# RKPD
## KABUPATEN MAROS
## TAHUN 2026

BAPPERIDA

2025

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan MenterDalam Negeri Nomor 90Tahun 2019 tentanKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros.
8. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Maros.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk tahun 2026.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD Tahun 2026 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah untuk periode Tahun 2026.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, kerangka arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, sasaran pembangunan Daerah pada Tahun 2026, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk:
    a. pedoman dalam penyusunan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2026;
    b. pedoman dalam penyelarasan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026; dan
    c. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2) Dalam penyusunan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 untuk:
    a. menyusun rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah; dan
    b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kepala Bapperida melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengenai kesesuaiannya dengan RKPD Tahun 2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum kondisi Daerah;
    c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
    d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
    g. penutup.
(2) Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 18

# DAFTAR ISI


**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I-5
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I-7

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN MAROS ..... II-1**
2.1 KONDISI UMUM DAERAH ..... II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ..... II-5
2.1.1.2.1 Kondisi Topografi ..... II-6
2.1.1.2.2 Kondisi Geologi ..... II-9
2.1.1.2.3 Kondisi Hidrologi ..... II-10
2.1.1.2.4 Kondisi Klimatologi ..... II-12
2.1.1.2.5 Kondisi Penggunaan Lahan ..... II-13
2.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana ..... II-14
2.1.1.4 Kondisi Demografi ..... II-19
2.1.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk ..... II-20
2.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-22
2.1.1.5.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) ..... II-22
2.1.1.5.2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ..... II-22
2.1.1.5.3 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ..... II-23
2. 2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II-24
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-24
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... II-24
2.2.1.1.1 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran ..... II-29
2.2.1.2 Laju Inflasi ..... II-32
2.2.1.3 PDRB Per Kapita ..... II-33
2.2.1.4 Kondisi Kemiskinan Daerah ..... II-33
2.2.1.4. Kondisi Kemiskinan Daerah ..... II-34
2.2.1.4.1 Tingkat kemiskinan (P0) ..... II-34
2.2.1.4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ..... II-37
2.2.1.4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ..... II-39
2.2.1.4.4 Kemiskinan Ekstrem ..... II-42
2.2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL ..... II-42
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia ..... II-42
2.2.2.2 Indeks Kesehatan ..... II-44
2.2.2.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) ..... II-44
2.2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1,000 Kelahiran Hidup ..... II-45
2.2.2.2.3 Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%) ..... II-46
2.2.2.2.4 Prevalensi Stunting ..... II-47
2.2.2.2.5 Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk ..... II-48
2.2.2.2.6 Jarak Perpuskesmas ..... II-50
2.2.2.2.7 Kelahiran dI Tolong Tenaga Terlatih ..... II-50
2.2.2.2.8 Angka Kejadian Malaria ..... II-51
2.2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... II-51
2.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... II-54
2.2.2.5 Persentase PAD terhadap Pendapatan ..... II-55
2.2.2.6 Opini Pemeriksaan BPK ..... II-56
2.2.2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat ..... II-56
2.2.2.8 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan ..... II-57
2.2.2.9 Seni Budaya Dan Olahraga ..... II-58
2.2.2.9.1. Seni Budaya ..... II-58
2.2.2.9.2 Olahraga ..... II-59

2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II-61
2.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... II-61
2.3.1.1 Pendidikan ..... II-61
2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini ..... II-61
2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni ..... II-62
2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar ..... II-63
2.3.1.1.4 Angka Melanjutkan ..... II-64
2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah ..... II-65
2.3.1.1.6 Angka Kelulusan ..... II-65
2.3.1.1.7 Angka Pendidikan Ditamatkan ..... II-66
2.3.1.1.8 Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar ..... II-66
2.3.1.1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar ..... II-67
2.3.1.1.10 Ketersediaan Sekolah Dalam Kondisi Baik ..... II-68
2.3.1.1.11 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar ..... II-69
2.3.1.1.12 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata ..... II-69
2.3.1.1.13 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun ..... II-70
2.3.1.1.14 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Diatas 15 Tahun ... II-71
2.3.1.1.15 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV ..... II-71
2.3.1.2 Kesehatan ..... II-72
2.3.1.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) ..... II-72
2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita ..... II-72
2.3.1.2.3 Angka Kematian Neonatal (AKN) ..... II-73
2.3.1.2.5 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk ..... II-74
2.3.1.2.6 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk ..... II-75
2.3.1.2.7 Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk ..... II-76
2.3.1.2.8 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangan ..... II-76
2.3.1.2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan ..... II-77
2.3.1.2.10 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) ... II-77
2.3.1.2.11 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan ... II-78
2.3.1.2.12 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak ..... II-78
2.3.1.2.13 Persentase Non Polio Rate ..... II-79
2.3.1.2.14 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani ..... II-79
2.3.1.2.15 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA ..... II-80
2.3.1.2.16 Tingkat Prevalensi Tuberklosis ..... II-80
2.3.1.2.17 Tingkat Kematian Karena Tuberklosis ..... II-81
2.3.1.2.18 Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS ..... II-82
2.3.1.2.19 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD ..... II-83
2.3.1.2.20 Penderita Diare yang Ditangani ..... II-83
2.3.1.2.21 Angka Kejadian Malaria ..... II-84
2.3.1.2.22 Proporsi Anak Balita Dengan Deman Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria ..... II-84
2.3.1.2.23 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi ..... II-85
2.3.1.2.24 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang Bahaya HIV/AIDS II-85
2.3.1.2.25 Cakupan Kunjungan Bayi ..... II-86
2.3.1.2.26 Cakupan Puskesmas ..... II-87
2.3.1.2.27 Cakupan Puskesmas Pembantu ..... II-87
2.3.1.2.28 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ..... II-88
2.3.1.2.29 Cakupan Pelayanan Nifas ..... II-88
2.3.1.2.30 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin ..... II-89
2.3.1.2.31 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan

Setingkat ..... II-90
2.3.1.2.32 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam ..... II-90
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-91
2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik ..... II-91
2.3.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk ..... II-92
2.3.1.3.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) ..... II-93
2.3.1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi ..... II-93
2.3.1.3.5 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik ..... II-94
2.3.1.3.5.1 Rasio Jaringan Irigasi ..... II-95
2.3.1.3.6 Persentase Penduduk Berakses Air Minum ..... II-96
2.3.1.3.7 Persentase Areal Kawasan Kumuh ..... II-96
2.3.1.3.8 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan ..... II-97
2.3.1.3.9 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk II-98
2.3.1.3.10 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk ..... II-98
2.3.1.3.11 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB ..... II-99
2.3.1.3.12 Rasio Bangunan Ber IMB ..... II-99
2.3.1.3.13 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya ..... II-100
2.3.1.3.14 Ketaatan Terhadap RTRW ..... II-100
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II-101
2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni ..... II-101
2.3.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni ..... II-101
2.3.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni ..... II-102
2.3.1.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau . II-102
2.3.1.4.5 Persentase Permukiman yang Tertata ..... II-103
2.3.1.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan ..... II-103
2.3.1.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan ..... II-104
2.3.1.4.8 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II-104
2.3.1.4.9 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , Keindahan) ..... II-105
2.3.1.4.10 Persentase Penegakan PERDA ..... II-106
2.3.1.5 Sosial ..... II-106
2.3.1.5.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial .... II-106
2.3.1.5.2 Persentase PMKS yang Tertangani ..... II-107
2.3.1.5.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar ..... II-107
2.3.1.5.4 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Ke ompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya ..... II-108
2.3.1.5.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial ..... II-109
2.3.1.5.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial ..... II-109
2.3.1.5.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat ..... II-110
2.3.1.5.8 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasa rana Tanggap Darurat Lengkap ..... II-110
2.3.1.5.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial ..... II-111
2.3.1.6 Fokus Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... II-112

2.3.1.6.1 Tenaga Kerja ..... II-112
2.3.1.6.1.1 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun ..... II-112
2.3.1.6.1.2 Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) ..... II-112
2.3.1.6.1.3 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan ..... II-113
2.3.1.6.1.4 Keselamatan dan Perlindungan Kerja ..... II-113
2.3.1.6.1.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah ..... II-114
2.3.1.6.1.7 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi ..... II-115
2.3.1.6.1.8 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat ..... II-116
2.3.1.6.1.9 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan ..... II-116
2.3.1.6.1.10 Rasio Lulusan S1/S2/S3 ..... II-117
2.3.1.6.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II-117
2.3.1.6.2.1 Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah ..... II-117
2.3.1.6.2.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD ..... II-118
2.3.1.6.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta ..... II-118
2.3.1.6.2.4 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ..... II-119
2.3.1.6.2.5 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur ..... II-119
2.3.1.6.2.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ..... II-119
2.3.1.6.2.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan esehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu II-120
2.3.1.6.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit ..... II-120
2.3.1.6.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu ..... II-121
2.3.1.6.2.10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ..... II-122
2.3.1.6.2.11 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ..... II-122
2.3.1.6.2.12 Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ..... II-123
2.3.1.6.2.13 Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD ..... II-123
2.3.1.6.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP ..... II-124
2.3.1.6.2.14.1 Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun ..... II-124
2.3.1.6.3 Pangan ..... II-125
2.3.1.6.3.1 Ketersediaan Pangan Utama ..... II-125
2.3.1.6.4 Pertanahan ..... II-126
2.3.1.6.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat ..... II-126
2.3.1.6.4.2 Penyelesaian Izin Lokasi ..... II-126
2.3.1.6.5 Lingkungan Hidup ..... II-127
2.3.1.6.5.1 Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten ..... II-127
2.3.1.6.5.2 Terintegrasinya Dokumen RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten ..... II-127
2.3.1.6.5.3 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten ..... II-127
2.3.1.6.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air ..... II-128
2.3.1.6.5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Udara ..... II-128
2.3.1.6.5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ..... II-129

2.3.1.6.5.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..... II-129
2.3.1.6.5.8 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ..... II-130
2.3.1.6.5.9 Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLHD) ..... II-131
2.3.1.6.5.10 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup ..... II-131
2.3.1.6.5.11 Pengaduan Masyarakat Terkai Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota ..... II-131
2.3.1.6.5.12 Timbulan Sampah yang Tertangani ..... II-132
2.3.1.6.5.13 Persentase Jumlah Sampah yang DIkurangi Melalui 3R ..... II-133
2.3.1.6.5.14 Persentase Cakupan Areal Pelayanan ..... II-133
2.3.1.6.5.15 Persentase Sampah yang Tertangani ..... II-134
2.3.1.6.5.16 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota . II-134
2.3.1.6.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ..... II-135
2.3.1.6.6.1 Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk ..... II-135
2.3.1.6.6.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran ..... II-135
2.3.1.6.6.4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten ..... II-136
2.3.1.6.6.5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ..... II-137
2.3.1.6.6.6 Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) ..... II-137
2.3.1.6.6.7 Cakupan Penertiban Akte Kelahiran ..... II-138
2.3.1.6.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa ..... II-138
2.3.1.6.7.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik ..... II-138
2.3.1.6.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ..... II-139
2.3.1.6.7.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK ..... II-139
2.3.1.6.7.4 Persentase LSM Aktif ..... II-140
2.3.1.6.7.5 Persentase Posyandu Aktif ..... II-140
2.3.1.6.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II-140
2.3.1.6.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk ..... II-140
2.3.1.6.8.2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) ..... II-142
2.3.1.6.8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB ..... II-142
2.3.1.6.8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk ..... II-143
2.3.1.6.8.6 Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan ..... II-144
2.3.1.6.8.7 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan ..... II-144
2.3.1.6.8.8 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga ..... II-145
2.3.1.6.8.9 Rasio Akseptor KB ..... II-145
2.3.1.6.8.10 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 1519 Tahun (ASFR 15-19) II-146
2.3.1.6.8.11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun ..... II-147

2.3.1.6.8.12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) ..... II-148
2.3.1.6.8.13 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang II-148
2.3.1.6.8.14 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi ..... II-149
2.3.1.6.8.15 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB ..... II-149
2.3.1.6.8.16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB ..... II-150
2.3.1.6.8.17 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB ..... II-150
2.3.1.6.8.18 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan ..... II-151
2.3.1.6.8.19 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa ..... II-151
2.3.1.6.8.20 Cakupan PKB/PLKB yang DIgunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk ..... II-152
2.3.1.6.8.21 Cakupan PUD Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri ..... II-152
2.3.1.6.8.22 Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (DP3ADALDUKKBD) di Setiap Desa/Kelurahan ..... II-153
2.3.1.6.8.23 Cakupan Keteresediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk memenuhi Permintaan Masyarakat ..... II-153
2.3.1.6.8.24 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yangBekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan ..... II-154
2.3.1.6.8.25 Cakupan Penyediaan Data Mikro Keluarga di Setiap Desa ..... II-154
2.3.1.6.8.26. Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) ..... II-155
2.3.1.6.8.27 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak ..... II-155
2.3.1.6.8.28 Rata-Rata Angka Usia Kawin Pertama ..... II-156
2.3.1.6.8.29 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan .... II-156
2.3.1.6.9 Perhubungan ..... II-157
2.3.1.6.9.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum ..... II-157
2.3.1.6.9.2 Rasio Izin Trayek ..... II-158
2.3.1.6.9.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum ..... II-158
2.3.1.6.9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus ..... II-158
2.3.1.6.9.5 Persentase Layanan Angkutan Darat ..... II-159
2.3.1.6.9.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum ..... II-159
2.3.1.6.9.7 Pemasangan Rambu-Rambu ..... II-160
2.3.1.6.9.8 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan ..... II-160
2.3.1.6.9.9 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara Terminal Pertahun ..... II-161
2.3.1.6.10 Komunikasi dan Informatika ..... II-161
2.3.1.6.10.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi (IKM) Masayarakat di Tingkat Kecamatan ..... II-161
2.3.1.6.10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi ..... II-162
2.3.1.6.10.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Seluler ..... II-162
2.3.1.6.10.4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet ..... II-163
2.3.1.6.10.4 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi ..... II-164

2.3.1.6.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ..... II-164
2.3.1.6.11.1 Persentase Koperasi Aktif ..... II-164
2.3.1.6.11.2 Persentase Usaha Mikro Dan Kecil ..... II-164
2.3.1.6.11.3 Persentase Bpr/Lkm Aktif ..... II-165
2.3.1.6.12 Penanaman Modal ..... II-165
2.3.1.6.12.1 Jumlah Investor Berskala Nasional ({Pmdn/Pma) ..... II-165
2.3.1.6.12.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Pmdn/ Pma) ..... II-166
2.3.1.6.12.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ..... II-166
2.3.1.6.12.4 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Pmdn (Milyar Rupiah) ..... II-167
2.3.1.6.13 Kepemudaaan Dan Olahraga ..... II-167
2.3.1.6.13.1 Persentase Organisasi Pemuda Aktif ..... II-167
2.3.1.6.13.2 Persentase Wirausaha Muda ..... II-168
2.3.1.6.13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga ..... II-168
2.3.1.6.13.4 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi ..... II-169
2.3.1.6.13.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda ..... II-169
2.3.1.6.13.6 Jumlah Atlet Berprestasi ..... II-169
2.3.1.6.13.7 Persentase Cabang Olahraga Berprestasi ..... II-170
2.3.1.6.14 Statistik ..... II-170
2.3.1.16.14.1 Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi II-170
2.3.1.16.14.2 Buku Kabupaten Dalam Angka ..... II-171
2.3.1.16.14.3 Buku Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) ..... II-171
2.3.1.6.15 Persandian ..... II-172
2.3.1.6.15.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasiperangkat Daerah ..... II-172
2.3.1.6.16 Kebudayaan ..... II-172
2.3.1.6.16.1 Penyelenggaraan Seni Dan Budaya ..... II-172
2.3.1.6.16.2 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan ..... II-173
2.3.1.6.16.3 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi ..... II-173
2.3.1.6.16.4 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu II-173
2.3.1.6.17 Perpustakaan ..... II-174
2.3.1.16.17.1 Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun ..... II-174
2.3.1.16.17.2 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah ..... II-174
2.3.1.16.17.3 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk ..... II-175
2.3.1.16.17.4 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun ..... II-175
2.3.1.16.17.5 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat ..... II-176
2.3.1.6.18 Kearsipan ..... II-176
2.3.1.6.18.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku ..... II-176
2.3.1.6.18.2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan ..... II-177
2.3.1.7 Fokus Urusan Pilihan ..... II-177
2.3.1.7.1 Urusan Pariwisata ..... II-177
2.3.1.7.1.1 Kunjungan Wisata ..... II-177
2.3.1.7.1.2 Lama Kunjungan Wisata ..... II-178
2.3.1.7.1.3 Pad Sektor Pariwisata ..... II-178
2.3.1.7.2 Urusan Pertanian ..... II-179
2.3.1.7.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pdrb ..... II-179
2.3.1.7.2.2. Kontribusi Sektor Kelompok Tani Terhadap Pdrb ..... II-180
2.3.1.7.2.3 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar ..... II-180
2.3.1.7.2.4 Cakupan Bina Kelompok Tani ..... II-181

2.3.1.7.1.5 Kebutuhan Pangan Utama ..... II-182
2.3.1.7.3 Urusan Perdagangan ..... II-182
2.3.1.7.3.1 Ekspor Bersih Perdagangan ..... II-182
2.3.1.7.3.2 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha ..... II-182
2.3.1.7.4 Perindustrian ..... II-183
2.3.1.7.4.1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin ..... IiI-183
2.3.1.7.5 Urusan Transmigrasi ..... II-184
2.3.1.7.5.1 Persentase Transmigran Swakarsa ..... II-184
2.3.1.7.6 Urusan Kelautan Dan Perikanan ..... II-184
2.3.1.7.6.1 Produksi Perikanan ..... II-184
2.3.1.7.6.2 Konsumsi Ikan ..... II-185
2.3.1.7.6.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan ..... II-185
2.3.1.7.6.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan ..... II-186
2.3.1.7.6.5 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman ..... II-186
2.3.1.8 Fokus Fungsi Penunjang ..... II-187
2.3.1.8.1 Perencanaan Pembangunan ..... II-187
2.3.1.8.1.1 Tersedianya Dokumen Rpjpd Yang Ditetapkan Dengan Perda ..... II-187
2.3.1.8.1.2 Tersedianya Dokumen Rpjmd Yang Ditetapkan Dengan Perda/Perkada ..... II-187
2.3.1.8.1.3 Tersedianya Dokumen Rkpd Yang Ditetapkan Dengan Perkada ..... II-187
2.3.1.8.1.4 Tersedianya Dokumen Rtrw Yang Ditetapkan Dengan Perda ..... II-188
2.3.1.8.1.5 Penjabaran Konsistensi Porgram Rpjmd Dalam Rkpd . II-188
2.3.1.8.1.6 Penjabaran Konsistensi Program Rkpd Ke Dalam Apbd II-189
2.3.1.8.2 Keuangan ..... II-189
2.3.1.8.2.1 Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan ..... II-189
2.3.1.8.2.2 Persentase Silpa ..... II-190
2.3.1.8.2.3 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana II-190
2.3.1.8.2.4 Persentase Belanja Pendidikan (20 %) ..... II-190
2.3.1.8.2.5 Persentase Belanja Kesehatan (10%) ..... II-191
2.3.1.8.2.6 Penetapan Apbd ..... II-192
2.3.1.8.2.8 Persentase Antara Jumlah Belanja Langsung Dengan Tidak Langsung Dalam Apbd. ..... II-192
2.3.1.8.2.9 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa ..... II-193
2.3.1.8.3 Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan ..... II-193
2.3.1.8.3.1 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan ..... II-193
2.3.1.8.3.2 Persentase Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Here ..... II-194
2.3.1.8.3.3 Persentase Pejabat Asn Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural ..... II-194
2.3.1.8.3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah ..... II-195
2.3.1.8.3.5 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah ..... II-195
2.3.1.8.3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah ..... II-196
2.3.1.8.4 Pegawasan ..... II-196
2.3.1.8.4.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan ..... II-196
2.3.1.8.4.2 Persentase Pelanggaran Pegawai ..... II-197
2.3.1.8.4.3 Jumlah Temuan Bpk ..... II-197
2.3.1.8.5 Penelitian Dan Pengembangan ..... II-197
2.3.1.8.5.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan ..... II-197
2.3.1.8.5.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ..... II-197
2.3.1.8.5.3 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam

Penerapan Inovasi Daerah ..... II-198
2.3.1.8.5.4 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Telah Diterapkan Daerah ..... II-199
2.3.1.8.6 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... II-199
2.3.1.8.6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan Dprd ..... II-199
2.3.1.8.6.2 Tersusunnya Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (Rpjmd) Maupun Rencana Kerja Tahunan (Rkpd) ..... II-200
2.3.1.8.6.3 Tersusunnya Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan ..... II-200
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... II-201
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II-201
2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ..... II-201
2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan ..... II-202
2.4.4 Produktivitas Total Daerah ..... II-202
2.4.5 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) ..... II-203
2.4.6 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur ..... II-203
2.4.6.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk ..... II-203
2.4.6.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum ..... II-204
2.4.6.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun ..... II-204
2.4.6.4 Ketaatan terhadap RTRW ..... II-205
2.4.6.5 Luas Wilayah Industri ..... II-206
2.4.6.6 Luas Wilayah Kebanjiran ..... II-206
2.4.6.7 Luas Wilayah kekeringan ..... II-207
2.4.6.8 Luas Wilayah Perkotaan ..... II-207
2.4.6.9 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang ..... II-208
2.4.6.10 Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya ..... II-209
2.4.6.11 Jenis dan Jumlah Restoran ..... II-209
2.4.6.12 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih ..... II-210
2.4.6.13 Ketersediaan Daya Listrik ..... II-211
2.4.6.14 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik .. II-212
2.4.6.15 Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Selular ..... II-212
2.4.5 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-212
2.4.5.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani ..... II-212
2.4.5.2 Persentase desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa ..... II-213
2.4.5.3 Jumlah Demontrasi ..... II-216
2.4.5.4 Lama Proses Perijinan ..... II-217
2.4.5.5 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha ..... II-217
2.4.5.6 Jumlah Pajak dan Retribusi ..... II-218
2.4.6 Fokus Sumber Daya Manusia
2.4.6.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3 ..... II-218
2.4.6.2 Rasio Ketergantungan ..... II-219
2.5 Capaian Pembangunan Daerah ..... II-219
2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 ..... II-219
2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-224
2.5.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Maros ..... II-247

2.5.4 Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2026 ..... II-272
2.5.5 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal ..... II-309
2.5.6 Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs ..... II-313
2.6 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan ..... II-323
2.7 Evaluasi Program Dan Kegiatan Rkpd Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi Rpjmd Tahun 2024 ..... II-327
2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-995
2.8.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II-995
2.8.2 Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) ... II-999
2.9 Isu-Isu Strategis Daerah ..... II-1005
A. Isu Strategis Global ..... II-1005
B. ISU STRATEGI NASIONAL ..... II-1008
C. Isu Strategi Daerah ..... II-1011
2.10 Inovasi Daerah ..... II-1015

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ..... III-1
3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah ..... III-1
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global ..... III-1
3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional ..... III-3
3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan ..... III-4
3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah ..... III-4
3.1.1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... Iii-4
3.1.1.5.2 PDRB Perkapita ..... III-5
3.1.1.5.3 Inflasi ..... III-6
3.1.1.5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... III-7
3.1.1.5.5 Kemiskinan ..... III-8
3.1.1.5.6 Indeks Pembangunan Manusia ..... III-9
3.1.1.5.7 Gini Rasio ..... III-10
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2026 ..... III-11
3.1.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026 ..... III-11
3.1.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ... III-12
3.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2026 ..... III-13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-14
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-14
3.2.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2027 ..... III-15
3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah ..... III-16
3.2.2.1.1 Pajak daerah ..... III-17
3.2.2.1.2 Retribusi Daerah ..... III-17
3.2.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ... III-17
3.2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ..... III-17
3.2.2.1.5 Pendapatan Transfer ..... III-18
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-19
3.2.3.1 Belanja Operasi ..... III-20
3.2.3.2 Belanja Modal ..... III-23
3.2.3.3 Belanja Tidak Terduga ..... III-23
3.2.3.4 Belanja Transfer ..... III-24
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-33

**BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1**
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.1.1 Visi ..... IV-1
4.1.2 Misi ..... IV-2

4.1.3 Tujuan Dan Sasaran ..... IV-4
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-13
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2026 ..... IV-13
4.2.1.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKPD Tahun 2026 ..... IV-13
4.2.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2026 ..... IV-14
4.2.1.3 Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Wilayah pada RKPD Tshun 2026 ..... IV-19
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-27
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 ..... IV-31
4.2.4 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD .. IV-41
4.2.5 Strategi Dan Arah Kebijakan Tahun 2026 ..... IV-45
4.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan =Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-49
4.3.1 Keselarasan Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-49
4.3.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-50
4.3.3 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 ..... IV-53
4.3.4 Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Provinsi terhadap Kegiatan Prioritas Utama ..... IV-88
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... IV-102

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026 ..... V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... V-3
5.3 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... V-171

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VI-1**
6.1 Indikator Makro Pembangunan ..... VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI-2
6.3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) ..... VI-5
6.4 Idikator Kinerja Kunci ( IKK) ..... VI-12
6.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... VI-34
6.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ..... VI-36

**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**
7.1 Kaidah Pelaksanaan ..... VII-1
7.2 Kesimpulan ..... VII-1

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Daerah dan Pusat Pemerintahan KecamatanKabupaten Maros Tahun 2024 | II-5 |
| Tabel 2.2 | Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatandi Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-7 |
| Tabel 2.3 | Luas Areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng per Kecamatan Tahun 2024 | II-8 |
| Tabel 2.4 | Formasi Geologi Kabupaten Maros | II-9 |
| Tabel 2.5 | Jenis Tanah Kab. Maros | II-9 |
| Tabel 2.6 | Daerah Aliran Sungai Kab. Maros | II-11 |
| Tabel 2.7 | Wilayah Sungai Kab. Maros | II-11 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Curah Hujan Kabupaten Maros | II-12 |
| Tabel 2.9 | Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-12 |
| Tabel 2.10 | Luas Lahan (Ha) dan Jenis Penggunaannya Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2025 | II-13 |
| Tabel 2.11 | Wilayah Rawan Bencana Kab. Maros | II-14 |
| Tabel 2.12 | Wilayah Rawan Bencana Banjir dan Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-15 |
| Tabel 2.13 | Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang dan Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-15 |
| Tabel 2.14 | Wilayah Rawan Cuaca Ekstrim dan Kelas Kerawanan BencanKabupaten Maros Tahun 2024 | II-16 |
| Tabel 2.15 | Wilayah Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-17 |
| Tabel 2.16 | Wilayah Rawan Gempa Bumi Serta Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-17 |
| Tabel 2.17 | Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-18 |
| Tabel 2.18 | Wilayah Rawan Kekeringan dan Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-18 |
| Tabel 2.19 | Wilayah Rawan Tanah Longsor dan Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-19 |
| Tabel 2.20 | Wilayah Rawan Tsunami dan Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-19 |
| Tabel 2.21 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-20 |
| Tabel 2.22 | Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-22 |
| Tabel 2.23 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-28 |
| Tabel 2.24 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros | II-31 |
| Tabel 2.25 | Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-33 |
| Tabel 2.26 | Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-34 |
| Tabel 2.27 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-36 |
| Tabel 2.28 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/KotaProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-38 |
| Tabel 2.29 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-41 |
| Tabel 2.30 | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-42 |
| Tabel 2.31 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-51 |
| Tabel 2.32 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II-53 |

Tabel 2.33 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-55
Tabel 2.34 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan BudayaKabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-58
Tabel 2.35 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-58
Tabel 2.36 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ..... II-59
Tabel 2.37 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-59
Tabel 2.38 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-59
Tabel 2.39 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-60
Tabel 2.40 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-60
Tabel 2.41 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-61
Tabel 2.42 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-61
Tabel 2.43 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Maros 2020 - 2024 ..... II-62
Tabel 2.44 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Per Kecamatan Tahun 2024 ..... II-62
Tabel 2.45 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Kelulusan Kabupaten Maros Tahun 2020-2025 ..... II-65
Tabel 2.46 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.47 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.48 Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 ..... II-67
Tabel 2.49 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.50 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-68
Tabel 2.51 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Guru Terhadap Murid Di Kab. Maros Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2.52 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 ..... II-69
Tabel 2.53 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-70
Tabel 2.54 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-70
Tabel 2.55 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.56 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.57 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2.58 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2.59` Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2.60 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan PendudukKabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-75

Tabel 2.61 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.62 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.63 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.64 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-77
Tabel 2.65 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-77
Tabel 2.66 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2.67 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2.68 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.69 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.70 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.71 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.72 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.73 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel 2.74 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.75 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.76 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.77 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.78 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.79 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.80 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.81 Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.82 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.84 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.84 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel 2.85 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan ..... II-90
Tabel 2.86 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.87 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-91

Tabel 2.88 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruangProporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik (KmKabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.89 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.90 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.91 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.92 Persentase Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten Maros ..... II-94
Tabel 2.93 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.94 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.95 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.96 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.97 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.98 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.99 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.100 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.101 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.102 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.103 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Persentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.104 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.105 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.106 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.107 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan PermukimanCakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.108 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.109 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan PermukimanPersentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.110 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.111 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-105
Tabel 2.112 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Persentase penegakan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.113 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.114 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Tertangani

Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.115 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.116 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.117 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel 2.118 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel 2.119 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.120 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.121 Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.122 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.124 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2.126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2.127 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 .. II-115
Tabel 2.128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.129 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel 2.130 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 . II-116
Tabel 2.131 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.133 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-118
Tabel 2.134 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-118
Tabel 2.135 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Maros

| | | |
|---|---|---|
| | Tahun 2020-2024 | II-119 |
| Tabel 2.136 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaPartisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-120 |
| Tabel 2.137 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-120 |
| Tabel 2.138 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-121 |
| Tabel 2.139 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial TerlatihBagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-121 |
| Tabel 2.140 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-122 |
| Tabel 2.141 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-123 |
| Tabel 2.142 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-123 |
| Tabel 2.143 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-124 |
| Tabel 2.144 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-124 |
| Tabel 2.145 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-125 |
| Tabel 2.146 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-125 |
| Tabel 2.147 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-126 |
| Tabel 2.148 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-126 |
| Tabel 2.149 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2019-2023 | II-127 |
| Tabel 2.150 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-127 |
| Tabel 2.151 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-127 |
| Tabel 2.152 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terintegrasinya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-128 |
| Tabel 2.153 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-128 |
| Tabel 2.154 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-128 |
| Tabel 2.155 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-129 |
| Tabel 2.156 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang Memenuhi Standar Minimum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-131 |

Tabel 2.157 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-131
Tabel 2.158 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/KotaKabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-132
Tabel 2.159 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-133
Tabel 2.160 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-134
Tabel 2.161 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Persentase Sampah yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-134
Tabel 2.162 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Operasionalisasi TPA/ TPST/SPA di Kabupaten/Kota Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-135
Tabel 2.163 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-135
Tabel 2.164 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Bayi Berakte kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-136
Tabel 2.165 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rasio Berakte Nikah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-136
Tabel 2.166 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-137
Tabel 2.167 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-137
Tabel 2.168 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cakupan Penertiban Kartu Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-137
Tabel 2.169 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cakupan Penertiban Akta Kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-138
Tabel 2.170 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-138
Tabel 2.171 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-139
Tabel 2.172 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-139
Tabel 2.173 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-140
Tabel 2.174 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-140
Tabel 2.175 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-141
Tabel 2.176 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-143
Tabel 2.177 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) yang Menyusun Dan Memanfaatkan RancanganInduk Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-143

Tabel 2.178 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jumlah Kebijakana Daerah Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk 2020 – 2024 ..... II-144
Tabel 2.179 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-144
Tabel 2.180 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal YanMelakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020 – 2024 ..... II-145
Tabel 2.181 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-145
Tabel 2.182 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-146
Tabel 2.183 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-146
Tabel 2.184 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-147
Tabel 2.185 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-147
Tabel 2.186 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-148
Tabel 2.187 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-148
Tabel 2.188 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Tingkat Keberlasungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-149
Tabel 2.189 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-149
Tabel 2.190 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-150
Tabel 2.191 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-150
Tabel 2.192 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-151
Tabel 2.193 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-151
Tabel 2.194 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-152
Tabel 2.195 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-152
Tabel 2.196 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (DP3ADALDUKKBD)

| | | |
|---|---|---|
| | Setiap Desa/KelurahaKabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-153 |
| Tabel 2.197 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-153 |
| Tabel 2.198 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-154 |
| Tabel 2.199 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-154 |
| Tabel 2.200 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-155 |
| Tabel 2.201 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan MelaksanakanPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-155 |
| Tabel 2.202 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-157 |
| Tabel 2.203 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Izin Trayek Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-158 |
| Tabel 2.204 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-158 |
| Tabel 2.205 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bus Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-159 |
| Tabel 2.206 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-159 |
| Tabel 2.207 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-160 |
| Tabel 2.208 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-160 |
| Tabel 2.209 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-160 |
| Tabel 2.210 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-161 |
| Tabel 2.211 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-162 |
| Tabel 2.212 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-162 |
| Tabel 2.213 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Selular Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-163 |
| Tabel 2.214 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-163 |
| Tabel 2.215 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika Proporsi Rumah Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-164 |
| Tabel 2.216 | Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-164 |
| Tabel 2.217 | Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Persentase Usaha Mikro dan kecil Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-165 |
| Tabel 2.218 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-166 |
| Tabel 2.219 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta) Kabupaten Maros | |

| | | |
|---|---|---|
| | Tahun 2020 – 2024 | II-166 |
| Tabel 2.220 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-166 |
| Tabel 2.221 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-167 |
| Tabel 2.222 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-167 |
| Tabel 2.223 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-168 |
| Tabel 2.224 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-168 |
| Tabel 2.225 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-169 |
| Tabel 2.226 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-169 |
| Tabel 2.227 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-170 |
| Tabel 2.228 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-170 |
| Tabel 2.229 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-171 |
| Tabel 2.230 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Buku " Kabupaten Dalam Angka " Kabupaten Maros Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-171 |
| Tabel 2.230 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-171 |
| Tabel 2.231 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-172 |
| Tabel 2.232 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-172 |
| Tabel 2.233 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-173 |
| Tabel 2.234 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-173 |
| Tabel 2.235 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-174 |
| Tabel 2.236 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-174 |
| Tabel 2.237 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-175 |
| Tabel 2.238 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-175 |
| Tabel 2.239 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-176 |
| Tabel 2.240 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-177 |
| Tabel 2.241 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-177 |
| Tabel 2.242 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kunjungan Wisata Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-177 |
| Tabel 2.243 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata PAD Sektor Pariwisata (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-179 |
| Tabel 2.244 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-180 |
| Tabel 2.245 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-180 |

Tabel 2.246 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-181
Tabel 2.247 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-182
Tabel 2.248 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-183
Tabel 2.249 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-183
Tabel 2.250 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-184
Tabel 2.251 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Persentase Produksi Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-184
Tabel 2.252 Produksi Perikanan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-185
Tabel 2.253 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-185
Tabel 2.254 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-185
Tabel 2.255 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-186
Tabel 2.256 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-186
Tabel 2.257 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-187
Tabel 2.258 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/ PERKADA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-187
Tabel 2.259 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-188
Tabel 2.260 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-188
Tabel 2.261 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-188
Tabel 2.262 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD Kabupaten Maros 2020 – 2024 ..... II-189
Tabel 2.263 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase SILPA (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-190
Tabel 2.264 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Kabupaten Maros Tahun 2020-2024..... II-190
Tabel 2.265 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Belanja Pendidikan 20 % (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-191
Tabel 2.266 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Belanja Kesehatan 10% (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-191
Tabel 2.267 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Penetapan APBD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-192
Tabel 2.268 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-192
Tabel 2.269 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD Tahun 2020 – 2024 ..... II-193

Tabel 2.270 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanRata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-194
Tabel 2.271 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanPersentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-194
Tabel 2.272 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-195
Tabel 2.273 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-195
Tabel 2.274 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanJumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-196
Tabel 2.275 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-196
Tabel 2.276 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-196
Tabel 2.277 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-197
Tabel 2.278 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan Jumlah Temuan BPK Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-197
Tabel 2.279 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-198
Tabel 2.280 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-198
Tabel 2.281 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-199
Tabel 2.282 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-200
Tabel 2.283 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-200
Tabel 2.284 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-201
Tabel 2.285 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk Kabupaten Maros ..... II-204
Tabel 2.286 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-204
Tabel 2.287 Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-205
Tabel 2.288 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-205
Tabel 2.289 Luas Wilayah Industri Kabupaten Maros ..... II-206
Tabel 2.290 Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 ..... II-206
Tabel 2.291 Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... II-207

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.292 | Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-207 |
| Tabel 2.293 | Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Maros | II-207 |
| Tabel 2.294 | Jumlah Bank Serta Pembiayaan dan Cabangnya Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-208 |
| Tabel 2.295 | Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-209 |
| Tabel 2.296 | Jumlah Restoran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-209 |
| Tabel 2.297 | Persentase penduduk Pengguna Air Bersih Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-210 |
| Tabel 2.298 | Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-210 |
| Tabel 2.299 | Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Maros | II-211 |
| Tabel 2.300 | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-212 |
| Tabel 2.301 | Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-213 |
| Tabel 2.302 | Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-213 |
| Tabel 2.303 | Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-213 |
| Tabel 2.304 | Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Maros | II-217 |
| Tabel 2.305 | Lama Proses Perijinan Kabupaten Maros tahun 2020-2024 | II-217 |
| Tabel 2.306 | Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Maros | II-218 |
| Tabel 2.307 | Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Maros | II-218 |
| Tabel 2.308 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2019-2023 | II-219 |
| Tabel 2.309 | Rasio Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-219 |
| Tabel 2.310 | Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 | II-220 |
| Tabel 2.314 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupan Maros Tahun 2020-2024 | II-224 |
| Tabel 2.312 | Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 – 2024 | II-247 |
| Tabel 2.312 | Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Maros Tahun 2026 | II-272 |
| Tabel 2.314 | Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-309 |
| Tabel 2.315 | Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Maros Tahun 2020-2023 | II-313 |
| Tabel 2.316 | Capaian IKK Kabupaten Maros Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026 | II-323 |
| Tabel 2.317 | Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD dan APBD Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-327 |
| Tabel 2.318 | Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD Tahun 2024 | II-330 |
| Tabel 2.318 | Capaian Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-331 |
| Tabel 2.325 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | II-635 |
| Tabel 2.326 | Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Tahun 2024 | II-636 |
| Tabel 2.327 | Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan | II-642 |
| Tabel 2.310 | Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-1015 |
| | | |
| Tabel 3.1 | Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | III-6 |
| Tabel 3.2 | Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 | III-12 |
| Tabel 3.3 | Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 | III-13 |
| Tabel 3.4 | Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2026 | III-14 |
| Tabel 3.5 | Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023-2027 | III-15 |
| Tabel 3.6 | Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 – 2027 | III-25 |
| Tabel 3.7 | Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2025 | III-26 |
| Tabel 3.8 | Target Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 | III-27 |
| Tabel 3.9 | Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Tahun 2026 | III-29 |
| Tabel 3.10 | Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023-2027 | III-35 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 4.1 | Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi | IV-1 |
| Tabel 4.2 | Misi beserta penjelasannya | IV-3 |
| Tabel 4.3 | Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan RKPD Tahun 2026 | IV-6 |
| Tabel 4.4 | Prioritas Nasional dan Sasaran Utama Prioritas Nasional Tahun 2026 | IV-14 |
| Tabel 4.5 | Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Maros berdasarkan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 | IV-20 |
| Tabel 4.6 | Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 | IV-28 |
| Tabel 4.7 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-31 |
| Tabel 4.8 | Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-34 |
| Tabel 4.9 | Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-37 |
| Tabel 4.10 | Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD Untuk Tahun 2026 | IV-42 |
| Tabel 4.11 | Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-45 |
| Tabel 4.12 | Keselarasan Tema RKP, RKPD Povinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-50 |
| Tabel 4.13 | Keselarasan Sasaran RKP, RKPD Povinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-50 |
| Tabel 4.14 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Maros Tahun 2026 | IV-51 |
| Tabel 4.15 | Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 | IV-53 |
| Tabel 4.16 | Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Provinsi terhadap Kegiatan Prioritas Utama Tahun 2026 | IV-88 |
| Tabel 4.17 | Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Prioritas Provinsi Tahun 2026 | IV-96 |
| Tabel 5.1 | Kerangka Pendanaan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027 | V-1 |
| Tabel 5.2 | Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 | V-3 |
| Tabel 5.3 | Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 | V-173 |
| Tabel 6.1 | Capaian dan Penetapan Target Indikator Makro Kabupaten Maros Tahun 2024-2026 | VI-1 |
| Tabel 6.2 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros Tahun 2024-2026 | VI-2 |
| Tabel 6.3 | Capaian dan Target Indikator Utama Pembanguna Kabupaten Maros Tahun 2024-2026 | VI-5 |
| Tabel 6.4 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Maros Tahun 2024-2026 | VI-12 |
| Tabel 6.5 | Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Maros Tahun 2024-2026 | VI-34 |
| Tabel 6.6 | Capaian dan Target Perubahan Indikator TPB/SDG’s Tahun 2024 –2025 | VI-36 |

# DAFTAR GRAFIK


| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2.1 | Rasio Ketergantungan Kab. Maros 2020 – 2024 | II-21 |
| Grafik 2.2 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-25 |
| Grafik 2.3 | Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatadan Nasional Tahun 2020-2024 | II-32 |
| Grafik 2.4 | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2022 – 2024 | II-35 |
| Grafik 2.5 | Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-35 |
| Grafik 2.6 | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-36 |
| Grafik 2.7 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-37 |
| Grafik 2.8 | Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-38 |
| Grafik 2.9 | Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-39 |
| Grafik 2.10 | Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-40 |
| Grafik 2.11 | Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-40 |
| Grafik 2.12 | Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-41 |
| Grafik 2.13 | Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-44 |
| Grafik 2.14 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-45 |
| Grafik 2.15 | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-46 |
| Grafik 2.16 | Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-47 |
| Grafik 2.17 | Prevalensi Stunting Kab. Maros bedasarkan E-PPGBM Tahun 2020-2024 | II-48 |
| Grafik 2.18 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-49 |
| Grafik 2.19 | Jarak Puskesmas dari ibukota kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2024 | II-49 |
| Grafik 2.20 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-50 |
| Grafik 2.21 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-52 |
| Grafik 2.22 | Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2024 | II-52 |
| Grafik 2.23 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-54 |
| Grafik 2.24 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-54 |
| Grafik 2.25 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-56 |
| Grafik 2.26 | Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-57 |
| Grafik 2.28 | Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-63 |
| Grafik 2.29 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Maros Tahun 2020 - 2024 | II-64 |
| Grafik 2.30 | Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024 | II-64 |
| Grafik 2.31 | Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-65 |
| Grafik 2.31 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kab. Maros Tahun 2020-2024 | II-72 |
| Grafik 2.31 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-82 |
| Grafik 2.31 | Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan PermukimanProporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 | II-104 |
| Grafik 2.32 | Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Maros 2020 – 2024 | II-104 |
| Grafik 2.33 | Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyaraka Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Maros 2020 – 2024 | II-105 |
| Grafik 2.34 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 | II-129 |
| Grafik 2.33 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan | |

| | | |
|---|---|---|
| | Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-130 |
| Grafik 2.34 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Timbunan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-132 |
| Grafik 2.35 | Laju pertumbuhan penduduk Kab. Maros tahun 2020 – 2024 ..... | II-141 |
| Grafik 2.36 | Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kab. Maros Tahun 2023 – 2024 ..... | II-141 |
| Grafik 2.37 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Total Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-142 |
| Grafik 2.37 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Usia Kawin Pertama Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .... | II-156 |
| Grafik 2.38 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Pembiayaan Program Kependudukan 2020 – 2024 ..... | II-157 |
| Grafik 2.38 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Rata-rata Jumlah Pengunjung Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-176 |
| Grafik 2.39 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros ..... | II-178 |
| Grafik 2.40 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-179 |
| Grafik 2.41 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-182 |
| Grafik 2.41 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD Tahun 2020 – 2024 ..... | II-193 |
| Grafik 2.41 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Persentase Kebijakan Inovasi Yang telah Diterapkan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-199 |
| Grafik 2.42 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 .... | II-201 |
| Grafik 2.43 | Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-202 |
| Grafik 2.44 | Produktivitas Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024 ..... | II-203 |
| Grafik 2.45 | Rasio Impor + Ekspor Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2023 ..... | II-203 |
| | | |
| Grafik 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026 ..... | III-5 |
| Grafik 3.1 | Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... | III-6 |
| Grafik 3.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026 ..... | III-8 |
| Grafik 3.3 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasiona Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026 ..... | III-9 |
| Grafik 3.4 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026 ..... | III-10 |
| Grafik 3.5 | Gini Rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Target 2025 ..... | III-11 |

# DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros ..... II-2
Gambar II.2 Peta Letak dan Kondisi GeografisKabupaten Maros ..... II-6
Gambar II.3 Peta Topografi Kabupaten Maros ..... II-8
Gambar II.4 Peta Geologi Kabupaten Maros ..... II-9
Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros ..... II-10

**Lampiran : Peraturan Bupati Maros**
**Nomor : 18 Tahun 2025**
**Tanggal : 04 Agustus 2025**
**Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Merujuk pada kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengatur dan mengamanahkan secara lugas bahwa Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 juga memperhatikan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029. Selanjutnya, karena penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara pararel, RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 yaitu periode pertama pelaksanaan RPJPD yang diarahkan pada Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan. Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Sebagai gambaran awal, untuk capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 3,79 persen, Tingkat Kemiskinan 9,32 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,32 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,04, PDRB Perkapita 69,21 juta/jiwa dan Rasio Gini 0,350, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,90. Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMN Tahun 2025-2029 dan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 RKPD Kabupaten Maros disusun dengan beberapa tahapan yaitu:1) Persiapan penyusunan; 2) Penyusunan Rancangan Awal; 3) Penyusunan Rancangan; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir; 6) Penetapan. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Maros tanggal 3 Januari 2025 Nomor 000.7.1.3/12/BAPPERIDA tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026. Hasil musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Bagan alir penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar I.1 Tahapan Penyusunan RKPD**

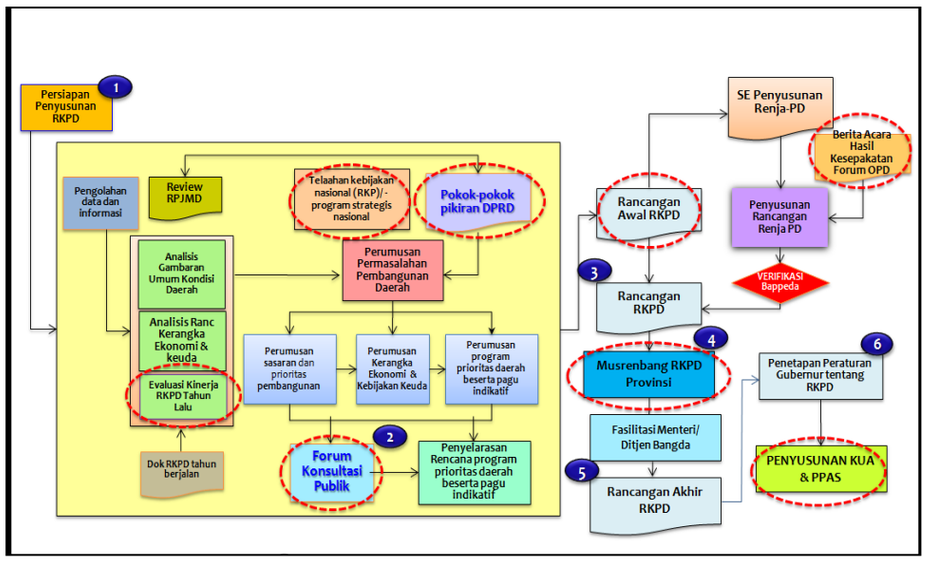


Sumber : Permendagri Nomorr 86 Tahun 2017

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. *Teknokratik,* yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diundangnya beberapa akademisi dan praktisi pembangunan pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026 pada bulan Januari 2025.
2. *Partisipatif,* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. *Politik,* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros dalam RKPD Kabupaten Maros.
4. *Top Down,* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi penyusunan RKPD yang mengacu kepada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan *Bottom-up,* yaitu pendekatan perencanaan yang

mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan.

Selain itu, dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara factual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukan oleh kebijakan, program dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026 dengan tetap menpedomani Renstra PD. Kemudian Renja-PD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun 2026.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6).

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Memperhatikan hubungan keterkaitan tersebut, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 harus mengacu pada dokumen RKP Nasional Tahun 2026, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029. Selain itu, kedudukan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW Kabupaten Maros). Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.2**

**Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya**

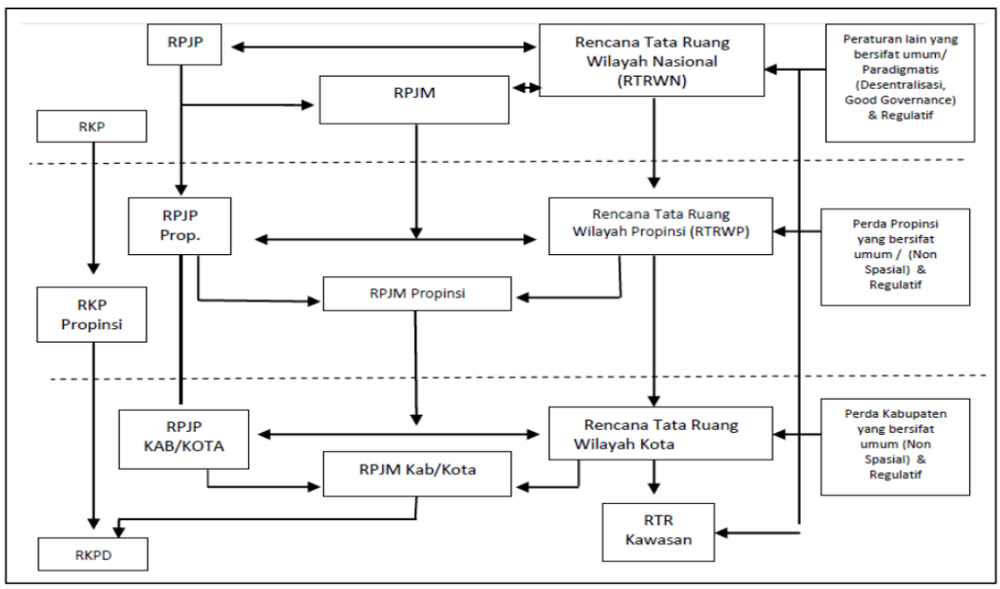


Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, selanjutnya RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros serta Rancangan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros dan menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD yang akan dibahas bersama dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1.3**
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 ke dalam program prioritas Kabupaten Maros Tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyelerasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Maros Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun 2026.
4. Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tahun 2025 dan menjadi acuan dalam perencanaan tahun 2026.

## 1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Lampiran C3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN,**

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan, memberikan uraian ringkas tentang dasar hokum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen , menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, keterhubungan dengan dokumen lain. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. Pada Sub Bab Sistematika Dokumen DPRD, mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**,

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan juga memperhatikan dokumen RPjMD dan RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Pada Sub bab Kondisi Umum Kondisi Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada Sub bab Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan peratanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Pada Sub Bab Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**,

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-

sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pada Sub Bab Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Pada Sub Bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada Sub Bab Tujuan dan Sasaran Pembangunan, menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan lima tahunan yang diambil dari RPJMD. Pada Sub Bab Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025, menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengna program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**,

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**,

Pada bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

**BAB VII PENUTUP**

Menguraikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2026.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN MAROS

## 2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros; Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45’ hingga 50°07’ Lintang Selatan, dan 109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kabupaten Maros adalah 1,442.946 km2 atau 3,18 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Sebagai salah satu kabupaten yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain dampak positif yang bermunculan, perkembangan ini juga banyak menimbulkan efek atau kondisi negatif yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Maros. Kondisi umum Kabupaten Maros dapat dilihat melalui beberapa aspek yang diuraikan berikut ini.

### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Maros dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedang gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Maros.

#### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042; Kabupaten Maros terletak di bagian barat daya Sulawesi Selatan antara 40°45'–50°07' Lintang Selatan dan 109°205'–129°12' Bujur Timur. Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten Maros mempunyai luas kurang lebih 144.380 hektar atau 1.443,80 $km^2$ yang meliputi 14 (empat belas) kecamatan, dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10 %) adalah kawasan pantai, 5 desa (5 %) adalah kawasan lembah, 28 desa (27 %) kawasan lereng/bukit dan 60 desa/kelurahan (58 %), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Maros :

- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep;
- Sebelah selatan adalah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa;
- Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan
- Sebelah barat adalah Selat Makassar.

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12’ Lintang Selatan dan 8° Lintang Selatan dan antara 116° 48’ – 122° 36’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan – Laut Flores; Barat – Selat Makassar; Timur – Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Gambar 2.1**
**Peta Administrasi Kabupaten Maros**

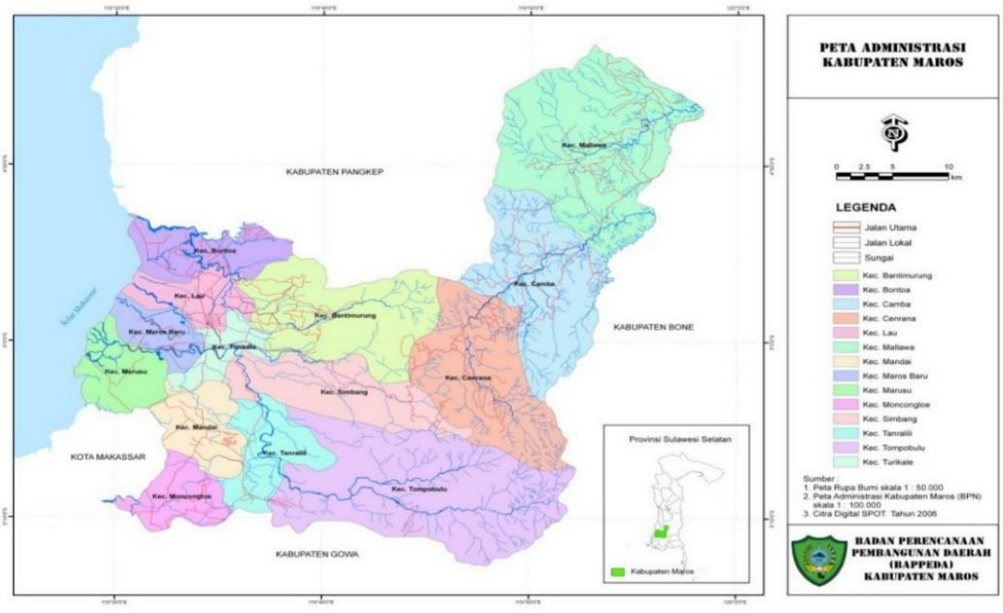


*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Wilayah Administrasi, Pusat Pemerintahan dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros, wilayah kerja administrasi kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maros terdiri dari :

a. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mandai meliputi:
   1. Kelurahan Hasanuddin
   2. Kelurahan Bontoa
   3. Desa Tenrigangkae
   4. Desa Pattontongan
   5. Desa Bonto Mate’ne
   6. Desa Baji Mangngai

b. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Camba meliputi:
   1. Kelurahan Cempaniga
   2. Kelurahan Mario Pulana
   3. Desa Timpuseng
   4. Desa Cenrana
   5. Desa Sawaru
   6. Desa Patanyamang

7. Desa Pattiro Deceng
8. Desa Benteng

c. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bantimurung meliputi:
1. Kelurahan Kalabbirang
2. Kelurahan Leang-leang
3. Desa Alatengae
4. Desa Minasa Baji
5. Desa Tukamasea
6. Desa Mattoangin
7. Desa Mangeloreng
8. Desa Baruga

d. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Maros Baru meliputi:
1. Kelurahan Baji Pa'mai
2. Kelurahan Pallantikang
3. Kelurahan Baju Bodoa
4. Desa Borikamase
5. Desa Mattirotasi
6. Desa Majannang
7. Desa Borimasunggu

e. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bontoa meliputi:
1. Kelurahan Bontoa
2. Desa Pajjukukang
3. Desa Tunikamaseang
4. Desa Tupabbiring
5. Desa Botolempangan
6. Desa Salenrang
7. Desa Minasa Upa
8. Desa Ampekale
9. Desa Bonto Bahari

f. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mallawa meliputi:
1. Kelurahan Sabila
2. Desa Padaelo
3. Desa Batu Putih
4. Desa Wanua Waru
5. Desa Telumpanuae
6. Desa Samaenre
7. Desa Bentenge
8. Desa Mattampapole
9. Desa Uludaya
10. Desa Gattareng Matinggi
11. Desa Barugae

g. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tanralili meliputi:
1. Kelurahan Borong
2. Desa Allaere
3. Desa Toddopulia
4. Desa Kurusumange
5. Desa Lekopancing
6. Desa Damai
7. Desa Sudirman
8. Desa Purnakarya

h. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Marusu meliputi:
1. Desa Temmapaduae
2. Desa Nisombalia
3. Desa Tellumpoccoe

4. Desa Ma'rumpa
5. Desa Bonto Mate'ne
6. Desa Abbulosibatang
7. Desa Pabbentengang

i. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Simbang meliputi:
1. Desa Jenetaesa
2. Desa Bonto Tallasa
3. Desa Sambueja
4. Desa Tanete
5. Desa Samangki
6. Desa Simbang

j. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cenrana meliputi:
1. Desa Limampoccoe
2. Desa Laiya
3. Desa Labuaja
4. Desa Lebbo Tengae
5. Desa Rompegading
6. Desa Baji Pamai
7. Desa Cenrana Baru

k. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tompobulu meliputi:
1. Desa Tompobulu
2. Desa Benteng Gajah
3. Desa Bonto Manai
4. Desa Bonto Somba
5. Desa Toddolimae
6. Desa Pucak
7. Desa Bonto Matinggi
8. Desa Bonto Manurung

l. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Lau meliputi:
1. Kelurahan Allepolea
2. Kelurahan Maccini Baji
3. Kelurahan Soreang
4. Kelurahan Mattirodeceng
5. Desa Marannu
6. Desa Bonto Marannu

m. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Moncongloe meliputi:
1. Desa Moncongloe
2. Desa Moncongloe Bulu
3. Desa Moncongloe Lappara
4. Desa Bonto Bunga
5. Deasa Bonto Marannu

n. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Turikale meliputi:
1. Kelurahan Pettuadae
2. Kelurahan Boribellaya
3. Kelurahan Alliritengae
4. Kelurahan Turikale
5. Kelurahan Taroada
6. Kelurahan Raya
7. Kelurahan Adatongeng

Seperti yang telah disebutnya sebelumnya, Kabupaten Maros memiliki luas sebesar 1.443,80 $km^2$ dan terdiri dari 14 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas areal terbesar adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas wilayah sebesar 259,75 $km^2$, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 231,15 $km^2$. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas

wilayah terkecil adalah Kecamatan Turikale yang juga merupakan ibukota kabupaten, dengan luas wilayah 23,30 km$^2$, kemudian luas wilayah terkecil kedua adalah Kecamatan Mandai dengan luas wilayah 38,14 km$^2$. Nama-nama kecamatan, pusat pemerintahan kecamatan, serta luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**
**Luas Daerah dan Pusat Pemerintahan Kecamatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSAT PEMERINTAHAN | LUAS WILAYAH (KM2) | PERSENTASE TER-HADAP LUAS KA-BUPATEN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turikale | Petuadae | 23,20 | 1,61 |
| 2 | Tompobulu | Pucak | 259,75 | 17,99 |
| 3 | Tanralili | Borong | 77,12 | 5,34 |
| 4 | Simbang | Jene Taesa | 101,43 | 7,03 |
| 5 | Moncongloe | Moncongloe Bulu | 38,23 | 2,65 |
| 6 | Marusu | Temmapaduae | 48,53 | 3,36 |
| 7 | Maros Baru | Baju Bodoa | 39,62 | 2,74 |
| 8 | Mandai | Tete batu | 38,14 | 2,64 |
| 9 | Mallawa | Ladange | 231,15 | 16,01 |
| 10 | Lau | Macini Baji | 41,73 | 2,89 |
| 11 | Cenrana | Bengo | 206,35 | 14,29 |
| 12 | Camba | Cempaniga | 121,92 | 8,44 |
| 13 | Bontoa | Panjalingan | 64,66 | 4,48 |
| 14 | Bantimurung | Kalabbirang | 151,97 | 10,53 |
| **MAROS** | | | **1.443,80** | **100,00** |

*Sumber : Perda Penataan Wilayah, Pusat Pemerintahan, dan batas wilayah, 2012*
*Perda RTRW Kab. Maros, 2023 (diolah)*

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45’ hingga 50°07’ Lintang Selatan, dan 109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur.

Letak Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan jika ditinjau dari segi geografis sangat strategis. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar, sehingga kegiatan perekonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini juga ditopang dengan letak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada didalam wilayah Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10%) adalah kawasan pantai, 5 desa (5%) adalah kawasan lembah, 28 desa (27%) kawasan lereng/bukit dan 60 desa/kelurahan (58%), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

**Gambar 2.2**
**Peta Letak dan Kondisi GeografisKabupaten Maros**

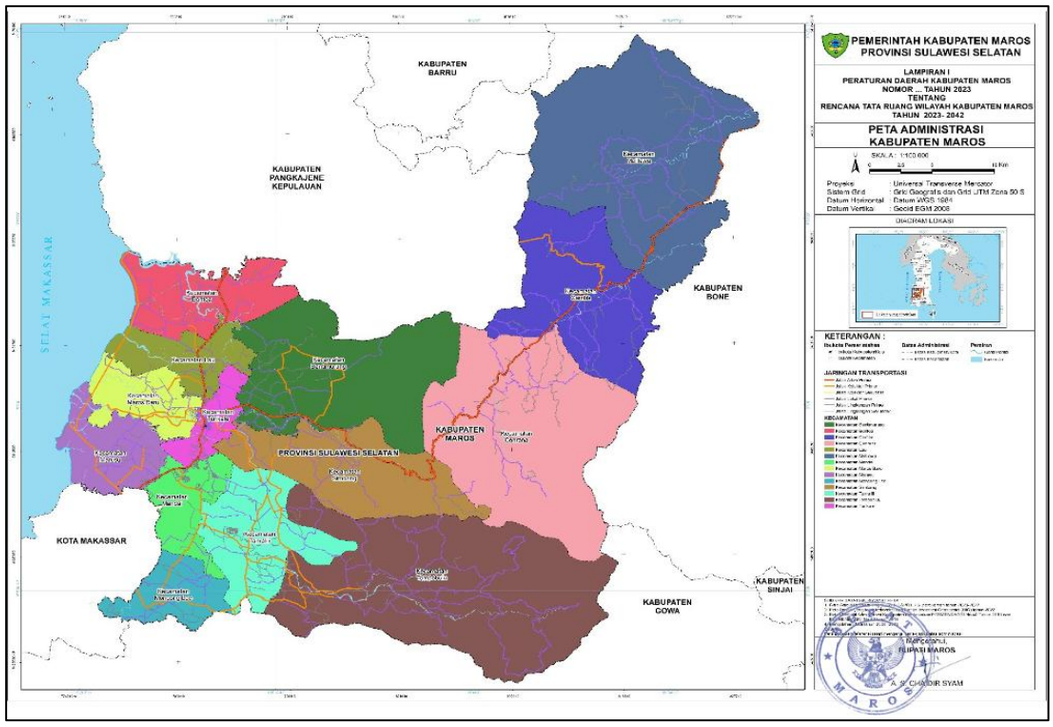


*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024*

### 2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042; Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten Maros mempunyai luas kurang lebih 144.380 hektar atau 1.443,80 km2 yang meliputi 14 (empat belas) kecamatan.

Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10 %) adalah kawasan pantai, 5 desa (5 %) adalah kawasan lembah, 28 desa (27 %) kawasan lereng/bukit dan 60 desa/kelurahan (58 %), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas 43.750 ha, dan sebanyak ± 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia. Kawasan karst Maros-Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional. Adanya keragaman potensi di kawasan inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai Geopark Nasional, dan berkat kerjasama

semua pihak pada 20 November 2017 secara resmi Kawasan Karst Maros-Pangkep telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, kemudian oleh Pusat Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menetapkan Geoprak Maros-Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan keputusan yang diambil pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, Rabu 24 Mei 2023. Geopark Maros-Pangkep menjadi Global Geopark ke-8 di Indonesia yang masuk daftar UNESCO Global Geopark.

Kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran. Tinggi wilayah setiap kecamatan bervariasi di antara 0-1000 mpdl di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Turikale berada pada ketinggian 0-300 mdpl. Berdasakan ketinggian di atas permukaan laut luas Kabupaten Maros adalah 144.017,59 ha. Adapun luas areal per kecamatan berdasarkan ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**
**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan**
**di Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Keterangan | | | | | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-300 Mdpl | 1000- Mdpl | 1500> Mdpl | 300-500 Mdpl | 500- Mdpl | |
| 1 | Bantimurung | 7572,28 | 449,30 | 2,13 | 4785,70 | 2505,62 | 15.315,03 |
| 2 | Bontoa | 6010,20 | -- | -- | 386,52 | 0,03 | 6.396,76 |
| 3 | Camba | -- | 6046,86 | 595,45 | 2385,99 | 5544,59 | 14.572,89 |
| 4 | Cenrana | -- | 5407,05 | 1671,38 | 2583,02 | 9154,65 | 18.816,09 |
| 5 | Lau | 4146,41 | -- | -- | -- | -- | 4.146,41 |
| 6 | Mallawa | 53,61 | 4626,89 | 3268,62 | 7408,01 | 7164,99 | 22.522,12 |
| 7 | Mandai | 3934,20 | -- | -- | 1,13 | -- | 3.935,33 |
| 8 | Maros Baru | 4261,06 | -- | -- | -- | -- | 4.261,06 |
| 9 | Marusu | 4376,97 | -- | -- | -- | -- | 4.376,97 |
| 10 | Moncong Loe | 3807,02 | -- | -- | 94,44 | -- | 3.901,46 |
| 11 | Simbang | 6081,35 | -- | -- | 2994,04 | 0,57 | 9.075,95 |
| 12 | Tanralili | 7697,77 | -- | -- | 597,47 | -- | 8.295,25 |
| 13 | Tompobulu | 6350,45 | 3552,31 | 1642,55 | 9183,90 | 5222,86 | 25.952,07 |
| 14 | Turikale | 2450,21 | -- | -- | -- | -- | 2.450,21 |
| **Jumlah** | | **56.741,5** | **20.082,4** | **7.180,13** | **30.420,2** | **29.593,3** | **14.4017,59** |

*Sumber : Dinas PUTRPPPP Kab. Maros, 2025*

Wilayah Kabupaten Maros berada pada kondisi topografi dengan kelas kemiringan lereng mulai dari datar, berbukit, sampai bergunung. Kelas kemiringan lereng 0 - 8% (datar) merupakan kondisi topografi dengan luas 48.207,72 ha, kemiringan lereng 8-15% dengan luas 24.046,23 ha, kemiringan lereng 15 – 25% (berbukit) dengan luas areal 35.361,65 ha, kemudian kelas kemiringan lereng 25 – 45% (bergunung), dengan luas areal 24.612,94 ha, dan kemiringan lereng >45% dengan total luas 11.646,94 ha. Luas areal per kecamatan berdasarkan kondisi topografinya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**
**Luas Areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng per Kecamatan Tahun 2024**

| No. | Kecamatan | Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-8% | 8-15% | 15-25% | 25-45 | 45>5 | |
| 1 | Bantimurung | 4.655.18 | 2.930.91 | 4.421.14 | 2.532.89 | 756.75 | 15.296.86 |
| 2 | Bontoa | 5.165.24 | 489.20 | 325.01 | 348.03 | 59.27 | 6.386.75 |
| 3 | Camba | 781.74 | 2.141.28 | 4.744.08 | 4.138.27 | 2759.35 | 14.564.71 |
| 4 | Cenrana | 1.082.11 | 3.361.14 | 7.153.82 | 5.489.67 | 1715.43 | 18.802.17 |
| 5 | Lau | 4.120.83 | 18.89 | -- | -- | -- | 4.139.73 |
| 6 | Mallawa | 1.491.57 | 5.362.59 | 7.784.68 | 4.902.53 | 2971.20 | 22.512.57 |
| 7 | Mandai | 3.785.00 | 51.24 | 92.75 | 0.03 | -- | 3.929.02 |
| 8 | Maros Baru | 4.254.43 | -- | -- | -- | -- | 4.254.43 |
| 9 | Marusu | 4.370.76 | -- | -- | -- | -- | 4.370.76 |
| 10 | Moncong Loe | 3.456.26 | 194.67 | 114.96 | 129.27 | -- | 3.895.16 |
| 11 | Simbang | 3.835.68 | 2.351.96 | 2.447.46 | 429.94 | -- | 9.065.04 |
| 12 | Tanralili | 5.613.27 | 1.365.45 | 1.103.93 | 201.00 | -- | 8.283.65 |
| 13 | Tompobulu | 3.149.25 | 5.778.91 | 7.173.83 | 6.441.31 | 33-84.93 | 25.928.22 |
| 14 | Turikale | 2.446.41 | -- | -- | -- | -- | 2.446.41 |
| Jumlah | | **48.207.72** | **24.046.23** | **35.361.65** | **24.612.94** | **11.646.94** | **14.3875.49** |

*Sumber : Dinas PUTRPPPP Kab. Maros, 2025*

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan bertopografi agak datar (lereng 0 – 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 Ha, diikuti oleh Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 Ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas areal masing-masing sekitar 4.736 Ha dan 4.712 Ha. Kemiringan lereng 8 – 15% tersebar di Kecamatan Mallawa, Bantimurung, dan Tompobulu, dengan luas areal masing-masing 1.134 Ha, 932 Ha dan 780 Ha. Seperti halnya dengan iklim, kemiringan lereng adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan suatu wilayah.

**Gambar 2.3**
**Peta Topografi Kabupaten Maros**

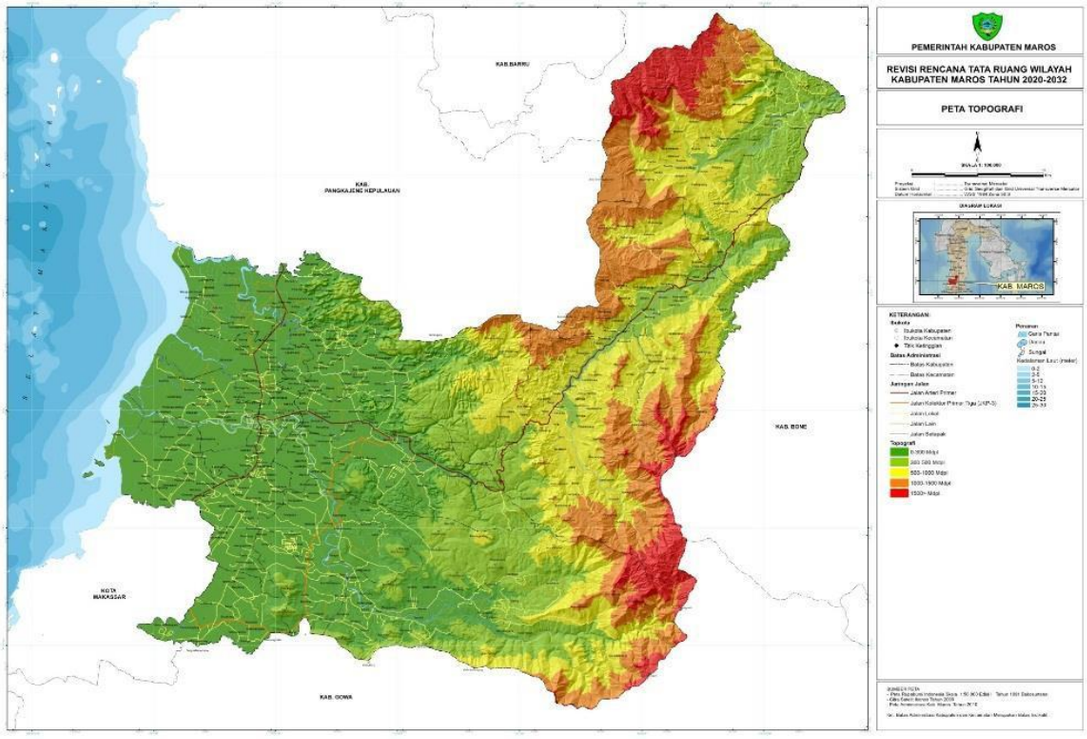


*Sumber : RTRW Kab. Maros, 2024*

### 2.1.1.2.2. Kondisi Geologi

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Maros antara lain Alluvial Hodromorf, Alluvial, Grumosol, Brown Forest Soil, Mediteranian, Latosol, Litosol dan Podoslik; dengan penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan, begitupun dengan kondisi geologi di Kabupaten Maros yang terdiri dari formasi Alluvium, Basalt, Camba, Mallawa dan Tonasa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

**TABEL 2.4**

**FORMASI GEOLOGI KABUPATEN MAROS**

| No | Keterangan | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bantimurung | Bontoa | Camba | Cenrana | Lau | Mallawa | Mandai | Maros Baru | Marusu | Moncong Loe | Simbang | Tanralili | Tompobulu | Turikale | Total |
| 1 | Alluvium | 4700.10 | 5589.89 | 242.72 | 734.87 | 4139.73 | -- | 768.65 | 4254.43 | 2600.17 | 860.40 | 4041.17 | 1612.10 | 914.25 | 2301.84 | 32760.31 |
| 2 | Basalt | 750.45 | -- | | 372.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 849.40 | -- | 1722.73 | -- | 3694.78 |
| 3 | Baturape Volcanic | -- | -- | 2659.53 | 5307.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2371.92 | -- | 10339.12 |
| 4 | Baturape-Cindako Vol | -- | -- | -- | 1824.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2720.18 | -- | 4544.84 |
| 5 | Camba Formation | 1523.21 | -- | 11247.31 | 7806.94 | -- | 14173.84 | 3160.37 | -- | 1770.60 | 3034.76 | 0.28 | 5606.52 | 13830.39 | 144.57 | 62298.78 |
| 6 | Dondo Suite | -- | -- | 415.16 | 552.52 | -- | 381.93 | -- | -- | -- | -- | 83.59 | 475.58 | 815.86 | -- | 2724.64 |
| 7 | Langi Volanics | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 412.87 | -- | 412.87 |
| 8 | Malawa Formation | -- | -- | -- | -- | -- | 921.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 921.12 |
| 9 | Tonasa Formation | 8323.12 | 796.86 | -- | 2203.29 | -- | 7035.68 | -- | -- | -- | -- | 4090.59 | 589.46 | 3140.03 | -- | 26179.02 |
| **Total** | | **15296.87** | **6386.75** | **14564.71** | **18802.16** | **4139.73** | **22512.57** | **3929.02** | **4254.43** | **4370.76** | **3895.16** | **9065.04** | **8283.65** | **25928.22** | **2446.41** | **143875.49** |

*Sumber : RTRW Kab. Maros, 2024*

**Tabel 2.5**

**Jenis Tanah Kab. Maros**

| No | Keterangan | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bantimurung | Bontoa | Camba | Cenrana | Lau | Mallawa | Mandai | Maros Baru | Marusu | Moncong Loe | Sim-bang | Tanralili | Tompo-bulu | Tu-rikale | |
| 1 | Aluvial Hodromorf,Glei Humus | 10.26 | 3091.93 | -- | -- | 1303.07 | -- | -- | 1248.96 | 1195.59 | 107.72 | -- | -- | -- | -- | 6957.52 |
| 2 | Aluvial,Grumusol | 3461.98 | 1345.81 | -- | -- | 2784.66 | -- | 167.26 | 3005.46 | 1036.86 | -- | 1682.34 | 317.52 | -- | 2186.95 | 15988.83 |
| 3 | Brown Fores Soil, Med-iteran Merah Kuning | -- | -- | -- | 1758.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3567.65 | -- | 5326.26 |
| 4 | Latosol,Litosol/Regosol | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 524.39 | 15323.74 | -- | 15849.28 |
| 5 | Mediteran Merah Kuning , Litosol, Mediteran Merah Kuning | 9588.00 | 1949.01 | -- | 2779.93 | 52.00 | -- | 295.88 | -- | -- | 990.51 | 7338.84 | 5940.99 | 3018.61 | -- | 31953.77 |
| 6 | Mediteran Merah Kuning, Latosol | 2236.63 | -- | 14564.71 | 14262.49 | -- | 22512.57 | -- | -- | -- | -- | 43.86 | -- | 4018.22 | -- | 57638.48 |
| 7 | No Data | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.22 |
| 8 | Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3465.89 | -- | 2097.09 | 2796.93 | -- | 1500.75 | -- | 259.47 | 10120.12 |
| **Total** | | **15296.86** | **6386.75** | **14564.71** | **18802.17** | **4139.73** | **22512.57** | **3929.02** | **4254.43** | **4370.76** | **3895.16** | **9065.04** | **8283.65** | **25928.22** | **2446.41** | **143875.49** |

*Sumber : RTRW Kab. Maros, 2024*

**Gambar 2.4**

**Peta Geologi Kabupaten Maros**

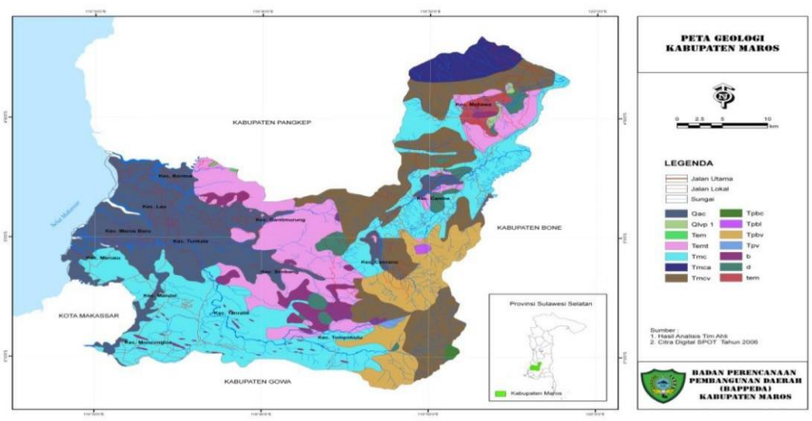


*Sumber : RTRW Kab. Maros, 2025*

Salah satu ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang dikenal dengan nama kawasan karst Maros Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep secara astronomis berada antara S4$^{O}$ 42' 49"– 5$^{O}$ 06' 42"dan E119$^{O}$ 34' 17"– 119$^{O}$ 55' 13". Secara areal geologi, kawasan ini termasuk dalam areal geologi regional Maros, Pangkep, dan Watampone yang secara umum terbagi atas dua baris pegunungan yang memanjang dengan arah utara-barat laut yang terpisahkan oleh lembah Sungai Walannae.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas 43.750 ha, dan sebanyak ± 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia . Kawasan karst Maros- Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional.

#### 2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Terdapat 2 (dua) jenis kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten Maros, yaitu jenis air permukaan dan jenis air tanah (dangkal dan dalam). Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (run-off) dan sebagian lagi meresap kedalam tanah.

**Gambar 2.5**
**Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros**

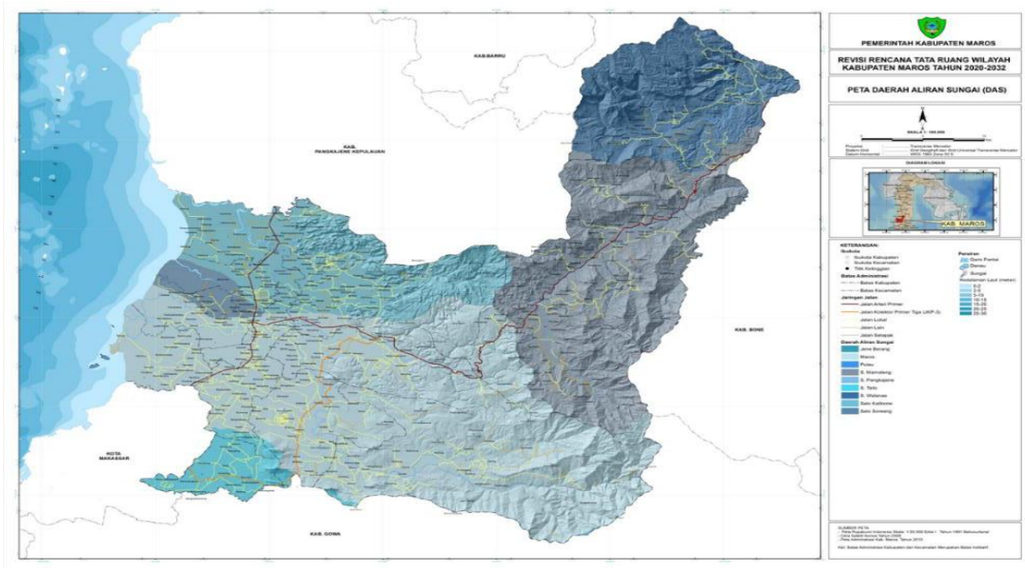


*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Maros cukup berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian disekitarnya. Sungai-sungai tersebut yakni sungai Maros, sungai Manraleng, sungai Kalibone, sungai Walanae, sungai Soreang, sungai Pangkajene, sungai Tallo, dan sungai Jeneberang. Wilayah Kabupaten Maros merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilalui oleh 8 (delapan) sungai tersebut dengan luas 143.875,49 ha atau 88% total luas wilayah.

**Tabel 2.6**

**Daerah Aliran Sungai Kab. Maros**

| No | Kecamatan | Keterangan | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | S. Maros | 4231.77 |
| | | S. Manraleng | 74.39 |
| | | Salo Kalibone | 10990.70 |
| 2 | Bontoa | Salo Kalibone | 6386.75 |
| 3 | Camba | S. Manraleng | 14550.40 |
| | | S. Walanae | 14.31 |
| 4 | Cenrana | Maros | 4160.88 |
| | | S. Manraleng | 14522.96 |
| | | Salo Kalibone | 118.33 |
| 5 | Lau | S. Maros | 0.04 |
| | | Salo Kalibone | 2464.76 |
| | | Salo Soreang | 1674.92 |
| 6 | Mallawa | S. Manraleng | 4241.00 |
| | | S. Pangkajene | 3.32 |
| | | S. Walanae | 18268.25 |
| 7 | Mandai | S. Maros | 3404.21 |
| | | S. Tallo | 524.82 |
| 8 | Maros Baru | S. Maros | 3013.11 |
| | | Salo Soreang | 1241.32 |
| 9 | Marusu | S. Maros | 4329.54 |
| | | Pulau | 41.22 |
| 10 | Moncong Loe | Maros | 3.68 |
| | | S. Tallo | 3891.48 |
| 11 | Simbang | S. Maros | 9065.04 |
| 12 | Tanralili | S. Maros | 7975.30 |
| | | S. Tallo | 308.35 |
| 13 | Tompobulu | Jene Berang | 47.16 |
| | | S. Maros | 25709.35 |
| | | S. Manraleng | 22.63 |
| | | S. Tallo | 149.09 |
| 14 | Turikale | S. Maros | 1950.82 |
| | | Salo Kalibone | 467.48 |
| | | Salo Soreang | 28.11 |
| **Total** | | | **143875.49** |

Sumber : RTRW Kab. Maros 2023

Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Maros merupakan bagian dari dua wilayah sungai besar yaitu Wilayah Sungai Jeneberang dan Wilayah Sungai Walanae- Cenranae. Luas wilayah sungai berdasarkan satuan wilayah sungai (SWS) Kabupaten Maros seluas 143.834 ha atau 97,95 % dari total wilayah, yang terdiri dari 2.947 ha SWS tidak kritis dan 140.887 ha SWS kritis.

**Tabel 2.7**

**Wilayah Sungai Kab. Maros**

| No | Kecamatan | Keterangan | SWS Tidak Kritis | SWS Kritis | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | WS Jeneberang | 15222.48 | 15222.48 | 15222.48 |
| | Bontoa | | -- | 6386.75 | 6386.75 |
| | Cenrana | | -- | 4279.21 | 4279.21 |
| | Lau | | 1674.92 | 2464.80 | 4139.73 |
| | Mallawa | | 3.32 | -- | 3.32 |
| | Mandai | | -- | 3929.02 | 3929.02 |
| | Maros Baru | | 1241.32 | 3013.11 | 4254.43 |
| | Marusu | | -- | 4329.54 | 4329.54 |
| | Moncong Loe | | -- | 3895.16 | 3895.16 |
| | Simbang | | -- | 9065.04 | 9065.04 |

| No | Kecamatan | Keterangan | SWS Tidak Kritis | SWS Kritis | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tanralili | | -- | 8283.65 | 8283.65 |
| | Tompobulu | | -- | 25905.59 | 25905.59 |
| | Turikale | | 28.11 | 2418.30 | 2446.41 |
| 2 | Bantimurung | WS Walanae Cendranae | -- | 74.39 | 74.39 |
| | Camba | | -- | 14564.71 | 14564.71 |
| | Cenrana | | -- | 14522.96 | 14522.96 |
| | Mallawa | | -- | 22509.25 | 22509.25 |
| | Tompobulu | | -- | 22.63 | 22.63 |
| **Total** | | | **18170.15** | **140886.59** | **143834.26** |

*Sumber : RTRW Kab. Maros 2023*

### 2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan pencatatan dari Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata Suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,22°C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,1°C (terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2018) sedangkan paling tinggi adalah 33,5°C (terjadi pada bulan September 2018).

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 284,5 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 185 hari selama Tahun 2018, dengan rata-rata suhu udara minimum 24,25°C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,39°C.

Kelembaban udara di Kabupaten Maros berada pada rata-rata kelembaban udara maksimum 91,75% dan rata-rata kelembaban udara minimum 59,17%, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut rata-rata suhu dan kelembaban udara

Tekanan udara di Kabupaten Maros sepanjang tahun 2022 berada pada kisaran 1.009,7 mb sampai 1011,5 mb. Tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember dengan tekanan sebesar 1.009,7 mb, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Juni dengan tekanan udara sebesar 1.011,5 mb. Sedangkan kecepatan angin di Kabupaten Maros sepanjang tahun 2022 berada antara 3 – 4 m/detik.

**Tabel 2.8**

**Jumlah Curah Hujan Kabupaten Maros**

| No | Kecamatan | Keterangan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000 -1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | Total |
| 1 | Bantimurung | 1921.67 | 1064.30 | -- | 12310.88 | 15296.86 |
| 2 | Bontoa | -- | 1592.78 | -- | 4793.95 | 6386.74 |
| 3 | Camba | 5615.01 | 8560.68 | 3.56 | 385.45 | 14564.71 |
| 4 | Cenrana | 1096.64 | 8138.65 | -- | 9566.85 | 18802.16 |
| 5 | Lau | -- | 1132.92 | -- | 3006.80 | 4139.72 |
| 6 | Mallawa | 8285.35 | -- | 14227.21 | -- | 22512.57 |
| 7 | Mandai | 474.79 | 1987.65 | 17.18 | 1449.38 | 3929.02 |
| 8 | Maros Baru | -- | 3718.98 | -- | 535.43 | 4254.42 |
| 9 | Marusu | 2070.24 | 2300.51 | -- | -- | 4370.76 |
| 10 | Moncong Loe | 1259.67 | 173.02 | -- | 2462.45 | 3895.16 |
| 11 | Simbang | 930.46 | 1788.6 | -- | 6345.90 | 9065.03 |
| 12 | Tanralili | 1554.30 | 66.46 | -- | 6662.87 | 8283.64 |
| 13 | Tompobulu | 10.78 | 3424.79 | -- | 22492.64 | 25928.22 |
| 14 | Turikale | -- | 626.06 | -- | 1820.35 | 2446.41 |
| **Total** | | **23218.96** | **34575.54** | **14247.96** | **71833.01** | **143875.48** |

Sumber : BMKG Kab. Maros

**Tabel 2.9**

**Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Kabupaten Maros Tahun 2024**

| Bulan | Suhu Udara (°C) | | | Kelembaban Udara (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maks | Min | Rata-rata | Maks | Min | Rata-rata |
| Januari | 30,0 | 24,6 | 26,8 | 96 | 68 | 85 |
| Februari | 29,6 | 24,1 | 26,1 | 97 | 76 | 89 |

| Bulan | Suhu Udara (°C) | | | Kelembaban Udara (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maks | Min | Rata-rata | Maks | Min | Rata-rata |
| Maret | 30,4 | 24,1 | 26,6 | 97 | 71 | 86 |
| April | 31,7 | 24,6 | 27,6 | 94 | 57 | 81 |
| Mei | 32,1 | 25,2 | 28,1 | 94 | 59 | 78 |
| Juni | 30,9 | 24,5 | 27,0 | 93 | 60 | 83 |
| Juli | 31,1 | 23,1 | 26,6 | 92 | 49 | 77 |
| Agustus | 32,3 | 23,1 | 27,2 | 75 | 56 | 72 |
| September | 33,5 | 22,8 | 27,9 | 78 | 31 | 65 |
| Oktober | 33,1 | 23,6 | 28,1 | 92 | 48 | 71 |
| November | 31,7 | 24,4 | 27,8 | 97 | 67 | 82 |
| Desember | 30,3 | 24,2 | 26,8 | 96 | 68 | 85 |

*Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), 2025*

### 2.1.1.2.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya lahan dibedakan menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sawah adalah lahan pertanian yang berpetak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk menahan/menyalurkan air. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan pertanian bukan sawah adalah lahan pertanian yang terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan, serta lahan sekitar rumah (pekarangan) yang diusahakan untuk pertanian. Yang termasuk lahan bukan pertanian adalah pemukiman, kantor, industri dan pertokoan.

Luas lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Maros sebesar 134.690 Ha atau sekitar 83% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan terluas, yaitu sekitar 67%, lahan sawah sekitar 16%, sedangkan lahan bukan pertanian sekitar 17% dengan luas 27.222 ha.

**Tabel 2.10**
**Luas Lahan (Ha) dan Jenis Penggunaannya Per Kecamatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2025**

| No | Kecamatan | Pengunaan Lahan | | | Total Luas Lahan (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sawah (Ha) | Pertanian Bukan Sawah (Ha) | Bukan Pertanian (Ha) | |
| 1 | Mandai | 1.440 | 1.259 | 2.212 | 4.911 |
| 2 | Moncongloe | 1.139 | 1.244 | 2.304 | 4.687 |
| 3 | Maros Baru | 1.101 | 1.888 | 2.387 | 5.376 |
| 4 | Marusu | 1.190 | 4.816 | 1.377 | 7.383 |
| 5 | Turikale | 975 | 191 | 1.827 | 2.993 |
| 6 | Lau | 2.259 | 2.003 | 1.111 | 5.373 |
| 7 | Bontoa | 1.935 | 6.302 | 1.115 | 9.352 |
| 8 | Bantimurung | 3.964 | 12.464 | 942 | 17.370 |
| 9 | SImbang | 2.034 | 5.372 | 3.125 | 10.531 |
| 10 | Tanralili | 1.292 | 2.062 | 4.692 | 8.945 |
| 11 | Tompobulu | 1.066 | 23.883 | 2.817 | 28.766 |
| 12 | Camba | 1.937 | 11.476 | 1.123 | 14.536 |

| No | Kecamatan | Pengunaan Lahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sawah (Ha) | Pertanian Bukan Sawah (Ha) | Bukan Pertanian (Ha) | Total Luas Lahan (Ha) |
| 13 | Cenrana | 2.001 | 14.449 | 1.647 | 18.097 |
| 14 | Mallawa | 1.770 | 21.279 | 543 | 23.592 |
| **Jumlah** | | **26.002** | **108.668** | **27.222** | **161.912** |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

### 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah rawan bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.

Potensi bencana di Kabupaten Maros diketahui dari catatan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan bencana terjadi berdasarkan pengkajian resiko bencana yang dilakukan di Kabupaten Maros. Berdasarkan pengkajian resiko bencana maka Kabupaten Maros memiliki 9 (Sembilan) jenis bencana yang rawan terjadi, yaitu; becana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami.

**Tabel 2.11**

**Wilayah Rawan Bencana Kab. Maros**

| No | Tipe Bencana | Jumlah Kawasan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjir | 1 | Mandai |
| | | 1 | Camba |
| | | 1 | Maros Baru |
| | | 1 | Bontoa |
| | | 1 | Tanralili |
| | | 1 | Marusu |
| | | 1 | Simbang |
| | | 1 | Tompobulu |
| | | 1 | Lau |
| | | 1 | Moncongloe |
| | | 1 | Turikale |
| 2 | Longsor | 3 | Bantimurung |
| | | 2 | Mallawa |
| | | 2 | Camba |
| | | 8 | Cenrana |
| | | 5 | Tompobulu |
| 3 | Kebakaran | 18 | Mandai |
| | | 7 | Camba |
| | | 1 | Bantimurung |
| | | 4 | Maros Baru |
| | | 3 | Bontoa |
| | | 6 | Mallawa |
| | | 2 | Marusu |
| | | 3 | Simbang |
| | | 3 | Cenrana |
| | | 1 | Lau |
| | | 3 | Moncongloe |

Sumber : BPBD Kab. Maros

Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Maros adalah 47.431,57 Ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Beberapa faktor penyebab banjir di Kabupaten Maros diantaranya : curah hujan cukup tinggi, topografi datar dan landau, jenis tanah Alluvial dan Litosol, penggunaan lahan dominan tambak dan sawah. Di samping itu faktor manusia yang kurang menyadari dalam hal pengelolaan sampah, karena sampah dibuang di kanal dan sungai supaya ikut aliran sungai sehingga drainase kurang lancar. Sebaran wilayah rawan bencana banjir serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12**
**Wilayah Rawan Bencana Banjir dan Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 4.207,20 | Ti |
| 2 | Bontoa | 8.341,40 | Ti |
| 3 | Lau | 5.361,24 | Sed |
| 4 | Mandai | 4.294,45 | Ti |
| 5 | Maros Baru | 5.354,25 | Ti |
| 6 | Marusu | 7.723,42 | Ti |
| 7 | Moncongloe | 3.208,99 | Ti |
| 8 | Simbang | 3.379,38 | Ti |
| 9 | Tanralili | 2.568,09 | Ti |
| 10 | Turikale | 2.993,12 | Ti |
| **Jumlah** | | **47.431,54** | **Ti** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Maros berada di 10 (sepuluh) kecamatan. Kelas sangat rawan tersebar di wilayah hilir sampai tengah DAS meliputi; Kecamatan Maros Baru bagian selatan, Marusu bagian utara, Turikale, Mandai bagian utara, Tanralili bagian utara, Bantimurung bagian selatan, Simbang bagian barat. Sebagian besar daerah yang datar dan landau rawan banjir di wilayah DAS Maros.

Banjir bandang merupakan banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada luar sungai (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana banjir bandang di Kabupaten Maros berada di 8 (delapan) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 2.860,04 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI, dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan. Sebaran wilayah rawan bencana banjir bandang serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**
**Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang dan Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 694,06 | Ti |
| 2 | Bontoa | 461,07 | Ti |

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 3 | Camba | 252,84 | Ti |
| 4 | Cenrana | 594,98 | Ti |
| 5 | Lau | 447,89 | Ti |
| 6 | Mallawa | 398,73 | Ti |
| 7 | Tompobulu | 0,13 | Ti |
| 8 | Turikale | 10,34 | Ti |
| **Jumlah** | | **2.860,04** | **Ti** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecamatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak cuaca ekstrim adalah 125.594,93 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Sebaran wilayah rawan bencana cuaca ekstrim serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.14**
**Wilayah Rawan Cuaca Ekstrim dan Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 8.102,96 | Tinggi |
| 2 | Bontoa | 8.599,54 | Tinggi |
| 3 | Camba | 10.906,37 | Sedang |
| 4 | Cenrana | 10.947,07 | Sedang |
| 5 | Lau | 5.371,48 | Tinggi |
| 6 | Mallawa | 16.161,83 | Tinggi |
| 7 | Mandai | 4.907,66 | Tinggi |
| 8 | Maros Baru | 5.261,90 | Tinggi |
| 9 | Marusu | 8.143,75 | Tinggi |
| 10 | Moncongloe | 4.682,84 | Tinggi |
| 11 | Simbang | 6.371,90 | Tinggi |
| 12 | Tanralili | 8.904,02 | Tinggi |
| 13 | Tompobulu | 24.240,21 | Tinggi |
| 14 | Turikale | 2.993,33 | Tinggi |
| **Jumlah** | | **125.594,93** | **Tinggi** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sedangkan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Total luas wilayah

yang terdampak bencana banjir adalah 329,76 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana cuaca gelombang ekstrim dan abrasi serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.15**
**Wilayah Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bontoa | 119,41 | Sedang |
| 2 | Lau | 23,24 | Sedang |
| 3 | Maros Baru | 55,25 | Sedang |
| 4 | Marusu | 131,85 | Sedang |
| **Jumlah** | | **329,76** | **Sedang** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total wilayah luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 Ha, dengan kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana gempa bumi dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.16**
**Wilayah Rawan Gempa Bumi Serta Kelas Kerawanan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 17.368,53 | Rendah |
| 2 | Bontoa | 9.497,64 | Rendah |
| 3 | Camba | 14.535,18 | Rendah |
| 4 | Cenrana | 17.787,45 | Rendah |
| 5 | Lau | 5.370,82 | Rendah |
| 6 | Mallawa | 23.590,67 | Rendah |
| 7 | Mandai | 4.910,48 | Rendah |
| 8 | Maros Baru | 5.376,26 | Rendah |
| 9 | Marusu | 8.184,67 | Rendah |
| 10 | Moncongloe | 4.686,95 | Rendah |
| 11 | Simbang | 10.529,44 | Rendah |
| 12 | Tanralili | 8.944,44 | Rendah |
| 13 | Tompobulu | 28.770,83 | Rendah |
| 14 | Turikale | 2.993,37 | Rendah |
| **Jumlah** | | **162.546,72** | **Rendah** |

*Sumber : BNPB, 2025*

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang sangat menganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 162.546,72

Ha, dengan kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.17**
**Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Total Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 17.368,5 | Rendah |
| 2 | Bontoa | 9.497,6 | Rendah |
| 3 | Camba | 14.535,1 | Rendah |
| 4 | Cenrana | 17.787,4 | Rendah |
| 5 | Lau | 5.370,82 | Rendah |
| 6 | Mallawa | 23.590,6 | Rendah |
| 7 | Mandai | 4.910,48 | Rendah |
| 8 | Maros Baru | 5.376,26 | Rendah |
| 9 | Marusu | 8.184,67 | Rendah |
| 10 | Moncongloe | 4.686,95 | Rendah |
| 11 | Simbang | 10.529,4 | Rendah |
| 12 | Tanralili | 8.944,44 | Rendah |
| 13 | Tompobulu | 28.770,8 | Rendah |
| 14 | Turikale | 2.993,37 | Rendah |
| **KABUPATEN MAROS** | | **162.546,72** | **Rendah** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian dalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman yang sedang dibudidayakan (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana kekeringan di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana kekeringan dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.18**
**Wilayah Rawan Kekeringan dan Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 17.368,53 | Sedang |
| 2 | Bontoa | 9.497,64 | Sedang |
| 3 | Camba | 14.535,18 | Sedang |
| 4 | Cenrana | 17,787,45 | Sedang |
| 5 | Lau | 5,370,82 | Sedang |
| 6 | Mallawa | 23.590,67 | Sedang |
| 7 | Mandai | 4.910,48 | Sedang |
| 8 | Maros Baru | 5.376,26 | Sedang |
| 9 | Marusu | 8.184,67 | Sedang |
| 10 | Moncongloe | 4.686,95 | Sedang |
| 11 | Simbang | 10.529,44 | Sedang |
| 12 | Tanralili | 8.944,44 | Sedang |
| 13 | Tompobulu | 28.770,83 | Sedang |
| 14 | Turikale | 2.993,37 | Sedang |

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| **Jumlah** | | **162.546,72** | **Sedang** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Tanah longsor adalah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB). Sebaran wilayah rawan bencana tanah longsor dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 19**
**Wilayah Rawan Tanah Longsor dan Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 7.833,83 | Sedang |
| 2 | Bontoa | 755,52 | Sedang |
| 3 | Camba | 10.171,15 | Sedang |
| 4 | Cenrana | 13.815,70 | Sedang |
| 5 | Mallawa | 15.998,01 | Sedang |
| 6 | Mandai | 71,20 | Sedang |
| 7 | Moncongloe | 427,94 | Sedang |
| 8 | Simbang | 3.732,45 | Sedang |
| 9 | Tanralili | 1.342,01 | Sedang |
| 10 | Tompobulu | 11.336,87 | Sedang |
| **Jumlah** | | **65.484,70** | **Sedang** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

Tsunami berasal dari bahasa jepang yang berarti gelombang lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana tsunami di Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Luas wilayah yang terdampak bencana tsunami adalah 6.019,72 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana tsunami dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20**
**Wilayah Rawan Tsunami dan Kelas Kerawanan Bencana**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Terdampak (Ha) | Kelas Kerawanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bontoa | 2.594,08 | Ting |
| 2 | Lau | 679,63 | Ting |
| 3 | Maros Baru | 455,85 | Ting |
| 4 | Marusu | 1.290,15 | Ting |
| **Jumlah** | | **6.019,72** | **Ting** |

*Sumber : BNPB Kab. Maros, 2025*

### 2.1.1.4. Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah sangat penting di dalam proses pembangunan. Penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.

#### 2.1.1.4.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2024, berdasarkan sensus penduduk 2023 sebesar 413,590 jiwa, yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Jumlah penduduk bertambah 2.891 jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2023. Rata- rata laju pertumbuhan per tahun selama periode 2020 - 2024 sebesar 0,7 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 1,72 persen per tahun.

**Tabel 2.21**
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan**
**Kabupaten Maros tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RERATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandai | 51.793 | 53.406 | 55.277 | 57.505 | 59.008 | 55.398 |
| 2 | Moncongloe | 23.742 | 24.336 | 25.059 | 25.764 | 25.938 | 24.968 |
| 3 | Maros Baru | 28.364 | 28.613 | 28.984 | 29.303 | 29.339 | 28.921 |
| 4 | Marusu | 34.319 | 35.105 | 36.046 | 37.062 | 37.486 | 36.004 |
| 5 | Turikale | 48.541 | 48.963 | 49.568 | 50.188 | 50.231 | 49.498 |
| 6 | lau | 27.542 | 27.686 | 27.941 | 28.135 | 28.262 | 27.913 |
| 7 | Bontoa | 30.598 | 30.799 | 31.119 | 31.449 | 31.474 | 31.088 |
| 8 | Bantimurung | 32.831 | 33.082 | 33.474 | 33.879 | 33.972 | 33.448 |
| 9 | Simbang | 25.544 | 25.697 | 25.960 | 26.190 | 26.409 | 25.960 |
| 10 | Tanralili | 30.950 | 31.448 | 32.067 | 32.706 | 32.800 | 31.994 |
| 11 | Tompobulu | 15.945 | 16.004 | 16.139 | 16.206 | 16.294 | 16.118 |
| 12 | Camba | 14.221 | 14.291 | 14.416 | 14.487 | 14.503 | 14.384 |
| 13 | Cenrana | 14.574 | 14.553 | 14.601 | 14.573 | 14.572 | 14.575 |
| 14 | Mallawa | 12.811 | 12.941 | 13.123 | 13.252 | 13.302 | 13.086 |
| Maros | | **391.775** | **396.924** | **403.774** | **410.699** | **413.590** | **403.352** |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

Selama tahun Tahun 2020 - 2024 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan, rasio jenis kelamin selama kurun waktu tersebut sebesar 100,69 persen. Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maros hampir sama jumlahnya dengan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2024 rasio jenis kelamin menujukkan angka seebsar 99,51 persen yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Sejak tahun 2020 di kabupaten maros terjadi penurunan angka penduduk non produktif hal tersebut berakibat dari semakin menurunnya rasio ketergantungan penduduk non produktif (berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) terhadap penduduk produktif, hal ini data dilihat dari trend penurunan yang signikan dari angka 51, 25 % pada tahun 2020 menjadi 45 % pada tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 46 % pada tahun 2024. Dari data dibawah ini dari dapat dilihat bahwa dari 100 jumlah penduduk produktif di Kabupaten Maros menanggung jumlah penduduk non produktif yang semakin menurun dari 51,25 % menjadi 45 % pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun ini terjadi peningkatan jumlah sumber daya ekonomi dalam hal ini penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan dengan efisien sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Grafik 2.1**
**Rasio Ketergantungan Kab. Maros 2020 – 2024**

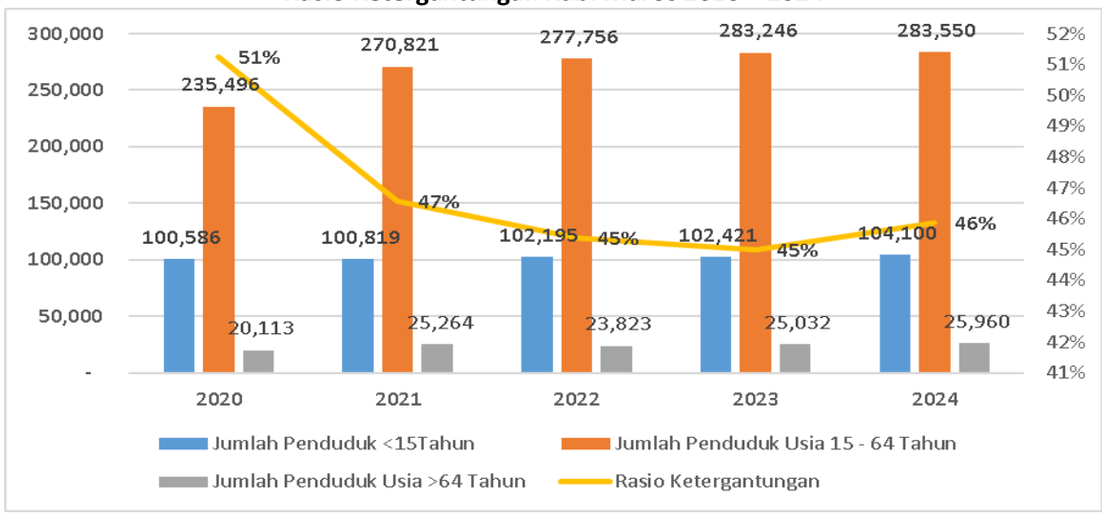


Sumber: BPS, 2025

Komposisi penduduk Kabupaten Maros menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk terbesar yakni 59.008 jiwa mendiami Kecamatan Mandai, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk sebanyak 13.302 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2024 mencapai 249 jiwa/km$^2$. Kecamatan Turikale adalah kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 1.654 jiwa/km$^2$, diikuti oleh Kecamatan Mandai 1.124 jiwa/km$^2$, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 56 jiwa/km$^2$.

Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2020 – 2024, dimana pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Maros sebesar 242 jiwa/km2, kemudian meningkat hingga mencapai 287 jiwa/km2 pada tahun

2024. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Turikale dengan rata-rata kepadatan penduduk selama tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 1.564 jiwa km2. Kemudian diukuti oleh Kecamatan Mandai dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 931 jiwa/km2. Kecamatan Mallawa dan Tompobulu memiliki rata-rata kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 51 jiwa/km2 dan 53 jiwa/km2.

**Tabel 2.22**
**Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 0.74 | 1.31 | 1.73 | 1.72 | 0.70 |
| 2 | Kepadatan penduduk | 242 | 245 | 249 | 283 | 287 |
| 3 | Rasio jenis kelamin | 100.63 | 100.65 | 100.67 | 100.83 | 99.51 |

*Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025*

### 2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah Kabupaten Maros yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas; Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

#### 2.1.1.5.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Metropolitan Mamminasata telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi :

a. Pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan;
b. Pengembangan Kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia;
c. Pengembangan Kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan Kawasan perkotaan inti dan Kawasan perkotaan disekitarnya;
d. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan perkotaan Mamminasata.

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dalam hal ini wilayah-wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan pusat perkotaan yang memiliki kepentingan dalam skala nasional.

#### 2.1.1.5.2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, menetapkan bahwa :

a. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:
   - Pengembangan Kawasan Perkotaaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
   - Pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan
   - Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yangberbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah.

b. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:
   - Pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan;
   - Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
   - Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya.

c. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi:
   - Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
   - Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

#### 2.1.1.5.3 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri atas:

a. KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Maros diarahkan pada :

- kawasan strategis pengembangan agrowisata yang terpadu dengan agropolitan Tanralili di Kecamatan Tanralili;
- kawasan strategis pengembangan bandar udara internasional sultan hasanuddin di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- kawasan strategis pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;
- kawasan strategis pengembangan minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru;
- kawasan strategis pengembangan kota baru moncongloe di Kecamatan Moncongloe;

- kawasan strategis pengembangan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai;
- kawasan strategis pengembangan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale; dan
- kawasan strategis pengembangan wisata pasir putih pantai kuri Kecamatan Marusu.

b. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

- Kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Patte'ne Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu.

c. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi

Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi di Kabupaten Maros, terdiri atas :

- Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung;
- Kawasan Industri Persenjataan dan Amunisi di Kecamatan Tompobulu; dan
- Pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mandai.

Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Maros meliputi :

- Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung;
- Kawasan Kebun Binatang Safari Puca Kecamatan Tompobulu.

## 2. 2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator- indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia dan indikator lainnya sesuai konteks di Kabupaten Maros. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Setiap lapangan usaha menciptakan nilai tambah yang membentuk struktur ekonomi dari suatu daerah. Struktur ekonomi ini menggambarkan ketergantunagn suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perekonomian Kabupaten Maros di dominasi oleh Sektor Transportasi dan pergudangan, Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Hal ini tergambar dari konstribusi masing-masing lapangan usaha PDRB Kabupaten Maros.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,03 persen. Meskipun ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen, capaian ini tetap signifikan mengingat berbagai tantangan ekonomi global yang dihadapi.

Beberapa sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ini termasuk

transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 13,96 persen, serta konstruksi yang tumbuh 7,68 persen. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan kinerja positif, masing-masing tumbuh sebesar 4,82 persen dan 4,40 persen.

**Grafik 2.2**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

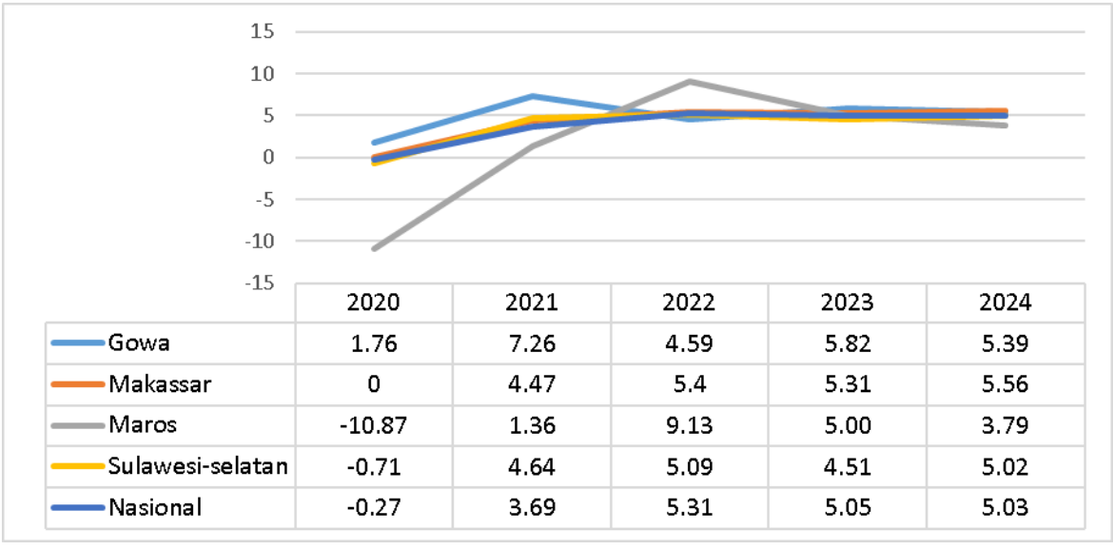


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gowa | 1.76 | 7.26 | 4.59 | 5.82 | 5.39 |
| Makassar | 0 | 4.47 | 5.4 | 5.31 | 5.56 |
| Maros | -10.87 | 1.36 | 9.13 | 5.00 | 3.79 |
| Sulawesi-selatan | -0.71 | 4.64 | 5.09 | 4.51 | 5.02 |
| Nasional | -0.27 | 3.69 | 5.31 | 5.05 | 5.03 |

*Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025*

Ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5.02 9 persen. Sebanyak 14 Kategori Lapangan Usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategori Jasa Lainnya sebesar 12,56 persen. Selanjutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,26 persen. Posisi ketiga dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,56 persen; posisi ke empat Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,58 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di posisi ke lima tumbuh sebesar 7,14 persen. Sementara itu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi tertinggi sebesar -5,91 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2020 - 2024 menunjukkan pelambatan, puncaknya pada tahun 2020 akibat adanya COVID-19, PDRB Kabupaten Maros mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga mencapai angka negatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros melambat hingga mencapai -10.87 persen, lalu pada tahun 2021 berkontraksi hingga mencapai 1.37 % dan mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 9.13 persen. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 5 % dan kembali melambat menjadi 3.79 % pada tahun 2024.

Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 696,252 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 43 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 652,648 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 377,208 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 396,142 triliun rupiah di tahun 2023. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02 persen. Kenaikan PDRB ini murni

disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terkahir, struktur perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 21,84%.

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Maros pada tahun 2024 terdapat sebanyak 52 tempat. Dimana terdiri dari 21 pasar dengan bangunan permanen, 16 Kelompok pertokoan dan 14 pasar dengan bangunan semi permanen. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikaitkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Sehingga hal tersebut yang mendorong permintaan akan barang-barang kebutuhan rumah tangga semakin meningkat juga.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 243.062,72 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 16.159,93 milyar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 226.902,79. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha memiliki pertumbuhan di atas 5 persen.Sembilan lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif antara 3 dan 5 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 3 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen antara lain: lapangan usaha Real Estate sebesar 8,18 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 3 persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,29 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,36 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,81 persen, dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,05 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 140.197,90 milyar di tahun 2023 menjadi Rp 147.989,20 milyar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,56 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;

Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarannya mencapai 20,03 persen.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencatatkan angka 5,39%, yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,02% . Pendapatan per Kapita: Meningkat dari Rp35,52 juta pada tahun 2023 menjadi Rp37,77 juta pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan sebesar 6,33% .

Sektor-sektor Pendorong Pertumbuhan adalah sektor pariwisata menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Gowa. Program "Beautiful Malino" dan pembangunan destinasi wisata baru seperti Sierra Sky View, Cimory Dairy Land, dan Malino Wonderland berhasil menarik investasi sebesar Rp400 miliar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . UMKM dan Inovasi Rumah Produktif: Inovasi "Proksi Rumah Produktif" yang diluncurkan oleh Pemkab Gowa berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan 167 desa/kelurahan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gowa berhasil masuk sepuluh besar dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI. Inovasi "Proksi Rumah Produktif" menjadi salah satu faktor utama yang diakui dalam penghargaan tersebut, menunjukkan komitmen Pemkab Gowa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan .

Meskipun perekonomian Kabupaten Gowa menunjukkan kinerja yang positif, tantangan seperti ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, Pemkab Gowa terus mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan UMKM untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan. pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024. Distribusi persentase PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.23**
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No. | Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 18,52 | 19,74 | 16,50 | 15,25 | 14,79 | 16.96 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,47 | 9,01 | 7,70 | 7,43 | 6,98 | 7.92 |
| 3 | Industri Pengolahan | 18,94 | 17,62 | 15,59 | 14,94 | 14,79 | 16.38 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.05 |
| 5 | Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0.12 |
| 6 | Konstruksi | 11,55 | 11,92 | 10,47 | 9,94 | 9,51 | 10.68 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,53 | 3,63 | 3,15 | 2,99 | 2,93 | 3.25 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 25,79 | 24,88 | 35,56 | 39,29 | 40,92 | 33.29 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0.34 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,49 | 1,56 | 1,29 | 1,20 | 1,14 | 1.34 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,66 | 1,73 | 1,48 | 1,33 | 1,27 | 1.49 |
| 12 | Real Estate | 1,61 | 1,63 | 1,42 | 1,33 | 1,37 | 1.47 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0.03 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,74 | 4,51 | 3,66 | 3,31 | 3,37 | 3.92 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,76 | 1,74 | 1,44 | 1,34 | 1,29 | 1.51 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,86 | 0,92 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0.80 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0.45 |
| **PDRB** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023). Dan terakhir yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan cenderung mengalami peningkatan peranan. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah bertambahnya aktivitas pada lapangan usaha tersebut sebagai pasca pandemi Covid-19. Dibukanya kembali rute penerbangan internasional dan kemudahan persyaratan penerbangan membuat jumlah penumpang utamanya sub sektor Angkutan Udara menjadi bertambah.

#### 2.2.1.1.1 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 243.062,72 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 16.159,93 milyar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 226.902,79. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha memiliki pertumbuhan di atas 5 persen.Sembilan lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif antara 3 dan 5 persen. Sedangkan, enam lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 3 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen antara lain: lapangan usaha Real Estate sebesar 8,18 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 persen.

Sedangkan, enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 3 persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,29 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,36 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,81 persen, dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,05 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 140.197,90 milyar di tahun 2023 menjadi Rp 147.989,20 milyar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,56 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarannya mencapai 20,03 persen.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencatatkan angka 5,39%, yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,02% . Pendapatan per Kapita: Meningkat dari Rp35,52 juta pada tahun 2023 menjadi Rp37,77 juta pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan sebesar 6,33% .

Sektor-sektor Pendorong Pertumbuhan adalah sektor pariwisata menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Gowa. Program "Beautiful Malino" dan pembangunan destinasi wisata baru seperti Sierra Sky View, Cimory Dairy Land, dan Malino Wonderland berhasil menarik investasi sebesar Rp400 miliar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . UMKM dan Inovasi Rumah Produktif: Inovasi "Proksi Rumah Produktif" yang diluncurkan oleh Pemkab Gowa berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa dan 167 desa/kelurahan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gowa berhasil masuk sepuluh besar dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI. Inovasi "Proksi Rumah Produktif" menjadi salah satu faktor utama yang diakui dalam penghargaan tersebut, menunjukkan komitmen Pemkab Gowa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan .

Meskipun perekonomian Kabupaten Gowa menunjukkan kinerja yang positif, tantangan seperti ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, Pemkab Gowa terus mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan UMKM untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan. pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024. Distribusi persentase PDRB berdasarkan ADHB

Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.24**
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**
**Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros**

| No. | Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 18,52 | 19,74 | 16,50 | 15,25 | 14,79 | 16.96 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,47 | 9,01 | 7,70 | 7,43 | 6,98 | 7.92 |
| 3 | Industri Pengolahan | 18,94 | 17,62 | 15,59 | 14,94 | 14,79 | 16.38 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.05 |
| 5 | Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0.12 |
| 6 | Konstruksi | 11,55 | 11,92 | 10,47 | 9,94 | 9,51 | 10.68 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,53 | 3,63 | 3,15 | 2,99 | 2,93 | 3.25 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 25,79 | 24,88 | 35,56 | 39,29 | 40,92 | 33.29 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0.34 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,49 | 1,56 | 1,29 | 1,20 | 1,14 | 1.34 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,66 | 1,73 | 1,48 | 1,33 | 1,27 | 1.49 |
| 12 | Real Estate | 1,61 | 1,63 | 1,42 | 1,33 | 1,37 | 1.47 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0.03 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,74 | 4,51 | 3,66 | 3,31 | 3,37 | 3.92 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,76 | 1,74 | 1,44 | 1,34 | 1,29 | 1.51 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,86 | 0,92 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0.80 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0.45 |
| **PDRB** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

### 2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2024 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 2,5%±1. Capaian inflasi tahun 2024 tersebut tercatat sebesar 1,84% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni sebesar 2.61%. Rincian Inflasi 2024 adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), meningkat dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 106,80 pada Desember 2024.

Kelompok Pengeluaran yang Meningkatkan Inflasi antaralain, makanan, minuman, dan tembakau, mencatat inflasi sebesar 1,90%, dengan kontribusi terbesar berasal dari sigaret kretek mesin (0,13%) dan minyak goreng (0,11%). Emas Perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,35%. Nasi dengan Lauk memberikan andil inflasi sebesar 0,06%..

Faktor Penyebab Inflasi Rendah adalah penurunan harga pangan, harga komoditas pangan yang sebelumnya mengalami lonjakan pada 2022 dan 2023 mulai stabil, berkontribusi terhadap rendahnya inflasi. Kebijakan Pemerintah, kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh PT Pertamina, turut menekan laju inflasi.

Kebijakan Moneter Bank Indonesia: Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi 2024 mencapai 3,2%, namun realisasinya lebih rendah dari perkiraan tersebut, menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi.

**Grafik 2.3**
**Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

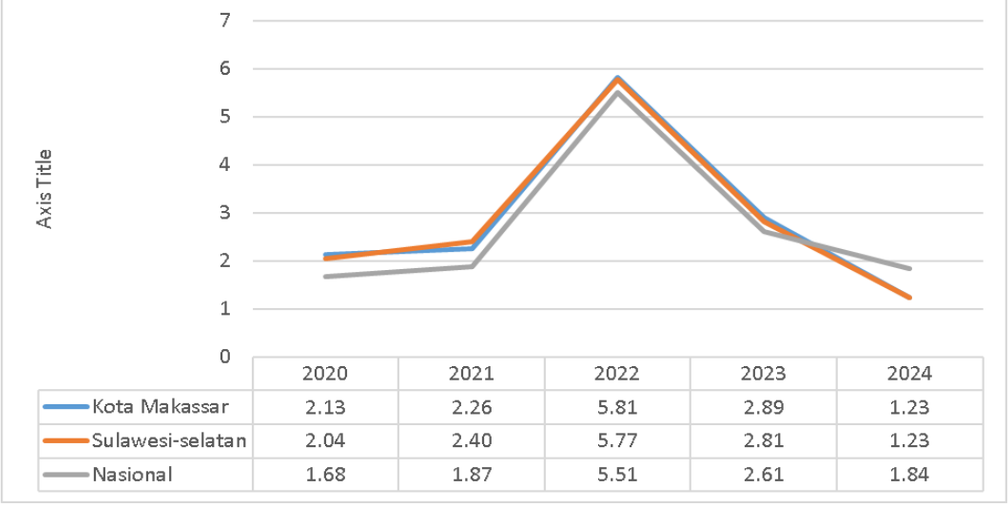


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 2.13 | 2.26 | 5.81 | 2.89 | 1.23 |
| Sulawesi-selatan | 2.04 | 2.40 | 5.77 | 2.81 | 1.23 |
| Nasional | 1.68 | 1.87 | 5.51 | 2.61 | 1.84 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Perbandingan ini menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan relatif terkendali dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam menjaga inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh pengendalian harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan salah satu kontributor utama inflasi.

Pada tahun 2024, inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,23%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Makassar yang berada di angka 1,23% pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar berhasil menjaga stabilitas harga sama dengan rata-rata provinsi.

Jumlah koperasi di Kota Makassar pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.976 unit.

Berdasarkan jenisnya terdapat 8 unit KUD, 228 unit KPRI, 198 unit KOPKAR, 12 unit KOPPAS, dan 1.530 unit koperasi jenis lainnya. Jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, terdapat 1.059 unit koperasi aktif di Kota Makassar. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Rappocini, sedangkan yang tidak memiliki koperasi aktir adalah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi) di daerah tersebut. Inflasi bulanan sepanjang tahun 2023 menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2024 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Desember yakni 0,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,49. Sedangkan, deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari dengan deflasi sebesar 0,25 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,66. Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki fasilitas perbankan yang cukup lengkap. Hingga 2024, tercatat sejumlah 67 kantor pusat dan kantor cabang bank umum dan 15 kantor pusat dan cabang bank perkreditan rakyat di Kota Makassar.

### 2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 64,69 juta rupiah. Kemudian, PDRB per kapita mengalami peningkatan menjadi 69,21 juta rupiah pada tahun 2024 (lihat Tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tahun lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25**
**Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai PDRB (Juta Rp) | 18,621,030 | 19,005,610 | 23,533.00 | 26.388,97 | 28,62 |
| 2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 391,774 | 396,924 | 402.168 | 407.923 | 413.594 |
| 3 | PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa) | 47,53 | 47,88 | 58.31 | 64.69 | 69,21 |

*Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2025*

### 2.2.1.4 Kondisi Kemiskinan Daerah

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dsar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosilogisnya. Upaya pembeberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi serta memperkukuk martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdpat dalam aplikasi DTKS.

**2.2.1.4. Kondisi Kemiskinan Daerah**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dsar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosilogisnya. Upaya pembeberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi serta memperkukuk martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdapat dalam aplikasi DTKS.

**2.2.1.4.1 Tingkat kemiskinan (P0)**

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,74 persen. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,32 persen. Data perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.26**
**Perkembangan penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No. | Tahun | Jumlah Pendudk (Jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (Persen) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 391.774 | 34.620 | 9,74 |
| 2 | 2021 | 396.924 | 34.110 | 9,57 |
| 3 | 2022 | 403.774 | 33.900 | 9,43 |
| 4 | 2023 | 410.699 | 34.960 | 9,65 |
| 5 | 2024 | 423.990 | 34.000 | 9,32 |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

Seperti yang terlihat pada Tabel diatas, terdapat penurunan angka tingkat kemiskinan pada Tahun 2024. Penurunan tahun 2024 disebabkan kondisi cuaca cenderung normal, produksi pertanian kembali meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan dan bibit pertanian, pembagian alat tangkap dan alsintan, penyediaan asuransi bagi petani, pemberian baju seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, pembangunan jalan produksi, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kawasan kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

**Grafik 2.4**
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan**
**Kabupaten Maros Tahun 2022 – 2024**

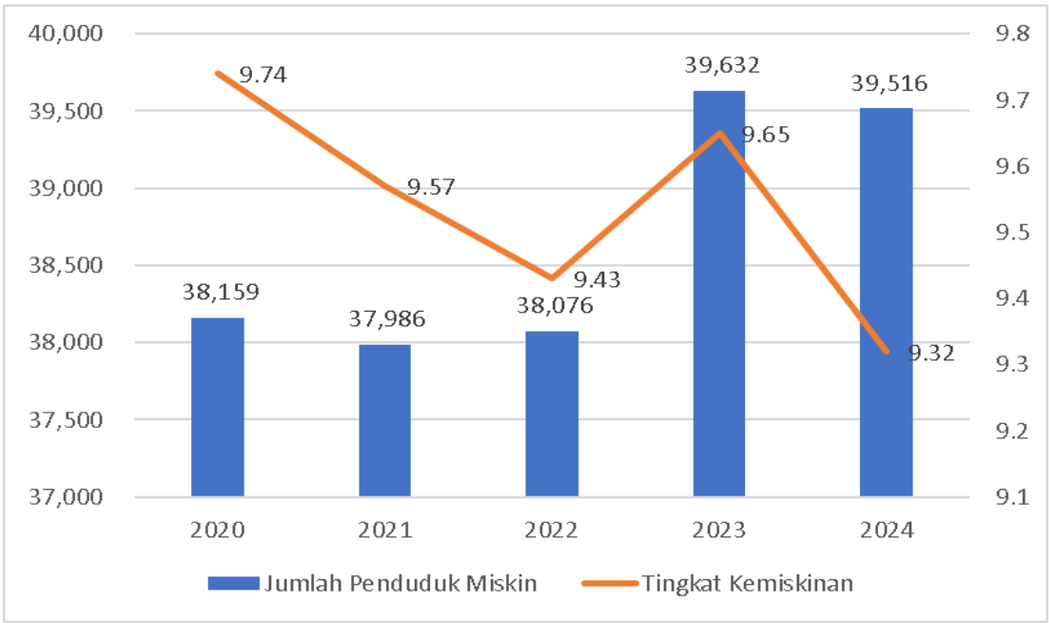


*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di urutan 15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan,. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki capaian tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 12,41 persen. Sedangkan Kota Makassar memiliki capaian tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,97 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, terlihat bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota serta Propinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

**Grafik 2.5**
**Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

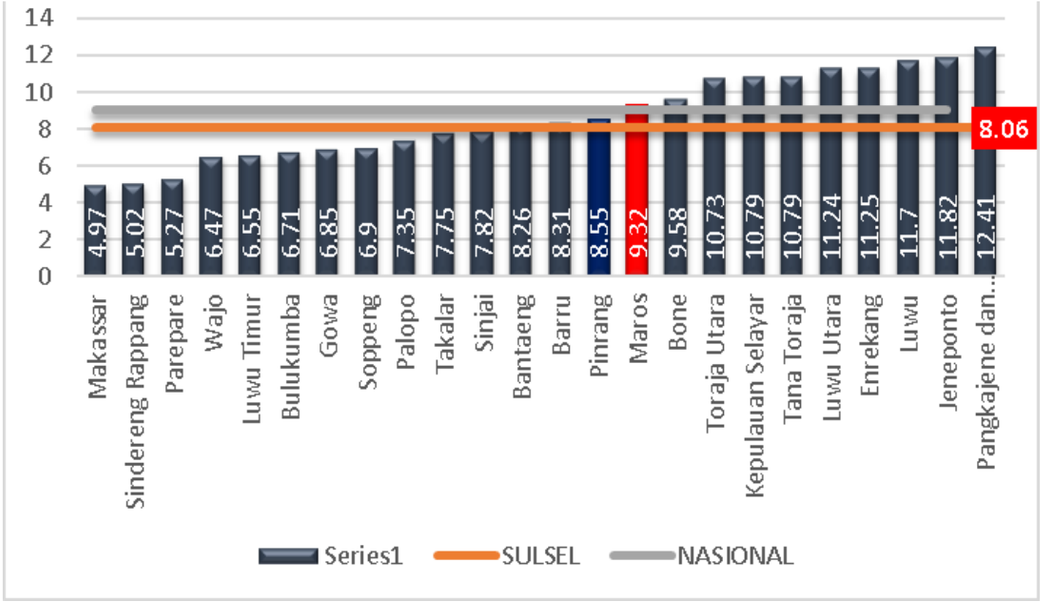


*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

**Tabel 2.27**

**Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kepulauan Selayar | 12,48 | 12,45 | 12.24 | 12,27 | 10,79 |
| 2 | Bulukumba | 7,10 | 7,43 | 7.39 | 7,22 | 6,71 |
| 3 | Bantaeng | 8,95 | 9,41 | 9.07 | 9,18 | 8,26 |
| 4 | Jeneponto | 14,58 | 14,28 | 13.73 | 13,06 | 11,82 |
| 5 | Takalar | 8,44 | 8,25 | 8.25 | 8,29 | 7,75 |
| 6 | Gowa | 7,38 | 7,54 | 7.36 | 7,42 | 6,85 |
| 7 | Sinjai | 9,00 | 8,84 | 8.80 | 8,55 | 7,82 |
| **8** | **Maros** | **9,74** | **9,57** | **9.43** | **9,65** | **9,32** |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 13,96 | 14,28 | 13.92 | 13,4 | 12,41 |
| 10 | Barru | 8,26 | 8,68 | 8.40 | 8,46 | 8,31 |
| 11 | Bone | 10,68 | 10,52 | 10.58 | 10,53 | 9,58 |
| 12 | Soppeng | 7,59 | 7,53 | 7.49 | 7,48 | 6,9 |
| 13 | Wajo | 6,95 | 6,46 | 6.57 | 6,73 | 6,47 |
| 14 | Sindereng Rappang | 5,05 | 5,04 | 5.11 | 5,14 | 5,02 |
| 15 | Pinrang | 8,86 | 8,81 | 8.79 | 8,9 | 8,55 |
| 16 | Enrekang | 12,17 | 12,47 | 12.39 | 12,69 | 11,25 |
| 17 | Luwu | 12,65 | 12,53 | 12.49 | 12,71 | 11,7 |
| 18 | Tana Toraja | 12,10 | 12,27 | 12.18 | 12,48 | 10,79 |
| 19 | Luwu Utara | 13,41 | 13,59 | 13.22 | 12,66 | 11,24 |
| 20 | Luwu Timur | 6,85 | 6,94 | 6.81 | 6,93 | 6,55 |
| 21 | Toraja Utara | 12,01 | 11,99 | 11.65 | 12,12 | 10,73 |
| 22 | Makassar | 4,54 | 4,82 | 4.58 | 5,07 | 4,97 |
| 23 | Parepare | 5,44 | 5,40 | 5.41 | 5,34 | 5,27 |
| 24 | Palopo | 7,85 | 8,14 | 7.78 | 7,69 | 7,35 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (9,32 %), dan diatas capaian Nasional (9,03 %). Pada Tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

**Grafik 2.6**

**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

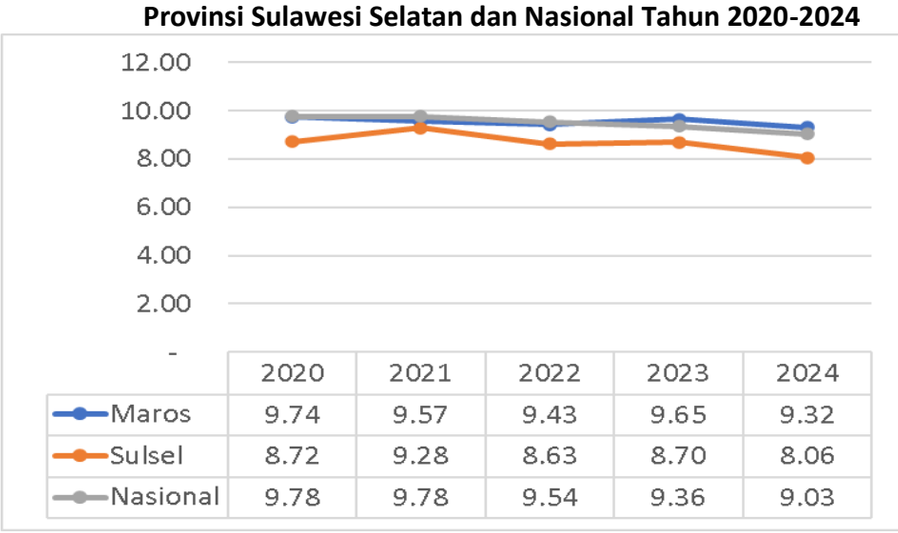


*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

**2.2.1.4.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya antar kabupaten/kota.

Indeks Kedalamankemiskinan (P1) Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024, walaupun secara umum cenderung menurun. Pada tahun 2022 realisasi P1 Kabupaten Maros sebesar 1,77 poin. Pada tahun 2023 P1 Kabupaten Maros naik hingga mencapai 1,89 poin, kemudian kembali turun pada tahun 2024 hingga 1,06 poin.

**Grafik 2. 7**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

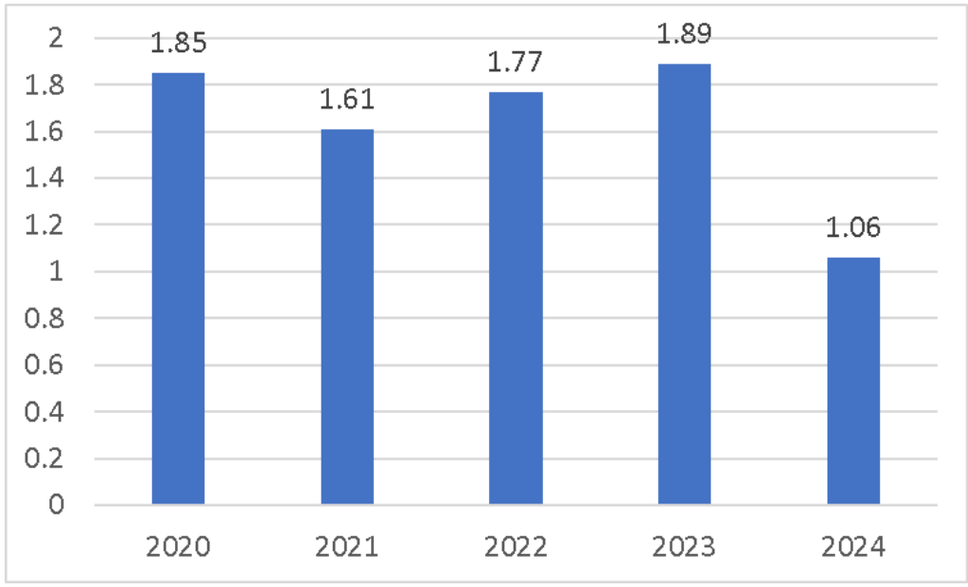


*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan demikian semakin tinggi nilai P1 maka ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar atau dengan kata lain kesenjangan penduduk miskin semakin bertambah. Capaian P1 Kabupaten Maros menujukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2023, walaupun tingkat kemiskinan (P0) terus menurun. Meningkatnya capaian P1 tersebut mempelihatkan bahwa penduduk miskin yang berkurang adalah penduduk miskin yang memliki pengeluaran mendekati garis kemiskinan (Rp 530.070), sedangkan penduduk miskin yang pengeluarannya berada jauh dari garis kemiskinan belum tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2024 nilai P1 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-10 dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Sidrap memiliki nilai P1 terendah, yaitu sebesar 0,51 poin, sedangkan nilai P1 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara dengan capaian 2,10 poin.

**Grafik 2.8**
**Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

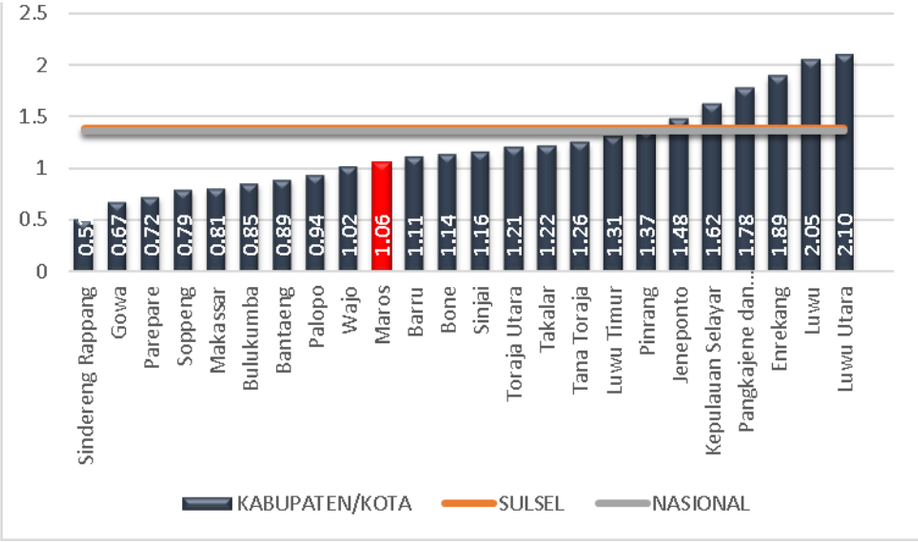


*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

**Tabel 2.28**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | KABUPATEN/KOTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 2,25 | 2,09 | 2,15 | 2,36 | 1,62 |
| 2 | Bulukumba | 0,71 | 1,00 | 0,99 | 1,16 | 0,85 |
| 3 | Bantaeng | 0,97 | 1,23 | 1,32 | 1,21 | 0,89 |
| 4 | Jeneponto | 2,6 | 1,64 | 2,54 | 2,23 | 1,48 |
| 5 | Takalar | 1,09 | 1,02 | 0,88 | 0,81 | 1,22 |
| 6 | Gowa | 1,18 | 1,38 | 1,13 | 0,72 | 0,67 |
| 7 | Sinjai | 1,34 | 1,45 | 1,19 | 0,98 | 1,16 |
| 8 | **Maros** | **1,45** | **1,61** | **1,77** | **1,89** | **1,06** |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 2,52 | 2,78 | 2,09 | 2,15 | 1,78 |
| 10 | Barru | 1,31 | 1,52 | 0,98 | 1,48 | 1,11 |
| 11 | Bone | 1,59 | 1,67 | 1,35 | 1,23 | 1,14 |
| 12 | Soppeng | 0,83 | 1,24 | 0,91 | 1,44 | 0,79 |
| 13 | Wajo | 0,98 | 0,79 | 0,86 | 1,34 | 1,02 |
| 14 | Sindereng Rappang | 0,82 | 0,64 | 0,86 | 0,54 | 0,51 |
| 15 | Pinrang | 1,27 | 1,77 | 1,06 | 1,22 | 1,37 |

| No | KABUPATEN/KOTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Enrekang | 1,61 | 1,35 | 1,97 | 1,96 | 1,89 |
| 17 | Luwu | 2,12 | 1,77 | 1,9 | 2,19 | 2,05 |
| 18 | Tana Toraja | 2,32 | 1,66 | 1,3 | 1,80 | 1,26 |
| 19 | Luwu Utara | 2,29 | 2,07 | 2,26 | 2,20 | 2,10 |
| 20 | Luwu Timur | 1,05 | 1,09 | 0,8 | 1,46 | 1,31 |
| 21 | Toraja Utara | 1,75 | 1,83 | 1,7 | 2,47 | 1,21 |
| 22 | Makassar | 0,58 | 0,76 | 0,8 | 0,62 | 0,81 |
| 23 | Parepare | 0,94 | 0,72 | 0,56 | 0,58 | 0,72 |
| 24 | Palopo | 0,95 | 1,17 | 1,43 | 1,10 | 0,94 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Capaian P1 Kabupaten Maros selama tahun 2022 hingga tahun 2023 berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sedangkan pada tahun 2024 capaian P1 Kabupaten Maros berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

**Grafik 2.9**
**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros, ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

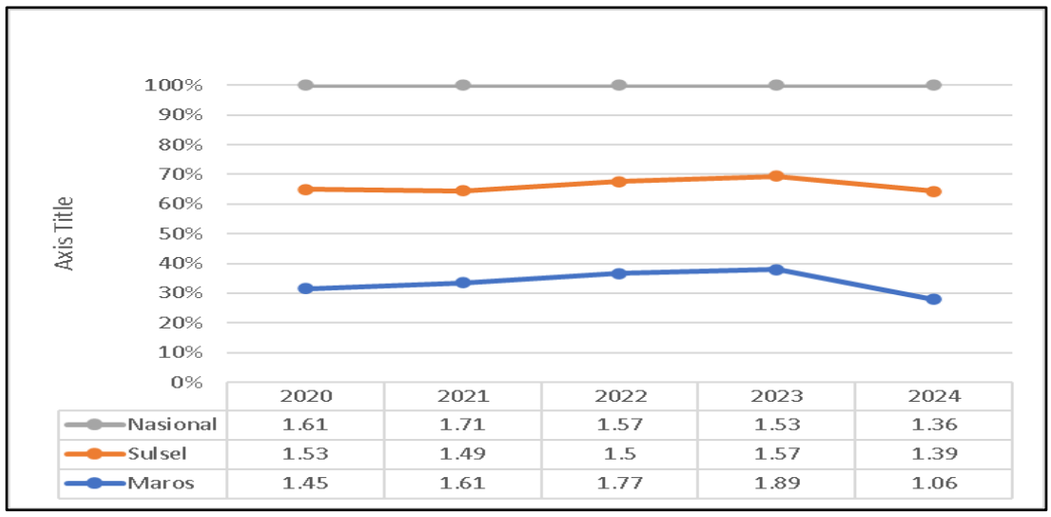


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

**2.2.1.4.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros secara umum menunjukkan tren penurunan selama tahun 2022 hingga tahun 2024, walapun dalam rentang tahun tersebut capaian indeks keparahan kemiskinan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 capaian P2 Kabupaten Maros sebesar 0,44 poin kemudian pada tahun

2023 menurun drastis hingga mencapai 0,47poin. Pada tahun 2024, capaian P2 sedikit meningkat menjadi 0,19 poin, dan pada tahun 2023 kembali meningkat hingga mencapai 0,47 poin. Pada Tahun 2024 P2 Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 0,19 poin.

**Grafik 2.10**
**Indeks Keparahan Kemiskinan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

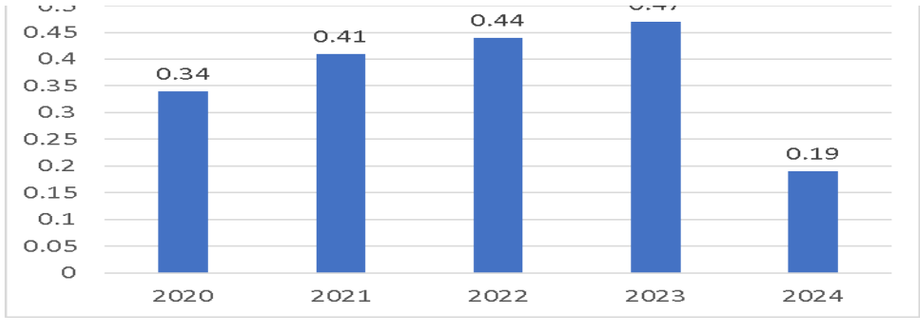


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Semakin tingginya nilai P2 memperlihatkan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Maros menunjukkan jarak yang semakin jauh, dengan demikian penduduk miskin yang berada pada desill 1 (miskin ekstrem) semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Capaian P2 Kabupaten Maros berada pada posisi ke-10 dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat satu tingkat dibandingkan Tahun 2023 (posisi 18). Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang memiliki capaian P2 terendah dengan nilai 0,08 poin, diikuti oleh Kabupaten Pare pare dengan nilai P2 0,14 poin dan Kabupaten Soppeng dengan capaian P2 sebesar 0,14 poin. Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang memiliki nilai P2 tertinggi yaitu sebesar 0,16 poin, diikuti oleh Kota Makassar dengan nilai P2 sebesar 0,18 poin, dan Kabupaten Maros dengan nilai P2 sebesar 0,19 poin.

**Grafik 2.11**
**Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

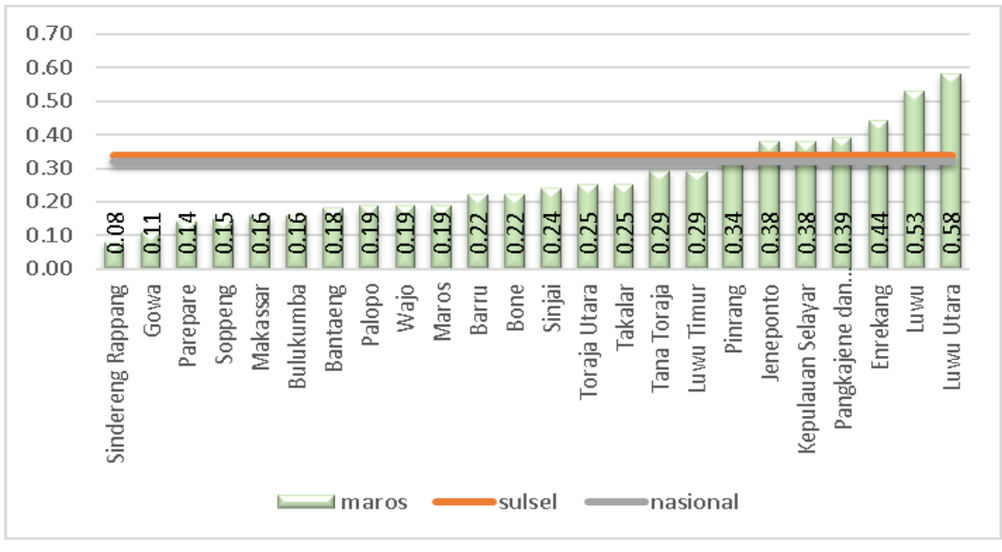


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

**Tabel 2.29**
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| NO | KABUPATEN/KOTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 0,60 | 0,46 | 0,57 | 0,68 | 0,38 |
| 2 | Bulukumba | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,16 |
| 3 | Bantaeng | 0,18 | 0,27 | 0,38 | 0,27 | 0,16 |
| 4 | Jeneponto | 0,68 | 0,29 | 0,70 | 0,62 | 0,29 |
| 5 | Takalar | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,29 |
| 6 | Gowa | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,12 | 0,11 |
| 7 | Sinjai | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,25 |
| **8** | **Maros** | **0,34** | **0,41** | **0,44** | **0,47** | **0,19** |
| 9 | Pangkep | 0,71 | 0,78 | 0,49 | 0,5 | 0,38 |
| 10 | Barru | 0,36 | 0,39 | 0,15 | 0,45 | 0,22 |
| 11 | Bone | 0,36 | 0,42 | 0,26 | 0,26 | 0,19 |
| 12 | Soppeng | 0,16 | 0,28 | 0,21 | 0,4 | 0,15 |
| 13 | Wajo | 0,21 | 0,15 | 0,21 | 0,43 | 0,22 |
| 14 | Sidrap | 0,19 | 0,13 | 0,20 | 0,1 | 0,08 |
| 15 | Pinrang | 0,34 | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,34 |
| 16 | Enrekang | 0,34 | 0,24 | 0,49 | 0,43 | 0,44 |
| 17 | Luwu | 0,49 | 0,46 | 0,39 | 0,55 | 0,53 |
| 18 | Tana Toraja | 0,74 | 0,36 | 0,22 | 0,4 | 0,25 |
| 19 | Luwu Utara | 0,61 | 0,49 | 0,55 | 0,63 | 0,58 |
| 20 | Luwu Timur | 0,24 | 0,26 | 0,16 | 0,41 | 0,39 |
| 21 | Toraja Utara | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,7 | 0,24 |
| 22 | Makassar | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,18 |
| 23 | Pare Pare | 0,24 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
| 24 | Palopo | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | 0,19 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Capaian P2 Kabupaten Maros pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (0,34) dan capaian nasional (0,32). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

**Grafik 2.12**
**Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

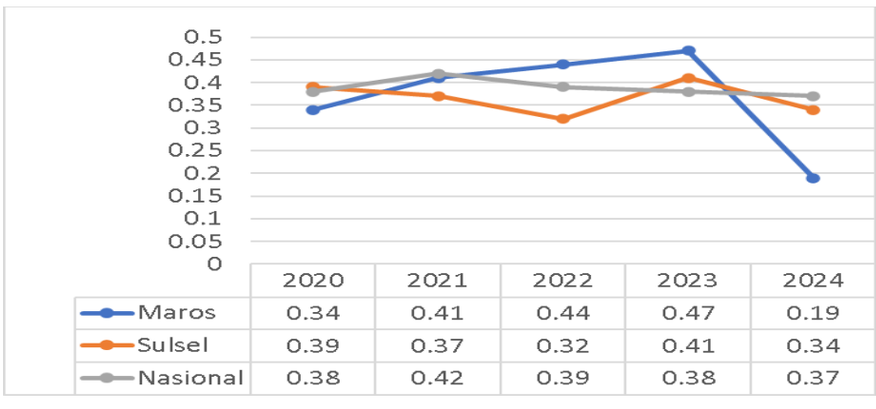


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

#### 2.2.1.4.4. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United nations, 1996).

Kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Maros menujukkan penurunan pada Tahun 2024. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Yang diperoleh dari kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang kemudian di padankan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Maros.

Seperti yang telah diketahui, kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 sebesar 1,21 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 4.979 jiwa, kemudian pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Maros maka kemiskinan ekstrem Kabupaten Maros sebesar 1,61 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 549 jiwa. Namun apabila dibandingkan antara penduduk miskin ekstrem dengan total penduduk miskin, maka diperoleh perbandingan sebesar 1,61 persen, dengan jumlah penduduk miskin total sebesar 34.000 orang.

**Tabel 2.30**
**Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Terhadap Penduduk Miskin dan Total Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Jumlah Penduduk** | | | |
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin Esktrem (Desil 1) | 8.173 | 4.979 | 549 |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | 33.900 | 34.960 | 34.000 |
| 3 | Jumlah Penduduk Maros | 403.774 | 410.699 | 413.590 |
| **II** | **Persentase** | | | |
| 1 | % Miskin Ekstrem Terhadap Miskin | 24,11 | 14,24 | 1,61 |
| 2 | % Miskin ekstrem terhadap penduduk | 2,02 | 1,21 | 0,13 |

*Sumber : Kemenko PMK, Dinas Sosial Kab. Maros, BPS Kab. Maros (Diolah), 2025*

### 2.2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masayarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2019 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### 2.2.2.1.Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran ang2ka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. sebelumnya yang sebesar 74,39. persen per tahun. Peningkatan ini termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan terjadi di seluruh dimensi pembentuk IPM seperti umur panjang dan hidup sehat: harapan hidup saat lahir meningkat. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah meningkat. Standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat. IPM Indonesia tahun 2024 berada di peringkat ke-112 dunia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selata tahun 2024 mencapai 75,18, meningkat 0,58 poin (0,78 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,60). Selama 2020-2024, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.Pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pendidikan mengalami perlambatan sedangkan percepatan pertumbuhan terjadi pada dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,83 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,54 tahun menjadi 13,55 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 8,76 tahun menjadi 8,86 tahun pada 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 434 ribu rupiah (3,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, jumlah kabupaten/kota pada masing-masing status pembangunan dari sedang hingga sangat tinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Seluruh kota madya memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM≥80). Selanjutnya, terdapat 20 kabupaten lainnya dengan status pembangunan tinggi (70 ≤ IPM < 80). Sementara itu, hanya Jeneponto yang status pembangunan manusianya masih berada pada level sedang dengan nilai indeks 69,45. Seiring dengan meningkatknya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM 24 Kabupaten/Kota sebesar 0,64 poin. 4 kabupaten dengan peningkatan paling tinggi adalah Tana Toraja, Bantaeng, Kepulauan Selayar dan Soppeng dengan peningkatan sebesar 0,82 poin sampai dengan 0,93 poin. Sedangkan Kabupaten dengan peningkatan paling rendah adalah Kota Makassar sebesar 0,38 poin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 73,56% dan tahun 2024 sebesar 74,04 dengan perubahan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar pada tahun 2024 mencapai 83,52, meningkat dari 83,12 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 75,18, juga mengalami peningkatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa pada tahun 2024 mencapai 73,71. IPM ini menunjukkan sejauh mana masyarakat Gowa dapat mengakses hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Gowa berada di kategori tinggi menurut standar UNDP.

Perkembangan IPM Nasinal, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terkahir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.13**
**Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

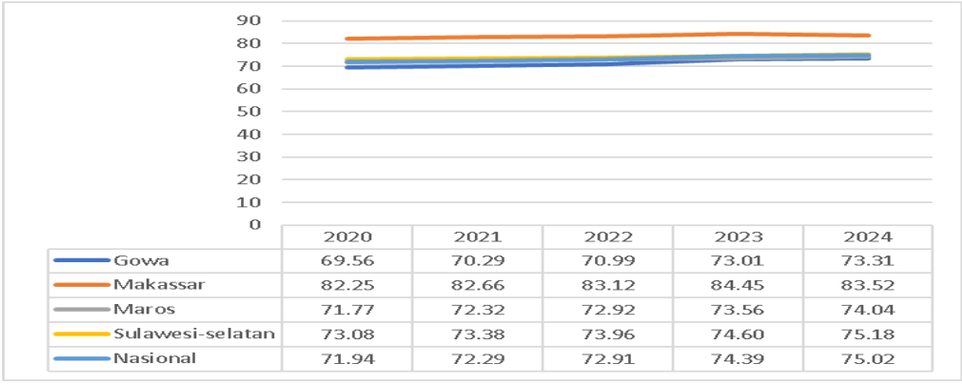


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gowa | 69.56 | 70.29 | 70.99 | 73.01 | 73.31 |
| Makassar | 82.25 | 82.66 | 83.12 | 84.45 | 83.52 |
| Maros | 71.77 | 72.32 | 72.92 | 73.56 | 74.04 |
| Sulawesi-selatan | 73.08 | 73.38 | 73.96 | 74.60 | 75.18 |
| Nasional | 71.94 | 72.29 | 72.91 | 74.39 | 75.02 |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

### 2.2.2.2. Indeks Kesehatan

Indikator kesehatan baik secara kolektif maupun tersediri memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung terhadap terhadap tingkat kemiskinan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros telah didukung oleh oleh peningkatan sarana prasarana yang ada, baik infrastruktur maupun alat kesehatan. Program yang dijalankan Pemerintah kabupaten Maros antara lain rehabilitasi puskesmas, akreditasi puskesmas, pelayanan rujukan jaminan persalinan, program JKN, pelayanan posbindu penyakit tidak menular, rehabilitasi rumah sakit, penambahan kamar rawat inap, ruang operasi, dan beebrapa kegiatan lainnya.

Pada hakikatnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan. Adalah relevan apabila perbaikan derajat kesehatan masyarakat dibarengi pula oleh ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumahs akit dan puskesmas. Rumah sakit yang terdapat di Kabupaten maros sebanyak 2 Unit, yang terdiri dari rumah sakit tentara (TNI AU) dan rumah sakit daerah (RSUD). Selain rumah sakit, puskesmas juga merupakan prasarana kesehatan yang tidak kalah penting. Kabupaten maros memiliki 14 puskesmas yang tersecar di 14 kecamatan, 26 puskesmas pembantu, sedangkan puskesling sebanyak 2 unit dan posyandu sebanyak 422 unit. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program prnggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu KB juga bertujuan untuk pemabngunan kelaurga kecil dan sejahtera dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya manusia. Beberapa indikator bidang kesehatan yang dia analisis terkait dengan tingkat kemiskinan antara lain:

#### 2.2.2.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah indikator yang mengukur jumlah bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKHB merupakan kebalikan dari Angka Kematian Bayi (AKB), dan memberikan gambaran tentang efektivitas sistem kesehatan dalam menjaga kesehatan bayi selama tahun pertama kehidupan mereka.

Peningkatan AKHB menunjukkan perbaikan dalam kondisi kesehatan dan perawatan bayi, sementara penurunan AKHB menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan ibu dan anak. Data ini penting untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat serta kebijakan kesehatan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan ibu dan bayi.

**Grafik 2.14**
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

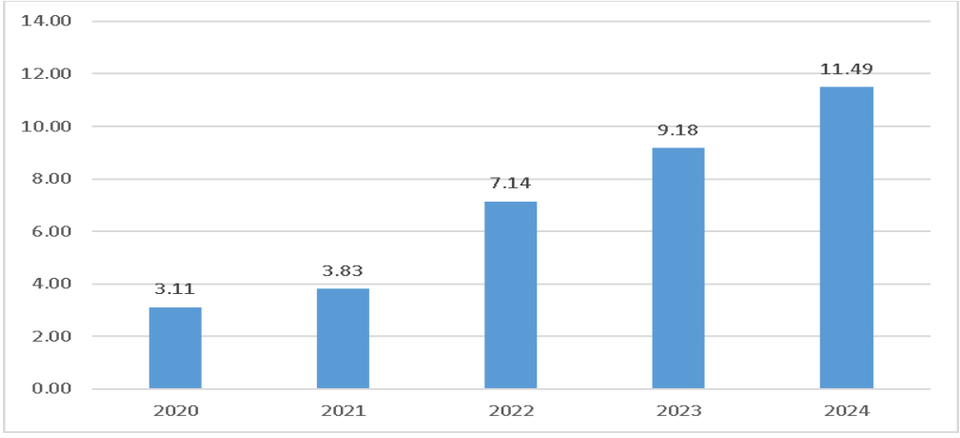


*Sumber: Dinkes Maros, 2025*

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator yang sangat menentukan dalam pencapaian komposit harapan hidup yang lebih baik.

Pada tahun 2020 sampai 2024 angka kematian bayi menujukkan peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 3,11 per seribu kelahiran, tahun 2021 angka kematian bayi sebesar 3,38 per seribu kelahiran, tahun 2022 angka kematian bayi sebesar 7,14 per seribu kelahiran, tahun 2023 angka kematian bayi sebesar 9,18 per seribu kelahiran, tahun 2024 angka kematian bayi sebesar 11,49 per seribu kelahira

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan AKHB di Maros antara lain, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan, dapat berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian bayi.

Untuk mengatasi tren penurunan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, program gizi yang lebih baik untuk ibu dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program vaksinasi dan penanganan penyakit menular juga harus terus ditingkatkan.

**2.2.2.2.2.Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1,000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu wilayah. AKI mengukur jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2020 hingga Tahun 2023 namun pada tahun 2024 AKI menunjukkan penurunan. Kenaikan AKI paling tinggi terjadai pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2020 AKI sebesar 56,49 per 100000 kelahiran. Tahun 2021 AKI sebesar 73,56 per 100000 kelahiran, tahun 2022 AKI 182,34 per 100000 kelahiran, tahun 2023 186,74 per 100000 kelahiran dan tahun 2024 AKI 185,29 per 100000 kelahiran.

Tingginya AKI selama 5 tahun terkahir banyak disebabkan oleh masih banyaknya pernikahan usia dini yang berakibat semakin tingginya resiko ibu hamil, dikarenakan pada umumnya ibu-ibu yang hamil dan berumur di bawah 20 tahun memiliki resiko kekurangan energi dan protein yang cukup besar.

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBA Kabupaten Maros menunjukkan tren kenaikan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 angka kematian balita sebesar 3,11 per 1000 kelahiran, kemudian tahun 2021 meningkat hingga mencapai 3,97 per 1000 kelahiran. Pada tahun 2024 angka kematian bayi meningkat cukup pesat hingga mencapai 11,86 per 1000 kelahiran.

**Grafik 2.15**

**Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup**

**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

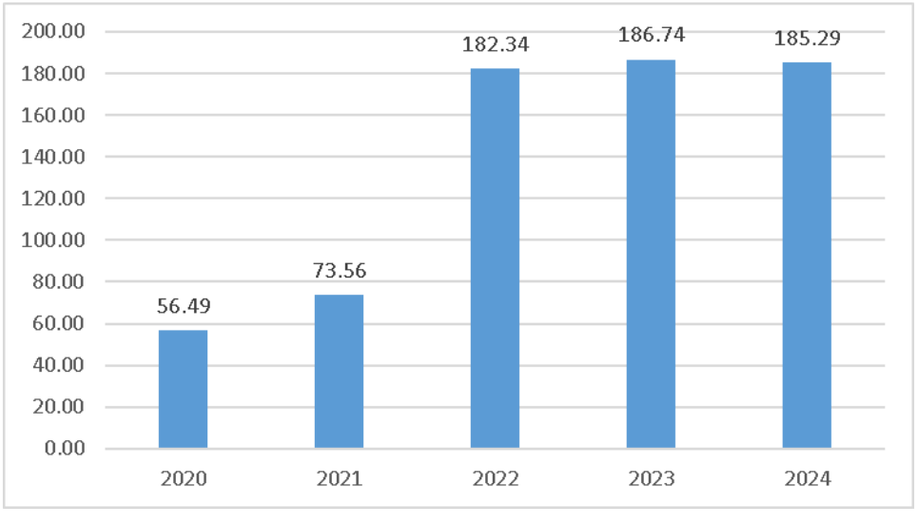


*Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025*

**2.2.2.2.3. Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%)**

Prevalensi gizi buruk pada balita adalah indikator penting yang mengukur persentase anak di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi buruk atau sangat buruk. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kondisi kesehatan anak-anak di suatu wilayah dan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

Status gizi balita di Kabupaten Maros pada umumnya menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan rendahnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Pada tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Maros sebesar 0,01 persen, kemudian pada tahun 2021 prevalensi balita gizi buruk kembali menurun hingga sebesar 0,77 persen, kemudian pada tahun 2022 meningkat kembali hingga mencapai 5,35 persen. Pada Tahun 2023 prevalensi balita gizi buruk menurun drastis hingga mencapai 0,20 persen. Tahun 2024 prevalensi balita gizi buruk kembali naik mencapai 0,63 persen.

Kenaikan prevalensi pada Tahun 2024 yang cukup siginifikan diakibatkan setelah dilakukan pendataan pada Tahun 2023 dan diperoleh hasil banyak nya balita dengan gizi buruk, kemudian dilakukan penanganan secara komprehensif dan tuntas terhadap balita-

balita tersebut. Penanganan yang dilakukan diantaranya pendampiangan terhadap ibu-ibu yang memiliki balita gizi buruk, pemebrian vitamin penambah darah, pemberian makanan tambahan selain ASI, program bapak dan ibu asuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap balita gizi buruk dan memiliki keluarga tidak mampu.

**Grafik 2.16**

**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

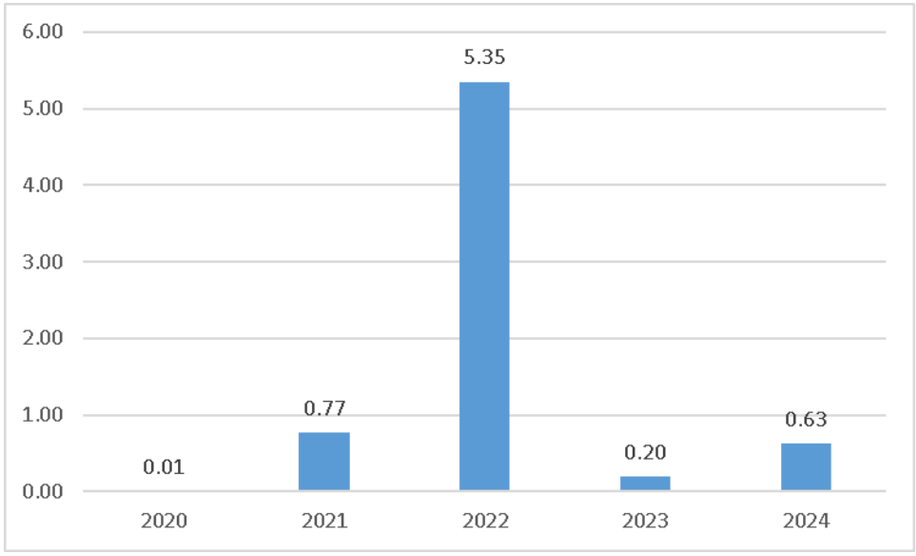


*Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025*

**2.2.2.2.4 Prevalensi Stunting**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah telah menetapkan Stunting sebagai program prioritas nasional. Komitmen ini diwujudkan dengan masuknya Stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 ditargetkan menjadi 14 % pada tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Presiden memberi mandat kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 ini telah ditetapkan 5 (lima) strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting. Kelima strategi dimaksud adalah I). peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 2). peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3). peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 4). peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan 5). penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, BKKBN telah mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai perencanaan aksi dalam penanganan Stunting yang akan dilakukan oleh pusat, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan serta multipihak.

**Grafik 2.17**
**Prevalensi Stunting Kab. Maros bedasarkan E-PPGBM**
**Tahun 2020-2024**

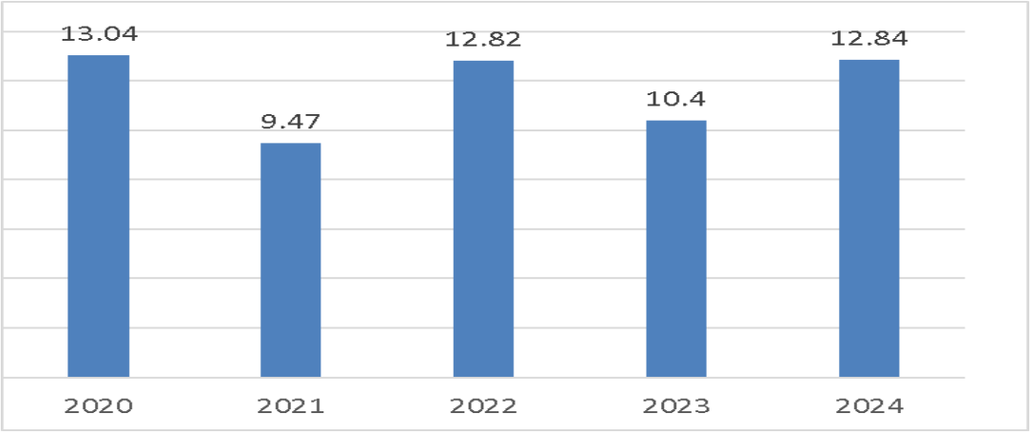


*Sumber: Data Eppgbm Dinkes Kab. Maros, 2025*

Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di Kabupaten Maros mengalami fluktuasi atau naik dan turun prevalensi stunting yaitu dari tahun 2020 sebesar 13,04 turun sebesar 9,47 % pada tahun 2021 kemudian naik menjadi 12,82 % pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 turun menjadi 10,40%. Pada pengukuran antropometri bulan Juni 2025 (penarikan data ter tanggal 5 Juli 2024) prevalensi stunting di Kabupaten Maros kembali mengalami peningkatan menjadi 12,46 0/0. Hal ini disebabkan karena pada Bulan Juni 2024 dilakukan kegiatan Intervensi Serentak dengan target 100% sasaran ke posyandu, dan hasilnya adalah sasaran balita yang belum pernah ke posyandu juga akhirnya tercover penimbangan sehingga angka prevalensi stunting di periode Juli 2024 mengalami peningkatan.

**2.2.2.2.5.Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk**

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tenaga medis yang dimaksud dalam hal ini adalah Dokter, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi.

Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun tahun 2020 rasio tenaga medis menurun hingga mencapai 0,40 orang untuk 1.000 penduduk. Dan pada Tahun 2021 menurun sangat drastis hingga mencapai 0,11 tenaga medis per 1.000 penduduk atau sebanyak 44 orang. Pada tahun 2022 jumlah tenaga medis meningkat hingga mencapai 102 orang dengan rasio sebesar 0,25 tenaga medis untuk 1.000 penduduk lalu pada Tahun 2023 kembali meningkat hingga 0,49 tenaga medis per 1.000 penduduk dan Tahun 2024 menurun hingga 0,45 per 1.000 penduduk.

Berdasarkan rasio tenaga medis per jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 untuk setiap 1 orang tenaga medis melayani sekitar 2.267 penduduk. Meningkatnya tenaga medis pada tahun 2023 dan 2024 dikarenakan adanya penerimaan PPPK untuk tenaga kesehatan yang cukup besar. Namun demikian apabila berdasarkan Keputusan Menteri Kesahatan Nomor 81/MENKEST/SK/I/2004 maka jumlah kebutuhan

tenaga medis di Kabupaten Maros sangat kurang, dimana seharunya berdasarkan aturan diatas raso standar untuk tenaga medis per jumlah penduduk di kabupaten maros adalah 1 orang tenaga medis melayani 40 orang penduduk.

**Grafik 2.18**
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

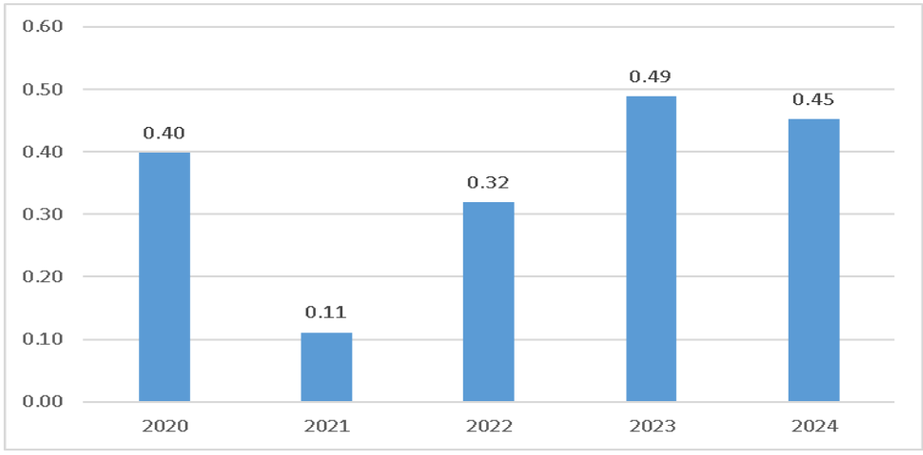


*Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025*

**2.2.2.2.6. Jarak Perpuskesmas**

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat, di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Berdasarkan peraturan yaitu Permenpera/No.32/Permen/M/2006 mengenai standar jarak ideal untuk fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas adalah 2 km.

Letak Puskesmas di seluruh kecamatan berada di ibukota kecamatan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Untuk beberapa wilayah desa yang berada di pegunungan telah disiapkan puskesmas pembantu.

**Grafik 2.19**
**Jarak Puskesmas dari ibukota kabupaten**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

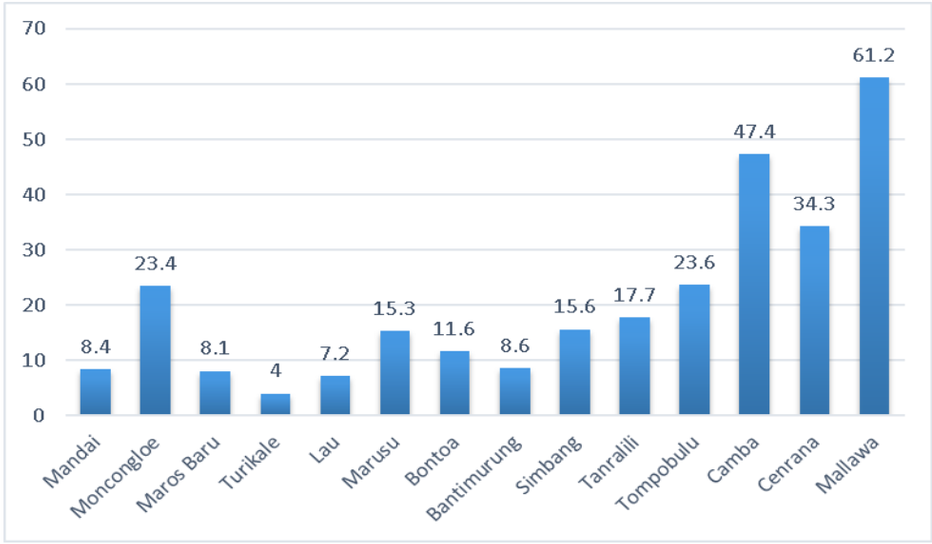


*Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025*

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Jumlah puskesmas pembantu Kabupaten Maros tahun 2024 sebanyak 27 unit yang tersebar di 14 kecamatan kecuali Kecamatan Lau tidak memiliki puskesmas pembantu. Diharapkan dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 27 unit tersebut, seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Posyandu per Satuan Penduduk untuk mengukur rasio fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan posyandu per satuan penduduk adalah penting untuk memahami ketersediaan layanan kesehatan di suatu wilayah.

#### 2.2.2.2.7. Kelahiran dI Tolong Tenaga Terlatih

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak. Tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan mencakup bidan, dokter umum yang memiliki pelatihan kebidanan, dan dokter spesialis kandungan.

Persentase ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan walupun setiap tahunnya menujukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 capaian angka kelahiran ditolong tenaga terlatih menurun hingga 94,72 persen. Pada tahun 2021 persentase persalinan ditolong tenaga terlatih sebesar 100 persen. Pada tahun 2022 persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 99,96 persen. Pada tahun 2023 persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 100 persen, 2024 persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 100 persen.

**Grafik 2.20**
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

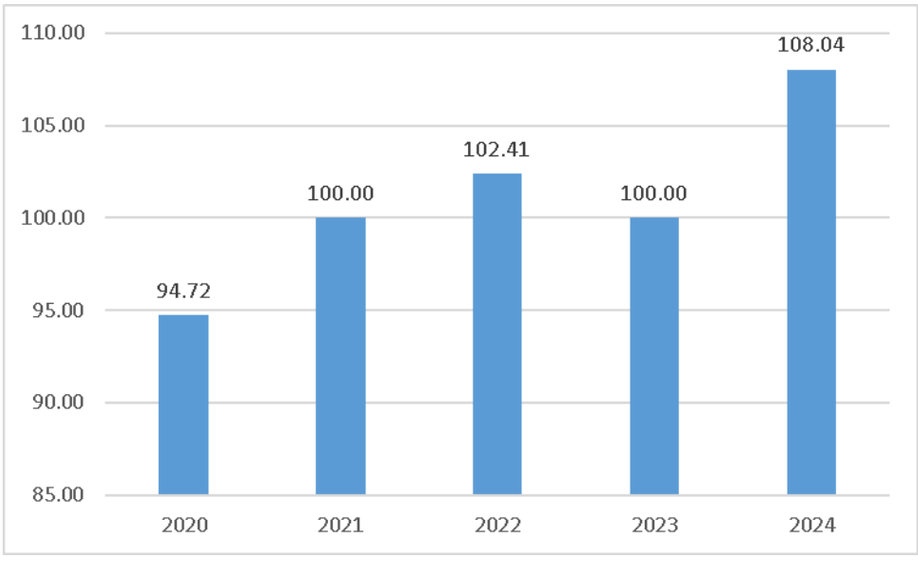


*Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2025*

Peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu sosialisasi yang cukup maish dilakukan oleh kader-kader posyandu dan puskesmas terkait pentingnya melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah juga cukup berpengaruh terhadap pertolongan persalinan.

#### 2.2.2.2.8. Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria adalah indikator yang mengukur jumlah kasus malaria yang terjadi dalam populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan sebagai jumlah kasus per 1.000 atau 100.000 penduduk per tahun. Angka ini penting untuk memantau prevalensi malaria dan efektivitas program pengendalian penyakit malaria di suatu daerah.

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia atau hewan lain. Malaria biasanya menyebabkan gejala demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan kulit kuning, kejang, koma bahkan kematian.

**Tabel 2.31**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu | 78 | 62 | 100 | 94 | 86 |
| 2 | Jumlah penduduk pada pertengahan tahun | 391.174 | 396.924 | 403,774 | 410,699 | 423,990 |
| **3** | **Angka Kejadian Malaria** | **20,00** | **15,62** | **24.77** | **22.89** | **20.28** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2024*

Angka kejadian malaria pada tahun 2020 di Kabupaten Maros sebesar 20 kasus per 100.000 penduduk (78 penderita), kemudian pada tahun 2024 meningka menjadi 86 orang penderita untuk setiap 100.000 penduduk (20.28 orang penderita).

Tingginya kasus malaria disebabkan banyak orang yang terinfeksi malaria belum terdeteksi dan terus menularkan kepada orang lain, Selain itu juga, orang yang sudah sembuh gampang terinfeksi kembali, karena tidak melakukan pencegahan seperti menggunakan kelambu ataupun kalau terinfeksi tidak berobat.

#### 2.2.2.3..Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. TPAK mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja, terhadap total populasi usia kerja.

Pembangunan berhasil jika tujuan pembangunan bisa tercapai. Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia sebagai salah satu faktor pembangunan harus dimaksimalkan. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Maros adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan, TPAK Kabupaten Maros menujukkan capaian yang berfluktuatif selama tahun 2020 sampai tahun 2024, Pada tahun 2020 TPAK mencapai 62,43 persen. Adapun tahun 2024 TPAK Kabupaten Maros menurun hingga 61,55 persen.

**Grafik 2.21**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

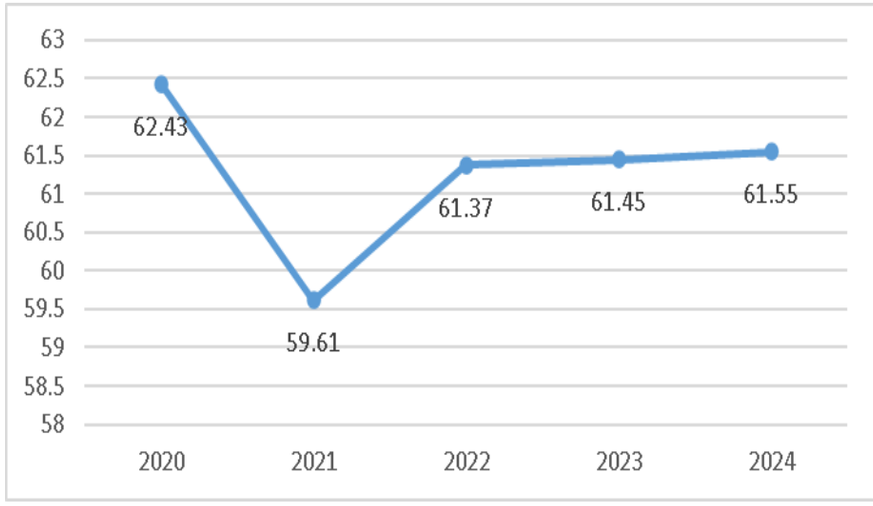


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Peningkatan TPAK pada Tahun 2024 memperlihatkan bahwa penyerapan tenga kerja di Kabupaten maros sudah cukup baik. Banyaknya lapangan kerja yang terbuka baik oleh swasta maupun oleh pemerintah melalui penerimaan Pegawai Dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia, sehingga tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Maros tidak perlu mencari pekerjaan di luar kabupaten Maros.

Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros berada pada posisi ke 22 capaian tertinggi TPAK dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng dengan capaian TPAK 78,39 persen. Sedangkan capaian TPAK terendah berada di Kabupaten Barru, yaitu sebesar 59,32 persen. Gambaran capaian TPAK kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.22**
**Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**
**Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2024**

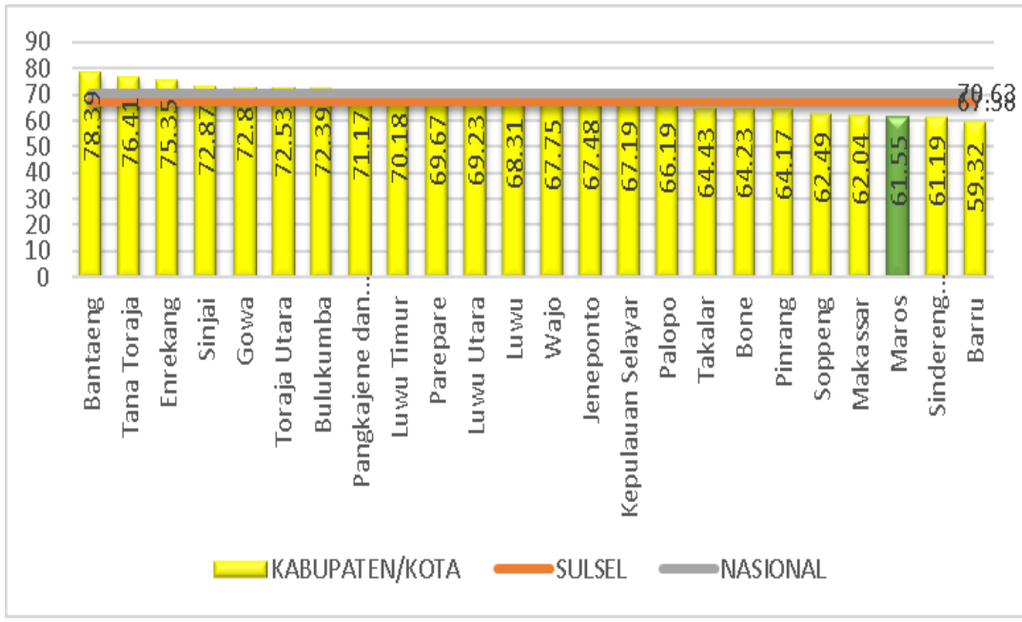


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Capaian TPAK Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kesempatan bekerja bagi angkatan kerja untuk bekerja di Kabupaten Maros masih lebih rendah atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja masih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

**Tabel 2.32**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | KABUPATEN/KOTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 68,18 | 69,07 | 69,93 | 71,88 | 2020 |
| 2 | Bulukumba | 68,26 | 65,46 | 65,27 | 70,78 | 68,18 |
| 3 | Bantaeng | 73,14 | 74,32 | 75,36 | 75,58 | 68,26 |
| 4 | Jeneponto | 68,87 | 67,39 | 75,26 | 66,44 | 73,14 |
| 5 | Takalar | 62,8 | 65,84 | 64,46 | 65,86 | 68,87 |
| 6 | Gowa | 67,62 | 68,89 | 73,16 | 69,63 | 62,8 |
| 7 | Sinjai | 69,9 | 71,91 | 63,34 | 67,16 | 67,62 |
| 8 | Maros | 62,43 | 59,61 | 61,37 | 61,45 | 69,9 |
| 9 | Pangkajene dan Kepulauan | 63,85 | 64,43 | 74,66 | 69,98 | 62,43 |
| 10 | Barru | 57,18 | 58,14 | 62,36 | 62,26 | 63,85 |
| 11 | Bone | 60,57 | 65,67 | 67,48 | 62,69 | 57,18 |
| 12 | Soppeng | 57,05 | 58,94 | 61,90 | 59,44 | 60,57 |
| 13 | Wajo | 65,99 | 64,58 | 61,13 | 65,78 | 57,05 |
| 14 | Sindereng Rappang | 56,92 | 58,7 | 57,63 | 55,49 | 65,99 |
| 15 | Pinrang | 59,11 | 57,78 | 57,72 | 60,51 | 56,92 |
| 16 | Enrekang | 70,8 | 72,64 | 72,05 | 68,09 | 59,11 |
| 17 | Luwu | 61,02 | 64,22 | 67,74 | 68,61 | 70,8 |
| 18 | Tana Toraja | 73,25 | 77,99 | 85,11 | 82,35 | 61,02 |
| 19 | Luwu Utara | 58,61 | 63,07 | 72,23 | 66,98 | 73,25 |
| 20 | Luwu Timur | 72,36 | 73,14 | 71,51 | 69,25 | 58,61 |
| 21 | Toraja Utara | 67,5 | 71,56 | 68,84 | 77,50 | 72,36 |
| 22 | Makassar | 58,05 | 59,70 | 59,27 | 58,72 | 67,5 |
| 23 | Parepare | 65,33 | 66,94 | 63,62 | 65,52 | 58,05 |
| 24 | Palopo | 61,23 | 59,95 | 63,65 | 65,75 | 65,33 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Apabila melihat tren perkembangan TPAK selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024, terlihat bahwa Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menujukkan peningkatan sedangkan Kabupaten Maros menunjukkan tidak signifikan TPAK yang cukup signifikan. Untuk TPAK nasional juga menunjukkan peningkatan pada Tahun 2024.

**Grafik 2.23**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

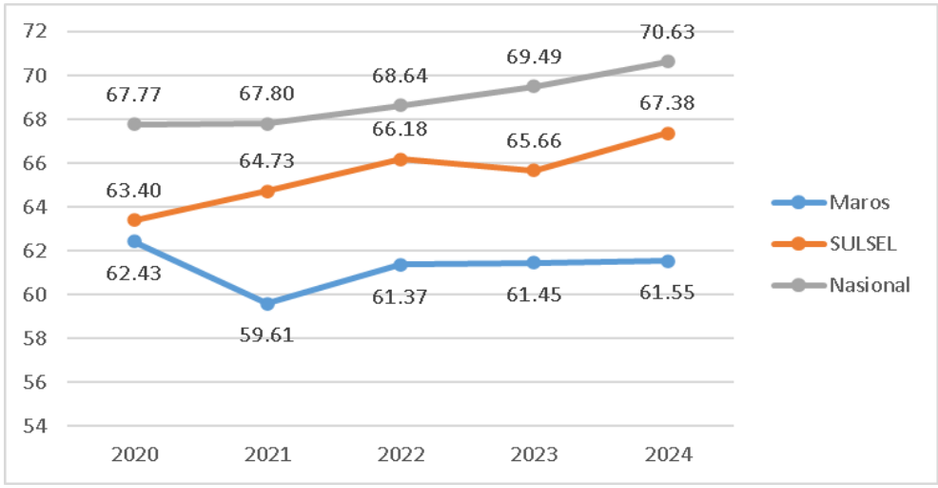


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

### 2.2.2.4.Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.

TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Perkembangan TPT Kabupaten maros menunjukkan tren yang cendrung menurun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Maros sebesar 6,28 persen, kemudian naik pada Tahun 2021 sebesar 6,28. Kemudian tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai 6,3. Namun pada tahun 2023 dengan semakin mengurangnya pandemi serta percepatan akselerasi ekonomi yang digalakkan Pemerintah Daerah, TPT Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 5,04 persen dan Pada Tahun 2024 dengan semakin banyaknya lapangan kerja di buka baik oleh swasta maupun oleh Pemerintah, maka TPT Kabupaten Maros dapat kembali menurun hingga mencapai 4,34 persen.

**Grafik 2.24**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

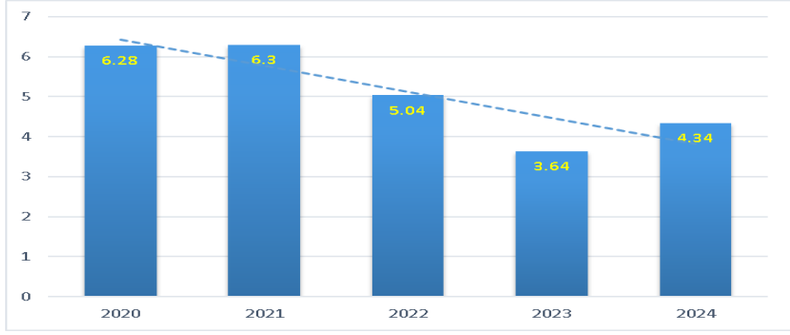


*Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2025*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros berada pada posisi ke-19 tertinggi dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat dibandingkan pada Tahun 2024 (posisi 15 dari 24 kabupaten/Kota). Kabupaten yang memiliki TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar dengan capaian TPT 9,71 persen. Sedangkan capaian TPT terendah berada di Kabupaten Enrekang yaitu sebesar 1,51 persen. TPT Kabupaten Maros tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran capaian TPT kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Pada tahun 2024 TPT menunjukkan peningkatan hingga mencapai 4,34 persen. Hal ini disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Selain itu tingkat Pendidikan tenaga kerja masih berada pada level menegah kebawah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan

**2.2.2.5.Persentase PAD terhadap Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat sesuai usaha atau objeknya.

Pendapatan dari pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 persentase pajak dan retribusi sebesar 57.48%, namun dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan penghasupan beberapa jenis pajak dan retribusi maka sejak tahun 2018 persentase capaian pajak dan retribusi mengalami penurunan.

**Tabel 2.33**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Pajak dan Retribusi Daerah**
**Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Pendapatan Pajak dan Retirbusi Daerah | 125,962,165,046 | 138,745,855,901.67 | 169,394,470,728 | 300,904,517,644 | 302,040,074,230 |
| **2** | Total Pendapatan Asli Daerah | 219,157,661,571 | 303,957,119,011 | 266,637,121,347 | 307,532,402,823 | 307,957,767,197 |
| **3** | **Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah** | 57.48 | 45.65 | 63.53 | 97.84 | 98.08 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, 2025*

Persentase pajak dan retribusi pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 98.08% persen dengan total pendapatan 169 Milyar Rupiah.

**2.2.2.6.Opini Pemeriksaan BPK**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selama 5 (lima) tahun terakhir opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Maros adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan Kabupaten Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

**2.2.2.7. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Layanan terhadap keagamaan meruapakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap masyarakat dan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamnya masing-masing. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Untuk mengukur kualitas pelayanan terkait keagamaan yang dilakukan pemerintah amaka digunakan inidkator Indeks Kepausan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan mengukur Tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan terkait keagamaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur Tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terkait keagamaan.

**Grafik 2.25**
**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

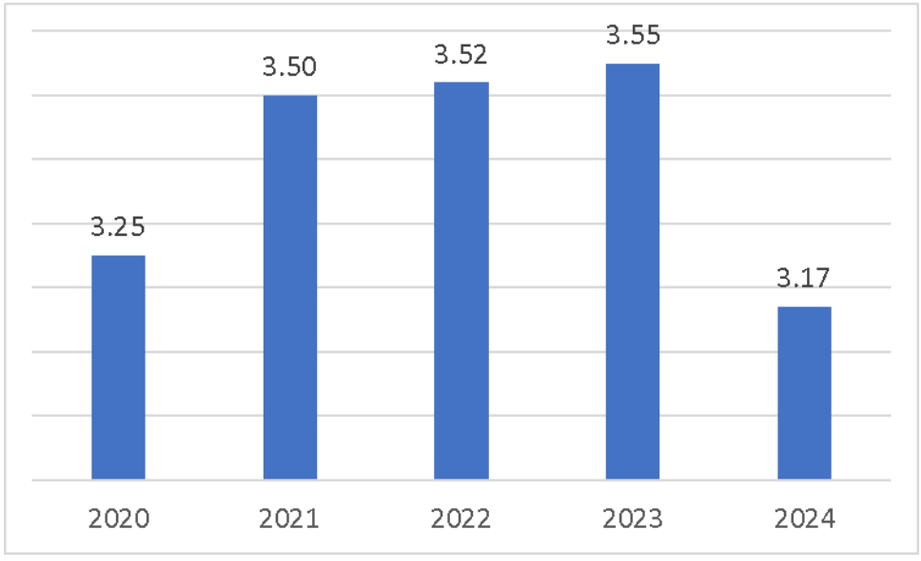


*Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025*

Realisasi IKM Layanan Keagamaan pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2020 nilai IKM sebesar 3,25 poin, kemudian meningkat hingga mencapai 3,52 poin pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 nilai IKM Layanan Keagamaan sebesar 3,54 poin. Pada Tahun 2024 nilai IKM Layanan Keagamaan sebesar 3,77 poin.Realisasi IKM layanan keagaaman di kabupaten Maros Tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Maros telah mndapatkan layanan keagamaan dengan baik oleh pemerintah, dan masyarakat telah puas dengan layanan yang diberikan.

**2.2.2.8. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan**

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk menilai jumlah, komposisi, dan ketersediaan pangan. PPH didasarkan pada proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, dengan mempertimbangkan daya terima, ketersediaan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH bertujuan untuk memastikan bahwa komposisi kelompok pangan utama dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, dan semakin tinggi skornya, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. PPH dapat dihitung dengan mengalikan persentase kontribusi energi aktual dengan bobot, membandingkan skor AKG dengan skor maksimum, dan menggunakan data primer dari survei konsumsi pangan dan data sekunder dari survei sosial ekonomi nasional.

**Grafik 2.26**
**Skor Pola Pangan Harapan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

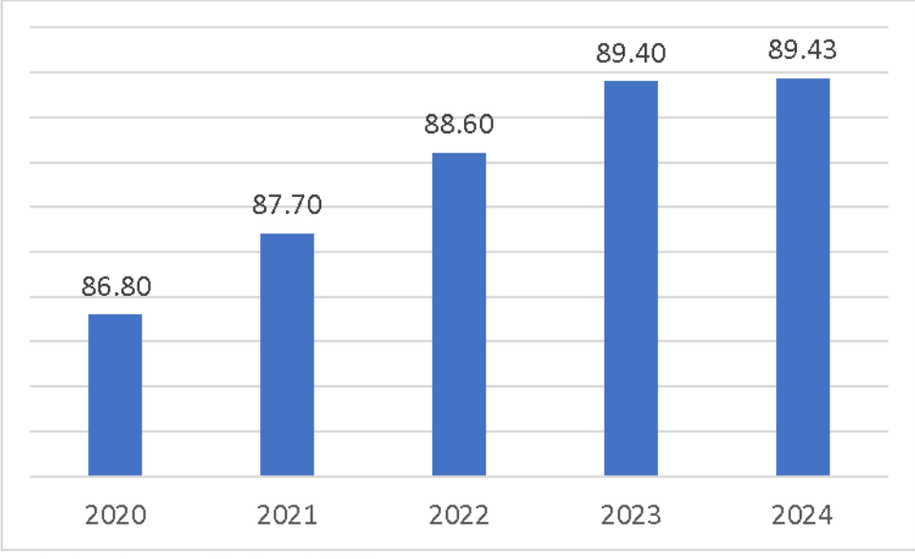


*Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025*

Pencapaian skor PPH menunjukkan peningkatan selama tahun 2020 hingga 2024, Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pola konsumsi pangan masyarakat Maros, mendekati skor ideal PPH yaitu 100. Peningkatan ini banyak disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan intervensi seperti; program yang mendorong konsumsi berbagai jenis pangan lokal, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran, selain itu kampanye dan penyuluhan mengenai pentingnya gizi seimbang juga memiliki peran yang cukup penting, serta peningkatan infrastruktur dan distribusi pangan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai jenis bahan pangan.

### 2.2.2.9. Seni Budaya Dan Olahraga

#### 2.2.2.9.1. Seni Budaya

Penyelenggaraan seni dan budaya merupakan upaya penting dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya serta karya seni di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan dan memajukan seni dan budaya kepada masyarakat luas. Berikut adalah cakupan utama dalam penyelenggaraan seni dan budaya:

Seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit dipisahkan. Karena di setiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas, begitu juga sebaliknya pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni.Penyelenggaraan festival seni dan budaya terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Setiap tahun diselenggarakan 3-4 kali festival budaya. Pada tahun 2020 sebanyak 4 kali kemudian pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penyelenggaraan seni budaya menjadi 8 kali. Untuk tahun 2024 meningkat menjadi 9 kali.

**Tabel 2.34**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 |

Sumber : Disdikbud Kab. Maros, 2025

**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan lainnya.

Benda, Situs dan kawasan yang dilestarikan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahu 2021 jumlah item yang telah dilestarikan sebanyak 157 item, sehingga benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 38,20%. Pada tahun 2024 kawasan cagar budaya yang dilestarikan naik sebesar 69.72%.

**Tabel 2.35**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 157 | 94 | 187 | 233 | 251 |
| 2 | Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 411 | 411 | 335 | 386 | 360 |
| 3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%) | 38.20 | 22.87 | 55.82 | 60.36 | 69.72 |

***Sumber: Disdikbud Kab. Maros, 2025***

**Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi**

Untuk menyandang predikat cagar budaya, suatu benda yang diduga cagar budaya harus melalui serangkaian proses sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Proses tersebut meliputi pendaftaran, pengkajian, dan akhirnya penetapan. Selain itu, cagar budaya juga harus melewati proses pemeringkatan

Pada tahun 2020 karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi sebanyak4 item. Pada tahun 2024 terdapat 7 karya budaya dilakukan inventarisasi karya budaya.peningkatan ini terjadi karena makin banyaknya kegiatan revitalisasi oleh tim cagar budaya yang telah dibentuk oleh dinas terkait.

**Tabel 2.36**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |

Sumber : Dinas P & K Kab. Maros, 2025

**Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sejak tahun 2020 sebanyak 83 cagar budaya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 bertambah menjadi 94 cagar hudaya. Pada tahun 2024 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara sebesar 251.

**Tabel 2.37**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | 83 | 94 | 94 | 233 | 251 |

***Sumber : Dinas P & K Kab. Maros, 2024***

**2.2.2.9.2 Olahraga**

Pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet, tim, dan olahraga secara keseluruhan. Berikut adalah cakupan utama dalam pembinaan olahraga:

Jumlah cabang olahraga yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan KONI kabupaten Maros sampai tahun 2026 berjumlah 36 cabang sehingga cakupan pembinaan olahraga mencapai 100%. Ke-36 cabang olahraga tersebut telah mendapatkan pembinaan baik secara materi maupun pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2.38**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah cabang olahraga yang dibina | | 27 | 27 | 37 | 36 | 36 |

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah seluruh cabang olagraha yang ada/terdaftar | | 27 | 27 | 37 | 36 | 36 |
| 3 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber *: Dispora Kab. Maros, 2024*

**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**

Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Untuk menjadi pelatih yang resmi dan mendampingi olahragawan atau kelompok olahragawan dalam suatu pertandingan, pelatih tersebut haruslah memiliki sertifikat/lisensi kepelatihan.

**Tabel 2.39**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pelatih bersertifikat | | 77 | 77 | 77 | 157 | 151 |
| 2 | jumlah seluruh pelatih | | 77 | 77 | 77 | 157 | 151 |
| 3 | Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

***Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025***

Jumlah pelatih seluruh cabang olahraga di Kabupaten Maros sampai tahun 2024 sebanyak 151 orang. Keseluruhan pelatih tersebut telah memiliki sertifikat sehingga cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Maros sebesar 100%.

**Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Atlet adalah seseorang yang mahir dalam berolahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Pembinaan terhadap atlit muda pada tahun 2020 hingga mencapai 10,61% dengan jumlah atlet yang dibina sebanyak 45 orang. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan kegiatan pembinaan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 jumlah atlet pelajar yang dibina sebesar 15,63%.

**Tabel 2.40**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Sat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah atlet pelajar yang dibina | | 45 | 46 | 70 | 55 | 55 |
| 2 | jumlah seluruh atlet pelajar | | 424 | 424 | 500 | 352 | 352 |
| 3 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | % | 10.61 | 10.85 | 14.00 | 15.63 | 15.63 |

Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025

**Jumlah Atlet Berprestasi**

Jumlah atlet yang berprestasi dalam hal ini adalah atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional. Kabupaten Maros memiliki 2 orang atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat nasional dan internasional. Sedangkan untuk tingkat regional atau Provinsi, jumlah atlet yang berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 terdapat 114 orang atlet yang memiliki prestasi pada tingkat propinsi dan nasional . Pada tahun 2023 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3 orang.

Jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional masih sangat kurang, hal ini disebabkan masih sangat minimnya sarana dan prasarana olahraga, khususnya di Kabupaten Maros yang memiliki standar untuk meningkatkan prestasi. Selain itu keberlanjutan pembinaan dan prestasi atlet hingga mencapai level nasonal juga belum berjalan dengan baik.

**Tabel 2.41**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Sat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah atlet yang memenagi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun | | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 2 | Jumlah atlet yang memenagi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun | | 33 | 41 | 108 | 8 | |
| 3 | Jumlah Atlet Berprestasi | Orang | 35 | 43 | 114 | 11 | |

Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025

**Persentase Cabang Olahraga Berprestasi**

Persentase cabang olahraga berprestasi mengacu pada proporsi cabang olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu di tingkat nasional atau internasional dibandingkan dengan total cabang olahraga yang ada. Untuk menghitung persentase ini, kita memerlukan data spesifik tentang jumlah cabang olahraga yang berprestasi dan jumlah total cabang olahraga yang diakui. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2020 persentase sebesar 35.56%. Pada tahun 2024 turun sebesar 23.08%. Kecilnya presentase cabang olahraga yang berprestasi lebih disebabkan jumlah *even* olahraga yang diselenggarakan sangat kurang pada tahun tersebut.

**Tabel 2.42**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Persentase Cabang Olahraga Berprestasi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Sat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun | | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Jumlah seluruh cabor | | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 3 | Persentase cabor berprestasi | % | 35.56 | 44.44 | 44.44 | 23.08 | 23.08 |

Sumber *: Dispora Kab. Maros, 2025*

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2025*

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

##### 2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Pada tahun 2020 pendidikan anak usia dini Kabupaten Maros sebesar 53,23 % dengan jumlah siswa sebanyak 11.432 orang, kemudian

pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 72,06 % dengan jumlah siswa sebanyak 15.685. Pada tahun 2022 terdapat pendurunan anak yang mengikuti pendidikan usia dini, jumlah siswa pada tahun 2022 sebanyak 13.015 orang dengan persentase sebesar 85.32 %. Secara umum partisipasi anak-anak pada pendidikan anak usia dini sangat tinggi, rata-rata anak yang mengikuti hanya 14 ribu anak dari 21 ribu penduduk usia 4-6 tahun. Hal ini disebabkan makin banyaknya fasilitas sekolah yang telah dibangun serta makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Sementara untuk capaian SPM Pendidikan anak usia dini pada tahun 2024 adalah 99.40 %

**Tabel 2.43**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Maros 2020 - 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jumlah siswa pada jenjang TK/RA/PA | 11,432 | 15,685 | 13,015 | 14,820 | 15,346 |
| 2 | Jumlah anak usia 5 - 6 tahun | 21,475 | 21,767 | 15,272 | 15,392 | 15,832 |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) | 53.23 | 72.06 | 85.22 | 96.28 | 96.93 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

**Tabel 2.44**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Per Kecamatan Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PESERTA DIDIK TK & KB (NEGERI & SWASTA) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | TOTAL |
| 1 | MANDAI | 1,025 | 993 | 2,018 |
| 2 | CAMBA | 171 | 179 | 350 |
| 3 | BANTIMURUNG | 592 | 620 | 1,212 |
| 4 | MAROS BARU | 588 | 587 | 1,175 |
| 5 | BONTOA | 600 | 596 | 1,196 |
| 6 | MALLAWA | 145 | 160 | 305 |
| 7 | TANRALILI | 667 | 752 | 1,419 |
| 8 | MARUSU | 741 | 763 | 1,504 |
| 9 | SIMBANG | 398 | 435 | 833 |
| 10 | CENRANA | 206 | 219 | 425 |
| 11 | TOMPOBULU | 266 | 276 | 542 |
| 12 | LAU | 562 | 565 | 1,127 |
| 13 | MONCONGLOE | 466 | 436 | 902 |
| 14 | TURIKALE | 942 | 870 | 1,812 |
| **JUMLAH** | | **7,369** | **7,451** | **14,820** |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

### 2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM mengukur partisipasi penduduk standar usia dijenjang pendidikan tertentu dengan standar usia siswa dijenjang tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK terhitung 1 januari 2018 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi pendidikan pada usia sekolah tertentu. Di Indonesia, meskipun APM pada tingkat SD cukup tinggi, masih ada tantangan dalam mempertahankan partisipasi pada tingkat SMP dan SMA. Upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan setara. Informasi lebih rinci dan data terbaru tentang APM dapat diakses melalui publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Perkembangan APM Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 - 2024, walaupun peningkatannya tidak terlalu signfikan. Angka APM pada tahun 2020 untuk tingkat sekolah SD/MI sebesar 93,67 persen kemudian meningkat pada tahu 2024 sebesar 102.92 persen. Untuk tingkat pendidikan SMP/Mts juga mengalami trend kenaikan dari 74,57 % pada tahun 2020 menjadi 102,34 % pada tahun 2024.

Upaya Meningkatkan APM di Kabupaten Maros anataralain dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan memperbaiki fasilitas yang ada. Program beasiswa, bantuan sekolah, dan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meringankan beban biaya pendidikan. Seryta program kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.

**Grafik 2.28**
**Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

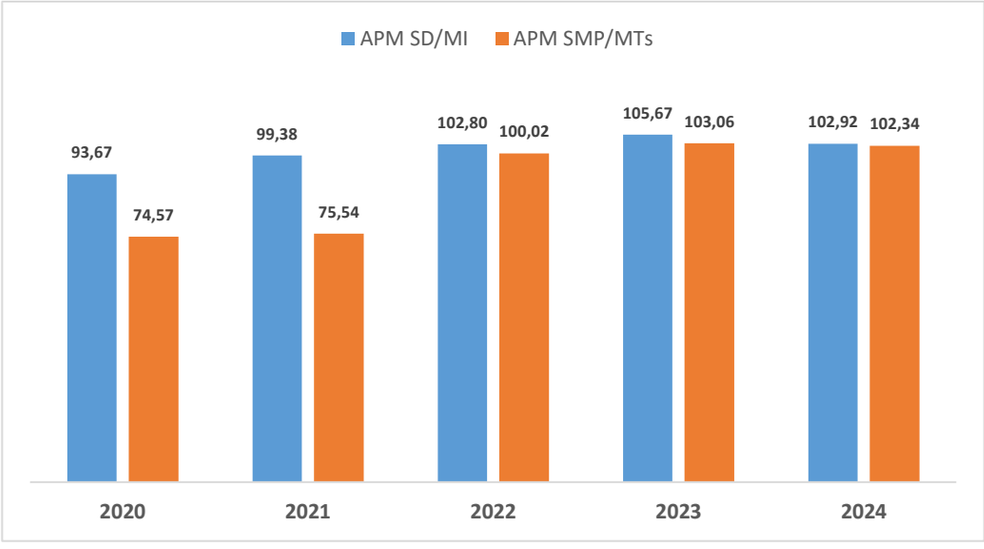


Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025

#### 2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan dijenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat Pendidikan, sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia penduduk tersebut. APK dihitung sebagai rasio antara jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tersebut, kemudian dikalikan dengan 100%.

Perkembangan APK Kabupaten Maros menujukkan tren yang berbeda. Pada tahun 2020 APK Kabupaten Maros sebesar 89.25 persen. Pada tahun 2023 meningkat dengan persentase sebesar 107,70 persen. Kemudain pada tahun 2024 menurun sedikit menjadi 102 %. Data ini mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan yang cukup tinggi di jenjang dasar, namun mengalami penurunan pada jenjang menengah atas. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses, masalah ekonomi, dan lainnya yang mungkin menghambat keberlanjutan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.

**Grafik 2.29**
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Maros Tahun 2020 - 2024**
**Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025**

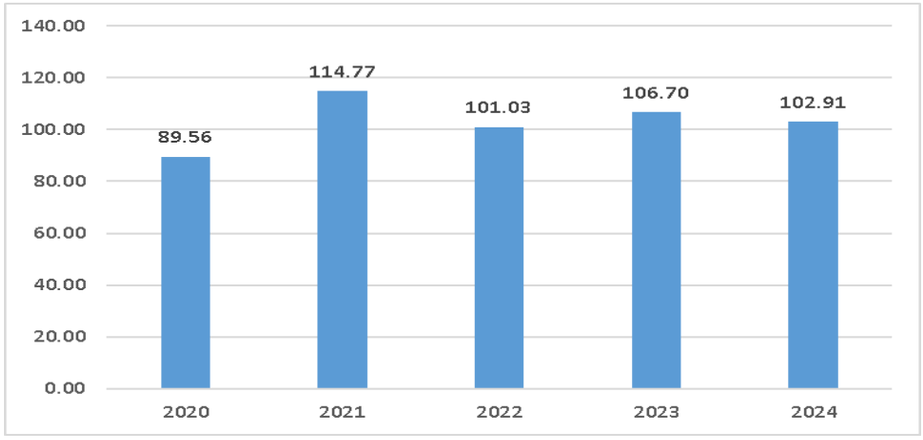


*Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025*

#### 2.3.1.1.4 Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) adalah jumlah siswa yang lulus ujian jenjang tertentu terhadap jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. AM merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur rata-rata lama sekolah antar jenjang pendidikan. Angka melanjutkan (AM) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian.

Angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2021 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 106 %, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 98 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat siswa sekolah SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sementara pada tahun 2024 persentase siswa SD/Mi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjunya naik menjadi 103, 71 %. Sedangkan AM dari tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga menunjukkan angka yang berfluktiatif, dimana pada tahun 2021 AM SMP/MTs sebesar 104,84 % kemudian pada tahun 2022 menurun hingga mencapai 99%. Pada tahun 2024 AM SMP/MTs mencapai 101,84%,. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa baik itu sisa jenjang SD sampai SMP dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya.Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros selama tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.30**
**Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2021-2024**

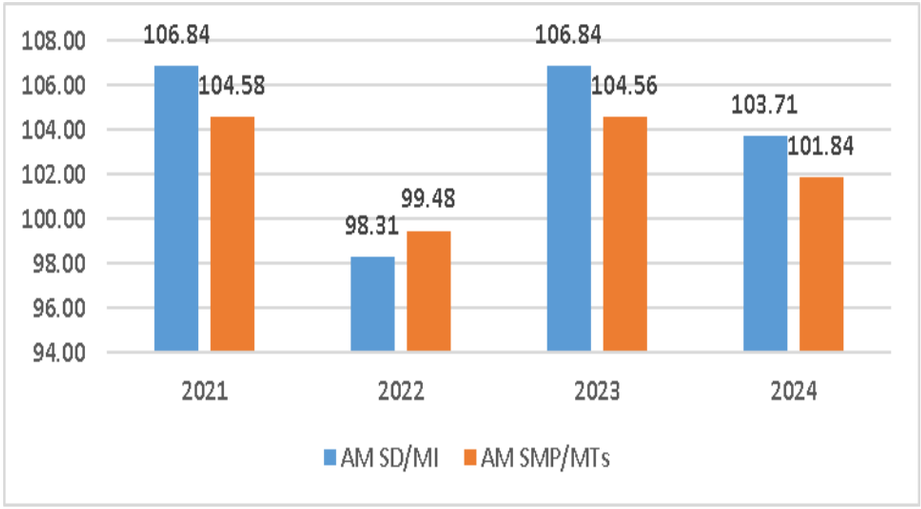


*Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025*

#### 2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) adalah indikator yang mengukur proporsi siswa yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya dalam sistem pendidikan. APS dinyatakan dalam persentase. APS yang tinggi menunjukkan banyaknya siswa yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan mereka, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi, sosial, atau lingkungan.

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan. Pada tahun 2020, APS SD Kabupaten Maros sebesar 0,29 % kemudian meingkat hingga 0,47% pada tahun 2021 kemudian menurun Kembali pada tahun 2024 sebesar 0,03%.Sedangkan APS SMP Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,11% kemudian mencapai 0,28% pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2024 kembali menurun dengan angka sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya baik pada tingkat SD maupun pada tingkat SMP, meski trendnya megalami penurunan.

**Grafik 2.31**
**Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

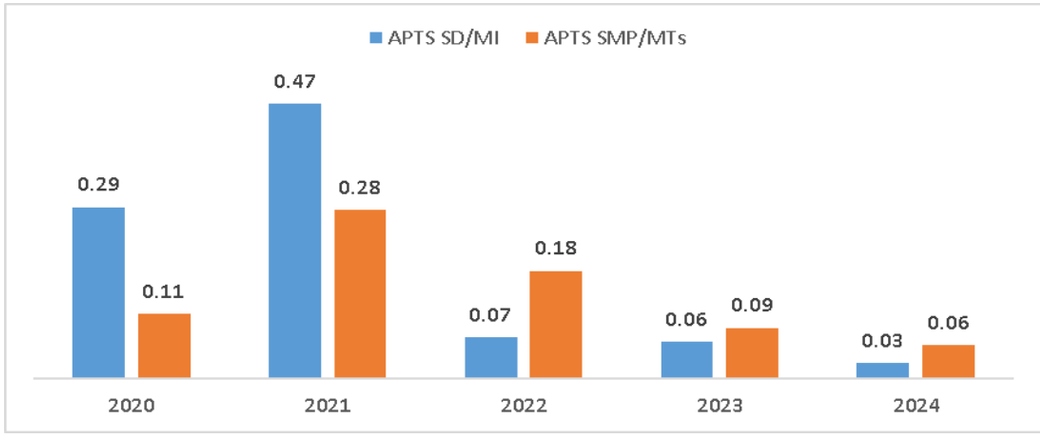


*Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Maros Tahun 2025*

#### 2.3.1.1.6 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase siswa pada tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Angka kelulusan untuk tingkat pendidikan dasar menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dimana pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan persentase diatas 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa hamper seluruh siswa dapat memahami materi pendidikan yang diberikan, walaupun pada tahun 2020 akibat adanya pendemi COVID-19, ujian kelulusan untuk seluruh tingkatan pendidikan dsar ditiadaka. dimana tingkat kelulusan hanya berpatokan kepada nilai angka tertinggi yang diperoleh siswa tersebut.

**Tabel 2.45**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Angka Kelulusan Kabupaten Maros Tahun 2020-2025**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kelulusan pada jenjang SD/MI | 6,820 | 6,922 | 6,473 | 5,909 | 4,420 |
| 2 | Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya | 6,841 | 7,052 | 6,473 | 5,909 | 4,420 |
| 3 | AL SD/MI | 99.69 | 98.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Jumlah kelulusan pada jenjang SMP/MTs | 6,430 | 6,403 | 6,453 | 4,978 | 3,105 |
| 5 | Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya | 6,434 | 6,403 | 6,462 | 4,978 | 3,105 |
| 6 | AL SMP/MTs | 99.94 | 100.00 | 99.86 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | AL MAROS | 99.82 | 99.08 | 99.93 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2024*

#### 2.3.1.1.7 Angka Pendidikan Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT Kabupaten MAros pada tahun 2020 sebesar 65.14 %, kemudian menurun hingga mencapai 59,42 % pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terdapat peurunan APT dengan persentase sebesar 52,93 %. Dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 52,70%.

**Tabel 2.46**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan | 166,512 | 160,724 | 158,831 | 182,688 | 163,099 |
| 2 | Jumlah Penduduk 15 keatas | 255,609 | 270,474 | 300,085 | 308,278 | 309,510 |
| 3 | Angka Pendidikan Yang Ditamatkan | 65.14 | 59.42 | 52.93 | 59.26 | 52.70 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

#### 2.3.1.1.8 Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat Pendidikan Dasar. Data ketersediaan sekolah pada tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Maros tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Kabupaten Maros**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik | 281 | 212 | 263 | 264 | 269 |
| 2 | Jumlah sekolah seluruh SD/MI | 292 | 268 | 271 | 271 | 276 |
| 3 | Sekolah SD/MI dalam kondisi baik | 96.23 | 79.10 | 97.05 | 97.42 | 97.46 |
| 4 | Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik | 117 | 101 | 119 | 119 | 123 |
| 5 | Jumlah sekolah seluruh SMP/MTs | 122 | 119 | 121 | 121 | 125 |
| 6 | Sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik | 95.59 | 84.87 | 98.35 | 98.35 | 98.40 |
| 7 | Fasilitas pendidikan dalam kondisi baik | 95.91 | 81.99 | 97.70 | 97.88 | 97.93 |
| | Jumlah Sekolah | 414 | 387 | 392 | 392 | 401 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

**Tabel 2.48**
**Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Per Kecamatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | KECAMATAN | Jumlah Sekolah Kondisi Baik | |
|---|---|---|---|
| | | SD | SMP |
| 1 | MANDAI | 23 | 13 |
| 2 | CAMBA | 19 | 8 |
| 3 | BANTIMURUNG | 28 | 11 |
| 4 | MAROS BARU | 16 | 8 |
| 5 | BONTOA | 23 | 8 |
| 6 | MALLAWA | 18 | 4 |
| 7 | TANRALILI | 18 | 6 |
| 8 | MARUSU | 14 | 8 |
| 9 | SIMBANG | 21 | 9 |
| 10 | CENRANA | 21 | 6 |
| 11 | TOMPOBULU | 17 | 11 |
| 12 | LAU | 14 | 12 |
| 13 | MONCONGLOE | 9 | 7 |
| 14 | TURIKALE | 28 | 12 |
| | JUMLAH | 269 | 123 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

#### 2.3.1.1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa untuk setiap gedung sekolah menampung sekitar 173 jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dengan rata-rata 23 orang per kelas. Rasio ini menunjukkan trend yang fluktuatif selama tahun 2020 - 2024. Hingga tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) sebesar 1 : 145, dengan rata-rata 24 orang per kelas.

**Tabel 2.49**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Maros**
**Tahun 2020-2024**

| NO | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Gedung Sekolah | 292 | 268 | 271 | 271 | 276 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun | 42,368 | 44,248 | 44,592 | 46,225 | 46,950 |
| 1.3 | Rasio | 145 | 165 | 165 | 171 | 170 |
| 2 | SMP / MTs | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Gedung Sekolah | 122 | 119 | 121 | 121 | 125 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun | 24,745 | 21,269 | 21,614 | 22,120 | 22,263 |
| 2.3 | Rasio | 203 | 179 | 179 | 183 | 178 |
| 2.4 | Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Pendidikan Dasar | 173.96 | 171.92 | 171.59 | 176.69 | 174.11 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

Rasio ketersediaan SD tahun 2024 sedikit lebih tinggi dikarenakan adanya regrouping yang dilakukan pada tahun 2024, dimana terdapat beberapa sekolah yang dipisahkan dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Secara umum ketersediaan SD tahun 2024 di Kabupaten Maros masih cukup memadai meski begitu terdapat kenakan trend rasio sekolah dari tahun 2020 sampai 2024 yang mengindikasikan perlunya penambahan jumlah sekolah dasar. Hal yang sama untuk sekolah SMP, meski mengalami penurunan di tahun 2020 namun pada tahun 2023 mengalami trend dari 179 menjadi 183 di tahun. Secara umum trend rasio sekolah di kabupaten Maros stabil dari tahun 2020 yang sebesar 1 : 173 menjadi 1 : 174 di tahun 2024 .

#### 2.3.1.1.10 Ketersediaan Sekolah Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan Gedung sekolah, kondisi fasilitas pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Pendidikan. Sekolah SD/MI maupun SMP/MTs dalam kondisi baik, meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah kondisi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dalam keadaan baik sebesar 95,91% kemudian meningkat hingga mencapai 97,93% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan utamanya sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Kondisi sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.50**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik | 281 | 212 | 263 | 264 | 269 |
| 2 | Jumlah sekolah seluruh SD/MI | 292 | 268 | 271 | 271 | 276 |
| 3 | Sekolah SD/MI dalam kondisi baik | 96.23 | 79.10 | 97.05 | 97.42 | 97.46 |
| 4 | Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik | 117 | 101 | 119 | 119 | 123 |
| 5 | Jumlah sekolah seluruh SMP/MTs | 122 | 119 | 121 | 121 | 125 |
| 6 | Sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik | 95.59 | 84.87 | 98.35 | 98.35 | 98.40 |
| 7 | Fasilitas pendidikan dalam kondisi baik | 95.91 | 81.99 | 97.70 | 97.88 | 97.93 |
| | Jumlah Sekolah | 414 | 387 | 392 | 392 | 401 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

#### 2.3.1.1.11 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid Kabupaten

Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 0,073 artinya terdapat 746 guru untuk setiap 10.000 murid atau 1 orang guru menangani 13 orang murid. Pada tahun 2024, rasio guru terhadap murid mencapai 0,074 artinya terdapat 711 guru untuk setiap 10.000 orang murid atau 1 guru menangani 14 orang murid. Secara umum kondisi rasio guru terhadap murid di Kabupaten Maros tergolong ideal (baik), dikarenakan rasio guru terhadap murid yang seimbang

adalah 1 orang guru berbanding 20 murid. Rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.51**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Rasio Guru Terhadap Murid Di Kab. Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **SD** | | | | | |
| 1 | Jumlah Guru | 2,361 | 3,415 | 2,893 | 2,692 | 2,205 |
| 2 | Jumlah Murid | 42,368 | 47,140 | 45,841 | 48,845 | 48,320 |
| **3** | **Rasio** | **18** | **14** | **16** | **18** | **22** |
| II | SMP | | | | | |
| 1 | Jumlah Guru | 1,095 | 1,091 | 2,001 | 1,165 | 1,005 |
| 2 | Jumlah Murid | 19,576 | 24,442 | 20,391 | 22,797 | 22,784 |
| **3** | **Rasio** | **18** | **22** | **10** | **20** | **23** |
| **3** | **Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar** | **18** | **18** | **13** | **19** | **22** |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

**Tabel 2.52**
**Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020**

| NO | KECAMATAN | Jumlah Guru SD | | Jumlah Siswa | | Rasio Guru dan Siswa SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SMP | 7-12 | 13-15 | SD | SMP |
| 1 | MANDAI | 194 | 135 | 6,150 | 3,012 | 32 | 22 |
| 2 | CAMBA | 134 | 67 | 1,287 | 1,121 | 10 | 17 |
| 3 | BANTIMURUNG | 210 | 94 | 3,808 | 1,816 | 18 | 19 |
| 4 | MAROS BARU | 159 | 62 | 3,455 | 1,393 | 22 | 22 |
| 5 | BONTOA | 193 | 63 | 3,557 | 1,426 | 18 | 23 |
| 6 | MALLAWA | 118 | 37 | 1,421 | 569 | 12 | 15 |
| 7 | TANRALILI | 211 | 38 | 4,069 | 1,443 | 19 | 38 |
| 8 | MARUSU | 165 | 72 | 4,619 | 1,682 | 28 | 23 |
| 9 | SIMBANG | 152 | 65 | 2,833 | 1,380 | 19 | 21 |
| 10 | CENRANA | 128 | 51 | 1,514 | 676 | 12 | 13 |
| 11 | TOMPOBULU | 104 | 35 | 2,132 | 1,544 | 21 | 44 |
| 12 | LAU | 141 | 106 | 3,818 | 2,406 | 27 | 23 |
| 13 | MONCONGLOE | 102 | 61 | 2,981 | 1,209 | 29 | 20 |
| 14 | TURIKALE | 194 | 119 | 6,676 | 3,107 | 34 | 26 |
| | JUMLAH | 2,205 | 1,005 | 48,320 | 22,784 | 22 | 23 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

### 2.3.1.1.12 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru, siswa dengan jumlah kelas atau kelompok belajar. Indikator ini mempunyai kegunaan untuk mengetahui rata-rata daya tampung guru dan siswa dalam satu kelas. Rasio guru/murid terhadap kelas rata-rata di Kabupaten Maros menunjukkan angka yang terbilang ideal,meskipun terdapat kenaikan rasio dari 1:19 di tahun 2023 menjadi 1 : 22 di tahun 2024.sementara rasio murid kelas juga menunjukkan angka yang ideal dari tahun 2020 yang berjumah 31 dan 2024 yang berjumlah 35 , ini menunjukkan peningkatan jumlah ruangan kelas mampu mengimbangi peingkatan jumlah

murid. Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.53**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah guru sekolah pendidikan dasar | 3,456 | 4,506 | 4,894 | 3,857 | 3,210 |
| 2 | jumlah murid pendidikan dasar | 61,944 | 71,582 | 66,232 | 71,642 | 71,104 |
| 3 | Jumlah Kelas | 1,980 | 2,468 | 1,724 | 2,299 | 2,031 |
| | Rasio Guru / Murid | 18 | 16 | 14 | 19 | 22 |
| | Rasio Murid / Kelas | 31 | 29 | 38 | 31 | 35 |
| 4 | Rasio Guru/Murid Per Kelas rata-Rata Sekolah Dasar | 0.57 | 0.55 | 0.35 | 0.60 | 0.63 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

#### 2.3.1.1.13 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Melek huruf adalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Angka melek huruf Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf sebesar 99,8%, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan seluruh penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Tingginya angka melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros disebabkan karena hampir seluruh penduduk pada usia tersebut telah mengenyam pendidikan terkahir setingkat SD, dimana pada tingkatan sekolah tersebut, setiap siswa diwajibkan memiliki kemampuan baca tulis. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.54**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyaknya penduduk usia 15-24 yang melek huruf | 64,652 | 64,863 | 56,811 | 61,829 | 62,977 |
| 2 | Banyaknya penduduk usia 15-24 | 64,733 | 64,974 | 56,908 | 61,875 | 62,977 |
| 3 | Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki) | 99.88 | 99.83 | 99.83 | 99.93 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

#### 2.3.1.1.14 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun adalah jumlah penduduk berumur diatas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis dengan lancar dan jelas. Seperti halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Maros juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka melek huruf sebesar 99,80% kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 98,49%. Penurunan ini disebabkan terdapat beberapa orang penduduk usia 75 tahun keatas yang tidak memiliki kemampuan baca tulis dan tidak dapat lagi mengikuti pendidikan kesetaraan disebabkan umur dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.55**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah capaian kinerja penduduk berusia > 15 tahun melek huruf se Kabupaten maros | 254,604 | 271,907 | 278,627 | 287,887 | 290,129 |
| 2 | Jumlah penduduk berusia > 15 tahun melek huruf se Kabupaten maros | 255,114 | 276,062 | 285,645 | 288,625 | 290,228 |
| 3 | Penduduk Usia > 15 Tahun melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | 99.80 | 98.49 | 97.54 | 99.74 | 99.97 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

#### 2.3.1.1.15 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah tingkat pendidikan setiap guru yang telah menempuh jenjang S1 dan D-IV. Pada tahun 2020 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 90,25 %. Sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga 88,29 %. Meskipun terdapat pengurangan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi, akan tetapi secara rata rata sebagian besar Guru di Kabupaten Maros telah memenuhi kualifikasi , meskipun begitu kedepan guna meningkatkan kualitas pembelajaran perlu memaksimalkan jumlah guru berkualifikasi S1 sampai dengan 100 %

**Tabel 2.56**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**
**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV | 3119 | 2,979 | 4,654 | 3,701 |
| 2 | Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) | 3,456 | 4,315 | 5,330 | 4,192 |
| 3 | **Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV** | 90.25 | 69.04 | 87.32 | 88.29 |

*Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maros 2025*

### 2.3.1.2 Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga atau kelompok atau masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

#### 2.3.1.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan persentase bayi yang lahir hidup dan bertahan hidup hingga usia satu tahun. AKHB dihitung sebagai kebalikan dari Angka Kematian Bayi (AKB). Jadi, jika AKB adalah jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, maka AKHB adalah 1.000 dikurangi AKB, dinyatakan dalam persentase.

**Grafik 2.31**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kab. Maros Tahun 2020-2024**

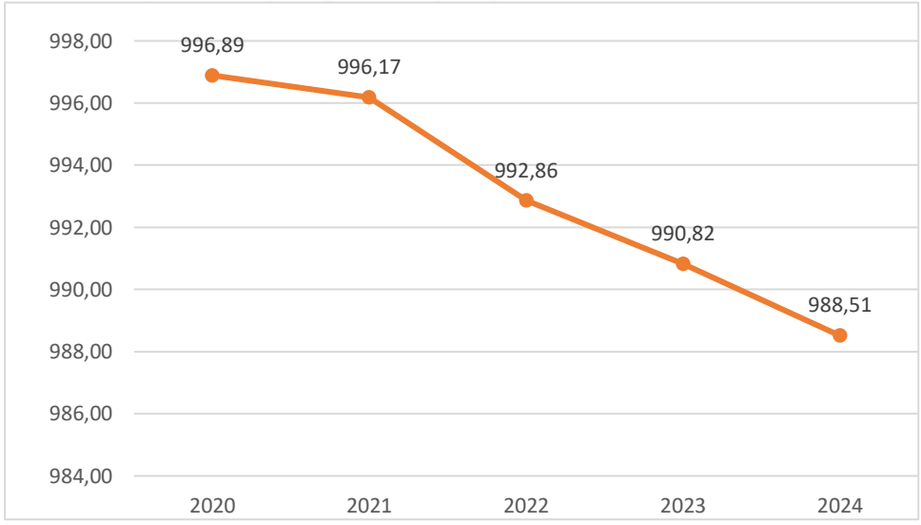


*Sumber : Dinas Kesehatan 2025*

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah jumlah bayi yang lahir hidup per 1000 kelahiran bayi. Kondisi AKHB di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 995,54 bayi lahir hidup dari 1000 bayi yang lahir, kemudian menurun sedikit menjadi 988,51 kelahiran hidup setiap 1.000 bayi yang lahir di tahun 2024. Hal ini menunjukkan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi kesehatan ibu mengandung cukup baik sehingga angka kematian bayi dapat ditekan. Dengan demikian angka kelahiran hidup bayi cukup tinggi. Beberapa intervensi yang dilakukan diantaranya pemberian vitamin dan peningkatan gizi, baik pada ibu yang mengandung maupun kepada bayi baru lahir. Di samping itu, tingkat kecukupan bidan dan polindes, kecukupan dokter dan puskesmas di tingkat kecamatan terus mendapat perhatian. Gambaran perkembangan angka kelangsungan hidup bayi selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik diatas.

#### 2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Angka ini

digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesehatan, nutrisi, dan kondisi sosial-ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 64 balita per 1000 anak umur 0-4 tahun, denga n jumlah balita yang meninggal sebanyak 59 orang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari angka kematian bayi pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020, Angka Kematian Balita sekitar 7 balita/1000 kelahiran hidup, dengan jumlah balita yang meninggal sekitar 34 orang.

Penurunan angka kematian balita ini disebabkan program pemberian gizi dan imunisasi yang lengkap kepada balita berjalan dengan baik, dimana ibu dan balita tersebut diberikan akses yang seluas-luasnya oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendapatkan imunisasi lengkap serta gizi tambahan melalui pelayanan di puskesmas maupu di posyandu. Gambaran perkembangan angka kematian bayi Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.57**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kematian balita (berumur kurang dari 5 tahun) pada satu tahun tertentu | 23 | 27 | 43 | 63 | 64 |
| **2** | Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu | 7,511 | 6,797 | 6,581 | 6,426 | 5,397 |
| **3** | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | 3.11 | 3.97 | 6.53 | 9.80 | 11.86 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.3 Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah indikator yang menunjukkan jumlah kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. AKN adalah salah satu indikator penting untuk menilai kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta kondisi kesehatan masyarakat secara umum.

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setalah dilahirkan. Umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian neonatal sebagian besar terjadi pada jarak kelahiran dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 12 bulan. Di samping itu bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram juga beresiko mengalami kematian neonatal. Untuk mengurangi resiko terjadinya kematian neonatal perlu dilakukan pembinaan dan intervensi pada ibu hamil yang berpendidikan rendah, serta pembinaan untuk mengatur jarak kelahiran lebih dari 12 bulan.

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Maros menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 AKN sebesar 2 balita setiap 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 21 bayi. Sedangkan pada tahun 2024, AKN Kabupaten Maros sekitar 10 balita per 1.000 kelahiran, dengan jumlah bayi yang

meninggal sebanyak 57 bayi. Perkembangan angka kematian neonatal Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.58**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 Bulan) pada satu tahun tertentu | 21 | 22 | 41 | 59 | 57 |
| 2 | Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu | 7.511 | 6.797 | 5,630 | 6,426 | 5,397 |
| 3 | Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup | 2,82 | 3,24 | 7.28 | 9.18 | 10.56 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.4 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembianaan teknis dari petugas kesehatan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Keberadaan Posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat, maka diharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani tidak lebih dari 100 balita.

**Tabel 2.59**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah posyandu | 506 | 421 | 422 | 422 | 425 |
| 2 | Jumlah balita | 42,238 | 30,517 | 29,782 | 27,062 | 30,076 |
| 3 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 11.99 | 13.80 | 14.17 | 15.59 | 14.13 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Jumlah posyandu di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 506 unit, kemudian menurun hingga mencapai 425 unit pada tahun 2024. Berdasarkan data rasio posyandu yang terlihat pada tabel di bawah, maka diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah posyandu di kabupaten Maros sudah cukup ideal, dimana 1 posyandu dapat melayani 72 balita (14,13 posyandu per 1.000 orang balita).

Meningkatnya rasio posyandu disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK aktif melakukan pendirian posyandu-posyandu di daerah pedesaan, utamanya yang cukup sulit terjangkau oleh pelayanan puskesmas. Selain melakukan pendirian Posyandu, Pemerintah bersama PKK juga aktif melakukan perekrutan kader posyandu yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel diatas.

#### 2.3.1.2.5 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk adalah untuk memperoleh gambaran tentang ketersediaan layanan kesehatan di suatu daerah, sering kali digunakan rasio fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik per satuan penduduk. Berikut adalah pengertian dari masing-masing fasilitas kesehatan tersebut.

Rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Meningkatnya rasio puskesmas, puskesmas

pembantu, dan poliklinik menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan semakin meningkat. Berdasarkan rasio tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten Maros, baik melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun melalui poliklinik yang dikelola oleh swasta dapat menjangkau hampir seluruh penduduk Kabupaten Maros.

**Tabel 2.60**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Puskesmas, Pustu, Poliklinik | 54 | 40 | 66 | 66 | 70 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391.774 | 396.924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| **3** | Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik Per Satuan Penduduk | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2020 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik sebesar 0.16 dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 54 unit, artinya untuk 1 unit puskesmas/pustu/poliklinik melayani sekitar 7.155 orang penduduk. Pada tahun 2024 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik kemudian meningkat menjadi 0,17, dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 70 unit. Angka ini menunjukkan bahwa untuk 1 unit melayani 6.057 orang penduduk. Perkembangan rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel diatas.

#### 2.3.1.2.6 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak mengalami peningkatan, yakni sebanyak 2 unit. Disisi lain jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, secara umum jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap rumah sakit yang tersedia semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2024 sedikit meningkat meskipun tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, maka terlihat bahwa 1 rumah sakit melayani 205.335 penduduk Kabupaten Maros. Dengan banyaknya penduduk yang harus dilayani, maka diperlukan peningkatan kapasitas atau tipe rumah sakit sehingga jumlah penduduk yang terlayani dapat lebih ditingkatkan. Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Rumah Sakit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391.774 | 396.924 | 403,774 | 410,669 | 353.121 |
| **3** | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.7 Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 156 orang dengan rasio 1 tenaga medis untuk 2.368 penduduk. Jumlah tenaga medis tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 3.130 penduduk pada tahun 2022, pada tahun 2024 rasio tenaga medis meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 2.267 penduduk.

**Tabel 2.62**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah tenaga medis | 156 | 144 | 129 | 202 | 187 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391.774 | 396.924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| **3** | Rasio Dokter tenaga medis per Satuan Penduduk | 1:2384 | 1:2384 | 1:3130 | 1:2033 | 1: 2267 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Penurunan jumlah tenaga medis pada tahun 2024 disebabkan adanya beberapa tenaga medis utamanya dokter spesialis yang berstatus kontrak, dan pada tahun 2024 kontraknya telah habis, selain itu terdapat juga dokter yang pensiun pada tahun tersebut

#### 2.3.1.2.8 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 156 orang dengan rasio 1 tenaga medis untuk 2.368 penduduk. Jumlah tenaga medis tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 3.130 penduduk pada tahun 2022, pada tahun 2024 rasio tenaga medis meningkat hingga mencapai 1 orang untuk 2.267 penduduk.

**Tabel 2.63**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah tenaga medis | 156 | 144 | 129 | 202 | 187 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391.774 | 396.924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| **3** | Rasio Dokter tenaga medis per Satuan Penduduk | 1:2384 | 1:2384 | 1:3130 | 1:2033 | 1: 2267 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Penurunan jumlah tenaga medis pada tahun 2024 disebabkan adanya beberapa tenaga medis utamanya dokter spesialis yang berstatus kontrak, dan pada tahun 2024 kontraknya telah habis, selain itu terdapat juga dokter yang pensiun pada tahun tersebut

#### 2.3.1.2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 7.328 orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 7.511 orang. Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 94,72 %. Cakupan tersebut kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 102,00% pada tahun 2022 dengan jumlah ibu bersalin yang dapat ditolong sebanyak 6.589 orang dari 6.434 sasaran. Pada tahun 2024 sebanyak 5.831 orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 5.397 orang

**Tabel 2.64**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**
**Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 7.328 | 7.968 | 6,589 | 6,418 | 5,831 |
| 2 | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 7.736 | 7.968 | 6,434 | 6,418 | 5,397 |
| 3 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 94,72 | 100,00 | 102.41 | 100.00 | 108.04 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Seperti halnya indikator cakupan komplikasi kebidanan yang dapat ditangani, peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### 2.3.1.2.10 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah jumlah desa/kelurahan yang telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (usia 0-11 bulan), ibu hamil, wanita subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak.

**Tabel 2.65**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah desa/kelurahan UCI | 70 | 72 | 79 | 103 | 98 |
| 2 | Jumlah seluruh desa/kelurahan | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 3 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI) | 67,96 | 69,90 | 76.70 | 100.00 | 95.15 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 67,96%. Dimana dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, belum seluruhnya telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar). Namun pad tahun 2021 naik hingga mencapai 69,90%, bahkan pada tahun 2024 cakupan UCI hanya sebesar 95 %. Pada tahun 2023 cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros sebesar 100% berarti dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, seluruhnya telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar).

Penurunan cakupan ini disebabkan jumlah bayi yang lahir pada tahun 2023 dan 2024 tidak sebanding dengan vaksin yang tersedia sehingga tidak semua bayi yang lahir pada tahun tersebut dapat diimunisasi.

#### 2.3.1.2.11 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan adalah indikator kesehatan yang menunjukkan persentase anak-anak yang mengalami gizi buruk dan menerima perawatan atau intervensi yang sesuai. Gizi buruk pada anak dapat berdampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan intervensi yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar 100 %. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan telah ditangani dan mendapatkan perawatan sesuai kondisi yang ada.

**Tabel 2.66**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan pada kurun waktu tertentu | 3 | 3 | 97 | 179 | 189 |
| 2 | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama | 3 | 3 | 97 | 179 | 189 |
| 3 | Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.12 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur cakupan imunisasi campak pada anak-anak. Imunisasi campak adalah salah satu upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi kejadian penyakit campak dan komplikasi yang ditimbulkannya..

**Tabel 2.67**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak pada suatu wilayah selama 1 tahun | 13,800 | 15,145 | 6,114 | 6,153 | 7763 |
| 2 | Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama | 14,709 | 14,786 | 6,157 | 6,841 | 7233 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak | 93.82 | 102.43 | 99.30 | 89.94 | 107.33 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 93.82% disebabkan adanya anak usia tahun yang berasal dari daerah lain yang ikut diimunisasi. Sedangkan pada tahun 2024 persentase cakupan anak usai 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 107,33%..

#### *2.3.1.2.13* Persentase *Non Polio Rate*

Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah pengamatan yang dilakukan pada semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada usia < 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio. Untuk mengukur sensifitas penemuan kasus AFP, maka ditetapkan indikator Non Polio AFP Rate per 100.000 anak berusia kurang dari 15 tahun per tahun.

Non *polio rate* Kabupaten Maros per 100.000 penduduk berumur kurang dari 15 tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak mengalami banyak perubahan. Dimana kasus non polio yang ditemukan dilaporkan hingga tahun 2021 sebanyak 1 kasus kemudian 4 kasus pada tahun 2023. Dengan demikian dapat dikatakan *non polio rate* sebesar 0 kasus untuk 100.000 penduduk.

**Tabel 2.68**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | Jumlah penduduk <15 tahun | 100,586 | 100,699 | 100,811 | 87934 | 87772 |
| 3 | Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.015 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Hal ini disebabkan hampir seluruh bayi di Kabupaten Maros telah diberikan imunisasi yang lengkap, sehingga bayi-bayi tersebut memiliki antibodi yang cukup dan kuat terhadap virus polio. Selain itu penyuluhan oleh kader posyandu dan puskesmas juga memegang perananan penting, dengan adanya informasi yang diterima masyarakat, maka kesadaran masyarakat juga akan semakin tinggi untuk melakukan imunisasi.

#### *2.3.1.2.14* Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara disalah satu atau kedua paru-paru. Pada balita pneumonia biasanya didahului gejala selesma berupa demam yang disertai batuk dan pilek, sakit kepala dan hilang nafsu makan.

Pada tahun 2020 jumlah penderita pneumonia yang ditemukan di Kabupaten Maros sebanyak 182 kasus dengan cakupan sebesar 13,50 %. Kemudian menurun pada tahun 2021 dengan jumlah penderita sebanyak 157 orang (11,84%). Pada tahun 2022 cakupan balita pneumonia yang ditangani naik hingga mencapai 11,48% dengan jumlah penderita sebanyak 287 orang. Pada tahun 2024 cakupan balita pneumonia yang ditangani mencapai 30 persen.

Tingginya kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Maros lebih banyak dialami oleh masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (Pra Sejahtera) dan berada di

kawasan kumuh, dimana masyarakat tersebut berada pada lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis, tempat tinggal yang berdempetan, sehingga tidak adanya udara sirkulasi udara yang baik.

**Tabel 2.69**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah penderita pneumonia yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun | 182 | 157 | 281 | 356 | 418 |
| **2** | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 1,350 | 1,326 | 281 | 97 | 1384 |
| **3** | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | **13.50** | **11.84** | **100.00** | **367.01** | **30.20** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.15 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Secara umum jumlah penyakit baru TBC BTA yang ditemukan di Kabupaten Maros menujukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah kasus pada tahun 2020 sebanyak 251 kasus kemudian meningkat hingga mencapai 954 kasus pada tahun 2024. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2020 sebesar 27,30 % dan pada tahun 2024 sebesar 100,00%.

**Tabel 2.70**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah penyakit baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun | 251 | 487 | 594 | 773 | 954 |
| **2** | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama | 921 | 837 | 968 | 773 | 954 |
| **3** | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 27.30 | 58.26 | 61.36 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan deteksi dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas dan puskesmas pembantu dengan melakukan perawatan dan pengawasan terhadap penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin menurun setiap tahunnya.

#### 2.3.1.2.16 Tingkat Prevalensi Tuberklosis

Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian.

Prevalensi tuberklosis Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 456 kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus yang ditemukan sebesar 116 kasus. Kasus TBC pada tahun 2024 mencapai 954kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 594 orang.
Seperti halnya pneumonia, penyakit TB sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat tinggal dan pola hidup masyarakat. Masih tingginya kasus TB di Kabupaten Maros disebabkan masih kurangnya pemahaman di masyarakat terhadap penyakit TB yang dapat menular dan kurangnya kewaspadaan terhadap kejadian TB, sehingga banyak masyarakat yang yang menderita TB yang tidak diketahui atau terlambat diketahui. Walaupun demikian, telah dilakukan pendeteksian secara dini oleh petugas kesehatan untuk menghambat penularan serta merujuk penderita dan pengawasan terhadap penderita TBC tersebut.

**Tabel 2.71**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Banyaknya kasus penderita TB (Baru dan lama) | 456 | 447 | 594 | 773 | 954 |
| **2** | Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama | 391.174 | 396.924 | 403,774 | 410,669 | 365369 |
| **3** | Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | 116,46 | 112,65 | 147.11 | 188.23 | 261.11 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.2.17 Tingkat Kematian Karena Tuberklosis**

Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh Tuberkulosis (TBC) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian per 100.000 penduduk yang disebabkan oleh penyakit TBC dalam periode waktu tertentu. TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyerang berbagai organ tubuh, terutama paru-paru.
Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh TBC menunjukkan tren yang yang meningkat selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 tingkat kematian karena tuberklosis sebesar 6,9 orang untuk setiap 100.000 orang penduduk yang diperiksa dengan jumlah TB yang meninggal sebanyak 15 orang. Sedangkan tahun 2024 jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 29 orang dengan tingkat kematian sebesar 12 orang untuk setiap 100.000 penduduk.

**Tabel 2.72**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah pasien TB yang meninggal | 27 | 25 | 20 | 29 | 52 |
| **2** | Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama | 391.174 | 396.924 | 403,774 | 410,699 | 423,990 |
| **3** | Tingkat kematian karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk) | 6,99 | 6,21 | 4.95 | 7.06 | 12.26 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Seperti yang telah disebutkan pada tingkat prevalensi TB, tingkat kematian pada penderita TB cukup tinggi dikarenakan deteksi yang kurang cepat terhadap penderita serta pemahaman masyarakat yang sangat kurang terhadap bahaya penyakit TB tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya penderita yang terlambat mendapat pertolongan serta perawatan yang intensif.

**2.3.1.2.18 Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS**

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberklosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan tuberkolosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit.

Proporsi jumlah kasus tuberklosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2020 sebesar 48 %. Dimana dari 944 jumlah pasien yang diperkirakan, terdapat 458 pasien TB yang mendapat pengobatan melalui DOTS. Kondisi tahun 2022 dimana pasien yang diobati sebanyak 594 dari 968 pasien orang dengan proporsi 61,36%.

Semakin menurunnya jumlah pasien rumah sakit diobati melalui porgam DOTS disebabkan karena penanganan penderita TBC saat ini lebih banyak diarahkan ke puskesmas di wilayah kecamatan, sehingga mengurangi beban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Seluruh kasus Tuberklosis yang terdeteksi dalam DOTS telah diobati dan dinyatakan sembuh. Dengan demikian dengan jumlah penderita penyakit TB yang terdeteksi pada tahun 2024 sebanyak 954 orang seluruhnya dapat diobati dan dinyatakan sembuh.

**Tabel 2.73**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah pasien tuberklosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS | 458 | 460 | 594 | 773 | 198 |
| **2** | Jumlah pasien baru TB paru dan BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut | 944 | 862 | 968 | 773 | 954 |
| **3** | Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS | 48,52 | 53,39 | 61.36 | 100.00 | **20.75** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

**Grafik 2.31**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

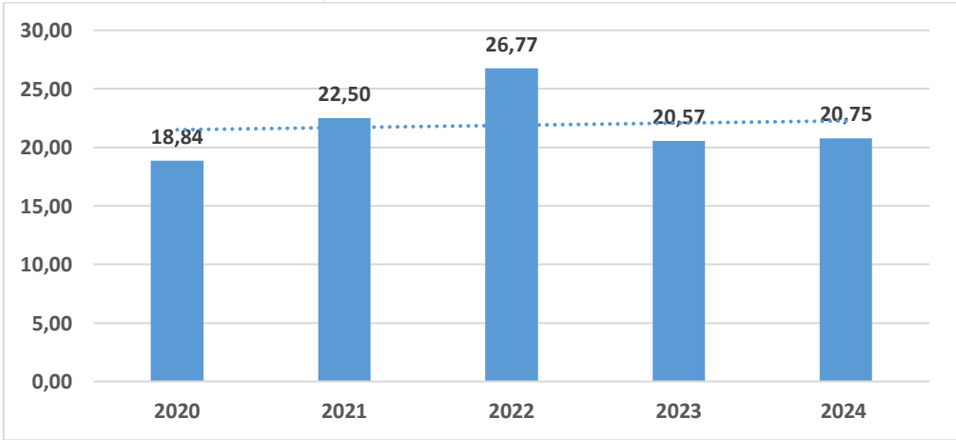


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.19 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD atau *Dengngue Hemorhagic Fever* adalah penyakit yang dapat membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi dan pada umumnya disertai sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, serta nyeri di bagian belakang mata. Penyakit DBD disebabkan oleh virus *dengue* yang penyebarannya terjadi melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*.
Jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 255 kasus, kemudian naik pada tahun 2024 sebanyak 498 kasus. Banyaknya kasus yang ditemukan diakibatkan gencarnya deteksi dini dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pemukiman wilayah kumuh.

**Tabel 2.74**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun | 255 | 255 | 159 | 183 | 498 |
| **2** | Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama | 255 | 255 | 159 | 183 | 498 |
| **3** | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Keseluruhan kasus yang ditemukan telah ditangani sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada selama kurun waktu 2020-2024 mencapai 100%.

#### 2.3.1.2.20 Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani adalah indikator yang mengukur persentase atau jumlah penderita diare yang menerima perawatan medis yang memadai. Indikator ini penting untuk menilai kinerja sistem kesehatan dalam menangani kasus diare, terutama pada anak-anak, yang rentan terhadap dehidrasi dan komplikasi serius akibat diare.

**Tabel 2.75**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Penderita Diare Yang Ditangani**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun | 4,134 | 2,289 | 2,511 | 5,358 | 5,557 |
| **2** | Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10 % dari angka keskitan diare x jumlah penduduk) | 10,433 | 9,684 | 2,211 | 9,977 | 9,865 |
| **3** | **Penderita Diare Yang Ditangani** | **39.62** | **23.64** | **113.57** | **53.70** | **56.33** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang lembek atau cair. Selama tahun 2020 jumlah penderita diare yang ditemukan sebanyak 10.433 kasus, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 9.865 kasus.

Dari jumlah kasus penderita diare yang ditemukan tersebut penderita yang dapat ditangani pada tahun 2020 sebesar 39,62%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 56,33 %. Masih tingginya kasus diare di Kabupaten Maros disebabkan perilaku hidup masyarakat yang kurang baik serta sanitasi lingkungan yang buruk.

#### 2.3.1.2.21 Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria adalah indikator yang mengukur jumlah kasus malaria yang terjadi dalam populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan sebagai jumlah kasus per 1.000 atau 100.000 penduduk per tahun. Angka ini penting untuk memantau prevalensi malaria dan efektivitas program pengendalian penyakit malaria di suatu daerah.

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia atau hewan lain. Malaria biasanya menyebabkan gejala demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan kulit kuning, kejang, koma bahkan kematian.

**Tabel 2.76**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu | 78 | 62 | 100 | 94 | 86 |
| 2 | Jumlah penduduk pada pertengahan tahun | 391.174 | 396.924 | 403,774 | 410,699 | 423,990 |
| 3 | **Angka Kejadian Malaria** | **20,00** | **15,62** | **24.77** | **22.89** | **20.28** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Angka kejadian malaria pada tahun 2020 di Kabupaten Maros sebesar 20 kasus per 100.000 penduduk (78 penderita), kemudian pada tahun 2024 meningka menjadi 86 orang penderita untuk setiap 100.000 penduduk (20.28 orang penderita).

Tingginya kasus malaria disebabkan banyak orang yang terinfeksi malaria belum terdeteksi dan terus menularkan kepada orang lain, Selain itu juga, orang yang sudah sembuh gampang terinfeksi kembali, karena tidak melakukan pencegahan seperti menggunakan kelambu ataupun kalau terinfeksi tidak berobat.

#### 2.3.1.2.22 Proporsi Anak Balita Dengan Deman Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria

Proporsi anak balita demam yang diobati dengan ACT (Artemisnin Combination Therapy) pada tahun 2020 hingga tahun 2024, penangan sudah 100%. Pada tahun 2024, keseluruhan penderita malaria sebesar 170 kasus telah mendapatkan pengobatan dengan metode ACT sehingga cakupannya sebesar 100%.

**Tabel 2.77**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati**
**Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun | 180 | 180 | 100 | 156 | 170 |
| 2 | jumlah Penderita positif dalam 1 tahun | 180 | 180 | 100 | 156 | 170 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.23 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi adalah indikator yang menunjukkan persentase dari populasi total yang hidup dengan HIV/AIDS pada suatu periode tertentu. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana penyebaran HIV/AIDS dalam masyarakat dan untuk mengukur efektivitas program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

**Tabel 2.78**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 20 | 40 | 0 | 43 | 37 |
| 2 | Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| 3 | **Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi** | 0.005 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.009 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Jumlah pasien HIV/AIDS Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 20 orang, Pada tahun 2021 jumlah kasusnya sama yaitu 40 orang. Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2021 sebesar 0,005% dari total penduduk. Pada tahun 2024 jumlah prevalensi sebsesar 37 orang dengan 0,090% dari jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penderita ini kemungkinan banyak terjadi pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, sehingga Makassar diduga menjadi penyebab bertambahnya penderita HIV dan AIDS di Maros. Rata- rata penderita penyakit ini berasal dari kota dan kecamatan yang berbatasan dengan Makassar.

#### 2.3.1.2.24 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang Bahaya HIV/AIDS

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang bahaya HIV/AIDS adalah indikator yang menunjukkan persentase remaja dan dewasa muda yang memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang penularan, pencegahan, dan bahaya HIV/AIDS. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas program edukasi dan kampanye kesadaran tentang HIV/AIDS di kalangan muda.

**Tabel 2.79**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif | 4.812 | 3.880 | 3,791 | 6,669 | 3.257 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu | | | | | |
| **2** | Jumllah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama | 67.677 | 66.258 | 66,854 | 61,875 | 4.812 |
| **3** | **Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS** | **7,11** | **5,86** | **5.67** | **10.78** | 67.677 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang bahaya HIV/AIDS pada tahun 2020 di Kabupaten Maros sebesar 4.812 orang dari 67.093 orang total penduduk usia 15-24 tahun. Dengan demikian proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 4,68%. Kondisi pada tahun 2024 meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2024, dimana dari 67.093 jumlah penduduk usia 15-24 orang, terdapat 6,669 orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS atau sebesar 10,78%.

Walaupun terjadi peningkatan secara proporsi, namun secara umum jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mengetahui pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS sangat sedikit. Hal ini disebabkan kegiatan penyuluhan dan informasi tentang HIV/AIDS di Kabupaten Maros sangat terbatas dan hanya dilakukan pada wilayah kecamatan yang dianggap rawan akan penyakit tersebut, seperti kecamatan yang berada di wilayah perkotan dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan infomasi belum dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang berada di pelosok wilayah Kabupaten Maros.

#### 2.3.1.2.25 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah indikator yang menunjukkan persentase bayi yang mendapatkan kunjungan kesehatan rutin dalam tahun pertama kehidupannya. Kunjungan ini penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi, memastikan imunisasi yang tepat waktu, serta mendeteksi dan menangani masalah kesehatan sejak dini.

**Tabel 2.80**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 7.484 | 8,392 | 5,867 | 7,638 | 6.226 |
| **2** | Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 7.817 | 8,392 | 5,812 | 6,366 | 5.397 |
| **3** | Cakupan Kunjungan bayi | 95,74 | 100 | 100.95 | 119.98 | 115.36 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pada tahun 2020 jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Maros sebanyak 7.484 orang dengan cakupan sebesar 100,00%. Cakupan pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan

tahun 2024, dimana dari 6.226 bayi yang lahir terdapat 6,366 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (100%).
Penurunan cakupan ini disebabkan bukan akibat kurangnya pelayanan ataupun kompisisi vaksin di posyandu dan puskesmas, namun lebih disebabkan tidak adanya waktu dari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk membawa anaknya ke posyandu dan puskesmas dikarenakan sebagian besar dari ibu-ibu tersebut memiliki pekerjaan.

#### 2.3.1.2.26 Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar yang (Pusat disediakan oleh puskesmas Kesehatan Masyarakat) di suatu daerah. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang merupakan komponen penting dari sistem kesehatan nasional.

**Tabel 2.81**
**Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Puskesmas | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Jumlah Seluruh Kecamatan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Cakupan Puskesmas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang berada di setiap kecamatan dalam suatu wilayah tertentu puskesmas Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 100%. Dengan demikian setiap kecamatan di Kabupaten Maros telah memiliki puskesmas, namun jenis pelayanan yang dapat diberikan pu. Cakupan skesmas tersebut berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah kecamatan dimana puskesmas tersebut berada.

#### 2.3.1.2.27 Cakupan Puskesmas Pembantu

kesehatan dasar yang disediakan oleh Puskesmas Pembantu di suatu daerah. Puskesmas Pembantu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari jaringan puskesmas, biasanya didirikan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan di daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau.
Pada tahun 2020 dibangun 31 unit puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan aksesibilitas layanan pembantu sehingga cakupannya mencapai 31% kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan puskesmas pembantu sebanyak 5 unit sehingga total puskesmas pembantu sebanyak 42 unit, dengan cakupan sebesar 40,78%. Pada tahun 2024 jumlah puskemas pembantu sebanyak 27 dengan cakupan sebesar 26,21%.

**Tabel 2.82**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Jumlah Puskesmas Pembantu**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Puskesmas pembantu | 31 | 42 | 26 | 27 | 27 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Jumlah Seluruh Desa | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| **3** | Cakupan Puskesmas pembantu | **30,10** | **40,78** | **25.24** | **26.21** | **26.21** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2025*

**2.3.1.2.28 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Kunjungan Antenatal K4 (K4) adalah indikator yang mengukur persentase ibu hamil yang telah melakukan setidaknya empat kali kunjungan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) selama masa kehamilan mereka. K4 adalah salah satu indikator penting dalam pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin, serta dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

**Tabel 2.84**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu | 7.206 | 7.369 | 5,409 | 6,502 | 5,606 |
| **2** | Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 7.868 | 8.283 | 5,409 | 6,752 | 5,397 |
| **3** | **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4** | **91,59** | **92.22** | **100.00** | **96.30** | **103.87** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Kunjungan Antenatal K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar yang ditetapkan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan dua kali trimester ketiga.

Cakupan kunjungan ibu hamil Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 91,59%, dengan sasaran ibu hamil 7.868 orang, kemudian pada tahun 2022 cakupan kunjungan K4 ibu hamil mencapai 100 % dengan sasaran ibu hamil sebanyak 5,409 orang. Pada tahun 2024 cakupan sebesar 103,87% dengan sasaran ibu hamil sebanyak 5,397 orang.Tingginya cakupan kunjungan ibu hamil K4 di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah cukup baik dilakukan, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.

**2.3.1.2.29 Cakupan Pelayanan Nifas**

Cakupan pelayanan nifas adalah indikator yang mengukur persentase ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa nifas (postpartum) dalam periode waktu tertentu setelah Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pada tahun 2019 jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Maros sebanyak 7.285

orang dengan cakupan sebesar 100,00%. Cakupan pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, dimana dari 7,638 bayi yang lahir terdapat 6,366 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (100%).

melahirkan. Masa nifas adalah periode penting yang berlangsung selama enam minggu setelah persalinan, di mana ibu memerlukan pemantauan dan perawatan kesehatan untuk memastikan pemulihan yang baik serta mendeteksi dan menangani komplikasi pasca melahirkan.

Nifas adalah periode 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, yaitu pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke 2 dan minggu ke 4.

Jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 8.001 orang dari 8.007orang ibu nifas yang ada di Kabupaten Maros (100,00%). Kemudian pda tahun 2022 jumlah ibu nifas yang memperoleh pelayanan sebanyak 5.359 orang dengan jumlah sasaran sebanyak 5.359 orang (100%).

Tingginya cakupan pelayanan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah dilakukan cukup baik, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.

**Tabel 2.84**
**Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Peserta Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wialayah kerja pada kurun waktu tertentu | 8,001 | 8,534 | 5,359 | 6,229 | 5,794 |
| 2 | Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 8,007 | 8,537 | 5,359 | 6,458 | 5,397 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Nifas | 99.93 | 99.97 | 100.00 | 96.45 | 107.36 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.2.30 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Makanan Pendamping (MP) ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP-ASI diberikan pada anak usia 4 bulan Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI tahun 2019 sebanyak 1.111 orang, dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 sampai 24 bulan. MP-ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga.tahun keluarga miskin sebanyak 1.102 orang. Cakupan pemberian MP-ASI tahun 2020 sebesar 99,16%. Pada tahun 2024 cakupan pemberian makanan pendamping asi sebesar 90,29 %, dengan jumlah sasaran sebanyak 1.441 orang.

Cukup tingginya cakupan pemberian makanan pendamping ASI di Kabupaten Maros disebabkan telah dilaksanakannya penyuluhan dasar-dasar Pemberian MP ASI dan Pelatihan pembuatan MP ASI rumahan kepada penduduk miskin. Kegiatan ini dilakukan oleh PKK dan Posyandu dengan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Namun demikian masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak utamanya dari dinas sosial dan dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka penetapan jumlah sasaran masyarakat miskin sehingga diharapkan seluruh sasaran dapat terlayani (100%).

**Tabel 2.85**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI | 1,057 | 1,080 | 298 | 166 | 1.441 |
| 2 | Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | 1,124 | 1,080 | 298 | 166 | 1.596 |
| 3 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin | 99,16 | 94.02 | 100.00 | 100.00 | 90.29 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.2.31 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah indikator yang mengukur persentase siswa sekolah dasar (SD) dan sederajat yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin dalam kurun waktu tertentu. Program penjaringan kesehatan bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, memberikan intervensi yang diperlukan, dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan anak-anak usia sekolah.

Penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Penjaringan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan peserta didik, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala.

Cakupan peserta didik yang diperiksa kesehatannya pada tahun 2020 sebesar 19,32% dengan jumlah sasaran sebanyak 7.871 orang, kemudian pada tahun 2024 hingga mencapai 97 % dengan jumlah sasaran 55.908 orang murid SD.

Penyebab belum maksimalnya capaian penjaringan kesehatan siswa SD adalah kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dengan kepala sekolah dasar yang ada di desa dalam upaya pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Sehingga dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan bersih siswa sekolah dasar SD di Kabupaten Maros dalam hal ini di 14 puskesmas, maka puskesmas telah melakukan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di wilayahnya masing-masing. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas satu sampai dengan kelas enam.

**Tabel 2.86**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 7,871 | 3,329 | 6,392 | 7,017 | 55,908 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 39,688 | 43,974 | 45,841 | 48,845 | 57,521 |
| 3 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat | 19.83 | 7.57 | 13.94 | 14.37 | 97.20 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.2.32 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam**

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

**Tabel 2.87**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**
**Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 2 | Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama | 10 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 3 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | 30 | 100 | 100 | 100 | **100** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2025*

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan oleh kabupaten pada tahun 2020 sebesar 30%, dengan jumlah desa yang diselidiki/ditangani sebanyak 8 desa. Pada Tahun 2024 dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh desa dan kelurahan mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan epidemiologi.

**2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik**

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan keseluruhan. Berdasarkan kondisi jalan, maka jalan dibagi atas beberapa kategori jalan yakni kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

Panjang jalan di Kabupaten Maros secara keseluruhan baik jalan yang berada pada kewenangan negara, provinsi maupun kabupaten sebesar 1.174,00 km pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 1,361.57 km pada tahun 2024.

Pada tabel di bawah ini, data panjang jalan dalam kondisi baik yang disajikan adalah data kondisi jalan kewenangan kabupaten, dikarenakan data untuk kondisi jalan negara dan provinsi tidak tersedia. Pada tahun 2020 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (km) sebesar 0,769 km kemudian meningkat hingga mencapai 0,68 km pada tahun 2024.

Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik disebabkan prioritas Pemerintah Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir adalah memperbaiki dan meningkatkan konektifitas antar

wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan. Sementara untuk tahun 2022 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 68 %

**Tabel 2.88**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik (Km)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) | 886.61 | 795.83 | 795.81 | 840.99 | 923.48 |
| **2** | Panjang jalan seluruhnya (Km) | 1,174.00 | 1,174.00 | 1,174.00 | 1,238.57 | 1,361.60 |
| **3** | Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi baik (Km) | **0.76** | **0.68** | **0.68** | **0.68** | **0.68** |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Kondisi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan di Kabupaten Maros, semakin tahun terlihat menurun. Pada tahun 2024 kondisi jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan sebesar 923 Km .

**2.3.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk**

Rasio panjang jalan per jumlah penduduk adalah indikator yang mengukur ketersediaan infrastruktur jalan dalam kaitannya dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk memahami seberapa baik aksesibilitas transportasi dan mobilitas penduduk di daerah tersebut. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam meter (atau kilometer) panjang jalan per jumlah penduduk (misalnya, per 1.000 atau 10.000 penduduk).

Panjang jalan di Kabupaten Maros (kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten) sejak tahun 2020 sebesar 1.032 km, kemudian meningkat menjadi 1.239 km pada tahun 2024.

Dikarenakan perubahan panjang jalan yang tidak terlalu besar, maka rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk juga tidak terlalu besar perubahannya setiap tahun. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,003 kemudian pada tahun 2024 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,003229. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap 1 km jalan di Kabupaten Maros dapat melayani akses 260 – 350 orang penduduk.

**Tabel 2.89**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah panjang jalan | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,294 | 1,239 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| **3** | Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0029 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi panjang jalan yang ada belum cukup pada untuk melayani akses penduduk di Kabupaten Maros. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di jalan, utamanya jalan-jalan poros trans kabupaten/provinsi.

#### 2.3.1.3.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) adalah indikator yang mengukur proporsi panjang jalan kabupaten yang memenuhi standar kualitas tertentu, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata lebih dari 40 kilometer per jam. Indikator ini penting untuk menilai kualitas infrastruktur jalan di tingkat kabupaten dan sejauh mana jalan-jalan tersebut mendukung mobilitas dan transportasi yang efisien.

**Tabel 2.90**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | 846.24 | 834.50 | 795.83 | 895.63 | 923.48 |
| **2** | panjang seluruh jalan kabupaten | 1032.13 | 1032.13 | 1032.13 | 1,293.83 | 1,238.57 |
| **3** | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) | **81.99** | **80.85** | **77.11** | **69.22** | **74.56** |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros pada tahun 2024 sepanjang 1,238.57 km, namun pada tahun 2020 setelah dilakukan survey dan pengukuran kembali, panjang jalan kewenangan Kabupaten Maros sepanjang 1.032,13 km. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 81.99 % kemudian meningkat pada athun 2024 sebesar 74.56%. Peningkatan kondisi jalan ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah memprioritaskan perbaikan infrastruktur, utamanya jalan selama 10 tahun terkakhir, utamanya jalan-jalan yang memiliki konektifitas antara wilayah kecamatan, antar desa serta dusun.

#### 2.3.1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang mengukur proporsi rumah tinggal yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang terhubung dengan sistem pembuangan yang memadai. Indikator ini penting untuk menilai tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah tangga, yang berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat.
Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi diantaranya; fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah/air bekas dan pembuangan sampah.
Rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros menunjukkan adanya peningkatan terhadap rumah yang dapat mengakses sanitasi selama 5 tahun. Pada tahun 2020 tercatat presentase rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal sebesar 92.41%, dan pada tahun 2024 naik menjadi 97.51 % .
Cukup tingginya persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki rumah dengan fasilitas yang sesuai standar kesehatan sudah cukup tinggi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memprogramkan kegiatan pemasangan Instalasi Pembuangan

Air Limbah (IPAL) masyarakat melalui sambungan rumah (SR) penduduk, utamanya rumah-rumah yang berada di wilayah kumuh dan pedesaan.

**Tabel 2.91**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | 80,056 | 81,802 | 89,314 | 101,826 | 89,392 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 86,636 | 88,145 | 89,628 | 101,826 | 91,673 |
| 3 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | **92.41** | **92.80** | **99.65** | **100** | **97.51** |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Salah satu indikaator yang penting dalam program capaian SDGs adalah akses sanitasi aman yang merupakan kondisi akhir yang dicapai dalam tangga layanan sanitasi dimana Kabupaten Maros dari data yang ada baru mencapai akses sanitasi aman di tahun 2021.

**Tabel 2.92**
**Persentase Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten Maros**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi aman | 0 | 2,405 | 4,696 | | |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 86,636 | 88,145 | 89,628 | 101,826 | |
| 3 | Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi Aman | **0** | **3.06** | **5.24** | | |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.3.5 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang mengukur proporsi dari total sistem irigasi di suatu kabupaten yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk mendukung pertanian, memastikan pasokan air yang stabil, dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang mengukur proporsi dari total sistem irigasi di suatu kabupaten yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk mendukung pertanian, memastikan pasokan air yang stabil, dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Luas jaringan irigasi teknis Kabupaten Maros sebesar 9,094 ha pada tahun 2020. hingga tahun 2024 sebesar 6,459. Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 7,159Ha pada tahun 2020 kemudian meningkat hingga mencapai 4,713 Ha pada tahun 2024. Dengan demikian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 78,77% dan pada tahun 2022 mencapai 81,45%.

Secara umum kondisi irigasi di Kabupaten Maros masih memerlukan perhatian yang khusus, dimana masih banyaknya irigasi yang belum berfungsi dengan maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak saluran irigasi utamanya irigasi tersier yang langsung menuju sawah masyarakat masih berupa saluran tanah sehingga terjadi banyak kebocoran pada saluran.

**Tabel 2.93**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha) | 7,159 | 4,821 | 4,953 | 5,328 | 4,713 |
| 2 | Luas irigasi Kabupaten Maros (ha) | 9,094 | 6,081 | 6,081 | 6,081 | 6,459 |
| 3 | Persentase irigasi kabupaten dalam Kondisi baik | 78.72 | 79.28 | 81.45 | 87.62 | 72.97 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.3.5.1 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian. Data ini digunakan untuk melihat sebesar besar cakupan lahan pertanian yang dapat diairi oleh saluran irigasi yang ada.

Rasio jaringan irigasi Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung menurun selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 rasio jaringan irigasi sebesar 0,004 km/ha kemudian menurun menjadi 0,004 km/ha pada tahun 2023. Walaupun angka rasio jaringan irigasi menunjukkan penurunan namun luas lahan budidaya pertanian mengalami penurunan yang cukup besar. Tahun 2020 luas lahan budidaya pertanian sebesar 44,125 ha, kemudian menurun hingga mencapai 25,276 ha pada tahun 2024. Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.

Selain itu, panjang saluran irigasi juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan panjang saluran irigasi tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat beberapa Daerah Irigasi (DI) yang kewenangannya diambil alih oleh Propinsi.

**Tabel 2.94**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjang Saluran irigasi (km) | 171.32 | 171.32 | 190.43 | 153.40 | 190.85 |
| 2 | Luas lahan budidaya pertanian (ha) | 44,125 | 41,938 | 39,860 | 37,885 | 25,276 |
| 3 | Rasio jaringan irigasi (km/ha) | **0.004** | **0.004** | **0.005** | **0.004** | **0.008** |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Panjang jaringan irigasi kondisi baik di Kabupaten Maros, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Demikian pula sebaliknya kondisi jaringan irigasi rusak sedang dan berat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan, dapat terlihat pada table berikut:

**Tabel 2.95**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Maros**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjang jaringan irigasi kondisi baik (m) | 7,159 | 4,821 | 4,953 | 5,328 | 140.299 |
| 2 | Panjang jaringan irigasi kondisi rusak sedang (m) | 9,094 | 6,081 | 6,081 | 6,081 | 8,029 |
| 3 | Panjang jaringan irigasi kondisi rusak berat (m) | 78.72 | 79.28 | 81.45 | 87.62 | 43,53 |
| **Total Panjang Irigasi** | | **16,332** | **10,981** | **11,115** | **11,497** | |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.3.6 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum adalah indikator yang mengukur proporsi populasi yang memiliki akses ke sumber air minum yang aman dan layak. Indikator ini penting untuk menilai kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, karena akses terhadap air minum yang bersih dan aman sangat krusial untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan kolera.

Persentase penduduk berakses air minum adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum dibagi dengan jumlah penduduk. Syarat dari air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud dengan air bersih adalah air minum yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM, pompa air, sumur, mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

**Tabel 2.96**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Persentase penduduk Berakses Air Minum**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk berakses air minum | 355,927 | 367,274 | 373,342 | 405,074 | 325,108 |
| 2 | jumlah penduduk | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| 3 | Persentase penduduk Berakses Air Minum | 90.85 | 92.53 | 92.46 | 98.64 | 76.68 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 90.85 %, kemudian menurun hingga mencapai 76.68% pada tahun 2024.

### 2.3.1.3.7 Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Diberbagai kawasan kumuh penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan. Kurangnya pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.

Luas areal kawasan kumuh pada tahun di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan luas 103,78 ha yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maros tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2019, dikarenakan kegiatan penanganan kawasan kumuh baru sehingga persentase areal kawasan kumuh sebesar 6,28% kemudian menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 5,50%.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih lima tahun terakhir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut.

**Tabel 2.97**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Persentase Areal Kawasan Kumuh**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Luas Kawasan kumuh | 105.56 | 101.97 | 91.05 | 87.05 | 78.88 |
| **2** | Luas wilayah | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,444 | 1,443 |
| **3** | Persentase Areal Kawasan Kumuh | 6.52 | 6.30 | 5.62 | 6.03 | 5,50 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.3.8 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Salah satu cara untuk mengelola sampah adalah dengan menyediakan fasilitas pengurangan sampah di suatu wilayah.

Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia di Kabupaten Maros, rasionya cukup kecil dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio fasilitas pengurangan sampah sebesar 0.02, naik pada tahun 2024 sebesar 0,26.

**Tabel 2.98**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Volume sampah di perkotaan mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA | 651.53 | 610.00 | 612.00 | 9,755 | 1,808.55 |
| **2** | Total volume sampah | 26,632 | 18,135 | 18,494 | 59,962 | 7,039.83 |
| **3** | Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan | **0.02** | **0.03** | **0.03** | **0.16** | **0.26** |

*Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.3.9 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum adalah jumlah tempat pemakaman umum (TPU) yang disediakan dan berada di bawah pengawasan, pengelolaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah
atau suatu wilayah tertentu.

Jumlah tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros hingga tahun 2023 sebanyak 1 tempat pemakaman umum dengan jumlah daya tampung kurang lebih 600 orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 423,990 jiwa, maka rasio tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros sebesar 0,0003.

**Tabel 2.99**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| **2** | Jumlah Penduduk (n) | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| **3** | Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk | **0.0003** | **0.0003** | **0.0003** | **0.0003** | **0.0003** |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Apabila dilihat jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terlihat bahwa daya tampung tempat pemakaman umum masih sangat kecil. Hal ini disebabkan sulitnya menemukan lokasi yang cukup luas sebagai tempat pemakaman umum. Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Maros lebih banyak tersebar dengan luasan yang kecil.

#### 2.3.1.3.10 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah seluruh umat beragama terhadap jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah menunjukkan penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pda tahun 2020 rasio tempat ibadah persatuan penduduk sebesar 2,23 kemudian menurun hingga mencapai 2,12 pada tahun 2021. Walaupun rasio menurun, namun apabila dilihat dari jumlah tempat ibadah terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah, dimana pada tahun 2020 jumlah tempat ibadah sebesar 829 unit kemudian menurun menjadi 828 unit pada tahun 2023.

**Tabel 2.100**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Tempat Ibadah | 829 | 829 | 828 | 828 | 828 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391.774 | 396.924 | 403,774 | 410,669 | 410,669 |
| **3** | Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

Menurunnya rasio tempat ibadah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tempat ibadah tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk ini banyak dipengaruhi oleh migrasi penduduk, utamanya pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota Makassar.

#### 2.3.1.3.11 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah adalah perbandingan luas terbuka hijau ber HPL/HGB dibandingkan dengan luas wilayah. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pada tahun 2020 rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Maros sebesar 1.060. Dimana dari 34.256 ha luas wilayah yang ber HPL/HGB, 36,311 ha merupakan areal ruang terbuka hijau. Pada tahun 2024, rasio RTH perluas wilayah HPL/HGB meningkat menjadi 1.88 dengan luasan RTH sebesar 34.256 ha. Peningkatan luas RTH ini disebabkan ada beberapa pembangunan taman dan hutan kota di wilayah perkotaan.

**Tabel 2.101**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas ruang terbuka hijau (Ha) | 36,311 | 18,311 | 31,955 | 31,955 | 64,522 |
| 2 | Luas wilayah ber HPL/HGB | 34,256 | 34,256 | 34,256 | 34,256 | 34,256 |
| 3 | Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 1.060 | 0.535 | 0.933 | 0.933 | 1.88 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.3.12 Rasio Bangunan Ber IMB

Rasio bangunan ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah indikator yang mengukur proporsi bangunan yang memiliki izin resmi dari pemerintah dibandingkan dengan total bangunan yang ada di suatu wilayah. Rasio ini penting karena menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perencanaan dan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memastikan keamanan, keteraturan, dan keberlanjutan lingkungan binaan.

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah jumlah bangunan yang memiliki IMB terhadap seluruh jumlah bangunan. Rasio bangunan ber IMB Kabupaten Maros tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2020 rasio IMB per satuan bangunan sebesar 0,45 kemudian meningkat hingga menjadi 0,59 pada tahun 2023.

**Tabel 2.102**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah bangunan ber-IMB | 36.612 | 43.583 | 43,986 | 53,803 | NA |
| 2 | Jumlah bangunan | 81.877 | 83.062 | 87,152 | 91,432 | NA |
| 3 | Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan | 0,45 | 0,52 | 0.50 | 0.59 | NA |

*Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2025*

Peningkatan ini disebabkan adanya sosialisasi dan aturan yang tegas yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk masyarakat ataupun pengusaha yang akan mendirikan bangunan agar memiliki izin, dikarenakan apabila didapatkan ada bangunan yang tidak memiliki izin maka bangunan tersebut akan dirubuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan rasio bangunan ber-IMB di Kab. Maros, termasuk: Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB dan proses pengurusannya. Mempermudah proses pengurusan IMB melalui layanan terpadu satu pintu (PTSP) dan digitalisasi layanan. Meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan tanpa IMB dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar. Serta memberikan insentif bagi warga yang mengurus IMB dan disinsentif bagi yang melanggar peraturan.

#### 2.3.1.3.13 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik adalah ruang atau tempat yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya, dan bisa dipergunakan bersama-sama oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Luas ruang publik yang tersedia di Kabupaten Maros kurang lebih seluas 21.278,20 ha. Hingga saat ini belum ada ruang publik yang berubah peruntukannya menjadi fungsi lain.

**Tabel 2.103**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Persentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (Ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah ruang publik yang tersedia (Ha) | 21.278,20 | 21.278,20 | 21.278,20 | 21.278,20 | 21.278,20 |
| 3 | Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.3.14 Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

**Tabel 2.104**
**Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang**
**Ketaatan Terhaap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi RTRW | 4,107.96 | 6,273.87 | 8,518.33 | 10,075.28 | 15,703.33 |
| 2 | Rencana Peruntukan | 145,310.63 | 145,310.63 | 145,310.63 | 145,310.63 | 145,310.63 |
| 3 | Ketaatan Terhadap RTRW | 2.83 | 4.32 | 5.86 | 6.93 | 10.81 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

Penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2020 sebesar 2.83 %, kemudian terus meningkat hingga mencapai 10.81% pada tahun 2024.

### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### 2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Rasio rumah layak huni Kabupaten Maros pada tahun 2024 naik menjadi 0,17 dari 0,12 di tahun tahun sebelumnya. Angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kecilnya rasio rumah layak huni di Kabupaten Maros dikarenakan rasio layak huni diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Sesuai dengan perhitungan indikator pada Permendagri 86).

**Tabel 2.105**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah rumah layak huni | 48,403 | 49,317 | 49,924 | 50,196 | 71,704 |
| 2 | Jumlah penduduk | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| 3 | Rasio Rumah Layak huni | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |

*Sumber : DInas PKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas permukiman secara keseluruhan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pada tahun 2020 rasio pemukiman layak huni Kabupaten Maros sebesar 0,982 kemudian meningkat hingga mencapai 0,989 pada tahun 2024. Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Maros belum mencapai angka 1 dikarenakan masih adanya permukiman kumuh seluas 103 ha yang masih harus dilakukan penataan dan perbaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai permukiman layak huni. Perkembangan kondisi permukiman Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.106**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Rasio Permukiman Layak Huni**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas permukiman layak huni | 5,442 | 6,006 | 6,620 | 7,301 | 9,136 |
| 2 | luas wilayah permukiman | 5,543 | 6,098 | 6,707 | 7,378 | 9,241 |
| 3 | Rasio Permukiman Layak Huni | 0.982 | 0.985 | 0.987 | 0.990 | 0.989 |

*Sumber : Dinas PKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni yang terdapat pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 48,403 unit dari 90,526 unit rumah yang ada, dengan persentase sebesar 62,25 persen. Meningkatnya jumlah rumah layak huni seiring dengan meningkatnya jumlah unit rumah yang ada. Dengan demikian hingga tahun 2024 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros sebanyak 71,704 unit rumah atau 78.30 persen dari jumlah rumah yang ada.

Secara umum, persentase rumah layak huni dari total rumah yang ada di Kabupaten Maros diatas 70 persen. Masih terdapat sekitar 22 persen rumah tidak layak huni di Kabupaten Maros yang disebabkan pesatnya pertambahan penduduk di wilayah perbatasan dengan kota Makassar sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tempat tinggal yang representatif. Hal ini menyebabkan masyarakat tersebut membangun rumah yang seadanya saja. Dengan demikian pemerintah masih sangat perlu mengupayakan peningkatan rumah layak huni, terutama pada lapisan masyarakat bawah.

**Tabel 2.107**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah seluruh rumah layak huni pada suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 48,403 | 49,317 | 49,924 | 50,196 | 71,704 |
| 2 | Jumlah seluruh rumah | 90,526 | 85,013 | 91,432 | 91,432 | 91,580 |
| 3 | Cakupan ketersediaan Rumah Layak huni | 53.47 | 58.01 | 54.60 | 54.90 | 78.30 |

*Sumber : DInas PKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang terjangkau dan dapat ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan jumlah MBR pada kurun waktu tertentu.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2020 sebesar 6,95b% dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 2.517 MBR, kemudian meningkat menjadi 22.03 % dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 5,095MBR pada tahun 2024.

**Tabel 2.108**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu | 2,517 | 3,017 | 3,178 | 5,066 | 5,095 |
| 2 | Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu | 36,196 | 35,696 | 35,735 | 34,831 | 23,125 |
| 3 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | 6.95 | 8.45 | 8.89 | 14.54 | 22.03 |

*Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2025*

Semakin banyaknya MBR yang menempati rumah layak huni disebabkan semakin gencarnya pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Maros sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Pesatnya pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dapat dilaksanakan dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### 2.3.1.4.5 Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman tertata adalah permukiman perkotaan dan pedesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Persentase areal permukiman yang tertata di Kabupaten Maros sudah sangat baik, dimana pada tahun 2020 sudah mencapai 98.18 %, kemudian meningkat sedikit 98.86 % pada tahun 2024.

Masih adanya permukiman yang tidak tertata disebabkan masih terdapat permukiman kumuh di Kecamatan Turikale, namun sejak tahun 2020 hingga saat ini telah dilakukan pembenahan terhadap permukiman kumuh tersebut. Perkembangan permukiman yang tertata di Kabupaten Maros selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.109**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Persentase Permukiman yang Tertata**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas areal permukiman tertata | 5,442 | 6,006 | 6,620 | 7,301 | 9,136 |
| 2 | Luas areal permukiman keseluruhan | 5,543 | 6,098 | 6,707 | 7,377 | 9,241 |
| 3 | Persentase Permukiman Yang Tertata | 98.18 | 98.49 | 98.70 | 98.97 | 98.86 |

*Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Areal kawasan kumuh di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan luas 103,78 ha, yang disahkan melalui Surat Keputusan(SK) Bupati Maros tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2020 persentase kawasan kumuh perkotaan sebesar 31.25 % dengan luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 32.99 ha. Pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 15.43 % dengan jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 12.17 Ha.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun terkahir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut.

**Tabel 2.110**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luasan permukiman kumuh yang tertangani | 32.99 | 36.58 | 34.81 | 10.37 | 12.17 |
| 2 | Luas permukiman kumuh | 105.56 | 101.97 | 91.05 | 91.05 | 78.88 |
| 3 | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan | 31.25 | 35.87 | 38.23 | 11.39 | 15.43 |

*Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak). Rumah tangga kumuh di Kabupaten Maros seluruhnya berada di wilayah perkotaan, dengan demikian proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 100 %.

**Grafik 2.31**
**Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
**Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

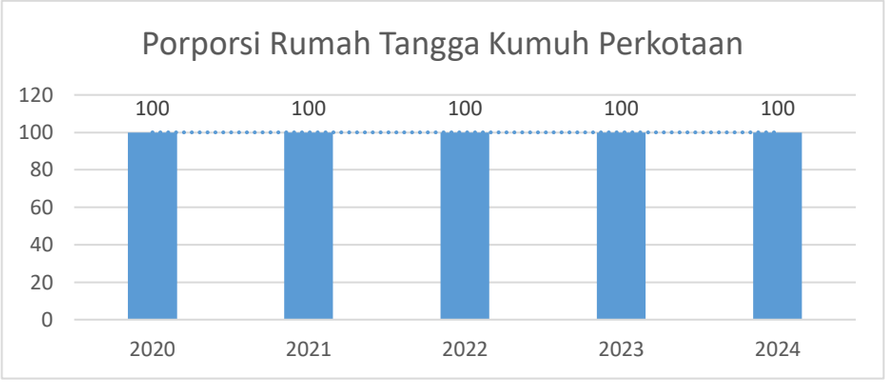


*Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.8 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Perkembangan melibatkan 2 (dua) OPD yang terkait didalamnya; yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menunjukkan tren yang semakin membaik setiap tahunnya, dimana hampir seluruh indikator menunjukkan capaian sebesar 100%.

**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , Keindahan)**

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penegakan peraturan dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan keindahan lingkungan di suatu wilayah. Seperti dilihat pada tabel dibawah,sejak tahun 2020 Capaian Kabupaten Maros selalu mencapai 100 % sampai dengan tahun 2024.

**Grafik. 2.32**
**Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**
**Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Maros**
**2020 – 2024**

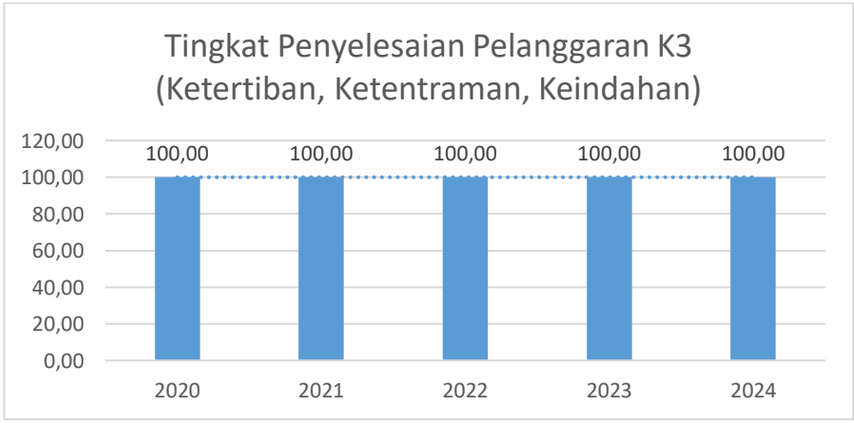


*Sumber : Damkas Kab. Maros 2025*

Tingginya tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 kebakaran di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat keahlian petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih dan bersertifikat dalam menghadapi bencana kebakaran, selain itu telah diterapkannya *Standar Operational Procedure (SOP)* dalam penanganan bahaya kebakaran juga berdampak terhadap tingkat waktu tanggap penanganan kasus kebakaran.

#### 2.3.1.4.9 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , Keindahan)

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penegakan peraturan dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan keindahan lingkungan di suatu wilayah.
Seperti dilihat pada tabel dibawah,sejak tahun 2020 Capaian Kabupaten Maros selalu mencapai 100 % sampai dengan tahun 2024.

Tingginya tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 kebakaran di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat keahlian petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih dan bersertifikat dalam menghadapi bencana kebakaran, selain itu telah diterapkannya *Standar Operational Procedure (SOP)* dalam penanganan bahaya kebakaran juga berdampak terhadap tingkat waktu tanggap penanganan kasus kebakaran.

**Grafik. 2.33**
**Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**
**Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Maros**
**2020 – 2024**

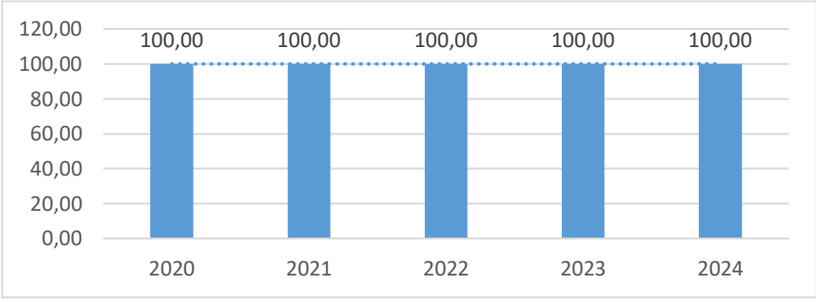


*Sumber : Damkas Kab. Maros 2025*

**Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wiayah Manajemen Kebakaran**

Salah satu faktor yang menyebabkan tinngginya tingkat penyelesaian kasus kebakaran di Kabupaten Maros adalah tingkat waktu tanggap yang cukup baik dari satuan pemadam kebakaran Kabupaten Maros. Hal ini dapat dilihat dari Tabel di bawah yang mana menunjukkan bahwa tingkat waktu tanggap terhadap kasus kebakaran di Kabupaten Maros cukup baik dan selalu berada diatas 70 %.

**Tabel 2.111**
**Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)**
**Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit | 66 | 47 | 36 | 222 | 179 |
| 2 | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK | 75 | 62 | 50 | 343 | 246 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tingkat Waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran | 88.00 | 75.81 | 72.00 | 64.72 | 72.76 |

*Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.4.10 Persentase Penegakan PERDA

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) adalah indikator yang mengukur sejauh mana peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diimplementasikan dan ditegakkan. Persentase ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Maros relatif sedikit dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2020 persentase penegakan Perda sebesar 100 % sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2.112**
**Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Persentase penegakan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penyelesaian penegakan PERDA | 1 | 5 | 5 | 53 | 45 |
| 2 | Jumlah pelanggaran PERDA | 1 | 5 | 5 | 53 | 45 |
| 3 | Persentase penegakan PERDA | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2025*

Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan *stake holder* terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda.

### 2.3.1.5 Sosial

#### 2.3.1.5.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga terkait dibandingkan dengan total jumlah PMKS di suatu wilayah. PMKS mencakup kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan bantuan sosial, seperti fakir miskin,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2020 masih 57.69 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 61.54 % dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 15 PMKS dari 26 PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada tahun 2022 meningkat lagi menjafi 100% dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 12 PMKS dari 12 PMKS

Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan bantuan disebabkan tidak meratanya persebaran potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Maros sehingga masih banyak PMKS yang belum tertangani. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama tahun **2020-2024** dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.113**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan | 15 | 16 | 17 | 12 | **22** |
| **2** | Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan | 26 | 26 | 26 | 12 | **156** |
| **3** | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 57.69 | 61.54 | 65.38 | 100.00 | **14.10** |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.5.2 Persentase PMKS yang Tertangani

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi PMKS yang menerima intervensi atau bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial dibandingkan dengan total jumlah PMKS di suatu wilayah. Intervensi ini bisa berupa bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bentuk dukungan lainnya.

**Tabel 2.114**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase PMKS yang Tertangani**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah PMKS yang tertangani | 15 | 16 | 17 | 12 | 22 |
| **2** | Jumlah PMKS yang ada | 26 | 26 | 26 | 12 | 156 |
| **3** | Persentase PMKS yang tertangani | 57.69 | 61.54 | 65.38 | 100.00 | 14.10 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 57,69%, dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 4 PMKS. Pada tahun 2024 persentase PMKS yang tertangani menurun menjadi 14.10% dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 156 PMKS. Penurunan PMKS yang tertangani disebabkan peningkatan jumlah PMKS tidak dibarengi dengan peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial.

#### 2.3.1.5.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 sebesar 57.69 % kemudian pada tahun 2024, dari 22 PMKS

yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, terdapat 17 PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sebesar 50,00 persen.

**Tabel 2.115**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun | 15 | 13 | 17 | 12 | 22 |
| 2 | Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial | 26 | 26 | 26 | 12 | 156 |
| 3 | Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar | 57.69 | 50.00 | 65.38 | 100.00 | 14.10 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 205*

### 2.3.1.5.4 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

**Tabel 2.116**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 2 | Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12 |
| **3** | **Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya** | **53.33** | **57.15** | **71.43** | **71.43** | **0** |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun 2020 sebesar 53,22 %, dimana dari 15 panti sosial yang terdapat di Kabupaten Maros hanya 8 yang mendapatkan bantuan. Persentase panti yang mendapat bantuan kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 57%. Pada tahun 2023 terdapat 10 panti sosial yang mendapatkan menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau 71 persen dari dari 14 panti sosial panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis.

#### 2.3.1.5.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2.117**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos | 8 | 8 | 10 | 14 | 12.00 |
| 2 | Jumlah panti osial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos | 15 | 14 | 14 | 14 | 12.00 |
| 3 | Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial | 53.33 | 57.15 | 71.43 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2020 persentase panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan sebesar 53.33%, dimana dari 14 panti sosial yang ada di Kabupaten Maros, 10 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pada tahun 2024 persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sebesar 100 %. Jumlah panti sosial pada tahun 2024 sebanyak 12 panti, dan 12 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan.

Tersedianya sarana dan prsarana layanan kesehatan pada panti sosial disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di setiap panti sosial, utamanya sarana dan prasarana pelayanan dasar. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana panti sosial, terutama dalam hal pelayanan kesehatan sosial.

#### 2.3.1.5.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat [WKSBM] adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

**Tabel 2.118**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.00 |
| 3 | **Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial** | 33.33 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebanyak 2 (dua) dari 6 (enam) WKBSM yang ada di Kabupaten Maros. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen.

#### 2.3.1.5.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2020 sebesar 100 %, kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2024 persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam penanganan bencana, terutama dalam penyaluran bantuan selama masa tanggap darurat telah dilakukan secara maksimal.

Untuk menghitung persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, kita memerlukan dua informasi penting adalah total jumlah korban bencana dan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial. Dengan informasi tersebut, kita bisa menggunakan rumus berikut untuk menghitung persentasenya.

**Tabel 2.119**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial**
**Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap dalam 1 (satu) tahun | 138 | 346 | 1,015 | 2,019 | 619 |
| 2 | Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap dalam 1 (satu) tahun | 138 | 346 | 1,015 | 2,019 | 619 |
| 3 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.5.8 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

**Tabel 2.120**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan**
**Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun | 10.00 | 1.00 | 346 | 1,015 | 2,019 |
| 2 | Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun | 10.00 | 1.00 | 346 | 1,015 | 2,019 |
| 3 | Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2020 sebesar 100% hingga tahun 2024.

### 2.3.1.5.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya dari bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan lain-lain.

**Tabel 2.121**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Sosial**
**Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial**
**yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun | 233 | 233 | 7978 | 192 | 245 |
| 2 | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun | 233 | 233 | 7978 | 192 | 245 |
| 3 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 100 | 100 | 100.00 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2025*

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang mendapatkan jaminan sosial pada tahun 2020 sebesar 100 %, hal tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024 dimana persentasenya tetap 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial.

### 2.3.1.6 Fokus Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.6.1 Tenaga Kerja

##### 2.3.1.6.1.1 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Sengketa antara pengusaha dan pekerja terjadi apabila ada hak-hak atau kewajiban salah satu pihak yang tidak dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga hukum lainnya.

Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Maros menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 angka sengketa sebesar 47 kasus untuk setiap 320 perusahaan, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 23,26% kasus untuk setiap 516 perusahaan.

**Tabel 2.122**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah sengketa pengusaha pekerja | 15 | 12 | 17 | 8 | 12 |
| 2 | Jumlah perusahaan | 320 | 347 | 304 | 491 | 516 |
| 3 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 47.50 | 35.29 | 55.92 | 16.29 | 23.26 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

Semakin menurunnya sengketa antara pengusaha dan pekerja ini disebabkan karena adanya kebjakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat menerapkan regulasi dan kebijakan yang adil serta seimbang bagi kedua belah pihak. Kebijakan seperti undang-undang ketenagakerjaan yang jelas, perlindungan hak pekerja, dan insentif bagi pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan pekerja dapat mengurangi potensi konflik. Sengketa mnurun juga karena adanya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja sangat penting. Dengan dialog yang terbuka, banyak masalah dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa besar. Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha sering berperan besar dalam mediasi ini.

##### 2.3.1.6.1.2 Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Persentase kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Maros yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sampai dengan tahun 2020 mencapai 66.77%, kemudian turun hingga mencapai 8.33% pada tahun 2024.

**Tabel 2.123**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Jumlah kasus yang dicatatkan | 15 | 14 | 1 | 9 | 12 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | 66.77 | 55.56 | 100.00 | 22.22 | 8.33 |

*Sumber DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

Masih rendahnya kasus antara pengusaha dan pekerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) disebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga pekerja memilih menyelesaikan kasus melalui ranah hukum atau pengadilan.

**2.3.1.6.1.3 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**

Besaran pencari kerja adalah jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Maros dan ditempatkan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat berdasarkan jumlah kartu pencari kerja (kartu kuning) yang dikeluarkan.

Walaupun capaian pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan *skill* dan disiplin ilmu yang dimiliki masih cukup rendah, namun secara umum besarannya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 besaran pencari kerja yang ditempatkan sebesar 23.27 % kemudian naik pada tahun 2024 hingga mencapai 34.31 %.

Masih rendahnya peyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang terdaftar tidak sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Maros masih rendah baik dari segi pendidikan maupun keterampilan sehingga banyak tenaga kerja yang terdaftar namun belum memiliki pekerjaan.

**Tabel 2.124**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | 465 | 109 | 341 | 79 | 514 |
| 2 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | 2000 | 1,373 | 2149 | 2399 | 1498 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) | 23.27 | 7.94 | 15.87 | 3.29 | 34.31 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.1.4 Keselamatan dan Perlindungan Kerja**

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada tahun 2020 sebanyak 320 perusahaan dari 320 perusahaan yang ada. Dengan demikian keselamatan dan perlindungan pada tahun 2020 sebesar 100 %. Pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak 491 perusahaan dengan persentase 0%.

Capaian perusahaan yang menerapkan K3 sebesar 100% pada tahun 2021 disebabkan adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan K3 dalam kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan tersebut tidak menerapkan K3, maka izinnya dapat dicabut.

**Tabel 2.125**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada tahun n | 320 | 345 | 304 | 491 | 0 |
| 2 | Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten selama tahun n | 320 | 345 | 304 | 491 | 516 |
| 3 | Keselamatan dan perlindungan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.1.5 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek.**

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Maros dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebesar 78,30 %, kemudian pada tahun 2023 besaran pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan turun hingga sebesar 63,25%. Pada tahun 2024 terjadi penururnan perserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 58,45%.

**Tabel 2.126**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pekerja/buruh jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan | 13,523 | 13,300 | 8,201 | 9,105 | 9,349 |
| 2 | Jumlah pekerja/buruh | 17,270 | 19,000 | 12,126 | 14,237 | 15,996 |
| 3 | Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenakerjaan) | 78.30 | 70.00 | 67.63 | 63.95 | 58.45 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

Menurunnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 disebabkan banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi COVID-19. Akibat adanya larangan beraktifitas yang cukup lama selama tahun 2021, mengakibatkan banyak pelaku usaha bangkrut hingga akhirnya menutup usahanya yang kemudian berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan/buruh.

**2.3.1.6.1.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah**

Perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disebabkan karena kurang pahamnya buruh dan pengusaha terhadap kebijakan tersebut. Selain

itu kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut menyebabkan informasi-informasi yang dianggap penting tidak sampai ke buruh atau pengusaha. Pada tahun 2020 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah sebanyak 0 kasus.
Pada tahun 2024 terdapat 12 kasus perselisihan dan semuanya dapat terselesaikan 100%.

**Tabel 2.127**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada tahun n | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 2 | Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.1.7 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjaga agar kemampuan tenaga kerja tersebut berada pada level yang diinginkan, maka diperlukan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi terhadap para tenaga kerja tersebut.

**Tabel 2.128**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang dilatih | 77 | 175 | 200 | 45 | 18 |
| 2 | Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | 210 | 250 | 250 | 60 | 25 |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 36.49 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 72.00 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 36.49 %, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 77 orang kemudian pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 70.00 % dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 175 orang.
Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2020 disebabkan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis potensi meningkat menjadi 72 %, ini mgindikasikan makin meningkatnya komptensi tenaga kerja yang ada di kabupaten Maros.

#### 2.3.1.6.1.8 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 120 orang dengan besaran sebesar 80,00%. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan sebanyak 118 orang dengan besaran sebesar 72 %.

Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

**Tabel 2.129**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang dilatih | 120 | 121 | 127 | 127 | 18 |
| 2 | Jumlah pendaftar pelatihan berbasis Masyarakat | 150 | 175 | 184 | 184 | 25 |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) | 80,00 | 69,14 | 69.00 | 69.00 | 72.00 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.1.9 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan merupakan informasi penting yang dapat memberikan gambaran tentang upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja di bidang kewirausahaan. Untuk menyajikan data ini dengan tepat.

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 60 orang dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebesar 60%. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 107orang, dengan besaran tenaga kerja yang dilatih sebesar 60,00%. HIngga tahun 2021 sudah ada 65 pekerja yang terlatih untuk wiraswasta dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 61,71%.Pada tahun 2024, 20 pekerja yang terlatih untuk wiraswasta dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 66.67 %.

**Tabel 2.130**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang dilatih | 60 | 107 | 107 | 32 | 20 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan | 100 | 178 | 178 | 50 | 30 |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 66.67 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.1.10 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros hingga tahun 2020 mencapai 0,05 orang Sedangkan pada tahun 2024 rasio lulusan S1/S2/S3 naik sebesar 0,10.

Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Maros yang berada di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting.

**Tabel 2.131**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja**
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 19,934 | 20,931 | 40,377 | 31,865 | 44,010 |
| 2 | Jumlah penduduk | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| 3 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |

*Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 2.3.1.6.2.1 Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah proporsi perempuan yang ada pada lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah total pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah.

**Tabel 2.132**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja perempuan di lembaga pemerintah | 7,410 | 7,234 | 8,100 | 9,070 | 10,157 |
| 2 | Jumlah pekerja perempuan | 41,031 | 51,392 | 55,044 | 61,989 | 65,552 |
| 3 | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 18.06 | 14.08 | 14.72 | 14.63 | 15.49 |

*Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2020 persentase perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Maros sebesar 18,06%, kemudian menurun menjadi 15,49% pada tahun 2024. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 7,410 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 sebesar 10,157 orang.

Penambahan jumlah pekerja perempuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berhubungan dengan jumlah penerimaan Aparatur Sipil Negara yang tidak terlalu banyak pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024, bahkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 tidak ada penerimaan ASN.

#### 2.3.1.6.2.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Maros beradasarkan hasil Pilkada Calon Legislatif tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 9 orang dengan total kursi keanggotan DPRD di Kabupaten Maros sebanyak 35 kursi. Dengan demikian persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2020-2024 sebanyak 25,71%.

**Tabel 2.133**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **2** | Jumlah total kursi di keanggortaan DPR | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **3** | Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD | **25.71** | **25.71** | **25.71** | **25.71** | **25.71** |

*Sumber : Dinas P3A dalduk KB Kab. Maros, 2025*

Dari data diatas jumlah proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di parlemen menunjukkan angka stagnan dalam lima tahun terakhir, hal tersbut menunjukkan belum ada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dalam 5 tahun.

#### 2.3.1.6.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan pada lembaga swasta dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah tertentu.

**Tabel 2.134**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Pekerja perempuan di lembaga swasta | 33,621 | 31,932 | 29,991 | 28,167 | 26,455 |
| **2** | Jumlah pekerja perempuan | 41,031 | 51,392 | 55,044 | 61,989 | 65,552 |
| **3** | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | **81.94** | **62.13** | **54.48** | **45.44** | **40.36** |

*Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2025*

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2020 sebesar 81.94 %, kemudian menurun hingga mencapai 40.36 % pada tahun 2024. Jumlah pekerja perempuan swasta pada tahun 2020 sebanyak 33,621 orang, kemudian menurun hingga mencapai 26,455 orang pada tahun 2024.

#### 2.3.1.6.2.4 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korbannya.

Rasio KDRT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 rasio KDRT sebesar 0.0001 dengan kasus KDRT yang terlaporkan sebanyak 7 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga mencapai 0.0001 dengan kasus KDRT yang terlaporkan sebanyak 7 kasus.

**Tabel 2.135**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah KDRT | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| **2** | Jumlah rumah tangga | 86,636 | 88,145 | 89,628 | 102,675 | 103,398 |
| **3** | Rasio KDRT | **0.0000791** | **0.0000454** | **0.0000112** | **0.0000390** | **0.0000677** |

*Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2025*

Penurunan jumlah kasus KDRT disebabkan karena kesadaran yang cukup tinggi di masyarakat, ataupun jumlah kasus yang dilaporkan sangat sedikit. Hal ini dikarenakan KDRT masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat, sehingga kejadiannya dututupi dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### 2.3.1.6.2.5 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja 5 tahun keatas.

Kabupaten Maros sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak memiliki tenaga kerja di bawah umur (0%). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah berkomitmen dan memberikan peringatan terhadap perusahan ataupun pelaku usaha untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha serta pidana bagi perusahaan dan pelaku usaha yang melanggar.

#### 2.3.1.6.2.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan antara pria dan wanita umumnya berbeda. Biasanya partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban untuk mencari nafkah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 42,78 %, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 56.070 orang. Sedangkan pada tahun 2024, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 26.47% dengan jumlah angakatan kerja sebesar 68,438 orang.

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan pemahaman di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pekerjaan, utamanya perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya angkatan kerja perempuan.

**Tabel 2.136**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Angkatan Kerja Perempuan | 56.070 | 60.013 | 51,392 | 50,409 | 68,438 |
| **2** | Penduduk Usia Kerja Perempuan | 131.064 | 137.546 | 139,010 | 141,597 | 258,562 |
| **3** | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | **42,78** | **43,63** | **36.97** | **35.60** | **26.47** |

*Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.2.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6 orang. Pada tahun 2024 jumlah pengaduan menurun hingga mencapai 74 pengaduan/laporan.

Seluruh laporan atau pengaduan yang masuk dalam unit pelayanan telah ditindaklanjuti sehingga cakupannya mencapai 100%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen dan perhatian terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 2.137**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu | 6 | 12 | 44 | 66 | 74 |
| **2** | Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke uni pelayanan terpadu | 6 | 12 | 44 | 66 | 74 |
| **3** | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** |

*Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang mendapatkan pelayanan di puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih telah tertangani seluruhnya, sehingga cakupan pelayanannya mencapai angka 100% sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020

terdapat 4 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2024 naik hingga menjadi menjadi 21 kasus.
Tertanganinya korban kasus kekerasan perempuan dan anak di fasilitas kesehatan disebabkan petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun yang berada di RSUD Salewangang telah memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

**abel 2.138**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah korban KTP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| **2** | Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| **3** | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100 | 100 | 100 | **100** | **100** |

*Sumber : Dinas P3A Dalduk KB Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban.

**Tabel 2.139**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos | 22 | 14 | 1 | 0 | 56 |
| **2** | Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos | 24 | 22 | 14 | 1 | 56 |
| **3** | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu | | | | | |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh palayanan rehabilitasi sosial pada tahun 2020 sebanyak 22 orang. Pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan sebanyak 1 orang. Seluruh korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang memerlukan rehabilitasi sosial telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga cakupan layanan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100%.

#### 2.3.1.6.2.10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak di Kabupaten Maros masih cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sebanyak 2 orang kemudian naik hingga mencapai 9 orang pada tahun 2022. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100%.

Seluruh anak dan korban kekerasan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan disebabkan karena pada unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros telah tersedia tenaga-tenaga psikiater, tenaga kesehatan, dan ahli hukum yang akan memerikan bantuan dan pelayanan secara maksimal dan tuntas.

**Tabel 2.140**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan**
**Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum | 2 | 3 | 9 | 0 | 47 |
| **2** | Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum | 2 | 3 | 9 | 0 | 47 |
| **3** | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan bantuan Hukum | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.2.11 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 cakupan pemulangan sebesar 100% capaian tersbut bertahan sampai pada tahun 2024. Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 74 orang dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 74 orang.

Setelah mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Maros tetap melakukan pendampingan dengan melakukan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke keluarga masing-masing dengan tujuan agar para korban dapat diterima kembali ke dalam kelaurga dan lingkungan tempat tinggalnya.

**Tabel 2.141**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan | 40 | 25 | 42 | 66 | 74 |
| **2** | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT | 40 | 25 | 42 | 66 | 74 |
| **3** | Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 100. | 100. | 100. | 100. | **100.** |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.2.12 Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 40 orang. Dari jumlah korban tersebut, jumlah yang disatukan kembali ke keluarga dan masyarakat sebanyak 34 orang (85,00%). Pada tahun 2024 Cakupan layanan reintegrasi sosial sebesar 100%, dimana jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang dikembalikan ke keluarga masing-masing sebanyak 74 orang**.**

**Tabel 2.142**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan**
**Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya | 40 | 25 | 42 | 66 | 74 |
| **2** | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT | 40 | 25 | 42 | 66 | 74 |
| **3** | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.2.13 Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD**

Rasio Angka Partisipasi Murni (RPAM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki. Indikator ini digunakan untuk melihat kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan keadilan gender dalam bidang pendidikan.

Rasio APM SD perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2020 hingga tahun 2024 berada di angka 1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah siswa laki-laki tingkat SD lebih sedikit dibandingkan siswi SD perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 rasio

APM menunjukkan angka diatas 1, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SD pada tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.

**Tabel 2.143**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM SD-Perempuan | 99.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.56 |
| 2 | APM SD Laki-Laki | 99.25 | 98.47 | 99.44 | 98.99 | 93.86 |
| 3 | **Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD** | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | **1.00** |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

Lebih banyaknya penduduk jenis kelamin perempuan yang bersekolah pada tingkat SD dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

#### 2.3.1.6.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP

Rasio APM SMP perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2020 berada di atas 1. Demikian juga pada tahun 2020 dan 2024 rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki sebesar 1,07 dan 1.09. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki pada tingkat SMP lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan. Pada tahun 2024 rasionya sebesar 0,95.

**Tabel 2.144**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM SMP-Perempuan | 76.21 | 69.32 | 74.41 | 73.82 | 71.55 |
| 2 | APM SMP Laki-Laki | 69.83 | 75.54 | 75.94 | 82.13 | 75.11 |
| 3 | **Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP** | 1.09 | 0.92 | 0.98 | 0.90 | 0.95 |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

Lebih banyaknya perempuan yang bersekolah pada tingkat SMP dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di samping itu, anak laki-laki setelah tamat SD tidak melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dikarenakan mereka membantu orang tuanya dalam menopang perekonomian keluarga.

##### 2.3.1.6.2.14.1 Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 14-24 tahun adalah perbandingan jumlah anak perempuan terhadap anak laki-laki yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis. Apabila rasio kurang dari 100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, demikian sebaliknya apabila

rasio >100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2020 sebesar 1. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang melek huruf dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2024 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sebesar 1. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh penduduk 15-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.

**Tabel 2.145**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia**
**15-24 Tahun Kabupaten Maros**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | AMH 15-24 Perempuan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| **2** | AMH 15-24 Laki-Laki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| **3** | **Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | 100 | **1.00** |

*Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.3 Pangan

#### 2.3.1.6.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama, maka terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan pangan utama. Kebutuhan pangan utama diperoleh dari perkalian antara jumlah penduduk dengan konstanta (0,109 ton) yang merupakan kebutuhan pangan tiap orang per tahun. Kebutuhan pangan Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 42,194 ton, kemudian meningkat menjadi 44,544 ton pada tahun 2024.

**Tabel 2.146**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan**
**Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kebutuhan pangan (ton) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
| **2** | Jumlah Penduduk (jiwa) | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 413,590 |
| **3** | Kebutuhan Pangan Utama | 42,194 | 42,749 | 43,486 | 44,229 | 44,544 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2025*

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan kebutuhan pangan serta jumlah cadangan pangan yang tersedia. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Maros menunjukkan persentase yang melebihi 100%. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama sebesar 0,40%, sedangkan pada tahun 2024 persentase ketersediaan pangan utama sebesar 0,39%.

Tingginya produksi pangan utama ini disebabkan adanya PERDA tentang larangan alih fungsi lahan produktif serta pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan produksi petani. Adapun penurunan produksi pada tahun 2023, disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup ekstrim yang menyebabkan waktu panen bergeser ke tahun berikutnya.

**Tabel 2.147**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan**
**Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah cadangan pangan (ton) | 169 | 171 | 174 | 174 | 174 |
| 2 | Jumlah kebutuhan pangan (ton) | 42,194 | 43,265 | 43,486 | 44,229 | 44,544 |
| 3 | Ketersediaan Pangan Utama (%) | 40.00% | 39.52% | 40.00% | 39.33% | 39.00% |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.4 Pertanahan

#### 2.3.1.6.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikat adalah informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita punya. Sertifikat juga dapat menjadi bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggu gugat.

Pada tahun 2020 persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Maros sebesar 14.70%, atau seluas 20,764 ha. Pada tahun 2024 luas lahan bersertifikat meningkat menjadi 35,536.02 Ha atau 24.62 % dari total luas wilayah Kabupaten Maros.

Meningkatnya persentase luas lahan yang bersertifikat karena adanya program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara dalam penyelenggaraan sertifikat gratis bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan pengurusan sertifikat. Selain Pemerintah Kabupaten Maros juga melakukan sertifikasi terhadap seluruh asset baik tanah maupun bangunan.

**Tabel 2.148**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan**
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah luas lahan bersertifikat (Ha) | 23,801 | 33,192 | 33,235 | 33,277 | 35,536.02 |
| 2 | Jumlah luas wilayah (Ha) | 161,912 | 161,912 | 161,912 | 144,338 | 144,338 |
| 3 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | 14.70 | 20.50 | 20.53 | 23.06 | 24.62 |

*Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.4.2 Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Maros sebesar 100%. Dimana setiap izin lokasi yang diajukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal telah diterbitkan izin oleh dinas terkait.

**Tabel 2.149**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan**
**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah izin lokasi | 40 | 26 | 24 | Na | Na |
| **2** | Permohonan izin lokasi | 40 | 26 | 24 | Na | Na |
| **3** | **Penyelesaian Izin Lokasi** | 100 | 100 | 100 | | |

*Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5 Lingkungan Hidup

##### 2.3.1.6.5.1 Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan disusunyya RPPLH adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan hingga generasi berikutnya. Kabupaten Maros hingga saat ini belum memiliki dokumen RPPLH. Belum adanya dokumen RPPLH di Kabupaten Maros disebabkan adanya refokusing anggaran akibat pandemi COVID-19.

**Tabel 2.150**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Tersusunnya RPPLH Kabupaten (*) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

##### 2.3.1.6.5.2 Terintegrasinya Dokumen RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros belum memiliki dokumen RPPLH sehingga otomatis belum ada integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan RPPLH.

**Tabel 2.151**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

##### 2.3.1.6.5.3 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Pada penyusunan RPJMD Tahun

2021-2026, Kabupaten Maros telah menyusun dokumen KLHS yang digunakan sebagai dokumen pendukung terkait kondisi dan masalah lingkungan di Kabupaten Maros.

**Tabel 2.152**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Terintegrasinya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten | ada | ada | Ada | ada | ada |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kualitas air adalah dengan menggunakan mentode perhitungan Indeks Kualitas Air. Tingkat pencemaran air di Kabupaten Maros berada di kategori cemar ringan berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan pada Sungai Maros, Sungai Bantimurung, Sungai Pute dan Sungai Rammang-Rammang.

**Tabel 2.153**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Pengukur Indeks Kualitas air | Ringan | Ringan | Sedang | Sedang | Sedang |
| 2 | Nilai rata-rata hasil perhitungan indeks pencemaran air | 50.10 | 56.37 | 55.45 | 53.64 | 60.00 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbin monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx).

Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun apabila dilihat dari Indeks Kualitas Udara, terlihat tren peningkatan menuju kategori tidak sehat. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 83.89 kemudian turun menjadi 93.04 pada tahun 2024.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui kualitas udara di Kabupaten Maros berada pada kategori unggul. Dimana pada kategori tersebut kondisi udara di Kabupaten Maros sangat baik.

**Tabel 2.154**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leu | 0.390 | 0.371 | 0.320 | 0.303 | 0.23 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 83.89 | 84.96 | 87.77 | 88.74 | 93.04 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbin monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx).

Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun apabila dilihat dari Indeks Kualitas Udara, terlihat tren peningkatan menuju kategori tidak sehat. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 83.89 kemudian turun menjadi 93.04 pada tahun 2024.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui kualitas udara di Kabupaten Maros berada pada kategori unggul. Dimana pada kategori tersebut kondisi udara di Kabupaten Maros sangat baik.

**Tabel 2.155**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leu | 0.390 | 0.371 | 0.320 | 0.303 | 0.23 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 83.89 | 84.96 | 87.77 | 88.74 | 93.04 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan.

**Grafik 2.34**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

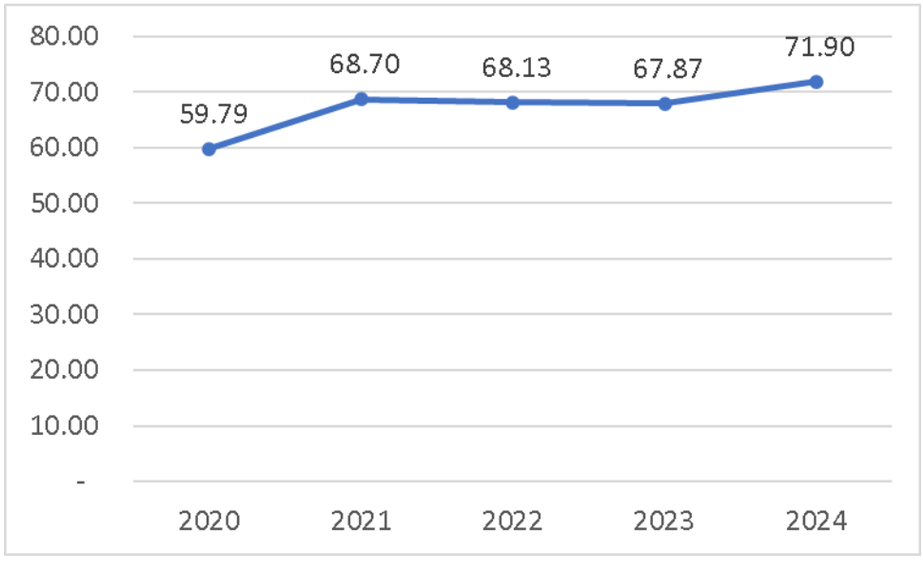


*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

Di Kabupaten Maros IKLH menunjukkan penurunan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 hal tersbut terjadi karena masih rendahnya indeks kualitas air pada waktu itu yang menjadi salah satu faktor menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Maros, namun berbagai

upaya yang dilakukan guna mendorong meningkatnya IKLH kabupaten maros melalui penigkatan indeks kualitas air dan udara menampakan hasil yang positif dengan meningkatnya secara signifikan IKLH Kabupaten Maros pada tahun 2024 menjadi 71.90.
Kenaikan IKLH Kabupaten Maros disebabkan oleh meningkatnya 2 indikator yang menopang indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara di Kabupaten Maros secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2024.

#### 2.3.1.6.5.8 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tahun tahun 2020 kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait izin PPH dan PUU LH mencapai 100,00 % .Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai 100%. Pada tahun 2024 persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai 100%. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang mengajukan izin lingkungan melalui pemeriksaan langsung di lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan.

**Grafik 2.33**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

Capaian pembinaan dan pegawasan terkait ketaataan izin lingkungan dapat mencapai 100% selama tiga tahun terakhir disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros sangat berkomitmen untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang di Kabupaten Maros, sehingga diharapkan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

#### 2.3.1.6.5.9 Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLHD)

Pejabat Pengawas Pengawas Lingkungan (PPLHD) memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkungan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugasnya PPLHD harus dilengkapi dengan pengetahuan dan kompetensi yang baik tentang lingkungan serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah PPLHD yang telah dilatih di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 1 orang.

**Tabel 2.156**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang Memenuhi Standar Minimum**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah PPLHD Yang dilatih dan/atau di bina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5.10 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup ada penghargaan yang diberikan kepada orang atau kelompok atas jasanya dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Maros telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

Penghargaan lingkungan, yang dalam hal ini adalah adipura, merupakan dampak dari usaha Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dengan cara pembersihan saluran drainase, membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai dan jembatan, memilah sampah organik dan an organik, penanaman pohon dan pot bunga untuk penghijauan.

**Tabel 2.157**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.5.11 Pengaduan Masyarakat Terkai Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampak-nya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang terbitkan setiap tahunnya di Kabupaten Maros telah ditindaklanjuti, sehingga cakupannya mencapai 100%. Jumlah pengaduan pada tahun 2020 sebanyak 13 pengaduan, kemudian pada tahun 2024 mencapai 9 pengaduan dan ditangani 100 %

Setiap pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan ditindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, apabila ditemukan pelanggaran maka Pemerintah

Kabupaten Maros akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian sebagai pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum.

**Tabel 2.158**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/KotaKabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaduan masyarakat yang ditangani | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi | 13 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 3 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.5.12 Timbulan Sampah yang Tertangani

Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan.

**Grafik 2.34**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Timbunan Sampah Yang Ditangani (%)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

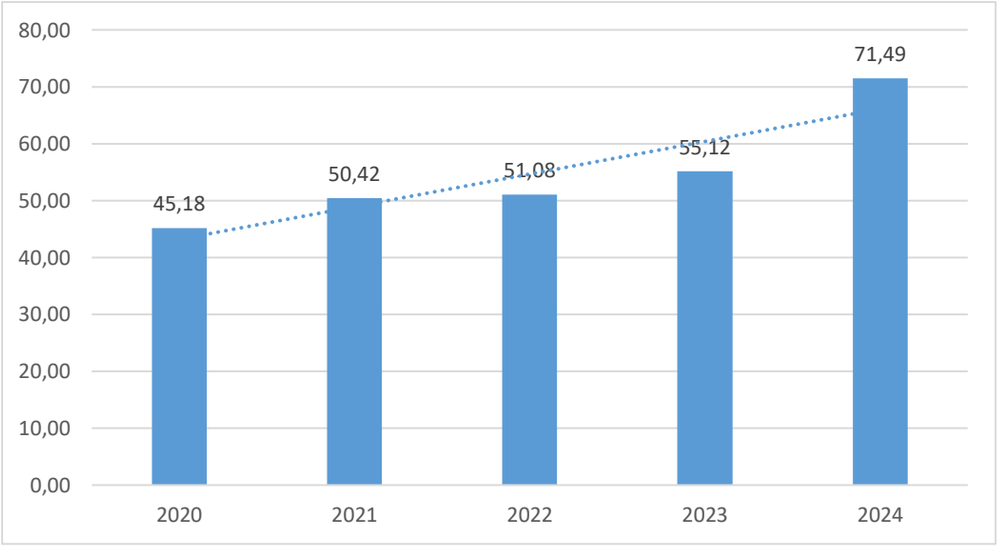


*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2020 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 45.18 % dengan jumlah volume sampah sebesar 186,682 $m^3$. Sedangkan pada tahun 2024 persentase timbulan sampah yang tertangani naik hingga mencapai 71.49 %, dengan jumlah volume sampah yang tertangani sebesar 43,172 $m^3$.

Tingginya timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Maros disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal.

**2.3.1.6.5.13 Persentase Jumlah Sampah yang DIkurangi Melalui 3R**

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll. Jumlah sampah yang dikelola melalui sistem 3R di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,31% dengan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R sebanyak 652 ton, kemudian pada tahun 2024 naik hingga menjadi 17.61 % dengan jumlah sampah yang terkurangi sebesar 10,632 ton.

**Tabel 2.159**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R (%)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan (m3) | 652 | 610 | 612 | 9,755 | 10,632 |
| 2 | Total timbunan sampah (m3) | 211,229 | 217,620 | 221,972 | 59,962 | 60,385 |
| 3 | Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 16.27 | 17.61 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

Sampah yang terkurangi melalui 3R melalui bank sampah dan kompos. Kapasitas dan bank sampah Kabupaten Maros sebesar 2 ton/hari sehingga dalam setahun dapat menampung 530 ton. Kemudian melalui pengomposan dengan daya tamping 0,5 ton/hari, sehingga daya tampung dalam setahun sebesar 182,5 ton. Daya tampung pengelolaan sampah melalui 3R masih sangat kecil dibandingkan produksi sampah yang terus bertambah setiap harinya.

**2.3.1.6.5.14 Persentase Cakupan Areal Pelayanan**

Cakupan areal pelayanan adalah luas areal yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Sejak tahun 2020 luas areal yang dilayani pengelolaan sampah sebesar 249.24 $km^2$, dengan persentase 15,69 %. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 persentase areal pelayanan sebesar

12,69% dengan luas areal pelayanan sebesar 285.06 $km^2$. Persentase areal pelayanan pengelolaan sampah tidak berubah dari tahun 2020 hingga tahun 2021 disebabkan areal seluas 205,45 $km^2$ adalah luas areal yang dihuni oleh penduduk. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 249.24 $km^2$ dengan persentasse sebesar 0.15 %.

**Tabel 2.160**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas area pelayanan pengelolaan sampah ($km^2$) | 249.24 | 285.06 | 337.78 | 1,057.59 | 249.24 |
| 2 | Luas area kabupaten/kota ($km^2$) | 161,912 | 161,912 | 144,380 | 144,380 | 161,912 |
| 3 | Persentase cakupan area pelayanan | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.73 | 0.15 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.5.15 Persentase Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang ditangani besarannya hampir sama dengan persentase volume sampah yang ditangani. Hal ini disebabkan jumlah sampah dengan volume sampah sama jumlahnya ($1m^3$ = 0,25 ton). Persentase jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 9.03 %, kemudian meningkat menjadi 53.89 % pada tahun 2024.

**Tabel 2.161**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Persentase Sampah yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah sampah yang tertangani (ton) | 4,769 | 100,522 | 102,532 | 42,809 | 32,539 |
| 2 | Total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton) | 52,807 | 159,191 | 162,374 | 59,962 | 60,385 |
| 3 | Persentase Jumlah Sampah yang tertangani | 9.03 | 63.15 | 63.15 | 71.39 | 53.89 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

Persentase sampah yang tertangani cukup tinggi di Kabupaten Maros disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal.

### 2.3.1.6.5.16 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA berhubungan dengan program Adipura. Nilai TPA di Kabupaten Maros pada tahun 2020 - 2024 sebesar 89,79%. Pada tahun 2024 Nilai TPA di Kabupaten Maros 73 %.

**Tabel 2.162**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**
**Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai TPA (Program Adipura) >/= 71 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 71.92 | 73,00 |

*Sumber : Dinas DPKPLH Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

#### 2.3.1.6.6.1 Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP menunjukkan jumlah penduduk wajib KTP (umur 17 tahun keatas) pada suatu wilayah yang telah memiliki KTP. Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Maros baru dapat dihitung pada tahun 2018 dikarenakan pada tahun 2016 sistem informasi kependudukan masih tahap pengembangan.

**Tabel 2.163**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk usia > 17 Tahun Yang Ber KTP | 239,236 | 261,337 | 265,238 | 277,829 | 286,260 |
| 2 | Jumlah penduduk usia . 17 Tahun atau telah menikah | 278,650 | 272,226 | 86,823 | 281,360 | 286,287 |
| 3 | Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk | 0.86 | 0.96 | 1.42 | 0.99 | 1.00 |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2020 rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk sebesar 0,86 kemudian naik hingga mencapai 0,96 pada tahun 2021.

Penurunan rasio penduduk ber KTP pada tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros mengalami penutupan selama bulan maret hingga mei 2020. Walaupun pelayanan dilakukan secara online, namun pelayanan KTP yang dapat diberikan kepada masyarakat sangat terbatas. Pada tahun 2024 rasio penduduk ber KTP mengalami peningkatan sebesar 1,00. Makin meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP tidak terlepas dari upaya dinas teknis terkait dalam melakukan berbagai macam program pelayanan pembuatan KTP kepada penduduk yang selama ini tidak terjangkau layanan.

#### 2.3.1.6.6.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi yang memiliki dokumen akte kelahiran. Jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 7.153 orang, dari jumlah tersebut jumlah bayi yang telah memiliki dokumen akte kelahiran sebanyak 7,010 orang, dengan demikian rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2020 sebesar 0,91. Pada tahun tahun 2020 rasio bayi berakte kelahiran menurun menjadi 0,91.

Seperti halnya dokumen KTP, penurunan penerbitan akta kelahiran juga disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros mengalami penutupan selama bulan maret hingga mei 2020. Pada tahun 2024 rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,99.

**Tabel 2.164**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Rasio Bayi Berakte kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah bayi berakte kelahiran | 6,835 | 6,789 | 6,571 | 4,109 | 4,109 |
| 2 | Jumlah bayi | 7,511 | 6,797 | 6,576 | 4,122 | 4,122 |
| 3 | Rasio Bayi Berakte kelahiran | 0.910 | 0.999 | 0.999 | 0.997 | 0.997 |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.6.3 Pasangan Berakte Nikah

Jumlah pasangan yang memiliki akte nikah yang terdapat di Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pasangan yang beragama non muslim, dikarenakan data untuk akte nikah bagi penduduk yang beragama muslim bearada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.

Rasio pasangan yang memiliki akte nikah di Kabupaten Maros cukup kecil, dimana pada tahun 2020 rasio nya sebesar 0537, yang berarti dari 94,410 pasangan nikah di Kabupaten Maros, hanya 25,000 pasangan yang memiliki akte. Pada tahun 2024 rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Maros sebesar 0,49 dengan jumlah pasangan yang memiliki akte sebanyak 89,399 pasangan.

Rasio pasangan berkate nikah sangat kecil apabila dilihat dari jumlah pasangan yang telah menikah. Hal ini disebabkan data yang berada di Kantor Kementerian Agama belum belum terintegrasi dengan data yang berada di Dinas Dukcapil Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 telah dilakukan MOU antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros dan Dinas Dukcapil dalam hal integrasi data sehingga nantinya seluruh pasangan yang memiliki akte nikah dapat tercatat di Sistem Dinas Dukcapil baik muslim maupun non muslim.

**Tabel 2.165**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Rasio Berakte Nikah Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pasangan nikah berakte nikah | 49,592 | 31,791 | 39,991 | 89,399 | 46,837 |
| 2 | Jumlah keseluruhan pasangan nikah | 94,410 | 99,343 | 1,555 | 188,265 | 95,363 |
| 3 | Rasio Pasangan Berakte Nikah | 0.53 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.6.4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Database kependudukan adalah data-data yang menerangkan legalitas penduduk dalam suatu wilayah, seperti Nomor Induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dll. Keseluruhan database ini terangkum dalam Sistem Informasi Kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros.

**Tabel 2.166**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.6.5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kabupaten Maros telah menerapkan KTP Nasional dengan basis Nomor Induk kependudukan. Namun belum seluruh penduduk Kabupaten Maros memiliki E-KTP walaupun jumlahnya sangat kecil. Hal ini disebebkan ada beberapa penduduk yang tinggal di pelosok desa dan sudah berumur yang tidak melakukan perekaman ulang untuk memperoleh E-KTP.

**Tabel 2.167**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Ketersediaan Database Kependudukan Skala**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.6.6 Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penertiban Kartu Penduduk adalah jumlah kartu penduduk yang diterbitkan. Penertiban KTP harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan agar setiap penduduk tidak memiliki KTP ganda. Dengan demikian dapat diketahui jumlah penduduk yang pasti dalam suatu wilayah berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang dimilikinya (KTP).
Cakupan penertiban KTP di Kabupaten Maros sudah cukup baik. Pada tahun 2020 sebesar 88,58%. kemudian pada tahun 2021 cakupan penertiban KTP naik hingga mencapai dengan 99.50 % jumlah KTP yang di terbitkan sebanyak 270,865 lembar.

**Tabel 2.168**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Cakupan Penertiban Kartu Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah KTP Ber-NIK Yang Diterbitkan | 239,236 | 270,865 | 297,486 | 277,829 | 286,278 |
| 2 | Jumlah penduduk wajib KTP | 270,091 | 272,226 | 276,471 | 281,360 | 286,278 |
| 3 | Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 88.58 | 99.50 | 107.60 | 99 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan adanya penutupan kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Maros selama bulan Maret hingga September tahun 2020 serta diberhentikannya pelayanan perekaman KTP keliling diakibatkan Pandemi Covid-19. Akibat dari penutupan kantor tersebut, jumlah masyarakat yang akan melakukan. Walaupun pada bulan Oktober hingga Desember pelayanan Kembali dibuka, namun jumlah masyarakat yang akan melakukan

perekaman KTP sangat dibatasi. Pada tahun 2022 capain cakupan mengalami peningkatan sebesar 107.6%. Pada tahun 2024 cakupan penertiban kartu penduduk rasionya sebesar 100 %.

#### 2.3.1.6.6.7 Cakupan Penertiban Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya.

Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di Kabupaten Maros menunjukkan pertambahan yang cukup baik. Pada tahun 2020 cakupan penertiban akta kelahiran sebesar 83.39%, dimana dari 12,231 jumlah kelahiran di tahun 2020, jumlah penduduk yang memiliki akte lahir sebanyak 10,199 orang. Pada tahun 2022 cakupan penertiban akte kelahiran menurun hingga menjadi 99,53%. Menurunnya cakupan penertiban akte kelahiran juga disebabkan oleh pandemic COVID-19. Pada tahun cakupan penertiban akta kelahiran sebesar 53.19.

**Tabel 2.169**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
**Cakupan Penertiban Akta Kelahiran**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan | 10,199 | 11,251 | 11,078 | 9,914 | 4,109 |
| 2 | Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan | 12,231 | 12,913 | 11,130 | 18,640 | 4,122 |
| 3 | Cakupan Penertiban Akta Kelahiran | 83.39 | 87.13 | 99.53 | 53.19 | 99.68 |

*Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### 2.3.1.6.7.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di desa, diperlukan sarana prasarana perkantoran yang baik. Hal ini diperlukan agar masyarakat yang memerluakn pelayanan di kantor-kantor desa merasa nyaman dan terlayani denga dengan baik.

**Tabel 2.170**
**Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kantor pemerintah desa yang baik | 69 | 70 | 70 | 72 | 75 |
| 2 | Jumlah seluruh pemerintahan desa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 86.25 | 87.50 | 87.50 | 90.00 | 93.75 |

*Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025*

Jumlah Desa di Kabupaten Maros sebanyak 80 desa yang tersebar di 14 kecamatan yang ada. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kabupaten Maros memerlukan perhatian khusus. Walaupun persentasenya sudah mencapai 80%. Cakupan sarana

perkantoran desa dalam kondisi baik pada tahan 2020 sebesar 86.25% kemudian meningkat mejadi 93.75% pada tahun 2024. Dari 80 kantor desa yang ada, masih ada 11 kantor desa yang harus diperbaiki dengan kategori kurang layak. Jumlah desa dengan status desa tertinggal sebanyak 2 desa.

Perbaikan kantor desa merupakan tanggung jawab desa yaitu sendiri dikarenakan perbaikannya berada dalam porsi anggaran dana desa yang dikelola oleh desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas PMD hanya melakukan fasilitasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik, termasuk kegiatan perbaikan kantor desa dengan Dinas Pekerjaan Umum.

#### 2.3.1.6.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

**Tabel 2.171**
**Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelompok Binaan LPM | 23 | 23 | 23 | 23 | 103 |
| 2 | Jumlah LPM | 23 | 23 | 23 | 23 | 103 |
| 3 | **Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

*Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025*

Rata-rata kelompok binaan LPM di Kabupaten Maros dari tahun 2020 hingga tahu 2024 sebanyak 1 LPM, dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap desa dan kelurahan yang di Kabupaten Maros telah memiliki LPM.

#### 2.3.1.6.7.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK ada adalah singkatan dari Pembinaan Keluarga Sejahtera adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

Rata-rata kelompok binaan PKK di Kabupaten Maros tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 9,58%, dimana jumlah PKK sebanyak 118 PKK dengan jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 1.131. Stagnannya jumlah kelompok binaan PKK selama 5 tahun terkahir dikarenakan jumlah kelompok binaan sudah mencapai batas maksimal sehingga tidak ada penambahan. Pada tahun 2024 persentasenya meningkat menjadi 17.15 % dengan kelompok binaan PKK sebesar 103 dengan jumlah kelompok yang ada sebesar 2,006.

**Tabel 2.172**
**Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kelompok binaan PKK | 1.131 | 1.131 | 1,459 | 1,511 | 2,006 |
| 2 | Jumlah PKK | 118 | 118 | 103 | 118 | 117 |
| 3 | **Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK** | 9,58 | 9,58 | 14.17 | 12.81 | 17.15 |

*Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.7.4 Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Persentase LSM yang aktif di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase LPM aktif apda tahun 2020 sebesar 23 kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2024 melonjak menjadi 103

**Tabel 2.173**
**Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
**Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelompok Binaan LPM | 23 | 23 | 23 | 23 | 103 |
| 2 | Jumlah LPM | 23 | 23 | 23 | 23 | 103 |
| 3 | **Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembedayaan Masyarakat** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

*Sumber : BKBP Kab. Maros, 2025*

#### 2.3.1.6.7.5 Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu adalah (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (IBM).

Jumlah posyandu di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 posyandu di Kabupaten Maros sebesar 118 posyandu dengan persentase posyandu sebesar 100%.

**Tabel 2.174**
**Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
**Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Posyandu Aktif | 118 | 118 | 118 | 118 | 416 |
| 2 | Jumlah Seluruh Posyandu | 118 | 118 | 118 | 118 | 416 |
| 3 | **Persentase Posyandu Aktif** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2025*

Semakin banyaknya posyandu dan keaktifan yang mencapai 100% disebabkan giatnya PKK Kabupaten Maros dalam meningkatkan kuantitas dan pelayanan posyandu, utamanya kader-kader posyandu. Kader-kader posyandu tersebut diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa dan kelurahan.

### 2.3.1.6.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### 2.3.1.6.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.05%. Tahun 2021 setelah diadakan sensus penduduk dimana BPS bekerja sama dengan Dinas Dukcapil diperoleh jumlah penduduk sebesar 396.924 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.99%. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,71.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 disebabkan banyaknya migrasi penduduk dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros. Banyak migrasi terjadi di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Marusu.

**Tabel 2.175**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pt | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| 2 | Po | 319,002 | 319,002 | 319,002 | 319,002 | 319,002 |
| 3 | T | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 4 | pt/po | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.33 |
| 5 | 1/t | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 6 | ln(Pt/po) | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| 7 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 2.05 | 1.99 | 1.73 | 1.71 | 3.24 |

*Sumber : BPS dan Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Keterangan :

Pt : Jumlah Penduduk pada tahun t
Po : Jumlah penduduk pada tahun dasar (2010)
T : Jangka waktu
R : Laju Pertumbuhan Penduduk

**Garfik 2.35**
**Laju pertumbuhan penduduk**
**Kab. Maros tahun 2020 – 2024**

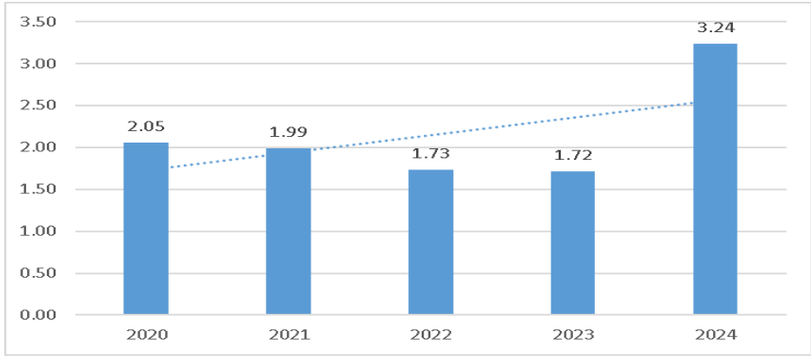


*Sumber : DP3KB 2025*

Pada tahun 2024 terdapat pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan di Kabupaten Maros yaitu sebesar 3, 24. Hal tersbut terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk di beberapa kecamatan di Kabupaten Maros. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi antara lain : Bantimurung, Tanralii, dan tompobulu

**Grafik 2.36**
**Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kab. Maros**
**Tahun 2023 – 2024**

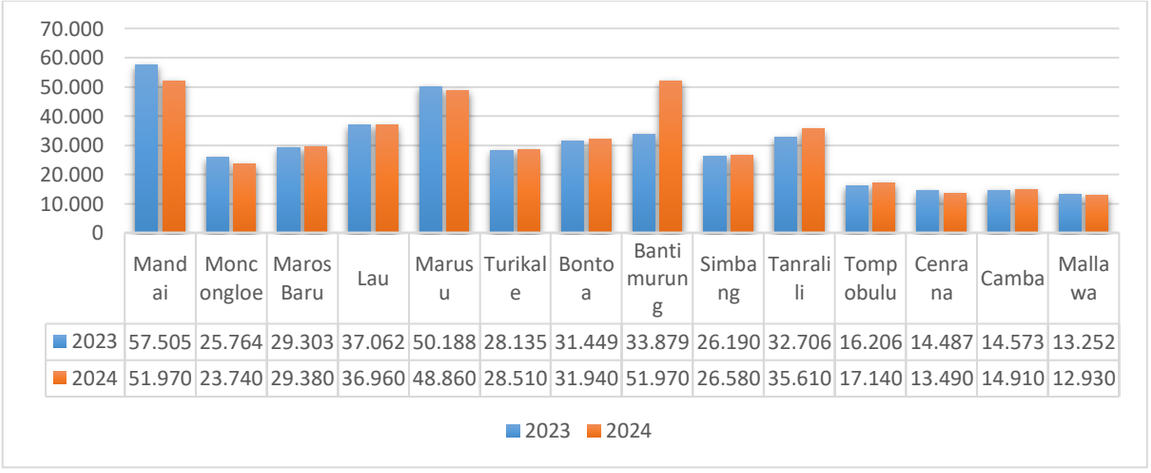


*Sumber : DP3KB KAB.Maros 2025*

**2.3.1.6.8.2. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)**

Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).

**Grafik 2.37**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Angka Kelahiran Total Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

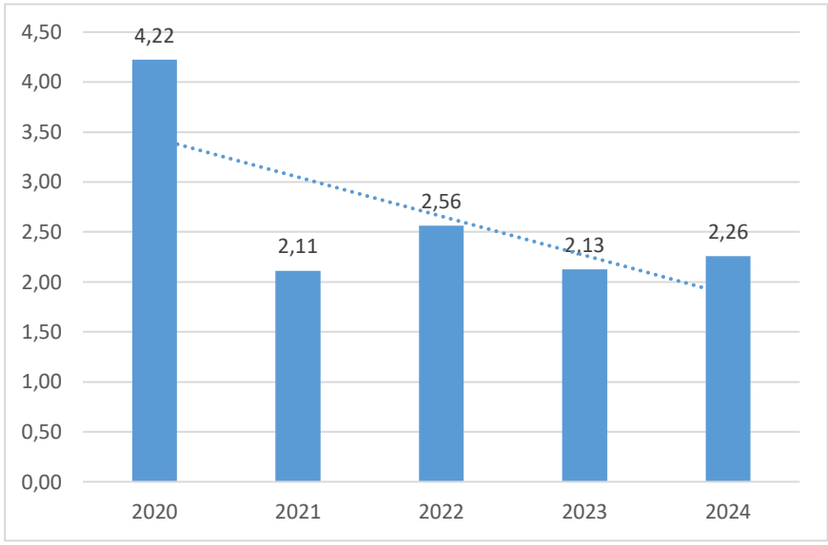


*Sumber : Dinas DP3ADP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Angka kelahiran total penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 angka TFR Kabupaten Maros sebesar 4.22 kemudian menurun hingga mencapai 2,11 pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 angka TFR kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 2.56. Pada tahun 2021 terjadi penururnan sebesar 2.11%  Berdasarkan data thersebut diketaui bahwa ibu yang berusia 15-49 tahun di Kabupaten Maros memiliki anak sebanyak 2-3 orang. Pada tahun 2024 kembali naik menjadi 2,26 dari 2. 13 di tahun 2023

Menurunnya angka TFR pada tahun 2023 disebabkan tingkat pendidikan wanita berusia 15-49 tahun yang masih cukup rendah serta. Banyak wanita yang putus sekolah setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu masih adanya budaya masyarakat untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka TFR di Kabupaten Maros

**2.3.1.6.8.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB**

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Untuk mewujudkan Kampung KB sesuai dengan standar yang diinginkan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DDP3ADALDUKKB) sebagai *leading* sector harus bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangun sebesar 22,73%. Pada tahun 2024 persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan kampung KB sebesar 100 %

**Tabel 2.176**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)**
**Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB | 10 | 10 | 39 | 39 | 39 |
| **2** | Jumlah seluruh perangkat daerah | 44 | 45 | 39 | 39 | 39 |
| **3** | **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB** | 22.22 | 22.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah dengan menyusun dokumen Rancangan Induk Pengendalian penduduk.

Penyusunan dan pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian penduduk dalam tentu memerlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah yang berhubungan dengan perencanaan dan kependudukan. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyusun dan menafaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sampai tahun 2020 sebesar 28,14 %, dimana dari 44 perangkat daerah yang ada, 11 PD diantaranya ikut serta dalam penyusunan atau ikut memanfaatkan dokumen tersebut. Pada tahun 2023 jumlah PD yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebanyak tetap di angka 11 PD dengan persentase sebesar 28,21%.

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan rancangan induk pengendalian penduduk tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan PD tersebut, apabila kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk telah selesai maka PD tersebut tidak memerlukan lagi rancangan induk tersebut.

**Tabel 2.177**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah perangkat daerah ytang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **2** | Jumlah seluruh perangkat daerah | 44 | 44 | 39 | 39 | 39 |
| **3** | **Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Yang Menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk** | 25.00 | 24.43 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.5. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Penduduk**

Untuk dapat mencapai sasaran pengendalian penduduk yang diharapkan, sesuai dengan target dalam Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Maka diperlukan payung hukum yang kuat agar seluruh kegiatan yang berhubungandengan kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dapat berpedoman pada Rancangan Induk pengendalian Penduduk.

Kabupaten Maros pada tahun 2020 dan 2024 telah memiliki kebijakan baik Peraturan Daerah Maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

**Tabel 2.178**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Jumlah Kebijakana Daerah Yang Mengatur Tentang Pengendalian**
**Kuantitas dan Kualitas Penduduk 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.6. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan**

Parameter dan proyeksi penduduk sangat penting diketahui dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Dikarenakan dengan data tersebut, dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil kemudian sesuai dengan kondisi penduduk di masa datang. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil di Kabupaten Maros hingga tahun 2018 sebanyak 7 sektor.

**Tabel 2.179**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.7. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan**

Bicara kependudukan tidak hanya bicara tentang jumlah, struktur umur, pertumbuhan, persebaran mobilitas dan penyebaran saja, namun juga mencakup, kualitas, kondisi kesejahteraan dan juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan.Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas. Kerjasama dengan penyelenggara pendidikan tentang kependudukan telah dilakukan di Kabupaten Maros.

Kerjasama ini dilakukan dengan Dinas Pendidikan dengan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan untuk sekolah lanjutan pertama. Selain itu telah dilakukan distribusi modul dan buku tentang kependudukan ke sekolah sekolah, baik SD maupun SMP.

**Tabel 2.180**
**Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.8. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga sangat erat hubungannya dengan angka kelahiran total (TFR). Rata-rata jumlah anak per kelaurga di Kabupaten Maros sebanyak 1-2 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program kelaurga berencana berjalan dengan baik dikarenakan jumlah anak per keluarga tidak lebih dari 2 orang.

**Tabel 2.181**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anak | 138,908 | 94,032 | 24,758 | 92,234 | 139,707 |
| 2 | Jumlah Keluarga | 90,707 | 97,070 | 56,406 | 103,193 | 90,719 |
| 3 | **Rata-rata Jumlah anak per kelurga** | 1.53 | 0.97 | 0.44 | 0.89 | 1.54 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Cukup rendahnya rata-rata jumlah anak perkeluarga disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan pasangan usia subur secara khusus tentang pentingnya program KB dalam keluarga serta distribusi alat kontrasepsi yang merata ke seluruh kecamatan.

**2.3.1.6.8.9. Rasio Akseptor KB**

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yangmengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi, karena pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran.

Rasio akseptor KB Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 70.05 % dimana dari 64,682 PUS yang ada, 45,307 adalah akseptor KB. Pada tahun 2024 rasio akseptor KB naik dari tahun sebelumnya hingga mencapai 63.17 %, dimana dari 65,779 PUS yang ada, 41,553 adalah akseptor KB.

Tingginya jumlah akseptor KB di Kabupaten Maros disebabkan kesadaran masyarakat, utamanya PUS yang cukup tinggi untuk ikut program KB, selain itu program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa sosialisasi program KB serta manfaatnya, distribusi alat kontrasepsi hingga ke pelosok juga sangat mempengaruhi peningkatan akseptor KB.

**Tabel 2.182**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Akseptor KB | 45,307 | 45,673 | 29,183 | 39,548 | 41,553 |
| **2** | Jumlah pasangan usia subur | 64,682 | 64,208 | 56,630 | 63,395 | 65,779 |
| **3** | **Rasio Akseptor KB** | 70.05 | 71.13 | 51.53 | 62.38 | 63.17 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB, 2025*

**2.3.1.6.8.10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**

Pengaturan kelahiran yang dikenal pula sebagai kontrasepsi dan pengaturan fertilitas, merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Perencanaan, pembekalan dan penggunaan kontrasepsi disebut keluarga berencana. Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang cukup baik setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 jumlah peserta KB aktif sebanyak 35.573 PUS dari 54.484 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi sebesar 65,29%. Kemudian meningkat menjadi 39,948 PUS yang menjadi peserta KB aktif dari 63.395 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi pada tahun 2023 sebesar 63,01%.

**Tabel 2.183**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Peserta KB Aktif | 44,928 | 44,889 | 28,991 | 39,948 | 41,553 |
| **2** | Jumlah pasangan usia subur | 64,682 | 64,208 | 56,630 | 63,395 | 65,779 |
| **3** | **Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49** | 69.46 | 69.91 | 51.19 | 63.01 | 63.17 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.10. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)**

Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dan wanita usia subur menurut umurnya.

Jumlah kelahiran remaja di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 2327 orang dengan Angka kelahiran remaja sebesar 131,09 orang per 1000 perempuan. Pada tahun 2024 angka ini meningkat hingga mencapaimenurun 452 orang per 1.000 perempuan. Pada tahun tahun 2020 ASFR Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 131,67 orang per 1.000 perempuan dengan jumlah kelahiran dari perempuan pada umur 15-19 tahun sebanyak 2.327 orang. Pada Tahun 2023 sebanyak 443 orang dengan angka kelahiran remaja sebesar 15,389 orang. Jumlahnya semakin menurun setiap tahun tapi tetap masih tinggi.

Masih cukup tingginya jumlah perempuan yang melahirkan pada kelompok umur 15-19 tahun di Kabupaten Maros disebabkan masih adanya budaya masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pelosok desa yang menikahkan anak perempuannya pada usia muda, dengan

anggapan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, dapat membaca dan menulis sudah dirasakan cukup. Di samping itu, masih berlaku pemikiran bahwa perempuan yang telah memasuki masa akil baliq harus segera dinikahkan.

**Tabel 2.184**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan**
**Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun | 2327 | 385 | 443 | 443 | 452 |
| 2 | Jumah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama | 17,675 | 15,450 | 15,450 | 15,389 | 12,209 |
| 3 | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) | 131.67 | 24.92 | 28.68 | 28.79 | 37.01 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun**

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka usia perkawinan dini.

Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2020 sebesar 0,51% kemudian menurun hingga mencapai 21 % pada tahun 2020. Jumlah PUS dengan istri dibawah 20 tahun pada tahu 1.141 PUS pada tahun 2018 kemudian menurun hingga mencapai 330 PUS pada tahun 2020. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 24.10% dengan jumlah PUS dengan instri dubawah 20 tahun sebesar 13,432 orang.

**Tabel 2.185**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 tahun | 330 | 13,650 | 13,650 | 13,432 | 443 |
| 2 | Jumlah pasangan usia subur | 64,682 | 64,208 | 56,630 | 63,380 | 65,779 |
| 3 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun | 0.51 | 21.26 | 24.10 | 21.19 | 0.67 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Menurunnya cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang dimiliki setiap pasangan, sehingga pengetahuan tentang umur yang ideal untuk menikah telah dimiliki oleh pasangan tersebut. Selain itu sosialisasi serta pelatihan yang dilakukan DDP3ADALDUKKB ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat umum juga sangat membantu dalam menurunkan angka cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun.

**2.3.1.6.8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)***

Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi *(unmet need)* didefinisikan sebagai kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan perilaku penggunaan kontrasepsi. Beberapa wanita yang menikah dan tidak menikah ingin menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi menunjukkan tren yang berfluktuatif selama kemudian menurun hingga mencapai 14,08 % Pada tahun 2020 cakupan PUS *Ummet Needkemudian* meningkat hingga mencapai 29,29% pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 9,93 %.

**Tabel 2.186**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)***
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani | 9,104 | 9,704 | 16,788 | 9,058 | 6,531 |
| 2 | Jumlah pasangan usia subur | 64,682 | 64,208 | 56,630 | 63,395 | 65,779 |
| 3 | Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | 14.08 | 15.11 | 29.65 | 14.29 | 9.93 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang**

Penggunaan kontrasepsi jangka panjang merujuk pada metode kontrasepsi yang memberikan perlindungan terhadap kehamilan untuk jangka waktu yang lama tanpa memerlukan tindakan harian atau mingguan dari pengguna. Metode ini mencakup berbagai jenis alat dan prosedur yang efektif untuk mencegah kehamilan selama beberapa tahun

Alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD, implant dan kontrasepsi mantap. Disamping mempercepat penurunan angka kelahiran, penggunaan kontrasepsi jangka panjang juga efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif.

**Tabel 2.187**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP | 11,789 | 10,758 | 6,625 | 8,454 | 9,653 |
| 2 | Jumlah akseptor KB | 45,307 | 45,673 | 30,122 | 39,548 | 41,553 |
| 3 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang | 26.02 | 23.55 | 21.99 | 21.38 | 23.23 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama 1 tahun terakhir (2023-2025). Persentase penggunaan MKJP pada tahun 2023 sebesar 21,72%, kemudian meningkat menjadi 23,23% pada tahun 2024. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP, terlihat bahwa jumlahnya sangat sedikit. Hal ini

disebabkan banyak askeptor yang lebih memiliki menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, Suntik dan kondom.

**2.3.1.6.8.14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah jangka waktu pemakaian alat kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur. Semakin panjang keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS, semakin baik.

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi sebesar 87.06% kemudian menurun hingga mencapai 15.72% pada tahun 2024.

**Tabel 2.188**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Tingkat Keberlasungan Pemakaian Kontrasepsi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi | 19,754 | 20,842 | 25,408 | 16,999 | 6,531 |
| 2 | Jumlah akseptor KB | 45,307 | 45,673 | 29,183 | 39,948 | 41,553 |
| 3 | Persentase Tingkat Keberlangusngan Pemakaian Kontrasepsi | 43.60 | 45.63 | 87.06 | 42.55 | 15.72 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB**

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW, dengan kata lain Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Cakupan anggota BKB yang ber KB Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 43.60 %, kemudian turun mencapai 5.98 % pada tahun 2024. Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2. Dibawah ini, diketahui bahwa jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin pahamnya anggota kelompok BKB tentang program KB, sehingga anggota kelompok BKB tersebut telah dapat mengatur jarak umur antara anak pertama dan kedua dan seterusnya, sehingga setiap anak memiliki masa tumbuh kembang yang cukup baik.

**Tabel 2.189**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB | 19,754 | 20,842 | 25,408 | 16,999 | 2,484 |
| 2 | Jumlah akseptor KB | 45,307 | 45,673 | 29,183 | 39,948 | 41,553 |
| 3 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB | 43.60 | 45.63 | 87.06 | 42.55 | 5.98 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.16.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB**

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

Cakupan anggota BKR ber-KB selama tahun 2020 hingga tahun 2024 di Kabupaten Maros menunjukkan pennurunan. Pada tahun 2020 cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 12.77 %, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 3.15 %. Walaupun secara umum cakupannya meningkat, namun apabila dibandingkan dengan jumlah akseptor KB, jumlah anggota kelompok BKR yang ber – KB jumlah sangat sedikit.

**Tabel 2.190**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber - KB**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB | 5,786 | 5,622 | 492 | 971 | 1,308 |
| 2 | Jumlah akseptor KB | 45,307 | 45,673 | 29,183 | 39,948 | 41,553 |
| 3 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber- KB | 12.77 | 12.31 | 1.69 | 2.43 | 3.15 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB**

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Cakupan anggota BKL yang ber-KB juga meningkatkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 cakupan BKL ber-KB sebesar 5.56 %. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0.73%.

Jumlah anggota BKL ber-KB cukup sedikit dikarenakan jumlah penduduk lansia yang memang tidak banyak, selain itu dikarenakan faktor umur, banyak anggoka BKL merasakan tidak perlu ber-KB karena menganggap bahwa dirinya tidak dapat berproduksi lagi.

**Tabel 2.191**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB | 2,519 | 1,828 | 154 | 266 | 305 |
| 2 | Jumlah akseptor KB | 45,307 | 49,271 | 29,183 | 39,948 | 41,553 |
| 3 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber- KB | 5.56 | 3.71 | 0.53 | 0.67 | 0.73 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan**

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan pelayanan konseling keluarga untuk mendukung pembinaan keluarga yang telah diselenggarakan oleh masyarakat. Kebahagiaan keluarga sangat tergantung kualitas setiap individu anggota keluarga yang di pengaruhi beberapa aspek antara lain kesiapan remaja dalam menuju jenjang rumah tangga.

Persentase PPKS di Kabupaten Maros hingga tahun 2020 sebesar 50.00% dengan jumlah PPKS sebanyak 4 PPKS, kemudian pada tahun 2024 persentasenya meningkat hingga mencapai 100% dengan jumlah PPKS yang terbentuk sebanyak 14 PPKS. Jumlah PPKS yang terbentuk pada tahun 2020 sudah sangat mencukupi dikarenakan terdapat beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan sehingga 1 PPKS dapat melayani beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan.

**Tabel 2.192**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah PPKS | 7 | 4 | 2 | 14 | 14 |
| **2** | Jumlah Kecamatan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **3** | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap kecamatan | 50.00 | 28.57 | 14.29 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.19. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

Pusat informasi dan konseling (PIK) adalah suatu wadah kegiatan PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dan mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

**Tabel 2.193**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah PIK R/M | 167 | 106 | 132 | 133 | 133 |
| **2** | Jumlah Sekolah | 368 | 368 | 368 | 368 | 401 |
| **3** | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa | 45.38 | 28.80 | 35.87 | 36.14 | 33.17 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan, cakupan remaja dalam PIK sebesar 100%, dikarenakan pada seluruh kecamatan telah terbentuk PIK. Namun untuk mengetahui cakupan PIK yang sebenarnya, maka yang dihitung adalah jumlah sekolah yang telah memiliki PIK. Apabila cakupan PIK dihitung berdasarkan sekolah maka diperleh data pada tahun 2020 cakupan PIK sebesar 45.38 % kemudian menurun menjadi 33.17% pada tahun 2024.

Walaupun mengalami peningkatan namun jumlah PIK yang terbentuk belum mencakup keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran

yang dimiliki oleh Dinas DP3ADALDUKKB dalam melatih remaja dan mahasiswa agar memiliki kompetensi untuk mengelola PIK di sekolah masing-masing. Selain itu lokasi sekolah-sekolah yang cukup jauh di pedalaman juga menjadi kendala tersendiri.

**2.3.1.6.8.20. Cakupan PKB/PLKB yang DIgunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**

Cakupan PKB/PLKB yang digunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah PKB dan PLKB Kabupaten Maros sebanyak 138 kelompok, kemudian menurun menjadi 120 kelompok pada tahun 2024. Cakupan PKB dan PLKB yang digunakan sebesar 100%.

**Tabel 2.194**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan | 138 | 135 | 129 | 120 | 120 |
| 2 | Jumlah PKB/PLKB | 138 | 135 | 129 | 120 | 120 |
| 3 | Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.21. Cakupan PUD Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri**

Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan.

**Tabel 2.195**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anggota kelompok UPPKS yang Ber-KB Mandiri | 1,660 | 565 | 309 | 377 | 481 |
| 2 | Jumlah Anggota kelompok UPPKS | 2,427 | 767 | 1,088 | 1,657 | 1,657 |
| 3 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri | **68.41** | **73.66** | **28.40** | **22.75** | **29.03** |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri pada tahun 2020 sebesar 68.41 % kemudian menurun hingga mencapai 22,75% pada tahun 2024.

Semakin banyaknya anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri disebabkan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas DP3ADALDUKKB bahwa dengan ber KB, maka anggota keluarga yang harus dihidupi tidak banyak sehingga beban juga semakin kecil. Dengan demikian anggota kelompok dapat meningkatkan pendapatan hingga dapat mencapai keluarga sejahtera.

**2.3.1.6.8.22. Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (DP3ADALDUKKBD) di Setiap Desa/Kelurahan**

Peran Petugas Pembantu Pembinaan sebagai penyedia fasilitas khususnya tentang fasilitas keluarga berencana yang terdiri dari tempat, obat-obatan dan alat peraga edukasi kontrasepsi. Sedangkan penerima layanan terdiri dari masyarakat yang merupakan Pasangan Usia Subur dan Wanita Usia Subur. Peran DP3ADALDUKKBD juga mendapat tugas tambahan yang merupakan UPPKS dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina lingkungan keluarga. Seluruh desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Maros sebanyak 103 desa/kelurahan telah memiliki DP3ADALDUKKBD sehingga rasionya telah mencapai 100.

**Tabel 2.196**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (DP3ADALDUKKBD) Setiap Desa/Kelurahan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah petugas pembantu pembina KB desa | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 3 | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (DP3ADALDUKKBD) Setiap Desa/Kelurahan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.23. Cakupan Keteresediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk memenuhi Permintaan Masyarakat**

Cakupan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi (alokon) di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga 2024 telah melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Dengan kata lain ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk Kabupaten Maros telah over target. Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 cakupan ketersediaan dan distribusi alokon sebesar 66.56 % kemudian naik hingga mencapai 98.67 % pada tahun 2024

Menurunnya jumlah alokon yang tersedia di fasket pada tahun 2020 diakibatkan adanya penutupan bandara dan pembatasan aktivitas masyarakat apda bulan Maret hingga September tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah alokon yang tersedia di kabupaten sebanyak 10,720 alokon, sedangkan kebutuhan masyarakat sebesar 38.835 alokon.

**Tabel 2.197**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota | 28,145 | 10,720 | 9,675 | 50,528 | 43,905 |
| 2 | Perkiraan permintaan masyarakat | 42,285 | 38,835 | 44,612 | 32,834 | 44,497 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat | 66.56 | 27.60 | 21.69 | 153.89 | 98.67 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.24. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**

Persentase faskes dan jaringannya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR telah mencapai 100%, dengan demikian semua fasilitas kesehatan (faskes) dan jejaring yang ada di Kabupaten Maros telah memberikan pelayanan KBKR. Jumlah faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Maros sebanyak 21 Unit, kemudian meningkat hingga mencapai 25 unit pada taun 2021 hingga tahun 2022. Pada tahu 2024 terjadi peningkatan yang sginifikan dengan jumlah faskes jejaring sebesar 93 unit.

**Tabel 2.198**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS | 21 | 25 | 25 | 79 | 93 |
| 2 | Jumlah faskes dan jejaring | 25 | 25 | 25 | 148 | 154 |
| 3 | Persentase Faskes dan jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan | 84.00 | 100.00 | 100.00 | 53.38 | 60.39 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.25. Cakupan Penyediaan Data Mikro Keluarga di Setiap Desa**

Data mikro diperlukan agar tersedia kependudukan dan keluarga yang lengkap dan akurat sehingga indikator-indikator pembangunan yang berhubungan dengan kependudukan dan keluarga dapat teridentifikasi dalam rangka melakukan intervensi pembangunan (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) KKBPK apabila diperlukan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa Kabupaten Maros telah mencapai 100% sejak tahun 2020 sampai tahun 2024.

**Tabel 2.199**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia | 40 | 58 | 58 | 58 | 58 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga | 40 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.26. Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terkena IMS dikarenakan perkembangan hormonal yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis sedikit banyak menyebabkan remaja mulai menunjukkan ketertarikan pada aktivitas seksual. Pemahaman yang tepat dan informasi yang jelas tentang masalah seksual dapat menghindarkan remaja dari resiko tertular IMS. Kasus remaja yang terkena IMS tidak ditemukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

**Tabel 2.200**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah remaja | 64,733 | 64,974 | 65,215 | 34,843 | 62,910 |
| 3 | Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular eksual (IMS) | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.8.27. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak**

Kesadaran dan pemahaman orangtua terhadap proses tumbuh-kembang anak jelas memiliki peran penting terhadap masa depan anak-anak. Jumlah keluarga yang memiliki balita di Kabupaten Maros pada tahun 2020 cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 15,36% kemudian menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 6.89%.

**Tabel 2.201**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang | 5,780 | 1,002 | 3,691 | 4,483 | 2,645 |
| 2 | Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak | 37,629 | 41,020 | 39,204 | 39,842 | 38,372 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cakupan Keluarga Yang mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | 15.36 | 2.44 | 9.41 | 11.25 | 6.89 |

*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

Sehubungan dengan penurunan tersebut, Dinas DP3ADALDUKKB mengadakan penyuluhan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak bertempat. Kegiatan ini betujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan orang tua/keluarga dalam mengasuh anak dari masa kehamilan, setelah lahir sampai balita, dengan berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan keluarga terutama anak secara holistik (menyeluruh) terutama dari stunting.

### 2.3.1.6.8.28. Rata-Rata Angka Usia Kawin Pertama

Usia kawin pertama adalah usia dimana seseorang melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya. Usia kawin pertama dalam suatu pernikahan berarti umur mulai berhubungan kelamin antara individu wanita yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan. Rendahnya umur perkawinan pertama pada wanita disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Usia kawin Pertama di Kabupaten Maros rata-rata 25-28 tahun selama tahun 2020 hingga tahun 2024.

**Grafik 2.37**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Angka Usia Kawin Pertama**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

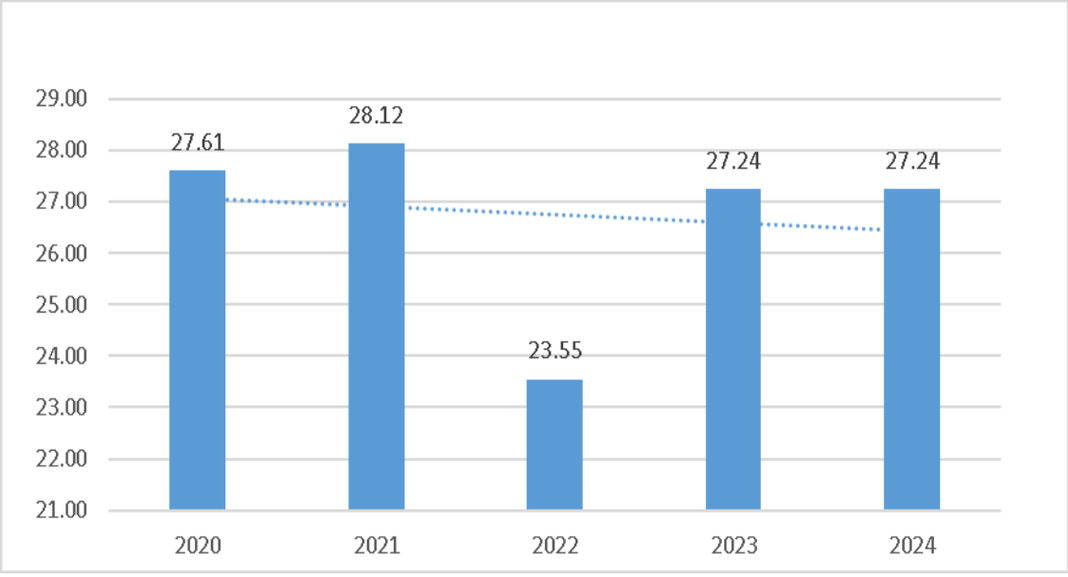


*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.8.29. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan

Jumlah alokasi anggaran kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan melalui APBD dan APBD desa menunjukkan trend penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,45 menjadi 0,33 pada tahun 2023, trend kenaikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 40 %. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten dan desa dalam penanganan maslah kependudukan dan KB.

**Grafik 2.38**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
**Persentase Pembiayaan Program Kependudukan 2020 – 2024**

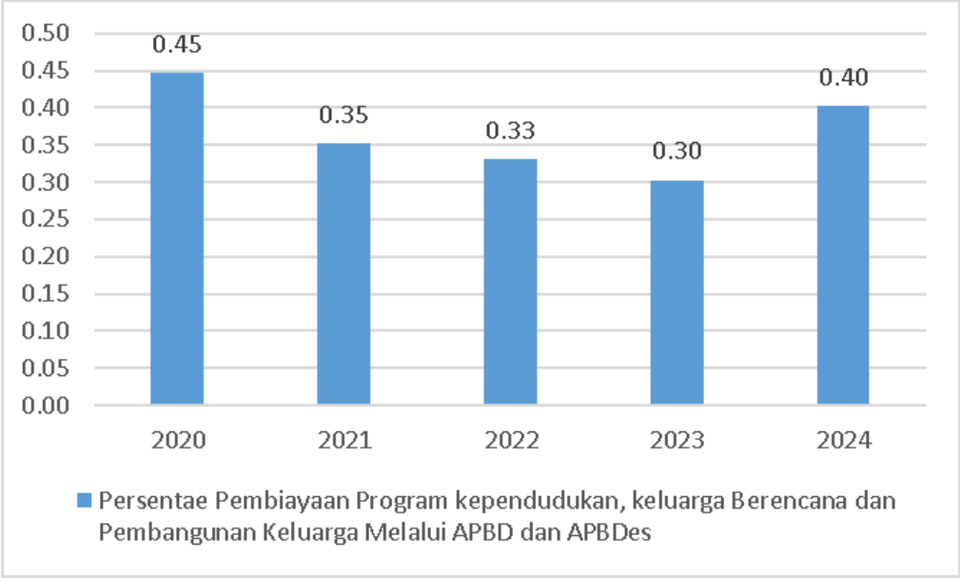


*Sumber : Dinas DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.9 Perhubungan

#### 2.3.1.6.9.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah penumpang yang tercatat setiap tahunnya, baik pada penumpang untuk angkutan umum darat, laut maupun udara. Jumlah arus penumpang umum Kabupaten Maros didominasi oleh penumpang pesawat udara. Tahun 2020 jumlah penumpang di Kabupaten Maros sebanyak 12.662.000. Pada tahun 2019, jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 13.59.492 orang. Jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2020 sebesar 1.797.772 orang. Pada tahun 2022 jumlah penumpang sebesar 2.159.169 orang.

**Tabel 2.202**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah arus penumpang umum Bis | 200 | 136 | 204 | 189 | NA |
| 2 | Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara | 1,797,572 | 1,799,171 | 2,159,005 | 9,554,322 | NA |
| 3 | Jumlah Penumpang Angkutan Umum | 1,797,772 | 1,799,307 | 2,159,169 | 1,834,727 | NA |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang pada angkutan umum yang disebabkan adanya pademi CONID-19 pada tahun 2020. Akibat pandemi tersebut terjadi penutupan bandara, terminal dan seluruh operasional angkutan umum dihentikan selama kurang lebih 4 bulan. Pada tahun 2021, pandemic covid-19 sudah agak terkendali sehingga terjadi kenaikan jumlah penumpang walauun tidak terlalu siginfikan.

**2.3.1.6.9.2.Rasio Izin Trayek**

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

**Tabel 2.203**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Rasio Izin Trayek Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah izin trayek yang dikeluarkan | 123 | 0 | 0 | 0 | NA |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | NA |
| **3** | Rasio Izin Trayek | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NA |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

Rasio izjin trayek Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 rasio izin tratek sebesar 0,0003 dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 166 izin Pada tahun 2023 rasio izin trayek yang dikeluarkan sebesar 0,000 tidak ada izin trayek yang dikeluarkan sebesar 0 izin.

Penurunan izin trayek yang dikeluarkan disebabkan banyaknya angkutan umum yang berhenti beroperasi diakibatkan banyaknya angkutan *online* yang lebih banyak digunakan masyarakat, selain itu pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 jumlah angkutan umum yang berhenti beroperasi juga bertambah.

**2.3.1.6.9.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan. Kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros untuk angkutan umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 428 kendaraan. Pada tahun 2024 jumlah uji KIR sebanyak 206 kendaaan.

**Tabel 2.204**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah uji KIR angkutan umum** | - | 426 | 426 | 755 | 206 |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

**2.3.1.6.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus**

Pelabuhan, terminal atau bandara udara adalah sarana/tempat yang digunakan sebagai kegiatan pengusahaan untuk menaikkan dan menurunkan barang atau penumpang. Pelabuhan, terminal dan Bandar udara biasanya diperlukan bagi daerah-daerah untuk dapat berkembang karena kelancaran transportasi baik udara, laut maupun darat sangat bergantung pada ketersediaan sarana tersebut.

Kabupaten Maros tidak memiliki terminal bus dan terminal laut. Yang terdapat di Kabupaten Maros hanya Terminal C yang melayani angkutan umum antar kecamatan dan desa. Kabupaten

Maros memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di Kecamatan Mandai.

**Tabel 2.205**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Pelabuhan laut | 48 | 48 | 48 | 1 | 0 |
| **2** | Jumlah Terminal Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3** | Jumlah Pelabuhan Udara | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Total | 50 | 50 | 50 | 4 | 3 |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

**2.3.1.6.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat**

Layanan angkutan darat adalah jumlah masyarakat yang dapat dilayani dengan angkutan darat yang tersedia pada suatu wilayah atau daerah. Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Maros cukup kecil apabila dilihat dari jumlah penumpang yang harus dilayani. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat sebesar 36.97 %. menurun akibat adanya pandemi persentase layanan angkutan darat menurun sangat drastis hingga mencapai 11,00%. Pada tahun 2022 masih mengalami sedikit kenaikan sebesar 36.18%. Pada tahun 2024 mencapai nilai 29.77 %.

**Tabel 2.206**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Angkutan darat | 410 | 420 | 525 | 16,986 | 710 |
| **2** | Jumlah penumpang angkutan darat | 1,109 | 1,209 | 1451 | 169,860 | 2,385 |
| **3** | Persentase Layanan Angkutan Darat | 36.97 | 34.74 | 36.18 | 10.00 | 29.77 |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

**2.3.1.6.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Maros setiap tahunnya menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR setiap tahun terus menurun, namun jumlah angkutan umum juga jumlahnya semakin sedikit.

Pada tahun 2020 persentase kepemilikan KIR meningkat hingga mencapai 5.37 % disebabkan jumlah angkutan umum yang bertambah sedangkan Dinas Perhubungan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan maka pengujian KIR tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2024 persentase kepemilikan KIR menurun sangat signifikan hingga mencapai 55.98 %. Hal ini disebabkan banyaknya angkutan umum yang berhenti beroperasi akibat pandemi sehingga yang tertinggal sebanyak 461 unit angkutan umum, dan keseluruhannya telah memiliki KIR.

**Tabel 2.207**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n | 22 | 170 | 215 | 283 | 262 |
| 2 | Jumlah angkutan umum pada tahun n | 410 | 420 | 435 | 461 | 468 |
| 3 | Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum | 5.37 | 40.48 | 49.43 | 61.39 | 55.98 |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

**2.3.1.6.9.7.Pemasangan Rambu-Rambu**

Rambu-rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Persentase pemasangan rambu di Kabupaten Maros telah mencapai 100%, namun ini untuk satu jenis rambu-rambu saja. Pada tahun 2020 jumlah rambu-rambu yang terpasang sebanyak 75.00 unit, kemudian pada tahun 2024 sebanyak 70.09 unit.

**Tabel 2.208**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Pemasangan Rambu-Rambu**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n | 150 | 160 | 133 | 99 | 82 |
| 2 | Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia | 200 | 200 | 150 | 120 | 117 |
| 3 | Pemasangan Rambu-Rambu | 75.00 | 80.00 | 88.67 | 82.50 | 70.09 |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

**2.3.1.6.9.8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan digunakan untuk kemampuan jalan tersebut untuk menampung jumlah kendaraan yang ada. Hal ini berhubungan dengan tingkat kemacetan jalan. Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan pada tahun 2020 sebesar 0.023% kemudian menurun hingga mencapai 0.043 % pada tahun 2024.Menurunnya rasio disebabkan jumlah panjang jalan yang tidak bertambah sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kemacetan di Kabupaten Maros akan semakin tinggi setiap tahunnya.

**Tabel 2.209**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjang jalan | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,294 | 1,239 |
| 2 | Jumlah kendaraan | 44,327 | 44,329 | 60,115 | 23,889 | 28,750 |
| 3 | **Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan** | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.054 | 0.043 |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

**2.3.1.6.9.9. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/BandaraTerminal Pertahun**

Jumlah barang dan orang yang melalui dermaga, terminal/bandara pertahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar udara Hasanuddin.

**Tabel 2.210**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**
**Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bandara** | | | | | |
| | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 1797572 | 1799171 | 2159005 | 9553322 | 10,541,421 |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 143614485 | 5624916924 | 7031146155 | 185182882 | 94,544,279 |
| 2 | **Dermaga** | | | | | |
| | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 1,797,572 | 1,799,171 | 2,159,005 | 9,553,322 | 0 |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 143,614,485 | 5,624,916,924 | 7,031,146,155 | 185,182,882 | 0 |
| 3 | **Terminal** | | | | | |
| | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 350 | 370 | 417 | 268200 | 32,256 |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 111 | 144.8480241 | 149 | 147 | 6,914 |
| 4 | **Jumlah orang terangkut (Jiwa)** | 1798122 | 1799743.988 | 2159733 | 10867322 | **10,573,677** |
| | **Jumlah barang terangkut (Ton)** | 143614596 | 5624917069 | 7031146354 | 186228829 | **94,551,193** |

*Sumber : Dinas PUTRPP, 2025*

Meningkatnya jumlah barang yang terangkut pada tahun 2023 disebabkan kebijkaan pembukaan mobilitas barang dan jasa pacsa covid yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana banyak pergerakan barang yang terangkut melewati bandara Sultan Hasanuddin. Pergerakan barang ini adalah barang-barang yang di pesan masyarakat melalui aplikasi belanja online.

**2.3.1.6.10 Komunikasi dan Informatika**

**2.3.1.6.10.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi (IKM) Masayarakat di Tingkat Kecamatan**

Kelompok informasi masyarakat adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain Kelompok Informasi Masyarakat bertujuan untuk memberikan nilai tambah. Jumlah KIM yangdibentuk sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Kabupaten Maros pada tahun 2024 telah melakukan pembentukan KIM pada setiap kecamatan yang ada sehingga cakupan pengembangan dan pemberdayaannya mencapai 100%.

**Tabel 2.211**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika**
**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **2** | Jumlah Kecamatan yang ada dalam kab/kota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **3** | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Cakupan layanan telekomunikasi adalah luas areal atau wilayah yang dapat terjangkau atau terlayani komunikasi dan telekomunikasi termasuk fasilitas internet. Dari 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, hampir seluruhnya telah terjangkau oleh layanan telekomunikasi. Pada tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi sebesar 77.74% dengan luas wilayah yang tercover sebesar 1.258 $km^2$, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 48,40 % dengan luas wilayah tercover sebesar 698.53 $km^2$.

Cakupan layanan belum mencapai 100% dikarenakan adanya beberapa desa/kelurahan yang memiliki kondisi geografis yang sangat sulit untuk dilakukan pemasangan tower serta peralatan telekomunikasi seperti desa/kelurahan yang berada di areal ketinggian dengan akses yang cukup sulit serta di wilayah yang berada di lembah karst sehingga sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanakan komunikasi dengan baik.

**Tabel 2.212**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika**
**Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Luas wilayah yang tercoverage ($km^2$) | 1.258,69 | 1,304.24 | 1,569.76 | 612.14 | 698.53 |
| **2** | Luas wilayah keseluruhan ($km^2$) | 1,619.12 | 1,619.12 | 1,619.12 | 1,443.80 | 1,443.80 |
| **3** | **Cakupan Layanan Telekomunikasi** | **77.74** | **80.55** | **96.95** | **42.40** | **48.38** |

*Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.10.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Seluler**

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting pada jaman sekarang ini, dikarenakan fungsinya yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi (*Smartphone*). Persentase penduduk Kabupaten Maros yang menggunakan telepon selular menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 71.18 % dengan jumlah penduduk yang menggunakan HP sebanyak 273,810 orang. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang menggunakan HP meningkat sebanyak 264.867 orang dengan persentase sebesar 62.47 %.

Seperti halnya listrik, HP juga saat ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat umum. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS). Selanjutnya handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi. Juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Dengan semakin banyaknya fungsi HP tersebut maka masyarakat saat ini semakin banyak yang menggunakan HP.

**Tabel 2.213**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika**
**Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Selular**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon | 278,877 | 316,691 | 337,434 | 275,929 | 264867 |
| **2** | Jumlah penduduk | 391,774 | 396,924 | 403,774 | 410,669 | 423,990 |
| **3** | Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon | 71.18 | 79.79 | 83.57 | 67.19 | 62.47 |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.10.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet**

Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan *standard system global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai protocol pertukaran paket. Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan internet sudah sangat tinggi diakibatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang juga sangat besar.

Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Maros masih sangat kecil. Pada tahun 2020 proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 66 % dengan kata lain dari 86,636 jumlah RT di kabupaten Maros, 57,478 diantara telah memliki akses terhadap internet. Pada tahun 2024 proporsi semakin meningkat hingga mencapai 57 % dimana dari 105,998 RT terdapat 60 245 diantaranya telah memiliki akses internet.

Semakin meningkatnya jumlah RT yang dapat mengakses internet disebabkan semakin bannyaknya sarana prasarana telekomunikasi yang tersedia, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Kominfo Kabupaten Maros.

**Tabel 2.214**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika**
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet | 57,478 | 57,478 | 54,458 | 74,696 | 60245 |
| **2** | Jumlah rumah tangga | 86,636 | 88,145 | 89,628 | 102,675 | 105,998 |
| **3** | **Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet** | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.73 | 0.57 |

*Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.10.4. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**

Seperti halnya telepon dan internet, komputer adalah salah satu sarana yang diperlukan masyarakat kehidupan sehari-hari pada jaman sekarang ini. Hampir seluruh masyarakat sekarang ini memiliki komputer/laptop. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2020 sebesar 0,14% . Pada tahun 2024 proprosi RT yang menggunakan komputer pribadi meningkat hingga mencapai 10 %.

Peningkatan jumlah RT yang menggunakan komputer pribadi disebabkan kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat, di era transformasi digital hampir seluruh kegiatan masyarakat berhubungan dengan internet yang memerlukan komputer sebagai perangkat penghubung.

**Tabel 2.215**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika**
**Proporsi Rumah Memiliki Komputer Pribadi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi | 12,439 | 10,806 | 11,669 | 10,278 | 10,798 |
| 2 | Jumlah rumah tangga | 86,636 | 88,145 | 89,628 | 102,675 | 105,998 |
| 3 | **Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi** | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |

*Sumber : Dinas KominfoSP Kab. Maros, 2024*

**2.3.1.6.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**2.3.1.6.11.1. Persentase Koperasi Aktif**

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan.Persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Maros menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.

Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 69.71%. Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif menurun hingga mencapai 69.71 %. Menurunnya persentase koperasi aktif pada tahun 2020 disebabkan karena jumlah koperasi aktif jumlahnya bertambah, yang mana hal tersebut akibat adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak koperasi yang berhenti beroperasi. Pada tahun 2024 persentase koperasi aktif cenderung stagnan sebesar 46.61 %

**Tabel 2.216**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**
**Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 244 | 244 | 252 | 125 | 117 |
| 2 | Jumlah seluruh koperasi | 350 | 353 | 358 | 239 | 251 |
| 3 | **Persentase Koperasi Aktif** | 69.71 | 69.12 | 70.39 | 52.30 | 46.61 |

*Sumber : Dinas Kopurindag Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.11.2. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil**

Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: 1) Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, 2) Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) *Livelihood*, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari

nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima, 2) *Micro*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

Usaha mikro dan kecil Kabupaten Maros mendominasi jumlah UKM di Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100.00% dimana dari 17,500 UKM yang ada di Kabuapaten Maros, 17,500 diantaranya adalah usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100 % dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 17.500 unit.

**Tabel 2.217**
**Kinerja Penyelenggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**
**Persentase Usaha Mikro dan kecil**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah usaha mikro dan kecil | 17,500 | 26,874 | 33,495 | 34,229 | 34,872 |
| **2** | Jumlah seluruh UKM | 17,500 | 27,188 | 33,980 | 34,454 | 34,954 |
| **3** | **Persentase Usaha Mikro dan kecil** | **100.00** | **98.85** | **98.57** | **99.35** | **99.77** |

*Sumber : Dinas Kopurindag Kab. Maros, 2025*

Walaupun persentase meningkat, jumlah UKM dan usaha mikro kecil pada tahun 2020 menurun. Hal ini disebabkan adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak UKM yang berhenti beroperasi. Selain itu penurunan jumlah UMKM juga disebabkan adannya pendataan ulang yang dilakukan oleh DInas Koperasi, UMKM dan Perdagangan kabupaten Maros terhadap UMKM yang aktif dan tidak aktif. Pada tahun 2021 pengaruh pandemic covid 19 masih ada dengan menurunnya persentasenya sebesar 98.85%. kemudian meningkat menjadi 99,35% pada tahun 2024.

**2.3.1.6.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif**

Di Kabupaten aros Jumlah BPR/LKM yang aktif baru dapat dilihat pada tahun 2023, berjumlah 19 lembaga dari 19 lembaga yang ada.

**2.3.1.6.12 Penanaman Modal**

**2.3.1.6.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional ({PMDN/PMA)**

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor nasional baik PMDN maupun PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah investor yang menanamkan modalnya sebanyak 35 investor, kemudian bertambah menjadi 134 investor pada tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah investor di kabupaten Maros sebanyak 35 investor. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 470 investor.

Walaupun jumlah investor meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Maros bertambah banyak sesuai dengan potensi investasi yang tersedia. Hal ini disebabkan informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros sangat gencar, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan sudah tidak berbelit-belit lagi.

**Tabel 2.218**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi**
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah Investor | 35 | 134 | 142 | 950 | 470 |

*Sumber : Dinas PMPTSP kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.12.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Nilai investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 5 trilyun dan diperkirakan pada tahun 2021 jumlah investasi di Kabupaten Maros sebesar 5,6 trilyun. Pada tahun 2021 sebesar 4,9 trilyun. Pada tahun 2024 sebesar 112 trilyun Walaupun investasi yang ditanamkan oleh investor sifatnya *multiyear*, namun apabila dilihat dari nilai invstasi maka jumlah investasi tersebut masih sangat kecil.

**Tabel 2.219**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi**
**Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA) | | 5,674, 866 | 31,809,848, 990,000 | 30,888,623, 531,353 | 90,007,313, 942,270 | 112,033,458,259 ,695 |

*Sumber : Dinas BPS Prop Sulsel (ICOR MAMMINASATA), 2025*

Masih kecilnya nilai investasi di Kabupaten Maros dikarenakan kurangnya informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan yang berbelit-belit masih sangat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.

**2.3.1.6.12.3.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Maros, baik dalam negeri maupun asing. Rasio tenaga kerja yang bekerja pada Penanaman Modal Asing (PMS)/Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) pada tahun 2020 sebesar 8,22. Pada tahun 2024 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 21.60 % menurun dari tahun 2023 yang sekitar 37.92. hal ini terjadi karena tenaga kerja maros banyak yang terserap di kota Makassar.

Menurunnya rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2020 disebabkan adanya pembatasan pergerakan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap operasional PMA/PMDN dan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja.

**Tabel 2.220**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi**
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi PMDN tahun evaluasi | | 288 | 1,278 | 12,838 | 14,309 | 10,152 |
| 2 | Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi | | 35 | 134 | 142 | 441 | 470 |

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN** | % | 8.22 | 9.54 | 90.41 | 37.92 | 21.60 |

*Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.12.4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)**

Realisasi jumlah nilai investasi yang ditanamkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada tahun pertunbuhan PMDN sebesar tumbuh sebesar 11,16% pada tahun 2020. Untuk tahun 2020 diperkirakan kenakikan PMDN sebesar 12.00%. Pada tahun 2021 terjadi kontraksi sebesar -14,39%. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN sebesar 19,30%.

**Tabel 2.221**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Investasi**
**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Realisasi PMDN tahun evaluasi | | 5,674,866 | 31,809,848,990,000 | 30,888,623,531,353 | 90,007,313,942,270 | 112,033,458,259,695 |
| **2** | Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi | | 5,066,845 | 5,674,866 | 31,809,848,990,000 | 30,888,623,531,353 | 90,007,313,942,270 |
| 3 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) | Milyar Rupiah | 12.00 | 560,539,069.52 | -2.90 | 191.39 | 24.47 |

*Sumber : DPMTSP Kab. Maros 2025*

**2.3.1.6.13 Kepemudaaan dan Olahraga**

**2.3.1.6.13.1. Persentase Organisasi Pemuda Aktif**

Organisasi pemuda adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organiasi pemuda di Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2023 sebanyak 160 organisasi dengan persentase organisasi yang aktif mencapai 100%.

**Tabel 2.222**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | | 147 | 147 | 160 | | |
| **2** | Jumlah seluruh organisasi pemuda | | 147 | 147 | 160 | | |
| **3** | **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif** | % | 100 | 100 | 100 | | |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

Dari data tersebut diketahui bahwa para pemuda di Kabupaten Maros memiliki keinginan dan kemampuan untuk berorganisasi yang cukup tinggi. Kondisi ini juga ditunjang dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pembinaan terhadap para pemuda di Kabupaten Maros.

**2.3.1.6.13.2. Persentase Wirausaha Muda**

Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Secara nominal terjadi peningkatan jumlah wirausaha muda di Kabupaten Maros dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang mana pada thun 2020 hanya berjumlah 309 wirausaha muda melonjak menjadi 8.323 pada tahun 2024, meskipun dari sisi persentase menurun disebabkan makin banyaknya jumlah seluruh wirusaha yang ada di kabupaten maros. Meningkatnya jumlah nominal wirausaha muda di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini efektif dalam meningkatkan minat usaha para pemuda, meskipun masih memerlukan upaya optimalisasi program pembinaan pada masa yang akan datang.

**Tabel 2.223**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah wirausaha muda | | 309 | 329 | 530 | 8,323 | 8,323 |
| **2** | Jumlah seluruh wirausaha | | 3,600 | 3651 | 4,750 | 95,970 | 95,970 |
| **3** | **Persentase Wirausaha Muda** | % | 8.58 | 9.01 | 11.16 | 8.67 | 8.67 |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga**

Pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet, tim, dan olahraga secara keseluruhan. Berikut adalah cakupan utama dalam pembinaan olahraga:

Jumlah cabang olahraga yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan KONI kabupaten Maros sampai tahun 2026 berjumlah 36 cabang sehingga cakupan pembinaan olahraga mencapai 100%. Ke-36 cabang olahraga tersebut telah mendapatkan pembinaan baik secara materi maupun pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2.224**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah cabang olahraga yang dibina | | 27 | 27 | 37 | 36 | 36 |
| **2** | Jumlah seluruh cabang olagraha yang ada/terdaftar | | 27 | 27 | 37 | 36 | 36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Cakupan Pembinaan Olahraga** | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**

Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Untuk menjadi pelatih yang resmi dan mendampingi olahragawan atau kelompok olahragawan dalam suatu pertandingan, pelatih tersebut haruslah memiliki sertifikat/lisensi kepelatihan.

**Tabel 2.225**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah pelatih bersertifikat | | 77 | 77 | 77 | 157 | 151 |
| **2** | jumlah seluruh pelatih | | 77 | 77 | 77 | 157 | 151 |
| **3** | **Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

Jumlah pelatih seluruh cabang olahraga di Kabupaten Maros sampai tahun 2024 sebanyak 151 orang. Keseluruhan pelatih tersebut telah memiliki sertifikat sehingga cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Maros sebesar 100%.

**2.3.1.6.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Atlet adalah seseorang yang mahir dalam berolahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Pembinaan terhadap atlit muda pada tahun 2020 hingga mencapai 10,61% dengan jumlah atlet yang dibina sebanyak 45 orang. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan kegiatan pembinaan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 jumlah atlet pelajar yang dibina sebesar 15,63%.

**Tabel 2.226**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Sat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah atlet pelajar yang dibina | | 45 | 46 | 70 | 55 | 55 |
| **2** | jumlah seluruh atlet pelajar | | 424 | 424 | 500 | 352 | 352 |
| **3** | **Cakupan Pembinaan Atlet Muda** | % | 10.61 | 10.85 | 14.00 | 15.63 | 15.63 |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi**

Jumlah atlet yang berprestasi dalam hal ini adalah atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional. Kabupaten Maros memiliki 2 orang atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat nasional dan internasional. Sedangkan untuk tingkat regional atau Provinsi, jumlah atlet yang berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022

terdapat 114 orang atlet yang memiliki prestasi pada tingkat propinsi dan nasional . Pada tahun 2023 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3 orang.
Jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional masih sangat kurang, hal ini disebabkan masih sangat minimnya sarana dan prasarana olahraga, khususnya di Kabupaten Maros yang memiliki standar untuk meningkatkan prestasi. Selain itu keberlanjutan pembinaan dan prestasi atlet hingga mencapai level nasonal juga belum berjalan dengan baik.

**Tabel 2.227**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Sat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah atlet yang memenagi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun | Atlet | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Jumlah atlet yang memenagi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun | Atlet | 33 | 41 | 108 | 8 | 0 |
| 3 | Jumlah Atlet Berprestasi | Atlet | 35 | 43 | 114 | 11 | 0 |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.13.7.Persentase Cabang Olahraga Berprestasi**

Persentase cabang olahraga berprestasi mengacu pada proporsi cabang olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu di tingkat nasional atau internasional dibandingkan dengan total cabang olahraga yang ada. Untuk menghitung persentase ini, kita memerlukan data spesifik tentang jumlah cabang olahraga yang berprestasi dan jumlah total cabang olahraga yang diakui. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2020 persentase sebesar 35.56%. Pada tahun 2024 turun sebesar 23.08%. Kecilnya presentase cabang olahraga yang berprestasi lebih disebabkan jumlah *even* olahraga yang diselenggarakan sangat kurang pada tahun tersebut.

**Tabel 2.228**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**
**Persentase Cabang Olahraga Berprestasi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Sat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun | Cabor | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Jumlah seluruh cabor | Cabor | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 3 | Persentase cabor berprestasi | % | 35.56 | 44.44 | 44.44 | 23.08 | 23.08 |

*Sumber : Dispora Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.14 Statistik**

**2.3.1.16.14.1. Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi**

Sistem data dan statistik yang terintegrasi adalah sistem yang terhubung dengan seluruh sistem yang ada, dengan tujuan agar dapat memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat akan data dan statistik. Sejak adanya Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dimana dalam Permendagri tersebut dikatakan bahwa SIPD merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghimpun dan mengolah data bak makro

maupun sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data telah mengoperasikan aplikasi SIPD tersebut, namun dikarenakan SIPD masih dalam proses pengembangan, maka pengoperasiannya belum berjalan maksimal.

**Tabel 2.229**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik**
**Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Sistem data Statistik Yang Terintegrasi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.16.14.2. Buku Kabupaten Dalam Angka**

Untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Maros, Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maros telah menyusun suatu buku yang memuat informasi-informasi umum tentang kondisi Kabupaten Maros, baik dari segi ekonomi, sosial, pemerintahan, keuangan dan aspek-aspek lainnya yang dianggap penting.

**Tabel 2.230**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik**
**Buku " Kabupaten Dalam Angka " Kabupaten Maros**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku " Kabupaten Dalam Angka " | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Dinas Kominfo kab. Maros, 2025*

**2.3.1.16.14.3. Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Seperti halnya buku " Kabupaten Dalam Angka ", BPS bersama Pemerintah Kabupaten Maros juga menyusun buku yang memuat tentang kondisi perekenomian makro Kabupaten Maros. Dalam buku ini termuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, sektor-sektor yang menjadi struktur pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang menjadi penyebab melajunya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros.

**Tabel 2.230**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik**
**Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Ada | Ada | Ada | Ada | ada |

*Sumber : Dinas Kominfo SP kab. Maros, 2025*

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakankinerja yang harus dilaksanakan pada urusan staistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 224 pelaksanaan urusan statistik melalui program penyediaan data dan informasi dan kerjasama dengan lembaga BPS maka Buku Maros Dalam Angka dan PDRB telah tersusun. Sedangkan sistem data statistik yang tersedia baik sektoral maupun data makro telah disusun dalam aplikasi SIPD.

### 2.3.1.6.15 Persandian

#### 2.3.1.6.15.1. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Selain menjalankan urusan komunikasi dan informatika, serta statistik, Diskominfo Kabupaten Maros juga melaksanakan urusan persandian. Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Tujuan pengelolaan persandian pengelolaan informasi yaitu informasi dengan dampak memiliki nilai yang penting bagi instansi, menghambat tugas pokok instansi, kerusakan aset organisasi tinggi pengaruhnya bagi instansi, terganggunya penyelenggaraan instansi dan menimbulkan kerugian bagi instansi pemerintah.

Pada tahun 2024 Kabupaten Maros baru menerapkan sistem persandian terhadap seluruh proses keluar masuknya surat dalam lingkup Pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

**Tabel 2.231**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian**
**Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perangkat perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Jumlah total perangkat daerah | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | **Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Meggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kominfo SP Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.6.16 Kebudayaan

#### 2.3.1.6.16.1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Penyelenggaraan seni dan budaya merupakan upaya penting dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya serta karya seni di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan dan memajukan seni dan budaya kepada masyarakat luas. Berikut adalah cakupan utama dalam penyelenggaraan seni dan budaya:

Seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit dipisahkan. Karena di setiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas, begitu juga sebaliknya pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni.Penyelenggaraan festival seni dan budaya terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Setiap tahun diselenggarakan 3-4 kali festival budaya. Pada tahun 2020 sebanyak 4 kali kemudian pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penyelenggaraan seni budaya menjadi 8 kali. Untuk tahun 2024 meningkat menjadi 9 kali.

**Tabel 2.232**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 |

*Sumber : Disdikbud Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan lainnya.

Benda, Situs dan kawasan yang dilestarikan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahu 2021 jumlah item yang telah dilestarikan sebanyak 157 item, sehingga benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 38,20%. Pada tahun 2024 kawasan cagar budaya yang dilestarikan naik sebesar 69.72%.

**Tabel 2.233**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 157 | 94 | 187 | 233 | 251 |
| 2 | Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 411 | 411 | 335 | 386 | 360 |
| 3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%) | 38.20 | 22.87 | 55.82 | 60.36 | 69.72 |

*Sumber: Disdikbud Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.16.3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi**

Untuk menyandang predikat cagar budaya, suatu benda yang diduga cagar budaya harus melalui serangkaian proses sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Proses tersebut meliputi pendaftaran, pengkajian, dan akhirnya penetapan. Selain itu, cagar budaya juga harus melewati proses pemeringkatan

Pada tahun 2020 karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi sebanyak4 item. Pada tahun 2024 terdapat 7 karya budaya dilakukan inventarisasi karya budaya.peningkatan ini terjadi karena makin banyaknya kegiatan revitalisasi oleh tim cagar budaya yang telah dibentuk oleh dinas terkait.

**Tabel 2.234**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |

*Sumber : Dinas P & K Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.16.4. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sejak tahun 2020 sebanyak 83 cagar budaya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 bertambah menjadi 94 cagar hudaya. Pada tahun 2024 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara sebesar 251.

**Tabel 2.235**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan**
**Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | 83 | 94 | 94 | 233 | 251 |

*Sumber : Dinas P & K Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.17 Perpustakaan**

**2.3.1.16.17.1. Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Perpustakaan adalah tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya dalam bentuk digital (bentuk data yang bias diakses lewat jaringan computer).

Kabupaten Maros memiliki perpustakaan daerah yang cukup representif dan memiliki cukup banyak koleksi buku. Jumlah kunjungan pengunjung di perpustakaan baik yang diperputakaan daerah maupun perpustakaan yang berada di sekolah-sekolah pada tahun 2020 sebesar 0,08% dengan jumlah pengunjung 24,475 orang. Jumlah kunjungan sedikit naik pada tahun 2021 hingga mencapai 0.13 %.

Menurunnya kunjungan pada tahun 2020 bukan disebabkan karena menurunnya minat baca masyarakat, namun dikarenakan ditutupnya seluruh fasilitas umum, termasuk peprustakaan akibat adanya pandemic COVID-19. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pengunjung dibanding tahun sebelumnya dari 93 % menjadi 23 %.

**Tabel 2.236**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan**
**Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun | 24,475 | 32,229 | 40,708 | 240,670 | 61,381 |
| 2 | Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani | 290,350 | 254,140 | 255,990 | 257,830 | 264,309 |
| 3 | **Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun** | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.93 | 0.23 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.16.17.2. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**

Koleksi buku yang tersedia di Kabupaten Maros cukup banyak. Pada tahun 2020 koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebesar 0,41 yang berarti setiap 1 judul buku terdiri dari 2 eksemplar buku. Koleksi buku yang tersedia kemudian meningkat dengan pesat pada tahun 2024, dimana perbandingan perbandingan 1 judul buku terdiri 2 eksemplar buku (rasio 0,44). Berdasarkan data tersebut, diketahui perpustakaan Kabupaten Maros memiliki koleksi judul buku yang cukup banyak, namun jumlah eksemplar buku yang cukup sedikit.

**Tabel 2.237**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan**
**Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 14,606 | 14,750 | 16,140 | 17,579 | 33,917 |
| **2** | Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakan daerah | 35,973 | 40,973 | 49,263 | 39,952 | 74,198 |
| **3** | **Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah** | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.44 | 0.46 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.16.17.3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk**

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan jumlah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Ditambah dengan perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan pada tahun 2020 sejumlah 376 perpustakaan. Pada tahun 2021 jumlah perpustakaan bertambah 17 perpustakaan yaitu perpustakaan khusus ibu dan anak sehingga jumlah perpustakaan sebanyak 376 unit. Pada tahun 2024 bertambah menjadi 527 unit.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka rasio perpustakaan tentunya semakin menurun. Pada tahun 2020 sebesar 0,96. Pada tahun 2024 rasio perpustakaan sebesar 1.24. Berdasarkan hal tersebut jumlah perpustakaan di Kabupaten Maros dalam hal jumlah dirasakan sangat memadai untuk melayani masyarakat Kabupaten Maros.

**Tabel 2.238**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan**
**Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah perpustakaan | 376 | 393 | 488 | 375 | 527 |
| **2** | Jumlah Penduduk | 391,774 | 396,924 | 410,669 | 353,121 | 423,990 |
| **3** | **Rasio perpustakaan per satuan penduduk** | 0.96 | 0.99 | 1.19 | 1.06 | 1.24 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.16.17.4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Minat baca penduduk Kabupaten Maros menjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnnya. Pada tahun 2020, rata-rata pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebesar 67 orang per hari, kemudian meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 89 orang per hari. Sedangkan pada tahun 2023 rata-rata pengunjung melonjak mencapai 659 pengunjung perhari.

**Grafik 2.38**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan**
**Rata-rata Jumlah Pengunjung Per Tahun Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

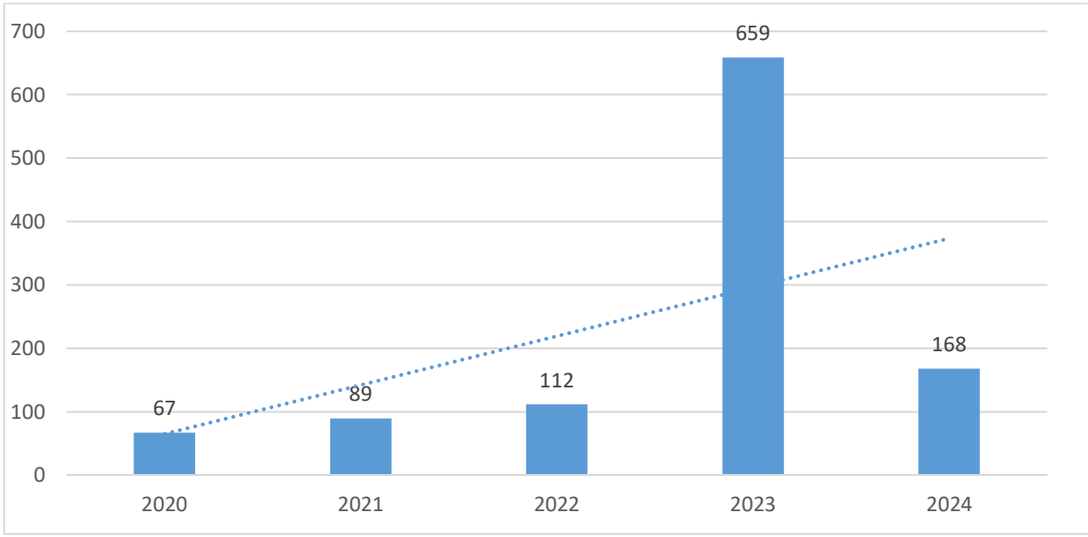


*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.16.17.5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat**

Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak, remaja, dewasa, sejarah, hukum, dsb. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat yang terdapat pada perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebanyak pada tahun 2020 sebanyak 6 orang. Pada tahun 2023 6 orang.

**Tabel 2.239**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan**
**Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai**
**Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| **2** | Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis an penilai | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| **3** | **Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat** | 100 | 85.71 | 100.00 | 100.00 | **100.00** |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.6.18 Kearsipan**

**2.3.1.6.18.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Tabel 2.240**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan**
**Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 |
| **2** | Jumlah perangkat daerah | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 |
| **3** | **Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

Pengelolaan arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Pengelolaan arsip pada Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maros sampai tahun 2023 telah mencapai 100%, artinya seluruh OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku.

**2.3.1.6.18.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan**

Untuk meningkatan kualitas pengelola arsip maka telah diadakan beberapa kegiatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Maros. Kegiatan tersebut antara lain Pelatihan Pengelolaan Arsip Secara Baku bagi aparat pengelola arsip di setiap OPD. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pengelolaan arsip OPD dapat lebih baik lagi kedepannya.

**Tabel 2.241**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan**
**Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kerasipan | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.7 Fokus Urusan Pilihan**

**2.3.1.7.1. URUSAN PARIWISATA**

**2.3.1.7.1.1. Kunjungan Wisata**

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa objek wisata yang cukup terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Objek wisata tersebut telah dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Kunjungan wisata secara umum mengalami peningkatan selama kurun waktu 2 tahun terakhir capaian kunjungan wisatawan selalu melebih target yang ditetapakan. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19.

**Tabel 2.242**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata**
**Kunjungan Wisata Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah capaian kinerja kuncungan wisata se kabupaten/kota | 238,456 | 219,392 | 197,626 | 842,233 | 842,233 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se kabupaten/kota | 544,710 | 282,033 | 242,834 | 550,000 | 700,000 |
| 3 | **Kunjungan Wisata** | **43.78** | **77.79** | **81.38** | **153.13** | 120.319 |

*Sumber : Dispapora Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisata kembali naik sebesar 842,233 orang. ha tersebut tak terlepas dari upaya promosi yang telah dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Maros

**2.3.1.7.1.2. Lama Kunjungan Wisata**

Walaupun Kabupaten Maros memiliki objek wisata yang cukup terkenal yang banyak jumlahnya, namun dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar serta menjadi wilayah perlintasan untuk menuju ke kabupaten lain, maka hampir seluruh wisatawan, utamanya mancanegara hanyak berkunjung selama 1 hari, sedangkan wisatawan yang berkunjung lebih dari 1 hari adalah wisatawan domestik yang melakukan kegiatan outbond dalam kawasan objek wisata

Melihat cukup banyaknya objek wisata di Kabupaten Maros, utamanya wisata alam dan cagar budaya, maka rata-rata pengunjung berkunjung di Kabupaten Maros sebanyak 1 – 2 hari.

**Grafik 2.39**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata**
**Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros**

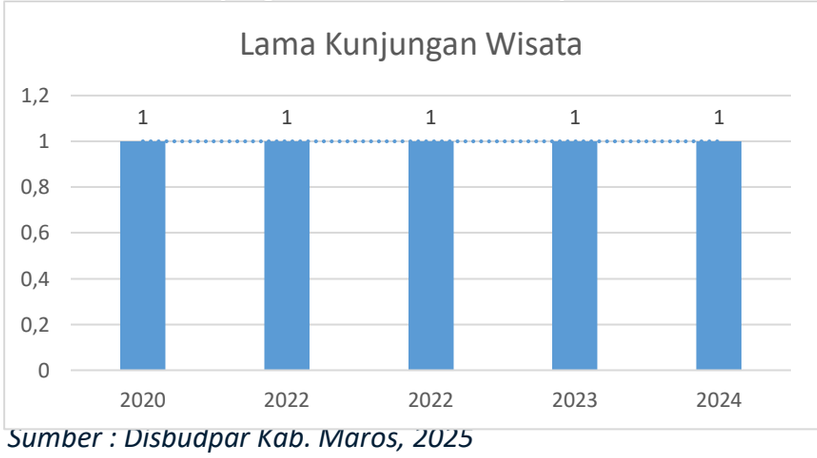


*Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.7.1.3. PAD Sektor Pariwisata**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Objek-objek wisata yang ada utamanya Taman Wisata Alam Bantimurung dan Rammang-Rammang merupakan objek yang banyak dikunjungi wisatawan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir (2020 – 2024). Terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 9,56 % dari total keselurahan PAD Kabupaten Maros dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 1,8 %, namun pada tahun 2024 proporsi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Pemkab Maros kembali menurun menjadi 1,29 % pada tahun 2025. Secara umum kinerja PAD Kabupaten Maros belum dapat menyamai kinerja PAD sebelum Pandemi COVID, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersbut terjadi adalah makin banyaknya tempat wisata yang menarik di kabupaten/kota sekitar Kabupaten Maros.

**Tabel 2.243**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata**
**PAD Sektor Pariwisata (Rp Juta) Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAD Sektor Pariwisata | 4,787,522,000 | 4,484,627,000 | 4,941,240,500 | 28,764,950,560 | 3,900,000,000 |
| 2 | Total PAD | 219,157,661,571 | 303,957,119,011 | 269,177,753,027 | 300,904,517,664 | 302,040,074,230 |
| 3 | **PAD Sektor Pariwisata** | 2.18 | 1.48 | 1.84 | 9.56 | 1.29 |

*Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.7.2. URUSAN PERTANIAN

#### 2.3.1.7.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian sangat penting bagi PDRB karena kontribusinya yang signifikan, khususnya sebagai penyedia pangan dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah.

Di Kabupaten Maros Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 49 % menjadi 57 % pada tahun 2021, namun terjadi trend penurunan dari tahun 2022 sebesar 48 % menjadi 42 % pada tahun 2024. Ini menujukkan perubahan struktur ekonomi kabupaten maros yang agraris menuju ke sektor ekonomi berdaya saing tinggi seperti barang dan jasa.

**Grafik 2.40**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian**
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

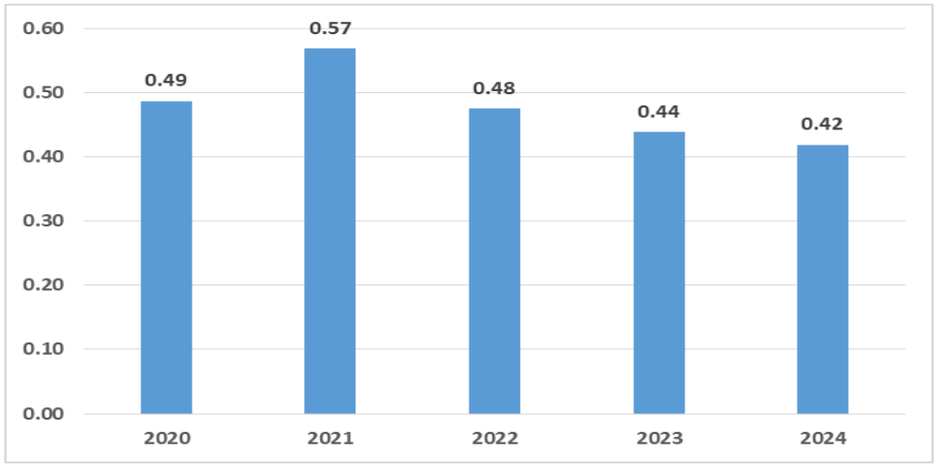


*Sumber : BPS 2025*

### 2.3.1.7.2.2. Kontribusi Sektor Kelompok tani Terhadap PDRB

**Tabel 2.244**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian**
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**
**Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani (ton) | 437,041 | 521,791 | 363,788 | 360,730 | 423,322 |
| Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal di daerah | 437,041 | 521,791 | 363,788 | 360,730 | 423,322 |
| Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS 2025

### 2.3.1.7.2.3. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya per hektar mengacu pada jumlah hasil panen yang diperoleh dari satu hektar lahan pertanian. Produktivitas ini sangat penting dalam menentukan tingkat ketersediaan pangan, efisiensi produksi, dan kesejahteraan petani. Produktivitas padi bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti varietas padi, kondisi tanah, praktik pertanian, dan iklim. Rata-rata produktivitas padi di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berkisar antara 4 hingga 6 ton per hektar. Dengan praktik pertanian modern dan penggunaan varietas unggul, produktivitas dapat mencapai lebih dari 7 ton per hektar. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama selain padi. Produktivitas jagung juga bervariasi berdasarkan faktor yang sama dengan padi.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pengusahaan pertanian strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Padi merupakan produk unggulan di sektor pertanian. Produktivitas tanaman padi dan bahan pangan lainnya pada tahun 2020 sebesar **6.75** ton/ha, kemudian menurun hingga mencapai 6,43 ton/ha pada tahun 2021. Pada tahun 2022 produktvitas menurun hingga mencapai 5,63 ton/ha. Pada tahun 2024 produktvitas naik hingga mencapai 6,58 ton/ha.

**Tabel 2.245**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian**
**Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar**
**Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)** | **437,041** | **521,791** | **363,788** | **360,730** | **423,322** |
| | - Padi Sawah | 308,439 | 314,335 | 266,059 | 260,719 | 297,029 |
| | - Padi Ladang | 10,937 | 10,188 | 1,142 | 210 | 99,754 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jagung | 66,159 | 146,200 | 87,012 | 88,249 | 99,754 |
| | - Kedelai | 572 | 461 | 293 | 152 | 243 |
| | - Kacang Tanah | 2,722 | 2,802 | 2,777 | 2,258 | 2,281 |
| | - Kacang Hijau | 279 | 273 | 9 | 26 | 11 |
| | - Ubi Kayu | 17,770 | 16,605 | 6,081 | 8,625 | 21,820 |
| | - Ubi Jalar | 30,162 | 30,927 | 415 | 490 | 2,184 |
| 2 | **Luas Areal Tanam Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ha)** | **64,786** | **81,177** | **62,214.00** | **56,865.00** | **64,325** |
| | - Padi Sawah | 48,436 | 48,011 | 48,170.00 | 44,178.00 | 49,875 |
| | - Padi Ladang | 2,760 | 2,807 | 125.00 | 125.00 | |
| | - Jagung | 11,287 | 28,108 | 11,981.00 | 11,131.00 | 12,684 |
| | - Kedelai | 293 | 232 | 158.00 | 90.00 | 152 |
| | - Kacang Tanah | 1,029 | 1,047 | 953.00 | 777.00 | 909 |
| | - Kacang Hijau | 255 | 241 | 59.00 | 158.00 | 102 |
| | - Ubi Kayu | 587 | 610 | 699.00 | 364.00 | 545 |
| | - Ubi Jalar | 139 | 121 | 69.00 | 42.00 | 58 |
| 3 | **Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya Per Hektar** | **6.75** | **6.43** | **5.85** | **6.34** | **6.58** |

*Sumber : DPKP Kab. Maros, 2025*

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan agar produktivitas pertanian naik adalah faktor luasan area tanam serta perubahan iklim.

**2.3.1.7.2.4.Cakupan Bina Kelompok Tani**

Unsur utama dalam pengelolaan pertanian adalah petani itu sendiri. Untuk meningkatkan produksi selain pengolahan lahan, kemampuan petani pun juga harus ditingkatkan. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah terus naik hingga tahun 2023 dari 90 di tahun 2020 menjadi 145 di tahun 2024.

Bantuan yang diberikan kepada petani sifatnya bermacam-macam, baik berupa bantuan alsintan, bibit, pupuk bahkan bantuan modal untuk pemasaran hasil pertanian.

**Tabel 2.246**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian**
**Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelompok tani yang mendapat bantuan pemda | 90 | 99 | 120 | 145 | 145 |
| 2 | Jumlah Kelompok tani | 1,299 | 1,299 | 1,356 | 1,356 | 1,379 |
| 3 | **Cakupan bina kelompok tani** | 6.93 | 7.62 | 8.85 | 10.69 | 10.51 |

*Sumber : DPKP Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.7.1.5. Kebutuhan Pangan Utama**

Kebutuhan Pangan utama adalah nilai total daripada kebutuhan pangan utama masyarakat yaitu beras di suatu daerah, angka ini dibutuhkan sebagai basis perencanan poduksi pangan di suatu daerah . Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Maros menyebabkan Kebutuhan akan paangan utama menjadi meningkat, seperti yang dapat dilihat pada grafik dibawah :

**Grafik 2.41**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian**
**Kebutuhan Pangan Utama**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

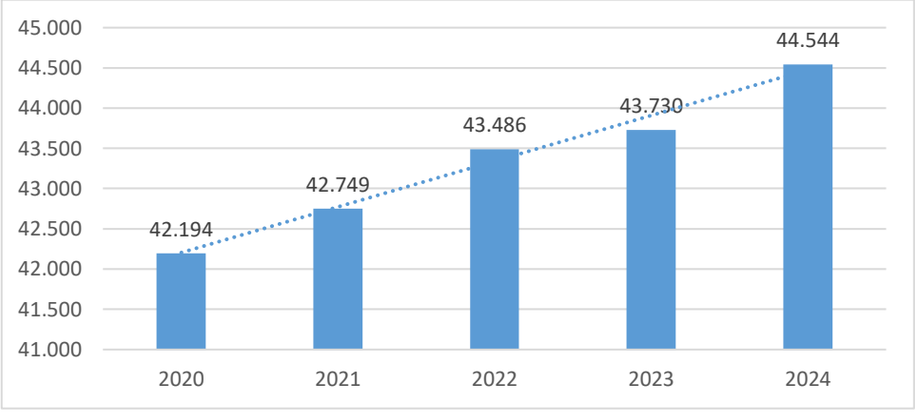


***Sumber : DPKP Kab. Maros***

**2.3.1.7.3. URUSAN PERDAGANGAN**

**2.3.1.7.3.1.Ekspor Bersih Perdagangan**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wialyah ekonomi Kabupaten Maros, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili wilayah lain, baik itu kabupaten lain dalam satu propinsi ataupun propinsi lain, ataupun luar negeri. Termasuk pula ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar, awak kapal yang singgah dan sebagainya.

Pada tahun 2020 nilai ekspor bersih sebesar -334,04 Milyar rupiah, kemudian pada tahun 2021 ekspor bersih sebesar 593,52 Milyar. Pada tahun 2024 terjadi penurunan ekspor sebesar 1.937,70Milyar.

**Tabel 2.247**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan**
**Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskpor | -334,04 | 593,52 | 2.138,02 | 3.612,09 | 1.937,70 |
| 2 | Impor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ekspor Bersih | -334,04 | 593,52 | 2.138,02 | 3.612,09 | 1.937,70 |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.7.3.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha**

Kelompok pedagang/usaha informal yang telah mendapatkan bantuan pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam rangka membantu meningkatkan produksi dan pendapatan pedagang pada tahun 2019 86,71%. Pada 2020 jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan sebanyak 4.328 pedagang dengan cakupan 78,49%. Makin meningkatnya upaya pembinaan pedagang dan

usaha informal di Kabupaten Maros menyebabkan meningkatnya jumlah pedagang yang menrima bantuan dari Pemerintah pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5,264 kelompok pedagang

Pada tahun 2023 pedagang yang mendapatkan bantuan sebanyak 5.264 pedagang dengan cakupan 100%.

**Tabel 2.248**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan**
**Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda | 4,328 | 6,662 | 5,264 | 5,264 | 5,264 |
| 2 | Jumlah kelompok pedagang/usaha informal | 5,514 | 6,662 | 5,264 | 5,264 | 5,264 |
| 3 | **Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal** | 78.49 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Kopurindag Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.7.4. PERINDUSTRIAN

#### 2.3.1.7.4.1.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Kelompok pengrajin merupakan bagian dari dunia usaha yang sangat penting untuk perkembangan industri, utamanya industri kecil dan menengah. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengrajin maka diperlukan bantuan dari Pemerintah Derah baik berupa bantuan modal, maupun bantuan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk. Jumlah kelompok pengrajin yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2020 cakupan bina kelompok pengarjin sebesar 75% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

**Tabel 2.249**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian**
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemda | 8 | 28 | 38 | 128 | |
| 2 | Jumlah kelompok pengrajin | 8 | 28 | 38 | 140 | |
| 3 | **Cakupan bina kelompok pengrajin** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.43 | |

*Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2025*

Cakupan bina kelompok pengarajin menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebbakan Pemerintah Kabupaten Maros yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan beberapa bantuan terhadap pengrajin yang memiliki potensi yang baik, berupa peningkatan kapasitas pengrajin dalam rangka penungkatan kualitas produk, kemudian bantuan pengemasan produsk yang dihasilkan pengrajin.

### 2.3.1.7.5. URUSAN TRANSMIGRASI

#### 2.3.1.7.5.1.Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya.

Lokasi transmigrasi saat ini yang berada di Kabupaten Maros hanya satu yaitu yang terletak di Kecamatan Tompobulu. Jumlah rumah tangga yang menempati lokasi tersebut awalnya 150 KK, namun pada saat ini belum dilakukan pendataan kembali. Tipe transmigrasi yang ada di Kabupaten Maros bukan termasuk transmigrasi swakarsa, sehingga persentase transmigran swakarsa hingga tahun 2024 sebesar 60%.

**Tabel 2.250**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi**
**Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah transmigran swakarsa | 50 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Jumlah transmigrasi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | **Persentase Transmigran Swakarsa** | 33.33 | 66.67 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |

*Sumber : DisnakerTrans Kab. Maros 2025*

### 2.3.1.7.6. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### 2.3.1.7.6.1. Produksi perikanan

Produksi sektor perikanan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang sangat baik, bahkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan Kabupaten Maros meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan oleh nelayan. Produksi perikanan Kabupaten Maros terbagi atas produksi perikanan laut dan perikanan budidaya.

Capaian produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 123.27% kemudian meningkat hingga mencapai 114.96% pada tahun 2024. Berdasarkan tabel dibawah diperoleh data bahwa produksi perikanan budidaya di Kabupaten Maros sangat besar apabila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap.

**Tabel 2.251**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan**
**Persentase Produksi Perikanan**
**Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah produksi ikan (Ton) | 38,085 | 46,578 | 48,643.4 | 55,897.30 | 64,257.53 |
| 2 | Target Produksi ikan daerah (Ton) | 30,895 | 31,497 | 2,754.0 | 34,127.00 | 55,897.30 |
| 3 | Persentase Produksi perikanan (%) | 123.27 | 147.88 | 148.51 | 163.79 | 114.96 |

*Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2024*

**Tabel 2.252**
**Produksi Perikanan Berdasarkan Jenisnya**
**di Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perikanan Tangkap | 13,052 | 19,577 | 20,234 | 26,072 | 33,548 |
| 2 | Perikanan Budidaya | 16,164 | 11,870 | 19,476 | 15,976 | 30,708 |

*Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2024*

**2.3.1.7.6.2. Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan adalah jumlah ikan (kg) yang dikonsumsi oleh masyarakat pertahunnya. Konsumsi ikan ini berhubungan kesehatan seperti meningkatkan kemampuan otak, dapat mencegah serangan penyakit, dan beberapa manfaat lainnya. Seperti halnya produksi ikan, konsumsi ikan di Kabupaten Maros juga telah mencapai 100%, apabila dihitung dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan ikan merupakan salah satu makanan pokok dan menu favorit masyarakat Kabupaten Maros.

**Tabel 2.253**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan**
**Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah konsumsi ikan (Kg) | 41.68 | 42.13 | 43.21 | 45.21 | 51.16 |
| 2 | Target konsumsi ikan daerah (Kg) | 41.68 | 41.35 | 42.54 | 42.95 | 43.36 |
| 3 | Konsumsi Ikan | 100.00 | 101.89 | 101.57 | 105.26 | 117.99 |

*Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2024*

**2.3.1.7.6.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah. Jumlah kelompok nelayan di Kabupaten maros sebanyak 316 kelompok hingga tahun 2020, dimana dari total kelompok nelayan tersebut jumlah kelompok yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 123 kelompok.

Cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 38.92 % dengan jumlah kelompok yang menerima bantuan sebanyak 296 kelompok, pada tahun 2024 cakupan meningkat hingga mencapai 61.40 % dengan jumlah kelompok yang telah menerima bantuan sebanyak 70 kelompok.

**Tabel 2.254**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan**
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemda | 123 | 45 | 55 | 65 | 70 |
| 2 | Jumlah kelompok nelayan | 316 | 100 | 106 | 112 | 114 |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan | 38.92 | 45.00 | 51.89 | 58.04 | 61.40 |

*Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2024*

Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan nelayan, sehingga setiap tahunnya dialokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM nelayan maupun bantuan sarana prasarana baik untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya. Beberapa bantuan yang diberikan adalah bantuan jaring tangkap dan bibit ikan.

**2.3.1.7.6.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**

Jumlah produksi ikan di Kabupaten Maros seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Dari produksi ikan tersebut tentu tidak semuanya berasal dari sektor perikanan budidaya, namun juga berasal dari sektor perikanan tangkap, dalam hal ini kontribusi kelompok nelayan.

Produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 42.44 %, kemudian pada tahun 2021 menurun hingga mencapai 25.48 %. Walaupun persentase produksi mengalami penurunan, namun jumlah produsksi perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 jumlah produksi sebesar 46,578 ton kemudian meningkat hingga mencapai 55,897 ton pada tahun 2022. Turunnya persentase produksi kelompok nelayan disebabkan produksi ikan di daerah lebih banyak dihasilkan oleh perikanan budidaya. Pada tahun 2024 produksi perikanan kelompok nelayan turun sedikit menjadi 31.40 %.

**Tabel 2.255**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan**
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan | 16,164 | 11,870 | 19,476 | 15,976 | 20,181 |
| 2 | Jumlah produksi ikan di daerah | 38,085 | 46,578 | 55,897 | 48,637 | 64,260 |
| 3 | Produksi perikanan kelompok nelayan | 42.44 | 25.48 | 34.84 | 32.85 | 31.40 |

*Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2025*

**2.3.1.7.6.5.Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman**

Potensi lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelangsungan dan tak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen di tahun berikutnya. Produksi tangkapan ikan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 83.33 % kemudian meningkat menjadi 93.75% pada tahun 2023. Meningkatnya proporsi tangkapan disebabkan jumlah tangkapan ikan juga mengalami peningkatan namun masih dalam batasan yang aman.

**Tabel 2.256**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan**
**Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah tangkapan ikan | 13,052 | 19,577 | 20,234 | 26,072 | 33,549 |
| 2 | 80 % dari tangkapan maksimum lestari | 15,662 | 23,179 | 23,147 | 27,810 | 44,730 |
| 3 | **Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman** | 83.33 | 84.46 | 87.41 | 93.75 | 75.00 |

*Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2025*

### 2.3.1.8 Fokus Fungsi Penunjang

#### 2.3.1.8.1 Perencanaan Pembangunan

**2.3.1.8.1.1.Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Ditetapkan Dengan PERDA**

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. RPJPD Kabupaten Maros disusun pada tahun 2005 dan berlaku hingga tahun 2025. RPJPD Kabupaten Maros ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024.

**Tabel 2.257**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan**
**Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.1.2. Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA**

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Maros telah disusun pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

**Tabel 2.258**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan**
**Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.1.3.Tersedianya Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA**

RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: 1. perencanaan, 2. penganggaran, 3. pelaksanaan, dan 4. pengawasan. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD memuat: 1). Rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). Program prioritas pembangunan daerah, dan 3). Rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

**Tabel 2.259**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan**
**Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.1.4.Tersedianya Dokumen RTRW Yang Ditetapkan Dengan PERDA**

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW Kabupaten Maros telah disusun pada tahun 2012 dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi RTRW, namun sampai dengan tahun 2020 dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi dan belum memiliki status legalitas. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042.

**Tabel 2.260**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan**
**Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.1.5. Penjabaran Konsistensi Porgram RPJMD Dalam RKPD**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian program-program yang telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD haruslah tertuang dalam dokumen RKPD dan dijadikan acuan dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya oleh seluruh pihak, utamanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada tahun 2020 penjabaran konsistensi RPJMD kedalam RKPD sebesar %. Pada tahun 2019 disebabkan karena adanya perampingan program dalam perubahan RPJMD Kabupaten Maros maka konsistensi RPJMD ke dalam RKPD meningkat sebesar 92.50%. Pada tahun 2023.

Jumlah program yang dimasukkan dalam RKPD besarannya berfluktuasi disebabkan program-program yang dimasukkan tersebut merupakan program prioritas yang dilaksanakan pada tahun berkenan dan menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD pada tahun tersebut.

**Tabel 2.261**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan**
**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah porgram RKPD tahun berkenan | 220 | 240 | 160 | 158 | 148 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan | 233 | 240 | 160 | 160 | 160 |
| **3** | **Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD** | **94.42** | **100.00** | **100.00** | **98.75** | **92.50** |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.1.6.Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD**

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan yang harus digunakan dalam penyusunan APBD, dimana seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam APBD haruslah tercantum juga dalam RKPD.

**Tabel 2.262**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan**
**Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD**
**Kabupaten Maros 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah program dalam APBD tahun berkenan | 220 | 240 | 143 | 141 | 136 |
| 2 | Jumlah program dalam RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenan | 233 | 240 | 160 | 160 | 149 |
| **3** | **Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD** | **94.42** | **100.00** | **89.38** | **88.13** | **91.28** |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

Pada tahun 2020 penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sebesar 94.42%, kemudian meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada program yang dilaksanakan dalam APBD yang tidak termuat dalam dokumen RKPD. Pada tahun 2024 penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD sebesar 91.28%.

**2.3.1.8.2.Keuangan**

**2.3.1.8.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selama 5 (lima) tahun terakhir opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Maros adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan Kabupaten Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku

umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

**2.3.1.8.2.2. Persentase SILPA**

Sisa Lebih Penggunaan Anggaraan (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Persentase SILPA Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 persentase SILPA sebesar 2.77 %, kemudian menurun hingga menjadi 5.80 % pada tahun 2024.

Rendahnya serapan anggaran daerah yang berujung pada SiLPA yang tinggi disebabkan oleh pelampauan perolehan pendapatan daerah dari proyeksi yang ditentukan. Disamping itu, tidak terlaksananya kegiatan serta terlambatnya transfer dana dari pemerintah pusat juga mempengaruhi besaran serapan anggaran.

**Tabel 2.263**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase SILPA (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Total SILPA | 40,285, 438,878 | 39,857, 579,167.59 | 119,112, 762,521 | 119,112, 762,521 | 97,913,028,143 |
| **2** | Total APBD | 1,456,868, 058,842 | 1,449,473, 299,517 | 1,308,483, 705,620 | 1,604,151, 161,593 | 1,687,019,643,138 |
| **3** | Persentase SILPA | **2.77** | **2.75** | **9.10** | **7.43** | 5.80 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.2.3. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana**

Jumlah Program Kegiatan yang tidak terlaksana di Kabupaten Maros tahun 2021 ada 8 dari 173 program dan kegiatan, kemudian naik menjadi 17 kegiatan pada tahun 2023 dan 6 Program/kegiatan pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa efektiftas perencanaan sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Maros.

**Tabel 2.264**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan | 0 | 8 | 0 | 17 | 6 |
| Total program dalam APBD | 149 | 173 | 143 | 208 | 145 |
| Persentase Program/kegiatan Yang Tidak Terlaksana | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 8.17 | 4.14 |

**Sumber : BKAD Kab. Maros 2025**

**2.3.1.8.2.4. Persentase Belanja Pendidikan (20 %)**

Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Melalui instrumen kebijakan yaitu

kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan.

**Tabel 2.265**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Belanja Pendidikan 20 % (Rp Juta)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah belanja bidang urusan pendidikan | 97,398, 612,263 | 102,844, 855,371.88 | 92,824, 656,900 | 453,410, 896,057 | 471,083,200,658 |
| **2** | Total APBD | 1,456,868, 058,842 | 1,449,473, 299,517 | 1,308,483, 705,620 | 1,604,151, 161,593 | 1,687,019,643,138 |
| **3** | **Persentase Belanja Pendidikan 20 %** | 6.69 | 7.10 | 7.09 | 28.26 | 27.92 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, 2025*

Alokasi dana pendidikan Kabupaten Maros mencapai lebih 20% dari total APBD Kabupaten Maros, dimana pada tahun 2020 persentase belanja pendidikan sebesar 6,69% dengan jumlah belanja sebesar 90,318,674,037 milyar, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 27.92% dengan jumlah belanja sebesar 454 milyar. Belanja pendidikan ini banyak digunakan pada pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

**2.3.1.8.2.5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)**

Persentase belanja kesehatan sebesar 10% adalah pemerintah daerah harus menganggarkan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat. Persentase belanja kesehatan pada tahun 2020 sebesar 10,8 % kemudian meningkat hingga mencapai 19,9 % pada tahun 2024. Peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2021 disebabkan adanya pendemi COVID-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pendemi tersebut dalam sektor kesehatan.

**Tabel 2.266**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Belanja Kesehatan 10% (Rp Juta)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah belanja bidang urusan kesehatan | 141,904 | 197,412 | 244,464 | 224,311 | 335,110,550,498 |
| **2** | Total APBD | 1,394,628 | 1,456,868 | 1,449,473 | 1.558,038 | 1,687,019,643,138 |
| **3** | Persentase Belanja Kesehatan 10 % | 10.18 | 13.55 | 16.87 | 14.40 | 19.86 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.2.6. Penetapan APBD**

Penyusunan dan penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.267**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Penetapan APBD**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan APBD | tepat | tepat | tepat | tepat | tepat |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.2.7. Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat sesuai usaha atau objeknya.

Pendapatan dari pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 persentase pajak dan retribusi sebesar 57.48%, namun dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan penghasupan beberapa jenis pajak dan retribusi maka sejak tahun 2018 persentase capaian pajak dan retribusi mengalami penurunan.

**Tabel 2.268**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Pajak dan Retribusi Daerah**
**Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Pajak dan Retirbusi Daerah | 125,962,165,046 | 138,745,855,901.67 | 169,394,470,728 | 300,904,517,644 | 302,040,074,230 |
| 2 | Total Pendapatan Asli Daerah | 219,157,661,571 | 303,957,119,011 | 266,637,121,347 | 307,532,402,823 | 307,957,767,197 |
| 3 | **Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah** | 57.48 | 45.65 | 63.53 | 97.84 | 98.08 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, 2025*

Persentase pajak dan retribusi pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 98.08% persen dengan total pendapatan 169 Milyar Rupiah.

**2.3.1.8.2.8. Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD.**

Sejak tahun 2020 proporsi jumlah belanja langsung dengan belanja tidak langsung cendrung berimbang 43 % belanja langsung dan 48 % Belanja tidak langsung. begitupun tahun 2021 dimana persentase belanja langsung 43 % sementara belanja tidak langsung 49 % . proporsi yang berimbang tersebut terjadi sampai di tahun 2022 dimana jumlah belanja langsung mencapai

angka 90 % sementara belanja tidak langsung hanya berada pada persentase 10 %, begitupula ditahun tahun selanjutnya dimana pada tahun 2024 jumlah belanja langsung tetap berada pada persentase 90 % dan belanja tidak langsung masih pada persntase 10 % dari total APBD. hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pembangunan mulai dari tahun 2022 berfokus langsung pada program/kegiatan yang telah di anggarakan.

**Tabel 2.269**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD**
**Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Belanja langsung | 44.61 | 43.81 | 107.39 | 90.46 | 90.51 |
| Persentase Belanja tidak langsung | 48.99 | 49.72 | 11.68 | 9.54 | 9.49 |
| Perbandingan Antara Belanja Langusng dengan Belanja Tidak Langsung | 0.91 | 0.88 | 9.20 | 9.48 | 9.54 |

*Sumber : BKAD 2025*

**2.3.1.8.2.9. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa**

Jika melihat data 4 tahun terakhir terjadi trend penurunan dana bagi hasil kabupaten kota dan Desa. Di tahun 2020 sempat mencapai 5,99 % namun kemudian menurun menjadi 4,66 % di tahun 2022, meski kembali naik menjadi 4, 83% pada tahun 2023 namun kembali menurun menjadi 3,95 % pada tahun 2024. Trend penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten maros masih perlu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Desa dan Kota.

**Grafik 2.41**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah**
**Persentase Antara Jumlah Belanja langsung Dengan Tidak Langsung Dalam APBD**
**Tahun 2020 – 2024**

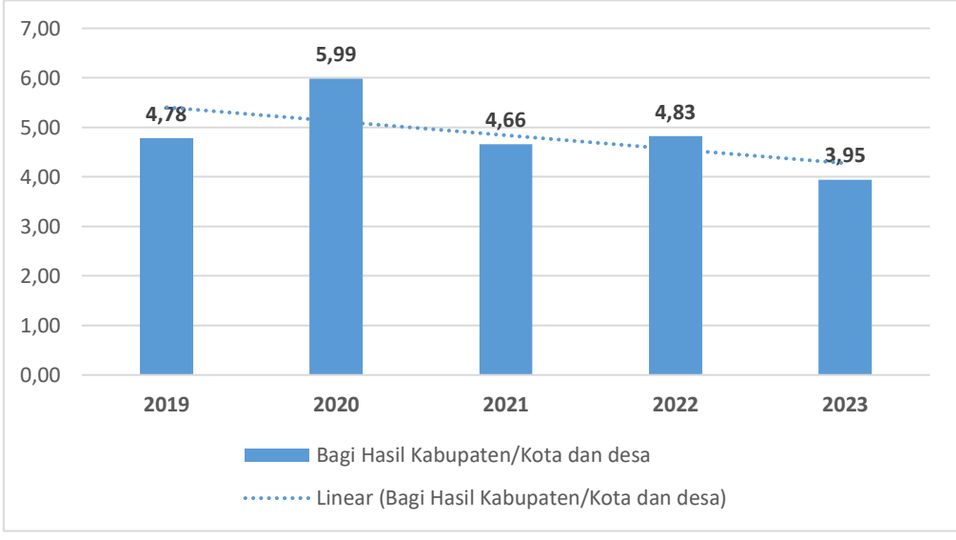


*Sumber : BKAD 2025*

**2.3.1.8.3. Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan**

**2.3.1.8.3.1.Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai tersebut. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2020 - 2024 adalah 20 jam pelajaran setiap tahunnya.

**Tabel 2.270**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

*Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2025*

Pendidikan dan pelatihan dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS, diklat dalam jabatan, diklat kepimpinan untuk setiap tingkatan, diklat fungsional, serta diklat teknis.

**2.3.1.8.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal HERE**

Pendidikan dan pelatihan formal ASN adalah pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh ASN, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau menduduki suatu jabatan. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 68.29 %, lalu pada tahun 2024 sebesar 91.77 %.

**Tabel 2.271**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 4,541 | 4,625 | 6,016 | 6,248 | 6,346 |
| 2 | Jumlah ASN | 6,650 | 6,363 | 6,614 | 6,666 | 6,915 |
| 3 | **Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal** | 68.29 | 72.69 | 90.96 | 93.73 | 91.77 |

*Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2025*

Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan menunjukkan bahwa pengembangan SDM ASN di Kabupaten Maros menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Maros, sehingga diharapkan nantinya ASN yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

**2.3.1.8.3.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yaitu pendidikan dan pelatihan yang diberikan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian , keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur.

Total pejabat yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2020 sebanyak 278 orang dengan persentase sebesar 32.99 %, kemudian naik pada tahun 2024 dengan persentase 90.18 %.

Adanya kenaikan jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan disebabkan kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM aparatur semakin besar.

**Tabel 2.272**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural | 278 | 258 | 491 | 493 | 505 |
| 2 | Jumlah total jabatan | 842 | 797 | 766 | 540 | 560 |
| 3 | **Persentase Pejabat ASN Yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural** | **32.99** | **32.37** | **64.10** | **91.30** | **90.18** |

*Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

**Tabel 2.273**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah** | 36 | 36 | 32 | 31 | 33 |

*Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas: jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

**Tabel 2.274**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah** | 175 | 174 | 161 | | 158 | 167 |

*Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas: jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama; jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

**Tabel 2.275**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
**Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah** | 2,988 | 3090 | 3,187 | 3,050 | 4,636 |

*Sumber : BPKA BKPSDM Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.4.Pegawasan**

**2.3.1.8.4.1. Persentase Tindak lanjut Temuan**

Tindak lanjut temuan adalah aktivitas auditil dalam rangka memenuhi rekomendasi pemeriksa yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Tindak lanjut yang dilakukan sifatnya bermacam-macam, sesuai dengan hasil temuan, baik berupa tindak lanjut secara administrasi maupun perbaikan sistem sehingga nantinya akan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2020 sebesar 72.00 % dimana dari 625 temuan, hanya 450 temuan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase yaitu sebesar 65.68 %, dimana dari 338 temuan pada tahun 2024, 222temuan telah ditindaklanjuti. Walaupun telah menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat 75,86% temuan yang belum ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari OPD dalam menindak lanjuti temuan yang ada kemudian rotasi pegawai yang menyebabkan adanya kesulitan dalam memperoleh data temuan yang akan ditindaklanjuti.

**Tabel 2.276**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan**
**Persentase Tindak Lanjut Temuan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah temuan yang ditindaklanjuti | 450 | 269 | 426 | 178 | 222 |
| 2 | Jumlah total temuan | 625 | 533 | 691 | 278 | 338 |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Persentase Tindak Lanjut Temuan** | 72.00 | 50.47 | 61.65 | 64.03 | 65.68 |

*Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.4.2. Persentase Pelanggaran Pegawai**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN baik berupa teguran maupun berupa sanksi.

Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Maros secara umum masih sangat kecil walaupun terdapat peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2023 persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,06 % dengan jumlah ASN yang dikenakan sanksi sebanyak 4 orang.

**Tabel 2.277**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan**
**Persentase Pelanggaran Pegawai**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ASN Yang dikenai sanksi | 15 | 8 | 4 | 13 | 4 |
| 2 | Jumlah Total ASN | 6,650 | 6,363 | 6,619 | 6,675 | 6915 |
| 3 | **Persentase Pelanggaran Pegawai** | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.06 |

*Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2025*

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh ASN adalah disipilin ketaatan jam kerja, dimana masih banyak ASN yang datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, selain itu terdapat 1 -2 orang ASN yang melakukan pelanggaran yang cukup berat. Sanksi yang diberikan bervariasi, baik berupa penundaan pencairan tunjangan kinerja sampai dengan pemecatan.

**2.3.1.8.4.3. Jumlah Temuan BPK**

Jumlah temuan yang merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hanya ada 18 temuan BPK. Pada tahun 2024 jumlah temuan BPK telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 32 temuan.

**Tabel 2.278**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan**
**Jumlah Temuan BPK**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Jumlah Temuan BPK** | 18 | 37 | 4 | 34 | 32 |

*Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.5.Penelitian dan Pengembangan**

**2.3.1.8.5.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**

Sebelum terbentuknya Badan Kelitbangan dan Pengembangan Daerah pada tahun 2019, urusan kelitbangan berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun urusan tersebut belum pernah diakomodir ke dalam kegiatan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan baru termuat dalam RKPD pada tahun 2019.

**Tabel 2.279**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kelitbangan dalam RKPD | 20 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| **2** | Jumlah kelitbangan dalam RPJMD | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **3** | **Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan** | 100.00 | 21.95 | 35.71 | 42.86 | 57.14 |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

Persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2020 sebesar 100 %, kemudian menurunhingga mencapai 50 % pada tahun 2020 100%. Menurunya persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2021 disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap program dan kegiatan Balitbangda yang mengalami pengurangan. Pada tahun 2024 jumlah kelitbangan dalam RKPD 6 kegiatan, dengan persentase implementasi sebesar 57.14%.

**2.3.1.8.5.2.Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan adalah jumlah kelitbangan yang telah disusun dan kemudian dimanfaatkan oleh stakeholder sebesar 100 %, artinya semua kelitbangan dalam rencana kerja Balitbangda telah ditindaklanjuti. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan sesuai renja perangkat daerah tahun berkenan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Jumlah kelitbangan pada tahun 2020 sebanyak 20 kelitbangan, pada tahun 2023 menjadi 6 dan kemudian naik pada tahun 2024 sebanyak 8 .

**Tabel 2.280**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 |
| **2** | Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 |
| **3** | **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.5.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong penerapan inovasi dalam berbagai perangkat daerahnya. Ini adalah indikator penting untuk menilai komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.281**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
**Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi | 0 | 45 | 39 | 39 | 39 |
| 2 | Jumlah total perangkat daerah | 45 | 45 | 39 | 39 | 39 |
| 3 | **Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah** | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025*

Inovasi merupakan bentuk perwujudan sesuatu yang baru atau membuat pembaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Tahun 2024 terdapat 39 perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapanan inovasi.

**2.3.1.8.5.4. Persentase Kebijakan Inovasi Yang telah Diterapkan Daerah**

Inovasi merupakan sumber kemajuan suatu lembaga baik itu Swasta maupun pemerintah. Dengan berionovasi nilai tambah yang diperoleh bagi seluruh stakeholder menjadi meningkat. Di kabupaten Maros sejak 5 tahun ini telah berfokus pada implementasi kebijakan inovasi terutama dalam ranah pelayanan publik ini dapat dilihat dari capaian persentase kebijakan inovasi yang telah di implementasikan di Kabupaten Maros

**Grafik 2.41**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
**Persentase Kebijakan Inovasi Yang telah Diterapkan Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

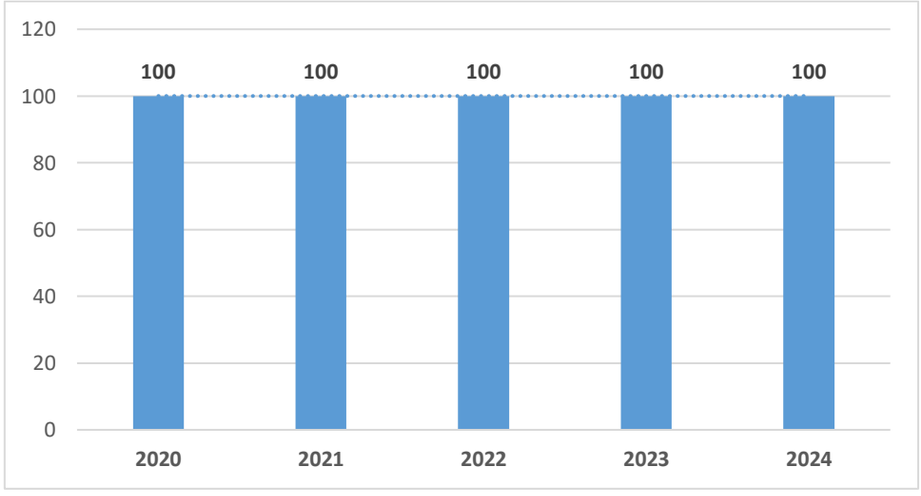


**SUMBER : BAPPELITBANGDA 2025**

**2.3.1.8.6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**2.3.1.8.6.1.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat kelengkapan DPRD**

Setiap tahun DPRD wajib membuat rencana kerja sebagai bagian dari rencana kerja Sekretariat DPRD selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola administrasi keuangan DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Maros telah melaksanakan kegiatan penyediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD.

**Tabel 2.282**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
**Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD** | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.6.2.Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Rencana Kerja Tahunan (RKPD)**

Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros yang akan dilaksanakan setiap tahunnya telah terangkum dalam dokumen perencanaan, baik dalam RPJMD maupun dalam RKPD, sehingga seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Maros dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 2.283**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
**Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)** | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2025*

**2.3.1.8.6.3. Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan**

Seluruh program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros harus terintegrasi dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRD, dikarenakan dokumen anggaran tersebut akan dijadikan acuan untuk anggaran yang akan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros selama tahun berjalan.

**Tabel 2.284**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
**Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD** | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2025*

## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

### 2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

**Grafik 2.42**
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

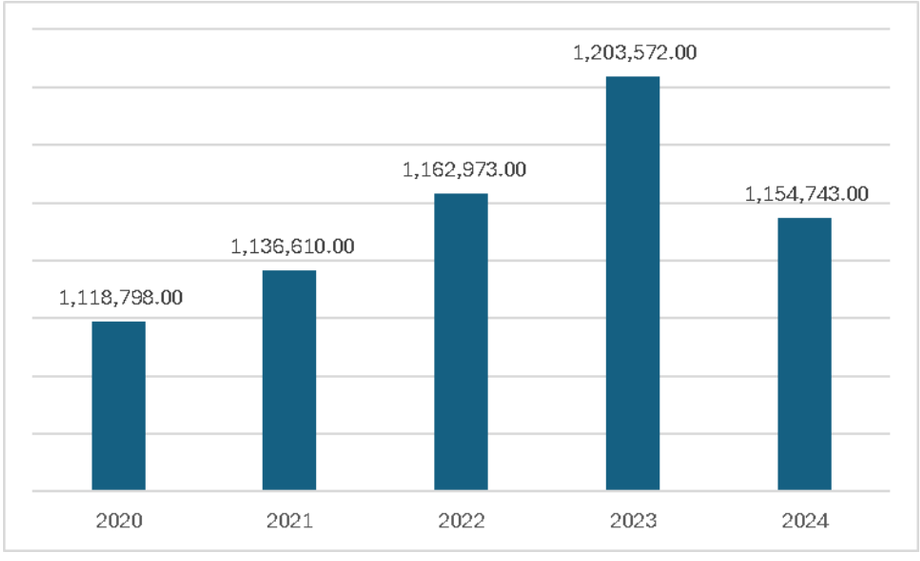


*Sumber : Maros Dalam angka 2025*

Pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 rata pengeluaran konsumsi

ruma tanggah perkapita sebesar Rp. 1.118.798, kemudian meningkat hingga mencapai Rp. 1.203,572 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali menurun sampai angka Rp. 1.154.743. Semakin meningkatnya rata-rata pengeluaran penduduk kabupaten Maros belum dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga semakin meningkat. PDRB perkapita di Kabupaten Maros mengalami tren penurunan pada tahun 2023 (64,69%) dan 2024 (69,21%), yang berarti kondisi kemakmuran masyarakat mengalami penurunan meskipun masih terkendali, Data ini tidak secara langsung mengindikasikan konsumsi rumah tangga, tetapi memberikan gambaran tentang perubahan kemakmuran masyarakat yang mungkin terkait dengan konsumsi. Hal ini disebabkan untuk memenuhi kriteria peningkatan kesejahteraan, pengeluaran dari konsumsi makanan harus lebih rendah dari pengeluaran konsumsi non makanan.

Upya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah dengan melakukan program peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Kabupaten Maros sebagai daerah agraris (padi, jagung, hortikultura, serta perikanan budidaya) terus mendapat dukungan teknologi, penyediaan pupuk, bibit unggul, dan akses pasar. Upaya lain yang telah dilakukan adalah pengembangan UMKM dan IKM, melalui pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan (KUR, dana bergulir), serta promosi produk local.

### 2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan). Pengeluaran konsumsi non pangan meliputi pendidikan, pakaian, perumahan, dan beberapa kebutuhan non pangan lainnya. Pengeluaran konsumsi non pangan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita sebesar 51,58%, kemudian pada tahun 2024 persentase pengeluran menurun hingga mencapai 48,96 %. Persentase tertingi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 52.33%.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk di kabupaten Maros tidak jauh berbeda antara pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan, walaupun pengeluaran konsumsi non pangan berada dibawah 50%, namun persentasenya tidak mencapai 60%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Maros tidak terlalu tinggi.

**Grafik 2.43**
**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

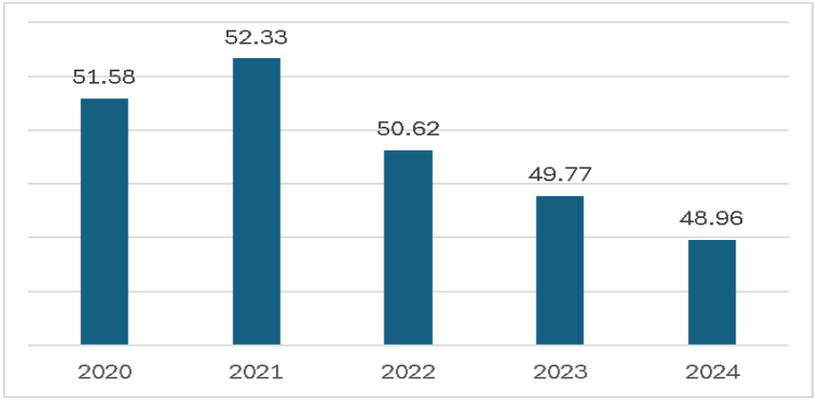


*Sumber : Maros Dalam Angka 2025*

### 2.4.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah persektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah Angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Produktivitas total daerah Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 sebesar 85, 28 %. Pada tahun 2021 produktivitas total daerah menurun hingga mencapai 77,18 % dan pada tahun 2025 kembali menurun sebesar 75.81%. Menurunnya produktivitas total daerah ini disebabkan Menurunnya PDRB kA. Pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 84.51%.

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Maros, yang meliputi berbagai jenis mineral seperti lempung, batu gamping, dan pasir kuarsa. Ini dapat menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor pertambangan dan industri terkait.

**Grafik 2.44**
**Produktivitas Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

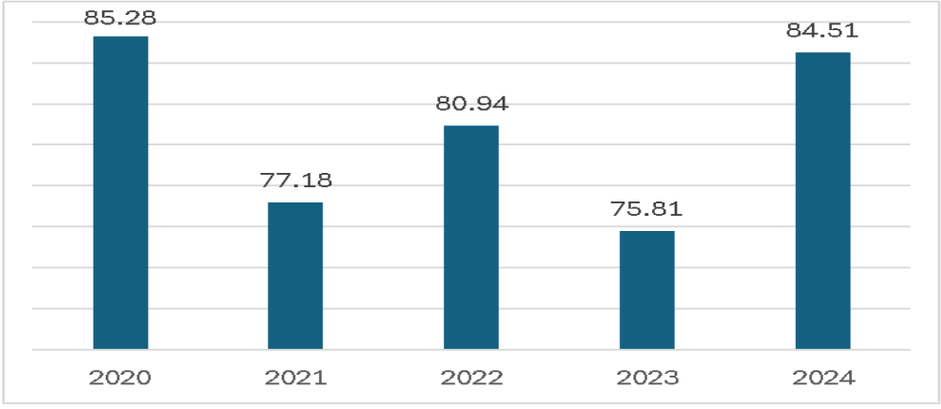


*Sumber : DMPTSP Kab. Maros Tahun 2025*

### 2.4.5.Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB adalah indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara. Rasio ini dihitung dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor dalam kurun waktu tertentu dengan produk domestik bruto pada kurun waktu yang sama. Meski disebut rasio, hasil akhirnya biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Rasio ini dijadikan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional.

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 rasio ekpor dan impor terhadap PDRB sebesar 20,2 0% kemudian menurun hingga mencapai 19,13 % pada tahun 2023.

**Grafik 2.45**
**Rasio Impor + Ekspor Terhadap PDRB**
**Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2023**

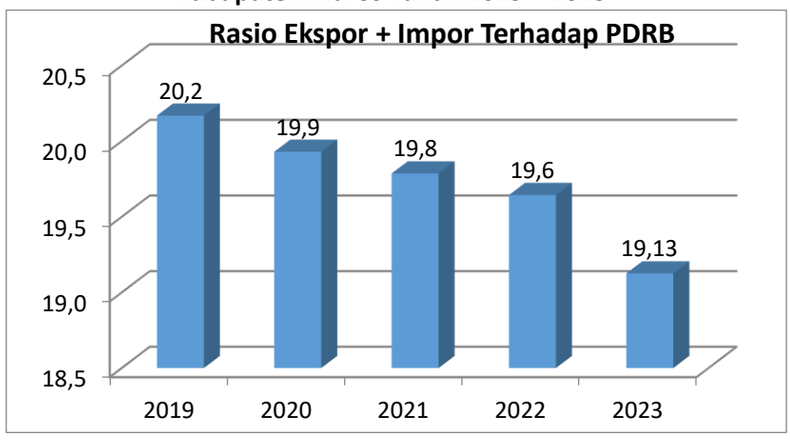


*Sumber : BPS Kab. Maros (Dolah), 2025*

### 2.4.6.Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

#### 2.4.6.1.Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk

Panjang jalan di Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 1,032km. Setelah dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2018, panjang jalan Kabupaten Maros sebesar

1.032 km. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,003 km/jiwa kemudian tahun 2020 hingga 2023 sebesar 0,0026 km/jiwa. Pada tahun 2024 sebesar 0,0030. Menurunnya rasio panjang jalan ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sedangkan panjang jalan praktis tidak megnalami perubahan.

**Tabel 2.285**
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk Kabupaten Maros**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah panjang jalan | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1.032 | 1.238,52 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 353,121 | 391,774 | 396,924 | 403.774 | 410.339 |
| 3 | Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk | 0.003 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0030 |

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 km jalan melayani 350 sampai 378 penduduk di Kabupaten Maros. Rasio Panjang jalan ini belum dapat mencerminkan tingkat kepadatan jalan dikarenakan belum memperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

### 2.4.6.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang dan orang yang memalui dermaga, terminal/bandara pertahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar Udara Hasanuddin. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terangkut sebanyak 21 juta orang, kemudian menurun hingga mencapai 1 juta orang pada tahun 2020. Pada tahun 2022 akibat adanya kebijakan pembukaan mobilitas masyarakat pasca Covid 19 , terjadi peningkatan jumlah penumpang secara signifikan, dimana jumlah penumpang yang tercatat pada tahun 2023 hanya sebesar 2,1 juta orang.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang, jumlah barang yang terangkut selama tahun 202 meningkat dengan pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah barang yang terangkut sebesar 143.614.485 ton, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 94.644.278 ton. Bertambahnya jumlah barang yang terangkut pada tahun 2024 dikarenakan kebijakan pembukaan mobilitas penduduk juga disebabkan banyaknya pembelian barang melalui online shop akibat pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2024.

**Tabel 2.286**
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah orang yang Terangkut Angkutan Umum (jiwa) | 1.797.572 | 1.209.600 | 2.159.733 | 2.159.833 | 10.541.421 |
| 2 | Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum (Ton) | 143.614.485 | 5.624.916.924 | 7.031.146.354 | 7.031.146.454 | 94.644.278 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2025

### 2.4.6.3.Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah barang dan orang yang memalui dermaga, terminal/bandara pertahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar Udara Hasanuddin.

**Tabel 2.287**
**Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bandara | | | | | |
| | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 1,798,122 | 1,799,744 | 2,159,005 | 9.553.322 | 10.541.421 |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 143,614,596 | 5,624,916,924 | 7,031,146,354 | 185.182.822 | |
| **2** | Dermaga | | | | | |
| | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 350 | 370 | 417 | 268.200 | |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 111 | 145 | 149 | 147 | |
| **3** | Terminal | | | | | |
| | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 200 | 203 | 311 | 1.045.800 | |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 0 | 0 | 0 | 10.762.667 | 94,644,278 |
| **4** | Jumlah orang terangkut (Jiwa) | 13.056.492 | 1.797.772 | 2.159.733 | 10.867.322 | 88,895,454 |
| | Jumlah barang terangkut (Ton) | 143,614,596 | 5.624.917.069 | 7.031.146.354 | 186.228.829 | 189,288,556 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2025

**2.4.6.4.Ketaatan terhadap RTRW**

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

**Tabel 2.288**
**Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketaatan Terhaap RTRW | 2.17 | 2.83 | 4.32 | 5,86 | 10.81 |

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025

Penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran

masyarakat tentang tata ruang yangada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2020 sebesar 2.17%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 10.81% pada tahun 2024.

**2.4.6.5.Luas Wilayah Industri**

Kawasan Industri atau wilayah industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri.Luas wilayah industri Kabupaten Maros tidak mengalami perkembangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Bahkan pada tahun 2020, penetapan kawasan industri sudah memiliki legalitas hukum melalui PERDA. Pada tahun 2018 luas wilayah industri Kabupaten Maros sebesar 112, Ha, kemudian pada tahun 2019 sebesar 122 Ha. Pada tahun 2021 hingga tahun 2024 luas areal wilayah industri Kabupaten Maros sebesar 122 Ha, dan masih dapat berkembang lagi sesuai Rencana Pengembangan Kawasan Industri (RPKI) 2018-2038.

**Tabel 2.289**
**Luas Wilayah Industri Kabupaten Maros**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Luas Wilayah Industri (Realisasi) | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| **2.** | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | 69.960,63 | 69.960,63 | 69.960,63 | 69.960,63 | 69.960,63 |
| **3.** | Rasio Luas wilayah industri | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

Sumber : DPMPTSP Kab. Maros, 2023

**2.4.6.6. Luas Wilayah Kebanjiran**

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Luas wilayah yang mengalami kebanjiran di Kabupaten Maros terdiri atasi Kecamatan Turikale, Bantimurung, Bontoa, Camba, Cenrana, Mandai, Maros Baru, Marusu, Moncongloe dan Tanralili. Luas wilayah kebanjran secara umum mengalami peningkatan.

Tahun 2020 rasio wilayah kebanjiran sebesar 6,04% kemudian menurun hingga mencapai 2,53 % pada tahun 2024. Menurunnya rasio kebanjiran ini disebabkan makin meningkatnya pembangunan ifrastruktur pencegahan banjir. Jumlah desa yang terkena dampak banjir sepanjang tahun 2024 sebanyak 40 desa.

**Tabel 2.290**
**Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Luas Wilayah kebanjiran | 4,227 | 4,481 | 4,212 | 4.212 | 4.212 |
| | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | 69,961 | 69,961 | 69,961 | 69,961 | 69,961 |
| | Rasio Wilayah kebanjiran | 6.04 | 6.40 | 6.02 | 2,53 | 2,53 |

Sumber : BPBD Kab. Maros, 2025 (Data masih Sangat Sementara)

**2.4.6.7. Luas Wilayah kekeringan**

Wilayah kekeringan adalah wilayah yang memiliki sumber air sangat terbatas, bahkan sumber air satu-satunya adalah air hujan. Beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros merupakan wilayah yang tidak memiliki sumber air lain selain air hujan. Wilayah tersebut utamanya kecamatan yang berada di wilayah pesisir, seperti Kecamatan Lau dan Bontoa. Rasio luas wilayah kekeringan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan data yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 rasio wilayah kekeringan sebesar 46% kemudian menurun hingga mencapai 25 %, pada tahun 2024.

Cukup tingginya wilayah terdampak kekeringan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 disebabkan cukup lamanya musim kemarau melanda Kabupaten Maros, selain itu wilayah yang terdampak memang berada pada wilayah yang berada di Kawasan pesisir dimana air tawar sangat sulit didapatkan. Pada tahun 2020 wilayah kekeringan menurun drastis disebabkan karena musim hujan yang cukup panjang melanda Kabupaten Maros, dimana pada bulan Januari hingga April kemudian Oktober hingga Desember curah hujan di Kabupaten Maros tergolong cukup tinggi. Wilayah kekeringan di Maros Kembali Naik menjadi 25 % pada tahun 2024.

**Tabel 2.291**
**Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Luas Wilayah kekeringan | 32,177 | 13,600 | 13,056 | 18,014 | 17,497 |
| **2.** | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | 69,961 | 69,961 | 69,961 | 69,961 | 69,961 |
| **3.** | Rasio Wilayah kekeringan | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.25 |

Sumber : BPBD Kab. Maros, 2025

**2.4.6.8. Luas Wilayah Perkotaan**

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.Wilayah yang termasuk kawasan perkotaan untuk Kabupaten Maros adalah Kecamatan Turikale dan seluruh desa/kelurahan yang merupakan ibukota kecamatan dari 13 kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Maros, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Maros sebesar 3.117,03, dengan rasio sebesar 4,46%.

**Tabel 2.292**
**Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Luas Wilayah Perkotaan (Realisasi) | 3.117,02 | 3.117,02 | 3.117,02 | 3.117,02 | 3.117,02 |
| **2** | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | 69.961 | 69.961 | 69.961 | 69.961 | 69.961 |
| **3** | Rasio Luas Wilayah Perkotaan | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025

**Tabel 2.293**
**Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Maros**

| No | Kecamatan/Desa/Kelurahan | Luas | Rasio |
|---|---|---|---|
| **1** | Turikale | 2993 | 4,28 |

| No | Kecamatan/Desa/Kelurahan | Luas | Rasio |
|---|---|---|---|
| 2 | Tetebatu | 4,38 | 0,01 |
| 3 | Moncongloe Bulu | 12,76 | 0,02 |
| 4 | Baju Bodoa | 3,76 | 0,01 |
| 5 | Temappaduae | 7,54 | 0,01 |
| 6 | Maccini baji | 9,48 | 0,01 |
| 7 | Panjalingan | 2,91 | 0,00 |
| 8 | Kalabirang | 5,89 | 0,01 |
| 9 | Jenetaesa | 10,08 | 0,01 |
| 10 | Borong | 4,49 | 0,01 |
| 11 | Pucak | 17,76 | 0,03 |
| 12 | Cempaniga | 6,34 | 0,01 |
| 13 | Bengo | 23,37 | 0,03 |
| 14 | Ladange | 15,26 | 0,02 |
| **MAROS** | | 3.117,02 | 4,46 |

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025

**2.4.6.9. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jumlah bank di Kabupaten Maros sampai tahun 2024 sebanyak 21 dengan unit, dengan rincian 15 unit bank konvensional dan 2 unit bank syariah. Sedangkan unit pembiayaan di Kabupaten Maros sebanyak 6 unit yang mana keseluruhan dan unit pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan konvensional.

**Tabel 2.294**
**Jumlah Bank Serta Pembiayaan dan Cabangnya**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Sektor | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Bank Umum | | | | | |
| 1.1. | Konvensional | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Pembiayaan (Finance) | | | | | |
| 2.1. | Konvensional | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2. | Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TOTAL | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

**2.4.6.10. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya**

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat). Perusahaan asuransi yang teradapat di Kabupaten Maros pada tahun 2020 hingga tahun 2021 hanya satu yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada tahun 2022 hingga tahun 2024 bertambah menjadi 5 perusahaan. Hal ini menunjukkan tingkat perekenomian dan pendapatan masyarakat Kabupaten Maros semkain membaik setiap tahunnya.

**Tabel 2.295**
**Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Sektor | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | Perusahaan Asuransi Kerugian | | | | | |
| **1.1.** | Konvensional | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| **1.2.** | Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.** | Perusahaan Asuransi Jiwa | | | | | |
| **2.1.** | Konvensional | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **2.2.** | Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

**2.4.6.11. Jenis dan Jumlah Restoran**

Jumlah restoran yang terdapat di Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, jumlah restoran yang terdapat di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 134 restoran, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 93 restoran, dan pada tahun 2021 sebanyak 158 unit restoran, kemudian pada tahun 2022 jumlah restoran kembali meningkat hingga mencapai 158 unit. Dan naik menjadi 168 unit pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali menurun dengan jumlah rrestoran sebesar 120 unit.

**Tabel 2.396**

**Jumlah Restoran Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandai | 17 | 74 | 70 | 90 | 37 |
| 2 | Moncongloe | 5 | 5 | 5 | | |
| 3 | Maros Baru | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | Marusu | 1 | 7 | 7 | 8 | |
| 5 | Turikale | 37 | 36 | 40 | 50 | 46 |
| 6 | Lau | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 |

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bontoa | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 8 | Bantimurung | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Simbang | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 10 | Tanralili | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | Tompobulu | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | Camba | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Cenrana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Mallawa | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| TOTAL | | 134 | 93 | 158 | 168 | 120 |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2025

**2.4.6.12. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih**

Persentase penduduk yang menggunakan air bersih adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih dibagi dengan jumlah penduduk. Syarat dari air bersih menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM, pompa air, sumur, mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

Sumber air bersih yang digunakan penduduk Kabupaten Maros adalah air yang bersumber dari PDAM (Perpipaan), Sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, penampungan air hujan, dan lain-lain. Persentase penduduk Kabupaten Maros yang memiliki akses terhadap air bersih di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 90.85%, kemudian menurun hingga mencapai 76,68 % pada tahun 2024.

**Tabel 2.397**
**Persentase penduduk Pengguna Air Bersih**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Rumah tangga menggunakan air bersih | 88.952 | 91.818 | 91.662 | 85.527 | 68.145 |
| 2 | Jumlah Rumah tangga | 97.944 | 99.231 | 98.490 | 88.870 | 88.870 |
| 3 | Persentase penduduk Berakses Air bersih | 90,85 | 92,53 | 93,07 | 98,49% | 76,68% |

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025

**Tabel 2.398**
**Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih**
**Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah RT Yang Menggunakan Air Bersih perpipaan | Jumlah RT Yang Menggunakan Air Bersin Non Perpipaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mandai | 6.774 | 2.151 |
| 2 | Moncongloe | 1.530 | 5.338 |
| 3 | Maros baru | 1.829 | 5.499 |

| No | Kecamatan | Jumlah RT Yang Menggunakan Air Bersih perpipaan | Jumlah RT Yang Menggunakan Air Bersin Non Perpipaan |
|---|---|---|---|
| **4** | MArusu | 1.841 | 4.885 |
| **5** | Turikale | 7.442 | 2.250 |
| **6** | Lau | 2.689 | 7.290 |
| **7** | Bontoa | 1.571 | 4.847 |
| **8** | Bantimurung | 5.688 | 1.471 |
| **9** | Simbang | 3.372 | 1.394 |
| **10** | Tanralili | 2.914 | 1.103 |
| **11** | Tompobulu | 2.126 | 1.447 |
| **12** | Camba | 2.754 | 1.263 |
| **13** | Cenrana | 3.510 | 862 |
| **14** | Mallawa | 1.578 | 2.109 |
| **MAROS** | | 45.618 | 41.909 |

Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros, 2025

**2.4.6.13 Ketersediaan Daya Listrik**

Kapasitas listrik terpasang merupakan sebuah rumah dari suatu tempat, sedangkan daya listrik adalah rombongan tamu yang menumpang di tempat tersebut selama jangka waktu tertentu. Misalnya, sebuah rumah memiliki daya tampung 1300 tamu untuk menginap

Ketersediaan listrik Kabupaten Maros selama tahun 2018 hingga tahun 2024 cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari daya terpasang yang dibandingkan dengan produksi listrik yang disediakan oleh PLN. Pada tahun 2018 daya terpasang sebesar 189.914.639 Kw, kemudian pada tahun 2018 daya terpasang sebesar 196.844.789 Kw. Pada tahun tahun 2022, daya terpasang Kembali meningkat hingga mencapai 243.638.000 kw. Pada tahun 2024 terpasang 183.000.000 kw.

Berdasarkan data yang ada tabel dibawah, diketahui bahwa produksi listrik Kabupaten Maros masih lebih tinggi dibandingkan dengan daya terpasang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Maros tidak akan kekurangan listrik dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

**Tabel 2.399**
**Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Maros**

| Tahun | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik terjual (KWh) | Susu/Hilang (KWh) |
|---|---|---|---|---|
| **2018** | 189.914.639 | 500.194.400 | 476.499.864 | 23.694.536 |
| **2019** | 196.844.789 | - | - | - |
| **2020** | 203.398.189 | - | - | - |
| **2021** | 213.645.173 | - | - | - |
| **2022** | 243.638.000 | 595.888.000 | 500.555.225 | 22.260.000 |
| **2023** | 210.000.000 | | | |
| **2024** | 183.000.000 | | | |

Sumber : PLN Kab. Maros (Diolah), 2024

**2.4.6.14. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik**

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat terlihat dari jumlah pelanggan listrik (PLN). Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Maros pada 2020 sebesar 96,12% dengan jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik sebesar 87.442 RT. Untuk tahun 2024 jumlah persentase RT menggunkan listrik sebesar 97.00 % dengan RT pengguna sebesar 112.771 RT.

Meningkatnya jumlah RT yang menggunakan listrik menunjukkan bahwa listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selain itu semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat juga berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk menggunakan listrik.

**Tabel 2.300**
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**
**Kabupaten MarosTahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik | 87.442 | 96.868 | 82.063 | 110.847 | 112.771 |
| **2.** | Jumlah Rumah Tangga | 90.970 | 97.944 | 102.751 | 100.943 | 116.154 |
| **3.** | Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik | 96,12 | 98,90 | 79,80 | 91,06 | 97,00 |

Sumber : PLN Kab. Maros (Diolah), 2025

**2.4.6.15. Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Selular**

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting pada jaman sekarang ini, dikarenakan fungsinya yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi (Smartphone). Persentase penduduk Kabupaten Maros yang menggunakan telepon selular menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 77,97% dengan jumlah penduduk yang menggunakan telepon seluler sebanyak 188.805 orang. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang menggunakan telepon seluler meningkat sebanyak 403,774 orang dengan persentase sebesar 83,57%.

Seperti halnya listrik, telepon seluler juga saat ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat umum. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS). Selanjutnya handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi. Juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Dengan semakin banyaknya fungsi telepon seluler tersebut maka masyarakat saat ini semakin banyak yang menggunakan telepon seluler.

## 2.4.5 Fokus Iklim Berinvestasi

### 2.4.5.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.

Angka kriminalitas yang dapat ditangani oleh pihak berwajib di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0.18 % dengan jumlah tinndakan kriminal yang dapat tertangani sebanyak 621 kasus. Pada tahun 2024 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 0.02 % dengan jumlah anga kejadian yang tertanagni sebanyak 9.738 kasus.

Rendahnya kejadian kriminal yang terjadi di Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum tingkat keamanan di Kabupaten maros masih sangat baik, sehingga masyarakat, pegusaha dan pelaku ekonomi lainnya dapat melakukan aktivitas dan kegiatan dengan tenang.

**Tabel 2.301**
**Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun | 621 | 654 | 659 | 692 | 9.738 |
| 2 | Jumlah penduduk | 349,822 | 353,121 | 391,774 | 396,924 | 423.989 |
| 3 | Angka Kriminalitas Yang Tertangani | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.02 |

*Sumber : Satpol PP dan Polres Maros, 2025*

### 2.4.5.2 Persentase desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri dari desa swasembada diantaranya: Kebanyakan berlokasi di ibukota dan kecamatan, penduduk padat, tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut, telah memiliki fasilitas yang memadai, dan juga maju dibanding warga dari desa lainnya. Persentase desa swasembada Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 11,25 %, dengan jumlah desa swasembada sebanyak 9 desa.

**Tabel 2.302**
**Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa**
**Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jumlah desa berswasembada | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Jumlah Desa/kelurahan | 80 | 81 | 82 | 80 | 80 |
| 3 | Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa | 2.50 | 3.70 | 4.88 | 11,25 | 11,25 |

*Sumber : PEMDES Kab. Maros, 2024*

Selain menggunakan indikator desa swasemabda, inidkator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi desa kemakmuran atau kesejahteraan suatu desa adalah jumlah desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Berdasarkan buku Indeks Pembangunan Desa yang dirilis oleh BPS Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros yang terdiri dari 80 desa memiliki jumlah desa tertinggal sebanyak 6 desa, desa mandiri sebanyak 3 desa dan desa berkembang sebanyak 71 desa.

**Tabel 2.303**
**Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | KECAMATAN | DESA | IPD | Status Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTIMURUNG | ALATENGAE | 70,35 | Berkembang |
| 2 | BANTIMURUNG | BARUGA | 69,82 | Berkembang |

| No | KECAMATAN | DESA | IPD | Status Desa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BANTIMURUNG | MANGELORENG | 69,83 | Berkembang |
| 4 | BANTIMURUNG | MATTOANGIN | 72,05 | Berkembang |
| 5 | BANTIMURUNG | MINASA BAJI | 72,27 | Berkembang |
| 6 | BANTIMURUNG | TUKAMASEA | 72,88 | Berkembang |
| 7 | BONTOA | AMPEKALE | 63,29 | Berkembang |
| 8 | BONTOA | BONTO BAHARI | 71,6 | Berkembang |
| 9 | BONTOA | BONTO LEMPANGAN | 70,6 | Berkembang |
| 10 | BONTOA | MINASA UPA | 59,87 | Berkembang |
| 11 | BONTOA | PAJUKUKANG | 66,75 | Berkembang |
| 12 | BONTOA | SALENRANG | 74,58 | Berkembang |
| 13 | BONTOA | TUNIKAMASEANG | 52,6 | Berkembang |
| 14 | BONTOA | TUPABIRING | 70,51 | Berkembang |
| 15 | CAMBA | BENTENG | 49,09 | Tertinggal |
| 16 | CAMBA | CENRANA | 59,95 | Berkembang |
| 17 | CAMBA | PATTANYAMANG | 45,92 | Tertinggal |
| 18 | CAMBA | PATTIRO DECENG | 63,14 | Berkembang |
| 19 | CAMBA | SAWARU | 61,18 | Berkembang |
| 20 | CAMBA | TIMPUSENG | 62,52 | Berkembang |
| 21 | CENRANA | BAJI PAMAI | 64,27 | Berkembang |
| 22 | CENRANA | CENRANA BARU | 56,32 | Berkembang |
| 23 | CENRANA | LABUAJA | 56,85 | Berkembang |
| 24 | CENRANA | LAIYA | 63,63 | Berkembang |
| 25 | CENRANA | LEBBOTENGNGAE | 62,61 | Berkembang |
| 26 | CENRANA | LIMAM POCCOE | 70,53 | Berkembang |
| 27 | CENRANA | ROMPE GADING | 63,09 | Berkembang |
| 28 | LAU | BONTO MARANNU | 79,03 | Berkembang |
| 29 | LAU | MARRANNU | 70,97 | Berkembang |

| No | KECAMATAN | DESA | IPD | Status Desa |
|---|---|---|---|---|
| **30** | MALLAWA | BARUGAE | 60,19 | Berkembang |
| **31** | MALLAWA | BATU PUTIH | 62,06 | Berkembang |
| **32** | MALLAWA | BENTENGE | 59,91 | Berkembang |
| **33** | MALLAWA | GATTARENG MATINGGI | 44,15 | Tertinggal |
| **34** | MALLAWA | MATTAMPAPOLE | 44,63 | Tertinggal |
| **35** | MALLAWA | PADAELO | 63,76 | Berkembang |
| **36** | MALLAWA | SAMAENRE | 52,48 | Berkembang |
| **37** | MALLAWA | TELLUMPANUAE | 54,31 | Berkembang |
| **38** | MALLAWA | ULUDAYA | 57,86 | Berkembang |
| **39** | MALLAWA | WANUA WARU | 47,13 | Tertinggal |
| **40** | MANDAI | BAJI MANGNGAI | 67,2 | Berkembang |
| **41** | MANDAI | BONTO MATENE | 66,54 | Berkembang |
| **42** | MANDAI | PATTONTONGAN | 61,44 | Berkembang |
| **43** | MANDAI | TENRIGANGKAE | 72,66 | Berkembang |
| **44** | MAROS BARU | BORI KAMASE | 72,51 | Berkembang |
| **45** | MAROS BARU | BORIMASUNGGU | 66,46 | Berkembang |
| **46** | MAROS BARU | MAJANNANG | 65,72 | Berkembang |
| **47** | MAROS BARU | MATTIRO TASI | 68,05 | Berkembang |
| **48** | MARUSU | A'BULOSIBATANG | 64,49 | Berkembang |
| **49** | MARUSU | BONTO MATENE | 52,86 | Berkembang |
| **50** | MARUSU | MARUMPA | 80,43 | Mandiri |
| **51** | MARUSU | NISOMBALIA | 68,39 | Berkembang |
| **52** | MARUSU | PABENTENGAN | 67,25 | Berkembang |
| **53** | MARUSU | TELLUMPOCCOE | 66,37 | Berkembang |
| **54** | MARUSU | TEMAPPADDUAE | 65,43 | Berkembang |
| **55** | MONCONGLOE | BONTO BUNGA | 72,37 | Berkembang |
| **56** | MONCONGLOE | BONTO MARANNU | 62,4 | Berkembang |

| No | KECAMATAN | DESA | IPD | Status Desa |
|---|---|---|---|---|
| **57** | MONCONGLOE | MONCONGLOE | 65,22 | Berkembang |
| **58** | MONCONGLOE | MONCONGLOE BULU | 68,86 | Berkembang |
| **59** | MONCONGLOE | MONCONGLOE LAPPARA | 67,14 | Berkembang |
| **60** | SIMBANG | BONTO TALLASA | 70,79 | Berkembang |
| **61** | SIMBANG | JENETAESA | 71,61 | Berkembang |
| **62** | SIMBANG | SAMANGKI | 75,77 | Mandiri |
| **63** | SIMBANG | SAMBUEJA | 72,27 | Berkembang |
| **64** | SIMBANG | SIMBANG | 66,83 | Berkembang |
| **65** | SIMBANG | TANETE | 67,62 | Berkembang |
| **66** | TANRALILI | ALLAERE | 72,86 | Berkembang |
| **67** | TANRALILI | DAMAI | 68,57 | Berkembang |
| **68** | TANRALILI | KURU SUMANGE | 70,99 | Berkembang |
| **69** | TANRALILI | LEKO PANCING | 79,84 | Mandiri |
| **70** | TANRALILI | PURNA KARYA | 67,75 | Berkembang |
| **71** | TANRALILI | SUDIRMAN | 74,94 | Berkembang |
| **72** | TANRALILI | TODDO PULIA | 69,56 | Berkembang |
| **73** | TOMPU BULU | BENTENG GAJAH | 60,89 | Berkembang |
| **74** | TOMPU BULU | BONTO MANAI | 55,37 | Berkembang |
| **75** | TOMPU BULU | BONTO MANURUNG | 58,36 | Berkembang |
| **76** | TOMPU BULU | BONTO SOMBA | 38,24 | Tertinggal |
| **77** | TOMPU BULU | BONTOMATINGGI | 57,77 | Berkembang |
| **78** | TOMPU BULU | PUCAK | 68,7 | Berkembang |
| **79** | TOMPU BULU | TODDOLIMAE | 65,66 | Berkembang |
| **80** | TOMPU BULU | TOMPO BULU | 69,23 | Berkembang |

*Sumber BPS Prop. Sulsel, 2024*

### 2.4.5.3 Jumlah Demontrasi

Jumlah demontrasi yang terjadi di kabupaten Maros selama tahun 2019 hongga tahun 2023 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020 jumlah kasus sebesar 13 kasus dan tahun 2024 turun sedikit menjadi 5 kasus. Penanganan demontrasi ini

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi terkait serta kepolisian dan TNI.

**Tabel 2.304**
**Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Maros**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bidang Politik | 3 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| **2** | Ekonomi | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| **3** | Kasus pemogokan kerja | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| **4** | **Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa** | **13** | **15** | **14** | **12** | **5** |

*Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Maros, 2025*

### 2.4.5.4 Lama Proses Perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB, HO. Dalam hal proses perijinan, lama proses perijinan pada kantor pelayanan di Kabupaten Maros dari jumlah total jenis ijin yang dikeluarkan pada tahun 2016 hingga tahun 2021 yakni selama 5 – 6 hari. Cukup lamanya proses perijinan ini disebabkan sebelum mengeluarkan ijin yang dimaksud, diperlukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada, apakah telah sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pengajuan izin, serta izin berjenjang muali dari tingkat RT/RW hingga kecamatan yang harus dipenuhi oleh pemohon

**Tabel 2.305**
**Lama Proses Perijinan Kabupaten Maros tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | SIUP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **2.** | TDP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **3.** | IUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **4.** | TDI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **5.** | IMB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **6.** | HO/SITU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Rata-Rata** | | **5,83** | **5,83** | **5,83** | **5,83** | **5,83** |

*Sumber : DPMPTSP Kab. Maros, 2025*

### 2.4.5.5 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah

kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Jumlah Perda yang terkait perijinan lalu ,intas barang dan ketenaga kerjaan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 11 Perda.

**Tabel 2.306**
**Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Maros**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Jumlah Perda terkait perijinan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **2.** | Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.** | Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL** | | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** |

*Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Maros, 2025*

### 2.4.5.6 Jumlah Pajak dan Retribusi

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Jumlah pajak yang dipungut selama tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 11 jenis pajak, sedangkan untuk retirbusi sebanyak 13 jenis retribusi.

**Tabel 2.307**
**Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Maros**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Jumlah Pajak | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **2.** | Jumlah rertibusi | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **TOTAL** | | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** |

*Sumber : Bpkad Kab Maros, 2025*

## 2.4.6 Fokus Sumber Daya Manusia

### 2.4.6.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros

hingga tahun 2020 mencapai 5,09 orang per 1.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 10 persen.

Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Maros yang berada di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting.

**Tabel 2.308**

**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 20,931 | 20,931 | 40,377 | 31.865 | 31.865 |
| 2 | Jumlah penduduk | 391.774 | 396,924 | 403,774 | 410.669 | 410.669 |
| 3 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 5,09 | 5,27 | 10.00 | 7,7 | 7,7 |

*Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2024*

### 2.4.6.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan Kabupaten Maros memperlihatkan penduduk usia produktif (15-64) tahun masih lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif ( < 15 tahun dan > 64 tahun). Pada tahun 2020 rasio ketergantungan sebesar 51,26 % kemudian pada tahun 2024 menurun hingga mencapai 45,00 %. Angka Tingkat Ketergantungan menunjukkan bahwa, setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Maros harus menanggung atau membiayai 45-51 orang penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut berarti beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang berusia tidak produktif cukup rendah, dan bebannya semakin menurun selama kurun waktu 2020 hingga 2024, atau dengan kata lain Kabupaten Maros masih berada pada kategori bonus demografi.

**Tabel 2.309**

**Rasio Ketergantungan**

**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk < 15 Tahun | 100,533 | 100,586 | 100,699 | 102,195 | 102.421 |
| 2 | Penduduk > 64 Tahun | 19,471 | 20,113 | 20,721 | 23,823 | 25.032 |
| 3 | Penduduk Usia Tidak Produktif | 120,004 | 120,699 | 121,379 | 126,018 | 127.453 |
| 4 | Penduduk Usia Produktif | 233,117 | 235,496 | 238,304 | 277,756 | 282.246 |
| 5 | **Rasio Ketergantungan** | **51,26** | **51,48** | **50,93** | **45.37** | **45,00** |

*Sumber : BPS Kab. Maros, 2025*

## 2.5 Capaian Pembangunan Daerah

### 2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021-2024

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance*

*Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:

1. Indikator Input: gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)
2. Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
3. Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
4. Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)
5. Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suati tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah melalui 7 Indikator Tujuan dan 14 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maros.

Berikut matriks pencapaian indicator tujuan, sasaran dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 berdasarkan target dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.310**
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati dan Wakil Bupati Maros**
**Tahun 2024**

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian s.d Ta-hun Berjalan (2024) |
| 1 | MENINGKATKAN KUALITAS PENYE-LENGGARAAN BIROKRASI DAN PE-LAYANAN PUBLIK | **Tujuan 1:**<br>Menciptakan tata kel-ola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi | Indeks Refor-masi Birokrasi | Nilai In-deks | 61,72 | B (68) | |

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOLOK UKUR | SATUAN | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan (2024) |
| | | 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | Nilai Level | 64,08 | 68 | 64,83 |
| | | 2 | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks | 3,34 | 3,26 | 3,15 |
| 2 | MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | **Tujuan 2:** **Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing** | | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Nilai Indeks** | 71,63 | 71,66 | |
| | | 3 | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Indeks Pendidikan | Nilai Indeks | 64,26 | 65,97 | |
| | | | | Indeks Kesehatan | Nilai Indeks | 76,07 | 76,45 | |
| | | 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan | Nilai Indeks | 3,5 | 3,26 | 3,77 |
| | | 5 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender | Indeks Pemberdayaan Gender | Nilai Indeks | 89,5 | 90,85 | 89,5 |
| 3 | MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF | **Tujuan 3:** **Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat** | | **Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar** | **Nilai Indeks** | 3,28 | 3,26 | |
| | | 6 | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat | Indeks Harga Konsumen | Nilai Indeks | 116,59 | 98,91 | 106,13 |

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOLOK UKUR | SATUAN | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan (2024) |
| | | 7 | Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar | Nilai Indeks | 3,28 | 3,26 | 3,07 |
| 4 | MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL | **Tujuan 4:** **Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah** | | **Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | 5 | 7,13 | |
| | | 8 | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah | Persen | 2,28 | 7,79 | 4,11 |
| | | | | PDRB Per Kapita | Rp/jiwa | 64,69 | 57,44 | 69,21 |
| | | 9 | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 3,64 | 3,52 | 4,34 |
| | | 10 | Terkendalinya Laju Inflasi | Laju inflasi | Persen | 2,89 | 3 | 1,74 |
| | | 11 | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | Angka kemiskinan | Persen | 9,65 | 7,64 | 9,32 |
| 5 | MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH | **Tujuan 5:** **Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiap wilayah** | | **Rasio Gini** | **Nilai Rasio** | 0,372 | 0,35 | |
| | | 12 | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Nilai Indeks | 3,25 | 3,26 | 3,14 |
| 6 | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA | **Tujuan 6:** **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | | **Indeks kualitas lingkungan hidup** | **Nilai Indeks** | 67,87 | 63,87 | |
| | | 13 | Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan | Indeks Kualitas Udara | Nilai Indeks | 87,77 | 88 | 93,04 |
| | | | | Indeks Kualitas Air | Nilai Indeks | 55,45 | 50,6 | 60 |

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOLOK UKUR | SATUAN | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan (2024) |
| | | | | Indeks Kualitas Lahan | Nilai Indeks | 53,55 | 55,3 | 53,25 |
| | | **Tujuan 7:** | | **Indeks risiko bencana** | **Nilai Indeks** | 128,04 | 108,06 | |
| | | **Menurunkan resiko bencana** | | | | | | |
| | | 14 | Menurunnya resiko akibat bencana | Indeks Ancaman Bencana | Nilai Indeks | 18,12 | 12,26 | 16,3 |
| | | | | Indeks Kerugian | Nilai Indeks | 6 | 5,6 | 6,45 |
| | | | | Indeks Kapasitas | Nilai Indeks | 0 | 0,77 | 0,28 |

*Sumber: Bapperida (diolah), 2025*

### 2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Urusan Pemerintah merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Untuk mengetahun capaian indicator kinerja dari setiap aspek/focus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan keweangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undnagan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indicator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaran urusan pemerintah tahun 2020-2024 capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai amanah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.314**
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**
**Kabupan Maros Tahun 2020-2024**

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR** | | | | | | |
| **I** | **Pendidikan** | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 53,23 | 72,06 | 85,22 | 96,28 | 96,93 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 89,56 | 114,77 | 101,03 | 106,70 | 102,91 |
| 3 | Angka Pendidikan di Tamatkan | 65,14 | 59,42 | 52,93 | 59,26 | 52,70 |
| | **Angka Partisipasi Murni (APM)** | | | | | |
| 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pa-ket A | 93,67 | 99,38 | 102,80 | 105,67 | 102,92 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 74,57 | 75,54 | 100,02 | 103,06 | 102,34 |
| | **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** | | | | | |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | 100,00 | 106,54 | 102,80 | 105,67 | 102,92 |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B | 46,12 | 108,66 | 100,02 | 103,06 | 102,34 |
| | **Angka Putus Sekolah (APT)** | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,29 | 0,47 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| 8 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,11 | 0,28 | 0,18 | 0,09 | 0,06 |
| | **Angka Kelulusan (AL)** | | | | | |
| 9 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 99,69 | 98,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 99,94 | 100,00 | 99,86 | 100,00 | 100,00 |
| | **Angka Melanjutkan (AM)** | | | | | |
| 11 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/MTs | #DIV/0! | 106,84 | 98,31 | 106,84 | 103,71 |
| 12 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | #DIV/0! | 104,58 | 99,48 | 104,56 | #DIV/0! |
| | **Fasilitas Pendidikan** | | | | | |
| 13 | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik | 96,23 | 79,10 | 97,05 | 97,42 | 97,46 |
| 14 | Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik | 95,59 | 84,87 | 98,35 | 98,35 | 98,40 |
| 15 | Rasio Ketersediaan Seklah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar | 173,96 | 171,92 | 171,59 | 176,69 | 174,11 |
| 16 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | 17,91 | 18,10 | 13,02 | 18,86 | 22,29 |
| 17 | Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata | 0,57 | 0,55 | 0,35 | 0,60 | 0,63 |
| 18 | Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar | 1,06 | 1,00 | 0,91 | 0,81 | 0,55 |
| 19 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan laki-Laki | 99,88 | 99,83 | 99,83 | 99,93 | 100,00 |
| 20 | Penduduk Yang Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | 99,80 | 98,49 | 97,54 | 99,74 | 99,97 |
| 21 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | 90,25 | 69,04 | 87,32 | 88,29 | 0,00 |
| **II** | **Kesehatan** | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup | 3,11 | 3,83 | 7,14 | 9,18 | 11,49 |
| 2 | Angka Kelangsungan Hidup bayi | 996,89 | 996,17 | 992,86 | 990,82 | 988,51 |
| 3 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | 3,11 | 3,97 | 6,53 | 9,80 | 11,86 |
| 4 | Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup | 2,82 | 3,24 | 7,28 | 9,18 | 10,56 |
| 5 | Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup | 56,49 | 73,56 | 182,34 | 186,74 | 185,29 |
| 6 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 11,99 | 13,80 | 14,17 | 15,59 | 14,13 |
| 7 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 8 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,39 | 0,31 |
| 10 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk | 0,40 | 0,11 | 0,32 | 0,49 | 0,44 |
| 11 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan | 94,72 | 100,00 | 102,41 | 100,00 | 108,04 |
| 13 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 67,96 | 76,70 | 76,70 | 100,00 | 95,15 |
| 14 | Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 |
| 16 | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak | 93,82 | 102,43 | 99,30 | 89,94 | 107,33 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17 | Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 18 | Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani | 13,50 | 11,84 | 100,00 | 367,01 | 30,20 |
| 19 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 27,30 | 58,26 | 61,36 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | 116,46 | 112,65 | 147,11 | 186,90 | 261,11 |
| 21 | Tingkat kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | 6,99 | 6,21 | 4,95 | 7,06 | 12,26 |
| 22 | Proporsi jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS | 18,84 | 22,50 | 26,77 | 20,57 | 20,75 |
| 23 | Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS | 18,84 | 22,50 | 26,77 | 20,57 | 20,75 |
| 24 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | Penderita Diare Yang Ditangani | 39,62 | 23,64 | 113,57 | 53,70 | 56,33 |
| 26 | Angka Kejadian malaria | 20,00 | 15,62 | 24,77 | 22,89 | 20,28 |
| 27 | Tingkat Kejadian Akibat Malaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doibati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30 | Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Akhir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS | 7,11 | 5,86 | 5,71 | 9,98 | 0,00 |
| 33 | Cakupan Kunjungan Bayi | 95,74 | 100,00 | 100,95 | 119,98 | 115,36 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 34 | Cakupan Puskesmas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Cakupan Pembantu Puskesmas | 40,78 | 25,24 | 25,24 | 26,21 | 26,21 |
| 36 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 91,59 | 99,30 | 100,00 | 96,30 | 103,87 |
| 37 | Cakupan Pelayanan Nifas | 99,93 | 99,97 | 100,00 | 96,45 | 107,36 |
| 38 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga | 94,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,29 |
| 39 | Cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat | 19,83 | 7,57 | 13,94 | 13,09 | 97,20 |
| 40 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43 | Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani | 80,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 100,00 | 86,29 | 78,15 | 79,32 | 86,72 |
| **III** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | |
| **III.1** | **Pekerjaan Umum** | | | | | |
| 1 | Proprosi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,68 |
| 2 | Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk | 0,00 | 0,00 | 0,00256 | 0,00305 | 0,00292 |
| 3 | Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat Dilalui Roda 4 | 12,80 | 12,80 | 11,03 | 9,56 | 0,00 |
| 4 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) | 81,99 | 80,85 | 77,11 | 72,31 | 74,56 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,36 | 0,36 |
| 6 | Persentase sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan liar | 15,18 | 15,04 | 15,04 | 12,53 | 12,53 |
| 7 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 92,41 | 92,80 | 99,65 | 100,00 | 97,51 |
| 8 | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 9 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| 11 | Persentase bangunan turap di wilayah penghbung dan aliran sungai rawan long-sor | 18,16 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| 12 | Persentase irigasi kabupaten dalam kon-disi baik | 78,72 | 79,28 | 81,45 | 87,62 | 72,97 |
| 13 | Rasio jaringan irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 14 | Persemtase Penduduk berakses air mi-num | 90,85 | 92,53 | 92,46 | 98,64 | 76,68 |
| 15 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan | 62,33 | 67,26 | 66,71 | 51,72 | 46,32 |
| 16 | Persentase areal kawasan kumuh | 6,52 | 6,30 | 5,62 | 6,31 | 4,32 |
| 17 | Tersedianya Fasilitasi pengurangan sam-pah di perkotaan | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,26 |
| 18 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.2** | **Penataan Ruang** | | | | | |
| 1 | Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | 1,06 | 0,53 | 0,93 | 0,93 | 1,88 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Luasa RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 2,17 | 3,06 | 3,60 | 1,30 | 1,30 |
| 3 | Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan | 0,45 | 0,52 | 0,50 | 0,59 | #DIV/0! |
| 4 | Ruang Oublik yang Berubah Pe-runtukannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas dara-tan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ketaatan Terhadap RTRW | 2,83 | 4,32 | 5,86 | 7,96 | 10,81 |
| **IV** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PER-MUKIMAN** | | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 |
| 2 | Rasio Pemukiman layak huni | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 53,47 | 58,01 | 54,60 | 54,90 | 78,30 |
| 4 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 6,95 | 8,45 | 8,89 | 14,54 | 22,03 |
| 5 | Persentase pemukiman yang tertata | 98,18 | 98,49 | 98,70 | 98,97 | 98,86 |
| 6 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 7 | Persentase luasan pemukiman kumuh ka-wasan perkotaan | 31,25 | 39,41 | 38,23 | 11,39 | 15,43 |
| 8 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman disukung dengan PSU | #DIV/0! | 4,74 | 6,54 | 4,61 | 2,75 |
| **V** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas perlindungan msayara-kat (LINMAS) | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 100,00 | 75,86 | 88,82 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK) | 88,00 | 75,81 | 72,00 | 64,72 | 72,76 |
| 5 | Persentase Penegakan PERDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **VI** | **SOSIAL** | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 57,69 | 61,54 | 65,38 | 100,00 | 14,10 |
| 2 | Persentase PMKS yang etrtangani | 57,69 | 61,54 | 65,38 | 100,00 | 14,10 |
| 3 | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar' | 57,69 | 50,00 | 65,38 | 100,00 | 14,10 |
| 4 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya | 53,33 | 57,15 | 71,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persetase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | 53,33 | 57,15 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 33,33 | 33,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | | |
| **I** | **Tenaga Kerja** | | | | | |
| 1 | Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 47,50 | 35,29 | 55,92 | 16,29 | 23,26 |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaiakan dengan perjanjian bersama (PB) | 66,77 | 55,56 | 100,00 | 22,22 | 8,33 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 23,27 | 7,94 | 15,87 | 3,29 | 34,31 |
| 4 | Keselamatan dan perlindungan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | 10,01 | 70,00 | 5,17 | 5,04 | 5,12 |
| 6 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Besaran pemeriksanaan perusahaan | 84,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Besaran pengujian peralatan di perusahaan | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis komptensi | 36,49 | 70,00 | 80,00 | 75,00 | 72,00 |
| 10 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masayarakat | 69,14 | 69,00 | 69,00 | 64,00 | 25,00 |
| 11 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 64,00 | 0,00 |
| 12 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,10 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **II** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 18,06 | 14,08 | 14,72 | 14,63 | 0,00 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 81,94 | 62,13 | 54,48 | 45,44 | 0,00 |
| 4 | Rasio KDRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 43,63 | 36,97 | 26,28 | 27,34 | 26,47 |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 87,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi per-empuan dan anak korban kekerasan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| 15 | Rasio APM perempuan/lai-laki di SMP | 1,09 | 0,92 | 0,98 | 0,90 | 0,95 |
| 16 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **III** | **Pangan** | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | 42.194,06 | 42.748,71 | 43.486,46 | 43.729,65 | 44.543,64 |
| 2 | Ketersedian energi dan protein perkapita | 148,27 | 0,00 | 176,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | | | | | |
| **IV** | **Pertanahan** | | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | 14,70 | 20,50 | 20,53 | 27,12 | 24,62 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah negara | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Penyelesaian izin lokasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **V** | **Lingkungan Hidup** | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pemabngunan kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Ting-kat daerah | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 4 | Hasil pengukuran indeks kualitas air | 50,10 | 56,37 | 55,45 | 53,64 | 60,00 |
| 5 | Hasil pengukuran indeks kaulitas tutupan udara | 83,89 | 84,96 | 87,78 | 88,74 | 93,04 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan | 48,99 | 53,55 | 53,55 | 53,71 | 47,01 |
| 7 | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | 100,00 | 100,00 | 64,29 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas daerah (PPLHD) di kabupaten/kota | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Tervferifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan ttradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penetapan Hal MHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Terfasilitasi kegiata peningkatan pengetahuan dan keterampilan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 18 | Timbunan sampah yang ditangani | 45,18 | 50,42 | 51,08 | 55,12 | 56,33 |
| 19 | Persentase cakupan areal pelayanan | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,73 |
| 20 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 16,27 | 17,61 |
| 21 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 45,18 | 50,42 | 51,08 | 55,12 | 53,89 |
| 22 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 71,92 | 0,00 |
| 23 | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VI** | **Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil** | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0,86 | 0,96 | 1,42 | 0,99 | 1,00 |
| 2 | Rasio bayi berakte lahir | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | 0,53 | 0,32 | 0,44 | 0,47 | 0,49 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Penerapan KTP nasional berbasis NIK | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP) | 88,58 | 99,50 | 107,60 | 98,75 | 100,00 |
| 7 | Cakupan penertiban akta kelahiran | 83,39 | 87,13 | 99,53 | 0,53 | 99,68 |
| **VII** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | |
| 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 86,25 | 87,50 | 87,50 | 90,00 | 93,75 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan msyarakat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Rata0rata jumlah kelompok binaan PKK | 9,58 | 12,36 | 12,81 | 17,00 | 17,15 |
| 4 | Persentase LSM Aktif | 100,00 | 71,54 | 49,70 | 49,70 | 56,22 |
| 5 | Persentase LPM berprestasi | 78,26 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 60,87 |
| 6 | Persentase PKK Aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Persentase posyandu aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pemeliharaan pasca prgram pemberdayaan masyarakat | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk | 2,05 | 1,99 | 1,73 | 1,72 | 0,70 |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | 4,22 | 2,11 | 2,56 | 2,13 | 2,26 |
| 3 | Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | 22,22 | 22,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase perangkatd aerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk | 25,00 | 24,43 | 28,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualiotas penduduk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1,53 | 0,97 | 0,44 | 0,89 | 1,33 |
| 9 | Ratio akseptor KB | 70,05 | 71,13 | 51,53 | 62,38 | 63,17 |
| 10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun | 69,46 | 69,91 | 51,19 | 63,01 | 63,17 |
| 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun | 131,67 | 24,92 | 28,68 | 28,79 | 37,01 |
| 12 | Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | 0,51 | 21,26 | 24,10 | 21,19 | 0,67 |
| 13 | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 14,08 | 15,11 | 29,65 | 14,29 | 9,93 |
| 14 | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 26,02 | 23,55 | 21,99 | 21,38 | 23,23 |
| 15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | 43,60 | 45,63 | 87,06 | 42,98 | 15,72 |
| 16 | Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber-KB | 18,29 | 19,75 | 11,77 | 6,95 | 5,98 |
| 17 | Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB | 12,77 | 12,31 | 1,69 | 2,46 | 3,15 |
| 18 | Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB | 5,56 | 4,00 | 0,53 | 0,67 | 0,73 |
| 19 | Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan | 50,00 | 28,57 | 14,29 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | 40,34 | 27,39 | 33,67 | 33,93 | 33,17 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat derah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian pendudul | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga se-jahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri | 68,41 | 73,66 | 28,40 | 22,75 | 29,03 |
| 23 | Rasio petugas pemabntu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kopntrasepsi untuk emmenuhi permintaan masyarakat | 66,56 | 27,60 | 21,69 | 153,89 | 98,67 |
| 25 | Persentase faskers dan jejaringnya (dise-luruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pela-yanan | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 62,41 | 60,39 |
| 26 | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pem-binaan tumbuh kembang anak | 15,36 | 2,44 | 9,41 | 11,25 | 6,89 |
| 30 | Rata-rata usia kawin pertama | 27,61 | 28,12 | 23,55 | 27,24 | 27,24 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 31 | Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes | 0,447560488 | 0,352032018 | 0,330325364 | 0,302956373 | 0,403035348 |
| **IX** | **Perhubungan** | | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 1.797.772,00 | 1.799.307,00 | 2.159.169,00 | 1.834.727,00 | 0,00 |
| 2 | Rasio ijin trayek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | 0,00 | 426,00 | 755,00 | 178,00 | 206,00 |
| 4 | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4,00 | 3,00 |
| 5 | Persentase layanan angkutan darat | 36,97 | 34,74 | 36,18 | 10,00 | 29,77 |
| 6 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | 5,37 | 40,48 | 49,43 | 61,39 | 55,98 |
| 7 | Pemasangan rambu-rambu | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 88,67 | 82,50 |
| 8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| 9 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | 1.797.572,00 | 1.209.600,00 | 2.159.733,00 | 2.159.833,00 | 0,00 |
| 10 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum | 143.614.484,99 | 5.624.916.924,00 | 7.031.146.354,00 | 7.031.146.454,00 | 0,00 |
| 11 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 1.798.122,00 | 1.799.743,99 | 2.159.733,00 | 10.867.322,00 | 10.573.677,00 |
| 12 | Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 143.614.595,99 | 5.624.917.068,85 | 7.031.146.354,00 | 186.228.829,00 | 94.551.193,00 |
| **X** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | |
| 1 | cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Cakupan layanan telekomunikasi | 77,74 | 80,55 | 96,95 | 42,40 | 48,38 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 71,18 | 79,79 | 83,57 | 67,19 | 62,47 |
| 4 | Proporsi rumah tangga dengan akses in-ternet | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,73 | 0,57 |
| 5 | Proporsi rumah atngga yang memiliki komputer pribadi | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| **XI** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | |
| 1 | Persentase koperasi aktif | 69,71 | 69,12 | 70,39 | 52,30 | 46,61 |
| 2 | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,35 | 100,00 |
| 3 | Persentase BPR/LKM Aktif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100,00 | 98,85 | 98,57 | 99,35 | 99,77 |
| **XII** | **Penanaman Modal** | | | | | |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 35,00 | 134,00 | 142,00 | 950,00 | 470,00 |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 5.674.866,40 | 31.809.848.990.000,00 | 30.888.623.531.353,00 | 90.007.313.942.270,00 | 112.033.458.259.695,00 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 8,22 | 9,54 | 90,41 | 32,45 | 37,92 |
| 4 | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah) | 12,00 | 560.539.069,52 | -2,90 | 191,39 | 24,47 |
| **XIII** | **Pemuda dan Olahraga** | | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Persentase wirausaha muda | 8,58 | 9,01 | 11,16 | 8,67 | 8,67 |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Cakupan pelatoh yang bersertifikasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Cakupan pembinaan atlit muda | 10,61 | 10,85 | 14,00 | 15,63 | 15,63 |
| 6 | Jumlah atlet berprestasi | 35 | 43 | 114 | 11 | 0 |
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | 29,63 | 35,56 | 44,44 | 44,44 | 23,08 |
| **XIV** | **Statistik** | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Buku " kabupaten  dalam angka " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Buku " PDRB " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **XV** | **Persandian** | | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **XVI** | **Kebudayaan** | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 38,20 | 22,87 | 55,82 | 60,36 | 69,72 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 83 | 94 | 94 | 233 | 251 |
| **XVII** | **Perpustakaan** | | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,93 | 0,23 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,44 | 0,46 |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | 0,96 | 0,99 | 1,31 | 1,20 | 1,24 |
| 4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 67,05 | 89,47 | 111,53 | 12852,49 | 168,00 |
| 5 | Jumlah koleksi buku perpustakaan | 14.606 | 14.911 | 16.140 | 16.473 | 33.917 |
| 6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat | 100 | 85,71428571 | 100 | 100 | 100 |
| **XVIII** | **Kearsipan** | | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB PILI-HAN** | | | | | | |
| **I** | **Pariwisata** | | | | | |
| 1 | Kunjungan wisata | 43,78 | 77,79 | 81,38 | 153,13 | 120,32 |
| 2 | Lama kunjungan wisata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | PAD Sektor Pariwisata | 2,18 | 1,48 | 1,84 | 9,56 | 1,29 |
| **II** | **Pertanian** | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 0,49 | 0,57 | 0,48 | 0,44 | 0,42 |
| 2 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) ter-hadap PDRB | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 6,75 | 6,43 | 5,85 | 6,34 | 6,58 |
| 6 | Cakupan bina kelompok tani | 6,93 | 7,62 | 8,85 | 10,51 | 10,51 |
| **III** | **Kehutanan** | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | | | | | |
| 2 | Kerusakan kawasan hutan | | | | | |
| 3 | Rasio luas kawasan lindung untuk men-jaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | | | | | |
| **IV** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | |
| 1 | Persentase Rumah tangga pengguna listrik | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Rasio ketersediaan daya listrik | | | | | |
| 3 | Persentase pertambangan tanpa ijin | | | | | |
| **V** | **Pergdagangan** | | | | | |
| 1 | Ekspor bersih perdagangan | 66.450.921.000 | 523.347.241.557 | 810.668.886.562 | 603.054.296.041 | 1.937.701.569.141 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi | 78,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **VI** | **Perindutsrian** | | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 100 | 100 | 100 | 91 | 0 |
| **VII** | **Transmigrasi** | | | | | |
| 1 | Persentase Transmigran swakarsa | 33,33 | 66,67 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **VIII** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | |
| 1 | Produksi perikanan | 123,27 | 147,88 | 148,51 | 163,79 | 114,96 |
| 2 | Konsumsi ikan | 100,00 | 101,89 | 101,57 | 105,26 | 117,99 |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan | 38,92 | 45,00 | 51,89 | 58,04 | 61,40 |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | 42,44 | 25,48 | 34,84 | 34,84 | 31,40 |
| 5 | Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | 83,33 | 84,46 | 87,41 | 93,75 | 75,00 |
| 6 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 7 | Nilai tukar nelayan | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | |
| **I** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | 94,42 | 100,00 | 100,00 | 98,75 | 92,50 |
| 6 | Penjbaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | 100,00 | 100,00 | 89,38 | 89,24 | 91,28 |
| 7 | Kesesuuaian rencana pemabngunan dengan RTRW | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **II** | **Keuangan** | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persetase SILPA | 2,77 | 2,75 | 9,10 | 7,43 | 5,80 |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | 2,77 | 2,75 | 9,10 | 7,43 | 5,80 |
| 4 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | 0 | 4,624277457 | 0 | 8,173076923 | 4,137931034 |
| 5 | Persentase belanja pendidikan (20 %) | 6,69 | 7,10 | 7,09 | 28,26 | 27,92 |
| 6 | Pernsentase belanja kesehatan (10 %) | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 7 | Perbandingan antara beanjalangsung dengan belanja tidak langsung | 0,91 | 0,88 | 9,20 | 9,48 | 9,54 |
| 8 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 5,99 | 4,66 | 4,83 | 3,95 | 4,55 |
| 9 | Penetapan APBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **III** | **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidi-kan dan pelatihan formal | 68,29 | 72,69 | 90,96 | 93,73 | 91,77 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Persentase pejabat ASN yang telah mengi-kuti pendidikan dan pelatihan struktural | 32,99 | 32,37 | 64,10 | 91,30 | 90,18 |
| 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada in-stansi pemerintah | 36,00 | 36,00 | 32,00 | 31,00 | 33,00 |
| 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 175,00 | 174,00 | 161,00 | 158,00 | 167,00 |
| 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional ter-tentu pada instansi pemerintah | 2.988,00 | 3.090,00 | 3.187,00 | 3.050,00 | 4.636,00 |
| **IV** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana keli-batngan | 100,00 | 21,95 | 35,71 | 42,86 | 57,14 |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **Penerapan SIDa** | | | | | |
| 3 | Perentase perangkat daerah yang difasili-tasi dalam penerapan inovasi daerah | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang dit-erapkan di daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **V** | **Pengawasan** | | | | | |
| 1 | Pernsentase tindak lanjut temuan | 72,00 | 50,47 | 61,65 | 64,03 | 65,68 |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | 22,56% | 12,57% | 6,04% | 19,48% | 5,78% |
| 3 | Jumlah temuan BPK | 14 | 37 | 4 | 34 | 32 |
| **VI** | **Sekretariat Dewan** | | | | | |
| 1 | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabu-paten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksankan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Terintegarisnya program-program DPRD untuk melaksankaan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke da-lam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bapperida (diolah), 2025*

### 2.5.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Maros

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenagnan pemerintah daerah kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023 dan 2024 diuraikian pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.312**

**Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 – 2024**

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Dae-rah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR** | | | | | | |
| **I** | **Pendidikan** | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 72,69 | 96,93 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 91,14 | 102,91 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| 3 | Angka Pendidikan di Tamatkan | 58,2 | 52,70 | Tidak Tercapai | Menurun | DISDIKBUD |
| | **Angka Partisipasi Murni (APM)** | | | | | |
| 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 97,44 | 102,92 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 80,66 | 102,34 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| | **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** | | | | | |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | 100 | 102,92 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B | 64,89 | 102,34 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| | **Angka Putus Sekolah (APT)** | | | | | |
| 7 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,15 | 0,03 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| 8 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,07 | 0,06 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| | **Angka Kelulusan (AL)** | | | | | |
| 9 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DISDIKBUD |
| 10 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DISDIKBUD |
| | **Angka Melanjutkan (AM)** | | | | | |
| 11 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/MTs | 100 | 103,71 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| 12 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 91,96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | DISDIKBUD |
| | **Fasilitas Pendidikan** | | | | | |
| 13 | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik | 97,6 | 97,46 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISDIKBUD |
| 14 | Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik | 99,18 | 98,40 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISDIKBUD |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 15 | Rasio Ketersediaan Seklah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar | 0,0057 | 174,11 | Terlampaui | Menurun | DISDIKBUD |
| 16 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | | 22,29 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| 17 | Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata | 0,07 | 0,63 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| 18 | Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamat-kan Sekolah Dasar | 0,051 | 0,55 | Tidak Tercapai | Menurun | DISDIKBUD |
| 19 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan laki-Laki | 99,68 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DISDIKBUD |
| 20 | Penduduk Yang Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | 100 | 99,97 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| 21 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | 92,41 | 0,00 | | | |
| **II** | **Kesehatan** | | | | | |
| 1 | Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup | 1,3 | 11,49 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 2 | Angka Kelangsungan Hidup bayi | 998,68 | 988,51 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 3 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | 1,28 | 11,86 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 4 | Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup | 1,27 | 10,56 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 5 | Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup | 44,06 | 185,29 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 6 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 16,55 | 14,13 | Tidak Tercapai | Meningkat | Dinkes |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 7 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk | 0,140 | 0,17 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 8 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0,08 | 0,005 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 9 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | 0,58 | 0,31 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 10 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk | 0,93 | 0,44 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 11 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | Dinkes |
| 12 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan | 100,00 | 108,04 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 13 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 75,73 | 95,15 | Terlampaui | #DIV/0! | Dinkes |
| 14 | Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan | 100,000 | 100,00 | Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 15 | Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | 0,00 | 0,00 | Tidak Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 16 | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak | 97,65 | 107,33 | Terlampaui | Menurun | Dinkes |
| 17 | Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk | 0,001 | 0,01 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 18 | Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani | 19,01 | 30,20 | Terlampaui | Menurun | Dinkes |
| 19 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 40,69 | 100,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | Dinkes |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 20 | Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | 100,34 | 261,11 | Tidak Tercapai | Meningkat | Dinkes |
| 21 | Tingkat kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | 3,52 | 12,26 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 22 | Proporsi jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS | 71,44 | 20,75 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 23 | Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS | 39,74 | 20,75 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 24 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 25 | Penderita Diare Yang Ditangani | 64,52 | 56,33 | Tidak Tercapai | Menurun | Dinkes |
| 26 | Angka Kejadian malaria | 14,88 | 20,28 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 27 | Tingkat Kejadian Akibat Malaria | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 28 | Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 29 | Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doi-bati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | Dinkes |
| 30 | Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi | 0,00 | 0,01 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 31 | Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Ber-esiko Tinggi Akhir | 47,56 | 0,00 | Tidak Tercapai | Tetap | Dinkes |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 32 | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS | 9,65 | 0,00 | Tidak Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 33 | Cakupan Kunjungan Bayi | 100' | 115,36 | Tidak Tercapai | Meningkat | Dinkes |
| 34 | Cakupan Puskesmas | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | Dinkes |
| 35 | Cakupan Pembantu Puskesmas | 55,48 | 26,21 | Tidak Tercapai | Meningkat | Dinkes |
| 36 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 30,00 | 103,87 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 37 | Cakupan Pelayanan Nifas | 85,34 | 107,36 | Terlampaui | Meningkat | Dinkes |
| 38 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga | 100,00 | 90,29 | Tidak Tercapai | Meningkat | Dinkes |
| 39 | Cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat | 93,59 | 97,20 | Terlampaui | | |
| 40 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | | 0,00 | | | |
| 41 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) | 0,83 | 0,00 | Tidak Tercapai | Tetap | DPUTRPP |
| 42 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam | 50,0000 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DPUTRPP |
| 43 | Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani | 90,86 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DPUTRPP |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 44 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 100,00 | 86,72 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPP |
| **III** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | |
| **III.1** | **Pekerjaan Umum** | | | | | |
| 1 | Proprosi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 0,91 | 0,68 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 2 | Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk | 0,00 | 0,00292 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 3 | Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat Dilalui Roda 4 | 6,82 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 4 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) | 95,92 | 74,56 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 5 | Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) | 1,700 | 0,36 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 6 | Persentase sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan liar | 14,61 | 12,53 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 7 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 97,39 | 97,51 | Terlampaui | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 8 | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 14,61 | 5,45 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 9 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat | 65,00 | 0,01 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DPUTRPKPP |
| 10 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | | 0,00 | Tercapai | #DIV/0! | DPUTRPKPP |
| 11 | Persentase bangunan turap di wilayah penghbung dan aliran sungai rawan longsor | 37,65 | 25,08 | | | DPUTRPKPP |
| 12 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 92,09 | 72,97 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 13 | Rasio jaringan irigasi | 0,01 | 0,01 | Terlampaui | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 14 | Persemtase Penduduk berakses air minum | 93,67 | 76,68 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 15 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan | 77,40 | 46,32 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 16 | Persentase areal kawasan kumuh | 6,11 | 4,32 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 17 | Tersedianya Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan | 0,02 | 0,26 | Terlampaui | | |
| 18 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudul | 0,150 | 0,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DLH |
| **III.2** | **Penataan Ruang** | | | | | |
| 1 | Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | 1,62 | 1,88 | Terlampaui | Menurun | DPUTRPKPP |
| 2 | Luasa RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 3,21 | 1,30 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 3 | Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan | 0,62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | DPUTRPKPP |
| 4 | Ruang Oublik yang Berubah Peruntukannya | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DPUTRPKPP |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 5 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | 0,00 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 6 | Ketaatan Terhadap RTRW | 7,25 | 10,81 | #REF! | Meningkat | DPUTRPKPP |
| **IV** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | 0,14 | 0,17 | | | |
| 2 | Rasio Pemukiman layak huni | 0,99 | 0,99 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 58,15 | 78,30 | Terlampaui | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 4 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 18,6 | 22,03 | Terlampaui | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 5 | Persentase pemukiman yang tertata | 99,22 | 98,86 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 6 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 0,04 | 0,05 | | | DPUTRPKPP |
| 7 | Persentase luasan pemukiman kumuh kawasan perkotaan | 67,23 | 15,43 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 8 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | 100 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DPUTRPKPP |
| 9 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman disukung dengan PSU | 70 | 2,75 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DPUTRPKPP |
| **V** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas perlindungan msayarakat (LINMAS) | 0,00 | 0,00 | Tercapai | #DIV/0! | SATPOL PP |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | SATPOL PP |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 100,00 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | SATPOL PP |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK) | 85,32 | 72,76 | Tidak Tercapai | Menurun | SATPOL PP |
| 5 | Persentase Penegakan PERDA | 100,00 | 100,00 | | | SATPOL PP |
| **VI** | **SOSIAL** | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 73,08 | 14,10 | Tidak Tercapai | Meningkat | DINSOS |
| 2 | Persentase PMKS yang etrtangani | 73,08 | 14,10 | Tidak Tercapai | Meningkat | DINSOS |
| 3 | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar' | 73,08 | 14,10 | Tidak Tercapai | Meningkat | DINSOS |
| 4 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya | 80 | 0,00 | Tidak Tercapai | Tetap | DINSOS |
| 5 | Persetase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | 80 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DINSOS |
| 6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 100 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DINSOS |
| 7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DINSOS |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DINSOS |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | | |
| **I** | **Tenaga Kerja** | | | | | |
| 1 | Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 45,03 | 23,26 | Tidak Tercapai | Menurun | DISNAKERTRANS |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaiakan dengan perjanjian bersama (PB) | 75 | 8,33 | | | DISNAKERTRANS |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 24,92 | 34,31 | Terlampaui | Meningkat | DISNAKERTRANS |
| 4 | Keselamatan dan perlindungan | 100 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DISNAKERTRANS |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | 90,81 | 5,12 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DISNAKERTRANS |
| 6 | Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 100 | 100,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DISNAKERTRANS |
| 7 | Besaran pemeriksanaan perusahaan | 84,57 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DISNAKERTRANS |
| 8 | Besaran pengujian peralatan di perusahaan | | 0,00 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DISNAKERTRANS |
| 9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis komptensi | 57,17 | 72,00 | Terlampaui | Meningkat | DISNAKERTRANS |
| 10 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masayarakat | 71,67 | 25,00 | Terlampaui | #DIV/0! | DISNAKERTRANS |
| 11 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | 67,16 | 0,00 | #REF! | Tetap | DISNAKERTRANS |
| 12 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | 0,06 | 0,10 | #REF! | Menurun | DISNAKERTRANS |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| **II** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 37,85 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 28,57 | 25,71 | Tidak Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 76,11 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 4 | Rasio KDRT | 0,01 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 5 | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DP3ADALDUKKB |
| 6 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 47,4 | 26,47 | | | DP3ADALDUKKB |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu | 100 | 100,00 | Tercapai | #DIV/0! | DP3ADALDUKKB |
| 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 100 | 100,00 | | | DP3ADALDUKKB |
| 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DP3ADALDUKKB |
| 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100 | 100,00 | Tercapai | #DIV/0! | DP3ADALDUKKB |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100 | 100,00 | | | DP3ADALDUKKB |
| 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | 1,01 | 1,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 15 | Rasio APM perempuan/lai-laki di SMP | 1,07 | 0,95 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 16 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | 1,00 | 1,00 | Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| **III** | **Pangan** | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | 43411 | 44.543,64 | Terlampaui | Meningkat | DPKP |
| 2 | Ketersedian energi dan protein perkapita | 177443 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DPKP |
| 3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 100 | | Tidak Tercapai | Tetap | DPKP |
| **IV** | **Pertanahan** | | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | 32,95 | 24,62 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah negara | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| 3 | Penyelesaian izin lokasi | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DPUTRPKPP |
| **V** | **Lingkungan Hidup** | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten | ada | 1,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DLH |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | ada | 0,00 | Tidak Tercapai | Tetap | DLH |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah | ada | 2,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DLH |
| 4 | Hasil pengukuran indeks kualitas air | 50,4 | 60,00 | Terlampaui | Meningkat | DLH |
| 5 | Hasil pengukuran indeks kaulitas tutupan udara | 87,8 | 93,04 | Terlampaui | Menurun | DLH |
| 6 | Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan | 53,5 | 47,01 | | | DLH |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 7 | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | 0 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DLH |
| 8 | Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas daerah (PPLHD) di kabupaten/kota | 1 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DLH |
| 9 | Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 10 | Tervferifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan ttradisional | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 11 | Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 12 | Penetapan Hal MHA | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 13 | Terfasilitasi kegiata peningkatan pengetahuan dan keterampilan | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 14 | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | 0 | 0,00 | | | DLH |
| 15 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | 0 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 16 | Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup | 100 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 17 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 18 | Timbunan sampah yang ditangani | | 56,33 | Terlampaui | Menurun | DLH |
| 19 | Persentase cakupan areal pelayanan | | 0,73 | Terlampaui | Menurun | DLH |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 20 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R | 0,49 | 17,61 | Terlampaui | Meningkat | DLH |
| 21 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 9,42 | 53,89 | Terlampaui | Menurun | DLH |
| 22 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | 89,79 | 0,00 | | | DLH |
| 23 | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| 24 | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DLH |
| **VI** | **Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil** | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0,93 | 1,00 | Terlampaui | #DIV/0! | DISDUKCAPIL |
| 2 | Rasio bayi berakte lahir | 1,18 | 1,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISDUKCAPIL |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | 2,73 | 0,49 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DISDUKCAPIL |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten | ada | 100,00 | Tidak Tercapai | Tetap | DISDUKCAPIL |
| 5 | Penerapan KTP nasional berbasis NIK | Ada | 100,00 | Terlampaui | Tetap | DISDUKCAPIL |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP) | 89,18 | 100,00 | Terlampaui | #DIV/0! | DISDUKCAPIL |
| 7 | Cakupan penertiban akta kelahiran | 92,93 | 99,68 | Terlampaui | Meningkat | DISDUKCAPIL |
| **VII** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | |
| 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 91,25 | 93,75 | Terlampaui | Meningkat | DPMD |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan msyarakat | 1,00 | 1,00 | Tercapai | Tetap | DPMD |
| 3 | Rata0rata jumlah kelompok binaan PKK | 9,58 | 17,15 | Terlampaui | Meningkat | DPMD |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 4 | Persentase LSM Aktif | 100,00 | 56,22 | Tidak Tercapai | Meningkat | DPMD |
| 5 | Persentase LPM berprestasi | 22,10 | 60,87 | Terlampaui | Meningkat | DPMD |
| 6 | Persentase PKK Aktif | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DPMD |
| 7 | Persentase posyandu aktif | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DPMD |
| 8 | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | 0,00 | 0,00 | Tercapai | #DIV/0! | DPMD |
| 9 | Pemeliharaan pasca prgram pemberdayaan masyarakat | 0,00 | 0,00 | Tercapai | #DIV/0! | DPMD |
| **VIII** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk | 1,59 | 0,70 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | 2,29 | 2,26 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 3 | Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | 35,90 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 4 | Persentase perangkatd aerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk | 38,46 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 5 | Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualiotas penduduk | 1,00 | 1,00 | Tercapai | Tetap | DP3ADALDUKKB |
| 6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 7,00 | 7,00 | Tercapai | Tetap | DP3ADALDUKKB |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | 14,00 | 14,00 | Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1,45 | 1,33 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 9 | Ratio akseptor KB | 83,85 | 63,17 | Tidak Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun | 47,2 | 63,17 | Terlampaui | | DP3ADALDUKKB |
| 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun | 414,63 | 37,01 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 12 | Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | 0,16000 | 0,67 | Terlampaui | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 13 | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | 8,99 | 9,93 | Terlampaui | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 14 | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 38,58 | 23,23 | Tidak Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | 42,41 | 15,72 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 16 | Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber-KB | 23,39 | 5,98 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 17 | Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB | 24,96 | 3,15 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 18 | Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB | 6,85 | 0,73 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 19 | Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan | 78,57 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DP3ADALDUKKB |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 20 | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | 46,47 | 33,17 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat derah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian pendudul | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 22 | Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri | 75,07 | 29,03 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 23 | Rasio petugas pemabntu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | 1 | 100,00 | Terlampaui | | DP3ADALDUKKB |
| 24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kopntrasepsi untuk emmenuhi permintaan masyarakat | 82,07 | 98,67 | Terlampaui | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 25 | Persentase faskers dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 100,00 | 60,39 | Tidak Tercapai | Menurun | DP3ADALDUKKB |
| 26 | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa | 100,00 | 100,00 | Tercapai | #DIV/0! | DP3ADALDUKKB |
| 27 | Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS) | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Tetap | DP3ADALDUKKB |
| 28 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 70,00 | 100 | Terlampaui | #DIV/0! | DP3ADALDUKKB |
| 29 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 20,09 | 6,89 | | | DP3ADALDUKKB |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 30 | Rata-rata usia kawin pertama | 29,73 | 27,24 | Tidak Tercapai | Meningkat | DP3ADALDUKKB |
| 31 | Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes | 1,71 | 0,403035348 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DP3ADALDUKKB |
| **IX** | **Perhubungan** | | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 1.907.810,03 | 0,00 | | | |
| 2 | Rasio ijin trayek | 0,00 | 0,00 | Tercapai | Menurun | DISHUB |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | 0,00 | 206,00 | Terlampaui | Menurun | DISHUB |
| 4 | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis | 1,00 | 3,00 | Terlampaui | Meningkat | DISHUB |
| 5 | Persentase layanan angkutan darat | 38,04 | 29,77 | Tidak Tercapai | Menurun | DISHUB |
| 6 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | 100,00 | 55,98 | | | DISHUB |
| 7 | Pemasangan rambu-rambu | 95,00 | 82,50 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISHUB |
| 8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,02 | 0,04 | Terlampaui | Meningkat | DISHUB |
| 9 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | 2.108.054,10 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DISHUB |
| 10 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum | 284.979.723,23 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DISHUB |
| 11 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 1.626.068,89 | 10.573.677,00 | Terlampaui | Menurun | DISHUB |
| 12 | Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 284.980.045,11 | 94.551.193,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISHUB |
| **X** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | |
| 1 | cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | 100 | 100,00 | | | DISKOMINFO |
| 2 | Cakupan layanan telekomunikasi | 90,14 | 48,38 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISKOMINFO |
| 3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 74,79 | 62,47 | Tidak Tercapai | Menurun | DISKOMINFO |
| 4 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 0,77 | 0,57 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISKOMINFO |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 5 | Proporsi rumah atngga yang memiliki komputer pribadi | 0,94 | 0,10 | | | |
| **XI** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | |
| 1 | Persentase koperasi aktif | 72,27 | 46,61 | | | |
| 2 | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DISKOPURINDAG |
| 3 | Persentase BPR/LKM Aktif | 0,00 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DISKOPURINDAG |
| 4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100,00 | 99,77 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISKOPURINDAG |
| **XII** | **Penanaman Modal** | | | | | |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 69,54 | 470,00 | | | |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 8.947.770,11 | 112.033.458.259.695,00 | Terlampaui | Meningkat | DPMPTSP |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 6,06 | 37,92 | Terlampaui | Meningkat | DPMPTSP |
| 4 | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah) | 12,06 | 24,47 | Terlampaui | Meningkat | DPMPTSP |
| **XIII** | **Pemuda dan Olahraga** | | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100,00 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DISPARPORA |
| 2 | Persentase wirausaha muda | 10,40 | 8,67 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISPARPORA |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | 100 | 100,00 | | | DISPARPORA |
| 4 | Cakupan pelatoh yang bersertifikasi | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Tetap | DISPARPORA |
| 5 | Cakupan pembinaan atlit muda | 11,56 | 15,63 | Terlampaui | Meningkat | DISPARPORA |
| 6 | Jumlah atlet berprestasi | **47** | 0 | | | DISPARPORA |
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | 44,44 | 23,08 | | | DISPARPORA |
| **XIV** | **Statistik** | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 1 | 1 | Tercapai | Meningkat | DISKOMINFO |
| 2 | Buku " kabupaten  dalam angka " | 1 | 1 | Tercapai | Tetap | DISKOMINFO |
| 3 | Buku " PDRB " | 2 | 2 | Tercapai | Tetap | DISKOMINFO |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| **XV** | **Persandian** | | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 100 | 100 | Tercapai | Meningkat | DISKOMINFO |
| **XVI** | **Kebudayaan** | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 3 | 9 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 68,55 | 69,72 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 8 | 7 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISDIKBUD |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 104 | 251 | Terlampaui | Meningkat | DISDIKBUD |
| **XVII** | **Perpustakaan** | | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 0,1 | 0,23 | | | |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 0,49 | 0,46 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISPERSIP |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | 0,95 | 1,24 | | | DISPERSIP |
| 4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 83,88 | 168,00 | Terlampaui | Meningkat | DISPERSIP |
| 5 | Jumlah koleksi buku perpustakaan | 16.539 | 33.917 | | | DISPERSIP |
| 6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat | 6 | 100 | Terlampaui | Meningkat | DISPERSIP |
| **XVIII** | **Kearsipan** | | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | DISPERSIP |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 5,00 | 5 | Tercapai | Meningkat | DISPERSIP |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB PILIHAN** | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| **I** | **Pariwisata** | | | | | |
| 1 | Kunjungan wisata | 43,8 | 120,32 | | | |
| 2 | Lama kunjungan wisata | 2,00 | 1 | Tidak Tercapai | Tetap | DISPARPORA |
| 3 | PAD Sektor Pariwisata | 2,32 | 1,29 | Tidak Tercapai | Menurun | DISPARPORA |
| **II** | **Pertanian** | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 0,42 | 0,42 | Tercapai | Meningkat | DPKP |
| 2 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | 0,90 | 0 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | DPKP |
| 3 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 0,01 | 0,00 | Tidak Tercapai | Menurun | DPKP |
| 4 | Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB | 100 | 100 | | | DPKP |
| 5 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 32,41 | 6,58 | Tidak Tercapai | Menurun | DPKP |
| 6 | Cakupan bina kelompok tani | 10,14 | 10,51 | Tidak Tercapai | Menurun | DPKP |
| **III** | **Kehutanan** | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | | | | | |
| 2 | Kerusakan kawasan hutan | | | | | |
| 3 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | | | | | |
| **IV** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | |
| 1 | Persentase Rumah tangga pengguna listrik | | | | | |
| 2 | Rasio ketersediaan daya listrik | | | | | |
| 3 | Persentase pertambangan tanpa ijin | | | | | |
| **V** | **Pergdagangan** | | | | | |
| 1 | Ekspor bersih perdagangan | 69.123.273.192,00 | 1.937.701.569.141 | Terlampaui | Meningkat | DISKOPURINDAG |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi | 84,36 | 100,00 | Terlampaui | Meningkat | DISKOPURINDAG |
| **VI** | **Perindutsrian** | | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 100 | 0 | | | DISKOPURINDAG |
| **VII** | **Transmigrasi** | | | | | |
| 1 | Persentase Transmigran swakarsa | 66,67 | 60,00 | Tidak Tercapai | Meningkat | DISNAKERTRANS |
| **VIII** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | |
| 1 | Produksi perikanan | 152,57 | 114,96 | Tidak Tercapai | Meningkat | DKP |
| 2 | Konsumsi ikan | 100 | 117,99 | | | DKP |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan | 66,4 | 61,40 | Tidak Tercapai | Meningkat | DKP |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | 51,51 | 31,40 | Terlampaui | Meningkat | DKP |
| 5 | Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | 92,16 | 75,00 | Terlampaui | Menurun | DKP |
| 6 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial | 0 | 0 | Tercapai | #DIV/0! | DKP |
| 7 | Nilai tukar nelayan | 0,00 | 0 | Tercapai | #DIV/0! | DKP |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | |
| **I** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | 1 | 1 | Tercapai | Tetap | BAPPERIDA |
| 2 | Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | 1 | 100 | Terlampaui | Tetap | BAPPERIDA |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | 2 | 2 | Tercapai | Tetap | BAPPERIDA |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | 1 | 1 | Tercapai | Tetap | BAPPERIDA |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 5 | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | 98,52 | 92,50 | Tidak Tercapai | Meningkat | BAPPERIDA |
| 6 | Penjbaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | 92,86 | 91,28 | Tidak Tercapai | Meningkat | BAPPERIDA |
| 7 | Kesesuuaian rencana pemabngunan dengan RTRW | **0** | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | BAPPERIDA |
| **II** | **Keuangan** | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | 0 | WTP | Terlampaui | Meningkat | BKAD |
| 2 | Persetase SILPA | 8,37 | 5,80 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | BKAD |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | 8,37 | 5,80 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | BKAD |
| 4 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | 0 | 4,137931034 | Terlampaui | Meningkat | BKAD |
| 5 | Persentase belanja pendidikan (20 %) | 26,46 | 27,92 | Terlampaui | #DIV/0! | BKAD |
| 6 | Pernsentase belanja kesehatan (10 %) | 13,39 | 20 | Terlampaui | #DIV/0! | BKAD |
| 7 | Perbandingan antara beanjalangsung dengan belanja tidak langsung | 0,8 | 9,54 | Terlampaui | #DIV/0! | BKAD |
| 8 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 5,79 | 4,55 | Tidak Tercapai | #DIV/0! | BKAD |
| 9 | Penetapan APBD | 100 | 100 | Tercapai | Tetap | BKAD |
| **III** | **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 20 | 20,00 | Tercapai | Tetap | BKPSDM |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 69,2 | 91,77 | Terlampaui | Meningkat | BKPSDM |
| 3 | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 46,57 | 90,18 | Terlampaui | Meningkat | BKPSDM |
| 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 25 | 33,00 | Terlampaui | Menurun | BKPSDM |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 175 | 167,00 | Tidak Tercapai | Menurun | BKPSDM |
| 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | 3109,32 | 4.636,00 | Terlampaui | Meningkat | BKPSDM |
| **IV** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelibatngan | 60,98 | 57,14 | Tidak Tercapai | Meningkat | BAPPERIDA |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 100 | 100 | Tercapai | Meningkat | BAPPERIDA |
| | **Penerapan SIDa** | 7,69 | | Tidak Tercapai | Tetap | BAPPERIDA |
| 3 | Perentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100 | 100,00 | Tercapai | Meningkat | BAPPERIDA |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | 100 | 100 | Tercapai | Meningkat | BAPPERIDA |
| **V** | **Pengawasan** | | | | | |
| 1 | Pernsentase tindak lanjut temuan | 86,2 | 65,68 | Tidak Tercapai | Meningkat | INSPEKTORAT |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | 0,1 | 5,78% | Tidak Tercapai | Menurun | INSPEKTORAT |
| 3 | Jumlah temuan BPK | 12,39 | 32 | Terlampaui | Meningkat | INSPEKTORAT |
| **VI** | **Sekretariat Dewan** | | | | | |
| 1 | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten | 100 | 100 | Tercapai | Tetap | SEKRETARIAT DPRD |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksankan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD | 100 | 100 | Tercapai | Tetap | SEKRETARIAT DPRD |
| 3 | Terintegarisnya program-program DPRD untuk melaksankaan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen | 100 | 100 | Tercapai | Tetap | SEKRETARIAT DPRD |

| No | Bidang Urusan/Indikator | 2024 | | Perbandingan Target/Realisasi 2022 | Perbandingan Capaian 2023/2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | | | |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| | perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD | | | | | |

Sumber : Bapperida Kab.Maros, 2025

### 2.5.4 Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan program periode RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 Sejumlah program penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Maros yang dilaksanakan tahun 2026 untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026. Berikut evaluasi capaian indicator kinerja program penyelelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2026 pada tabeli berikut ini:

**Tabel 2.312**
**Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Maros Tahun 2026**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 324.342.450.001 | 100 | 316.477.653.730 | 100,00 | 97,58 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengelolaan Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Ber-partisipasi Dalam Pendidi-kan | Persen | 100 | 158.934.423.429 | 96,28 | 95.455.684.601 | 96,28 | 60,06 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase Satuan Pen-didikan Yang Mememnuhi Standar Jumlah dan Kuali-tas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persen | 100 | 190.080.000 | 79,82 | 167.430.000 | 79,82 | 88,08 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pengembangan bahasa dan sastra | Persentase satuan Pendidi-kan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sas-tra Lokal | Persen | 1 | 100.600.000 | 75 | 89.930.000 | 7500,00 | 89,39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pengembangan ke-budayaan | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | Persen | 75 | 332.220.000 | 75 | 230.120.000 | 100,00 | 69,27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pelestarian dan pengel-olaan cagar budaya | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | Persen | 4 | 2.481.437.000 | 45 | 2.235.219.563 | 1125,00 | 90,08 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pengelolaan per-museuman | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam se-tahun | Persen | 1 | 1.234.400.000 | 75 | 739.441.463 | 7500,00 | 59,90 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pengembangan kesenian tradisioan | Persentase Kesenian Tradisional yang dikem-bangkan | Persen | 5 | 145.005.000 | 50 | 145.005.000 | 1000,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| Pembinaan Sejarah | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | Persen | 100 | 41.055.000 | 25 | 32.705.000 | 25,00 | 79,66 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100,00 | 187.085.616.419 | 100 | 181.575.139.515 | 100,00 | 97,05 | Dinas Kesehatan/RSUD La Paloloi | Tercapai |
| Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Pero-rangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | 100,00 | 188.280.932.745 | 100 | 141.375.553.344 | 100,00 | 75,09 | Dinas Kesehatan/RSUD La Paloloi | Tercapai |
| Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | Persen | 100,00 | 1.222.384.000 | 100 | 1.208.968.000 | 100,00 | 98,90 | Dinas Kesehatan/RSUD La Paloloi | Tercapai |
| Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makannan minuman | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | Persen | 100,00 | 379.131.000 | 100 | 362.226.000 | 100,00 | 95,54 | Dinas Kesehatan/RSUD La Paloloi | Tercapai |
| Pemberdayaan masyara-kat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | Persen | 100,00 | 293.920.000 | 95 | 238.230.000 | 95,00 | 81,05 | Dinas Kesehatan/RSUD La Paloloi | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Peraentase jumlh layanan penunjang yang dil-aksanakan | Persen | 100 | 16.184.925.521 | 100 | 15.187.245.544 | 100,00 | 93,84 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | Persen | 100 | 17.280.661.333 | 95 | 14.121.839.255 | 95,00 | 81,72 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | Persen | 100 | 6.866.237.000 | 93,15 | 6.836.781.308 | 93,15 | 99,57 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Pengembangan sistem dan pengelolaan per-sampahan regional | Persentase Pengurangan Sampah pada Wilayah Per-otaan yang Terfasilitasi | Persen | 1,57 | 2.203.060.000 | 1,57 | 2.151.143.284 | 100,00 | 97,64 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 100 | 3.446.128.000 | 100 | 3.440.172.747 | 100,00 | 99,83 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Pegembangan per-mukiman | Persentase luas kawasan kumuh | Persen | 6,11 | 2.437.175.000 | 5 | 2.390.742.120 | 81,83 | 98,09 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Penataan bangunan ge-dung | Rasio bangunan Ber IMB per satuan bangunan | Rasio | 11,76 | 20.484.239.680 | 11,76 | 20.455.438.571 | 100,00 | 99,86 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengembangan jasa kon-struksi | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | Persen | 150 | 683.427.000 | 150 | 377.813.300 | 100,00 | 55,28 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Penyelenggaraan jalan | Persentase jalan Kabu-paten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) | Persen | 95,52 | 94.935.858.084 | 93,68 | 93.197.565.570 | 98,07 | 98,17 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Penyelenggaraan pena-taan ruang | Persentase Ketaatan ter-hadap RTRW | Persen | 7,25 | 2.169.921.000 | 7,25 | 1.447.042.603 | 100,00 | 66,69 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah garapan | Persen | 100 | 21.310.000 | 90 | 13.100.000 | 90,00 | 61,47 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksi-mum dan tanah absente | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | Persen | 100 | 25.500.000 | 100 | 5.780.000 | 100,00 | 22,67 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Penatagunaan tanah | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan RTRW | Persen | 70 | 16.210.000 | 70 | 10.140.000 | 100,00 | 62,55 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Persentase Layanan Angkutan Darat | Persen | 38,04 | 13.830.210.000 | 38,04 | 12.574.906.816 | 100,00 | 90,92 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengelolaan pelayaran | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/pelabuhan perahu penyeberangan | Persen | 50 | 4.455.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 15.316.919.242 | 100 | 14.459.764.659 | 100,00 | 94,40 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Keba-karan dan Penyela-matan | Tercapai |
| Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 | Persen | 100 | 712.934.262 | 100 | 591.672.000 | 100,00 | 82,99 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Keba-karan dan Penyela-matan | Tercapai |
| Pencengahan, penanggu-langan, penyelamatan ke-bakaran dan penyelamatan non kebakaran | Persentase Masyarakat Yang MemperoLeh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM Pe-layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 90 | 97.014.000 | 100 | 80.918.550 | 111,11 | 83,41 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Keba-karan dan Penyela-matan | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 5.051.543.102 | 100,00 | 4.534.653.027 | 100,00 | 89,77 | Dinas Sosial | Tercapai |
| Pemberdayaan sosial | Persentase Masyarakat Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebu-tuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. | Persen | 100 | 257.240.000 | 100,00 | 254.166.245 | 100,00 | 98,81 | Dinas Sosial | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kese-jahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | Persen | 100 | 1.732.132.014 | 100,00 | 1.665.174.979 | 100,00 | 96,13 | Dinas Sosial | Tercapai |
| Pengelolaan taman makam pahlawan | Persentase Kelayakan Penggunaan Taman makam Pahlawan | Persen | 100 | 19.542.000 | 100,00 | 19.401.600 | 100,00 | 99,28 | Dinas Sosial | Tercapai |
| Rehabilitasi sosial | Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kese-jahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Reha-bilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial. | Persen | 100 | 169.601.500 | 100,00 | 159.215.200 | 100,00 | 93,88 | Dinas Sosial | Tercapai |
| Penanganan Bencana | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana. | Persen | 100 | 307.155.000 | 100,00 | 305.997.650 | 100,00 | 99,62 | Dinas Sosial | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 8.532.583.144 | 100 | 7.824.028.652 | 100,00 | 91,70 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengembangan pe-rumahan | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Pe-rumahan | Persen | 100 | 421.551.500 | 100 | 384.340.000 | 100,00 | 91,17 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Kawasan pemukiman | Persentase Permukiman yang Tertata | Persen | 3 | 421.751.400 | 2 | 371.400.230 | 66,67 | 88,06 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tidak Tercapai |
| Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Persentase luasan per-mukiman kumuh di kawa-san perkotaan | Persen | 10,36 | 330.687.000 | 0 | 327.895.000 | 0,00 | 99,16 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tidak Tercapai |
| Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Persentase Cakupan Ling-kungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU | Persen | 18 | 40.445.000 | 18 | 17.700.000 | 100,00 | 43,76 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Perencanaan lingkungan hidup | Persentase Pengintе-grasian Rencana Perlin-dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke da-lam Rencana Pem-bangunan Kabupaten | Persen | 1 | 119.455.000 | 1 | 96.880.000 | 100,00 | 81,10 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase masayarakat hukum adat (MHA) yang mendapatkan pengakuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaky | Persen | 1 | 8.152.000 | 1 | 5.176.000 | 100,00 | 63,49 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengelolaan keane-karagaman hayati | Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan | Persen | 30 | 130.000.000 | 30 | 129.112.425 | 100,00 | 99,32 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin per-lindungan dan pengel-olaan lingkungan hidup (PPLH) | Persentase ketataan ter-hadap izin lingkungan | Persen | 180 | 13.599.000 | 135 | 13.466.000 | 75,00 | 99,02 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH | | | 5 | 8.152.000 | 4 | 5.176.000 | 80,00 | 63,49 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyulu-han lingkungan hidup un-tuk masyarakat | Persentase masyarakat yang mendapatkan pen-didikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang lingkungan hidup | Persen | 29200 | 26.855.000 | 19200 | 26.830.000 | 65,75 | 99,91 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tidak Tercapai |
| Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Ling-kungan Hidup | Persen | 1 | 59.300.000 | 1 | 16.340.000 | 100,00 | 27,55 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Penanganan pengakuan lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan | Persen | 10 | 5.982.000 | 3 | 5.798.000 | 30,00 | 96,92 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tidak Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengelolaan per-sampahan | Persentase sampah yang tertangan | Persen | 180 | 8.365.593.620 | 175 | 8.279.875.927 | 97,22 | 98,98 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| Pengendalian pencema-ran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabu-paten/kota | Persentase Cakupan Wila-yah Pemantauan Pence-maran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Persen | 5 | 129.665.400 | 5 | 116.337.250 | 100,00 | 89,72 | Dinas Perumahan, Kawasan Pem-ukiman dan Ling-kungan Hidup | Tercapai |
| PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE-RAH KABU-PATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 8.761.108.861 | 100 | 7.264.758.185 | 100,00 | 82,92 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagaker-jaan | Tercapai |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Rencana In-vestasi Yang terealisasi | Persen | 100 | 12.675.000 | 100 | 12.655.000 | 100,00 | 99,84 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagaker-jaan | Tercapai |
| PROGRAM PENGEN-DALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Pena-naman Modal Secara Te-pat Wakt | Persen | 100 | 381.740.000 | 100 | 268.472.000 | 100,00 | 70,33 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagaker-jaan | Tercapai |
| PROGRAM PELA-YANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Pena-naman Modal Secara Te-pat Waktu | Persen | 100 | 107.625.000 | 100 | 105.112.500 | 100,00 | 97,67 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagaker-jaan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persen | 100 | 215.735.000 | 100 | 10.600.000 | 100,00 | 4,91 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 37,54 | 31.760.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tidak Tercapai |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 24,5 | 51.937.000 | 24 | 50.350.000 | 97,96 | 96,94 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | Persen | 100 | 55.831.000 | 85 | 29.537.000 | 85,00 | 52,90 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentasekesesuiaian Kawasan Transmigrasi | Persen | 100 | 5.920.000 | 100 | 5.120.000 | 100,00 | 86,49 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 5.110.994.557 | 100 | 4.612.977.398 | 100,00 | 90,26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penanggulangan bencana | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Cakupan Layanan Kebencanaan Sesuai SPM Kebencanaan | Persen | 100 | 546.030.500 | 100 | 489.393.742 | 100,00 | 89,63 | Badan Penanggu-langan Bencana Daerah | Tercapai |
| PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE-RAH KABU-PATEN/KOTA | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Dae-rah | Persen | 100 | 6.280.596.773 | 100 | 5.775.805.433 | 100,00 | 91,96 | Dinas Pem-berdayaan Per-empuan, Perlin-dungan Anak, Pen-gendalian Penduduk dan Keluarga Ber-encana | Tercapai |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEM-BERDAYAAN PER-EMPUAN | Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta | Persen | 100 | 387.840.000 | 100 | 346.195.000 | 100,00 | 89,26 | Dinas Pem-berdayaan Per-empuan, Perlin-dungan Anak, Pen-gendalian Penduduk dan Keluarga Ber-encana | Tercapai |
| PROGRAM PERLIN-DUNGAN PEREMPUAN | Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibat-kan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadi-lan | Persen | 100 | 416.700.000 | 100 | 382.259.500 | 100,00 | 91,73 | Dinas Pem-berdayaan Per-empuan, Perlin-dungan Anak, Pen-gendalian Penduduk dan Keluarga Ber-encana | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Rasio | 0,02 | 135.260.000 | 0,02 | 93.010.000 | 100,00 | 68,76 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan | Persen | 100 | 16.280.000 | 100 | 16.280.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | Persen | 100 | 670.080.000 | 100 | 669.517.038 | 100,00 | 99,92 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan | Persen | 100 | 75.910.000 | 100 | 75.735.000 | 100,00 | 99,77 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | Keluarga Ber-encana | |
| PROGRAM PENGEN-DALIAN PENDUDUK | Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk | Persen | 2 | 110.450.000 | 2 | 110.350.000 | 100,00 | 99,91 | Dinas Pem-berdayaan Per-empuan, Perlin-dungan Anak, Pen-gendalian Penduduk dan Keluarga Ber-encana | Tercapai |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BER-ENCANA | Persentase Akseptor KB | Persen | 100 | 4.908.637.200 | 100 | 3.106.948.622 | 100,00 | 63,30 | Dinas Pem-berdayaan Per-empuan, Perlin-dungan Anak, Pen-gendalian Penduduk dan Keluarga Ber-encana | Tercapai |
| PROGRAM PEM-BERDAYAAN DAN PEN-INGKATAN KELUARGA SEJAHTERA | Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga me-lalui 8 fungsi keluarga | Persen | 100 | 2.292.940.000 | 100 | 2.225.690.000 | 100,00 | 97,07 | Dinas Pem-berdayaan Per-empuan, Perlin-dungan Anak, Pen-gendalian Penduduk dan Keluarga Ber-encana | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 6.119.230.870 | 100 | 5.718.410.175 | 100,00 | 93,45 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| PROGRAM PENDAFTA-RAN PENDUDUK | Persentase Kepemilikan Dokumen pendafataran Penduduk | Persen | 100 | 450.152.100 | 100 | 421.835.593 | 100,00 | 93,71 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| PROGRAM PENCATA-TAN SIPIL | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persen | 100 | 76.449.500 | 100 | 64.137.300 | 100,00 | 83,89 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| PROGRAM PENGEL-OLAAN INFORMASI AD-MINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase pelaksanaan Pengelolaan Informasi Ad-ministrasi Kependudukan | Persen | 100 | 233.773.000 | 100 | 213.948.300 | 100,00 | 91,52 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| PROGRAM PENGEL-OLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | Persen | 100 | 3.134.000 | 100 | 3.087.500 | 100,00 | 98,52 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE-RAH KABU-PATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 5.343.962.705 | 85,00 | 4.794.313.069 | 85,00 | 89,71 | Dinas Pem-berdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Desa yang ter-fasilitasi dalam Penataan Desa | Persen | 70 | 57.780.000 | 100 | 20.100.000 | 142,86 | 34,79 | Dinas Pem-berdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 100 | 52.896.000 | 13,75 | 52.560.000 | 13,75 | 99,36 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | Persen | 40 | 629.397.000 | 37,5 | 443.816.856 | 93,75 | 70,51 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persen | 100 | 1.489.560.000 | 100 | 1.422.630.740 | 100,00 | 95,51 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 5.938.289.799 | 100 | 5.349.491.035 | 100,00 | 90,08 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa | Persen | 100 | 364.960.000 | 100 | 288.754.000 | 100,00 | 79,12 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE | Persen | 90 | 6.815.351.603 | 90 | 6.020.689.751 | 100,00 | 88,34 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Persen | 100 | 33.293.000 | 100 | 24.170.000 | 100,00 | 72,60 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi | Persen | 100 | 48.308.000 | 100 | 43.910.000 | 100,00 | 90,90 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 7.569.902.447 | 100,00 | 6.974.941.170 | 100,00 | 92,14 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| Meningkatnya kualitas kesehatan pemuda | angka harapan hiudp pemuda | Tahun | | 1.347.100.000 | | 1.323.490.000 | #VALUE! | 98,25 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |
| Meningkatnya Pembinaan Usia Dini dan prestasi Olahraga Unggulan Daerah | Persentase Cabang Olahraga yang melakukan Pembinaan usia Dini dan Berprestasi | Persen | 90 | 2.803.560.000 | | 2.789.019.000 | #VALUE! | 99,48 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |
| Meningkatnya kualitas pendidikan pemuda | Rata-rata lama sekolah pemuda | Tahun | 7,38 | 569.800.000 | | 567.400.000 | #VALUE! | 99,58 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |
| Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata | Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik | Persen | 90 | 1.782.225.000 | | 1.766.140.520 | #VALUE! | 99,10 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Meningkatnya kunjungan wisatwan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Persen | 44,44 | 493.100.000 | | 438.845.000 | #VALUE! | 89,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |
| Meningkatnya usaha ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi | persentase usaha ekonomi Kreatif yang bersertifikasi | Persen | 90 | 71.271.666 | | 36.398.172 | #VALUE! | 51,07 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |
| Meningkatnya usaha ekonomi Kreatif yang berkualitas dan ter-standarisasi | persentase usaha ekonomi Kreatif yang berkualitas dan terstandarisasi | Persen | 90 | 679.644.000 | | 677.717.000 | #VALUE! | 99,72 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | #VALUE! |
| PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE-RAH KABU-PATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dae-rah | Persen | 100,00 | 5.647.457.513 | 100,00 | 5.331.715.570 | 100,00 | 94,41 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rasio perpustakaan per satuan penduduk | Rasio | 0,001 | 2.631.670.000 | 0,001 | 2.328.144.194 | 94,62 | 88,47 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| PROGRAM PELES-TARIAN KOLEKSI NA-SIONAL DAN NASKAH KUNO | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Persen | 100 | 30.470.000 | 75 | 26.376.000 | 75,00 | 86,56 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| PROGRAM PENGEL-OLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 50 | 115.740.000 | 45 | 82.795.560 | 90,00 | 71,54 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| PROGRAM PERLIN-DUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Dokumen Arsip Yang Diakuisisi dan Ter-pelihara | Persen | 100 | 56.250.000 | 75 | 3.010.000 | 75,00 | 5,35 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Arsip Yang Menjadi bahan Informasi | Persen | 100 | 18.160.000 | 100 | 9.990.000 | 100,00 | 55,01 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE-RAH KABU-PATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 15.500.000 | 99,34 | 15.396.000 | 99,34 | 99,33 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM PELA-YANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | Persen | 90 | 13.540.000 | 100 | 0 | 111,11 | 0,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi ber-kategori sehat | Persen | 72,27 | 21.300.000 | 18,73 | 21.210.000 | 25,92 | 99,58 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| PROGRAM PEM-BERDAYAAN DAN PER-LINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi aktif | Persen | 71,62 | 66.200.000 | 46,61 | 64.402.000 | 65,08 | 97,28 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| PROGRAM PEM-BERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 100 | 736.619.000 | 99,46 | 649.511.646 | 99,46 | 88,17 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM PENING-KATAN SARANA DIS-TRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | Persen | 100 | 1.035.827.671 | 92,88 | 958.361.050 | 92,88 | 92,52 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM STABI-LISASI HARGA BA-RANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Di-perdagangkan di Tempat Pemasaran | Persen | 100 | 25.985.000 | 100 | 25.773.000 | 100,00 | 99,18 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM PENGEM-BANGAN EKSPOR | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | Persen | 0,99 | 5.460.000 | 5,09 | 5.445.000 | 514,14 | 99,73 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM STAND-ARDISASI DAN PERLIN-DUNGAN KONSUMEN | Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen | Persen | 90 | 67.350.000 | 0 | 51.356.323 | 0,00 | 76,25 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN IN-DUSTRI | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | Persen | 100 | 972.342.257 | 95 | 972.342.257 | 95,00 | 100,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM PENGEL-OLAAN SISTEM INFOR-MASI INDUSTRI NA-SIONAL | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional | Persen | 90 | 29.220.000 | 95 | 29.220.000 | 105,56 | 100,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindus-trian dan Perdagangan | Tercapai |
| PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE-RAH KABU-PATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 20.068.185.885 | 100 | 18.697.734.687 | 100,00 | 93,17 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk ked-aulatan dan kemandirian pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 35,7 | 2.149.000 | 100 | 0 | 280,11 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| Peningkatan diverisifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Ketersediaan energi dan protein perkapita | kkal/ka pita/har i | 68,12 | 298.434.000 | 68,12 | 220.874.000 | 100,00 | 74,01 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PE-NANGANAN KERA-WANAN PANGAN | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | Persen | 100 | 42.609.000 | 100 | 32.270.000 | 100,00 | 75,74 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PENGAWASAN KEA-MANAN PANGAN | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | Persen | 100 | 75.521.000 | 100 | 16.390.000 | 100,00 | 21,70 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PENYE-DIAAN DAN PENGEM-BANGAN SARANA PER-TANIAN | Produktivitas padi atau ba-han pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton/Ha | 5 | 579.344.700 | 5 | 415.737.200 | 100,00 | 71,76 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PENYE-DIAAN DAN PENGEM-BANGAN PRASARANA PERTANIAN | Kontribusi Produksi ke-lompok petani terhadap PDRB | Persen | 35 | 2.908.322.740 | 35 | 2.625.707.213 | 100,00 | 90,28 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Kontrbusi Sektor Per-tanian/Perkebunan ter-hadap PDRB | Persen | 0,35 | 8.321.500 | 0,35 | 2.138.000 | 100,00 | 25,69 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PENGEN-DALIAN DAN PE-NANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani akibat Gagal Panen | Persen | 85 | 518.251.000 | 85 | 453.280.000 | 100,00 | 87,46 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PENYULU-HAN PERTANIAN | Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pem-binaan | Persen | 7,08 | 626.468.500 | 89 | 592.797.600 | 1257,06 | 94,63 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | Persen | 83 | 581.475.900 | 83 | 541.793.950 | 100,00 | 93,18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 7.492.092.243 | 100 | 6.842.326.717 | 100,00 | 91,33 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| Pengelolaan perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 2 | 4.012.475.000 | 28,68 | 3.978.093.078 | 1434,00 | 99,14 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| Pengelolaan perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Persen | 5,25 | 5.240.255.000 | 2,97 | 5.194.895.756 | 56,57 | 99,13 | Dinas Perikanan | Tidak Tercapai |
| Pengolahan dan pemasarab hasil perikanan | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | Persen | 0,97 | 1.143.065.000 | 13,16 | 1.128.394.717 | 1356,70 | 98,72 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 5.747.904.711 | 90 | 5.280.650.122 | 90,00 | 91,87 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 100 | 1.411.500.600 | 100 | 1.358.473.950 | 100,00 | 96,24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | Pengembangan Daerah | |
| Koordinasi dan sink-ronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 258.891.000 | 100 | 161.186.700 | 100,00 | 62,26 | Badan Perencanaan Pem-bangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| Penelitian dan Pengem-bangan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Persen | 70 | 934.603.400 | 70 | 864.811.000 | 100,00 | 92,53 | Badan Perencanaan Pem-bangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 56.922.746.594 | 100 | 55.390.130.132 | 100,00 | 97,31 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target | Persen | 100 | 161.924.094.600 | 100 | 79.303.064.820 | 100,00 | 48,98 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| Pengelolaan barang milik daerah | Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah | Persen | 100 | 6.982.619.900 | 100 | 6.695.647.711 | 100,00 | 95,89 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 13.254.815.704 | 100 | 12.921.603.017 | 100,00 | 97,49 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Realisasi Pen-dapatan | Persen | 70 | 1.112.642.800 | 70 | 1.072.117.800 | 100,00 | 96,36 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 36.156.959.111 | 100 | 34.200.265.414 | 100,00 | 94,59 | Sekretariat Daerah | Tercapai |
| Pemerintahan dan kese-jahteraan rakyat | Persentase Kebijakan Pemerintah dan Kese-jahteraan Rakyat yg dil-aksanakan | Persen | 100 | 3.413.768.000 | 58 | 3.231.938.720 | 58,00 | 94,67 | Sekretariat Daerah | Tidak Tercapai |
| Perekonomian dan pem-bangunan | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pem-bangunan yg dilaksanakan | Persen | 100 | 2.828.709.800 | 100 | 2.648.722.000 | 100,00 | 93,64 | Sekretariat Daerah | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 29.190.981.546 | 100 | 27.198.521.161 | 100,00 | 93,17 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan | Doku-men | 100 | 156.600.000 | 100 | 138.297.000 | 100,00 | 88,31 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100 | 8.864.844.578 | 100 | 8.320.552.364 | 100,00 | 93,86 | Inspektorat | Tercapai |
| Penyelenggaraan pengawasan | Persentase pelanggaran pegawai | Persen | 100 | 2.736.330.000 | 100 | 2.692.765.000 | 100,00 | 98,41 | Inspektorat | Tercapai |
| Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 100 | 148.679.000 | 100 | 109.454.000 | 100,00 | 73,62 | Inspektorat | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Ka-bupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dae-rah. | Persen | 100,00 | 4.165.965.930 | 100,00 | 3.949.648.891 | 100,00 | 94,81 | Kecamatan Banti-murung | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100,00 | 635.875.000 | 100,00 | 635.875.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| Pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100,00 | 2.800.000 | 100,00 | 1.400.000 | 100,00 | 50,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100,00 | 448.150.000 | 100,00 | 448.150.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100,00 | 34.100.000 | 95,00 | 33.050.000 | 95,00 | 96,92 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100,00 | 8,5 | 100,00 | 93.980.000 | 100,00 | 11056 47058, 82 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 3.189.019.055 | 100 | 2.948.068.730 | 100,00 | 92,44 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 395.150.000 | 100 | 395.150.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100 | 14.630.000 | 75 | 5.940.000 | 75,00 | 40,60 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Desa | 100 | 77.200.120 | 50 | 59.600.000 | 50,00 | 77,20 | Kecamatan Bontoa | Tidak Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 33.825.000 | 100 | 32.925.000 | 100,00 | 97,34 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 146.475.000 | 33 | 142.000.000 | 33,33 | 96,94 | Kecamatan Bontoa | Tidak Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 4.200.000 | 100 | 4.200.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Camba | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 610.490.000 | 100 | 607.981.500 | 100,00 | 99,59 | Kecamatan Camba | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 467.220.000 | 100 | 454.941.723 | 100,00 | 97,37 | Kecamatan Camba | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 46.200.000 | 100 | 46.200.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Camba | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 57.825.000 | 100 | 56.025.000 | 100,00 | 96,89 | Kecamatan Camba | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 2.368.042.402 | 16,16 | 2.211.687.676 | 16,16 | 93,40 | Kecamatan Cenrana | Tidak Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 23.500.000 | 0 | 19.050.000 | 0,00 | 81,06 | Kecamatan Cenrana | Tidak Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100 | 10.000.000 | 90 | 3.500.000 | 90,00 | 35,00 | Kecamatan Cenrana | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 56.150.000 | 90 | 48.050.000 | 90,00 | 85,57 | Kecamatan Cenrana | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 34.000.000 | 90 | 33.100.000 | 90,00 | 97,35 | Kecamatan Cenrana | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase urusan pemerintahan daerah yang sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Persen | 100 | 104.300.000 | 90 | 90.350.000 | 90,00 | 86,63 | Kecamatan Cenrana | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 6.534.369.767 | 100 | 6.055.596.229 | 100,00 | 92,67 | Kecamatan Lau | Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 1.679.200.000 | 4 | 1.676.100.000 | 4,00 | 99,82 | Kecamatan Lau | Tidak Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100 | 2.640.000 | 100 | 2.640.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Lau | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 90 | 841.825.000 | 85 | 841.825.000 | 94,44 | 100,00 | Kecamatan Lau | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 2.355.000 | 100 | 2.355.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Lau | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 64.325.000 | 100 | 64.325.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Lau | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 2.945.211.903 | 15,33 | 2.750.772.448 | 15,33 | 93,40 | Kecamatan Mallawa | Tidak Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 284.380.000 | 3,33 | 260.495.000 | 3,33 | 91,60 | Kecamatan Mallawa | Tidak Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 247.740.000 | 214 | 244.384.280 | 214,00 | 98,65 | Kecamatan Mallawa | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 32.250.000 | 1 | 32.000.000 | 1,00 | 99,22 | Kecamatan Mallawa | Tidak Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 89.320.000 | 1 | 56.800.000 | 1,00 | 63,59 | Kecamatan Mallawa | Tidak Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 4.964.096.573 | 100 | 4.683.682.405 | 100,00 | 94,35 | Kecamatan Mandai | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pela-yanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pe-layanan Publik di Kecama-tan | Persen | 100 | 1.470.625.000 | 100 | 1.441.845.250 | 100,00 | 98,04 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerinta-han desa | Persentase Desa Yang Me-nyelenggarakan Admin-istrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Pera-turan Perundang -Un-dangan | Persen | 100 | 3.990.000 | 100 | 3.990.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| Pemberdayaan masyra-kat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pem-bangunan | Persen | 100 | 540.178.000 | 100 | 511.619.362 | 100,00 | 94,71 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Ka-sus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 35.980.000 | 100 | 35.980.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 70.500.000 | 100 | 70.450.000 | 100,00 | 99,93 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Ka-bupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dae-rah. | Persen | 100 | 4.801.872.087 | 100 | 4.545.688.477 | 100,00 | 94,66 | Kecamatan Maros Baru | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 4 | 1.015.000.000 | 4 | 1.002.223.250 | 100,00 | 98,74 | Kecamatan Maros Baru | Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100 | 1.120.000 | 100 | 1.120.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Maros Baru | Tercapai |
| Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 660.178.500 | 100 | 657.606.168 | 100,00 | 99,61 | Kecamatan Maros Baru | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 32.250.000 | 100 | 32.250.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Maros Baru | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 32.250.000 | 100 | 32.250.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Maros Baru | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 2.744.928.759 | 100,00 | 2.627.382.288 | 100,00 | 95,72 | Kecamatan Marusu | Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 12.140.000 | 100 | 12.140.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Marusu | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100 | 4.200.000 | 100 | 4.200.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Marusu | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 65.115.000 | 100 | 63.365.000 | 100,00 | 97,31 | Kecamatan Marusu | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 32.700.000 | 100 | 32.700.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Marusu | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 67.860.000 | 100 | 67.860.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Marusu | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 11,00 | 2.964.655.116 | 11,00 | 2.907.051.062 | 100,00 | 98,06 | Kecamatan Moncongloe | Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100,00 | 56.550.000 | 100,00 | 55.500.000 | 100,00 | 98,14 | Kecamatan Moncongloe | Tercapai |
| Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan | Persen | 100,00 | 6.149.900 | 100,00 | 6.050.000 | 100,00 | 98,38 | Kecamatan Moncongloe | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100,00 | 6.149.900 | 100,00 | 6.050.000 | 100,00 | 98,38 | Kecamatan Moncongloe | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100,00 | 33.650.000 | 100,00 | 21.950.000 | 100,00 | 65,23 | Kecamatan Moncongloe | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100,00 | 76.825.000 | 100,00 | 71.675.000 | 100,00 | 93,30 | Kecamatan Moncongloe | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100,00 | 2.720.995.204 | 40,00 | 2.154.986.828 | 40,00 | 79,20 | Kecamatan Simbang | Tidak Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 0,00 | 7.300.000 | 1,00 | 7.300.000 | #DIV/0! | 100,00 | Kecamatan Simbang | #DIV/0! |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100,00 | 2.800.000 | 100,00 | 2.800.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Simbang | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100,00 | 58.650.000 | 100,00 | 58.650.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Simbang | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (out-come)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan ang-garan RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Dae-rah | Kinerja Pro-gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelang-garan PERDA di Wilayah Kece-matan | Persen | 100,00 | 33.050.000 | 100,00 | 33.050.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Sim-bang | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100,00 | 109.200.000 | 100,00 | 109.200.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Sim-bang | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabu-paten/Kota | Persentase Layanan Penun-jang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100,00 | 3.555.953.645 | 100,00 | 3.245.918.873 | 100,00 | 91,28 | Kecamatan Tanralili | Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pela-yanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pela-yanan Publik di Kecamatan | Persen | 100,00 | 226.200.000 | 100,00 | 224.555.000 | 100,00 | 99,27 | Kecamatan Tanralili | Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menye-lenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perun-dang -Undangan | Persen | 100,00 | 4.100.000 | 100,00 | 3.960.000 | 100,00 | 96,59 | Kecamatan Tanralili | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Da-lam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100,00 | 255.280.000 | 100,00 | 250.153.274 | 100,00 | 97,99 | Kecamatan Tanralili | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelang-garan PERDA di Wilayah Kece-matan | Persen | 100,00 | 34.750.000 | 100,00 | 34.750.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Tanralili | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100,00 | 72.850.000 | 100,00 | 72.350.000 | 100,00 | 99,31 | Kecamatan Tanralili | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100,00 | 2.781.270.023 | 100,00 | 2.644.307.412 | 100,00 | 95,08 | Kecamatan Tompobulu | Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100,00 | 10.100.000 | 100,00 | 10.100.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Tompobulu | Tercapai |
| Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | Persen | 100,00 | 6.850.000 | 100,00 | 6.800.000 | 100,00 | 99,27 | Kecamatan Tompobulu | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100,00 | 40.050.000 | 100,00 | 40.000.000 | 100,00 | 99,88 | Kecamatan Tompobulu | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100,00 | 35.000.000 | 100,00 | 34.950.000 | 100,00 | 99,86 | Kecamatan Tompobulu | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100,00 | 93.450.000 | 100,00 | 83.400.000 | 100,00 | 89,25 | Kecamatan Tompobulu | Tercapai |
| Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. | Persen | 100 | 8.824.555.034 | 100 | 8.371.485.673 | 100,00 | 94,87 | Kecamatan Turikale | Tercapai |
| Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | 2.786.150.000 | 100 | 2.728.250.300 | 100,00 | 97,92 | Kecamatan Turikale | Tercapai |
| Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 100 | 1.498.100.000 | 100 | 1.438.596.946 | 100,00 | 96,03 | Kecamatan Turikale | Tercapai |
| Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | Persen | 100 | 32.650.000 | 100 | 32.650.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Turikale | Tercapai |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persen | 100 | 16.600.000 | 100 | 16.600.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Turikale | Tercapai |
| Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | Persen | 100,00 | 3.246.423.259 | 100,00 | 3.049.650.475 | 100,00 | 93,94 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persen | 100,00 | 1.336.244.000 | 100,00 | 1.280.897.750 | 100,00 | 95,86 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | Persen | 100 | 33.598.780.690 | 100,00 | 33.539.950.790 | 100,00 | 99,82 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemsyarakatan | Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | Persen | 100 | 6.615.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tidak Tercapai |
| Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekoomi, sosial dan budaya | Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya | Persen | 100 | 142.098.000 | 100,00 | 141.820.000 | 100,00 | 99,80 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| Peningkatan kewaspadaan nasional dan pembingkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyaraat Dalam Mengantisipasi Konflik | Persen | 100 | 907.820.000 | 100,00 | 844.537.500 | 100,00 | 93,03 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

### 2.5.5. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Maros diukur dari ketercapaian indicator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan. Berikut gambaran pencapaian SPM Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.314**
**Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| NO | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Capaian SPM | | | | | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<), TERCAPAI (=), MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | |
| | **JumlahPendidikan Anak Usia Dini** | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | 71,25 | 72,47 | 85,22 | 94,53 | 96,28 | Belum Tercapai |
| | **Pendidikan Dasar** | | | | | | |
| 1.2 | Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 103,66 | 107,22 | 99,93 | 98,66 | 100 | Tercapai |
| | **Pendidikan Kesetaraan** | | | | | | |
| 1.3 | Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%/ per tahun) | 52,91 | 81,35 | 100 | 98,65 | 100 | Tercapai |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | | | | |
| 2.1 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM) | 92 | 85,59 | 101,57 | 100 | 80 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | | | | | | |
| 2.2 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 90 | 90,72 | 102,33 | 100 | 100 | Tercapai |
| | Peleyanan Kesehatan bayi Baru lahir | | | | | | |
| 2.3 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 90 | 90,44 | 101,54 | 100 | 100 | Tercapai |
| | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | |

| NO | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Capaian SPM | | | | | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<), TERCAPAI (=), MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai stander | 18 | 57,82 | 98,52 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar** | | | | | | |
| 2.5 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 40 | 63,22 | 102,35 | 100 | 100 | Tercapai |
| | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | |
| 2.6 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar | 27 | 42,63 | 89,31 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan pada UsiaL anjut** | | | | | | |
| 2.7 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar | 85 | 80,51 | 83,79 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | | | | | | |
| 2.8 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 25 | 23,09 | 36,49 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)** | | | | | | |
| 2.9 | Cakupan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 101 | 67,13 | 71,39 | 100 | 100 | Tercapai |
| | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | | | | | |
| 2.10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 79 | 98,8 | 94,49 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)** | | | | | | |
| 2.11 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar | 34 | 33,66 | 95,18 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)** | | | | | | |

| NO | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Capaian SPM | | | | | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<), TERCAPAI (=), MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.12 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan dini HIV sesuai standar | 54 | 78,46 | 104,48 | 100 | 100 | Tercapai |
| **3** | **Pekerjaan Umum** | | | | | | |
| | **Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - Hari** | | | | | | |
| 3.1 | Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 90 | 93,87 | 93,87 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik** | | | | | | |
| 3.2 | Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | 69,19 | 96,67 | 96,67 | 100 | 100 | Tercapai |
| **4** | **Perumahan Rakyat** | | | | | | |
| | **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak huni Bagi Korban Bencana Kabupaten** | | | | | | |
| 4.1 | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana | - | 56,68 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten** | | | | | | |
| 4.2 | Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah | - | - | - | 100 | 100 | Tercapai |
| **5** | **Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | |
| | **pelayanan ketentraman dan ketertiban umum** | | | | | | |
| 5.1 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 62,7 | 62,7 | 88,94 | 100 | 100 | Tercapai |

| NO | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Capaian SPM | | | | | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<), TERCAPAI (=), MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **pelayanan informasi rawan bencana** | | | | | | |
| 5.2 | Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan informasi rawan bencana | 100 | 100 | 99,42 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | | | |
| 5.3 | Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | | | |
| 5.4 | Persentase warga negara yang berada pada kwasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | | | |
| 5.6 | Persentase warga negara yang berada pada kwasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran | 94,97 | 94,97 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| **6** | **Sosial** | | | | | | |
| | **rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti** | | | | | | |
| 6.1 | Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan social dasarnya di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | **rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti** | | | | | | |
| 6.2 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | , rehabilitasi social dasar lanjut usia telantar di luar panti | | | | | | |
| 6.3 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

| NO | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Capaian SPM | | | | | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<), TERCAPAI (=), MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | | | | | | |
| 6.4 | Persentase tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. | | | | | | |
| 6.5 | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

Sumber : Bapperida Kab.Maros, 2025

### 2.5.6. Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Gambaran pencapaian target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten Maros Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.315**
**Capaian Target Indikator TPB/SDGs**
**Kabupaten Maros Tahun 2020-2023**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Dinas Sosial | Persen | 9,89 | 9,57 | 9,43 | 0 |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persen | 96,50 | 99,66 | 97,3 | 62,9 |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Dinas Sosial | Persen | 60,00 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Dinas Sosial | Rumah Tangga | 13.880 | 14.009,00 | 15.895,00 | 14.009,00 |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persen | 100,00 | 100 | 102,11 | 100 |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Dinas Kesehatan | Persen | 95,88 | 77,06 | 91,89 | 104,5 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 65,29 | 69,91 | 51,19 | 73,35 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan | Persen | 76,56 | 92,53 | 93,07 | 98,49 |
| 96 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan | Persen | 91,07 | 90,97 | 92,7 | 100 |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 102,90 | 106,54 | 102,8 | 105,67 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 108,57 | 108,66 | 100,02 | 103,06 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen | 72,00 | 87,13 | 92,32 | 93,43 |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Orang | 6 | 1,25 | 4,973 | 4.973 |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Lokasi | 0 | 62,00 | 80 | 80 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Dinas Sosial | Orang | 400 | 376,00 | 1.015,00 | 376 |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Dinas Sosial | Orang | 411 | 376,00 | 21 | 376 |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen | Ada | 1 | 1 | 1 |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persen | 33,73 | 43,54 | | 13,47 |
| **Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Dinas Kesehatan | Persen | 17,30 | 0,53 | 4,62 | 10,89 |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Dinas Kesehatan | Persen | 21,5 | 9,47 | 30,1 | 10,4 |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Dinas Kesehatan | Persen | 6,8 | 4,76 | 5,45 | 4,08 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Dinas Kesehatan | Persen | 64,97 | 77,91 | 79,19 | 83 |
| **Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Dinas Kesehatan | Angka | 3,00 | 0,07 | 0,18 | 0,19 |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang | Dinas Kesehatan | Persen | 89,11 | 100,00 | 102,41 | 99,47 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | | | | | | |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persen | 100 | 100,00 | 102,11 | 99,47 |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Angka | 4,7 | 3,97 | 6,53 | 0,17 |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Angka | 2,82 | 3,24 | 7,28 | 9,99 |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Angka | 4,76 | 3,83 | 7,14 | 10,49 |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Dinas Kesehatan | Persen | 95,5 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Dinas Kesehatan | Persen | 0,0005 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Dinas Kesehatan | Kasus | 111 | 112,65 | 147,11 | 209,21 |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Dinas Kesehatan | Orang | 20 | 15,62 | 24,77 | 47,03 |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria. | Dinas Kesehatan | Kecamatan | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Dinas Kesehatan | Persen | 1 | 0,60 | 3,2 | 16,98 |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Dinas Kesehatan | Persen | 28,38 | 23,09 | 36,5 | 7,52 |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Dinas Kesehatan | Persen | 59,26 | 49,5 | 43,5 | 16,98 |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 65,29 | 73,25 | 51,19 | 100 |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 65,29 | 69,91 | 51,9 | 63,03 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 20,72 | 23,55 | 21,99 | 39,95 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Angka | 36 | 24,92 | 30,5 | 28,79 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 2,43 | 2,11 | 2,56 | 2,13 |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 14,49 | 14,43 | 29,65 | 29,65 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Dinas Kesehatan | Persen | 96,5 | 37,78 | | 101,4 |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Dinas Kesehatan | Persen | 100 | 100 | | 100 |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persen | 0,057 | 0,11 | | 0,76 |
| **Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 98,37 | 63,81 | 74,89 | 80,48 |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 92 | 55,46 | 58,66 | 58,66 |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 109,6 | 106,54 | 107,71 | 107,18 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 105,31 | 108,66 | 94,34 | 106,23 |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 61,46 | 72,06 | 85,22 | 96,28 |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 105,31 | 1,06 | 1,05 | 1,05 |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 99,23 | 99,96 | 97,54 | 99,74 |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Persen | 65,22 | 69,04 | 69,56 | 75,04 |
| **Tujuan 5 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kebijakan | 25,00 | 2 | 2 | 20,00 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 46 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 0,21 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | 23 | 21,26 | 24,1 | 24,00 |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tahun | 21 | 28,12 | 23,55 | 23,55 |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tahun | 22 | 24,92 | 30,5 | 29,73 |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 19 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | 804 | 0,09 | -0,09 | 0,00 |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 41,958 | 71,13 | 74,34 | 0,00 |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 14,49 | 14,43 | 29,65 | 14,29 |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 65,54 | 71,13 | 74,67 | 86,13 |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 77,58 | 79,79 | | 84,57 |
| **Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan | Persen | 76,56 | 92,53 | 93,07 | 98,49 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan | Persen | 91,07 | 103,00 | | 100 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Dinas Kesehatan | Persen | 103 | 56,37 | 75 | 99,47 |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Dinas Kesehatan | Desa | 26 | 35,00 | 98 | 104,5 |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Angka | 50,00 | 56,37 | | 53,64 |
| **Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 1,24 | 0,74 | 21,78 | 3,52 |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Juta | 64,33 | 47,88 | 58,31 | 64,69 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | | 0,2077 | 63,99 | 79,67 | Tidak ada |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Persen | 4,71 | 6,30 | 5,04 | 3,7 |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | Persen | 0,33 | 0,38 | 0,34 | tidak ada |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | Orang | 1.293 | 280,00 | 2138 | 6373 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | orang | 517.342 | 462598,00 | 581878 | 587653 |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | Rp | 193.950 | Tidak Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| **Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan | Dermaga | 1,00 | 48,00 | 48 | 48 |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Rp | 3.724.700,00 | 17,62 | | 19,94 |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Rp | 22.716.974,40 | -8,30 | 4,88 | 4,25 |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Persen | 16,4 | 21,86 | 22,13 | Tidak ada |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 77,58 | 71,13 | | 67,75 |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 77,58 | 79,79 | | 84,57 |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 42,31 | 0,56 | | 67,75 |
| **Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Dinas Sosial | Indeks | 0,38 | 0,38 | | |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Dinas Sosial | Persen | 8,31 | 9,57 | | 0 |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Desa | 9 | 2,00 | 1 | 1 |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Desa | 5 | 0,00 | 13 | 43 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persen | 0,59 | Tidak Ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Dinas Sosial | Persen | 9,89 | | | 0 |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Kebijakan | Ada | Ada | | 0 |
| **Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Rasio | 0,16 | 0,12 | | 0,02 |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 6 | 5,00 | | 12 |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 50 | 141,87 | | 128,04 |
| 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Desa / Kelurahan | 62 | 62,00 | | |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rambu | 64 | 2 | | 1 |
| 11.5.2 | Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persen | 50 | | | |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | 500 | 5.744.311.000,00 | | 3.643.230.000,00 |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Persen | 89,03 | 63,15 | | 94,09 |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | Ada | Tidak Ada | | 1 |
| **Tujuan 12 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 84,70 | 1088,10 | | 8473,68 |
| **Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen | 1 | 0,00 | | 1 |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | 6 | 5 | | 12 |
| **Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Dinas Perikanan | Ton | 21.681 | 13.189,00 | | 93,75 |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Dinas Perikanan | Nelayan | 804 | 3063,00 | | 200 |
| **Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Persen | 48,99 | 53,55 | | 50,31 |
| **Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR | Kasus | 1,00 | 1,00 | 7 | 3 |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR | | - | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR | Orang | 138 | 0,64 | 1,01 | 1 |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR | Persen | 99,7 | 99,85 | 95,85 | 99,7 |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rumah Tangga | 2 | 0,00 | 0,001 | 0,032 |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,032 |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | 5 | 21,26 | 24,1 | 0,001 |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persen | 93,92 | 94,49 | | 37,54 |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | WTP | WTP | WTP | | 0 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16.6.1.(b) | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | Badan Pendapatan Daerah | Persen | 16,45 | 16,18 | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 25,71 | 21,75 | 21,75 | 25 |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen | 7,14 | 6,66 | 4,44 | 0,015 |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen | 81 | 87,13 | 99,78 | 99,69 |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen | 85 | 85 | 90 | 91,07 |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen | 72 | 87,13 | 99,78 | 91,07 |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| **Nama Target SDGs :** | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Badan Pendapatan Daerah | Persen | 16,00 | 1,16 | | 0,57 |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. | Badan Pendapatan Daerah | Persen | 0,0109 | 0,66 | | 0,075 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persen | 0,0109 | 0,01 | | 13,3 |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 2,6 | | | 5,75 |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 77,56 | 83,57 | | 67,75 |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 42,31 | 60,76 | | 67,75 |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persen | 86,67 | 100,00 | | 98,39 |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persen | 67,66 | 40,00 | | 82 |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Dinas Kependudukan | Data | Ada | Ada | | 100 |

| Kode Indi-kator | Nama Indikator SDGs | Sumber Data | Satuan | Tahun Pencapaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | dan Pencatatan Sipil | | | | | |

Sumber : Bapperida Kab.Maros, 2025

## 2.6 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

### 1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Maros tahun 2021-2026 diukur melalui 273 indikator kinerja, dengan tingkat pencapaian secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.316**
**Capaian IKK Kabupaten Maros**
**Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026**

| NO | URAIAN | JUMLAH | PERSEN (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | IKK YANG MELAMPAUI TARGET | 98 | 35,90 |
| 2 | IKK YANG MENCAPAI TARGET | 59 | 21,61 |
| 3 | IKK YANG TIDAK MENCAPAI TARGET | 116 | 42,49 |
| | **TOTAL IKK** | **273** | **100** |

### 2. Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pencapaian target indikator bidang urusan dapat dijelaskan bahwa:

**a. Urusan Bidang Pendidikan**

Realisasi SPM Bidang Pendidikan tidak semuanya mencapai target 100%, dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih belum tersedianya data By Name By Nik;
2. Struktur pendataan yang belum terstandarisasi;
3. Adanya perbedaan data dari beberapa indikator;
4. Belum maksimalnya sasaran pengampu SPM;
5. Perhitungan anak tidak sekolah yang dilakukan by Name By Adress;
6. PErhitungan kebutuhan biaya pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD;
7. PErhitungan kebutuhan pangananan sosial bagi anak putus sekolah belum memadai;
8. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM;
9. KEtersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak Sekolah
10. KEterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah;
11. Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wiayah/lokasi pemenuhan.

**b. Urusan Bidang Kesehatan**

Terkait pencapaian SPM bidang kesehatan yang telah mencapai 100 persen, maka dipastikan tidak ada kendala atau permasalahan yang dihadapi.

**c. Urusan Bidang Pekerjaan Umum**

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum tidak mencapai target 100% dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Adanya perbedaan data pada saat di lapangan;
2. Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update;
3. Belum adanya database keberfungsian dari saran prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun;
4. Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM;
5. PErlunya penganggaran yang cukup besar untuk menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi;
6. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah;
7. Sarana prasarana bidang sanitasi belum berfungsi secara optimal;
8. Format laporan yang selau berubah-ubah;
9. Untuk anggaran yang direncanakan berbeda dengan realisasinya.

**d. Urusan Bidang Perumahan Rakyat**

Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang belum mencapai 100% dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Lokasi yang jauh;
2. Sulitnya berkoordinasi dengan aparat desa;
3. Pengumpulan data di tingkat desa masih kurang;
4. Data yang lebih banyak darpada yang terealisasi;
5. Perencanaan pendataan lebih banyak daripada usuolan kegiatan;
6. Belum terakomdirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhanSPM;
7. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana;
8. Pendistribusian material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda;
9. Pengurangan anggaran yang disebabkan oleh beberapa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi;
10. Minimnya sumber daya yang tersedia.

**e. Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban**

Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban mencapai 100%, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya, yaitu:

1. tidak tersedianya data (tidak terdokumentasi secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat;
2. kurangnya SDM yang mampu menggunakan komputer dengan baik dan mahir;
3. belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;

4. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada diperuntukkan untuk memenuhi jasa tenaga honor;
5. Kondisi sarana prasarana masih perlu ditambah utamanya mobil operasional Satdalmas, PAtroli dan Armada Damkar masih terdaoat beberapa kecamatan yang belum memilik armada.
6. kurangnya anggaran dalam mendukung program dan kegiatan;
7. kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;
9. masih banyaknya aparatur yang belum memnuhi standar kompetensi sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018.

**f. Urusan Bidang Sosial**

Realisasi SPM Bidang Sosial mencapai 100%, namun masih ada beberapa permasalahn yang dihadapi yaitu:

1. kurangnya personil Satga Bencana;
2. Jumlah kerugian tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan
3. anggaran yang terbatas
4. pkurangnya ketrampilan atau pengalaman dalam pengumpulan data sehingga berdampak pada data yang dikumpulkna.

## 3. Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Hingga tahun 2022, dari 134 indikator TPB/SDGs yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 53 (39,55%), Indikator telah mencapai target tahun berjalan. Sebanyak 29 indikator (21,64%) tercatat akan mencapai target.membaik dibandingkan pencapaian pada peridoe sebelumnya. Indikator yamg masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 45 indikator (33,58%). Adapun indikator yang belum/tidak ada data sebanyak 7 (5,22%) indikator.

Tujuh belas tujuan yang terdapat di dalam TPB/SDGs diklasifikasikan menjadi empat Pilar Pembangunan yang meliputi Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7,8,9,10 dan 17), Pilar Pembangunan Lingkkungan (tujuan 6,11,12,13,14 dan 15) dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16). Narasi penting terkait pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs pada masing-masing pilar tersebut sebagai berikut

**A. Pilar Pembangunan Sosial**

Pilar Pembangunan Sosial di dalam RAD TPB/SDGs terdiri atas 67 indikator yang berhasil diidentifikasi data pencapaiannya di tahun 2022. Berdasar data yang telah diidentifikasi tersebut, terdapat 24 *36%) indikator berstatus mencapai target yang sudah ditetapkan. Sementara, untuk indikator yang verstatus “akan tercapai/membaik” dari tahun sebelumnya serta berstatus “perlu perhatian khusus” secara berturut-turut sebanyak 13 (19%) dan 30 (45%) indikator. Sejumlah indikator di Pilar Pembangunan Sosial juga tercatat berhasil melampaui target yang telah ditentukan di antaranya PErsentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan

ASI ekslusif, Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat.

Sementara, indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya berada bahkan di bawah data tahun dasar (baseline) di antaranya, Prevalensi tekanan darah tinggi, Kejadian Malaria per 1000 orang, Persentase cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Tujuan 3 (Kehidupan yang Sehat Sejahtera) menjadi tujuan yang memiliki jumlah indikator dengan status perlu perhatian khusus tertinggi dibandingkan sektor lainnya di Kabupaten Maros.

Tantangan utama untuk pencapaian target-target pada setiap tujuan di dalam Pilar Pembangunan Sosial yakni Beberapa masyarakat dinonaktifkan dikarenakan tidak melakukan pembayaran. Khususnya, untuk sektor-sektor yang masih didominasi dengan status “perlu perhatian khusus” seperti pada Tujuan 3 (Kehidupan yang Sehat Sejahtera).

**B. Pilar Pembangunan Ekonomi**

Sebanyak 27 (87%) indikator dalam Pilar Pembangunan Ekonomi berhasil diidentifikasi data pencapaiannya di tahun 2022. Total indikator yang berhasil mencapai target tercatat sebanyak 14 indikator atau 45% dari total indikator yang telah diidentifikasi data pencapaiannya. Indikator lain yang berstatus akan tercapai/membaik dan perlu perhatian khusus secara berturut-turut sebanyak 7 indikator (23%) dan 6 indikator (19%). Tujuan 8 (Industri, inovasi dan infrastruktur) tercatat memiliki jumlah indikator dengan status perlu perhatian khusus tertinggi pada Pilar Pembangunan Ekonomi. Sejumlah indikator di dalam tujuan tersebut yang berstatus perlu perhatian khusus, di antaranya, Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita, Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dan Proporsi individu yang menggunakan internet.

**C. Pilar Pembangunan Lingkungan**

Pilar Pembangunan Lingkungan terdiri atas 6 Tujuan yang secara total mencakup 20 indikator. Sebanyak 18 (90%) dari 20 indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan dapat diidentifikasi data pencapaiannya di tahun 2022. Untuk indikator yang berhasil mencapai target yakni 45% (9 indikator). Indikator dengan status akan tercapai/ membaik dan perlu perhatian khusus secara berturut-turut sebesar 30% (6 indikator) dan 15% (3 indikator).

Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus pada Pilar Pembangunan Lingkungan antara lain Jumlah nelayan yang terlindungi dan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Adapun tantangan dalam Pilar Pembangunan Lingkungan diantaranya penurunan jumlah alokasi anggaran.

**D. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola**

Sebanyak 15 (94%) indikator yang terdapat di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola telah berhasil diidentifikasi data pencapaiannya di tahun 2022. Lebih dari separuh indikator-indikator tersebut berstatus akan mencapai target atau membaik dibandingkan data periode sebelumnya. Sebagian indikator dengan status perlu perhatian khusus di antaranya Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota), Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) dan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Salah satu tantangan dalam hal ini diantaranya cakupan akses pelayanan yang belum optimal untuk daerah-daerah terpencil. Selain itu perlu mendorong pelibatan perempuan dalam kegiatan politik mengajukan alokasi anggaran untuk pemeliharaan.

## 2.7 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD TAHUN 2024

### . Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2024

#### A. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan antara RPJMD dan RKPD, RKPD dengan APBD.

**Tabel 2.317**
**Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD dan APBD Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | | | | Jumlah Program Yang Sama | | | | Jumlah Program Tidak Sama | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD | Renja-PD | APBD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD |
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaa | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Dinas Pekerjaa n Umum, Tata Ruang, Perhubu ngan | 25 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 4 | Dinas Peruma han, Kawasa n Permuki man | ``15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakara n Dan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Badan Penanggu lang an Bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Dinas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | | | | Jumlah Program Yang Sama | | | | Jumlah Program Tidak Sama | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD | Renja-PD | APBD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 9 | Dinas Kependuduk an Dan Pencatat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | Dinas Komunikasi, Informatika | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdaga | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 13 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 14 | Dinas Pariwisata, Pemuda | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 15 | Dinas Perpustakaan Dan Kears | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | Dinas Perikanan | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 17 | Dinas Pertanian Dan Ketahana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 18 | Sekretariat Daerah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 19 | Sekertariat Dprd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | Inspektorat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | | | | Jumlah Program Yang Sama | | | | Jumlah Program Tidak Sama | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD | Renja-PD | APBD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD |
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 22 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 23 | Badan Pendapatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Badan Kepegawaian & Pengemb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 25 | Kecamatan | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |

*Sumber: Bapperida (diolah), 2025*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 160 program dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2023 berjumlah 148 program.
   b) Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 12 program.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja PD
   a) Jumlah rencana program RKPD adalah 148 program dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 146 program.
   b) Antara dokumen RKPD dan Renja-PD sudah konsisten.
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 148 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 141 program.
   b. Antara dokumen RKPD dan APBD sudah konsisten.
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD adalah 160 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 141 program. Terdapat selisih 19 program dikedua dokumen tersebut.

**Tabel 2.318**

**Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD Tahun 2024**

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan | | | Kegiatan Yang Sama | | | Kegiatan Tidak Sama | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD | Renja | APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 19 | 19 | 14 | 19 | 14 | 14 | | | |
| 2 | Dinas Kesehatan | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | - | - |
| 3 | Dinas PUTRPP | 33 | 33 | 30 | 33 | 30 | 30 | - | - | - |
| 4 | Dinas PKPLH | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | - | - | - |
| 5 | Satpol PP dan Damkar | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | - | - |
| 6 | BPBD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 7 | Dinas Sosial | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | - | - | - |
| 8 | Dinas P3ADALDUKKB | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | - | - | - |
| 9 | Dinas DUKCAPIL | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - | - |
| 10 | Dinas PMD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 11 | Dinas Kominfo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 12 | Dinas KOPUMRINDAG | 27 | 27 | 13 | 27 | 13 | 13 | - | - | - |
| 13 | Dinas PMPTSPK | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | - | - | - |
| 14 | Dinas PARPORA | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | - | - | - |
| 15 | Dinas Perprustakaan dan Kearsipan | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | | | |
| 16 | Dinas Perikanan | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - |
| 17 | Dinas Pertanian dan KP | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | - | - | - |
| 18 | Sekretariat Daerah | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 19 | Sekretariat DPRD | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |
| 20 | Inspektorat | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| 21 | Bappelitbangda | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | - | - |
| 22 | BKAD | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - |
| 23 | Bapenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 24 | BKPSDM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 25 | Kecamatan Mandai | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - |
| 26 | Badan KESBANGPOL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |

Sumber : Bapperida, Tahun 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan RENJA-PD
   a) Kegiatan dalam RKPD sejumlah 326 dan Renja PD sejumlah 326, sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0.
   b) Untuk jumlah kegiatan antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c) Persentasi konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 persen.
2. RKPD dan APBD
   a. Kegiatan dalam RKPD sejumlah 326 dan ABPD sejumlah 262. Jumlah kegiatan yang sama antara kedua dokumen adalah 262.
   b. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 80,37 persen

**B. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024**

Terkait penggambaran PElaksanaan Capaian Kinerja pada Sub Kegiatan pada pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.318**

**Capaian Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 7.600.000 | 2 | 7.600.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.800.000 | 1 | 3.800.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.100.000 | 1 | 4.100.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.950.000 | 1 | 3.950.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.100.000 | 1 | 4.100.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 3.650.000 | 1 | 3.650.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 6 | 3.650.000 | 6 | 3.650.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 41.132 | ########## | 41132 | 314.160.929.903 | 100,00 | 97,65 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 765.820.000 | 12 | 672.780.000 | 100,00 | 87,85 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 4.900.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 81,63 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 1 | 4.900.000 | 1 | 4.900.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 1 | Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 27.800.000 | 1 | 22.700.000 | 100,00 | 81,65 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | Rekonsiliasi dan penyuluhan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 20.300.000 | 1 | 20.300.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 35 | 14.000.000 | 35 | 14.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 25.900.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 25.900.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 11 | 15.555.250 | 11 | 14.135.000 | 100,00 | 90,87 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 14 | 15.840.000 | 14 | 14.225.000 | 100,00 | 89,80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 87.175.500 | 4 | 77.594.500 | 100,00 | 89,01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 53.542.000 | 3 | 53.042.000 | 100,00 | 99,07 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 79.250.000 | 12 | 79.250.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 456.752.500 | 12 | 345.315.527 | 100,00 | 75,60 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 7 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 159.784.750 | 2 | 155.650.000 | 100,00 | 97,41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 50 | 289.250.000 | 50 | 280.750.000 | 100,00 | 97,06 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 14.500.000 | 3 | 14.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 18.000.000 | 12 | 7.984.900 | 100,00 | 44,36 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 370.400.000 | 12 | 354.810.000 | 100,00 | 95,79 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 3 | 30.000.000 | 3 | 29.939.400 | 100,00 | 99,80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 2 | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 60.000.000 | 3 | 57.952.500 | 30,00 | 96,59 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 3 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Unit | 20 | 40.000.000 | 4 | 38.045.000 | 20,00 | 95,11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Unit | 46.225 | 848.757.000 | 3 | 830.185.000 | 0,01 | 97,81 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 2 | Pembangunan peprustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 3 | 247.000.000 | 1 | 241.130.900 | 33,33 | 97,62 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 3 | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1.876.598.900 | 10 | 1.826.295.800 | 1000,00 | 97,32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 4 | Rehabilitasi sedang/berta ruang guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 10 | 963.882.000 | 7 | 954.417.020 | 70,00 | 99,02 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 5 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 7 | 987.080.000 | 5 | 972.937.800 | 71,43 | 98,57 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 6 | Rehabilitasi sedang/berta rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 5 | 475.500.000 | 4 | 463.508.200 | 80,00 | 97,48 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 7 | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 4 | 10.163.784.136 | 3 | 9.735.695.000 | 75,00 | 95,79 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 8 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 5 | 1.400.000.000 | 8 | 1.279.730.000 | 160,00 | 91,41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 9 | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 8 | 373.050.000 | 50 | 321.650.000 | 625,00 | 86,22 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 10 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Orang | 150 | 1.000.420.000 | 200 | 747.120.000 | 133,33 | 74,68 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 11 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 200 | 217.630.000 | 200 | 209.730.000 | 100,00 | 96,37 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 12 | Pengelolaan dana BOS sekolah dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 350 | 41.085.600.000 | 241 | 41.402.077.338 | 68,86 | 100,77 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 13 | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Orang | 241 | 111.270.000 | 482 | 110.770.000 | 200,00 | 99,55 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 14 | Pembangunan laboratorium sekolah dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | Ruang | 482 | 1.365.000.000 | 5 | 1.328.573.130 | 1,04 | 97,33 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 15 | Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 5 | 26.550.000 | 100 | 25.549.000 | 2000,00 | 96,23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 16 | Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 100 | 16.950.000 | 50 | 15.049.000 | 50,00 | 88,78 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 17 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 50 | 31.550.000 | 2 | 30.599.000 | 4,00 | 96,99 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 18 | Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 2 | 52.905.000 | 100 | 52.905.000 | 5000,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 19 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 100 | 16.950.000 | 1 | 15.949.000 | 1,00 | 94,09 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 20 | Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | 1 | 78.750.000 | 300 | 77.415.524 | ###### | 98,31 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 21 | Pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 300 | 6.277.200.000 | 2 | 4.940.920.200 | 0,67 | 78,71 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 22 | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 4 | 7.122.796.000 | 19 | 6.604.633.000 | 475,00 | 92,73 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 23 | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 19 | 483.048.000 | 5 | 469.402.100 | 26,32 | 97,18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 24 | Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 5 | 94.715.600 | 50 | 75.225.600 | 1000,00 | 79,42 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 25 | Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 50 | 119.050.000 | 241 | 117.670.000 | 482,00 | 98,84 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 26 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 241 | 7.855.084.150 | 45 | 6.944.038.800 | 18,67 | 88,40 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 1 | Pembangunan unit sekolah baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 22.120 | 2.509.000.000 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 2 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 279.478.000 | 2 | 277.011.185 | 200,00 | 99,12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | Pembangunan laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 2 | 924.800.000 | 2 | 814.265.650 | 100,00 | 88,05 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 4 | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 2 | 839.900.000 | 2 | 836.482.700 | 100,00 | 99,59 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 5 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 3.467.636.400 | 17 | 3.396.419.480 | 850,00 | 97,95 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 6 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 17 | 426.700.000 | 2 | 421.804.000 | 11,76 | 98,85 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 7 | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 626.259.000 | 3 | 617.174.250 | 150,00 | 98,55 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 8 | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3 | 97.140.000 | 2 | 94.996.925 | 66,67 | 97,79 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 9 | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 2 | 10.708.666.135 | 3 | 10.506.113.000 | 150,00 | 98,11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 10 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 5 | 1.240.000.000 | 10 | 927.970.000 | 200,00 | 74,84 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 11 | pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 10 | 298.970.000 | 50 | 270.630.000 | 500,00 | 90,52 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 12 | Penyediaan pendidiik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Orang | 150 | 500.165.000 | 50 | 243.865.000 | 33,33 | 48,76 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 13 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 50 | 163.500.000 | 200 | 146.340.000 | 400,00 | 89,50 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 14 | pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Satuan Pendidikan | 250 | 227.740.000 | 74 | 221.887.000 | 29,60 | 97,43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 15 | Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 74 | 19.039.100.000 | 74 | 18.697.373.762 | 100,00 | 98,21 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 16 | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Orang | 74 | 101.382.000 | 148 | 100.082.000 | 200,00 | 98,72 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 17 | Rehabilitasi sedang/berat ruang TU | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 148 | 318.000.000 | 1 | 315.015.700 | 0,68 | 99,06 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 18 | Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 1 | 30.810.000 | 100 | 27.260.000 | ###### | 88,48 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 19 | Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 100 | 11.350.000 | 100 | 9.050.000 | 100,00 | 79,74 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 20 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 100 | 16.750.000 | 1 | 13.633.000 | 1,00 | 81,39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 21 | Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 1 | 114.795.000 | 100 | 114.795.000 | ###### | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 22 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 100 | 39.200.000 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 23 | Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 1 | 134.990.000 | 74 | 98.940.000 | 7400,00 | 73,29 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 24 | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 74 | 3.650.847.000 | 11 | 3.443.341.760 | 14,86 | 94,32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 25 | Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 11 | 28.645.000 | 43 | 28.645.000 | 390,91 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 26 | pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 43 | 3.300.000.000 | 2 | 4.056.034.000 | 4,65 | 122,91 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 27 | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 3 | 528.385.000 | 4 | 516.757.050 | 133,33 | 97,80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Unit | 15.392 | 1.907.700.000 | 19 | 1.482.886.284 | 0,12 | 77,73 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 2 | Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 19 | 2.533.891.800 | 24 | 2.412.963.075 | 126,32 | 95,23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 3 | Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 24 | 238.500.000 | 3 | 237.188.863 | 12,50 | 99,45 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 4 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | Paket | 3 | 1.850.000.000 | 1 | 1.838.050.200 | 33,33 | 99,35 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 5 | Penyelenggaraan proses belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Peserta Didik | 1 | 151.640.000 | 15.000 | 51.000.000 | ###### | 33,63 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 6 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | 15.000 | 4.616.400.000 | 725 | 4.224.600.000 | 4,83 | 91,51 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 7 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 725 | 264.945.000 | 150 | 61.545.000 | 20,69 | 23,23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 8 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 250 | 738.390.000 | 250 | 683.490.000 | 100,00 | 92,56 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 9 | Pengelolaan dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 250 | 5.111.400.000 | 250 | 5.018.140.991 | 100,00 | 98,18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 10 | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Orang | 250 | 78.470.000 | 250 | 70.900.000 | 100,00 | 90,35 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 11 | Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 250 | 46.130.000 | 50 | 45.730.000 | 20,00 | 99,13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 12 | Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 50 | 104.582.600 | 1 | 68.522.000 | 2,00 | 65,52 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 13 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 1 | 123.045.000 | 1 | 60.850.000 | 100,00 | 49,45 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 14 | Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 212.000.000 | 1 | 206.313.969 | 100,00 | 97,32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 15 | Fasilitasi komunitas belajar endidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 1 | 211.575.000 | 14 | 211.575.000 | 1400,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 16 | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 14 | 936.000.000 | 3 | 781.431.379 | 21,43 | 83,49 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 17 | Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 3 | 83.150.000 | 100 | 64.950.000 | 3333,33 | 78,11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 18 | Pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 100 | 2.000.000.000 | 1 | 1.959.804.000 | 1,00 | 97,99 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 1 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | Unit | 273 | 34.950.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 2 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 50 | 450.000.000 | 2 | 450.000.000 | 4,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 3 | Pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 2 | 456.700.000 | 12 | 419.597.500 | 600,00 | 91,88 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 4 | Peningkatan kapasitas pengloelaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Orang | 12 | 26.250.000 | 30 | 6.050.000 | 250,00 | 23,05 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 30 | 322.680.000 | 1 | 22.610.000 | 3,33 | 7,01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| 6 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 1 | 128.150.000 | 1 | 61.000.000 | 100,00 | 47,60 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 7 | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 3.261.974.708 | 2 | 3.241.253.072 | 200,00 | 99,36 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| 8 | Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Peserta Didik | 2 | 130.570.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| | Perhitungan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dsar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Dokumen | 565 | 104.930.000 | 1 | 101.180.000 | 0,18 | 96,43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| | Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non fromal/kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Laporan | 1 | 85.150.000 | 1 | 66.250.000 | 100,00 | 77,80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah kabupateb/kota | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Bahasa | 2 | 100.600.000 | 2 | 89.930.000 | 100,00 | 89,39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek | 2 | 52.200.000 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Pelestraian kesenian tradisional yang maysarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | 2 | 150.705.000 | 2 | 100.805.000 | 100,00 | 66,89 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 2 | 150.705.000 | 2 | 100.805.000 | 100,00 | 66,89 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga adat yang dikelola, dilesatrikan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | 2 | 129.315.000 | 4 | 129.315.000 | 200,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 4 | 129.315.000 | 4 | 129.315.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Revitalisasi sarana dan prasarana museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi | Unit | 10 | 180.000.000 | 1 | 49.850.853 | 10,00 | 27,69 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak Tercapai |
| | Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara | Unit | 5 | 350.000.000 | 5 | 148.130.610 | 100,00 | 42,32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang | 14 | 145.005.000 | 100 | 145.005.000 | 714,29 | 100,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat | Dokumen | 50 | 41.055.000 | 50 | 32.705.000 | 100,00 | 79,66 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2,00 | 13.349.612 | 2 | 13.251.700 | 100,00 | 99,27 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 4.897.000 | 1 | 3.665.500 | 100,00 | 74,85 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 11.691.500 | 1 | 11.525.100 | 100,00 | 98,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 11.610.000 | 1 | 11.455.800 | 100,00 | 98,67 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1,00 | 10.180.100 | 1 | 10.065.115 | 100,00 | 98,87 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4,00 | 22.450.000 | 4 | 22.339.800 | 100,00 | 99,51 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ###### | 92.156.491.018 | 17.220 | 90.417.482.171 | 100,00 | 98,11 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12,00 | 663.900.000 | 12 | 560.340.000 | 100,00 | 84,40 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1,00 | 22.575.000 | 1 | 22.491.300 | 100,00 | 99,63 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 21.400.000 | 1 | 20.950.000 | 100,00 | 97,90 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1,00 | 29.135.500 | 1 | 26.700.500 | 100,00 | 91,64 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 319.118.500 | 1 | 242.418.500 | 100,00 | 75,97 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12,00 | 2.159.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12,00 | 13.925.000 | 12 | 13.925.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 25,00 | 469.134.000 | 25 | 382.465.556 | 100,00 | 81,53 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1,00 | 145.200.000 | 1 | 139.200.000 | 100,00 | 95,87 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12,00 | 22.100.000 | 12 | 11.476.000 | 100,00 | 51,93 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 25,00 | 51.000.000 | 25 | 51.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 5,00 | 65.444.500 | 5 | 50.955.800 | 100,00 | 77,86 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1,00 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 2.382.000.000 | 1 | 2.241.013.548 | 100,00 | 94,08 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.766.650.000 | 1 | 1.739.318.573 | 100,00 | 98,45 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 3.291.867.818 | 1 | 3.265.388.911 | 100,00 | 99,20 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.311.577.881 | 1 | 1.206.721.679 | 100,00 | 92,01 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 2.580.212.870 | 1 | 2.393.033.062 | 100,00 | 92,75 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 950.000.000 | 1 | 936.997.336 | 100,00 | 98,63 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 2.267.332.639 | 1 | 2.112.542.283 | 100,00 | 93,17 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.641.641.368 | 1 | 1.526.927.791 | 100,00 | 93,01 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.163.649.811 | 1 | 1.074.582.386 | 100,00 | 92,35 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.421.750.000 | 1 | 1.416.436.354 | 100,00 | 99,63 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 2.975.292.658 | 1 | 2.574.362.961 | 100,00 | 86,52 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 2.254.875.000 | 1 | 1.955.089.078 | 100,00 | 86,70 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.429.822.169 | 1 | 1.295.775.213 | 100,00 | 90,62 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan penunjnag pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 1.094.716.721 | 1 | 966.195.786 | 100,00 | 88,26 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan dan Penunjnag Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1,00 | 66.455.966.554 | 1 | 64.845.046.712 | 100,00 | 97,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prsarana pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 1,00 | 45.540.492.600 | 1 | 45.118.705.600 | 100,00 | 99,07 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | Unit | 2,00 | 1.180.000.000 | 2 | 1.167.280.000 | 100,00 | 98,92 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengembangan puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Diting-katkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 7,00 | 27.870.000.000 | 7 | 27.212.633.000 | 100,00 | 97,64 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sa-rana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 8,00 | 4.349.639.700 | 8 | 4.260.848.069 | 100,00 | 97,96 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pela-yanan Kesehatan yang Dise-diakan | Unit | 14,00 | 14.976.847.825 | 14 | 14.817.736.172 | 100,00 | 98,94 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pela-yanan Kesehatan yang Dise-diakan | Unit | 79,00 | 11.831.849.700 | 79 | | 100,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan.alat penunjnag medik fasilitas pe-layanan kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Ter-pelihara Sesuai Standar | Unit | 16,00 | 52.870.000 | 16 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Paket | 1,00 | 30.047.695.175 | 1 | | 100,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1,00 | 6.727.936.100 | 1 | 6.608.300.280 | 100,00 | 98,22 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Distribusi alat eksehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | Paket | 1,00 | 115.600.000 | 1 | 54.260.000 | 100,00 | 46,94 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | 20,00 | 45.336.521.645 | 20 | 41.907.990.223 | 100,00 | 92,44 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 194.020.465 | 5397 | 185.754.000 | 100,00 | 95,74 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 491,00 | 62.880.000 | 491 | 52.380.000,00 | 100,00 | 83,30 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 434,00 | 99.540.000 | 434 | 76.160.000,00 | 100,00 | 76,51 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 433,00 | 129.680.000 | 433 | 129.680.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 460,00 | 128.640.000 | 460 | 122.410.000,00 | 100,00 | 95,16 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 800,00 | 42.920.000 | 800 | 34.520.000,00 | 100,00 | 80,43 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 100,00 | 74.100.000 | 100 | 60.950.000,00 | 100,00 | 82,25 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 460,00 | 76.280.000 | 460 | 76.280.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 582,00 | 87.640.000 | 582 | 86.240.000,00 | 100,00 | 98,40 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 266,00 | 74.900.000 | 266 | 74.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 246,00 | 77.600.000 | 246 | 77.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 248,00 | 84.280.000 | 248 | 84.280.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 587,00 | 70.820.000 | 587 | 70.820.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 145,00 | 18.800.000 | 145 | 18.800.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 145,00 | 65.800.000 | 145 | 65.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 118.000.000 | 5397 | 118.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 491,00 | 75.960.000 | 491 | 61.220.000,00 | 100,00 | 80,60 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 434,00 | 47.540.000 | 434 | 47.530.000,00 | 100,00 | 99,98 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 433,00 | 16.840.000 | 433 | 16.770.000,00 | 100,00 | 99,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 460,00 | 24.450.000 | 460 | 24.120.000,00 | 100,00 | 98,65 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 800,00 | 41.105.000 | 800 | 41.105.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 100,00 | 34.500.000 | 100 | 26.100.000,00 | 100,00 | 75,65 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 460,00 | 40.900.000 | 460 | 40.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 582,00 | 61.130.000 | 582 | 61.130.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 266,00 | 57.800.000 | 266 | 57.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 246,00 | 37.200.000 | 246 | 37.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 248,00 | 51.640.000 | 248 | 42.400.000,00 | 100,00 | 82,11 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 587,00 | 43.560.000 | 587 | 42.410.000,00 | 100,00 | 97,36 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 145,00 | 13.800.000 | 145 | 13.600.000,00 | 100,00 | 98,55 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 145,00 | 56.800.000 | 145 | 56.100.000,00 | 100,00 | 98,77 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 72.165.000 | 28000 | 53.100.000 | 100,00 | 73,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 27.710.000 | 57521 | 27.560.000 | 100,00 | 99,46 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 48.370.000 | 6112 | 48.370.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 39.690.000 | 4093 | 39.690.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 53.480.000 | 5241 | 50.400.000,00 | 100,00 | 94,24 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 61.120.000 | 3824 | 61.040.000,00 | 100,00 | 99,87 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 110.880.000 | 8351 | 88.620.000,00 | 100,00 | 79,92 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 47.800.000 | 1650 | 47.600.000,00 | 100,00 | 99,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 60.340.000 | 4435 | 59.360.000,00 | 100,00 | 98,38 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 76.440.000 | 4069 | 76.440.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 71.200.000 | 2898 | 71.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 61.700.000 | 2693 | 61.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 49.700.000 | 5929 | 49.630.000,00 | 100,00 | 99,86 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 109.660.000 | 4386 | 102.940.000,00 | 100,00 | 93,87 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 80.000.000 | 1822 | 70.100.000,00 | 100,00 | 87,63 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 75.000.000 | 2018 | 75.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesetahan sesuai standar | Orang | ###### | 18.000.000 | 179813 | 18.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 577.500.000 | 2736 | 577.000.000 | 100,00 | 99,91 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 451.420.900 | 3863 | 448.049.250 | 100,00 | 99,25 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 171,00 | 11.900.000 | 171 | 11.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 264,00 | 17.080.000 | 264 | 17.080.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 437,00 | 9.660.000 | 437 | 9.660.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 221,00 | 21.700.000 | 221 | 21.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 567,00 | 11.690.000 | 567 | 11.690.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 52,00 | 13.800.000 | 52 | 12.800.000,00 | 100,00 | 92,75 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 281,00 | 16.380.000 | 281 | 16.380.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 463,00 | 23.940.000 | 463 | 23.940.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 175,00 | 21.300.000 | 175 | 21.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 146,00 | 35.800.000 | 146 | 35.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 545,00 | 23.380.000 | 545 | 23.380.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 350,00 | 8.820.000 | 350 | 8.610.000,00 | 100,00 | 97,62 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 119,00 | 16.600.000 | 119 | 9.800.000,00 | 100,00 | 59,04 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 72,00 | 15.800.000 | 72 | 5.800.000,00 | 100,00 | 36,71 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 172.400.000 | 6220 | 171.935.000 | 100,00 | 99,73 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 518,00 | 11.340.000 | 518 | 11.340.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 564,00 | 24.500.000 | 564 | 8.610.000,00 | 100,00 | 35,14 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 501,00 | 8.960.000 | 501 | 6.720.000,00 | 100,00 | 75,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 495,00 | 12.600.000 | 495 | 12.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 905,00 | 7.140.000 | 905 | 7.140.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 108,00 | 7.400.000 | 108 | 7.400.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 547,00 | 9.660.000 | 547 | 9.660.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 665,00 | 16.520.000 | 665 | 6.790.000,00 | 100,00 | 41,10 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 306,00 | 10.400.000 | 306 | 10.400.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 275,00 | 15.200.000 | 275 | 15.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 310,00 | 18.620.000 | 310 | 18.620.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 657,00 | 16.800.000 | 657 | 16.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 202,00 | 7.800.000 | 202 | 6.800.000,00 | 100,00 | 87,18 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 167,00 | 6.800.000 | 167 | 6.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 46.180.000 | 1 | 46.180.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 282.420.000 | 1 | 173.536.000,00 | 100,00 | 61,45 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 287.180.000 | 1 | 251.089.000,00 | 100,00 | 87,43 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 257.620.000 | 1 | 165.200.000,00 | 100,00 | 64,13 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 242.270.000 | 1 | 235.758.000,00 | 100,00 | 97,31 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 259.897.000 | 1 | 189.957.000,00 | 100,00 | 73,09 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 316.900.000 | 1 | 228.087.000,00 | 100,00 | 71,97 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 298.460.000 | 1 | 225.390.000,00 | 100,00 | 75,52 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 243.865.000 | 1 | 224.153.000,00 | 100,00 | 91,92 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 273.200.000 | 1 | 200.340.000,00 | 100,00 | 73,33 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 296.600.000 | 1 | 287.400.000,00 | 100,00 | 96,90 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 286.220.000 | 1 | 188.240.000,00 | 100,00 | 65,77 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 243.520.000 | 1 | 195.470.000,00 | 100,00 | 80,27 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 335.900.000 | 1 | 271.733.500,00 | 100,00 | 80,90 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 274.060.000 | 1 | 98.430.000,00 | 100,00 | 35,92 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 432.484.000 | 1 | 432.445.000 | 100,00 | 99,99 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 25.340.000 | 1 | 25.340.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 29.820.000 | 1 | 29.260.000,00 | 100,00 | 98,12 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 25.900.000 | 1 | 25.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 27.230.000 | 1 | 26.810.000,00 | 100,00 | 98,46 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 19.740.000 | 1 | 19.740.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 25.900.000 | 1 | 24.900.000,00 | 100,00 | 96,14 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 11.060.000 | 1 | 11.060.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 30.170.000 | 1 | 30.170.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 12.800.000 | 1 | 12.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 10.800.000 | 1 | 10.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 27.020.000 | 1 | 27.020.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 23.800.000 | 1 | 23.520.000,00 | 100,00 | 98,82 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 24.200.000 | 1 | 24.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 1,00 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 472.204.800 | 1 | 450.773.678 | 100,00 | 95,46 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 51.157.000 | 1 | 51.140.000,00 | 100,00 | 99,97 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 34.820.000 | 1 | 28.170.000,00 | 100,00 | 80,90 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 20.750.000 | 1 | 20.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 53.340.000 | 1 | 45.580.000,00 | 100,00 | 85,45 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 44.320.000 | 1 | 39.280.000,00 | 100,00 | 88,63 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 49.260.000 | 1 | 45.760.000,00 | 100,00 | 92,89 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 36.800.000 | 1 | 24.600.000,00 | 100,00 | 66,85 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 25.550.000 | 1 | 16.295.000,00 | 100,00 | 63,78 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 23.680.000 | 1 | 23.540.000,00 | 100,00 | 99,41 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 22.800.000 | 1 | 22.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 27.660.000 | 1 | 27.610.000,00 | 100,00 | 99,82 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 36.320.000 | 1 | 32.680.000,00 | 100,00 | 89,98 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 28.800.000 | 1 | 15.800.000,00 | 100,00 | 54,86 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 911,00 | 27.440.000 | 911 | 23.640.000,00 | 100,00 | 86,15 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 1,00 | 45.820.000 | 1 | 45.092.000 | 100,00 | 98,41 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 2.452.981.000 | 1 | 2.418.263.999 | 100,00 | 98,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 139.730.000 | 1 | 133.290.000,00 | 100,00 | 95,39 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 101.780.000 | 1 | 113.610.000,00 | 100,00 | 111,62 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 113.510.000 | 1 | 143.610.000,00 | 100,00 | 126,52 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 135.940.000 | 1 | 135.520.000,00 | 100,00 | 99,69 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 161.420.000 | 1 | 152.880.000,00 | 100,00 | 94,71 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 120.850.000 | 1 | 145.650.000,00 | 100,00 | 120,52 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 163.700.000 | 1 | 159.740.000,00 | 100,00 | 97,58 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 140.420.000 | 1 | 137.410.000,00 | 100,00 | 97,86 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 164.300.000 | 1 | 164.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 140.100.000 | 1 | 139.300.000,00 | 100,00 | 99,43 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 145.400.000 | 1 | 141.620.000,00 | 100,00 | 97,40 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 154.360.000 | 1 | 148.620.000,00 | 100,00 | 96,28 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 128.951.000 | 1 | 123.950.000,00 | 100,00 | 96,12 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1,00 | 161.150.000 | 1 | 151.150.000,00 | 100,00 | 93,79 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 1,00 | 24.534.959.880 | 1 | 24.085.928.300 | 100,00 | 98,17 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dokumen | 1,00 | 183.754.000 | 1 | 77.675.400 | 100,00 | 42,27 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 222.000.000 | 1 | 222.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 289.184.000 | 1 | 153.338.613,00 | 100,00 | 53,02 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 283.150.000 | 1 | 154.147.969,00 | 100,00 | 54,44 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 283.150.000 | 1 | 174.057.304,00 | 100,00 | 61,47 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 256.500.000 | 1 | 157.201.795,00 | 100,00 | 61,29 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 279.890.000 | 1 | 150.966.592,00 | 100,00 | 53,94 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 283.080.000 | 1 | 136.970.724,00 | 100,00 | 48,39 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 252.170.000 | 1 | 183.125.268,00 | 100,00 | 72,62 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 285.275.000 | 1 | 152.186.037,00 | 100,00 | 53,35 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 255.100.000 | 1 | 173.291.982,00 | 100,00 | 67,93 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 283.100.000 | 1 | 171.291.553,00 | 100,00 | 60,51 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 269.530.000 | 1 | 177.359.394,00 | 100,00 | 65,80 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 249.830.000 | 1 | 185.142.132,00 | 100,00 | 74,11 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayana pusk-esmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 250.280.000 | 1 | 154.054.179,00 | 100,00 | 61,55 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1,00 | 249.426.000 | 1 | 161.679.153,00 | 100,00 | 64,82 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 1,00 | 310.641.600 | 1 | 246.367.401 | 100,00 | 79,31 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 6.780.000 | 1 | 6.780.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 840.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 980.000 | 1 | 980.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 5.040.000 | 1 | 5.040.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 700.000 | 1 | 700.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 980.000 | 1 | 980.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 4.900.000 | 1 | 4.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 1.260.000 | 1 | 1.260.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 1,00 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 1,00 | 1.105.180.000 | 1 | 1.084.020.000 | 100,00 | 98,09 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 1,00 | 11.900.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 1,00 | 3.360.000 | 1 | 3.360.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 35,00 | 3.360.000 | 35 | 3.360.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 1,00 | 5.880.000 | 1 | 5.880.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 1,00 | 1.680.000 | 1 | 1.680.000,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan sistem informasi kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dokumen | 45,00 | 238.000.000 | 1 | 227.800.000 | 2,22 | 95,71 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Unit | 15,00 | 13.480.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 1,00 | 294.870.000 | 1 | 291.170.000 | 100,00 | 98,75 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Orang | 200,00 | 927.514.000 | 200 | 917.798.000 | 100,00 | 98,95 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Pengendalian dan penagwasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk maknan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dokumen | 1,00 | 379.131.000 | 1 | 362.226.000 | 100,00 | 95,54 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 120.800.000 | 1 | 120.600.000 | 100,00 | 99,83 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 11.490.000 | 1 | 11.490.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 9.680.000 | 1 | 9.680.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 17.270.000 | 1 | 17.270.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 7.510.000 | 1 | 5.590.000 | 100,00 | 74,43 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 6.390.000 | 1 | 5.490.000 | 100,00 | 85,92 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 2,00 | 4.690.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tidak Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 16.750.000 | 1 | 6.900.000 | 100,00 | 41,19 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 4.890.000 | 1 | 2.480.000 | 100,00 | 50,72 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 6.900.000 | 1 | 6.900.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 14.500.000 | 1 | 14.380.000 | 100,00 | 99,17 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 49.300.000 | 1 | 13.700.000 | 100,00 | 27,79 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1,00 | 8.750.000 | 1 | 8.750.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan/RS UD La Paloloi | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 3.775.000 | 1 | 3.775.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.450.000 | 1 | 2.450.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.480.000 | 1 | 3.370.000 | 100,00 | 96,84 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 864.000,00 | 12 | 864.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2248 | 12.894.288.021 | 2240 | 12.244.173.092 | 99,64 | 94,96 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 722.260.000 | 12 | 722.260.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.850.000 | 1 | 1.550.000 | 100,00 | 83,78 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 1.170.000 | 18 | 1.170.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang miliki daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 2.375.000 | 1 | 2.375.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 31 | 31.000.000 | 31 | 30.690.000 | 100,00 | 99,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 13.155.000 | 1 | 13.028.000 | 100,00 | 99,03 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 3.028.000 | 1 | 2.615.000 | 100,00 | 86,36 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 201.673.500 | 1 | 193.566.250 | 100,00 | 95,98 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 71.750.000 | 1 | 46.607.000 | 100,00 | 64,96 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12.500.000 | 12 | 4.175.000 | 100,00 | 33,40 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 739.077.000 | 12 | 703.210.767 | 100,00 | 95,15 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 30 | 51.000.000 | 30 | 46.700.000 | 100,00 | 91,57 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 15 | 75.000.000 | 15 | 40.350.000 | 100,00 | 53,80 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 3.500.000 | 100,00 | 43,75 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 600.000 | 12 | 159.285 | 100,00 | 26,55 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 1.103.330.000 | 12 | 974.850.000 | 100,00 | 88,36 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 8 | 50.000.000,00 | 8 | 34.674.650 | 100,00 | 69,35 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | 6 | 149.600.000 | 6 | 74.690.000 | 100,00 | 49,93 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 25.000.000 | 50 | 20.500.000 | 100,00 | 82,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 8.242.500 | 100,00 | 82,43 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pembangunan bangunan perkuatan tebing | Dinormalisasi/Direstorasi | KM | 3 | 2.314.300.000 | 3 | 2.284.474.306 | 100,00 | 98,71 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pembangunan sumur air tanah untuk air baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi | Titik | 3 | 470.100.000 | 3 | 465.219.926 | 100,00 | 98,96 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Pembangunan embung dan penampung air lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Unit | 6386 | 957.385.000 | 4500 | 950.935.816 | 70,47 | 99,33 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 1 | Peningkatan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 2 | 1.492.985.000 | 2 | 1.481.275.225 | 100,00 | 99,22 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pembangunan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun | km | 9,67 | 2.973.310.983 | 11,21 | 0 | 115,93 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Peningkatan bendung irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | Bendung | 3 | 520.100.000 | 3 | 515.991.987 | 100,00 | 99,21 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 32,91 | 7.425.960.350 | 32,91 | 7.307.942.735 | 100,00 | 98,41 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Rehablitasi bendung irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | Bendung | 10 | 792.070.000 | 0 | 784.949.260 | 0,00 | 99,10 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 6 | Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM | 85 | 334.450.000 | 0 | 331.050.000 | 0,00 | 98,98 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 1 | Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | Unit | 19 | 1.079.359.000 | 19 | 1.078.786.919 | 100,00 | 99,95 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | Liter/Detik | 30 | 1.103.397.000 | 0 | 1.099.270.858 | 0,00 | 99,63 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 3 | Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | 2 | 2.088.509.000 | 2 | 2.075.755.334 | 100,00 | 99,39 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 4 | Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR | 2 | 2.594.972.000 | 2 | 2.582.968.197 | 100,00 | 99,54 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun | Ton/hari | 50 | 2.203.060.000 | 50 | 2.151.143.284 | 100,00 | 97,64 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pembangunan sistem drainase lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | m | 3602 | 3.446.128.000 | 3602 | 3.440.172.747 | 100,00 | 99,83 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/kota | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar | Rumah Tangga | 219 | 2.437.175.000 | 219 | 2.390.742.120 | 100,00 | 98,09 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pengubahsesuaian bangunan edung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Bangunan Gedung | 5 | 1.293.020.000 | 5 | 1.289.509.373 | 100,00 | 99,73 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 10 | ########## | 10 | 19.165.929.198 | 100,00 | 99,87 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 1 | 144.548.000 | 1 | 39.674.300 | 100,00 | 27,45 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan instruktur/asesor/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor dan teknisi atau analis | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | Orang | 3 | 13.050.000 | 3 | 13.050.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor, teknisi atau analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | Orang | 5 | 158.949.000 | 5 | 146.299.000 | 100,00 | 92,04 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 1 | Penyediaan perangkat pendukung layanan infromasi jasa konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | Perangkat Pendukung | 30 | 35.800.000 | 30 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | Dokumen | 30 | 86.790.000 | 30 | 40.020.000 | 100,00 | 46,11 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Orang | 1 | 15.450.000 | 1 | 12.900.000 | 100,00 | 83,50 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Operasionalisasi layanan infromasi jasa konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | Layanan Informasi | 5 | 20.000.000 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis resiko jasa konstruksi | Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi | Dokumen | 100 | 23.730.000 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 5 | 36.910.000 | 5 | 31.750.000 | 100,00 | 86,02 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Paket Pekerjaan | 100 | 61.400.000 | 71 | 60.890.000 | 71,00 | 99,17 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib pemanfaatan produk | Bangunan Konstruksi | 100 | 25.600.000 | 100 | 18.130.000 | 100,00 | 70,82 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Lembaga | 5 | 35.600.000 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 4 | Pengawasan dan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi kabupaten/kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | Badan Usaha | 20 | 25.600.000 | 20 | 15.100.000 | 100,00 | 58,98 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pengelolaan leger jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 99.789.000 | 100,00 | 99,79 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Pembangunan jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | KM | 8 | 6.919.886.084 | 4,12 | 6.785.557.000 | 51,50 | 98,06 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 3 | Rekonstruksi jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | KM | 31 | 78.309.473.000 | 34,74 | 77.524.575.570 | 112,06 | 99,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | KM | 1238,6 | 60.000.000 | 1238,6 | 48.000.000 | 100,00 | 80,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 5 | Rehabilitasi jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | Jembatan | 1 | 593.944.000 | 1 | 593.900.000 | 100,00 | 99,99 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 6 | Pembangunan jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | Jembatan | 9 | 8.502.555.000 | 7 | 7.696.779.000 | 77,78 | 90,52 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 7 | Survey kondisi jalan/jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | KM | 1238,6 | 450.000.000 | 1238,6 | 448.965.000 | 100,00 | 99,77 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 910.675.000 | 3 | 794.239.267 | 100,00 | 87,21 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 2 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | Orang | 540 | 148.575.000 | 540 | 86.117.500 | 100,00 | 57,96 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan | 50 | 41.050.000 | 158 | 7.260.000 | 316,00 | 17,69 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Koordinasi pelaksanaan penataan ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 300 | 971.396.000 | 157 | 529.925.836 | 52,33 | 54,55 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 2 | Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiaatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 30 | 57.625.000 | 30 | 19.300.000 | 100,00 | 33,49 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | Pengawasan TURBINLAK dan pengawasan fungsi dan manfaat | Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | Dokumen | 1 | 40.600.000 | 1 | 10.200.000 | 100,00 | 25,12 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 6 | 16.210.000 | 10 | 11.060.000 | 166,67 | 68,23 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara | 3 | 5.100.000 | 1 | 2.040.000 | 33,33 | 40,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 8.500.000 | 1 | 5.780.000 | 100,00 | 68,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | 1535 | 11.948.930.000 | 2621 | 10.951.380.474 | 170,75 | 91,65 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 300 | 896.630.000 | 481 | 822.509.000 | 160,33 | 91,73 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 1 | 7.115.000 | 1 | 7.005.000 | 100,00 | 98,45 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabuoaten/kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 10 | 10.000.000 | 38 | 0 | 380,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Unit | 1 | 35.100.000 | 1 | 34.914.540 | 100,00 | 99,47 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | Unit | 3500 | 4.330.000 | 3077 | 4.330.000 | 87,91 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 3 | Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dokumen | 3500 | 75.600.000 | 5255 | 75.600.000 | 150,14 | 100,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 4 | Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 3 | 16.580.000 | 3 | 16.330.000 | 100,00 | 98,49 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 5 | Indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Laporan | 14 | 9.890.000,00 | 22 | 7.340.000 | 157,14 | 74,22 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 6 | Pemeliharaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Unit | 11 | 32.120.000 | 35 | 30.090.000 | 318,18 | 93,68 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 7 | Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 20 | 33.910.000 | 31 | 8.900.000 | 155,00 | 26,25 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 8 | Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 4 | 12.990.000 | 10 | 9.710.000 | 250,00 | 74,75 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 135.400.000 | 8 | 123.020.000 | 200,00 | 90,86 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 8.755.000 | 2 | 2.060.000 | 50,00 | 23,53 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | Laporan | 12 | 553.000.000 | 12 | 478.317.802 | 100,00 | 86,50 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andallalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Laporan | 4 | 9.460.000 | 9 | 0 | 225,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tercapai |
| 2 | Peningkatan kompetensi perihal andallalin | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | Orang | 2 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 3 | Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andallalin | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | Laporan | 10 | 10.400.000 | 3 | 3.400.000 | 30,00 | 32,69 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 2 | 1.155.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | dan Perhubungan | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 2 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan | Tidak Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 10.928.000 | 2 | 9.778.500 | 100,00 | 89,48 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 1.287.000 | 5 | 1.256.000 | 100,00 | 97,59 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 18 | 1.317.000 | 18 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2.400 | 9.113.786.742 | 2231 | 8.470.301.574 | 92,96 | 92,94 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 132.770.000 | 12 | 132.770.000 | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 18 | 7.915.500 | 18 | 6.062.000 | 100,00 | 76,58 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 3.455.000 | 2 | 3.285.000 | 100,00 | 95,08 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 8.432.000 | 5 | 8.076.000 | 100,00 | 95,78 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 21.386.000 | 5 | 19.749.000 | 100,00 | 92,35 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 9.930.000 | 5 | 8.430.000 | 100,00 | 84,89 | Satuan Polisi Pamong Praja, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 140.920.000 | 12 | 97.071.585 | 100,00 | 68,88 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 4.224.000 | 12 | 2.475.000 | 100,00 | 58,59 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 5.699.650.000 | 12 | 5.574.795.000 | 100,00 | 97,81 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 24 | 110.650.000 | 24 | 104.285.000 | 100,00 | 94,25 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tidak Tercapai |
| | Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 6 | 22.490.000 | 6 | 21.290.000 | 100,00 | 94,66 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | 478 | 484.000.000 | 478 | 392.600.000 | 100,00 | 81,12 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyusunan SOP ketertiban dan ketentraman masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pecegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | laporan | 360 | 27.690.000 | 360 | 27.690.000 | 100,00 | 100,00 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 100 | 27.000.000 | 100 | 26.920.000 | 100,00 | 99,70 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Sosialisasi penegakan peraturan d aerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha | Laporan | 86 | 91.348.878 | 69 | 84.010.000 | 80,23 | 91,97 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 14 | 42.208.384 | 13 | 25.862.000 | 92,86 | 61,27 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Laporan | 14 | 8.015.000 | 9 | 4.060.000 | 64,29 | 50,66 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tidak Tercapai |
| | Pengembangan kapasitas dan karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | Laporan | 5 | 5.182.000 | 5 | 4.240.000 | 100,00 | 81,82 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 365 | 13.940.000 | 365 | 13.940.000 | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |
| | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | 12 | 17.000.000 | 12 | 7.420.000 | 100,00 | 43,65 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | 12 | 24.408.000 | 12 | 24.182.550 | 100,00 | 99,08 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | 103 | 1.800.000 | 103 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Dokumen | 12 | 12.290.000 | 12 | 10.060.000 | 100,00 | 81,86 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penilaian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | Dokumen | 14 | 7.100.000 | 14 | 7.100.000 | 100,00 | 100,00 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Orang | 500 | 20.476.000 | 2345 | 18.216.000 | 469,00 | 88,96 | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 1.925.000 | 12,00 | 1.925.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.755.000 | 1,00 | 1.755.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.910.000 | 1,00 | 1.880.000 | 100,00 | 98,43 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.880.000 | 1,00 | 1.862.000 | 100,00 | 99,04 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.930.000 | 1,00 | 1.903.000 | 100,00 | 98,60 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.825.000 | 1,00 | 1.806.000 | 100,00 | 98,96 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 1.785.000 | 4,00 | 1.773.000 | 100,00 | 99,33 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 658 | 4.304.004.952 | 658,00 | 3.864.491.523 | 100,00 | 89,79 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 132.990.000 | 11,00 | 132.990.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.960.000 | 1,00 | 1.960.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 3.825.000 | 18,00 | 3.825.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 4 | 1.100.000 | 4,00 | 1.100.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 3 | 11.125.000 | 3,00 | 11.125.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 2 | 13.000.000 | 2,00 | 13.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 11 | 1.780.000 | 11,00 | 1.593.000 | 100,00 | 89,49 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 44.603.500 | 5,00 | 41.923.250 | 100,00 | 93,99 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6 | 5.111.400 | 6,00 | 5.051.400 | 100,00 | 98,83 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 11 | 20.215.000 | 11,00 | 20.215.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 146.147.500 | 12,00 | 100.992.754 | 100,00 | 69,10 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 50.500.000 | 1,00 | 49.650.000 | 100,00 | 98,32 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 2.600.000 | 12,00 | 2.400.000 | 100,00 | 92,31 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 231.570.000 | 12,00 | 219.670.000 | 100,00 | 94,86 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 3 | 15.000.000 | 3,00 | 14.875.000 | 100,00 | 99,17 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | 3,00 | 19.670.000 | 100,00 | 98,35 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 10.500.000 | 20,00 | 9.932.500 | 100,00 | 94,60 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 22.500.750 | 1,00 | 7.284.600 | 50,00 | 32,37 | **Dinas Sosial** | Tidak Tercapai |
| | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan osial kecamatan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 14 | 130.319.000 | 14,00 | 130.035.245 | 100,00 | 99,78 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Peningkatan kemampuan potensi usmber kesejhateraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga | 3 | 102.112.000 | 3,00 | 101.872.000 | 100,00 | 99,76 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Sertifikat | 15 | 24.809.000 | 15,00 | 22.259.000 | 100,00 | 89,72 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Orang | 40.000 | 618.244.000 | ###### | 598.803.075 | 100,00 | 96,86 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Keluarga | 10.000 | 31.499.500 | ###### | 29.098.000 | 100,00 | 92,38 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluaarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | 21.590 | 673.749.904 | ###### | 668.723.904 | 100,00 | 99,25 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 408.638.610 | 20,00 | 368.550.000 | 100,00 | 90,19 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Unit | 2 | 19.542.000 | 2,00 | 19.401.600 | 100,00 | 99,28 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 7.000.000 | 50,00 | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Penyediaan sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 60 | 11.000.000 | 60,00 | 11.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peynyediaan alat bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesua kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 34 | 44.000.000 | 22,00 | 37.350.000 | 64,71 | 84,89 | **Dinas Sosial** | Tidak Tercapai |
| | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 49.450.000 | 50,00 | 49.207.200 | 100,00 | 99,51 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 27.650.000 | 100,00 | 25.555.000 | 100,00 | 92,42 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 1.250.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Dinas Sosial** | Tidak Tercapai |
| | Pemberian layanan data dan pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 5.975.500 | 50,00 | 5.827.000 | 100,00 | 97,51 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 23.276.000 | 1,00 | 23.276.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengung-sian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 24.550.000 | 100,00 | 24.400.000 | 100,00 | 99,39 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | penyediaan sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tang-gap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabu-paten/Kota | Orang | 100 | 53.625.000 | 100,00 | 53.463.750 | 100,00 | 99,70 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Pelayanan dukungan psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 9.400.000 | 100,00 | 9.400.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koodinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosial-isasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabu-paten/Kota | Kampung | 14 | 14.545.000 | 14,00 | 14.530.000 | 100,00 | 99,90 | **Dinas Sosial** | Tercapai |
| | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabu-paten/Kota | Orang | 30 | 205.035.000 | 30,00 | 204.203.900 | 100,00 | 99,59 | **Dinas Sosial** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 3.533.000 | 1 | 3.483.000 | 100 | 98,58 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.287.500 | 1 | 1.087.500 | 100 | 47,54 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.155.000 | 1 | 1.480.000 | 100 | 68,68 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.025.000 | 1 | 1.575.000 | 100 | 77,78 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.990.000 | 1 | 1.990.000 | 100 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12 | 2.100.000 | 12 | 2.100.000 | 100 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 2.825.000 | 4 | 2.825.000 | 100 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2256 | 7.571.258.648 | 2256 | 6.974.314.842 | 100 | 92,12 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 174.130.000 | 12 | 159.010.000 | 100 | 91,32 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup | |
| 3 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.385.000 | 1 | 1.160.000 | 100 | 83,75 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 2.305.000 | 18 | 524.000 | 100 | 22,73 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 100 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 2.050.000 | 12 | 1.997.000 | 100 | 97,41 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 4.737.500 | 1 | 4.167.000 | 100 | 87,96 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 5.995.000 | 1 | 5.730.000 | 100 | 95,58 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 3 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 13.349.000 | 1 | 12.727.000 | 100 | 95,34 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 4 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 30.627.500 | 1 | 28.342.500 | 100 | 92,54 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 18.830.000 | 1 | 18.522.000 | 100 | 98,36 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 6 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 7.430.000 | 1 | 7.430.000 | 100 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 7 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 197.030.000 | 12 | 136.081.810 | 100 | 69,07 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 35.000.000 | 2 | 34.000.000 | 100 | 97,14 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 51.240.000 | 1 | 47.800.000 | 100 | 93,29 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup | |
| 3 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 6 | 327.100.000 | 5 | 305.940.000 | 83 | 93,53 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 4 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 10.100.000 | 2 | 6.350.000 | 100 | 62,87 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 5 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 317.000.000 | 12 | 299.590.000 | 100 | 94,51 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 9.780.000 | 100 | 97,80 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 38.199.996 | 2 | 36.999.000 | 100 | 96,86 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 19.963.000 | 100 | 99,82 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 10.721.000 | 1 | 5.830.000 | 100 | 54,38 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | Orang | 1 | 24.750.000 | 1 | 24.750.000 | 100 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | Unit Rumah | 20 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 100,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup | |
| 1 | Penatausahaan serah terima bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 150 | 3.305.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 51,44 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tidak Tercapai |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | 10 | 17.869.500 | 8 | 2.060.000 | 80 | 11,53 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Laporan | 12 | 12.337.000 | 12 | 0 | 100 | 0,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawaan oemukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Laporan | 1 | 29.180.000 | 1 | 3.870.000 | 100 | 13,26 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyusunan /review/legalisasi kebijakan bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | Dokumen | 1 | 7.176.000 | 1 | 4.569.500 | 100 | 63,68 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Unit Rumah | 300 | 335.395.400 | 124 | 313.129.500 | 41 | 93,36 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tidak Tercapai |
| 2 | Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 49.831.230 | 100 | 99,66 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Rumah | 100 | 330.687.000 | 124 | 327.895.000 | 124 | 99,16 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan | 12 | 15.445.000 | 12 | 850.000 | 100 | 5,50 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 2 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 16.850.000 | 100 | 67,40 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Penyusunan RPPLH kabupaten/kota | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | Dokuman | 1 | 119.455.000 | 1 | 96.880.000 | 100 | 81,10 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Dokumen | 1 | 8.152.000 | 1 | 5.176.000 | 100 | 63,49 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | 1 | 130.000.000 | 1 | 129.112.425 | 100 | 99,32 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 2 | 13.599.000 | 2 | 13.466.000 | 100 | 99,02 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Dokumen | 5 | 8.152.000 | 4 | 5.176.000 | 80 | 63,49 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 9.156.000 | 2 | 7.576.000 | 100,00 | 82,74 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.989.000 | 1 | 3.989.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.747.000 | 1 | 3.707.000 | 100,00 | 98,93 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | **Pintu dan Ketenagakerjaan** | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.549.000 | 1 | 3.549.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 9.498.000 | 1 | 9.498.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 4.960.000 | 12 | 4.960.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 1.115 | 7.074.460.766 | 1042 | 6.036.960.345 | 93,45 | 85,33 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 181.390.000 | 10 | 129.360.000 | 83,33 | 71,32 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 12 | 5.014.000 | 11 | 0 | 91,67 | 0,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 4.059.000 | 4 | 4.059.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1.550.000 | 1 | 1.550.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 115.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tidak Tercapai |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 2 | 67.100.000 | 1 | 10.850.000 | 50,00 | 16,17 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pintu dan Ketenagakerjaan | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 21.814.000 | 12 | 7.839.000 | 100,00 | 35,94 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 65.361.860 | 0,99 | 53.522.000 | 99,00 | 81,89 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 221.827.000 | 0,92 | 179.625.000 | 92,00 | 80,98 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 10.300.000 | 1 | 8.450.000 | 100,00 | 82,04 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 80.000.000 | 12 | 63.600.000 | 100,00 | 79,50 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 157.110.000 | 1 | 117.753.340 | 100,00 | 74,95 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 12 | 642.510.000 | 9 | 546.700.000 | 75,00 | 85,09 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pintu dan Ketenagakerjaan | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 264.000.000 | 12 | 242.000.000 | 100,00 | 91,67 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 357.210.000 | 12 | 284.900.000 | 100,00 | 79,76 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 12 | 76.013.235 | 10 | 68.510.500 | 83,33 | 90,13 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 47.763.290 | 3 | 47.725.000 | 100,00 | 99,92 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | Dokumen | 1 | 12.675.000 | 1 | 12.655.000 | 100,00 | 99,84 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kegiatan Usaha. | 2 | 57.655.000 | 2 | 30.090.000 | 100,00 | 52,19 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Pelaku Usaha | 120 | 209.950.000 | 150 | 127.940.000 | 125,00 | 60,94 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha | 60 | 114.135.000 | 151 | 110.442.000 | 251,67 | 96,76 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kegiatan Usaha. | 50 | 32.449.000 | 50 | 32.426.500 | 100,00 | 99,93 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Pelaku Usaha | 50 | 29.161.000 | 50 | 27.011.000 | 100,00 | 92,63 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha | 3 | 46.015.000 | 3 | 45.675.000 | 100,00 | 99,26 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen | 4 | 215.735.000 | 4 | 10.600.000 | 100,00 | 4,91 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Orang | 23 | 31.760.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tidak Tercapai |
| | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Orang | 50 | 1.937.000 | 50 | 1.878.000 | 100,00 | 96,95 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah pelaksanaan Job Fair | Kali | 1 | 50.000.000 | 1 | 48.472.000 | 100,00 | 96,94 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan | 6 | 37.826.000 | 6 | 23.286.000 | 100,00 | 61,56 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dicegah | Perkara | 5 | 18.005.000 | 5 | 6.251.000 | 100,00 | 34,72 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain | Dokumen | 1 | 5.920.000 | 1 | 5.120.000 | 100,00 | 86,49 | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2.344.000 | 2 | 1.981.000 | 100 | 84,51 | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.356.000 | 1 | 2.355.000 | 100 | 99,96 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.648.000 | 1 | 1.850.000 | 100 | 69,86 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 2.566.000 | 1 | 2.190.000 | 100 | 85,35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dokumen | 14 | 3.582.107.852 | 14 | 3.263.234.992 | 100 | 91,10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 116.600.000 | 12 | 113.875.450 | 100 | 97,66 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 4.760.500 | 100 | 95,21 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1.630.000 | 1 | 1.430.000 | 100 | 87,73 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen | 18 | 4.000.000 | 18 | 4.000.000 | 100 | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen | 1 | 924.500 | 1 | 821.000 | 100 | 88,80 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Steel | 43 | 10.000.000 | 43 | 10.000.000 | 100 | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jenis | 5 | 13.415.500 | 5 | 8.067.750 | 100 | 60,14 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jenis | 5 | 60.000.000 | 5 | 57.100.000 | 100 | 95,17 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket peralatan rumah tangga | Jenis | 12 | 14.000.000 | 12 | 10.199.500 | 100 | 72,85 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jenis | 11 | 50.007.500 | 11 | 27.503.500 | 100 | 55,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jenis | 5 | 25.000.000 | 5 | 23.500.000 | 100 | 94,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 16.000.000 | 100 | 80,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 100 | 307.930.000 | 100 | 238.441.706 | 100 | 77,43 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jenis | 6 | 716.200.000 | 6 | 664.220.000 | 100 | 92,74 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 100 | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan aset tetap lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 138 | 70.000.000 | 138 | 68.367.000 | 100 | 97,67 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 60.000.000 | 2 | 59.890.000 | 100 | 99,82 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 154.640.000 | 1 | 139.401.492 | 100 | 90,15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan perlindunagnd an kesiapsiagan terhadap bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Unit | 1 | 87.800.000 | 1 | 87.640.250 | 100 | 99,82 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |
| | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Orang | 100 | 51.200.000 | 100 | 51.200.000 | 100 | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | 2 | 45.250.000 | 2 | 44.367.500 | 100 | 98,05 | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | Tercapai |
| | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 200 | 149.050.000 | 200 | 140.475.000 | 100 | 94,25 | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | Tercapai |
| | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | 1 | 58.090.500 | 1 | 26.309.500 | 100 | 45,29 | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | Tercapai |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 4.500.000 | 3 | 4.200.000 | 100 | 93,33 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100 | 37,50 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD P | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.200.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2.900.000 | 1 | 2.000.000 | 100 | 68,97 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 924 | 6.080.300.473 | 924 | 5.581.909.133 | 100 | 91,80 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 163.200.000 | 12 | 163.200.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 3.406.300 | 1 | 3.406.300 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 13.140.000 | 4 | 13.140.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 31 | 8.000.000 | 31 | 8.000.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 6.452.400 | 1 | 5.270.000 | 100 | 81,68 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.845.000 | 1 | 8.245.000 | 100 | 93,22 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 61.182.000 | 1 | 59.699.000 | 100 | 97,58 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 16.541.500 | 2 | 16.541.500 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 32.000.000 | 12 | 32.000.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 182.085.000 | 12 | 180.238.545 | 100 | 98,99 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 3.000.000 | 3 | 0 | 100 | 0,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 202.550.000 | 12 | 202.050.000 | 100 | 99,75 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 15.000.000 | 2 | 13.944.000 | 100 | 92,96 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 3 | 9.400.000 | 3 | 6.500.000 | 100 | 69,15 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 9.983.050 | 100 | 99,83 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 21.195.000 | 1 | 21.195.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 15.495.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Organisasi | 1 | 303.150.000 | 1 | 280.000.000 | 100 | 92,36 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | Lembaga | 100 | 48.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 93,75 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | 1 | 18.000.000 | 1 | 15.000.000 | 100 | 83,33 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 93.750.000 | 1 | 93.750.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 40 | 10.700.000 | 40 | 5.300.000 | 100 | 49,53 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Layanan | 1 | 248.500.000 | 1 | 226.599.500 | 100 | 91,19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 100 | 63.750.000 | 100 | 56.610.000 | 100 | 88,80 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 40 | 14.950.000 | 40 | 14.900.000 | 100 | 99,67 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 42.200.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | Lembaga | 1 | 13.950.000 | 1 | 13.950.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Layanan | 1 | 64.160.000 | 1 | 64.160.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 16.280.000 | 1 | 16.280.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organisasi | 45 | 22.750.000 | 45 | 22.750.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 351.720.000 | 1 | 351.720.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 1 | 33.210.000 | 1 | 33.210.000 | 100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 92.800.000 | 1 | 92.487.038 | 100 | 99,66 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 169.600.000 | 1 | 169.350.000 | 100 | 99,85 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA | Orang | 45 | 22.150.000 | 45 | 22.050.000 | 100 | 99,55 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang meemrlukan perlindungan khusus | Layanan | 1 | 53.760.000 | 1 | 53.685.000 | 100 | 99,86 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | Orang | 1 | 28.760.000 | 1 | 28.760.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 25.450.000 | 1 | 25.350.000 | 100 | 99,61 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Dokumen | 13 | 60.000.000 | 13 | 60.000.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Laporan | 2 | 1.750.000.000 | 3 | 276.400.000 | 150 | 15,79 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Laporan | 14 | 210.000.000 | 14 | 210.000.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dokumen | 1 | 160.000.000 | 1 | 159.850.000 | 100 | 99,91 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Orang | 206 | 370.800.000 | 206 | 370.800.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Laporan | 12 | 862.400.000 | 12 | 859.679.300 | 100 | 99,68 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 12 | 30.500.000 | 12 | 28.800.000 | 100 | 94,43 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Orang | 1941 | 691.407.200 | 1941 | 539.079.322 | 100 | 77,97 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Keluarga Berencana | |
| | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Laporan | 2 | 809.980.000 | 2 | 638.940.000 | 100 | 78,88 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |
| | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 12 | 23.550.000 | 12 | 23.400.000 | 100 | 99,36 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Laporan | 12 | 775.250.000 | 12 | 775.250.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | Unit | 14 | 311.900.000 | 14 | 244.650.000 | 100 | 78,44 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksep-tor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Orang | 9060 | 1.924.020.000 | 9060 | 1.924.020.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Organisasi | 104 | 57.020.000 | 104 | 57.020.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 2.400.000 | 5 | 2.340.000 | 100,00 | 97,50 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.020.000 | 100,00 | 97,14 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.400.000 | 1 | 2.340.000 | 100,00 | 97,50 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.020.000 | 100,00 | 97,14 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.650.000 | 1 | 1.620.000 | 100,00 | 98,18 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 2.940.000 | 100,00 | 98,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 5.700.000 | 4 | 5.580.000 | 100,00 | 97,89 | Dinas Kependuduka | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | n dan Catatan Sipil | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 854 | 5.359.725.214 | 865 | 5.050.725.136 | 101,29 | 94,23 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 138.600.000 | 12 | 129.800.000 | 100,00 | 93,65 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 12 | 3.900.000 | 12 | 3.900.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 9.405.000 | 12 | 9.405.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 300.000 | 2 | 270.000 | 100,00 | 90,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 61 | 21.000.000 | 62 | 21.000.000 | 101,64 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegwaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 61 | 2.365.000 | 62 | 2.365.000 | 101,64 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 61 | 49.150.000 | 62 | 49.150.000 | 101,64 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 5.652.900 | 3 | 5.548.000 | 100,00 | 98,14 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyediaan pelatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 30.700.000 | 4 | 24.600.000 | 100,00 | 80,13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 4 | 8.181.000 | 4 | 7.330.000 | 100,00 | 89,60 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 32.546.756 | 1 | 29.713.756 | 100,00 | 91,30 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | 2 | 5.699.000 | 100,00 | 94,98 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 17.100.000 | 12 | 17.100.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 58.130.000 | 12 | 55.210.283 | 100,00 | 94,98 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Dukungan pelaksanaan sistem peemrintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 12 | 3.600.000 | 12 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penagadaan perlatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 79.000.000 | 5 | 76.870.000 | 100,00 | 97,30 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 24 | 201.650.000 | 24 | 162.490.000 | 100,00 | 80,58 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 27.000.000 | 2 | 26.824.000 | 100,00 | 99,35 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 4 | 14.975.000 | 4 | 10.550.000 | 100,00 | 70,45 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 100 | 5.539.000 | 45 | 4.808.000 | 45,00 | 86,80 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dokumen | 95040 | 33.463.500 | 93135 | 25.610.500 | 98,00 | 76,53 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 1400 | 31.659.600 | 1588 | 31.320.000 | 113,43 | 98,93 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | Laporan | 3 | 359.960.000 | 3 | 349.179.440 | 100,00 | 97,01 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | Laporan | 2 | 19.530.000 | 2 | 10.917.653 | 100,00 | 55,90 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tercapai |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dokumen | 22680 | 30.599.500 | 15117 | 29.867.500 | 66,65 | 97,61 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tidak Tercapai |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Layanan | 114 | 8.500.000 | 20 | 0 | 17,54 | 0,00 | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | 1400 | 16.320.000 | 1352 | 16.320.000 | 96,57 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | Laporan | 2 | 21.030.000 | 2 | 17.949.800 | 100,00 | 85,35 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Dokumen | 12 | 7.877.000 | 12 | 7.811.000 | 100,00 | 99,16 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan" | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 5 | 17.460.000 | 4 | 14.069.300 | 80,00 | 80,58 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 1 | 156.470.000 | 1 | 145.205.000 | 100,00 | 92,80 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 5 | 21.920.000 | 2 | 21.162.000 | 40,00 | 96,54 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Dokumen | 20 | 21.546.000 | 19 | 17.541.000 | 95,00 | 81,41 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.160.000 | 100,00 | 96,00 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Dokumen | 2 | 3.134.000 | 2 | 3.087.500 | 100,00 | 98,52 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Tercapai |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1.800.000 | 2 | 1.800.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 1.280.000 | 2 | 1.280.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 16 | 2.400.000 | 16 | 2.400.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 714 | 4.581.670.460 | 714 | 4.180.906.505 | 100,00 | 91,25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 95.260.000 | 11 | 95.260.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 5 | 1.200.000 | 5 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 2.000.000 | 18 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 800.000 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 4 | 870.000 | 4 | 800.000 | 100,00 | 91,95 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 25 | 17.500.000 | 25 | 16.903.000 | 100,00 | 96,59 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 8.963.000 | 12 | 3.232.000 | 100,00 | 36,06 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 13.500.845 | 12 | 9.269.500 | 100,00 | 68,66 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 28.526.000 | 12 | 22.555.200 | 100,00 | 79,07 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 25.256.400 | 12 | 9.612.000 | 100,00 | 38,06 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 5 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 3 | 28.000.000 | 2 | 11.101.000 | 66,67 | 39,65 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 10.500.000 | 5 | 8.895.000 | 41,67 | 84,71 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 24 | 168.196.000 | 20 | 114.283.864 | 83,33 | 67,95 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 6 | 39.000.000 | 6 | 35.700.000 | 100,00 | 91,54 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 8 | 126.500.000 | 8 | 119.340.000 | 100,00 | 94,34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 1.870.000 | 12 | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 135.270.000 | 12 | 129.390.000 | 100,00 | 95,65 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 35 | 20.000.000 | 35 | 9.060.000 | 100,00 | 45,30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 2 | 25.000.000 | 2 | 8.855.000 | 100,00 | 35,42 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 1 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | Desa | 56 | 15.950.000 | 56 | 15.000.000 | 100,00 | 94,04 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 2 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Desa | 80 | 19.730.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 3 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 80 | 5.100.000 | 80 | 5.100.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 4 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | Unit | 1 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 31.000.000 | 2 | 31.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 2 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Dokumen | 1 | 21.896.000 | 1 | 21.560.000 | 100,00 | 98,47 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Dokumen | 5 | 43.700.000 | 4 | 25.800.000 | 80,00 | 59,04 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Dokumen | 1 | 9.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Dokumen | 5 | 11.950.000,0 | 3 | 0 | 60,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 2 | 8.400.000 | 1 | 3.400.000 | 50,00 | 40,48 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Orang | 80 | 197.850.000 | 80 | 175.000.000 | 100,00 | 88,45 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 6 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 3 | 65.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0,00 | 76,92 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 7 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | 1 | 36.146.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 8 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 13.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 9 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Orang | 160 | 75.000.000 | 80 | 50.000.000 | 50,00 | 66,67 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tidak Tercapai |
| 10 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Desa | 49 | 101.241.000 | 46 | 83.316.856 | 93,88 | 82,30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 11 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 2 | 67.110.000 | 2 | 56.300.000 | 100,00 | 83,89 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 1 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | 1 | 6.920.000 | 1 | 5.920.000 | 100,00 | 85,55 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | 2 | 22.450.000 | 2 | 21.150.000 | 100,00 | 94,21 | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa** | Tercapai |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 80 | 14.740.000 | 80 | 13.500.000 | 100,00 | 91,59 | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa** | Tercapai |
| 4 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Unit | 80 | 20.100.000 | 100 | 19.600.000 | 125,00 | 97,51 | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Dokumen | 2 | 13.100.000 | 2 | 13.100.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| 6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dokumen | 8 | 1.412.250.000 | 8 | 1.349.360.740 | 100,00 | 95,55 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tercapai |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1.355.000 | 2 | 835.000 | 100 | 61,62 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.450.000 | 1 | 850.000 | 100 | 58,62 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.475.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.475.000 | 1 | 1.475.000 | 100 | 100,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Statistik dan Persandian | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.446.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 1.500.000 | 12 | 230.000 | 100 | 15,33 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 812 | 5.157.448.799 | 812 | 4.735.748.393 | 100 | 91,82 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 154.220.000 | 12 | 147.970.000 | 100 | 95,95 | Dinas Komuniskasi, Informatika, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | **Statistik dan Persandian** | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 1.755.000 | 3 | 0 | 100 | 0,00 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 1.180.000 | 18 | 1.000.000 | 100 | 84,75 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 1.280.000 | 2 | 1.280.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 6.120.000 | 12 | 6.120.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka-pannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 58 | 11.250.000 | 58 | 11.250.000 | 100 | 100,00 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepega-waian | Jumlah Dokumen Hasil Koordi-nasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 3.130.000 | 12 | 2.040.000 | 100 | 65,18 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Penyediaan Komponen In-stalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen In-stalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dise-diakan | Paket | 1 | 3.930.000 | 1 | 2.245.500 | 100 | 57,14 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 4.238.500 | 1 | 4.225.000 | 100 | 99,68 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 33.327.000 | 1 | 31.817.000 | 100 | 95,47 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise-diakan | Paket | 2 | 12.345.500 | 2 | 11.613.500 | 100 | 94,07 | **Dinas Komuniskasi, Informatika,** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Statistik dan Persandian | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100 | 66,67 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 242.004.000 | 12 | 149.842.568 | 100 | 61,92 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Me-sin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 100 | 100,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Surat Me-nyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 5.500.000 | 12 | 3.300.000 | 100 | 60,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 600.000 | 12 | 148.895 | 100 | 24,82 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 160.060.000 | 12 | 153.740.000 | 100 | 96,05 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 90 | 80.700.000 | 90 | 39.587.000 | 100 | 49,05 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha-bilitasi | Unit | 1 | 22.000.000 | 1 | 21.173.179 | 100 | 96,24 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komu-nikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengel-olaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 12 | 120.920.000 | 12 | 100.294.000 | 100 | 82,94 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Pengelolaan Media Komu-nikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksa-naan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 12 | 226.440.000 | 12 | 171.215.000 | 100 | 75,61 | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | Tercapai |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pela-yanan Informasi Publik | Dokumen | 12 | 17.600.000 | 12 | 17.245.000 | 100 | 97,98 | **Dinas Komuniskasi, Informatika,** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Statistik dan Persandian | |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerinta-han Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksa-naan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 5.400.000 | 12 | 2.000.000 | 100 | 37,04 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Unit | 40 | 1.119.130.000 | 40 | 437.433.000 | 100 | 39,09 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penye-lenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Dokumen | 12 | 5.000.000.000 | 12 | 4.997.583.101 | 100 | 99,95 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | PD | 40 | 400.000.000 | 40 | 295.000.000 | 100 | 73,75 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Unit | 7 | 290.821.603 | 7 | 288.673.650 | 100 | 99,26 | Dinas Komuniskasi, Informatika, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Statistik dan Persandian | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 12 | 33.293.000 | 12 | 24.170.000 | 100 | 72,60 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen | 2 | 1.158.000 | 2 | 0 | 100 | 0,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 100 | 100,00 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | PD | 40 | 27.150.000 | 40 | 23.910.000 | 100 | 88,07 | Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Tercapai |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2.810.000 | | 2.810.000 | 0,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.630.000 | | 2.630.000 | 0,00 | 100,00 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tidak Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 930.000 | | 930.000 | 0,00 | 100,00 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tidak Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.675.000 | | 2.675.000 | 0,00 | 100,00 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tidak Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.125.000 | | 1.125.000 | 0,00 | 100,00 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tidak Tercapai |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 2.825.000 | | 2.825.000 | 0,00 | 100,00 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tidak Tercapai |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 3.080.000 | | 3.080.000 | 0,00 | 100,00 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1.274 | 166.710.000 | 1274 | 166.560.000 | 100,00 | 99,91 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 12 | 2.260.000 | 12 | 2.212.000 | 100,00 | 97,88 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 19 | 2.500.000 | 19 | 2.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 92.832.500 | 1 | 92.369.000 | 100,00 | 99,50 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 21.100.000 | 1 | 21.100.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 335.050.000 | 1 | 310.660.425 | 100,00 | 92,72 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 12 | 54.000.000 | 12 | 54.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 486.000.000 | 2 | 484.150.000 | 100,00 | 99,62 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tercapai |
| 1 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya | Orang | 1 | 367.600.000 | 1 | 355.640.000 | 100,00 | 96,75 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 3 | 12.000.000 | 3 | 7.600.000 | 100,00 | 63,33 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tercapai |
| 1 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Organsiasi | 40 | 979.500.000 | 40 | 967.850.000 | 100,00 | 98,81 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tercapai |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha | Orang | 100 | 42.650.000 | 90 | 32.000.000 | 90,00 | 75,03 | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cabang olahraga kependidikan yang mendapatkan pembinaan | Cabang Olaharaga | 7 | 110.960.000 | 7 | 100.655.000 | 100,00 | 90,71 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah | Cabor | 7 | 480.000.000 | 7 | 479.950.000 | 100,00 | 99,99 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Tercapai |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2.525.000 | 2 | 2.525.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.525.000 | 1 | 2.525.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.325.000 | 1 | 1.325.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2.525.000 | 2 | 2.525.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 1.085.000 | 4 | 1.085.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 742 | 4.658.219.445 | 742 | 4.417.426.017 | 100,00 | 94,83 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 128.750.000 | 12 | 128.590.000 | 100,00 | 99,88 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 8.000.000 | 18 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 | 10.196.000 | 6 | 10.196.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 74.753.468 | 5 | 69.586.000 | 100,00 | 93,09 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 15 | 8.738.600 | 15 | 8.438.600 | 100,00 | 96,57 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | 0,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 131.895.000 | 12 | 113.961.453 | 100,00 | 86,40 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3 | 132.000.000 | 3 | 115.650.000 | 100,00 | 87,61 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 20 | 150.040.000 | 20 | 120.790.000 | 100,00 | 80,51 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 13 | 18.000.000 | 13 | 17.550.000 | 100,00 | 97,50 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 700.000 | 3 | 600.000 | 100,00 | 85,71 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 19.421.500 | 100,00 | 97,11 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 209.680.000 | 12 | 207.680.000 | 100,00 | 99,05 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 30.000.000 | 2 | 29.749.000 | 200,00 | 99,16 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 50 | 30.000.000 | 50 | 27.592.000 | 100,00 | 91,97 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | layanan | 1 | 5.000.000 | 1 | 4.942.000 | 100,00 | 98,84 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | 30 | 19.880.000 | 20 | 510.000 | 66,67 | 2,57 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapa Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 260 | 64.220.000 | 195 | 31.710.000 | 75,00 | 49,38 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 4 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | Layanan | 5 | 45.700.000 | 4 | 27.900.000 | 80,00 | 61,05 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | Eksemplar | 2075 | 1.196.000.000 | 1820 | 1.106.500.000 | 87,71 | 92,52 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 6 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Eksemplar | 2100 | 512.220.000 | 1600 | 495.360.000 | 76,19 | 96,71 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 7 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 3.400.000 | 2 | 2.890.000 | 100,00 | 85,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | Lokus | 15 | 27.290.000 | 15 | 19.410.000 | 100,00 | 71,12 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 2 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Orang | 15 | 76.055.000 | 15 | 74.215.000 | 100,00 | 97,58 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 3 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Perpustakaan | 3 | 654.745.000 | 3 | 540.407.194 | 100,00 | 82,54 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | Orang | 3 | 27.160.000 | 3 | 24.300.000 | 100,00 | 89,47 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Eksemplar | 50 | 5.470.000 | 25 | 1.720.000 | 50,00 | 31,44 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 1 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | Eksemplar | 100 | 25.000.000 | 70 | 24.656.000 | 70,00 | 98,62 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | Berkas | 50 | 7.940.000 | 35 | 2.555.000 | 70,00 | 32,18 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Berkas | 50 | 5.000.000 | 35 | 2.850.000 | 70,00 | 57,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 3 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 18.220.000 | 3 | 18.220.000 | 75,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan diisampaikan kepada ANRI | Arsip | 50 | 19.150.000 | 30 | 19.140.560 | 60,00 | 99,95 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Arsip | 100 | 12.150.000 | 50 | 12.150.000 | 50,00 | 100,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 1 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Penggguna | 2799 | 27.800.000 | 1320 | 25.300.000 | 47,16 | 91,01 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 2 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 25.480.000 | 4 | 2.580.000 | 100,00 | 10,13 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tercapai |
| 1 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Arsip | 100 | 10.400.000 | 0 | 430.000 | 0,00 | 4,13 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | Arsip | 40 | 41.130.000 | 25 | 2.580.000 | 62,50 | 6,27 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |
| 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | Arsip | 100 | 4.720.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Arsip | 20 | 18.160.000 | 5 | 9.990.000 | 25,00 | 55,01 | **Dinas Perpustakaan dan kearsipan** | Tidak Tercapai |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 4.210.000 | 2 | 4.210.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.685.000 | 1 | 2.665.000 | 100,00 | 99,26 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.785.000 | 1 | 2.785.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.125.000 | 1 | 2.125.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 905.000 | 1 | 821.000 | 100,00 | 90,72 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | 925.000 | 6 | 925.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 5.520.487.191 | 12 | 4.997.276.479 | 100,00 | 90,52 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 812 | 163.460.000 | 812 | 158.290.000 | 100,00 | 96,84 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 2.689.500 | 12 | 2.611.000 | 100,00 | 97,08 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 3.554.000 | 18 | 3.539.000 | 100,00 | 99,58 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1.914.000 | 1 | 1.905.000 | 100,00 | 99,53 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 17.991.000 | 12 | 17.956.000 | 100,00 | 99,81 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1.586.000 | 1 | 1.551.000 | 100,00 | 97,79 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 58 | 1.605.000 | 58 | 1.605.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 58 | 353.272.000 | 58 | 204.223.195 | 100,00 | 57,81 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 61.238.000 | 1,00 | 45.610.000 | 100,00 | 74,48 | Dinas Koperasi, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 45.000.000 | 2,00 | 27.100.000 | 100,00 | 60,22 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | 1,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 96.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 | 54,17 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 300 | 136.020.000 | 225 | 70.270.195 | 75,00 | 51,66 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 179 | 65.500.000 | 134 | 64.870.000 | 75,00 | 99,04 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 1.732.212.000 | 5 | 1.453.914.000 | 100,00 | 83,93 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1.720.200.000 | 1,00 | 1.443.750.000 | 100,00 | 83,93 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 152.629.000 | 12 | 131.304.163 | 100,00 | 86,03 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 3 | 40.000.000 | 3 | 37.770.000 | 100,00 | 94,43 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 24 | 62.629.000 | 24 | 61.804.163 | 100,00 | 98,68 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 26 | 101.040.000 | 26,00 | 85.612.000 | 100,00 | 84,73 | Dinas Koperasi, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | **UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 187 | 13.540.000 | 77 | 0 | 41,18 | 0,00 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 353 | 21.300.000 | 50 | 21.210.000 | 14,16 | 99,58 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tidak Tercapai |
| | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 100 | 66.200.000 | 50 | 64.402.000 | 50,00 | 97,28 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tidak Tercapai |
| 1 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Unit Usaha | 60 | 78.729.000 | 50 | 78.452.000 | 83,33 | 99,65 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |
| 2 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | Unit Usaha | 1400 | 103.928.000 | 323 | 103.594.000 | 23,07 | 99,68 | **Dinas Koperasi,** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 3 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Unit Usaha | 100 | 350.000.000 | 515 | 338.852.646 | 515,00 | 96,82 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang | 100 | 25.090.000 | 431 | 0 | 431,00 | 0,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| 5 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 100 | 95.000.000 | 100 | 94.800.000 | 100,00 | 99,79 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| 6 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Unit Usaha | 33475 | 33.872.000 | 34954 | 33.813.000 | 104,42 | 99,83 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| 7 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Orang | 100 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 25 | 1.035.827.671 | 25 | 958.361.050 | 100,00 | 92,52 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 243 | 7.300.000 | 238 | 7.273.000 | 97,94 | 99,63 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 250 | 7.850.000 | 138 | 7.785.000 | 55,20 | 99,17 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 4.685.000 | 6 | 4.580.000 | 50,00 | 97,76 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | 84 | 6.150.000 | 42 | 6.135.000 | 50,00 | 99,76 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tidak Tercapai |
| | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | 2 | 5.460.000 | 2 | 5.445.000 | 100,00 | 99,73 | Dinas Koperasi, | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang , dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | 943 | 54.150.000 | 1006 | 38.598.323 | 106,68 | 71,28 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Orang | 88 | 13.200.000 | 116 | 12.758.000 | 131,82 | 96,65 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 3 | 610.443.257 | 3 | 610.443.257 | 100,00 | 100,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 3 | 361.899.000 | 3 | 361.899.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | "Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas " | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen | 1 | 29.220.000 | 1 | 29.220.000 | 100,00 | 100,00 | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | Tercapai |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 5.140.000 | 3 | 2.984.000 | 100,0 | 58,05 | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 890.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.319.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 655.000 | 1 | 600.000 | 100,0 | 91,60 | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 999.000 | 1 | 914.000 | 100,0 | 91,49 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 8 | 7.406.000 | 8 | 6.970.000 | 100,0 | 94,11 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 2.488.000 | 4 | 2.290.500 | 100,0 | 92,06 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2.496 | 18.566.029.604 | 2.496 | 17.630.057.287 | 100,0 | 94,96 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 208.770.000 | 12 | 191.950.000 | 100,0 | 91,94 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 675.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 850.000 | 18 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 5 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 12 | 330.000 | 12 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 4 | 400.000 | 4 | 275.000 | 100,0 | 68,75 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 51 | 12.750.000 | 51 | 12.750.000 | 100,0 | 100,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 8.200.000 | 1 | 6.299.500 | 100,0 | 76,82 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 35.421.081 | 12 | 29.357.000 | 100,0 | 82,88 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 14 | 14.020.000 | 14 | 12.325.000 | 100,0 | 87,91 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 35.000.000 | 12 | 31.805.000 | 100,0 | 90,87 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 386.984.000 | 12 | 96.243.450 | 100,0 | 24,87 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 12.280.200 | 3 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 624.300.000 | 12 | 543.240.000 | 100,0 | 87,02 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 35 | 15.921.000 | 35 | 14.460.000 | 100,0 | 90,82 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 7.995.000 | 1 | 7.995.000 | 100,0 | 100,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Laporan | 1 | 2.149.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia | Laporan | 1 | 16.337.000 | 1 | 15.787.000 | 100,0 | 96,63 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | Unit | 1 | 14.208.000 | 1 | 460.000 | 100,0 | 3,24 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 3 | Peningkatan ketahanan pangan keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga | 250 | 18.555.000 | 250 | 2.720.000 | 100,0 | 14,66 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 4 | Pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | Unit | 4 | 6.048.000 | 4 | 216.000 | 100,0 | 3,57 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 5 | Pemantauan stok pangan | Informasi Stok Pangan | Dokumen | 4 | 44.690.000 | 4 | 43.245.000 | 100,0 | 96,77 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 6 | Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 3.580.000 | 1 | 3.580.000 | 100,0 | 100,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 7 | Koordinasi dan sinkronisasi pemanatauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | Laporan | 3 | 33.874.000 | 3 | 25.078.000 | 100,0 | 74,03 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 8 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Dokumen | 1 | 20.671.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tidak Tercapai |
| 1 | Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Ton | 20 | 102.597.000 | 20 | 98.004.000 | 100,0 | 95,52 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Dokumen | 1 | 15.234.000 | 1 | 14.724.000 | 100,0 | 96,65 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumer daya loka | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Laporan | 1 | 2.380.000 | 1 | 2.380.000 | 100,0 | 100,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Laporan | 1 | 20.260.000 | 1 | 14.680.000 | 100,0 | 72,46 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | Dokumen | 14 | 26.843.000 | 14 | 25.122.000 | 100,0 | 93,59 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Laporan | 103 | 15.766.000 | 103 | 7.148.000 | 100,0 | 45,34 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 1 | 31.269.400 | 1 | 16.390.000 | 100,0 | 52,42 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokuman | 1 | 44.251.600 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tidak Tercapai |
| 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 1 | 75.553.500 | 1 | 75.063.000 | 100,0 | 99,35 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Laporan | 2 | 22.413.500 | 2 | 21.420.000 | 100,0 | 95,57 | Dinas Pertanian dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Ketahanan Pangan | |
| 3 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Laporan | 2 | 6.820.000 | 2 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 4 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan | Laporan | 2 | 5.970.000 | 2 | 5.970.000 | 100,0 | 100,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 5 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Laporan | 2 | 5.100.000 | 2 | 2.550.000 | 100,0 | 50,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG /Tanaman | Dokumen | 1 | 146.031.200 | 1 | 127.182.200 | 100,0 | 87,09 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar | Ekor | 750 | 134.199.500 | 750 | 11.560.000 | 100,0 | 8,61 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Ekor | 611 | 183.257.000 | 611 | 171.992.000 | 100,0 | 93,85 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Laporan | 1 | 43.837.000 | 1 | 42.407.500 | 100,0 | 96,74 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | "Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota" | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 5 | 2.214.485.740 | 4 | 1.983.299.713 | 80,0 | 89,56 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | Unit | 6 | 600.000.000 | 6 | 600.000.000 | 100,0 | 100,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Dokumen | 1 | 8.321.500 | 1 | 2.138.000 | 100,0 | 25,69 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha | 50 | 287543500 | 50 | 280.514.000 | 100,0 | 97,56 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Ha | 98 | 93.718.000 | 98 | 82.164.000 | 100,0 | 87,67 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 3 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ha | 85 | 118.932.000 | 85 | 90.602.000 | 100,0 | 76,18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 4 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Laporan | 1 | 18.057.500 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 14 | 131.807.000 | 14 | 131.156.500 | 100,0 | 99,51 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 249 | 322.661.500 | 249 | 298.913.100 | 100,0 | 92,64 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 1 | 57.000.000 | 1 | 52.050.000 | 100,0 | 91,32 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 4 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | 14 | 100.000.000 | 14 | 96.323.000 | 100,0 | 96,32 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 5 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 120 | 15.000.000 | 120 | 14.355.000 | 100,0 | 95,70 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | Laporan | 1 | 63.993.400 | 1 | 49.647.600 | 100,0 | 77,58 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 2 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan | 1 | 276.975.000 | 1 | 266.859.500 | 100,0 | 96,35 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | "Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM " | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | laporan | 1 | 10.750.000 | 1 | 8.250.000 | 100,0 | 76,74 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Laporan | 5 | 12.000.000 | 5 | 0 | 100,0 | 0,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Orang | 28 | 213.998.500 | 28 | 213.636.850 | 100,0 | 99,83 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | Unit Usaha | 1 | 3.759.000 | 1 | 3.400.000 | 100,0 | 90,45 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tercapai |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1.500.000 | 2 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 980 | 6.099.239.127 | 961 | 5.658.289.238 | 98,06 | 92,77 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 155.910.000 | 11 | 155.910.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Dokumen | 18 | 1.300.000 | 18 | 1.300.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 6.125.400 | 1 | 5.743.250 | 100,00 | 93,76 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 7.367.500 | 1 | 4.774.000 | 100,00 | 64,80 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 69.538.000 | 3 | 61.883.000 | 100,00 | 88,99 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 3.750.000 | 1 | 3.600.000 | 100,00 | 96,00 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 15.350.000 | 12 | 11.500.000 | 100,00 | 74,92 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 367.982.500 | 12 | 244.795.743 | 100,00 | 66,52 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 116.760.000 | 10 | 113.750.000 | 100,00 | 97,42 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 49.780.516 | 100,00 | 99,56 | Dinas Perikanan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 382.700.000 | 12 | 318.680.000 | 100,00 | 83,27 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 10 | 20.100.000 | 10 | 19.100.000 | 100,00 | 95,02 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 10.469.716 | 1 | 9.908.970 | 100,00 | 94,64 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | Unit | 2 | 1.387.800.000 | 2 | 1.375.721.578 | 100,00 | 99,13 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Penjaminan ketersediaan saran usaha perikanan tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Unit | 12645 | 2.505.000.000 | 12645 | 2.483.190.000 | 100,00 | 99,13 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Pengembangan kaapsitas nelayan kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 240 | 28.680.000 | 240 | 28.461.500 | 100,00 | 99,24 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Unit Usaha | 25 | 90.995.000 | 25 | 90.720.000 | 100,00 | 99,70 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 3 | Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sela a 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehtan Ikan | Dokumen | 2 | 9.632.500 | 2 | 9.300.000 | 100,00 | 96,55 | Dinas Perikanan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Orang | 60 | 9.567.500 | 60 | 9.418.000 | 100,00 | 98,44 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 5 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Ha | 4 | 79.400.000 | 4 | 78.585.750 | 100,00 | 98,97 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Pelaksaanaan bimbingan dn penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemsaran skala mikro dan kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit usaha | 20 | 28.702.500 | 20 | 28.289.000 | 100,00 | 98,56 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Ton | 290 | 27.135.000 | 290 | 26.596.000 | 100,00 | 98,01 | Dinas Perikanan | Tercapai |
| 1 | Pengelolaan perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 2 | 45.200.000 | 28,68 | 43.450.000 | ###### | 96,13 | Dinas Perikanan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang dikelola | Unit | 1 | 45.200.000 | 1 | 43.450.000 | 100,00 | 96,13 | **Dinas Perikanan** | Tercapai |
| 3 | Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Layanan | 2 | 45.200.000 | 2 | 43.450.000 | 100,00 | 96,13 | **Dinas Perikanan** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.976.400 | 1 | 3.975.400 | 100,00 | 99,97 | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 714 | 4.858.645.817 | 714 | 4.571.929.053 | 100,00 | 94,10 | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | Tercapai |
| | pelaksanaan penatalaksanaan dan engujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 125.880.000 | 12 | 125.880.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pengembangan Daerah | |
| | Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 300.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 45 | 27.000.000 | 45 | 27.000.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 8 | 10.233.000 | 7 | 6.848.000 | 87,50 | 66,92 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 9 | 23.270.000 | 8 | 19.105.000 | 88,89 | 82,10 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 85.945.500 | 3 | 64.723.525 | 75,00 | 75,31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | 2 | 5.840.000 | 100,00 | 83,43 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 14.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100,00 | 57,14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pengembangan Daerah | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 157.071.000 | 12 | 75.165.144 | 100,00 | 47,85 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 28.000.000 | 100,00 | 93,33 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 117.000.000 | 5 | 114.800.000 | 100,00 | 98,12 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa surat me-nyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pem-bangunan, Penelitian dan Pengem-bangan Dae-rah | Tercapai |
| | Penyediaan jasa komunikasi, usmber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 300.000 | 12 | 300.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pem-bangunan, Penelitian dan Pengem-bangan Dae-rah | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 159.000.000 | 12 | 159.000.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pem-bangunan, Penelitian dan Pengem-bangan Dae-rah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaaan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | 41.032.994 | 1 | 11.069.000 | 100,00 | 26,98 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 23 | 45.250.000 | 23 | 37.015.000 | 100,00 | 81,80 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | 0 | 0 | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan konusltasi publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 1 | 28.453.600 | 1 | 28.088.400 | 100,00 | 98,72 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pengembangan Daerah | |
| | Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 1 | 31.416.000 | 1 | 31.053.900 | 100,00 | 98,85 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 1 | 83.623.000 | 1 | 81.580.400 | 100,00 | 97,56 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 1550 | 70.175.000 | 1550 | 69.857.700 | 100,00 | 99,55 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 4 | 531.633.000 | 4 | 511.556.550 | 100,00 | 96,22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 4 | 64.640.000 | 4 | 64.182.500 | 100,00 | 99,29 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Monitoring, evaluasi dan penysunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 6 | 531.458.000 | 6 | 527.254.000 | 100,00 | 99,21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Pengelolaan data dalam distem informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 1 | 28.032.750 | 1 | 20.389.000 | 100,00 | 72,73 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pengembangan Daerah | |
| | penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen | 10 | 42.069.250 | 10 | 24.511.500 | 100,00 | 58,26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 2 | 60.000.000 | 2 | 59.940.000 | 100,00 | 99,90 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 3 | 133.799.000 | 2 | 70.810.000 | 66,67 | 52,92 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 5 | 33.621.000 | 5 | 16.166.500 | 100,00 | 48,08 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 5 | 31.471.000 | 5 | 14.270.200 | 100,00 | 45,34 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Laporan | 1 | 106.020.000 | 1 | 105.887.500 | 100,00 | 99,88 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 69.652.500 | 100,00 | 92,87 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Peneltiian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dokumen | 1 | 85.693.000 | 1 | 76.836.500 | 100,00 | 89,66 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Dokumen | 1 | 160.983.400 | 1 | 146.961.000 | 100,00 | 91,29 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penelitian dan pengembangan pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Pengembangan Daerah | |
| | Peneltiian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 69.682.500 | 100,00 | 92,91 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Peneltiian dan pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 69.683.000 | 100,00 | 92,91 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Uji coba dan penerapan bangun/modal replikasi dan inoavasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Laporan | 1 | 91.280.000 | 1 | 88.193.500 | 100,00 | 96,62 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatiif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan | 1 | 65.627.000 | 1 | 37.914.500 | 100,00 | 57,77 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 4.240.000 | 2 | 4.235.000 | 100,00 | 99,88 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.650.000 | 1 | 4.650.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.490.000 | 1 | 4.490.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.110.000 | 1 | 3.110.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.952.000 | 1 | 2.952.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 3.825.000 | 1 | 3.825.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 3.910.000 | 4 | 3.910.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 868 | 25.445.928.673 | 868 | 24.477.645.213 | 100,00 | 96,19 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 115.365.500 | 12 | 111.421.000 | 100,00 | 96,58 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 771.480.000 | 1 | 759.480.000 | 100,00 | 98,44 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan pelaksaaan akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | 41.130.000 | 1 | 39.840.000 | 100,00 | 96,86 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 15.336.000 | 1 | 14.696.000 | 100,00 | 95,83 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 14.859.000 | 1 | 13.814.000 | 100,00 | 92,97 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 36.791.000 | 2 | 35.005.000 | 100,00 | 95,15 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 4.475.000 | 1 | 4.160.000 | 100,00 | 92,96 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 2.507.500 | 1 | 2.425.000 | 100,00 | 96,71 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pengamanan barang milik daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 3.027.000 | 1 | 1.145.000 | 100,00 | 37,83 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1.832.000 | 1 | 1.707.000 | 100,00 | 93,18 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 3.620.000 | 1 | 3.570.000 | 100,00 | 98,62 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 16.245.500 | 1 | 15.884.500 | 100,00 | 97,78 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 80 | 53.880.000 | 80 | 53.320.000 | 100,00 | 98,96 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 10.858.000 | 12 | 8.200.000 | 100,00 | 75,52 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 9.809.875 | 10 | 9.535.000 | 100,00 | 97,20 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 28.703.000 | 1 | 26.281.500 | 100,00 | 91,56 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 29 | 87.761.750 | 29 | 79.590.000 | 100,00 | 90,69 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 18.000.000 | 7 | 17.899.500 | 100,00 | 99,44 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 86.000.000 | 1 | 86.000.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 449.125.000 | 12 | 420.831.181 | 100,00 | 93,70 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 560 | 662.400.000 | 540 | 567.100.000 | 96,43 | 85,61 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 1 | 93.700.000 | 1 | 91.300.000 | 100,00 | 97,44 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 168.700.000 | 1 | 75.800.000 | 100,00 | 44,93 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 37.700.000 | 12 | 36.500.000 | 100,00 | 96,82 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 23.047.224.803 | 12 | 22.750.374.665 | 100,00 | 98,71 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 2.580.395.200 | 3 | 2.539.285.600 | 100,00 | 98,41 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2.656.540.000 | 2 | 2.605.601.038 | 100,00 | 98,08 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 6 | 558.824.793 | 6 | 548.880.935 | 100,00 | 98,22 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 31 | 35.750.000 | 31 | 34.466.000 | 100,00 | 96,41 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 98.300.000 | 100,00 | 98,30 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 2 | 10.820.000 | 2 | 10.670.000 | 100,00 | 98,61 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 2 | 15.485.500 | 2 | 15.335.500 | 100,00 | 99,03 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 39 | 4.898.000 | 39 | 4.403.000 | 100,00 | 89,89 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 39 | 7.452.000 | 39 | 3.000.000 | 100,00 | 40,26 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 39 | 4.916.000 | 39 | 0 | 100,00 | 0,00 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 39 | 7.452.000 | 39 | 7.309.000 | 100,00 | 98,08 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tenatng APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerahtentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 1 | 272.267.250 | 1 | 210.567.188 | 100,00 | 77,34 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan peratuan daerah tentang perubahan APBD dan pertauran kepala daerah tentang penjabaran prubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 1 | 251.061.250 | 1 | 244.176.000 | 100,00 | 97,26 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 12 | 21.607.500 | 12 | 20.258.500 | 100,00 | 93,76 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen | 12 | 88.347.500 | 12 | 37.129.528 | 100,00 | 42,03 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Dokumen | 12 | 21.937.000 | 12 | 8.971.000 | 100,00 | 40,89 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 39 | 19.134.000 | 39 | 15.480.000 | 100,00 | 80,90 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 12 | 18.404.000 | 12 | 18.180.000 | 100,00 | 98,78 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas di SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 12 | 5.760.000 | 12 | 5.600.000 | 100,00 | 97,22 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penatausahaan pembiayaan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen | 12 | 43.280.000 | 12 | 40.178.000 | 100,00 | 92,83 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 4 | 115.196.500 | 4 | 103.173.629 | 100,00 | 89,56 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan trnasaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan bukan bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 4 | 26.669.000 | 4 | 23.752.926 | 100,00 | 89,07 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetora perhitungan fihak ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lapora Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | 12 | 59.222.000 | 12 | 58.017.625 | 100,00 | 97,97 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 12 | 10.952.000 | 12 | 8.200.000 | 100,00 | 74,87 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan | 12 | 18.738.000 | 12 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban | Dokumen | 12 | 10.357.000 | 12 | 10.357.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semsteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan | 12 | 15.013.000 | 12 | 6.979.000 | 100,00 | 46,49 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 12 | 274.326.500 | 12 | 267.426.000 | 100,00 | 97,48 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan rancanagan peraturan daerah tenatnag pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancanagan pertauran kepala daerah tenatng penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 36.351.500 | 2 | 35.331.500 | 100,00 | 97,19 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen | 1 | 168.771.000 | 1 | 168.586.000 | 100,00 | 99,89 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 12 | 33.857.000 | 12 | 27.500.000 | 100,00 | 81,22 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah istem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 131.209.000 | 1 | 58.955.522 | 100,00 | 44,93 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 1 | 105.036.000 | 1 | 98.052.805 | 100,00 | 93,35 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen | 1 | ########## | 1 | 77.795.475.097 | 100,00 | 48,58 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| | Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 80 | ########## | 80 | 77.795.475.097 | 100,00 | 48,58 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 1 | Penyusunan standar harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | Dokumen | 1 | 42.341.000 | 1 | 31.913.000 | 100,00 | 75,37 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 2 | Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 2 | 8.548.000 | 2 | 3.555.000 | 100,00 | 41,59 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 3 | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 1 | 21.588.000 | 1 | 7.369.000 | 100,00 | 34,13 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 4 | Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 40 | 7.493.000 | 40 | 700.000 | 100,00 | 9,34 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 5 | penatausahaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 3 | 103.748.000 | 3 | 84.811.250 | 100,00 | 81,75 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 6 | Inventarisasi barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Laporan | 3 | 20.292.500 | 3 | 13.557.500 | 100,00 | 66,81 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 7 | Pengamanan barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 25 | 140.104.500 | 25 | 31.526.000 | 100,00 | 22,50 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 8 | Penialian barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 3 | 3.100.350.000 | 3 | 3.026.059.000 | 100,00 | 97,60 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 9 | Pengawasan dan pengendalain pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 5 | 162.123.000 | 5 | 155.790.000 | 100,00 | 96,09 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 10 | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, oemusnahan dan penghapusan barang milik daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 15 | 3.250.273.900 | 12 | 3.247.959.961 | 80,00 | 99,93 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 3 | 29.475.000 | 3 | 26.679.000 | 100,00 | 90,51 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |
| 12 | Penyusunan laporan barang milik daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan | 1 | 65.770.000 | 1 | 59.608.000 | 100,00 | 90,63 | Badan Keuangan dan Aset DAerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 13 | Pembinaan pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 40 | 30.513.000 | 40 | 6.120.000 | 100,00 | 20,06 | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1.450.000 | 2 | 1.450.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.210.000 | 1 | 1.210.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 850.000 | 1 | 850.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 1.400.000 | 4 | 1.400.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 700.000 | 2 | 700.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 840 | 12.056.864.410 | 723 | 11.793.480.055 | 86,07 | 97,82 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | Dokumen | 12 | 82.071.000 | 12 | 78.083.500 | 100,00 | 95,14 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 174.450.000 | 12 | 167.710.000 | 100,00 | 96,14 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 2.120.000 | 1 | 2.120.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 1.250.000 | 18 | 1.250.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1.168.394 | 1 | 1.129.000 | 100,00 | 96,63 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 2.293.000 | 12 | 2.279.000 | 100,00 | 99,39 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 57.337.500 | 5 | 56.132.500 | 100,00 | 97,90 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 24.571.400 | 12 | 22.648.400 | 100,00 | 92,17 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 131.670.000 | 0 | 120.094.162 | 0,00 | 91,21 | Badan Pendapatan Daerah | Tidak Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 194.400.000 | 12 | 190.348.900 | 100,00 | 97,92 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan mebel | | Unit | 6 | 110.700.000 | 6 | 106.900.000 | 100,00 | 96,57 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 444.410.000 | 6 | 417.840.000 | 100,00 | 94,02 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 442.210.000 | 12 | 415.640.000 | 100,00 | 93,99 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 74.150.000 | 12 | 60.427.500 | 100,00 | 81,49 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 57 | 20.000.000 | 57 | 9.964.500 | 100,00 | 49,82 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | | | | | | #REF! | 1.072.117.800 | #REF! | #DIV/0! | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen | 1 | 46.731.500 | 1 | 38.739.000 | 100,00 | 82,90 | Badan Pendapatan Daerah | Tercapai |
| | Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen | 7 | 21.900.000 | 4 | 12.500.000 | 57,14 | 57,08 | Badan Pendapatan Daerah | Tidak Tercapai |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Unit | 12 | 160.480.000 | 6 | 159.098.000 | 50,00 | 99,14 | Badan Pendapatan Daerah | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 12 | 262.170.000 | 12 | 245.479.500 | 100,00 | 93,63 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 12 | 401.353.800 | 12 | 401.243.800 | 100,00 | 99,97 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Penetapan wajib pajak daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 12 | 8.750.000 | 12 | 8.750.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Peneltiian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Dokumen | 12 | 47.020.000 | 12 | 46.250.000 | 100,00 | 98,36 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Penagihan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Dokumen | 12 | 57.290.000 | 12 | 53.110.000 | 100,00 | 92,70 | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| | Pengendalian, pemeriksanaan dan penagwasan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | **Badan Pendapatan Daerah** | Tercapai |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 3.875.000 | 1 | 3.875.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.725.000 | 1 | 3.725.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 3.725.000 | 1 | 3.725.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.725.000 | 1 | 1.725.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.725.000 | 1 | 1.725.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 482.448.000 | 12 | 458.818.000 | 100,00 | 95,10 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 3.525.000 | 1 | 3.525.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bu-lanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bu-lanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 4.175.000 | 4 | 4.175.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise-diakan | Paket | 7 | 49.443.900 | 6,8 | 46.436.600 | 97,14 | 93,92 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 11 | 1.765.000.000 | 11 | 1.631.025.000 | 100,00 | 92,41 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 4 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 5 | 2.256.165.000 | 5 | 1.874.672.078 | 100,00 | 83,09 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Pengadaan sarana dan prasa-rana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasa-rana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise-diakan | Unit | 217 | 846.000.000 | 216 | 826.540.500 | 99,54 | 97,70 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan jasa pe,ayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 2.732.640.000 | 12 | 2.697.650.000 | 100,00 | 98,72 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penun-jang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 2 | 1.761.550.000 | 1,7 | 1.709.147.854 | 85,00 | 97,03 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Admnitrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah jenis layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jenis | 4 | 1.450.167.324 | 4 | 1.301.412.356 | 100,00 | 89,74 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan medical checkup kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang | 24 | 252.000.000 | 20 | 197.500.000 | 83,33 | 78,37 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/Bulan | 8 | 600.000.000 | 8 | 525.000.000 | 100,00 | 87,50 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 4 | Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah | Jumlah jenis fasilitas kerumahtanggan sekretariat daerah yang tersedia | Jenis | 3 | 1.780.000.000 | 3 | 1.610.000.000 | 100,00 | 90,45 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Penataan organisasi | Jumlah kebijakan terkait penataan organisasi yang di keluarkan | kebijakan | 21 | 359.295.000 | 22 | 347.795.000 | 104,76 | 96,80 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen | 4 | 97.400.000 | 4 | 97.400.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Pelaksanaan protokolo dan komunikasi pimpinan | Jumlah Layanan Keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | Layanan | 3 | 5.116.600.000 | 3 | 5.051.055.000 | 100,00 | 98,72 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 4 | Fasilitasi keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Laporan | 51 | 1.135.700.000 | 50 | 1.127.380.000 | 98,04 | 99,27 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penataan administrasi pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Dokumen | 23 | 66.635.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Sekretariat Daerah** | Tidak Tercapai |
| 2 | Pengelolaan administrasi kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Dokumen | 7 | 216.450.000 | 7 | 215.650.000 | 100,00 | 99,63 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 1 | Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen | 4 | 636.705.000 | 4 | 614.955.000 | 100,00 | 96,58 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Dokumen | 3 | 1.437.855.000 | 3 | 1.415.105.000 | 100,00 | 98,42 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Dokumen | 1600 | 49.685.000 | 1600 | 47.295.000 | 100,00 | 95,19 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kasus | 6 | 276.800.000 | 1 | 234.900.000 | 16,67 | 84,86 | **Sekretariat Daerah** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pengendalian dan distribusi perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan | 11 | 212.300.000 | 11 | 208.890.000 | 100,00 | 98,39 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Dokumen | 2 | 94.237.800 | 2 | 91.420.000 | 100,00 | 97,01 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Pengendalian dan evaluasi program pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Laporan | 12 | 82.100.000 | 12 | 47.100.000 | 100,00 | 57,37 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 17 | 62.200.000 | 17 | 39.020.000 | 100,00 | 62,73 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Dokumen | 3 | 139.092.000 | 3 | 138.092.000 | 100,00 | 99,28 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Orang | 43 | 110.980.000 | 43 | 45.300.000 | 100,00 | 40,82 | **Sekretariat Daerah** | Tercapai |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 910 | 4.956.560.727 | 910 | 4.623.618.353 | 100,00 | 93,28 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 157.190.000 | 12 | 155.400.000 | 100,00 | 98,86 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 20.000.000 | 18 | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 25.600.000 | 1 | 25.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 19.538.625 | 1 | 19.535.000 | 100,00 | 99,98 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 63.081.000 | 1 | 53.106.000 | 100,00 | 84,19 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 628.310.000 | 4 | 541.972.000 | 100,00 | 86,26 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 164.500.000 | 2 | 50.000.000 | 100,00 | 30,40 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 5 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | Dokumen | 50 | 502.000.000 | 50 | 490.220.000 | 100,00 | 97,65 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 6 | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 311.760.000 | 2 | 297.888.740 | 100,00 | 95,55 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 7 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 110.882.000 | 12 | 110.882.000 | 100,00 | 100,00 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 8 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 313.000.000 | 12 | 280.400.000 | 100,00 | 89,58 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 10 | 74.000.000 | 10 | 51.200.000 | 100,00 | 69,19 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 25 | 825.226.788 | 25 | 775.461.554 | 100,00 | 93,97 | Sekretariat DPRD | Tercapai |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 42.000.000 | 12 | 41.539.554 | 100,00 | 98,90 | Sekretariat DPRD | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 745.926.788 | 12 | 696.622.000 | 100,00 | 93,39 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 3 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 1.051.663.600 | 12 | 859.985.738 | 100,00 | 81,77 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 48 | 155.393.600 | 48 | 138.725.291 | 100,00 | 89,27 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 48 | 15.000.000 | 48 | 14.835.150 | 100,00 | 98,90 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 3 | Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 4 | 185.000.000 | 4 | 164.004.345 | 100,00 | 88,65 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 4 | Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 400.000.000 | 20 | 332.622.452 | 100,00 | 83,16 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Orang/Bulan | 490 | 369.250.000 | 490 | 369.250.000 | 100,00 | 100,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Penyediaan pakaian dinas dan atibut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Dise-diakan | Paket | 7 | 50.000.000 | 7 | 15.502.200 | 100,00 | 31,00 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Fasilitasi fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Laporan | 12 | 69.000.000 | 12 | 64.250.000 | 100,00 | 93,12 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Paket | 36 | 1.650.000.000 | 36 | 1.455.000.000 | 100,00 | 88,18 | **Sekretariat DPRD** | Tercapai |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat dae-rah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2.600.000 | 2 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Doku-men Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 1.022 | ########## | 1.005 | 7.571.311.009 | 98,34 | 94,79 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 132.990.000 | 11 | 129.790.000 | 100,00 | 97,59 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 73 | 100.126.803 | 31 | 82.217.000 | 42,47 | 82,11 | **Inspektorat** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1.275.000 | 1 | 1.275.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 9.457.500 | 1 | 6.788.700 | 100,00 | 71,78 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 83.672.000 | 4 | 53.954.000 | 100,00 | 64,48 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 31.950.000 | 3 | 20.100.000 | 100,00 | 62,91 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 41.000.000 | 12 | 39.500.000 | 100,00 | 96,34 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 261.231.250 | 12 | 231.080.655 | 100,00 | 88,46 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 1 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 30.000.000 | 10 | 27.650.000 | 100,00 | 92,17 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 3 | 149.745.000 | 3 | 120.986.000 | 100,00 | 80,79 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 3 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 450 | 5.250.000 | 511 | 2.250.000 | 113,56 | 42,86 | **Inspektorat** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 57.215.000 | 3 | 51.316.000 | 100,00 | 89,69 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 5 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 87.280.000 | 12 | 67.420.000 | 100,00 | 77,25 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 1 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 1 | Pengawasan kinerja pemerintah daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 39 | 252.110.000 | 39 | 252.110.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Pengawasan keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 150 | ########## | 150 | 1.740.460.000 | 100,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 3 | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksanaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Laporan | 36 | 370.180.000 | 35 | 337.415.000 | 97,22 | 91,15 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 1 | Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Laporan | 8 | 10.800.000 | 8 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 2 | Pengawasan dengan tujuan terntentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | laporan | 10 | 362.780.000 | 14 | 362.780.000 | 140,00 | 100,00 | **Inspektorat** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | PD | 39 | 112.754.000 | 20 | 97.304.000 | 51,28 | 86,30 | **Inspektorat** | Tidak Tercapai |
| 2 | Pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian refor-masi birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | PD | 39 | 25.125.000 | 39 | 7.250.000 | 100,00 | 28,86 | **Inspektorat** | Tercapai |
| 3 | Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberanta-san korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Laporan | 3 | 9.100.000 | 1 | 4.900.000 | 33,33 | 53,85 | **Inspektorat** | Tidak Tercapai |
| 4 | Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan zona in-tegritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | PD | 7 | 1.700.000 | 7 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Inspektorat** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd ae-rah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2,00 | 790.000 | 2,00 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 1.040.000 | 1,00 | 1.040.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Doku-men Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 790.000 | 1,00 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 1.040.000 | 1,00 | 1.040.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 790.000 | 1,00 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1,00 | 1.060.000 | 1,00 | 1.060.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4,00 | 1.200.000 | 4,00 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 672,00 | 3.754.964.430 | 672,00 | 3.546.952.214 | 100,00 | 94,46 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11,00 | 46.860.000 | 11,00 | 46.860.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 2.780.000 | 1,00 | 2.490.000 | 100,00 | 89,57 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1,00 | 8.627.000 | 1,00 | 8.358.000 | 100,00 | 96,88 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 24.391.500 | 1,00 | 23.644.000 | 100,00 | 96,94 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise-diakan | Paket | 1,00 | 6.103.000 | 1,00 | 6.103.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12,00 | 95.650.000 | 12,00 | 95.650.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12,00 | 51.450.000 | 12,00 | 48.239.177 | 100,00 | 93,76 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat me-nyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12,00 | 7.320.000 | 12,00 | 7.320.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12,00 | 140.730.000 | 12,00 | 137.030.000 | 100,00 | 97,37 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 22,00 | 16.150.000 | 22,00 | 16.115.000 | 100,00 | 99,78 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi ge-dung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeli-hara/Direhabilitasi | Unit | 1,00 | 4.230.000 | 1,00 | 4.177.500 | 100,00 | 98,76 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1,00 | 4.150.000 | 1,00 | 4.150.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12,00 | 90.000.000 | 12,00 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12,00 | 90.000.000 | 12,00 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1,00 | 4.125.000 | 1,00 | 4.125.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12,00 | 436.200.000 | 12,00 | 436.200.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 1,00 | 4.125.000 | 1,00 | 4.125.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 1,00 | 3.150.000 | 1,00 | 3.150.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bantimurung | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1,00 | 4.125.000 | 1,00 | 4.125.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6,00 | 2.800.000 | 6,00 | 1.400.000 | 100,00 | 50,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2,00 | 26.450.000 | 2,00 | 26.450.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3,00 | 13.500.000 | 3,00 | 13.500.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Evaluasi kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 1,00 | 3.700.000 | 1,00 | 3.700.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1,00 | 202.250.000 | 1,00 | 202.250.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 2,00 | 202.250.000 | 2,00 | 202.250.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1,00 | 34.100.000 | 1,00 | 33.050.000 | 100,00 | 96,92 | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 300,00 | 300 | 300,00 | 50.525.000 | 100,00 | ####### | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (imtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 75,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | **Kecamatan Bantimurung** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 800,00 | 550 | 800,00 | 43.455.000 | 100,00 | ####### | **Kecamatan Bantimurung** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.995.000 | 100,00 | 99,75 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.000.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 90,00 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.000.000 | 1 | 995.000 | 100,00 | 99,50 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.000.000 | 1 | 855.000 | 100,00 | 85,50 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.000.000 | 1 | 945.000 | 100,00 | 94,50 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12 | 1.600.000 | 12 | 1.595.000 | 100,00 | 99,69 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 1.945.000 | 100,00 | 97,25 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 476 | 2.823.854.055 | 476 | 2.668.695.370 | 100,00 | 94,51 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | 1 | 624.000 | 100,00 | 15,60 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 3.125.000 | 100,00 | 52,08 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 28.749.400 | 1 | 22.562.000 | 100,00 | 78,48 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1.400.600 | 1 | 1.200.600 | 100,00 | 85,72 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 40.025.000 | 12 | 27.500.000 | 100,00 | 68,71 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 61.430.000 | 12 | 33.237.960 | 100,00 | 54,11 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 8.600.000 | 12 | 6.000.000 | 100,00 | 69,77 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 134.100.000 | 12 | 117.820.000 | 100,00 | 87,86 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 22 | 20.300.000 | 10 | 7.530.000 | 45,45 | 37,09 | Kecamatan Bontoa | Tidak Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.583.800 | 100,00 | 86,13 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 293.350.000 | 12 | 293.350.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | 1 | 2.925.000 | 1 | 2.925.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bontoa | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 1 | 2.925.000 | 1 | 2.925.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1 | 5.950.000 | 1 | 5.950.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6 | 14.630.000 | 4 | 5.940.000 | 66,67 | 40,60 | **Kecamatan Bontoa** | Tidak Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 2 | 37.150.000 | 2 | 37.150.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 3 | 40.050.120 | 3 | 22.450.000 | 100,00 | 56,05 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 202.250.000 | 2 | 201.014.495 | 100,00 | 99,39 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 33.825.000 | 1 | 32.925.000 | 100,00 | 97,34 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 845 | 96.050.000 | 845 | 96.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konusltasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 75 | 2.025.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Bontoa** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 700 | 48.400.000 | 700 | 45.950.000 | 100,00 | 94,94 | **Kecamatan Bontoa** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 500 | 35.625.000 | 500 | 35.625.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Camba** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 640 | 22.200.000 | 635 | 20.400.000 | 99,22 | 91,89 | **Kecamatan Camba** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 960.000 | 2 | 900.000 | 100,00 | 93,75 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 860.000 | 1 | 720.000 | 100,00 | 83,72 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 750.000 | 1 | 720.000 | 100,00 | 96,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.070.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 84,11 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat dae-rah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 780.000 | 4 | 780.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bu-lan | 336 | 1.937.560.403 | 336 | 1.856.845.359 | 100,00 | 95,83 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi-kasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 46.860.000 | 11 | 46.860.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 4.530.000 | 1 | 3.521.000 | 100,00 | 77,73 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Ru-mah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 12.164.000 | 1 | 11.247.500 | 100,00 | 92,47 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logis-tik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 26.579.000 | 1 | 24.526.000 | 100,00 | 92,28 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 4.540.000 | 100,00 | 45,40 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 62.000.000 | 12 | 45.200.000 | 100,00 | 72,90 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 83.900.000 | 12 | 52.328.317 | 100,00 | 62,37 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 11.640.000 | 12 | 11.200.000 | 100,00 | 96,22 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 111.430.000 | 12 | 101.001.000 | 100,00 | 90,64 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 48.000.999 | 10 | 41.539.000 | 100,00 | 86,54 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 8.058.000 | 1 | 7.959.500 | 100,00 | 98,78 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 7.050.000 | 1 | 6.900.000 | 100,00 | 97,87 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 4.050.000 | 1 | 4.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.000.000 | 100,00 | 93,75 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.100.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 7 | 10.000.000 | 7 | 3.500.000 | 100,00 | 35,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2 | 26.600.000 | 2 | 26.000.000 | 100,00 | 97,74 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 29.550.000 | 3 | 22.050.000 | 100,00 | 74,62 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 34.000.000 | 1 | 33.100.000 | 100,00 | 97,35 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 500 | 53.650.000 | 500 | 53.300.000 | 100,00 | 99,35 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (imtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 75 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Cenrana** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 800 | 46.650.000 | 700 | 37.050.000 | 87,50 | 79,42 | **Kecamatan Cenrana** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 950.000 | 1 | 949.500 | 100,00 | 99,95 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 1.148 | 6.079.224.667 | 1148 | 5.601.585.942 | 100,00 | 92,14 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 46.420.000 | 11 | 46.420.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 12.212.100 | 5 | 12.212.100 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 8.098.000 | 2 | 7.552.000 | 100,00 | 93,26 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 63.565.000 | 12 | 63.565.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 10.650.000 | 12 | 10.650.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 182.020.000 | 12 | 182.020.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 29.949.000 | 100,00 | 99,83 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 89.230.000 | 0 | 88.692.687 | 0,00 | 99,40 | **Kecamatan Lau** | Tidak Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.500.000 | 100,00 | 96,15 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 1.314.000.000 | 12 | 1.311.000.000 | 100,00 | 99,77 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 2.640.000 | 1 | 2.640.000 | 50,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tidak Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2 | 32.765.000 | 2 | 32.765.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 9.060.000 | 3 | 9.060.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 2.355.000 | 12 | 2.355.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 500 | 41.575.000 | 500 | 41.575.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 500 | 22.750.000 | 500 | 22.750.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Lau** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 990.000 | 1 | 0 | 50,00 | 0,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tidak Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 990.000 | 1 | 990.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 990.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 90,91 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.050.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 85,71 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 1.056.000 | 12 | 900.000 | 100,00 | 85,23 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjan-gan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bu-lan | 476 | 2.554.261.278 | 476 | 2.377.069.077 | 100,00 | 93,06 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keu-angan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 91,67 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengka-pannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket abhan material yang disediakan | Paket | 5 | 792.000 | 5 | 792.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 1.777.500 | 2 | 1.777.500 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 10.772.500 | 2 | 10.764.500 | 100,00 | 99,93 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 20 | 1.100.000 | 19 | 980.000 | 95,00 | 89,09 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 33.815.000 | 12 | 33.815.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 90.310.000 | 11 | 75.024.371 | 91,67 | 83,07 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 11.860.000 | 12 | 11.420.000 | 100,00 | 96,29 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 159.217.625 | 12 | 159.210.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 1.000.000 | 10 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 3.280.000 | 2 | 2.250.000 | 200,00 | 68,60 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 77.345.000 | 100,00 | 85,94 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 185.400.000 | 12 | 179.400.000 | 300,00 | 96,76 | **Kecamatan Mallawa** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 4 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah laporan pelaksanan pelayanan non perizinan | Laporan | 13 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Mallawa** | Tidak Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12 | 550.000 | 12 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1.470.000 | 1 | 1.470.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 840 | 4.589.157.140 | 840 | 4.353.545.985 | 100,00 | 94,87 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 47.960.000 | 12 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 29 | 5.800.000 | 29 | 5.800.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 1.988.080 | 10 | 1.924.000 | 100,00 | 96,78 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 5.872.500 | 1 | 5.192.500 | 100,00 | 88,42 | Kecamatan Mandai | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 15.536.453 | 5 | 14.877.000 | 100,00 | 95,76 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 2.952.400 | 5 | 2.952.400 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 29.000.000 | 12 | 29.000.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 89.630.000 | 12 | 47.068.020 | 100,00 | 52,51 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 7.320.000 | 12 | 7.320.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 143.680.000 | 12 | 143.680.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 30 | 12.440.000 | 30 | 12.202.500 | 100,00 | 98,09 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 6.790.000 | 1 | 6.190.000 | 100,00 | 91,16 | Kecamatan Mandai | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 5.995.000 | 1 | 5.995.000 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Mandai | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 85.898.000 | 100,00 | 95,44 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 71.117.250 | 100,00 | 79,02 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 1.271.400.000 | 12 | 1.265.800.000 | 100,00 | 99,56 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | 1 | 4.140.000 | 1 | 4.140.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 1 | 4.095.000 | 1 | 3.900.000 | 100,00 | 95,24 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1 | 4.995.000 | 1 | 4.995.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 3.990.000 | 4 | 3.990.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2 | 22.478.000 | 2 | 22.428.800 | 100,00 | 99,78 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pem-berdayaan Masyarakat di Wila-yah Kecamatan | Laporan | 2 | 23.200.000 | 2 | 15.700.000 | 100,00 | 67,67 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5 | 292.250.000 | 5 | 272.343.692 | 100,00 | 93,19 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5 | 202.250.000 | 5 | 201.146.870 | 100,00 | 99,45 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Re-publik Indonesia, Tentara Na-sional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 35.980.000 | 1 | 35.980.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 300 | 26.000.000 | 300 | 25.950.000 | 100,00 | 99,81 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 600 | 44.500.000 | 600 | 44.500.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Mandai** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 534.000 | 100,00 | 97,09 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 503.000 | 100,00 | 91,45 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi-nasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 518.000 | 100,00 | 94,18 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan pe-rubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 550.000 | 1 | 518.000 | 100,00 | 94,18 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat dae-rah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bu-lan | 744 | 4.441.582.587 | 744 | 4.197.389.865 | 100,00 | 94,50 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 26 | 3.300.000 | 26 | 3.300.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 225.000 | 1 | 225.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 16 | 1.889.500 | 16 | 1.865.000 | 100,00 | 98,70 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 8.100.000 | 3 | 7.850.750 | 100,00 | 96,92 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 2.850.000 | 7 | 2.599.400 | 100,00 | 91,21 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Peralatan mesin lainnya yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 75,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 60.080.000 | 12 | 60.080.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 53.260.000 | 12 | 45.154.462 | 100,00 | 84,78 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 150.060.000 | 1 | 149.330.000 | 100,00 | 99,51 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 7.750.000 | 2 | 7.746.000 | 100,00 | 99,95 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 12 | 965.000 | 12 | 965.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 2.050.000 | 12 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 81.899.550 | 100,00 | 91,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 87.431.900 | 100,00 | 97,15 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 2 | 90.000.000 | 2 | 87.891.800 | 100,00 | 97,66 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 2.050.000 | 1 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 736.800.000 | 2 | 736.800.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 1 | 2.050.000 | 1 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 12 | 2.050.000 | 12 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 1.120.000 | 4 | 1.120.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 4 | 20.803.500 | 4 | 20.740.000 | 100,00 | 99,69 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 32.625.000 | 4 | 32.600.000 | 100,00 | 99,92 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.023.656 | 100,00 | 99,39 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.569.077 | 100,00 | 99,66 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.673.435 | 100,00 | 99,71 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 32.250.000 | 2 | 32.250.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 400 | 87.575.000 | 400 | 87.475.000 | 100,00 | 99,89 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 4 | 45.075.000 | 4 | 45.075.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Maros Baru** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 790.000 | 2 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1.530.000 | 1 | 1.530.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 890.000 | 1 | 890.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 640.000 | 1 | 640.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 1.065.000 | 4 | 1.065.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 420 | 2.436.145.759 | 420 | 2.325.148.274 | 100,00 | 95,44 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11 | 54.780.000 | 11 | 54.780.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 30 | 3.300.000 | 30 | 3.300.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 3.160.000 | 1 | 3.045.000 | 100,00 | 96,36 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 9.203.000 | 1 | 8.373.000 | 100,00 | 90,98 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 26.210.000 | 1 | 25.160.000 | 100,00 | 95,99 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 2.800.000 | 1 | 2.800.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 45.525.000 | 12 | 45.525.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 49.690.000 | 12 | 48.843.014 | 100,00 | 98,30 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 87.200.000 | 12 | 87.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 19.000.000 | 15 | 15.293.000 | 100,00 | 80,49 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 2.750.000 | 12 | 2.750.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1 | 6.690.000 | 1 | 6.690.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 7 | 4.200.000 | 7 | 4.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2 | 28.065.000 | 2 | 26.315.000 | 100,00 | 93,76 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 32.700.000 | 1 | 32.700.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 300 | 25.700.000 | 300 | 25.700.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 500 | 42.160.000 | 500 | 42.160.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Marusu** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12,00 | 2.000.000 | 12,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2,00 | 2.000.000 | 2,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 378,00 | 2.569.866.866 | 378,00 | 2.569.866.866 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12,00 | 46.860.000 | 12,00 | 42.599.956 | 100 | 90,91 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 35,00 | 20.000.250 | 35,00 | 13.975.000 | 100 | 69,87 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 4,00 | 5.040.000 | 4,00 | 4.867.000 | 100 | 96,57 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1,00 | 7.833.000 | 1,00 | 7.443.000 | 100 | 95,02 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 25,00 | 59.125.000 | 20,00 | 56.125.000 | 80 | 94,93 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12,00 | 88.900.000 | 8,00 | 46.931.477 | 66,6667 | 52,79 | **Kecamatan Moncongloe** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 25,00 | 14.200.000 | 16,00 | 12.500.000 | 64 | 88,03 | **Kecamatan Moncongloe** | Tidak Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12,00 | 114.830.000 | 12,00 | 114.834.763 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 12,00 | 24.000.000 | 12,00 | 23.908.000 | 100 | 99,62 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait | Dokumen | 0,00 | 9.100.000 | 0,00 | 9.100.000 | #DIV/0! | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | #DIV/0! |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1,00 | 10.000.000 | 1,00 | 10.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Dokumen | 1,00 | 22.250.000 | 1,00 | 21.500.000 | 100 | 96,63 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 1,00 | 5.000.000 | 1,00 | 5.000.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 1,00 | 5.000.000 | 1,00 | 4.700.000 | 100 | 94,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1,00 | 5.200.000 | 1,00 | 5.200.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah dokumen desa yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Dokumen | 5,00 | 6.149.900 | 5,00 | 6.050.000 | 100 | 98,38 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2,00 | 6.149.900 | 2,00 | 6.050.000 | 100 | 98,38 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2,00 | 33.650.000 | 2,00 | 21.950.000 | 100 | 65,23 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 700,00 | 35.250.000 | 700,00 | 35.250.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 500,00 | 5.150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tidak Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 800,00 | 36.425.000 | 800,00 | 36.425.000 | 100 | 100,00 | **Kecamatan Moncongloe** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1,00 | 600.000 | 1,00 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 600.000 | 1,00 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Simbang** | Tidak Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 600.000 | 1,00 | 600000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1,00 | 885.000 | 1,00 | 360000 | 100,00 | 40,68 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bu-lan | 26,00 | 2.356.082.204 | 26,00 | 1.820.311.534 | 100,00 | 77,26 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 392,00 | 47.960.000 | 392,00 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kan-tor yang Disediakan | Paket | 28,00 | 2.508.000 | 0,00 | 2.508.000 | 0,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tidak Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1,00 | 1.722.000 | 0,00 | 1.722.000 | 0,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tidak Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 6,00 | 25.898.000 | 6,00 | 25.679.000 | 100,00 | 99,15 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7,00 | 6.200.000 | 7,00 | 6.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 13,00 | 52.200.000 | 12,00 | 51.525.000 | 92,31 | 98,71 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Penyelenggaraan rapat koordi-nasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 36,00 | 73.020.000 | 36,00 | 52.073.794 | 100,00 | 71,31 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 12,00 | 29.500.000 | 11,00 | 27.250.000 | 91,67 | 92,37 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1,00 | 6.880.000 | 1,00 | 6.880.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2,00 | 96.840.000 | 2,00 | 92.800.000 | 100,00 | 95,83 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 12,00 | 13.900.000 | 12,00 | 12.917.500 | 100,00 | 92,93 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 12,00 | 5.000.000 | 12,00 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | #VALUE! | 3.050.000 | 1,00 | 3.050.000 | #VALUE! | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | #VALUE! |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1,00 | 4.250.000 | 1,00 | 4.250.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2,00 | 2.800.000 | 2,00 | 2.800.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2,00 | 26.600.000 | 2,00 | 26.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1,00 | 5.450.000 | 1,00 | 5.450.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1,00 | 33.050.000 | 1,00 | 33.050.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 250,00 | 34.200.000 | 250,00 | 34.200.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 900,00 | 20.400.000 | 900,00 | 20.400.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Simbang** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2,00 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 400.000 | 100,00 | 40,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 400.000 | 100,00 | 40,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 400.000 | 100,00 | 40,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1,00 | 2.000.000 | 1 | 200.000 | 100,00 | 10,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Evaluasi kinerja perangkat dae-rah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4,00 | 2.000.000 | 4 | 500.000 | 100,00 | 25,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bu-lan | 546,00 | 3.186.972.645 | 546 | 3.040.230.873 | 100,00 | 95,40 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 11,00 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kan-tor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tidak Tercapai |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1,00 | 10.000.000 | 1 | 9.990.000 | 100,00 | 99,90 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 17.321.000 | 1 | 16.243.000 | 100,00 | 93,78 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1,00 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12,00 | 58.000.000 | 12 | 58.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12,00 | 64.050.000 | 11 | 49.050.000 | 91,67 | 76,58 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12,00 | 10.650.000 | 12 | 9.000.000 | 100,00 | 84,51 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12,00 | 122.500.000 | 12 | 113.820.000 | 100,00 | 92,91 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10,00 | 16.000.000 | 10 | 13.358.000 | 100,00 | 83,49 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1,00 | 7.000.000 | 1 | 6.660.000 | 100,00 | 95,14 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1,00 | 5.750.000 | 1 | 5.500.000 | 100,00 | 95,65 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12,00 | 90.000.000 | 12 | 89.205.000 | 100,00 | 99,12 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Peningkatan efektifitas,Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12,00 | 117.600.000 | 12 | 117.200.000 | 100,00 | 99,66 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 1,00 | 4.000.000 | 1 | 3.900.000 | 100,00 | 97,50 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkat dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 1,00 | 4.000.000 | 1 | 3.900.000 | 100,00 | 97,50 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1,00 | 4.850.000 | 1 | 4.850.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 7,00 | 4.100.000 | 7 | 3.960.000 | 100,00 | 96,59 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2,00 | 32.000.000 | 2 | 32.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3,00 | 21.030.000 | 3 | 17.030.000 | 100,00 | 80,98 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1,00 | 202.250.000 | 1 | 201.123.274 | 100,00 | 99,44 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1,00 | 34.750.000 | 1 | 34.750.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 500,00 | 38.050.000 | 500 | 37.750.000 | 100,00 | 99,21 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,<br>Regional, dan Nasional | Orang | 800,00 | 34.800.000 | 800 | 34.600.000 | 100,00 | 99,43 | **Kecamatan Tanralili** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 240 | 10.600.000 | 240 | 10.600.000 | 100,00 | 100,00 | **Kecamatan Turikale** | Tercapai |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2,00 | 2.240.000 | 2,00 | 2.240.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 3.640.000 | 1,00 | 3.600.000 | 100,00 | 98,90 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 4.579.100 | 1,00 | 3.960.000 | 100,00 | 86,48 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 2.340.000 | 1,00 | 2.265.000 | 100,00 | 96,79 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1,00 | 2.530.000 | 1,00 | 2.270.000 | 100,00 | 89,72 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1,00 | 31.654.000 | 1,00 | 30.202.110 | 100,00 | 95,41 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1,00 | 6.100.000 | 1,00 | 1.870.000 | 100,00 | 30,66 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 392,00 | 2.730.187.159 | 392,00 | 2.562.155.598 | 100,00 | 93,85 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 14,00 | 160.050.000 | 14,00 | 160.050.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1,00 | 3.193.000 | 1,00 | 2.764.500 | 100,00 | 86,58 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Real-isasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bu-lanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bu-lanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12,00 | 4.413.000 | 12,00 | 4.192.000 | 100,00 | 94,99 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengka-pannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 45,00 | 12.000.000 | 45,00 | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan komponen in-stalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen In-stalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dise-diakan | Paket | 5,00 | 1.475.000 | 5,00 | 1.475.000 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 30.000.000 | 1,00 | 29.900.000 | 100,00 | 99,67 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1,00 | 5.265.000 | 1,00 | 4.874.500 | 100,00 | 92,58 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 14,00 | 60.314.500 | 12,00 | 49.177.000 | 85,71 | 81,53 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2,00 | 3.106.000 | 2,00 | 3.006.000 | 100,00 | 96,78 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Laporan | 1,00 | 3.000.000 | 1,00 | 2.400.000 | 100,00 | 80,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1,00 | 30.340.000 | 1,00 | 26.300.000 | 100,00 | 86,68 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 14,00 | 32.532.500 | 1,00 | 31.450.000 | 7,14 | 96,67 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tidak Tercapai |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1,00 | 1.032.500 | 1,00 | 330.000 | 100,00 | 31,96 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 1,00 | 3.900.000 | 1,00 | 3.520.000 | 100,00 | 90,26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 3,00 | 30.000.000 | 3,00 | 29.875.000 | 100,00 | 99,58 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2,00 | 10.000.000 | 2,00 | 9.925.000 | 100,00 | 99,25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 50,00 | 37.569.050 | 5,00 | 12.600.000 | 10,00 | 33,54 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 200,00 | 14.495.200 | 200,00 | 10.547.200 | 100,00 | 72,76 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | 50,00 | 15.943.750 | 50,00 | 10.672.800 | 100,00 | 66,94 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | 4,00 | 26.473.350 | 4,00 | 20.330.600 | 100,00 | 76,80 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pembentukan paskibraka | Jumlah Paskibraka | Orang | 250,00 | 1.217.626.000 | 250,00 | 1.203.124.500 | 100,00 | 98,81 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraja duta pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | 5,00 | 24.136.650 | 5,00 | 23.622.650 | 100,00 | 97,87 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Orang | 50 | 7.770.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tidak Tercapai |
| | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | Orang | 5.000 | 33.587.010.690 | ###### | 33.539.950.790 | 100,00 | 99,86 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pelaksanaan tugas paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kegiatan | 2 | 4.000.000 | 2,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah | Orang | 100 | 6.615.000 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 150 | 116.747.000 | 150,00 | 116.574.000 | 100,00 | 99,85 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 100 | 18.731.000 | 100,00 | 18.695.000 | 100,00 | 99,81 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 2 | 6.620.000 | 2,00 | 6.551.000 | 100,00 | 98,96 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |
| | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 100 | 30.000.000 | 100,00 | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | Tercapai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7,00 | | 8 | 9 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 2 | 18.227.000 | 2,00 | 1.999.500 | 100,00 | 10,97 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum korodinasi pimpinan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 12 | 859.593.000 | 12,00 | 812.538.000 | 100,00 | 94,53 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tercapai |

## C. EVALUASI PELAKSANAAN PRIORITAS KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

Dalam melakukan pengukuran terhadap capaian prioritas tahun 2024, digunakan skala peringkat kinerja yang terdapat dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.325**
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 90,1 | Sangat Tinggi |
| 2 | 75,1 ≤ 90 | Tinggi |
| 3 | 65,1 ≤ 75 | Sedang |
| 4 | 50,1 ≤ 65 | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

**Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017**

Dalam melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas pembangunan tahun 2024 maka perlu diperhatikan konsistensi antara prioritas tahun 2024 dengan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 tahun pelaksanaan 2024. Hasil evaluasi yang dilaksanakan terkait kinerja prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.326**

**Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Tahun 2024**

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024 | SASARAN DALAM RPJMD | | INDIKATOR | Target 2024 | Realisasi 2024 | CAPAIAN | CAPAIAN PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Optimalnsasi Pengelolaan Potensi Ekonomi lokal secara kewilayahan yang mendukung | 1 | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah Terhadap PDRB | Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah | 6,24 | 4,11 | 65,87 | 82,13 |
| | | | | PDRB Perkapita | 53,08 | 69,21 | 130,39 | |
| | | 2 | Terkendalinya laju inflasi | Laju Inflasi | 3,47 | 1,74 | 50,14 | |
| 2 | Penguatan infrastruktur penunjang aksesbiitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat | 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Layanan Infrastruktur | 3,26 | 3,14 | 96,32 | 99,68 |
| | | 2 | Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat | Indeks Harga Konsumen | 102,99 | 106,13 | 103,05 | |
| 3 | Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kondusitifitas wilayah | 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | 73,00 | 64,83 | 88,81 | 92,72 |
| | | 2 | Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3,26 | 3,15 | 96,63 | |
| 4 | Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan | 1 | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | Indeks Kualitas Udara | 87,80 | 93,04 | 105,97 | 95,71 |
| | | 2 | | Indeks Kualitas Air | 50,40 | 60,00 | 119,05 | |
| | | 3 | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 53,50 | 53,25 | 99,53 | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024 | SASARAN DALAM RPJMD | | INDIKATOR | Target 2024 | Realisasi 2024 | CAPAIAN | CAPAIAN PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1 | Menurunnya Resiko Akibat Bencana | Indeks Ancaman Bencana | 15,19 | 16,30 | 107,31 | |
| | | 2 | | Indeks Kerugian | 6,30 | 6,45 | 102,38 | |
| | | 3 | | Indeks Kapasitas | 0,70 | 0,28 | 40,00 | |
| | Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat secara inklusif | 1 | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Indeks Pendidikan | 64,24 | 64,36 | 100,19 | 104,41 |
| | | 2 | | Indeks Kesehatan | 76,10 | 82,72 | 108,70 | |
| | | 2 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan | 3,26 | 3,77 | 115,64 | |
| | | 3 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 90,31 | 89,50 | 99,10 | |
| | | 4 | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat | 3,26 | 3,07 | 94,17 | |

**Sumber : Bapperida Kab. Maros (Diolah), 2025**

Secara umum kinerja pembangunan Kabupaten Maros secara umum sebesar 90,01 persen dengan kategori kinerja berdasarkan Tabel 3.4 adalah **SANGAT TINGGI**, dengan masing-masing capaian prioritas adalah sebagai berikut :

1. **Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi lokal secara kewilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.**

   Prioritas ini sesuai dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros maka digunakan beberapa indikator untuk dijadikan dasar pengukuran, yaitu; (1) Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah, (2) PDRB Perkapita, dan (3) Laju Inflasi.

   Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, capaian prioritas 1 sebesar 82,13 persen dengan kategori kinerja adalah **TINGGI.** Hal ini disebabkan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja prioritas 1 telah melampaui target yang ditetapkan. Indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan adalah; (1), Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah, dan (2) Laju Inflasi.

   Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi lokal secara kewilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, diantaranya :

   a. Rendahnya pertumbuhan Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah disebabkan peranan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor industri pengolahan sangat dominan terhadap PDRB Kabupaten Maros, Sektor transportasi dan pergudangan sangat dominan akibat adanya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sedangkan pada sektor industri pengolahan akibat adanya pabrik Semen Bosowa serta Pabrik Teh Cap Orang Tua. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan inetrvensi terkait proses produksi jasa pada kedua sektor lapangan usaha tersebut
   b. Laju inflasi pada tahun 2024 banyak dipengaruhi oleh dampak ekonomi global yang sedang tidak baik, dimana terjadi kenaikan harga sedangkan permintaan barang, utamanya kebutuhan pokok sangat tinggi di pasaran. Kenaikan harga komoditi makanan sangat memberikan andil terkait kenaikan inflasi.

2. **Penguatan infrakstruktur penunjang aksesibilitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat**

   Untuk mengukur kinerja prioritas 2 maka digunakan indikator (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Layanan Infrastruktur, dan (2). Indeks Harga Konsumen. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, capaian prioritas 2 sebesar 99,68 persen dengan kategori kinerja adalah **SANGAT TINGGI.**

   Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Penguatan infrakstruktur penunjang aksesbilitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Maros, diantaranya :

   a. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang diprogramkan oleh pemerintah sangat memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Begitu pun dengan pelayanan telekomunikasi yang mendapatkan nilai indeks kepuasan yang cukup tinggi. Masyarakat menilai bahwa layanan infrastruktur transportasi (darat dan laut), sanitasi, perumahan, dan persampahan tersedia dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dan listrik, masyarakat menilai bahwa infrastruktur sudah sangat memadai dan cukup mudah diakses. Pada sembilan

kategori tersebut, masyarakat memberikan nilai kinerja sangat baik dan baik atas usaha layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam hal layanan infrastruktur drainase, air minum, dan irigasi, masyarakat menilai bahwa pemerintah masih perlu berupaya lebih keras untuk mendorong ketersediaan dan kemudahan akses untuk infrastruktur tersebut.

b. Penurunan IHK Tahun 2024 menunjukkan semakin stabilnya harga-harga barang kebutuhan pokok yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat baik makanan maupun non makanan dapat terpenuhi dengan baik. Stabilnya harga barang kebutuhan pokok ini disebabkan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros untuk menstabilkan harga dilakukan secara intensif.. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya, operasi pasar murah yang rutin dilakukan utamanya pada saat menjelang hari raya, gerakan pangan murah yang menyediakan bahan-bahan pangan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta operasi bersama aparat dan stakeholder lainnya terkait kontrol harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional dan pasar modern se Kabupaten Maros.

**3. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kondusitifitas wilayah**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja prioritas 3 (tiga) adalah; (1) Nilai SAKIP, dan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, capaian prioritas 3 sebesar 92,72 persen dengan kategori kinerja adalah **SANGAT TINGGI.** Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait SDM penduduk Kabupaten Maros, diantaranya :

a) Realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 sedikit menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan perumusan tujuan dan sasaran strategis pada level pemerintah daerah sudah cukup baik, IKU telah memiliki defenisi operasional pengukuran kinerja, pelaporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu, telah dilaksanakan evaluasi internal terhadap impelementasi SAKIP**.**

b) Penurunan kinerja IKM pada tahun 2024 disebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan pada beberapa sektor, yaitu; (1) sektor infrastruktur yang terdiri dari pelayanan terkait air limbah, perumahan, drainase, transportasi laut dan pelayanan persampahan dan (2) Sektor social.

**4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan antisipasi perubahan iklim.**

a) Indikator yang digunakan untuk mengukur Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan antisipasi perubahan iklim adalah; (1) Indeks Kualitas Udara, (2) Indeks Kualitas Air, (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan, (4) Indeks ancaman bencana, (5) Indeks Kerugian, dan (6) Indeks Kapasitas Bencana. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, capaian prioritas 4 sebesar 95,71 persen dengan kategori kinerja adalah **SANGAT TINGGI.** Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kualitas Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan antisipasi perubahan iklim adalah :

   a) Faktor yang menjadi penyebab terjadi pencemaran udara di Kabupaten Maros adalah penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Sedangkan faktor yang mendorong sehingga pencemaran udara masih cukup relatif rendah adalah masih adanya areal hutan, keberadaan RTH, dan sepanjang jalan masih terdapat pepohonan, sehingga tingkat pencemaran udara masih dapat ditekan.

b) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air di Kabupaten Maros adalah limbah cair/padat dari domestik, indutri dan pertanian. Pada tingkatan pencemaran sedang, tingkat pencemaran sungai dapat normal dengan sendirinya karena sifat air sungai yang mengalir.
c) Faktor yang menjadi penyebab terjadi pencemaran udara di Kabupaten Maros adalah penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Sedangkan faktor yang mendorong sehingga pencemaran udara masih cukup relatif rendah adalah masih adanya areal hutan, keberadaan RTH, dan sepanjang jalan masih terdapat pepohonan, sehingga tingkat pencemaran udara masih dapat ditekan.
d) Faktor yang menyebabkan Indeks Kerugian masih cukup tinggi adalah tingkat kerugian yang disebabkan oleh bencana tidak dapat diukur dan diperkirakan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Maros telah menganggarkan dana untuk melakukan perbaikan rumah, ataupun penggantian kerugian yang diperoleh masyarakat akibat kejadian bencana.
e) Faktor yang menyebabkan Indeks Kerugian masih cukup tinggi adalah tingkat kerugian yang disebabkan oleh bencana tidak dapat diukur dan diperkirakan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Maros telah menganggarkan dana untuk melakukan perbaikan rumah, ataupun penggantian kerugian yang diperoleh masyarakat akibat kejadian bencana.

**5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat secara inklusif.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat secara inklusif adalah; (1) Indeks Pendidikan, (2) Indeks Kesehatan, (3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan, (4) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, capaian prioritas 5 sebesar 100 persen dengan kategori kinerja adalah **SANGAT TINGGI.**

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kualitas sumberdaya manusia masyarakat secara inklusif adalah :

a. Rendahnya IPG Kabupaten Maros disebabkan budaya sebagian masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan pendapatan sendiri, karena laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan akan mencari nafkah. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian IPG tahun 2023 antara lain banyaknya organisasi pemerintah dan swasta yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan.
b. Indeks kesehatan, yaitu masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). Selain itu masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara teratur dan lengkap di fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap pencapaian Indeks kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Maros melalui instansi terkait telah melakukan sosialisasi secara intensif dengan bantuan kader-kader posyandu dan kader PKK terkait kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, balita dengan melakukan imunisasi lengkap, selain itu peningkatan sarana prasarana kesehatan juga telah dilakukan baik di tingkat puskesmas, puskesmas pembantu, maupun pada tingkat rumah sakit daerah.

c. Layanan terhadap keagamaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap masyarakat dan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
e. Penurunan kinerja IKM Layanan Minimum Masyarakat pada tahun 2024 disebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan pada beberapa sektor, yaitu; (1) sektor infrastruktur yang terdiri dari pelayanan terkait air limbah, perumahan, drainase, transportasi laut dan pelayanan persampahan dan (2) Sektor sosial.

## 2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan RKPD bermaksud utnuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan RPKPD Kabupaten Maros tahun 2024. Evaluasi terhadap RKPD tahun 2024 bertujuan utnuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program/kegiatan prioritas daerah dalam RKPD tahun 2024 dan sasasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2023. Berkenaan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan , evaluasi RKPD tahun 2024 dapat dilakukan dengan melihat capaian realisasi keuangan dan pencapaian kinerja perangkat daerah yang terangkum dalam tabel evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2024. Untuk evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara lebih lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 327**

**Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **3.143.830.280.570,00** | **100,00** | **1.886.706.168.342,00** | **100** | **324.342.450.001** | **100** | **316.477.653.730** | **100,00** | **97,58** | **100** | **2.203.183.822.072** | **200,00** | **70,08** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **290.250.000,00** | **33,00** | **174.150.000,00** | **13** | **30.850.000** | **13** | **30.850.000** | **100,00** | **100,00** | **46** | **205.000.000** | **83,64** | **70,63** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 154.250.000,00 | 6,00 | 92.550.000,00 | 2 | 7.600.000 | 2 | 7.600.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 100.150.000 | 80,00 | 64,93 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 38.000.000,00 | 3,00 | 22.800.000,00 | 1 | 3.800.000 | 1 | 3.800.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 26.600.000 | 80,00 | 70,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 19.000.000,00 | 3,00 | 11.400.000,00 | 1 | 4.100.000 | 1 | 4.100.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 15.500.000 | 80,00 | 81,58 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 20.500.000,00 | 3,00 | 12.300.000,00 | 1 | 3.950.000 | 1 | 3.950.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 16.250.000 | 80,00 | 79,27 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 19.750.000,00 | 3,00 | 11.850.000,00 | 1 | 4.100.000 | 1 | 4.100.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 15.950.000 | 80,00 | 80,76 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 20.500.000,00 | 3,00 | 12.300.000,00 | 1 | 3.650.000 | 1 | 3.650.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 15.950.000 | 80,00 | 77,80 | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 18.250.000,00 | 12,00 | 10.950.000,00 | 6 | 3.650.000 | 6 | 3.650.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | 14.600.000 | 90,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **140,00** | **3.128.475.780.570,00** | **84,00** | **1.877.085.468.342,00** | **26** | **322.483.650.001** | **26** | **314.842.609.903** | **100,00** | **97,63** | **110** | **2.191.928.078.245** | **78,57** | **70,06** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 1.564.250.140.285,00 | ######### | 938.550.084.171,00 | 41.132 | 321.708.030.001 | 41132 | 314.160.929.903 | 100,00 | 97,65 | ##### | 1.252.711.014.074 | 80,00 | 80,08 | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 1.560.372.040.285,00 | 36,00 | 936.223.224.171,00 | 12 | 765.820.000 | 12 | 672.780.000 | 100,00 | 87,85 | 48 | 936.896.004.171 | 80,00 | 60,04 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 3.829.100.000,00 | 3,00 | 2.297.460.000,00 | 1 | 4.900.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 81,63 | 4 | 2.301.460.000 | 80,00 | 60,10 | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 5,00 | 24.500.000,00 | 3,00 | 14.700.000,00 | 1 | 4.900.000 | 1 | 4.900.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 19.600.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **24.500.000,00** | **3,00** | **166.500.000,00** | **1** | **48.100.000** | **1** | **43.000.000** | **100,00** | **89,40** | **4** | **209.500.000** | **80,00** | **855,10** | | |
| 1 | Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 5,00 | 189.500.000,00 | 3,00 | 113.700.000,00 | 1 | 27.800.000 | 1 | 22.700.000 | 100,00 | 81,65 | 4 | 136.400.000 | 80,00 | 71,98 | | |
| 2 | Rekonsiliasi dan penyuluhan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 88.000.000,00 | 3,00 | 52.800.000,00 | 1 | 20.300.000 | 1 | 20.300.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 73.100.000 | 80,00 | 83,07 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **########** | **101.500.000,00** | **8.814,00** | **317.100.000,00** | **2.938** | **65.800.000** | **2.938** | **14.000.000** | **100,00** | **21,28** | **11.752** | **331.100.000** | **80,00** | **326,21** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 175,00 | 329.000.000,00 | 105,00 | 197.400.000,00 | 35 | 14.000.000 | 35 | 14.000.000 | 100,00 | 100,00 | 140 | 211.400.000 | 80,00 | 64,26 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 5,00 | 70.000.000,00 | 3,00 | 42.000.000,00 | 1 | 25.900.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4 | 42.000.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| 3 | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 5,00 | 129.500.000,00 | 3,00 | 77.700.000,00 | 1 | 25.900.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4 | 77.700.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **8,00** | **5.688.290.000,00** | **8,00** | **3.412.974.000,00** | **7** | **732.115.250** | **7** | **607.562.027** | **100,00** | **82,99** | **15** | **4.020.536.027** | **187,50** | **70,68** | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 55,00 | 2.904.145.000,00 | 33,00 | 1.742.487.000,00 | 11 | 15.555.250 | 11 | 14.135.000 | 100,00 | 90,87 | 44 | 1.756.622.000 | 80,00 | 60,49 | | |
| 2 | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70,00 | 77.776.250,00 | 42,00 | 46.665.750,00 | 14 | 15.840.000 | 14 | 14.225.000 | 100,00 | 89,80 | 56 | 60.890.750 | 80,00 | 78,29 | | |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20,00 | 79.200.000,00 | 12,00 | 47.520.000,00 | 4 | 87.175.500 | 4 | 77.594.500 | 100,00 | 89,01 | 16 | 125.114.500 | 80,00 | 157,97 | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15,00 | 435.877.500,00 | 9,00 | 261.526.500,00 | 3 | 53.542.000 | 3 | 53.042.000 | 100,00 | 99,07 | 12 | 314.568.500 | 80,00 | 72,17 | | |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 267.710.000,00 | 3,00 | 160.626.000,00 | 12 | 79.250.000 | 12 | 79.250.000 | 100,00 | 100,00 | 15 | 239.876.000 | 300,00 | 89,60 | | |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 50.000.000,00 | 36,00 | 30.000.000,00 | 12 | 456.752.500 | 12 | 345.315.527 | 100,00 | 75,60 | 48 | 375.315.527 | 80,00 | 750,63 | | |
| 7 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 60,00 | 396.250.000,00 | 36,00 | 237.750.000,00 | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 261.750.000 | 80,00 | 66,06 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60,00** | **1.477.331.250,00** | **36,00** | **886.398.750,00** | **12** | **449.034.750** | **9** | **436.400.000** | **75,00** | **97,19** | **45** | **1.322.798.750** | **75,00** | **89,54** | | |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 10,00 | 5.972.960.000,00 | 6,00 | 3.583.776.000,00 | 2 | 159.784.750 | 2 | 155.650.000 | 100,00 | 97,41 | 8 | 3.739.426.000 | 80,00 | 62,61 | | |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 250,00 | 3.709.605.000,00 | 150,00 | 2.225.763.000,00 | 50 | 289.250.000 | 50 | 280.750.000 | 100,00 | 97,06 | 200 | 2.506.513.000 | 80,00 | 67,57 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **135,00** | **2.263.355.000,00** | **81,00** | **1.358.013.000,00** | **27** | **402.900.000** | **27** | **377.294.900** | **100,00** | **93,64** | **108** | **1.735.307.900** | **80,00** | **76,67** | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 15,00 | 2.177.000.000,00 | 9,00 | 1.306.200.000,00 | 3 | 14.500.000 | 3 | 14.500.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | 1.320.700.000 | 80,00 | 60,67 | | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 2.014.500.000,00 | 36,00 | 1.208.700.000,00 | 12 | 18.000.000 | 12 | 7.984.900 | 100,00 | 44,36 | 48 | 1.216.684.900 | 80,00 | 60,40 | | |
| 3 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 72.500.000,00 | 36,00 | 43.500.000,00 | 12 | 370.400.000 | 12 | 354.810.000 | 100,00 | 95,79 | 48 | 398.310.000 | 80,00 | 549,39 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **60,00** | **90.000.000,00** | **36,00** | **54.000.000,00** | **12** | **130.000.000** | **12** | **125.936.900** | **100,00** | **96,87** | **48** | **179.936.900** | **80,00** | **199,93** | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 15,00 | 1.100.000.000,00 | 9,00 | 660.000.000,00 | 3 | 30.000.000 | 3 | 29.939.400 | 100,00 | 99,80 | 12 | 689.939.400 | 80,00 | 62,72 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50,00 | 650.000.000,00 | 30,00 | 390.000.000,00 | 10 | 60.000.000 | 3 | 57.952.500 | 30,00 | 96,59 | 33 | 447.952.500 | 66,00 | 68,92 | | |
| 3 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Unit | 100,00 | 150.000.000,00 | 60,00 | 90.000.000,00 | 20 | 40.000.000 | 4 | 38.045.000 | 20,00 | 95,11 | 64 | 128.045.000 | 64,00 | 85,36 | | |
| | **Pengelolaan Pendidikan** | **Persentase Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan** | **Persen** | **100,00** | **713.604.836.229,00** | **91,01** | **208.676.247.000,49** | **100** | 158.934.423.429 | **96,28** | 95.455.684.601 | 96,28 | 60,06 | 187,3 | 304.131.931.601 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan pendidikan dasar** | **Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan** | **Orang** | **500,00** | **370.995.288.430,00** | **300,00** | **141.622.536.046,00** | **100** | **83.291.120.786** | **0** | **79.793.176.412** | **0,00** | **95,80** | **300** | **221.415.712.458** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Unit | 9,00 | 2.546.271.000,00 | - | - | 46.225 | 848.757.000 | 3 | 830.185.000 | 0,01 | 97,81 | 3 | 830.185.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pembangunan peprustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 3,00 | 741.000.000,00 | - | - | 3 | 247.000.000 | 1 | 241.130.900 | 33,33 | 97,62 | 1 | 241.130.900 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 5,00 | 9.382.994.500,00 | 33,00 | 4.357.269.181,00 | 1 | 1.876.598.900 | 10 | 1.826.295.800 | 1000,00 | 97,32 | 43 | 6.183.564.981 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Rehabilitasi sedang/berta ruang guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 50,00 | 4.819.410.000,00 | 10,00 | 1.162.660.746,00 | 10 | 963.882.000 | 7 | 954.417.020 | 70,00 | 99,02 | 17 | 2.117.077.766 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 35,00 | 4.935.400.000,00 | 6,00 | 980.190.103,00 | 7 | 987.080.000 | 5 | 972.937.800 | 71,43 | 98,57 | 11 | 1.953.127.903 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Rehabilitasi sedang/berta rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 25,00 | 2.377.500.000,00 | 2,00 | 368.604.728,00 | 5 | 475.500.000 | 4 | 463.508.200 | 80,00 | 97,48 | 6 | 832.112.928 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 182,00 | 50.818.920.680,00 | 170,00 | 14.592.463.750,00 | 4 | 10.163.784.136 | 3 | 9.735.695.000 | 75,00 | 95,79 | 173 | 24.328.158.750 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 59,00 | 7.000.000.000,00 | 44,00 | 5.503.931.800,00 | 5 | 1.400.000.000 | 8 | 1.279.730.000 | 160,00 | 91,41 | 52 | 6.783.661.800 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 9 | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 40,00 | 1.865.250.000,00 | 400,00 | 239.680.000,00 | 8 | 373.050.000 | 50 | 321.650.000 | 625,00 | 86,22 | 450 | 561.330.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 10 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Orang | 750,00 | 5.002.100.000,00 | 100,00 | 659.500.000,00 | 150 | 1.000.420.000 | 200 | 747.120.000 | 133,33 | 74,68 | 300 | 1.406.620.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM (Pembayaran Jasa dibayarkan pertriwulan sesuai dengan jumlah Output selama 1 Tahun) |
| 11 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | ######## | 1.088.150.000,00 | 949,00 | 2.811.862.500,00 | 200 | 217.630.000 | 200 | 209.730.000 | 100,00 | 96,37 | 1149 | 3.021.592.500 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 12 | Pengelolaan dana BOS sekolah dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | ######## | 205.428.000.000,00 | 241,00 | 108.168.813.300,00 | 350 | 41.085.600.000 | 241 | 41.402.077.338 | 68,86 | 100,77 | 482 | 149.570.890.638 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 13 | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Orang | ######## | 556.350.000,00 | 1,20 | 196.552.500,00 | 241 | 111.270.000 | 482 | 110.770.000 | 200,00 | 99,55 | 483,2 | 307.322.500 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 14 | Pembangunan laboratorium sekolah dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | Ruang | ######## | 6.825.000.000,00 | 9,00 | 2.044.216.888,00 | 482 | 1.365.000.000 | 5 | 1.328.573.130 | 1,04 | 97,33 | 14 | 3.372.790.018 | 0,00 | 0,00 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 15 | Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 25,00 | 132.750.000,00 | 200,00 | 9.600.000,00 | 5 | 26.550.000 | 100 | 25.549.000 | 2000,00 | 96,23 | 300 | 35.149.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 16 | Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 150,00 | 50.850.000,00 | - | - | 100 | 16.950.000 | 50 | 15.049.000 | 50,00 | 88,78 | 50 | 15.049.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 17 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 250,00 | 157.750.000,00 | 2,00 | 30.000.000,00 | 50 | 31.550.000 | 2 | 30.599.000 | 4,00 | 96,99 | 4 | 60.599.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 18 | Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 300,00 | 158.715.000,00 | - | - | 2 | 52.905.000 | 100 | 52.905.000 | 5000,00 | 100,00 | 100 | 52.905.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 19 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3,00 | 50.850.000,00 | - | - | 100 | 16.950.000 | 1 | 15.949.000 | 1,00 | 94,09 | 1 | 15.949.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 20 | Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | 3,00 | 236.250.000,00 | - | - | 1 | 78.750.000 | 300 | 77.415.524 | 30000,00 | 98,31 | 300 | 77.415.524 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 21 | Pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 900,00 | 18.831.600.000,00 | - | - | 300 | 6.277.200.000 | 2 | 4.940.920.200 | 0,67 | 78,71 | 2 | 4.940.920.200 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 22 | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 12,00 | 21.368.388.000,00 | - | - | 4 | 7.122.796.000 | 19 | 6.604.633.000 | 475,00 | 92,73 | 19 | 6.604.633.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 23 | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 95,00 | 2.415.240.000,00 | 5,00 | 497.190.550,00 | 19 | 483.048.000 | 5 | 469.402.100 | 26,32 | 97,18 | 10 | 966.592.650 | 0,00 | 0,00 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 24 | Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 25,00 | 284.146.800,00 | - | - | 5 | 94.715.600 | 50 | 75.225.600 | 1000,00 | 79,42 | 50 | 75.225.600 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 25 | Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 250,00 | 357.150.000,00 | - | - | 50 | 119.050.000 | 241 | 117.670.000 | 482,00 | 98,84 | 241 | 117.670.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | ########## | 23.565.252.450,00 | - | - | 241 | 7.855.084.150 | 45 | 6.944.038.800 | 18,67 | 88,40 | 45 | 6.944.038.800 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan pendidikan menegah pertama** | **Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan** | **Orang** | **225,00** | **221.170.726.675,00** | **135,00** | **65.188.860.946,00** | **45** | **49.624.208.535** | **0** | **46.195.886.462** | **0,00** | **93,09** | **135** | **111.384.747.408** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pembangunan unit sekolah baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 3,00 | 7.527.000.000,00 | - | - | 22.120 | 2.509.000.000 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 2 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 5,00 | 1.397.390.000,00 | 5,00 | 1.202.050.700,00 | 1 | 279.478.000 | 2 | 277.011.185 | 200,00 | 99,12 | 7 | 1.479.061.885 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pembangunan laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 6,00 | 2.774.400.000,00 | - | - | 2 | 924.800.000 | 2 | 814.265.650 | 100,00 | 88,05 | 2 | 814.265.650 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 12,00 | 4.199.500.000,00 | 10,00 | 1.305.087.450,00 | 2 | 839.900.000 | 2 | 836.482.700 | 100,00 | 99,59 | 12 | 2.141.570.150 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6,00 | 17.338.182.000,00 | 3,00 | 1.137.000.100,00 | 2 | 3.467.636.400 | 17 | 3.396.419.480 | 850,00 | 97,95 | 20 | 4.533.419.580 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 6 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 51,00 | 1.280.100.000,00 | 1,00 | 356.586.000,00 | 17 | 426.700.000 | 2 | 421.804.000 | 11,76 | 98,85 | 3 | 778.390.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6,00 | 1.878.777.000,00 | 1,00 | 309.022.000,00 | 2 | 626.259.000 | 3 | 617.174.250 | 150,00 | 98,55 | 4 | 926.196.250 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 9,00 | 291.420.000,00 | 1,00 | 92.708.000,00 | 3 | 97.140.000 | 2 | 94.996.925 | 66,67 | 97,79 | 3 | 187.704.925 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 66,00 | 53.543.330.675,00 | 60,00 | 8.757.193.750,00 | 2 | 10.708.666.135 | 3 | 10.506.113.000 | 150,00 | 98,11 | 63 | 19.263.306.750 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 25,00 | 6.200.000.000,00 | 29,00 | 2.428.396.800,00 | 5 | 1.240.000.000 | 10 | 927.970.000 | 200,00 | 74,84 | 39 | 3.356.366.800 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 11 | pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 50,00 | 1.494.850.000,00 | 330,00 | 303.400.000,00 | 10 | 298.970.000 | 50 | 270.630.000 | 500,00 | 90,52 | 380 | 574.030.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Penyediaan pendidiik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Orang | 450,00 | 1.500.495.000,00 | - | - | 150 | 500.165.000 | 50 | 243.865.000 | 33,33 | 48,76 | 50 | 243.865.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM (Pembayaran Jasa dibayarkan pertriwulan sesuai dengan jumlah Output selama 1 Tahun) |
| 13 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 150,00 | 490.500.000,00 | - | - | 50 | 163.500.000 | 200 | 146.340.000 | 400,00 | 89,50 | 200 | 146.340.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 14 | pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama | Satuan Pendidikan | ########## | 1.138.700.000,00 | 148,00 | 334.250.000,00 | 250 | 227.740.000 | 74 | 221.887.000 | 29,60 | 97,43 | 222 | 556.137.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 370,00 | 95.195.500.000,00 | 148,00 | 48.005.911.096,00 | 74 | 19.039.100.000 | 74 | 18.697.373.762 | 100,00 | 98,21 | 222 | 66.703.284.858 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Orang | 222,00 | 304.146.000,00 | - | - | 74 | 101.382.000 | 148 | 100.082.000 | 200,00 | 98,72 | 148 | 100.082.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | Rehabilitasi sedang/berat ruang TU | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 444,00 | 954.000.000,00 | - | 917.163.050,00 | 148 | 318.000.000 | 1 | 315.015.700 | 0,68 | 99,06 | 1 | 1.232.178.750 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 5,00 | 154.050.000,00 | 100,00 | 12.650.000,00 | 1 | 30.810.000 | 100 | 27.260.000 | 10000,00 | 88,48 | 200 | 39.910.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 19 | Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 300,00 | 34.050.000,00 | - | - | 100 | 11.350.000 | 100 | 9.050.000 | 100,00 | 79,74 | 100 | 9.050.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 20 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 500,00 | 83.750.000,00 | 2,00 | 27.442.000,00 | 100 | 16.750.000 | 1 | 13.633.000 | 1,00 | 81,39 | 3 | 41.075.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 21 | Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 3,00 | 344.385.000,00 | - | - | 1 | 114.795.000 | 100 | 114.795.000 | 10000,00 | 100,00 | 100 | 114.795.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 22 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, | Kegiatan | 300,00 | 117.600.000,00 | - | - | 100 | 39.200.000 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi peserta didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 3,00 | 404.970.000,00 | - | - | 1 | 134.990.000 | 74 | 98.940.000 | 7400,00 | 73,29 | 74 | 98.940.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 222,00 | 10.952.541.000,00 | - | - | 74 | 3.650.847.000 | 11 | 3.443.341.760 | 14,86 | 94,32 | 11 | 3.443.341.760 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 25 | Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 33,00 | 85.935.000,00 | - | - | 11 | 28.645.000 | 43 | 28.645.000 | 390,91 | 100,00 | 43 | 28.645.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 26 | pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 129,00 | 9.900.000.000,00 | - | - | 43 | 3.300.000.000 | 2 | 4.056.034.000 | 4,65 | 122,91 | 2 | 4.056.034.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 27 | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 9,00 | 1.585.155.000,00 | - | - | 3 | 528.385.000 | 4 | 516.757.050 | 133,33 | 97,80 | 4 | 516.757.050 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **Jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan** | **Orang** | **20,00** | **106.039.097.000,00** | ######## | **809.650.008,49** | **4** | **21.207.819.400** | **0** | **19.479.940.761** | **0,00** | **91,85** | **22882** | **20.289.590.769** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Unit | ######## | 5.723.100.000,00 | - | - | 15.392 | 1.907.700.000 | 19 | 1.482.886.284 | 0,12 | 77,73 | 19 | 1.482.886.284 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 57,00 | 7.601.675.400,00 | - | - | 19 | 2.533.891.800 | 24 | 2.412.963.075 | 126,32 | 95,23 | 24 | 2.412.963.075 | 0,00 | 0,00 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 72,00 | 715.500.000,00 | - | - | 24 | 238.500.000 | 3 | 237.188.863 | 12,50 | 99,45 | 3 | 237.188.863 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 4 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | Paket | 15,00 | 9.250.000.000,00 | 5,00 | 124.790.000,00 | 3 | 1.850.000.000 | 1 | 1.838.050.200 | 33,33 | 99,35 | 6 | 1.962.840.200 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 5 | Penyelenggaraan proses belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Peserta Didik | 5,00 | 758.200.000,00 | 24,42 | 8,49 | 1 | 151.640.000 | 15.000 | 51.000.000 | ######## | 33,63 | 15024 | 51.000.008 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | ######## | 13.849.200.000,00 | - | - | 15.000 | 4.616.400.000 | 725 | 4.224.600.000 | 4,83 | 91,51 | 725 | 4.224.600.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM (Pembayaran Jasa dibayarkan pertriwulan sesuai dengan jumlah Output selama 1 Tahun) |
| 7 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | ######## | 794.835.000,00 | - | - | 725 | 264.945.000 | 150 | 61.545.000 | 20,69 | 23,23 | 150 | 61.545.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 8 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | ######## | 3.691.950.000,00 | 267,00 | 200.000.000,00 | 250 | 738.390.000 | 250 | 683.490.000 | 100,00 | 92,56 | 517 | 883.490.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 9 | Pengelolaan dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | ######## | 25.557.000.000,00 | 250,00 | 187.150.000,00 | 250 | 5.111.400.000 | 250 | 5.018.140.991 | 100,00 | 98,18 | 500 | 5.205.290.991 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Orang | ######## | 392.350.000,00 | 250,00 | 187.150.000,00 | 250 | 78.470.000 | 250 | 70.900.000 | 100,00 | 90,35 | 500 | 258.050.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 11 | Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | Orang | ########## | 230.650.000,00 | 50,00 | 43.450.000,00 | 250 | 46.130.000 | 50 | 45.730.000 | 20,00 | 99,13 | 100 | 89.180.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 12 | Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 150,00 | 313.747.800,00 | - | - | 50 | 104.582.600 | 1 | 68.522.000 | 2,00 | 65,52 | 1 | 68.522.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 13 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 5,00 | 615.225.000,00 | 2,00 | 67.110.000,00 | 1 | 123.045.000 | 1 | 60.850.000 | 100,00 | 49,45 | 3 | 127.960.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 14 | Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 3,00 | 636.000.000,00 | - | - | 1 | 212.000.000 | 1 | 206.313.969 | 100,00 | 97,32 | 1 | 206.313.969 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Fasilitasi komunitas belajar endidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | 3,00 | 634.725.000,00 | - | - | 1 | 211.575.000 | 14 | 211.575.000 | 1400,00 | 100,00 | 14 | 211.575.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Pembangunan ruang kelas baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 42,00 | 2.808.000.000,00 | - | - | 14 | 936.000.000 | 3 | 781.431.379 | 21,43 | 83,49 | 3 | 781.431.379 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 17 | Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 9,00 | 249.450.000,00 | - | - | 3 | 83.150.000 | 100 | 64.950.000 | 3333,33 | 78,11 | 100 | 64.950.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 18 | Pengadaan perlengkapan peserta didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 300,00 | 6.000.000.000,00 | - | - | 100 | 2.000.000.000 | 1 | 1.959.804.000 | 1,00 | 97,99 | 1 | 1.959.804.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | **Pengelolaan pendidikan non formal /kesetaraan** | **Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan non formal/kesetaraan** | **Orang** | **5,00** | **15.399.724.124,00** | **-** | **1.055.200.000,00** | **1** | **4.811.274.708** | **0** | **4.200.510.572** | **0,00** | **87,31** | **0** | **5.255.710.572** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | Unit | 819,00 | 104.850.000,00 | - | - | 273 | 34.950.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | 150,00 | 1.350.000.000,00 | - | - | 50 | 450.000.000 | 2 | 450.000.000 | 4,00 | 100,00 | 2 | 450.000.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 10,00 | 2.283.500.000,00 | 19,00 | 1.046.200.000,00 | 2 | 456.700.000 | 12 | 419.597.500 | 600,00 | 91,88 | 31 | 1.465.797.500 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Peningkatan kapasitas pengloelaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non-formal/Kesetaraan | Orang | 60,00 | 131.250.000,00 | 38,00 | 9.000.000,00 | 12 | 26.250.000 | 30 | 6.050.000 | 250,00 | 23,05 | 68 | 15.050.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 90,00 | 968.040.000,00 | - | - | 30 | 322.680.000 | 1 | 22.610.000 | 3,33 | 7,01 | 1 | 22.610.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| 6 | Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 3,00 | 384.450.000,00 | - | - | 1 | 128.150.000 | 1 | 61.000.000 | 100,00 | 47,60 | 1 | 61.000.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 3,00 | 9.785.924.124,00 | - | - | 1 | 3.261.974.708 | 2 | 3.241.253.072 | 200,00 | 99,36 | 2 | 3.241.253.072 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Peserta Didik | 6,00 | 391.710.000,00 | - | - | 2 | 130.570.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pendidik dan tenaga kependidikan** | **Persentase Satuan Pendidikan Yang Mememnuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **Persen** | **100,00** | **950.400.000,00** | **83,33** | **92.056.500,00** | **200** | **190.080.000** | **79,82** | **167.430.000** | **39,91** | **88,08** | **163,2** | **259.486.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan** | **Jumlah satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memenuhi standar jumlah dan keualitas pendidik dan tenaga kependidikan** | **Satuan Pendidikan** | **500,00** | **950.400.000,00** | **100,00** | **92.056.500,00** | **100** | **190.080.000** | **451** | **167.430.000** | **451,00** | **88,08** | **551** | **259.486.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Perhitungan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dsar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Dokumen | ######## | 524.650.000,00 | 2,00 | 58.706.500,00 | 565 | 104.930.000 | 1 | 101.180.000 | 0,18 | 96,43 | 3 | 159.886.500 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non fromal/kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Laporan | 5,00 | 425.750.000,00 | 1,00 | 33.350.000,00 | 1 | 85.150.000 | 1 | 66.250.000 | 100,00 | 77,80 | 2 | 99.600.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | **Pengembangan bahasa dan sastra** | **Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal** | **Persen** | **100,00** | **503.000.000,00** | **33,33** | **59.792.000,00** | **1** | **100.600.000** | **75** | **89.930.000** | **7500,00** | **89,39** | **108,3** | **149.722.000** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota** | **Jumlah Jenis Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra** | **Jenis** | 375,00 | 503.000.000,00 | **1,00** | **59.792.000,00** | **75** | **100.600.000** | **2** | **89.930.000** | **2,67** | **89,39** | **3** | **149.722.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah kabupateb/kota | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Bahasa | 2,00 | 503.000.000,00 | 2,00 | 59.792.000,00 | 2 | 100.600.000 | 2 | 89.930.000 | 100,00 | 89,39 | 4 | 149.722.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengembangan kebudayaan** | **Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan** | **Persen** | **100,00** | **2.307.675.000,00** | **29,00** | **700.375.673,00** | **75** | **332.220.000** | **75** | **230.120.000** | **100,00** | **69,27** | **104** | **930.495.673** | **0,00** | **0,00** | | **#REF!** |
| | **Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota** | **Jumlah kebudayaan yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat** | **Objek** | **251,00** | **261.000.000,00** | **26,00** | **204.279.523,00** | **75** | **52.200.000** | **2** | **0** | **2,67** | **0,00** | **28** | **204.279.523** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek | 10,00 | 261.000.000,00 | 8,00 | 204.279.523,00 | 2 | 52.200.000 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 10 | 204.279.523 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pelestraian kesenian tradisional yang maysarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | **10,00** | **2.046.675.000,00** | **6,00** | **496.096.150,00** | 2 | 150.705.000 | 2 | 100.805.000 | 100,00 | 66,89 | 8 | 596.901.150 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 10,00 | 753.525.000,00 | 1,00 | 77.642.150,00 | 2 | 150.705.000 | 2 | 100.805.000 | 100,00 | 66,89 | 3 | 178.447.150 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga adat yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat | Objek | **28,00** | **646.575.000,00** | **22,00** | **209.227.000,00** | 2 | 129.315.000 | 4 | 129.315.000 | 200,00 | 100,00 | 26 | 338.542.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 20,00 | 646.575.000,00 | 10,00 | 209.227.000,00 | 4 | 129.315.000 | 4 | 129.315.000 | 100,00 | 100,00 | 14 | 338.542.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya** | **Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan** | **Persen** | **100,00** | **12.407.185.000,00** | **46,00** | **2.618.452.330,00** | **4** | **2.481.437.000** | **45** | **2.235.219.563** | **1125,00** | **90,08** | **91** | **4.853.671.893** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Penetapan cagar budaya peringkat kabupate/kota** | **Jumlah Cagar Budaya yang dikelola, dilesatrikan dan dikembangkan oleh masyarakat** | **Objek** | **375,00** | **907.185.000,00** | **255,00** | **544.311.000,00** | **45** | **181.437.000** | **233** | **146.766.000** | **517,78** | **80,89** | **488** | **691.077.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pendaftaran objek diduga cagar budaya | Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang didaftarkan | Objek | ########## | 72.630.000,00 | 15,00 | 43.578.000,00 | 233 | 14.526.000 | 5 | 10.876.000 | 2,15 | 74,87 | 20 | 54.454.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penetapan cagar budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | 25,00 | 834.555.000,00 | 30,00 | 500.733.000,00 | 5 | 166.911.000 | 10 | 135.890.000 | 200,00 | 81,41 | 40 | 636.623.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota** | **Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola** | **Objek** | **56,00** | **11.500.000.000,00** | **26,00** | **2.074.141.330,00** | **10** | **2.300.000.000** | **1** | **2.088.453.563** | **10,00** | **90,80** | **27** | **4.162.594.893** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pengembangan cagar budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | 5,00 | 11.500.000.000,00 | 3,00 | 2.074.141.330,00 | 1 | 2.300.000.000 | 1 | 2.088.453.563 | 100,00 | 90,80 | 4 | 4.162.594.893 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan permuseuman** | **Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun** | **Persen** | **75,00** | **4.450.000.000,00** | **20,40** | **3.107.122.461,00** | **1** | **1.234.400.000** | **75** | **739.441.463** | **7500,00** | **59,90** | **95,4** | **3.846.563.924** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengelolaan museum kabupaten/kota** | **Jumlah Museum Kab.kota yang terkelola dengan baik** | **Unit** | **1,00** | **4.450.000.000,00** | **1,00** | **3.107.122.461,00** | **75** | **1.234.400.000** | **1** | **739.441.463** | **1,33** | **59,90** | **2** | **3.846.563.924** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Unit | 225,00 | 900.000.000,00 | 69,00 | 494.429.000,00 | 1 | 270.150.000 | 255 | 172.800.000 | 25500,00 | 63,96 | 324 | 667.229.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penyediaan dan peemliharaan sarana dan prasarana museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Unit | 10,00 | 900.000.000,00 | 5,00 | 69.604.000,00 | 225 | 434.250.000 | 10 | 368.660.000 | 4,44 | 84,90 | 15 | 438.264.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Revitalisasi sarana dan prasarana museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi | Unit | 10,00 | 900.000.000,00 | 8,00 | 307.089.461,00 | 10 | 180.000.000 | 1 | 49.850.853 | 10,00 | 27,69 | 9 | 356.940.314 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara | Unit | 15,00 | 1.750.000.000,00 | 12,65 | 2.236.000.000,00 | 5 | 350.000.000 | 5 | 148.130.610 | 100,00 | 42,32 | 17,65 | 2.384.130.610 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengembangan kesenian tradisioan** | **Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan** | **Persen** | 75,00 | **435.015.000,00** | **25,00** | **22.360.000,00** | **5** | **145.005.000** | **50** | **145.005.000** | **1000,00** | **100,00** | **75** | **167.365.000** | **417,67** | **136,06** | | |
| | **Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota** | **Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat** | **Objek** | **150,00** | **435.015.000,00** | - | - | **50** | **145.005.000** | **14** | **145.005.000** | **28,00** | **100,00** | **14** | **145.005.000** | **52,00** | **38,47** | | |
| | Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang | 300,00 | 725.025.000,00 | 20,40 | 170.991.284,00 | 14 | 145.005.000 | 100 | 145.005.000 | 714,29 | 100,00 | 120 | 315.996.284 | 238,10 | 33,33 | | |
| | **Pembinaan Sejarah** | **Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal** | **Persen** | **75,00** | **123.165.000,00** | - | - | **100** | **41.055.000** | **25** | **32.705.000** | **25,00** | **79,66** | **25** | **32.705.000** | **15,13** | **28,10** | | |
| | **Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **Jumlah penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pembinaan sejarah lokal** | **Orang** | **150,00** | **123.165.000,00** | - | - | **25** | **41.055.000** | **50** | **32.705.000** | **200,00** | **79,66** | **50** | **32.705.000** | **66,67** | **26,55** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat | Dokumen | 150,00 | 123.165.000,00 | - | - | 50 | 41.055.000 | 50 | 32.705.000 | 100,00 | 79,66 | 50 | 32.705.000 | 33,33 | 26,55 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **1.242.126.627.165,00** | **100,00** | **745.275.976.299,00** | **100,00** | **187.085.616.419** | **100** | **181.575.139.515** | **100,00** | **97,05** | **200** | **926.851.115.814** | **200,00** | **74,62** | **Dinas Kesehatan/RSUD La Paloloi** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **90,00** | **342.642.060,00** | **54,00** | **205.585.236,00** | **18,00** | **74.178.212** | **18** | **72.303.015** | **100,00** | **97,47** | **72** | **277.888.251** | **80,00** | **81,10** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 66.749.060,00 | 6,00 | 40.049.436,00 | 2,00 | 13.349.612 | 2 | 13.251.700 | 100,00 | 99,27 | 8 | 53.301.136 | 80,00 | 79,85 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 24.485.000,00 | 3,00 | 14.691.000,00 | 1,00 | 4.897.000 | 1 | 3.665.500 | 100,00 | 74,85 | 4 | 18.356.500 | 80,00 | 74,97 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 58.457.500,00 | 3,00 | 35.074.500,00 | 1,00 | 11.691.500 | 1 | 11.525.100 | 100,00 | 98,58 | 4 | 46.599.600 | 80,00 | 79,72 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 58.050.000,00 | 3,00 | 34.830.000,00 | 1,00 | 11.610.000 | 1 | 11.455.800 | 100,00 | 98,67 | 4 | 46.285.800 | 80,00 | 79,73 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 61.540.500,00 | 3,00 | 36.924.300,00 | 1,00 | 10.180.100 | 1 | 10.065.115 | 100,00 | 98,87 | 4 | 46.989.415 | 80,00 | 76,36 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 73.360.000,00 | 12,00 | 44.016.000,00 | 4,00 | 22.450.000 | 4 | 22.339.800 | 100,00 | 99,51 | 16 | 66.355.800 | 80,00 | 90,45 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **135,00** | **466.934.910.550,00** | **81,00** | **280.160.946.330,00** | **27,00** | **92.842.966.018** | **27** | **91.000.313.471** | **100,00** | **98,02** | **108,00** | **371.161.259.801** | **80,00** | **79,49** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 323.769.581.070,00 | ########## | 194.261.748.642,00 | ########## | 92.156.491.018 | 17.220 | 90.417.482.171 | 100,00 | 98,11 | 53.088 | 284.679.230.813 | 88,81 | 87,93 | | Dinkes & RSUD Palaloi |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | ########## | 139.975.741.980,00 | ########## | 83.985.445.188,00 | 12,00 | 663.900.000 | 12 | 560.340.000 | 100,00 | 84,40 | 15.804 | 84.545.785.188 | 60,05 | 60,40 | | |
| | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 60,00 | 3.062.950.000,00 | 36,00 | 1.837.770.000,00 | 1,00 | 22.575.000 | 1 | 22.491.300 | 100,00 | 99,63 | 37 | 1.860.261.300 | 61,67 | 60,73 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **5,00** | **126.637.500,00** | **3,00** | **75.982.500,00** | **25,00** | **17.500.000** | **25** | **14.000.000** | **100,00** | **80,00** | **28** | **89.982.500** | **560,00** | **71,06** | | |
| | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 125,00 | 87.500.000,00 | 75,00 | 52.500.000,00 | 25,00 | 17.500.000 | 25 | 14.000.000 | 100,00 | 80,00 | 100 | 66.500.000 | 80,00 | 76,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **125,00** | **87.500.000,00** | **75,00** | **52.500.000,00** | **7,00** | **1.000.072.200** | **6** | **825.659.556** | **85,71** | **82,56** | **81,00** | **878.159.556** | **64,80** | **1003,61** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 7,00 | 5.599.562.425,00 | 7,00 | 3.359.737.455,00 | 1,00 | 21.400.000 | 1 | 20.950.000 | 100,00 | 97,90 | 8 | 3.380.687.455 | 114,29 | 60,37 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 107.000.000,00 | 3,00 | 64.200.000,00 | 1,00 | 29.135.500 | 1 | 26.700.500 | 100,00 | 91,64 | 4 | 90.900.500 | 80,00 | 84,95 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 213.250.000,00 | 3,00 | 127.950.000,00 | 1,00 | 319.118.500 | 1 | 242.418.500 | 100,00 | 75,97 | 4 | 370.368.500 | 80,00 | 173,68 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 2.093.712.425,00 | 3,00 | 1.256.227.455,00 | 12,00 | 2.159.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.256.227.455 | 60,00 | 60,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 123.375.000,00 | 3,00 | 74.025.000,00 | 12,00 | 13.925.000 | 12 | 13.925.000 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 87.950.000 | 300,00 | 71,29 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 69.625.000,00 | 36,00 | 41.775.000,00 | 25,00 | 469.134.000 | 25 | 382.465.556 | 100,00 | 81,53 | 61,00 | 424.240.556 | 101,67 | 609,32 | | |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 125,00 | 2.266.600.000,00 | 75,00 | 1.359.960.000,00 | 1,00 | 145.200.000 | 1 | 139.200.000 | 100,00 | 95,87 | 76,00 | 1.499.160.000 | 60,80 | 66,14 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **5,00** | **726.000.000,00** | **3,00** | **435.600.000,00** | **2,00** | **73.100.000** | **2** | **62.476.000** | **100,00** | **85,47** | **5** | **498.076.000** | **100,00** | **68,61** | | |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 2,00 | 769.162.012.130,00 | 2,00 | 461.497.207.278,00 | 12,00 | 22.100.000 | 12 | 11.476.000 | 100,00 | 51,93 | 14 | 461.508.683.278 | 700,00 | 60,00 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 160.500.000,00 | 36,00 | 96.300.000,00 | 25,00 | 51.000.000 | 25 | 51.000.000 | 100,00 | 100,00 | 61 | 147.300.000 | 101,67 | 91,78 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **60,00** | **255.000.000,00** | **36,00** | **153.000.000,00** | **2,00** | **90.444.500** | **1** | **50.955.800** | **50,00** | **56,34** | **37** | **203.955.800** | **61,67** | **79,98** | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10,00 | 704.200.000,00 | 6,00 | 422.520.000,00 | 5,00 | 65.444.500 | 5 | 50.955.800 | 100,00 | 77,86 | 11,00 | 473.475.800 | 110,00 | 67,24 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 25,00 | 454.200.000,00 | 15,00 | 272.520.000,00 | 1,00 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 272.520.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | **Peningkatan pelayanan BLUD** | **Jumlah Faskes dengan fasilitasi BLUD** | **Unit Kerja** | **10,00** | **250.000.000,00** | **6,00** | **150.000.000,00** | **15,00** | **92.987.355.489** | **15** | **89.549.431.673** | **100,00** | **96,30** | **21,00** | **89.699.431.673** | **210,00** | **######** | | |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 75,00 | 383.669.056.065,00 | 45,00 | 230.201.433.639,00 | 1,00 | 2.382.000.000 | 1 | 2.241.013.548 | 100,00 | 94,08 | 46,00 | 232.442.447.187 | 61,33 | 60,58 | | Puskesmas Lau |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 12.901.064.350,00 | 3,00 | 7.740.638.610,00 | 1,00 | 1.766.650.000 | 1 | 1.739.318.573 | 100,00 | 98,45 | 4,00 | 9.479.957.183 | 80,00 | 73,48 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 7.780.000.000,00 | 3,00 | 4.668.000.000,00 | 1,00 | 3.291.867.818 | 1 | 3.265.388.911 | 100,00 | 99,20 | 4,00 | 7.933.388.911 | 80,00 | 101,97 | | Puskesmas bantimurung |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 14.510.311.605,00 | 3,00 | 8.706.186.963,00 | 1,00 | 1.311.577.881 | 1 | 1.206.721.679 | 100,00 | 92,01 | 4,00 | 9.912.908.642 | 80,00 | 68,32 | | Pusksmas simbang |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 6.404.256.305,00 | 3,00 | 3.842.553.783,00 | 1,00 | 2.580.212.870 | 1 | 2.393.033.062 | 100,00 | 92,75 | 4,00 | 6.235.586.845 | 80,00 | 97,37 | | Puskesmas Mandai |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 11.752.090.135,00 | 3,00 | 7.051.254.081,00 | 1,00 | 950.000.000 | 1 | 936.997.336 | 100,00 | 98,63 | 4,00 | 7.988.251.417 | 80,00 | 67,97 | | Puskesmas mallawa |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 5.638.883.605,00 | 3,00 | 3.383.330.163,00 | 1,00 | 2.267.332.639 | 1 | 2.112.542.283 | 100,00 | 93,17 | 4,00 | 5.495.872.446 | 80,00 | 97,46 | | Puskesmas tanralili |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 11.250.950.000,00 | 3,00 | 6.750.570.000,00 | 1,00 | 1.641.641.368 | 1 | 1.526.927.791 | 100,00 | 93,01 | 4,00 | 8.277.497.791 | 80,00 | 73,57 | | Puskesmas Marusu |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 8.480.149.250,00 | 3,00 | 5.088.089.550,00 | 1,00 | 1.163.649.811 | 1 | 1.074.582.386 | 100,00 | 92,35 | 4,00 | 6.162.671.936 | 80,00 | 72,67 | | Puskesmas Moncongloe |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 5.714.883.605,00 | 3,00 | 3.428.930.163,00 | 1,00 | 1.421.750.000 | 1 | 1.416.436.354 | 100,00 | 99,63 | 4,00 | 4.845.366.517 | 80,00 | 84,79 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 6.928.125.000,00 | 3,00 | 4.156.875.000,00 | 1,00 | 2.975.292.658 | 1 | 2.574.362.961 | 100,00 | 86,52 | 4,00 | 6.731.237.961 | 80,00 | 97,16 | | Puskesmas Turikale |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 13.660.383.605,00 | 3,00 | 8.196.230.163,00 | 1,00 | 2.254.875.000 | 1 | 1.955.089.078 | 100,00 | 86,70 | 4,00 | 10.151.319.241 | 80,00 | 74,31 | | Puskesmas Bontoa |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 11.274.375.000,00 | 3,00 | 6.764.625.000,00 | 1,00 | 1.429.822.169 | 1 | 1.295.775.213 | 100,00 | 90,62 | 4,00 | 8.060.400.213 | 80,00 | 71,49 | | Puskesmas Camba |
| | Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 6.900.000.000,00 | 3,00 | 4.140.000.000,00 | 1,00 | 1.094.716.721 | 1 | 966.195.786 | 100,00 | 88,26 | 4,00 | 5.106.195.786 | 80,00 | 74,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 5,00 | 5.473.583.605,00 | 3,00 | 3.284.150.163,00 | 1,00 | 66.455.966.554 | 1 | 64.845.046.712 | 100,00 | 97,58 | 4,00 | 68.129.196.875 | 80,00 | 1244,69 | | RSUD La plaloi |
| | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | Persen | **100,00** | **1.000.054.459.035,00** | **99,75** | **235.496.415.787,00** | 100,00 | 188.280.932.745 | 100 | 141.375.553.344 | 100,00 | 75,09 | 199,8 | 376.871.969.131 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia** | **Unit** | **15,00** | **734.891.972.530,00** | **15,00** | **146.610.512.805,00** | **10,00** | **142.692.931.100** | **9** | **99.239.763.121** | **90,00** | **69,55** | **24** | **245.850.275.926** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prsarana pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 5,00 | 227.702.463.000,00 | 3,00 | 8.868.231.320,00 | 1,00 | 45.540.492.600 | 1 | 45.118.705.600 | 100,00 | 99,07 | 4 | 53.986.936.920 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | Unit | 6,00 | 3.540.000.000,00 | | | 2,00 | 1.180.000.000 | 2 | 1.167.280.000 | 100,00 | 98,92 | 2 | 1.167.280.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengembangan puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 35,00 | 139.350.000.000,00 | 17,00 | 18.404.141.464,00 | 7,00 | 27.870.000.000 | 7 | 27.212.633.000 | 100,00 | 97,64 | 24 | 45.616.774.464 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 24,00 | 13.048.919.100,00 | | | 8,00 | 4.349.639.700 | 8 | 4.260.848.069 | 100,00 | 97,96 | 8 | 4.260.848.069 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 401,00 | 74.884.239.125,00 | 359,00 | 59.594.494.484,00 | 14,00 | 14.976.847.825 | 14 | 14.817.736.172 | 100,00 | 98,94 | 373 | 74.412.230.656 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 237,00 | 35.495.549.100,00 | 237,00 | 35.495.549.100,00 | 79,00 | 11.831.849.700 | 79 | | 100,00 | 0,00 | 316 | 35.495.549.100 | 0,00 | 0,00 | | RSUD La Palaloi |
| | Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan.alat penunjnag medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Unit | 48,00 | 158.610.000,00 | 48,00 | 158.610.000,00 | 16,00 | 52.870.000 | 16 | 0 | 100,00 | 0,00 | 64 | 158.610.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Paket | 5,00 | 150.238.475.875,00 | 10,00 | 5.135.368.500,00 | 1,00 | 30.047.695.175 | 1 | | 100,00 | 0,00 | 11 | 5.135.368.500 | 0,00 | 0,00 | | RSUD La Palaloi |
| | Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 112,00 | 89.895.716.330,00 | 107,00 | 69.711.908.030,00 | 1,00 | 6.727.936.100 | 1 | 6.608.300.280 | 100,00 | 98,22 | 108 | 76.320.208.310 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Distribusi alat eksehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | Paket | 5,00 | 578.000.000,00 | 29,00 | 129.562.454,00 | 1,00 | 115.600.000 | 1 | 54.260.000 | 100,00 | 46,94 | 30 | 183.822.454 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota | Junlah jenis layanan kesehatan rujukan yang tersedia | Layanan | **20,00** | **263.653.606.505,00** | **20,00** | **87.814.882.782,00** | 20,00 | 45.336.521.645 | 20 | 41.907.990.223 | 100,00 | 92,44 | 40 | 129.722.873.005 | 0,00 | 0,00 | | |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 970.102.325,00 | ######## | 582.061.395,00 | ###### | 194.020.465 | 5397 | 185.754.000 | 100,00 | 95,74 | 21588 | 767.815.395 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 314.400.000,00 | 1.473,00 | 188.640.000,00 | 491,00 | 62.880.000 | 491 | 52.380.000,00 | 100,00 | 83,30 | 1964 | 241.020.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD ta-hun 2024 yang die-valuasi | | Realisasi capaian kinerja dan ang-garan RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d ta-hun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Dae-rah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 497.700.000,00 | 1.302,00 | 298.620.000,00 | 434,00 | 99.540.000 | 434 | 76.160.000,00 | 100,00 | 76,51 | 1736 | 374.780.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 648.400.000,00 | 1.299,00 | 389.040.000,00 | 433,00 | 129.680.000 | 433 | 129.680.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1732 | 518.720.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 643.200.000,00 | 1.380,00 | 385.920.000,00 | 460,00 | 128.640.000 | 460 | 122.410.000,00 | 100,00 | 95,16 | 1840 | 508.330.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas sim-bang/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 214.600.000,00 | 2.400,00 | 128.760.000,00 | 800,00 | 42.920.000 | 800 | 34.520.000,00 | 100,00 | 80,43 | 3200 | 163.280.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Man-dai/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 500,00 | 370.500.000,00 | 300,00 | 222.300.000,00 | 100,00 | 74.100.000 | 100 | 60.950.000,00 | 100,00 | 82,25 | 400 | 283.250.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mal-lawa/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 381.400.000,00 | 1.380,00 | 228.840.000,00 | 460,00 | 76.280.000 | 460 | 76.280.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1840 | 305.120.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tan-ralili/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 438.200.000,00 | 1.746,00 | 262.920.000,00 | 582,00 | 87.640.000 | 582 | 86.240.000,00 | 100,00 | 98,40 | 2328 | 349.160.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 374.500.000,00 | 798,00 | 224.700.000,00 | 266,00 | 74.900.000 | 266 | 74.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1064 | 299.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 388.000.000,00 | 738,00 | 232.800.000,00 | 246,00 | 77.600.000 | 246 | 77.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | 984 | 310.400.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompo-bulu/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 421.400.000,00 | 744,00 | 252.840.000,00 | 248,00 | 84.280.000 | 248 | 84.280.000,00 | 100,00 | 100,00 | 992 | 337.120.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tu-rikale/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 354.100.000,00 | 1.761,00 | 212.460.000,00 | 587,00 | 70.820.000 | 587 | 70.820.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2348 | 283.280.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 725,00 | 94.000.000,00 | 435,00 | 56.400.000,00 | 145,00 | 18.800.000 | 145 | 18.800.000 | 100,00 | 100,00 | 580 | 75.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba/SPM |
| | pengeolaan pelayaan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 725,00 | 329.000.000,00 | 435,00 | 197.400.000,00 | 145,00 | 65.800.000 | 145 | 65.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 580 | 263.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 590.000.000,00 | ######### | 354.000.000,00 | ###### | 118.000.000 | 5397 | 118.000.000 | 100,00 | 100,00 | 21588 | 472.000.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 379.800.000,00 | 1.473,00 | 227.880.000,00 | 491,00 | 75.960.000 | 491 | 61.220.000,00 | 100,00 | 80,60 | 1964 | 289.100.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 237.700.000,00 | 1.302,00 | 142.620.000,00 | 434,00 | 47.540.000 | 434 | 47.530.000,00 | 100,00 | 99,98 | 1736 | 190.150.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 84.200.000,00 | 1.299,00 | 50.520.000,00 | 433,00 | 16.840.000 | 433 | 16.770.000,00 | 100,00 | 99,58 | 1732 | 67.290.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 122.250.000,00 | 1.380,00 | 73.350.000,00 | 460,00 | 24.450.000 | 460 | 24.120.000,00 | 100,00 | 98,65 | 1840 | 97.470.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas sim-bang/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 205.525.000,00 | 2.400,00 | 123.315.000,00 | 800,00 | 41.105.000 | 800 | 41.105.000,00 | 100,00 | 100,00 | 3200 | 164.420.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 500,00 | 172.500.000,00 | 300,00 | 103.500.000,00 | 100,00 | 34.500.000 | 100 | 26.100.000,00 | 100,00 | 75,65 | 400 | 129.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas malawa/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 204.500.000,00 | 1.380,00 | 122.700.000,00 | 460,00 | 40.900.000 | 460 | 40.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1840 | 163.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 305.650.000,00 | 1.746,00 | 183.390.000,00 | 582,00 | 61.130.000 | 582 | 61.130.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2328 | 244.520.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 289.000.000,00 | 798,00 | 173.400.000,00 | 266,00 | 57.800.000 | 266 | 57.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1064 | 231.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 186.000.000,00 | 738,00 | 111.600.000,00 | 246,00 | 37.200.000 | 246 | 37.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 984 | 148.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 258.200.000,00 | 744,00 | 154.920.000,00 | 248,00 | 51.640.000 | 248 | 42.400.000,00 | 100,00 | 82,11 | 992 | 197.320.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 217.800.000,00 | 1.761,00 | 130.680.000,00 | 587,00 | 43.560.000 | 587 | 42.410.000,00 | 100,00 | 97,36 | 2348 | 173.090.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 725,00 | 69.000.000,00 | 435,00 | 41.400.000,00 | 145,00 | 13.800.000 | 145 | 13.600.000,00 | 100,00 | 98,55 | 580 | 55.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 725,00 | 284.000.000,00 | 435,00 | 170.400.000,00 | 145,00 | 56.800.000 | 145 | 56.100.000,00 | 100,00 | 98,77 | 580 | 226.500.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana-SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 360.825.000,00 | ###### | 216.495.000,00 | ###### | 72.165.000 | 28000 | 53.100.000 | 100,00 | 73,58 | 1E+05 | 269.595.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 138.550.000,00 | ###### | 83.130.000,00 | ###### | 27.710.000 | 57521 | 27.560.000 | 100,00 | 99,46 | 2E+05 | 110.690.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 241.850.000,00 | ###### | 145.110.000,00 | ###### | 48.370.000 | 6112 | 48.370.000,00 | 100,00 | 100,00 | 24448 | 193.480.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 198.450.000,00 | ###### | 119.070.000,00 | ###### | 39.690.000 | 4093 | 39.690.000,00 | 100,00 | 100,00 | 16372 | 158.760.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 267.400.000,00 | ###### | 160.440.000,00 | ###### | 53.480.000 | 5241 | 50.400.000,00 | 100,00 | 94,24 | 20964 | 210.840.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 305.600.000,00 | ###### | 183.360.000,00 | ###### | 61.120.000 | 3824 | 61.040.000,00 | 100,00 | 99,87 | 15296 | 244.400.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas sim-bang/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 554.400.000,00 | ###### | 332.640.000,00 | ###### | 110.880.000 | 8351 | 88.620.000,00 | 100,00 | 79,92 | 33404 | 421.260.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Man-dai/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD ta-hun 2024 yang die-valuasi | | Realisasi capaian kinerja dan ang-garan RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d ta-hun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Dae-rah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 239.000.000,00 | 4.950,00 | 143.400.000,00 | ##### | 47.800.000 | 1650 | 47.600.000,00 | 100,00 | 99,58 | 6600 | 191.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mal-lawa/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 301.700.000,00 | ###### | 181.020.000,00 | ##### | 60.340.000 | 4435 | 59.360.000,00 | 100,00 | 98,38 | 17740 | 240.380.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tan-ralili/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 382.200.000,00 | ###### | 229.320.000,00 | ##### | 76.440.000 | 4069 | 76.440.000,00 | 100,00 | 100,00 | 16276 | 305.760.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 356.000.000,00 | 8.694,00 | 213.600.000,00 | ##### | 71.200.000 | 2898 | 71.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 11592 | 284.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncon-gloe/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 308.500.000,00 | 8.079,00 | 185.100.000,00 | ##### | 61.700.000 | 2693 | 61.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | 10772 | 246.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompo-bulu/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 248.500.000,00 | ###### | 149.100.000,00 | ##### | 49.700.000 | 5929 | 49.630.000,00 | 100,00 | 99,86 | 23716 | 198.730.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tu-rikale/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 548.300.000,00 | ###### | 328.980.000,00 | ##### | 109.660.000 | 4386 | 102.940.000,00 | 100,00 | 93,87 | 17544 | 431.920.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ##### | 400.000.000,00 | 5.466,00 | 240.000.000,00 | ##### | 80.000.000 | 1822 | 70.100.000,00 | 100,00 | 87,63 | 7288 | 310.100.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 375.000.000,00 | 6.054,00 | 225.000.000,00 | ###### | 75.000.000 | 2018 | 75.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 8072 | 300.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesetahan sesuai standar | Orang | ###### | 90.000.000,00 | ######### | 54.000.000,00 | ###### | 18.000.000 | 2E+05 | 18.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 7E+05 | 72.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | ###### | 2.887.500.000,00 | 8.208,00 | 1.732.500.000,00 | ###### | 577.500.000 | 2736 | 577.000.000 | 100,00 | 99,91 | 10944 | 2.309.500.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 2.257.104.500,00 | ######### | 1.354.262.700,00 | ###### | 451.420.900 | 3863 | 448.049.250 | 100,00 | 99,25 | 15452 | 1.802.311.950 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 855,00 | 59.500.000,00 | 513,00 | 35.700.000,00 | 171,00 | 11.900.000 | 171 | 11.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 684 | 47.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 85.400.000,00 | 792,00 | 51.240.000,00 | 264,00 | 17.080.000 | 264 | 17.080.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1056 | 68.320.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 48.300.000,00 | 1.311,00 | 28.980.000,00 | 437,00 | 9.660.000 | 437 | 9.660.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1748 | 38.640.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas bantimurung/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 108.500.000,00 | 663,00 | 65.100.000,00 | 221,00 | 21.700.000 | 221 | 21.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | 884 | 86.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 58.450.000,00 | 1.701,00 | 35.070.000,00 | 567,00 | 11.690.000 | 567 | 11.690.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2268 | 46.760.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 260,00 | 69.000.000,00 | 156,00 | 41.400.000,00 | 52,00 | 13.800.000 | 52 | 12.800.000,00 | 100,00 | 92,75 | 208 | 54.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 81.900.000,00 | 843,00 | 49.140.000,00 | 281,00 | 16.380.000 | 281 | 16.380.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1124 | 65.520.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 119.700.000,00 | 1.389,00 | 71.820.000,00 | 463,00 | 23.940.000 | 463 | 23.940.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1852 | 95.760.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 875,00 | 106.500.000,00 | 525,00 | 63.900.000,00 | 175,00 | 21.300.000 | 175 | 21.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 700 | 85.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 730,00 | 179.000.000,00 | 438,00 | 107.400.000,00 | 146,00 | 35.800.000 | 146 | 35.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 584 | 143.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 116.900.000,00 | 1.635,00 | 70.140.000,00 | 545,00 | 23.380.000 | 545 | 23.380.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2180 | 93.520.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 44.100.000,00 | 1.050,00 | 26.460.000,00 | 350,00 | 8.820.000 | 350 | 8.610.000,00 | 100,00 | 97,62 | 1400 | 35.070.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 595,00 | 83.000.000,00 | 357,00 | 49.800.000,00 | 119,00 | 16.600.000 | 119 | 9.800.000,00 | 100,00 | 59,04 | 476 | 59.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba/SPM |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 360,00 | 79.000.000,00 | 216,00 | 47.400.000,00 | 72,00 | 15.800.000 | 72 | 5.800.000,00 | 100,00 | 36,71 | 288 | 53.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 862.000.000,00 | ######## | 517.200.000,00 | ###### | 172.400.000 | 6220 | 171.935.000 | 100,00 | 99,73 | 24880 | 689.135.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 56.700.000,00 | 1.554,00 | 34.020.000,00 | 518,00 | 11.340.000 | 518 | 11.340.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2072 | 45.360.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 122.500.000,00 | 1.692,00 | 73.500.000,00 | 564,00 | 24.500.000 | 564 | 8.610.000,00 | 100,00 | 35,14 | 2256 | 82.110.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 44.800.000,00 | 1.503,00 | 26.880.000,00 | 501,00 | 8.960.000 | 501 | 6.720.000,00 | 100,00 | 75,00 | 2004 | 33.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas bantimurung/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 63.000.000,00 | 1.485,00 | 37.800.000,00 | 495,00 | 12.600.000 | 495 | 12.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1980 | 50.400.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 35.700.000,00 | 2.715,00 | 21.420.000,00 | 905,00 | 7.140.000 | 905 | 7.140.000,00 | 100,00 | 100,00 | 3620 | 28.560.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 540,00 | 37.000.000,00 | 324,00 | 22.200.000,00 | 108,00 | 7.400.000 | 108 | 7.400.000,00 | 100,00 | 100,00 | 432 | 29.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa/SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 48.300.000,00 | 1.641,00 | 28.980.000,00 | 547,00 | 9.660.000 | 547 | 9.660.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2188 | 38.640.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 82.600.000,00 | 1.995,00 | 49.560.000,00 | 665,00 | 16.520.000 | 665 | 6.790.000,00 | 100,00 | 41,10 | 2660 | 56.350.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 52.000.000,00 | 918,00 | 31.200.000,00 | 306,00 | 10.400.000 | 306 | 10.400.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1224 | 41.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 76.000.000,00 | 825,00 | 45.600.000,00 | 275,00 | 15.200.000 | 275 | 15.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1100 | 60.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 93.100.000,00 | 930,00 | 55.860.000,00 | 310,00 | 18.620.000 | 310 | 18.620.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1240 | 74.480.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 84.000.000,00 | 1.971,00 | 50.400.000,00 | 657,00 | 16.800.000 | 657 | 16.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2628 | 67.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | ###### | 39.000.000,00 | 606,00 | 23.400.000,00 | 202,00 | 7.800.000 | 202 | 6.800.000,00 | 100,00 | 87,18 | 808 | 30.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba/SPM |
| | Penelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang | 835,00 | 34.000.000,00 | 501,00 | 20.400.000,00 | 167,00 | 6.800.000 | 167 | 6.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 668 | 27.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana-SPM |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 230.900.000,00 | 3,00 | 138.540.000,00 | 1,00 | 46.180.000 | 1 | 46.180.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 184.720.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.412.100.000,00 | 3,00 | 847.260.000,00 | 1,00 | 282.420.000 | 1 | 173.536.000,00 | 100,00 | 61,45 | 4 | 1.020.796.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.435.900.000,00 | 3,00 | 861.540.000,00 | 1,00 | 287.180.000 | 1 | 251.089.000,00 | 100,00 | 87,43 | 4 | 1.112.629.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.288.100.000,00 | 3,00 | 772.860.000,00 | 1,00 | 257.620.000 | 1 | 165.200.000,00 | 100,00 | 64,13 | 4 | 938.060.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.211.350.000,00 | 3,00 | 726.810.000,00 | 1,00 | 242.270.000 | 1 | 235.758.000,00 | 100,00 | 97,31 | 4 | 962.568.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.299.485.000,00 | 3,00 | 779.691.000,00 | 1,00 | 259.897.000 | 1 | 189.957.000,00 | 100,00 | 73,09 | 4 | 969.648.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.584.500.000,00 | 3,00 | 950.700.000,00 | 1,00 | 316.900.000 | 1 | 228.087.000,00 | 100,00 | 71,97 | 4 | 1.178.787.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.492.300.000,00 | 3,00 | 895.380.000,00 | 1,00 | 298.460.000 | 1 | 225.390.000,00 | 100,00 | 75,52 | 4 | 1.120.770.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.219.325.000,00 | 3,00 | 731.595.000,00 | 1,00 | 243.865.000 | 1 | 224.153.000,00 | 100,00 | 91,92 | 4 | 955.748.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.366.000.000,00 | 3,00 | 819.600.000,00 | 1,00 | 273.200.000 | 1 | 200.340.000,00 | 100,00 | 73,33 | 4 | 1.019.940.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.483.000.000,00 | 3,00 | 889.800.000,00 | 1,00 | 296.600.000 | 1 | 287.400.000,00 | 100,00 | 96,90 | 4 | 1.177.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.431.100.000,00 | 3,00 | 858.660.000,00 | 1,00 | 286.220.000 | 1 | 188.240.000,00 | 100,00 | 65,77 | 4 | 1.046.900.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.217.600.000,00 | 3,00 | 730.560.000,00 | 1,00 | 243.520.000 | 1 | 195.470.000,00 | 100,00 | 80,27 | 4 | 926.030.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.679.500.000,00 | 3,00 | 1.007.700.000,00 | 1,00 | 335.900.000 | 1 | 271.733.500,00 | 100,00 | 80,90 | 4 | 1.279.433.500 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba |
| | pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 1.644.360.000,00 | 3,00 | 822.180.000,00 | 1,00 | 274.060.000 | 1 | 98.430.000,00 | 100,00 | 35,92 | 4 | 920.610.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 2.594.904.000,00 | 3,00 | 1.297.452.000,00 | 1,00 | 432.484.000 | 1 | 432.445.000 | 100,00 | 99,99 | 4 | 1.729.897.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 152.040.000,00 | 3,00 | 76.020.000,00 | 1,00 | 25.340.000 | 1 | 25.340.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 101.360.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 178.920.000,00 | 3,00 | 89.460.000,00 | 1,00 | 29.820.000 | 1 | 29.260.000,00 | 100,00 | 98,12 | 4 | 118.720.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 155.400.000,00 | 3,00 | 77.700.000,00 | 1,00 | 25.900.000 | 1 | 25.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 103.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 163.380.000,00 | 3,00 | 81.690.000,00 | 1,00 | 27.230.000 | 1 | 26.810.000,00 | 100,00 | 98,46 | 4 | 108.500.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 118.440.000,00 | 3,00 | 59.220.000,00 | 1,00 | 19.740.000 | 1 | 19.740.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 78.960.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 155.400.000,00 | 3,00 | 77.700.000,00 | 1,00 | 25.900.000 | 1 | 24.900.000,00 | 100,00 | 96,14 | 4 | 102.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 66.360.000,00 | 3,00 | 33.180.000,00 | 1,00 | 11.060.000 | 1 | 11.060.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 44.240.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 181.020.000,00 | 3,00 | 90.510.000,00 | 1,00 | 30.170.000 | 1 | 30.170.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 120.680.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 76.800.000,00 | 3,00 | 38.400.000,00 | 1,00 | 12.800.000 | 1 | 12.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 51.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 64.800.000,00 | 3,00 | 32.400.000,00 | 1,00 | 10.800.000 | 1 | 10.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 43.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 162.120.000,00 | 3,00 | 81.060.000,00 | 1,00 | 27.020.000 | 1 | 27.020.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 108.080.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 5,00 | 142.800.000,00 | 3,00 | 71.400.000,00 | 1,00 | 23.800.000 | 1 | 23.520.000,00 | 100,00 | 98,82 | 4 | 94.920.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD ta-hun 2024 yang die-valuasi | | Realisasi capaian kinerja dan ang-garan RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d ta-hun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Dae-rah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ling-kungan | Dokumen | 5,00 | 145.200.000,00 | 3,00 | 72.600.000,00 | 1,00 | 24.200.000 | 1 | 24.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 96.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ling-kungan | Dokumen | 5,00 | 180.000.000,00 | 3,00 | 90.000.000,00 | 1,00 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 120.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 2.833.228.800,00 | 3,00 | 1.416.614.400,00 | 1,00 | 472.204.800 | 1 | 450.773.678 | 100,00 | 95,46 | 4 | 1.867.388.078 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 306.942.000,00 | 3,00 | 153.471.000,00 | 1,00 | 51.157.000 | 1 | 51.140.000,00 | 100,00 | 99,97 | 4 | 204.611.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 208.920.000,00 | 3,00 | 104.460.000,00 | 1,00 | 34.820.000 | 1 | 28.170.000,00 | 100,00 | 80,90 | 4 | 132.630.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 124.500.000,00 | 3,00 | 62.250.000,00 | 1,00 | 20.750.000 | 1 | 20.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 83.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 320.040.000,00 | 3,00 | 160.020.000,00 | 1,00 | 53.340.000 | 1 | 45.580.000,00 | 100,00 | 85,45 | 4 | 205.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 265.920.000,00 | 3,00 | 132.960.000,00 | 1,00 | 44.320.000 | 1 | 39.280.000,00 | 100,00 | 88,63 | 4 | 172.240.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 295.560.000,00 | 3,00 | 147.780.000,00 | 1,00 | 49.260.000 | 1 | 45.760.000,00 | 100,00 | 92,89 | 4 | 193.540.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 220.800.000,00 | 3,00 | 110.400.000,00 | 1,00 | 36.800.000 | 1 | 24.600.000,00 | 100,00 | 66,85 | 4 | 135.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 153.300.000,00 | 3,00 | 76.650.000,00 | 1,00 | 25.550.000 | 1 | 16.295.000,00 | 100,00 | 63,78 | 4 | 92.945.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 142.080.000,00 | 3,00 | 71.040.000,00 | 1,00 | 23.680.000 | 1 | 23.540.000,00 | 100,00 | 99,41 | 4 | 94.580.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 136.800.000,00 | 3,00 | 68.400.000,00 | 1,00 | 22.800.000 | 1 | 22.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 91.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 150.000.000,00 | 3,00 | 75.000.000,00 | 1,00 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 100.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 165.960.000,00 | 3,00 | 82.980.000,00 | 1,00 | 27.660.000 | 1 | 27.610.000,00 | 100,00 | 99,82 | 4 | 110.590.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 217.920.000,00 | 3,00 | 108.960.000,00 | 1,00 | 36.320.000 | 1 | 32.680.000,00 | 100,00 | 89,98 | 4 | 141.640.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 172.800.000,00 | 3,00 | 86.400.000,00 | 1,00 | 28.800.000 | 1 | 15.800.000,00 | 100,00 | 54,86 | 4 | 102.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba |
| | Pengelolaan surveilans kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | ######## | 164.640.000,00 | 2.733,00 | 82.320.000,00 | 911,00 | 27.440.000 | 911 | 23.640.000,00 | 100,00 | 86,15 | 3644 | 105.960.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 5,00 | 274.920.000,00 | 3,00 | 137.460.000,00 | 1,00 | 45.820.000 | 1 | 45.092.000 | 100,00 | 98,41 | 4 | 182.552.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 1.800.000.000,00 | 3,00 | 900.000.000,00 | 1,00 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 1.200.000.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 14.717.886.000,00 | 3,00 | 7.358.943.000,00 | 1,00 | 2.452.981.000 | 1 | 2.418.263.999 | 100,00 | 98,58 | 4 | 9.777.206.999 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 838.380.000,00 | 3,00 | 419.190.000,00 | 1,00 | 139.730.000 | 1 | 133.290.000,00 | 100,00 | 95,39 | 4 | 552.480.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 610.680.000,00 | 3,00 | 305.340.000,00 | 1,00 | 101.780.000 | 1 | 113.610.000,00 | 100,00 | 111,62 | 4 | 418.950.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 681.060.000,00 | 3,00 | 340.530.000,00 | 1,00 | 113.510.000 | 1 | 143.610.000,00 | 100,00 | 126,52 | 4 | 484.140.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 815.640.000,00 | 3,00 | 407.820.000,00 | 1,00 | 135.940.000 | 1 | 135.520.000,00 | 100,00 | 99,69 | 4 | 543.340.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 968.520.000,00 | 3,00 | 484.260.000,00 | 1,00 | 161.420.000 | 1 | 152.880.000,00 | 100,00 | 94,71 | 4 | 637.140.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 725.100.000,00 | 3,00 | 362.550.000,00 | 1,00 | 120.850.000 | 1 | 145.650.000,00 | 100,00 | 120,52 | 4 | 508.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 982.200.000,00 | 3,00 | 491.100.000,00 | 1,00 | 163.700.000 | 1 | 159.740.000,00 | 100,00 | 97,58 | 4 | 650.840.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 842.520.000,00 | 3,00 | 421.260.000,00 | 1,00 | 140.420.000 | 1 | 137.410.000,00 | 100,00 | 97,86 | 4 | 558.670.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 985.800.000,00 | 3,00 | 492.900.000,00 | 1,00 | 164.300.000 | 1 | 164.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 657.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 840.600.000,00 | 3,00 | 420.300.000,00 | 1,00 | 140.100.000 | 1 | 139.300.000,00 | 100,00 | 99,43 | 4 | 559.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 872.400.000,00 | 3,00 | 436.200.000,00 | 1,00 | 145.400.000 | 1 | 141.620.000,00 | 100,00 | 97,40 | 4 | 577.820.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 926.160.000,00 | 3,00 | 463.080.000,00 | 1,00 | 154.360.000 | 1 | 148.620.000,00 | 100,00 | 96,28 | 4 | 611.700.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 773.706.000,00 | 3,00 | 386.853.000,00 | 1,00 | 128.951.000 | 1 | 123.950.000,00 | 100,00 | 96,12 | 4 | 510.803.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba |
| | Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 5,00 | 966.900.000,00 | 3,00 | 483.450.000,00 | 1,00 | 161.150.000 | 1 | 151.150.000,00 | 100,00 | 93,79 | 4 | 634.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 5,00 | 147.209.759.280,00 | 3,00 | 73.604.879.640,00 | 1,00 | 24.534.959.880 | 1 | 24.085.928.300 | 100,00 | 98,17 | 4 | 97.690.807.940 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dokumen | 5,00 | 1.102.524.000,00 | 3,00 | 551.262.000,00 | 1,00 | 183.754.000 | 1 | 77.675.400 | 100,00 | 42,27 | 4 | 628.937.400 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.332.000.000,00 | 3,00 | 666.000.000,00 | 1,00 | 222.000.000 | 1 | 222.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 888.000.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.735.104.000,00 | 3,00 | 867.552.000,00 | 1,00 | 289.184.000 | 1 | 153.338.613,00 | 100,00 | 53,02 | 4 | 1.020.890.613 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.698.900.000,00 | 3,00 | 849.450.000,00 | 1,00 | 283.150.000 | 1 | 154.147.969,00 | 100,00 | 54,44 | 4 | 1.003.597.969 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.698.900.000,00 | 3,00 | 849.450.000,00 | 1,00 | 283.150.000 | 1 | 174.057.304,00 | 100,00 | 61,47 | 4 | 1.023.507.304 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.539.000.000,00 | 3,00 | 769.500.000,00 | 1,00 | 256.500.000 | 1 | 157.201.795,00 | 100,00 | 61,29 | 4 | 926.701.795 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.679.340.000,00 | 3,00 | 839.670.000,00 | 1,00 | 279.890.000 | 1 | 150.966.592,00 | 100,00 | 53,94 | 4 | 990.636.592 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.698.480.000,00 | 3,00 | 849.240.000,00 | 1,00 | 283.080.000 | 1 | 136.970.724,00 | 100,00 | 48,39 | 4 | 986.210.724 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.513.020.000,00 | 3,00 | 756.510.000,00 | 1,00 | 252.170.000 | 1 | 183.125.268,00 | 100,00 | 72,62 | 4 | 939.635.268 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.711.650.000,00 | 3,00 | 855.825.000,00 | 1,00 | 285.275.000 | 1 | 152.186.037,00 | 100,00 | 53,35 | 4 | 1.008.011.037 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.530.600.000,00 | 3,00 | 765.300.000,00 | 1,00 | 255.100.000 | 1 | 173.291.982,00 | 100,00 | 67,93 | 4 | 938.591.982 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.698.600.000,00 | 3,00 | 849.300.000,00 | 1,00 | 283.100.000 | 1 | 171.291.553,00 | 100,00 | 60,51 | 4 | 1.020.591.553 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.617.180.000,00 | 3,00 | 808.590.000,00 | 1,00 | 269.530.000 | 1 | 177.359.394,00 | 100,00 | 65,80 | 4 | 985.949.394 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.498.980.000,00 | 3,00 | 749.490.000,00 | 1,00 | 249.830.000 | 1 | 185.142.132,00 | 100,00 | 74,11 | 4 | 934.632.132 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.501.680.000,00 | 3,00 | 750.840.000,00 | 1,00 | 250.280.000 | 1 | 154.054.179,00 | 100,00 | 61,55 | 4 | 904.894.179 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba |
| | Operasional pelayana puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 5,00 | 1.496.556.000,00 | 3,00 | 748.278.000,00 | 1,00 | 249.426.000 | 1 | 161.679.153,00 | 100,00 | 64,82 | 4 | 909.957.153 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 5,00 | 1.863.849.600,00 | 3,00 | 931.924.800,00 | 1,00 | 310.641.600 | 1 | 246.367.401 | 100,00 | 79,31 | 4 | 1.178.292.201 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 40.680.000,00 | 3,00 | 20.340.000,00 | 1,00 | 6.780.000 | 1 | 6.780.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 27.120.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 16.800.000,00 | 3,00 | 8.400.000,00 | 1,00 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 3 | 11.200.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Lau |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 5.040.000,00 | 3,00 | 2.520.000,00 | 1,00 | 840.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4 | 2.520.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 5.880.000,00 | 3,00 | 2.940.000,00 | 1,00 | 980.000 | 1 | 980.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 3.920.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas banti-murung |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 30.240.000,00 | 3,00 | 15.120.000,00 | 1,00 | 5.040.000 | 1 | 5.040.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 20.160.000 | 0,00 | 0,00 | | Pusksmas simbang |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 4.200.000,00 | 3,00 | 2.100.000,00 | 1,00 | 700.000 | 1 | 700.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca | Laporan | 5,00 | 7.200.000,00 | 3,00 | 3.600.000,00 | 1,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas mallawa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 12.600.000,00 | 3,00 | 6.300.000,00 | 1,00 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 8.400.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas tanralili |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 5.880.000,00 | 3,00 | 2.940.000,00 | 1,00 | 980.000 | 1 | 980.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 3.920.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Marusu |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 6.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Moncongloe |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 6.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 29.400.000,00 | 3,00 | 14.700.000,00 | 1,00 | 4.900.000 | 1 | 4.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 19.600.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Turikale |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 7.560.000,00 | 3,00 | 3.780.000,00 | 1,00 | 1.260.000 | 1 | 1.260.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5.040.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bontoa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 12.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 8.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Camba |
| | Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Laporan | 5,00 | 7.200.000,00 | 3,00 | 3.600.000,00 | 1,00 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4.800.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Cenrana |
| | Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 5,00 | 6.631.080.000,00 | 3,00 | 3.315.540.000,00 | 1,00 | 1.105.180.000 | 1 | 1.084.020.000 | 100,00 | 98,09 | 4 | 4.399.560.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 5,00 | 71.400.000,00 | 3,00 | 35.700.000,00 | 1,00 | 11.900.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4 | 35.700.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Maros Baru |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 5,00 | 20.160.000,00 | 3,00 | 10.080.000,00 | 1,00 | 3.360.000 | 1 | 3.360.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 13.440.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Bantimurung |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 175,00 | 20.160.000,00 | 105,00 | 10.080.000,00 | 35,00 | 3.360.000 | 35 | 3.360.000,00 | 100,00 | 100,00 | 140 | 13.440.000 | 0,00 | 0,00 | | **Puskesmas Mandai** |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberklosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 25,00 | 31.200.000,00 | 15,00 | 15.600.000,00 | 5,00 | 5.200.000 | 5 | 4.400.000,00 | 100,00 | 84,62 | 20 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mallawa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 5,00 | 35.280.000,00 | 3,00 | 17.640.000,00 | 1,00 | 5.880.000 | 1 | 5.880.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 23.520.000 | 0,00 | 0,00 | | **Puskesmas Simbang** |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang | 5,00 | 10.080.000,00 | 3,00 | 5.040.000,00 | 1,00 | 1.680.000 | 1 | 1.680.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.720.000 | 0,00 | 0,00 | | Puskesmas Mandai |
| | **Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi** | **Jumlah sistem informasi eksehatan yang dikelola** | **Sistem** | **45,00** | **1.428.000.000,00** | **45,00** | **714.000.000,00** | **1,00** | **238.000.000** | **1** | **227.800.000** | **100,00** | **95,71** | **46** | **941.800.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pengelolaan sistem informasi kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dokumen | 225,00 | 1.428.000.000,00 | 135,00 | 714.000.000,00 | 45,00 | 238.000.000 | 1 | 227.800.000 | 2,22 | 95,71 | 136 | 941.800.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota** | **Jumlah izin rumah sakit tipe C, D dan fasilitas kesehatan yang diterbitkan** | **Dokumen** | **60,00** | **80.880.000,00** | **45,00** | **40.440.000,00** | **1,00** | **13.480.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **45** | **40.440.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Unit | 60,00 | 80.880.000,00 | 45,00 | 40.440.000,00 | 15,00 | 13.480.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45 | 40.440.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan** | **Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan** | **Persen** | **100,00** | **7.334.304.000,00** | **100,00** | **3.667.152.000,00** | **100,00** | **1.222.384.000** | **100** | **1.208.968.000** | **100,00** | **98,90** | **200** | **4.876.120.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia esehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota** | **Jumlah SDM kesehatan untuk UKP dan UKM yang tersedia** | **Orang** | **########** | **1.769.220.000,00** | **600,00** | **884.610.000,00** | **200,00** | **294.870.000** | **200** | **291.170.000** | **100,00** | **98,75** | **800** | **1.175.780.000** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 5,00 | 1.769.220.000,00 | 3,00 | 884.610.000,00 | 1,00 | 294.870.000 | 1 | 291.170.000 | 100,00 | 98,75 | 4 | 1.175.780.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota** | **jumlah SDM kesehatan yang memiliki mutu dan kompetensi teknis sesuai ketentuan** | **Orang** | **########** | **5.565.084.000,00** | **600,00** | **2.782.542.000,00** | **1,00** | **927.514.000** | **5** | **917.798.000** | **500,00** | **98,95** | **605** | **3.700.340.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Orang | ########## | 5.565.084.000,00 | 600,00 | 2.782.542.000,00 | 200,00 | 927.514.000 | 200 | 917.798.000 | 100,00 | 98,95 | 800 | 3.700.340.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makannan minuman** | **Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan** | **Persen** | **100,00** | **2.274.786.000,00** | **100,00** | **1.137.393.000,00** | **100,00** | **379.131.000** | **100** | **362.226.000** | **100,00** | **95,54** | **200** | **1.499.619.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produsk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga** | **Jumlah sertifikat produksi pangan IRT serta nomor P-IRT yang di terbitkan** | **Sertifikat** | **5,00** | **2.274.786.000,00** | **3,00** | **1.137.393.000,00** | **1,00** | **379.131.000** | **1** | **362.226.000** | **100,00** | **95,54** | **4** | **1.499.619.000** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengendalian dan penagwasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dokumen | 5,00 | 2.274.786.000,00 | 3,00 | 1.137.393.000,00 | 1,00 | 379.131.000 | 1 | 362.226.000 | 100,00 | 95,54 | 4 | 1.499.619.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan** | **Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan** | **Persen** | **100,00** | **3.174.690.000,00** | **100,00** | **2.641.200.000,00** | **100,00** | **293.920.000** | **95** | **238.230.000** | **95,00** | **81,05** | **195,00** | **2.879.430.000** | **195,00** | **95,92** | | |
| | **Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota** | **Jumlah masyarakat yang mengetahui dan memahami Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)** | **Orang** | **########** | **3.174.690.000,00** | **1.200,00** | **2.641.200.000,00** | **400,00** | **293.920.000** | **400** | **238.230.000** | **100,00** | **81,05** | **1.600** | **2.879.430.000** | **80,00** | **95,92** | | |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 724.800.000,00 | 3,00 | 362.400.000,00 | 1,00 | 120.800.000 | 1 | 120.600.000 | 100,00 | 99,83 | 4,00 | 483.000.000 | 80,00 | 83,28 | | |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 414.270.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 11.490.000 | 1 | 11.490.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 391.290.000 | 80,00 | 94,45 | | Puskesmas Lau |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya | Dokumen | 5,00 | 408.840.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 9.680.000 | 1 | 9.680.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 389.480.000 | 80,00 | 95,26 | | Puskesmas Maros Baru |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 431.610.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 17.270.000 | 1 | 17.270.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 397.070.000 | 70,00 | 92,00 | | Puskesmas Bantimurung |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 402.330.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 7.510.000 | 1 | 5.590.000 | 100,00 | 74,43 | 4,00 | 385.390.000 | 80,00 | 95,79 | | Puskesmas Simbang |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 398.970.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 6.390.000 | 1 | 5.490.000 | 100,00 | 85,92 | 4,00 | 385.290.000 | 70,00 | 96,57 | | Puskesmas Mandai |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 10,00 | 393.870.000,00 | 6,00 | 379.800.000,00 | 2,00 | 4.690.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 379.800.000 | 60,00 | 96,28 | | Puskesmas Mallawa |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 430.050.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 16.750.000 | 1 | 6.900.000 | 100,00 | 41,19 | 4,00 | 386.700.000 | 80,00 | 96,32 | | Puskesmas Tanralili |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 394.470.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 4.890.000 | 1 | 2.480.000 | 100,00 | 50,72 | 4,00 | 382.280.000 | 80,00 | 96,93 | | Puskesmas Marusu |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 402.300.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 387.300.000 | 80,00 | 96,27 | | Puskesmas Moncongloe |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 400.500.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 6.900.000 | 1 | 6.900.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 386.700.000 | 80,00 | 91,35 | | Puskesmas Tompobulu |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 423.300.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 14.500.000 | 1 | 14.380.000 | 100,00 | 99,17 | 4,00 | 394.180.000 | 80,00 | 93,12 | | Puskesmas Bontoa |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 402.300.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 387.300.000 | 80,00 | 96,27 | | Puskesmas Turikale |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 527.700.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 49.300.000 | 1 | 13.700.000 | 100,00 | 27,79 | 4,00 | 393.500.000 | 80,00 | 74,57 | | Puskesmas Camba |
| | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 5,00 | 406.050.000,00 | 3,00 | 379.800.000,00 | 1,00 | 8.750.000 | 1 | 8.750.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 388.550.000 | 80,00 | 73,63 | | Puskesmas Cenrana |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Peraentase jumlh layanan penunjang yang dilaksanakan** | **Persen** | **100,00** | **81.421.861.985,00** | **100,00** | **48.853.117.191,00** | **100** | **16.184.925.521** | **100** | **15.187.245.544** | **100,00** | **93,84** | **200** | **64.040.362.735** | **200,00** | **78,65** | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Perhubungan** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **105,00** | **92.595.000,00** | **63,00** | **55.557.000,00** | **18** | **18.269.000** | **18** | **18.159.000** | **100,00** | **99,40** | **81** | **73.716.000** | **77,14** | **79,61** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 20.125.000,00 | 3,00 | 12.075.000,00 | 1 | 3.775.000 | 1 | 3.775.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 15.850.000 | 80,00 | 78,76 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.250.000,00 | 3,00 | 7.350.000,00 | 1 | 2.450.000 | 1 | 2.450.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 9.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 15.000.000,00 | 3,00 | 9.000.000,00 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 12.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.500.000,00 | 3,00 | 8.100.000,00 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 10.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 17.400.000,00 | 3,00 | 10.440.000,00 | 1 | 3.480.000 | 1 | 3.370.000 | 100,00 | 96,84 | 4 | 13.810.000 | 80,00 | 79,37 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Laporan | 60,00 | 10.000.000,00 | 36,00 | 6.000.000,00 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 37 | 8.000.000 | 61,67 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 4.320.000,00 | 12,00 | 2.592.000,00 | 12 | 864.000,00 | 12 | 864.000 | 100,00 | 100,00 | 24 | 3.456.000 | 120,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **225,00** | **69.158.579.485,00** | **135,00** | **41.495.147.691,00** | **45** | **13.619.568.021** | **45** | **12.969.153.092** | **100,00** | **95,22** | **180** | **54.464.300.783** | **80,00** | **78,75** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 65.532.179.485,00 | 6.744,00 | 39.319.307.691,00 | 2248 | 12.894.288.021 | 2240 | 12.244.173.092 | 99,64 | 94,96 | 8984 | 51.563.480.783 | 79,93 | 78,68 | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 3.611.300.000,00 | 36,00 | 2.166.780.000,00 | 12 | 722.260.000 | 12 | 722.260.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 2.889.040.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 9.250.000,00 | 3,00 | 5.550.000,00 | 1 | 1.850.000 | 1 | 1.550.000 | 100,00 | 83,78 | 4 | 7.100.000 | 80,00 | 76,76 | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 5.850.000,00 | 54,00 | 3.510.000,00 | 18 | 1.170.000 | 18 | 1.170.000 | 100,00 | 100,00 | 72 | 4.680.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Adminitarsi barang milik daerah pada perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **11.875.000,00** | **3,00** | **7.125.000,00** | **1** | **2.375.000** | **1** | **2.375.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **9.500.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| 1 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang miliki daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 11.875.000,00 | 3,00 | 7.125.000,00 | 1 | 2.375.000 | 1 | 2.375.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 9.500.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **800,00** | **155.000.000,00** | **480,00** | **93.000.000,00** | **160** | **31.000.000** | **160** | **30.690.000** | **100,00** | **99,00** | **640** | **123.690.000** | **80,00** | **79,80** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | ######## | 155.000.000,00 | 600,00 | 93.000.000,00 | 31 | 31.000.000 | 31 | 30.690.000 | 100,00 | 99,00 | 631 | 123.690.000 | 63,10 | 79,80 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7,00** | **4.671.162.500,00** | **7,00** | **2.802.697.500,00** | **6** | **1.041.183.500** | **6** | **963.202.017** | **100,00** | **92,51** | **13** | **3.765.899.517** | **185,71** | **80,62** | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 65.775.000,00 | 3,00 | 39.465.000,00 | 1 | 13.155.000 | 1 | 13.028.000 | 100,00 | 99,03 | 4 | 52.493.000 | 80,00 | 79,81 | | |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 15.140.000,00 | 3,00 | 9.084.000,00 | 1 | 3.028.000 | 1 | 2.615.000 | 100,00 | 86,36 | 4 | 11.699.000 | 80,00 | 77,27 | | |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 1.008.367.500,00 | 3,00 | 605.020.500,00 | 1 | 201.673.500 | 1 | 193.566.250 | 100,00 | 95,98 | 4 | 798.586.750 | 80,00 | 79,20 | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 374.500.000,00 | 3,00 | 224.700.000,00 | 1 | 71.750.000 | 1 | 46.607.000 | 100,00 | 64,96 | 4 | 271.307.000 | 80,00 | 72,45 | | |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 62.500.000,00 | 36,00 | 37.500.000,00 | 12 | 12.500.000 | 12 | 4.175.000 | 100,00 | 33,40 | 48 | 41.675.000 | 80,00 | 66,68 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 3.094.880.000,00 | 36,00 | 1.856.928.000,00 | 12 | 739.077.000 | 12 | 703.210.767 | 100,00 | 95,15 | 48 | 2.560.138.767 | 80,00 | 82,72 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **600.000.000,00** | **2,00** | **360.000.000,00** | **2** | **126.000.000** | **2** | **87.050.000** | **100,00** | **69,09** | **4** | **447.050.000** | **200,00** | **74,51** | | |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 150,00 | 225.000.000,00 | 90,00 | 135.000.000,00 | 30 | 51.000.000 | 30 | 46.700.000 | 100,00 | 91,57 | 120 | 181.700.000 | 80,00 | 80,76 | | |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 75,00 | 375.000.000,00 | 45,00 | 225.000.000,00 | 15 | 75.000.000 | 15 | 40.350.000 | 100,00 | 53,80 | 60 | 265.350.000 | 80,00 | 70,76 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3,00** | **5.559.650.000,00** | **3,00** | **3.335.790.000,00** | **3** | **1.111.930.000** | **15** | **978.509.285** | **500,00** | **88,00** | **18** | **4.314.299.285** | **600,00** | **77,60** | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 40.000.000,00 | 36,00 | 24.000.000,00 | 12 | 8.000.000 | 12 | 3.500.000 | 100,00 | 43,75 | 48 | 27.500.000 | 80,00 | 68,75 | | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 3.000.000,00 | 36,00 | 1.800.000,00 | 12 | 600.000 | 12 | 159.285 | 100,00 | 26,55 | 48 | 1.959.285 | 80,00 | 65,31 | | |
| 3 | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 5.516.650.000,00 | 36,00 | 3.309.990.000,00 | 12 | 1.103.330.000 | 12 | 974.850.000 | 100,00 | 88,36 | 48 | 4.284.840.000 | 80,00 | 77,67 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **4,00** | **1.173.000.000,00** | **4,00** | **703.800.000,00** | **4** | **234.600.000,00** | **4** | **138.107.150** | **100,00** | **58,87** | **8** | **841.907.150** | **200,00** | **71,77** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 40,00 | 250.000.000,00 | 24,00 | 150.000.000,00 | 8 | 50.000.000,00 | 8 | 34.674.650 | 100,00 | 69,35 | 32 | 184.674.650 | 80,00 | 73,87 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | 30,00 | 748.000.000,00 | 18,00 | 448.800.000,00 | 6 | 149.600.000 | 6 | 74.690.000 | 100,00 | 49,93 | 24 | 523.490.000 | 80,00 | 69,99 | | |
| 3 | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 250,00 | 125.000.000,00 | 150,00 | 75.000.000,00 | 50 | 25.000.000 | 50 | 20.500.000 | 100,00 | 82,00 | 200 | 95.500.000 | 80,00 | 76,40 | | |
| 4 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 10.000.000 | 1 | 8.242.500 | 100,00 | 82,43 | 4 | 38.242.500 | 80,00 | 76,49 | | |
| | **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | **Persentase pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat** | **Persen** | 100,00 | 75.598.288.000,00 | 37,50 | 31.908.744.027,00 | **100** | 17.280.661.333 | **95** | 14.121.839.255 | 95,00 | 81,72 | 132,5 | 46.030.583.282 | 132,50 | 60,89 | | |
| | **Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **Jumlah ketersediaan air baku** | **M3** | **########** | **17.753.500.000,00** | **########** | **9.964.442.549,00** | **0,58** | **3.741.785.000** | **0,73** | **3.700.630.048** | **125,86** | **98,90** | **40.388** | **13.665.072.597** | **44,52** | **76,97** | | |
| 1 | Pembangunan bangunan perkuatan tebing | Dinormalisasi/Direstorasi | KM | 5,73 | 10.576.500.000,00 | 4,00 | 6.817.937.249,00 | 3 | 2.314.300.000 | 3 | 2.284.474.306 | 100,00 | 98,71 | 7 | 9.102.411.555 | 122,21 | 86,06 | | |
| 2 | Pembangunan sumur air tanah untuk air baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi | Titik | 15,00 | 2.350.500.000,00 | 15,00 | 1.410.928.000,00 | 3 | 470.100.000 | 3 | 465.219.926 | 100,00 | 98,96 | 18 | 1.876.147.926 | 120,00 | 79,82 | | |
| 3 | Pembangunan embung dan penampung air lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Unit | 15,00 | 4.826.500.000,00 | 6,00 | 1.735.577.300,00 | 6386 | 957.385.000 | 4500 | 950.935.816 | 70,47 | 99,33 | 4506 | 2.686.513.116 | 30040,00 | 55,66 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **Luas irigasi primer dan sekunder dengan luas < 1000 ha dalam kondisi baik** | **Ha** | **########** | **57.844.788.000,00** | **9.642,00** | **21.944.301.478,00** | **1,27** | **13.538.876.333** | **1,74** | **10.421.209.207** | **137,01** | **76,97** | **9.644** | **32.365.510.685** | **30,20** | **55,95** | | |
| 1 | Peningkatan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 41,05 | 12.206.193.000,00 | 23,00 | 7.721.013.000,00 | 2 | 1.492.985.000 | 2 | 1.481.275.225 | 100,00 | 99,22 | 25 | 9.202.288.225 | 60,90 | 75,39 | | |
| 2 | Pembangunan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun | km | | | | | 9,67 | 2.973.310.983 | 11,21 | 0 | 115,93 | 0,00 | 11,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Peningkatan bendung irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | Bendung | 10,00 | 2.600.500.000,00 | 2,00 | 628.992.000,00 | 3 | 520.100.000 | 3 | 515.991.987 | 100,00 | 99,21 | 5 | 1.144.983.987 | 50,00 | 44,03 | | |
| 4 | Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 123,50 | 35.614.010.000,00 | 10,00 | 8.084.100.678,00 | 32,91 | 7.425.960.350 | 32,91 | 7.307.942.735 | 100,00 | 98,41 | 42,91 | 15.392.043.413 | 34,74 | 43,22 | | |
| 5 | Rehablitasi bendung irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | Bendung | 15,00 | 3.960.350.000,00 | 8,00 | 3.804.410.800,00 | 10 | 792.070.000 | 0 | 784.949.260 | 0,00 | 99,10 | 8 | 4.589.360.060 | 53,33 | 115,88 | | |
| 6 | Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM | 449,73 | 2.709.135.000,00 | 351,00 | 1.705.785.000,00 | 85 | 334.450.000 | 0 | 331.050.000 | 0,00 | 98,98 | 351 | 2.036.835.000 | 78,05 | 75,18 | | |
| | **Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum** | **Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum** | **Persen** | **100,00** | **42.433.203.172,00** | **46,50** | **23.628.944.174,00** | **100** | **6.866.237.000** | **93,15** | **6.836.781.308** | **93,15** | **99,57** | **139,7** | **30.465.725.482** | **139,65** | **71,80** | | |
| | **Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota** | **Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak** | **Rumah tangga** | **########** | **42.433.203.172,00** | **########** | **23.628.944.174,00** | **85885** | **6.866.237.000** | **80000** | **6.836.781.308** | **93,15** | **99,57** | **####** | **30.465.725.482** | **47,45** | **71,80** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | Unit | 709,00 | 9.337.721.000,00 | 559,00 | 6.292.421.000,00 | 19 | 1.079.359.000 | 19 | 1.078.786.919 | 100,00 | 99,95 | 578 | 7.371.207.919 | 81,52 | 78,94 | | |
| 2 | Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | Liter/Detik | 36,00 | 12.279.632.172,00 | 30,00 | 8.941.382.172,00 | 30 | 1.103.397.000 | 0 | 1.099.270.858 | 0,00 | 99,63 | 30 | 10.040.653.030 | 83,33 | 81,77 | | |
| 3 | Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | 18,00 | 10.563.750.000,00 | 12,00 | 2.292.550.302,00 | 2 | 2.088.509.000 | 2 | 2.075.755.334 | 100,00 | 99,39 | 14 | 4.368.305.636 | 77,78 | 41,35 | | |
| 4 | Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR | 318,00 | 10.089.250.000,00 | 258,00 | 1.469.738.700,00 | 2 | 2.594.972.000 | 2 | 2.582.968.197 | 100,00 | 99,54 | 260 | 4.052.706.897 | 81,76 | 40,17 | | |
| | **Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional** | **Persentase Pengurangan Sampah pada Wilayah Perotaan yang Terfasilitasi** | **Persen** | **60,00** | **11.015.300.000,00** | - | - | **1,57** | **2.203.060.000** | **1,57** | **2.151.143.284** | **100,00** | **97,64** | **1,57** | **2.151.143.284** | **2,62** | **19,53** | | |
| | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah sampah perkotaan yang tertangani** | **Ton** | **######** | **11.015.300.000,00** | - | - | **29628** | **2.203.060.000** | **29628** | **2.151.143.284** | **100,00** | **97,64** | **29628** | **2.151.143.284** | **20,00** | **19,53** | | |
| 1 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS yang dibangun | Ton/hari | 250,00 | 11.015.300.000,00 | - | - | 50 | 2.203.060.000 | 50 | 2.151.143.284 | 100,00 | 97,64 | 50 | 2.151.143.284 | 20,00 | 19,53 | | |
| | **Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase** | **Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat** | **Persen** | **100,00** | **27.677.670.380,00** | **0,02** | **21.191.970.380,00** | **100** | **3.446.128.000** | **100** | **3.440.172.747** | **100,00** | **99,83** | **100** | **24.632.143.127** | **100,02** | **89,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota** | **Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan** | **km** | **10,00** | **27.677.670.380,00** | **6,00** | **21.191.970.380,00** | **3,6** | **3.446.128.000** | **3,6** | **3.440.172.747** | **100,00** | **99,83** | **9,6** | **24.632.143.127** | **96,00** | **89,00** | | |
| 1 | Pembangunan sistem drainase lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | m | ########## | 27.677.670.380,00 | ######### | 21.191.970.380,00 | 3602 | 3.446.128.000 | 3602 | 3.440.172.747 | 100,00 | 99,83 | 20.043 | 24.632.143.127 | 89,31 | 89,00 | | |
| | **Pegembangan permukiman** | **Persentase luas kawasan kumuh** | **Persen** | **30,00** | **31.871.985.498,00** | **0,03** | **24.660.945.498,00** | **6,11** | **2.437.175.000** | **5** | **2.390.742.120** | **81,83** | **98,09** | **5,03** | **27.051.687.618** | **16,77** | **84,88** | | |
| | **Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman kawasan strategis daerah kabupaten/kota** | **Luas kawasan pemukiman strategis daerah** | **Ha** | **290,15** | **31.871.985.498,00** | **35,00** | **24.660.945.498,00** | **85,05** | **2.437.175.000** | **75** | **2.390.742.120** | **88,18** | **98,09** | **110** | **27.051.687.618** | **37,91** | **84,88** | | |
| 1 | Penyediaan sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/kota | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar | Rumah Tangga | ########## | 31.871.985.498,00 | - | 24.660.945.498,00 | 219 | 2.437.175.000 | 219 | 2.390.742.120 | 100,00 | 98,09 | 219 | 27.051.687.618 | 20,00 | 84,88 | | |
| | **Penataan bangunan gedung** | **Rasio bangunan Ber IMB per satuan bangunan** | **Rasio** | 1,00 | 112.725.375.000,00 | 0,14 | 82.730.807.488,00 | **11,76** | 20.484.239.680 | **11,76** | 20.455.438.571 | 100,00 | 99,86 | 11,9 | 103.186.246.059 | 1190,00 | 91,54 | | |
| | **Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung** | **Jumlah dokumen IMB dan setifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan** | **Dokumen** | ########## | **112.725.375.000,00** | **17,00** | **82.730.807.488,00** | **150** | **20.484.239.680** | **150** | **20.455.438.571** | **100,00** | **99,86** | **167** | **103.186.246.059** | **2,39** | **91,54** | | |
| 1 | Pengubahsesuaian bangunan edung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Bangunan Gedung | 25,00 | 6.500.000.000,00 | - | - | 5 | 1.293.020.000 | 5 | 1.289.509.373 | 100,00 | 99,73 | 5 | 1.289.509.373 | 20,00 | 19,84 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 105,00 | 106.225.375.000,00 | - | - | 10 | 19.191.219.680,00 | 10 | 19.165.929.198 | 100,00 | 99,87 | 10 | 19.165.929.198 | 9,52 | 18,04 | | |
| | **Pengembangan jasa konstruksi** | **Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB** | **Persen** | **12,00** | **2.708.771.000,00** | **5,37** | **231.863.500,00** | **150** | **683.427.000** | **150** | **377.813.300** | **100,00** | **55,28** | **155,4** | **609.676.800** | **1294,75** | **22,51** | | |
| | **Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi** | **Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku** | **Orang** | **650,00** | **1.146.621.000,00** | **200,00** | **158.089.500,00** | **1** | **316.547.000** | **1** | **199.023.300** | **100,00** | **62,87** | **201** | **357.112.800** | **30,92** | **31,14** | | |
| 1 | Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 25,00 | 492.450.000,00 | - | - | 1 | 144.548.000 | 1 | 39.674.300 | 100,00 | 27,45 | 1 | 39.674.300 | 4,00 | 8,06 | | |
| 2 | Penyediaan instruktur/asesor/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor dan teknisi atau analis | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | Orang | 30,00 | 39.150.000,00 | - | - | 3 | 13.050.000 | 3 | 13.050.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | 13.050.000 | 10,00 | 33,33 | | |
| 3 | Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor, teknisi atau analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | Orang | 450,00 | 615.021.000,00 | - | - | 5 | 158.949.000 | 5 | 146.299.000 | 100,00 | 92,04 | 5 | 146.299.000 | 1,11 | 23,79 | | |
| | **Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota** | **Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang Tersedia** | **Sistem** | **1,00** | **517.950.000,00** | **1,00** | **36.934.000,00** | **1** | **158.040.000** | **1** | **52.920.000** | **100,00** | **33,49** | **2** | **89.854.000** | **200,00** | **17,35** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan perangkat pendukung layanan infromasi jasa konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | Perangkat Pendukung | 5,00 | 53.000.000,00 | 7,00 | - | 30 | 35.800.000 | 30 | 0 | 100,00 | 0,00 | 37 | 0 | 740,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | Dokumen | 15,00 | 287.700.000,00 | - | - | 30 | 86.790.000 | 30 | 40.020.000 | 100,00 | 46,11 | 30 | 40.020.000 | 200,00 | 13,91 | | |
| 3 | Peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Orang | 25,00 | 77.250.000,00 | - | - | 1 | 15.450.000 | 1 | 12.900.000 | 100,00 | 83,50 | 1 | 12.900.000 | 4,00 | 16,70 | | |
| 4 | Operasionalisasi layanan infromasi jasa konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | Layanan Informasi | 5,00 | 100.000.000,00 | - | - | 5 | 20.000.000 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | | |
| | **Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)** | **Jumlah izin usaha konstruksi yang diterbitkan** | **dokumen** | **65,00** | **303.200.000,00** | **-** | **-** | **100** | **60.640.000** | **71** | **31.750.000** | **71,00** | **52,36** | **71** | **31.750.000** | **109,23** | **10,47** | | |
| 1 | Pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis resiko jasa konstruksi | Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi | Dokumen | 150,00 | 118.650.000,00 | - | - | 100 | 23.730.000 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100 | 0 | 66,67 | 0,00 | | |
| 2 | Penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 5,00 | 184.550.000,00 | - | - | 5 | 36.910.000 | 5 | 31.750.000 | 100,00 | 86,02 | 5 | 31.750.000 | 100,00 | 17,20 | | |
| | **Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi** | **Jumlah lembaga jasa konstruksi yang di tertibkan** | **Lembaga** | **5,00** | **741.000.000,00** | **5,00** | **36.840.000,00** | **20** | **148.200.000** | **24** | **94.120.000** | **120,00** | **63,51** | **29** | **130.960.000** | **580,00** | **17,67** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Paket Pekerjaan | 500,00 | 307.000.000,00 | - | - | 100 | 61.400.000 | 71 | 60.890.000 | 71,00 | 99,17 | 71 | 60.890.000 | 14,20 | 19,83 | | |
| 2 | Pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib pemanfaatan produk | Bangunan Konstruksi | 500,00 | 128.000.000,00 | - | - | 100 | 25.600.000 | 100 | 18.130.000 | 100,00 | 70,82 | 100 | 18.130.000 | 20,00 | 14,16 | | |
| 3 | Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Lembaga | 25,00 | 178.000.000,00 | - | - | 5 | 35.600.000 | 5 | 0 | 100,00 | 0,00 | 5 | 0 | 20,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pengawasan dan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi kabupaten/kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | Badan Usaha | 100,00 | 128.000.000,00 | - | - | 20 | 25.600.000 | 20 | 15.100.000 | 100,00 | 58,98 | 20 | 15.100.000 | 20,00 | 11,80 | | |
| | **Penyelenggaraan jalan** | **Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)** | **Persen** | 100,00 | 654.826.974.451,00 | 78,04 | 356.026.644.658,00 | **95,52** | 94.935.858.084 | **93,68** | 93.197.565.570 | 98,07 | 98,17 | 171,7 | 449.224.210.228 | 171,72 | 68,60 | | |
| | **Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota** | **Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik** | **km** | **########** | **654.826.974.451,00** | **796,00** | **356.026.644.658,00** | **985,8** | **94.935.858.084** | **923,5** | **93.197.565.570** | **93,68** | **98,17** | **1719** | **449.224.210.228** | **34,89** | **68,60** | | |
| 1 | Pengelolaan leger jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | Dokumen | 5,00 | 500.000.000,00 | - | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 99.789.000 | 100,00 | 99,79 | 1 | 99.789.000 | 20,00 | 19,96 | | |
| 2 | Pembangunan jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | KM | 256,00 | 252.017.999.451,00 | 232,00 | 235.067.999.451,00 | 8 | 6.919.886.084 | 4,12 | 6.785.557.000 | 51,50 | 98,06 | 236,1 | 241.853.556.451 | 92,23 | 95,97 | | |
| 3 | Rekonstruksi jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | KM | 155,00 | 347.258.975.000,00 | 60,00 | 88.507.156.000,00 | 31 | 78.309.473.000 | 34,74 | 77.524.575.570 | 112,06 | 99,00 | 94,74 | 166.031.731.570 | 61,12 | 47,81 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 4 | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | KM | ######## | 300.000.000,00 | - | - | 1239 | 60.000.000 | 1239 | 48.000.000 | 100,00 | 80,00 | 1239 | 48.000.000 | 20,00 | 16,00 | | |
| 5 | Rehabilitasi jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | Jembatan | 5,00 | 3.000.000.000,00 | - | - | 1 | 593.944.000 | 1 | 593.900.000 | 100,00 | 99,99 | 1 | 593.900.000 | 20,00 | 19,80 | | |
| 6 | Pembangunan jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | Jembatan | 45,00 | 49.500.000.000,00 | 27,00 | 32.105.156.207,00 | 9 | 8.502.555.000 | 7 | 7.696.779.000 | 77,78 | 90,52 | 34 | 39.801.935.207 | 75,56 | 80,41 | | |
| 7 | Survey kondisi jalan/jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | KM | ######## | 2.250.000.000,00 | 198,00 | 346.333.000,00 | 1239 | 450.000.000 | 1239 | 448.965.000 | 100,00 | 99,77 | 1437 | 795.298.000 | 23,20 | 35,35 | | |
| | **Penyelenggaraan penataan ruang** | **Persentase Ketaatan terhadap RTRW** | **Persen** | 10,00 | 3.419.253.000,00 | 3,66 | 419.085.658,00 | **7,25** | 2.169.921.000 | **7,25** | 1.447.042.603 | 100,00 | 66,69 | 10,91 | 1.866.128.261 | 109,10 | 54,58 | | |
| | **Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/kota** | **Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR** | **Ha** | ######## | **3.419.253.000,00** | **9.574,00** | - | **6600** | **1.059.250.000** | **12099** | **880.356.767** | **183,32** | **83,11** | **21.673** | **880.356.767** | **109,46** | **25,75** | | |
| 1 | Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 9,00 | 2.727.228.000,00 | - | - | 3 | 910.675.000 | 3 | 794.239.267 | 100,00 | 87,21 | 3 | 794.239.267 | 33,33 | 29,12 | | |
| 2 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | Orang | ######## | 445.725.000,00 | - | - | 540 | 148.575.000 | 540 | 86.117.500 | 100,00 | 57,96 | 540 | 86.117.500 | 20,00 | 19,32 | | |
| | **Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota** | **Luas Areal Ruang Daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan** | **Ha** | ######## | **123.150.000,00** | - | - | **6600** | **41.050.000** | **12099** | **7.260.000** | **183,32** | **17,69** | **12099** | **7.260.000** | **61,11** | **5,90** | | |
| 1 | Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan | 150,00 | 123.150.000,00 | - | - | 50 | 41.050.000 | 158 | 7.260.000 | 316,00 | 17,69 | 158 | 7.260.000 | 105,33 | 5,90 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota** | **Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya** | **Ha** | **########** | **4.644.305.000,00** | **9.574,00** | **419.085.658,00** | **6600** | **1.069.621.000** | **12099** | **559.425.836** | **183,32** | **52,30** | **21673** | **978.511.494** | **65,68** | **21,07** | | |
| 1 | Koordinasi pelaksanaan penataan ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | ######## | 4.153.180.000,00 | 2,00 | 419.085.658,00 | 300 | 971.396.000 | 157 | 529.925.836 | 52,33 | 54,55 | 159 | 949.011.494 | 10,60 | 22,85 | | |
| 2 | Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiaatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 150,00 | 288.125.000,00 | - | - | 30 | 57.625.000 | 30 | 19.300.000 | 100,00 | 33,49 | 30 | 19.300.000 | 20,00 | 6,70 | | |
| 3 | Pengawasan TURBINLAK dan pengawasan fungsi dan manfaat | Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | Dokumen | 5,00 | 203.000.000,00 | - | - | 1 | 40.600.000 | 1 | 10.200.000 | 100,00 | 25,12 | 1 | 10.200.000 | 20,00 | 5,02 | | |
| | **Penyelesaian sengketa tanah garapan** | **Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah garapan** | **Persen** | 100,00 | 240.050.000,00 | 50,00 | 37.328.000,00 | **100** | 21.310.000 | **90** | 13.100.000 | 90,00 | 61,47 | 140 | 50.428.000 | 140,00 | 21,01 | | |
| | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan** | **Kasus** | **4,00** | **240.050.000,00** | **4,00** | **37.328.000,00** | **3** | **21.310.000** | **3** | **13.100.000** | **100,00** | **61,47** | **7** | **50.428.000** | **175,00** | **21,01** | | |
| 1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 30,00 | 148.750.000,00 | 3,00 | 32.470.000,00 | 6 | 16.210.000 | 10 | 11.060.000 | 166,67 | 68,23 | 13 | 43.530.000 | 43,33 | 29,26 | | |
| 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara | 15,00 | 91.300.000,00 | 3,00 | 4.858.000,00 | 3 | 5.100.000 | 1 | 2.040.000 | 33,33 | 40,00 | 4 | 6.898.000 | 26,67 | 7,56 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente** | **Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee** | **Persen** | **100,00** | **234.525.000,00** | **25,00** | **9.420.000,00** | **100** | **25.500.000** | **100** | **5.780.000** | **100,00** | **22,67** | **125** | **15.200.000** | **125,00** | **6,48** | | |
| **1** | **Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang di tetapkan** | **Objek** | **1,00** | **234.525.000,00** | **1,00** | **9.420.000,00** | **1** | **25.500.000** | **1** | **5.780.000** | **100,00** | **22,67** | **2** | **15.200.000** | **200,00** | **6,48** | | |
| 1 | Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangk Kegiatan Redistribusi Tanah | Dokumen | 5,00 | 121.550.000,00 | - | - | 1 | 17.000.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | | |
| 2 | Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 112.975.000,00 | 2,00 | 9.420.000,00 | 1 | 8.500.000 | 1 | 5.780.000 | 100,00 | 68,00 | 3 | 15.200.000 | 60,00 | 13,45 | | |
| | **Penatagunaan tanah** | **Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan RTRW** | **Persen** | **100,00** | **156.600.000,00** | **-** | **4.760.000,00** | **70** | **16.210.000** | **70** | **10.140.000** | **100,00** | **62,55** | **70** | **14.900.000** | **70,00** | **9,51** | | |
| | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW** | **Ha** | **########** | **156.600.000,00** | **-** | **4.760.000,00** | **6600** | **16.210.000** | **12099** | **10.140.000** | **183,32** | **62,55** | **12099** | **14.900.000** | **61,11** | **9,51** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 5,00 | 156.600.000,00 | 1,00 | 4.760.000,00 | 1 | 16.210.000 | 1 | 10.140.000 | 100,00 | 62,55 | 2 | 14.900.000 | 40,00 | 9,51 | | #REF! |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)** | **Persentase Layanan Angkutan Darat** | **Persen** | **50,00** | **36.808.084.839,00** | **17,73** | **16.209.399.387,00** | **38,04** | **13.830.210.000** | **38,04** | **12.574.906.816** | **100,00** | **90,92** | **55,77** | **28.784.306.203** | **111,54** | **78,20** | | |
| | **Penyediaan perlengkapan jalan di jalam kabupaten/kota** | **Jumlah jens perlengkapan jalan yang tersedia** | **Jenis** | **10,00** | **26.255.786.561,00** | **6,00** | **10.341.096.109,00** | **2** | **12.845.560.000** | **2** | **11.773.889.474** | **100,00** | **91,66** | **8** | **22.114.985.583** | **80,00** | **84,23** | | |
| 1 | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | ########## | 21.957.436.561,00 | 2.282,00 | 10.341.096.109,00 | 1535 | 11.948.930.000 | 2621 | 10.951.380.474 | 170,75 | 91,65 | 4.903 | 21.292.476.583 | 63,88 | 96,97 | | |
| 2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | ########## | 4.298.350.000,00 | - | - | 300 | 896.630.000 | 481 | 822.509.000 | 160,33 | 91,73 | 481 | 822.509.000 | 32,07 | 19,14 | | |
| | **Pengelolaan terminal penumpang Tipe C** | **Jumlah terminal Tipe C yang di kelola** | **Unit** | **1,00** | **35.575.000,00** | **1,00** | **7.500.000,00** | **1** | **7.115.000** | **1** | **7.005.000** | **100,00** | **98,45** | **2** | **14.505.000** | **200,00** | **40,77** | | |
| 1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 5,00 | 35.575.000,00 | 1,00 | 7.500.000,00 | 1 | 7.115.000 | 1 | 7.005.000 | 100,00 | 98,45 | 2 | 14.505.000 | 40,00 | 40,77 | | |
| | **Penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir** | **Jumlah izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan** | **Dokumen** | **250,00** | **50.000.000,00** | **20,00** | **10.040.000,00** | **50** | **10.000.000** | **38** | **0** | **76,00** | **0,00** | **58** | **10.040.000** | **23,20** | **20,08** | | |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabuoaten/kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 50,00 | 50.000.000,00 | 1,00 | 10.040.000,00 | 10 | 10.000.000 | 38 | 0 | 380,00 | 0,00 | 39 | 10.040.000 | 78,00 | 20,08 | | |
| | **Pengujian berkala kendaran bermotor** | **Jumlah kendaran bermotor yang melaksanakan uji berkala** | **Unit** | **########** | **6.872.590.078,00** | **1.644,00** | **4.743.185.078,00** | **3500** | **220.520.000** | **3500** | **187.214.540** | **100,00** | **84,90** | **5.144** | **4.930.399.618** | **48,99** | **71,74** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Unit | 20,00 | 5.954.484.120,00 | 17,00 | 4.602.684.120,00 | 1 | 35.100.000 | 1 | 34.914.540 | 100,00 | 99,47 | 18 | 4.637.598.660 | 90,00 | 77,88 | | |
| 2 | Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | Unit | ########## | 14.106.000,00 | 4.687,00 | 1.116.000,00 | 3500 | 4.330.000 | 3077 | 4.330.000 | 87,91 | 100,00 | 7.764 | 5.446.000 | 51,12 | 38,61 | | |
| 3 | Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dokumen | ########## | 378.000.000,00 | 4.687,00 | 42.500.000,00 | 3500 | 75.600.000 | 5255 | 75.600.000 | 150,14 | 100,00 | 9.942 | 118.100.000 | 56,81 | 31,24 | | |
| 4 | Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 15,00 | 82.900.000,00 | 10,00 | 11.250.000,00 | 3 | 16.580.000 | 3 | 16.330.000 | 100,00 | 98,49 | 13 | 27.580.000 | 86,67 | 33,27 | | |
| 5 | Indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Laporan | 70,00 | 49.450.000,00 | 15,00 | 8.020.000,00 | 14 | 9.890.000,00 | 22 | 7.340.000 | 157,14 | 74,22 | 37 | 15.360.000 | 52,86 | 31,06 | | |
| 6 | Pemeliharaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Unit | 55,00 | 159.149.958,00 | 14,00 | 62.789.958,00 | 11 | 32.120.000 | 35 | 30.090.000 | 318,18 | 93,68 | 49 | 92.879.958 | 89,09 | 58,36 | | |
| 7 | Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 100,00 | 169.550.000,00 | 17,00 | 9.000.000,00 | 20 | 33.910.000 | 31 | 8.900.000 | 155,00 | 26,25 | 48 | 17.900.000 | 48,00 | 10,56 | | |
| 8 | Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 20,00 | 64.950.000,00 | 18,00 | 5.825.000,00 | 4 | 12.990.000 | 10 | 9.710.000 | 250,00 | 74,75 | 28 | 15.535.000 | 140,00 | 23,92 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota** | **Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Kegiatan** | **4,00** | **3.303.560.000,00** | **4,00** | **1.032.095.000,00** | **3** | **697.155.000** | **3** | **603.397.802** | **100,00** | **86,55** | **7** | **1.635.492.802** | **175,00** | **49,51** | | |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 20,00 | 1.162.895.000,00 | 9,00 | 756.695.000,00 | 4 | 135.400.000 | 8 | 123.020.000 | 200,00 | 90,86 | 17 | 879.715.000 | 85,00 | 75,65 | | |
| 2 | Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 20,00 | 27.895.000,00 | 2,00 | 1.630.000,00 | 4 | 8.755.000 | 2 | 2.060.000 | 50,00 | 23,53 | 4 | 3.690.000 | 20,00 | 13,23 | | |
| 3 | Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | Laporan | 60,00 | 2.112.770.000,00 | 6,00 | 273.770.000,00 | 12 | 553.000.000 | 12 | 478.317.802 | 100,00 | 86,50 | 18 | 752.087.802 | 30,00 | 35,60 | | |
| | **Persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas (andallain) untuk jalan kabupaten/kota** | **Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan** | **Dokumen** | **60,00** | **290.573.200,00** | **-** | **75.483.200,00** | **20** | **49.860.000** | **16** | **3.400.000** | **80,00** | **6,82** | **16** | **78.883.200** | **26,67** | **27,15** | | |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andallalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Laporan | 20,00 | 51.600.000,00 | 7,00 | 4.300.000,00 | 4 | 9.460.000 | 9 | 0 | 225,00 | 0,00 | 16 | 4.300.000 | 80,00 | 8,33 | | |
| 2 | Peningkatan kompetensi perihal andallalin | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | Orang | 10,00 | 186.973.200,00 | 2,00 | 36.973.200,00 | 2 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 36.973.200 | 20,00 | 19,77 | | |
| 3 | Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andallalin | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | Laporan | 50,00 | 52.000.000,00 | 21,00 | 34.210.000,00 | 10 | 10.400.000 | 3 | 3.400.000 | 30,00 | 32,69 | 24 | 37.610.000 | 48,00 | 72,33 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengelolaan pelayaran** | **Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/pelabuhan perahu penyeberangan** | **Persen** | **50,00** | **1.127.920.000,00** | **-** | **1.003.225.000,00** | **50** | **4.455.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **1.003.225.000** | **0,00** | **88,94** | | |
| | **Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah izin usaha angkutan laut badan usaha yang diterbitkan** | **Dokumen** | **6,00** | **25.055.000,00** | **-** | **21.425.000,00** | **2** | **1.155.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **21.425.000** | **0,00** | **85,51** | | |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 82,00 | 25.055.000,00 | 76,00 | 21.425.000,00 | 2 | 1.155.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76 | 21.425.000 | 92,68 | 85,51 | | |
| | **Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota** | **Jumlah izin usaha angkutan laut playaran rakyat bagi orang perorangan yang diterbitkan** | **Dokumen** | **6,00** | **2.175.000,00** | **-** | **-** | **2** | **3.300.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 49,00 | 2.175.000,00 | 43,00 | - | 2 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43 | 0 | 87,76 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **79.560.501.325,00** | **100,00** | **47.736.300.795,00** | **100** | **15.316.919.242** | **100** | **14.459.764.659** | **100,00** | **94,40** | **200** | **62.196.065.454** | **200,00** | **78,17** | **Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **10,00** | **49.000.000,00** | **6,00** | **29.400.000,00** | **29** | **18.800.000** | **29** | **17.464.500** | **100,00** | **92,90** | **35** | **46.864.500** | **350,00** | **95,64** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 9.640.000,00 | 3,00 | 5.784.000,00 | 2 | 10.928.000 | 2 | 9.778.500 | 100,00 | 89,48 | 5 | 15.562.500 | 100,00 | 161,44 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.585.000,00 | 3,00 | 3.951.000,00 | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | 4 | 5.237.000 | 80,00 | 79,53 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.585.000,00 | 3,00 | 3.951.000,00 | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | 4 | 5.237.000 | 80,00 | 79,53 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.585.000,00 | 3,00 | 3.951.000,00 | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | 4 | 5.237.000 | 80,00 | 79,53 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 25,00 | 6.585.000,00 | 15,00 | 3.951.000,00 | 1 | 1.317.000 | 1 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | 16 | 5.237.000 | 64,00 | 79,53 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 90,00 | 6.435.000,00 | 54,00 | 3.861.000,00 | 5 | 1.287.000 | 5 | 1.256.000 | 100,00 | 97,59 | 59 | 5.117.000 | 65,56 | 79,52 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 15,00 | 6.585.000,00 | 9,00 | 3.951.000,00 | 18 | 1.317.000 | 18 | 1.286.000 | 100,00 | 97,65 | 27 | 5.237.000 | 180,00 | 79,53 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **########** | **47.339.828.445,00** | **7.200,00** | **28.403.897.067,00** | **3** | **9.254.472.242** | **3** | **8.609.133.574** | **100,00** | **93,03** | **7203** | **37.013.030.641** | **60,03** | **78,19** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 60,00 | 46.636.400.945,00 | 36,00 | 27.981.840.567,00 | 2.400 | 9.113.786.742 | 2231 | 8.470.301.574 | 92,96 | 92,94 | 2267 | 36.452.142.141 | 3778,33 | 78,16 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 90,00 | 663.850.000,00 | 54,00 | 398.310.000,00 | 12 | 132.770.000 | 12 | 132.770.000 | 100,00 | 100,00 | 66 | 531.080.000 | 73,33 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 30,00 | 39.577.500,00 | 18,00 | 23.746.500,00 | 18 | 7.915.500 | 18 | 6.062.000 | 100,00 | 76,58 | 36 | 29.808.500 | 120,00 | 75,32 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **950.965.000,00** | **6,00** | **570.579.000,00** | **6** | **199.123.000** | **5** | **151.611.585** | **83,33** | **76,14** | **11** | **722.190.585** | **183,33** | **75,94** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 17.275.000,00 | 15,00 | 10.365.000,00 | 2 | 3.455.000 | 2 | 3.285.000 | 100,00 | 95,08 | 17 | 13.650.000 | 68,00 | 79,02 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 42.160.000,00 | 15,00 | 25.296.000,00 | 5 | 8.432.000 | 5 | 8.076.000 | 100,00 | 95,78 | 20 | 33.372.000 | 80,00 | 79,16 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 106.930.000,00 | 15,00 | 64.158.000,00 | 5 | 21.386.000 | 5 | 19.749.000 | 100,00 | 92,35 | 20 | 83.907.000 | 80,00 | 78,47 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60,00 | 49.650.000,00 | 36,00 | 29.790.000,00 | 5 | 9.930.000 | 5 | 8.430.000 | 100,00 | 84,89 | 41 | 38.220.000 | 68,33 | 76,98 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 75.000.000,00 | 36,00 | 45.000.000,00 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 60.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 10,00 | 659.950.000,00 | 6,00 | 395.970.000,00 | 12 | 140.920.000 | 12 | 97.071.585 | 100,00 | 68,88 | 18 | 493.041.585 | 180,00 | 74,71 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **28.437.370.000,00** | **2,00** | **17.062.422.000,00** | **2** | **5.703.874.000** | **2** | **5.577.270.000** | **100,00** | **97,78** | **4** | **22.639.692.000** | **200,00** | **79,61** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 21.120.000,00 | 36,00 | 12.672.000,00 | 12 | 4.224.000 | 12 | 2.475.000 | 100,00 | 58,59 | 48 | 15.147.000 | 80,00 | 71,72 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 10,00 | 28.416.250.000,00 | 6,00 | 17.049.750.000,00 | 12 | 5.699.650.000 | 12 | 5.574.795.000 | 100,00 | 97,81 | 18 | 22.624.545.000 | 180,00 | 79,62 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **2.783.337.880,00** | **2,00** | **1.670.002.728,00** | **2** | **140.650.000** | **1** | **104.285.000** | **50,00** | **74,15** | **3** | **1.774.287.728** | **150,00** | **63,75** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 20,00 | 54.250.000,00 | 12,00 | 32.550.000,00 | 24 | 110.650.000 | 24 | 104.285.000 | 100,00 | 94,25 | 36 | 136.835.000 | 180,00 | 252,23 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 500,00 | 150.000.000,00 | 300,00 | 90.000.000,00 | 4 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300 | 90.000.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | **Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase penyelesaian pelanggaran K3** | **Persen** | **100,00** | **859.695.960,00** | **100,00** | **515.817.576,00** | **100** | **712.934.262** | **100** | **591.672.000** | **100,00** | **82,99** | **200** | **1.107.489.576** | **200,00** | **128,82** | | |
| | **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 ( Satu ) Daerah** | **Jumlah kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani** | **Jenis** | **6,00** | **482.950.000,00** | **6,00** | **289.770.000,00** | **6** | **566.180.000** | **5** | **473.500.000** | **83,33** | **83,63** | **11** | **763.270.000** | **183,33** | **158,04** | | |
| | Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 70,00 | 112.950.000,00 | 42,00 | 67.770.000,00 | 6 | 22.490.000 | 6 | 21.290.000 | 100,00 | 94,66 | 48 | 89.060.000 | 68,57 | 78,85 | | |
| | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | - | 25.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | 478 | 484.000.000 | 478 | 392.600.000 | 100,00 | 81,12 | 478 | 407.600.000 | 0,00 | 1630,40 | | SPM |
| | Penyusunan SOP ketertiban dan ketentraman masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | Dokumen | 5,00 | 107.000.000,00 | 3,00 | 64.200.000,00 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 69.200.000 | 80,00 | 64,67 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pecegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | laporan | ########## | 109.500.000,00 | 1.080,00 | 65.700.000,00 | 360 | 27.690.000 | 360 | 27.690.000 | 100,00 | 100,00 | 1440 | 93.390.000 | 80,00 | 85,29 | | SPM |
| | Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 500,00 | 25.500.000,00 | 300,00 | 15.300.000,00 | 100 | 27.000.000 | 100 | 26.920.000 | 100,00 | 99,70 | 400 | 42.220.000 | 80,00 | 165,57 | | |
| | **Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peaturan bupati/walikota** | **Jumlah PERDA dan PERBUP yang dilaksanakan penegakannya** | **Jenis** | **86,00** | **350.835.960,00** | **86,00** | **210.501.576,00** | **30** | **141.572.262** | **30** | **113.932.000** | **100,00** | **80,48** | **116** | **324.433.576** | **134,88** | **92,47** | | |
| | Sosialisasi penegakan peraturan d aerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha | Laporan | 430,00 | 205.225.000,00 | 258,00 | 123.135.000,00 | 86 | 91.348.878 | 69 | 84.010.000 | 80,23 | 91,97 | 327 | 207.145.000 | 76,05 | 100,94 | | |
| | Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 70,00 | 40.075.000,00 | 42,00 | 24.045.000,00 | 14 | 42.208.384 | 13 | 25.862.000 | 92,86 | 61,27 | 55 | 49.907.000 | 78,57 | 124,53 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Laporan | 70,00 | 105.535.960,00 | 42,00 | 63.321.576,00 | 14 | 8.015.000 | 9 | 4.060.000 | 64,29 | 50,66 | 51 | 67.381.576 | 72,86 | 63,85 | | |
| | **Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota** | **Jumlah PPNS yang menadapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas** | **Laporan** | **500,00** | **25.910.000,00** | **300,00** | **15.546.000,00** | **100** | **5.182.000** | **56** | **4.240.000** | **56,00** | **81,82** | **356** | **19.786.000** | **71,20** | **76,36** | | |
| | Pengembangan kapasitas dan karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | Laporan | 25,00 | 25.910.000,00 | 15,00 | 15.546.000,00 | 5 | 5.182.000 | 5 | 4.240.000 | 100,00 | 81,82 | 20 | 19.786.000 | 80,00 | 76,36 | | |
| | **Pencengahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran** | **Persentase Masyarakat Yang MemperoLeh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **Persen** | **100,00** | **633.162.900,00** | **98,83** | **387.955.900,00** | **90** | **97.014.000** | **100** | **80.918.550** | **111,11** | **83,41** | **199** | **468.874.450** | **198,83** | **74,05** | | |
| | **Pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota** | **Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** | **Jenis** | **4,00** | **514.984.900,00** | **4,00** | **343.540.900,00** | **100** | **57.148.000** | **100** | **45.542.550** | **100,00** | **79,69** | **104** | **389.083.450** | **2600,00** | **75,55** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 500,00 | 114.776.200,00 | 30,00 | 72.956.200,00 | 365 | 13.940.000 | 365 | 13.940.000 | 100,00 | 100,00 | 395 | 86.896.200 | 79,00 | 75,71 | | |
| | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | ########## | 225.145.000,00 | 12,00 | 174.145.000,00 | 12 | 17.000.000 | 12 | 7.420.000 | 100,00 | 43,65 | 24 | 181.565.000 | 1,32 | 80,64 | | |
| | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | 48,00 | 123.183.000,00 | 12,00 | 49.959.000,00 | 12 | 24.408.000 | 12 | 24.182.550 | 100,00 | 99,08 | 24 | 74.141.550 | 50,00 | 60,19 | | |
| | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | 103,00 | 51.880.700,00 | 103,00 | 46.480.700,00 | 103 | 1.800.000 | 103 | 0 | 100,00 | 0,00 | 206 | 46.480.700 | 200,00 | 89,59 | | |
| | **Inspeksi peralatan proteksi kebakaran** | **Jumlah jenis peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku** | **Jenis** | **3,00** | **50.300.000,00** | **1,00** | **9.100.000,00** | **1** | **12.290.000** | **1** | **10.060.000** | **100,00** | **81,86** | **2** | **19.160.000** | **66,67** | **38,09** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Dokumen | 5,00 | 50.300.000,00 | 12,00 | 9.100.000,00 | 12 | 12.290.000 | 12 | 10.060.000 | 100,00 | 81,86 | 24 | 19.160.000 | 480,00 | 38,09 | | |
| | **Invetigasi kejadian kebakaran** | **Jumlah kasus kebakaran yang diinvestigasi** | **Kasus** | **60,00** | **21.300.000,00** | **-** | **-** | **14** | **7.100.000** | **14** | **7.100.000** | **100,00** | **100,00** | **14** | **7.100.000** | **23,33** | **33,33** | | |
| | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penilaian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | Dokumen | 70,00 | 21.300.000,00 | - | - | 14 | 7.100.000 | 14 | 7.100.000 | 100,00 | 100,00 | 14 | 7.100.000 | 20,00 | 33,33 | | |
| | **Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran** | **Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya pencegahan kebakaran** | **Orang** | **########** | **67.878.000,00** | **456,00** | **35.315.000,00** | **500** | **20.476.000** | **2345** | **18.216.000** | **469,00** | **88,96** | **2801** | **53.531.000** | **186,73** | **78,86** | | |
| | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Orang | ######## | 67.878.000,00 | - | - | 500 | 20.476.000 | 2345 | 18.216.000 | 469,00 | 88,96 | 2345 | 18.216.000 | 156,33 | 26,84 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **22.908.456.170,00** | **100,00** | **13.745.073.702,00** | **100** | **5.051.543.102** | **100,00** | **4.534.653.027** | **100,00** | **89,77** | **100,00** | **18.279.726.729** | **100,00** | **79,79** | **Dinas Sosial** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **105,00** | **65.300.000,00** | **63,00** | **39.180.000,00** | **21** | **13.010.000** | **21,00** | **12.904.000** | **100,00** | **99,19** | **84,00** | **52.084.000** | **80,00** | **79,76** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 60,00 | 9.625.000,00 | 36,00 | 5.775.000,00 | 12 | 1.925.000 | 12,00 | 1.925.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 7.700.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 8.775.000,00 | 3,00 | 5.265.000,00 | 1 | 1.755.000 | 1,00 | 1.755.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 7.020.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 9.550.000,00 | 3,00 | 5.730.000,00 | 1 | 1.910.000 | 1,00 | 1.880.000 | 100,00 | 98,43 | 4,00 | 7.610.000 | 80,00 | 79,69 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 9.650.000,00 | 3,00 | 5.790.000,00 | 1 | 1.880.000 | 1,00 | 1.862.000 | 100,00 | 99,04 | 4,00 | 7.652.000 | 80,00 | 79,30 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 9.650.000,00 | 3,00 | 5.790.000,00 | 1 | 1.930.000 | 1,00 | 1.903.000 | 100,00 | 98,60 | 4,00 | 7.693.000 | 80,00 | 79,72 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 10,00 | 9.125.000,00 | 6,00 | 5.475.000,00 | 1 | 1.825.000 | 1,00 | 1.806.000 | 100,00 | 98,96 | 7,00 | 7.281.000 | 70,00 | 79,79 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5,00 | 8.925.000,00 | 3,00 | 5.355.000,00 | 4 | 1.785.000 | 4,00 | 1.773.000 | 100,00 | 99,33 | 7,00 | 7.128.000 | 140,00 | 79,87 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **5,00** | **22.080.137.420,00** | **3,00** | **13.248.082.452,00** | **11** | **4.442.779.952** | **11,00** | **4.003.266.523** | **100,00** | **90,11** | **14,00** | **17.251.348.975** | **280,00** | **78,13** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 21.266.837.420,00 | 2.100,00 | 12.760.102.452,00 | 658 | 4.304.004.952 | 658,00 | 3.864.491.523 | 100,00 | 89,79 | ##### | 16.624.593.975 | 78,80 | 78,17 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 794.750.000,00 | 36,00 | 476.850.000,00 | 11 | 132.990.000 | 11,00 | 132.990.000 | 100,00 | 100,00 | 47,00 | 609.840.000 | 78,33 | 76,73 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 120,00 | 9.800.000,00 | 72,00 | 5.880.000,00 | 1 | 1.960.000 | 1,00 | 1.960.000 | 100,00 | 100,00 | 73,00 | 7.840.000 | 60,83 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 60,00 | 8.750.000,00 | 36,00 | 5.250.000,00 | 18 | 3.825.000 | 18,00 | 3.825.000 | 100,00 | 100,00 | 54,00 | 9.075.000 | 90,00 | 103,71 | | |
| | **Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **5.500.000,00** | **3,00** | **3.300.000,00** | **4** | **1.100.000** | **4,00** | **1.100.000** | **100,00** | **100,00** | **7,00** | **4.400.000** | **140,00** | **80,00** | | |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 20,00 | 5.500.000,00 | 12,00 | 3.300.000,00 | 4 | 1.100.000 | 4,00 | 1.100.000 | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 4.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **500,00** | **127.725.000,00** | **300,00** | **76.635.000,00** | **52** | **24.125.000** | **52,00** | **24.125.000** | **100,00** | **100,00** | **352,00** | **100.760.000** | **70,40** | **78,89** | | |
| | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 15,00 | 62.725.000,00 | 9,00 | 37.635.000,00 | 3 | 11.125.000 | 3,00 | 11.125.000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 48.760.000 | 80,00 | 77,74 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 10,00 | 65.000.000,00 | 6,00 | 39.000.000,00 | 2 | 13.000.000 | 2,00 | 13.000.000 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 52.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **5,00** | **842.814.500,00** | **3,00** | **505.688.700,00** | **6** | **217.857.400** | **6,00** | **169.775.404** | **100,00** | **77,93** | **9,00** | **675.464.104** | **180,00** | **80,14** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 100,00 | 8.900.000,00 | 60,00 | 5.340.000,00 | 11 | 1.780.000 | 11,00 | 1.593.000 | 100,00 | 89,49 | 71,00 | 6.933.000 | 71,00 | 77,90 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 15,00 | 209.485.000,00 | 9,00 | 125.691.000,00 | 5 | 44.603.500 | 5,00 | 41.923.250 | 100,00 | 93,99 | 14,00 | 167.614.250 | 93,33 | 80,01 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 30,00 | 23.769.500,00 | 18,00 | 14.261.700,00 | 6 | 5.111.400 | 6,00 | 5.051.400 | 100,00 | 98,83 | 24,00 | 19.313.100 | 80,00 | 81,25 | | |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 25,00 | 50.000.000,00 | 15,00 | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15,00 | 30.000.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 101.075.000,00 | 36,00 | 60.645.000,00 | 11 | 20.215.000 | 11,00 | 20.215.000 | 100,00 | 100,00 | 47,00 | 80.860.000 | 78,33 | 80,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 20,00 | 449.585.000,00 | 12,00 | 269.751.000,00 | 12 | 146.147.500 | 12,00 | 100.992.754 | 100,00 | 69,10 | 24,00 | 370.743.754 | 120,00 | 82,46 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **500,00** | **125.000.000,00** | **300,00** | **75.000.000,00** | **1** | **50.500.000** | **1,00** | **49.650.000** | **100,00** | **98,32** | **301,00** | **124.650.000** | **60,20** | **99,72** | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 100,00 | 125.000.000,00 | 60,00 | 75.000.000,00 | 1 | 50.500.000 | 1,00 | 49.650.000 | 100,00 | 98,32 | 61,00 | 124.650.000 | 61,00 | 99,72 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **343.007.500,00** | **2,00** | **205.804.500,00** | **2** | **234.170.000** | **2,00** | **222.070.000** | **100,00** | **94,83** | **4,00** | **427.874.500** | **200,00** | **124,74** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 5,00 | 13.000.000,00 | 3,00 | 7.800.000,00 | 12 | 2.600.000 | 12,00 | 2.400.000 | 100,00 | 92,31 | 15,00 | 10.200.000 | 300,00 | 78,46 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 330.007.500,00 | 36,00 | 198.004.500,00 | 12 | 231.570.000 | 12,00 | 219.670.000 | 100,00 | 94,86 | 48,00 | 417.674.500 | 80,00 | 126,57 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **5,00** | **255.007.500,00** | **3,00** | **153.004.500,00** | **4** | **68.000.750** | **4,00** | **51.762.100** | **100,00** | **76,12** | **7,00** | **204.766.600** | **140,00** | **80,30** | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 25,00 | 75.000.000,00 | 15,00 | 45.000.000,00 | 3 | 15.000.000 | 3,00 | 14.875.000 | 100,00 | 99,17 | 18,00 | 59.875.000 | 72,00 | 79,83 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 25,00 | 90.003.750,00 | - | 54.002.250,00 | 3 | 20.000.000 | 3,00 | 19.670.000 | 100,00 | 98,35 | 3,00 | 73.672.250 | 12,00 | 81,85 | | |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100,00 | 52.500.000,00 | 60,00 | 31.500.000,00 | 20 | 10.500.000 | 20,00 | 9.932.500 | 100,00 | 94,60 | 80,00 | 41.432.500 | 80,00 | 78,92 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10,00 | 37.503.750,00 | 6,00 | 22.502.250,00 | 2 | 22.500.750 | 1,00 | 7.284.600 | 50,00 | 32,37 | 7,00 | 29.786.850 | 70,00 | 79,42 | | |
| | **Pemberdayaan sosial** | **Persentase Masyarakat Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.** | **Persen** | **100,00** | **1.232.724.500,00** | **100,00** | **508.317.000,00** | **100** | **257.240.000** | **100,00** | **254.166.245** | **100,00** | **98,81** | **100,00** | **762.483.245** | **100,00** | **61,85** | | |
| | **Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota** | **Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku** | **Orang** | **5,00** | **1.232.724.500,00** | **74,00** | **508.317.000,00** | **14** | **257.240.000** | **14,00** | **254.166.245** | **100,00** | **98,81** | **88,00** | **762.483.245** | **1760,00** | **61,85** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan osial kecamatan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 70,00 | 574.100.000,00 | 49,00 | 125.897.000,00 | 14 | 130.319.000 | 14,00 | 130.035.245 | 100,00 | 99,78 | 63,00 | 255.932.245 | 90,00 | 44,58 | | |
| | Peningkatan kemampuan potensi usmber kesejhateraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga | 15,00 | 572.460.000,00 | 29,00 | 382.420.000,00 | 3 | 102.112.000 | 3,00 | 101.872.000 | 100,00 | 99,76 | 32,00 | 484.292.000 | 213,33 | 84,60 | | |
| | peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Sertifikat | 45,00 | 86.164.500,00 | - | - | 15 | 24.809.000 | 15,00 | 22.259.000 | 100,00 | 89,72 | 15,00 | 22.259.000 | 33,33 | 25,83 | | |
| | **Perlindungan dan jaminan sosial** | **Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial** | **Persen** | **100,00** | **4.697.572.500,00** | **28,41** | **3.490.620.983,00** | **100** | **1.732.132.014** | **100,00** | **1.665.174.979** | **100,00** | **96,13** | **64,21** | **5.155.795.962** | **64,21** | **109,75** | | |
| | **Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.** | **Jumlah fakir miskin yang telah diverifikasi oleh daerah.** | **Orang** | **########** | **4.697.572.500,00** | **########** | **3.490.620.983,00** | **40.000** | **1.732.132.014** | **#####** | **1.665.174.979** | **100,00** | **96,13** | **####** | **5.155.795.962** | **139,98** | **109,75** | | |
| | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Orang | ########## | 3.184.300.000,00 | ########## | 1.592.365.456,00 | 40.000 | 618.244.000 | ##### | 598.803.075 | 100,00 | 96,86 | #### | 2.191.168.531 | 61,68 | 68,81 | | |
| | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Keluarga | ########## | 149.997.500,00 | ########## | 854.300.000,00 | 10.000 | 31.499.500 | ##### | 29.098.000 | 100,00 | 92,38 | #### | 883.398.000 | 26,92 | 588,94 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluaarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | ######## | 1.332.045.000,00 | ######## | 1.043.955.527,00 | 21.590 | 673.749.904 | ###### | 668.723.904 | 100,00 | 99,25 | ##### | 1.712.679.431 | 51,53 | 128,58 | | |
| | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 60,00 | 31.230.000,00 | - | - | 20 | 408.638.610 | 20,00 | 368.550.000 | 100,00 | 90,19 | 20,00 | 368.550.000 | 33,33 | 1180,12 | | |
| | **Pengelolaan taman makam pahlawan** | **Persentase Kelayakan Penggunaan Taman makam Pahlawan** | **Persen** | **100,00** | **97.710.000,00** | **0,01** | **25.762.000,00** | **100** | **19.542.000** | **100,00** | **19.401.600** | **100,00** | **99,28** | **50,01** | **45.163.600** | **50,01** | **46,22** | | |
| | **Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota** | **Jumlah TPM yang dikelola oleh Daerah** | **Unit** | **4,00** | **97.710.000,00** | **4,00** | **25.762.000,00** | **2** | **19.542.000** | **2,00** | **19.401.600** | **100,00** | **99,28** | **6,00** | **45.163.600** | **150,00** | **46,22** | | |
| | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Unit | 4,00 | 97.710.000,00 | 4,00 | 25.762.000,00 | 2 | 19.542.000 | 2,00 | 19.401.600 | 100,00 | 99,28 | 6,00 | 45.163.600 | 150,00 | 46,22 | | |
| | **Rehabilitasi sosial** | **Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial.** | **Persen** | **100,00** | **743.506.500,00** | **27,17** | **144.915.000,00** | **100** | **169.601.500** | **100,00** | **159.215.200** | **100,00** | **93,88** | **63,59** | **304.130.200** | **63,59** | **40,90** | | |
| | **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial** | **Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar** | **Orang** | **5,00** | **609.200.000,00** | **450,00** | **73.532.000,00** | **150** | **140.350.000** | **150,00** | **130.112.200** | **100,00** | **92,71** | **600,00** | **203.644.200** | **1200,00** | **33,43** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 3,00 | 21.000.000,00 | - | - | 50 | 7.000.000 | 50,00 | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 7.000.000 | 1666,67 | 33,33 | | |
| | Penyediaan sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 3,00 | 48.750.000,00 | - | - | 60 | 11.000.000 | 60,00 | 11.000.000 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 11.000.000 | 2000,00 | 22,56 | | |
| | Peynyediaan alat bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesua kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 150,00 | 205.500.000,00 | - | - | 34 | 44.000.000 | 22,00 | 37.350.000 | 64,71 | 84,89 | 22,00 | 37.350.000 | 14,67 | 18,18 | | |
| | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 250,00 | 247.250.000,00 | 50,00 | 54.785.500,00 | 50 | 49.450.000 | 50,00 | 49.207.200 | 100,00 | 99,51 | 100,00 | 103.992.700 | 40,00 | 42,06 | | |
| | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 300,00 | 82.950.000,00 | - | - | 100 | 27.650.000 | 100,00 | 25.555.000 | 100,00 | 92,42 | 100,00 | 25.555.000 | 33,33 | 30,81 | | |
| | Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 300,00 | 3.750.000,00 | - | - | 100 | 1.250.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **Jumlah masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar** | **Orang** | **350,00** | **134.306.500,00** | **300,00** | **71.383.000,00** | **50** | **29.251.500** | **50,00** | **29.103.000** | **100,00** | **99,49** | **350,00** | **100.486.000** | **100,00** | **74,82** | | |
| | Pemberian layanan data dan pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 150,00 | 17.926.500,00 | - | - | 50 | 5.975.500 | 50,00 | 5.827.000 | 100,00 | 97,51 | 50,00 | 5.827.000 | 33,33 | 32,50 | | |
| | kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | - | 116.380.000,00 | 3,00 | 71.383.000,00 | 1 | 23.276.000 | 1,00 | 23.276.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 94.659.000 | 0,00 | 81,34 | | |
| | **Penanganan Bencana** | **Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana.** | **Persen** | **100,00** | **1.277.740.000,00** | **82,50** | **356.275.000,00** | **100** | **307.155.000** | **100,00** | **305.997.650** | **100,00** | **99,62** | **91,25** | **662.272.650** | **91,25** | **51,83** | | |
| | **Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota** | **Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayanan perlindungan sosial** | **Orang** | **3,00** | **262.725.000,00** | **-** | **-** | **100** | **87.575.000** | **100,00** | **87.263.750** | **100,00** | **99,64** | **100,00** | **87.263.750** | **3333,33** | **33,21** | | |
| | Penyediaan makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 3,00 | 73.650.000,00 | - | - | 100 | 24.550.000 | 100,00 | 24.400.000 | 100,00 | 99,39 | 100,00 | 24.400.000 | 3333,33 | 33,13 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 300,00 | 160.875.000,00 | - | - | 100 | 53.625.000 | 100,00 | 53.463.750 | 100,00 | 99,70 | 100,00 | 53.463.750 | 33,33 | 33,23 | | |
| | Pelayanan dukungan psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 300,00 | 28.200.000,00 | - | - | 100 | 9.400.000 | 100,00 | 9.400.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9.400.000 | 33,33 | 33,33 | | |
| | **penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota** | **Jumlah lembaga pemberdayaan bencana (kampung bencana) yang terbentuk)** | **lembaga** | **385,00** | **1.015.015.000,00** | **85,00** | **356.275.000,00** | **14** | **219.580.000** | **14,00** | **218.733.900** | **100,00** | **99,61** | **99,00** | **575.008.900** | **25,71** | **56,65** | | |
| | Koodinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung | 88,00 | 399.910.000,00 | 85,00 | 356.275.000,00 | 14 | 14.545.000 | 14,00 | 14.530.000 | 100,00 | 99,90 | 99,00 | 370.805.000 | 112,50 | 92,72 | | |
| | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 42,00 | 615.105.000,00 | - | - | 30 | 205.035.000 | 30,00 | 204.203.900 | 100,00 | 99,59 | 30,00 | 204.203.900 | 71,43 | 33,20 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **46.136.183.080,00** | **100,00** | **27.681.709.848,00** | **100** | **8.532.583.144** | **100** | **7.824.028.652** | **100** | **91,70** | **200** | **35.505.738.500** | **200,00** | **76,96** | **Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **35,00** | **84.577.500,00** | **21,00** | **50.746.500,00** | **7** | **16.915.500** | **5** | **14.540.500** | **71** | **85,96** | **26** | **65.287.000** | **74,29** | **77,19** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 17.665.000,00 | 3,00 | 10.599.000,00 | 1 | 3.533.000 | 1 | 3.483.000 | 100 | 98,58 | 4 | 14.082.000 | 80,00 | 79,72 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 11.437.500,00 | 3,00 | 6.862.500,00 | 1 | 2.287.500 | 1 | 1.087.500 | 100 | 47,54 | 4 | 7.950.000 | 80,00 | 69,51 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.775.000,00 | 3,00 | 6.465.000,00 | 1 | 2.155.000 | 1 | 1.480.000 | 100 | 68,68 | 4 | 7.945.000 | 80,00 | 73,74 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.125.000,00 | 3,00 | 6.075.000,00 | 1 | 2.025.000 | 1 | 1.575.000 | 100 | 77,78 | 4 | 7.650.000 | 80,00 | 75,56 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 9.950.000,00 | 3,00 | 5.970.000,00 | 1 | 1.990.000 | 1 | 1.990.000 | 100 | 100,00 | 4 | 7.960.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Laporan | 60,00 | 10.500.000,00 | 36,00 | 6.300.000,00 | 12 | 2.100.000 | 12 | 2.100.000 | 100 | 100,00 | 48 | 8.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 14.125.000,00 | 12,00 | 8.475.000,00 | 4 | 2.825.000 | 4 | 2.825.000 | 100 | 100,00 | 16 | 11.300.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **225,00** | **39.055.760.600,00** | **135,00** | **23.433.456.360,00** | **45** | **7.749.078.648** | **45** | **7.135.008.842** | **100** | **92,08** | **180** | **30.568.465.202** | **80,00** | **78,27** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 38.166.660.600,00 | 6.768,00 | 22.899.996.360,00 | 2256 | 7.571.258.648 | 2256 | 6.974.314.842 | 100 | 92,12 | 9024 | 29.874.311.202 | 80,00 | 78,27 | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 870.650.000,00 | 36,00 | 522.390.000,00 | 12 | 174.130.000 | 12 | 159.010.000 | 100 | 91,32 | 48 | 681.400.000 | 80,00 | 78,26 | | |
| 3 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 6.925.000,00 | 3,00 | 4.155.000,00 | 1 | 1.385.000 | 1 | 1.160.000 | 100 | 83,75 | 4 | 5.315.000 | 80,00 | 76,75 | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 11.525.000,00 | 54,00 | 6.915.000,00 | 18 | 2.305.000 | 18 | 524.000 | 100 | 22,73 | 72 | 7.439.000 | 80,00 | 64,55 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **470,00** | **35.250.000,00** | **282,00** | **21.150.000,00** | **94** | **7.050.000** | **94** | **6.997.000** | **100** | **99,25** | **376** | **28.147.000** | **80,00** | **79,85** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5,00 | 25.000.000,00 | 3,00 | 15.000.000,00 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 100 | 100,00 | 4 | 20.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 60,00 | 10.250.000,00 | 36,00 | 6.150.000,00 | 12 | 2.050.000 | 12 | 1.997.000 | 100 | 97,41 | 48 | 8.147.000 | 80,00 | 79,48 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **8,00** | **1.281.895.000,00** | **8,00** | **769.137.000,00** | **8** | **277.999.000** | **8** | **213.000.310** | **100** | **76,62** | **16** | **982.137.310** | **200,00** | **76,62** | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 23.687.500,00 | 3,00 | 14.212.500,00 | 1 | 4.737.500 | 1 | 4.167.000 | 100 | 87,96 | 4 | 18.379.500 | 80,00 | 77,59 | | |
| 2 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 29.975.000,00 | 3,00 | 17.985.000,00 | 1 | 5.995.000 | 1 | 5.730.000 | 100 | 95,58 | 4 | 23.715.000 | 80,00 | 79,12 | | |
| 3 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 66.745.000,00 | 3,00 | 40.047.000,00 | 1 | 13.349.000 | 1 | 12.727.000 | 100 | 95,34 | 4 | 52.774.000 | 80,00 | 79,07 | | |
| 4 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 153.137.500,00 | 3,00 | 91.882.500,00 | 1 | 30.627.500 | 1 | 28.342.500 | 100 | 92,54 | 4 | 120.225.000 | 80,00 | 78,51 | | |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 94.150.000,00 | 3,00 | 56.490.000,00 | 1 | 18.830.000 | 1 | 18.522.000 | 100 | 98,36 | 4 | 75.012.000 | 80,00 | 79,67 | | |
| 6 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 7.430.000 | 1 | 7.430.000 | 100 | 100,00 | 4 | 37.430.000 | 80,00 | 74,86 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 37.150.000,00 | 36,00 | 22.290.000,00 | 12 | 197.030.000 | 12 | 136.081.810 | 100 | 69,07 | 48 | 158.371.810 | 80,00 | 426,30 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60,00** | **827.050.000,00** | **36,00** | **496.230.000,00** | **12** | **86.240.000** | **12** | **81.800.000** | **100** | **94,85** | **48** | **578.030.000** | **80,00** | **69,89** | | |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2,00 | 3.802.200.000,00 | 2,00 | 2.281.320.000,00 | 2 | 35.000.000 | 2 | 34.000.000 | 100 | 97,14 | 4 | 2.315.320.000 | 200,00 | 60,89 | | |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5,00 | 175.000.000,00 | 3,00 | 105.000.000,00 | 1 | 51.240.000 | 1 | 47.800.000 | 100 | 93,29 | 4 | 152.800.000 | 80,00 | 87,31 | | |
| 3 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 30,00 | 356.200.000,00 | 18,00 | 213.720.000,00 | 6 | 327.100.000 | 5 | 305.940.000 | 83 | 93,53 | 23 | 519.660.000 | 76,67 | 145,89 | | |
| 4 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 10,00 | 1.635.500.000,00 | 6,00 | 981.300.000,00 | 2 | 10.100.000 | 2 | 6.350.000 | 100 | 62,87 | 8 | 987.650.000 | 80,00 | 60,39 | | |
| 5 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 50.500.000,00 | 36,00 | 30.300.000,00 | 12 | 317.000.000 | 12 | 299.590.000 | 100 | 94,51 | 48 | 329.890.000 | 80,00 | 653,25 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **60,00** | **1.585.000.000,00** | **36,00** | **951.000.000,00** | **12** | **68.199.996** | **12** | **66.742.000** | **100** | **97,86** | **48** | **1.017.742.000** | **80,00** | **64,21** | | |
| 1 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2,00 | 240.999.980,00 | 2,00 | 144.599.988,00 | 2 | 10.000.000 | 2 | 9.780.000 | 100 | 97,80 | 4 | 154.379.988 | 200,00 | 64,06 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10,00 | 50.000.000,00 | 6,00 | 30.000.000,00 | 2 | 38.199.996 | 2 | 36.999.000 | 100 | 96,86 | 8 | 66.999.000 | 80,00 | 134,00 | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 5,00 | 190.999.980,00 | 3,00 | 114.599.988,00 | 1 | 20.000.000 | 1 | 19.963.000 | 100 | 99,82 | 4 | 134.562.988 | 80,00 | 70,45 | | |
| | **Pengembangan perumahan** | **Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Perumahan** | **Persen** | **100,00** | **1.183.950.000,00** | **50,00** | **174.855.000,00** | **100** | **421.551.500** | **100** | **384.340.000** | **100** | **91,17** | **150** | **559.195.000** | **150,00** | **47,23** | | **#REF!** |
| | **Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupateb/kota** | **Jumlah penduduk korban bencana yang terdata untuk memperoleh rumah layak huni** | **Keluarga** | **150,00** | **32.163.000,00** | **-** | **-** | **50** | **10.721.000** | **50** | **5.830.000** | **100** | **54,38** | **50** | **5.830.000** | **33,33** | **18,13** | | |
| 1 | Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 3,00 | 32.163.000,00 | - | - | 1 | 10.721.000 | 1 | 5.830.000 | 100 | 54,38 | 1 | 5.830.000 | 33,33 | 18,13 | | |
| | **Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota** | **Jumlah Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program yang Mengikuti Sosialisasi Sesuai Standar SPM Perumahan** | **Keluarga** | **150,00** | **81.957.000,00** | **104,00** | **-** | **50** | **27.319.000** | **50** | **24750000** | **100** | **90,60** | **154** | **24.750.000** | **102,67** | **30,20** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | 150,00 | 7.707.000,00 | - | - | 50 | 2.569.000 | 50 | 0 | 100 | 0,00 | 50 | 0 | 33,33 | 0,00 | | |
| 2 | Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | Orang | 3,00 | 74.250.000,00 | - | - | 1 | 24.750.000 | 1 | 24.750.000 | 100 | 100,00 | 1 | 24.750.000 | 33,33 | 33,33 | | |
| | **Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota** | **Jumlah rumah yang dibangun dan di rebah bagi penduduk korban bencana dan relokasi program kabupateb/kota** | **Rumah** | **450,00** | **1.059.915.000,00** | **46,00** | **174.855.000,00** | **150** | **350.000.000** | **70** | **350.000.000** | **47** | **100,00** | **116** | **524.855.000** | **25,78** | **49,52** | | |
| 1 | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Unit Rumah | 450,00 | 600.000.000,00 | 12,00 | 174.855.000,00 | 150 | 200.000.000 | 70 | 200.000.000 | 47 | 100,00 | 82 | 374.855.000 | 18,22 | 62,48 | | |
| 2 | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | Unit Rumah | 60,00 | 450.000.000,00 | - | - | 20 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 100,00 | 0 | 150.000.000 | 0,00 | 33,33 | | |
| | **Penditribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota** | **Jumlah penduduk korban bencana dan relokasi program yang memiliki rumah layak huni** | **Keluarga** | **25,00** | **9.915.000,00** | **71,00** | **-** | **5** | **3.305.000** | **0** | **1.700.000** | **0** | **51,44** | **71** | **1.700.000** | **284,00** | **17,15** | | |
| 1 | Penatausahaan serah terima bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 450,00 | 9.915.000,00 | - | - | 150 | 3.305.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 51,44 | 0 | 1.700.000 | 0,00 | 17,15 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan** | **Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang di terbitkan** | **Dokumen** | **36,00** | **90.619.500,00** | **-** | **-** | **12** | **30.206.500** | **12** | **2.060.000** | **100** | **6,82** | **12** | **2.060.000** | **33,33** | **2,27** | | |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | 30,00 | 53.608.500,00 | - | - | 10 | 17.869.500 | 8 | 2.060.000 | 80 | 11,53 | 8 | 2.060.000 | 26,67 | 3,84 | | |
| 2 | Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Laporan | 36,00 | 37.011.000,00 | - | - | 12 | 12.337.000 | 12 | 0 | 100 | 0,00 | 12 | 0 | 33,33 | 0,00 | | |
| | **Kawasan pemukiman** | **Persentase Permukiman yang Tertata** | **Persen** | **100,00** | **1.265.254.200,00** | **100,00** | **138.742.000,00** | **3** | **421.751.400** | **2** | **371.400.230** | **67** | **88,06** | **102** | **510.142.230** | **102,00** | **40,32** | | |
| | **Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman** | **Jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman yang diterbitkan** | **Dokumen** | **3,00** | **87.540.000,00** | **-** | **-** | **1** | **29.180.000** | **1** | **3.870.000** | **100** | **13,26** | **1** | **3.870.000** | **33,33** | **4,42** | | |
| 1 | Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawaan oemukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Laporan | 3,00 | 87.540.000,00 | - | - | 1 | 29.180.000 | 1 | 3.870.000 | 100 | 13,26 | 1 | 3.870.000 | 33,33 | 4,42 | | |
| | **Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha** | **pengurangan Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha** | **Ha** | **5,00** | **21.528.000,00** | **-** | **-** | **1** | **7.176.000** | **1** | **4.569.500** | **100** | **63,68** | **1,00** | **4.569.500** | **20,00** | **21,23** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyusunan /review/legalisasi kebijakan bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | Dokumen | 3,00 | 21.528.000,00 | - | - | 1 | 7.176.000 | 1 | 4.569.500 | 100 | 63,68 | 1 | 4.569.500 | 33,33 | 21,23 | | |
| | **Peningkatan kualitas kawasn pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha** | **Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan** | **Ha** | **10,00** | **1.156.186.200,00** | **5,36** | **138.742.000,00** | **1** | **385.395.400** | **0** | **362.960.730** | **0** | **94,18** | **5,36** | **501.702.730** | **53,60** | **43,39** | | |
| 1 | Perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Unit Rumah | 900,00 | 1.006.186.200,00 | 5,00 | 138.742.000,00 | 300 | 335.395.400 | 124 | 313.129.500 | 41 | 93,36 | 129 | 451.871.500 | 14,33 | 44,91 | | |
| 2 | Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | Dokumen | 3,00 | 150.000.000,00 | - | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 49.831.230 | 100 | 99,66 | 1 | 49.831.230 | 33,33 | 33,22 | | |
| | **Perumahan dan kawasan permukiman kumuh** | **Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan** | **Persen** | **100,00** | **992.061.000,00** | **96,85** | **215.911.650,00** | **10,36** | **330.687.000** | **0** | **327.895.000** | **0** | **99,16** | **48,43** | **543.806.650** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota** | **Luas Areal pemukiman yang Memiliki Potensi untuk menjadi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** | **Ha** | **50,00** | **992.061.000,00** | **15,36** | **215.911.650,00** | **10,36** | **330.687.000** | **0** | **327.895.000** | **0** | **99,16** | **15,36** | **543.806.650** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Rumah | 300,00 | 992.061.000,00 | 58,00 | 215.911.650,00 | 100 | 330.687.000 | 124 | 327.895.000 | 124 | 99,16 | 182,00 | 543.806.650 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)** | **Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU** | **Persen** | **100,00** | **172.722.027,00** | **29,91** | **76.599.612,00** | **18** | **40.445.000** | **18** | **17.700.000** | **100** | **43,76** | **23,96** | **94.299.612** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU sesuai standar yang berlaku** | **Kawasan** | **150,00** | **172.722.027,00** | **120,00** | **76.599.612,00** | **18** | **40.445.000** | **18** | **17.700.000** | **100** | **43,76** | **138,00** | **94.299.612** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan | 60,00 | 97.722.027,00 | 36,00 | 51.387.027,00 | 12 | 15.445.000 | 12 | 850.000 | 100 | 5,50 | 48,00 | 52.237.027 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Laporan | 36,00 | 75.000.000,00 | 11,00 | 25.212.585,00 | 12 | 25.000.000 | 12 | 16.850.000 | 100 | 67,40 | 23,00 | 42.062.585 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Perencanaan lingkungan hidup** | **Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten** | **Persen** | **100,00** | **358.365.000,00** | **50,00** | **294.053.000,00** | **1** | **119.455.000** | **1** | **96.880.000** | **100** | **81,10** | **25,50** | **390.933.000** | **0,00** | **0,00** | | **#REF!** |
| | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | **Dokumen** | **5,00** | **358.365.000,00** | **1,00** | **6.850.000,00** | **1** | **119.455.000** | **1** | **96.880.000** | **100** | **81,10** | **2,00** | **103.730.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Penyusunan RPPLH kabupaten/kota | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | Dokuman | 3,00 | 358.365.000,00 | 1,00 | 6.850.000,00 | 1 | 119.455.000 | 1 | 96.880.000 | 100 | 81,10 | 2,00 | 103.730.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH** | **Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang mendapatkan pengakuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaky** | **Persen** | **100,00** | **24.456.000,00** | **-** | **-** | **1** | **8.152.000** | **1** | **5.176.000** | **100** | **63,49** | **0,50** | **5.176.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH** | **Jumlah Masyarakat Hukum Ada (MHA) terkait PPLH yang mendapatkan pengakuan** | **MHA** | **1,00** | **24.456.000,00** | **-** | **-** | **1** | **8.152.000** | **1** | **5.176.000** | **100** | **63,49** | **1,00** | **5.176.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Dokumen | 3,00 | 24.456.000,00 | - | - | 1 | 8.152.000 | 1 | 5.176.000 | 100 | 63,49 | 1,00 | 5.176.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan keanekaragaman hayati** | **Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan** | **Persen** | **100,00** | **430.797.000,00** | **-** | **25.000.000,00** | **30** | **130.000.000** | **30** | **129.112.425** | **100** | **99,32** | **15,00** | **154.112.425** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Luas areal keanekaragaman hayati (KEHATI) yang dikelola termasuk taman kebun raya dan RTH** | **Ha** | **30,00** | **430.797.000,00** | **-** | **25.000.000,00** | **30** | **130.000.000** | **30** | **129.112.425** | **100** | **99,32** | **30,00** | **154.112.425** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | 3,00 | 390.000.000,00 | - | - | 1 | 130.000.000 | 1 | 129.112.425 | 100 | 99,32 | 1,00 | 129.112.425 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)** | **Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan** | **Persen** | **540,00** | **40.797.000,00** | - | - | **180** | **13.599.000** | **135** | **13.466.000** | **75** | **99,02** | **135,00** | **13.466.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah unit usaha yang memiliki izin PPLH yang berada dalam pengawasan pemerintah Kabupaten** | **Unit Usaha** | **100,00** | **24.456.000,00** | **50,00** | **18.424.000,00** | **492** | **13.599.000** | **369** | **13.466.000** | **75** | **99,02** | **209,50** | **31.890.000,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 50,00 | 24.456.000,00 | 10,00 | 18.424.000,00 | 2 | 13.599.000 | 2 | 13.466.000 | 100 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH** | | | **15,00** | **24.456.000,00** | - | - | **5** | **8.152.000** | **4** | **5.176.000** | **80** | **63,49** | 4,00 | 5.176.000 | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH** | | | **100,00** | **773.371.500,00** | **0,95** | **692.806.500,00** | **12** | **8.152.000** | **12** | **5.176.000** | **100** | **63,49** | **6,48** | **697.982.500** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Dokumen | 25,00 | 773.371.500,00 | 45,17 | 692.806.500,00 | 5 | 8.152.000 | 4 | 5.176.000 | 80 | 63,49 | **49,17** | **697.982.500** | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat** | **Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang lingkungan hidup** | **Persen** | **85,00** | **773.371.500,00** | **67,06** | **692.806.500,00** | **29200** | **26.855.000** | **19200** | **26.830.000** | **66** | **99,91** | ##### | 719.636.500 | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH** | **Lembaga** | **100,00** | **35.040.000,00** | **50,00** | **35.980.000,00** | **12** | **26.855.000** | **12** | **26.830.000** | **100** | **99,91** | **31,00** | **62.810.000** | **0,00** | **0,00** | | **UPTD Laboratorium Lingkungan** |
| 1 | Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 500,00 | 35.040.000,00 | 38,00 | 35.980.000,00 | 100 | 15.175.000 | 0 | 15.160.000 | 0 | 99,90 | **38,00** | **51.140.000** | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Orang | 300,00 | 35.040.000,00 | - | - | 100 | 11.680.000 | 0 | 11.670.000 | 0 | 99,91 | 0,00 | 11.670.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat** | **Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup** | **Persen** | **100,00** | **213.792.000,00** | **22,50** | **331.397.500,00** | **1** | **59.300.000** | **1** | **16.340.000** | **100** | **27,55** | **11,75** | **347.737.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **umlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penghargaan lingkungan hidup** | **Orang** | **500,00** | **213.792.000,00** | **40,00** | **331.397.500,00** | **100** | **59.300.000** | **0** | **16.340.000** | **0** | **27,55** | **40,00** | **347.737.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas | ######## | 177.900.000,00 | 1,00 | 5.201.000,00 | ###### | 59.300.000 | 0 | 16.340.000 | 0 | 27,55 | 1,00 | 21.541.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penanganan pengakuan lingkungan hidup** | **Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan** | **Persen** | **30,00** | **17.946.000,00** | **-** | **-** | **10** | **5.982.000** | **3** | **5.798.000** | **30** | **96,92** | 3,00 | 5.798.000 | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota** | **Jumlah kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diselesaikan** | **Kasus** | **300,00** | **17.946.000,00** | **1,00** | **57.453.500,00** | **100** | **5.982.000** | **30,95** | **5.798.000** | **31** | **96,92** | 31,95 | 63.251.500 | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | Pengaduan | 100,00 | 25.119.065.648,00 | 12,50 | 22.284.788,00 | 47.304 | 5.982.000 | 14640 | 5.798.000 | 31 | 96,92 | **#####** | **28.082.788** | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan persampahan** | **Persentase sampah yang tertangan** | **Persen** | **900,00** | **25.119.065.648,00** | **5,00** | **22.284.788,00** | **180** | **8.365.593.620** | **175** | **8.279.875.927** | **97** | **98,98** | **180,00** | **8.302.160.715** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengelolaan Sampah** | **Jumlah sampah yang tertangani** | **Ton** | **######** | **25.119.065.648,00** | **1,00** | **22.284.788,00** | **492** | **8.365.593.620** | **385** | **8.279.875.927** | **78** | **98,98** | 386,00 | 8.302.160.715 | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kelompok | 100,00 | 45.030.000,00 | 36,94 | 114.355.000,00 | 2 | 86.400.000 | 2 | 86.400.000 | 100 | 100,00 | **19,47** | **200.755.000** | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penyediaan sarana adn prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Unit | ######## | 45.030.000,00 | 530,00 | 114.355.000,00 | 5 | 2.251.198.620 | 4,8 | 2.191.275.927 | 96 | 97,34 | **534,80** | **2.305.630.927** | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | Dokumen | 36,00 | 45.030.000,00 | 10,00 | 114.355.000,00 | 12 | 15.010.000 | 12 | 0 | 100 | 0,00 | 22,00 | 114.355.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang | Ton | 100,00 | 15.264.628.716,00 | 63,24 | 31.877.745.116,00 | 5 | 14.685.000 | 4,8 | 4.200.000 | 96 | 28,60 | **34,02** | **31.881.945.116** | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional | jumlah sampah yang ertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton | ######## | 15.264.628.716,00 | ######### | 31.877.745.116,00 | 29200 | 5.998.300.000 | 21000 | 5.998.000.000 | 72 | 99,99 | **#####** | **37.875.745.116** | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota** | **Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Persen** | **15,00** | **388.996.200,00** | **150,00** | **86.400.000,00** | **5** | **129.665.400** | **5** | **116.337.250** | **100** | **89,72** | 155,00 | 202.737.250 | **10,00** | **17,94** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota** | **Jumah lokasi pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota yang terlaksana** | **Lokasi** | **36,00** | **14.486.636.316,00** | **296,00** | **14.097.640.116,00** | **12** | **129.665.400** | **12** | **116.337.250** | **100** | **89,72** | 308,00 | 14.213.977.366 | **20,00** | **17,94** | | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 36,00 | 59.182.500,00 | 1,00 | 3.440.000,00 | 12 | 19.727.500 | 12 | 6.400.000 | 100 | 32,44 | 13,00 | 9.840.000 | 20,00 | 6,49 | | |
| 2 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Dokumen | ######## | 329.813.700,00 | - | - | 29200 | 109.937.900 | 29200 | 109.937.250 | 100 | 100,00 | #### | 109.937.250 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **84.627.432.160,00** | **100,00** | **50.776.459.296,00** | **100** | **8.761.108.861** | **100** | **7.264.758.185** | **100,00** | **82,92** | **200,00** | **58.041.217.481** | **200,00** | **68,58** | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **95,00** | **351.190.000,00** | **57,00** | **210.714.000,00** | **19** | **37.599.000** | **19** | **35.979.000** | **100,00** | **95,69** | **76,00** | **246.693.000** | **80,00** | **70,24** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 187.995.000,00 | 6,00 | 112.797.000,00 | 2 | 9.156.000 | 2 | 7.576.000 | 100,00 | 82,74 | 8,00 | 120.373.000 | 80,00 | 64,03 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 45.780.000,00 | 3,00 | 27.468.000,00 | 1 | 3.989.000 | 1 | 3.989.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 31.457.000 | 80,00 | 68,71 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 19.945.000,00 | 3,00 | 11.967.000,00 | 1 | 3.747.000 | 1 | 3.707.000 | 100,00 | 98,93 | 4,00 | 15.674.000 | 80,00 | 78,59 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 18.735.000,00 | 3,00 | 11.241.000,00 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 13.941.000 | 80,00 | 74,41 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.500.000,00 | 3,00 | 8.100.000,00 | 1 | 3.549.000 | 1 | 3.549.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 11.649.000 | 80,00 | 86,29 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 17.745.000,00 | 3,00 | 10.647.000,00 | 1 | 9.498.000 | 1 | 9.498.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 20.145.000 | 80,00 | 113,52 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60,00 | 47.490.000,00 | 36,00 | 28.494.000,00 | 12 | 4.960.000 | 12 | 4.960.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 33.454.000 | 80,00 | 70,44 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **210,00** | **72.628.942.660,00** | **126,00** | **43.577.365.596,00** | **42** | **7.264.923.766** | **38** | **6.170.379.345** | **90,48** | **84,93** | **164,00** | **49.747.744.941** | **78,10** | **68,50** | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 36.324.618.830,00 | 3.345,00 | 21.794.771.298,00 | 1.115 | 7.074.460.766 | 1042 | 6.036.960.345 | 93,45 | 85,33 | ##### | 27.831.731.643 | 78,69 | 76,62 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 35.372.303.830,00 | 36,00 | 21.223.382.298,00 | 12 | 181.390.000 | 10 | 129.360.000 | 83,33 | 71,32 | 46,00 | 21.352.742.298 | 76,67 | 60,37 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 60,00 | 906.950.000,00 | 36,00 | 544.170.000,00 | 12 | 5.014.000 | 11 | 0 | 91,67 | 0,00 | 47,00 | 544.170.000 | 78,33 | 60,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 20,00 | 25.070.000,00 | 12,00 | 15.042.000,00 | 4 | 4.059.000 | 4 | 4.059.000 | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 19.101.000 | 80,00 | 76,19 | | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **7.750.000,00** | **3,00** | **4.650.000,00** | **1** | **1.550.000** | **1** | **1.550.000** | **100,00** | **100,00** | **4,00** | **6.200.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 7.750.000,00 | 3,00 | 4.650.000,00 | 1 | 1.550.000 | 1 | 1.550.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 6.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **390,00** | **1.860.195.000,00** | **234,00** | **1.116.117.000,00** | **78** | **203.914.000** | **78** | **18.689.000** | **100,00** | **9,17** | **312,00** | **1.134.806.000** | **80,00** | **61,00** | | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 5,00 | 949.695.000,00 | 3,00 | 569.817.000,00 | 1 | 115.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 569.817.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 10,00 | 575.000.000,00 | 6,00 | 345.000.000,00 | 2 | 67.100.000 | 1 | 10.850.000 | 50,00 | 16,17 | 7,00 | 355.850.000 | 70,00 | 61,89 | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 60,00 | 335.500.000,00 | 36,00 | 201.300.000,00 | 12 | 21.814.000 | 12 | 7.839.000 | 100,00 | 35,94 | 48,00 | 209.139.000 | 80,00 | 62,34 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **4.537.788.600,00** | **6,00** | **2.722.673.160,00** | **5** | **534.598.860** | **4,40** | **422.950.340** | **88,00** | **79,12** | **10,40** | **3.145.623.500** | **173,33** | **69,32** | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 2.661.669.300,00 | 3,00 | 1.597.001.580,00 | 1 | 65.361.860 | 0,99 | 53.522.000 | 99,00 | 81,89 | 3,99 | 1.650.523.580 | 79,80 | 62,01 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 326.809.300,00 | 3,00 | 196.085.580,00 | 1 | 221.827.000 | 0,92 | 179.625.000 | 92,00 | 80,98 | 3,92 | 375.710.580 | 78,40 | 114,96 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 1.047.810.000,00 | 3,00 | 628.686.000,00 | 1 | 10.300.000 | 1 | 8.450.000 | 100,00 | 82,04 | 4,00 | 637.136.000 | 80,00 | 60,81 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 51.500.000,00 | 3,00 | 30.900.000,00 | 12 | 80.000.000 | 12 | 63.600.000 | 100,00 | 79,50 | 15,00 | 94.500.000 | 300,00 | 183,50 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 157.110.000 | 1 | 117.753.340 | 100,00 | 74,95 | 4,00 | 147.753.340 | 80,00 | 295,51 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 60,00 | 400.000.000,00 | 36,00 | 240.000.000,00 | 12 | 642.510.000 | 9 | 546.700.000 | 75,00 | 85,09 | 45,00 | 786.700.000 | 75,00 | 196,68 | | |
| | **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **Laporan** | **3,00** | **4.720.250.000,00** | **3,00** | **2.832.150.000,00** | **3** | **21.300.000** | **2,90** | **19.800.000** | **96,67** | **92,96** | **5,90** | **2.851.950.000** | **196,67** | **60,42** | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 3.293.750.000,00 | 36,00 | 1.976.250.000,00 | 12 | 264.000.000 | 12 | 242.000.000 | 100,00 | 91,67 | 48,00 | 2.218.250.000 | 80,00 | 67,35 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 106.500.000,00 | 36,00 | 63.900.000,00 | 12 | 357.210.000 | 12 | 284.900.000 | 100,00 | 79,76 | 48,00 | 348.800.000 | 80,00 | 327,51 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang | Jenis | 60,00 | 1.320.000.000,00 | 36,00 | 792.000.000,00 | 12 | 76.013.235 | 10 | 68.510.500 | 83,33 | 90,13 | 46,00 | 860.510.500 | 76,67 | 65,19 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | berda Dalam Kondisi Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** | **Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya** | **Unit** | **2,00** | **521.315.900,00** | **2,00** | **312.789.540,00** | **2** | **28.249.945** | **2** | **20.785.500** | **100,00** | **73,58** | **4,00** | **333.575.040** | **200,00** | **63,99** | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 15,00 | 380.066.175,00 | 9,00 | 228.039.705,00 | 3 | 47.763.290 | 3 | 47.725.000 | 100,00 | 99,92 | 12,00 | 275.764.705 | 80,00 | 72,56 | | |
| | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi** | **Persen** | 100,00 | 63.375.000,00 | - | 40.000.000,00 | **100** | 12.675.000 | **100** | 12.655.000 | 100,00 | 99,84 | 100 | 52.655.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah investor yang melakukan investasi pada tahun berkenan** | **Investor** | **495,00** | **63.375.000,00** | - | **40.000.000,00** | **165** | **12.675.000** | **184** | **12.655.000** | **111,52** | **99,84** | **184** | **52.655.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | Dokumen | 5,00 | 63.375.000,00 | 1,00 | 40.000.000,00 | 1 | 12.675.000 | 1 | 12.655.000 | 100,00 | 99,84 | 2 | 52.655.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Wakt** | **Persen** | **100,00** | **1.908.700.000,00** | **41,25** | **728.088.405,00** | **100** | **381.740.000** | **100** | **268.472.000** | **100,00** | **70,33** | **141,3** | **996.560.405** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah perusahaan yang yang dievaluasi dan mendapatkan pendampingan** | **Perusahaan** | **480,00** | **1.908.700.000,00** | **10,00** | **728.088.405,00** | **160** | **381.740.000** | **160** | **268.472.000** | **100,00** | **70,33** | **170** | **996.560.405** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kegiatan Usaha. | 10,00 | 288.275.000,00 | - | - | 2 | 57.655.000 | 2 | 30.090.000 | 100,00 | 52,19 | 2 | 30.090.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Pelaku Usaha | 600,00 | 1.049.750.000,00 | - | - | 120 | 209.950.000 | 150 | 127.940.000 | 125,00 | 60,94 | 150 | 127.940.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha | 300,00 | 570.675.000,00 | - | - | 60 | 114.135.000 | 151 | 110.442.000 | 251,67 | 96,76 | 151,00 | 110.442.000 | 50,33 | 19,35 | | |
| | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu** | **Persen** | **100,00** | **538.125.000,00** | **98,00** | **152.927.000,00** | **100** | **107.625.000** | **100** | **105.112.500** | **100,00** | **97,67** | **198** | **258.039.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah perusahaan yang yang dievaluasi dan mendapatkan pendampingan** | **Perusahaan** | **130,00** | **538.125.000,00** | **13,00** | **152.927.000,00** | **26** | **107.625.000** | **26** | **105.112.500** | **100,00** | **97,67** | **39** | **258.039.500** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kegiatan Usaha. | 250,00 | 162.245.000,00 | - | - | 50 | 32.449.000 | 50 | 32.426.500 | 100,00 | 99,93 | 50 | 32.426.500 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Pelaku Usaha | 250,00 | 145.805.000,00 | - | - | 50 | 29.161.000 | 50 | 27.011.000 | 100,00 | 92,63 | 50 | 27.011.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha | 15,00 | 230.075.000,00 | - | - | 3 | 46.015.000 | 3 | 45.675.000 | 100,00 | 99,26 | 3 | 45.675.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal** | **Persen** | **100,00** | **1.078.675.000,00** | **-** | **47.027.000,00** | **100** | **215.735.000** | **100** | **10.600.000** | **100,00** | **4,91** | **100** | **57.627.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal** | **Jenis** | **2,00** | **1.078.675.000,00** | **-** | **47.027.000,00** | **2** | **215.735.000** | **2** | **10.600.000** | **100,00** | **4,91** | **2** | **57.627.000** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen | 20,00 | 1.078.675.000,00 | 12,00 | 47.027.000,00 | 4 | 215.735.000 | 4 | 10.600.000 | 100,00 | 4,91 | 16 | 57.627.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** | **Persen** | **50,00** | **158.800.000,00** | **22,69** | **-** | **37,54** | **31.760.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **22,69** | **0** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi** | **Orang** | **69,00** | **158.800.000,00** | **-** | **-** | **23** | **31.760.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Orang | 69,00 | 158.800.000,00 | - | - | 23 | 31.760.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan** | **Persen** | **35,00** | **298.302.000,00** | **22,69** | **42.491.000,00** | **24,5** | **51.937.000** | **24** | **50.350.000** | **97,96** | **96,94** | **46,69** | **92.841.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan** | **Orang** | **########** | **48.302.000,00** | **2,00** | **42.491.000,00** | **1.000** | **1.937.000** | **1000** | **1.878.000** | **100,00** | **96,95** | **1002** | **44.369.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Orang | 250,00 | 48.302.000,00 | 110,00 | 42.491.000,00 | 50 | 1.937.000 | 50 | 1.878.000 | 100,00 | 96,95 | 160 | 44.369.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja** | **Orang** | **########** | **250.000.000,00** | **-** | **-** | **800** | **50.000.000** | **800** | **48.472.000** | **100,00** | **96,94** | **800** | **48.472.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah pelaksanaan Job Fair | Kali | 5,00 | 250.000.000,00 | - | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 48.472.000 | 100,00 | 96,94 | 1 | 48.472.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan** | **Persen** | **100,00** | **279.155.000,00** | **50,00** | **117.992.500,00** | **100** | **55.831.000** | **85** | **29.537.000** | **85,00** | **52,90** | **135** | **147.529.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja** | **Dokumen** | **20,00** | **189.130.000,00** | **3,00** | **91.200.000,00** | **4** | **37.826.000** | **4** | **23.286.000** | **100,00** | **61,56** | **7** | **114.486.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan | 30,00 | 189.130.000,00 | 5,00 | 91.200.000,00 | 6 | 37.826.000 | 6 | 23.286.000 | 100,00 | 61,56 | 11 | 114.486.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial terfasilitasi** | **Kasus** | **50,00** | **90.025.000,00** | **10,00** | **26.792.500,00** | **10** | **18.005.000** | **7** | **6.251.000** | **70,00** | **34,72** | **17** | **33.043.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dicegah | Perkara | 25,00 | 90.025.000,00 | 5,00 | 26.792.500,00 | 5 | 18.005.000 | 5 | 6.251.000 | 100,00 | 34,72 | 10 | 33.043.500 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Persentasekesesuiaian Kawasan Transmigrasi** | **Persen** | **100,00** | **29.600.000,00** | **-** | **-** | **100** | **5.920.000** | **100** | **5.120.000** | **100,00** | **86,49** | **100** | **5.120.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **Luas areal kawasan transmigrasi yang tersedia** | **Ha** | **220,00** | **29.600.000,00** | **-** | **-** | **220** | **5.920.000** | **220** | **5.120.000** | **100,00** | **86,49** | **220** | **5.120.000** | **0,00** | **0,00** | | **TALA - TALA** |
| | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain | Dokumen | 5,00 | 29.600.000,00 | - | - | 1 | 5.920.000 | 1 | 5.120.000 | 100,00 | 86,49 | 1 | 5.120.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100** | **25.554.972.785** | **100** | **15.332.983.671** | **100** | **5.110.994.557** | **100** | **4.612.977.398** | **100** | **90,26** | **200,00** | **19.945.961.069** | **200,00** | **78,05** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **#REF!** |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **25** | **49.570.000** | **15** | **29.742.000** | **19** | **9.914.000** | **19** | **8.376.000** | **100** | **84,49** | **34,00** | **38.118.000** | **136,00** | **76,90** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 11.720.000 | 3 | 7.032.000 | 2 | 2.344.000 | 2 | 1.981.000 | 100 | 84,51 | 5,00 | 9.013.000 | 100,00 | 76,90 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 11.780.000 | 3 | 7.068.000 | 1 | 2.356.000 | 1 | 2.355.000 | 100 | 99,96 | 4,00 | 9.423.000 | 80,00 | 79,99 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.240.000 | 3 | 7.944.000 | 1 | 2.648.000 | 1 | 1.850.000 | 100 | 69,86 | 4,00 | 9.794.000 | 80,00 | 73,97 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 12.830.000 | 3 | 7.698.000 | 1 | 2.566.000 | 1 | 2.190.000 | 100 | 85,35 | 4,00 | 9.888.000 | 80,00 | 77,07 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **230** | **18.546.689.260** | **138** | **11.128.013.556** | **46** | **3.709.337.852** | **46** | **3.387.300.942** | **100** | **91,32** | **184,00** | **14.515.314.498** | **80,00** | **78,26** | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dokumen | 210 | 17.910.539.260 | 126 | 10.746.323.556 | 14 | 3.582.107.852 | 14 | 3.263.234.992 | 100 | 91,10 | 140,00 | 14.009.558.548 | 66,67 | 78,22 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 583.000.000 | 36 | 349.800.000 | 12 | 116.600.000 | 12 | 113.875.450 | 100 | 97,66 | 48,00 | 463.675.450 | 80,00 | 79,53 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 5 | 25.000.000 | 3 | 15.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 4.760.500 | 100 | 95,21 | 4,00 | 19.760.500 | 80,00 | 79,04 | | |
| | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 5 | 8.150.000 | 3 | 4.890.000 | 1 | 1.630.000 | 1 | 1.430.000 | 100 | 87,73 | 4,00 | 6.320.000 | 80,00 | 77,55 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | Dokumen | 90 | 20.000.000 | 54 | 12.000.000 | 18 | 4.000.000 | 18 | 4.000.000 | 100 | 100,00 | 72,00 | 16.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **5** | **4.622.500** | **3** | **2.773.500** | **1** | **924.500** | **1** | **821.000** | **100** | **88,80** | **4,00** | **3.594.500** | **80,00** | **77,76** | | |
| | Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen | 5 | 4.622.500 | 3 | 2.773.500 | 1 | 924.500 | 1 | 821.000 | 100 | 88,80 | 4,00 | 3.594.500 | 80,00 | 77,76 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **200** | **50.000.000** | **120** | **30.000.000** | **43** | **10.000.000** | **43** | **10.000.000** | **100** | **100,00** | **163,00** | **40.000.000** | **81,50** | **80,00** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Steel | 200 | 50.000.000 | 120 | 30.000.000 | 43 | 10.000.000 | 43 | 10.000.000 | 100 | 100,00 | 163,00 | 40.000.000 | 81,50 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **8** | **2.311.765.000** | **8** | **1.387.059.000** | **8** | **490.353.000** | **8** | **380.812.456** | **100** | **77,66** | **16,00** | **1.767.871.456** | **200,00** | **76,47** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jenis | 40 | 67.077.500 | 24 | 40.246.500 | 5 | 13.415.500 | 5 | 8.067.750 | 100 | 60,14 | 29,00 | 48.314.250 | 72,50 | 72,03 | | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jenis | 15 | 300.000.000 | 9 | 180.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 57.100.000 | 100 | 95,17 | 14,00 | 237.100.000 | 93,33 | 79,03 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket peralatan rumah tangga | Jenis | 135 | 250.037.500 | 81 | 150.022.500 | 12 | 14.000.000 | 12 | 10.199.500 | 100 | 72,85 | 93,00 | 160.222.000 | 68,89 | 64,08 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jenis | 80 | 70.000.000 | 48 | 42.000.000 | 11 | 50.007.500 | 11 | 27.503.500 | 100 | 55,00 | 59,00 | 69.503.500 | 73,75 | 99,29 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jenis | 20 | 125.000.000 | 12 | 75.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 23.500.000 | 100 | 94,00 | 17,00 | 98.500.000 | 85,00 | 78,80 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 25 | 50.000.000 | 15 | 30.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 16.000.000 | 100 | 80,00 | 27,00 | 46.000.000 | 108,00 | 92,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 2500 | 100.000.000 | 1500 | 60.000.000 | 100 | 307.930.000 | 100 | 238.441.706 | 100 | 77,43 | ##### | 298.441.706 | 64,00 | 298,44 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **800** | **1.349.650.000** | **480** | **809.790.000** | **238** | **721.700.000** | **238** | **667.410.000** | **100** | **92,48** | **718,00** | **1.477.200.000** | **89,75** | **109,45** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat | 2 | 3.748.500.000 | 2 | 2.249.100.000 | 100 | 5.500.000 | 100 | 3.190.000 | 100 | 58,00 | 102,00 | 2.252.290.000 | 5100,00 | 60,09 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jenis | 2500 | 27.500.000 | 1500 | 16.500.000 | 6 | 716.200.000 | 6 | 664.220.000 | 100 | 92,74 | ##### | 680.720.000 | 60,24 | 2475,35 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **30** | **3.721.000.000** | **18** | **2.232.600.000** | **3** | **168.765.205** | **3** | **158.257.000** | **100** | **93,77** | **21,00** | **2.390.857.000** | **70,00** | **64,25** | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 4 | 843.826.025 | 4 | 506.295.615 | 11 | 8.765.205 | 11 | 0 | 100 | 0,00 | 15,00 | 506.295.615 | 375,00 | 60,00 | | |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 43.826.025 | 3 | 26.295.615 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 100 | 100,00 | 53,00 | 56.295.615 | 1060,00 | 128,45 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemeliharaan aset tetap lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 150.000.000 | 3 | 90.000.000 | 138 | 70.000.000 | 138 | 68.367.000 | 100 | 97,67 | 141,00 | 158.367.000 | 2820,00 | 105,58 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 15 | 350.000.000 | 9 | 210.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 59.890.000 | 100 | 99,82 | 11,00 | 269.890.000 | 73,33 | 77,11 | | |
| | **Penanggulangan bencana** | **Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Cakupan Layanan Kebencanaan Sesuai SPM Kebencanaan** | **Persen** | **100** | **2438371500** | **32** | **772463100** | **100** | **546.030.500** | **100** | **489.393.742** | **100** | **89,63** | **132,00** | **1.261.856.842** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota** | **Jumlah penduduk pada kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana** | **Orang** | **500000** | **773200000** | **200** | **128870000** | **4E+05** | **154.640.000** | **4E+05** | **139.401.492** | **100** | **90,15** | **####** | **268.271.492** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | 5 | 773200000 | 1 | 45770000 | 1 | 154.640.000 | 1 | 139.401.492 | 100 | 90,15 | 2,00 | 185.171.492 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadpa bencana** | **Jumlah masyarakat pada kawasan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana** | **Orang** | **500000** | **519400000** | **219924** | **133780000** | **4E+05** | **139.000.000** | **4E+05** | **138.840.250** | **100** | **99,89** | **####** | **272.620.250** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Penyediaan peralatan perlindunagnd an kesiapsiagan terhadap bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Unit | 5 | 263400000 | 0 | 0 | 1 | 87.800.000 | 1 | 87.640.250 | 100 | 99,82 | 1,00 | 87.640.250 | 0,00 | 0,00 | | SPM |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Orang | 500 | 256000000 | 300 | 133780000 | 100 | 51.200.000 | 100 | 51.200.000 | 100 | 100,00 | 400,00 | 184.980.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | **Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi** | **Orang** | **1000** | **971500000** | **468** | **509813100** | **200** | **194.300.000** | **200** | **184.842.500** | **100** | **95,13** | **668,00** | **694.655.600** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | 525 | 226250000 | 107 | 120243100 | 2 | 45.250.000 | 2 | 44.367.500 | 100 | 98,05 | 109,00 | 164.610.600 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 1000 | 745250000 | 602 | 389570000 | 200 | 149.050.000 | 200 | 140.475.000 | 100 | 94,25 | 802,00 | 530.045.000 | 0,00 | 0,00 | | SPM |
| | **Penataan sistem dasar penanggulangan bencana** | **Jumlah lembaga yang terlibat dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana** | **Lembaga** | **2** | **174271500** | **0** | **0** | **100** | **58.090.500** | **100** | **26.309.500** | **100** | **45,29** | **100,00** | **26.309.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | 2 | 174271500 | 0 | 0 | 1 | 58.090.500 | 1 | 26.309.500 | 100 | 45,29 | 1,00 | 26.309.500 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Persen** | **100,00** | **34.980.344.970,00** | **100,00** | **20.988.206.982,00** | **100** | **6.280.596.773** | **100** | **5.775.805.433** | **100** | **91,96** | **200** | **26.764.012.415** | **200,00** | **76,51** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **45,00** | **102.750.000,00** | **27,00** | **61.650.000,00** | **9** | **20.550.000** | **9** | **14.150.000** | **100** | **68,86** | **36** | **75.800.000** | **80,00** | **73,77** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 15,00 | 22.500.000,00 | 9,00 | 13.500.000,00 | 3 | 4.500.000 | 3 | 4.200.000 | 100 | 93,33 | 12 | 17.700.000 | 80,00 | 78,67 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.500.000,00 | 3,00 | 8.100.000,00 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100 | 100,00 | 4 | 10.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 16.000.000,00 | 3,00 | 9.600.000,00 | 1 | 3.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100 | 37,50 | 4 | 10.800.000 | 80,00 | 67,50 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD P | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 16.000.000,00 | 3,00 | 9.600.000,00 | 1 | 3.200.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | 4 | 9.600.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Dokumen | 5,00 | 10.500.000,00 | 3,00 | 6.300.000,00 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | 100 | 100,00 | 4 | 8.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 9.750.000,00 | 3,00 | 5.850.000,00 | 1 | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 | 100 | 100,00 | 4 | 7.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5,00 | 14.500.000,00 | 3,00 | 8.700.000,00 | 1 | 2.900.000 | 1 | 2.000.000 | 100 | 68,97 | 4 | 10.700.000 | 80,00 | 73,79 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **155,00** | **32.208.265.470,00** | **93,00** | **19.324.959.282,00** | **31** | **6.260.046.773** | **31** | **5.761.655.433** | **100** | **92,04** | **124** | **25.086.614.715** | **80,00** | **77,89** | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 31.399.333.970,00 | 2.772,00 | 18.839.600.382,00 | 924 | 6.080.300.473 | 924 | 5.581.909.133 | 100 | 91,80 | 3696 | 24.421.509.515 | 80,00 | 77,78 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 726.200.000,00 | 36,00 | 435.720.000,00 | 12 | 163.200.000 | 12 | 163.200.000 | 100 | 100,00 | 48 | 598.920.000 | 80,00 | 82,47 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 17.031.500,00 | 3,00 | 10.218.900,00 | 1 | 3.406.300 | 1 | 3.406.300 | 100 | 100,00 | 4 | 13.625.200 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 20,00 | 65.700.000,00 | 12,00 | 39.420.000,00 | 4 | 13.140.000 | 4 | 13.140.000 | 100 | 100,00 | 16 | 52.560.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **155,00** | **40.000.000,00** | **93,00** | **24.000.000,00** | **31** | **8.000.000** | **31** | **8.000.000** | **100** | **100,00** | **124** | **32.000.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 155,00 | 40.000.000,00 | 93,00 | 24.000.000,00 | 31 | 8.000.000 | 31 | 8.000.000 | 100 | 100,00 | 124 | 32.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **1.388.079.500,00** | **6,00** | **832.847.700,00** | **29** | **307.105.900** | **29** | **301.994.045** | **100** | **98,34** | **35** | **1.134.841.745** | **583,33** | **81,76** | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 32.262.000,00 | 3,00 | 19.357.200,00 | 1 | 6.452.400 | 1 | 5.270.000 | 100 | 81,68 | 4 | 24.627.200 | 80,00 | 76,34 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan kantor yang disediakan | Paket | 5,00 | 44.225.000,00 | 3,00 | 26.535.000,00 | 1 | 8.845.000 | 1 | 8.245.000 | 100 | 93,22 | 4 | 34.780.000 | 80,00 | 78,64 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 305.910.000,00 | 3,00 | 183.546.000,00 | 1 | 61.182.000 | 1 | 59.699.000 | 100 | 97,58 | 4 | 243.245.000 | 80,00 | 79,52 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10,00 | 82.707.500,00 | 6,00 | 49.624.500,00 | 2 | 16.541.500 | 2 | 16.541.500 | 100 | 100,00 | 8 | 66.166.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 160.000.000,00 | 36,00 | 96.000.000,00 | 12 | 32.000.000 | 12 | 32.000.000 | 100 | 100,00 | 48 | 128.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 762.975.000,00 | 36,00 | 457.785.000,00 | 12 | 182.085.000 | 12 | 180.238.545 | 100 | 98,99 | 48 | 638.023.545 | 80,00 | 83,62 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3,00** | **15.000.000,00** | **3,00** | **9.000.000,00** | **3** | **3.000.000** | **3** | **0** | **100** | **0,00** | **6** | **9.000.000** | **200,00** | **60,00** | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 15,00 | 15.000.000,00 | 9,00 | 9.000.000,00 | 3 | 3.000.000 | 3 | 0 | 100 | 0,00 | 12 | 9.000.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **1,00** | **978.500.000,00** | **1,00** | **587.100.000,00** | **1** | **202.550.000** | **1** | **202.050.000** | **100** | **99,75** | **2** | **789.150.000** | **200,00** | **80,65** | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 978.500.000,00 | 36,00 | 587.100.000,00 | 12 | 202.550.000 | 12 | 202.050.000 | 100 | 99,75 | 48 | 789.150.000 | 80,00 | 80,65 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **3,00** | **238.000.000,00** | **3,00** | **142.800.000,00** | **3** | **34.400.000** | **3** | **30.427.050** | **100** | **88,45** | **6** | **173.227.050** | **200,00** | **72,78** | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10,00 | 150.000.000,00 | 6,00 | 90.000.000,00 | 2 | 15.000.000 | 2 | 13.944.000 | 100 | 92,96 | 8 | 103.944.000 | 80,00 | 69,30 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15,00 | 38.000.000,00 | 9,00 | 22.800.000,00 | 3 | 9.400.000 | 3 | 6.500.000 | 100 | 69,15 | 12 | 29.300.000 | 80,00 | 77,11 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 10.000.000 | 1 | 9.983.050 | 100 | 99,83 | 4 | 39.983.050 | 80,00 | 79,97 | | |
| | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta** | **Persen** | **80,00** | **3.614.560.000,00** | **36,82** | **1.467.304.526,00** | **100** | **387.840.000** | **100** | **346.195.000** | **100** | **89,26** | **136,8** | **1.813.499.526** | **171,03** | **50,17** | | **#REF!** |
| | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG** | **Orang** | **500,00** | **141.060.000,00** | **243,00** | **58.771.526,00** | **100** | **36.690.000** | **100** | **21.195.000** | **100** | **57,77** | **343** | **79.966.526** | **68,60** | **56,69** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 3,00 | 63.585.000,00 | - | - | 1 | 21.195.000 | 1 | 21.195.000 | 100 | 100,00 | 1 | 21.195.000 | 33,33 | 33,33 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 77.475.000,00 | 3,00 | 58.771.526,00 | 1 | 15.495.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | 4 | 58.771.526 | 80,00 | 75,86 | | |
| | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumah perempuan anggota oragnisasi kemsyarakatan yang memiliki peningkatan kapasitas pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi** | **Orang** | **300,00** | **1.300.000.000,00** | **5,00** | **237.000.000,00** | **100** | **303.150.000** | **100** | **280.000.000** | **100** | **92,36** | **105** | **517.000.000** | **35,00** | **39,77** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Organisasi | 5,00 | 1.060.000.000,00 | 2,00 | 212.000.000,00 | 1 | 303.150.000 | 1 | 280.000.000 | 100 | 92,36 | 3 | 492.000.000 | 60,00 | 46,42 | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | Lembaga | 500,00 | 240.000.000,00 | 1,00 | 25.000.000,00 | 100 | 48.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 93,75 | 101 | 70.000.000 | 20,20 | 29,17 | | |
| | **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan** | **Lembaga** | **1,00** | **2.173.500.000,00** | **1,00** | **1.171.533.000,00** | **1** | **30.000.000** | **1** | **30.000.000** | **100** | **100,00** | **2** | **1.201.533.000** | **200,00** | **55,28** | | |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | 1,00 | 90.000.000,00 | - | - | 1 | 18.000.000 | 1 | 15.000.000 | 100 | 83,33 | 1 | 15.000.000 | 100,00 | 16,67 | | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan** | **Persen** | **100,00** | **2.083.500.000,00** | **50,00** | **1.171.533.000,00** | **100** | **416.700.000** | **100** | **382.259.500** | **100** | **91,73** | **150** | **1.553.792.500** | **150,00** | **74,58** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan** | **Kasus** | **30,00** | **522.250.000,00** | **24,00** | **278.900.000,00** | **30** | **104.450.000** | **30** | **99.050.000** | **100** | **94,83** | **54** | **377.950.000** | **180,00** | **72,37** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 468.750.000,00 | 3,00 | 265.900.000,00 | 1 | 93.750.000 | 1 | 93.750.000 | 100 | 100,00 | 4 | 359.650.000 | 80,00 | 76,73 | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 200,00 | 53.500.000,00 | 45,00 | 13.000.000,00 | 40 | 10.700.000 | 40 | 5.300.000 | 100 | 49,53 | 85 | 18.300.000 | 42,50 | 34,21 | | |
| | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia** | **Layanan** | **1,00** | **1.242.500.000,00** | **1,00** | **710.697.000,00** | **1** | **248.500.000** | **1** | **226.599.500** | **100** | **91,19** | **2** | **937.296.500** | **200,00** | **75,44** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Layanan | 5,00 | 1.242.500.000,00 | 3,00 | 710.697.000,00 | 1 | 248.500.000 | 1 | 226.599.500 | 100 | 91,19 | 4 | 937.296.500 | 80,00 | 75,44 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan** | **Lembaga** | **1,00** | **318.750.000,00** | **1,00** | **181.936.000,00** | **1** | **63.750.000** | **1** | **56.610.000** | **100** | **88,80** | **2** | **238.546.000** | **200,00** | **74,84** | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 500,00 | 318.750.000,00 | 300,00 | 181.936.000,00 | 100 | 63.750.000 | 100 | 56.610.000 | 100 | 88,80 | 400 | 238.546.000 | 80,00 | 74,84 | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** | **Rasio** | **0.02** | **676.300.000,00** | **-** | **253.420.000,00** | **0,02** | **135.260.000** | **0,02** | **93.010.000** | **100** | **68,76** | **0,02** | **346.430.000** | **0,00** | **51,22** | | |
| | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender** | **Jumlah keluarga yang memiiki pengetahuan terkait kesetaraan gedner dan hak anak** | **Keluarga** | **500,00** | **285.750.000,00** | **330,00** | **93.455.000,00** | **200** | **57.150.000** | **200** | **14.900.000** | **100** | **26,07** | **530** | **108.355.000** | **106,00** | **37,92** | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 200,00 | 74.750.000,00 | - | - | 40 | 14.950.000 | 40 | 14.900.000 | 100 | 99,67 | 40 | 14.900.000 | 20,00 | 19,93 | | |
| | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 211.000.000,00 | 3,00 | 93.455.000,00 | 1 | 42.200.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | 4 | 93.455.000 | 80,00 | 44,29 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kelluarga** | **Lembaga** | **1,00** | **69.750.000,00** | **1,00** | **16.555.000,00** | **1** | **13.950.000** | **1** | **13.950.000** | **100** | **100,00** | **2** | **30.505.000** | **200,00** | **43,73** | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | Lembaga | 5,00 | 69.750.000,00 | 3,00 | 16.555.000,00 | 1 | 13.950.000 | 1 | 13.950.000 | 100 | 100,00 | 4 | 30.505.000 | 80,00 | 43,73 | | |
| | **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis layanan bagi keluarga yang tersedia** | **Layanan** | **1,00** | **320.800.000,00** | **1,00** | **143.410.000,00** | **1** | **64.160.000** | **1** | **64.160.000** | **100** | **100,00** | **2** | **207.570.000** | **200,00** | **64,70** | | |
| | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Layanan | 5,00 | 320.800.000,00 | 3,00 | 143.410.000,00 | 1 | 64.160.000 | 1 | 64.160.000 | 100 | 100,00 | 4 | 207.570.000 | 80,00 | 64,70 | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **81.400.000,00** | **-** | **-** | **100** | **16.280.000** | **100** | **16.280.000** | **100** | **100,00** | **100** | **16.280.000** | **100,00** | **20,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis data gender dan anak yang tersedia dan dianalisis** | **Jenis** | **2,00** | **81.400.000,00** | **-** | **-** | **2** | **16.280.000** | **2** | **16.280.000** | **100** | **100,00** | **2** | **16.280.000** | **100,00** | **20,00** | | |
| | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 81.400.000,00 | - | - | 1 | 16.280.000 | 1 | 16.280.000 | 100 | 100,00 | 1 | 16.280.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK** | **Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak** | **Persen** | **100,00** | **3.350.400.000,00** | **92,50** | **247.665.920,00** | **100** | **670.080.000** | **100** | **669.517.038** | **100** | **99,92** | **192,5** | **917.182.958** | **192,50** | **27,38** | | |
| | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju satuan pendidikan ramah anak** | **Satuan Pendidikan** | **485,00** | **1.872.350.000,00** | **485,00** | **80.296.720,00** | **485** | **374.470.000** | **485** | **374.470.000** | **100** | **100,00** | **970** | **454.766.720** | **200,00** | **24,29** | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organisasi | 225,00 | 113.750.000,00 | 15,00 | - | 45 | 22.750.000 | 45 | 22.750.000 | 100 | 100,00 | 60 | 22.750.000 | 26,67 | 20,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 1.758.600.000,00 | 3,00 | 80.296.720,00 | 1 | 351.720.000 | 1 | 351.720.000 | 100 | 100,00 | 4 | 432.016.720 | 80,00 | 24,57 | | |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak** | **Lembaga** | **1,00** | **1.478.050.000,00** | **1,00** | **167.369.200,00** | **1** | **295.610.000** | **1** | **295.047.038** | **100** | **99,81** | **2** | **462.416.238** | **200,00** | **31,29** | | |
| | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5,00 | 166.050.000,00 | 3,00 | 69.845.000,00 | 1 | 33.210.000 | 1 | 33.210.000 | 100 | 100,00 | 4 | 103.055.000 | 80,00 | 62,06 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 464.000.000,00 | 3,00 | 67.132.200,00 | 1 | 92.800.000 | 1 | 92.487.038 | 100 | 99,66 | 4 | 159.619.238 | 80,00 | 34,40 | | |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 848.000.000,00 | 2,00 | 30.392.000,00 | 1 | 169.600.000 | 1 | 169.350.000 | 100 | 99,85 | 3 | 199.742.000 | 60,00 | 23,55 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan** | **Persen** | **100,00** | **1.075.600.000,00** | **50,00** | **312.090.000,00** | **100** | 75.910.000 | **100** | 75.735.000 | 100 | 99,77 | 150 | 387.825.000 | 150,00 | 36,06 | | |
| | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak** | **Kasus** | **490,00** | **379.550.000,00** | **325,00** | **-** | **55** | **22.150.000** | **55** | **22.050.000** | **100** | **99,55** | **380** | **22.050.000** | **77,55** | **5,81** | | |
| | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA | Orang | 225,00 | 110.750.000,00 | - | - | 45 | 22.150.000 | 45 | 22.050.000 | 100 | 99,55 | 45 | 22.050.000 | 20,00 | 19,91 | | |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang meemrlukan perlindungan khusus | Layanan | 5,00 | 268.800.000,00 | - | - | 1 | 53.760.000 | 1 | 53.685.000 | 100 | 99,86 | 1 | 53.685.000 | 20,00 | 19,97 | | |
| | **Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan** | **Orang** | **1,00** | **696.050.000,00** | **1,00** | **312.090.000,00** | **1** | **25.000.000** | **1** | **24.925.000** | **100** | **99,70** | **2** | **337.015.000** | **200,00** | **48,42** | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | Orang | 5,00 | 143.800.000,00 | 32,00 | 36.690.000,00 | 1 | 28.760.000 | 1 | 28.760.000 | 100 | 100,00 | 33 | 65.450.000 | 660,00 | 45,51 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk** | **Persen** | **1,00** | **552.250.000,00** | **0,93** | **275.400.000,00** | **2** | **110.450.000** | **2** | **110.350.000** | **100** | **99,91** | **2,93** | **385.750.000** | **293,00** | **69,85** | | **#REF!** |
| | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk** | **Kebijakan** | **1,00** | **127.250.000,00** | - | - | **1** | **25.450.000** | **1** | **25.350.000** | **100** | **99,61** | **1** | **25.350.000** | **100,00** | **19,92** | | |
| | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 5,00 | 127.250.000,00 | - | - | 1 | 25.450.000 | 1 | 25.350.000 | 100 | 99,61 | 1 | 25.350.000 | 20,00 | 19,92 | | |
| | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis data kependudukan dan pengendalian penduduk yang tersedia** | **Jenis** | **2,00** | **425.000.000,00** | **2,00** | **275.400.000,00** | **2** | **85.000.000** | **2** | **85.000.000** | **100** | **100,00** | **4** | **360.400.000** | **200,00** | **84,80** | | |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Dokumen | 65,00 | 300.000.000,00 | 11,00 | 275.400.000,00 | 13 | 60.000.000 | 13 | 60.000.000 | 100 | 100,00 | 24 | 335.400.000 | 36,92 | 111,80 | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana | Laporan | 60,00 | 125.000.000,00 | - | - | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 100 | 100,00 | 12 | 25.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA** | **Persentase Akseptor KB** | **Persen** | **100,00** | **32.295.686.000,00** | **88,67** | **5.351.740.300,00** | **100** | **4.908.637.200** | **100** | **3.106.948.622** | **100** | **63,30** | **188,7** | **8.458.688.922** | **188,67** | **26,19** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi** | **Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang mendapatkan advokasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB** | **PUS** | **########** | **10.600.000.000,00** | **37,52** | **821.040.000,00** | **63380** | **2.120.000.000** | **63380** | **646.250.000** | **100** | **30,48** | **63418** | **1.467.290.000** | **99,87** | **13,84** | | |
| | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Laporan | 10,00 | 8.750.000.000,00 | 10,00 | 200.000.000,00 | 2 | 1.750.000.000 | 3 | 276.400.000 | 150 | 15,79 | 13 | 476.400.000 | 130,00 | 5,44 | | |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Laporan | 70,00 | 1.050.000.000,00 | 10,00 | 400.400.000,00 | 14 | 210.000.000 | 14 | 210.000.000 | 100 | 100,00 | 24 | 610.400.000 | 34,29 | 58,13 | | |
| | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dokumen | 5,00 | 800.000.000,00 | 3,00 | 220.640.000,00 | 1 | 160.000.000 | 1 | 159.850.000 | 100 | 99,91 | 4 | 380.490.000 | 80,00 | 47,56 | | |
| | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB** | **Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan dalam rangka perencanaan dan pembanguna daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana** | **Orang** | **605,00** | **6.166.000.000,00** | **132,00** | **1.256.600.000,00** | **121** | **1.233.200.000** | **121** | **1.230.479.300** | **100** | **99,78** | **253** | **2.487.079.300** | **41,82** | **40,34** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Orang | ######## | 1.854.000.000,00 | 412,00 | 1.256.600.000,00 | 206 | 370.800.000 | 206 | 370.800.000 | 100 | 100,00 | 618 | 1.627.400.000 | 60,00 | 87,78 | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Laporan | 60,00 | 4.312.000.000,00 | - | - | 12 | 862.400.000 | 12 | 859.679.300 | 100 | 99,68 | 12 | 859.679.300 | 20,00 | 19,94 | | |
| | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan penunjang KB berupa alat dan obat kontrasepsi** | **PUS** | ######## | **15.529.686.000,00** | **5.823,00** | **3.274.100.300,00** | **1941** | **1.555.437.200** | **1941** | **1.230.219.322** | **100** | **79,09** | **7.764** | **4.504.319.622** | **80,00** | **29,00** | | |
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 60,00 | 152.500.000,00 | 16,00 | 98.425.000,00 | 12 | 30.500.000 | 12 | 28.800.000 | 100 | 94,43 | 28 | 127.225.000 | 46,67 | 83,43 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Orang | ######## | 3.457.036.000,00 | 490,00 | 2.067.393.300,00 | 1941 | 691.407.200 | 1941 | 539.079.322 | 100 | 77,97 | 2431 | 2.606.472.622 | 25,05 | 75,40 | | |
| | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Laporan | 10,00 | 4.049.900.000,00 | 6,00 | 1.108.282.000,00 | 2 | 809.980.000 | 2 | 638.940.000 | 100 | 78,88 | 8 | 1.747.222.000 | 80,00 | 43,14 | | |
| | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 60,00 | 117.750.000,00 | - | - | 12 | 23.550.000 | 12 | 23.400.000 | 100 | 99,36 | 12 | 23.400.000 | 20,00 | 19,87 | | |
| | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **Jumlah Organisasi Kemasyarakat yang berperan akif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **Ormas** | **5,00** | **3.876.250.000,00** | - | - | **1** | **775.250.000** | **1** | **775.250.000** | **100** | **100,00** | **1** | **775.250.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Laporan | 60,00 | 3.876.250.000,00 | - | - | 12 | 775.250.000 | 12 | 775.250.000 | 100 | 100,00 | 12 | 775.250.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA** | **Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga** | **Persen** | **100,00** | **11.749.800.000,00** | **50,00** | - | **100** | **2.292.940.000** | **100** | **2.225.690.000** | **100** | **97,07** | **150** | **2.225.690.000** | **150,00** | **18,94** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga** | **kelompok** | **6,00** | **11.749.800.000,00** | - | - | **2** | **2.235.920.000** | **2** | **2.168.670.000** | **100** | **96,99** | **2** | **2.168.670.000** | **33,33** | **18,46** | | |
| | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | Unit | 70,00 | 1.559.500.000,00 | - | - | 14 | 311.900.000 | 14 | 244.650.000 | 100 | 78,44 | 14 | 244.650.000 | 20,00 | 15,69 | | |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Orang | ###### | 9.620.100.000,00 | - | - | 9060 | 1.924.020.000 | 9060 | 1.924.020.000 | 100 | 100,00 | 9060 | 1.924.020.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga** | **Ormas** | **520,00** | **285.100.000,00** | - | - | **104** | **57.020.000** | **104** | **57.020.000** | **100** | **100,00** | **104** | **57.020.000** | **20,00** | **20,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Organisasi | 520,00 | 285.100.000,00 | - | - | 104 | 57.020.000 | 104 | 57.020.000 | 100 | 100,00 | 104 | 57.020.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **29.585.348.440,00** | **100,00** | **17.751.209.064,00** | **100** | **6.119.230.870** | **100** | **5.718.410.175** | **100,00** | **93,45** | **200** | **23.469.619.239** | **200,00** | **79,33** | **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **85,00** | **86.250.000,00** | **51,00** | **51.750.000,00** | **17** | **17.250.000** | **17** | **16.860.000** | **100,00** | **97,74** | **68** | **68.610.000** | **80,00** | **79,55** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 25,00 | 12.000.000,00 | 15,00 | 7.200.000,00 | 5 | 2.400.000 | 5 | 2.340.000 | 100,00 | 97,50 | 20 | 9.540.000 | 80,00 | 79,50 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.250.000,00 | 3,00 | 3.150.000,00 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.020.000 | 100,00 | 97,14 | 4 | 4.170.000 | 80,00 | 79,43 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.000.000,00 | 3,00 | 7.200.000,00 | 1 | 2.400.000 | 1 | 2.340.000 | 100,00 | 97,50 | 4 | 9.540.000 | 80,00 | 79,50 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.250.000,00 | 3,00 | 3.150.000,00 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.020.000 | 100,00 | 97,14 | 4 | 4.170.000 | 80,00 | 79,43 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 8.250.000,00 | 3,00 | 4.950.000,00 | 1 | 1.650.000 | 1 | 1.620.000 | 100,00 | 98,18 | 4 | 6.570.000 | 80,00 | 79,64 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20,00 | 15.000.000,00 | 12,00 | 9.000.000,00 | 4 | 3.000.000 | 4 | 2.940.000 | 100,00 | 98,00 | 16 | 11.940.000 | 80,00 | 79,60 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 28.500.000,00 | 12,00 | 17.100.000,00 | 4 | 5.700.000 | 4 | 5.580.000 | 100,00 | 97,89 | 16 | 22.680.000 | 80,00 | 79,58 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **180,00** | **26.547.345.160,00** | **108,00** | **15.928.407.096,00** | **36** | **5.511.630.214** | **36** | **5.193.830.136** | **100,00** | **94,23** | **144** | **21.122.237.232** | **80,00** | **79,56** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 25.787.820.160,00 | 2.562,00 | 15.472.692.096,00 | 854 | 5.359.725.214 | 865 | 5.050.725.136 | 101,29 | 94,23 | 3427 | 20.523.417.232 | 80,26 | 79,59 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 693.000.000,00 | 36,00 | 415.800.000,00 | 12 | 138.600.000 | 12 | 129.800.000 | 100,00 | 93,65 | 48 | 545.600.000 | 80,00 | 78,73 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 60,00 | 19.500.000,00 | 36,00 | 11.700.000,00 | 12 | 3.900.000 | 12 | 3.900.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 15.600.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 60,00 | 47.025.000,00 | 36,00 | 28.215.000,00 | 12 | 9.405.000 | 12 | 9.405.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 37.620.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah** | **Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **10,00** | **1.500.000,00** | **6,00** | **900.000,00** | **2** | **300.000** | **2** | **270.000** | **100,00** | **90,00** | **8** | **1.170.000** | **80,00** | **78,00** | | |
| | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 10,00 | 1.500.000,00 | 6,00 | 900.000,00 | 2 | 300.000 | 2 | 270.000 | 100,00 | 90,00 | 8 | 1.170.000 | 80,00 | 78,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **305,00** | **362.575.000,00** | **183,00** | **217.545.000,00** | **61** | **72.515.000** | **62** | **72.515.000** | **101,64** | **100,00** | **245** | **290.060.000** | **80,33** | **80,00** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 305,00 | 105.000.000,00 | 183,00 | 63.000.000,00 | 61 | 21.000.000 | 62 | 21.000.000 | 101,64 | 100,00 | 245 | 84.000.000 | 80,33 | 80,00 | | |
| | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegwaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 305,00 | 11.825.000,00 | 183,00 | 7.095.000,00 | 61 | 2.365.000 | 62 | 2.365.000 | 101,64 | 100,00 | 245 | 9.460.000 | 80,33 | 80,00 | | |
| | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 305,00 | 245.750.000,00 | 183,00 | 147.450.000,00 | 61 | 49.150.000 | 62 | 49.150.000 | 101,64 | 100,00 | 245 | 196.600.000 | 80,33 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | 7,00 | 809.553.280,00 | 7,00 | 485.731.968,00 | **7** | 161.910.656 | **7** | 145.201.039 | 100,00 | 89,68 | 14 | 630.933.007 | 200,00 | 77,94 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 15,00 | 28.264.500,00 | 9,00 | 16.958.700,00 | 3 | 5.652.900 | 3 | 5.548.000 | 100,00 | 98,14 | 12 | 22.506.700 | 80,00 | 79,63 | | |
| | Penyediaan pelatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 20,00 | 153.500.000,00 | 12,00 | 92.100.000,00 | 4 | 30.700.000 | 4 | 24.600.000 | 100,00 | 80,13 | 16 | 116.700.000 | 80,00 | 76,03 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 20,00 | 40.905.000,00 | 12,00 | 24.543.000,00 | 4 | 8.181.000 | 4 | 7.330.000 | 100,00 | 89,60 | 16 | 31.873.000 | 80,00 | 77,92 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 162.733.780,00 | 3,00 | 97.640.268,00 | 1 | 32.546.756 | 1 | 29.713.756 | 100,00 | 91,30 | 4 | 127.354.024 | 80,00 | 78,26 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10,00 | 30.000.000,00 | 6,00 | 18.000.000,00 | 2 | 6.000.000 | 2 | 5.699.000 | 100,00 | 94,98 | 8 | 23.699.000 | 80,00 | 79,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 85.500.000,00 | 36,00 | 51.300.000,00 | 12 | 17.100.000 | 12 | 17.100.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 68.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 290.650.000,00 | 36,00 | 174.390.000,00 | 12 | 58.130.000 | 12 | 55.210.283 | 100,00 | 94,98 | 48 | 229.600.283 | 80,00 | 79,00 | | |
| | Dukungan pelaksanaan sistem peemrintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 60,00 | 18.000.000,00 | 36,00 | 10.800.000,00 | 12 | 3.600.000 | 12 | 0 | 100,00 | 0,00 | 48 | 10.800.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | 1,00 | 395.000.000,00 | 1,00 | 237.000.000,00 | **1** | 79.000.000 | **1** | 76.870.000 | 100,00 | 97,30 | 2 | 313.870.000 | 200,00 | 79,46 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penagadaan perlatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 25,00 | 395.000.000,00 | 15,00 | 237.000.000,00 | 5 | 79.000.000 | 5 | 76.870.000 | 100,00 | 97,30 | 20 | 313.870.000 | 80,00 | 79,46 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3,00** | **1.073.250.000,00** | **3,00** | **643.950.000,00** | **3** | **214.650.000** | **3** | **175.490.000** | **100,00** | **81,76** | **6** | **819.440.000** | **200,00** | **76,35** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 45.000.000,00 | 36,00 | 27.000.000,00 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 36.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 20.000.000,00 | 36,00 | 12.000.000,00 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 16.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 120,00 | 1.008.250.000,00 | 72,00 | 604.950.000,00 | 24 | 201.650.000 | 24 | 162.490.000 | 100,00 | 80,58 | 96 | 767.440.000 | 80,00 | 76,12 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **7,00** | **309.875.000,00** | **7,00** | **185.925.000,00** | **7** | **61.975.000** | **7** | **37.374.000** | **100,00** | **60,30** | **14** | **223.299.000** | **200,00** | **72,06** | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10,00 | 135.000.000,00 | 6,00 | 81.000.000,00 | 2 | 27.000.000 | 2 | 26.824.000 | 100,00 | 99,35 | 8 | 107.824.000 | 80,00 | 79,87 | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20,00 | 74.875.000,00 | 12,00 | 44.925.000,00 | 4 | 14.975.000 | 4 | 10.550.000 | 100,00 | 70,45 | 16 | 55.475.000 | 80,00 | 74,09 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 100.000.000,00 | 3,00 | 60.000.000,00 | 1 | 20.000.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4 | 60.000.000 | 80,00 | 60,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase Kepemilikan Dokumen pendafataran Penduduk** | **Persen** | **100,00** | **3.743.552.300,00** | **45,75** | **491.000.555,00** | **100** | **450.152.100** | **100** | **421.835.593** | **100,00** | **93,71** | **145,8** | **912.836.148** | **145,75** | **24,38** | | |
| | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **jumlah penduduk yang terlayani pendaftaran penduduk** | **Orang** | **########** | **1.969.217.000,00** | **########** | **393.843.400,00** | **95140** | **39.002.500** | **93180** | **30.418.500** | **97,94** | **77,99** | **#####** | **424.261.900** | **85,81** | **21,54** | | |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 500,00 | 80.639.500,00 | 48,00 | 16.127.900,00 | 100 | 5.539.000 | 45 | 4.808.000 | 45,00 | 86,80 | 93 | 20.935.900 | 18,60 | 25,96 | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dokumen | ########## | 1.888.577.500,00 | ########## | 377.715.500,00 | 95040 | 33.463.500 | 93135 | 25.610.500 | 98,00 | 76,53 | ##### | 403.326.000 | 43,66 | 21,36 | | |
| | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan** | **Orang** | **########** | **1.774.335.300,00** | **4.215,00** | **97.157.155,00** | **1405** | **411.149.600** | **1593** | **391.417.093** | **113,38** | **95,20** | **5.808** | **488.574.248** | **82,68** | **27,54** | | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | ########## | 158.298.000,00 | 4.200,00 | 74.509.855,00 | 1400 | 31.659.600 | 1588 | 31.320.000 | 113,43 | 98,93 | ##### | 105.829.855 | 82,69 | 66,85 | | |
| | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | Laporan | 15,00 | 1.534.800.000,00 | - | - | 3 | 359.960.000 | 3 | 349.179.440 | 100,00 | 97,01 | 3 | 349.179.440 | 20,00 | 22,75 | | |
| | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | Laporan | 10,00 | 81.237.300,00 | 6,00 | 22.647.300,00 | 2 | 19.530.000 | 2 | 10.917.653 | 100,00 | 55,90 | 8 | 33.564.953 | 80,00 | 41,32 | | |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil** | **Persen** | **100,00** | **442.774.200,00** | **41,50** | **252.113.500,00** | **100** | **76.449.500** | **100** | **64.137.300** | **100,00** | **83,89** | **141,5** | **316.250.800** | **141,50** | **71,42** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **jumlah penduduk yang terlayani pencacatan sipil** | **orang** | **######** | **195.497.500,00** | **######** | **161.416.800,00** | **22680** | **39.099.500** | **15117** | **29.867.500** | **66,65** | **76,39** | **####** | **191.284.300** | **29,11** | **97,84** | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dokumen | ###### | 152.997.500,00 | ###### | 106.416.800,00 | 22680 | 30.599.500 | 15117 | 29.867.500 | 66,65 | 97,61 | #### | 136.284.300 | 45,22 | 89,08 | | |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Layanan | 570,00 | 42.500.000,00 | - | - | 114 | 8.500.000 | 20 | 0 | 17,54 | 0,00 | 20 | 0 | 3,51 | 0,00 | | |
| | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Jumlah penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil** | **Dokumen** | **######** | **247.276.700,00** | **4.206,00** | **90.696.700,00** | **1402** | **37.350.000** | **1354** | **34.269.800** | **96,58** | **91,75** | **####** | **124.966.500** | **79,32** | **50,54** | | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | ###### | 142.126.700,00 | 1.570,00 | 93.166.700,00 | 1400 | 16.320.000 | 1352 | 16.320.000 | 96,57 | 100,00 | #### | 109.486.700 | 41,74 | 77,03 | | |
| | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | Laporan | 10,00 | 105.150.000,00 | 6,00 | 30.970.000,00 | 2 | 21.030.000 | 2 | 17.949.800 | 100,00 | 85,35 | 8 | 48.919.800 | 80,00 | 46,52 | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persen** | **100,00** | **1.836.162.500,00** | **61,25** | **870.663.000,00** | **100** | **233.773.000** | **100** | **213.948.300** | **100,00** | **91,52** | **161,3** | **1.084.611.300** | **161,25** | **59,07** | | |
| | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Jumlah jenis data kependudukan yang termanffatkan** | **Jenis** | **12,00** | **226.422.500,00** | **10,00** | **45.284.500,00** | **12** | **7.877.000** | **12** | **7.811.000** | **100,00** | **99,16** | **22** | **53.095.500** | **183,33** | **23,45** | | |
| | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Dokumen | 60,00 | 226.422.500,00 | 32,00 | 45.284.500,00 | 12 | 7.877.000 | 12 | 7.811.000 | 100,00 | 99,16 | 44 | 53.095.500 | 73,33 | 23,45 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Jumlah jenis data indformasi kependudukan yang tersedia** | **Jenis** | **31,00** | **1.567.240.000,00** | **10,00** | **825.378.500,00** | **31** | **217.396.000** | **31** | **197.977.300** | **100,00** | **91,07** | **41** | **1.023.355.800** | **132,26** | **65,30** | | |
| | "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan" | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 25,00 | 87.300.000,00 | - | - | 5 | 17.460.000 | 4 | 14.069.300 | 80,00 | 80,58 | 4 | 14.069.300 | 16,00 | 16,12 | | |
| | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 5,00 | 1.262.610.000,00 | 3,00 | 793.200.000,00 | 1 | 156.470.000 | 1 | 145.205.000 | 100,00 | 92,80 | 4 | 938.405.000 | 80,00 | 74,32 | | |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 25,00 | 109.600.000,00 | 15,00 | 9.910.500,00 | 5 | 21.920.000 | 2 | 21.162.000 | 40,00 | 96,54 | 17 | 31.072.500 | 68,00 | 28,35 | | |
| | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Dokumen | 100,00 | 107.730.000,00 | 60,00 | 22.268.000,00 | 20 | 21.546.000 | 19 | 17.541.000 | 95,00 | 81,41 | 79 | 39.809.000 | 79,00 | 36,95 | | |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Jumlah izin penggunaan data informasi kependudukan yang dikeluarkan** | **Dokumen** | **36,00** | **42.500.000,00** | - | - | **12** | **8.500.000** | **12** | **8.160.000** | **100,00** | **96,00** | **12** | **8.160.000** | **33,33** | **19,20** | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 36,00 | 42.500.000,00 | - | - | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.160.000 | 100,00 | 96,00 | 12 | 8.160.000 | 33,33 | 19,20 | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan** | **Persen** | **100,00** | **15.670.000,00** | **100,00** | - | **100** | **3.134.000** | **100** | **3.087.500** | **100,00** | **98,52** | **200** | **3.087.500** | **200,00** | **19,70** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Jumlah jenis data dan informasi kependudukan yang diamnfaatkan** | **Jenis** | **2,00** | **15.670.000,00** | **-** | **-** | **2** | **3.134.000** | **2** | **3.087.500** | **100,00** | **98,52** | **2** | **3.087.500** | **100,00** | **19,70** | | |
| | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Dokumen | 6,00 | 15.670.000,00 | - | - | 2 | 3.134.000 | 2 | 3.087.500 | 100,00 | 98,52 | 2 | 3.087.500 | 33,33 | 19,70 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **50.801.557.050,00** | **100,00** | **30.480.934.230,00** | **100** | **5.343.962.705** | **85,00** | **4.794.313.069** | **85,00** | **89,71** | **185,00** | **35.275.247.299** | **185,00** | **69,44** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **110,00** | **124.800.000,00** | **22,00** | **74.880.000,00** | **24** | **10.680.000** | **24** | **10.680.000** | **100,00** | **100,00** | **46** | **85.560.000** | **41,82** | **68,56** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 83.400.000,00 | 2,00 | 50.040.000,00 | 2 | 1.800.000 | 2 | 1.800.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 51.840.000 | 40,00 | 62,16 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 9.000.000,00 | 1,00 | 5.400.000,00 | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 6.800.000 | 40,00 | 75,56 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 7.000.000,00 | 1,00 | 4.200.000,00 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 5.400.000 | 40,00 | 77,14 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 3.600.000,00 | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 5.000.000 | 40,00 | 83,33 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 7.000.000,00 | 1,00 | 4.200.000,00 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 5.400.000 | 40,00 | 77,14 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60,00 | 6.000.000,00 | 12,00 | 3.600.000,00 | 2 | 1.280.000 | 2 | 1.280.000 | 100,00 | 100,00 | 14 | 4.880.000 | 23,33 | 81,33 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 6.400.000,00 | 4,00 | 3.840.000,00 | 16 | 2.400.000 | 16 | 2.400.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | 6.240.000 | 100,00 | 97,50 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **305,00** | **46.822.304.600,00** | **183,00** | **28.093.382.760,00** | **61** | **4.682.730.460** | **25** | **4.281.966.505** | **40,98** | **91,44** | **208** | **32.375.349.265** | **68,20** | **69,15** | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 23.413.652.300,00 | 2.142,00 | 14.048.191.380,00 | 714 | 4.581.670.460 | 714 | 4.180.906.505 | 100,00 | 91,25 | 2856 | 18.229.097.885 | 80,00 | 77,86 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 22.908.352.300,00 | 33,00 | 13.745.011.380,00 | 11 | 95.260.000 | 11 | 95.260.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 13.840.271.380 | 80,00 | 60,42 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 476.300.000,00 | 3,00 | 285.780.000,00 | 1 | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 287.380.000 | 80,00 | 60,34 | | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 25,00 | 8.000.000,00 | 15,00 | 4.800.000,00 | 5 | 1.200.000 | 5 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | 6.000.000 | 80,00 | 75,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 6.000.000,00 | 54,00 | 3.600.000,00 | 18 | 2.000.000 | 18 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 72 | 5.600.000 | 80,00 | 93,33 | | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 60,00 | 10.000.000,00 | 36,00 | 6.000.000,00 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 7.000.000 | 80,00 | 70,00 | | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **20,00** | **20.350.000,00** | **12,00** | **12.210.000,00** | **4** | **2.470.000** | **1** | **1.600.000** | **25,00** | **64,78** | **13** | **13.810.000** | **65,00** | **67,86** | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.350.000,00 | 3,00 | 7.410.000,00 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 8.210.000 | 80,00 | 66,48 | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 10,00 | 4.000.000,00 | 6,00 | 2.400.000,00 | 2 | 800.000 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 8 | 2.400.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 20,00 | 4.000.000,00 | 12,00 | 2.400.000,00 | 4 | 870.000 | 4 | 800.000 | 100,00 | 91,95 | 16 | 3.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **125,00** | **87.500.000,00** | **75,00** | **52.500.000,00** | **25** | **17.500.000** | **25** | **16.903.000** | **100,00** | **96,59** | **100** | **69.403.000** | **80,00** | **79,32** | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 125,00 | 87.500.000,00 | 75,00 | 52.500.000,00 | 25 | 17.500.000 | 25 | 16.903.000 | 100,00 | 96,59 | 100 | 69.403.000 | 80,00 | 79,32 | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7,00** | **1.931.202.450,00** | **7,00** | **1.158.721.470,00** | **7** | **282.942.245** | **4** | **178.948.564** | **57,14** | **63,25** | **11** | **1.337.670.034** | **157,14** | **69,27** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 60,00 | 1.330.336.225,00 | 36,00 | 798.201.735,00 | 12 | 8.963.000 | 12 | 3.232.000 | 100,00 | 36,06 | 48 | 801.433.735 | 80,00 | 60,24 | | |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 60,00 | 44.815.000,00 | 36,00 | 26.889.000,00 | 12 | 13.500.845 | 12 | 9.269.500 | 100,00 | 68,66 | 48 | 36.158.500 | 80,00 | 80,68 | | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 60,00 | 67.504.225,00 | 36,00 | 40.502.535,00 | 12 | 28.526.000 | 12 | 22.555.200 | 100,00 | 79,07 | 48 | 63.057.735 | 80,00 | 93,41 | | |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60,00 | 142.630.000,00 | 36,00 | 85.578.000,00 | 12 | 25.256.400 | 12 | 9.612.000 | 100,00 | 38,06 | 48 | 95.190.000 | 80,00 | 66,74 | | |
| 5 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 15,00 | 125.917.000,00 | 9,00 | 75.550.200,00 | 3 | 28.000.000 | 2 | 11.101.000 | 66,67 | 39,65 | 11 | 86.651.200 | 73,33 | 68,82 | | |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 155.000.000,00 | 36,00 | 93.000.000,00 | 12 | 10.500.000 | 5 | 8.895.000 | 41,67 | 84,71 | 41 | 101.895.000 | 68,33 | 65,74 | | |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 120,00 | 65.000.000,00 | 72,00 | 39.000.000,00 | 24 | 168.196.000 | 20 | 114.283.864 | 83,33 | 67,95 | 92 | 153.283.864 | 76,67 | 235,82 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **582.500.000,00** | **2,00** | **349.500.000,00** | **2** | **165.500.000** | **2** | **155.040.000** | **100,00** | **93,68** | **4** | **504.540.000** | **200,00** | **86,62** | | |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 30,00 | 447.500.000,00 | 18,00 | 268.500.000,00 | 6 | 39.000.000 | 6 | 35.700.000 | 100,00 | 91,54 | 24 | 304.200.000 | 80,00 | 67,98 | | |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 40,00 | 135.000.000,00 | 24,00 | 81.000.000,00 | 8 | 126.500.000 | 8 | 119.340.000 | 100,00 | 94,34 | 32 | 200.340.000 | 80,00 | 148,40 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **907.900.000,00** | **2,00** | **544.740.000,00** | **2** | **137.140.000** | **2** | **131.260.000** | **100,00** | **95,71** | **4** | **676.000.000** | **200,00** | **74,46** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 898.550.000,00 | 36,00 | 539.130.000,00 | 12 | 1.870.000 | 12 | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 541.000.000 | 80,00 | 60,21 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 9.350.000,00 | 36,00 | 5.610.000,00 | 12 | 135.270.000 | 12 | 129.390.000 | 100,00 | 95,65 | 48 | 135.000.000 | 80,00 | 1443,85 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **325.000.000,00** | **2,00** | **195.000.000,00** | **2** | **45.000.000** | **2** | **17.915.000** | **100,00** | **39,81** | **4** | **212.915.000** | **200,00** | **65,51** | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 175,00 | 225.000.000,00 | 105,00 | 135.000.000,00 | 35 | 20.000.000 | 35 | 9.060.000 | 100,00 | 45,30 | 140 | 144.060.000 | 80,00 | 64,03 | | |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 10,00 | 100.000.000,00 | 6,00 | 60.000.000,00 | 2 | 25.000.000 | 2 | 8.855.000 | 100,00 | 35,42 | 8 | 68.855.000 | 80,00 | 68,86 | | |
| | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa** | **Persen** | **100,00** | **492.800.000,00** | **18,74** | **52.373.000,00** | **70** | **57.780.000** | **100** | **20.100.000** | **142,86** | **34,79** | **118,7** | **72.473.000** | **118,74** | **14,71** | | |
| | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa** | **Desa** | **80,00** | **492.800.000,00** | **32,00** | **56.373.000,00** | **56** | **57.780.000** | **80** | **20.100.000** | **142,86** | **34,79** | **112** | **76.473.000** | **140,00** | **15,52** | | |
| 1 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | Desa | 280,00 | 288.900.000,00 | - | - | 56 | 15.950.000 | 56 | 15.000.000 | 100,00 | 94,04 | 56 | 15.000.000 | 20,00 | 5,19 | | |
| 2 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Desa | 400,00 | 79.750.000,00 | 1,00 | 15.250.000,00 | 80 | 19.730.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.250.000 | 0,25 | 19,12 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 400,00 | 98.650.000,00 | - | - | 80 | 5.100.000 | 80 | 5.100.000 | 100,00 | 100,00 | 80 | 5.100.000 | 20,00 | 5,17 | | |
| 4 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | Unit | 5,00 | 25.500.000,00 | - | - | 1 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | **Persen** | **100,00** | **2.910.129.000,00** | **89,19** | **1.033.469.000,00** | **100** | **52.896.000** | **13,75** | **52.560.000** | **13,75** | **99,36** | **102,9** | **1.086.029.000** | **102,94** | **37,32** | | |
| | **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** | **Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka kerjasama pembangunan Desa** | **Desa** | **80,00** | **2.910.129.000,00** | **80,00** | **2.547.107.000,00** | **100 %** | **52.896.000** | **100 %** | **52.560.000** | **100,00** | **99,36** | **8100 %** | **2.599.667.000** | **101,25** | **89,33** | | |
| 1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Dokumen | 10,00 | 298.460.000,00 | 2,00 | 13.638.000,00 | 2 | 31.000.000 | 2 | 31.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 44.638.000 | 40,00 | 14,96 | | |
| 2 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Dokumen | 15,00 | 2.611.669.000,00 | 3,00 | 2.518.669.000,00 | 1 | 21.896.000 | 1 | 21.560.000 | 100,00 | 98,47 | 4 | 2.540.229.000 | 26,67 | 97,26 | | |
| | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku** | **Persen** | **100,00** | **6.293.060.000,00** | **73,34** | **1.039.914.400,00** | **40** | **629.397.000** | **37,5** | **443.816.856** | **93,75** | **70,51** | **110,8** | **1.483.731.256** | **110,84** | **23,58** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku** | **Desa** | **80,00** | **6.293.060.000,00** | **53,00** | **1.050.724.400,00** | **32** | **629.397.000** | **30** | **443.816.856** | **93,75** | **70,51** | **83** | **1.494.541.256** | **103,75** | **23,75** | | |
| 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Dokumen | 25,00 | 3.314.530.000,00 | - | - | 5 | 43.700.000 | 4 | 25.800.000 | 80,00 | 59,04 | 4 | 25.800.000 | 16,00 | 0,78 | | |
| 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Dokumen | 5,00 | 272.500.000,00 | - | - | 1 | 9.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Dokumen | 25,00 | 48.500.000,00 | - | - | 5 | 11.950.000,0 | 3 | 0 | 60,00 | 0,00 | 3 | 0 | 12,00 | 0,00 | | |
| 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 10,00 | 59.750.000,00 | - | - | 2 | 8.400.000 | 1 | 3.400.000 | 50,00 | 40,48 | 1 | 3.400.000 | 10,00 | 5,69 | | |
| 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Orang | 45,00 | 47.600.000,00 | 9,00 | 256.482.000,00 | 80 | 197.850.000 | 80 | 175.000.000 | 100,00 | 88,45 | 89 | 431.482.000 | 197,78 | 906,47 | | |
| 6 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 45,00 | 989.250.000,00 | 9,00 | 31.625.000,00 | 3 | 65.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0,00 | 76,92 | 9 | 81.625.000 | 20,00 | 8,25 | | |
| 7 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | - | 325.000.000,00 | - | - | 1 | 36.146.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 8 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 10,00 | 350.725.000,00 | - | - | 2 | 13.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Orang | 800,00 | 66.500.000,00 | 320,00 | 25.000.000,00 | 160 | 75.000.000 | 80 | 50.000.000 | 50,00 | 66,67 | 400 | 75.000.000 | 50,00 | 112,78 | | |
| 10 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Desa | 245,00 | 312.500.000,00 | - | - | 49 | 101.241.000 | 46 | 83.316.856 | 93,88 | 82,30 | 46 | 83.316.856 | 18,78 | 26,66 | | |
| 11 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 10,00 | 506.205.000,00 | - | - | 2 | 67.110.000 | 2 | 56.300.000 | 100,00 | 83,89 | 2 | 56.300.000 | 20,00 | 11,12 | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persen** | **100,00** | **13.663.850.000,00** | **100,00** | **26.457.000,00** | **100** | **1.489.560.000** | **100** | **1.422.630.740** | **100,00** | **95,51** | **200** | **1.449.087.740** | **200,00** | **10,61** | | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan** | **Lembaga** | **540,00** | **13.663.850.000,00** | **534,00** | **26.457.000,00** | **534** | **1.489.560.000** | **540** | **1.422.630.740** | **101,12** | **95,51** | **1074** | **1.449.087.740** | **198,89** | **10,61** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | 5,00 | 6.342.800.000,00 | - | - | 1 | 6.920.000 | 1 | 5.920.000 | 100,00 | 85,55 | 1 | 5.920.000 | 20,00 | 0,09 | | |
| 2 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | 10,00 | 34.600.000,00 | 5,00 | 15.916.000,00 | 2 | 22.450.000 | 2 | 21.150.000 | 100,00 | 94,21 | 7 | 37.066.000 | 70,00 | 107,13 | | |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 400,00 | 112.250.000,00 | - | - | 80 | 14.740.000 | 80 | 13.500.000 | 100,00 | 91,59 | 80 | 13.500.000 | 20,00 | 12,03 | | |
| 4 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Unit | 400,00 | 73.700.000,00 | - | - | 80 | 20.100.000 | 100 | 19.600.000 | 125,00 | 97,51 | 100 | 19.600.000 | 25,00 | 26,59 | | |
| 5 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Dokumen | 10,00 | 100.500.000,00 | 5,00 | 10.541.000,00 | 2 | 13.100.000 | 2 | 13.100.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | 23.641.000 | 70,00 | 23,52 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dokumen | 40,00 | 7.000.000.000,00 | - | - | 8 | 1.412.250.000 | 8 | 1.349.360.740 | 100,00 | 95,55 | 8 | 1.349.360.740 | 20,00 | 19,28 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **30.162.091.350,00** | **100,00** | **18.097.254.810,00** | **100** | **5.938.289.799** | **100** | **5.349.491.035** | **100** | **90,08** | **200** | **23.446.745.845** | **200,00** | **77,74** | **Dinas Komuniskasi, Informatika, Statistik dan Persandian** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **95,00** | **51.965.000,00** | **57,00** | **31.179.000,00** | **19** | **10.201.000** | **19** | **3.390.000** | **100** | **33,23** | **76** | **34.569.000** | **80,00** | **66,52** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 7.225.000,00 | 6,00 | 4.335.000,00 | 2 | 1.355.000 | 2 | 835.000 | 100 | 61,62 | 8 | 5.170.000 | 80,00 | 71,56 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 7.490.000,00 | 3,00 | 4.494.000,00 | 1 | 1.450.000 | 1 | 850.000 | 100 | 58,62 | 4 | 5.344.000 | 80,00 | 71,35 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 7.375.000,00 | 3,00 | 4.425.000,00 | 1 | 1.475.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | 4 | 4.425.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 7.375.000,00 | 3,00 | 4.425.000,00 | 1 | 1.475.000 | 1 | 1.475.000 | 100 | 100,00 | 4 | 5.900.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 7.500.000,00 | 3,00 | 4.500.000,00 | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | 4 | 4.500.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 7.500.000,00 | 3,00 | 4.500.000,00 | 1 | 1.446.000 | 1 | 0 | 100 | 0,00 | 4 | 4.500.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60,00 | 7.500.000,00 | 36,00 | 4.500.000,00 | 12 | 1.500.000 | 12 | 230.000 | 100 | 15,33 | 48 | 4.730.000 | 80,00 | 63,07 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **235,00** | **27.133.861.350,00** | **141,00** | **16.280.316.810,00** | **47** | **5.314.603.799** | **47** | **4.884.718.393** | **100** | **91,91** | **188** | **21.165.035.203** | **80,00** | **78,00** | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 26.348.086.350,00 | 2.436,00 | 15.808.851.810,00 | 812 | 5.157.448.799 | 812 | 4.735.748.393 | 100 | 91,82 | 3248 | 20.544.600.203 | 80,00 | 77,97 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 771.100.000,00 | 36,00 | 462.660.000,00 | 12 | 154.220.000 | 12 | 147.970.000 | 100 | 95,95 | 48 | 610.630.000 | 80,00 | 79,19 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 15,00 | 8.025.000,00 | 9,00 | 4.815.000,00 | 3 | 1.755.000 | 3 | 0 | 100 | 0,00 | 12 | 4.815.000 | 80,00 | 60,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 6.650.000,00 | 54,00 | 3.990.000,00 | 18 | 1.180.000 | 18 | 1.000.000 | 100 | 84,75 | 72 | 4.990.000 | 80,00 | 75,04 | | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **70,00** | **37.750.000,00** | **42,00** | **22.650.000,00** | **14** | **7.400.000** | **14** | **7.400.000** | **100** | **100,00** | **56** | **30.050.000** | **80,00** | **79,60** | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 10,00 | 7.150.000,00 | 6,00 | 4.290.000,00 | 2 | 1.280.000 | 2 | 1.280.000 | 100 | 100,00 | 8 | 5.570.000 | 80,00 | 77,90 | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 60,00 | 30.600.000,00 | 36,00 | 18.360.000,00 | 12 | 6.120.000 | 12 | 6.120.000 | 100 | 100,00 | 48 | 24.480.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **290,00** | **71.900.000,00** | **174,00** | **43.140.000,00** | **58** | **14.380.000** | **58** | **13.290.000** | **100** | **92,42** | **232** | **56.430.000** | **80,00** | **78,48** | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 290,00 | 56.250.000,00 | 174,00 | 33.750.000,00 | 58 | 11.250.000 | 58 | 11.250.000 | 100 | 100,00 | 232 | 45.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 60,00 | 15.650.000,00 | 36,00 | 9.390.000,00 | 12 | 3.130.000 | 12 | 2.040.000 | 100 | 65,18 | 48 | 11.430.000 | 80,00 | 73,04 | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **30,00** | **1.477.565.000,00** | **18,00** | **886.539.000,00** | **6** | **307.845.000** | **6** | **207.743.568** | **100** | **67,48** | **24** | **1.094.282.568** | **80,00** | **74,06** | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 19.650.000,00 | 3,00 | 11.790.000,00 | 1 | 3.930.000 | 1 | 2.245.500 | 100 | 57,14 | 4 | 14.035.500 | 80,00 | 71,43 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 21.192.500,00 | 3,00 | 12.715.500,00 | 1 | 4.238.500 | 1 | 4.225.000 | 100 | 99,68 | 4 | 16.940.500 | 80,00 | 79,94 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 166.635.000,00 | 3,00 | 99.981.000,00 | 1 | 33.327.000 | 1 | 31.817.000 | 100 | 95,47 | 4 | 131.798.000 | 80,00 | 79,09 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10,00 | 59.567.500,00 | 6,00 | 35.740.500,00 | 2 | 12.345.500 | 2 | 11.613.500 | 100 | 94,07 | 8 | 47.354.000 | 80,00 | 79,50 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 60.000.000,00 | 36,00 | 36.000.000,00 | 12 | 12.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100 | 66,67 | 48 | 44.000.000 | 80,00 | 73,33 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 1.150.520.000,00 | 36,00 | 690.312.000,00 | 12 | 242.004.000 | 12 | 149.842.568 | 100 | 61,92 | 48 | 840.154.568 | 80,00 | 73,02 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **5,00** | **75.000.000,00** | **3,00** | **45.000.000,00** | **1** | **15.000.000** | **1** | **15.000.000** | **100** | **100,00** | **4** | **60.000.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10,00 | 75.000.000,00 | 6,00 | 45.000.000,00 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 100 | 100,00 | 8 | 60.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **15,00** | **955.800.000,00** | **9,00** | **573.480.000,00** | **3** | **166.160.000** | **3** | **157.188.895** | **100** | **94,60** | **12** | **730.668.895** | **80,00** | **76,45** | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 27.500.000,00 | 36,00 | 16.500.000,00 | 12 | 5.500.000 | 12 | 3.300.000 | 100 | 60,00 | 48 | 19.800.000 | 80,00 | 72,00 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 3.000.000,00 | 36,00 | 1.800.000,00 | 12 | 600.000 | 12 | 148.895 | 100 | 24,82 | 48 | 1.948.895 | 80,00 | 64,96 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 925.300.000,00 | 36,00 | 555.180.000,00 | 12 | 160.060.000 | 12 | 153.740.000 | 100 | 96,05 | 48 | 708.920.000 | 80,00 | 76,62 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **10,00** | **358.250.000,00** | **6,00** | **214.950.000,00** | **2** | **102.700.000** | **2** | **60.760.179** | **100** | **59,16** | **8** | **275.710.179** | **80,00** | **76,96** | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 450,00 | 248.250.000,00 | 270,00 | 148.950.000,00 | 90 | 80.700.000 | 90 | 39.587.000 | 100 | 49,05 | 360 | 188.537.000 | 80,00 | 75,95 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 110.000.000,00 | 3,00 | 66.000.000,00 | 1 | 22.000.000 | 1 | 21.173.179 | 100 | 96,24 | 4 | 87.173.179 | 80,00 | 79,25 | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa** | **Persen** | **100,00** | **4.305.674.240,00** | **84,00** | **861.134.848,00** | **100** | **364.960.000** | **100** | **288.754.000** | **100** | **79,12** | **184** | **1.149.888.848** | **184,00** | **26,71** | | |
| | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis informasi dan komunikasi publik yang di kelola** | **Jenis** | **3,00** | **4.305.674.240,00** | **3,00** | **861.134.848,00** | **3** | **364.960.000** | **3** | **288.754.000** | **100** | **79,12** | **6** | **1.149.888.848** | **200,00** | **26,71** | | |
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 60,00 | 952.943.675,00 | 25,00 | 190.588.735,00 | 12 | 120.920.000 | 12 | 100.294.000 | 100 | 82,94 | 37 | 290.882.735 | 61,67 | 30,52 | | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 60,00 | 3.132.697.065,00 | 25,00 | 626.539.413,00 | 12 | 226.440.000 | 12 | 171.215.000 | 100 | 75,61 | 37 | 797.754.413 | 61,67 | 25,47 | | |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Dokumen | 60,00 | 220.033.500,00 | 25,00 | 44.006.700,00 | 12 | 17.600.000 | 12 | 17.245.000 | 100 | 97,98 | 37 | 61.251.700 | 61,67 | 27,84 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE** | **Persen** | 100,00 | 39.904.167.518,00 | 38,52 | 16.340.690.488,00 | **90** | 6.815.351.603 | **90** | 6.020.689.751 | 100 | 88,34 | 129 | 22.361.380.239 | 128,52 | 56,04 | | |
| | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah domain dan sub domain yang telah ditetapkan dan dikelola lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota** | **Domain/Subdomain** | **400,00** | **11.462.959.518,00** | **211,00** | **7.682.119.518,00** | **63** | **1.124.530.000** | **63** | **439.433.000** | **100** | **39,08** | **274** | **8.121.552.518** | **68,50** | **70,85** | | |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 60,00 | 59.050.000,00 | 36,00 | 42.850.000,00 | 12 | 5.400.000 | 12 | 2.000.000 | 100 | 37,04 | 48 | 44.850.000 | 80,00 | 75,95 | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Unit | 209,00 | 11.403.909.518,00 | 129,00 | 7.639.269.518,00 | 40 | 1.119.130.000 | 40 | 437.433.000 | 100 | 39,09 | 169 | 8.076.702.518 | 80,86 | 70,82 | | |
| | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah aplikasi informatika layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi** | **Aplikasi** | **40,00** | **28.441.208.000,00** | **19,00** | **8.658.570.970,00** | **40** | **5.690.821.603** | **40** | **5.581.256.751** | **100** | **98,07** | **59** | **14.239.827.721** | **147,50** | **50,07** | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Dokumen | 60,00 | 25.000.000.000,00 | 24,00 | 8.299.607.320,00 | 12 | 5.000.000.000 | 12 | 4.997.583.101 | 100 | 99,95 | 36 | 13.297.190.421 | 60,00 | 53,19 | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | PD | 40,00 | 2.000.000.000,00 | 40,00 | - | 40 | 400.000.000 | 40 | 295.000.000 | 100 | 73,75 | 80 | 295.000.000 | 200,00 | 14,75 | | |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Unit | 35,00 | 1.441.208.000,00 | 7,00 | 358.963.650,00 | 7 | 290.821.603 | 7 | 288.673.650 | 100 | 99,26 | 14 | 647.637.300 | 40,00 | 44,94 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi** | **Persen** | **100,00** | **95.915.000,00** | **49,00** | **85.806.296,00** | **100** | **33.293.000** | **100** | **24.170.000** | **100** | **72,60** | **149** | **109.976.296** | **149,00** | **114,66** | | |
| | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros** | **Dokumen** | **60,00** | **95.915.000,00** | **49,00** | **85.806.296,00** | **12** | **33.293.000** | **12** | **24.170.000** | **100** | **72,60** | **61** | **109.976.296** | **101,67** | **114,66** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 60,00 | 95.915.000,00 | 9,00 | 79.628.296,00 | 12 | 33.293.000 | 12 | 24.170.000 | 100 | 72,60 | 21 | 103.798.296 | 35,00 | 108,22 | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi** | **Persen** | **100,00** | **172.474.000,00** | **75,00** | **49.937.771,00** | **100** | **48.308.000** | **100** | **43.910.000** | **100** | **90,90** | **175** | **93.847.771** | **175,00** | **54,41** | | |
| | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah perangkat daerah yang menerapkan persandian berupa tanda tangan elektronik untuk pengamanan informasi** | **PD** | **40,00** | **87.474.000,00** | **38,00** | **23.131.771,00** | **40** | **21.158.000** | **40** | **20.000.000** | **100** | **94,53** | **78** | **43.131.771** | **195,00** | **49,31** | | |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen | 6,00 | 3.474.000,00 | - | - | 2 | 1.158.000 | 2 | 0 | 100 | 0,00 | 2 | 0 | 33,33 | 0,00 | | |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 36,00 | 84.000.000,00 | - | - | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 100 | 100,00 | 12 | 20.000.000 | 33,33 | 23,81 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi** | **PD** | **40,00** | **85.000.000,00** | **40,00** | **26.806.000,00** | **40** | **27.150.000** | **40** | **23.910.000** | **100** | **88,07** | **80** | **50.716.000** | **200,00** | **59,67** | | |
| | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | PD | 40,00 | 85.000.000,00 | 40,00 | 26.806.000,00 | 40 | 27.150.000 | 40 | 23.910.000 | 100 | 88,07 | 80 | 50.716.000 | 200,00 | 59,67 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **44.346.292.260,00** | **100,00** | **26.607.775.356,00** | **100** | **7.569.902.447** | **100,00** | **6.974.941.170** | **100,00** | **92,14** | **200,00** | **33.582.716.526** | **200,00** | **75,73** | **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **95,00** | **92.875.000,00** | **57,00** | **55.725.000,00** | **19** | **16.075.000** | **19** | **16.075.000** | **100,00** | **100,00** | **76** | **71.800.000** | **80,00** | **77,31** | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 14.050.000,00 | 6,00 | 8.430.000,00 | 2 | 2.810.000 | | 2.810.000 | 0,00 | 100,00 | 6 | 11.240.000 | 60,00 | 80,00 | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.150.000,00 | 3,00 | 7.890.000,00 | 1 | 2.630.000 | | 2.630.000 | 0,00 | 100,00 | 3 | 10.520.000 | 60,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 4.650.000,00 | 3,00 | 2.790.000,00 | 1 | 930.000 | | 930.000 | 0,00 | 100,00 | 3 | 3.720.000 | 60,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.375.000,00 | 3,00 | 8.025.000,00 | 1 | 2.675.000 | | 2.675.000 | 0,00 | 100,00 | 3 | 10.700.000 | 60,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.625.000,00 | 3,00 | 3.375.000,00 | 1 | 1.125.000 | | 1.125.000 | 0,00 | 100,00 | 3 | 4.500.000 | 60,00 | 80,00 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 14.125.000,00 | 3,00 | 8.475.000,00 | 1 | 2.825.000 | | 2.825.000 | 0,00 | 100,00 | 3 | 11.300.000 | 60,00 | 80,00 | | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5,00 | 15.400.000,00 | 3,00 | 9.240.000,00 | 1 | 3.080.000 | | 3.080.000 | 0,00 | 100,00 | 3 | 12.320.000 | 60,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **225,00** | **12.500.000,00** | **135,00** | **7.500.000,00** | **12** | **7.490.129.202** | **12** | **6.901.506.170** | **100,00** | **92,14** | **147** | **6.909.006.170** | **65,33** | **######** | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ######## | 38.878.226.910,00 | 3.822,00 | 23.326.936.146,00 | 45 | 7.321.159.202 | 45 | 6.732.734.170 | 100,00 | 91,96 | 3.867 | 30.059.670.316 | 60,71 | 77,32 | | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 25,00 | 38.020.876.910,00 | 15,00 | 22.812.526.146,00 | 1.274 | 166.710.000 | 1274 | 166.560.000 | 100,00 | 99,91 | 1289 | 22.979.086.146 | 5156,00 | 60,44 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 95,00 | 833.550.000,00 | 57,00 | 500.130.000,00 | 12 | 2.260.000 | 12 | 2.212.000 | 100,00 | 97,88 | 69 | 502.342.000 | 72,63 | 60,27 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 12.500.000,00 | 54,00 | 7.500.000,00 | 19 | 2.500.000 | 19 | 2.500.000 | 100,00 | 100,00 | 73 | 10.000.000 | 81,11 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **25,00** | **11.300.000,00** | **15,00** | **6.780.000,00** | **5** | **513.644.825** | **5** | **488.765.185** | **100,00** | **95,16** | **20** | **495.545.185** | **80,00** | **4385,36** | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 2.600.190.350,00 | 3,00 | 1.560.114.210,00 | 5 | 10.662.325 | 5 | 10.635.760 | 100,00 | 99,75 | 8 | 1.570.749.970 | 160,00 | 60,41 | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 78.427.850,00 | 3,00 | 47.056.710,00 | 1 | 92.832.500 | 1 | 92.369.000 | 100,00 | 99,50 | 4 | 139.425.710 | 80,00 | 177,78 | | |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 464.162.500,00 | 3,00 | 278.497.500,00 | 1 | 21.100.000 | 1 | 21.100.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 299.597.500 | 80,00 | 64,55 | | |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 105.500.000,00 | 36,00 | 63.300.000,00 | 1 | 335.050.000 | 1 | 310.660.425 | 100,00 | 92,72 | 37 | 373.960.425 | 61,67 | 354,46 | | |
| 5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 5,00 | 1.682.100.000,00 | 3,00 | 1.009.260.000,00 | 12 | 54.000.000 | 12 | 54.000.000 | 100,00 | 100,00 | 15 | 1.063.260.000 | 300,00 | 63,21 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **10,00** | **270.000.000,00** | **6,00** | **162.000.000,00** | | **500.500.000** | | **498.650.000** | **#DIV/0!** | **99,63** | **6** | **660.650.000** | **60,00** | **244,69** | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 2.472.500.000,00 | 36,00 | 1.483.500.000,00 | 1 | 14.500.000 | 1 | 14.500.000 | 100,00 | 100,00 | 37 | 1.498.000.000 | 61,67 | 60,59 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 72.500.000,00 | 36,00 | 43.500.000,00 | 2 | 486.000.000 | 2 | 484.150.000 | 100,00 | 99,62 | 38 | 527.650.000 | 63,33 | 727,79 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **5,00** | **2.400.000.000,00** | **3,00** | **1.440.000.000,00** | **12** | **63.698.245** | **12** | **57.360.000** | **100,00** | **90,05** | **15** | **1.497.360.000** | **300,00** | **62,39** | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jenis | 25,00 | 302.500.000,00 | 15,00 | 181.500.000,00 | 12 | 63.698.245 | 12 | 57.360.000 | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas kesehatan pemuda** | **angka harapan hiudp pemuda** | **Tahun** | **100,00** | **18.341.625.000,00** | **50,00** | **11.004.975.000,00** | | **1.347.100.000** | | **1.323.490.000** | **#DIV/0!** | **98,25** | **50** | **12.328.465.000** | **50,00** | **67,22** | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase pemuda aktif** | **Persen** | 175,00 | 9.106.125.000,00 | 105,00 | 5.463.675.000,00 | **1** | 1.347.100.000 | **1** | 1.323.490.000 | 100,00 | 98,25 | 106 | 6.787.165.000 | 60,57 | 74,53 | | |
| 1 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya | Orang | 125,00 | 1.220.000.000,00 | 75,00 | 732.000.000,00 | 1 | 367.600.000 | 1 | 355.640.000 | 100,00 | 96,75 | 76 | 1.087.640.000 | 60,80 | 89,15 | | |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 225,00 | 1.220.000.000,00 | 135,00 | 732.000.000,00 | 3 | 6.805.000 | 3 | 205.000 | 100,00 | 3,01 | 138 | 732.205.000 | 61,33 | 60,02 | | |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 70,00 | 6.666.125.000,00 | 42,00 | 3.999.675.000,00 | 3 | 12.000.000 | 3 | 7.600.000 | 100,00 | 63,33 | 45 | 4.007.275.000 | 64,29 | 60,11 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan** | **Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan** | **Orang** | **500,00** | **9.235.500.000,00** | **300,00** | **5.541.300.000,00** | **3** | **348.795.000** | **3** | **347.835.000** | **100,00** | **99,72** | **303** | **5.889.135.000** | **60,60** | **63,77** | | |
| 1 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Organsiasi | 30,00 | 6.420.000.000,00 | 18,00 | 3.852.000.000,00 | 40 | 979.500.000 | 40 | 967.850.000 | 100,00 | 98,81 | 58 | 4.819.850.000 | 193,33 | 75,08 | | |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha | Orang | 450,00 | 2.815.500.000,00 | 270,00 | 1.689.300.000,00 | 100 | 42.650.000 | 90 | 32.000.000 | 90,00 | 75,03 | 360 | 1.721.300.000 | 80,00 | 61,14 | | |
| | **Meningkatnya Pembinaan Usia Dini dan prestasi Olahraga Unggulan Daerah** | **Persentase Cabang Olahraga yang melakukan Pembinaan usia Dini dan Berprestasi** | **Persen** | **100,00** | **6.763.206.660,00** | **56,00** | **4.057.923.996,00** | **90** | **2.803.560.000** | | **2.789.019.000** | **0,00** | **99,48** | **56** | **6.846.942.996** | **56,00** | **101,24** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Cakupan Pembinaan Olahraga** | **Persen** | **7,00** | **503.275.000,00** | **-** | **-** | **100** | **2.803.560.000** | **100** | **2.789.019.000** | **100,00** | **99,48** | **100** | **2.789.019.000** | **1428,57** | **554,17** | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cabang olahraga kependidikan yang mendapatkan pembinaan | Cabang Olaharaga | 35,00 | 503.275.000,00 | - | - | 7 | 110.960.000 | 7 | 100.655.000 | 100,00 | 90,71 | 7 | 100.655.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar** | **Jumlah laporan korodinasi, dan sikronisaisi pelaksanaan pemberdayan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetesis oleh satuan pendidikan dasar** | **Laporan** | **70,00** | **549.608.330,00** | **42,00** | **329.764.998,00** | **14** | **110.960.000** | **14** | **100.655.000** | **100,00** | **90,71** | **56** | **430.419.998** | **80,00** | **78,31** | | |
| 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah | Cabor | 100,00 | 132.500.000,00 | 60,00 | 79.500.000,00 | 7 | 480.000.000 | 7 | 479.950.000 | 100,00 | 99,99 | 67 | 559.450.000 | 67,00 | 422,23 | | |
| 2 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 35,00 | 417.108.330,00 | 21,00 | 250.264.998,00 | 14 | 280.000.000 | 14 | 280.000.000 | 100,00 | 100,00 | 35 | 530.264.998 | 100,00 | 127,13 | | |
| | **Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota** | **Dokumen** | **########** | **182.958.330,00** | **750,00** | **109.774.998,00** | **20** | **200.000.000** | **20** | **199.950.000** | **100,00** | **99,98** | **770** | **309.724.998** | **61,60** | **169,29** | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan | Cabor | 135,00 | 182.958.330,00 | 81,00 | 109.774.998,00 | 7 | 11.950.000 | 7 | 8.950.000 | 100,00 | 74,90 | 88 | 118.724.998 | 65,19 | 64,89 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Seleksi Atlet Daerah** | **Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi** | **Orang** | **135,00** | **234.150.000,00** | **81,00** | **140.490.000,00** | **250** | **11.950.000** | **245** | **8.950.000** | **98,00** | **74,90** | **326** | **149.440.000** | **241,48** | **63,82** | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan | Organisasi | 125,00 | 234.150.000,00 | 75,00 | 140.490.000,00 | 27 | 2.106.150.000 | 27 | 2.105.940.000 | 100,00 | 99,99 | 102 | 2.246.430.000 | 81,60 | 959,40 | | |
| | **Pengembangan Organisasi Keolahragaan** | **Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan** | **Organisasi** | **60,00** | **5.796.490.000,00** | **36,00** | **3.477.894.000,00** | **27** | **2.106.150.000** | **27** | **2.105.940.000** | **100,00** | **99,99** | **63** | **5.583.834.000** | **105,00** | **96,33** | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah cabang olahraga rekreasi yang mendapatkan pembinaan | Cabor | 15,00 | 2.398.270.000,00 | 9,00 | 1.438.962.000,00 | 25 | 94.500.000 | 25 | 93.524.000 | 100,00 | 98,97 | 34 | 1.532.486.000 | 226,67 | 63,90 | | |
| 2 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Dokumen | 15,00 | 2.398.270.000,00 | 9,00 | 1.438.962.000,00 | 12 | 37.700.000 | 12 | 36.744.000 | 100,00 | 97,46 | 21 | 1.475.706.000 | 140,00 | 61,53 | | |
| 3 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahrag Rekreasi | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | Unit | 36,90 | 999.950.000,00 | 22,14 | 599.970.000,00 | 3 | 24.000.000 | 3 | 24.000.000 | 100,00 | 100,00 | 25 | 623.970.000 | 68,13 | 62,40 | | |
| | **Meningkatnya kualitas pendidikan pemuda** | **Rata-rata lama sekolah pemuda** | **Tahun** | **100,00** | **1.823.175.000,00** | **75,00** | **1.093.905.000,00** | **7,38** | **569.800.000** | | **567.400.000** | **0,00** | **99,58** | **75,00** | **1.661.305.000** | **75,00** | **91,12** | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi** | **Persen** | **60,00** | **1.823.175.000,00** | **36,00** | **1.093.905.000,00** | **100,00** | **569.800.000** | **100,00** | **567.400.000** | **100,00** | **99,58** | **136,00** | **1.661.305.000** | **226,67** | **91,12** | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah oragnsiasi kepramukaan yang mendapatkan pembinaan | Organisasi | ########## | 1.715.775.000,00 | 1.320,00 | 1.029.465.000,00 | 440 | 569.800.000 | 440 | 567.400.000 | 100,00 | 99,58 | 1.760 | 1.596.865.000 | 80,00 | 93,07 | | |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | Dokumen | - | 107.400.000,00 | - | 64.440.000,00 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | 76.440.000 | 0,00 | 71,17 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata** | **Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik** | **Persen** | **2,00** | **23.302.250.000,00** | **1,00** | **13.981.350.000,00** | **90** | **1.782.225.000** | | **1.766.140.520** | **0,00** | **99,10** | **1** | **15.747.490.520** | **50,00** | **67,58** | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Rata-rata lama kunjungan wisatawan** | **Hari** | **15,00** | **5.003.000.000,00** | **9,00** | **3.001.800.000,00** | **1** | **1.782.225.000** | **1** | **1.766.140.520** | **100,00** | **99,10** | **10** | **4.767.940.520** | **66,67** | **95,30** | | |
| 1 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kawasan startegis pariwisata yang terkelola dengan baik | Kawasan | 15,00 | 5.003.000.000,00 | 9,00 | 3.001.800.000,00 | 1 | 244.000.000 | 1 | 243.939.520 | 100,00 | 99,98 | 10 | 3.245.739.520 | 66,67 | 64,88 | | |
| | **Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)** | **Lokasi** | **15,00** | **18.299.250.000,00** | **9,00** | **10.979.550.000,00** | **3** | **244.000.000** | **3** | **243.939.520** | **100,00** | **99,98** | **12** | **11.223.489.520** | **80,00** | **61,33** | | |
| 1 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik | DTW | 200,00 | 4.750.000.000,00 | 120,00 | 2.850.000.000,00 | 3 | 1.538.225.000 | 3 | 1.522.201.000 | 100,00 | 98,96 | 123 | 4.372.201.000 | 61,50 | 92,05 | | |
| 2 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi | 222,20 | 13.549.250.000,00 | 133,32 | 8.129.550.000,00 | 3 | 149.225.000 | 3 | 135.725.000 | 100,00 | 90,95 | 136 | 8.265.275.000 | 61,35 | 61,00 | | |
| | **Meningkatnya kunjungan wisatwan** | **Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan** | **Persen** | **75,00** | **1.101.750.000,00** | **25,00** | **661.050.000,00** | **44,44** | **493.100.000** | | **438.845.000** | **0,00** | **89,00** | **25** | **1.099.895.000** | **33,33** | **99,83** | | |
| | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Persentase Kunjungan Wisata** | **Persen** | **25,00** | **1.101.750.000,00** | **15,00** | **661.050.000,00** | **100,00** | **493.100.000** | **100** | **438.845.000** | **100,00** | **89,00** | **115** | **1.099.895.000** | **460,00** | **99,83** | | |
| 1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan | Objek | 60,00 | 1.000.000.000,00 | 36,00 | 600.000.000,00 | 15 | 493.100.000 | 15 | 438.845.000 | 100,00 | 89,00 | 51 | 1.038.845.000 | 85,00 | 103,88 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Kegiatan | 450,00 | 101.750.000,00 | 270,00 | 61.050.000,00 | 5 | 431.600.000 | 5 | 385.600.000 | 100,00 | 89,34 | 275 | 446.650.000 | 61,11 | 438,97 | | |
| | **Meningkatnya usaha ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi** | **persentase usaha ekonomi Kreatif yang bersertifikasi** | **Persen** | **100,00** | **10.763.500.000,00** | **100,00** | **6.458.100.000,00** | **90** | **71.271.666** | | **36.398.172** | **0,00** | **51,07** | **100** | **6.494.498.172** | **100,00** | **60,34** | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **PersentaseUsaha Ekonomi Kreatif Lokal yang memilik Hak Kekayaan Intelktual** | **Persen** | **5,00** | **10.584.500.000,00** | **3,00** | **6.350.700.000,00** | **100** | **71.271.666** | **70** | **36.398.172** | **70,00** | **51,07** | **73** | **6.387.098.172** | **1460,00** | **60,34** | | |
| 1 | Penyediaan Prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha ekonomi kreatif yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran | Ukraf | 250,00 | 10.584.500.000,00 | 150,00 | 6.350.700.000,00 | 105 | 36.591.666 | 105 | 36.398.172 | 100,00 | 99,47 | 255 | 6.387.098.172 | 102,00 | 60,34 | | |
| | **Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif** | **Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia** | **Unit** | **5,00** | **179.000.000,00** | **3,00** | **107.400.000,00** | **1** | **36.591.666** | **1** | **36.398.172** | **100,00** | **99,47** | **4** | **143.798.172** | **80,00** | **80,33** | | |
| 2 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah ekonomi kreatif yang berkembang | Ekraf | 450,00 | 179.000.000,00 | 270,00 | 107.400.000,00 | 50 | 34.680.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270 | 107.400.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | **Meningkatnya usaha ekonomi Kreatif yang berkualitas dan terstandarisasi** | **persentase usaha ekonomi Kreatif yang berkualitas dan terstandarisasi** | **Persen** | **100,00** | **3.261.500.000,00** | **20,00** | **1.752.900.000,00** | **90** | **679.644.000** | | **677.717.000** | **0,00** | **99,72** | **20** | **2.430.617.000** | **20,00** | **74,52** | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase peningkatan usaha kepariwisataan dan eknomi kreatif** | **Persen** | **30,00** | **2.861.500.000,00** | **18,00** | **1.716.900.000,00** | **100** | **679.644.000** | **100** | **677.717.000** | **100,00** | **99,72** | **118** | **2.394.617.000** | **393,33** | **83,68** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang meningkat kapasitasnya | Orang | ########## | 2.861.500.000,00 | 2.100,00 | 1.716.900.000,00 | 100 | 479.654.000 | 100 | 477.727.000 | 100,00 | 99,60 | 2200 | 2.194.627.000 | 62,86 | 76,69 | | |
| | **Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif** | **Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif** | **Laporan** | **########** | **400.000.000,00** | **2.100,00** | **36.000.000,00** | **6** | **479.654.000** | **6** | **477.727.000** | **100,00** | **99,60** | **2106** | **513.727.000** | **60,17** | **128,43** | | |
| 1 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | jumlah pelaku ekonomi kreaif yang mendapatkan pelatihan | Orang | 364,35 | 400.000.000,00 | 218,61 | 36.000.000,00 | 700 | 199.990.000 | 700 | 199.990.000 | 100,00 | 100,00 | 919 | 235.990.000 | 252,12 | 59,00 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persen** | **100,00** | **45.277.422.905,00** | **100,00** | **27.166.453.743,00** | **100,00** | **5.647.457.513** | **100,00** | **5.331.715.570** | **100,00** | **94,41** | **200,00** | **32.498.169.313** | **200,00** | **71,78** | **Dinas Perpustakaan dan kearsipan** | **#REF!** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **270,00** | **23.874.772.225,00** | **162,00** | **14.324.863.335,00** | **10** | **9.985.000** | **10** | **9.985.000** | **100,00** | **100,00** | **####** | **14.334.848.335** | **63,70** | **60,04** | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 12.625.000,00 | 6,00 | 7.575.000,00 | 2 | 2.525.000 | 2 | 2.525.000 | 100,00 | 100,00 | 8,000 | 10.100.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.625.000,00 | 3,00 | 7.575.000,00 | 1 | 2.525.000 | 1 | 2.525.000 | 100,00 | 100,00 | 4,000 | 10.100.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.625.000,00 | 3,00 | 3.975.000,00 | 1 | 1.325.000 | 1 | 1.325.000 | 100,00 | 100,00 | 4,000 | 5.300.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 10,00 | 12.625.000,00 | 6,00 | 7.575.000,00 | 2 | 2.525.000 | 2 | 2.525.000 | 100,00 | 100,00 | 8,000 | 10.100.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 5.425.000,00 | 12,00 | 3.255.000,00 | 4 | 1.085.000 | 4 | 1.085.000 | 100,00 | 100,00 | 16,000 | 4.340.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **220,00** | **23.824.847.225,00** | **132,00** | **14.294.908.335,00** | **44** | **4.794.969.445** | **44** | **4.554.016.017** | **100,00** | **94,97** | **#####** | **18.848.924.352** | **80,00** | **79,11** | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ######## | 1.944.165.340,00 | 2.100,00 | 1.166.499.204,00 | 742 | 4.658.219.445 | 742 | 4.417.426.017 | 100,00 | 94,83 | ##### | 5.583.925.221 | 81,20 | 287,21 | | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 643.750.000,00 | 36,00 | 386.250.000,00 | 12 | 128.750.000 | 12 | 128.590.000 | 100,00 | 99,88 | 48,000 | 514.840.000 | 80,00 | 79,98 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 40.000.000,00 | 54,00 | 24.000.000,00 | 18 | 8.000.000 | 18 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 72,000 | 32.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **30,00** | **1.260.415.340,00** | **18,00** | **756.249.204,00** | **6** | **252.083.068** | **5** | **228.682.053** | **83,33** | **90,72** | **23,000** | **984.931.257** | **76,67** | **78,14** | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6,00 | 2.709.635.340,00 | 6,00 | 1.625.781.204,00 | 6 | 10.196.000 | 6 | 10.196.000 | 100,00 | 100,00 | 12,000 | 1.635.977.204 | 200,00 | 60,38 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 373.767.340,00 | 15,00 | 224.260.404,00 | 5 | 74.753.468 | 5 | 69.586.000 | 100,00 | 93,09 | 20,000 | 293.846.404 | 80,00 | 78,62 | | |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 75,00 | 43.693.000,00 | 45,00 | 26.215.800,00 | 15 | 8.738.600 | 15 | 8.438.600 | 100,00 | 96,57 | 60,000 | 34.654.400 | 80,00 | 79,31 | | |
| 4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | 0,00 | 100,00 | 3,000 | 56.500.000 | 60,00 | 113,00 | | |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 132.500.000,00 | 36,00 | 79.500.000,00 | 12 | 131.895.000 | 12 | 113.961.453 | 100,00 | 86,40 | 48,000 | 193.461.453 | 80,00 | 146,01 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **15,00** | **1.500.200.000,00** | **9,00** | **900.120.000,00** | **12** | **300.040.000** | **12** | **253.990.000** | **100,00** | **84,65** | **21,000** | **1.154.110.000** | **140,00** | **76,93** | | |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3,00 | 1.992.100.000,00 | 3,00 | 1.195.260.000,00 | 3 | 132.000.000 | 3 | 115.650.000 | 100,00 | 87,61 | 6,000 | 1.310.910.000 | 200,00 | 65,81 | | |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 65,00 | 750.200.000,00 | 39,00 | 450.120.000,00 | 20 | 150.040.000 | 20 | 120.790.000 | 100,00 | 80,51 | 59,000 | 570.910.000 | 90,77 | 76,10 | | |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 250,00 | 90.000.000,00 | 150,00 | 54.000.000,00 | 13 | 18.000.000 | 13 | 17.550.000 | 100,00 | 97,50 | ##### | 71.550.000 | 65,20 | 79,50 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **15,00** | **1.151.900.000,00** | **9,00** | **691.140.000,00** | **50** | **230.380.000** | **50** | **227.701.500** | **100,00** | **98,84** | **59,000** | **918.841.500** | **393,33** | **79,77** | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3,00 | 1.448.400.000,00 | 3,00 | 869.040.000,00 | 3 | 700.000 | 3 | 600.000 | 100,00 | 85,71 | 6,000 | 869.640.000 | 200,00 | 60,04 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 100.000.000,00 | 36,00 | 60.000.000,00 | 12 | 20.000.000 | 12 | 19.421.500 | 100,00 | 97,11 | 48,000 | 79.421.500 | 80,00 | 79,42 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 1.048.400.000,00 | 36,00 | 629.040.000,00 | 12 | 209.680.000 | 12 | 207.680.000 | 100,00 | 99,05 | 48,000 | 836.720.000 | 80,00 | 79,81 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **10,00** | **300.000.000,00** | **6,00** | **180.000.000,00** | **12** | **60.000.000** | **12** | **57.341.000** | **100,00** | **95,57** | **18,000** | **237.341.000** | **180,00** | **79,11** | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2,00 | 13.308.350.000,00 | 2,00 | 7.985.010.000,00 | 1 | 30.000.000 | 2 | 29.749.000 | 200,00 | 99,16 | 4,000 | 8.014.759.000 | 200,00 | 60,22 | | |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 150.000.000,00 | 3,00 | 90.000.000,00 | 50 | 30.000.000 | 50 | 27.592.000 | 100,00 | 91,97 | 53,000 | 117.592.000 | 1060,00 | 78,39 | | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Rasio perpustakaan per satuan penduduk** | **Rasio** | **0,01** | **13.158.350.000,00** | **0,00** | **7.895.010.000,00** | **0,001** | **2.631.670.000** | **0,001** | **2.328.144.194** | **94,62** | **88,47** | **0,004** | **10.223.154.194** | **78,92** | **77,69** | | |
| | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pengunjung perpustakaan daerah** | **Orang** | **0,01** | **13.077.740.000,00** | **0,00** | **846.808.400,00** | **72.000** | **1.846.420.000** | **48.400** | **1.669.812.000** | **67,22** | **90,44** | **48.400** | **2.516.620.400** | **########** | **19,24** | | |
| 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | layanan | 1,00 | 9.207.100.000,00 | 1,00 | 548.578.400,00 | 1 | 5.000.000 | 1 | 4.942.000 | 100,00 | 98,84 | 2,000 | 553.520.400 | 200,00 | 6,01 | | |
| 2 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | 2,00 | 99.400.000,00 | 2,00 | 7.997.400,00 | 30 | 19.880.000 | 20 | 510.000 | 66,67 | 2,57 | 22,000 | 8.507.400 | 1100,00 | 8,56 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapa Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Orang | ###### | 321.100.000,00 | 18,00 | 15.430.000,00 | 260 | 64.220.000 | 195 | 31.710.000 | 75,00 | 49,38 | #### | 47.140.000 | 16,38 | 14,68 | | |
| 4 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | Layanan | 25,00 | 228.500.000,00 | 10,00 | 44.205.000,00 | 5 | 45.700.000 | 4 | 27.900.000 | 80,00 | 61,05 | 14,000 | 72.105.000 | 56,00 | 31,56 | | |
| 5 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | Eksemplar | ###### | 5.980.000.000,00 | 15,00 | 193.217.000,00 | 2075 | 1.196.000.000 | 1820 | 1.106.500.000 | 87,71 | 92,52 | #### | 1.299.717.000 | 17,69 | 21,73 | | |
| 6 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Eksemplar | ###### | 2.561.100.000,00 | 2.438,00 | 287.729.000,00 | 2100 | 512.220.000 | 1600 | 495.360.000 | 76,19 | 96,71 | #### | 783.089.000 | 38,46 | 30,58 | | |
| 7 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 10,00 | 17.000.000,00 | - | - | 2 | 3.400.000 | 2 | 2.890.000 | 100,00 | 85,00 | 2,000 | 2.890.000 | 20,00 | 17,00 | | |
| | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam gerakan gemar membaca** | **Orang** | ###### | **3.870.640.000,00** | **4,00** | **298.230.000,00** | **200** | **785.250.000** | **150** | **658.332.194** | **75,00** | **83,84** | #### | **956.562.194** | **15,40** | **24,71** | | |
| 1 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | Lokus | ###### | 136.450.000,00 | 5,00 | 41.870.000,00 | 15 | 27.290.000 | 15 | 19.410.000 | 100,00 | 71,12 | 20,000 | 61.280.000 | 2,00 | 44,91 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Orang | 75,00 | 465.390.000,00 | 20,00 | 152.790.000,00 | 15 | 76.055.000 | 15 | 74.215.000 | 100,00 | 97,58 | 35,000 | 227.005.000 | 46,67 | 48,78 | | |
| 3 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Perpustakaan | 75,00 | 3.133.000.000,00 | 14,00 | 103.570.000,00 | 3 | 654.745.000 | 3 | 540.407.194 | 100,00 | 82,54 | 17,000 | 643.977.194 | 22,67 | 20,55 | | |
| 4 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | Orang | 0,08 | 135.800.000,00 | - | - | 3 | 27.160.000 | 3 | 24.300.000 | 100,00 | 89,47 | 3,000 | 24.300.000 | 3623,55 | 17,89 | | |
| | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah** | **Persen** | **100,00** | **185.175.000,00** | **100,00** | **43.765.000,00** | **100** | **30.470.000** | **75** | **26.376.000** | **75,00** | **86,56** | **####** | **70.141.000** | **175,00** | **37,88** | | |
| | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan** | **Dokumen** | **114,00** | **60.175.000,00** | **-** | **43.765.000,00** | **38** | **5.470.000** | **10** | **1.720.000** | **26,32** | **31,44** | **10,000** | **45.485.000** | **8,77** | **75,59** | | |
| 1 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Eksemplar | 190,00 | 60.175.000,00 | 11,00 | 43.765.000,00 | 50 | 5.470.000 | 25 | 1.720.000 | 50,00 | 31,44 | 36,000 | 45.485.000 | 18,95 | 75,59 | | |
| | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia** | **Jenis** | **544,00** | **125.000.000,00** | **394,00** | **-** | **50** | **25.000.000** | **10** | **24.656.000** | **20,00** | **98,62** | **####** | **24.656.000** | **74,26** | **19,72** | | |
| 1 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | Eksemplar | 500,00 | 125.000.000,00 | - | - | 100 | 25.000.000 | 70 | 24.656.000 | 70,00 | 98,62 | 70,000 | 24.656.000 | 14,00 | 19,72 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku** | **Persen** | **100,00** | **578.700.000,00** | **40,00** | **61.546.835,00** | **50** | **115.740.000** | **45** | **82.795.560** | **90,00** | **71,54** | **85,000** | **144.342.395** | **85,00** | **24,94** | | |
| | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah** | **Dokumen** | **250,00** | **155.800.000,00** | **200,00** | **13.376.835,00** | **50** | **31.160.000** | **35** | **23.625.000** | **70,00** | **75,82** | **#####** | **37.001.835** | **94,00** | **23,75** | | |
| 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | Berkas | 250,00 | 39.700.000,00 | 100,00 | 819.000,00 | 50 | 7.940.000 | 35 | 2.555.000 | 70,00 | 32,18 | ##### | 3.374.000 | 54,00 | 8,50 | | |
| 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Berkas | 20,00 | 25.000.000,00 | - | - | 50 | 5.000.000 | 35 | 2.850.000 | 70,00 | 57,00 | 35,000 | 2.850.000 | 175,00 | 11,40 | | |
| 3 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 750,00 | 91.100.000,00 | 450,00 | 12.557.835,00 | 4 | 18.220.000 | 3 | 18.220.000 | 75,00 | 100,00 | ##### | 30.777.835 | 60,40 | 33,78 | | |
| | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah arsip statis yang dikelola perangkat daerah** | **Dokumen** | **250,00** | **156.500.000,00** | **50,00** | **-** | **150** | **31.300.000** | **100** | **31.290.560** | **66,67** | **99,97** | **#####** | **31.290.560** | **60,00** | **19,99** | | |
| 1 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan diisampaikan kepada ANRI | Arsip | 500,00 | 95.750.000,00 | - | - | 50 | 19.150.000 | 30 | 19.140.560 | 60,00 | 99,95 | 30,000 | 19.140.560 | 6,00 | 19,99 | | |
| 2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Arsip | 200,00 | 60.750.000,00 | - | - | 100 | 12.150.000 | 50 | 12.150.000 | 50,00 | 100,00 | 50,000 | 12.150.000 | 25,00 | 20,00 | | |
| | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Jumlah layanan terkiat pengelolaan kerasipan nasional tingkat kabupaten/kota** | **Layanan** | **#######** | **266.400.000,00** | **241,00** | **48.170.000,00** | **40** | **53.280.000** | **30** | **27.880.000** | **75,00** | **52,33** | **#####** | **76.050.000** | **3,14** | **28,55** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Penggunaa | 20,00 | 139.000.000,00 | 6,00 | 38.730.000,00 | 2799 | 27.800.000 | 1320 | 25.300.000 | 47,16 | 91,01 | ##### | 64.030.000 | 6630,00 | 46,06 | | |
| 2 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 500,00 | 127.400.000,00 | 300,00 | 9.440.000,00 | 4 | 25.480.000 | 4 | 2.580.000 | 100,00 | 10,13 | ##### | 12.020.000 | 60,80 | 9,43 | | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Dokumen Arsip Yang Diakuisisi dan Terpelihara** | **Persen** | **100,00** | **383.350.000,00** | **100,00** | **25.140.000,00** | **100** | **56.250.000** | **75** | **3.010.000** | **75,00** | **5,35** | **#####** | **28.150.000** | **175,00** | **7,34** | | |
| | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | **Jumlah jenis arsip referensi dibawah 10 (sepuluh tahun) yang di musnahkan** | **Dokumen** | **500,00** | **52.000.000,00** | **5,00** | - | **100** | **10.400.000** | **0** | **430.000** | **0,00** | **4,13** | **5,000** | **430.000** | **1,00** | **0,83** | | |
| 1 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Arsip | 200,00 | 52.000.000,00 | - | - | 100 | 10.400.000 | 0 | 430.000 | 0,00 | 4,13 | 0,000 | 430.000 | 0,00 | 0,83 | | |
| | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media yang teridentifikasi** | **Dokumen** | **200,00** | **205.650.000,00** | **2,00** | - | **40** | **41.130.000** | **25** | **2.580.000** | **62,50** | **6,27** | **27,000** | **2.580.000** | **13,50** | **1,25** | | |
| 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | Arsip | 200,00 | 205.650.000,00 | - | - | 40 | 41.130.000 | 25 | 2.580.000 | 62,50 | 6,27 | 25,000 | 2.580.000 | 12,50 | 1,25 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang** | **Jumlah arsip statis yang ditemukan** | **Dokumen** | **500,00** | **125.700.000,00** | **-** | **25.140.000,00** | **40** | **4.720.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **25.140.000** | **0,00** | **20,00** | | |
| 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | Arsip | 100,00 | 125.700.000,00 | 20,00 | 25.140.000,00 | 100 | 4.720.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,000 | 25.140.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **Persentase Arsip Yang Menjadi bahan Informasi** | **Persen** | **100,00** | **90.800.000,00** | **-** | **-** | **100** | **18.160.000** | **100** | **9.990.000** | **100,00** | **55,01** | **#####** | **9.990.000** | **100,00** | **11,00** | | |
| | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota** | **Jumlah izin penggunaan arsip tertutup yang dikeluarkan** | **Dokumen** | **100,00** | **90.800.000,00** | **-** | **-** | **20** | **18.160.000** | **5** | **9.990.000** | **25,00** | **55,01** | **5,000** | **9.990.000** | **5,00** | **11,00** | | |
| 1 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Arsip | 100,00 | 90.800.000,00 | - | - | 20 | 18.160.000 | 5 | 9.990.000 | 25,00 | 55,01 | 5,000 | 9.990.000 | 5,00 | 11,00 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **39.258.816.415,00** | **100,00** | **23.555.289.849,00** | **100** | **15.500.000** | **99,34** | **15.396.000** | **99,34** | **99,33** | **199,34** | **23.570.685.849** | **199,34** | **60,04** | **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **120,00** | **77.500.000,00** | **72,00** | **46.500.000,00** | **24** | **1.865.000** | **24** | **1.865.000** | **100,00** | **100,00** | **96** | **48.365.000** | **80,00** | **62,41** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 9.325.000,00 | 6,00 | 5.595.000,00 | 2 | 4.210.000 | 2 | 4.210.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 9.805.000 | 80,00 | 105,15 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 21.050.000,00 | 3,00 | 12.630.000,00 | 1 | 2.685.000 | 1 | 2.665.000 | 100,00 | 99,26 | 4 | 15.295.000 | 80,00 | 72,66 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.425.000,00 | 3,00 | 8.055.000,00 | 1 | 2.785.000 | 1 | 2.785.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 10.840.000 | 80,00 | 80,74 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 13.925.000,00 | 3,00 | 8.355.000,00 | 1 | 2.125.000 | 1 | 2.125.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 10.480.000 | 80,00 | 75,26 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.625.000,00 | 3,00 | 6.375.000,00 | 1 | 905.000 | 1 | 821.000 | 100,00 | 90,72 | 4 | 7.196.000 | 80,00 | 67,73 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 30,00 | 4.525.000,00 | 18,00 | 2.715.000,00 | 6 | 925.000 | 6 | 925.000 | 100,00 | 100,00 | 24 | 3.640.000 | 80,00 | 80,44 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60,00 | 4.625.000,00 | 36,00 | 2.775.000,00 | 12 | 5.520.487.191 | 12 | 4.997.276.479 | 100,00 | 90,52 | 48 | 5.000.051.479 | 80,00 | ###### | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **220,00** | **27.906.821.415,00** | **132,00** | **16.744.092.849,00** | **44** | **5.354.337.691** | **44** | **4.836.375.479** | **100,00** | **90,33** | **176** | **21.580.468.328** | **80,00** | **77,33** | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ###### | 27.076.073.915,00 | 2.688,00 | 16.245.644.349,00 | 812 | 163.460.000 | 812 | 158.290.000 | 100,00 | 96,84 | 3500 | 16.403.934.349 | 78,13 | 60,58 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 817.300.000,00 | 36,00 | 490.380.000,00 | 12 | 2.689.500 | 12 | 2.611.000 | 100,00 | 97,08 | 48 | 492.991.000 | 80,00 | 60,32 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 13.447.500,00 | 54,00 | 8.068.500,00 | 18 | 3.554.000 | 18 | 3.539.000 | 100,00 | 99,58 | 72 | 11.607.500 | 80,00 | 86,32 | | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **65,00** | **17.770.000,00** | **39,00** | **10.662.000,00** | **13** | **1.640.000** | **13** | **1.634.000** | **100,00** | **99,63** | **52** | **12.296.000** | **80,00** | **69,20** | | |
| | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 5,00 | 8.200.000,00 | 3,00 | 4.920.000,00 | 1 | 1.914.000 | 1 | 1.905.000 | 100,00 | 99,53 | 4 | 6.825.000 | 80,00 | 83,23 | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 60,00 | 9.570.000,00 | 36,00 | 5.742.000,00 | 12 | 17.991.000 | 12 | 17.956.000 | 100,00 | 99,81 | 48 | 23.698.000 | 80,00 | 247,63 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **295,00** | **89.955.000,00** | **177,00** | **53.973.000,00** | **58** | **14.800.000** | **58** | **14.800.000** | **100,00** | **100,00** | **235** | **68.773.000** | **79,66** | **76,45** | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5,00 | 74.000.000,00 | 3,00 | 44.400.000,00 | 1 | 1.586.000 | 1 | 1.551.000 | 100,00 | 97,79 | 4 | 45.951.000 | 80,00 | 62,10 | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 295,00 | 7.930.000,00 | 177,00 | 4.758.000,00 | 58 | 1.605.000 | 58 | 1.605.000 | 100,00 | 100,00 | 235 | 6.363.000 | 79,66 | 80,24 | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 295,00 | 8.025.000,00 | 177,00 | 4.815.000,00 | 58 | 353.272.000 | 58 | 204.223.195 | 100,00 | 57,81 | 235 | 209.038.195 | 79,66 | 2604,84 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **1.693.460.000,00** | **6,00** | **1.016.076.000,00** | **6** | **10.014.000** | **5** | **9.243.000** | **83,33** | **92,30** | **11** | **1.025.319.000** | **183,33** | **60,55** | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 50.070.000,00 | 3,00 | 30.042.000,00 | 1 | 61.238.000 | 1,00 | 45.610.000 | 100,00 | 74,48 | 4,00 | 75.652.000 | 80,00 | 151,09 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10,00 | 306.190.000,00 | 6,00 | 183.714.000,00 | 2 | 45.000.000 | 2,00 | 27.100.000 | 100,00 | 60,22 | 8,00 | 210.814.000 | 80,00 | 68,85 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 225.000.000,00 | 3,00 | 135.000.000,00 | 1 | 5.000.000 | 1,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4,00 | 135.000.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 10,00 | 50.000.000,00 | 6,00 | 30.000.000,00 | 2 | 96.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 | 54,17 | 6 | 82.000.000 | 60,00 | 164,00 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | ########## | 480.000.000,00 | 900,00 | 288.000.000,00 | 300 | 136.020.000 | 225 | 70.270.195 | 75,00 | 51,66 | 1125 | 358.270.195 | 75,00 | 74,64 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 895,00 | 582.200.000,00 | 537,00 | 349.320.000,00 | 179 | 65.500.000 | 134 | 64.870.000 | 75,00 | 99,04 | 671 | 414.190.000 | 75,00 | 71,14 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **1,00** | **252.500.000,00** | **1,00** | **151.500.000,00** | **1** | **65.500.000** | **1** | **64.870.000** | **100,00** | **99,04** | **2** | **216.370.000** | **200,00** | **85,69** | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 25,00 | 252.500.000,00 | 15,00 | 151.500.000,00 | 5 | 1.732.212.000 | 5 | 1.453.914.000 | 100,00 | 83,93 | 20 | 1.605.414.000 | 80,00 | 635,81 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **8.620.810.000,00** | **2,00** | **5.172.486.000,00** | **2** | **12.012.000** | **2,00** | **10.164.000** | **100,00** | **84,62** | **4,00** | **5.182.650.000** | **200,00** | **60,12** | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 5,00 | 60.060.000,00 | 3,00 | 36.036.000,00 | 1 | 1.720.200.000 | 1,00 | 1.443.750.000 | 100,00 | 83,93 | 4,00 | 1.479.786.000 | 80,00 | 2463,85 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 8.560.750.000,00 | 36,00 | 5.136.450.000,00 | 12 | 152.629.000 | 12 | 131.304.163 | 100,00 | 86,03 | 48 | 5.267.754.163 | 80,00 | 61,53 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **3,00** | **600.000.000,00** | **3,00** | **360.000.000,00** | **3** | **50.000.000** | **3** | **31.730.000** | **100,00** | **63,46** | **6** | **391.730.000** | **200,00** | **65,29** | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 95,00 | 250.000.000,00 | 57,00 | 150.000.000,00 | 3 | 40.000.000 | 3 | 37.770.000 | 100,00 | 94,43 | 60 | 187.770.000 | 63,16 | 75,11 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 120,00 | 200.000.000,00 | 72,00 | 120.000.000,00 | 24 | 62.629.000 | 24 | 61.804.163 | 100,00 | 98,68 | 96 | 181.804.163 | 80,00 | 90,90 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 130,00 | 150.000.000,00 | 78,00 | 90.000.000,00 | 26 | 101.040.000 | 26,00 | 85.612.000 | 100,00 | 84,73 | 104,00 | 175.612.000 | 80,00 | 117,07 | | |
| | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah** | **Persen** | **100,00** | **67.700.000,00** | **90,00** | **26.571.000,00** | **90** | **13.540.000** | **100** | **0** | **111,11** | **0,00** | **190** | **26.571.000** | **190,00** | **39,25** | | |
| | **Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Junlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pemabntu dan kantor kas yang direrbitkan** | **Dokumen** | **935,00** | **67.700.000,00** | **254,00** | **26.571.000,00** | **187** | **13.540.000** | **77** | **0** | **41,18** | **0,00** | **331** | **26.571.000** | **35,40** | **39,25** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 935,00 | 67.700.000,00 | 18,75 | 45.812.000,00 | 187 | 13.540.000 | 77 | 0 | 41,18 | 0,00 | 95,75 | 45.812.000 | 10,24 | 67,67 | | |
| | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase koperasi berkategori sehat** | **Persen** | **75,00** | **106.500.000,00** | **58,00** | **19.853.000,00** | **72,27** | **21.300.000** | **18,73** | **21.210.000** | **25,92** | **99,58** | **76,73** | **41.063.000** | **102,31** | **38,56** | | |
| | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah koperasi simpan pinjam berkategori sehat** | **Unit** | **353,00** | **106.500.000,00** | **145,00** | **19.853.000,00** | **66** | **21.300.000** | **47** | **21.210.000** | **71,21** | **99,58** | **192** | **41.063.000** | **54,39** | **38,56** | | |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | ########## | 106.500.000,00 | 16,85 | 19.853.000,00 | 353 | 21.300.000 | 50 | 21.210.000 | 14,16 | 99,58 | 66,85 | 41.063.000 | 3,79 | 38,56 | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase koperasi aktif** | **Persen** | **75,00** | **331.000.000,00** | **33,00** | **198.600.000,00** | **71,62** | **66.200.000** | **46,61** | **64.402.000** | **65,08** | **97,28** | **79,61** | **263.002.000** | **106,15** | **79,46** | | |
| | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan koperasi** | **Unit** | **300,00** | **331.000.000,00** | **54,00** | **198.600.000,00** | **50** | **66.200.000** | **117** | **64.402.000** | **234,00** | **97,28** | **171** | **263.002.000** | **57,00** | **79,46** | | |
| | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 500,00 | 331.000.000,00 | 27,00 | 198.600.000,00 | 100 | 66.200.000 | 50 | 64.402.000 | 50,00 | 97,28 | 77 | 263.002.000 | 15,40 | 79,46 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM** | **Persentase Usaha Mikro dan Kecil** | **Persen** | **98,00** | **2.461.592.550,00** | **90,00** | **641.353.550,00** | **100** | **736.619.000** | **99,46** | **649.511.646** | **99,46** | **88,17** | **189** | **1.290.865.196** | **193,33** | **52,44** | | |
| | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha** | **Unit** | **########** | **2.461.592.550,00** | **188,00** | **641.353.550,00** | **33475** | **736.619.000** | **1419** | **649.511.646** | **4,24** | **88,17** | **1607** | **1.290.865.196** | **0,96** | **52,44** | | |
| 1 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Unit Usaha | 300,00 | 143.645.000,00 | - | - | 60 | 78.729.000 | 50 | 78.452.000 | 83,33 | 99,65 | 50 | 78.452.000 | 16,67 | 54,62 | | |
| 2 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | Unit Usaha | ########## | 803.137.550,00 | 2.034,00 | 491.353.550,00 | 1400 | 103.928.000 | 323 | 103.594.000 | 23,07 | 99,68 | 2.357 | 594.947.550 | 37,81 | 74,08 | | |
| 3 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Unit Usaha | 500,00 | 250.000.000,00 | - | - | 100 | 350.000.000 | 515 | 338.852.646 | 515,00 | 96,82 | 515 | 338.852.646 | 103,00 | 135,54 | | |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang | 500,00 | 125.450.000,00 | - | - | 100 | 25.090.000 | 431 | 0 | 431,00 | 0,00 | 431 | 0 | 86,20 | 0,00 | | |
| 5 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 500,00 | 720.000.000,00 | - | - | 100 | 95.000.000 | 100 | 94.800.000 | 100,00 | 99,79 | 100 | 94.800.000 | 20,00 | 13,17 | | |
| 6 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Unit Usaha | ########## | 169.360.000,00 | - | - | 33475 | 33.872.000 | 34954 | 33.813.000 | 104,42 | 99,83 | 34954 | 33.813.000 | 20,88 | 19,97 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Orang | 500,00 | 250.000.000,00 | 11,13 | 150.000.000,00 | 100 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 150.000.000 | 2,23 | 60,00 | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat** | **Persen** | **15,00** | **27.300.000,00** | **5,00** | **-** | **100** | **1.035.827.671** | **92,88** | **958.361.050** | **92,88** | **92,52** | **97,88** | **958.361.050** | **652,53** | **3510,48** | | |
| | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Jumlah pasar sehat yang terbangun dan dikelola** | **Unit** | **5,00** | **27.300.000,00** | **-** | **-** | **25** | **1.035.827.671** | **21** | **958.361.050** | **84,00** | **92,52** | **21** | **958.361.050** | **420,00** | **3510,48** | | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 200,00 | 27.300.000,00 | - | - | 25 | 1.035.827.671 | 25 | 958.361.050 | 100,00 | 92,52 | 25 | 958.361.050 | 12,50 | 3510,48 | | |
| | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran** | **Persen** | **100,00** | **4.579.138.355,00** | **100,00** | **2.110.737.720,00** | **100** | **25.985.000** | **100** | **25.773.000** | **100,00** | **99,18** | **200** | **2.136.510.720** | **200,00** | **46,66** | | |
| | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah kenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediaannya** | **Jenis** | **25,00** | **4.579.138.355,00** | **25,00** | **2.110.737.720,00** | **22** | **7.300.000** | **22** | **7.273.000** | **100,00** | **99,63** | **47** | **2.118.010.720** | **188,00** | **46,25** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 125,00 | 4.579.138.355,00 | - | - | 243 | 7.300.000 | 238 | 7.273.000 | 97,94 | 99,63 | 238 | 7.273.000 | 190,40 | 0,16 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **Jumlah kenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkandali harganya** | **Jenis** | **100,00** | **129.925.000,00** | **-** | **38.403.500,00** | **22** | **12.535.000** | **22** | **12.365.000** | **100,00** | **98,64** | **22** | **50.768.500** | **22,00** | **39,08** | | |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 22,00 | 36.500.000,00 | - | 14.075.500,00 | 250 | 7.850.000 | 138 | 7.785.000 | 55,20 | 99,17 | 138 | 21.860.500 | 627,27 | 59,89 | | |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | ######## | 36.500.000,00 | 22,00 | 14.075.500,00 | 12 | 4.685.000 | 6 | 4.580.000 | 50,00 | 97,76 | 28 | 18.655.500 | 2,30 | 51,11 | | |
| | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Junlah pupuk dan pestisida yang diawasi penyalurannya** | **Kg** | **22,00** | **62.675.000,00** | **22,00** | **12.164.000,00** | **7** | **6.150.000** | **35954** | **6.135.000** | **513628,57** | **99,76** | **35976** | **18.299.000** | **163527,27** | **29,20** | | |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | ######## | 39.250.000,00 | - | - | 84 | 6.150.000 | 42 | 6.135.000 | 50,00 | 99,76 | 42 | 6.135.000 | 3,36 | 15,63 | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan** | **Persen** | **60,00** | **23.425.000,00** | **22,00** | **12.164.000,00** | **0,99** | **5.460.000** | **5,09** | **5.445.000** | **514,14** | **99,73** | **27,09** | **17.609.000** | **45,15** | **75,17** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran dagang dan misi dagang** | **Jenis** | | **30.750.000,00** | **175,00** | **12.164.000,00** | **11** | **5.460.000** | **11** | **5.445.000** | **100,00** | **99,73** | **186** | **17.609.000** | **0,00** | **57,27** | | |
| | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | 420,00 | 30.750.000,00 | - | 12.164.000,00 | 2 | 5.460.000 | 2 | 5.445.000 | 100,00 | 99,73 | 2 | 17.609.000 | 0,48 | 57,27 | | |
| | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen** | **Persen** | **100,00** | **357.650.000,00** | **89,00** | **27.347.000,00** | **90** | **67.350.000** | **0** | **51.356.323** | **0,00** | **76,25** | **89** | **78.703.323** | **89,00** | **22,01** | | |
| | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **Jumlah unit usaha perdagangan yang memiliki cap tanda tera** | **Unit** | **########** | **357.650.000,00** | **2.554,00** | **27.347.000,00** | **570** | **67.350.000** | **654** | **51.356.323** | **114,74** | **76,25** | **3.208** | **78.703.323** | **112,56** | **22,01** | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang , dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | ######## | 291.650.000,00 | 1.389,00 | 27.347.000,00 | 943 | 54.150.000 | 1006 | 38.598.323 | 106,68 | 71,28 | 2.395 | 65.945.323 | 50,80 | 22,61 | | |
| | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Orang | 440,00 | 66.000.000,00 | - | - | 88 | 13.200.000 | 116 | 12.758.000 | 131,82 | 96,65 | 116 | 12.758.000 | 26,36 | 19,33 | | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri** | **Persen** | **100,00** | **14.589.791.557,00** | **100,00** | **11.277.571.786,00** | **100** | **972.342.257** | **95** | **972.342.257** | **95,00** | **100,00** | **195** | **12.249.914.043** | **195,00** | **83,96** | | |
| | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW** | **Ha** | **200,00** | **14.589.791.557,00** | **200,00** | **11.277.571.786,00** | **200** | **972.342.257** | **650** | **972.342.257** | **325,00** | **100,00** | **850** | **12.249.914.043** | **425,00** | **83,96** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 15,00 | 12.754.901.557,00 | 9,00 | 11.277.571.786,00 | 3 | 610.443.257 | 3 | 610.443.257 | 100,00 | 100,00 | 12 | 11.888.015.043 | 80,00 | 93,20 | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 9,00 | 1.834.890.000,00 | - | - | 3 | 361.899.000 | 3 | 361.899.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | 361.899.000 | 33,33 | 19,72 | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional** | **Persen** | **100,00** | **146.100.000,00** | **90,00** | **4.326.000,00** | **90** | **29.220.000** | **95** | **29.220.000** | **105,56** | **100,00** | **185** | **33.546.000** | **185,00** | **22,96** | | |
| | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah data industri terkait IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang tersedia dan dianalisis** | **Jenis** | **5,00** | **146.100.000,00** | **2,00** | **4.326.000,00** | **1** | **29.220.000** | **1** | **29.220.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **33.546.000** | **60,00** | **22,96** | | |
| | "Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas " | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen | 5,00 | 146.100.000,00 | 2,00 | 4.326.000,00 | 1 | 29.220.000 | 1 | 29.220.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | 33.546.000 | 60,00 | 22,96 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **99.534.032.435,00** | **100,00** | **59.720.419.461,00** | **100** | **20.068.185.885** | **100** | **18.697.734.687** | **100,0** | **93,17** | **200** | **78.418.154.148** | **200,00** | **78,79** | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | **#REF!** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **105,00** | **94.485.000,00** | **63,00** | **56.691.000,00** | **3** | **18.897.000** | **3** | **13.758.500** | **100,0** | **72,81** | **66** | **70.449.500** | **62,86** | **74,56** | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 25.700.000,00 | 3,00 | 15.420.000,00 | 3 | 5.140.000 | 3 | 2.984.000 | 100,0 | 58,05 | 6 | 18.404.000 | 120,00 | 71,61 | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 4.450.000,00 | 3,00 | 2.670.000,00 | 1 | 890.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 4 | 2.670.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.595.000,00 | 3,00 | 3.957.000,00 | 1 | 1.319.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 4 | 3.957.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.275.000,00 | 3,00 | 1.965.000,00 | 1 | 655.000 | 1 | 600.000 | 100,0 | 91,60 | 4 | 2.565.000 | 80,00 | 78,32 | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 4.995.000,00 | 3,00 | 2.997.000,00 | 1 | 999.000 | 1 | 914.000 | 100,0 | 91,49 | 4 | 3.911.000 | 80,00 | 78,30 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60,00 | 37.030.000,00 | 36,00 | 22.218.000,00 | 8 | 7.406.000 | 8 | 6.970.000 | 100,0 | 94,11 | 44 | 29.188.000 | 73,33 | 78,82 | | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 12.440.000,00 | 12,00 | 7.464.000,00 | 4 | 2.488.000 | 4 | 2.290.500 | 100,0 | 92,06 | 16 | 9.754.500 | 80,00 | 78,41 | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **285,00** | **96.307.612.030,00** | **171,00** | **57.784.567.218,00** | **1** | **18.776.654.604** | **1** | **17.822.007.287** | **100,0** | **94,92** | **172** | **75.606.574.505** | **60,35** | **78,51** | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 95.254.487.030,00 | 8.820,00 | 57.152.692.218,00 | 2.496 | 18.566.029.604 | 2.496 | 17.630.057.287 | 100,0 | 94,96 | 11.316 | 74.782.749.505 | 76,98 | 78,51 | | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 1.043.850.000,00 | 36,00 | 626.310.000,00 | 12 | 208.770.000 | 12 | 191.950.000 | 100,0 | 91,94 | 48 | 818.260.000 | 80,00 | 78,39 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 3.375.000,00 | 3,00 | 2.025.000,00 | 1 | 675.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 4 | 2.025.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 4.250.000,00 | 54,00 | 2.550.000,00 | 18 | 850.000 | 18 | 0 | 100,0 | 0,00 | 72 | 2.550.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| 5 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 60,00 | 1.650.000,00 | 36,00 | 990.000,00 | 12 | 330.000 | 12 | 0 | 100,0 | 0,00 | 48 | 990.000 | 80,00 | 60,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **2.000.000,00** | **3,00** | **1.200.000,00** | **1** | **400.000** | **1** | **275.000** | **100,0** | **68,75** | **4** | **1.475.000** | **80,00** | **73,75** | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 2.000.000,00 | 3,00 | 1.200.000,00 | 4 | 400.000 | 4 | 275.000 | 100,0 | 68,75 | 7 | 1.475.000 | 140,00 | 73,75 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **########** | **2.549.420.405,00** | **624,00** | **1.529.652.243,00** | **20** | **12.750.000** | **20** | **12.750.000** | **100,0** | **100,00** | **644** | **1.542.402.243** | **61,92** | **60,50** | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 255,00 | 63.750.000,00 | 153,00 | 38.250.000,00 | 51 | 12.750.000 | 51 | 12.750.000 | 100,0 | 100,00 | 204 | 51.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **9,00** | **2.485.670.405,00** | **9,00** | **1.491.402.243,00** | **1** | **482.728.081** | **1** | **177.534.950** | **100,0** | **36,78** | **10** | **1.668.937.193** | **111,11** | **67,14** | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 8.015.000,00 | 3,00 | 4.809.000,00 | 1 | 1.603.000 | 1 | 1.505.000 | 100,0 | 93,89 | 4 | 6.314.000 | 80,00 | 78,78 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 7.500.000,00 | 3,00 | 4.500.000,00 | 1 | 1.500.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 4 | 4.500.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 41.000.000,00 | 3,00 | 24.600.000,00 | 1 | 8.200.000 | 1 | 6.299.500 | 100,0 | 76,82 | 4 | 30.899.500 | 80,00 | 75,36 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 60,00 | 177.105.405,00 | 36,00 | 106.263.243,00 | 12 | 35.421.081 | 12 | 29.357.000 | 100,0 | 82,88 | 48 | 135.620.243 | 80,00 | 76,58 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 70.100.000,00 | 3,00 | 42.060.000,00 | 14 | 14.020.000 | 14 | 12.325.000 | 100,0 | 87,91 | 17 | 54.385.000 | 340,00 | 77,58 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 12 | 35.000.000 | 12 | 31.805.000 | 100,0 | 90,87 | 15 | 61.805.000 | 300,00 | 123,61 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 175.000.000,00 | 36,00 | 105.000.000,00 | 12 | 386.984.000 | 12 | 96.243.450 | 100,0 | 24,87 | 48 | 201.243.450 | 80,00 | 115,00 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60,00** | **1.956.950.000,00** | **36,00** | **1.174.170.000,00** | **103** | **79.540.200** | **103** | **56.800.000** | **100,0** | **71,41** | **139** | **1.230.970.000** | **231,67** | **62,90** | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2,00 | 327.500.000,00 | 2,00 | 196.500.000,00 | 3 | 12.280.200 | 3 | 0 | 100,0 | 0,00 | 5 | 196.500.000 | 250,00 | 60,00 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10,00 | 327.500.000,00 | 6,00 | 196.500.000,00 | 35 | 67.260.000 | 35 | 56.800.000 | 100,0 | 84,45 | 41 | 253.300.000 | 410,00 | 77,34 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **3.101.500.000,00** | **2,00** | **1.860.900.000,00** | **2** | **633.300.000** | **2** | **552.240.000** | **100,0** | **87,20** | **4** | **2.413.140.000** | **200,00** | **77,81** | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 45.000.000,00 | 36,00 | 27.000.000,00 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 100,0 | 100,00 | 48 | 36.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 3.056.500.000,00 | 36,00 | 1.833.900.000,00 | 12 | 624.300.000 | 12 | 543.240.000 | 100,0 | 87,02 | 48 | 2.377.140.000 | 80,00 | 77,77 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **3,00** | **314.975.000,00** | **3,00** | **188.985.000,00** | **3** | **63.916.000** | **3** | **62.368.950** | **100,0** | **97,58** | **6** | **251.353.950** | **200,00** | **79,80** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 15,00 | 200.000.000,00 | 9,00 | 120.000.000,00 | 3 | 40.000.000 | 3 | 39.913.950 | 100,0 | 99,78 | 12 | 159.913.950 | 80,00 | 79,96 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 175,00 | 75.000.000,00 | 105,00 | 45.000.000,00 | 35 | 15.921.000 | 35 | 14.460.000 | 100,0 | 90,82 | 140 | 59.460.000 | 80,00 | 79,28 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 39.975.000,00 | 3,00 | 23.985.000,00 | 1 | 7.995.000 | 1 | 7.995.000 | 100,0 | 100,00 | 4 | 31.980.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan** | **Persentase Ketersediaan Pangan Utama** | **Persen** | **100,00** | **10.745.000,00** | **27,67** | **6.447.000,00** | **35,7** | **2.149.000** | **100** | **0** | **280,1** | **0,00** | **127,7** | **6.447.000** | **127,67** | **60,00** | | |
| | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia** | **Unit** | **5,00** | **10.745.000,00** | **3,00** | **6.447.000,00** | **1** | **2.149.000** | **10** | **0** | **1000,0** | **0,00** | **13** | **6.447.000** | **260,00** | **60,00** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Laporan | 5,00 | 10.745.000,00 | 3,00 | 6.447.000,00 | 1 | 2.149.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 4 | 6.447.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | **Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat** | **Ketersediaan energi dan protein perkapita** | **kkal/kapita/hari** | **340,60** | **1.616.345.000,00** | **34,06** | **75.821.800,00** | **68,12** | **298.434.000** | **68,12** | **220.874.000** | **100,0** | **74,01** | **102,2** | **296.695.800** | **30,00** | **18,36** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan** | **Jumlah jenis bahan pokok atau pangan lainnya yang tersedia dan tersalurkan** | **Jenis** | **40,00** | **823.575.000,00** | **6,00** | **53.774.200,00** | **11** | **157.963.000** | **11** | **91.086.000** | **100,0** | **57,66** | **17** | **144.860.200** | **42,50** | **17,59** | | |
| 1 | Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia | Laporan | 5,00 | 81.685.000,00 | 1,00 | 25.703.200,00 | 1 | 16.337.000 | 1 | 15.787.000 | 100,0 | 96,63 | 2 | 41.490.200 | 40,00 | 50,79 | | |
| 2 | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | Unit | 5,00 | 71.040.000,00 | 5,00 | 28.071.000,00 | 1 | 14.208.000 | 1 | 460.000 | 100,0 | 3,24 | 6 | 28.531.000 | 120,00 | 40,16 | | |
| 3 | Peningkatan ketahanan pangan keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga | ########## | 92.775.000,00 | - | - | 250 | 18.555.000 | 250 | 2.720.000 | 100,0 | 14,66 | 250 | 2.720.000 | 20,00 | 2,93 | | |
| 4 | Pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | Unit | 20,00 | 30.240.000,00 | - | - | 4 | 6.048.000 | 4 | 216.000 | 100,0 | 3,57 | 4 | 216.000 | 20,00 | 0,71 | | |
| 5 | Pemantauan stok pangan | Informasi Stok Pangan | Dokumen | 20,00 | 223.450.000,00 | - | - | 4 | 44.690.000 | 4 | 43.245.000 | 100,0 | 96,77 | 4 | 43.245.000 | 20,00 | 19,35 | | |
| 6 | Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | Laporan | 5,00 | 51.660.000,00 | - | - | 1 | 3.580.000 | 1 | 3.580.000 | 100,0 | 100,00 | 1 | 3.580.000 | 20,00 | 6,93 | | |
| 7 | Koordinasi dan sinkronisasi pemanatauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | Laporan | 15,00 | 169.370.000,00 | - | - | 3 | 33.874.000 | 3 | 25.078.000 | 100,0 | 74,03 | 3 | 25.078.000 | 20,00 | 14,81 | | |
| 8 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Dokumen | 5,00 | 103.355.000,00 | - | - | 1 | 20.671.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupateb/kota** | **Jumlah cadangan pangan yang tersedia** | **Ton** | **100,00** | **480.000.000,00** | **-** | **-** | **20** | **102.597.000** | **18** | **98.004.000** | **90,0** | **95,52** | **18** | **98.004.000** | **18,00** | **20,42** | | |
| 1 | Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Ton | 100,00 | 480.000.000,00 | - | - | 20 | 102.597.000 | 20 | 98.004.000 | 100,0 | 95,52 | 20 | 98.004.000 | 0,00 | 20,42 | | |
| | **Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi** | **Jumlah ketersediaan pangan** | **kkal/kapita/hari** | **538,50** | **312.770.000,00** | **158,72** | **22.047.600,00** | **107** | **37.874.000** | **107** | **31.784.000** | **100,0** | **83,92** | **265,7** | **53.831.600** | **49,34** | **17,21** | | |
| | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Dokumen | 5,00 | 194.470.000,00 | - | - | 1 | 15.234.000 | 1 | 14.724.000 | 100,0 | 96,65 | 1 | 14.724.000 | 20,00 | 7,57 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumer daya loka | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Laporan | 5,00 | 17.000.000,00 | 3,00 | 10.200.000,00 | 1 | 2.380.000 | 1 | 2.380.000 | 100,0 | 100,00 | 4 | 12.580.000 | 80,00 | 74,00 | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Laporan | 5,00 | 101.300.000,00 | 1,00 | 11.847.600,00 | 1 | 20.260.000 | 1 | 14.680.000 | 100,0 | 72,46 | 2 | 26.527.600 | 40,00 | 26,19 | | |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | Persen | 100,00 | 213.095.000,00 | 98,00 | 20.247.500,00 | 100 | 42.609.000 | 100 | 32.270.000 | 100,0 | 75,74 | 198 | 52.517.500 | 198,00 | 24,65 | | |
| | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik** | **Kecamatan** | **14,00** | **134.215.000,00** | **14,00** | **20.247.500,00** | **14** | **26.843.000** | **14** | **25.122.000** | **100,0** | **93,59** | **28** | **45.369.500** | **200,00** | **33,80** | | |
| | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | Dokumen | 5,00 | 134.215.000,00 | 2,00 | 20.247.500,00 | 14 | 26.843.000 | 14 | 25.122.000 | 100,0 | 93,59 | 16 | 45.369.500 | 320,00 | 33,80 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang tertangani** | **Desa / Kelurahan** | **103,00** | **78.880.000,00** | **103,00** | **-** | **103** | **15.766.000** | **103** | **7.148.000** | **100,0** | **45,34** | **206** | **7.148.000** | **200,00** | **9,06** | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Laporan | 5,00 | 78.880.000,00 | - | - | 103 | 15.766.000 | 103 | 7.148.000 | 100,0 | 45,34 | 103 | 7.148.000 | 2060,00 | 9,06 | | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan** | **Persen** | **100,00** | **377.605.000,00** | **71,93** | **54.136.400,00** | **100** | **75.521.000** | **100** | **16.390.000** | **100,0** | **21,70** | **171,9** | **70.526.400** | **171,93** | **18,68** | | |
| | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pangan ssegar yang memnuhi syarat keamanan pangan** | **jenis** | **70,00** | **377.605.000,00** | **20,00** | **54.136.400,00** | **2** | **75.521.000** | **1** | **16.390.000** | **50,0** | **21,70** | **21** | **70.526.400** | **30,00** | **18,68** | | |
| | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 5,00 | 156.347.000,00 | - | - | 1 | 31.269.400 | 1 | 16.390.000 | 100,0 | 52,42 | 1 | 16.390.000 | 20,00 | 10,48 | | |
| | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokuman | 5,00 | 221.258.000,00 | - | - | 1 | 44.251.600 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar** | **Ton/Ha** | **260,00** | **11.029.220.350,00** | **24,87** | **9.472.310.590,00** | **5** | **579.344.700** | **5** | **415.737.200** | **100,0** | **71,76** | **29,87** | **9.888.047.790** | **11,49** | **89,65** | | |
| | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Jumlah jenis sarana pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan produksi pertanian** | **Jenis** | **30,00** | **8.711.781.850,00** | **9,00** | **8.481.430.850,00** | **5** | **115.857.000** | **5** | **105.003.000** | **100,0** | **90,63** | **14** | **8.586.433.850** | **46,67** | **98,56** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 5,00 | 3.182.972.850,00 | 2,00 | 3.109.312.350,00 | 1 | 75.553.500 | 1 | 75.063.000 | 100,0 | 99,35 | 3 | 3.184.375.350 | 60,00 | 100,04 | | |
| 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Laporan | 10,00 | 5.439.359.000,00 | 4,00 | 5.372.118.500,00 | 2 | 22.413.500 | 2 | 21.420.000 | 100,0 | 95,57 | 6 | 5.393.538.500 | 60,00 | 99,16 | | |
| 3 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Laporan | 10,00 | 34.100.000,00 | - | - | 2 | 6.820.000 | 2 | 0 | 100,0 | 0,00 | 2 | 0 | 20,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan | Laporan | 10,00 | 29.850.000,00 | - | - | 2 | 5.970.000 | 2 | 5.970.000 | 100,0 | 100,00 | 2 | 5.970.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| 5 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Laporan | 10,00 | 25.500.000,00 | - | - | 2 | 5.100.000 | 2 | 2.550.000 | 100,0 | 50,00 | 2 | 2.550.000 | 20,00 | 10,00 | | |
| | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme yang tersedia** | **Jenis** | **1,00** | **580.156.000,00** | **1,00** | **563.736.040,00** | **1** | **146.031.200** | **1** | **127.182.200** | **100,0** | **87,09** | **2** | **690.918.240** | **200,00** | **119,09** | | |
| 1 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG /Tanaman | Dokumen | 5,00 | 580.156.000,00 | 1,00 | 563.736.040,00 | 1 | 146.031.200 | 1 | 127.182.200 | 100,0 | 87,09 | 2 | 690.918.240 | 40,00 | 119,09 | | |
| | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah benih/binit ternak yang diawasi dan di kendalikan** | **Ekor** | **15,00** | **820.997.500,00** | **5,00** | **198.335.600,00** | **3** | **134.199.500** | **3** | **11.560.000** | **100,0** | **8,61** | **8** | **209.895.600** | **53,33** | **25,57** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar | Ekor | ######## | 820.997.500,00 | 1.789,00 | 198.335.600,00 | 750 | 134.199.500 | 750 | 11.560.000 | 100,0 | 8,61 | ####### | 209.895.600 | 67,71 | 25,57 | | |
| | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan** | **Jenis** | **25,00** | **916.285.000,00** | **5,00** | **228.808.100,00** | **2** | **183.257.000** | **2** | **171.992.000** | **100,0** | **93,85** | **7** | **400.800.100** | **28,00** | **43,74** | | |
| 1 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Ekor | ######## | 916.285.000,00 | 1.718,00 | 228.808.100,00 | 611 | 183.257.000 | 611 | 171.992.000 | 100,0 | 93,85 | ####### | 400.800.100 | 40,72 | 43,74 | | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB** | **Persen** | **45,00** | **13.469.185.000,00** | **42,50** | **-** | **35** | **2.908.322.740** | **35** | **2.625.707.213** | **100,0** | **90,28** | **77,5** | **2.625.707.213** | **172,22** | **19,49** | | |
| | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Jumlah prasarana pertanian dan dikembangkan** | **Unit** | **10,00** | **469.185.000,00** | **6,00** | **-** | **2** | **93.837.000** | **2** | **42.407.500** | **100,0** | **45,19** | **8** | **42.407.500** | **80,00** | **9,04** | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Laporan | 5,00 | 219.185.000,00 | - | - | 1 | 43.837.000 | 1 | 42.407.500 | 100,0 | 96,74 | 1 | 42.407.500 | 20,00 | 19,35 | | |
| 2 | "Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota" | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dokumen | 5,00 | 250.000.000,00 | - | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | | |
| | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Jumlah prasarana pertanian yang dibangun** | **Unit** | **10,00** | **13.000.000.000,00** | **8,00** | **-** | **11** | **2.814.485.740** | **10** | **2.583.299.713** | **90,9** | **91,79** | **18** | **2.583.299.713** | **180,00** | **19,87** | | |
| 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 5,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 5 | 2.214.485.740 | 4 | 1.983.299.713 | 80,0 | 89,56 | 4 | 1.983.299.713 | 80,00 | 19,83 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | Unit | 30,00 | 3.000.000.000,00 | - | - | 6 | 600.000.000 | 6 | 600.000.000 | 100,0 | 100,00 | 6 | 600.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Kontrbusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB** | **Persen** | **0,50** | **41.607.500,00** | **0,49** | **-** | **0,35** | **8.321.500** | **0,35** | **2.138.000** | **100,0** | **25,69** | **0,84** | **2.138.000** | **168,00** | **5,14** | | |
| | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | **Jumlah usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memiliki Izin** | **Kelompok Usaha** | **20,00** | **41.607.500,00** | **-** | **-** | **1** | **8.321.500** | **1** | **2.138.000** | **100,0** | **25,69** | **1** | **2.138.000** | **5,00** | **5,14** | | |
| | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Dokumen | 5,00 | 41.607.500,00 | - | - | 1 | 8.321.500 | 1 | 2.138.000 | 100,0 | 25,69 | 1 | 2.138.000 | 20,00 | 5,14 | | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani akibat Gagal Panen** | **Persen** | **85,00** | **2.591.755.000,00** | **43,25** | **1.297.319.600,00** | **85** | **518.251.000** | **85** | **453.280.000** | **100,0** | **87,46** | **128,3** | **1.750.599.600** | **150,88** | **67,54** | | |
| | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan** | **Ha** | **########** | **2.591.755.000,00** | **54,00** | **1.297.319.600,00** | **201** | **518.251.000** | **201** | **453.280.000** | **100,0** | **87,46** | **255** | **1.750.599.600** | **25,50** | **67,54** | | |
| 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha | 250,00 | 1.437.717.500,00 | 54,00 | 760.982.800,00 | 50 | 287543500 | 50 | 280.514.000 | 100,0 | 97,56 | 104 | 1.041.496.800 | 41,60 | 72,44 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Ha | 490,00 | 468.590.000,00 | 248,00 | 311.739.300,00 | 98 | 93.718.000 | 98 | 82.164.000 | 100,0 | 87,67 | 346 | 393.903.300 | 70,61 | 84,06 | | |
| 3 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ha | 425,00 | 595.160.000,00 | 50,00 | 224.597.500,00 | 85 | 118.932.000 | 85 | 90.602.000 | 100,0 | 76,18 | 135 | 315.199.500 | 31,76 | 52,96 | | |
| 4 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Laporan | 5,00 | 90.287.500,00 | - | - | 1 | 18.057.500 | 1 | 0 | 100,0 | 0,00 | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | | |
| | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan** | **Persen** | **100,00** | **6.210.229.700,00** | **30,31** | **4.480.621.200,00** | **7,08** | **626.468.500** | **89** | **592.797.600** | **1257,1** | **94,63** | **119,3** | **5.073.418.800** | **119,31** | **81,69** | | |
| | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan** | **Kelompok Tani** | **########** | **6.210.229.700,00** | **441,00** | **4.480.621.200,00** | **249** | **626.468.500** | **249** | **592.797.600** | **100,0** | **94,63** | **690** | **5.073.418.800** | **69,00** | **81,69** | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 70,00 | 659.035.000,00 | 42,00 | 324.745.500,00 | 14 | 131.807.000 | 14 | 131.156.500 | 100,0 | 99,51 | 56 | 455.902.000 | 80,00 | 69,18 | | |
| 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | ########## | 1.613.307.500,00 | 2.958,00 | 963.988.500,00 | 249 | 322.661.500 | 249 | 298.913.100 | 100,0 | 92,64 | ##### | 1.262.901.600 | 52,19 | 78,28 | | |
| 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 70,00 | 3.362.887.200,00 | 46,00 | 3.191.887.200,00 | 1 | 57.000.000 | 1 | 52.050.000 | 100,0 | 91,32 | 47 | 3.243.937.200 | 67,14 | 96,46 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 4 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | 25,00 | 500.000.000,00 | - | - | 14 | 100.000.000 | 14 | 96.323.000 | 100,0 | 96,32 | 14 | 96.323.000 | 56,00 | 19,26 | | |
| 5 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 600,00 | 75.000.000,00 | - | - | 120 | 15.000.000 | 120 | 14.355.000 | 100,0 | 95,70 | 120 | 14.355.000 | 20,00 | 19,14 | | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak** | **Persen** | **100,00** | **2.907.379.500,00** | **87,25** | **291.707.000,00** | **83** | **581.475.900** | **83** | **541.793.950** | **100,0** | **93,18** | **170,3** | **833.500.950** | **170,25** | **28,67** | | |
| | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan** | **Lokasi** | **50,00** | **1.704.842.000,00** | **24,00** | **246.357.000,00** | **2** | **340.968.400** | **2** | **316.507.100** | **100,0** | **92,83** | **26** | **562.864.100** | **52,00** | **33,02** | | **UPTD Psukeswan** |
| 1 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | Laporan | 5,00 | 319.967.000,00 | - | - | 1 | 63.993.400 | 1 | 49.647.600 | 100,0 | 77,58 | 1 | 49.647.600 | 20,00 | 15,52 | | UPTD Psukeswan |
| 2 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan | 5,00 | 1.384.875.000,00 | 3,00 | 246.357.000,00 | 1 | 276.975.000 | 1 | 266.859.500 | 100,0 | 96,35 | 4 | 513.216.500 | 80,00 | 37,06 | | |
| | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi** | **Lokasi** | **14,00** | **53.750.000,00** | **14,00** | **-** | **1** | **10.750.000** | **1** | **8.250.000** | **100,0** | **76,74** | **15** | **8.250.000** | **107,14** | **15,35** | | **UPTD Psukeswan** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | "Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM " | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | laporan | 5,00 | 53.750.000,00 | - | - | 1 | 10.750.000 | 1 | 8.250.000 | 100,0 | 76,74 | 1 | 8.250.000 | 20,00 | 15,35 | | |
| | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku** | **Layanan** | **5,00** | **60.000.000,00** | **3,00** | **45.350.000,00** | **5** | **12.000.000** | **5** | **0** | **100,0** | **0,00** | **8** | **45.350.000** | **160,00** | **75,58** | | **UPTD Psukeswan** |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Laporan | 5,00 | 60.000.000,00 | 3,00 | 45.350.000,00 | 5 | 12.000.000 | 5 | 0 | 100,0 | 0,00 | 8 | 45.350.000 | 160,00 | 75,58 | | |
| | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Jumlah peraturan dan persyaratan teknis yang dikeluarkan dalam rangka penerapan kesehatan masyarakat veteriner** | **Dokumen** | **5,00** | **1.088.787.500,00** | **3,00** | **-** | **29** | **217.757.500** | **29** | **217.036.850** | **100,0** | **99,67** | **32** | **217.036.850** | **640,00** | **19,93** | | **UPTD Psukeswan** |
| | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Orang | 140,00 | 1.069.992.500,00 | - | - | 28 | 213.998.500 | 28 | 213.636.850 | 100,0 | 99,83 | 28 | 213.636.850 | 20,00 | 19,97 | | UPTD Psukeswan |
| | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | Unit Usaha | 5,00 | 18.795.000,00 | - | - | 1 | 3.759.000 | 1 | 3.400.000 | 100,0 | 90,45 | 1 | 3.400.000 | 20,00 | 18,09 | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100** | **111.203.133.390** | **100** | **22.240.626.678** | **100** | **7.492.092.243** | **100** | **6.842.326.717** | **100,00** | **91,33** | **200** | **29.082.953.395** | **200,00** | **26,15** | **Dinas Perikanan** | **#REF!** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **60** | **135.000.000** | **36** | **27.000.000** | **12** | **9.000.000** | **12** | **9.000.000** | **100,00** | **100,00** | **48** | **36.000.000** | **80,00** | **26,67** | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 22.500.000 | 6 | 4.500.000 | 2 | 1.500.000 | 2 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 6.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 3 | 4.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 3 | 4.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 3 | 4.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 22.500.000 | 3 | 4.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 22.500.000 | 3 | 4.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **215** | **92.955.286.650** | **129** | **18.591.057.330** | **43** | **6.256.449.127** | **43** | **5.815.499.238** | **100,00** | **92,95** | **172** | **24.406.556.568** | **80,00** | **26,26** | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4900 | 90.411.286.650 | 2940 | 18.082.257.330 | 980 | 6.099.239.127 | 961 | 5.658.289.238 | 98,06 | 92,77 | 3901 | 23.740.546.568 | 79,61 | 26,26 | | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 2.524.500.000 | 33 | 504.900.000 | 11 | 155.910.000 | 11 | 155.910.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 660.810.000 | 80,00 | 26,18 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Dokumen | 90 | 19.500.000 | 54 | 3.900.000 | 18 | 1.300.000 | 18 | 1.300.000 | 100,00 | 100,00 | 72 | 5.200.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **5** | **19.500.000** | **3** | **3.900.000** | **1** | **1.300.000** | **1** | **1.300.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **5.200.000** | **80,00** | **26,67** | | |
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 19.500.000 | 3 | 3.900.000 | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5.200.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **125** | **150.000.000** | **75** | **30.000.000** | **25** | **10.000.000** | **25** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **40.000.000** | **80,00** | **26,67** | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 5 | 150.000.000 | 3 | 30.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 40.000.000 | 80,00 | 26,67 | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7** | **6.869.901.000** | **7** | **1.373.980.200** | **6** | **470.113.400** | **6** | **332.295.993** | **100,00** | **70,68** | **13** | **1.706.276.193** | **185,71** | **24,84** | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 91.881.000 | 3 | 18.376.200 | 1 | 6.125.400 | 1 | 5.743.250 | 100,00 | 93,76 | 4 | 24.119.450 | 80,00 | 26,25 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 110.512.500 | 3 | 22.102.500 | 1 | 7.367.500 | 1 | 4.774.000 | 100,00 | 64,80 | 4 | 26.876.500 | 80,00 | 24,32 | | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 15 | 1.043.070.000 | 9 | 208.614.000 | 3 | 69.538.000 | 3 | 61.883.000 | 100,00 | 88,99 | 12 | 270.497.000 | 80,00 | 25,93 | | |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 56.250.000 | 3 | 11.250.000 | 1 | 3.750.000 | 1 | 3.600.000 | 100,00 | 96,00 | 4 | 14.850.000 | 80,00 | 26,40 | | |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 150.000.000 | 3 | 30.000.000 | 12 | 15.350.000 | 12 | 11.500.000 | 100,00 | 74,92 | 15 | 41.500.000 | 300,00 | 27,67 | | |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 110.250.000 | 36 | 22.050.000 | 12 | 367.982.500 | 12 | 244.795.743 | 100,00 | 66,52 | 48 | 266.845.743 | 80,00 | 242,04 | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60** | **5.307.937.500** | **36** | **1.061.587.500** | **3** | **293.760.000** | **3** | **289.680.516** | **100,00** | **98,61** | **39** | **1.351.268.016** | **65,00** | **25,46** | | |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3 | 4.181.400.000 | 3 | 836.280.000 | 89 | 127.000.000 | 89 | 126.150.000 | 100,00 | 99,33 | 92 | 962.430.000 | 3066,67 | 23,02 | | |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 445 | 1.905.000.000 | 267 | 381.000.000 | 10 | 116.760.000 | 10 | 113.750.000 | 100,00 | 97,42 | 277 | 494.750.000 | 62,25 | 25,97 | | |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 50 | 1.751.400.000 | 30 | 350.280.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 49.780.516 | 100,00 | 99,56 | 32 | 400.060.516 | 64,00 | 22,84 | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **5** | **525.000.000** | **3** | **105.000.000** | **2** | **390.900.000** | **2** | **326.880.000** | **100,00** | **83,62** | **5** | **431.880.000** | **100,00** | **82,26** | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 5.983.500.000 | 2 | 1.196.700.000 | 12 | 8.200.000 | 12 | 8.200.000 | 100,00 | 100,00 | 14 | 1.204.900.000 | 700,00 | 20,14 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 123.000.000 | 36 | 24.600.000 | 12 | 382.700.000 | 12 | 318.680.000 | 100,00 | 83,27 | 48 | 343.280.000 | 80,00 | 279,09 | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **60** | **5.860.500.000** | **36** | **1.172.100.000** | **12** | **60.569.716** | **12** | **57.670.970** | **100,00** | **95,21** | **48** | **1.229.770.970** | **80,00** | **20,98** | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 2 | 908.545.740 | 2 | 181.709.148 | 3 | 30.000.000 | 3 | 28.662.000 | 100,00 | 95,54 | 5 | 210.371.148 | 250,00 | 23,15 | | |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 15 | 450.000.000 | 9 | 90.000.000 | 10 | 20.100.000 | 10 | 19.100.000 | 100,00 | 95,02 | 19 | 109.100.000 | 126,67 | 24,24 | | |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 50 | 301.500.000 | 30 | 60.300.000 | 1 | 10.469.716 | 1 | 9.908.970 | 100,00 | 94,64 | 31 | 70.208.970 | 62,00 | 23,29 | | |
| | **Pengelolaan perikanan tangkap** | **Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap** | **Persen** | 45 | 27526312185 | 8,65 | 5505262437 | **2** | 4.012.475.000 | **28,68** | 3.978.093.078 | 1.434,00 | 99,14 | 37,33 | 9.483.355.515 | 0,00 | 0,00 | | **produksi= 9626 ton** |
| | **Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan alam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.** | **Ton** | **9900** | **26367828025** | **4580** | **5273565605** | **3300** | **3.892.800.000** | **3887** | **3.858.911.578** | **117,79** | **99,13** | **8467** | **9.132.477.183** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | Unit | 10 | 19325654500 | 13 | 3865130900 | 2 | 1.387.800.000 | 2 | 1.375.721.578 | 100,00 | 99,13 | 15 | 5.240.852.478 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penjaminan ketersediaan saran usaha perikanan tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Unit | 63225 | 7042173525 | 6072 | 1408434705 | 12645 | 2.505.000.000 | 12645 | 2.483.190.000 | 100,00 | 99,13 | 18717 | 3.891.624.705 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota** | **Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapsitasnya** | **Kelompok** | **75** | **1059814160** | **300** | **211962832** | **25** | **119.675.000** | **25** | **119.181.500** | **100,00** | **99,59** | **325** | **331.144.332** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pengembangan kaapsitas nelayan kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 1200 | 223808375 | 340 | 44761675 | 240 | 28.680.000 | 240 | 28.461.500 | 100,00 | 99,24 | 580 | 73.223.175 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Unit Usaha | 125 | 836005785 | 29 | 167201157 | 25 | 90.995.000 | 25 | 90.720.000 | 100,00 | 99,70 | 54 | 257.921.157 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengelolaan perikanan budidaya** | **Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya** | **Persen** | **5** | **98670000** | **3** | **19734000** | **5,25** | **5.240.255.000** | **2,97** | **5.194.895.756** | **56,57** | **99,13** | **5,97** | **5.214.629.756** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil** | **Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan** | **Kelompok** | **100** | **98670000** | **4** | **19734000** | **20** | **22.135.000** | **20** | **21.860.000** | **100,00** | **98,76** | **24** | **41.594.000** | **0,00** | **0,00** | | **UPTD TPI** |
| 1 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kelompok | 8 | 73507564500 | 7,82 | 14622112900 | 20 | 22.135.000 | 20 | 21.860.000 | 100,00 | 98,76 | 27,82 | 14.643.972.900 | 0,00 | 0,00 | | Produksi = 205,8 ton |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengelolaan pembudidaya ikan** | **jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar** | **Kelompok** | **225** | **815614500** | **92** | **163122900** | **45** | **5.218.120.000** | **45** | **5.173.035.756** | **100,00** | **99,14** | **137** | **5.336.158.656** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 45 | 815614500 | 28 | 163122900 | 9 | 2.652.800.000 | 9 | 2.630.022.738 | 100,00 | 99,14 | 37 | 2.793.145.638 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Unit | 625 | 72691950000 | 70 | 14458990000 | 125 | 2.466.720.000 | 125 | 2.445.709.268 | 100,00 | 99,15 | 195 | 16.904.699.268 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sela a 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehtan Ikan | Dokumen | 10 | 17357190000 | 11 | 3471438000 | 2 | 9.632.500 | 2 | 9.300.000 | 100,00 | 96,55 | 13 | 3.480.738.000 | 0,00 | 0,00 | | Perencanaan DAK |
| 4 | Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Orang | 300 | 30036710000 | 10 | 6007342000 | 60 | 9.567.500 | 60 | 9.418.000 | 100,00 | 98,44 | 70 | 6.016.760.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Ha | 20 | 397000000 | 0 | 0 | 4 | 79.400.000 | 4 | 78.585.750 | 100,00 | 98,97 | 4 | 78.585.750 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengolahan dan pemasarab hasil perikanan** | **Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan** | **Persen** | **4,85** | **17145975000** | **10** | **3429195000** | **0,97** | **1.143.065.000** | **13,16** | **1.128.394.717** | **1.356,70** | **98,72** | **23,16** | **4.557.589.717** | **0,00** | **0,00** | | **UPTD BBI** |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penerbitan tanda daftra usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil** | **Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan** | **Dokumen** | **10** | **7755075000** | **10** | **1551015000** | **2** | **54.327.500** | **2** | **53.255.500** | **100,00** | **98,03** | **12** | **1.604.270.500** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Penyediaan data dan informasi pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | Dokumen | 1,5 | 12752353680 | 1,37 | 2550470736 | 2 | 54.327.500 | 2 | 53.255.500 | 100,00 | 98,03 | 3,37 | 2.603.726.236 | 0,00 | 0,00 | | Realisasi Tahun 2023 |
| | **Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil** | **Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan** | **Unit Usaha** | **5** | **507033500** | **1** | **101406700** | **20** | **28.702.500** | **20** | **28.289.000** | **100,00** | **98,56** | **21** | **129.695.700** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pelaksaanaan bimbingan dn penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemsaran skala mikro dan kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit usaha | 100 | 507033500 | 3 | 101406700 | 20 | 28.702.500 | 20 | 28.289.000 | 100,00 | 98,56 | 23 | 129.695.700 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan** | **Jenis** | **6** | **454707500** | **40** | **90941500** | **2** | **1.060.035.000** | **2** | **1.046.850.217** | **100,00** | **98,76** | **42** | **1.137.791.717** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Ton | 1450 | 454707500 | 70 | 90941500 | 290 | 27.135.000 | 290 | 26.596.000 | 100,00 | 98,01 | 360 | 117.537.500 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi** | **Pelaku usaha** | **2** | **11790612680** | **2** | **2358122536** | **11** | **1.032.900.000** | **11** | **1.020.254.217** | **100,00** | **98,78** | **13** | **3.378.376.753** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pengelolaan perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 10 | 608795000 | 692,9 | 121759000 | 2 | 45.200.000 | 28,68 | 43.450.000 | 1.434,00 | 96,13 | 721,6 | 165.209.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang dikelola | Unit | 5 | 11181817680 | 23 | 2236363536 | 1 | 45.200.000 | 1 | 43.450.000 | 100,00 | 96,13 | 24 | 2.279.813.536 | 0,00 | 0,00 | | Perencanaan DAK |
| 3 | Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Layanan | 2 | 226.000.000 | 0 | 0 | 2 | 45.200.000 | 2 | 43.450.000 | 100,00 | 96,13 | 2 | 43.450.000 | 100,00 | 19,23 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **53.910.520.540,00** | **100,00** | **32.346.312.324,00** | **100** | **5.747.904.711** | **90** | **5.280.650.122** | **90,00** | **91,87** | **190** | **37.626.962.446** | **190,00** | **69,80** | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **19.882.000,00** | **3,00** | **11.929.200,00** | **1** | **3.976.400** | **1** | **3.975.400** | **100,00** | **99,97** | **4** | **15.904.600** | **80,00** | **79,99** | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 19.882.000,00 | 3,00 | 11.929.200,00 | 1 | 3.976.400 | 1 | 3.975.400 | 100,00 | 99,97 | 4 | 15.904.600 | 80,00 | 79,99 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **130,00** | **48.211.863.600,00** | **78,00** | **28.927.118.160,00** | **26** | **4.984.525.817** | **26** | **4.697.809.053** | **100,00** | **94,25** | **104** | **33.624.927.213** | **80,00** | **69,74** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 24.394.406.800,00 | 2.142,00 | 14.636.644.080,00 | 714 | 4.858.645.817 | 714 | 4.571.929.053 | 100,00 | 94,10 | 2856 | 19.208.573.133 | 80,00 | 78,74 | | |
| | pelaksanaan penatalaksanaan dan engujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 23.817.456.800,00 | 36,00 | 14.290.474.080,00 | 12 | 125.880.000 | 12 | 125.880.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 14.416.354.080 | 80,00 | 60,53 | | |
| | **Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **1.500.000,00** | | **900.000,00** | **1** | **300.000** | **1** | **0** | **100,00** | **0,00** | **1** | **900.000** | **20,00** | **60,00** | | |
| | Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 1.500.000,00 | 3,00 | 900.000,00 | 1 | 300.000 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 4 | 900.000 | 80,00 | 60,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **225,00** | **135.000.000,00** | **135,00** | **81.000.000,00** | **8** | **27.000.000** | **8** | **27.000.000** | **100,00** | **100,00** | **143** | **108.000.000** | **63,56** | **80,00** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 225,00 | 135.000.000,00 | 135,00 | 81.000.000,00 | 45 | 27.000.000 | 45 | 27.000.000 | 100,00 | 100,00 | 180 | 108.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7,00** | **3.603.945.000,00** | **7,00** | **2.162.367.000,00** | **44** | **327.519.500** | **41** | **207.681.669** | **93,18** | **63,41** | **48** | **2.370.048.669** | **685,71** | **65,76** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 40,00 | 1.876.972.500,00 | 24,00 | 1.126.183.500,00 | 8 | 10.233.000 | 7 | 6.848.000 | 87,50 | 66,92 | 31 | 1.133.031.500 | 77,50 | 60,36 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 45,00 | 92.850.000,00 | 27,00 | 55.710.000,00 | 9 | 23.270.000 | 8 | 19.105.000 | 88,89 | 82,10 | 35 | 74.815.000 | 77,78 | 80,58 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20,00 | 116.350.000,00 | 12,00 | 69.810.000,00 | 4 | 85.945.500 | 3 | 64.723.525 | 75,00 | 75,31 | 15 | 134.533.525 | 75,00 | 115,63 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10,00 | 711.352.500,00 | 6,00 | 426.811.500,00 | 2 | 7.000.000 | 2 | 5.840.000 | 100,00 | 83,43 | 8 | 432.651.500 | 80,00 | 60,82 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 35.000.000,00 | 36,00 | 21.000.000,00 | 12 | 14.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100,00 | 57,14 | 48 | 29.000.000 | 80,00 | 82,86 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 80.000.000,00 | 36,00 | 48.000.000,00 | 12 | 157.071.000 | 12 | 75.165.144 | 100,00 | 47,85 | 48 | 123.165.144 | 80,00 | 153,96 | | |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 5,00 | 691.420.000,00 | 3,00 | 414.852.000,00 | 1 | 30.000.000 | 1 | 28.000.000 | 100,00 | 93,33 | 4 | 442.852.000 | 80,00 | 64,05 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **235.000.000,00** | **2,00** | **141.000.000,00** | **2** | **117.000.000** | **2** | **114.800.000** | **100,00** | **98,12** | **4** | **255.800.000** | **200,00** | **108,85** | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 25,00 | 235.000.000,00 | 15,00 | 141.000.000,00 | 5 | 117.000.000 | 5 | 114.800.000 | 100,00 | 98,12 | 20 | 255.800.000 | 80,00 | 108,85 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3,00** | **1.143.000.000,00** | **3,00** | **685.800.000,00** | **3** | **181.300.000** | **3** | **181.300.000** | **100,00** | **100,00** | **6** | **867.100.000** | **200,00** | **75,86** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 1.029.000.000,00 | 36,00 | 617.400.000,00 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 639.400.000 | 80,00 | 62,14 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, usmber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 110.000.000,00 | 36,00 | 66.000.000,00 | 12 | 300.000 | 12 | 300.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 66.300.000 | 80,00 | 60,27 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 4.000.000,00 | 36,00 | 2.400.000,00 | 12 | 159.000.000 | 12 | 159.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 161.400.000 | 80,00 | 4035,00 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **3,00** | **560.329.940,00** | **3,00** | **336.197.964,00** | **6** | **106.282.994** | **5** | **48.084.000** | **83,33** | **45,24** | **8** | **384.281.964** | **266,67** | **68,58** | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaaan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 5,00 | 355.164.970,00 | 3,00 | 213.098.982,00 | 1 | 41.032.994 | 1 | 11.069.000 | 100,00 | 26,98 | 4 | 224.167.982 | 80,00 | 63,12 | | |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 115,00 | 205.164.970,00 | 69,00 | 123.098.982,00 | 23 | 45.250.000 | 23 | 37.015.000 | 100,00 | 81,80 | 92 | 160.113.982 | 80,00 | 78,04 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | | | 1 | 20.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | **Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** | **Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD** | **Persen** | | **5.027.300.000,00** | | **1.088.084.350,00** | **100** | **1.411.500.600** | **100** | **1.358.473.950** | **100,00** | **96,24** | **100** | **2.446.558.300** | **0,00** | **48,67** | | |
| | **Penyusunan perencanaan dan pendanaan** | **Jumlah program dalam RPJMD yang tertuang dalam RKPD** | **Program** | **5,00** | **3.828.215.000,00** | **3,00** | **89.687.750,00** | **7** | **745.300.600** | **7** | **722.136.950** | **100,00** | **96,89** | **10** | **811.824.700** | **200,00** | **21,21** | | |
| | Pelaksanaan konusltasi publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 5,00 | 175.765.000,00 | 3,00 | 62.805.000,00 | 1 | 28.453.600 | 1 | 28.088.400 | 100,00 | 98,72 | 4 | 90.893.400 | 80,00 | 51,71 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 5,00 | 181.580.000,00 | 4,00 | 105.610.000,00 | 1 | 31.416.000 | 1 | 31.053.900 | 100,00 | 98,85 | 5 | 136.663.900 | 100,00 | 75,26 | | |
| | Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | ###### | 452.615.000,00 | 9.443,00 | 129.232.000,00 | 1 | 83.623.000 | 1 | 81.580.400 | 100,00 | 97,56 | #### | 210.812.400 | 67,01 | 46,58 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 20,00 | 389.125.000,00 | 9,00 | 700.749.600,00 | 1550 | 70.175.000 | 1550 | 69.857.700 | 100,00 | 99,55 | 1.559 | 770.607.300 | 7795,00 | 198,04 | | |
| | Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 50,00 | 2.303.690.000,00 | 18,00 | 910.426.045,00 | 4 | 531.633.000 | 4 | 511.556.550 | 100,00 | 96,22 | 22 | 1.421.982.595 | 44,00 | 61,73 | | |
| | **Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah** | **Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Dikeluarkan** | **Dokumen** | **20,00** | **1.980.490.000,00** | **9,00** | **345.926.000,00** | **10** | **596.098.000** | **10** | **591.436.500** | **100,00** | **99,22** | **19** | **937.362.500** | **95,00** | **47,33** | | |
| | Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 30,00 | 323.200.000,00 | 21,00 | 564.500.045,00 | 4 | 64.640.000 | 4 | 64.182.500 | 100,00 | 99,29 | 25 | 628.682.545 | 83,33 | 194,52 | | |
| | Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 5,00 | 460.346.250,00 | 1,00 | 109.013.250,00 | 6 | 531.458.000 | 6 | 527.254.000 | 100,00 | 99,21 | 7 | 636.267.250 | 140,00 | 138,21 | | |
| | **Implementasi sistem infomrasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah** | **Jumlah jenis data yang di kelola apda Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah** | **Jenis** | **5,00** | **335.346.250,00** | **-** | **11.476.600,00** | **1** | **70.102.000** | **1** | **44.900.500** | **100,00** | **64,05** | **1** | **56.377.100** | **20,00** | **16,81** | | |
| | Pengelolaan data dalam distem informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 50,00 | 125.000.000,00 | 1,00 | 97.536.650,00 | 1 | 28.032.750 | 1 | 20.389.000 | 100,00 | 72,73 | 2 | 117.925.650 | 4,00 | 94,34 | | |
| | penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen | 100,00 | 1.609.046.750,00 | 100,00 | 279.100.050,00 | 10 | 42.069.250 | 10 | 24.511.500 | 100,00 | 58,26 | 110 | 303.611.550 | 110,00 | 18,87 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah** | **Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD** | **Persen** | **153,00** | **1.136.981.750,00** | **153,00** | **155.136.350,00** | **100** | **258.891.000** | **100** | **161.186.700** | **100,00** | **62,26** | **253** | **316.323.050** | **165,36** | **27,82** | | |
| | **Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia** | **Jumlah program bidang peemrintahan dan pembangunan manusia dalam RKPD yang tertuang dalam APBD** | **Program** | **10,00** | **836.981.750,00** | **0,30** | **23.167.500,00** | **8** | **193.799.000** | **8** | **130.750.000** | **100,00** | **67,47** | **8,3** | **153.917.500** | **83,00** | **18,39** | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 15,00 | 300.000.000,00 | 12,00 | 131.968.850,00 | 2 | 60.000.000 | 2 | 59.940.000 | 100,00 | 99,90 | 14 | 191.908.850 | 93,33 | 63,97 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 8,00 | 472.065.000,00 | 7,00 | 123.963.700,00 | 3 | 133.799.000 | 2 | 70.810.000 | 66,67 | 52,92 | 9 | 194.773.700 | 112,50 | 41,26 | | |
| | **Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan** | **Jumlah program infrastruktur dan kewilayahan dalam RKPD yang tertuang dalam APBD** | **Program** | **25,00** | **314.710.000,00** | **2,50** | **65.174.700,00** | **8** | **65.092.000** | **8** | **30.436.700** | **100,00** | **46,76** | **10,5** | **95.611.400** | **42,00** | **30,38** | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 25,00 | 157.355.000,00 | 12,00 | 58.789.000,00 | 5 | 33.621.000 | 5 | 16.166.500 | 100,00 | 48,08 | 17 | 74.955.500 | 68,00 | 47,63 | | |
| | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisaso perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 100,00 | 5.937.439.000,00 | 68,75 | 357.721.500,00 | 5 | 31.471.000 | 5 | 14.270.200 | 100,00 | 45,34 | 73,75 | 371.991.700 | 73,75 | 6,27 | | |
| | **Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan** | **Persen** | **10,00** | **1.892.240.000,00** | **6,00** | **357.721.500,00** | **70** | **934.603.400** | **70** | **864.811.000** | **100,00** | **92,53** | **76** | **1.222.532.500** | **760,00** | **64,61** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Peneltiian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan** | **Jumlah Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Dokumen** | 5,00 | 1.216.640.000,00 | 3,00 | 172.665.000,00 | **2** | 181.020.000 | **2** | 175.540.000 | 100,00 | 96,97 | 5 | 348.205.000 | 100,00 | 28,62 | | |
| | Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Laporan | 5,00 | 675.600.000,00 | 3,00 | 185.056.500,00 | 1 | 106.020.000 | 1 | 105.887.500 | 100,00 | 99,88 | 4 | 290.944.000 | 80,00 | 43,06 | | |
| | Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Laporan | 9,00 | 2.716.764.000,00 | - | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 69.652.500 | 100,00 | 92,87 | 1 | 69.652.500 | 11,11 | 2,56 | | |
| | **Penelitian dan pengembangan bidang sosial bidang kependudukan** | **Jumlah Kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **dokumen** | 3,00 | 1.858.382.000,00 | - | - | **3** | 446.676.400 | **3** | 423.797.500 | 100,00 | 94,88 | 3 | 423.797.500 | 100,00 | 22,80 | | |
| | Peneltiian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dokumen | 3,00 | 428.465.000,00 | - | - | 1 | 85.693.000 | 1 | 76.836.500 | 100,00 | 89,66 | 1 | 76.836.500 | 33,33 | 17,93 | | |
| | Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Dokumen | 3,00 | 429.917.000,00 | - | - | 1 | 160.983.400 | 1 | 146.961.000 | 100,00 | 91,29 | 1 | 146.961.000 | 33,33 | 34,18 | | |
| | Penelitian dan pengembangan pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Dokumen | 6,00 | 1.328.435.000,00 | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 200.000.000 | 16,67 | 15,06 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **dokumen** | 3,00 | 872.035.000,00 | - | - | **1** | 75.000.000 | **1** | 69.682.500 | 100,00 | 92,91 | 1 | 69.682.500 | 33,33 | 7,99 | | |
| | Peneltiian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | 3,00 | 456.400.000,00 | - | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 69.682.500 | 100,00 | 92,91 | 1 | 69.682.500 | 33,33 | 15,27 | | |
| | **Pengambangan inovasi dan teknologi** | **Jumlah inovasi dan tekologi yang tersdia** | **Inovasi** | | | | | **3** | **231.907.000** | **3** | **195.791.000** | **100,00** | **84,43** | **3** | **195.791.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Peneltiian dan pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 5,00 | 348.415.000,00 | - | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 69.683.000 | 100,00 | 92,91 | 1 | 69.683.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | Uji coba dan penerapan bangun/modal replikasi dan inoavasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Laporan | 5,00 | 440.967.500,00 | - | - | 1 | 91.280.000 | 1 | 88.193.500 | 100,00 | 96,62 | 1 | 88.193.500 | 20,00 | 20,00 | | |
| | Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatiif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan | 5,00 | 189.572.500,00 | - | - | 1 | 65.627.000 | 1 | 37.914.500 | 100,00 | 57,77 | 1 | 37.914.500 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **262.830.942.400,00** | **100,00** | **157.698.565.440,00** | **100** | **56.922.746.594** | **100** | **55.390.130.132** | **100,00** | **97,31** | **200** | **213.088.695.572** | **200,00** | **81,07** | **Badan Keuangan dan Aset DAerah** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **135.885.000,00** | **33,00** | **81.531.000,00** | **11** | **27.177.000** | **11** | **27.172.000** | **100,00** | **99,98** | **44** | **108.703.000** | **80,00** | **80,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 21.200.000,00 | 6,00 | 12.720.000,00 | 2 | 4.240.000 | 2 | 4.235.000 | 100,00 | 99,88 | 8 | 16.955.000 | 80,00 | 79,98 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 23.250.000,00 | 3,00 | 13.950.000,00 | 1 | 4.650.000 | 1 | 4.650.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 18.600.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 22.450.000,00 | 3,00 | 13.470.000,00 | 1 | 4.490.000 | 1 | 4.490.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 17.960.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 15.550.000,00 | 3,00 | 9.330.000,00 | 1 | 3.110.000 | 1 | 3.110.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 12.440.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 14.760.000,00 | 3,00 | 8.856.000,00 | 1 | 2.952.000 | 1 | 2.952.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 11.808.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 19.125.000,00 | 3,00 | 11.475.000,00 | 1 | 3.825.000 | 1 | 3.825.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 15.300.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 19.550.000,00 | 12,00 | 11.730.000,00 | 4 | 3.910.000 | 4 | 3.910.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 15.640.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **160,00** | **118.882.387.665,00** | **96,00** | **71.329.432.599,00** | **32** | **26.445.365.173** | **32** | **25.456.061.213** | **100,00** | **96,26** | **128** | **96.785.493.812** | **80,00** | **81,41** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 113.934.295.165,00 | 2.604,00 | 68.360.577.099,00 | 868 | 25.445.928.673 | 868 | 24.477.645.213 | 100,00 | 96,19 | 3472 | 92.838.222.312 | 80,00 | 81,48 | | Jan 57, Feb 58, Mar 58 |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 60,00 | 567.932.500,00 | 36,00 | 340.759.500,00 | 12 | 115.365.500 | 12 | 111.421.000 | 100,00 | 96,58 | 48 | 452.180.500 | 80,00 | 79,62 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.845.050.000,00 | 3,00 | 2.307.030.000,00 | 1 | 771.480.000 | 1 | 759.480.000 | 100,00 | 98,44 | 4 | 3.066.510.000 | 80,00 | 79,75 | | |
| | Koordinasi dan pelaksaaan akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 5,00 | 168.450.000,00 | 3,00 | 101.070.000,00 | 1 | 41.130.000 | 1 | 39.840.000 | 100,00 | 96,86 | 4 | 140.910.000 | 80,00 | 83,65 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 135.200.000,00 | 3,00 | 81.120.000,00 | 1 | 15.336.000 | 1 | 14.696.000 | 100,00 | 95,83 | 4 | 95.816.000 | 80,00 | 70,87 | | |
| | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 5,00 | 74.295.000,00 | 3,00 | 44.577.000,00 | 1 | 14.859.000 | 1 | 13.814.000 | 100,00 | 92,97 | 4 | 58.391.000 | 80,00 | 78,59 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 10,00 | 134.790.000,00 | 6,00 | 80.874.000,00 | 2 | 36.791.000 | 2 | 35.005.000 | 100,00 | 95,15 | 8 | 115.879.000 | 80,00 | 85,97 | | |
| | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 5,00 | 22.375.000,00 | 3,00 | 13.425.000,00 | 1 | 4.475.000 | 1 | 4.160.000 | 100,00 | 92,96 | 4 | 17.585.000 | 80,00 | 78,59 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah** | **Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah** | **Dokumen** | **25,00** | **75.270.000,00** | **15,00** | **45.162.000,00** | **5** | **27.232.000** | **5** | **24.731.500** | **100,00** | **90,82** | **20** | **69.893.500** | **80,00** | **92,86** | | |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.537.500,00 | 3,00 | 7.522.500,00 | 1 | 2.507.500 | 1 | 2.425.000 | 100,00 | 96,71 | 4 | 9.947.500 | 80,00 | 79,34 | | |
| | Pengamanan barang milik daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 5,00 | 15.135.000,00 | 3,00 | 9.081.000,00 | 1 | 3.027.000 | 1 | 1.145.000 | 100,00 | 37,83 | 4 | 10.226.000 | 80,00 | 67,57 | | |
| | Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 5,00 | 9.160.000,00 | 3,00 | 5.496.000,00 | 1 | 1.832.000 | 1 | 1.707.000 | 100,00 | 93,18 | 4 | 7.203.000 | 80,00 | 78,64 | | |
| | Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 18.100.000,00 | 3,00 | 10.860.000,00 | 1 | 3.620.000 | 1 | 3.570.000 | 100,00 | 98,62 | 4 | 14.430.000 | 80,00 | 79,72 | | |
| | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5,00 | 20.337.500,00 | 3,00 | 12.202.500,00 | 1 | 16.245.500 | 1 | 15.884.500 | 100,00 | 97,78 | 4 | 28.087.000 | 80,00 | 138,10 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **400,00** | **228.500.000,00** | **240,00** | **137.100.000,00** | **80** | **64.738.000** | **80** | **61.520.000** | **100,00** | **95,03** | **320** | **198.620.000** | **80,00** | **86,92** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 400,00 | 187.500.000,00 | 240,00 | 112.500.000,00 | 80 | 53.880.000 | 80 | 53.320.000 | 100,00 | 98,96 | 320 | 165.820.000 | 80,00 | 88,44 | | |
| | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 60,00 | 41.000.000,00 | 36,00 | 24.600.000,00 | 12 | 10.858.000 | 12 | 8.200.000 | 100,00 | 75,52 | 48 | 32.800.000 | 80,00 | 80,00 | | Tamu TW I : 435 org |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7,00** | **2.614.595.625,00** | **7,00** | **1.568.757.375,00** | **7** | **679.399.625** | **7** | **640.137.181** | **100,00** | **94,22** | **14** | **2.208.894.556** | **200,00** | **84,48** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 50,00 | 49.049.375,00 | 30,00 | 29.429.625,00 | 10 | 9.809.875 | 10 | 9.535.000 | 100,00 | 97,20 | 40 | 38.964.625 | 80,00 | 79,44 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 125.012.500,00 | 3,00 | 75.007.500,00 | 1 | 28.703.000 | 1 | 26.281.500 | 100,00 | 91,56 | 4 | 101.289.000 | 80,00 | 81,02 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 145,00 | 330.658.750,00 | 87,00 | 198.395.250,00 | 29 | 87.761.750 | 29 | 79.590.000 | 100,00 | 90,69 | 116 | 277.985.250 | 80,00 | 84,07 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 35,00 | 90.000.000,00 | 21,00 | 54.000.000,00 | 7 | 18.000.000 | 7 | 17.899.500 | 100,00 | 99,44 | 28 | 71.899.500 | 80,00 | 79,89 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 86.000.000 | 1 | 86.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 116.000.000 | 80,00 | 232,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 300.000.000,00 | 36,00 | 180.000.000,00 | 12 | 449.125.000 | 12 | 420.831.181 | 100,00 | 93,70 | 48 | 600.831.181 | 80,00 | 200,28 | | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | ########## | 1.669.875.000,00 | 1.680,00 | 1.001.925.000,00 | 560 | 662.400.000 | 540 | 567.100.000 | 96,43 | 85,61 | 2220 | 1.569.025.000 | 79,29 | 93,96 | | |
| | **Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** | **Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan** | **Unit** | **10,00** | **2.600.000.000,00** | **6,00** | **1.560.000.000,00** | **2** | **400.000.000** | **2** | **400.000.000** | **100,00** | **100,00** | **8** | **1.960.000.000** | **80,00** | **75,38** | | |
| | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5,00 | 2.000.000.000,00 | 3,00 | 1.200.000.000,00 | 1 | 93.700.000 | 1 | 91.300.000 | 100,00 | 97,44 | 4 | 1.291.300.000 | 80,00 | 64,57 | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5,00 | 600.000.000,00 | 3,00 | 360.000.000,00 | 1 | 168.700.000 | 1 | 75.800.000 | 100,00 | 44,93 | 4 | 435.800.000 | 80,00 | 72,63 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **15,00** | **123.522.154.205,00** | **9,00** | **74.113.292.523,00** | **3** | **25.665.320.003** | **3** | **25.326.160.265** | **100,00** | **98,68** | **12** | **99.439.452.788** | **80,00** | **80,50** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 188.500.000,00 | 36,00 | 113.100.000,00 | 12 | 37.700.000 | 12 | 36.500.000 | 100,00 | 96,82 | 48 | 149.600.000 | 80,00 | 79,36 | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 108.690.678.205,00 | 36,00 | 65.214.406.923,00 | 12 | 23.047.224.803 | 12 | 22.750.374.665 | 100,00 | 98,71 | 48 | 87.964.781.588 | 80,00 | 80,93 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 15,00 | 14.642.976.000,00 | 9,00 | 8.785.785.600,00 | 3 | 2.580.395.200 | 3 | 2.539.285.600 | 100,00 | 98,41 | 12 | 11.325.071.200 | 80,00 | 77,34 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **20,00** | **14.772.149.905,00** | **12,00** | **8.863.289.943,00** | **4** | **3.351.114.793** | **4** | **3.287.247.973** | **100,00** | **98,09** | **16** | **12.150.537.916** | **80,00** | **82,25** | | |
| | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10,00 | 11.062.700.000,00 | 6,00 | 6.637.620.000,00 | 2 | 2.656.540.000 | 2 | 2.605.601.038 | 100,00 | 98,08 | 8 | 9.243.221.038 | 80,00 | 83,55 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 30,00 | 3.055.699.905,00 | 18,00 | 1.833.419.943,00 | 6 | 558.824.793 | 6 | 548.880.935 | 100,00 | 98,22 | 24 | 2.382.300.878 | 80,00 | 77,96 | | |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 155,00 | 153.750.000,00 | 93,00 | 92.250.000,00 | 31 | 35.750.000 | 31 | 34.466.000 | 100,00 | 96,41 | 124 | 126.716.000 | 80,00 | 82,42 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 500.000.000,00 | 3,00 | 300.000.000,00 | 1 | 100.000.000 | 1 | 98.300.000 | 100,00 | 98,30 | 4 | 398.300.000 | 80,00 | 79,66 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target** | **Persen** | **100,00** | **2.037.363.461.384,00** | **67,22** | **205.646.602.388,00** | **100** | **161.924.094.600** | **100** | **79.303.064.820** | **100,00** | **48,98** | **167,2** | **284.949.667.208** | **167,22** | **13,99** | | **#REF!** |
| | **Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah** | **Jumlah Dokumen koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Dokumen** | ########## | 3.940.083.750,00 | 142,00 | 943.197.000,00 | **237** | 725.378.000 | **237** | 577.299.716 | 100,00 | 79,59 | 379 | 1.520.496.716 | 31,98 | 38,59 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 10,00 | 77.300.000,00 | 6,00 | 28.299.000,00 | 2 | 10.820.000 | 2 | 10.670.000 | 100,00 | 98,61 | 8 | 38.969.000 | 80,00 | 50,41 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 10,00 | 77.427.500,00 | 5,00 | 28.299.000,00 | 2 | 15.485.500 | 2 | 15.335.500 | 100,00 | 99,03 | 7 | 43.634.500 | 70,00 | 56,36 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195,00 | 39.130.000,00 | 1,00 | 19.722.000,00 | 39 | 4.898.000 | 39 | 4.403.000 | 100,00 | 89,89 | 40 | 24.125.000 | 20,51 | 61,65 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195,00 | 32.130.000,00 | 26,00 | 12.471.000,00 | 39 | 7.452.000 | 39 | 3.000.000 | 100,00 | 40,26 | 65 | 15.471.000 | 33,33 | 48,15 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195,00 | 38.880.000,00 | 21,00 | 9.866.000,00 | 39 | 4.916.000 | 39 | 0 | 100,00 | 0,00 | 60 | 9.866.000 | 30,77 | 25,38 | | |
| | Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 195,00 | 38.880.000,00 | 46,00 | 17.001.000,00 | 39 | 7.452.000 | 39 | 7.309.000 | 100,00 | 98,08 | 85 | 24.310.000 | 43,59 | 62,53 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tenatng APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerahtentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 5,00 | 1.376.631.250,00 | 4,00 | 313.120.000,00 | 1 | 272.267.250 | 1 | 210.567.188 | 100,00 | 77,34 | 5 | 523.687.188 | 100,00 | 38,04 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan peratuan daerah tentang perubahan APBD dan pertauran kepala daerah tentang penjabaran prubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 5,00 | 1.542.381.250,00 | 5,00 | 295.724.000,00 | 1 | 251.061.250 | 1 | 244.176.000 | 100,00 | 97,26 | 6 | 539.900.000 | 120,00 | 35,00 | | |
| | Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 60,00 | 110.397.500,00 | 1,00 | 10.771.000,00 | 12 | 21.607.500 | 12 | 20.258.500 | 100,00 | 93,76 | 13 | 31.029.500 | 21,67 | 28,11 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen | 60,00 | 411.236.250,00 | 1,00 | 98.296.600,00 | 12 | 88.347.500 | 12 | 37.129.528 | 100,00 | 42,03 | 13 | 135.426.128 | 21,67 | 32,93 | | |
| | Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Dokumen | 60,00 | 100.020.000,00 | - | 49.930.000,00 | 12 | 21.937.000 | 12 | 8.971.000 | 100,00 | 40,89 | 12 | 58.901.000 | 20,00 | 58,89 | | |
| | Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 195,00 | 95.670.000,00 | - | 59.697.400,00 | 39 | 19.134.000 | 39 | 15.480.000 | 100,00 | 80,90 | 39 | 75.177.400 | 20,00 | 78,58 | | |
| | **Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Dokumen** | **340,00** | **1.454.027.500,00** | **47,00** | **463.961.910,00** | **68** | **279.483.500** | **68** | **257.102.180** | **100,00** | **91,99** | **115** | **721.064.090** | **33,82** | **49,59** | | |
| | Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 60,00 | 92.020.000,00 | 3,00 | 71.686.000,00 | 12 | 18.404.000 | 12 | 18.180.000 | 100,00 | 98,78 | 15 | 89.866.000 | 25,00 | 97,66 | | |
| | Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas di SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 60,00 | 195.700.000,00 | 2,00 | 39.140.000,00 | 12 | 5.760.000 | 12 | 5.600.000 | 100,00 | 97,22 | 14 | 44.740.000 | 23,33 | 22,86 | | |
| | Penatausahaan pembiayaan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen | 60,00 | 216.400.000,00 | 2,00 | 73.360.000,00 | 12 | 43.280.000 | 12 | 40.178.000 | 100,00 | 92,83 | 14 | 113.538.000 | 23,33 | 52,47 | | |
| | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 120,00 | 575.982.500,00 | 24,00 | 179.626.200,00 | 4 | 115.196.500 | 4 | 103.173.629 | 100,00 | 89,56 | 28 | 282.799.829 | 23,33 | 49,10 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan tmasaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan bukan bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 20,00 | 85.265.000,00 | 8,00 | 21.936.000,00 | 4 | 26.669.000 | 4 | 23.752.926 | 100,00 | 89,07 | 12 | 45.688.926 | 60,00 | 53,58 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetora perhitungan fihak ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lapora Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | 60,00 | 233.900.000,00 | 15,00 | 49.254.000,00 | 12 | 59.222.000 | 12 | 58.017.625 | 100,00 | 97,97 | 27 | 107.271.625 | 45,00 | 45,86 | | |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 60,00 | 54.760.000,00 | 5,00 | 28.959.710,00 | 12 | 10.952.000 | 12 | 8.200.000 | 100,00 | 74,87 | 17 | 37.159.710 | 28,33 | 67,86 | | |
| | **Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Dokumen** | **415,00** | **1.355.968.996.756,00** | **99,00** | **1.435.379.900,00** | **67** | **793.659.000** | **67** | **673.187.827** | **100,00** | **84,82** | **166** | **2.108.567.727** | **40,00** | **0,16** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan | 60,00 | 93.690.000,00 | 21,00 | 54.377.000,00 | 12 | 18.738.000 | 12 | 0 | 100,00 | 0,00 | 33 | 54.377.000 | 55,00 | 58,04 | | |
| | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban | Dokumen | 60,00 | 51.785.000,00 | 6,00 | 30.825.500,00 | 12 | 10.357.000 | 12 | 10.357.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | 41.182.500 | 30,00 | 79,53 | | |
| | Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semsteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan | 60,00 | 325.065.000,00 | 17,00 | 24.834.100,00 | 12 | 15.013.000 | 12 | 6.979.000 | 100,00 | 46,49 | 29 | 31.813.100 | 48,33 | 9,79 | | |
| | Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 60,00 | 1.406.057.500,00 | 5,00 | 392.834.400,00 | 12 | 274.326.500 | 12 | 267.426.000 | 100,00 | 97,48 | 17 | 660.260.400 | 28,33 | 46,96 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan rancanagan peraturan daerah tenatnag pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancanagan pertauran kepala daerah tenatng penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 10,00 | 181.757.500,00 | 2,00 | 96.265.900,00 | 2 | 36.351.500 | 2 | 35.331.500 | 100,00 | 97,19 | 4 | 131.597.400 | 40,00 | 72,40 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen | 5,00 | 11.940.000,00 | - | - | 1 | 168.771.000 | 1 | 168.586.000 | 100,00 | 99,89 | 1 | 168.586.000 | 20,00 | 1411,94 | | |
| | Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 60,00 | 843.855.000,00 | 8,00 | 418.454.000,00 | 12 | 33.857.000 | 12 | 27.500.000 | 100,00 | 81,22 | 20 | 445.954.000 | 33,33 | 52,85 | | |
| | Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah istem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 5,00 | 13.010.000,00 | - | - | 1 | 131.209.000 | 1 | 58.955.522 | 100,00 | 44,93 | 1 | 58.955.522 | 20,00 | 453,16 | | |
| | Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 5,00 | 322.210.000,00 | 1,00 | 253.063.000,00 | 1 | 105.036.000 | 1 | 98.052.805 | 100,00 | 93,35 | 2 | 351.115.805 | 40,00 | 108,97 | | |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen | 5,00 | 174.940.000,00 | - | 69.990.000,00 | 1 | 160.125.574.100 | 1 | 77.795.475.097 | 100,00 | 48,58 | 1 | 77.865.465.097 | 20,00 | ###### | | |
| | Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 320,00 | 438.890.000,00 | 60,00 | 94.736.000,00 | 80 | 160.125.574.100 | 80 | 77.795.475.097 | 100,00 | 48,58 | 140 | 77.890.211.097 | 43,75 | ###### | | |
| | **Pengelolaan barang milik daerah** | **Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah** | **Persen** | **100,00** | **135.885.000,00** | **100,00** | **5.090.417.167,00** | **100** | **6.982.619.900** | **100** | **6.695.647.711** | **100,00** | **95,89** | **200** | **11.786.064.878** | **200,00** | **8673,56** | | |
| | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **135.885.000,00** | **202,00** | **5.090.417.167,00** | **102** | **6.982.619.900** | **140** | **6.695.647.711** | **137,25** | **95,89** | **342** | **11.786.064.878** | **621,82** | **8673,56** | | |
| 1 | Penyusunan standar harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | Dokumen | 10,00 | 65.240.000,00 | - | - | 1 | 42.341.000 | 1 | 31.913.000 | 100,00 | 75,37 | 1 | 31.913.000 | 10,00 | 48,92 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 5,00 | 107.940.000,00 | - | - | 2 | 8.548.000 | 2 | 3.555.000 | 100,00 | 41,59 | 2 | 3.555.000 | 40,00 | 3,29 | | |
| 3 | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 200,00 | 37.465.000,00 | 1,00 | 41.311.100,00 | 1 | 21.588.000 | 1 | 7.369.000 | 100,00 | 34,13 | 2 | 48.680.100 | 1,00 | 129,93 | | |
| 4 | Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 250,00 | 348.271.250,00 | 85,00 | 28.208.200,00 | 40 | 7.493.000 | 40 | 700.000 | 100,00 | 9,34 | 125 | 28.908.200 | 50,00 | 8,30 | | |
| 5 | penatausahaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 15,00 | 101.462.500,00 | 50,00 | 60.408.000,00 | 3 | 103.748.000 | 3 | 84.811.250 | 100,00 | 81,75 | 53 | 145.219.250 | 353,33 | 143,13 | | |
| 6 | Inventarisasi barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Laporan | 125,00 | 75.522.500,00 | 5,00 | 23.574.000,00 | 3 | 20.292.500 | 3 | 13.557.500 | 100,00 | 66,81 | 8 | 37.131.500 | 6,40 | 49,17 | | |
| 7 | Pengamanan barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 15,00 | 14.481.750.000,00 | 10,00 | 34.574.500,00 | 25 | 140.104.500 | 25 | 31.526.000 | 100,00 | 22,50 | 35 | 66.100.500 | 233,33 | 0,46 | | |
| 8 | Penialian barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 25,00 | 186.454.500,00 | 2,00 | 1.841.423.300,00 | 3 | 3.100.350.000 | 3 | 3.026.059.000 | 100,00 | 97,60 | 5 | 4.867.482.300 | 20,00 | 2610,55 | | |
| 9 | Pengawasan dan pengendalain pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 75,00 | 13.722.455.500,00 | 3,00 | 150.085.500,00 | 5 | 162.123.000 | 5 | 155.790.000 | 100,00 | 96,09 | 8 | 305.875.500 | 10,67 | 2,23 | | |
| 10 | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, oemusnahan dan penghapusan barang milik daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 15,00 | 147.375.000,00 | 22,00 | 2.652.964.067,00 | 15 | 3.250.273.900 | 12 | 3.247.959.961 | 80,00 | 99,93 | 34 | 5.900.924.028 | 226,67 | 4004,02 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 5,00 | 328.850.000,00 | 4,00 | 57.167.500,00 | 3 | 29.475.000 | 3 | 26.679.000 | 100,00 | 90,51 | 7 | 83.846.500 | 140,00 | 25,50 | | |
| 12 | Penyusunan laporan barang milik daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan | 200,00 | 152.565.000,00 | 2,00 | 99.651.500,00 | 1 | 65.770.000 | 1 | 59.608.000 | 100,00 | 90,63 | 3 | 159.259.500 | 1,50 | 104,39 | | |
| 13 | Pembinaan pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 75,00 | 101.049.500,00 | 75,00 | 101.049.500,00 | 40 | 30.513.000 | 40 | 6.120.000 | 100,00 | 20,06 | 115 | 107.169.500 | 153,33 | 106,06 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **66.992.853.710,00** | **100,00** | **40.195.712.226,00** | **100** | **13.254.815.704** | **100** | **12.921.603.017** | **100,00** | **97,49** | **200** | **53.117.315.243** | **200,00** | **79,29** | **Badan Pendapatan Daerah** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **60,00** | **40.300.000,00** | **36,00** | **24.180.000,00** | **12** | **8.060.000** | **12** | **8.060.000** | **100,00** | **100,00** | **48** | **32.240.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 7.250.000,00 | 6,00 | 4.350.000,00 | 2 | 1.450.000 | 2 | 1.450.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 5.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.500.000,00 | 3,00 | 3.900.000,00 | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.750.000,00 | 3,00 | 3.450.000,00 | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4.600.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.050.000,00 | 3,00 | 3.630.000,00 | 1 | 1.210.000 | 1 | 1.210.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4.840.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 4.250.000,00 | 3,00 | 2.550.000,00 | 1 | 850.000 | 1 | 850.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 3.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20,00 | 7.000.000,00 | 12,00 | 4.200.000,00 | 4 | 1.400.000 | 4 | 1.400.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 5.600.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 10,00 | 3.500.000,00 | 6,00 | 2.100.000,00 | 2 | 700.000 | 2 | 700.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 2.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Administrasi keuaangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | 285,00 | 62.413.552.240,00 | 171,00 | 37.448.131.344,00 | 57 | 12.316.755.410 | 55 | 12.042.643.555 | 96,49 | 97,77 | 226 | 49.490.774.899 | 79,30 | 79,29 | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 61.114.097.240,00 | 2.520,00 | 36.668.458.344,00 | 840 | 12.056.864.410 | 723 | 11.793.480.055 | 86,07 | 97,82 | 3243 | 48.461.938.399 | 77,21 | 79,30 | | |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | Dokumen | 60,00 | 410.355.000,00 | 36,00 | 246.213.000,00 | 12 | 82.071.000 | 12 | 78.083.500 | 100,00 | 95,14 | 48 | 324.296.500 | 80,00 | 79,03 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 872.250.000,00 | 36,00 | 523.350.000,00 | 12 | 174.450.000 | 12 | 167.710.000 | 100,00 | 96,14 | 48 | 691.060.000 | 80,00 | 79,23 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 10.600.000,00 | 3,00 | 6.360.000,00 | 1 | 2.120.000 | 1 | 2.120.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 8.480.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90,00 | 6.250.000,00 | 54,00 | 3.750.000,00 | 18 | 1.250.000 | 18 | 1.250.000 | 100,00 | 100,00 | 72 | 5.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | 6,00 | 1.040.251.470,00 | 6,00 | 624.150.882,00 | 6 | 217.040.294 | 6 | 202.283.062 | 100,00 | 93,20 | 12 | 826.433.944 | 200,00 | 79,45 | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 5.841.970,00 | 3,00 | 3.505.182,00 | 1 | 1.168.394 | 1 | 1.129.000 | 100,00 | 96,63 | 4 | 4.634.182 | 80,00 | 79,33 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 60,00 | 11.465.000,00 | 36,00 | 6.879.000,00 | 12 | 2.293.000 | 12 | 2.279.000 | 100,00 | 99,39 | 48 | 9.158.000 | 80,00 | 79,88 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 211.687.500,00 | 15,00 | 127.012.500,00 | 5 | 57.337.500 | 5 | 56.132.500 | 100,00 | 97,90 | 20 | 183.145.000 | 80,00 | 86,52 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 60,00 | 122.857.000,00 | 36,00 | 73.714.200,00 | 12 | 24.571.400 | 12 | 22.648.400 | 100,00 | 92,17 | 48 | 96.362.600 | 80,00 | 78,43 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 75.000.000,00 | 36,00 | 45.000.000,00 | 12 | 131.670.000 | 0 | 120.094.162 | 0,00 | 91,21 | 36 | 165.094.162 | 60,00 | 220,13 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 613.400.000,00 | 36,00 | 368.040.000,00 | 12 | 194.400.000 | 12 | 190.348.900 | 100,00 | 97,92 | 48 | 558.388.900 | 80,00 | 91,03 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **798.500.000,00** | **2,00** | **479.100.000,00** | **2** | **83.700.000** | **2** | **83.448.900** | **100,00** | **99,70** | **4** | **562.548.900** | **200,00** | **70,45** | | |
| | Pengadaan mebel | | Unit | 30,00 | 568.500.000,00 | 18,00 | 341.100.000,00 | 6 | 110.700.000 | 6 | 106.900.000 | 100,00 | 96,57 | 24 | 448.000.000 | 80,00 | 78,80 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 30,00 | 230.000.000,00 | 18,00 | 138.000.000,00 | 6 | 444.410.000 | 6 | 417.840.000 | 100,00 | 94,02 | 24 | 555.840.000 | 80,00 | 241,67 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **2.267.000.000,00** | **2,00** | **1.360.200.000,00** | **2** | **2.200.000** | **2** | **2.200.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **1.362.400.000** | **200,00** | **60,10** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 11.000.000,00 | 36,00 | 6.600.000,00 | 12 | 442.210.000 | 12 | 415.640.000 | 100,00 | 93,99 | 48 | 422.240.000 | 80,00 | 3838,55 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 2.256.000.000,00 | 36,00 | 1.353.600.000,00 | 12 | 74.150.000 | 12 | 60.427.500 | 100,00 | 81,49 | 48 | 1.414.027.500 | 80,00 | 62,68 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **433.250.000,00** | **2,00** | **259.950.000,00** | **2** | **54.150.000** | **2** | **50.463.000** | **100,00** | **93,19** | **4** | **310.413.000** | **200,00** | **71,65** | | |
| | Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 57,00 | 333.250.000,00 | 57,00 | 199.950.000,00 | 57 | 20.000.000 | 57 | 9.964.500 | 100,00 | 49,82 | 114 | 209.914.500 | 200,00 | 62,99 | | |
| | | | | 3,00 | 100.000.000,00 | 3,00 | 60.000.000,00 | | | #REF! | 1.072.117.800 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | 1.132.117.800 | 0,00 | 1132,12 | | |
| | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Persentase Realisasi Pendapatan** | **Persen** | **100,00** | **5.555.401.000,00** | **48,22** | **2.348.419.900,00** | **70** | **1.112.642.800** | **70** | **1.072.117.800** | **100,00** | **96,36** | **118** | **3.420.537.700** | **118,22** | **61,57** | | |
| | **Pengelolaan pendapatan daerah** | **Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Dokumen** | **350,00** | **5.555.401.000,00** | **11,00** | **2.348.419.900,00** | **1** | **106.947.500** | **1** | **106.947.500** | **100,00** | **100,00** | **12** | **2.455.367.400** | **3,43** | **44,20** | | |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen | 15,00 | 627.500.000,00 | 12,00 | 246.400.000,00 | 1 | 46.731.500 | 1 | 38.739.000 | 100,00 | 82,90 | 13 | 285.139.000 | 86,67 | 45,44 | | |
| | Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pa- | Dokumen | 15,00 | 271.064.000,00 | 12,00 | 189.557.000,00 | 7 | 21.900.000 | 4 | 12.500.000 | 57,14 | 57,08 | 16 | 202.057.000 | 106,67 | 74,54 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | jak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Unit | 21,00 | 65.200.000,00 | 2,00 | 10.000.000,00 | 12 | 160.480.000 | 6 | 159.098.000 | 50,00 | 99,14 | 8 | 169.098.000 | 38,10 | 259,35 | | |
| | Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 60,00 | 935.000.000,00 | 32,00 | 358.752.000,00 | 12 | 262.170.000 | 12 | 245.479.500 | 100,00 | 93,63 | 44 | 604.231.500 | 73,33 | 64,62 | | |
| | Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 18,00 | 828.250.000,00 | 15,00 | 254.744.400,00 | 12 | 401.353.800 | 12 | 401.243.800 | 100,00 | 99,97 | 27 | 655.988.200 | 150,00 | 79,20 | | |
| | Penetapan wajib pajak daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 60,00 | 2.006.769.000,00 | 33,00 | 804.658.500,00 | 12 | 8.750.000 | 12 | 8.750.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | 813.408.500 | 75,00 | 40,53 | | |
| | Peneltiian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Dokumen | 36,00 | 21.450.000,00 | - | - | 12 | 47.020.000 | 12 | 46.250.000 | 100,00 | 98,36 | 12 | 46.250.000 | 33,33 | 215,62 | | |
| | Penagihan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Dokumen | 60,00 | 235.100.000,00 | 23,00 | 96.040.000,00 | 12 | 57.290.000 | 12 | 53.110.000 | 100,00 | 92,70 | 35 | 149.150.000 | 58,33 | 63,44 | | |
| | Pengendalian, pemeriksanaan dan penagwasan pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen | 60,00 | 565.068.000,00 | 33,00 | 398.268.000,00 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 33 | 398.268.000 | 55,00 | 70,48 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **268.069.880.080,00** | **100,00** | **166.582.679.179,00** | **100** | **36.156.959.111** | **100** | **34.200.265.414** | **100,00** | **94,59** | **100** | **200.782.944.593** | **100,00** | **74,90** | **Sekretariat Daerah** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **25,00** | **81.689.864.230,00** | **15,00** | **49.013.918.538,00** | **5** | **14.775.000** | **5** | **14.775.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **49.028.693.538** | **80,00** | **60,02** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 19.375.000,00 | 3,00 | 11.625.000,00 | 1 | 3.875.000 | 1 | 3.875.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 15.500.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 18.625.000,00 | 3,00 | 11.175.000,00 | 1 | 3.725.000 | 1 | 3.725.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 14.900.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 18.625.000,00 | 3,00 | 11.175.000,00 | 1 | 3.725.000 | 1 | 3.725.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 14.900.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 8.625.000,00 | 3,00 | 5.175.000,00 | 1 | 1.725.000 | 1 | 1.725.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.900.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 8.625.000,00 | 3,00 | 5.175.000,00 | 1 | 1.725.000 | 1 | 1.725.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 6.900.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **155,00** | **81.615.989.230,00** | **93,00** | **48.969.593.538,00** | **31** | **16.515.743.787** | **31** | **15.630.663.526** | **100,00** | **94,64** | **124** | **64.600.257.064** | **80,00** | **79,15** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 79.758.659.230,00 | ######### | 47.855.195.538,00 | 5037 | 16.025.595.787 | 5037 | 15.164.145.526 | 100,00 | 94,62 | 20148 | 63.019.341.064 | 80,00 | 79,01 | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 1.820.830.000,00 | 36,00 | 1.092.498.000,00 | 12 | 482.448.000 | 12 | 458.818.000 | 100,00 | 95,10 | 48 | 1.551.316.000 | 80,00 | 85,20 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 17.625.000,00 | 3,00 | 10.575.000,00 | 1 | 3.525.000 | 1 | 3.525.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 14.100.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 20,00 | 18.875.000,00 | 12,00 | 11.325.000,00 | 4 | 4.175.000 | 4 | 4.175.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 15.500.000 | 80,00 | 82,12 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **########** | **1.707.910.000,00** | **630,00** | **1.024.746.000,00** | **255** | **360.182.000** | **252** | **345.600.000** | **98,82** | **95,95** | **882** | **1.370.346.000** | **84,00** | **80,24** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | ######## | 1.707.910.000,00 | 765,00 | 1.024.746.000,00 | 255 | 360.182.000 | 252 | 345.600.000 | 98,82 | 95,95 | 1017 | 1.370.346.000 | 79,76 | 80,24 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **4,00** | **20.416.210.000,00** | **4,00** | **12.249.726.000,00** | **4** | **4.442.006.000** | **4** | **3.911.650.178** | **100,00** | **88,06** | **8** | **16.161.376.178** | **200,00** | **79,16** | | |
| 1 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 525,00 | 1.856.990.500,00 | 315,00 | 1.114.194.300,00 | 105 | 371.397.100 | 104 | 359.516.500 | 99,05 | 96,80 | 419 | 1.473.710.800 | 79,81 | 79,36 | | |
| 2 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 35,00 | 247.219.500,00 | 21,00 | 148.331.700,00 | 7 | 49.443.900 | 6,8 | 46.436.600 | 97,14 | 93,92 | 27,8 | 194.768.300 | 79,43 | 78,78 | | |
| 3 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 55,00 | 8.750.000.000,00 | 33,00 | 5.250.000.000,00 | 11 | 1.765.000.000 | 11 | 1.631.025.000 | 100,00 | 92,41 | 44 | 6.881.025.000 | 80,00 | 78,64 | | |
| 4 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 25,00 | 9.562.000.000,00 | 15,00 | 5.737.200.000,00 | 5 | 2.256.165.000 | 5 | 1.874.672.078 | 100,00 | 83,09 | 20 | 7.611.872.078 | 80,00 | 79,61 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3,00** | **3.647.500.000,00** | **3,00** | **2.188.500.000,00** | **2** | **1.558.000.000** | **2** | **1.519.516.500** | **100,00** | **97,53** | **2,5** | **3.708.016.500** | **83,33** | **101,66** | | |
| 1 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 110,00 | 2.000.000.000,00 | 66,00 | 1.200.000.000,00 | 22 | 712.000.000 | 22 | 692.976.000 | 100,00 | 97,33 | 88 | 1.892.976.000 | 80,00 | 94,65 | | |
| 2 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | ########## | 1.647.500.000,00 | 651,00 | 988.500.000,00 | 217 | 846.000.000 | 216 | 826.540.500 | 99,54 | 97,70 | 867 | 1.815.040.500 | 79,91 | 110,17 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3,00** | **13.767.450.000,00** | **3,00** | **8.260.470.000,00** | **3** | **2.798.640.000** | **3** | **2.758.650.000** | **100,00** | **98,57** | **3** | **11.019.120.000** | **100,00** | **80,04** | | |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 15,00 | 330.000.000,00 | 9,00 | 198.000.000,00 | 3 | 66.000.000 | 3 | 61.000.000 | 100,00 | 92,42 | 12 | 259.000.000 | 80,00 | 78,48 | | |
| 2 | Penyediaan jasa pe,ayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 5,00 | 100.000.000,00 | 3,00 | 60.000.000,00 | 12 | 2.732.640.000 | 12 | 2.697.650.000 | 100,00 | 98,72 | 15 | 2.757.650.000 | 300,00 | 2757,65 | | |
| 3 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 50,00 | 13.337.450.000,00 | 30,00 | 8.002.470.000,00 | 2 | 1.761.550.000 | 1,7 | 1.709.147.854 | 85,00 | 97,03 | 31,7 | 9.711.617.854 | 63,40 | 72,81 | | |
| | **Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya** | **Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara** | **Unit** | **2,00** | **6.649.500.000,00** | **2,00** | **3.989.700.000,00** | **250** | **695.000.000** | **210** | **669.032.581** | **84,00** | **96,26** | **106** | **4.658.732.581** | **5300,00** | **70,06** | | |
| 1 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | ########## | 3.350.000.000,00 | 750,00 | 2.010.000.000,00 | 4 | 1.066.550.000 | 4 | 1.040.115.273 | 100,00 | 97,52 | 754 | 3.050.115.273 | 60,32 | 91,05 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Admnitrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah jenis layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jenis | 45,00 | 3.299.500.000,00 | 27,00 | 1.979.700.000,00 | 4 | 1.450.167.324 | 4 | 1.301.412.356 | 100,00 | 89,74 | 31 | 3.281.112.356 | 68,89 | 99,44 | | |
| | **Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah** | **Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Orang/Bulan** | **4,00** | **7.232.446.620,00** | **4,00** | **2.878.365.664,00** | **28** | **163.217.324** | **28** | **161.412.356** | **100,00** | **98,89** | **16** | **3.039.778.020** | **400,00** | **42,03** | | |
| 1 | Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | 140,00 | 797.696.620,00 | 32,00 | 319.003.808,00 | 18 | 434.950.000 | 18 | 417.500.000 | 100,00 | 95,99 | 50 | 736.503.808 | 35,71 | 92,33 | | |
| 2 | Pelaksanaan medical checkup kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang | 90,00 | 2.174.750.000,00 | 14,00 | 857.800.000,00 | 24 | 252.000.000 | 20 | 197.500.000 | 83,33 | 78,37 | 34 | 1.055.300.000 | 37,78 | 48,53 | | |
| 3 | Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/Bulan | 120,00 | 1.260.000.000,00 | 5,00 | 501.561.856,00 | 8 | 600.000.000 | 8 | 525.000.000 | 100,00 | 87,50 | 13 | 1.026.561.856 | 10,83 | 81,47 | | |
| 4 | Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah | Jumlah jenis fasilitas kerumahtanggan sekretariat daerah yang tersedia | Jenis | 120,00 | 3.000.000.000,00 | 4,66 | 1.200.000.000,00 | 3 | 1.780.000.000 | 3 | 1.610.000.000 | 100,00 | 90,45 | 7,66 | | 6,38 | 0,00 | | |
| | **Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah** | **Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan** | **Paket** | **15,00** | **9.300.000.000,00** | **4,66** | **1.200.000.000,00** | **3** | **900.000.000** | **3** | **750.000.000** | **100,00** | **83,33** | **7,66** | **1.950.000.000** | **51,07** | **20,97** | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | 3,00 | 4.500.000.000,00 | 3,00 | 3.720.000.000,00 | 3 | 720.000.000 | 3 | 720.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | 4.440.000.000 | 100,00 | 98,67 | | |
| 2 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat | Paket | 15,00 | 3.600.000.000,00 | 9,00 | 1.800.000.000,00 | 3 | 160.000.000 | 2 | 140.000.000 | 66,67 | 87,50 | 11 | 1.940.000.000 | 73,33 | 53,89 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Daerah yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penataan organisasi | Jumlah kebijakan terkait penataan organisasi yang di keluarkan | kebijakan | 15,00 | 1.200.000.000,00 | 9,00 | 1.440.000.000,00 | 21 | 359.295.000 | 22 | 347.795.000 | 104,76 | 96,80 | 31 | 1.787.795.000 | 206,67 | 148,98 | | |
| **4** | **Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan** | **Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **Dokumen** | **110,00** | **1.864.010.000,00** | **9,00** | **480.000.000,00** | **5** | **81.250.000** | **5** | **69.750.000** | **100,00** | **85,85** | **14** | **549.750.000** | **12,73** | **29,49** | | |
| | Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Laporan | 25,00 | 365.000.000,00 | 18,00 | 749.855.320,00 | 5 | 39.600.000 | 5 | 39.600.000 | 100,00 | 100,00 | 23 | 789.455.320 | 92,00 | 216,29 | | |
| 1 | Peningkatan kinerja dan feormasi birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen | 25,00 | 240.000.000,00 | 13,00 | 148.750.000,00 | 7 | 141.045.000 | 7 | 141.045.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | 289.795.000 | 80,00 | 120,75 | | |
| 2 | Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen | 35,00 | 1.179.010.000,00 | 8,70 | 95.000.000,00 | 4 | 97.400.000 | 4 | 97.400.000 | 100,00 | 100,00 | 12,7 | 192.400.000 | 36,29 | 16,32 | | |
| 3 | Pelaksanaan protokolo dan komunikasi pimpinan | Jumlah Layanan Keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | Layanan | 20,00 | 40.000.000,00 | 8,07 | 481.475.320,00 | 3 | 5.116.600.000 | 3 | 5.051.055.000 | 100,00 | 98,72 | 11,07 | 5.532.530.320 | 55,35 | ###### | | |
| 4 | Fasilitasi keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Laporan | 5,00 | 40.000.000,00 | 3,08 | 8.000.000,00 | 51 | 1.135.700.000 | 50 | 1.127.380.000 | 98,04 | 99,27 | 53,08 | 1.135.380.000 | 1061,60 | 2838,45 | | |
| **5** | **Fasilitasi komunikasi pimpinan** | **Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan** | **Laporan** | **5,00** | **19.867.000.000,00** | **1,00** | **15.000.000,00** | **1** | **7.500.000** | **1** | **7.500.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **22.500.000** | **40,00** | **0,11** | | |
| 1 | Pendokumentasian tugas pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Laporan | ###### | 19.867.000.000,00 | 3,00 | 15.000.000,00 | 1088 | 3.973.400.000 | 1065 | 3.916.175.000 | 97,89 | 98,56 | 534 | 3.931.175.000 | 9,82 | 19,79 | | |
| | **Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat** | **Persentase Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yg dilaksanakan** | **Persen** | **100,00** | **95.764.692.457,00** | **162,58** | **20.133.382.919,00** | **100** | **3.413.768.000** | **58** | **3.231.938.720** | **58,00** | **94,67** | **220,6** | **23.365.321.639** | **220,58** | **24,40** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi tata pemerintahan** | **Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan yang dilaksanakan** | **Dokumen** | **170,00** | **49.183.665.819,00** | **11,50** | **4.934.561.600,00** | **34** | **963.123.000** | **11** | **881.383.720** | **32,35** | **91,51** | **22,5** | **5.815.945.320** | **13,24** | **11,82** | | |
| 1 | Penataan administrasi pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Dokumen | 115,00 | 609.005.000,00 | 10,00 | 409.100.000,00 | 23 | 66.635.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 409.100.000 | 8,70 | 67,18 | | |
| 2 | Pengelolaan administrasi kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Dokumen | 35,00 | 1.082.250.000,00 | 12,00 | 532.626.100,00 | 7 | 216.450.000 | 7 | 215.650.000 | 100,00 | 99,63 | 19 | 748.276.100 | 54,29 | 69,14 | | |
| 3 | Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dokumen | 40,00 | 47.492.410.819,00 | 21,00 | 3.992.835.500,00 | 4 | 680.038.000 | 4 | 665.733.720 | 100,00 | 97,90 | 25 | 4.658.569.220 | 62,50 | 9,81 | | |
| | **Pelaksanaan kebijakan kesejhateraan rakyat** | **Jumlah kebijakan terkait kesejahteraan rakyat** | **Kebijakan** | **40,00** | **31.964.785.819,00** | **8,00** | **1.994.910.500,00** | **8** | **2.096.960.000** | **8** | **2.041.160.000** | **100,00** | **97,34** | **16** | **4.036.070.500** | **40,00** | **12,63** | | |
| 1 | Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen | 20,00 | 7.713.525.000,00 | 12,00 | 1.419.510.500,00 | 4 | 636.705.000 | 4 | 614.955.000 | 100,00 | 96,58 | 16 | 2.034.465.500 | 80,00 | 26,38 | | |
| 2 | Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Dokumen | 15,00 | 7.814.100.000,00 | 5,25 | 36.300.000,00 | 3 | 1.437.855.000 | 3 | 1.415.105.000 | 100,00 | 98,42 | 8,25 | 1.451.405.000 | 55,00 | 18,57 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 3 | Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Dokumen | 15,00 | 16.437.160.819,00 | 9,00 | 539.100.000,00 | 1 | 22.400.000 | 1 | 11.100.000 | 100,00 | 49,55 | 10,00 | 550.200.000 | 66,67 | 3,35 | | |
| | **Fasilitasi dan koordinasi hukum** | **Jumlah kebijkan terkait hukum dan penetapan produk hukum** | **Kebijakan** | **########** | **14.616.240.819,00** | **3.346,00** | **13.203.910.819,00** | **3** | **353.685.000** | **3** | **309.395.000** | **100,00** | **87,48** | **####** | **13.513.305.819** | **99,82** | **92,45** | | |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Dokumen | ########## | 646.770.000,00 | 23,19 | 412.290.000,00 | 1600 | 49.685.000 | 1600 | 47.295.000 | 100,00 | 95,19 | 1623 | 459.585.000 | 20,29 | 71,06 | | |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kasus | ########## | 1.174.150.000,00 | 4.085,00 | 77.900.000,00 | 6 | 276.800.000 | 1 | 234.900.000 | 16,67 | 84,86 | ####### | 312.800.000 | 99,59 | 26,64 | | |
| 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Dokumen | ########## | 12.795.320.819,00 | 100,00 | 12.713.720.819,00 | 2000 | 27.200.000 | 1623 | 27.200.000 | 81,15 | 100,00 | 861,5 | 12.740.920.819 | 14,12 | 99,57 | | |
| | **Perekonomian dan pembangunan** | **Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yg dilaksanakan** | **Persen** | **100,00** | **18.711.184.838,00** | **100,00** | **6.926.667.019,00** | **100** | **2.828.709.800** | **100** | **2.648.722.000** | **100,00** | **93,64** | **100** | **9.575.389.019** | **100,00** | **51,17** | | |
| | **Pelaksanaan kebijakan perekonomian** | **Jumlah kebijakan terkait perekonomian yang di keluarkan** | **Kebijakan** | **120,00** | **9.508.740.838,00** | **45,00** | **6.926.667.019,00** | **25** | **318.537.800** | **25** | **312.310.000** | **100,00** | **98,04** | **35** | **7.238.977.019** | **29,17** | **76,13** | | |
| 1 | Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dokumen | 60,00 | 8.215.431.419,00 | 20,00 | 807.139.419,00 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 32 | 819.139.419 | 53,33 | 9,97 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pengendalian dan distribusi perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan | 55,00 | 1.060.225.000,00 | 32,00 | 423.325.000,00 | 11 | 212.300.000 | 11 | 208.890.000 | 100,00 | 98,39 | 43 | 632.215.000 | 78,18 | 59,63 | | |
| 3 | Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Dokumen | 10,00 | 233.084.419,00 | 6,00 | 134.384.419,00 | 2 | 94.237.800 | 2 | 91.420.000 | 100,00 | 97,01 | 8 | 225.804.419 | 80,00 | 96,88 | | |
| | **Pelaksanaan administrasi pembangunan** | **Jumlah kebijakan terkiat administrasi pembangunan yanf di tetapkan** | **Kebijakan** | **55,00** | **6.922.122.000,00** | **19,00** | **249.430.000,00** | **19** | **193.100.000** | **19** | **105.620.000** | **100,00** | **54,70** | **38** | **355.050.000** | **69,09** | **5,13** | | |
| 1 | Fasilitasi penyusunan program pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Dokumen | 60,00 | 4.601.222.000,00 | 2,00 | 5.661.153.800,00 | 2 | 48.800.000 | 2 | 19.500.000 | 100,00 | 39,96 | 4 | 5.680.653.800 | 6,67 | 123,46 | | |
| 2 | Pengendalian dan evaluasi program pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Laporan | 60,00 | 2.164.000.000,00 | 5,75 | 90.000.000,00 | 12 | 82.100.000 | 12 | 47.100.000 | 100,00 | 57,37 | 17,75 | 137.100.000 | 29,58 | 6,34 | | |
| 3 | Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 60,00 | 156.900.000,00 | 34,00 | 33.530.000,00 | 17 | 62.200.000 | 17 | 39.020.000 | 100,00 | 62,73 | 51 | 72.550.000 | 85,00 | 46,24 | | |
| | **Pengelolaan barang dan jasa** | **Jumlah kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang di tetapkan** | **Kebijakan** | **60,00** | **2.280.322.000,00** | **30,00** | **5.537.623.800,00** | **10** | **2.317.072.000** | **10** | **2.230.792.000** | **100,00** | **96,28** | **40** | **7.768.415.800** | **66,67** | **340,67** | | |
| 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan arang dan Jasa | Dokumen | ########## | 1.140.161.000,00 | 1.975,00 | 458.373.800,00 | 5179 | 2.067.000.000 | 5179 | 2.047.400.000 | 100,00 | 99,05 | 7.154 | 2.505.773.800 | 40,85 | 219,77 | | |
| 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Dokumen | 15,00 | 915.276.000,00 | 7,00 | 72.464.000,00 | 3 | 139.092.000 | 3 | 138.092.000 | 100,00 | 99,28 | 10 | 210.556.000 | 66,67 | 23,00 | | |
| 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Orang | 515,00 | 224.885.000,00 | 103,00 | 385.909.800,00 | 43 | 110.980.000 | 43 | 45.300.000 | 100,00 | 40,82 | 146 | 431.209.800 | 28,35 | 191,75 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100** | **245.792.384.145** | **100** | **84.573.355.797** | **100** | **29.190.981.546** | **100** | **27.198.521.161** | **100,00** | **93,17** | **200** | **111.771.876.958** | **200,00** | **45,47** | **Sekretariat DPRD** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55** | **165.512.500** | **33** | **99.307.500** | **11** | **37.000.000** | **11** | **37.000.000** | **100,00** | **100,00** | **44** | **136.307.500** | **80,00** | **82,35** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 30.512.500 | 6 | 18.307.500 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 24.307.500 | 80,00 | 79,66 | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 25.000.000 | 3 | 15.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 20.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 3 | 12.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 16.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 3 | 12.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 16.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 20.000.000 | 3 | 12.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 16.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 30.000.000 | 3 | 18.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 24.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 20.000.000 | 12 | 12.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 20.000.000 | 80,00 | 100,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **225** | **24.712.068.770** | **33** | **14.827.241.262** | **941** | **5.141.750.727** | **941** | **4.807.018.353** | **100,00** | **93,49** | **974** | **19.634.259.615** | **432,89** | **79,45** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4.550 | 23.786.118.770 | 2.730 | 14.271.671.262 | 910 | 4.956.560.727 | 910 | 4.623.618.353 | 100,00 | 93,28 | 3.640 | 18.895.289.615 | 80,00 | 79,44 | | |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 785.950.000 | 36 | 471.570.000 | 12 | 157.190.000 | 12 | 155.400.000 | 100,00 | 98,86 | 48 | 626.970.000 | 80,00 | 79,77 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 40.000.000 | 3 | 24.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 32.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 90 | 100.000.000 | 54 | 60.000.000 | 18 | 20.000.000 | 18 | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 72 | 80.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **325** | **3.905.000.000** | **195** | **2.343.000.000** | **1** | **25.600.000** | **1** | **25.600.000** | **100,00** | **100,00** | **196** | **2.368.600.000** | **60,31** | **60,66** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 3.905.000.000 | 3 | 2.343.000.000 | 1 | 25.600.000 | 1 | 25.600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.368.600.000 | 80,00 | 60,66 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **8** | **10.663.763.125** | **8** | **6.398.257.875** | **8** | **1.800.071.625** | **8** | **1.563.603.740** | **100,00** | **86,86** | **16** | **7.961.861.615** | **200,00** | **74,66** | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 97.683.125 | 3 | 58.609.875 | 1 | 19.538.625 | 1 | 19.535.000 | 100,00 | 99,98 | 4 | 78.144.875 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 111.025.000 | 3 | 66.615.000 | 1 | 63.081.000 | 1 | 53.106.000 | 100,00 | 84,19 | 4 | 119.721.000 | 80,00 | 107,83 | | |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 2.641.550.000 | 12 | 1.584.930.000 | 4 | 628.310.000 | 4 | 541.972.000 | 100,00 | 86,26 | 16 | 2.126.902.000 | 80,00 | 80,52 | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 795.000.000 | 6 | 477.000.000 | 2 | 164.500.000 | 2 | 50.000.000 | 100,00 | 30,40 | 8 | 527.000.000 | 80,00 | 66,29 | | |
| 5 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | Dokumen | 250 | 287.500.000 | 150 | 172.500.000 | 50 | 502.000.000 | 50 | 490.220.000 | 100,00 | 97,65 | 200 | 662.720.000 | 80,00 | 230,51 | | |
| 6 | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 10 | 2.387.500.000 | 6 | 1.432.500.000 | 2 | 311.760.000 | 2 | 297.888.740 | 100,00 | 95,55 | 8 | 1.730.388.740 | 80,00 | 72,48 | | |
| 7 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 1.558.900.000 | 36 | 935.340.000 | 12 | 110.882.000 | 12 | 110.882.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 1.046.222.000 | 80,00 | 67,11 | | |
| 8 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 2.784.605.000 | 36 | 1.670.763.000 | 12 | 313.000.000 | 12 | 280.400.000 | 100,00 | 89,58 | 48 | 1.951.163.000 | 80,00 | 70,07 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2** | **1.120.000.000** | **2** | **672.000.000** | **2** | **239.000.000** | **2** | **229.200.000** | **100,00** | **95,90** | **4** | **901.200.000** | **200,00** | **80,46** | | |
| 1 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 50 | 820.000.000 | 30 | 492.000.000 | 10 | 74.000.000 | 10 | 51.200.000 | 100,00 | 69,19 | 40 | 543.200.000 | 80,00 | 66,24 | | |
| 2 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 125 | 300.000.000 | 75 | 180.000.000 | 25 | 825.226.788 | 25 | 775.461.554 | 100,00 | 93,97 | 100 | 955.461.554 | 80,00 | 318,49 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **3** | **4.470.983.690** | **3** | **2.682.590.214** | **3** | **37.300.000** | **3** | **37.300.000** | **100,00** | **100,00** | **6** | **2.719.890.214** | **200,00** | **60,83** | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 186.500.000 | 36 | 111.900.000 | 12 | 42.000.000 | 12 | 41.539.554 | 100,00 | 98,90 | 48 | 153.439.554 | 80,00 | 82,27 | | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 210.000.000 | 36 | 126.000.000 | 12 | 745.926.788 | 12 | 696.622.000 | 100,00 | 93,39 | 48 | 822.622.000 | 80,00 | 391,72 | | |
| 3 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 4.074.483.690 | 36 | 2.444.690.214 | 12 | 1.051.663.600 | 12 | 859.985.738 | 100,00 | 81,77 | 48 | 3.304.675.952 | 80,00 | 81,11 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **5** | **3.756.350.000** | **5** | **2.253.810.000** | **5** | **296.270.000** | **5** | **209.798.500** | **100,00** | **70,81** | **10** | **2.463.608.500** | **200,00** | **65,59** | | |
| 1 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 240 | 1.431.350.000 | 144 | 858.810.000 | 48 | 155.393.600 | 48 | 138.725.291 | 100,00 | 89,27 | 192 | 997.535.291 | 80,00 | 69,69 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 240 | 75.000.000 | 144 | 45.000.000 | 48 | 15.000.000 | 48 | 14.835.150 | 100,00 | 98,90 | 192 | 59.835.150 | 80,00 | 79,78 | | |
| 3 | Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 20 | 975.000.000 | 12 | 585.000.000 | 4 | 185.000.000 | 4 | 164.004.345 | 100,00 | 88,65 | 16 | 749.004.345 | 80,00 | 76,82 | | |
| 4 | Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100 | 1.275.000.000 | 60 | 765.000.000 | 20 | 400.000.000 | 20 | 332.622.452 | 100,00 | 83,16 | 80 | 1.097.622.452 | 80,00 | 86,09 | | |
| 5 | **Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya** | **Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi** | **Unit** | 5 | 178.526.206.060 | 0 | 55.197.148.946 | **1** | 18.273.918.806 | **1** | 17.326.601.776 | 100,00 | 94,82 | 1 | 72.523.750.722 | 20,00 | 40,62 | | |
| | **Layana keuangan dan kesejahteraan DPRD** | **Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD** | **Layanan** | **3** | **89.388.103.030** | **3** | **27.648.574.473** | **3** | **17.854.668.806** | **3** | **16.941.849.576** | **100,00** | **94,89** | **6** | **44.590.424.049** | **200,00** | **49,88** | | |
| 1 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Orang/Bulan | 2.450 | 87.169.353.030 | 350 | 26.908.074.473 | 490 | 369.250.000 | 490 | 369.250.000 | 100,00 | 100,00 | 840 | 27.277.324.473 | 34,29 | 31,29 | | |
| 2 | Penyediaan pakaian dinas dan atibut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Paket | 134 | 1.968.750.000 | 113 | 640.500.000 | 7 | 50.000.000 | 7 | 15.502.200 | 100,00 | 31,00 | 120 | 656.002.200 | 89,55 | 33,32 | | |
| 3 | **Pelaksananaan medical chekcup DPRD** | **Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD** | **Orang** | 175 | 18.472.500.000 | 0 | 100.000.000 | **35** | 1.722.750.000 | **35** | 1.522.850.000 | 100,00 | 88,40 | 35 | 1.622.850.000 | 20,00 | 8,79 | | |
| | **Layanan administrasi DPRD** | **Jumlah layanan administrasi DPRD** | **Layanan** | **3** | **9.453.750.000** | **3** | **3.258.980.000** | **3** | **3.750.000** | **3** | **3.600.000** | **100,00** | **96,00** | **6** | **3.262.580.000** | **200,00** | **34,51** | | |
| 1 | Fasilitasi fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Laporan | 60 | 18.750.000 | 13 | 3.780.000 | 12 | 69.000.000 | 12 | 64.250.000 | 100,00 | 93,12 | 25 | 68.030.000 | 41,67 | 362,83 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Paket | 108 | 9.000.000.000 | 11 | 3.150.000.000 | 36 | 1.650.000.000 | 36 | 1.455.000.000 | 100,00 | 88,18 | 47 | 4.605.000.000 | 43,52 | 51,17 | | |
| | **Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD** | **Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan** | **Dokumen** | **500** | **783000000** | **16** | **337550000** | **100** | **156.600.000** | **100** | **138.297.000** | **100,00** | **88,31** | **116** | **475.847.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah** | **Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah** | **Dokumen** | **200** | **26000000** | **14** | **14600000** | **40** | **5.200.000** | **40** | **2.600.000** | **100,00** | **50,00** | **54** | **17.200.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Dokumen | 60 | 415750000 | 26 | 209650000 | 12 | 83.150.000 | 12 | 79.975.000 | 100,00 | 96,18 | 38 | 289.625.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Dokumen | 60 | 91250000 | 11 | 63300000 | 12 | 18.250.000 | 12 | 5.800.000 | 100,00 | 31,78 | 23 | 69.100.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen | 60 | 250000000 | 11 | 50000000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 49.922.000 | 100,00 | 99,84 | 23 | 99.922.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pembahasan kebijakan Anggaran | Jumlah rekomendasi-yang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah | Rekomendasi | 20 | 669000000 | 18 | 275270000 | 4 | 133.800.000 | 4 | 132.225.000 | 100,00 | 98,82 | 22 | 407.495.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pembahasan KUA dan PPAS** | **Jumlah laporan KUA dan PPAS** | **Dokumen** | **50** | **182000000** | **5** | **54725000** | **10** | **36.400.000** | **10** | **34.950.000** | **100,00** | **96,02** | **15** | **89.675.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah laporan Perubahan KUA dan PPAS | Dokumen | 10 | 84000000 | 16 | 58170000 | 2 | 16.800.000 | 2 | 16.675.000 | 100,00 | 99,26 | 18 | 74.845.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pembahasan APBD | Jumlah Pembahasan APBD | Dokumen | 10 | 124000000 | 1 | 68200000 | 2 | 24.800.000 | 2 | 24.800.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | 93.000.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen | 10 | 149000000 | 1 | 53525000 | 2 | 29.800.000 | 2 | 29.800.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | 83.325.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pembahasan Pertanggung jawaban APBD | Jumlah laporan Pertanggung jawaban | Dokumen | 10 | 130000000 | 2 | 40650000 | 2 | 26.000.000 | 2 | 26.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 66.650.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 5 | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan | Rekomendasi | 10 | 339000000 | 9 | 150260000 | 2 | 67.800.000 | 2 | 66.925.000 | 100,00 | 98,71 | 11 | 217.185.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum** | **Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum** | **Laporan** | **370** | **40000000** | **13** | **16900000** | **74** | **8.000.000** | **74** | **8.000.000** | **100,00** | **100,00** | **87** | **24.900.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 60 | 40000000 | 22 | 11000000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 7.625.000 | 100,00 | 95,31 | 34 | 18.625.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 60 | 40000000 | 21 | 18425000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 33 | 26.425.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 60 | 40000000 | 22 | 18500000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 34 | 26.500.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang sumber daya alam | Laporan | 60 | 40000000 | 9 | 11375000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 7.550.000 | 100,00 | 94,38 | 21 | 18.925.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 60 | 40000000 | 13 | 22450000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 25 | 30.450.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Pengawasan penggunaan anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 5 | 14563135000 | 19 | 26510000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | 34.510.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 7 | Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Rekomendasi | 60 | 59000000 | 3 | 25100000 | **12** | 11.800.000 | **12** | 11.750.000 | 100,00 | 99,58 | 15 | 36.850.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Peningkatan kapasitas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya | Orang | 35 | 7270505000 | 35 | 4579201689 | 1 | 1.454.101.000 | 1 | 1.409.561.091 | 100,00 | 96,94 | 36 | 5.988.762.780 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pendalaman tugas DPRD** | **Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD** | **Dokumen** | **175** | **6237630000** | **40** | **4056266689** | **35** | **1.247.526.000** | **35** | **1.223.786.091** | **100,00** | **98,10** | **75** | **5.280.052.780** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 60 | 450000000 | 9 | 159100000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 7.375.000 | 100,00 | 8,19 | 21 | 166.475.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 180 | 546000000 | 20 | 189500000 | 36 | 109.200.000 | 36 | 90.000.000 | 100,00 | 82,42 | 56 | 279.500.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Publikasi dan dokumentasi dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen | 420 | 36875000 | 20 | 189500000 | 84 | 7.375.000 | 84 | 88.400.000 | 100,00 | 1198,64 | 104 | 277.900.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Penyerapan dan penghimpunan masyarakat | Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat yang difasilutasi | Usulan | 5 | 11209250000 | 20 | 189500000 | 1 | 2.241.850.000 | 1 | 2.207.830.000 | 100,00 | 98,48 | 21 | 2.397.330.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 60 | 174250000 | 20 | 189500000 | 12 | 34.850.000 | 12 | 19.940.000 | 100,00 | 57,22 | 32 | 209.440.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD** | **Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun** | **Dokumen** | **175** | **20000000** | **14** | **4741230000** | **35** | **4.000.000** | **35** | **3.000.000** | **100,00** | **75,00** | **49** | **4.744.230.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 175 | 11015000000 | 37 | 57895000 | 35 | 2.203.000.000 | 35 | 2.184.890.000 | 100,00 | 99,18 | 72 | 2.242.785.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | Jumlah pelanngaran kode otik yang terselesaikan | Kasus | 175 | 53000000 | 4 | 8840000 | 35 | 10.600.000 | 35 | 4.800.000 | 100,00 | 45,28 | 39 | 13.640.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Pengawasan kode etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Laporan | 175 | 53000000 | 5 | 4674495000 | 35 | 10.600.000 | 35 | 4.800.000 | 100,00 | 45,28 | 40 | 4.679.295.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembahasan kerja sama daerah** | **Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi** | **Dokumen** | **35** | **2508060000** | **7** | **657100000** | **7** | **501.612.000** | **7** | **480.565.000** | **100,00** | **95,80** | **14** | **1.137.665.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen | 35 | 25.000.000 | 0 | 0 | 7 | 5.000.000 | 7 | 0 | 100,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi** | **Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun** | **Dokumen** | **120** | **2483060000** | **10** | **657100000** | **24** | **496.612.000** | **24** | **480.565.000** | **100,00** | **96,77** | **34** | **1.137.665.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Fasilitasi tugas DPRD | Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi | Jenis | 4 | 41826956500 | 4 | 9987285438 | 12 | 8.365.391.300 | 12 | 8.352.518.176 | 100,00 | 99,85 | 16 | 18.339.803.614 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 60 | 37113966500 | 36 | 9713835938 | 12 | 7.422.793.300 | 12 | 7.421.218.412 | 100,00 | 99,98 | 48 | 17.135.054.350 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah** | **Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah** | **Dokumen** | **20** | **60000000** | **31** | **21000000** | **4** | **12.000.000** | **4** | **10.350.000** | **100,00** | **86,25** | **35** | **31.350.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 60 | 3012380000 | 27 | 242249500 | 12 | 602.476.000 | 12 | 593.667.764 | 100,00 | 98,54 | 39 | 835.917.264 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Dokumen | 36 | 984366000 | 0 | 0 | 12 | 328.122.000 | 12 | 327.282.000 | 100,00 | 99,74 | 12 | 327.282.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100** | **44.303.677.890** | **100** | **26.582.206.734** | **100** | **8.864.844.578** | **100** | **8.320.552.364** | **100,00** | **93,86** | **200** | **34.902.759.098** | **200,00** | **78,78** | **Inspektorat** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55** | **96.765.000** | **33** | **58.059.000** | **11** | **13.400.000** | **11** | **13.400.000** | **100,00** | **100,00** | **44** | **71.459.000** | **80,00** | **73,85** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 16.325.000 | 6 | 9.795.000 | 2 | 2.600.000 | 2 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 12.395.000 | 80,00 | 75,93 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 15.222.500 | 3 | 9.133.500 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 11.133.500 | 80,00 | 73,14 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 11.222.500 | 3 | 6.733.500 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 7.933.500 | 80,00 | 70,69 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 13.000.000 | 3 | 7.800.000 | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 10.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 14.995.000 | 3 | 8.997.000 | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 11.597.000 | 80,00 | 77,34 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 13.000.000 | 3 | 7.800.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 9.000.000 | 80,00 | 69,23 | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 13.000.000 | 12 | 7.800.000 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 9.000.000 | 80,00 | 69,23 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125** | **40.602.435.125** | **75** | **24.361.461.075** | **25** | **8.120.487.025** | **25** | **7.701.101.009** | **100,00** | **94,84** | **100** | **32.062.562.084** | **80,00** | **78,97** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 5110 | 39.937.485.125 | 3066 | 23.962.491.075 | 1.022 | 7.987.497.025 | 1.005 | 7.571.311.009 | 98,34 | 94,79 | 4.071 | 31.533.802.084 | 79,67 | 78,96 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55 | 664.950.000 | 33 | 398.970.000 | 11 | 132.990.000 | 11 | 129.790.000 | 100,00 | 97,59 | 44 | 528.760.000 | 80,00 | 79,52 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **365** | **538.134.015** | **219** | **322.880.409** | **73** | **107.626.803** | **32** | **89.717.000** | **43,84** | **83,36** | **251** | **412.597.409** | **68,77** | **76,67** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 5 | 37.500.000 | 3 | 22.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 30.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 365 | 500.634.015 | 219 | 300.380.409 | 73 | 100.126.803 | 31 | 82.217.000 | 42,47 | 82,11 | 250 | 382.597.409 | 68,49 | 76,42 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7** | **2.058.593.750** | **7** | **1.235.156.250** | **6** | **428.585.750** | **6** | **352.698.355** | **100,00** | **82,29** | **13** | **1.587.854.605** | **185,71** | **77,13** | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 6.375.000 | 3 | 3.825.000 | 1 | 1.275.000 | 1 | 1.275.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5.100.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 50.000.000 | 3 | 30.000.000 | 1 | 9.457.500 | 1 | 6.788.700 | 100,00 | 71,78 | 4 | 36.788.700 | 80,00 | 73,58 | | |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 47.287.500 | 3 | 28.372.500 | 4 | 83.672.000 | 4 | 53.954.000 | 100,00 | 64,48 | 7 | 82.326.500 | 140,00 | 174,10 | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 20 | 432.825.000 | 12 | 259.695.000 | 3 | 31.950.000 | 3 | 20.100.000 | 100,00 | 62,91 | 15 | 279.795.000 | 75,00 | 64,64 | | |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 15 | 191.250.000 | 9 | 114.750.000 | 12 | 41.000.000 | 12 | 39.500.000 | 100,00 | 96,34 | 21 | 154.250.000 | 140,00 | 80,65 | | |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 200.000.000 | 36 | 120.000.000 | 12 | 261.231.250 | 12 | 231.080.655 | 100,00 | 88,46 | 48 | 351.080.655 | 80,00 | 175,54 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60** | **1.130.856.250** | **36** | **678.513.750** | **1** | **30.000.000** | **1** | **27.650.000** | **100,00** | **92,17** | **37** | **706.163.750** | **61,67** | **62,45** | | |
| 1 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 45.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 27.650.000 | 100,00 | 92,17 | 11 | 72.650.000 | 1100,00 | 96,87 | | |
| 2 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 50 | 75.000.000 | 30 | 45.000.000 | 3 | 149.745.000 | 3 | 120.986.000 | 100,00 | 80,79 | 33 | 165.986.000 | 66,00 | 221,31 | | |
| 3 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 15 | 857.750.000 | 9 | 514.650.000 | 450 | 5.250.000 | 511 | 2.250.000 | 113,56 | 42,86 | 520 | 516.900.000 | 3466,67 | 60,26 | | |
| 4 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2250 | 60.000.000 | 1350 | 36.000.000 | 3 | 57.215.000 | 3 | 51.316.000 | 100,00 | 89,69 | 1353 | 87.316.000 | 60,13 | 145,53 | | |
| 5 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 15 | 280.750.000 | 9 | 168.450.000 | 12 | 87.280.000 | 12 | 67.420.000 | 100,00 | 77,25 | 21 | 235.870.000 | 140,00 | 84,01 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **60** | **517.000.000** | **36** | **310.200.000** | **1** | **15.000.000** | **1** | **15.000.000** | **100,00** | **100,00** | **37** | **325.200.000** | **61,67** | **62,90** | | |
| 1 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 60.000.000 | 200,00 | 80,00 | | |
| | **Penyelenggaraan pengawasan** | **Persentase pelanggaran pegawai** | **Persen** | **1** | **15549550000** | **0,24** | **4.908.961.000** | **100** | **2.736.330.000** | **100** | **2.692.765.000** | **100,00** | **98,41** | **100,2** | **7.601.726.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Penyelenggaraan pengawasan internal** | **Jumlah temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti** | **Kasus** | **740** | **15549550000** | **731** | **4.908.961.000** | **3** | **2.362.750.000** | **3** | **2.329.985.000** | **100,00** | **98,61** | **734** | **7.238.946.000** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pengawasan kinerja pemerintah daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 195 | 1260550000 | 195 | 610.810.000 | 39 | 252.110.000 | 39 | 252.110.000 | 100,00 | 100,00 | 234 | 862.920.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pengawasan keuangan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 750 | 8702300000 | 341 | 2.425.220.000 | 150 | 1.740.460.000 | 150 | 1.740.460.000 | 100,00 | 100,00 | 491 | 4.165.680.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksanaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Laporan | 180 | 1850900000 | 11 | 1.351.371.000 | 36 | 370.180.000 | 35 | 337.415.000 | 97,22 | 91,15 | 46 | 1.688.786.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penyelenggaraan penagwasan dengan tujuan tertentu** | **Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan** | **Rekomendasi** | **144** | **1867900000** | **138** | **585.590.000** | **2** | **373.580.000** | **1** | **362.780.000** | **50,00** | **97,11** | **139** | **948.370.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Laporan | 40 | 54000000 | 17 | 23.400.000 | 8 | 10.800.000 | 8 | 0 | 100,00 | 0,00 | 25 | 23.400.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Pengawasan dengan tujuan terntentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | laporan | 190 | 1813900000 | 160 | 562.190.000 | 10 | 362.780.000 | 14 | 362.780.000 | 140,00 | 100,00 | 174 | 924.970.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi** | **Persentase tindak lanjut temuan** | **Persen** | **100** | **739995000** | **30,7** | **392.846.400** | **100** | **148.679.000** | **100** | **109.454.000** | **100,00** | **73,62** | **130,7** | **502.300.400** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pendampingan dan asistensi** | **Jumlah layanan pendampingan dan aisstensi di yang di berikan** | **Layanan** | **4** | **739995000** | **4** | **392.846.400** | **4** | **148.679.000** | **4** | **109.454.000** | **100,00** | **73,62** | **8** | **502.300.400** | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | PD | 195 | 563770000 | 40 | 226.296.400 | 39 | 112.754.000 | 20 | 97.304.000 | 51,28 | 86,30 | 60 | 323.600.400 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | PD | 195 | 125625000 | 40 | 103.600.000 | 39 | 25.125.000 | 39 | 7.250.000 | 100,00 | 28,86 | 79 | 110.850.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Laporan | 15 | 45500000 | 13 | 17.750.000 | 3 | 9.100.000 | 1 | 4.900.000 | 33,33 | 53,85 | 14 | 22.650.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan zona integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | PD | 21 | 5100000 | 21 | 45.200.000 | 7 | 1.700.000 | 7 | 0 | 100,00 | 0,00 | 28 | 45.200.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **20.742.329.650,00** | **100,00** | **5.463.707.800,00** | **100,00** | **4.165.965.930** | **100,00** | **3.949.648.891** | **100,00** | **94,81** | **200,00** | **9.413.356.691** | **200,00** | **45,38** | **Kecamatan Bantimurung** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **33.550.000,00** | **33,00** | **20.130.000,00** | **11,00** | **6.710.000** | **11,00** | **6.710.000** | **100,00** | **100,00** | **44,00** | **26.840.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 3.950.000,00 | 6,00 | 2.370.000,00 | 2,00 | 790.000 | 2,00 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3.160.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.200.000,00 | 3,00 | 3.120.000,00 | 1,00 | 1.040.000 | 1,00 | 1.040.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 4.160.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.950.000,00 | 3,00 | 2.370.000,00 | 1,00 | 790.000 | 1,00 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 3.160.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.200.000,00 | 3,00 | 3.120.000,00 | 1,00 | 1.040.000 | 1,00 | 1.040.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 4.160.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.950.000,00 | 3,00 | 2.370.000,00 | 1,00 | 790.000 | 1,00 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 3.160.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 5.300.000,00 | 3,00 | 3.180.000,00 | 1,00 | 1.060.000 | 1,00 | 1.060.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 4.240.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 6.000.000,00 | 12,00 | 3.600.000,00 | 4,00 | 1.200.000 | 4,00 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 4.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **19.009.122.150,00** | **75,00** | **4.423.783.300,00** | **25,00** | **3.801.824.430** | **25,00** | **3.593.812.214** | **100,00** | **94,53** | **100,00** | **8.017.595.514** | **80,00** | **42,18** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 18.774.822.150,00 | 2.016,00 | 11.264.893.290,00 | 672,00 | 3.754.964.430 | 672,00 | 3.546.952.214 | 100,00 | 94,46 | ##### | 14.811.845.504 | 80,00 | 78,89 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 234.300.000,00 | 33,00 | 140.580.000,00 | 11,00 | 46.860.000 | 11,00 | 46.860.000 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 187.440.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **807.507.500,00** | **6,00** | **484.504.500,00** | **6,00** | **189.001.500** | **6,00** | **184.484.177** | **100,00** | **97,61** | **12,00** | **668.988.677** | **200,00** | **82,85** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 13.900.000,00 | 3,00 | 8.340.000,00 | 1,00 | 2.780.000 | 1,00 | 2.490.000 | 100,00 | 89,57 | 4,00 | 10.830.000 | 80,00 | 77,91 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 43.135.000,00 | 3,00 | 25.881.000,00 | 1,00 | 8.627.000 | 1,00 | 8.358.000 | 100,00 | 96,88 | 4,00 | 34.239.000 | 80,00 | 79,38 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 121.957.500,00 | 3,00 | 73.174.500,00 | 1,00 | 24.391.500 | 1,00 | 23.644.000 | 100,00 | 96,94 | 4,00 | 96.818.500 | 80,00 | 79,39 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 30.515.000,00 | 3,00 | 18.309.000,00 | 1,00 | 6.103.000 | 1,00 | 6.103.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 24.412.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 340.750.000,00 | 36,00 | 204.450.000,00 | 12,00 | 95.650.000 | 12,00 | 95.650.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 300.100.000 | 80,00 | 88,07 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 257.250.000,00 | 36,00 | 154.350.000,00 | 12,00 | 51.450.000 | 12,00 | 48.239.177 | 100,00 | 93,76 | 48,00 | 202.589.177 | 80,00 | 78,75 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **740.250.000,00** | **2,00** | **444.150.000,00** | **2,00** | **148.050.000** | **2,00** | **144.350.000** | **100,00** | **97,50** | **4,00** | **588.500.000** | **200,00** | **79,50** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 36.600.000,00 | 36,00 | 21.960.000,00 | 12,00 | 7.320.000 | 12,00 | 7.320.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 29.280.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 703.650.000,00 | 36,00 | 422.190.000,00 | 12,00 | 140.730.000 | 12,00 | 137.030.000 | 100,00 | 97,37 | 48,00 | 559.220.000 | 80,00 | 79,47 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **151.900.000,00** | **2,00** | **91.140.000,00** | **2,00** | **20.380.000** | **2,00** | **20.292.500** | **100,00** | **99,57** | **4,00** | **111.432.500** | **200,00** | **73,36** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 110,00 | 130.750.000,00 | 66,00 | 78.450.000,00 | 22,00 | 16.150.000 | 22,00 | 16.115.000 | 100,00 | 99,78 | 88,00 | 94.565.000 | 80,00 | 72,33 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 21.150.000,00 | 3,00 | 12.690.000,00 | 1,00 | 4.230.000 | 1,00 | 4.177.500 | 100,00 | 98,76 | 4,00 | 16.867.500 | 80,00 | 79,75 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **2.383.175.000,00** | **39,75** | **1.319.312.000,00** | **100,00** | **635.875.000** | **100,00** | **635.875.000** | **100,00** | **100,00** | **139,75** | **1.955.187.000** | **139,75** | **82,04** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **15,00** | **560.750.000,00** | **6,00** | **130.422.000,00** | **3,00** | **184.150.000** | **3,00** | **184.150.000** | **100,00** | **100,00** | **9,00** | **314.572.000** | **60,00** | **56,10** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 20.750.000,00 | 5,00 | 130.422.000,00 | 1,00 | 4.150.000 | 1,00 | 4.150.000 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 134.572.000 | 120,00 | 648,54 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | - | - | 12,00 | 90.000.000 | 12,00 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 90.000.000 | 33,33 | 33,33 | | Kelurahan leang-leang |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | - | - | 12,00 | 90.000.000 | 12,00 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 90.000.000 | 33,33 | 33,33 | | Kelurahan kalabbirang |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **2,00** | **1.765.425.000,00** | **2,00** | **1.177.600.000,00** | **2,00** | **440.325.000** | **2,00** | **440.325.000** | **100,00** | **100,00** | **4,00** | **1.617.925.000** | **200,00** | **91,65** | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12,00 | 20.625.000,00 | 8,00 | 777.400.000,00 | 1,00 | 4.125.000 | 1,00 | 4.125.000 | 100,00 | 100,00 | 9,00 | 781.525.000 | 75,00 | 3789,21 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 1.744.800.000,00 | 36,00 | 400.200.000,00 | 12,00 | 436.200.000 | 12,00 | 436.200.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 836.400.000 | 80,00 | 47,94 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **57.000.000,00** | **3,00** | **11.290.000,00** | **3,00** | **11.400.000** | **3,00** | **11.400.000** | **100,00** | **100,00** | **6,00** | **22.690.000** | **200,00** | **39,81** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 5,00 | 20.625.000,00 | 3,00 | 16.662.000,00 | 1,00 | 4.125.000 | 1,00 | 4.125.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 20.787.000 | 80,00 | 100,79 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5,00 | 15.750.000,00 | 3,00 | 6.528.000,00 | 1,00 | 3.150.000 | 1,00 | 3.150.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 9.678.000 | 80,00 | 61,45 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 20.625.000,00 | 3,00 | 12.000.000,00 | 1,00 | 4.125.000 | 1,00 | 4.125.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 16.125.000 | 80,00 | 78,18 | | |
| | **Pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan** | **Persen** | **100,00** | **14.000.000,00** | **42,50** | **6.025.000,00** | **100,00** | **2.800.000** | **100,00** | **1.400.000** | **100,00** | **50,00** | **142,50** | **7.425.000** | **142,50** | **53,04** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **6,00** | **14.000.000,00** | **6,00** | **6.025.000,00** | **6,00** | **2.800.000** | **6,00** | **1.400.000** | **100,00** | **50,00** | **12,00** | **7.425.000** | **200,00** | **53,04** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 30,00 | 14.000.000,00 | 18,00 | 6.025.000,00 | 6,00 | 2.800.000 | 6,00 | 1.400.000 | 100,00 | 50,00 | 24,00 | 7.425.000 | 80,00 | 53,04 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam** | **Persen** | **100,00** | **2.255.750.000,00** | **34,05** | **513.821.291,00** | **100,00** | **448.150.000** | **100,00** | **448.150.000** | **100,00** | **100,00** | **134,05** | **961.971.291** | **134,05** | **42,65** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | **Kegiatan Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **237.250.000,00** | **201,00** | **110.779.000,00** | **400,00** | **39.950.000** | **400,00** | **39.950.000** | **100,00** | **100,00** | **601,00** | **150.729.000** | **30,05** | **63,53** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 132.250.000,00 | 3,00 | 71.725.000,00 | 2,00 | 26.450.000 | 2,00 | 26.450.000 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 98.175.000 | 50,00 | 74,23 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,00 | 105.000.000,00 | 1,00 | 39.054.000,00 | 3,00 | 13.500.000 | 3,00 | 13.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 52.554.000 | 40,00 | 50,05 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan** | **Kegiatan** | **10,00** | **2.018.500.000,00** | **3,00** | **403.042.291,00** | **2,00** | **408.200.000** | **2,00** | **408.200.000** | **100,00** | **100,00** | **5,00** | **811.242.291** | **50,00** | **40,19** | | |
| | Evaluasi kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 5,00 | 18.500.000,00 | 2,00 | 4.255.000,00 | 1,00 | 3.700.000 | 1,00 | 3.700.000 | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 7.955.000 | 60,00 | 43,00 | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5,00 | 1.000.000.000,00 | 3,00 | 398.787.291,00 | 1,00 | 202.250.000 | 1,00 | 202.250.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 601.037.291 | 80,00 | 60,10 | | Kelurahan leang-Leang |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 10,00 | 1.000.000.000,00 | 3,00 | 600.000.000,00 | 2,00 | 202.250.000 | 2,00 | 202.250.000 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 802.250.000 | 50,00 | 80,23 | | Kelurahan kalabbirang |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **20.500.000,00** | **-** | **2.175.000,00** | **100,00** | **34.100.000** | **95,00** | **33.050.000** | **95,00** | **96,92** | **95,00** | **35.225.000** | **95,00** | **171,83** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **375,00** | **20.500.000,00** | **-** | **2.175.000,00** | **300,00** | **34.100.000** | **300,00** | **33.050.000** | **100,00** | **96,92** | **300,00** | **35.225.000** | **80,00** | **171,83** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 20.500.000,00 | 1,00 | 2.175.000,00 | 1,00 | 34.100.000 | 1,00 | 33.050.000 | 100,00 | 96,92 | 2,00 | 35.225.000 | 40,00 | 171,83 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **500,00** | **542.000.000,00** | **27,70** | **125.325.000,00** | **100,00** | **8,5** | **100,00** | **93.980.000** | **100,00** | **########** | **127,70** | **219.305.000** | **25,54** | **40,46** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **15,00** | **542.000.000,00** | **3,00** | **125.325.000,00** | **3,00** | **1** | **3,00** | **93.980.000** | **100,00** | **########** | **6,00** | **219.305.000** | **40,00** | **40,46** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ###### | 252.625.000,00 | 2,00 | 37.450.000,00 | 300,00 | 300 | 300,00 | 50.525.000 | 100,00 | ###### | 302,00 | 87.975.000 | 20,13 | 34,82 | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (imtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 375,00 | 20.750.000,00 | 154,00 | 12.450.000,00 | 75,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 154,00 | 12.450.000 | 41,07 | 60,00 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ###### | 268.625.000,00 | 202,00 | 43.900.000,00 | 800,00 | 550 | 800,00 | 43.455.000 | 100,00 | ###### | #### | 87.355.000 | 25,05 | 32,52 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **15.266.958.105,00** | **100,00** | **9.160.174.863,00** | **100** | **3.189.019.055** | **100** | **2.948.068.730** | **100,00** | **92,44** | **200** | **12.108.243.593** | **200,00** | **79,31** | **Kecamatan Bontoa** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **48.000.000,00** | **33,00** | **28.800.000,00** | **11** | **9.600.000** | **11** | **9.230.000** | **100,00** | **96,15** | **44** | **38.030.000** | **80,00** | **79,23** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.995.000 | 100,00 | 99,75 | 4 | 7.995.000 | 80,00 | 79,95 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1 | 1.000.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 90,00 | 4 | 3.900.000 | 80,00 | 78,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1 | 1.000.000 | 1 | 995.000 | 100,00 | 99,50 | 4 | 3.995.000 | 80,00 | 79,90 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1 | 1.000.000 | 1 | 855.000 | 100,00 | 85,50 | 4 | 3.855.000 | 80,00 | 77,10 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1 | 1.000.000 | 1 | 945.000 | 100,00 | 94,50 | 4 | 3.945.000 | 80,00 | 78,90 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60,00 | 8.000.000,00 | 36,00 | 4.800.000,00 | 12 | 1.600.000 | 12 | 1.595.000 | 100,00 | 99,69 | 48 | 6.395.000 | 80,00 | 79,94 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 10.000.000,00 | 12,00 | 6.000.000,00 | 4 | 2.000.000 | 4 | 1.945.000 | 100,00 | 97,25 | 16 | 7.945.000 | 80,00 | 79,45 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **13.721.933.105,00** | **75,00** | **8.233.159.863,00** | **25** | **2.871.814.055** | **25** | **2.716.655.370** | **100,00** | **94,60** | **100** | **10.949.815.233** | **80,00** | **79,80** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 13.482.133.105,00 | 1.428,00 | 8.089.279.863,00 | 476 | 2.823.854.055 | 476 | 2.668.695.370 | 100,00 | 94,51 | 1904 | 10.757.975.233 | 80,00 | 79,79 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 239.800.000,00 | 33,00 | 143.880.000,00 | 11 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 191.840.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **667.025.000,00** | **6,00** | **400.215.000,00** | **6** | **141.605.000** | **6** | **88.249.560** | **100,00** | **62,32** | **12** | **488.464.560** | **200,00** | **73,23** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 20.000.000,00 | 3,00 | 12.000.000,00 | 1 | 4.000.000 | 1 | 624.000 | 100,00 | 15,60 | 4 | 12.624.000 | 80,00 | 63,12 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 30.000.000,00 | 3,00 | 18.000.000,00 | 1 | 6.000.000 | 1 | 3.125.000 | 100,00 | 52,08 | 4 | 21.125.000 | 80,00 | 70,42 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 115.475.000,00 | 3,00 | 69.285.000,00 | 1 | 28.749.400 | 1 | 22.562.000 | 100,00 | 78,48 | 4 | 91.847.000 | 80,00 | 79,54 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 7.000.000,00 | 3,00 | 4.200.000,00 | 1 | 1.400.600 | 1 | 1.200.600 | 100,00 | 85,72 | 4 | 5.400.600 | 80,00 | 77,15 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 137.500.000,00 | 36,00 | 82.500.000,00 | 12 | 40.025.000 | 12 | 27.500.000 | 100,00 | 68,71 | 48 | 110.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 357.050.000,00 | 36,00 | 214.230.000,00 | 12 | 61.430.000 | 12 | 33.237.960 | 100,00 | 54,11 | 48 | 247.467.960 | 80,00 | 69,31 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **713.500.000,00** | **2,00** | **428.100.000,00** | **2** | **142.700.000** | **2** | **123.820.000** | **100,00** | **86,77** | **4** | **551.920.000** | **200,00** | **77,35** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 43.000.000,00 | 36,00 | 25.800.000,00 | 12 | 8.600.000 | 12 | 6.000.000 | 100,00 | 69,77 | 48 | 31.800.000 | 80,00 | 73,95 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 670.500.000,00 | 36,00 | 402.300.000,00 | 12 | 134.100.000 | 12 | 117.820.000 | 100,00 | 87,86 | 48 | 520.120.000 | 80,00 | 77,57 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **116.500.000,00** | **2,00** | **69.900.000,00** | **2** | **23.300.000** | **2** | **10.113.800** | **100,00** | **43,41** | **4** | **80.013.800** | **200,00** | **68,68** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 110,00 | 101.500.000,00 | 66,00 | 60.900.000,00 | 22 | 20.300.000 | 10 | 7.530.000 | 45,45 | 37,09 | 76 | 68.430.000 | 69,09 | 67,42 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 15.000.000,00 | 3,00 | 9.000.000,00 | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.583.800 | 100,00 | 86,13 | 4 | 11.583.800 | 80,00 | 77,23 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **2.016.750.000,00** | **46,29** | **389.700.000,00** | **100** | **395.150.000** | **100** | **395.150.000** | **100,00** | **100,00** | **146** | **784.850.000** | **146,29** | **38,92** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **2,00** | **1.962.250.000,00** | **2,00** | **85.213.000,00** | **2** | **383.350.000** | **2** | **383.350.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **468.563.000** | **200,00** | **23,88** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60,00 | 1.462.250.000,00 | 36,00 | 877.350.000,00 | 12 | 293.350.000 | 12 | 293.350.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 1.170.700.000 | 80,00 | 80,06 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 40,00 | 500.000.000,00 | 36,00 | 270.000.000,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 360.000.000 | 120,00 | 72,00 | | Kelurahan Bontoa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **54.500.000,00** | **3,00** | **34.487.000,00** | **3** | **11.800.000** | **3** | **11.800.000** | **100,00** | **100,00** | **6** | **46.287.000** | **200,00** | **84,93** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | 5,00 | 14.625.000,00 | 9,00 | 7.200.000,00 | 1 | 2.925.000 | 1 | 2.925.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | 10.125.000 | 200,00 | 69,23 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5,00 | 10.125.000,00 | 25,00 | 9.737.000,00 | 1 | 2.925.000 | 1 | 2.925.000 | 100,00 | 100,00 | 26 | 12.662.000 | 520,00 | 125,06 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 29.750.000,00 | 5,00 | 17.550.000,00 | 1 | 5.950.000 | 1 | 5.950.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | 23.500.000 | 120,00 | 78,99 | | |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan** | **Persen** | **100,00** | **73.150.000,00** | **30,04** | **30.810.000,00** | **100** | **14.630.000** | **75** | **5.940.000** | **75,00** | **40,60** | **105** | **36.750.000** | **105,04** | **50,24** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **8,00** | **73.150.000,00** | **8,00** | **30.810.000,00** | **8** | **14.630.000** | **4** | **5.940.000** | **50,00** | **40,60** | **12** | **36.750.000** | **150,00** | **50,24** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 30,00 | 73.150.000,00 | 10,00 | 30.810.000,00 | 6 | 14.630.000 | 4 | 5.940.000 | 66,67 | 40,60 | 14 | 36.750.000 | 46,67 | 50,24 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **100,00** | **1.386.000.600,00** | **42,26** | **333.369.300,00** | **100** | **77.200.120** | **50** | **59.600.000** | **50,00** | **77,20** | **92** | **392.969.300** | **92,26** | **28,35** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa** | **Dokumen** | **########** | **386.000.600,00** | **928,00** | **134.206.000,00** | **965** | **77.200.120** | **965** | **59.600.000** | **100,00** | **77,20** | **1893** | **193.806.000** | **39,23** | **50,21** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | Persen | 10,00 | 185.750.000,00 | 6,00 | 85.296.000,00 | 2 | 37.150.000 | 2 | 37.150.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 122.446.000 | 80,00 | 65,92 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Orang | 15,00 | 200.250.600,00 | 2,00 | 48.910.000,00 | 3 | 40.050.120 | 3 | 22.450.000 | 100,00 | 56,05 | 5 | 71.360.000 | 33,33 | 35,64 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan** | **Dokumen** | **100,00** | **1.000.000.000,00** | **60,00** | **199.163.300,00** | **20** | **202.250.000** | **20** | **201.014.495** | **100,00** | **99,39** | **80** | **400.177.795** | **80,00** | **40,02** | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,00 | 1.000.000.000,00 | 1,00 | 199.163.300,00 | 2 | 202.250.000 | 2 | 201.014.495 | 100,00 | 99,39 | 3 | 400.177.795 | 30,00 | 40,02 | | Kelurahan Bontoa |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **19.125.000,00** | **36,25** | **9.170.000,00** | **100** | **33.825.000** | **100** | **32.925.000** | **100,00** | **97,34** | **136** | **42.095.000** | **136,25** | **220,10** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **375,00** | **19.125.000,00** | **100,00** | **9.170.000,00** | **75** | **33.825.000** | **75** | **32.925.000** | **100,00** | **97,34** | **175** | **42.095.000** | **46,67** | **220,10** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 19.125.000,00 | 3,00 | 9.170.000,00 | 1 | 33.825.000 | 1 | 32.925.000 | 100,00 | 97,34 | 4 | 42.095.000 | 80,00 | 220,10 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **832.350.000,00** | **36,25** | **176.425.000,00** | **100** | **146.475.000** | **33** | **142.000.000** | **33,33** | **96,94** | **70** | **318.425.000** | **69,58** | **38,26** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **3,00** | **832.350.000,00** | **3,00** | **176.425.000,00** | **3** | **146.475.000** | **2** | **142.000.000** | **66,67** | **96,94** | **5** | **318.425.000** | **166,67** | **38,26** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ###### | 480.250.000,00 | 300,00 | 57.300.000,00 | 845 | 96.050.000 | 845 | 96.050.000 | 100,00 | 100,00 | 1145 | 153.350.000 | 27,10 | 31,93 | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konusltasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 375,00 | 60.100.000,00 | 200,00 | 54.025.000,00 | 75 | 2.025.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 | 54.025.000 | 53,33 | 89,89 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ###### | 292.000.000,00 | 400,00 | 65.100.000,00 | 700 | 48.400.000 | 700 | 45.950.000 | 100,00 | 94,94 | 1100 | 111.050.000 | 31,43 | 38,03 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **23.747.786.945,00** | **100,00** | **14.248.672.167,00** | **100** | **4.200.000** | **100** | **4.200.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **14.252.872.167** | **100,00** | **60,02** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **17.175.098.785,00** | **33,00** | **10.305.059.271,00** | **11** | **4.200.000** | **11** | **4.200.000** | **100,00** | **100,00** | **44** | **10.309.259.271** | **80,00** | **60,02** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 2 | 600.000 | 2 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | 2.400.000 | 100,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 17.157.098.785,00 | 12,00 | 10.294.259.271,00 | 4 | 600.000 | 4 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 10.294.859.271 | 80,00 | 60,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **312.650.000,00** | **75,00** | **187.590.000,00** | **25** | **3.431.419.757** | **25** | **3.245.693.817** | **100,00** | **94,59** | **100** | **3.433.283.817** | **80,00** | **1098,12** | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ######## | 273.900.000,00 | ######## | 164.340.000,00 | 558 | 3.376.639.757 | 558 | 3.190.913.817 | 100,00 | 94,50 | 2.232 | 3.355.253.817 | 80,00 | 1224,99 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 38.750.000,00 | 33,00 | 23.250.000,00 | 11 | 54.780.000 | 11 | 54.780.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 78.030.000 | 80,00 | 201,37 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **290,00** | **780.799.080,00** | **174,00** | **468.479.448,00** | **1** | **7.750.000** | **1** | **7.750.000** | **100,00** | **100,00** | **175** | **476.229.448** | **60,34** | **60,99** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5,00 | 780.799.080,00 | 3,00 | 468.479.448,00 | 1 | 7.750.000 | 1 | 7.750.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 476.229.448 | 80,00 | 60,99 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **1.492.939.080,00** | **6,00** | **895.763.448,00** | **6** | **176.322.816** | **6** | **153.623.634** | **100,00** | **87,13** | **12** | **1.049.387.082** | **200,00** | **70,29** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 17.110.000,00 | 3,00 | 10.266.000,00 | 1 | 1.612.000 | 1 | 1.359.000 | 100,00 | 84,31 | 4 | 11.625.000 | 80,00 | 67,94 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 106.940.000,00 | 3,00 | 64.164.000,00 | 1 | 3.422.000 | 1 | 3.374.000 | 100,00 | 98,60 | 4 | 67.538.000 | 80,00 | 63,16 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 27.000.000,00 | 3,00 | 16.200.000,00 | 1 | 21.386.000 | 1 | 20.210.000 | 100,00 | 94,50 | 4 | 36.410.000 | 80,00 | 134,85 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 130.500.000,00 | 3,00 | 78.300.000,00 | 1 | 5.400.000 | 1 | 3.400.000 | 100,00 | 62,96 | 4 | 81.700.000 | 80,00 | 62,61 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 491.189.080,00 | 36,00 | 294.713.448,00 | 12 | 54.765.000 | 12 | 54.765.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 349.478.448 | 80,00 | 71,15 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 720.200.000,00 | 36,00 | 432.120.000,00 | 12 | 89.737.816 | 12 | 70.515.634 | 100,00 | 78,58 | 48 | 502.635.634 | 80,00 | 69,79 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **902.300.000,00** | **2,00** | **541.380.000,00** | **2** | **138.040.000** | **2** | **129.870.000** | **100,00** | **94,08** | **4** | **671.250.000** | **200,00** | **74,39** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 677.000.000,00 | 36,00 | 406.200.000,00 | 12 | 8.640.000 | 12 | 8.580.000 | 100,00 | 99,31 | 48 | 414.780.000 | 80,00 | 61,27 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 225.300.000,00 | 36,00 | 135.180.000,00 | 12 | 129.400.000 | 12 | 121.290.000 | 100,00 | 93,73 | 48 | 256.470.000 | 80,00 | 113,83 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **3.084.000.000,00** | **2,00** | **1.850.400.000,00** | **2** | **43.060.000** | **2** | **42.083.000** | **100,00** | **97,73** | **4** | **1.892.483.000** | **200,00** | **61,36** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 30,00 | 31.550.000,00 | 18,00 | 18.930.000,00 | 6 | 36.750.000 | 6 | 35.900.000 | 100,00 | 97,69 | 24 | 54.830.000 | 80,00 | 173,79 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10,00 | 3.052.450.000,00 | 6,00 | 1.831.470.000,00 | 2 | 6.310.000 | 2 | 6.183.000 | 100,00 | 97,99 | 8 | 1.837.653.000 | 80,00 | 60,20 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **2.107.650.000,00** | **61,39** | **1.019.536.999,00** | **100** | **610.490.000** | **100** | **607.981.500** | **100,00** | **99,59** | **80,695** | **1.627.518.499** | **80,70** | **77,22** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **3,00** | **525.000.000,00** | **3,00** | **264.736.999,00** | **3** | **187.640.000** | **2** | **185.781.500** | **66,67** | **99,01** | **5** | **450.518.499** | **166,67** | **85,81** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 38.200.000,00 | 3,00 | 88.245.666,00 | 1 | 7.640.000 | 1 | 7.640.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 95.885.666 | 80,00 | 251,01 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60,00 | 243.400.000,00 | 36,00 | 88.245.666,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 89.613.500 | 100,00 | 99,57 | 48 | 177.859.166 | 80,00 | 73,07 | | Kelurahan Cempaniga |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60,00 | 243.400.000,00 | 36,00 | 88.245.666,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 88.528.000 | 100,00 | 98,36 | 48 | 176.773.666 | 80,00 | 72,63 | | Kelurahan Mario Pulana |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **5,00** | **1.532.400.000,00** | **4,00** | **754.800.000,00** | **1** | **412.800.000** | **1** | **412.300.000** | **100,00** | **99,88** | **5** | **1.167.100.000** | **100,00** | **76,16** | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 1.532.400.000,00 | 28,00 | 754.800.000,00 | 24 | 412.800.000 | 24 | 412.300.000 | 100,00 | 99,88 | 52 | 1.167.100.000 | 86,67 | 76,16 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **50.250.000,00** | **3,00** | **18.500.000,00** | **2** | **10.050.000** | **2** | **9.900.000** | **100,00** | **98,51** | **5** | **28.400.000** | **166,67** | **56,52** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 15,00 | 20.000.000,00 | 9,00 | 3.600.000,00 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | 7.600.000 | 66,67 | 38,00 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 30.250.000,00 | 3,00 | 14.900.000,00 | 1 | 6.050.000 | 1 | 5.900.000 | 100,00 | 97,52 | 4 | 20.800.000 | 80,00 | 68,76 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **1.921.141.508,00** | **70,25** | **936.143.008,00** | **100** | **467.220.000** | **100** | **454.941.723** | **100,00** | **97,37** | **85,125** | **1.391.084.731** | **85,13** | **72,41** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **718.941.508,00** | **1.200,00** | **538.097.508,00** | **525** | **66.120.000** | **500** | **56.010.000** | **95,24** | **84,71** | **######** | **594.107.508** | **80,95** | **82,64** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 195.150.000,00 | 5,00 | 95.546.000,00 | 2 | 39.030.000 | 2 | 39.030.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | 134.576.000 | 70,00 | 68,96 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15,00 | 523.791.508,00 | 9,00 | 442.551.508,00 | 3 | 27.090.000 | 3 | 16.980.000 | 100,00 | 62,68 | 12 | 459.531.508 | 80,00 | 87,73 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan** | **Orang** | **180,00** | **1.202.200.000,00** | **30,00** | **398.045.500,00** | **60** | **401.100.000** | **60** | **398.931.723** | **100,00** | **99,46** | **90** | **796.977.223** | **50,00** | **66,29** | | |
| | Evaluasi kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 4,00 | 2.200.000,00 | - | - | 2 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | 1,00 | 199.022.750,00 | 1 | 200.000.000 | 1 | 199.307.972 | 100,00 | 99,65 | 2 | 398.330.722 | 66,67 | 66,39 | | Kelurahan Cempaniga |
| | Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | 1,00 | 199.022.750,00 | 1 | 200.000.000 | 1 | 199.623.751 | 100,00 | 99,81 | 2 | 398.646.501 | 66,67 | 66,44 | | Kelurahan Cempaniga |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran** | **Persen** | **100,00** | **31.000.000,00** | **98,75** | **15.450.000,00** | **100** | **46.200.000** | **100** | **46.200.000** | **100,00** | **100,00** | **99,375** | **61.650.000** | **99,38** | **198,87** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | **PERDA di Wilayah Kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **########** | **31.000.000,00** | **350,00** | **15.450.000,00** | **70** | **46.200.000** | **70** | **46.200.000** | **100,00** | **100,00** | **420** | **61.650.000** | **42,00** | **198,87** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 31.000.000,00 | 3,00 | 15.450.000,00 | 1 | 46.200.000 | 1 | 46.200.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 61.650.000 | 80,00 | 198,87 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **215.970.000,00** | **52,25** | **125.865.000,00** | **100** | **57.825.000** | **100** | **56.025.000** | **100,00** | **96,89** | **76,125** | **181.890.000** | **76,13** | **84,22** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **215.970.000,00** | **2,00** | **125.865.000,00** | **2** | **57.825.000** | **2** | **56.025.000** | **100,00** | **96,89** | **4** | **181.890.000** | **200,00** | **84,22** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 93.270.000,00 | 1.500,00 | 93.270.000,00 | 500 | 35.625.000 | 500 | 35.625.000 | 100,00 | 100,00 | 2000 | 128.895.000 | 80,00 | 138,20 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ######## | 122.700.000,00 | 657,00 | 32.595.000,00 | 640 | 22.200.000 | 635 | 20.400.000 | 99,22 | 91,89 | 1292 | 52.995.000 | 45,65 | 43,19 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **12.067.082.015,00** | **100,00** | **7.240.249.209,00** | **100** | **2.368.042.402** | **16,16** | **2.211.687.676** | **16,16** | **93,40** | **58** | **4.725.968.443** | **58,08** | **39,16** | **Kecamatan Cenrana** | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | Dokumen | 55,00 | 26.600.000,00 | 33,00 | 15.960.000,00 | 11 | 5.320.000 | 11 | 4.920.000 | **100,00** | **92,48** | **22** | **20.880.000** | **40,00** | **78,50** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 4.800.000,00 | 6,00 | 2.880.000,00 | 2 | 960.000 | 2 | 900.000 | 100,00 | 93,75 | 8 | 3.780.000 | 80,00 | 78,75 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 4.300.000,00 | 3,00 | 2.580.000,00 | 1 | 860.000 | 1 | 720.000 | 100,00 | 83,72 | 4 | 3.300.000 | 80,00 | 76,74 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.250.000,00 | 3,00 | 1.350.000,00 | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 1.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.750.000,00 | 3,00 | 2.250.000,00 | 1 | 750.000 | 1 | 720.000 | 100,00 | 96,00 | 4 | 2.970.000 | 80,00 | 79,20 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.250.000,00 | 3,00 | 1.350.000,00 | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 1.800.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 5.350.000,00 | 3,00 | 3.210.000,00 | 1 | 1.070.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 84,11 | 4 | 4.110.000 | 80,00 | 76,82 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 3.900.000,00 | 12,00 | 2.340.000,00 | 4 | 780.000 | 4 | 780.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 3.120.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **9.922.102.015,00** | **75,00** | **5.953.261.209,00** | **25** | **1.984.420.403** | **25** | **1.903.705.359** | **100,00** | **95,93** | **50** | **7.856.966.568** | **40,00** | **79,19** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 9.687.802.015,00 | 1.008,00 | 5.812.681.209,00 | 336 | 1.937.560.403 | 336 | 1.856.845.359 | 100,00 | 95,83 | 1.344 | 7.669.526.568 | 80,00 | 79,17 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 234.300.000,00 | 33,00 | 140.580.000,00 | 11 | 46.860.000 | 11 | 46.860.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 187.440.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **945.865.000,00** | **6,00** | **567.519.000,00** | **6** | **199.173.000** | **6** | **141.362.817** | **100,00** | **70,97** | **6** | **708.881.817** | **100,00** | **74,95** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 22.650.000,00 | 3,00 | 13.590.000,00 | 1 | 4.530.000 | 1 | 3.521.000 | 100,00 | 77,73 | 4 | 17.111.000 | 80,00 | 75,55 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 60.820.000,00 | 3,00 | 36.492.000,00 | 1 | 12.164.000 | 1 | 11.247.500 | 100,00 | 92,47 | 4 | 47.739.500 | 80,00 | 78,49 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 132.895.000,00 | 3,00 | 79.737.000,00 | 1 | 26.579.000 | 1 | 24.526.000 | 100,00 | 92,28 | 4 | 104.263.000 | 80,00 | 78,46 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1 | 10.000.000 | 1 | 4.540.000 | 100,00 | 45,40 | 4 | 34.540.000 | 80,00 | 69,08 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 310.000.000,00 | 36,00 | 186.000.000,00 | 12 | 62.000.000 | 12 | 45.200.000 | 100,00 | 72,90 | 48 | 231.200.000 | 80,00 | 74,58 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 369.500.000,00 | 36,00 | 221.700.000,00 | 12 | 83.900.000 | 12 | 52.328.317 | 100,00 | 62,37 | 48 | 274.028.317 | 80,00 | 74,16 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **615.365.000,00** | **2,00** | **369.219.000,00** | **2** | **123.070.000** | **2** | **112.201.000** | **100,00** | **91,17** | **2** | **481.420.000** | **100,00** | **78,23** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 58.215.000,00 | 36,00 | 34.929.000,00 | 12 | 11.640.000 | 12 | 11.200.000 | 100,00 | 96,22 | 48 | 46.129.000 | 80,00 | 79,24 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 557.150.000,00 | 36,00 | 334.290.000,00 | 12 | 111.430.000 | 12 | 101.001.000 | 100,00 | 90,64 | 48 | 435.291.000 | 80,00 | 78,13 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **280.294.995,00** | **2,00** | **168.176.997,00** | **2** | **56.058.999** | **2** | **49.498.500** | **100,00** | **88,30** | **2** | **217.675.497** | **100,00** | **77,66** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50,00 | 240.004.995,00 | 30,00 | 144.002.997,00 | 10 | 48.000.999 | 10 | 41.539.000 | 100,00 | 86,54 | 40 | 185.541.997 | 80,00 | 77,31 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 40.290.000,00 | 3,00 | 24.174.000,00 | 1 | 8.058.000 | 1 | 7.959.500 | 100,00 | 98,78 | 4 | 32.133.500 | 80,00 | 79,76 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **117.500.000,00** | **38,88** | **47.819.000,00** | **100** | **23.500.000** | **0** | **19.050.000** | **0,00** | **81,06** | **19** | **33.434.500** | **19,44** | **28,45** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **1,00** | **35.250.000,00** | **1,00** | **30.594.000,00** | **1** | **7.050.000** | **1** | **6.900.000** | **100,00** | **97,87** | **1** | **37.494.000** | **100,00** | **106,37** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 35.250.000,00 | 1,00 | 30.594.000,00 | 1 | 7.050.000 | 1 | 6.900.000 | 100,00 | 97,87 | 2 | 37.494.000 | 40,00 | 106,37 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **1,00** | **20.250.000,00** | **-** | **-** | **1** | **4.050.000** | **1** | **4.050.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **4.050.000** | **50,00** | **20,00** | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 20.250.000,00 | - | - | 1 | 4.050.000 | 1 | 4.050.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 4.050.000 | 20,00 | 20,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **62.000.000,00** | **3,00** | **17.225.000,00** | **3** | **12.400.000** | **2** | **8.100.000** | **66,67** | **65,32** | **3** | **25.325.000** | **83,33** | **40,85** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 5,00 | 20.500.000,00 | 7,00 | - | 1 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 140,00 | 0,00 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5,00 | 16.000.000,00 | 11,00 | - | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.000.000 | 100,00 | 93,75 | 12 | 3.000.000 | 240,00 | 18,75 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 25.500.000,00 | 4,00 | 17.225.000,00 | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.100.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | 22.325.000 | 100,00 | 87,55 | | |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan** | **Persen** | **100,00** | **30.000.000,00** | **23,75** | **7.100.000,00** | **100** | **10.000.000** | **90** | **3.500.000** | **90,00** | **35,00** | **57** | **5.300.000** | **56,88** | **17,67** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **7,00** | **30.000.000,00** | **-** | **7.100.000,00** | **7** | **10.000.000** | **7** | **3.500.000** | **100,00** | **35,00** | **4** | **10.600.000** | **50,00** | **35,33** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 35,00 | 30.000.000,00 | - | 7.100.000,00 | 7 | 10.000.000 | 7 | 3.500.000 | 100,00 | 35,00 | 7 | 10.600.000 | 20,00 | 35,33 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **221.650.000,00** | **33,45** | **86.003.000,00** | **100** | **56.150.000** | **90** | **48.050.000** | **90,00** | **85,57** | **62** | **67.026.500** | **61,73** | **30,24** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **221.650.000,00** | **485,00** | **86.003.000,00** | **400** | **56.150.000** | **300** | **48.050.000** | **75,00** | **85,57** | **393** | **134.053.000** | **26,17** | **60,48** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 133.000.000,00 | 4,00 | 67.978.000,00 | 2 | 26.600.000 | 2 | 26.000.000 | 100,00 | 97,74 | 6 | 93.978.000 | 60,00 | 70,66 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15,00 | 88.650.000,00 | - | 18.025.000,00 | 3 | 29.550.000 | 3 | 22.050.000 | 100,00 | 74,62 | 3 | 40.075.000 | 20,00 | 45,21 | | |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **12.000.000,00** | **-** | **-** | **100** | **34.000.000** | **90** | **33.100.000** | **90,00** | **97,35** | **45** | **16.550.000** | **45,00** | **137,92** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **375,00** | **12.000.000,00** | **-** | **-** | **75** | **34.000.000** | **75** | **33.100.000** | **100,00** | **97,35** | **38** | **33.100.000** | **10,00** | **275,83** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 12.000.000,00 | - | - | 1 | 34.000.000 | 1 | 33.100.000 | 100,00 | 97,35 | 1 | 33.100.000 | 20,00 | 275,83 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase urusan pemerintahan daerah yang sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Persen** | **100,00** | **456.200.000,00** | **27,00** | **84.745.000,00** | **100** | **104.300.000** | **90** | **90.350.000** | **90,00** | **86,63** | **59** | **87.547.500** | **58,50** | **19,19** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **3,00** | **456.200.000,00** | **2,00** | **84.745.000,00** | **3** | **104.300.000** | **2** | **90.350.000** | **66,67** | **86,63** | **2** | **175.095.000** | **66,67** | **38,38** | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 160.950.000,00 | - | 38.750.000,00 | 500 | 53.650.000 | 500 | 53.300.000 | 100,00 | 99,35 | 500 | 92.050.000 | 20,00 | 57,19 | | |
| | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (imtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 375,00 | 12.000.000,00 | - | - | 75 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ########## | 283.250.000,00 | 420,00 | 45.995.000,00 | 800 | 46.650.000 | 700 | 37.050.000 | 87,50 | 79,42 | 1.120 | 83.045.000 | 28,00 | 29,32 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **32.671.848.835,00** | **100,00** | **19.603.109.301,00** | **100** | **6.534.369.767** | **100** | **6.055.596.229** | **100,00** | **92,67** | **200** | **25.658.705.530** | **200,00** | **78,53** | **Kecamatan Lau** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **5,00** | **4.750.000,00** | **3,00** | **2.850.000,00** | **1** | **950.000** | **1** | **949.500** | **100,00** | **99,95** | **4** | **3.799.500** | **80,00** | **79,99** | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60,00 | 4.750.000,00 | 36,00 | 2.850.000,00 | 1 | 950.000 | 1 | 949.500 | 100,00 | 99,95 | 37 | 3.799.500 | 61,67 | 79,99 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **30.628.223.335,00** | **75,00** | **18.376.934.001,00** | **25** | **6.125.644.667** | **25** | **5.648.005.942** | **100,00** | **92,20** | **100** | **24.024.939.943** | **80,00** | **78,44** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 30.396.123.335,00 | 3.444,00 | 18.237.674.001,00 | 1.148 | 6.079.224.667 | 1148 | 5.601.585.942 | 100,00 | 92,14 | 4592 | 23.839.259.943 | 80,00 | 78,43 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 232.100.000,00 | 33,00 | 139.260.000,00 | 11 | 46.420.000 | 11 | 46.420.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 185.680.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **4,00** | **479.375.500,00** | **4,00** | **287.625.300,00** | **4** | **95.875.100** | **4** | **95.329.100** | **100,00** | **99,43** | **8** | **382.954.400** | **200,00** | **79,89** | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 61.060.500,00 | 15,00 | 36.636.300,00 | 5 | 12.212.100 | 5 | 12.212.100 | 100,00 | 100,00 | 20 | 48.848.400 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10,00 | 40.490.000,00 | 6,00 | 24.294.000,00 | 2 | 8.098.000 | 2 | 7.552.000 | 100,00 | 93,26 | 8 | 31.846.000 | 80,00 | 78,65 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 60.000.000,00 | 36,00 | 36.000.000,00 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 48.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 317.825.000,00 | 36,00 | 190.695.000,00 | 12 | 63.565.000 | 12 | 63.565.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 254.260.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **809.500.000,00** | **2,00** | **485.700.000,00** | **2** | **192.670.000** | **2** | **192.670.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **678.370.000** | **200,00** | **83,80** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 53.250.000,00 | 36,00 | 31.950.000,00 | 12 | 10.650.000 | 12 | 10.650.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 42.600.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 756.250.000,00 | 36,00 | 453.750.000,00 | 12 | 182.020.000 | 12 | 182.020.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 635.770.000 | 80,00 | 84,07 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **750.000.000,00** | **2,00** | **450.000.000,00** | **1** | **119.230.000** | **1** | **118.641.687** | **100,00** | **99,51** | **3** | **568.641.687** | **150,00** | **75,82** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 5,00 | 150.000.000,00 | 3,00 | 90.000.000,00 | 1 | 30.000.000 | 1 | 29.949.000 | 100,00 | 99,83 | 4 | 119.949.000 | 80,00 | 79,97 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10,00 | 600.000.000,00 | 6,00 | 360.000.000,00 | 1 | 89.230.000 | 0 | 88.692.687 | 0,00 | 99,40 | 6 | 448.692.687 | 60,00 | 74,78 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **14.755.942.500,00** | **37,25** | **3.719.668.500,00** | **100** | **1.679.200.000** | **4** | **1.676.100.000** | **4,00** | **99,82** | **41,25** | **5.395.768.500** | **41,25** | **36,57** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **4,00** | **8.843.842.500,00** | **4,00** | **1.768.768.500,00** | **1** | **360.000.000** | **1** | **360.000.000** | **100,00** | **100,00** | **5** | **2.128.768.500** | **125,00** | **24,07** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 2.210.960.625,00 | 3,00 | 442.192.125,00 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 532.192.125 | 80,00 | 24,07 | | Kelurahan Allepolea |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 2.210.960.625,00 | 3,00 | 442.192.125,00 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 532.192.125 | 80,00 | 24,07 | | Kelurahan Soreang |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 2.210.960.625,00 | 3,00 | 442.192.125,00 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 532.192.125 | 80,00 | 24,07 | | Kelurahan Maccini Baji |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 2.210.960.625,00 | 3,00 | 442.192.125,00 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 532.192.125 | 80,00 | 24,07 | | Kelurahan Mattiro Deceng |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **2,00** | **5.899.100.000,00** | **2,00** | **1.949.300.000,00** | **2** | **1.316.600.000** | **2** | **1.313.500.000** | **100,00** | **99,76** | **4** | **3.262.800.000** | **200,00** | **55,31** | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 1.170.000.000,00 | 3,00 | 1.162.200.000,00 | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.500.000 | 100,00 | 96,15 | 4 | 1.164.700.000 | 80,00 | 99,55 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 4.729.100.000,00 | 36,00 | 787.100.000,00 | 12 | 1.314.000.000 | 12 | 1.311.000.000 | 100,00 | 99,77 | 48 | 2.098.100.000 | 80,00 | 44,37 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **1,00** | **13.000.000,00** | **-** | **1.600.000,00** | **1** | **2.600.000** | **1** | **2.600.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **4.200.000** | **100,00** | **32,31** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 13.000.000,00 | 1,00 | 1.600.000,00 | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 4.200.000 | 40,00 | 32,31 | | |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan** | **Persen** | **100,00** | **7.920.000,00** | **23,75** | **-** | **100** | **2.640.000** | **100** | **2.640.000** | **100,00** | **100,00** | **123,75** | **2.640.000** | **123,75** | **33,33** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **2,00** | **7.920.000,00** | **-** | **-** | **2** | **2.640.000** | **1** | **2.640.000** | **50,00** | **100,00** | **1** | **2.640.000** | **50,00** | **33,33** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6,00 | 7.920.000,00 | - | - | 2 | 2.640.000 | 1 | 2.640.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | 2.640.000 | 16,67 | 33,33 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **3.009.125.000,00** | **44,25** | **263.997.000,00** | **90** | **841.825.000** | **85** | **841.825.000** | **94,44** | **100,00** | **129,25** | **1.105.822.000** | **129,25** | **36,75** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **209.125.000,00** | **1.050,00** | **78.925.000,00** | **350** | **41.825.000** | **350** | **41.825.000** | **100,00** | **100,00** | **1400** | **120.750.000** | **80,00** | **57,74** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 163.825.000,00 | 3,00 | 58.370.000,00 | 2 | 32.765.000 | 2 | 32.765.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | 91.135.000 | 50,00 | 55,63 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15,00 | 45.300.000,00 | 1,00 | 20.555.000,00 | 3 | 9.060.000 | 3 | 9.060.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 29.615.000 | 26,67 | 65,38 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan** | **Orang** | **14,00** | **2.800.000.000,00** | **-** | **185.072.000,00** | **200** | **800.000.000** | **200** | **800.000.000** | **100,00** | **100,00** | **200** | **985.072.000** | **1428,57** | **35,18** | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5,00 | 1.000.000.000,00 | 1,00 | 185.072.000,00 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 385.072.000 | 40,00 | 38,51 | | Kelurahan Allepolea |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 200.000.000 | 33,33 | 33,33 | | Kelurahan Soreang |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 200.000.000 | 33,33 | 33,33 | | Kelurahan Maccini Baji |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 200.000.000 | 33,33 | 33,33 | | Kelurahan Mattiro Deceng |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **11.775.000,00** | **-** | **-** | **100** | **2.355.000** | **100** | **2.355.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **2.355.000** | **100,00** | **20,00** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **150,00** | **11.775.000,00** | **-** | **-** | **30** | **2.355.000** | **12** | **2.355.000** | **40,00** | **100,00** | **12** | **2.355.000** | **8,00** | **20,00** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 11.775.000,00 | - | - | 12 | 2.355.000 | 12 | 2.355.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | 2.355.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **321.625.000,00** | **31,75** | **122.700.000,00** | **100** | **64.325.000** | **100** | **64.325.000** | **100,00** | **100,00** | **131,75** | **187.025.000** | **131,75** | **58,15** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **3,00** | **321.625.000,00** | **3,00** | **122.700.000,00** | **2** | **64.325.000** | **2** | **64.325.000** | **100,00** | **100,00** | **5** | **187.025.000** | **166,67** | **58,15** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 207.875.000,00 | 350,00 | 56.220.000,00 | 500 | 41.575.000 | 500 | 41.575.000 | 100,00 | 100,00 | 850 | 97.795.000 | 34,00 | 47,05 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ######## | 113.750.000,00 | 350,00 | 66.480.000,00 | 500 | 22.750.000 | 500 | 22.750.000 | 100,00 | 100,00 | 850 | 89.230.000 | 34,00 | 78,44 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100** | **14.574.009.515** | **100** | **8.744.405.709** | **100** | **2.945.211.903** | **15,33** | **2.750.772.448** | **15,33** | **93,40** | **57,67** | **5.747.589.079** | **57,67** | **39,44** | **Kecamatan Mallawa** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **95** | **35.880.000** | **57** | **21.528.000** | **19** | **7.176.000** | **18** | **5.790.000** | **94,74** | **80,69** | **37,50** | **13.659.000** | **39,47** | **38,07** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 4.950.000 | 6 | 2.970.000 | 2 | 990.000 | 1 | 0 | 50,00 | 0,00 | 3,50 | 1.485.000 | 35,00 | 30,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.950.000 | 3 | 2.970.000 | 1 | 990.000 | 1 | 990.000 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 1.980.000 | 40,00 | 40,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.950.000 | 3 | 2.970.000 | 1 | 990.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 90,91 | 2,00 | 1.935.000 | 40,00 | 39,09 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.250.000 | 3 | 3.150.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.050.000 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 2.100.000 | 40,00 | 40,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 5.250.000 | 3 | 3.150.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 900.000 | 100,00 | 85,71 | 2,00 | 2.025.000 | 40,00 | 38,57 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5.250.000 | 3 | 3.150.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.050.000 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 2.100.000 | 40,00 | 40,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 60 | 5.280.000 | 36 | 3.168.000 | 12 | 1.056.000 | 12 | 900.000 | 100,00 | 85,23 | 24,00 | 2.034.000 | 40,00 | 38,52 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **130** | **12.871.106.390** | **78** | **7.722.663.834** | **26** | **2.602.221.278** | **25** | **2.425.029.077** | **96,15** | **93,19** | **51,50** | **5.073.846.456** | **39,62** | **39,42** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 2380 | 12.631.306.390 | 1428 | 7.578.783.834 | 476 | 2.554.261.278 | 476 | 2.377.069.077 | 100,00 | 93,06 | 952,00 | 4.977.926.456 | 40,00 | 39,41 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 239.800.000 | 36 | 143.880.000 | 12 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 91,67 | 100,00 | 23,50 | 95.920.000 | 39,17 | 40,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **200** | **50.000.000** | **120** | **30.000.000** | **40** | **10.000.000** | **40** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **80,00** | **20.000.000** | **40,00** | **40,00** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 200 | 50.000.000 | 120 | 30.000.000 | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 20.000.000 | 40,00 | 40,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6** | **625.635.000** | **6** | **375.381.000** | **6** | **138.567.000** | **5** | **123.153.371** | **83,33** | **88,88** | **5,50** | **249.267.186** | **91,67** | **39,84** | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket abhan material yang disediakan | Paket | 25 | 8.887.500 | 15 | 5.332.500 | 5 | 792.000 | 5 | 792.000 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 3.062.250 | 40,00 | 34,46 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 10 | 53.862.500 | 6 | 32.317.500 | 2 | 1.777.500 | 2 | 1.777.500 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 17.047.500 | 40,00 | 31,65 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 5.500.000 | 6 | 3.300.000 | 2 | 10.772.500 | 2 | 10.764.500 | 100,00 | 99,93 | 4,00 | 7.032.250 | 40,00 | 127,86 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 100 | 3.960.000 | 60 | 2.376.000 | 20 | 1.100.000 | 19 | 980.000 | 95,00 | 89,09 | 39,50 | 1.678.000 | 39,50 | 42,37 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 94.075.000 | 36 | 56.445.000 | 12 | 33.815.000 | 12 | 33.815.000 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 45.130.000 | 40,00 | 47,97 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 459.350.000 | 36 | 275.610.000 | 12 | 90.310.000 | 11 | 75.024.371 | 91,67 | 83,07 | 23,50 | 175.317.186 | 39,17 | 38,17 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2** | **986.388.125** | **2** | **591.832.875** | **2** | **171.077.625** | **2** | **170.630.000** | **100,00** | **99,74** | **2,00** | **381.231.438** | **100,00** | **38,65** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60 | 59.300.000 | 36 | 35.580.000 | 12 | 11.860.000 | 12 | 11.420.000 | 100,00 | 96,29 | 24,00 | 23.500.000 | 40,00 | 39,63 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 15 | 927.088.125 | 9 | 556.252.875 | 12 | 159.217.625 | 12 | 159.210.000 | 100,00 | 100,00 | 10,50 | 357.731.438 | 70,00 | 38,59 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2** | **5.000.000** | **2** | **3.000.000** | **2** | **16.170.000** | **2** | **16.170.000** | **100,00** | **100,00** | **2,00** | **9.585.000** | **100,00** | **191,70** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 5.000.000 | 30 | 3.000.000 | 10 | 1.000.000 | 10 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 2.000.000 | 40,00 | 40,00 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 8.800.000 | 3 | 5.280.000 | 2 | 15.170.000 | 1 | 15.170.000 | 50,00 | 100,00 | 2,00 | 10.225.000 | 40,00 | 116,19 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100** | **1.199.416.000** | **53,75** | **110.252.000** | **100** | **284.380.000** | **3,33** | **260.495.000** | **3,33** | **91,60** | **28,54** | **185.373.500** | **28,54** | **15,46** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **2** | **513.016.000** | **2** | **106.352.000** | **1** | **93.280.000** | **2** | **79.595.000** | **200,00** | **85,33** | **2,00** | **92.973.500** | **100,00** | **18,12** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 63.016.000 | 3 | 53.176.000 | 1 | 3.280.000 | 2 | 2.250.000 | 200,00 | 68,60 | 2,50 | 27.713.000 | 50,00 | 43,98 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 450.000.000 | 36 | 53.176.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 77.345.000 | 100,00 | 85,94 | 24,00 | 65.260.500 | 40,00 | 14,50 | | Kelurahan Sabila |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **2** | **670.050.000** | **2** | **109.800.000** | **2** | **186.750.000** | **1** | **179.400.000** | **50,00** | **96,06** | **1,50** | **144.600.000** | **75,00** | **21,58** | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 25 | 113.850.000 | 15 | 109.800.000 | 5 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 54.900.000 | 30,00 | 48,22 | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 556.200.000 | 0 | 0 | 4 | 185.400.000 | 12 | 179.400.000 | 300,00 | 96,76 | 6,00 | 89.700.000 | 50,00 | 16,13 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3** | **16.350.000** | **1** | **3.900.000** | **3** | **4.350.000** | **1** | **1.500.000** | **33,33** | **34,48** | **1,00** | **2.700.000** | **33,33** | **16,51** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 12 | 4.050.000 | 0 | 0 | 4 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah laporan pelaksanan pelayanan non perizinan | Laporan | 39 | 4.050.000 | 0 | 0 | 13 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 8.250.000 | 3 | 3.900.000 | 1 | 1.650.000 | 1 | 1.500.000 | 100,00 | 90,91 | 2,00 | 2.700.000 | 40,00 | 32,73 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100** | **1.227.450.000** | **74,41** | **285.404.888** | **100** | **247.740.000** | **214** | **244.384.280** | **214,00** | **98,65** | **144,21** | **264.894.584** | **144,21** | **21,58** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **1075** | **227.450.000** | **645** | **50.877.250** | **4** | **45.490.000** | **4** | **42.700.000** | **100,00** | **93,87** | **324,50** | **46.788.625** | **30,19** | **20,57** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 141.150.000 | 4 | 38.775.000 | 2 | 28.230.000 | 2 | 27.490.000 | 100,00 | 97,38 | 3,00 | 33.132.500 | 30,00 | 23,47 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 86.300.000 | 2 | 12.102.250 | 2 | 17.260.000 | 2 | 15.210.000 | 100,00 | 88,12 | 2,00 | 13.656.125 | 20,00 | 15,82 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan** | **Orang** | **1260** | **1.000.000.000** | **100** | **234.527.638** | **420** | **202.250.000** | **420** | **201.684.280** | **100,00** | **99,72** | **260,00** | **218.105.959** | **20,63** | **21,81** | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5 | 1.000.000.000 | 5 | 234.527.638 | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.684.280 | 100,00 | 99,72 | 3,00 | 218.105.959 | 60,00 | 21,81 | | Kelurahan sabila |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100** | **6.750.000** | **0** | **0** | **100** | **32.250.000** | **1** | **32.000.000** | **1,00** | **99,22** | **0,50** | **16.000.000** | **0,50** | **237,04** | | |
| | Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Orang | 3 | 6.750.000 | 0 | 0 | 1 | 32.250.000 | 1 | 32.000.000 | 100,00 | 99,22 | 0,50 | 16.000.000 | 16,67 | 237,04 | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 6.750.000 | 0 | 0 | 1 | 32.250.000 | 1 | 32.000.000 | 100,00 | 99,22 | 0,50 | 16.000.000 | 16,67 | 237,04 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100** | **449.850.000** | **33,52** | **118.865.000** | **100** | **89.320.000** | **1** | **56.800.000** | **1,00** | **63,59** | **17,26** | **87.832.500** | **17,26** | **19,52** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2** | **449.850.000** | **2** | **118.865.000** | **2** | **89.320.000** | **1** | **56.800.000** | **50,00** | **63,59** | **1,50** | **87.832.500** | **75,00** | **19,52** | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 2500 | 233.600.000 | 0 | 20.500.000 | 500 | 58.820.000 | 400 | 32.000.000 | 80,00 | 54,40 | 200,00 | 26.250.000 | 8,00 | 11,24 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 6000 | 216.250.000 | 560 | 25.200.000 | 1200 | 30.500.000 | 500 | 24.800.000 | 41,67 | 81,31 | 530,00 | 25.000.000 | 8,83 | 11,56 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **24.551.450.105,00** | **100,00** | **14.730.870.063,00** | **100** | **4.964.096.573** | **100** | **4.683.682.405** | **100,00** | **94,35** | **200** | **19.414.552.468** | **200,00** | **79,08** | **Kecamatan Mandai** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **35,00** | **23.850.000,00** | **21,00** | **14.310.000,00** | **7** | **5.970.000** | **7** | **5.970.000** | **100,00** | **100,00** | **28** | **20.280.000** | **80,00** | **85,03** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.800.000 | 80,00 | 101,82 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 2.800.000 | 80,00 | 101,82 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60,00 | 2.750.000,00 | 36,00 | 1.650.000,00 | 12 | 550.000 | 12 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 2.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 7.350.000,00 | 12,00 | 4.410.000,00 | 1 | 1.470.000 | 1 | 1.470.000 | 100,00 | 100,00 | 13 | 5.880.000 | 65,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **140,00** | **22.916.552.940,00** | **84,00** | **13.749.931.764,00** | **28** | **4.637.117.140** | **28** | **4.401.505.985** | **100,00** | **94,92** | **112** | **18.151.437.749** | **80,00** | **79,21** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 22.676.752.940,00 | 2.520,00 | 13.606.051.764,00 | 840 | 4.589.157.140 | 840 | 4.353.545.985 | 100,00 | 94,87 | 3360 | 17.959.597.749 | 80,00 | 79,20 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 239.800.000,00 | 36,00 | 143.880.000,00 | 12 | 47.960.000 | 12 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 191.840.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **145,00** | **29.000.000,00** | **87,00** | **17.400.000,00** | **29** | **5.800.000** | **29** | **5.800.000** | **100,00** | **100,00** | **116** | **23.200.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 145,00 | 29.000.000,00 | 87,00 | 17.400.000,00 | 29 | 5.800.000 | 29 | 5.800.000 | 100,00 | 100,00 | 116 | 23.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **630.897.165,00** | **6,00** | **378.538.299,00** | **6** | **144.979.433** | **6** | **101.013.920** | **100,00** | **69,67** | **12** | **479.552.219** | **200,00** | **76,01** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 50,00 | 9.940.400,00 | 30,00 | 5.964.240,00 | 10 | 1.988.080 | 10 | 1.924.000 | 100,00 | 96,78 | 40 | 7.888.240 | 80,00 | 79,36 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 29.362.500,00 | 3,00 | 17.617.500,00 | 1 | 5.872.500 | 1 | 5.192.500 | 100,00 | 88,42 | 4 | 22.810.000 | 80,00 | 77,68 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 77.682.265,00 | 15,00 | 46.609.359,00 | 5 | 15.536.453 | 5 | 14.877.000 | 100,00 | 95,76 | 20 | 61.486.359 | 80,00 | 79,15 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 25,00 | 14.762.000,00 | 15,00 | 8.857.200,00 | 5 | 2.952.400 | 5 | 2.952.400 | 100,00 | 100,00 | 20 | 11.809.600 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 100.000.000,00 | 36,00 | 60.000.000,00 | 12 | 29.000.000 | 12 | 29.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 89.000.000 | 80,00 | 89,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 399.150.000,00 | 36,00 | 239.490.000,00 | 12 | 89.630.000 | 12 | 47.068.020 | 100,00 | 52,51 | 48 | 286.558.020 | 80,00 | 71,79 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **855.000.000,00** | **2,00** | **513.000.000,00** | **2** | **151.000.000** | **2** | **151.000.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **664.000.000** | **200,00** | **77,66** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 36.600.000,00 | 36,00 | 21.960.000,00 | 12 | 7.320.000 | 12 | 7.320.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 29.280.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 818.400.000,00 | 36,00 | 491.040.000,00 | 12 | 143.680.000 | 12 | 143.680.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 634.720.000 | 80,00 | 77,56 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **96.150.000,00** | **2,00** | **57.690.000,00** | **2** | **19.230.000** | **2** | **18.392.500** | **100,00** | **95,64** | **4** | **76.082.500** | **200,00** | **79,13** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 150,00 | 62.200.000,00 | 90,00 | 37.320.000,00 | 30 | 12.440.000 | 30 | 12.202.500 | 100,00 | 98,09 | 120 | 49.522.500 | 80,00 | 79,62 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 33.950.000,00 | 3,00 | 20.370.000,00 | 1 | 6.790.000 | 1 | 6.190.000 | 100,00 | 91,16 | 4 | 26.560.000 | 80,00 | 78,23 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **6.993.125.000,00** | **62,15** | **3.700.803.500,00** | **100** | **1.470.625.000** | **100** | **1.441.845.250** | **100,00** | **98,04** | **162,2** | **5.142.648.750** | **162,15** | **73,54** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **3,00** | **569.975.000,00** | **3,00** | **134.183.500,00** | **3** | **185.995.000** | **3** | **163.010.250** | **100,00** | **87,64** | **6** | **297.193.750** | **200,00** | **52,14** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 29.975.000,00 | 3,00 | 16.990.000,00 | 1 | 5.995.000 | 1 | 5.995.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 22.985.000 | 80,00 | 76,68 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 60.000.000,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 85.898.000 | 100,00 | 95,44 | 24 | 145.898.000 | 66,67 | 54,04 | | Kelurahan Bontoa |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 11,00 | 57.193.500,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 71.117.250 | 100,00 | 79,02 | 23 | 128.310.750 | 63,89 | 47,52 | | Kelurahan Hasanuddin |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **1,00** | **6.357.000.000,00** | **1,00** | **3.542.200.000,00** | **1** | **1.271.400.000** | **1** | **1.265.800.000** | **100,00** | **99,56** | **2** | **4.808.000.000** | **200,00** | **75,63** | | |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 6.357.000.000,00 | 19,00 | 3.542.200.000,00 | 12 | 1.271.400.000 | 12 | 1.265.800.000 | 100,00 | 99,56 | 31 | 4.808.000.000 | 51,67 | 75,63 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | | **66.150.000,00** | **3,00** | **24.420.000,00** | **3** | **13.230.000** | **3** | **13.035.000** | **100,00** | **98,53** | **6** | **37.455.000** | **#DIV/0!** | **56,62** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha | Laporan | 55,00 | 20.700.000,00 | 11,00 | 7.540.000,00 | 1 | 4.140.000 | 1 | 4.140.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | 11.680.000 | 21,82 | 56,43 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 140,00 | 20.475.000,00 | 28,00 | 7.040.000,00 | 1 | 4.095.000 | 1 | 3.900.000 | 100,00 | 95,24 | 29 | 10.940.000 | 20,71 | 53,43 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 30,00 | 24.975.000,00 | 6,00 | 9.840.000,00 | 1 | 4.995.000 | 1 | 4.995.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | 14.835.000 | 23,33 | 59,40 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan** | **Persen** | **100,00** | **19.950.000,00** | **95,00** | **6.790.000,00** | **100** | **3.990.000** | **100** | **3.990.000** | **100,00** | **100,00** | **195** | **10.780.000** | **195,00** | **54,04** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **4,00** | **19.950.000,00** | **4,00** | **6.790.000,00** | **4** | **3.990.000** | **4** | **3.990.000** | **100,00** | **100,00** | **8** | **10.780.000** | **200,00** | **54,04** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 20,00 | 19.950.000,00 | 6,00 | 6.790.000,00 | 4 | 3.990.000 | 4 | 3.990.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | 10.780.000 | 50,00 | 54,04 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **1.428.390.000,00** | **36,00** | **513.674.278,00** | **100** | **540.178.000** | **100** | **511.619.362** | **100,00** | **94,71** | **136** | **1.025.293.640** | **136,00** | **71,78** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **228.390.000,00** | **416,00** | **115.835.500,00** | **317** | **45.678.000** | **317** | **38.128.800** | **100,00** | **83,47** | **733** | **153.964.300** | **46,25** | **67,41** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 112.390.000,00 | 5,00 | 81.835.500,00 | 2 | 22.478.000 | 2 | 22.428.800 | 100,00 | 99,78 | 7 | 104.264.300 | 70,00 | 92,77 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,00 | 116.000.000,00 | 2,00 | 34.000.000,00 | 2 | 23.200.000 | 2 | 15.700.000 | 100,00 | 67,67 | 4 | 49.700.000 | 40,00 | 42,84 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **1.200.000.000,00** | **900,00** | **397.838.778,00** | **300** | **494.500.000** | **300** | **473.490.562** | **100,00** | **95,75** | **1200** | **871.329.340** | **80,00** | **72,61** | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 15,00 | 600.000.000,00 | 4,00 | 198.919.389,00 | 5 | 292.250.000 | 5 | 272.343.692 | 100,00 | 93,19 | 9 | 471.263.081 | 60,00 | 78,54 | | Kelurahan Bontoa |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 15,00 | 600.000.000,00 | 4,00 | 198.919.389,00 | 5 | 202.250.000 | 5 | 201.146.870 | 100,00 | 99,45 | 9 | 400.066.259 | 60,00 | 66,68 | | Kelurahan Hasanuddin |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **29.900.000,00** | **48,75** | **16.410.000,00** | **100** | **35.980.000** | **100** | **35.980.000** | **100,00** | **100,00** | **148,8** | **52.390.000** | **148,75** | **175,22** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **500,00** | **29.900.000,00** | **450,00** | **16.410.000,00** | **100** | **35.980.000** | **100** | **35.980.000** | **100,00** | **100,00** | **550** | **52.390.000** | **110,00** | **175,22** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 29.900.000,00 | 3,00 | 16.410.000,00 | 1 | 35.980.000 | 1 | 35.980.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 52.390.000 | 80,00 | 175,22 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan** | **Persen** | **100,00** | **352.500.000,00** | **33,75** | **53.160.000,00** | **100** | **70.500.000** | **100** | **70.450.000** | **100,00** | **99,93** | **133,8** | **123.610.000** | **133,75** | **35,07** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | **dan Ketahanan Nasional** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **352.500.000,00** | **2,00** | **53.160.000,00** | **2** | **70.500.000** | **2** | **70.450.000** | **100,00** | **99,93** | **4** | **123.610.000** | **200,00** | **35,07** | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 130.000.000,00 | 300,00 | 9.210.000,00 | 300 | 26.000.000 | 300 | 25.950.000 | 100,00 | 99,81 | 600 | 35.160.000 | 40,00 | 27,05 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ######## | 222.500.000,00 | 591,00 | 43.950.000,00 | 600 | 44.500.000 | 600 | 44.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1191 | 88.450.000 | 39,70 | 39,75 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **52.419.592.020,00** | **100,00** | **31.451.755.212,00** | **100** | **4.801.872.087** | **100** | **4.545.688.477** | **100,00** | **94,66** | **200,00** | **35.997.443.689** | **200,00** | **68,67** | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **30,00** | **16.500.000,00** | **18,00** | **9.900.000,00** | **7** | **3.850.000** | **7** | **3.723.000** | **100,00** | **96,70** | **25,00** | **13.623.000** | **83,33** | **82,56** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | - | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 534.000 | 100,00 | 97,09 | 1,00 | 2.184.000 | 20,00 | 79,42 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 503.000 | 100,00 | 91,45 | 4,00 | 2.153.000 | 80,00 | 78,29 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 518.000 | 100,00 | 94,18 | 4,00 | 2.168.000 | 80,00 | 78,84 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 518.000 | 100,00 | 94,18 | 4,00 | 2.168.000 | 80,00 | 78,84 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 2.750.000,00 | 3,00 | 1.650.000,00 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5,00 | 47.633.752.020,00 | 3,00 | 28.580.251.212,00 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 28.580.801.212 | 80,00 | 60,00 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **24.780.773.510,00** | **75,00** | **14.868.464.106,00** | **25** | **4.489.542.587** | **25** | **4.245.349.865** | **100,00** | **94,56** | **100,00** | **19.113.813.971** | **80,00** | **77,13** | | |
| | Penyedian gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 22.852.978.510,00 | 2.232,00 | 13.711.787.106,00 | 744 | 4.441.582.587 | 744 | 4.197.389.865 | 100,00 | 94,50 | 2976,00 | 17.909.176.971 | 80,00 | 78,37 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 1.927.795.000,00 | 33,00 | 1.156.677.000,00 | 11 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 1.204.637.000 | 80,00 | 62,49 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **130,00** | **1.927.795.000,00** | **78,00** | **1.156.677.000,00** | **26** | **3.300.000** | **26** | **3.300.000** | **100,00** | **100,00** | **104,00** | **1.159.977.000** | **80,00** | **60,17** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 6,00 | 1.927.795.000,00 | 6,00 | 1.156.677.000,00 | 26 | 3.300.000 | 26 | 3.300.000 | 100,00 | 100,00 | 32,00 | 1.159.977.000 | 533,33 | 60,17 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **30,00** | **457.022.500,00** | **18,00** | **274.213.500,00** | **6** | **136.404.500** | **6** | **125.274.612** | **100,00** | **91,84** | **24,00** | **399.488.112** | **80,00** | **87,41** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 1.125.000,00 | 3,00 | 675.000,00 | 1 | 225.000 | 1 | 225.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 900.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 9.447.500,00 | 3,00 | 5.668.500,00 | 16 | 1.889.500 | 16 | 1.865.000 | 100,00 | 98,70 | 19,00 | 7.533.500 | 380,00 | 79,74 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 40.500.000,00 | 3,00 | 24.300.000,00 | 3 | 8.100.000 | 3 | 7.850.750 | 100,00 | 96,92 | 6,00 | 32.150.750 | 120,00 | 79,38 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 35,00 | 14.250.000,00 | 3,00 | 8.550.000,00 | 7 | 2.850.000 | 7 | 2.599.400 | 100,00 | 91,21 | 10,00 | 11.149.400 | 28,57 | 78,24 | | |
| | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Peralatan mesin lainnya yang disediakan | Paket | 60,00 | 125.400.000,00 | 36,00 | 75.240.000,00 | 1 | 10.000.000 | 1 | 7.500.000 | 100,00 | 75,00 | 37,00 | 82.740.000 | 61,67 | 65,98 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 266.300.000,00 | 36,00 | 159.780.000,00 | 12 | 60.080.000 | 12 | 60.080.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 219.860.000 | 80,00 | 82,56 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 10,00 | 963.750.000,00 | 6,00 | 578.250.000,00 | 12 | 53.260.000 | 12 | 45.154.462 | 100,00 | 84,78 | 18,00 | 623.404.462 | 180,00 | 64,69 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60,00** | **50.000.000,00** | **36,00** | **30.000.000,00** | **12** | **160.060.000** | **12** | **159.330.000** | **100,00** | **99,54** | **48,00** | **189.330.000** | **80,00** | **378,66** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2,00 | 913.750.000,00 | 2,00 | 548.250.000,00 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 558.250.000 | 200,00 | 61,09 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 10,00 | 43.575.000,00 | 6,00 | 26.145.000,00 | 1 | 150.060.000 | 1 | 149.330.000 | 100,00 | 99,51 | 7,00 | 175.475.000 | 70,00 | 402,70 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **38.750.000,00** | **2,00** | **23.250.000,00** | **1** | **8.715.000** | **1** | **8.711.000** | **100,00** | **99,95** | **3,00** | **31.961.000** | **150,00** | **82,48** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5,00 | 4.825.000,00 | 3,00 | 2.895.000,00 | 2 | 7.750.000 | 2 | 7.746.000 | 100,00 | 99,95 | 5,00 | 10.641.000 | 100,00 | 220,54 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 60,00 | 33.925.000,00 | 12,00 | 20.355.000,00 | 12 | 965.000 | 12 | 965.000 | 100,00 | 100,00 | 24 | 21.320.000 | 40,00 | 62,84 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **4.535.000.000,00** | **62,50** | **2.241.850.000,00** | **4** | **1.015.000.000** | **4** | **1.002.223.250** | **100,00** | **98,74** | **66,50** | **3.244.073.250** | **66,50** | **71,53** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **12,00** | **820.250.000,00** | **12,00** | **13.000.000,00** | **12** | **272.050.000** | **12** | **259.273.250** | **100,00** | **95,30** | **24,00** | **272.273.250** | **200,00** | **33,19** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60,00 | 10.250.000,00 | 29,00 | 13.000.000,00 | 12 | 2.050.000 | 12 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | 41,00 | 15.050.000 | 68,33 | 146,83 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 270.000.000,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 81.899.550 | 100,00 | 91,00 | 24,00 | 351.899.550 | 40,00 | 130,33 | | Kelurahan Baju Bodoa |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 270.000.000,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 87.431.900 | 100,00 | 97,15 | 24,00 | 357.431.900 | 66,67 | 132,38 | | Kelurahan Pallantikang |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 270.000.000,00 | 2 | 90.000.000 | 2 | 87.891.800 | 100,00 | 97,66 | 14,00 | 357.891.800 | 38,89 | 132,55 | | Kelurahan Baji Pa'mai |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **2,00** | **3.694.250.000,00** | **2,00** | **2.216.550.000,00** | **4** | **738.850.000** | **4** | **738.850.000** | **100,00** | **100,00** | **6,00** | **2.955.400.000** | **300,00** | **80,00** | | |
| | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 10.250.000,00 | 1,00 | 6.150.000,00 | 1 | 2.050.000 | 1 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 8.200.000 | 3,33 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,00 | 3.684.000.000,00 | 21,00 | 2.210.400.000,00 | 2 | 736.800.000 | 2 | 736.800.000 | 100,00 | 100,00 | 23,00 | 2.947.200.000 | 230,00 | 80,00 | | |
| | **Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **2,00** | **20.500.000,00** | **2,00** | **12.300.000,00** | **2** | **4.100.000** | **2** | **4.100.000** | **100,00** | **100,00** | **4,00** | **16.400.000** | **200,00** | **80,00** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 60,00 | 10.250.000,00 | 19,00 | 6.150.000,00 | 1 | 2.050.000 | 1 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 8.200.000 | 33,33 | 80,00 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 10,00 | 10.250.000,00 | 7,00 | 6.150.000,00 | 12 | 2.050.000 | 12 | 2.050.000 | 100,00 | 100,00 | 19,00 | 8.200.000 | 190,00 | 80,00 | | |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan** | **Persen** | **100,00** | **35.290.000,00** | **30,04** | **30.810.000,00** | **100** | **1.120.000** | **100** | **1.120.000** | **100,00** | **100,00** | **130,04** | **31.930.000** | **130,04** | **90,48** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan korodinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **4,00** | **35.290.000,00** | **4,00** | **30.810.000,00** | **4** | **1.120.000** | **4** | **1.120.000** | **100,00** | **100,00** | **8,00** | **31.930.000** | **200,00** | **90,48** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 500,00 | 35.290.000,00 | 10,00 | 30.810.000,00 | 4 | 1.120.000 | 4 | 1.120.000 | 100,00 | 100,00 | 14,00 | 31.930.000 | 2,80 | 90,48 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **2.067.142.500,00** | **42,26** | **333.369.300,00** | **100** | **660.178.500** | **100** | **657.606.168** | **100,00** | **99,61** | **142,26** | **990.975.468** | **142,26** | **47,94** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **928,00** | **267.142.500,00** | **928,00** | **134.206.000,00** | **800** | **53.428.500** | **800** | **53.340.000** | **100,00** | **99,83** | **1728,00** | **187.546.000** | **186,21** | **70,20** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | - | 104.017.500,00 | 6,00 | 85.296.000,00 | 4 | 20.803.500 | 4 | 20.740.000 | 100,00 | 99,69 | 10,00 | 106.036.000 | #DIV/0! | 101,94 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 500,00 | 163.125.000,00 | 2,00 | 48.910.000,00 | 4 | 32.625.000 | 4 | 32.600.000 | 100,00 | 99,92 | 6,00 | 81.510.000 | 1,20 | 49,97 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **1.800.000.000,00** | **2.400,00** | **199.163.300,00** | **60** | **606.750.000** | **60** | **604.266.168** | **100,00** | **99,59** | **2460,00** | **803.429.468** | **61,50** | **44,63** | | |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 6,00 | 600.000.000,00 | 3,00 | 84.232.950,00 | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.023.656 | 100,00 | 99,39 | 4,00 | 285.256.606 | 66,67 | 47,54 | | Kelurahan Baju Bodoa |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | | 57.465.175,00 | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.569.077 | 100,00 | 99,66 | 1,00 | 259.034.252 | 33,33 | 43,17 | | Kelurahan Pallantikang |
| | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 3,00 | 600.000.000,00 | | 57.465.175,00 | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.673.435 | 100,00 | 99,71 | 1,00 | 259.138.610 | 33,33 | 43,19 | | Kelurahan Baji Pa'mai |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **11.250.000,00** | **36,25** | **9.170.000,00** | **100** | **32.250.000** | **100** | **32.250.000** | **100,00** | **100,00** | **136,25** | **41.420.000** | **136,25** | **368,18** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **100,00** | **11.250.000,00** | **100,00** | **9.170.000,00** | **2** | **32.250.000** | **2** | **32.250.000** | **100,00** | **100,00** | **102,00** | **41.420.000** | **102,00** | **368,18** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | - | 11.250.000,00 | 1,50 | 9.170.000,00 | 2 | 32.250.000 | 2 | 32.250.000 | 100,00 | 100,00 | 3,50 | 41.420.000 | #DIV/0! | 368,18 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **487.875.000,00** | **36,25** | **176.425.000,00** | **100** | **32.250.000** | **100** | **32.250.000** | **100,00** | **100,00** | **136,25** | **208.675.000** | **136,25** | **42,77** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **487.875.000,00** | **2,00** | **176.425.000,00** | **2** | **87.575.000** | **2** | **87.475.000** | **100,00** | **99,89** | **4,00** | **263.900.000** | **200,00** | **54,09** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | - | 225.375.000,00 | 300,00 | 57.300.000,00 | 400 | 87.575.000 | 400 | 87.475.000 | 100,00 | 99,89 | 700,00 | 144.775.000 | #DIV/0! | 64,24 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | - | 262.500.000,00 | 400,00 | 65.100.000,00 | 4 | 45.075.000 | 4 | 45.075.000 | 100,00 | 100,00 | 404,00 | 110.175.000 | #DIV/0! | 41,97 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100** | **13.358.352.425** | **100** | **8.015.011.455** | **100** | **2.744.928.759** | **100,00** | **2.627.382.288** | **100,00** | **95,72** | **200,00** | **10.642.393.743** | **200,00** | **79,67** | **Kecamatan Marusu** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **11** | **29.575.000** | **11** | **17.745.000** | **10** | **5.915.000** | **10** | **5.915.000** | **100,00** | **100,00** | **21,00** | **23.660.000** | **190,91** | **80,00** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 3.950.000 | 6 | 2.370.000 | 2 | 790.000 | 2 | 790.000 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3.160.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.450.000 | 3 | 2.670.000 | 1 | 1.530.000 | 1 | 1.530.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 4.200.000 | 80,00 | 94,38 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 3.200.000 | 3 | 1.920.000 | 1 | 890.000 | 1 | 890.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.810.000 | 80,00 | 87,81 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 4.450.000 | 3 | 2.670.000 | 1 | 640.000 | 1 | 640.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 3.310.000 | 80,00 | 74,38 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 3.200.000 | 3 | 1.920.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.920.000 | 80,00 | 91,25 | | |
| | Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5 | 5.000.000 | 3 | 3.000.000 | 4 | 1.065.000 | 4 | 1.065.000 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 4.065.000 | 140,00 | 81,30 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **20** | **5.325.000** | **12** | **3.195.000** | **25** | **2.490.925.759** | **25** | **2.379.928.274** | **100,00** | **95,54** | **37,00** | **2.383.123.274** | **185,00** | **######** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 125 | 12.134.887.425 | 75 | 7.280.932.455 | 420 | 2.436.145.759 | 420 | 2.325.148.274 | 100,00 | 95,44 | 495,00 | 9.606.080.729 | 396,00 | 79,16 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 2100 | 11.860.987.425 | 1260 | 7.116.592.455 | 11 | 54.780.000 | 11 | 54.780.000 | 100,00 | 100,00 | ##### | 7.171.372.455 | 60,52 | 60,46 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **60** | **273.900.000** | **36** | **164.340.000** | **30** | **3.300.000** | **30** | **3.300.000** | **100,00** | **100,00** | **66,00** | **167.640.000** | **110,00** | **61,20** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 150 | 16.500.000 | 90 | 9.900.000 | 30 | 3.300.000 | 30 | 3.300.000 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 13.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **150** | **16.500.000** | **90** | **9.900.000** | **6** | **136.588.000** | **6** | **133.746.014** | **100,00** | **97,92** | **96,00** | **143.646.014** | **64,00** | **870,58** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 | 500.515.000 | 6 | 300.309.000 | 1 | 3.160.000 | 1 | 3.045.000 | 100,00 | 96,36 | 7,00 | 303.354.000 | 116,67 | 60,61 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 16.180.000 | 3 | 9.708.000 | 1 | 9.203.000 | 1 | 8.373.000 | 100,00 | 90,98 | 4,00 | 18.081.000 | 80,00 | 111,75 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 33.110.000 | 3 | 19.866.000 | 1 | 26.210.000 | 1 | 25.160.000 | 100,00 | 95,99 | 4,00 | 45.026.000 | 80,00 | 135,99 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 121.775.000 | 3 | 73.065.000 | 1 | 2.800.000 | 1 | 2.800.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 75.865.000 | 80,00 | 62,30 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 14.000.000 | 3 | 8.400.000 | 12 | 45.525.000 | 12 | 45.525.000 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 53.925.000 | 300,00 | 385,18 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 162.500.000 | 36 | 97.500.000 | 12 | 49.690.000 | 12 | 48.843.014 | 100,00 | 98,30 | 48,00 | 146.343.014 | 80,00 | 90,06 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **60** | **152.950.000** | **36** | **91.770.000** | **2** | **89.200.000** | **2** | **89.200.000** | **100,00** | **100,00** | **38,00** | **180.970.000** | **63,33** | **118,32** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 531.000.000 | 2 | 318.600.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 14,00 | 320.600.000 | 700,00 | 60,38 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 10.000.000 | 36 | 6.000.000 | 12 | 87.200.000 | 12 | 87.200.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 93.200.000 | 80,00 | 932,00 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **60** | **521.000.000** | **36** | **312.600.000** | **1** | **19.000.000** | **1** | **15.293.000** | **100,00** | **80,49** | **37,00** | **327.893.000** | **61,67** | **62,94** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 145.875.000 | 2 | 87.525.000 | 15 | 19.000.000 | 15 | 15.293.000 | 100,00 | 80,49 | 17,00 | 102.818.000 | 850,00 | 70,48 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100** | **68675000** | **32,5** | **34905000** | **100** | **12.140.000** | **100** | **12.140.000** | **100,00** | **100,00** | **66,25** | **47.045.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **1** | **22075000** | **1** | **13825000** | **1** | **2.750.000** | **1** | **2.750.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **16.575.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60 | 22075000 | 8 | 13825000 | 12 | 2.750.000 | 12 | 2.750.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | 16.575.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **2** | **46600000** | **2** | **21080000** | **2** | **9.390.000** | **2** | **9.390.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **30.470.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 5 | 13500000 | 3 | 8050000 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 10.750.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 33100000 | 3 | 13030000 | 1 | 6.690.000 | 1 | 6.690.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 19.720.000 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan** | **Persen** | **100** | **21000000** | **46,25** | **7280000** | **100** | **4.200.000** | **100** | **4.200.000** | **100,00** | **100,00** | **73,13** | **11.480.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **7** | **21000000** | **7** | **7280000** | **7** | **4.200.000** | **7** | **4.200.000** | **100,00** | **100,00** | **7** | **11.480.000** | **0,00** | **0,00** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 35 | 21000000 | 5 | 7280000 | 7 | 4.200.000 | 7 | 4.200.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | 11.480.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100** | **325.575.000** | **100** | **14.560.000** | **100** | **65.115.000** | **100** | **63.365.000** | **100,00** | **97,31** | **100** | **77.925.000** | **200,00** | **22,10** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **2000** | **325.575.000** | **1200** | **14.560.000** | **400** | **65.115.000** | **400** | **63.365.000** | **100,00** | **97,31** | **1600** | **77.925.000** | **80,00** | **22,10** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10 | 140.325.000 | 5 | 7.280.000 | 2 | 28.065.000 | 2 | 26.315.000 | 100,00 | 93,76 | 7 | 33.595.000 | 70,00 | 23,94 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 185.250.000 | 5 | 7.280.000 | 3 | 37.050.000 | 3 | 37.050.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 44.330.000 | 53,33 | 20,89 | | |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100** | **109.640.000** | **46,25** | **11.540.000** | **100** | **32.700.000** | **100** | **32.700.000** | **100,00** | **100,00** | **73,13** | **44.240.000** | **146,25** | **225,25** | | |
| | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **375** | **109.640.000** | **200** | **11.540.000** | **75** | **32.700.000** | **75** | **32.700.000** | **100,00** | **100,00** | **137,5** | **44.240.000** | **73,33** | **225,25** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 109.640.000 | 4 | 11.540.000 | 1 | 32.700.000 | 1 | 32.700.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | 44.240.000 | 100,00 | 225,25 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100** | **379.450.000** | **37,48** | **175.870.000** | **100** | **67.860.000** | **100** | **67.860.000** | **100,00** | **100,00** | **68,74** | **243.730.000** | **137,48** | **59,53** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2** | **379.450.000** | **2** | **175.870.000** | **2** | **67.860.000** | **2** | **67.860.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **243.730.000** | **200,00** | **59,53** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1500 | 131.430.000 | 100 | 54.330.000 | 300 | 25.700.000 | 300 | 25.700.000 | 100,00 | 100,00 | 400 | 80.030.000 | 26,67 | 60,89 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | 2500 | 248.020.000 | 400 | 121.540.000 | 500 | 42.160.000 | 500 | 42.160.000 | 100,00 | 100,00 | 900 | 163.700.000 | 36,00 | 58,88 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **14.255.133.835,00** | **100,00** | **8.553.080.301,00** | **11,00** | **2.964.655.116** | **11,00** | **2.907.051.062** | **100** | **98,06** | **111,00** | **11.460.131.363** | **111,00** | **80,39** | **Kecamatan Moncongloe** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **35,00** | **70.000.000,00** | **21,00** | **42.000.000,00** | **7,00** | **14.000.000** | **7,00** | **14.000.000** | **100** | **100,00** | **28,00** | **56.000.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 4,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 4,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 4,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 4,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 4,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 60,00 | 10.000.000,00 | 36,00 | 6.000.000,00 | 12,00 | 2.000.000 | 12,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 48,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 10,00 | 10.000.000,00 | 6,00 | 6.000.000,00 | 2,00 | 2.000.000 | 2,00 | 2.000.000 | 100 | 100,00 | 8,00 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **130,00** | **11.725.593.935,00** | **78,00** | **7.035.356.361,00** | **26,00** | **2.616.726.866** | **25,00** | **2.612.466.822** | **96,153846** | **99,84** | **103,00** | **9.647.823.183** | **79,23** | **82,28** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 11.491.293.935,00 | 1.134,00 | 6.894.776.361,00 | 378,00 | 2.569.866.866 | 378,00 | 2.569.866.866 | 100 | 100,00 | 1512,00 | 9.464.643.227 | 80,00 | 82,36 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 234.300.000,00 | 36,00 | 140.580.000,00 | 12,00 | 46.860.000 | 12,00 | 42.599.956 | 100 | 90,91 | 48,00 | 183.179.956 | 80,00 | 78,18 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **175,00** | **50.000.000,00** | **45,00** | **30.000.000,00** | **35,00** | **20.000.250** | **35,00** | **13.975.000** | **100** | **69,87** | **80,00** | **43.975.000** | **45,71** | **87,95** | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 20,00 | 50.000.000,00 | 12,00 | 30.000.000,00 | 35,00 | 20.000.250 | 35,00 | 13.975.000 | 100 | 69,87 | 47,00 | 43.975.000 | 235,00 | 87,95 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **4,00** | **769.615.000,00** | **4,00** | **461.769.000,00** | **4,00** | **160.898.000** | **2,00** | **115.366.477** | **50** | **71,70** | **6,00** | **577.135.477** | **150,00** | **74,99** | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 125,00 | 25.200.000,00 | 75,00 | 15.120.000,00 | 4,00 | 5.040.000 | 4,00 | 4.867.000 | 100 | 96,57 | 79,00 | 19.987.000 | 63,20 | 79,31 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 25,00 | 39.165.000,00 | 15,00 | 23.499.000,00 | 1,00 | 7.833.000 | 1,00 | 7.443.000 | 100 | 95,02 | 16,00 | 30.942.000 | 64,00 | 79,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 125,00 | 250.000.000,00 | 75,00 | 150.000.000,00 | 25,00 | 59.125.000 | 20,00 | 56.125.000 | 80 | 94,93 | 95,00 | 206.125.000 | 76,00 | 82,45 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 455.250.000,00 | 36,00 | 273.150.000,00 | 12,00 | 88.900.000 | 8,00 | 46.931.477 | 66,666667 | 52,79 | 44,00 | 320.081.477 | 73,33 | 70,31 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **10,00** | **620.150.000,00** | **6,00** | **372.090.000,00** | **5,00** | **129.030.000** | **5,00** | **127.334.763** | **100** | **98,69** | **11,00** | **499.424.763** | **110,00** | **80,53** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2,00 | 744.149.950,00 | 2,00 | 446.489.970,00 | 25,00 | 14.200.000 | 16,00 | 12.500.000 | 64 | 88,03 | 18,00 | 458.989.970 | 900,00 | 61,68 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 549.150.000,00 | 36,00 | 329.490.000,00 | 12,00 | 114.830.000 | 12,00 | 114.834.763 | 100 | 100,00 | 48,00 | 444.324.763 | 80,00 | 80,91 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **5,00** | **154.999.950,00** | **9,00** | **92.999.970,00** | **2,00** | **24.000.000** | **2,00** | **23.908.000** | **100** | **99,62** | **11,00** | **116.907.970** | **220,00** | **75,42** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2,00 | 154.999.950,00 | 2,00 | 92.999.970,00 | 12,00 | 24.000.000 | 12,00 | 23.908.000 | 100 | 99,62 | 14,00 | 116.907.970 | 700,00 | 75,42 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **220.050.000,00** | **32,50** | **69.100.000,00** | **100,00** | **56.550.000** | **100,00** | **55.500.000** | **100** | **98,14** | **132,50** | **124.600.000** | **132,50** | **56,62** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **2,00** | **77.300.000,00** | **2,00** | **13.150.000,00** | **2,00** | **19.100.000** | **2,00** | **19.100.000** | **100** | **100,00** | **4,00** | **32.250.000** | **200,00** | **41,72** | | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait | Dokumen | 6,00 | 27.300.000,00 | - | - | 0,00 | 9.100.000 | 0,00 | 9.100.000 | #DIV/0! | 100,00 | 0,00 | 9.100.000 | 0,00 | 33,33 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 50.000.000,00 | 1,00 | 13.150.000,00 | 1,00 | 10.000.000 | 1,00 | 10.000.000 | 100 | 100,00 | 2,00 | 23.150.000 | 40,00 | 46,30 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **1,00** | **66.750.000,00** | **1,00** | **19.750.000,00** | **1,00** | **22.250.000** | **1,00** | **21.500.000** | **100** | **96,63** | **2,00** | **41.250.000** | **200,00** | **61,80** | | |
| | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Dokumen | 6,00 | 66.750.000,00 | - | - | 1,00 | 22.250.000 | 1,00 | 21.500.000 | 100 | 96,63 | 1,00 | 21.500.000 | 16,67 | 32,21 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **76.000.000,00** | **3,00** | **36.200.000,00** | **3,00** | **15.200.000** | **3,00** | **14.900.000** | **100** | **98,03** | **6,00** | **51.100.000** | **200,00** | **67,24** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 5,00 | 25.000.000,00 | 3,00 | 9.250.000,00 | 1,00 | 5.000.000 | 1,00 | 5.000.000 | 100 | 100,00 | 4,00 | 14.250.000 | 80,00 | 57,00 | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5,00 | 25.000.000,00 | 3,00 | 9.250.000,00 | 1,00 | 5.000.000 | 1,00 | 4.700.000 | 100 | 94,00 | 4,00 | 13.950.000 | 80,00 | 55,80 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 10,00 | 26.000.000,00 | 6,00 | 17.700.000,00 | 1,00 | 5.200.000 | 1,00 | 5.200.000 | 100 | 100,00 | 7,00 | 22.900.000 | 70,00 | 88,08 | | |
| | **Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase desa yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan** | **Persen** | **100,00** | **178.011.000,00** | **62,92** | **137.711.000,00** | **100,00** | **6.149.900** | **100,00** | **6.050.000** | **100** | **98,38** | **162,92** | **143.761.000** | **162,92** | **80,76** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa** | **Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan** | **Desa** | **########** | **178.011.000,00** | **1.050,00** | **137.711.000,00** | **5,00** | **6.149.900** | **5,00** | **6.050.000** | **100** | **98,38** | **1055,00** | **143.761.000** | **42,20** | **80,76** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah dokumen desa yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Dokumen | 10,00 | 178.011.000,00 | 5,00 | 101.061.000,00 | 5,00 | 6.149.900 | 5,00 | 6.050.000 | 100 | 98,38 | 10,00 | 107.111.000 | 100,00 | 60,17 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **20.750.000,00** | **23,75** | **14.405.000,00** | **100,00** | **6.149.900** | **100,00** | **6.050.000** | **100** | **98,38** | **123,75** | **20.455.000** | **123,75** | **98,58** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **25,00** | **20.750.000,00** | **15,00** | **14.405.000,00** | **2,00** | **6.149.900** | **2,00** | **6.050.000** | **100** | **98,38** | **17,00** | **20.455.000** | **68,00** | **98,58** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 25,00 | 20.750.000,00 | 3,00 | 14.405.000,00 | 2,00 | 6.149.900 | 2,00 | 6.050.000 | 100 | 98,38 | 5,00 | 20.455.000 | 20,00 | 98,58 | | |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **818.250.000,00** | **30,56** | **123.925.000,00** | **100,00** | **33.650.000** | **100,00** | **21.950.000** | **100** | **65,23** | **130,56** | **145.875.000** | **130,56** | **17,83** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **3,00** | **818.250.000,00** | **2,00** | **123.925.000,00** | **500,00** | **33.650.000** | **500,00** | **21.950.000** | **100** | **65,23** | **502,00** | **145.875.000** | **16733,33** | **17,83** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 50.000.000,00 | 350,00 | 39.000.000,00 | 2,00 | 33.650.000 | 2,00 | 21.950.000 | 100 | 65,23 | 352,00 | 60.950.000 | 7040,00 | 121,90 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **500,00** | **384.125.000,00** | **250,00** | **47.950.000,00** | **100,00** | **76.825.000** | **100,00** | **71.675.000** | **100** | **93,30** | **350,00** | **119.625.000** | **70,00** | **31,14** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **15,00** | **384.125.000,00** | **3,00** | **71.975.000,00** | **130,00** | **76.825.000** | **130,00** | **71.675.000** | **100** | **93,30** | **133,00** | **143.650.000** | **886,67** | **37,40** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 176.250.000,00 | 800,00 | 15.000.000,00 | 700,00 | 35.250.000 | 700,00 | 35.250.000 | 100 | 100,00 | 1500,00 | 50.250.000 | 42,86 | 28,51 | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | ######## | 25.750.000,00 | 500,00 | 6.000.000,00 | 500,00 | 5.150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 6.000.000 | 20,00 | 23,30 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ######## | 182.125.000,00 | 1.000,00 | 6.000.000,00 | 800,00 | 36.425.000 | 800,00 | 36.425.000 | 100 | 100,00 | 1800,00 | 42.425.000 | 45,00 | 23,29 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **10.370.254.255,00** | **100,00** | **6.222.152.553,00** | **100,00** | **2.720.995.204** | **40,00** | **2.154.986.828** | **40,00** | **79,20** | **140,00** | **8.377.139.381** | **140,00** | **80,78** | **Kecamatan Simbang** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **25,00** | **16.425.000,00** | **15,00** | **9.855.000,00** | **5,00** | **3.285.000** | **4,00** | **2.160.000** | **80,00** | **65,75** | **19,00** | **12.015.000** | **76,00** | **73,15** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1,00 | 600.000 | 1,00 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1,00 | 600.000 | 1,00 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1,00 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.800.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | 1.800.000,00 | 1,00 | 600.000 | 1,00 | 600000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.400.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 4.425.000,00 | 3,00 | 2.655.000,00 | 1,00 | 885.000 | 1,00 | 360000 | 100,00 | 40,68 | 4,00 | 3.015.000 | 80,00 | 68,14 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Layanan** | **130,00** | **9.449.339.255,00** | **78,00** | **5.669.603.553,00** | **1,00** | **2.404.042.204** | **1,00** | **1.868.271.534** | **100,00** | **77,71** | **79,00** | **7.537.875.087** | **60,77** | **79,77** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 9.209.539.255,00 | 3,00 | 5.525.723.553,00 | 26,00 | 2.356.082.204 | 26,00 | 1.820.311.534 | 100,00 | 77,26 | 29,00 | 7.346.035.087 | 1,48 | 79,77 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 239.800.000,00 | 3,00 | 143.880.000,00 | 392,00 | 47.960.000 | 392,00 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 395,00 | 191.840.000 | 658,33 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **627.490.000,00** | **6,00** | **376.494.000,00** | **6,00** | **161.548.000** | **4,00** | **139.707.794** | **66,67** | **86,48** | **10,00** | **516.201.794** | **166,67** | **82,26** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 35,00 | 12.540.000,00 | 3,00 | 7.524.000,00 | 28,00 | 2.508.000 | 0,00 | 2.508.000 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 10.032.000 | 8,57 | 80,00 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70,00 | 8.610.000,00 | 3,00 | 5.166.000,00 | 1,00 | 1.722.000 | 0,00 | 1.722.000 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 6.888.000 | 4,29 | 80,00 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 180,00 | 129.490.000,00 | 3,00 | 77.694.000,00 | 6,00 | 25.898.000 | 6,00 | 25.679.000 | 100,00 | 99,15 | 9,00 | 103.373.000 | 5,00 | 79,83 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15,00 | 31.000.000,00 | 3,00 | 18.600.000,00 | 7,00 | 6.200.000 | 7,00 | 6.200.000 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 24.800.000 | 66,67 | 80,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 110.000.000,00 | 3,00 | 66.000.000,00 | 13,00 | 52.200.000 | 12,00 | 51.525.000 | 92,31 | 98,71 | 15,00 | 117.525.000 | 25,00 | 106,84 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 335.850.000,00 | 3,00 | 201.510.000,00 | 36,00 | 73.020.000 | 36,00 | 52.073.794 | 100,00 | 71,31 | 39,00 | 253.583.794 | 65,00 | 75,51 | | |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah** | **Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan** | **Jenis** | **4,00** | **147.500.000,00** | **4,00** | **88.500.000,00** | **1,00** | **29.500.000** | **1,00** | **27.250.000** | **100,00** | **92,37** | **5,00** | **115.750.000** | **125,00** | **78,47** | | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10,00 | 147.500.000,00 | 3,00 | 88.500.000,00 | 12,00 | 29.500.000 | 11,00 | 27.250.000 | 91,67 | 92,37 | 14,00 | 115.750.000 | 140,00 | 78,47 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **10,00** | **518.600.000,00** | **3,00** | **311.160.000,00** | **12,00** | **103.720.000** | **12,00** | **99.680.000** | **100,00** | **96,10** | **15,00** | **410.840.000** | **150,00** | **79,22** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 34.400.000,00 | 3,00 | 20.640.000,00 | 1,00 | 6.880.000 | 1,00 | 6.880.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 27.520.000 | 6,67 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 484.200.000,00 | 3,00 | 290.520.000,00 | 2,00 | 96.840.000 | 2,00 | 92.800.000 | 100,00 | 95,83 | 5,00 | 383.320.000 | 8,33 | 79,17 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **94.500.000,00** | **2,00** | **56.700.000,00** | **2,00** | **18.900.000** | **2,00** | **17.917.500** | **100,00** | **94,80** | **4,00** | **74.617.500** | **200,00** | **78,96** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 180,00 | 69.500.000,00 | 3,00 | 41.700.000,00 | 12,00 | 13.900.000 | 12,00 | 12.917.500 | 100,00 | 92,93 | 15,00 | 54.617.500 | 8,33 | 78,59 | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 25.000.000,00 | 3,00 | 15.000.000,00 | 12,00 | 5.000.000 | 12,00 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 20.000.000 | 300,00 | 80,00 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **15.250.000,00** | **32,08** | **-** | **0,00** | **7.300.000** | **1,00** | **7.300.000** | **#DIV/0!** | **100,00** | **33,08** | **7.300.000** | **33,08** | **47,87** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **1,00** | **15.250.000,00** | **-** | **-** | **12,00** | **3.050.000** | **1,00** | **3.050.000** | **#VALUE!** | **100,00** | **1,00** | **3.050.000** | **100,00** | **20,00** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 15.250.000,00 | - | - | #VALUE! | 3.050.000 | 1,00 | 3.050.000 | #VALUE! | 100,00 | 1,00 | 3.050.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **1,00** | **21.250.000,00** | **3,00** | **15.500.000,00** | **#VALUE!** | **4.250.000** | **1,00** | **4.250.000** | **#VALUE!** | **100,00** | **4,00** | **19.750.000** | **400,00** | **92,94** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 21.250.000,00 | 301,00 | 15.500.000,00 | 1,00 | 4.250.000 | 1,00 | 4.250.000 | 100,00 | 100,00 | 302,00 | 19.750.000 | 6040,00 | 92,94 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan** | **Persen** | **100,00** | **34.150.000,00** | **24,50** | **25.750.000,00** | **100,00** | **2.800.000** | **100,00** | **2.800.000** | **100,00** | **100,00** | **124,50** | **28.550.000** | **124,50** | **83,60** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **6,00** | **34.150.000,00** | **-** | **25.750.000,00** | **6,00** | **2.800.000** | **6,00** | **2.800.000** | **100,00** | **100,00** | **6,00** | **28.550.000** | **100,00** | **83,60** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 10,00 | 34.150.000,00 | 6,00 | 25.750.000,00 | 2,00 | 2.800.000 | 2,00 | 2.800.000 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 28.550.000 | 80,00 | 83,60 | | |
| | **Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **215.155.000,00** | **51,50** | **153.805.000,00** | **100,00** | **58.650.000** | **100,00** | **58.650.000** | **100,00** | **100,00** | **151,50** | **212.455.000** | **151,50** | **98,75** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **150,00** | **215.155.000,00** | **60,00** | **153.805.000,00** | **3,00** | **32.050.000** | **3,00** | **32.050.000** | **100,00** | **100,00** | **63,00** | **185.855.000** | **42,00** | **86,38** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | - | 133.000.000,00 | 3,00 | 88.000.000,00 | 2,00 | 26.600.000 | 2,00 | 26.600.000 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 114.600.000 | #DIV/0! | 86,17 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 500,00 | 82.155.000,00 | 2,00 | 65.805.000,00 | 1,00 | 5.450.000 | 1,00 | 5.450.000 | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 71.255.000 | 0,60 | 86,73 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **15.250.000,00** | **-** | **-** | **100,00** | **33.050.000** | **100,00** | **33.050.000** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **33.050.000** | **100,00** | **216,72** | | |
| | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | | **15.250.000,00** | **-** | **-** | **100,00** | **33.050.000** | **100,00** | **33.050.000** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **33.050.000** | **#DIV/0!** | **216,72** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | - | 15.250.000,00 | - | - | 1,00 | 33.050.000 | 1,00 | 33.050.000 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 33.050.000 | #DIV/0! | 216,72 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **334.600.000,00** | **31,70** | **68.485.000,00** | **100,00** | **109.200.000** | **100,00** | **109.200.000** | **100,00** | **100,00** | **131,70** | **177.685.000** | **131,70** | **53,10** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **334.600.000,00** | **2,00** | **68.485.000,00** | **2,00** | **54.600.000** | **2,00** | **54.600.000** | **100,00** | **100,00** | **4,00** | **123.085.000** | **200,00** | **36,79** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | - | 136.800.000,00 | 350,00 | 30.750.000,00 | 250,00 | 34.200.000 | 250,00 | 34.200.000 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 64.950.000 | #DIV/0! | 47,48 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | - | 197.800.000,00 | 340,00 | 37.735.000,00 | 900,00 | 20.400.000 | 900,00 | 20.400.000 | 100,00 | 100,00 | 1240,00 | 58.135.000 | #DIV/0! | 29,39 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **17.980.786.065,00** | **100,00** | **10.788.471.639,00** | **100,00** | **3.555.953.645** | **100,00** | **3.245.918.873** | **100,00** | **91,28** | **200,00** | **14.034.390.512** | **200,00** | **78,05** | **Kecamatan Tanralili** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **50.000.000,00** | **33,00** | **30.000.000,00** | **11,00** | **10.000.000** | **11** | **4.900.000** | **100,00** | **49,00** | **44** | **34.900.000** | **80,00** | **69,80** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 10.000.000,00 | 6,00 | 6.000.000,00 | 2,00 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 8.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 400.000 | 100,00 | 40,00 | 4 | 3.400.000 | 80,00 | 68,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 400.000 | 100,00 | 40,00 | 4 | 3.400.000 | 80,00 | 68,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 5.000.000,00 | 3,00 | 3.000.000,00 | 1,00 | 1.000.000 | 1 | 400.000 | 100,00 | 40,00 | 4 | 3.400.000 | 80,00 | 68,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 10.000.000,00 | 3,00 | 6.000.000,00 | 1,00 | 2.000.000 | 1 | 200.000 | 100,00 | 10,00 | 4 | 6.200.000 | 80,00 | 62,00 | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 10.000.000,00 | 12,00 | 6.000.000,00 | 4,00 | 2.000.000 | 4 | 500.000 | 100,00 | 25,00 | 16 | 6.500.000 | 80,00 | 65,00 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **125,00** | **16.425.681.065,00** | **75,00** | **9.855.408.639,00** | **25,00** | **3.234.932.645** | **25** | **3.088.190.873** | **100,00** | **95,46** | **100** | **12.943.599.512** | **80,00** | **78,80** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 16.185.881.065,00 | 1.638,00 | 9.711.528.639,00 | 546,00 | 3.186.972.645 | 546 | 3.040.230.873 | 100,00 | 95,40 | 2.184 | 12.751.759.512 | 80,00 | 78,78 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 55,00 | 239.800.000,00 | 33,00 | 143.880.000,00 | 11,00 | 47.960.000 | 11 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 44 | 191.840.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **679.105.000,00** | **6,00** | **407.463.000,00** | **6,00** | **154.871.000** | **6** | **9.990.000** | **100,00** | **6,45** | **12** | **417.453.000** | **200,00** | **61,47** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 7.500.000,00 | 3,00 | 4.500.000,00 | 1,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4.500.000 | 60,00 | 60,00 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000,00 | 1,00 | 10.000.000 | 1 | 9.990.000 | 100,00 | 99,90 | 4 | 39.990.000 | 80,00 | 79,98 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 86.605.000,00 | 3,00 | 51.963.000,00 | 1,00 | 17.321.000 | 1 | 16.243.000 | 100,00 | 93,78 | 4 | 68.206.000 | 80,00 | 78,76 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 20.000.000,00 | 3,00 | 12.000.000,00 | 1,00 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 16.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 290.000.000,00 | 36,00 | 174.000.000,00 | 12,00 | 58.000.000 | 12 | 58.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 232.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 225.000.000,00 | 36,00 | 135.000.000,00 | 12,00 | 64.050.000 | 11 | 49.050.000 | 91,67 | 76,58 | 47 | 184.050.000 | 78,33 | 81,80 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **2,00** | **711.000.000,00** | **2,00** | **426.600.000,00** | **2,00** | **133.150.000** | **2** | **122.820.000** | **100,00** | **92,24** | **4** | **549.420.000** | **200,00** | **77,27** | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 53.250.000,00 | 36,00 | 31.950.000,00 | 12,00 | 10.650.000 | 12 | 9.000.000 | 100,00 | 84,51 | 48 | 40.950.000 | 80,00 | 76,90 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 657.750.000,00 | 36,00 | 394.650.000,00 | 12,00 | 122.500.000 | 12 | 113.820.000 | 100,00 | 92,91 | 48 | 508.470.000 | 80,00 | 77,30 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **2,00** | **115.000.000,00** | **2,00** | **69.000.000,00** | **2,00** | **23.000.000** | **2** | **20.018.000** | **100,00** | **87,03** | **4** | **89.018.000** | **200,00** | **77,41** | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50,00 | 80.000.000,00 | 30,00 | 48.000.000,00 | 10,00 | 16.000.000 | 10 | 13.358.000 | 100,00 | 83,49 | 40 | 61.358.000 | 80,00 | 76,70 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5,00 | 35.000.000,00 | 3,00 | 21.000.000,00 | 1,00 | 7.000.000 | 1 | 6.660.000 | 100,00 | 95,14 | 4 | 27.660.000 | 80,00 | 79,03 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **1.324.700.000,00** | **47,58** | **392.077.000,00** | **100,00** | **226.200.000** | **100,00** | **224.555.000** | **100,00** | **99,27** | **147,58** | **616.632.000** | **147,58** | **46,55** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **1,00** | **672.450.000,00** | **1,00** | **205.200.000,00** | **1,00** | **95.750.000** | **1** | **94.705.000** | **100,00** | **98,91** | **2** | **299.905.000** | **200,00** | **44,60** | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5,00 | 222.450.000,00 | 4,00 | 205.200.000,00 | 1,00 | 5.750.000 | 1 | 5.500.000 | 100,00 | 95,65 | 5 | 210.700.000 | 100,00 | 94,72 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 60,00 | 450.000.000,00 | - | - | 12,00 | 90.000.000 | 12 | 89.205.000 | 100,00 | 99,12 | 12 | 89.205.000 | 20,00 | 19,82 | | Kelurahan Borong |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **1,00** | **588.000.000,00** | **1,00** | **144.309.000,00** | **1,00** | **117.600.000** | **1** | **117.200.000** | **100,00** | **99,66** | **2** | **261.509.000** | **200,00** | **44,47** | | |
| | Peningkatan efektifitas,Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60,00 | 588.000.000,00 | 13,00 | 144.309.000,00 | 12,00 | 117.600.000 | 12 | 117.200.000 | 100,00 | 99,66 | 25 | 261.509.000 | 41,67 | 44,47 | | Kelurahan Borong |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **64.250.000,00** | **3,00** | **42.568.000,00** | **3,00** | **12.850.000** | **3** | **12.650.000** | **100,00** | **98,44** | **6** | **55.218.000** | **200,00** | **85,94** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 5,00 | 20.000.000,00 | 110,00 | 11.600.000,00 | 1,00 | 4.000.000 | 1 | 3.900.000 | 100,00 | 97,50 | 111 | 15.500.000 | 2220,00 | 77,50 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkat dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5,00 | 20.000.000,00 | 124,00 | 10.968.000,00 | 1,00 | 4.000.000 | 1 | 3.900.000 | 100,00 | 97,50 | 125 | 14.868.000 | 2500,00 | 74,34 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 24.250.000,00 | 112,00 | 20.000.000,00 | 1,00 | 4.850.000 | 1 | 4.850.000 | 100,00 | 100,00 | 113 | 24.850.000 | 2260,00 | 102,47 | | |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan** | **Persen** | **100,00** | **20.500.000,00** | **60,54** | **6.640.000,00** | **100,00** | **4.100.000** | **100,00** | **3.960.000** | **100,00** | **96,59** | **160,54** | **10.600.000** | **160,54** | **51,71** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **7,00** | **20.500.000,00** | **7,00** | **6.640.000,00** | **7,00** | **4.100.000** | **7** | **3.960.000** | **100,00** | **96,59** | **14** | **10.600.000** | **200,00** | **51,71** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 35,00 | 20.500.000,00 | 2,00 | 6.640.000,00 | 7,00 | 4.100.000 | 7 | 3.960.000 | 100,00 | 96,59 | 9 | 10.600.000 | 25,71 | 51,71 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **1.044.120.000,00** | **37,58** | **312.800.000,00** | **100,00** | **255.280.000** | **100,00** | **250.153.274** | **100,00** | **97,99** | **137,58** | **562.953.274** | **137,58** | **53,92** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **244.120.000,00** | **480,00** | **114.395.000,00** | **752,00** | **53.030.000** | **752** | **49.030.000** | **100,00** | **92,46** | **1.232** | **163.425.000** | **32,77** | **66,94** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 160.000.000,00 | 54,00 | 92.420.000,00 | 2,00 | 32.000.000 | 2 | 32.000.000 | 100,00 | 100,00 | 56 | 124.420.000 | 560,00 | 77,76 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15,00 | 84.120.000,00 | 2,00 | 21.975.000,00 | 3,00 | 21.030.000 | 3 | 17.030.000 | 100,00 | 80,98 | 5 | 39.005.000 | 33,33 | 46,37 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan** | **Kegiatan** | **5,00** | **800.000.000,00** | **-** | **198.405.000,00** | **1,00** | **202.250.000** | **1** | **201.123.274** | **100,00** | **99,44** | **1** | **399.528.274** | **20,00** | **49,94** | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 5,00 | 800.000.000,00 | 2,00 | 198.405.000,00 | 1,00 | 202.250.000 | 1 | 201.123.274 | 100,00 | 99,44 | 3 | 399.528.274 | 60,00 | 49,94 | | |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **23.750.000,00** | **47,50** | **14.850.000,00** | **100,00** | **34.750.000** | **100,00** | **34.750.000** | **100,00** | **100,00** | **147,50** | **49.600.000** | **147,50** | **208,84** | | |
| | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **375,00** | **23.750.000,00** | **200,00** | **14.850.000,00** | **75,00** | **34.750.000** | **75** | **34.750.000** | **100,00** | **100,00** | **275** | **49.600.000** | **73,33** | **208,84** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 23.750.000,00 | 3,00 | 14.850.000,00 | 1,00 | 34.750.000 | 1 | 34.750.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 49.600.000 | 80,00 | 208,84 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **414.250.000,00** | **51,25** | **98.410.000,00** | **100,00** | **72.850.000** | **100,00** | **72.350.000** | **100,00** | **99,31** | **151,25** | **170.760.000** | **151,25** | **41,22** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **414.250.000,00** | **2,00** | **98.410.000,00** | **2,00** | **72.850.000** | **2** | **72.350.000** | **100,00** | **99,31** | **4** | **170.760.000** | **200,00** | **41,22** | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 190.250.000,00 | 400,00 | 47.625.000,00 | 500,00 | 38.050.000 | 500 | 37.750.000 | 100,00 | 99,21 | 900 | 85.375.000 | 36,00 | 44,88 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ######## | 224.000.000,00 | 586,00 | 50.785.000,00 | 800,00 | 34.800.000 | 800 | 34.600.000 | 100,00 | 99,43 | 1.386 | 85.385.000 | 34,65 | 38,12 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **13.688.975.115,00** | **100,00** | **8.213.385.069,00** | **100,00** | **2.781.270.023** | **100,00** | **2.644.307.412** | **100,00** | **95,08** | **200,00** | **10.857.692.481** | **200,00** | **79,32** | **Kecamatan Tompobulu** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **20,00** | **12.300.000,00** | **12,00** | **7.380.000,00** | **4,00** | **2.460.000** | **4,00** | **2.460.000** | **100,00** | **100,00** | **16,00** | **9.840.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | **5,00** | **3.075.000,00** | **3,00** | **1.845.000,00** | 1,00 | 615.000 | 1,00 | 615.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.460.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | **5,00** | **3.075.000,00** | **3,00** | **1.845.000,00** | 1,00 | 615.000 | 1,00 | 615.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.460.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | **5,00** | **3.075.000,00** | **3,00** | **1.845.000,00** | 1,00 | 615.000 | 1,00 | 615.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.460.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | **5,00** | **3.075.000,00** | **3,00** | **1.845.000,00** | 1,00 | 615.000 | 1,00 | 615.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 2.460.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuaangan perangkat daerah** | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | Dokumen | **125,00** | **12.430.855.115,00** | **75,00** | **7.458.513.069,00** | 25,00 | 2.516.171.023 | 25,00 | 2.392.042.778 | 100,00 | 95,07 | 100,00 | 9.850.555.847 | 80,00 | 79,24 | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | **#######** | **12.191.055.115,00** | **1.260,00** | **7.314.633.069,00** | 420,00 | 2.468.211.023 | 420,00 | 2.344.082.778 | 100,00 | 94,97 | ##### | 9.658.715.847 | 80,00 | 79,23 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | **55,00** | **239.800.000,00** | **33,00** | **143.880.000,00** | 11,00 | 47.960.000 | 11,00 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 191.840.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian | Orang | **150,00** | **37.500.000,00** | **90,00** | **22.500.000,00** | 30,00 | 7.500.000 | 30,00 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 30.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | **5,00** | **37.500.000,00** | **3,00** | **22.500.000,00** | 1,00 | 7.500.000 | 1,00 | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 30.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | Layanan | **5,00** | **504.570.000,00** | **5,00** | **302.742.000,00** | 5,00 | 111.139.000 | 5,00 | 108.835.634 | 100,00 | 97,93 | 10,00 | 411.577.634 | 200,00 | 81,57 | | |
| | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | **5,00** | **22.500.000,00** | **3,00** | **13.500.000,00** | 1,00 | 4.500.000 | 1,00 | 4.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 18.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | **5,00** | **71.820.000,00** | **3,00** | **43.092.000,00** | 1,00 | 14.364.000 | 1,00 | 14.364.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 57.456.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | **5,00** | **28.750.000,00** | **3,00** | **17.250.000,00** | 1,00 | 5.750.000 | 1,00 | 5.750.000 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 23.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | **60,00** | **89.750.000,00** | **36,00** | **53.850.000,00** | 12,00 | 28.175.000 | 12,00 | 28.175.000 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 82.025.000 | 80,00 | 91,39 | | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | **60,00** | **291.750.000,00** | **36,00** | **175.050.000,00** | 12,00 | 58.350.000 | 12,00 | 56.046.634 | 100,00 | 96,05 | 48,00 | 231.096.634 | 80,00 | 79,21 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | **2,00** | **583.750.000,00** | **2,00** | **350.250.000,00** | 2,00 | 116.750.000 | 2,00 | 107.240.000 | 100,00 | 91,85 | 4,00 | 457.490.000 | 200,00 | 78,37 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | **60,00** | **48.250.000,00** | **36,00** | **28.950.000,00** | 12,00 | 9.650.000 | 12,00 | 9.000.000 | 100,00 | 93,26 | 48,00 | 37.950.000 | 80,00 | 78,65 | | |
| | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | **60,00** | **535.500.000,00** | **36,00** | **321.300.000,00** | 12,00 | 107.100.000 | 12,00 | 98.240.000 | 100,00 | 91,73 | 48,00 | 419.540.000 | 80,00 | 78,35 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | **1,00** | **120.000.000,00** | **1,00** | **72.000.000,00** | 2,00 | 27.250.000 | 2,00 | 26.229.000 | 100,00 | 96,25 | 3,00 | 98.229.000 | 300,00 | 81,86 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/ Jabatan dalam kondisi baik | Unit | **5,00** | **120.000.000,00** | **3,00** | **72.000.000,00** | 1,00 | 24.000.000 | 1,00 | 23.979.000 | 100,00 | 99,91 | 4,00 | 95.979.000 | 80,00 | 79,98 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | **130,00** | **16.250.000,00** | **78,00** | **9.750.000,00** | 25,00 | 3.250.000 | 10,00 | 2.250.000 | 40,00 | 69,23 | 88,00 | 12.000.000 | 67,69 | 73,85 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **51.000.000,00** | **100,00** | **104.239.000,00** | **100,00** | **10.100.000** | **100,00** | **10.100.000** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **114.339.000** | **200,00** | **224,19** | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **10,00** | **51.000.000,00** | **10,00** | **104.239.000,00** | **2,00** | **10.100.000** | **2,00** | **10.100.000** | **100,00** | **100,00** | **12,00** | **114.339.000** | **120,00** | **224,19** | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 5,00 | 25.500.000,00 | 5,00 | 90.514.000,00 | 1,00 | 5.050.000 | 1,00 | 5.050.000 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 95.564.000 | 120,00 | 374,76 | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | **5,00** | **25.500.000,00** | **2,00** | **13.725.000,00** | 1,00 | 5.050.000 | 1,00 | 5.050.000 | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 18.775.000 | 60,00 | 73,63 | | |
| | **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan** | **Persen** | **100,00** | **34.250.000,00** | **46,25** | **15.000.000,00** | **100,00** | **6.850.000** | **100,00** | **6.800.000** | **100,00** | **99,27** | **146,25** | **21.800.000** | **146,25** | **63,65** | | |
| | **Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa** | **Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** | **Desa** | **40,00** | **34.250.000,00** | **10,00** | **15.000.000,00** | **8,00** | **6.850.000** | **8,00** | **6.800.000** | **100,00** | **99,27** | **18,00** | **21.800.000** | **45,00** | **63,65** | | |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 40,00 | 34.250.000,00 | 2,00 | 15.000.000,00 | 8,00 | 6.850.000 | 8,00 | 6.800.000 | 100,00 | 99,27 | 10,00 | 21.800.000 | 25,00 | 63,65 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **200.625.000,00** | **100,00** | **72.175.000,00** | **100,00** | **40.050.000** | **100,00** | **40.000.000** | **100,00** | **99,88** | **200,00** | **112.175.000** | **200,00** | **55,91** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **200.625.000,00** | **2,00** | **72.175.000,00** | **580,00** | **40.050.000** | **580,00** | **40.000.000** | **100,00** | **99,88** | **582,00** | **112.175.000** | **12,52** | **55,91** | | |
| | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 50,00 | 169.875.000,00 | 10,00 | 8.000.000,00 | 2,00 | 33.900.000 | 2,00 | 33.850.000 | 100,00 | 99,85 | 12,00 | 41.850.000 | 24,00 | 24,64 | | |
| | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | **5,00** | **30.750.000,00** | **4,00** | **64.175.000,00** | 1,00 | 6.150.000 | 1,00 | 6.150.000 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 70.325.000 | 100,00 | 228,70 | | |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **25.000.000,00** | **100,00** | **72.175.000,00** | **100,00** | **35.000.000** | **100,00** | **34.950.000** | **100,00** | **99,86** | **200,00** | **107.125.000** | **200,00** | **428,50** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **375,00** | **25.000.000,00** | **722,00** | **64.175.000,00** | **75,00** | **35.000.000** | **75,00** | **34.950.000** | **100,00** | **99,86** | **797,00** | **99.125.000** | **212,53** | **396,50** | | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5,00 | 25.000.000,00 | 12,00 | 64.175.000,00 | 1,00 | 35.000.000 | 1,00 | 34.950.000 | 100,00 | 99,86 | 13,00 | 99.125.000 | 260,00 | 396,50 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **410.000.000,00** | **100,00** | **72.175.000,00** | **100,00** | **93.450.000** | **100,00** | **83.400.000** | **100,00** | **89,25** | **200,00** | **155.575.000** | **200,00** | **37,95** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **410.000.000,00** | **2,00** | **72.175.000,00** | **2,00** | **93.450.000** | **2,00** | **83.400.000** | **100,00** | **89,25** | **4,00** | **155.575.000** | **200,00** | **37,95** | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ###### | 205.000.000,00 | 722,00 | 64.175.000,00 | 300,00 | 41.000.000 | 300,00 | 41.000.000 | 100,00 | 100,00 | #### | 105.175.000 | 51,10 | 51,30 | | |
| | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ###### | 205.000.000,00 | 722,00 | 64.175.000,00 | 450,00 | 52.450.000 | 450,00 | 42.400.000 | 100,00 | 80,84 | #### | 106.575.000 | 26,04 | 51,99 | | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.** | **Persen** | **100,00** | **44.047.775.170,00** | **100,00** | **26.518.665.102,00** | **100** | **8.824.555.034** | **100** | **8.371.485.673** | **100,00** | **94,87** | **100,00** | **34.890.150.775** | **100,00** | **79,21** | **Kecamatan Turikale** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **55,00** | **68.100.000,00** | **33,00** | **40.860.000,00** | **11** | **13.620.000** | **11** | **13.620.000** | **100,00** | **100,00** | **44** | **54.480.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 6.550.000,00 | 6,00 | 3.930.000,00 | 2 | 1.310.000 | 2 | 1.310.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | 5.240.000 | 80,00 | 80,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.400.000,00 | 3,00 | 3.840.000,00 | 1 | 1.280.000 | 1 | 1.280.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5.120.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.150.000,00 | 3,00 | 7.290.000,00 | 1 | 2.430.000 | 1 | 2.430.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 9.720.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 6.550.000,00 | 3,00 | 3.930.000,00 | 1 | 1.310.000 | 1 | 1.310.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5.240.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 12.150.000,00 | 3,00 | 7.290.000,00 | 1 | 2.430.000 | 1 | 2.430.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 9.720.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 12.150.000,00 | 3,00 | 7.290.000,00 | 1 | 2.430.000 | 1 | 2.430.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 9.720.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20,00 | 12.150.000,00 | 12,00 | 7.290.000,00 | 4 | 2.430.000 | 4 | 2.430.000 | 100,00 | 100,00 | 16 | 9.720.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **130,00** | **41.967.625.170,00** | **78,00** | **25.270.575.102,00** | **26** | **8.393.525.034** | **26** | **8.028.037.673** | **100,00** | **95,65** | **104** | **33.298.612.775** | **80,00** | **79,34** | | |
| 1 | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 41.727.825.170,00 | 4.284,00 | 25.036.695.102,00 | 1428 | 8.345.565.034 | 1428 | 7.980.077.673 | 100,00 | 95,62 | 5712 | 33.016.772.775 | 80,00 | 79,12 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60,00 | 239.800.000,00 | 36,00 | 143.880.000,00 | 12 | 47.960.000 | 12 | 47.960.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 191.840.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **510,00** | **75.000.000,00** | **306,00** | **45.000.000,00** | **102** | **15.000.000** | **102** | **7.500.000** | **100,00** | **50,00** | **408** | **52.500.000** | **80,00** | **70,00** | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 10,00 | 75.000.000,00 | 6,00 | 45.000.000,00 | 2 | 15.000.000 | 2 | 7.500.000 | 100,00 | 50,00 | 8 | 52.500.000 | 80,00 | 70,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **6,00** | **512.950.000,00** | **6,00** | **307.770.000,00** | **6** | **102.590.000** | **6** | **73.318.000** | **100,00** | **71,47** | **12** | **381.088.000** | **200,00** | **74,29** | | |
| 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 12.685.000,00 | 3,00 | 7.611.000,00 | 1 | 2.537.000 | 1 | 2.437.000 | 100,00 | 96,06 | 4 | 10.048.000 | 80,00 | 79,21 | | |
| 2 | penyediaan peratalan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5,00 | 36.780.000,00 | 3,00 | 22.068.000,00 | 1 | 7.356.000 | 1 | 6.264.000 | 100,00 | 85,15 | 4 | 28.332.000 | 80,00 | 77,03 | | |
| 3 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 117.120.000,00 | 3,00 | 70.272.000,00 | 1 | 23.424.000 | 1 | 22.164.000 | 100,00 | 94,62 | 4 | 92.436.000 | 80,00 | 78,92 | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 27.615.000,00 | 3,00 | 16.569.000,00 | 1 | 5.523.000 | 1 | 5.523.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 22.092.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 5 | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60,00 | 157.500.000,00 | 36,00 | 94.500.000,00 | 12 | 31.500.000 | 12 | 31.500.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 126.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 6 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60,00 | 161.250.000,00 | 36,00 | 96.750.000,00 | 12 | 32.250.000 | 12 | 5.430.000 | 100,00 | 16,84 | 48 | 102.180.000 | 80,00 | 63,37 | | |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jenis** | **10,00** | **1.469.100.000,00** | **2,00** | **881.460.000,00** | **2** | **293.820.000** | **2** | **243.010.000** | **100,00** | **82,71** | **4** | **1.124.470.000** | **40,00** | **76,54** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 60,00 | 58.200.000,00 | 36,00 | 34.920.000,00 | 12 | 11.640.000 | 12 | 11.640.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | 46.560.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2 | penyediaan jasa pelayanan umu kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 1.410.900.000,00 | 36,00 | 846.540.000,00 | 12 | 282.180.000 | 12 | 231.370.000 | 100,00 | 81,99 | 48 | 1.077.910.000 | 80,00 | 76,40 | | |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik** | **Jenis** | **1,00** | **30.000.000,00** | **1,00** | **18.000.000,00** | **1** | **6.000.000** | **1** | **6.000.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **24.000.000** | **200,00** | **80,00** | | |
| 1 | Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100,00 | 30.000.000,00 | 60,00 | 18.000.000,00 | 20 | 6.000.000 | 20 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 80 | 24.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **34.069.000.000,00** | **70,00** | **4.535.278.900,00** | **100** | **2.786.150.000** | **100** | **2.728.250.300** | **100,00** | **97,92** | **85,00** | **7.263.529.200** | **85,00** | **21,32** | | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan** | **Urusan** | **1,00** | **23.353.000.000,00** | **1,00** | **12.113.098.899,00** | **1** | **636.200.000** | **1** | **586.350.300** | **100,00** | **92,16** | **2** | **12.699.449.199** | **200,00** | **54,38** | | |
| 1 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 3,00 | 31.000.000,00 | - | - | 1 | 6.200.000 | 1 | 6.200.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 6.200.000 | 33,33 | 20,00 | | |
| 2 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 87.694.000 | 100,00 | 97,44 | 24 | 151.579.557 | 66,67 | 56,14 | | Kelurahan Taroada |
| 3 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 87.023.500 | 100,00 | 96,69 | 24 | 150.909.057 | 66,67 | 55,89 | | Kelurahan Adatongeng |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 4 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 85.786.900 | 100,00 | 95,32 | 24 | 149.672.457 | 66,67 | 55,43 | | Kelurahan Pattuadae |
| 5 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 74.235.000 | 100,00 | 82,48 | 24 | 138.120.557 | 66,67 | 51,16 | | Kelurahan Boribellaya |
| 6 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 82.136.000 | 100,00 | 91,26 | 24 | 146.021.557 | 66,67 | 54,08 | | Kelurahan Raya |
| 7 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 77.012.900 | 100,00 | 85,57 | 24 | 140.898.457 | 66,67 | 52,18 | | Kelurahan Turikale |
| 8 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 36,00 | 270.000.000,00 | 12,00 | 63.885.557,00 | 12 | 90.000.000 | 12 | 86.262.000 | 100,00 | 95,85 | 24 | 150.147.557 | 66,67 | 55,61 | | Kelurahan Alliritengae |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan** | **Layanan** | **5,00** | **10.716.000.000,00** | **7,00** | **5.832.950.000,00** | **1** | **2.143.200.000** | **1** | **2.135.150.000** | **100,00** | **99,62** | **8** | **7.968.100.000** | **160,00** | **74,36** | | |
| 1 | Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 420,00 | 10.716.000.000,00 | 131,00 | 5.832.950.000,00 | 84 | 2.143.200.000 | 84 | 2.135.150.000 | 100,00 | 99,62 | 215 | 7.968.100.000 | 51,19 | 74,36 | | |
| | **Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat** | **Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat** | **Urusan** | **3,00** | **63.280.000,00** | **3,00** | **43.030.000,00** | **3** | **6.750.000** | **3** | **6.750.000** | **100,00** | **100,00** | **6** | **49.780.000** | **200,00** | **78,67** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha | Laporan | 5,00 | 19.030.000,00 | 3,00 | 12.280.000,00 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 14.530.000 | 80,00 | 76,35 | | |
| 2 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah laporan terkiat non perizinan | Laporan | 5,00 | 18.050.000,00 | 3,00 | 11.300.000,00 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 13.550.000 | 80,00 | 75,07 | | |
| 3 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5,00 | 26.200.000,00 | 3,00 | 19.450.000,00 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 21.700.000 | 80,00 | 82,82 | | |
| | **Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan** | **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan** | **Persen** | **100,00** | **6.074.750.000,00** | **43,50** | **1.571.829.075,00** | **100** | **1.498.100.000** | **100** | **1.438.596.946** | **100,00** | **96,03** | **71,75** | **3.010.426.021** | **71,75** | **49,56** | | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **399.750.000,00** | **850,00** | **167.640.000,00** | **900** | **79.950.000** | **900** | **54.950.000** | **100,00** | **68,73** | **1750** | **222.590.000** | **38,89** | **55,68** | | |
| 1 | SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 10,00 | 120.250.000,00 | 5,00 | 79.530.000,00 | 2 | 24.050.000 | 2 | 24.050.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | 103.580.000 | 70,00 | 86,14 | | |
| 2 | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15,00 | 279.500.000,00 | 4,00 | 88.110.000,00 | 3 | 55.900.000 | 3 | 30.900.000 | 100,00 | 55,28 | 7 | 119.010.000 | 46,67 | 42,58 | | |
| | **Pemberdayaan kelurahan** | **Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan** | **Orang** | **########** | **5.675.000.000,00** | **498,00** | **1.404.189.075,00** | **800** | **1.418.150.000** | **800** | **1.383.646.946** | **100,00** | **97,57** | **1298** | **2.787.836.021** | **32,45** | **49,12** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Evaluasi kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 5,00 | 12.000.000,00 | 1,00 | 2.400.000,00 | 1 | 2.400.000 | 1 | 2.400.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 4.800.000 | 40,00 | 40,00 | | |
| 2 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 12,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 3 | 202.250.000 | 3 | 199.110.807 | 100,00 | 98,45 | 5 | 399.366.389 | 41,67 | 49,37 | | Kelurahan Taroada |
| 3 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 8,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 2 | 202.250.000 | 2 | 198.439.451 | 100,00 | 98,12 | 4 | 398.695.033 | 50,00 | 49,28 | | Kelurahan Adatongeng |
| 4 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 4,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 1 | 202.250.000 | 1 | 199.362.887 | 100,00 | 98,57 | 3 | 399.618.469 | 75,00 | 49,40 | | Kelurahan Pattuadae |
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 4,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 1 | 202.250.000 | 1 | 201.827.205 | 100,00 | 99,79 | 3 | 402.082.787 | 75,00 | 49,70 | | Kelurahan Boribellaya |
| 6 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 4,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 1 | 202.250.000 | 1 | 198.857.535 | 100,00 | 98,32 | 3 | 399.113.117 | 75,00 | 49,33 | | Kelurahan Raya |
| 7 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 12,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 3 | 202.250.000 | 3 | 184.533.360 | 100,00 | 91,24 | 5 | 384.788.942 | 41,67 | 47,56 | | Kelurahan Turikale |
| 8 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 8,00 | 809.000.000,00 | 2,00 | 200.255.582,00 | 2 | 202.250.000 | 2 | 199.115.701 | 100,00 | 98,45 | 4 | 399.371.283 | 50,00 | 49,37 | | Kelurahan Alliritengae |
| | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | **Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan** | **Persen** | **100,00** | **163.250.000,00** | **46,25** | **16.150.000,00** | **100** | **32.650.000** | **100** | **32.650.000** | **100,00** | **100,00** | **73,13** | **48.800.000** | **73,13** | **29,89** | | |
| | **Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum** | **Orang** | **########** | **163.250.000,00** | **200,00** | **16.150.000,00** | **600** | **32.650.000** | **600** | **32.650.000** | **100,00** | **100,00** | **800** | **48.800.000** | **26,67** | **29,89** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,00 | 163.250.000,00 | 3,00 | 16.150.000,00 | 2 | 32.650.000 | 2 | 32.650.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | 48.800.000 | 50,00 | 29,89 | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** | **Persen** | **100,00** | **83.000.000,00** | **28,70** | **100.350.000,00** | **100** | **16.600.000** | **100** | **16.600.000** | **100,00** | **100,00** | **64,35** | **116.950.000** | **64,35** | **140,90** | | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah** | **Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan** | **Urusan** | **2,00** | **83.000.000,00** | **2,00** | **100.350.000,00** | **2** | **16.600.000** | **2** | **16.600.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **116.950.000** | **200,00** | **140,90** | | |
| 1 | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | ######## | 30.000.000,00 | 800,00 | 48.500.000,00 | 300 | 6.000.000 | 300 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1100 | 54.500.000 | 73,33 | 181,67 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 2 | Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | ########## | 53.000.000,00 | 920,00 | 51.850.000,00 | 240 | 10.600.000 | 240 | 10.600.000 | 100,00 | 100,00 | 1160 | 62.450.000 | 96,67 | 117,83 | | |
| | **Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.** | **Persen** | **100,00** | **16.082.113.795,00** | **100,00** | **9.649.268.277,00** | **100,00** | **3.246.423.259** | **100,00** | **3.049.650.475** | **100,00** | **93,94** | **200,00** | **12.698.918.752** | **200,00** | **78,96** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **Dokumen** | **40,00** | **265.415.500,00** | **24,00** | **159.249.300,00** | **8,00** | **53.083.100** | **8,00** | **46.407.110** | **100,00** | **87,42** | **32,00** | **205.656.410** | **80,00** | **77,48** | | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10,00 | 11.200.000,00 | 6,00 | 6.720.000,00 | 2,00 | 2.240.000 | 2,00 | 2.240.000 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 8.960.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 18.200.000,00 | 3,00 | 10.920.000,00 | 1,00 | 3.640.000 | 1,00 | 3.600.000 | 100,00 | 98,90 | 4,00 | 14.520.000 | 80,00 | 79,78 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 29.320.500,00 | 3,00 | 17.592.300,00 | 1,00 | 4.579.100 | 1,00 | 3.960.000 | 100,00 | 86,48 | 4,00 | 21.552.300 | 80,00 | 73,51 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 11.700.000,00 | 3,00 | 7.020.000,00 | 1,00 | 2.340.000 | 1,00 | 2.265.000 | 100,00 | 96,79 | 4,00 | 9.285.000 | 80,00 | 79,36 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5,00 | 21.225.000,00 | 3,00 | 12.735.000,00 | 1,00 | 2.530.000 | 1,00 | 2.270.000 | 100,00 | 89,72 | 4,00 | 15.005.000 | 80,00 | 70,69 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5,00 | 143.270.000,00 | 3,00 | 85.962.000,00 | 1,00 | 31.654.000 | 1,00 | 30.202.110 | 100,00 | 95,41 | 4,00 | 116.164.110 | 80,00 | 81,08 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5,00 | 30.500.000,00 | 3,00 | 18.300.000,00 | 1,00 | 6.100.000 | 1,00 | 1.870.000 | 100,00 | 30,66 | 4,00 | 20.170.000 | 80,00 | 66,13 | | |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan** | **Dokumen** | **195,00** | **14.489.215.795,00** | **117,00** | **8.693.529.477,00** | **41** | **2.897.843.159** | **41,00** | **2.729.162.098** | **100,00** | **94,18** | **158,00** | **11.422.691.575** | **81,03** | **78,84** | | |
| | Penyediaan gajji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | ########## | 13.650.935.795,00 | 1.134,00 | 8.190.561.477,00 | 392,00 | 2.730.187.159 | 392,00 | 2.562.155.598 | 100,00 | 93,85 | ##### | 10.752.717.075 | 80,74 | 78,77 | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 70,00 | 800.250.000,00 | 42,00 | 480.150.000,00 | 14,00 | 160.050.000 | 14,00 | 160.050.000 | 100,00 | 100,00 | 56,00 | 640.200.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5,00 | 15.965.000,00 | 3,00 | 9.579.000,00 | 1,00 | 3.193.000 | 1,00 | 2.764.500 | 100,00 | 86,58 | 4,00 | 12.343.500 | 80,00 | 77,32 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 60,00 | 22.065.000,00 | 36,00 | 13.239.000,00 | 12,00 | 4.413.000 | 12,00 | 4.192.000 | 100,00 | 94,99 | 48,00 | 17.431.000 | 80,00 | 79,00 | | |
| | **Administrasi kepegawaian perangkat dasrah** | **Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian** | **Orang** | **225,00** | **60.000.000,00** | **135,00** | **36.000.000,00** | **45,00** | **12.000.000** | **45,00** | **12.000.000** | **100,00** | **100,00** | **180,00** | **48.000.000** | **80,00** | **80,00** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya | Paket | 225,00 | 60.000.000,00 | 135,00 | 36.000.000,00 | 45,00 | 12.000.000 | 45,00 | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 48.000.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan** | **Layanan** | **7,00** | **954.822.500,00** | **21,00** | **572.893.500,00** | **34** | **220.964.500** | **34,00** | **200.756.267** | **100,00** | **90,85** | **55,00** | **773.649.767** | **785,71** | **81,03** | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 25,00 | 7.375.000,00 | 15,00 | 4.425.000,00 | 5,00 | 1.475.000 | 5,00 | 1.475.000 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 5.900.000 | 80,00 | 80,00 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5,00 | 26.325.000,00 | 3,00 | 15.795.000,00 | 1,00 | 30.000.000 | 1,00 | 29.900.000 | 100,00 | 99,67 | 4,00 | 45.695.000 | 80,00 | 173,58 | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70,00 | 301.572.500,00 | 42,00 | 180.943.500,00 | 1,00 | 5.265.000 | 1,00 | 4.874.500 | 100,00 | 92,58 | 43,00 | 185.818.000 | 61,43 | 61,62 | | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10,00 | 15.530.000,00 | 6,00 | 9.318.000,00 | 14,00 | 60.314.500 | 12,00 | 49.177.000 | 85,71 | 81,53 | 18,00 | 58.495.000 | 180,00 | 376,66 | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5,00 | 65.000.000,00 | 3,00 | 39.000.000,00 | 2,00 | 3.106.000 | 2,00 | 3.006.000 | 100,00 | 96,78 | 5,00 | 42.006.000 | 100,00 | 64,62 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penyediaan bahan/material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Laporan | 5,00 | 101.700.000,00 | 3,00 | 61.020.000,00 | 1,00 | 3.000.000 | 1,00 | 2.400.000 | 100,00 | 80,00 | 4,00 | 63.420.000 | 80,00 | 62,36 | | |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 50,00 | 437.320.000,00 | 30,00 | 262.392.000,00 | 1,00 | 30.340.000 | 1,00 | 26.300.000 | 100,00 | 86,68 | 31,00 | 288.692.000 | 62,00 | 66,01 | | |
| | **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** | **Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | **Laporan** | **3,00** | **162.660.000,00** | **3,00** | **97.596.000,00** | **10,00** | **87.464.000** | **10,00** | **83.623.767** | **100,00** | **95,61** | **13,00** | **181.219.767** | **433,33** | **111,41** | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 5,00 | 5.160.000,00 | 3,00 | 3.096.000,00 | 14,00 | 32.532.500 | 1,00 | 31.450.000 | 7,14 | 96,67 | 4,00 | 34.546.000 | 80,00 | 669,50 | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 5,00 | 19.500.000,00 | 3,00 | 11.700.000,00 | 1,00 | 1.032.500 | 1,00 | 330.000 | 100,00 | 31,96 | 4,00 | 12.030.000 | 80,00 | 61,69 | | |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 60,00 | 138.000.000,00 | 36,00 | 82.800.000,00 | 1,00 | 3.900.000 | 1,00 | 3.520.000 | 100,00 | 90,26 | 37,00 | 86.320.000 | 61,67 | 62,55 | | |
| | **penyediaan jasa pelayanan umum kantor** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan** | **Laporan** | **2,00** | **150.000.000,00** | **2,00** | **90.000.000,00** | **12,00** | **27.600.000** | **12,00** | **27.600.000** | **100,00** | **100,00** | **14,00** | **117.600.000** | **700,00** | **78,40** | | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | Jenis | 10,00 | 50.000.000,00 | 6,00 | 30.000.000,00 | 3,00 | 30.000.000 | 3,00 | 29.875.000 | 100,00 | 99,58 | 9,00 | 59.875.000 | 90,00 | 119,75 | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 5,00 | 100.000.000,00 | 3,00 | 60.000.000,00 | 2,00 | 10.000.000 | 2,00 | 9.925.000 | 100,00 | 99,25 | 5,00 | 69.925.000 | 100,00 | 69,93 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan** | **Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Persen** | **100,00** | **5.374.227.900,00** | **100,00** | **1.784.378.500,00** | **100,00** | **1.336.244.000** | **100,00** | **1.280.897.750** | **100,00** | **95,86** | **200,00** | **3.065.276.250** | **200,00** | **57,04** | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Dokumen** | **60,00** | **5.374.227.900,00** | **36,00** | **1.784.378.500,00** | **559,00** | **1.336.244.000** | **559,00** | **1.280.897.750** | **100,00** | **95,86** | **595,00** | **3.065.276.250** | **991,67** | **57,04** | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 250,00 | 85.488.150,00 | 37,00 | 1.764.378.500,00 | 50,00 | 37.569.050 | 5,00 | 12.600.000 | 10,00 | 33,54 | 42,00 | 1.776.978.500 | 16,80 | 2078,63 | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | ########## | 72.476.000,00 | - | - | 200,00 | 14.495.200 | 200,00 | 10.547.200 | 100,00 | 72,76 | 200,00 | 10.547.200 | 20,00 | 14,55 | | |
| | Pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan | Keluarga | 250,00 | 79.718.750,00 | - | 20.000.000,00 | 50,00 | 15.943.750 | 50,00 | 10.672.800 | 100,00 | 66,94 | 50,00 | 30.672.800 | 20,00 | 38,48 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | 20,00 | 155.566.750,00 | - | - | 4,00 | 26.473.350 | 4,00 | 20.330.600 | 100,00 | 76,80 | 4,00 | 20.330.600 | 20,00 | 13,07 | | |
| | Pembentukan paskibraka | Jumlah Paskibraka | Orang | ########## | 4.851.795.000,00 | - | - | 250,00 | 1.217.626.000 | 250,00 | 1.203.124.500 | 100,00 | 98,81 | 250,00 | 1.203.124.500 | 20,00 | 24,80 | | |
| | Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraja duta pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | 25,00 | 129.183.250,00 | - | - | 5,00 | 24.136.650 | 5,00 | 23.622.650 | 100,00 | 97,87 | 5,00 | 23.622.650 | 20,00 | 18,29 | | |
| | **Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik** | **Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik** | **Persen** | **100,00** | **167.993.903.450,00** | **100,00** | **-** | **100** | **33.598.780.690** | **100,00** | **33.539.950.790** | **100,00** | **99,82** | **200,00** | **33.539.950.790** | **200,00** | **19,96** | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Dokumen** | **20,00** | **167.993.903.450,00** | **12,00** | **-** | **4** | **33.598.780.690** | **4,00** | **33.539.950.790** | **100,00** | **99,82** | **16,00** | **33.539.950.790** | **80,00** | **19,96** | | |
| | Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Orang | 150,00 | 38.850.000,00 | - | - | 50 | 7.770.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | Orang | ######## | 167.935.053.450,00 | - | - | 5.000 | 33.587.010.690 | ##### | 33.539.950.790 | 100,00 | 99,86 | ##### | 33.539.950.790 | 33,33 | 19,97 | | |
| | Pelaksanaan tugas paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kegiatan | 6,00 | 20.000.000,00 | - | - | 2 | 4.000.000 | 2,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 33,33 | 0,00 | | |
| | **Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemsyarakatan** | **Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas** | **Persen** | **100,00** | **33.075.000,00** | **-** | **18.827.500,00** | **100** | **6.615.000** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.827.500** | **0,00** | **56,92** | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Dokumen** | **5,00** | **33.075.000,00** | **-** | **18.827.500,00** | **1** | **6.615.000** | **1,00** | **0** | **100,00** | **0,00** | **1,00** | **18.827.500** | **20,00** | **56,92** | | |
| | Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah | Orang | 500,00 | 33.075.000,00 | 96,00 | 18.827.500,00 | 100 | 6.615.000 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 196,00 | 18.827.500 | 39,20 | 56,92 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | **Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekoomi, sosial dan budaya** | **Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya** | **Persen** | **100,00** | **710.490.000,00** | **-** | **563.150.700,00** | **100** | **142.098.000** | **100,00** | **141.820.000** | **100,00** | **99,80** | **100,00** | **704.970.700** | **100,00** | **99,22** | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya** | **Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya** | **Orang** | **750,00** | **710.490.000,00** | **-** | **563.150.700,00** | **150** | **142.098.000** | **150,00** | **141.820.000** | **100,00** | **99,80** | **150,00** | **704.970.700** | **20,00** | **99,22** | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 750,00 | 583.735.000,00 | 96,00 | 18.827.500,00 | 150 | 116.747.000 | 150,00 | 116.574.000 | 100,00 | 99,85 | 246,00 | 135.401.500 | 32,80 | 23,20 | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 500,00 | 93.655.000,00 | 100,00 | 272.161.600,00 | 100 | 18.731.000 | 100,00 | 18.695.000 | 100,00 | 99,81 | 200,00 | 290.856.600 | 40,00 | 310,56 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 10,00 | 33.100.000,00 | 105,00 | 272.161.600,00 | 2 | 6.620.000 | 2,00 | 6.551.000 | 100,00 | 98,96 | 107,00 | 278.712.600 | 1070,00 | 842,03 | | |
| | **Peningkatan kewaspadaan nasional dan pembingkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial** | **Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyaraat Dalam Mengantisipasi Konflik** | **Persen** | **500,00** | **4.464.100.000,00** | **77,00** | **1.046.934.450,00** | **100** | **907.820.000** | **100,00** | **844.537.500** | **100,00** | **93,03** | **177,00** | **1.891.471.950** | **35,40** | **42,37** | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya** | **Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya** | **Dokumen** | **75,00** | **4.464.100.000,00** | **120,00** | **1.046.934.450,00** | **15** | **907.820.000** | **15,00** | **844.537.500** | **100,00** | **93,03** | **135,00** | **1.891.471.950** | **180,00** | **42,37** | | |
| | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 500,00 | 75.000.000,00 | - | 6.500.000,00 | 100 | 30.000.000 | 100,00 | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 36.500.000 | 20,00 | 48,67 | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi | | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024 | | Tingkat capaian kinerja & Realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 | | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8/7x100 | | 10 = 8 + 6 | | 11 = 10/5 x 100 % | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 10,00 | 91.135.000,00 | 10,75 | - | 2 | 18.227.000 | 2,00 | 1.999.500 | 100,00 | 10,97 | 12,75 | 1.999.500 | 127,50 | 2,19 | | |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum korodinasi pimpinan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 60,00 | 4.297.965.000,00 | 128,00 | 1.040.434.450,00 | 12 | 859.593.000 | 12,00 | 812.538.000 | 100,00 | 94,53 | 140,00 | 1.852.972.450 | 233,33 | 43,11 | | |

## 2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah diklasifikasi atas dua level yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (level mikro sektoral/penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

### 2.8.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umunya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada masa mendatang. Berikut disajikan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Maros yaitu:

**1) Masih Tingginya Angka Kemiskinan Termasuk Kemiskinan Ekstrem**

Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Maros mencapai 14,62 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 60.000 orang. Angka kemiskinan terbut terus menurun hingga mencapai 12,57 persen pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 40.889 orang. Pada tahun 2013 Angka kemiskinan sedikit meningkat hingga mencapai 12,94 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 43.100 orang. Namun setelah tahun 2013, angka kemiskinan Kabupaten Maros terus mengalami penurunan, termasuk pada saat adanya pandemi COVID-19 tahun 2020. Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Maros sebesar 9,43 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 33.100 orang. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 dikarenakan masih banyak bantuan yang diberikan pemerintah pus at dan daerah yang langsung menyasar penduduk miskin, sehingga dampaknya cukup membantu bagi penduduk miskin.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996).

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehariharinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktuatau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS, 2021) Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Pada tahun 2022 Pemerintah pusat memprioritaskan 212 kabupaten/kota dimana jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota tersebut sebesar 75 persen dari total penduduk miskin ekstrem nasional. Namun demikian, tidak membatasi kabupaten/kota lain untuk berpartisipasi dalam upaya percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem ditahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten Maros tidak termasuk dalam daerah prioritas (212 Kabupaten/Kota), meskipunpadatahun 2021 Kabupaten Maros memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 4%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 144.686 jiwa, atau 34.146 keluarga.

Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros adalah belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan bagi semua *stakeholder.* Beberapa faktor yang menyebakan tingginya tinkat kemiskinan di Kabupaten Maros antaralain: kualitas manusia yang masih rendah, tumpang tindih penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih terbatasnya akses terhadap bantuan modal usaha bagi pedagang kecil serta rendahnya tingkat pendapatan dan terbatasnya keahlian penduduk.

**2) Masih Tingginya Angka Pengangguran**

Pada tahun 2010 angka pengangguran Kabupaten Maros sebesar 9,74 persen kemudian menurun hingga mencapai 4,60 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 angka pengangguran Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 6,99 persen, kemudian menurun peda tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 4,71 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 angka pengangggguran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 6,28 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi hingga mencapai 6,30 persen. Pada tahun 2022 angka pengangguran Kabupaten Maros mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 5,04 persen.

Permasalahan utama tingginya angka pengangguran di Kabupaten Maros adalah kualitas tenaga kerja masih terkendala pada tingkat pendidikan yang rendah dan sertifikasi keahlian. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya daya saing tenaga kerja, rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha, dan tidak seimbangnya pencari kerja dengan peluang lapangan kerja.

**3) Tingginya Rasio Gini**

Perhitungan Rasio Gini di Kabupaten Maros baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2010 hingga tahun 2013 data untuk Rasio Gini tidak tersedia. Perkembangan rasio gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2014 Rasio gini Kabupaten Maros sebesar 0,400 kemudian meningkat hingga 0.439 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Rasio gini Kabupaten Maros kembali menurun 0,410 kemudian terus menurun hingga mencapai 0,330 pada tahun 2018, kemudian tahun 2019, kembali meningkat 0,380. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, Rasio Gini Kabupaten Maros justru menurun hingga 0,368 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,362 pada tahun 2022.

Permasalahan tingginya Rasio Gini di Kabupaten Maros adalah perbaikan taraf perekonomian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah miskin masih sangat rendah, akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatand an kesempatan kerja masih cukup rendah. Masalah lainnya Adalah masih melebar adalah perbedaan mata pencaharian penduduk di wilayah pesisir, pegunungan dan perkotaan. Dimana wilayah pesisir dan pegunungan mata pencaharian hanya seputar nelayan dan petani, sedangkan di perkotaan mata pencaharian lebih bervariatif.

Tingginya ketimpangan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Maros. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bias dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Idealnya rasio gini turun karena percepatan pertumbuhan ekonomi kelas menengah kebawah lebih cepat daripada kelas menengah atas.

**4) Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia**

Capaian IPM Kabupaten Maros selama tahun 2010 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2010 IPM Kabupaten Maros sebesar 64,07 poin (kategori sedang), kemudian dapat mencapai 71,00 poin pada tahun 2022 (kategori tinggi). Capaian ini disebabkan selama kurun waktu 20 tahun tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan penyusunan anggaran.

Permasalahan utama masih rendahnya IPM di Kabupaten Maros adalah sektor sosial budaya masyarakat yang sudah mengakar sejak lama terkait pernikahan usia muda, kualitas SDM yang masih sangat rendah, penyerapan tenaga kerja yang masih rendah. Masalah lainnya adalah pada sektor pendidikan masih banyak pendudk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan selepas SMP, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya menikah, bekerja membantu orang tua (petani), serta adanya idiom yang masih berlaku dimasyarakat, utamanya pada wilayah pegunungan bahwa tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, cukup dapat membaca dan menulis. Pada sektor kesehatan, masalah yang ditemui diantaranya; masih kurangnya kesadaran masyarakat, utamanya ibu-ibu yang mengandung untuk rutin memeriksakan kandungannya ke faslitas kesehatan atau posyandu, sehingga masih terdapat kasus angka kematian bayi dan ibu.

**5) Rendahnya Investasi**

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi untuk dapat menjadi Kabupaten Maros memiliki potensi wisata alam yang eksotis. Eksotisme alam yang membawa Kabupaten Maros menjadi salah satu destinasi wisata baik internasional maupun domestik. Dalam menunjang pengembangan wisata Kabupaten Maros, bukan hanya diperlukan kerja keras dari pemerintah semata untuk melakukan pembangunan tetapi juga perlu adanya bantuan lain dalam bentuk-bentuk investasi dengan melibatkan swasta ataupun pemerintah pusat sehingga Kabupaten Maros mampu mengembangkan sektor pariwisata yang dimiliki.

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor nasional baik PMDN maupun PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah investor yang menanamkan modalnya sebanyak 20 investor, kemudian bertambah menjadi 25 investor pada tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah investor di kabupaten Maros sebanyak 35 investor. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 134 investor.

Persentae kenaikan nilai investasi berskala nasonal (PMDN/PMA) masih rendah (-91,42%). Rendahnya investasi di Kabupaten Maros disebabkan karena Investor belum berani menanamkan investasi dalam jangka panjang, sosialisasi terkait perizinan suaha belum berjalan dengan baik.

Permasalahan utama rendanya investasi di Kabupaten Maros adalah Investor belum berani menanamkan investasi dalam jangka panjangs, sosialisasi terkait perizinan suaha belum ebrjalan dengan baik.

**6) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan elemen penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntablitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.

Dengan mewujudkan reformasi birokrasi maka akan menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan sumber daya manusia yang kompeten. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Maros masih menyisakan berbagai tantangan dan hambatan ke depan guna mewujukan tata kelola pemerintahan yang optimal. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros pada tahun 2022 masih terbilang rendah yaitu sebesar 60,02%. Hal ini disebabkan pada proses deregulasi belum berjalan optimal, belum adanya identifikasi mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan jabatan fungsional, penguatan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, impelementasi kebijakan pengendalian internal belum dilakukan menyeluruh pada berbagai jenjang organisasi/PD, belum dilakukan monitoring terhadap dampak inovasi yang telah dilakukan.

Adapun permasalahan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maros adalah pemeringkatan kinerja belum ada, caascading kinerja belum ada, evaluasi kinerja belum ada. Masalah lainnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum dapat menikmati pelayanan absolut yang seharusnya dimiliki, terkait bidang pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal akibat anggaran yang terbatas, pelaksanaan program kegaiatn yang belum teat sasaran, belum adanya satu sumber data yang digunakan.

**7) Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan cara mengelola sumber daya demi memenuhi kebutuhan manusia, tanpa mengurangi potensinya di masa depan. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Oleh karena itu, dalam mengolah sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros selama ini dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Maros masih didominasi lapangan usaha transportasi, industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor unggulan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Maros seperti bertambahnya sampah perkotaan dan limbah industri yang dapat mencemari lingkungan selain itu untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros sebesar 68,13%, permasalahan dalam peneglolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pertumbuhan penduduk, serta pertambah kendaraan yang cukup pesat, tumbuhnya industri-industri besar/pabrik, penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitasi perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman.Permasalah laiinya adalah limbah cair/padat dari domestik, indutri, dan pertanian.

**8) Belum Optimalnya Pembangunan Gender**

Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan lasung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya. Semakin mendekati angka 100 maka kesejangan pemabgunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 89.46%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahu bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Maros berada pada kategori rendah. Permasalahannya adalah faktor budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

### 2.8.2 Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Maros dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini disajikan beberapa permasalah pembangunan Daerah berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, Yaitu:

**1. Pendidikan**

a) Masih terdapatnya siswa putus sekolah pada tiap jenjang Pendidikan;
b) Rasio ketersediaan sekolah yang tidak sebanding dengan penduduk usia sekolah (pertumbuhan penduduk lebih besar dari jumlah sekolah/ruang kelas yang tersedia);
c) Rasio ketersediaan guru/murid di tingkat pendidikan dasar masih rendah;
d) Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik.

**2. Kesehatan**

a) Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi;
b) Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting;
c) Masih tingginya angka kematian akibat tuberkolosis.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. Menurunnya persentasi jalan kabupaten dalam kondisi baik;
b. Menurunnya ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan;
c. Belum mencukupinya ketersediaan tempat pemakaman umum;
d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;
e. Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;
f. Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai peruntukannya;
g. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
h. Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaun rentan lainnya;
i. Masih sangat kurangnya ketersediaan air bersih pada wilayah pesisir.
j. Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi dalam kondisi yang rusak;
k. Masih terdapatnya rumah tangga yang kumuh.
l. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

**4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a. Belum akuratnya Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi korban bencana dari aparat setempat (Lurah dan Desa)
b. Belum mencukupinya ketersediaan rumah layak huni;
c. Masih terdapat kawasan pemukiman yang belum tertata sesuai dengan standar penataan pemukiman;
d. Masih tingginya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan;

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;
b. Terbatasnya sarana prasarana terkait kendaraan operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Kebakaran.
c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;
d. Belum optimalnya proses penyaluran air bersih pada saat bencana kekeringan disebabkan karena kurangnya armada dan tandom penampungan air bersih.

**6. Sosial**

a. Data yang belum di update secara berkala;
b. Belum terpenuhiyna kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial;
c. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar;

**2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

**1. Tenaga Kerja**

a) Masih adanya sengketa pengusaha-pekerja per tahun;
b) Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB);
c) Masih kurangnya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
d) Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
e) Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
f) Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan;

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
c. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan.

**3. Pangan**

a. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal
b. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal

**4. Pertanahan**

a. Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah belum tertata termasuk masih adanya lahan pemerintah yang belum bersertifikat;
b. Penyelesaian konflik pertanahan belum optimal termasuk beberapa lahan pemerintah yang disengketakan.

**5. Lingkungan Hidup**

a. Belum tersedianya dokumen RPPLH dan D3TLH;
b. Belum terintegrasinya dokumen RPPLH dalam rencana pembangunan daerah.
c. Masih kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (terutama dalam hal pemilahan sampah);
d. Masih sangat kurangnya Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan sampah yang tersedia saat ini;
e. Masih sangat sederhananya Teknologi pengelolaan sampah yang ada saat ini;
f. Belum adanya gedung dan saraan laboratorium yang representatif untuk mendukung kegiatan pengukuran kualitas air dan udara;

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

a. Masih adanya penduduk yang wajib KTP, tapi belum memiliki KTP. b. Masih kurangnya bayi yang belum memiliki akte kelahiran.
b. Masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki akta nikah terutama penduduk daerah terpencil.

**7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

a) Kurangnya kualitas SDM Penyelenggara Pemerintahan Desa;
b) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta masih kurangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi;
c) Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan dana desa, penyertaan swadaya masyarakat dan pemeliharaan pasca program.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk;
b. Masih tingginya Total Fertility Rate;
c. Masih rendahnya perangkat daerah yang memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk;
d. Masih tingginya pernikahan di usia dini;
e. Masih rendahnya peran serta Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program BANGGAKENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
f. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan kesejahteraan keluarga
g. Masih kurangnya kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

**9. Perhubungan**

a. Menurunnnya penumpang angkutan umum dan angkutan darat;
b. Menurunnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

**10. Komunikasi dan Informatika**

a. Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi terintegrasi;
b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

**11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

a. Belum adanya aturan sebagai dasar pelaksanaan MoU antara Diskopumdag dengan mitra layanan keuangan terkait akses UMKM;
b. Masih adanya beberapa koperasi yang tidak aktif;
c. Menurunnya persentase Usaha Mikro dan kecil yang tidak aktif;

**12. Penanaman Modal**

a. Masih rendahnya investor berskala nasional;
b. Masih rendahnya nilai investasi berskala nasional
c. Belum optimalnya kegiatan promosi daerah.

**13. Kepemudaan dan Olah Raga**

a. Belum tersedianya Gedung Olahraga (GOR) yang representatif.
b. Masih kurangnya jenis cabang olahraga yang berprestasi.
c. Masih kurangnya atlet yang beprestasi pada tingkat nasional dan internasional;

**14. Statistik**

a. Belum optimalnya pemanfaatan sertifikat elektronik dalam pengamanan informasi pemerintah daerah;
b. Belum tersedianya sistem pengumpulan data sektoral;

**15. Persandian**

a) Belum optimalnya kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah;
b) belum adanya sistem kerja/kerangka kerja keamanan informasi terstandar.

**16. Kebudayaan**

a. Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
b. Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat belum dikembangkan secara optimal;
c. Masih terbatasnya SDM Pengelola Cagar Budaya dan Tim Ahli;
d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;

**17. Perpustakaan**

a) Kurang beragamnya koleksi buku di perpustakaan;
b) Belum mencukupinya koleksi buku di perpustakaan.

**18. Kearsipan**

a) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku;
b) Belum optimalnya pemanfaatan arsip.

**Urusan Pilihan**

**1. Kelautan dan Perikanan**

a. Belum optimalnya produdktivitas sektor perikanan
b. Belum optimalnya peranan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produksi perikanan
c. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang belum memadai

**2. Pariwisata**

a. Belum optimalnya SDM pengelola kawasan wisata;
b. Belum optimalnya pengembangan, pemasaran dan teknologi informasi pariwisata dalam melakukan promosi wisata;
c. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata
d. Munculnya destinasi wisata baru di setiap wilayah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan;
e. Jarak antara Ibukota Provinsi dan Kota Maros sangat dekat sehingga lama kunjungan berwisata di Maros cukup untuk 1 hari dan maksimal 2 hari.

**3. Pertanian**

a. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
c. Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan in efisiensi usaha tani;
d. Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi;
e. Rendahnya tingkat pendidikan petani yang relative tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi;
f. Keterbatasan petugas/penyuluh pertanian lapangan sehingga menyebabkan kurang optimalnya pembangunan pertanian;
g. Adanya anomalI iklim, bencana alam dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi.

**4. Perdagangan**

a. Tidak ada survey atau pendataan langsung yang dilakukan terkait jumlah pedagang yang ada di Kabupaten Maros.

**5. Perindustrian**

a. Masih rendahnya sumber daya manusia bagi pelaku IKM

**6. Transmigrasi**

a. Belum adanya Dokumen Rencana Kawasn Transmigrasi sebagai pedoman penetapan Kawasan Transmigrasi;

**FUNGSI PENUNJANG**

**1. Perencanaan**

a. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;
b. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

**2. Keuangan**

a. SDM yang belum optimal dalam penguasaan iptek sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
b. Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah;
c. Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

**3. Kepegawaian**

a. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;
b. Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak displin di setiap unit kerja;
c. Jumlah ASN pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu lainnya belum mencukupi;
d. Analisis kebijakan daerah mengenai kenaikan pangkat yang perlu direvisi;

**4. Pengawasan**

a) Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan;
b) Belum optimalnya kapabilitas APIP yang memenuhi standar;
c) Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP;

**5. Penelitian dan Pengembangan**

a) Masih minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Maros;
b) Masih minimnya produk penelitian yang memberikan dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
c) Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daeraj lain dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
d) Kualitas SDM Kelitbangan yang terbatas;
e) Masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengmebangan perkonomian Kabupaten Maros

**6. Sekretariat Daerah**

a. Ketersediaan data/dokumen dari OPD yang belum maksimal
b. Pelaksanaan administrasi pembangunan yang belum maksimal
c. Aplikasi yang belum terintegrasi yang berdampak pada pencapaian nilai SAKIP
d. Masih kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang kinerja
e. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang terkadang menghambat/mempengaruhi acara yang satu dengan yang lainnya

**7. Sekretariat DPRD**

a. Tarbatasnya jumlah SDM yang berkualitas;
b. Belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya

**8. Kesatuan Bangsa dan Politik**

a. Belum memadainya kualitas sumberdaya manusia aparatur Badan Ksebangpol;
b. Belum optimalnya penanganan dampak penanggulangan narkoba di kalangan generasi bangsa;
c. Semakin menurunnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila pada semua elemen masyarakat, penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideology, jiwa dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
d. Belum optimalnya koordinasi di bidang ekonomi, social, budaya dan agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa;

## 2.9 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan

Penentuan isu strategis Kabupaten Maros dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan dengan pembangunan Kabupaten Maros.

### A. ISU STRATEGIS GLOBAL

#### *1. Suistainable Development Goals (SDGs)*

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan memiliki tujuan dalam pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat, pembangunan yang mnejaga kaulitas lingkungan hidup, pembangunan yang menjamni keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memastikan setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. Terdapat tujuh belas TPB yang harus menjadi fokus pemeirntah daerah untuk diwujukan secara bersama yaitu : (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga eksosistem darat, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pemerintah Kabupaten telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Bupati Maros Nomor: 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun 2021-2026.

Terkait dengan pelaksanaan TPB, terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerntah daerah yakni ketersediaan data sektoral, pendanaan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stake holder lainnya dalam mengakselerasi pencapaian TPB.

### *2.* Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dewasa ini, perubahan iklim menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian berbagai pihak. Masalah perubahan iklim juga telah menjadi masalah kebijakan publik terbesar yang dihadapi oleh pemangku kepentingan.Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim telah mengacaukan keseimbangan suhu bumi dan memiliki efek luas pada manusia dan lingkungan. Selama pemanasan global, keseimbangan energi dan suhu bumi berubah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang memiliki dampak signifikan pada manusia dan lingkungan.

Khusus Kabupaten Maros, dampak perubahan iklim makin dirasakan menyusul banyaknya bencana alam yang terjadi beberapa tahun terakhir. Tidak hanya longsor, banjir dan kekeringan, tapi juga memunculkan potensi angin puting beliung yang kian meningkat. Berdasarkan hasil kajian KLHK terkait kondisi dan dampak perubahan iklim di wilayah ekosistem karst TN Babul menemukan bahwa desa-desa sekitar karst di Kabupaten Maros mulai terancam kekeringan. Di sektor pertanian perubahan iklim menyebabkan penurunan produktivitas petani hingga 50 persen, hal ini sebagai dampak adanya perubahan cuaca yang hampir sepanjang tahun terjadi, meningkatnya serangan hama tanaman dan rusaknya tanaman padi akibat terendam banjir serta sulitnya mengeringkan gabah hasil panen. Selain itu, adanya perubahan iklim juga berdampak pada semakin berkurangnya suplai air yang kemudian mendorong petani melakukan peladangan berpindah, mencari sumber-sumber air potensial yang berdampak pada meningkatnya perambahan hutan untuk pertanian yang terjadi selama ini di sekitar wilayah TN Babul. Di sektor perikanan, adanya perubahan iklim dengan cuaca yang tidak menentu sehingga nelayan sulit untuk melaut, jumlah ikan

laut merosot (arus laut berubah dan pengasaman air laut serta suhu air yang berubah-ubah menyebabkan kualitas air tambak menurun.

Bagi kesehatan, perubahan iklim ini menyebabkan kondisi kerentanan bagi munculnya beragam penyakit yang berdampak pada hilangnya waktu kerja petani serta tingginya tingkat kejenuhan. Keberadaaan ekosistem karst pun ikut berdampak, dimana perubahan iklim yang terjadi dapat membuat produksi garam geologi semakin meningkat dan beresiko meningkatkan pengelupasan pada dinding goa dan menghilangnya lukisan- lukisan tertua pada dinding karst Maros-Pangkep.

Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.

Untuk mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana terutama di wilayah yang rawan, pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan perencanaan partisipatif penanggulangan bncana. Kerja sama dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan dan wawancara untuk pmemahami kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pembuatan Peta rawan bencana, dengan membuat peta rawan bencana yang memuat informasi tentang daerah-daerah yang paling rentan terhadap bencana. Peta ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Pengembangan budaya sadar bencana dengan menasosialisasikan informasi tentang bencana dan cara mitigasi kepada masyarakat. Gunakan media massa, sekolah, dan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi.

***3.*** **Teknologi dan Transformasi Digital**

Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital ini, termasuk di antaranya adalah memanfaat digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis diIndonesia.

Untuk mewujudkan percepatan pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui akselerasi transformasi digital, Pemerintah terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta. Transformasi digital merupakan salah satu aspek yang penting untuk diwujudkan menuju Indonesia Maju 2045 dan hal ini juga telah menjadi salah satu isu prioritas dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telam memberikan dukungan untuk percepatan trasnformasi digital dan penguatan ekosistem teknologi melalu berbagai kebijakan dan upaya lainnya. Salah satu kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi digital adalah membantu mengakselerasi bisnis Indonesia melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perkembangan ekonomi syariah. Indonesia memiliki hampir 64 juta UMKM dalam perekonomian.

Bagi pemerintah daerah, Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Dimana, saat ini cara hidup seluruh

lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital. Pemerintah daerah pun dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan tepat sasaran untuk merespon persoalan dengan cepat. Strategi percepatan transformasi digital bagi pemerintah sendiri telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, melalui penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.

**4. Geopolitik Dunia**

Dinamika geopolitik global dewasa ini menjadi salah satu aspek yang perlu diatensi secara serius oleh semua negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi strategis yang dapat membentuk peta geopolitik global. Kecendrungan dari negara-negara maju dan besar seperti Amerika Serikat, Kelompok Uni Eropa, Rusia dan Tiongkok yang menjalankan perang proksi dan perebutan pengaruh di barbagai kawasan dunia akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijkaan politik luar negeri Indonesia.

Posisi geografisnya yang strategis, terletak di persilangan Samudera Indonesia, Selat Natuna Utara dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai simpul krusial dalam jaringan hubungan internasional. Keberagaman etnis, budaya dan agala di dalam negeri bukan hanya menciptakan fondasi yang kokoh untuk diplomasi inklusif, tetapi juga memungkinkan Indonesia menjali hubungan harmonis dengan berbagai negara. Termasuk menjaga keseimbangan dalam dinamika hubungan internasional. Pertumbuhan ekonomi yng stabil memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang semakin dominan dalam kebijakan ekonomi global dan berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional.

Salah satu dinamika politik global yang paling mencolok saat ini adalah pertarungan kekuasaaan dna perbeutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasitifk. Rivlaitas keduanya berada pada sedikitnya empat dimensi, yakni teknologi, investasi, infrastruktur dan keamanan. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik ini pada dasarnya menimbulkan banyak dampak. Kecendrungan yang terjadi adalah munculnya proksi di antara kedua negara yang membagi negara-negara kawasan ke dalam kelompok-kelompok dan aliansi-aliansi tertentu.

Selain itu, dinamika geopolitik global lainnya yakni perang fisik antara Rusia dan Ukraina. Perang di antara kedua negara meletus pada Februari lalu yang menjadi puncak konflik di antara kedua negara. Perang di antara keduanya menimbulkan banyak implikasi. Dampak skala global yang muncul dari perang ini adalah krisis energi global dalam hal mana harga minyak bumi dan gas alam menjadi sangat fluktuatif dan tidak stabil. Rusia sebagai pemasok energi utama di Eropa terpaksa memainkan politik energi sebagai repons atas saknsi keras yang mereka terika dari negara-negara Eropa.

Dalam merespon dinamika geopolitik global yang tidak ramah saat ini, Indonesia diwajibkan untuk cermat dan waspada. Situasi gropolitk global yang bergejolak saat ini pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi yang terpisah dari lingkungan strategis nasional Indonesua, melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Ada banyak kepentingan nasional Indoneia, baik yang sifantya jangka pendek maupun jangka panjang yang terpengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika global saat ini.

## B. ISU STRATEGI NASIONAL

**1. Pemanfaatan Bonus Demografi**

Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dimana usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif bangsa Indonesia akan mencapai 70%.

Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju.

Bonus demografi merupakan keadaan dimana struktur penduduk akan sangat menguntungkan ditinjau dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangatlah besar. Bonus demografi merupakan salah satu peluang emas dalam kemajuan Indonesia apabila dipersiapkan dengan baik. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat wajib dalam mempersiapkan bonus geografi.

Selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju dan juga jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan negara dalam memanfaatkan peluang bonus demografi ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang meningkat akan menjadi awal yang buruk bagi negara yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari hal itu bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan.

Dampak buruk bonus demografi lainnya misalnya: berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan.

Berdasrkan data yang tersedia, diketahui jika Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Maros tahun 2022 sebanyak 277.747 jiwa atau 68,79 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros masih dalam bonus demografi. Sedangkan penduduk lanjut usia sebesar 5,90 persen atau sebanyak 23.840 jiwa.

**2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang Prinsip dan Penetapan SPM serta segala ketentuan yang terkait dengan

Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdaarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanga;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Pelrindungan Masayarakat dan
6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa terget pencapaian setiap indikator adalah 100 persen setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari terget tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100 persen.

**3. Hilirisasi Produk Sumberdaya Alam**

Hilirisasi produk sumberdaya alam merujuk pada proses peningkatan nilai tambah produk-produk yang berasal dari sumber daya alam melalui berbagai tahap pengolahan lanjutan sebelum produk tersebut dijual atau diekspor. Tujuan utama dari hilirisasi adalah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan pendapatan melalui produk-produk bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu usaha dan upaya produktif untuk maksimalisasi bahan mentah yang di dapat dari eksploitasi SDA agar menjadi barang atau produk setengah jadi atau produk jadi. Aktifitas produksi yang komplit dari hulu sampai ke hilir guna meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi SDA menekankan aspek produktivitas atau kegiatan produksi bahan mentah (raw materials) yang mempertimbangkan pengeluaran dan pendapatan biaya secara efektif dan efesien.

Setiap daerah yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk mengmebangkan industry hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah dan memmberkan manfaat langsung bagi daerah. Hilirisasi di daerah memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang efektif, hilirisasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi dengan didukung oleh kondisi topografi yang kompleks sesuai dengn tipikal wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, dan lembah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan variatif, menjadikan Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah yang memiliki peluang investasi paling potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan.

**4. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)**

Pembangunan IKN Nusantara membawa peluang besar untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperhatikan dampak lingkungan dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

Secara keseluruhan, pembangunan IKN Nusantara membawa berbagai peluang dan tantangan bagi pemeirntah daerah. Manfaat ekonomi dan peningkatan konektivitas adalah beberapa dampak positif yang diharapkan, tetapi ada juga potensi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Pemerintah dan pemangku kepentingan lokal di daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dampak positif dapat dimaksimalkan sementara dampak negatif dapat diminimalkan.

## C. ISU STRATEGI DAERAH

### 1. Pengembangan Kawasan Mamminasata

Pusat pertumbuhan Mamminasata adalah sebuah kawasan metropolitan di Sulawesi Selatan yang mencakup beberapa wilayah, yaitu Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur.

Pengelolaan pusat pertumbuhan Mamminasata memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan pembangunan infrastruktur, kebijakan pendukung, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, serta perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif, Mamminasata dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur secara keseluruhan.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ini, Maros memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan kawasan metropolitan Mamminasata. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan peran dan kontribusi Maros dalam pengembangan kawasan Mamminasata: 1) Lokasi Strategis, Maros terletak berdekatan dengan Kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadi kawasan penyangga yang penting. Kedekatan ini memudahkan akses dan konektivitas antara kedua wilayah; 2) Maros merupakan lokasi dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yang merupakan gerbang utama masuk ke Sulawesi Selatan. Ini menjadikan Maros sebagai titik penting dalam jaringan transportasi udara nasional dan internasional; 3) Potensi Ekonomi, Maros memiliki lahan pertanian yang subur dan terkenal dengan produksi beras, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Maros. Selain itu, Maros memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menarik, seperti Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang terkenal dengan gua dan air terjunnya, serta keanekaragaman hayati yang menarik wisatawan domestik dan internasional, Industri dan Perdagangan, Maros juga memiliki potensi dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan, memanfaatkan kedekatan dengan pelabuhan dan infrastruktur transportasi. 3) Pengembangan Infrastruktur, Transportasi dan Jalan , Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antara Maros dan kawasan Mamminasata lainnya, dan Pengembangan fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Maros; 4) Kebijakan dan Regulasi terkait dengan investasi dan pengaturan tata ruang berupa pemberian insentif untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis dan penataan ruang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu peluang kedepan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan industri Kawasan Perkotaan Mamminasata termasuk Kabupaten Maros dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah termasuk mendukung distribusi logistik IKN. Peluang yang lainnya adalah mengembangkan Kawasan Wisata Tompobulu yang ada di Kabupaten Maros sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi dengan mendorong rencana jalan lingkar pesisir dan pembangunan jalan tol Kawasan Perkotaan Mamminasata serta mendorong pengembangan transpostasi massal secara terpadu dan terintegrasi inter sebagai bagian dari penataan sistem jaringan transportasi regional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pengembangan ekonomi Kabupaten Maros, yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan oleh keberadaan bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di kabupaten ini.

Rencana pengembangan pelestarian dan taman nasional Bantimurung Bulusaraung melibatkan beberapa aspek penting, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan ekowisata, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil dan direncanakan:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi

   Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul): Ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. TN Babul memiliki luas ± 43.750 ha yang mencakup tiga wilayah kabupaten: Maros, Pangkep, dan Bone di Sulawesi Selatan.
2. Pengembangan Ekowisata

   Kawasan Wisata Pattunuang: Diresmikan pada 20 Maret 2021, kawasan wisata ini menyuguhkan panorama karst yang unik dan langka. Pengembangan ekowisata ini melibatkan masyarakat sekitar dan berfokus pada kemandirian ekonomi yang tetap memerhatikan budaya-budaya setempat. Pusat Informasi di Kawasan Wisata Bulusaraung: Dibangun sebagai sarana pendukung wisata mendaki gunung Bulusaraung. Pusat informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata dan memanfaatkan fasilitas baru ini.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

   Pengembangan ekowisata di TN Babul melibatkan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

Secara umum, Kabupaten Maros memiliki peran yang penting dalam pengembangan kawasan Mamminasata melalui potensinya di sektor pertanian, pariwisata, dan transportasi. Dengan pengelolaan yang baik, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi yang kuat dengan daerah-daerah sekitar, Maros dapat menjadi kontributor utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Mamminasata.

**2. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan**

Pengelolaan pusat pertumbuhan merupakan salah satu strategi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi, yang dapat mempengaruhi dan merangsang pertumbuhan di sekitarnya.

Pengelolaan pusat pertumbuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan pengembangan infrastruktur, kebijakan pendukung, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, serta perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan mengelola pusat pertumbuhan secara efektif, daerah dapat memaksimalkan potensi ekonominya, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**3. Produktivitas Ekonomi**

Produktivitas ekonomi daerah merupakan isu penting dalam konteks pembangunan, karena produktivitas yang tinggi di suatu daerah dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan standar hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas ekonomi* mengacu pada efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Ini biasanya diukur sebagai output per unit input, seperti tenaga kerja atau modal.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ekonomi daerah yakni : 1) kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi, komunikasi, energi dan air dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas; 2) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja berkontribusi pada kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi; 3) Akses dan adopsi teknologi baru serta inovasi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi; 4) Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif pajak, regulasi yang efisien, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan produktivitas; 5) Kemudahan akses ke sumber pembiayaan untuk investasi dalam usaha baru dan pengembangan usaha yang ada.

Dampak Produktivitas Ekonomi pada Pembangunan Daerah yakni 1) peningkatan pendapatan baik bagi perusahaan maupun pekerja, yang kemudian dapat meningkatkan standar hidup; 2) Daerah dengan produktivitas tinggi biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan kesempatan bisnis, 3) Dengan meningkatkan produktivitas, daerah dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, yang dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan; 4) Daerah dengan produktivitas tinggi dapat lebih kompetitif di pasar global, menarik investasi asing, dan mengembangkan ekspor.

Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, daerah dapat meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi.

**4. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal**

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal adalah dua isu penting dalam pembangunan yang saling terkait. Keduanya berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan yang kuat memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik dan menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintahan serta meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu , Kelembagaan yang kuat mendukung koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan yaitu: 1) Reformasi Birokrasi, melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik; 2) Pengembangan Kapasitas, melaksanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pegawai pemerintah daerah; 3) Peningkatan Sistem Informasi, mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pemerintahan 4) Peningkatan Regulasi dan Kebijakan, mengembangkan dan memperbarui regulasi serta kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pentingnya Kemandirian Fiskal bagi pemerintah daerah yakni dengan kemandirian fiskal memungkinkan daerah untuk memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan pembangunan spesifik daerahnya serta denga  sumber pendapatan lokal yang kuat memungkinkan daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal adalah pilar penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Reformasi kelembagaan dan strategi peningkatan pendapatan daerah yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemerintahan daerah. Dengan demikian, daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dan mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**5. Pelayanan Publik Berbasis IPTEK**

Pelayanan publik berbasis IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan pendekatan modern dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pelayanan publik berbasis IPTEK yakni: 1) Efisiensi Operasional, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola layanan publik; 2) Transparansi dan Akuntabilitas, memperbaiki transparansi proses pelayanan dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat; 3) Aksesibilitas, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa batasan geografis; 4) Kualitas Layanan, meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Pelayanan publik berbasis IPTEK memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dengan strategi yang tepat, termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan keamanan data, pemerintah dapat berhasil mengimplementasikan teknologi dalam pelayanan publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

**6. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur**

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, tetapi juga berperan penting

dalam memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti transportasi, energi, air bersih, dan pendidikan.

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

**7. Pembangunan Sumberdaya Manusia Secara Inklusi**

Pembangunan sumber daya manusia secara inklusif adalah pendekatan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan kualitas hidup semua individu, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang memadai.

Pembangunan sumber daya manusia secara inklusif memainkan peran kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan menekankan pada kesetaraan akses dan kesempatan, masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara penuh, sementara negara dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai motor penggerak untuk kemajuan yang berkelanjutan.

## 2.10 Inovasi Daerah

Pengembangan dan penerapan suatu inovasi dapat menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Maros, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhtikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Berikut ini sejumlah bentuk inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.310**
**Inovasi Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2024**

| NO | NAMA INOVASI | URAIAN | OPD |
|---|---|---|---|
| 1. | PERHITUNGAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN KABUPATEN MAROS (PARAGA) | Bentuk inovasi yang diperkenalkan dalam penyusunan anggaran melalui pendekatan Metode Penyusunan Anggaran dengan pemetaan kebutuhan. | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | NAMA INOVASI | URAIAN | OPD |
|---|---|---|---|
| 2. | PAMANDA (Pusat Informasi Keuangan Daerah) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros | menyediakan informasi keuangan daerah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | INOVASI MAKAMAJA DENGAN PEMBERDAYAAN BUMDES DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK | Aplikasi Yang Dikembangkan Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros Untuk Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Secara Online Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) | Badan Pendapatan Daerah |
| 4. | Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Geografis (SIPENANGKIS) | Sistem Yang Dirancang Untuk Membantu Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Khususnya Dengan Memanfaatkan Informasi Berbasis Lokasi Atau Geografis | Dinas Sosial |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Maros | Sistem Informasi yang membantu dalam pelayanan data informasi Kepegawaian di Kabupaten Maros | Badan Kepegawaian Daerah |
| 6 | PAKINTAKI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Integrasi Keliling) | Bentuk Pelayanan yang membantu masyarakat dalam Pembuatan melalui KTP melalui pelayanan yang langsung ke Masyarakat | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| 7 | Macenning Ati (Mari Cegah dan Tanggulangi Anak yang Stunting) | Bentuk Inovasi yang dilakukan untuk melakukan pemantauan secara dini terhadap anak penderita stunting | Dinas Kesehatan |
| 8 | SILONGTA KEREN (SIstem Layanan ONline Gawat darurat TerpAdu dan KEgawatdaRuratan bENcana | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 9 | MAKESSING (Monitoring Android Perkembangan STBM di Puskesmas Simbang) | Merupakan Aplikasi yang dapat membantu para petugas untuk dapat memonitoring STBM di wilayah layanannya | Dinas Kesehatan |

| NO | NAMA INOVASI | URAIAN | OPD |
|---|---|---|---|
| 10 | GESIT LIAR (GERAKAN INTERVENSI STUNTING DENGAN LIMA PILAR STBM) | | Dinas Kesehatan |
| 11 | GOES LA BANG | | Dinas Kesehatan |
| 12 | Sandaran Si Dia (Standart Operasional Prosedur Berbasis Digital) | | Dinas Kesehatan |
| 13 | KERETA SAKTI | | Dinas Kesehatan |
| 14 | Si Data Seru | | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 15 | SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIAPJAKI) | Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa konstruksi kepada masyarakat yang mempunyai peranan strategis dalam rangka terwujudnya standar pelayanan minimal dan system informasi Pembina jasa konstruksi,maka perlu adanya suatu system pengelolaan informasi yang baik terkhusus pada kegiatan jasa konstruksi ,dimana masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pembangunan jasa konstruksi yang sedang di kerjakan di daerah. | Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang |
| 16 | Layanan Klinik Desa | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 17 | JEMPOL MANIZ | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN |
| 18 | SMART DIGITAL (Solusi Modern untuk Absensi yang respontif dan terpercaya) | | ENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (disdikbud.kabupaten.maros) |
| 19 | Penerapan Implementasi E Rekam Medik berbasis digital | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALALOI MAROS (rsud.kabupaten.maros) |

| NO | NAMA INOVASI | URAIAN | OPD |
|---|---|---|---|
| 20 | KANAL INFORMASI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN SECARA ELEKTRONIK (KASIHARAPANKEREN) | | EKRETARIAT DAERAH (sekda.kabupaten.maros) |

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

### 3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

#### 3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Maros terus menunjukkan pemulihan ke arah yang positif setelah sebelumnya mengalami kontraksi (-10,87%) pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros membaik hingga mencapai 1,36 persen, tahun 2022 bertumbuh dengan sangat signifikan yakni sebesar 9,13 persen, angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Peda tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros melambat hingga mencapai 5,00 persen dan di tahun 2024 mengalami pelambatan, Dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,79 persen.

Letak Kabupaten Maros sebagai daerah penyangga Kota Makassar memberi nilai tersendiri bagi Kabupaten Maros. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Letak Bandara Sultan Hasanuddin yang berada di Kabupaten Maros tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Maros. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023). Dan terakhir yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan cenderung mengalami peningkatan peranan. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah bertambahnya aktivitas pada lapangan usaha tersebut sebagai pasca pandemi Covid-19. Dibukanya kembali rute penerbangan internasional dan kemudahan persyaratan penerbangan membuat jumlah penumpang utamanya sub sektor Angkutan Udara menjadi bertambah.

#### 3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Ketidakpastian ekonomi global selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama saat volatilitas meningkat dan pasar global menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi geopolitik yang dinamis, perubahan kebijakan moneter, serta pergeseran besar dalam tren ekonomi global telah menimbulkan banyak risiko dan peluang bagi para investor. Namun, tantangan global

yang berkembang ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi perekonomian global yang sedang memburuk saat ini tidak dapat dihindari. Hal ini dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang memanas dan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Secara umum, tantangan ekonomi global saat ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi Negara-negara di seluruh dunia. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. **Volatilitas Harga Komoditas**

   Fluktuasi harga komoditas seperti minyak, gas, dan logam telah menjadi sorotan utama. Perubahan harga yang tidak stabil ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, yang mempengaruhi pasokan energi dan makanan global.

2. **Perlambatan Ekonomi di Tiongkok**

   Tiongkok, yang selama beberapa dekade menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi global, kini menghadapi perlambatan. Sektor properti yang lesu dan kebijakan "*Zero-COVID*" yang diterapkan sebelumnya telah memukul aktivitas ekonomi. Perlambatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan ekonomi global mengingat peran besar Tiongkok dalam rantai pasokan internasional.

3. **Kebijakan Moneter Ketat di Amerika Serikat dan Eropa**

   Pasca terpilihnya Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, memberlakukan berbagai kebijakan yang memberi pengaruh signifikan bagi perekonomian global diantaranya, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve*) dan Bank Sentral Eropa (*ECB*) terus mengetatkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi yang melonjak di tengah pandemi dan krisis energi. Suku bunga yang lebih tinggi memiliki dampak langsung pada biaya pinjaman, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan menurunkan profitabilitas perusahaan. Bagi investor, kenaikan suku bunga berarti obligasi menjadi lebih menarik, tetapi pada saat yang sama, harga saham mungkin terpukul karena biaya pembiayaan yang lebih tinggi bagi perusahaan.

4. **Tekanan Geopolitik Global**

   Konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan juga berperan penting dalam menciptakan ketidakpastian pasar. Setiap konflik besar di kawasan strategis dunia mempengaruhi harga energi, perdagangan internasional, dan stabilitas politik.

5. **Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0**

   Teknologi akan tetap menjadi pendorong utama perubahan ekonomi. Pada 2025, transformasi digital diperkirakan semakin masif dengan tren seperti:

   - ✓ Adopsi Artificial Intelligence (AI): AI akan menjadi penggerak utama efisiensi di sektor manufaktur, jasa, dan bahkan pertanian.
   - ✓ Ekonomi Digital: E-commerce dan teknologi keuangan (fintech) akan terus berkembang, memberikan peluang besar bagi negara-negara yang berinvestasi dalam infrastruktur digital.
   - ✓ Teknologi Hijau: Inovasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan akan tumbuh pesat sebagai respons terhadap kebutuhan global untuk menurunkan emisi karbon.

6. **Fokus pada Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau**
   Agenda keberlanjutan semakin menonjol dalam strategi ekonomi global. Pada 2025, diharapkan ada peningkatan investasi dalam sektor energi bersih, termasuk tenaga surya, angin, dan hidrogen. Perusahaan-perusahaan besar j uga akan semakin menyesuaikan model bisnis mereka dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Negara-negara yang berhasil memimpin transisi ke ekonomi hijau kemungkinan besar akan menarik lebih banyak investasi asing, sementara yang tertinggal mungkin menghadapi hambatan perdagangan akibat regulasi lingkungan yang ketat.

### 3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Indonesia berhasil melalui tahun 2024 dengan performa yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2024 didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan. Data *World Bank* menunjukkan pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tahun 2024, di mana pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,1%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang melampaui rata-rata negara berpendapatan menengah. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0% (yoy), di atas rata-rata pertumbuhan global, dengan stabilitas sektor keuangan yang tercermin dari IHSG yang sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Inflasi tercatat naik menjadi 2,8% pada Mei 2024, sementara defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Meski demikian, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada tahun 2025

Memasuki tahun 2025, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.

Memperhatikan hal-hal tersebut, pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi dan keuangan di tahun 2025 dinilai penting bagi seluruh individu maupun

institusi. Mempersiapkan diri menjadi aspek penting untuk menghadapi tren ekonomi yang mungkin terjadi di tahun 2025. Oleh karena itu, *Webinar* ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif kepada para peserta, sehingga mereka dapat menyusun rancangan bisnis yang tangguh, mengelola risiko, dan memanfaatkan potensi yang ada di tahun 2025 secara optimal.

### 3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan di tahun 2025 mencakup beberapa hal, termasuk inflasi, ketidakpastian ekonomi global, dan perlunya diversifikasi ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi diperkirakan positif, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Berdasarkan kondisi terkini dan tren nasional/global, berikut beberapa tantangan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Ketidakpastian global dan tekanan eksternal,
2. Kenaikan suku bunga/biaya pembiayaan
3. Ketebratasan infrastruktur konektivitas, dan logistic
4. Keterbatasan kapasitas hilirisasi dan diversifikasi ekonomi
5. Resiko perubahan iklim dan bencana alam
6. Kelemahan pencatatan dan formalitas ekonomi nikro
7. Ketimpangan kemiskinan dan kapasitas SDM
8. Fiskal daerah dan keterbatasan anggaran

### 3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah

#### 3.1.1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu mencapai 40,92 persen (angka ini meningkat dari 39,28 persen di tahun 2023). Selanjutnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 14,79 persen (angka ini menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,79 persen (menurun dari 14,94 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,94 persen (menurun dari 9,94 persen di tahun 2023). Dan terakhir yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,98 persen (menurun dari 7,43 persen di tahun 2023).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan cenderung mengalami peningkatan peranan. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan

lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah bertambahnya aktivitas pada lapangan usaha tersebut sebagai pasca pandemi Covid-19. Dibukanya kembali rute penerbangan internasional dan kemudahan persyaratan penerbangan membuat jumlah penumpang utamanya sub sektor Angkutan Udara menjadi bertambah.

Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 28.624,00 milliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.235,03 milliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26.388,97 milliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2024, PDRB juga mengalami kenaikan dari 14.210,16 milliar rupiah di tahun 2023 menjadi 14.748,76 milliar rupiah di Tahun 2024. Hal ini menunjukan selama tahun 2024, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, target capaian 2024 dan proyeksi 2025 sebagai berikut.

**Grafik 3.1**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026**

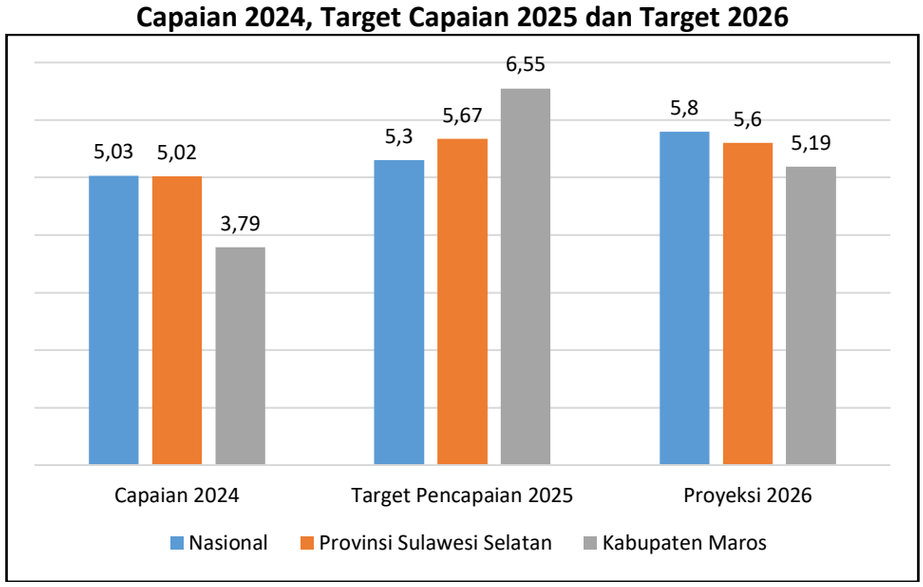


*Sumber : BPS Kab. Maros dan Rancangan Akhir RPJMD Kab.Maros Tahun 2025-2029*

### 3.1.1.5.2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 64,69 juta rupiah. Kemudian, PDRB per kapita mengalami peningkatan menjadi 69,21 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 3.1**
**Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai PDRB (Juta Rp) | 18,621,030 | 19,005,610 | 23,533.00 | 26.388,97 | 28,62 |
| 2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 391,774 | 396,924 | 402.168 | 407.923 | 413.594 |
| 3 | PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa) | 47,53 | 47,88 | 58.31 | 64.69 | 69,21 |

*Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2025*

### 3.1.1.5.3. Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2024 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 2,5%±1. Capaian inflasi tahun 2024 tersebut tercatat sebesar 1,84% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni sebesar 2.61%. Rincian Inflasi 2024 adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), meningkat dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 106,80 pada Desember 2024.

Kelompok Pengeluaran yang Meningkatkan Inflasi antaralain, makanan, minuman, dan tembakau, mencatat inflasi sebesar 1,90%, dengan kontribusi terbesar berasal dari sigaret kretek mesin (0,13%) dan minyak goreng (0,11%). Emas Perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,35%. Nasi dengan Lauk memberikan andil inflasi sebesar 0,06%..

Faktor Penyebab Inflasi Rendah adalah penurunan harga pangan, harga komoditas pangan yang sebelumnya mengalami lonjakan pada 2022 dan 2023 mulai stabil, berkontribusi terhadap rendahnya inflasi. Kebijakan Pemerintah, kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh PT Pertamina, turut menekan laju inflasi.

Kebijakan Moneter Bank Indonesia: Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi 2024 mencapai 3,2%, namun realisasinya lebih rendah dari perkiraan tersebut, menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi.

**Grafik 3.1**
**Perbandingan Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

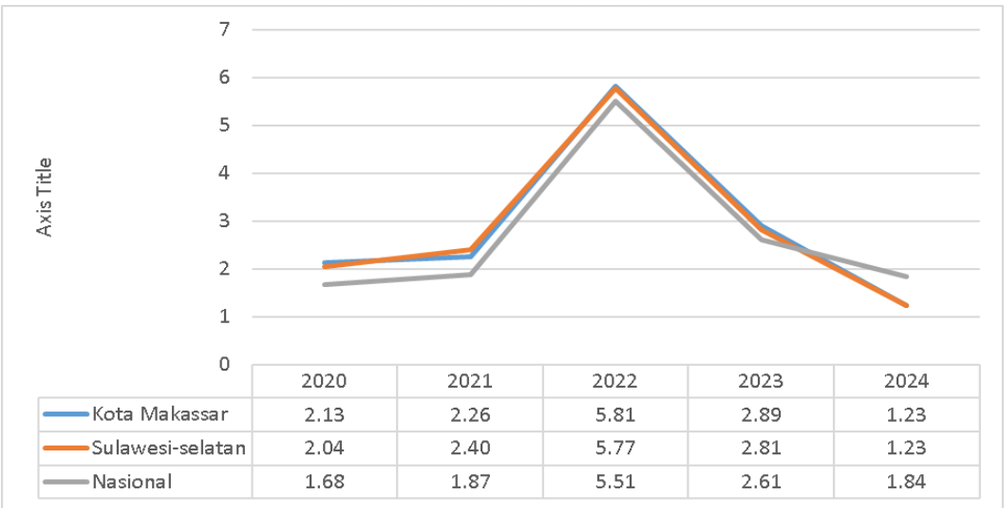


*Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025*

Perbandingan ini menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan relatif terkendali dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam menjaga inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh pengendalian harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan salah satu kontributor utama inflasi.

Pada tahun 2024, inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,23%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Makassar yang berada di angka 1,23% pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar berhasil menjaga stabilitas harga sama dengan rata-rata provinsi.

Jumlah koperasi di Kota Makassar pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.976 unit. Berdasarkan jenisnya terdapat 8 unit KUD, 228 unit KPRI, 198 unit KOPKAR, 12 unit KOPPAS, dan 1.530 unit koperasi jenis lainnya. Jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, terdapat 1.059 unit koperasi aktif di Kota Makassar. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Rappocini, sedangkan yang tidak memiliki koperasi aktir adalah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi) di daerah tersebut. Inflasi bulanan sepanjang tahun 2023 menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2024 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Desember yakni 0,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,49. Sedangkan, deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari dengan deflasi sebesar 0,25 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,66. Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki fasilitas perbankan yang cukup lengkap. Hingga 2024, tercatat sejumlah 67 kantor pusat dan kantor cabang bank umum dan 15 kantor pusat dan cabang bank perkreditan rakyat di Kota Makassar.

### 3.1.1.5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja tidak pernah adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.

TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Perkembangan TPT Kabupaten maros menunjukkan tren yang cendrung menurun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Maros sebesar 6,28 persen, kemudian naik pada Tahun 2021 sebesar 6,28. Kemudian tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai 6,3. Namun pada tahun 2023 dengan semakin mengurangnya pandemi serta percepatan akselerasi ekonomi yang digalakkan Pemerintah Daerah, TPT Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 5,04 persen dan Pada Tahun 2024 dengan semakin banyaknya lapangan kerja di buka baik oleh swasta maupun oleh Pemerintah, maka TPT Kabupaten Maros dapat kembali menurun hingga mencapai 4,34 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros berada pada posisi ke-19 tertinggi dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, meningkat

dibandingkan pada Tahun 2024 (posisi 15 dari 24 kabupaten/Kota). Kabupaten yang memiliki TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar dengan capaian TPT 9,71 persen. Sedangkan capaian TPT terendah berada di Kabupaten Enrekang yaitu sebesar 1,51 persen. TPT Kabupaten Maros tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran capaian TPT kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Pada tahun 2024 TPT menunjukkan peningkatan hingga mencapai 4,34 persen. Hal ini disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Selain itu tingkat Pendidikan tenaga kerja masih berada pada level menegah kebawah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Gambaran pencapaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, target capaian 2025 dan proyeksi 2026 sebagai berikut.

**Grafik 3.2**
**Tingkat Pengangguran Terbuka**
**Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional**
**Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026**

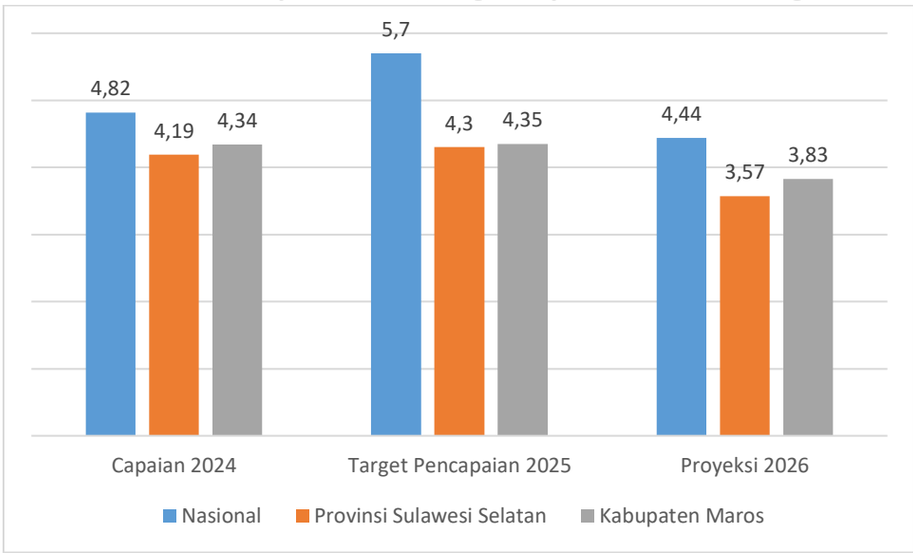


*Sumber : BPS Kab. Maros dan Ranhir RPJMD Kab.Maros Tahun 2025-2029*

### 3.1.1.5.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari Badan Pusat Statistik.

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,74 persen. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,32 persen.

Penurunan tahun 2024 disebabkan kondisi cuaca cenderung normal, produksi pertanian kembali meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan dan bibit pertanian, pembagian alat tangkap dan alsintan, penyediaan asuransi bagi petani, pemberian baju seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, pembangunan jalan produksi, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kawasan kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Berikut gambaran pencapaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, target capaian 2025 dan proyeksi 2026 sebagai berikut.

**Grafik 3.3**
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026**

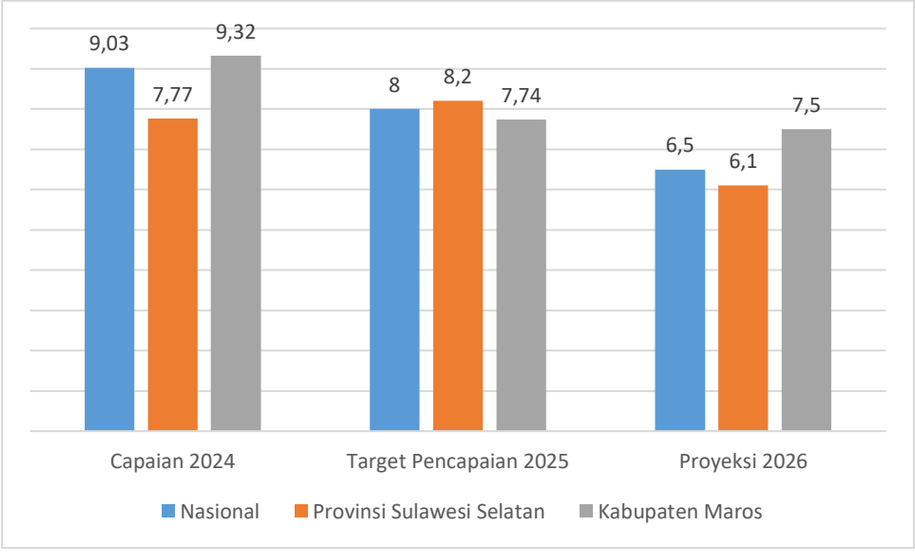


*Sumber : BPS Kab. Maros dan Rancangan Akhir RPJMD Kab.Maros Tahun 2025-2029*

### 3.1.1.5.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 73,56% dan tahun 2024 sebesar 74,04 dengan perubahan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program-program prioritas pemerintah telah tepat sasaran. Sebagai Gambaran umum, Pada tahun 2024, sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada masing-masing status pembangunan dari sedang hingga sangat tinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Seluruh kota madya memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM≥80). Selanjutnya, terdapat 20 kabupaten lainnya dengan status pembangunan tinggi (70 ≤ IPM < 80). Sementara itu, hanya Jeneponto yang status pembangunan manusianya masih berada pada level sedang dengan nilai indeks 69,45. Seiring dengan meningkatknya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM 24 Kabupaten/Kota sebesar 0,64 poin. 4 kabupaten dengan

peningkatan paling tinggi adalah Tana Toraja, Bantaeng, Kepulauan Selayar dan Soppeng dengan peningkatan sebesar 0,82 poin sampai dengan 0,93 poin. Sedangkan Kabupaten dengan peningkatan paling rendah adalah Kota Makassar sebesar 0,38 poin.

Berikut gambaran capaian tahun 2024 dan target capaian tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional.

**Grafik 3.4**
**Indeks Pembangunan Manusia**
**Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**
**Capaian 2024, Target Capaian 2025 dan Target 2026**

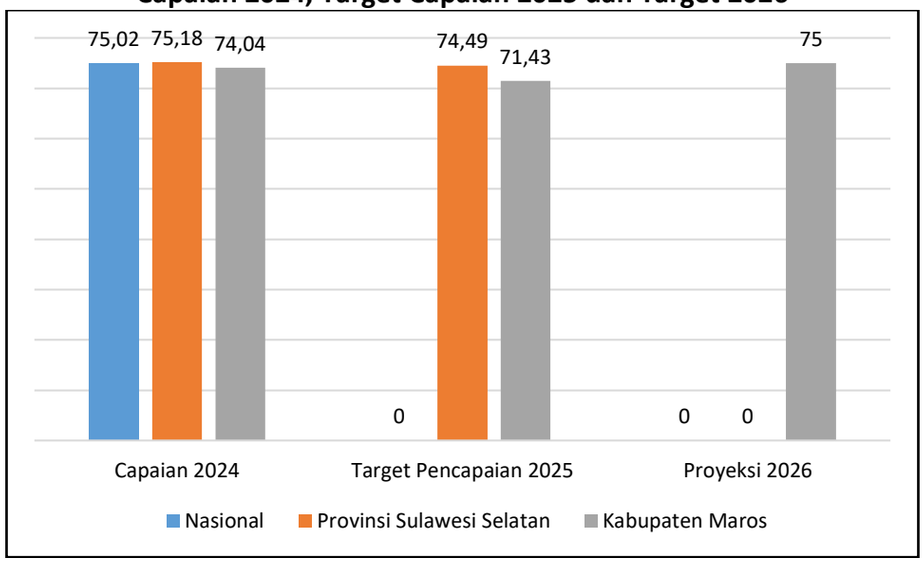


*Sumber : BPS Kab. Maros dan Ranhir RPJMD Kab.Maros Tahun 2025-2029*

### 3.1.1.5.7. Gini Rasio

Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur Tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur Tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Perhitungan Indeks Gini di Kabupaten Maros baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2014.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Maros sebesar 0,385. Capaian Indeks Gini Kabupaten Maros yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih tinggi kesenjangan antara pengeluaran penduduk antara 40 persen lapisan bawah, dan menengah. Indeks Gini turun tipis karena tidak ada perbaikan pengeluaran kelompok masyarakat miskin, bahkan pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menjadi buruh di perusahaan daripada menjadi petani, dengan penghasilan yang tidak lebih baik. Hal ini linear dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Maros, dimana walaupun Tingkat kemiskinan terus menurun namun, kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat.

Data terakhir yang tersedia adalah untuk tahun2024, yang tercatat sebesar 0,363. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2023 yang sebesar 0,388. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Maros. Berikut gambaran target

capaian tahun 2024 dan proyeksi capaian tahun 2025/2026 Gini Rasio Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional.

**Grafik 3.5**
**Gini Rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**
**Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Target 2025**

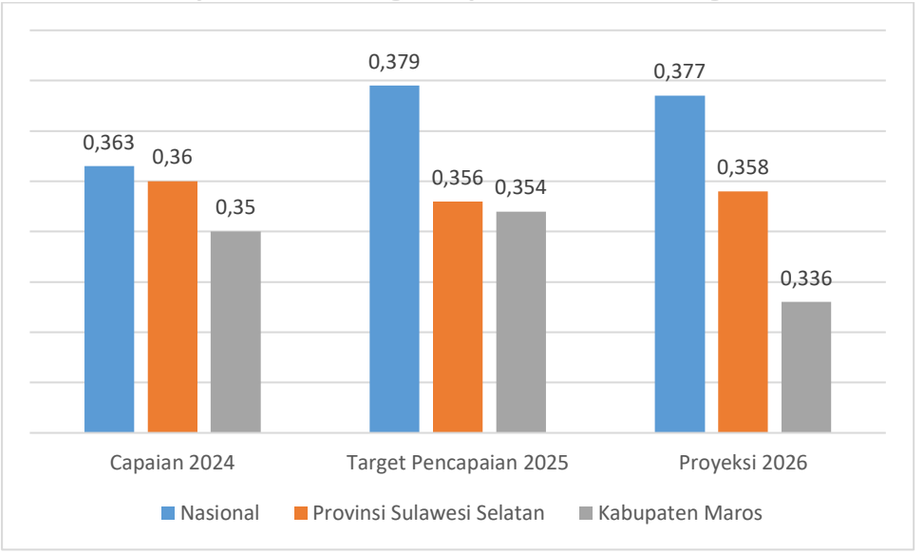


*Sumber : BPS Kab. Maros dan Ranhir RPJMD Kab.Maros Tahun 2025-2029*

### 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2026

#### 3.1.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Untuk tahun 2026, tema RKP yaitu **"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonom hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangakan agromariitm industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehata, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenila dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelendupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2026, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2026, antara lain:

**Tabel. 3.2**
**Sasaran Pembangunan Nasional**
**Tahun 2026**

| NO | INDIKATOR MAKRO | TARGET 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,8 – 6,3 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5 – 7,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44 – 4.96 |
| 4 | Indeks Modal Manusia | 0,57 |
| 5 | Gini Rasio | 0,377 – 0,38 |
| 6 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 37,14 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,67 |
| 8 | Kemiskinan Ekstrem (%) | 0,00 – 0,50 |
| 9 | GNI per Capita (USS) | 5,870 |

**Sumber : RKP Tahun 2026**

### 3.1.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2026 yaitu **"Peningkatan Kualitas SDM Yang Berkahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inkklusif".** Terdapat tujuh Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Adapun target indicator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2026yaitu:

**Tabel. 3.3**
**Target Indikator Makro Ekonomi**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026**

| NO | INDIKATOR MAKRO | TARGET 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,9 – 6,5 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,50 – 7,00 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,00 – 4,18 |
| 4 | IMM (Nilai) | 0,54 |
| 5 | Gini Rasio | 0,346 – 0,352 |
| 6 | Penurunan Emisi GRK | 33,26 – 37,47 |
| 7 | Pendapatan Per Kapita ADHK (juta) | 86,9 – 89,5 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 77,81 |

**Sumber : RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026**

### 3.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2026

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2026 mengambil tema: **Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan.** Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan;
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan;
3. Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan;
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan;
6. Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah;
7. Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan;
8. Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Arah kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha lokal melalui pengembangan keterampilan dan kualitas tenaga kerja;
2. Penguatan nilai tambah produk dan jasa unggulan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi;
3. Peningkatan akses pembiayaan, permodalan, dan jaringan pemasaran bagi pelaku ekonomi local;
4. Pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan;

5. Penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing;
6. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk serta jasa unggulan daerah untuk menjamin mutu dan daya saing;
7. Penguatan nilai tambah produk unggulan melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif;
8. Pengembangan kapasitas pelaku usaha, UMKM, dan industri kreatif dalam pengelolaan dan pemasaran produk;
9. Pemanfaatan teknologi digital, promosi, dan perluasan akses pasar guna meningkatkan distribusi produk dan jasa unggulan;
10. Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam pengembangan produk serta jasa unggulan daerah.

Adapun Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 3.4**
**Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros**
**Tahun 2026**

| No | Indikator | Tahun 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,75 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,16 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,82 – 6,92 |
| 4 | PDRB Perkapita (Rp Juta) | 75,43 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | 74,76 |
| 6 | Gini Ratio | 0,336 |
| 7 | Intensitas Emisi GRK (%) | 13,75 |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,47 |

**Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029**

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagi penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus ditangani dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal.

Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan dilakukan melalui:

a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak da retirbusi daerah dengan rangkaian kegiatan 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau

retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan Opsen PKB dan BBNKB untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan sebesar 1 persen atau sekitar Rp 525 juta dari target opsen tahun 2025.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan system administrasi perpajakan/retribusi yang jelas dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak/retribusi daerah;
c) Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampuh oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
d) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, penataan ulang *(restrukturisasi asset),* agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan pendapatan daerah melalu pendapatan sewa.
e) Menggali inovasi pemanfaatan teknologi, guna mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah.
f) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada objek pendapatan dan retribusi daerah.

### 3.2.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2027

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Maros bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut Gambaran realisasi dan target pendapatan daerah Kabupaten Maros selama lima tahun (2023 s.d 2027).

**Tabel 3.5**
**Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Maros**
**Tahun 2023-2027**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Rencana Capaian Tahun 2025 | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi Tahun 2027 |
| **PENDAPATAN** | **1.470.052.018.011,28** | **1.557.279.562.311,88** | **1.656.120.892.000,00** | **1.705.804.518.000,00** | **1.756.978.653.000,00** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **309.499.978.535,26** | **302.023.839.689,88** | **366.655.000.000,00** | **377.654.650.000,00** | **388.984.289.000,00** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 194.980.064.546,00 | 186.964.321.884,00 | 236.030.000.000,00 | 243.110.900.000,00 | 250.404.227.000,00 |

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Rencana Capaian Tahun 2025 | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi Tahun 2027 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 18.233.282.544,14 | 13.891.702.590,00 | 105.475.000.000,00 | 23.800.000.000,00 | 24.514.000.000,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.483.898.863,00 | 10.514.263.237,80 | 11.000.000.000,00 | 11.330.000.000,00 | 11.669.900.000,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 85.802.732.582,12 | 90.653.551.978,08 | 14.150.000.000,00 | 99.413.750.000,00 | 102.396.162.000,00 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.160.552.039.476,02** | **1.126.681.416.393,50** | **1.289.465.892.000,00** | **1.328.149.868.000,00** | **1.367.994.364.000,00** |
| **TRANSFER PUSAT** | **1.059.653.888.653,00** | **1.149.839.930.422,00** | 1.222.624.919.000,00 | 1.259.972.076.000,00 | 1.298.453.016.000,00 |
| **TRANSFER ANTAR DAERAH** | **100.898.150.823,02** | **69.433.864.390,00** | 66.840.973.000,00 | 69.541.348.000,00 | 69.541.348.000,00 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0** | **1.302.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029

Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar **Rp 1.705.804.518.000,00**yang terdiri atas **Pendapatan Asli Daerah Rp 377.654.650.000,00 Pendapatan Transfer Rp 1.328.149.868.000,00** dan **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tidak ada penerimaan di tahun 2026.**

Selama kurun waktu tahun 2020 s/d 2024, Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 78,83 persen, Pendapatan Asli Daerah sekitar 20,90 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sekitar 0,27 persen.

Adapun Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh pendapatan Pajak Daerah sekitar 60,28 persen, Lain-lain PAD yang sah sekitar 31,08 persen, Pendapatan Retribusi Daerah sekitar 5,93 persen, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sekitar 2,70 persen.

### 3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir (2020-2024). Diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 mencapai Rp 219.100.516.893,51 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp 302.058.178.594,88. Realisasi penerimaan PAD ini tergantung dari komponen PAD itu sendiri, Dimana masing-masing komponen PAD memiliki persentase pertumbuhan yang berbeda-beda. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi paling besar adalah Pajak Daerah. Selama kurun waktu lima tahun (2020 ss.d 2024) kontribusi masing-masing komponen PAD yaitu: Pendapatan Pajak Daerah (58,20 persen), Retribusi Daerah (6,44 persen), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (4,3 persen), Lain-lain PAD Yang Sah (31,9 persen).

**3.2.2.1.1. Pajak daerah**

Pajak Daerah merupakan tulang punggung dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Selama lima tahun (2020-2024) penerimaan Pajak Daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini ditopang oleh optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak restoran, pajak hotel, serta penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp 243.110.900.000,00 dan di tahun 2027 diproyeksikan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 250.404.227.000,00.

**3.2.2.1.2. Retribusi Daerah**

Untuk Retribusi Daerah, selama kurun waktu 2023 s.d 2025 cenderung fluktuatif. Dimana tahun 2023 realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 18.233.282.544,14, di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 13.891.702.590,00 dan di tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 105.475.000.000,00.

Untuk proyeksi tahun 2026, penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 23.800.000.000,00 dan di tahun 2027 diproyeksikan menjadi Rp 24.514.000.000,00. Penurunan ini bukan disebabkan melemahnya kinerja pemungutan, melainkan akibat adanya reklasifikasi pendapatan layanan kesehatan Puskesmas dan RSUD dari kelompok retribusi ke pos Lain-lain PAD yang Sah melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

**3.2.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan cenderung stabil. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 10.483.898.863,00 dan di tahun 2024 sebesar Rp 10.514.263.237,80 dan di tahun 2025 ditargetkan Rp 11.000.000.000,00.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 11.330.000.000,00 dan di tahun 2027 diproyeksikan Rp 11.669.900.000,00. 2024. Target yang stagnan ini mencerminkan kontribusi BUMD yang masih terbatas, sehingga diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja BUMD agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih optimal di masa mendatang..

**3.2.2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerha yang Sah cenderung mengalami fluktuatif di tahun 2023 sampai dengan 2025. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2023 sebesar Rp 85.802.732.582,12, di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp 90.653.551.978,08, dan di tahun 2025 target penerimaan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 14.150.000.000,00. Penurunan ini disebabkan adanya pergeseran klasifikasi pendapatan, khususnya pada sektor kesehatan, di

mana penerimaan Puskesmas dan RSUD yang sebagian besar bersumber dari kapitasi JKN dan non-kapitasi tidak lagi dicatat sebagai retribusi, melainkan masuk ke pos Lain-lain PAD yang Sah melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana diproyeksikan menjadi Rp 99.413.750.000,00 dan di tahun 2027 menjadi Rp 102.396.162.000,00. Peningkatan ini disebabkan oleh pergeseran pencatatan pendapatan BLUD, khususnya dari layanan kesehatan, yang sebelumnya berada pada kelompok retribusi.

Secara keseluruhan, meskipun realisasi PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, strukturnya masih didominasi oleh Pajak Daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi cukup signifikan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah stagnan, dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan akibat penyesuaian klasifikasi. Hal ini menegaskan bahwa upaya optimalisasi PAD ke depan perlu difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, rasionalisasi jenis retribusi sesuai UU HKPD, serta penguatan peran BLUD dan BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Maros.

**3.2.2.1.5. Pendapatan Transfer**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 sampai dngan Pasal 45, Pendapatan Transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer selama lima tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami fluktutatif. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.160.552.039.476,02, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 1.126.681.416.393,50 dan di tahun 2025 ditargetkan mengalami peningkatan menjadi Rp 1.289.465.892.000,00.

Penerimaan Pendapatan Transfer untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1.328.149.868.000,00 dan di tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp 1.367.994.364.000,00.

Secara komposisi, Transfer Pemerintah Pusat merupakan penyumbang terbesar dengan rata-rata kontribusi lebih dari 95 persen. Penerimaan dari pusat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Stabilitas transfer dari pusat selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepastian dukungan fiskal dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, terutama dalam membiayai belanja wajib layanan dasar.

#### 3.2.2.1.6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan di luar PAD dan Transfer yang bersumber dari penerimaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain hibah yang tidak mengikat, dana darurat, dan penerimaan lain yang bersifat insidental.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Maros pada periode Tahun Anggaran 2022–2024 menunjukkan sifatnya yang insidental. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak terdapat realisasi penerimaan pada pos ini. Namun, pada Tahun 2024 tercatat realisasi sebesar Rp1.302.000.000,00 yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat. Kontribusi pos ini terhadap total pendapatan daerah sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,08 persen pada Tahun 2024. Untuk tahun 2025 ditargetkan tidak ada penerimaan dari pos pendapatan ini.

Meskipun demikian, keberadaannya tetap penting karena menunjukkan adanya peluang tambahan kapasitas fiskal yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas daerah apabila terdapat hibah atau penerimaan incidental lainnya. Dengan karakteristik yang tidak dapat diproyeksikan secara rutin, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dijadikan tumpuan utama dalam struktur pendapatan daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Maros tetap perlu menaruh perhatian terhadap pos ini, khususnya dalam hal penertiban administrasi pencatatan agar setiap penerimaan yang bersifat sah dapat dimasukkan secara akuntabel ke dalam APBD.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunanaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan targer kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasisi kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara efektif, akuntabel dan transparan.

Adapun struktur belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

### 3.2.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi untuk tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp 1.166.630.185.699,00 dan untuk tahun 2027 dianggarkan sebesar Rp 1.704.624.919.00,00 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

**1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipi l Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, untuk penyediaan gaji PPPK juga telah dialokasikan dalam perencanaan tahun anggaran 2026. Dampak rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian dalam perencanaan belanja pegawai tahun 2026. Rekrutmen PPPK yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (terutama guru dan tenaga kesehatan) memang meningkatkan nominal belanja pegawai, mengingat PPPK berhak atas gaji dan tunjangan setara ASN. Untuk tahun 2026, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp718.485.177.699,00, sedikit menurun dibandingkan APBD Pokok 2025 yang sebesar Rp725.230.349.481,00. Penurunan ini mencerminkan adanya pengendalian yang ketat: penambahan belanja gaji akibat PPPK baru diimbangi dengan efisiensi pada pos lain, seperti pengurangan lembur yang tidak mendesak, penundaan kenaikan tunjangan nonprioritas, serta adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

Dengan strategi tersebut, proporsi Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah dapat ditekan dari sekitar 43,8 persen pada 2025 menjadi 40,0 persen pada 2026. Penurunan proporsi ini menunjukkan adanya pengendalian belanja pegawai yang ketat meskipun kebutuhan layanan dasar tetap meningkat. Dengan demikian, ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih luas. Pemerintah Kabupaten Maros juga memastikan bahwa Belanja Pegawai digunakan secara akuntabel, termasuk kepatuhan terhadap standar gaji ASN/PPPK sesuai ketentuan, serta penyaluran tunjangan

kinerja berbasis capaian nyata. Secara umum, kebijakan Belanja Pegawai tahun 2026 menekankan disiplin anggaran sumber daya manusia: jumlah pegawai yang dibiayai harus proporsional dengan kebutuhan layanan, dan setiap rupiah belanja pegawai diharapkan berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

### 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2026, belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp 396.745.008.000 dan di tahun 2027 diproyeksikan menurun menjadi Rp 386.745.008.000,00. Anggaran belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas, antara lain operasional pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan penguatan sarana pembelajaran, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, pengadaan obat-obatan esensial, serta kegiatan promotif-preventif penurunan stunting. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa juga menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang kepegawaian, pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Maros juga menyesuaikan alokasi Belanja Barang dan Jasa untuk mendukung implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Skema PPPK Paruh Waktu tidak dicatat pada Belanja Pegawai, melainkan dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, sehingga terdapat kebutuhan tambahan belanja operasional terkait kontrak, insentif, serta sarana pendukung kerja bagi tenaga teknis tertentu yang direkrut melalui mekanisme paruh waktu. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga teknis sesuai prioritas, tanpa menambah beban pada struktur belanja pegawai.

### 3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk Masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2026, Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp47.900.000.000,00, lebih rendah dibandingkan alokasi APBD Pokok Tahun 2025 yang

mencapai Rp49.605.075.437,00 dan di tahun 2027 direncanakan senilai Rp 38.850.000.000,00.

Penurunan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran serta masyarakat, melainkan sebagai bentuk kebijakan pengetatan fiskal agar alokasi belanja lebih diarahkan kepada pelayanan dasar dan infrastruktur publik.

Pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Mekanisme pemberian hibah diawali dengan proses perencanaan dan pengajuan usulan oleh calon penerima, yang kemudian diverifikasi oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prioritas pembangunan daerah.

Setelah melalui proses verifikasi dan penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah, hibah disalurkan kepada penerima yang telah ditetapkan. Penerima hibah wajib menggunakan dana, barang, atau jasa yang diterima sesuai dengan peruntukannya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pemerintah daerah. Seluruh proses ini diawasi melalui mekanisme pengendalian internal dan dapat diaudit oleh aparat pengawas fungsional untuk menjamin tata kelola keuangan daerah yang baik.

Dengan mekanisme tersebut, hibah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah.

### 4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.070.000.000,00 diperuntukkan bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan, khususnya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta bantuan darurat bagi korban bencana alam dan sosial. Fokus kebijakan ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dalam hal hunian yang layak dan perlindungan pascabencana. Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan peningkatan alokasi Belanja Bantuan Sosial menjadi Rp3.500.000.000,00, atau naik sebesar Rp2.430.000.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi Bansos terhadap total belanja daerah meningkat dari 0,06 persen pada Tahun 2025 menjadi 0,30

persen pada Tahun 2026. Peningkatan alokasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, serta memperluas sasaran penerima manfaat.

### 3.2.3.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi asset.

Untuk Tahun 2026, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp436.246.337.301,00, meningkat dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 yang sebesar Rp314.147.663.815,00. Kenaikan sebesar Rp 122.098.673.486,00 atau 38,87 persen ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk memperkuat investasipublik dalam aset infrastruktur. Sedangkan untuk tahun 2027, diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp 421.978.392.429,00.

Alokasi belanja modal disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah, mempertimbangkan kondisi aset yang ada, urgensi pelayanan, serta kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa setiap pengadaan aset melalui belanja modal dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan belanja modal diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kuantitas infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan tujuan strategis daerah

### 3.2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan alokasi BTT menjadi Rp9.000.000.000,00, naik dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 sebesar Rp6.500.000.000,00. Kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 38,46 persen ini sebagai langkah antisipatif agar cadangan dana darurat mencukupi, mengingat frekuensi bencana dan ketidakpastian ekonomi yang mungkin dihadapi. Meskipun sifatnya fleksibel, pencairan BTT tetap diatur ketat, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan status darurat atau bencana oleh Kepala Daerah dan harus segera dipertanggungjawabkan secara rinci.

Dengan kebijakan ini, Belanja Tidak Terduga Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi krisis, melindungi masyarakat dari dampak terburuk bencana maupun gejolak ekonomi, serta mempercepat proses pemulihan sehingga sasaran pembangunan daerah tetap dapat tercapai sesuai perencanaan.

### 3.2.3.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah yang disalurkan kepada pemerintah desa atau pemerintah supra-daerah (provinsi/kabupaten lain), biasanya dalam bentuk bagi hasil pendapatan maupun bantuan keuangan. Sesuai konteks Kabupaten Maros, Belanja Transfer terutama terdiri atas Transfer ke Desa mengingat Maros memiliki banyak desa yang membutuhkan pendanaan dari APBD. Kebijakan Belanja Transfer tahun 2026 disusun untuk memenuhi kewajiban perimbangan keuangan dengan desa sesuai peraturan, serta mendukung program prioritas di level desa agar selaras dengan nasional (program Membangun dari Desa).

Merujuk pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2029, secara umum kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam pengelolaan belanja daerah dilakukan melalui:

a) Pemanfaatan belanja daerah menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
b) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal.
c) Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah setiap tahun yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
d) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada public terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun rincian dari Belanja Transfer yaitu Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Belanja Transfer**

   Belanja Bagi Hasil adalah porsi pendapatan daerah yang dibagikan kepada desa. Kebijakan Belanja Bagi Hasil Tahun 2026 diarahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Desa), di mana pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan sebagian pendapatan tertentu kepada pemerintahan desa. Komponen bagi hasil biasanya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut kabupaten. Pemerintah Kabupaten Maros akan menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa secara adil dan proporsional, antara lain berdasarkan realisasi penerimaan di wilayah desa serta jumlah penduduk.

   Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pendapatan asli desa sehingga desa memiliki kemampuan anggaran yang lebih baik untuk pembangunan dan pelayanan. Dengan adanya bagi hasil pajak dan retribusi, pemerintah desa terdorong aktif membantu Pemerintah Kabupaten dalam optimalisasi penerimaan, misalnya melalui pendataan objek pajak PBB atau retribusi wisata, karena desa juga akan memperoleh manfaat dari bagi hasil tersebut. Selain itu, dana bagi hasil memperkuat konsep Desa Membangun, di mana desa dapat menggunakannya untuk pembangunan lokal, seperti perbaikan jalan desa, fasilitas umum, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.

   Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Maros merencanakan peningkatan signifikan pada Belanja Bagi Hasil ke desa. Alokasi Belanja Bagi Hasil naik

menjadi Rp26.691.090.000,00, dibandingkan APBD Pokok Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp4.000.000.000,00. Kenaikan sebesar Rp 22.691.000.000,00, mencerminkan adanya kebijakan baru atau penyesuaian agar desa memperoleh hak keuangan yang lebih layak. Peningkatan alokasi ini berasal dari penambahan porsi bagi hasil Pajak Daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) serta implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan skema baru dalam pembagian bagi hasil daerah.

**2. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu instrumen penting dalam Belanja Transfer yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal desa. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan, sehingga desa mampu lebih mandiri dalam melaksanakan kewenangannya. Struktur Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros terdiri atas dua komponen utama, yaitu Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada Tahun Anggaran 2026, Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) ditetapkan sebesar Rp78.816.740.000,00. Jumlah ini sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2025. Besaran dana ini ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN, sehingga Pemerintah Kabupaten Maros hanya menerima dan menyalurkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Dana Desa tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa, seperti percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, Pembangunan.

Secara keseluruhan, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp 192.427.995.000,00 meningkar dibandingkan APBD Pokok Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp161.750.963.200,00 dan di tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp 169.584.998.000,00.

**Tabel 3.6**
**Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Maros**
**Tahun 2023 - 2027**

| Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Rencana Capaian Tahun 2025 | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi/Target Tahun 2027 |
| **BELANJA** | **1.479.688.652.614,00** | **1.621.432.789.285,62** | **1.655.120.892.000** | **1.804.304.518.000** | **1.704.624.919.000** |
| **BELANJA OPERASI** | **987.157.434.387,00** | **1.089.701.694.345,62** | **1.168.722.264.985** | **1.166.630.185.699** | **1.098.423.440.571** |
| Belanja Pegawai | 610.068.956.568,00 | 660.556.918.805,00 | 725.230.349.481 | 718.485.177.699 | 668.828.432.571 |
| Belanja Barang dan Jasa | 380.425.409.200,00 | 363.902.605.759,62 | 392.816.840.067 | 396.745.008.000 | 386.745.008.000 |
| Belanja Hibah | 16.063.068.619,00 | 63.971.369.781,00 | 49.605.075.437 | 47.900.000.000 | 38.850.000.000 |

| Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Rencana Capaian Tahun 2025 | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi/Target Tahun 2027 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 1.270.800.000,00 | 1.070.000.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | **341.870.095.627,00** | **374.240.786.513,00** | **314.147.663.815,00** | **436.246.337.301** | **421.978.392.429** |
| Belanja Modal | 341.870.095.627,00 | **374.240.786.513,00** | **314.147.663.815,00** | 436.246.337.301 | 421.978.392.429 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **3.000.000.000,00** | **804.288.500,00** | **6.500.000.000,00** | **9.000.000.000** | **10.000.000.000** |
| Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 | 804.288.500,00 | **6.500.000.000,00** | 9.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| **BELANJA TRANSFER** | **147.661.122.600,00** | **156.686.019.927,00** | **165.750.963.200,00** | **192.427.995.000** | **197.076.820.000** |
| Belanja Bantuan Keuangan | 147.661.122.600,00 | 156.686.019.927,00 | 161.750.963.200,00 | 165.736.905.000 | 169.584.998.000 |
| Belanja Bagi Hasil | | | 4.000.000.000 | 26.691.090.000 | 27.491.822.000 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar **Rp 1.804.304.518.000** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp 1.166.630.185.699**, **Belanja Modal Rp 436.246.337.301**, **Belanja Tidak Terduga Rp 9.000.000.000,00, Belanja Transfer Rp 192.427.995.000.**

Selama kurun waktu tahun 2023 s/d 2027 struktur belanja daerah didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 62,85 persen, Belanja Modal sekitar 23,44 persen, Belanja Transfer sekitar 13,59 persen dan Belanja Tidak Terduga sekitar 0,11 persen. Proporsi belanja pegawai masih mendominasi belanja operasi sebesar 67,45 persen, Belanja Barang dan Jasa sekitar 28,74 persen dan Belanja Hibah sekitar 2,94 persen.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan urusan wajib berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal **(SPM)** di tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 189.195.766.085,00** dari total belanja daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**
**Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2025**

| NO | BIDANG | PROGRAM | PAGU ANGGARAN (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | 129.761.717.142,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| NO | BIDANG | PROGRAM | PAGU ANGGARAN (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 32.186.201.443,00 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Pekerjaan Umum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 13.035.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 100.000.000,00 | |
| 4 | Perumahan Rakyat | Pengembangan Perumahan | 6.651.960.000,00 | |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 615.000.000,00 | Satpol PP dan Linmas |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 5.202.038.500,00 | Damkar dan Penyelamatan |
| | | Program Penanggulangan Bencana | 545.000.000,00 | BPBD |
| 6 | Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 686.250.000,00 | Dinas Sosial |
| | | Program Penanganan Bencana | 102.000.000,00 | |
| | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | 173.000.000,00 | |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | 310.599.000,00 | |
| | **Total** | | **189.195.766.085,00** | |

**Sumber : Bappelitbangda, 2025, diolah**

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mana nomenklatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.8**
**Target Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026**

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 477.533.397.472 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 240.454.881.290 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 |
|---|---|---|
| 3 | RSUD | 114.500.000.000 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 220.501.624.521 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 11.143.534.526 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 9.803.186.100 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7.226.639.679 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 9.667.842.143 |
| 9 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | 4.196.793.783 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 17.558.077.578 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46.787.402.797 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.101.928.586 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 9.033.620.081 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 17.016.908.040 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 15.181.470.018 |
| 16 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11.709.279.537 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 7.322.226.016 |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 8.243.908.999 |
| 19 | DINAS PERIKANAN DAERAH | 11.782.809.081 |
| 20 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 16.677.508.939 |
| 21 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 24.412.730.875 |
| 22 | SEKRETARIAT DAERAH | 53.074.155.274 |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD | 44.936.827.590 |
| 24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8.299.813.891 |
| 25 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 275.198.727.428 |
| 26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18.157.046.873 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9.183.367.306 |
| 28 | INSPEKTORAT KABUPATEN | 25.375.311.319 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 |
|---|---|---|
| 29 | KECAMATAN MAROS BARU | 6.913.088.752 |
| 30 | KECAMATAN BANTIMURUNG | 5.407.927.091 |
| 31 | KECAMATAN CAMBA | 4.845.340.637 |
| 32 | KECAMATAN MALLAWA | 3.744.920.109 |
| 33 | KECAMATAN TANRALILI | 4.478.738.899 |
| 34 | KECAMATAN BONTOA | 4.333.788.139 |
| 35 | KECAMATAN TURIKALE | 13.665.634.159 |
| 36 | KECAMATAN MARUSU | 3.143.277.580 |
| 37 | KECAMATAN LAU | 9.101.347.411 |
| 38 | KECAMATAN CENRANA | 2.888.802.089 |
| 39 | KECAMATAN MONCONGLOE | 2.671.940.212 |
| 40 | KECAMATAN TOMPOBULU | 3.216.802.145 |
| 41 | KECAMATAN SIMBANG | 2.900.133.608 |
| 42 | KECAMATAN MANDAI | 7.252.962.744 |
| 43 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.964.752.386 |
| **TOTAL** | | **1.804.610.475.703** |

Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan strategi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Tabel 3.9**
**Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Tahun 2026**

| No | Tujuan TPB/SDGs | Progaram Pembangunan Daerah | | Pagu Anggaran 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tujuan 1** | | | |
| | Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. | 1 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 293.521.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 92.422.895.500,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | 4 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | 5 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 724.482.000,00 |
| | | 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, | 889.300.000,00 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Progaram Pembangunan Daerah | | Pagu Anggaran 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| | | 7 | PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1.093.816.500,00 |
| | | 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) | 2.303.000.000,00 |
| | | 9 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 5.011.917.000,00 |
| | | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 87.660.000.000,00 |
| | | 11 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 92.485.500,00 |
| | | 12 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 469.328.000,00 |
| | | 13 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2.189.758.500,00 |
| | | 14 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 32.440.000,00 |
| | | 15 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 48.697.194.310,00 |
| | | 16 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 225.069.500,00 |
| 2 | **Tujuan 2** | | | |
| | Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. | 1 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 173.763.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 92.422.895.500,00 |
| | | 4 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 516.435.850,00 |
| 3 | **Tujuan 3** | | | |
| | Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia | 1 | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 92.422.895.500,00 |
| 4 | **Tujuan 4** | | | |
| | Pendidikan Berkualitas : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; | 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 143.576.783.950,00 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Progaram Pembangunan Daerah | | Pagu Anggaran 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Tujuan 5** | | | |
| | Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. | 1 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 409.520.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 162.250.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 39.160.000,00 |
| | | 4 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 278.417.500,00 |
| | | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 143.576.783.950,00 |
| | | 6 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2.189.758.500,00 |
| | | 7 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 53.168.000,00 |
| 6 | **Tujuan 6** | | | |
| | Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. | 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 48.697.194.310,00 |
| | | 2 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 32.440.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 60.810.000,00 |
| | | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 0,00 |
| 7 | **Tujuan 8** | | | |
| | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua | 1 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 40.401.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 41.400.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 516.435.850,00 |
| 8 | **Tujuan 9** | | | |
| | Industri, Inovasi dan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. | 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 6.829.895.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 182.556.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.130.895.800,00 |
| | | 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 53.168.000,00 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Progaram Pembangunan Daerah | | Pagu Anggaran 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Tujuan 10** | | | |
| | Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara | 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 889.300.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 724.482.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 32.440.000,00 |
| | | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 143.576.783.950,00 |
| | | 6 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 92.485.500,00 |
| 10 | **Tujuan 11** | | | |
| | Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan. | 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 6.829.895.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 87.660.000.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.720.947.000,00 |
| | | 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 60.810.000,00 |
| | | 5 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 724.482.000,00 |
| 11 | **Tujuan 12** | | | |
| | Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan | 1 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 60.810.000,00 |
| 12 | **Tujuan 13** | | | |
| | Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. | 1 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.720.947.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 182.556.000,00 |
| | | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 516.435.850,00 |
| 13 | **Tujuan 14** | | | |
| | Ekosistem Lautan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera | 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 8.388.585.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 4.051.447.500,00 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Progaram Pembangunan Daerah | | Pagu Anggaran 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | untuk pembangunan berkelanjutan | | | |
| 14 | **Tujuan 15** | | | |
| | Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaraman hayati | 1 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 60.810.000,00 |
| 15 | **Tujuan 16** | | | |
| | Perdamaian, Keadilan, dan Kelembangaan yang Tangguh : Menguatkan masyarakat yang inkluif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat. | 1 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 162.250.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 278.417.500,00 |
| 16 | **Tujuan 17** | | | |
| | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. | 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 53.168.000,00 |
| | | 2 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 516.435.850,00 |
| | | 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 225.069.500,00 |

**Sumber : Bapperida,2025, diolah**

### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Maros terdiri dari:

**1) Penerimaan Pembiayaan**

**Penerimaan Pembiayaan,** dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros berasal dari Pos penerimaan SILPA Tahun sebelumnya.

Jenis penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2026 seluruhnya bersumber dari pinjaman daerah jangka menengah dengan nilai

Rp100.000.000.000,00. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, antara lain pembangunan Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant/WTP) guna memperluas akses air bersih, serta pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedua proyek tersebut dipilih karena memiliki multiplier effect yang signifikan, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja.

Pinjaman daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dikategorikan sebagai pinjaman jangka menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan rencana pengembalian pinjaman daerah jangka menengah yang direncanakan akan mulai diangsur pokoknya pada tahun anggaran berikut setelah pencairan, dan dilunasi secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun. Skema pengembalian ini disusun secara terukur dan terjadwal, sehingga memberikan kepastian fiskal serta memastikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengganggu alokasi belanja prioritas lainnya. Dengan demikian, struktur pelunasan pinjaman telah dirancang sesuai prinsip kehati-hatian dan selaras dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

**2) Pengeluaran Pembiayaan**

**Pengeluaran Pembiayaan,** dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah dan Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Dalam Tahun Anggaran 2026, kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diarahkan pada dua hal pokok. Pertama, pemenuhan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang mulai jatuh tempo sesuai jadwal pengembalian. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan kreditur serta menjamin aksesibilitas pemerintah daerah terhadap sumber pembiayaan di masa depan. Kedua, pengendalian kebijakan penyertaan modal daerah agar tetap sejalan dengan kapasitas fiskal, kebutuhan investasi, serta kemampuan daerah dalam memberikan manfaat ekonomi yang optimal dari BUMD penerima modal.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026 direncanakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan memperkuat permodalan dan kapasitas usaha daerah. Namun pada Tahun Anggaran 2026, pos penyertaan modal tersebut tidak lagi dianggarkan, digantikan oleh alokasi untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang mulai jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka menengah yang ditarik pada tahun berjalan. Gambaran lebih rinci terkait pembiayaan daerah dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3.10**
**Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros**
**Tahun 2023-2027**

| Uraian | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi/Target Tahun 2027 |
| | | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **7.000.000.000,00** | **108.561.018.807,00** | **0,00** | **100.000.000.000** | |
| SiLPA Tahun Sebelumnya | 7.000.000.000,00 | 108.561.018.807,00 | 0,00 | | 0 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | | | | 100.000.000.000 | 0 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2.000.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000.000,00** | **6.500.000.000,00** | **34.500.000.000,00** |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | - | 5.000.000.000,00 |
| Pembayaran Utang | | | | 1.500.000.000,00 | 29.500.000.000,00 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **5.000.000.000,00** | **108.561.018.807,00** | **-1.000.000.000,00** | **98.500.000.000,00** | **-29.500.000.000,00** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | **0** | | | | |

# BAB IV
# PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah mendasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rencana pembangunan menengah daerah, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, maka Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 diarahkan pada P**ENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN BERKELANJUTAN.** Dimana, focus dan arah kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan aksesbiltas dan kualitas pelayanan dasar pada semua wilayah, menghapus kesenjangan ekonomi antar wilayah, Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal Berdasarkan Keahlian/Keterampilan Yang Dimiliki Dan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Utamanya Bagi Kelompok Disabilitas, Miskin, Dan Perempuan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Jalan Yang Menghubungkan Kawasan/Wilayah Yang Memiliki Potensi Pengembangan Ekonomi. Program/kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetap sinergis atau saling menopang dengan urusan lain yang tidak menjadi prioritas pada tahun 2025.

## 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

### 4.1.1 VISI

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Maros yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: **MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN.** Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu:

**Tabel 4.1**
**Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi**

| VISI | POKOK VISI | PENJELASAN |
|---|---|---|
| **MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN** | **SEJAHTERA** | Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup tinggi, terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak, serta akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial yang inklusif. Kesejahteraan mencakup pemenuhan hak perempuan, anak, pemuda, masyarakat adat, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. |

| VISI | POKOK VISI | PENJELASAN |
|---|---|---|
| | **RELIGIUS** | Kondisi kehidupan masyarakat yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Religiusitas tidak hanya dimaknai secara seremonial, tetapi sebagai kekuatan pembentuk karakter dan ketahanan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, saling menghargai, dan hidup dalam harmoni. |
| | **MAJU** | Kondisi Kabupaten Maros yang mengalami perkembangan yang pesat dan berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta transformasi pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis smart government, serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan pelayanan publik. |
| | **BERKELANJUTAN** | Mencerminkan pembangunan Kabupaten Maros yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara merata, tetapi juga memastikan pemerataan akses pembangunan antar wilayah, penguatan konektivitas infrastruktur, menjamin kelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah, serta peningkatan daya saing daerah yang responsif terhadap dinamika perubahan dan tantangan jangka panjang, sehingga pembangunan dapat terus berlangsung secara konsisten dan bertanggung jawab antar generasi. |

Sumber : Bapprida Kab. Maros

### 4.1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maros tahun 2025–2029, yaitu “Maros Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”, telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi pembangunan daerah merupakan arah strategis yang memuat upaya-upaya utama yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penetapan misi dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang teridentifikasi dalam dokumen teknokratik, memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta selaras dengan arah kebijakan

pembangunan provinsi dan nasional. Misi ini juga berfungsi sebagai landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskanlah 7 (tujuh) Misi, yaitu:

- Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif
- Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi
- Misi 3: Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government
- Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah
- Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan
- Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dengan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Terintegrasi dan Adaptif
- Misi 7: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah

Setiap misi tersebut memiliki substansi masing-masing, untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada penyajian tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**
**Misi beserta penjelasannya**

| MISI | PENJELASAN MISI |
|---|---|
| MISI 1 | Upaya untuk mewujudkan masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan produktif (utamanya pada bidang jasa, Pertanian, Teknologi, Manufaktur, ekonomi kreatif) melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keterampilan kerja, dan perlindungan jaminan sosial yang inklusif serta berkeadilan, Dengan memastikan bahwa setiap warga termasuk perempuan, anak, pemuda, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan terlindungi dalam menjalani kehidupan yang layak. |
| MISI 2 | Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah secara berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong sektor-sektor unggulan daerah, dan memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal. |
| MISI 3 | Upaya yang menitikberatkan pada transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis teknologi informasi dan menghasilkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip smart government yang diarahkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan dan produktivitas daerah secara berkelanjutan. |
| MISI 4 | Upaya pada penciptaan kondisi keamanan yang stabil dan lingkungan kondusif guna mendukung kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Dengan menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan akses aman dan setara terhadap layanan dasar. Keamanan yang terjaga menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. |

| MISI | PENJELASAN MISI |
|---|---|
| MISI 5 | Upaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai agama sebagai pijakan moral, etika, dan spiritual yang mendasar dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Religiusitas diimplementasikan secara substansial sebagai sumber karakter dan ketahanan sosial, guna membangun masyarakat inklusif yang menjunjung toleransi, penghargaan antar sesama, serta hidup rukun dalam harmoni. |
| MISI 6 | Upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur, penguatan konektivitas, dan akses yang merata antar wilayah/kawasan secara berkualitas, terintegrasi, dan adaptif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif. yang dilaksanakan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan berketahanan bencana. |
| MISI 7 | Upaya yang menekankan pada kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah melalui Pendekatan yang adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan jangka panjang sehingga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab lintas generasi |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

### 4.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah hingga panjang, sedangkan sasaran merupakan hasil konkret yang ingin dicapai secara bertahap dalam kurun waktu perencanaan.

Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Penjabaran tujuan dan sasaran dilakukan secara sistematis dan terukur, agar dapat menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan selama kurun waktu Tahun 2025-2029, yaitu:

- Tujuan untuk Misi 1:
  1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif
- Tujuan untuk Misi 2:
  2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan
- Tujuan untuk Misi 3:
  3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi
- Tujuan untuk Misi 4:
  4. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
- Tujuan untuk Misi 5:
  5. Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan

- Tujuan untuk Misi 6:
  6. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur
  7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Tujuan untuk Misi 7:
  8. Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan

Selanjutnya 8 (delapan) tujuan pembangunan tersebut memiliki sasaran pembangunan masing-masing yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- **Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sumebr Daya Manusia yang Merata dan Inklusif**
  Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat
- **Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif, Berkaulitas dan Berkelanjutan**
  Sasaran : Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Lokal Yang Mendorong Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
- **Tujuan 3 : Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi**
  Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel
- **Tujuan 4 : Meningkatnya Kondisi Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif**
  Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat Secara Berkelanjutan
- **Tujuan 5 : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Yang Inklusif Dengan Berlandaskan Nilai Keagamaan**
  Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat ynag Inklusif dan Harmonis Berbasis Nilai Keagamaan
- **Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur**
  Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan, Kualitas dan Akses Layanan Infrastruktur Publik Yang Efisien, Aman dan Berkelanjutan
- **Tujuan 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hiduo**
  Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Terhadap DAmpak Perubahan Iklim dan Bencana
- **Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Daerah di Berbagai Sektor Pembangunan**
  Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Nilai Tambah Produk Serta Jasa Unggulan Daerah

Tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**
**Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan**
**RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan RKPD Tahun 2026**

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| 1 | **Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif** | **Indeks Pembangunan Manusia** | | **74.76** | **Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif** | **Indeks Pembangunan Manusia** | | **74.76** | |
| | 1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | Indeks Kesehatan | point | 83.22 | 1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | Indeks Kesehatan | point | 83.22 | |
| | | Prevalensi stunting | nilai | 17.29 | | Prevalensi stunting | nilai | 17.29 | |
| | | Indeks Pendidikan | point | 65.16 | | Indeks Pendidikan | point | 65.16 | |
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | point | 45.89 | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | point | 45.89 | |
| | | Indeks Pengeluaran | point | 48.79 | | Indeks Pengeluaran | point | 48.79 | |
| | | Tingkat pengangguran terbuka | % | 4.16 | | Tingkat pengangguran terbuka | % | 4.16 | |
| | | Indeks Ketimpangan Gender | point | 65.98 | | Indeks Ketimpangan Gender | point | 65.98 | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| | | | Indeks Pembangunan Pemuda | point | 70.98 | | | Indeks Pembangunan Pemuda | point | 70.98 | |
| | | | Nilai dalam Kabupaten Layak Anak | nilai | 0.23 | | | Nilai dalam Kabupaten Layak Anak | nilai | 0.23 | |
| | | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | point | 55.61 | | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | point | 55.61 | |
| **2** | **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan** | | **Pertumbuhan Ekonomi** | (%) | **4.75** | **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan** | | **Pertumbuhan Ekonomi** | (%) | **4.75** | |
| | 2 | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | (%) | 16.34 | 2 | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | (%) | 16.34 | |
| | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 0.34 | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 0.34 | |
| | | | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | (%) | 4.18 | | | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | (%) | 4.18 | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| | | | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | 15.84 | | | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | 15.84 | |
| | | | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | (%) | 1.47 | | | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | (%) | 1.47 | |
| | | | Tingkat inflasi | % | 52.88 | | | Tingkat inflasi | % | 52.88 | |
| | | | Tingkat kemiskinan | % | 7,82 - 6,92 | | | Tingkat kemiskinan | % | 7,82 - 6,92 | |
| | | | Rasio gini | nilai | 0.34 | | | Rasio gini | nilai | 0.34 | |
| | | | PDRB Per Kapita | juta rupiah/jiwa | 75.43 | | | PDRB Per Kapita | juta rupiah/jiwa | 75.43 | |
| **3** | **Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | nilai | **75.00** | **Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | nilai | **75.00** | |
| | 3 | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | Indeks SPBE | point | 4.20 | 3 | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | Indeks SPBE | point | 4.20 | |
| | | | Indeks pelayanan Publik | point | 2.69 | | | Indeks pelayanan Publik | point | 2.69 | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| | | | Indeks Sistem Merit | point | 305.33 | | | Indeks Sistem Merit | point | 305.33 | |
| | | | Nilai SAKIP | nilai | 68.00 | | | Nilai SAKIP | nilai | 68.00 | |
| | | | Indeks inovasi daerah | point | 53.98 | | | Indeks inovasi daerah | point | 53.98 | |
| **4** | **Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif** | | **Indeks Stabilitas Keamanan Daerah** | (%) | **84.40** | **Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif** | | **Indeks Stabilitas Keamanan Daerah** | (%) | **84.40** | |
| | 4 | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | % | 99.99 | 4 | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | % | 99.99 | |
| | | | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | % | 18.26 | | | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | % | 18.26 | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| | | | Persentase Tindak Kriminal Tertangani | % | 0.01 | | | Persentase Tindak Kriminal Tertangani | % | 0.01 | |
| 5 | **Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan** | | **Indeks Ketahanan Masyarakat** | point | **0.70** | **Meningkatnya ketahanan masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan** | | **Indeks Ketahanan Masyarakat** | point | **0.70** | |
| | 5 | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | Indeks kerukunan umat beragama | **point** | 96.59 | 5 | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | Indeks kerukunan umat beragama | **point** | 96.59 | |
| | | | Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kegamaan | % | 90.00 | | | Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kegamaan | % | 90.00 | |
| | | | Indeks Pembangunan Inklusi | **point** | 58.75 | | | Indeks Pembangunan Inklusi | **point** | 58.75 | |
| | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) | point | 0.23 | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) | point | 0.23 | |
| 6 | **Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur** | | **Indeks Layanan Infrastruktur** | **point** | **3.96** | **Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur** | | **Indeks Layanan Infrastruktur** | **point** | **3.96** | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| | 6 | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | Rasio Kemantapan Jalan | % | 78.86 | 6 | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | Rasio Kemantapan Jalan | % | 78.86 | |
| | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | % | 89.06 | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | % | 89.06 | |
| | | | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | % | 52.88 | | | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | % | 52.88 | |
| | | | Indeks Transportasi darat | point | 59.70 | | | Indeks Transportasi darat | point | 59.70 | |
| 7 | **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | point | **75.47** | **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | point | **75.47** | |
| | 7 | Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana | Indeks Kualitas Air | point | 75.32 | 7 | Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana | Indeks Kualitas Air | point | 75.32 | |
| | | | Indeks Kualitas Udara | point | 78.92 | | | Indeks Kualitas Udara | point | 78.92 | |

| NO | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | RKPD TAHUN 2026 | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN / SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET | |
| | | | Indeks Tutupan Lahan | point | 69.37 | | | Indeks Tutupan Lahan | point | 69.37 | |
| | | | Persentase Intensitas Penurunan Gas Rumah Kaca | (%) | 13.75 | | | Persentase Intensitas Penurunan Gas Rumah Kaca | (%) | 13.75 | |
| | | | Indeks Risiko Bencana | % | 109.76 | | | Indeks Risiko Bencana | % | 109.76 | |
| 8 | **Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan** | | **Indeks Daya Saing Daerah** | point | **3.74** | **Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan** | | **Indeks Daya Saing Daerah** | point | **3.74** | |
| | 8 | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | % | 84.40 | 8 | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | % | 84.40 | |
| | | | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | % | 27.91 | | | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | % | 27.91 | |
| | | | Persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah | % | 0.5 | | | Persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah | % | 0.5 | |

## 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 merupakan target dari pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026 serta prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Maros berkorelasi dengan:

- Sektor/bidang/urusan yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- Hasil evaluasi pencapaian target pembangunan Kabupaten Maros pada tahun sebelumnya (tahun 2022, 2023 dan 2024)
- Hasil pokok – pokok pikiran DPRD kabupaten Maros yang didapatkan melalui: Reses, Rapat Dengar Pendapat, dan kunjungan kerja ke seluruh wilayah Kabupaten Maros serta studi perbandingan ke beberapa Daerah lain.
- Hasil Musyawarah perencanaan pembangunan (Tingkat Desa/Kelurahan sampai Kabupaten) dan Hasil pelaksanaan Forum Gabungan OPD.
- Pencapaian kebijakan yang terkait dengan issu – issu strategis pembangunan misalnya: SDG's, Pengarusutamaan Gender, Kemiskinan, Disabilitas, Reformasi Birokrasi, Implementasi Standar pelayanan Minimal, dan lain sebagainya yang diproyeksikan akan menjadi tantangan pembangunan pada tahun 2026.

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2026

#### 4.2.1.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKPD Tahun 2026

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Untuk tahun 2026, tema RKP yaitu **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonom hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangakan agromariitm industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehata, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan

Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenila dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelendupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### 4.2.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2026

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2026, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2026, antara lain:

**Tabel. 4.4**
**Prioritas Nasional dan Sasaran Utama Prioritas Nasional**
**Tahun 2026**

| NO | PRIORITAS NASIONAL | SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM | Indeks Demokrasi Indonesia | 82,12 - 85,66 |
| | | | Indeks HAM | 2,8 |
| 2 | Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonom hijau dan ekonomi biru | Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan | Asia Power Index (Military Capability) | 17 |
| | | | Asia Power Index (Diplomatic Influence) | 65,8 |
| | | | roporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 68 |
| | | | Global Cybersecurity Index | 95 |
| | | | Indeks Keamanan Laut Nasional | 61 |
| | | Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) | Indeks Ketahanan Pangan | 75,4 |
| | | | Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | 3,33 |
| | | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) | 6,55 |
| | | Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan | Indeks Ketahanan Energi | 6,82 |
| | | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) b) | 20 |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) | | |
| | | Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) | Indeks Ketahanan Air Nasional | 3,5 |
| | | | Kapasitas Tampungan Air (m 3 /kapita)b) | 60,16 |
| | | | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | 42,24 |
| | | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | 17 |
| | | Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan | Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat) | 2 |
| | | | Indonesia Blue Economy Index (IBEI) | 41,26 |
| | | | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) | 41 |
| | | Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau | Indeks Ekonomi Hijau | 71,01 |
| | | | Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) | 60 |
| | | | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) b) | 28 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) b) | 19,07 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (% | 27,35 |
| | | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,47 |
| | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 76,67 |
| 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan | Stok Infrastruktur terhadap PDB | 47 |
| | | Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB | Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) | 188,04 |
| | | | Aset Perbankan/PDB (%) | 64,51 |
| | | | Aset Dana Pensiun/PDB (%) | 7,63 |
| | | | Aset Asuransi/PDB (%)a | 9,3 |
| | | | Kapitalisasi Pasar Modal/PDB | 59,9 |
| | | | Total Kredit/PDB | 38,46 |
| | | | Inklusi Keuangan (%) | 91,5 |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 37,95 |
| | | | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) | 1,12 |
| | | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) | 3,15 |
| | | | Rasio Kewirausahaan (%) | 3,18 |
| | | Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata | Rasio PDB Pariwisata (%) | 4,60 - 4,70 |
| | | | Devisa Pariwisata (miliar USD) | 22,00 - 24,70 |
| | | Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) | 7,40 - 8,00 |
| 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun) | 9,45 |
| | | | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,36 |
| | | | Rata-rata Nilai PISA<br>(a) Membaca<br>(b) Matematika<br>(c) Sains | 396<br>404<br>416 |
| | | | Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca Numerasi | 65,89<br>58,86 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) c) | 34,92 |
| | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 11,49 |
| | | | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 68,5 |
| | | Terwujudnya Kesehatan untuk Semua | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,68 |
| | | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) | 2,1 |
| | | | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) c) | 109 |
| | | | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada | 17,5 |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Balita (%)c) | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)c) | 252 |
| | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | 98,7 |
| | | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 73,83 |
| | | | Indeks Perlindungan Anak a) | 72,33 |
| | | | Indeks Pembangunan Pemuda b) | 67,24 |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender | 0,421 |
| | | | ndeks Pembangunan Gender | 92,11 - 92,21 |
| | | | Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) | 94,5 |
| | | | Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (% | 69,5 |
| | | Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja | Peringkat Indeks Inovasi Global | 52 |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44 - 4,96 |
| | | | Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) c) | 0,31 |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) c) | 56,40 - 59,31 |
| | | Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat | Peringkat pada Asian Games | 9 s.d 11 |
| | | | Peringkat pada Asian Para Games | 5 s.d 7 |
| | | | Peringkat pada ASEAN Para Games | 1 s.d 2 |
| | | | Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga (%) | 10,80 - 11,94 |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan | Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 21,2 |
| | | Terwujudnya Peningkatan Integrasi | Biaya Logistik (% PDB) | 13,3 |
| | | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) | 29,44 |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | Ekonomi Domestik dan Global | Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) | 22,7 |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untukPertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan PemberantasanKemiskinan | Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5 - 7,5 |
| | | | Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)c) | 0 - 0,50 |
| | | | Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%) | 18,2 |
| | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) b) | 34,99 |
| | | | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) | 10,4 |
| | | Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | 68,66 |
| | | Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan | Persentase Desa Mandiri (%) | 23,91 |
| | | Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%) | 57,7 |
| | | | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (% | 44,58 |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, danBirokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional | Indeks Pembangunan Hukum | 0,7 |
| | | | Indeks Persepsi Korupsi | 40 |
| | | | Indeks Integritas Partai Politik | 65,00 - 66,99 |
| | | Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Nasional | 72,80 |
| | | | Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | 94 |
| | | Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba | Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika | 1,70 |
| | | Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan | Return on Asset (RoA) BUMN | 3,26 |
| | | Tercapainya Peningkatan | Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB | 12,22-13,35 |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan | Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) | 10,45-11,40 |
| | | Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | Tingkat Inflasi (%) | 2,50 ± 1,00 |
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 66,15 |
| | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 58,99 |
| | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 77,14 |
| | | Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) | 0,136 |

**Sumber : RKP Tahun 2026**

#### 4.2.1.3 Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Wilayah pada RKPD Tshun 2026

Tujuan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 konsisten dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sesuai dengan arah RPJMN Tahun 2025-2029 untuk penguatan fondasi transformasi, maka fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 adalah pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

RKP 2026 memetakan arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan terhadap sumber daya pembangunan, intervensi pembangunan diprioritaskan pada kawasan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat lokal hingga

nasional, prioritas intervensi pembangunan adalah peningkatan pengelolaan urbanisasi dan pusat pertumbuhan sekaligus mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk memastikan pendekatan kewilayahan yang diimplementasikan dapat berkelanjutan, maka dilakukan upaya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.Dalam RKP Tahun 2026 telah ditetapkan pula sejumlah intervensi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional di Kabupaten Maros yang dirumuskan berdasarkan prioritas nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**
**Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Maros berdasarkan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026**

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | **LOKASI PRIORITAS** | ***HIGHLIGHT* INTERVENSI** | **LOKASI PRIORITAS** | **DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Sulawesi Selatan | Direktif Presiden: | | |
| | | **Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output:** | Seluruh Satuan Pendidikan Jenjang PAUD SD dan SMP | |
| | | • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; | | |
| | | • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; | | |
| | | • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); | | |
| | | • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; | | |
| | | • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. | | |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Sulawesi Selatan | **Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD dan SMP) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.** | | |
| | Sulawesi Selatan | **Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan** | Seluruh Satuan Pendidikan Jenjang PAUD SD dan SMP | |
| | Sulawesi Selatan | **Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:** | | |
| | | • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; | | |
| | | • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; | sementara proses Verifikasi dan Validasi data calon penerima | |
| | | • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; | Daftar SMP Penerima Peralatan Digitalisasi Pembelajaran<br>1. UPTD SMPN 17 Marusu<br>2. UPTD SMPN 1 TURIKALE<br>3. SMP MUHAMMADIYAH MAROS<br>4. SMP DDI MAROS<br>5. SMP QURRATU AYYUN | |
| | | • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. | | |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Sulawesi Selatan | Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: | | |
| | | • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; | | |
| | | • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. | | |
| | Sulawesi Selatan | **Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output;** | | |
| | | • Pelatihan pertanian bagi Non Aparatur; | | |
| | | • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; | | |
| | | • . Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; | | |
| | | • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); | | |
| | | • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; | | |
| | | • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; | | |
| | | • Kartu Prakerja; | | |
| | | • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; | | |
| | | • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; | | |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; | | |
| | | • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; | Maros Baru dan Bontoa | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayaan Skala Kecil |
| | | • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; | Tompobulu, Moncongloe, Tanralili, Cenrana, Camba, Mallawa, Simbang, Bantimurung | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat |
| | | • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; | | |
| | Sulawesi Selatan | **Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output;** | | |
| | | • Pelatihan pertanian bagi Non Aparatur; | | |
| | | • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; | | |
| | | • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; | | |
| | | • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); | | |
| | | • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; | | |
| | | • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan | | |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; | | |
| | | • Kartu Prakerja; | | |
| | | • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; | | |
| | | • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; | | |
| | | • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; | | |
| | | • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; | Maros Baru dan Bontoa | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayaan Skala Kecil |
| | | • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; | Tompobulu, Moncongloe, Tanralili, Cenrana, Camba, Mallawa, Simbang, Bantimurung | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat |
| | | • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; | | |
| | | • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; | | |
| | | • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; | | |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; | | |
| | | • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; | | |
| | | • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya | | |
| | Kawasan Wilayah Metorpolitan Makassar dan Sekitarnya<br>A1 : Kota Makassar<br>A2 : Kabupaten Maros<br>A3 : Kabupaten Gowa<br>A4 : Kabupaten Takalar<br>A5 : Kota Pare-pare<br>A6 : Kabupaten Barru | **Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, dengan output:** | **Kabupaten Maros** | |
| | | • Bantuan PSU bidang perumahan; | | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan |
| | | • Pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan; | | |
| | | • Pemugaran Permukiman Kumuh; | | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| | | • Peremajaan Permukiman Kumuh; | | |
| | | • Peningkatan dan Perluasan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng; | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |
| | | • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| | | • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | Air Limbah Domestik (SPALD) |
| | | • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasisi kekayaan intelektual | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif |
| | | • penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare (KA Makassar–Pare Pare); | | - |
| | | • Jalan Tol Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar; | | - |
| | | • Penanganan kinerja lalu lintas perkotaan (Mamminasata Bypass); | | - |
| | | • kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan (dukungan/pendampingan KPBU); | | - |
| | | **Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, dengan output:** | | |
| | | • Pembangunan duplikasi Jembatan S.Maros A | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
| | | **Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), dengan output:** | | |

| KODE | RKP 2026 | | RKPD 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | *HIGHLIGHT* INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional (salah satunya Festival Geopark Maros Pangkep) | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan<br>• Cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan<br>• Desa pemajuan kebudayaan<br>• Data dan informasi warisan budaya<br>• Koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola,<br>• Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst, | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; Penyusunan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya |

### 4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2026 yaitu **"Peningkatan Kualitas SDM Yang Berkahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inkklusif".** Terdapat tujuh Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;

6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Adapun target indicator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2026yaitu:

**Tabel. 4.6**
**Target Indikator Makro Ekonomi**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD | RKP |
| 1 | Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi | **Tujuan** | **Meningkatkan kualitas Modal Manusia** | **Indeks Modal Manusia** | **Angka** | **0,54** | **0,54** | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74,06 | 74,06 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | 1. Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,59 - 9,60 | 9,59 - 9,60 | |
| | | | | 2. Harapan Lama Sekolaj | Tahun | 13,87 - 13,88 | 13,87 - 13,88 | |
| | | | | 3. Persentasev Siswa yang Terserap di Perguruan Tinggi | Persen | 25,7 | 25,7 | |
| 2 | Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan | **Tujuan** | **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif** | **1. Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **5,9 – 6,5** | **5,9 – 6,5** | |
| | | | | **2. Rasio Gini** | **Angka** | **0,346 – 0,352** | **0,346 – 0,352** | |
| | | | | **3. Indeks Ekonomi Biru** | **Skor** | **84,06** | **84,06** | |
| | | Sasaran | Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan | 1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | Persen | 46,67 - 47,13 | 46,67 - 47,13 | |
| | | | | 2. Rasio Volumne Usaha Koperasi terhadap PDRB | Persen | | | |
| | | | | 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi | Persen | 6,63 | 6,63 | |
| | | | | 4. Indeks Ketahanan Pangan | Persen | 86,01 | 86,01 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Integrasi Ekonomi | Persentase Ekspor Barang | Persen | 10,9 | 10,9 | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD | RKP |
| | | | Regional dan Global | dan Jasa Terhadap PDRB | | | | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | 1. Tingkat Inflasi | Persen | 3,05 - 3,72 | 3,05 - 3,72 | |
| | | | | 2. Inklusi Keuangan | Persen | 85,03 | 85,03 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Pembangunan Perdesaan | Persentase Desa Mandiri | Persen | 34,05 | 34,05 | |
| | | Sasaran | Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,00 – 4,18 | 4,00 – 4,18 | |
| | | | | 2. Tingkat Kemiskinan | Persen | 6,50 - 7,00 | 6,50 - 7,00 | |
| 3 | Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital | **Tujuan** | **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Poin** | **81,86** | **81,86** | |
| | | Sasaran | Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | Angka | 70,03 | 70,03 | |
| | | Sasaran | Terwujudnya Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif | 1. Indeks SPBE | Poin | 4,05 | 4,05 | |
| | | | | 2. Indeks Inovasi Daerah | Angka | 61,5 | 61,5 | |
| | | | | 3. Indeks Pelayanan Publik | Poin | 4,44 | 4,44 | |
| 4 | Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal | **Tujuan** | **Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif** | **Indeks Ketahanan Nasional** | Angka | 3,09 | 3,09 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Demokrasi | Indeks Demokrasi Provinsi | Angka | 3,09 | 3,09 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Pemajuan Kebudayaan | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 79,04 | 79,04 | |
| | | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Skor | 55,26 | 55,26 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Generasi Muda dan Kesetaraan Gender | Indeks Pembangunan Anak | Angka | 60,74 | 60,74 | |
| | | | | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 56,67 | 56,67 | |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,366 | 0,366 | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD | RKP |
| 5 | Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | **Tujuan** | **Meningkatnya pembangunan infrastruktur yg merata dan berkelanjutan** | **Indeks Williamson** | **Angka** | **0,54** | **0,54** | |
| | | | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Angka** | **77,81** | **77,81** | |
| | | | | **Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca** | **Persen** | **33,46** | **33,46** | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Ketangguhan Adaptasi dan MitigasBencana dan Perubahan Iklim | Indeks Resiko Bencana | Poin | 134,20 - 133,12 | 134,20 - 133,12 | |
| 6 | Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | **Tujuan** | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif** | **Pertumbuhan ekoomi** | **Persen** | **5,9 – 6,5** | **5,9 – 6,5** | |
| | | | | **Rasio Gini** | **Angka** | **0,346** | **0,346** | |
| | | | | **Indeks Ekonomi Biru** | **Skor** | **84,06** | **84,06** | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan | Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | Persen | 46,67 - 47,13 | 46,67 - 47,13 | |
| | | | | Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (% | Persen | | | |
| | | | | Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi pangan | Persen | 6,63 | 6,63 | |
| | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Persen | 86,01 | 86,01 | |
| 7 | Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan | **Tujuan** | **Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan** | **Indeks Williamson** | **Angka** | **0,54** | **0,54** | |
| | | | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Angka** | **77,81** | **77,81** | |
| | | | | **Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca** | **Persen** | **33,46** | **33,46** | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | Indeks Layanan Infrastruktur | Angka | 88,83 | 88,83 | |
| 8 | Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing | **Tujuan** | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif** | **Pertumbuhan ekoomi** | **Persen** | **5,9 – 6,5** | **5,9 – 6,5** | |
| | | | | **Rasio Gini** | **Angka** | **0,346** | **0,346** | |
| | | | | **Indeks Ekonomi Biru** | **Skor** | **84,06** | **84,06** | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD | RKP |
| | | Sasaran | Meningkatnya Integrasi Ekonomi Regional dan Global | Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB | Persen | 10,9 | 10,9 | |
| | | Sasaran | Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | Tingkat Inflasi | Persen | 3,05 - 3,72 | 3,05 - 3,72 | |
| | | | | Inklusi Keuangan | Persen | 85,03 | 85,03 | |

**Sumber : RKPD Sulsel Tahun 2026**

### 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2026 mengambil tema: **Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan;
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan;
3. Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan;
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan;
6. Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah;
7. Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan;
8. Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tahun 2026, maka pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 difokuskan pada sasaran sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD 2025-2029 |
| 1 | Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, | Tujuan | Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif | 1 | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | Indeks | 74.76 | 74.76 |
| | | Sasaran | | 1 | Indeks Kesehatan | Indeks | 83.22 | 83.22 |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD 2025-2029 |
| | serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan | | Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | 2 | Prevalensi stunting | Persentase | 17.29 | 17.29 |
| | | | | 3 | Indeks Pendidikan | Indeks | 65.16 | 65.16 |
| | | | | 4 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 45.89 | 45.89 |
| | | | | 5 | Indeks Pengeluaran | Indeks | 48.79 | 48.79 |
| | | | | 6 | Tingkat pengangguran terbuka | Persentase | 4.16 | 4.16 |
| | | | | 7 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 65.98 | 65.98 |
| | | | | 8 | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 70.98 | 70.98 |
| | | | | 9 | Indeks Kabupaten Layak Anak | Indeks | 0.23 | 0.23 |
| | | | | 10 | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | Indeks | 55.61 | 55.61 |
| 2 | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan | 2 | PERTUMBUHAN EKONOMI | Persentase | 4.75 | 4.75 |
| | | Sasaran | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. | 11 | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persentase | 16.34 | 16.34 |
| | | | | 12 | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Persentase | 0.34 | 0.34 |
| | | | | 13 | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persentase | 4.18 | 4.18 |
| | | | | 14 | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah | Persentase | 15.84 | 15.84 |
| | | | | 15 | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | Persentase | 1.47 | 1.47 |
| | | | | 16 | Laju inflasi daerah | Persentase | 52.88 | 52.88 |
| | | | | 17 | Persentase Masyarakat miskin | Persentase | 7,82 - 6,92 | 7,82 - 6,92 |
| | | | | 18 | Rasio gini | Nilsi | 0.34 | 0.34 |
| | | | | 19 | Pendapatan Per Kapita | Juta Rupiaj/jiwa | 75.43 | 75.43 |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD 2025-2029 |
| 3 | Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah | Tujuan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi | 3 | INDEKS REFORMASI BIROKRASI | Indeks | 75.00 | 75.00 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | 20 | Indeks SPBE | Indeks | 4.20 | 4.20 |
| | | | | 21 | Indeks Sistem Merit | Indeks | 305,33 | 305,33 |
| | | | | 22 | Indeks inovasi | Indeks | 53,98 | 53,98 |
| | | | | 23 | Indeks pelayanan Publik | Indeks | 2,69 | 2,69 |
| | | | | 24 | Nilai SAKIP | Nilsi | 68 | 68 |
| 4 | Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif | 4 | INDEKS STABILITAS KEAMANAN DAERAH | Indeks | 84.40 | 84.40 |
| | | Sasaran | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | 26 | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | Persentase | 99.99 | 99.99 |
| | | | | 27 | Persentase Penyelesaian Kasus Kriminal | Persentase | 0,02 | 0,02 |
| | | | | 28 | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | Persentase | 28,36 | 28,36 |
| 5 | Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan | Tujuan | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | 5 | INDEKS KETAHANAN MASYARAKAT | Indeks | 0.70 | 0.70 |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | 29 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 96.59 | 96.59 |
| | | | | 30 | Indeks Pembangunan Inklusif | Indeks | 58.75 | 58.75 |
| | | | | 31 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 0 | 0 |
| | | | | 32 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-keagamaan | Persentase | 85 | 85 |
| 6 | Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah | Tujuan | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur | 6 | INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR | Indeks | 3.96 | 3.96 |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | 33 | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. | Persentase | 78.86 | 78.86 |
| | | | | 34 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | Persentase | 89.06 | 89.06 |
| | | | | 35 | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | Persentase | 52.88 | 52.88 |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RKPD Tahun 2026 | RPJMD 2025-2029 |
| | | | | 36 | Indeks Transportasi darat | Indeks | 59,7 | 59,7 |
| 7 | Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 7 | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks | 75,47 | 75,47 |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. | 37 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 75.32 | 75.32 |
| | | | | 38 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 78.92 | 78.92 |
| | | | | 39 | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 69.37 | 69.37 |
| | | | | 40 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 109,76 | 109,76 |
| | | | | 41 | Emisi GRK | Indeks | 13,75 | 13,75 |
| 8 | Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal | Tujuan | Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan | 8 | INDEKS DAYA SAING DAERAH | Indeks | 3,74 | 3,74 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. | 42 | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | Persentase | 84,4 | 84,4 |
| | | | | 43 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | Persentase | 27,91 | 27,91 |
| | | | | 44 | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | Persentase | 0,5 | 0,5 |

**Sumber : Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029**

Prioritas pembangunan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 sebagaimana tabel sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan PRJMD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**
**Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah**
**Kabupaten Maros Tahun 2026**

| No. | Misi RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif | Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA |
| | | | Sasaran | Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | Indeks Kesehatan |
| | | | | | Prevalensi stunting |
| | | | | | Indeks Pendidikan |
| | | | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| | | | | | Indeks Pengeluaran |
| | | | | | Tingkat pengangguran terbuka |
| | | | | | Indeks Ketimpangan Gender |
| | | | | | Indeks Pembangunan Pemuda |

| No. | Misi RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Indeks Kabupaten Layak Anak |
| | | | | | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat |
| 2 | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan | PERTUMBUHAN EKONOMI |
| | | | Sasaran | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah |
| | | | | | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah |
| | | | | | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah |
| | | | | | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah |
| | | | | | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah |
| | | | | | Laju inflasi daerah |
| | | | | | Persentase Masyarakat miskin |
| | | | | | Rasio gini |
| | | | | | Pendapatan Per Kapita |
| 3 | Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government | Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah | Tujuan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi | INDEKS REFORMASI BIROKRASI |
| | | | Sasaran | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | Indeks SPBE |
| | | | | | Indeks Sistem Merit |
| | | | | | Indeks inovasi |
| | | | | | Indeks pelayanan Publik |
| | | | | | Nilai SAKIP |
| 4 | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah | Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif | INDEKS STABILITAS KEAMANAN DAERAH |
| | | | Sasaran | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk |
| | | | | | Persentase Penyelesaian Kasus Kriminal |
| | | | | | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun |
| 5 | Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan | Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan | Tujuan | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | INDEKS KETAHANAN MASYARAKAT |

| No. | Misi RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sasaran | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| | | | | | Indeks Pembangunan Inklusif |
| | | | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| | | | | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-keagamaan |
| 6 | Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dengan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Terintegrasi dan Adaptif | Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah | Tujuan | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur | INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR |
| | | | Sasaran | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. |
| | | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak |
| | | | | | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih |
| | | | | | Indeks Transportasi darat |
| | | Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Sasaran | Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. | Indeks Kualitas Air |
| | | | | | Indeks Kualitas Udara |
| | | | | | Indeks Tutupan Lahan |
| | | | | | Indeks Resiko Bencana |
| | | | | | Emisi GRK |
| 7 | Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah | Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal | Tujuan | Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan | INDEKS DAYA SAING DAERAH |
| | | | Sasaran | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah |
| | | | | | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital |
| | | | | | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB |

**Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**
**Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026**

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | |
| | | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | |
| | | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |
| | | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | |
| | | 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | |
| | | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | |
| | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN |
| | | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SELURUH KECAMAYAN |
| | | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | |
| | | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | |
| 3 | Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | |
| | | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |
| | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | |
| | | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |
| | | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | |
| | | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| 4 | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | |
| | | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | |
| | | 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | |
| | | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | |
| | | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | |
| | | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | |
| | | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | |
| | | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | |
| 5 | Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | |
| | | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | |
| | | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | |
| | | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | |
| | | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | |
| | | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | |
| | | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | |
| | | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | |
| | | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | |
| | | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | |
| | | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| | | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | |
| | | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | |
| | | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | |
| | | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | |
| | | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | |
| | | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | |
| | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | |
| | | 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | |
| 6 | Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SELURUH OPD |
| | | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DISDUKCAPIL |
| | | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | |
| | | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |
| | | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | |
| | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA | |
| | | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | |
| | | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | |
| | | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | |
| | | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DISPERSIP |
| | | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | |
| | | 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | |
| | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD |
| | | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | |
| | | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| | | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | KECAMATAN |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 7 | Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |
| | | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | |
| | | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |
| | | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | |
| | | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
| | | 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | |
| | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | |
| 8 | Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL |
| | | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | |
| | | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | |
| | | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | |
| | | 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | |
| | | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| | | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| | | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | |

### 4.2.4 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**
**Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD Untuk Tahun 2026**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target RKPD Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif | 1 | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | Indeks | 74.76 |
| | | Sasaran | Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | 1 | Indeks Kesehatan | Indeks | 83.22 |
| | | | | 2 | Prevalensi stunting | Persentase | 17.29 |
| | | | | 3 | Indeks Pendidikan | Indeks | 65.16 |
| | | | | 4 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 45.89 |
| | | | | 5 | Indeks Pengeluaran | Indeks | 48.79 |
| | | | | 6 | Tingkat pengangguran terbuka | Persentase | 4.16 |
| | | | | 7 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 65.98 |
| | | | | 8 | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 70.98 |
| | | | | 9 | Indeks Kabupaten Layak Anak | Indeks | 0.23 |
| | | | | 10 | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | Indeks | 55.61 |
| 2 | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan | 2 | PERTUMBUHAN EKONOMI | Persentase | 4.75 |
| | | Sasaran | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. | 11 | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persentase | 16.34 |
| | | | | 12 | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah | Persentase | 0.34 |
| | | | | 13 | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persentase | 4.18 |
| | | | | 14 | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan | Persentase | 15.84 |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target RKPD Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | terhadap PDRB daerah | | |
| | | | | 15 | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | Persentase | 1.47 |
| | | | | 16 | Laju inflasi daerah | Persentase | 52.88 |
| | | | | 17 | Persentase Masyarakat miskin | Persentase | 7,82 - 6,92 |
| | | | | 18 | Rasio gini | Nilsi | 0.34 |
| | | | | 19 | Pendapatan Per Kapita | Juta Rupiaj/jiwa | 75.43 |
| 3 | Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah | Tujuan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi | 3 | INDEKS REFORMASI BIROKRASI | Indeks | 75.00 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | 20 | Indeks SPBE | Indeks | 4.20 |
| | | | | 21 | Indeks Sistem Merit | Indeks | 305,33 |
| | | | | 22 | Indeks inovasi | Indeks | 53,98 |
| | | | | 23 | Indeks pelayanan Publik | Indeks | 2,69 |
| | | | | 24 | Nilai SAKIP | Nilsi | 68 |
| 4 | Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif | 4 | INDEKS STABILITAS KEAMANAN DAERAH | Indeks | 84.40 |
| | | Sasaran | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | 26 | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | Persentase | 99.99 |
| | | | | 27 | Persentase Penyelesaian Kasus Kriminal | Persentase | 0,02 |
| | | | | 28 | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | Persentase | 28,36 |
| 5 | Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan | Tujuan | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | 5 | INDEKS KETAHANAN MASYARAKAT | Indeks | 0.70 |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | 29 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 96.59 |
| | | | | 30 | Indeks Pembangunan Inklusif | Indeks | 58.75 |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | | Satuan | Target RKPD Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 0 |
| | | | | 32 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-keagamaan | Persentase | 85 |
| 6 | Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah | Tujuan | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur | 6 | INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR | Indeks | 3.96 |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | 33 | Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. | Persentase | 78.86 |
| | | | | 34 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | Persentase | 89.06 |
| | | | | 35 | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | Persentase | 52.88 |
| | | | | 36 | Indeks Transportasi darat | Indeks | 59,7 |
| 7 | Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan | Tujuan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 7 | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks | 75,47 |
| | | Sasaran | Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. | 37 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 75.32 |
| | | | | 38 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 78.92 |
| | | | | 39 | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 69.37 |
| | | | | 40 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 109,76 |
| | | | | 41 | Emisi GRK | Indeks | 13,75 |
| 8 | Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal | Tujuan | Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan | 8 | INDEKS DAYA SAING DAERAH | Indeks | 3,74 |
| | | Sasaran | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. | 42 | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | Persentase | 84,4 |
| | | | | 43 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | Persentase | 27,91 |
| | | | | 44 | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | Persentase | 0,5 |

**Sumber : Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029**

### 4.2.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program - program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan dan pengendalian.

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut gambaran strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2026.

**Tabel 4.11**
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**
**Kabupaten Maros Tahun 2026**

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026 | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan** | Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | Memperkuat akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif | Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat secara inklusif |
| | | | | Perluasan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan serta penurunan prevalensi stunting di seluruh wilayah. |
| | | | | Penguatan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh, termasuk perlindungan anak, pemuda, dan kelompok rentan. |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026 | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Peningkatan kesempatan kerja, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. |
| | | | | Pengarusutamaan kesetaraan gender dalam seluruh program pembangunan serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan publik. |
| 2 | **Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan** | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. | Meningkatkan kinerja ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memperkuat nilai tambah dan produktivitas usaha unggulan serta kapasitas masyarakat | Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha lokal melalui pengembangan keterampilan dan kualitas tenaga kerja. |
| | | | | Penguatan nilai tambah produk dan jasa unggulan daerah berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi. |
| | | | | Peningkatan akses pembiayaan, permodalan, dan jaringan pemasaran bagi pelaku ekonomi lokal. |
| | | | | Pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. |
| | | | | Penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. |
| 3 | **Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah** | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | Memperkuat kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan | Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan profesional. |
| | | | | Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel. |
| | | | | Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026 | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (smart government). |
| | | | | Pengarusutamaan integritas, budaya kerja, dan keterbukaan informasi publik untuk memperluas partisipasi masyarakat. |
| 4 | **Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan** | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | Mendorong sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman secara berkelanjutan | Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. |
| | | | | Penguatan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan. |
| | | | | Pengembangan sistem deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. |
| | | | | Pemanfaatan teknologi informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. |
| | | | | Pengarusutamaan nilai-nilai toleransi, harmoni sosial, dan kesadaran hukum dalam membangun ketenteraman masyarakat. |
| 5 | **Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan** | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan nilai keagamaan untuk menciptakan keharmonisan dan ketahanan sosial yang merata | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat ketahanan sosial |
| | | | | Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial dalam membina keharmonisan dan inklusivitas masyarakat. |
| | | | | Pengarusutamaan nilai toleransi, moderasi beragama, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026 | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keagamaan untuk memperkokoh solidaritas sosial. |
| | | | | Peningkatan literasi keagamaan dan multikultural guna mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif. |
| 6 | **Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah** | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | Mendorong pengembangan infrastruktur publik dengan standar efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan untuk mendukung pelayanan masyarakat secara optimal | Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik sesuai standar efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. |
| | | | | Penguatan aksesibilitas dan pemerataan layanan infrastruktur publik yang inklusif dan berkeadilan. |
| | | | | Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi inovatif untuk mendukung pelayanan publik yang aman dan adaptif. |
| | | | | Pemeliharaan, optimalisasi pemanfaatan, serta pengarusutamaan aspek lingkungan dalam pengelolaan infrastruktur publik. |
| | | | | Penguatan pembiayaan, investasi, serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik. |
| 7 | **Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan** | Meningkatnya ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. | Mendorong penerapan praktik adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan lingkungan | Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. |
| | | | | Penguatan sistem mitigasi, deteksi dini, dan penanggulangan bencana secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. |
| | | | | Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026 | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemeliharaan ekosistem, rehabilitasi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi hijau untuk mendukung ketahanan lingkungan. |
| | | | | Pengembangan kelembagaan, pembiayaan, dan kemitraan strategis dalam pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. |
| **8** | **Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal** | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. | Memperkuat daya saing produk dan jasa unggulan daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif | Peningkatan kualitas dan standarisasi produk serta jasa unggulan daerah untuk menjamin mutu dan daya saing. |
| | | | | Penguatan nilai tambah produk unggulan melalui optimalisasi sumber daya lokal dan penerapan teknologi inovatif. |
| | | | | Pengembangan kapasitas pelaku usaha, UMKM, dan industri kreatif dalam pengelolaan dan pemasaran produk. |
| | | | | Pemanfaatan teknologi digital, promosi, dan perluasan akses pasar guna meningkatkan distribusi produk dan jasa unggulan. |
| | | | | Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam pengembangan produk serta jasa unggulan daerah. |

**Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029**

### 4.3. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan =Pembangunan Nasional Tahun 2025

#### 4.3.1. Keselarasan Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dan mendukung prioritas nasional tahun 2026. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dapat dijabarkan melalui keselarasan tema dan sasaran pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.12**
**Keselarasan Tema RKP, RKPD Povinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros**
**Tahun 2026**

| TEMA NASIONAL | TEMA PROVINSI | TEMA DAERAH |
|---|---|---|
| Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | Peningkatan Kualitas SDM Yang Berkahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inkklusif | Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan. |

**Tabel 4.13**
**Keselarasan Sasaran RKP, RKPD Povinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros**
**Tahun 2026**

| Sasaran Pembangunan Nasional | Indikator | Target 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nasional | Provinsi | Kabupaten |
| Pertumbuhan tinggi berkelanjutan | Pertumbuhan ekonomi | 5,80 – 6,30 | 5,9 – 6,5 | 4,75 |
| | Pendapatan Nasional Bruto/PDRB perkapita | 5.870 (U$) | 86,9 – 89,5 Juta | 75,43 |
| | Penurunan Intensitas Emisi GRK | 37,14% | 33,46 | 13,75 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,67 | 77,81 | 75,47 |
| Penurunan Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | 6,5 – 7,5 | 6,50 – 7,00 | 7,82 – 6,92 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,44 – 4,96 | 4,00 – 4,18 | 4,16 |
| | Gini Rasio | 0,377 – 0,380 | 0,346 – 0,352 | 0,336 |
| | Kemiskinan Ekstrem | 0,0 – 0,5 | - | - |
| Sumber Daya Manusia Bekualiats | Indeks Modal Manusia/IP M | 0,57 | 0,54 | 74,76 (IPM) |

### 4.3.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dan mendukung prioritas nasional Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029. Keterkaitan dan keselarasan antara

perencanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Maros**
**Tahun 2026**

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|
| Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehata, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenila dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas; | Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi | Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial secara inklusif untuk mendukung kemajuan berkelanjutan |
| Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan daya saing usaha dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan |
| | Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | |
| Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelendupan | Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital | Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing daerah |
| Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonom hijau dan ekonomi biru | Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal | Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai keagamaan dan karakter kebersamaan |
| Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | | Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sebagai landasan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|
| Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangakan agromariitm industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan | Penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah |
| Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan |
| Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; | Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing | Penguatan kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal |

### 4.3.3 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026

**Tabel 4.15**

**Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026**

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 1 | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | 241 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 2 | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 800 | 800,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 3 | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 30 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 4 | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 50 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 6 | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 345,00 - Kesehatan Untuk Semua | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap | Unit | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 7 | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 345,00 - Kesehatan Untuk Semua | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 250 | 250,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 8 | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 345,00 - Kesehatan Untuk Semua | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 12 | 12,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 9 | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 345,00 - Kesehatan Untuk Semua | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 12 | 12,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 345,00 - Kesehatan Untuk Semua | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 11 | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 345,00 - Kesehatan Untuk Semua | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Orang | 1 | 500,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 12 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 3,2 | 0 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 13 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 3,2 | 0 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 14 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 12,39 | 0 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 15 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 12,39 | 0 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | 3 | 3,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 17 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | 3 | 3,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 18 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR | 50 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 19 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR | 50 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 20 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 21 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 22 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai | 355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tambah di dalam negeri. | | | | | | | | | | |
| 23 | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 24 | 1,04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang | Unit Rumah | 30 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 25 | 1,04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Unit | | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 26 | 1,04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | Lokasi | 12 | 12,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 27 | 1,04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Lokasi | 20 | 20,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 29 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang | 357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 30 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Laporan | 1 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 31 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Laporan | 1 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 32 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan | laporan | | 12,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.2.01.00 15 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan | laporan | | 12,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 34 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.2.02.00 11 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai | Laporan | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 35 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.2.02.00 11 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai | Laporan | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 36 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON | 1.05.04.2.01.00 13 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Dokumen | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 37 | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON | 1.05.04.2.01.00 13 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Dokumen | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 38 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.2.03.00 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga | 6 | 6,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga | 6 | 6,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 40 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | 14 | 14,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 41 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang | Orang | 14 | 14,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 42 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Orang | | 52961,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 43 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | | 52961,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 44 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan | Orang | 52961 | 52961,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.00 06 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 52961 | 52961,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 46 | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 2.07.03.2.01.00 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Orang | 100 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 47 | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 2.07.03.2.01.00 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Orang | 100 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 48 | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.2.01.00 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial | Perusahaa n | 5 | 75,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 49 | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.2.01.00 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Perusahaa n | 5 | 75,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 50 | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.2.02.00 05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Orang | 500 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Orang | 500 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 52 | 2,08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 2.08.02.2.01.0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan | Lembaga | 15 | 15,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 53 | 2,08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | Orang | 100 | 100,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 54 | 2,08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 2.08.07.2.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota | Kegiatan | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 55 | 2,08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota | Orang | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2,09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga | | 250,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 57 | 2,09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | laporan | | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 58 | 2,09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam | Dokumen | | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 59 | 2,09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Laporan | | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 60 | 2,10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 2.10.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 61 | 2,10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 2.10.06.2.01.0006 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. | Berita Acara | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas | Lokasi | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 63 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas | Lokasi | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 64 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Paket | 21 | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 65 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Paket | 21 | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 66 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Ton | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 67 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Ton | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | antarumat beragama untuk | | | | | | | | | | |
| 68 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | Persentase | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 69 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | Persentase | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 70 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan | Ton | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 71 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan | Ton | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST | Ton | 36000 | 25550,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 73 | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST | Ton | 36000 | 25550,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 74 | 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 2.12.02.2.03.0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan | Laporan | | 4,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 75 | 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | Laporan | 1 | 12,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 76 | 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 2.12.03.2.02.0002 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- | Laporan | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Laporan | 1 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 78 | 2,13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | Unit | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 79 | 2,13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | Unit | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 80 | 2,13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 81 | 2,13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 82 | 2,14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan | 25 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2,14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2.14.03.2.04.00 05 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB | Unit | 48 | 48,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 84 | 2,14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.14.04.2.01.00 16 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Laporan / Dokumen | 12 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 85 | 2,14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.14.04.2.01.00 28 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga | Kelompok | 412 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 86 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.15.02.2.02.00 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | 140 | 140,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 87 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.15.02.2.02.00 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | 140 | 140,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 89 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 90 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | Unit | 1 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 91 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | Unit | 1 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 92 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | Unit | 2 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 93 | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | Unit | 2 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada | Laporan | 2 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 95 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada | Laporan | 2 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 96 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Permohonan | 39 | 39,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 97 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan | Permohonan | 39 | 39,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 98 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas | Rekomendasi | 40 | 3,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 99 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas | Rekomendasi | 40 | 3,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai | Media | 2 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 101 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai | Media | 2 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 102 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi | Layanan | 5 | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 103 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi | Layanan | 5 | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 104 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.0034 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Aplikasi | 5 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 105 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.0034 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Aplikasi | 5 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.00 36 | Penyediaan Akses Internet | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | Perangkat Daerah | 48 | 43,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 107 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.00 36 | Penyediaan Akses Internet | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | Perangkat Daerah | 48 | 43,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 108 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.00 38 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 109 | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.00 38 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan | Dokumen | 1 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 110 | 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 2.17.06.2.01.00 03 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | Kelompok Masyarakat | 103 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 111 | 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 2.17.06.2.01.00 09 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 103 | 100,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.2.01.00 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Unit Usaha | 100 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 113 | 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.2.01.00 15 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Orang | 100 | 60,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 114 | 2,18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 2.18.05.2.01.00 04 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan | Kegiatan Usaha. | 50 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 115 | 2,18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 2.18.05.2.01.00 06 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian | Kegiatan Usaha | 50 | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 116 | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.19.02.2.01.00 11 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | Orang | | 75,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Orang | | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 118 | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | Orang | | 100,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 119 | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | Orang | | 50,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 120 | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Lembaga | | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 121 | 2,20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | 338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data | % | 30 | 40,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2,20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 2.20.02.2.01.00 19 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | % | 65 | 80,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 123 | 2,21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.21.02.2.01.00 07 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | Perangkat Daerah | 43 | 43,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 124 | 2,21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | 337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.21.02.2.01.00 07 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | Perangkat Daerah | 43 | 43,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 125 | 2,21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.21.02.2.01.00 08 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan | Dokumen | 2 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 126 | 2,21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.21.02.2.01.00 08 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan | Dokumen | 2 | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.2.01.00 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek | 10 | 10,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 128 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.2.01.00 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek | 10 | 10,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 129 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.2.01.00 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Orang | 50 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 130 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.2.01.00 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Orang | 50 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 131 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.2.01.00 02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | 5 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | 5 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 133 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | 2 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 134 | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | 2 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 135 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | 37 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 136 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan | Perpustakaan | 37 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | Eksemplar | 500 | 120,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 138 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | Eksemplar | 500 | 120,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 139 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Orang | 13 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 140 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Orang | 13 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 141 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan | Eksemplar | 5 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang | 340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 2.23.03.2.01.00 04 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan | Eksemplar | 5 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 143 | 2,24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 2.24.02.2.01.00 03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 29 | 29,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 144 | 2,24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk | 343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 2.24.02.2.03.00 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengguna | | 1850,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 145 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.2.02.00 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 240 | 620,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 146 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.2.02.00 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Kelompok | 30 | 30,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 147 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.2.02.00 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Unit | 170 | 170,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05.2.01.00 04 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 5 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 149 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05.2.01.00 06 | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan | Pelaku Usaha | 9 | 9,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 150 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05.2.01.00 07 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha | 5 | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 151 | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05.2.01.00 12 | Pengawasan Ekstraksi Garam | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya | Pelaku Usaha | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 152 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.2.01.00 06 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Lokasi | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 153 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.2.01.00 09 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.2.02.0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Orang | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 155 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.2.03.0001 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Lokasi | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 156 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 157 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | Unit | | 5,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 158 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | Unit | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.02.0002 | Pengembangan Pendidikan | Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | Dokumen | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 160 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Dokumen | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 161 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.02.0012 | Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah | Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah | Lembaga | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 162 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.02.0016 | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | Dokumen | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 163 | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di | 344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.02.0022 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual | Produk | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.2.01.00 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 2 | 2,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 165 | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.2.01.00 03 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | Ton | | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 166 | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.27.03.2.01.00 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Laporan | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 167 | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | 353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.27.03.2.01.00 05 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | Ha | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 168 | 3,30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 3.30.02.2.06.00 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir | Laporan | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 169 | 3,30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 3.30.02.2.07.00 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | Dokumen | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 3,30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.2.01.00 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | Pelaku Usaha | 5 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 171 | 3,30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.2.01.00 04 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 172 | 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.2.01.00 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Dokumen | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 173 | 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.2.01.00 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran | Dokumen | 1 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 174 | 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.2.01.00 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang | Dokumen | 2 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.2.01.00 04 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan | Dokumen | 2 | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 176 | 3,32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 3.32.03.2.01.00 10 | Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal | Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan | Orang | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 177 | 3,32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 3.32.03.2.01.00 20 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi | Lokasi | | 1,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 178 | 3,32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi | 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 3.32.04.2.01.00 01 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | Kepala Keluarga | | | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 179 | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 8.01.03.2.01.00 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | Orang | | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 8.01.03.2.01.00 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | Orang | | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 181 | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 8.01.03.2.01.00 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | Orang | | 0,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 182 | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 8.01.04.2.01.00 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, | Orang | | 100,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |
| 183 | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 8.01.04.2.01.00 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, | Orang | | 100,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | OUTCOME PRIORITAS | KODE PROGRAM | PROGRAM | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025 | TARGET RKPD 2026 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, | Orang | | 100,00 | PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : |

### 4.3.4 Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Provinsi terhadap Kegiatan Prioritas Utama

Sebagai dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (ASTA CITA), maka Kabupaten Maros menetapkan program/kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi pencapaian ASTA CITA tersebut sebagai mana pada Tabel berikut:

**Tabel 4.16**
**Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Provinsi terhadap Kegiatan Prioritas Utama Tahun 2026**

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Satpol PP | Reguler |
| | | | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | |
| 2 | Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonom hijau dan ekonomi biru | Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya<br><br>02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani<br><br>02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati |
| | | | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | |
| | | | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | |
| | | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Dinas Perikanan | 02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) |
| | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | |
| | | | Pengawasan usaha embudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | |
| | | | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | |
| | | | Pengawasan Ekstraksi Garam | | |
| 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | DPUTRPKPP | Reguler |
| | | Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Reguler |
| | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | | | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | 03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi |
| | | | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah kabupaten/Kota | | |
| | | Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Reguler |
| | | | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | |
| | | | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | KPU |
| | | | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | |
| | | | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | |
| | | | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | |
| | | Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | KPU |
| | | | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | | |
| | | | Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah | | |
| | | | Pengembangan Pendidikan | | |
| | | | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | | |
| | | | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | | |
| 4 | Memperkuat Pembangunan | Terwujudnya Pendidikan | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Dinas Pendidikan | Reguler |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | Berkualitas yang Merata | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | dan Kebudayaan | 04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah |
| | | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | 04.04.02 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja |
| | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | 04.01.01 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | 04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah |
| | | Terwujudnya Kesehatan untuk Semua | Pengembangan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses |
| | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | |
| | | | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dinas Kesehatan | 04.13.01 Penuntasan TBC<br><br>04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis |
| | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting<br><br>04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer<br><br>04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan |
| | | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal | DISNAKERTRANS | REGULER |
| | | | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | | |
| | | | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | |
| | | | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | DP3ADALDUKKB | Reguler |
| | | | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | |
| | | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | DP3ADALDUKKB | Reguler |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di kampung Keluarga Berkualitas | | |
| | | | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembentukan Kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | |
| | | Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | DISNAKERTRANS | REGULER |
| | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | |
| | | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Dinas Perhubungan | Reguler |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | |
| | | | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | |
| | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Reguler |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyaraka | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | DPMPTSP | Reguler |
| | | | Pengawasan Penanaman Modal | | |
| | | | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Reguler |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | |
| | | | Pameran Dagang Nasional | | |
| | | | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untukPertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan PemberantasanKemiskinan | Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | DPUTRPKPP | 06.06.01 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU |
| | | | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | |
| | | | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | |
| | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | |
| | | Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | Reguler |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | |
| | | Mewujudkan Pembangunan | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | DPMD K | Reguler |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, danBirokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani | Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Reguler |
| | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka nteropabilitas data dan integrasi layanan | | |
| | | | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | |
| | | | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka enyelesaian Sengketa Informasi Publik | | 07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas |
| | | | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | |
| | | | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | |
| | | | Penyediaan Akses Internet | | |
| | | | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | Reguler |
| | | | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | |
| | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan ersandian Pemerintah Daerah | | |
| | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | |
| | | | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil | Reguler |
| | | | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada | | |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | | |
| | | | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | | |
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan |
| | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | |
| | | | Penetapan Cagar Budaya | | |
| | | | Pengembangan Cagar Budaya | | |
| | | | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | DISPERSIP | REGULER |
| | | | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | |
| | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | |
| | | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | |
| | | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | DISPERSIP | REGULER |
| | | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | |
| | | Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau |
| | | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | |
| | | | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | 02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR |
| | | | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | |

| No. | ASTA CITA | Sasaran Pembangunan | Sub Kegiatan Yang Mendukung ASTA CITA | Perangkat Daerah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | 02.18.01 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan |
| | | | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | 02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR |
| | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Reguler |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | |
| | | | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Reguler |

Sebagai dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Maros menetapkan program prioritas tersebut sebagai mana pada Tabel berikut:

**Tabel 4.17**
**Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Prioritas Provinsi**
**Tahun 2026**

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | |
| | | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | |
| | | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |
| | | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | |
| | | 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | |
| | | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN |
| | | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | |
| | | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | |
| | | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |
| | | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | |
| | | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |
| | | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | |
| | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN |
| | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | |
| 3 | Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | |
| | | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | |
| | | 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | |
| | | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | |
| | | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | |
| | | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | |
| 4 | Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | |
| | | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | |
| | | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | |
| | | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | |
| | | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | |
| | | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | |
| | | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | |
| | | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | |
| | | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | |
| | | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | |
| | | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | |
| | | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | |
| | | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | |
| | | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | |
| | | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | |
| | | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | |
| | | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | |
| | | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | |
| | | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan | 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | |
| | | 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | |
| | | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | |
| 6 | Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SELURUH OPD |
| | | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DISDUKCAPIL |
| | | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | |
| | | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |
| | | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | |
| | | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA | |
| | | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | |
| | | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | |
| | | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | |
| | | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DISPERSIP |
| | | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | |
| | | 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | |
| | | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD |
| | | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | |
| | | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| | | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | KECAMATAN |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |
| | | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |
| | | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | |
| | | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
| | | 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | |
| | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | |
| 7 | Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |
| | | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | |
| | | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |
| | | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | |
| | | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
| | | 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | |
| | | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | |
| 8 | Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL |

| No. | Prioritas Daerah | Program | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| | | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | |
| | | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | |
| | | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | |
| | | 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | |
| | | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| | | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| | | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | |

### 4.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Untuk menampung aspirasi masyarakat secara komprehensif, Dokumen RKPD Kabupaten Maros tahun 2026 memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat mekanisme politik anggaran melalui aspirasi yang disalurkan melalui anggota DPRD Kabupaten Bangka. Proses ini dilakukan lewat kegiatan penjaringan permasalahan di lapangan yang kemudian aspirasi tersebut disampaikan dan dilakukan pembahasan dalam musyawarah perencanaan daerah untuk diusulkan sebagai program dan kegiatan dalam rangka memecahkan permaslahan di masyarakat dalam dokumen perencanaan daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros yang disampaikan melalui aplikasi SIPD pada tahun 2026 sebanyak 281 usulan dari 35 anggota DPRD di Kabupaten Maros, sebanyak 228 usulan diteruskan ke Perangkat Daerah, 40 usulan dikembalikan/ditolak/dibatalkan karena usulan tidak dilengkapi dengan data. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 akan dikelompokan sesuai dengan Perangkat Daerah pengampuh urusan sehingga pokok-pokok pikiran DPRD menjadi rujukan untuk mengusung tema pembangunan tahunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros untuk tahun 2026 didominasi pada pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penyusunan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2026.

# BAB V

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

## 5.1 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2026 Kabupaten Maros. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp 1.711.110.475.703 Pendapatan Asli Daerah Rp 415.450.000.000**, **Pendapatan Transfer Rp 1.295.660.475.703** dan **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tidak ada penerimaan di tahun 2026.** Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun **2026**, dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp. **1.804.610.475.703.**

Belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

**Tabel 5.1**
**Kerangka Pendanaan Proyeksi Tahun 2026 dan 2027**

| Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|
| | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi/Target Tahun 2027 |
| **BELANJA** | **1.804.304.518.000** | **1.704.624.919.000** |
| **BELANJA OPERASI** | **1.166.630.185.699** | **1.098.423.440.571** |
| Belanja Pegawai | 718.485.177.699 | 668.828.432.571 |
| Belanja Barang dan Jasa | 396.745.008.000 | 386.745.008.000 |
| Belanja Hibah | 47.900.000.000 | 38.850.000.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.500.000.000 | 4.000.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | **436.246.337.301** | **421.978.392.429** |
| Belanja Modal | 436.246.337.301 | 421.978.392.429 |

| Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|
| | Proyeksi/Target Tahun 2026 | Proyeksi/Target Tahun 2027 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **9.000.000.000** | **10.000.000.000** |
| Belanja Tidak Terduga | 9.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| **BELANJA TRANSFER** | **192.427.995.000** | **197.076.820.000** |
| Belanja Bantuan Keuangan | 165.736.905.000 | 169.584.998.000 |
| Belanja Bagi Hasil | 26.691.090.000 | 27.491.822.000 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025-2029

## 5.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2026. Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari :

**Tabel 5.2**
**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAROS**
**TAHUN 2026**

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif | Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang merata dan inklusif | Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemenuhan hak anak secara inklusif dan mudah diakses | | | **IT.1. Indeks Pembangunan Manusia** | |
| | | | | Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, inklusifitas, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat | | **IS.1.1. Indeks Kesehatan** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan.. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya tertib penyelenggaraan dan keselamatan bangunan gedung. | Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi | Program Penataan Bangunan Gedung |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. | Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan respon kesehatan masyarakat terhadap bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. | Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran dan kerusakan ekosistem. | Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan bahan dan limbah berbahaya secara aman dan terkendali. | Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B) |
| | | | | | Meningkatnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan. | Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup sehat melalui informasi dan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | komunikasi publik yang efektif. | | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | | **IS.1.2. Indeks Pendidikan** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | | | | | Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap ketentuan perizinan. | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kemampuan dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra. | Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya persentase cakupan keluarga yang mengalami peningkatan pengetahuan dan praktik dalam mendukung pendidikan anak dalam 12 bulan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data gender dan anak untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan. | Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak |
| | | | | | Menguatnya pelembagaan PUG serta meningkatnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pembangunan | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemenuhan hak anak secara optimal dan berkelanjutan. | Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. | Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup sehat melalui informasi dan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | komunikasi publik yang efektif. | | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | **IS.1.3. Indeks Pengeluaran per kapita** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum, kredibilitas, dan kapasitas koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. | Persentase koperasi yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas tinggi, dan kapasitas memadai dalam menjalankan kegiatan usaha | Program Penguatan Badan Hukum Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat. | Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | | **IS.1.4. Prevalensi Stunting** | |
| | | | | | | | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | | Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengawasan keamanan pangan. | Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif | Program Pengawasan Keamanan Pangan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara menyeluruh. | Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya persentase anak usia 0-5 tahun yang memperoleh pemenuhan hak gizi optimal dan akses layanan kesehatan dasar. | Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. | Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data gender dan anak untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan. | Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | Program Pengembangan Perumahan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. | Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. | Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana | Program Penanganan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran dan kerusakan ekosistem. | Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan bahan dan limbah berbahaya secara aman dan terkendali. | Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B) |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perizinan yang berlaku. | Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. | Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan. | Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | Meningkatnya kolaborasi antar-desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. | Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan | Program Peningkatan Kerja Sama Desa |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. | Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. | Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya. | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. | Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting di wilayah kerja. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konsistensi, dan efektivitas kebijakan serta pelaksanaan program daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase desa/kelurahan dalam kecamatan yang aman dan bebas dari konflik sosial atau politik. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| | | | | | | **IS.1.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** | |
| | | | | Meningkatnya persentase Tingkat Gemar Membaca | | **Tingkat Gemar Membaca** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kemampuan dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra. | Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra |
| | | | | | Meningkatnya persentase masyarakat yang memanfaatkan aplikasi informatika untuk kegiatan literasi digital. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal dan nasional. | Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | | | Meningkatnya akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk literasi dan pendidikan masyarakat. | ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan akses terhadap koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya. | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno |
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses arsip untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan. | Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan | Program Pengelolaan Arsip |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses legal dan terkontrol terhadap arsip untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan administrasi. | Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi | Program Perizinan Penggunaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | | **IS.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka** | |
| | | | | | | **Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya harmonisasi dan kepastian hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. | Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan | Program Hubungan Industrial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya tata kelola, kapasitas, dan daya saing sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. | Persentase peningkatan jumlah industri yang menerapkan standar tata kelola dan sertifikasi mutu. | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan akses data industri untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan. | Persentase data industri yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem informasi industri daerah | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | | **IS.1.7. Indeks Ketimpangan Gender** | |
| | | | | Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | | **Persentase perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).** | |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data gender dan anak untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan. | Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | Meningkatnya Rasio Akseptor KB | | | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | | Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | meningkatkan derajat kesehatannya. | | |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara menyeluruh. | Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. | Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | **IS.1.8. Indeks Pembangunan Pemuda** | |
| | | | | | | **Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik.** | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan, prestasi, dan partisipasi atlet serta masyarakat dalam bidang olahraga. | Persentase atlet dan masyarakat yang memiliki kemampuan, prestasi, dan partisipasi aktif dalam bidang olahraga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keterampilan, kepemimpinan, dan partisipasi generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. | Persentase generasi muda yang terampil, berkemampuan kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif melalui kegiatan kepramukaan. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal dan nasional. | Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat karakter dan persatuan kebangsaan. | Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat, etika, dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi. | Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | **Persentase pemuda (16-30 tahun) yang menjadi wirausahawan baru** | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | | **IS.1.9. Indeks Perlindungan Anak** | |
| | | | | | | **Indeks Perlindungan Hak Anak** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | | Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengawasan keamanan pangan. | Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif | Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemenuhan hak anak secara optimal dan berkelanjutan. | Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. | Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data gender dan anak untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan. | Persentase data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan dimanfaatkan dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya tertib penyelenggaraan dan keselamatan bangunan gedung. | Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi | Program Penataan Bangunan Gedung |
| | | | | | Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. | Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | | Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. | Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kepemilikan identitas resmi dan akurasi data kependudukan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat | Program Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan tercatatnya status kependudukan masyarakat secara lengkap dan akurat. | Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat | Program Pencatatan Sipil |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses data kependudukan untuk layanan publik dan perencanaan pemerintah. | Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, fungsi, dan kualitas lingkungan desa untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. | Persentase lingkungan desa yang tertata, berfungsi baik, dan berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat | Program Penataan Desa |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kolaborasi antar-desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. | Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan | Program Peningkatan Kerja Sama Desa |
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel | Program Administrasi Pemerintahan Desa |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. | Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| | | | | | Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan | Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah | Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | | | | | | **IS.1.10. Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya persentase cakupan masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan | | **Persentase penduduk peserta aktif JKN (BPJS Kesehatan)** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Meningkatnya persentase cakupan pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan ketenagakerjaan | | **Persentase pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan** | |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya harmonisasi dan kepastian hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. | Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan | Program Hubungan Industrial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dalam pemerintahan dan pembangunan | | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| **2** | **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi** | **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan** | **Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan, pertanian, pesantren, dan UMKM serta pengembangan produk unggulan lokal secara berkelanjutan.** | | | **IT.2. Laju Pertumbuhan PDRB** | |
| | | | | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. | | **IS.2.1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah** | |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. | Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya. | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan perlindungan sumber daya kelautan serta keberlanjutan perikanan. | Persentase nelayan atau pelaku usaha perikanan yang mematuhi peraturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan usaha pertanian terhadap bencana dan berkurangnya kerugian petani. | Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertanian secara legal dan tertib. | Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum | Program Perizinan Usaha Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. | Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | | **IS.2.2. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | | **IS.2.3. Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengawasan keamanan pangan. | Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif | Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum, kredibilitas, dan kapasitas koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. | Persentase koperasi yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas tinggi, dan kapasitas memadai dalam menjalankan kegiatan usaha | Program Penguatan Badan Hukum Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan, keberlanjutan, dan perlindungan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan anggota serta pengelola koperasi dalam menjalankan usaha secara profesional. | Persentase anggota dan pengelola koperasi yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan profesional dalam menjalankan usaha | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan kinerja koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Persentase koperasi yang patuh, transparan, dan berkinerja baik dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah | Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. | Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan usaha pertanian terhadap bencana dan berkurangnya kerugian petani. | Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertanian secara legal dan tertib. | Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum | Program Perizinan Usaha Pertanian |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IS.2.4. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah** | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya harmonisasi dan kepastian hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. | Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan | Program Hubungan Industrial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pertumbuhan ekonomi daerah. | | |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya tata kelola, kapasitas, dan daya saing sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. | Persentase peningkatan jumlah industri yang menerapkan standar tata kelola dan sertifikasi mutu. | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan akses data industri untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan. | Persentase data industri yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem informasi industri daerah | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | | **IS.2.5. Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. | Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya tertib penyelenggaraan dan keselamatan bangunan gedung. | Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi | Program Penataan Bangunan Gedung |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | | Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan tanah yang aman dan tepat guna untuk kepentingan umum. | Persentase tanah yang tersedia, aman, dan digunakan sesuai kepentingan umum | Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum |
| | | | | | Meningkatnya keteraturan dan efisiensi pemanfaatan tanah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. | Persentase pemanfaatan tanah yang tertata, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan | Program Penatagunaan Tanah |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. | Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akurasi data dan informasi bidang tanah untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah. | Persentase data dan informasi bidang tanah yang akurat, lengkap, dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengelolaan wilayah | Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dalam pemerintahan dan pembangunan | | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum, kredibilitas, dan kapasitas koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. | Persentase koperasi yang memiliki kepastian hukum, kredibilitas tinggi, dan kapasitas memadai dalam menjalankan kegiatan usaha | Program Penguatan Badan Hukum Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan, keberlanjutan, dan perlindungan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | **IS.2.6. Laju inflasi daerah** | |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. | Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. | Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya. | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan usaha pertanian terhadap bencana dan berkurangnya kerugian petani. | Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertanian secara legal dan tertib. | Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum | Program Perizinan Usaha Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. | Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah | Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. | Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. | Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana | Program Penanganan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IS.2.7. Persentase Masyarakat miskin** | |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya mutu, keamanan, dan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. | Persentase pengujian sampel sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman yang memenuhi standar mutu dan keamanan. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | | Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | | Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan, keberlanjutan, dan perlindungan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. | Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. | Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya. | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan usaha pertanian terhadap | Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | bencana dan berkurangnya kerugian petani. | | |
| | | | | | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. | Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertanian secara legal dan tertib. | Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum | Program Perizinan Usaha Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya pemukiman, infrastruktur, dan fasilitas yang mendukung kehidupan dan produktivitas masyarakat transmigran. | Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas sosial-ekonomi yang berfungsi dengan baik. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat. | Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. | Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. | Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana | Program Penanganan Bencana |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara menyeluruh. | Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya pemenuhan hak anak secara optimal dan berkelanjutan. | Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. | Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kolaborasi antar-desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. | Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan | Program Peningkatan Kerja Sama Desa |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. | Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk literasi dan pendidikan masyarakat. | ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil dan tertib. | Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. | Persentase kasus ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan tepat waktu sesuai prosedur | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya kepemilikan tanah yang adil dan seimbang serta terlindunginya hak-hak masyarakat atas tanah | Persentase masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah, adil, dan terlindungi. | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. | Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran dan kerusakan ekosistem. | Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan bahan dan limbah berbahaya secara aman dan terkendali. | Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B) |
| | | | | | Meningkatnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan. | Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. | Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| | | | | | Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan | Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah | Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | | | | | | **IS.2.8. Rasio gini** | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kemampuan, keberlanjutan, dan perlindungan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Persentase koperasi yang berkemampuan, berkelanjutan, dan terlindungi dalam mendukung perekonomian masyarakat | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. | Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. | Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | produk lokal di pasar domestik. | | |
| | | | | | Meningkatnya pemukiman, infrastruktur, dan fasilitas yang mendukung kehidupan dan produktivitas masyarakat transmigran. | Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas sosial-ekonomi yang berfungsi dengan baik. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat. | Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berdaya saing. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. | Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepemilikan tanah yang adil dan seimbang serta terlindunginya hak-hak masyarakat atas tanah | Persentase masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah, adil, dan terlindungi. | Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee |
| | | | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil dan tertib. | Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk literasi dan pendidikan masyarakat. | ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak warga negara migran korban tindak kekerasan. | Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan yang dialami warga negara migran | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan |
| | | | | | Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. | Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. | Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana | Program Penanganan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | #N/A | |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. | Persentase sumber daya lokal yang dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan demi kedaulatan dan kemandirian pangan | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| | | | | | Meningkatnya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. | Persentase masyarakat yang memiliki akses ke pangan beragam dan aman secara berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. | Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | | Meningkatnya konsumsi, penjualan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik. | Persentase peningkatan penjualan produk lokal di pasar domestik | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi. | Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi | Program Pengembangan Jasa Konstruksi |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| **3** | **Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government** | **Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi** | **Peningkatan kesejahteraan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.** | | | **IT.3. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten** | |
| | | | | Meningkatnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel | | **IS.3.1. Indeks SPBE** | |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses data kependudukan untuk layanan publik dan perencanaan pemerintah. | Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | | | | Meningkatnya kepemilikan identitas resmi dan akurasi data kependudukan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat | Program Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan tercatatnya status kependudukan masyarakat secara lengkap dan akurat. | Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat | Program Pencatatan Sipil |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data profil kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. | Persentase data profil kependudukan yang tersedia dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tepat. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan aksesibilitas informasi pertanahan untuk mendukung pengambilan keputusan. | Persentase data pertanahan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan akses data industri untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan. | Persentase data industri yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem informasi industri daerah | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya keamanan, kerahasiaan, dan integritas informasi pemerintah. | Persentase informasi pemerintah yang aman, rahasia, dan terjaga integritasnya | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses arsip untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan. | Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan | Program Pengelolaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya keamanan, kelestarian, dan ketersediaan arsip penting sebagai sumber informasi dan bukti hukum. | Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya akses legal dan terkontrol terhadap arsip untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan administrasi. | Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi | Program Perizinan Penggunaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya mutu dan profesionalisme pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan sistem sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi yang tertib. | Persentase pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, atau registrasi yang valid | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap ketentuan perizinan. | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan kinerja koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Persentase koperasi yang patuh, transparan, dan berkinerja baik dalam mendukung perekonomian masyarakat. | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan, kinerja, dan keberlanjutan koperasi dalam mendukung anggota dan perekonomian lokal. | Persentase koperasi yang sehat, berkinerja baik, dan berkelanjutan dalam mendukung anggota dan perekonomian lokal | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan, pengamanan, dan akuntabilitas barang milik daerah. | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | | **IS,3,2, Indeks Sistem Merit** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan, pengamanan, dan akuntabilitas barang milik daerah. | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | **IS.3.3. Indeks inovasi** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | **IS.3.4 Indeks pelayanan Publik** | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. | Persentase layanan publik yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan | Persentase desa dalam kecamatan yang memiliki perangkat desa terlatih dan menjalankan tata kelola sesuai standar. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya mutu dan profesionalisme pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan sistem sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi yang tertib. | Persentase pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, atau registrasi yang valid | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat. | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | | Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang bermutu | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap ketentuan perizinan. | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional/ Penyelenggaraan yang Aktif dan Sesuai dengan Ketentuan | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra. | Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencapai standar kompetensi minimum profesi yang ditetapkan. | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya kepemilikan identitas resmi dan akurasi data kependudukan masyarakat. | Persentase penduduk yang memiliki identitas resmi dan data kependudukannya akurat | Program Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan tercatatnya status kependudukan masyarakat secara lengkap dan akurat. | Persentase penduduk yang memiliki kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan tercatat lengkap serta akurat | Program Pencatatan Sipil |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses data kependudukan untuk layanan publik dan perencanaan pemerintah. | Persentase data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung layanan publik dan perencanaan pemerintah | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data profil kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. | Persentase data profil kependudukan yang tersedia dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tepat. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan akses pelaku usaha terhadap izin usaha simpan pinjam secara cepat dan aman. | Persentase pelaku usaha simpan pinjam yang memiliki kepastian hukum dan akses izin usaha secara cepat dan aman. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan anggota serta pengelola koperasi dalam menjalankan usaha secara profesional. | Persentase anggota dan pengelola koperasi yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan profesional dalam menjalankan usaha | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan perusahaan secara resmi. | Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha resmi | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kelancaran distribusi barang untuk mendukung perdagangan dan perekonomian lokal. | Persentase peningkatan volume distribusi barang lokal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | | | Meningkatnya volume, nilai, dan daya saing produk ekspor daerah di pasar internasional. | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar produk dan terlindunginya hak-hak konsumen. | Persentase pelaku usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan tertibnya pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku. | Persentase pelaku industri yang patuh terhadap peraturan dan perizinan usaha industri. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertanian secara legal dan tertib. | Persentase pelaku usaha pertanian yang memiliki izin usaha dan memenuhi ketentuan hukum | Program Perizinan Usaha Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. | Persentase petani yang memanfaatkan sarana pertanian untuk peningkatan produktivitas. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. | Persentase petani yang memiliki akses terhadap prasarana pertanian yang berfungsi baik | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya kesehatan hewan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko zoonosis. | Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan bebas penyakit zoonosis | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan usaha pertanian terhadap bencana dan berkurangnya kerugian petani. | Persentase penurunan kerugian usaha pertanian akibat bencana | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian yang produktif dan berkelanjutan di kalangan petani. | Persentase petani yang menerapkan praktik pertanian produktif dan berkelanjutan | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | Meningkatnya akses legal dan terkontrol terhadap arsip untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan administrasi. | Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi | Program Perizinan Penggunaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan. | Persentase pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya tertib penyelenggaraan dan keselamatan bangunan gedung. | Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi | Program Penataan Bangunan Gedung |
| | | | | | Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. | Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. | Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak warga negara migran korban tindak kekerasan. | Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan yang dialami warga negara migran | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan |
| | | | | | Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan secara berkelanjutan. | Persentase peningkatan tingkat kemandirian sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. | Persentase peningkatan kepesertaan aktif program jaminan sosial | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan. | Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan publik dan swasta | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara menyeluruh. | Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara memadai | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. | Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | | | Meningkatnya pemenuhan hak anak secara optimal dan berkelanjutan. | Persentase anak yang memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara memadai dan berkelanjutan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan tanah yang aman dan tepat guna untuk kepentingan umum. | Persentase tanah yang tersedia, aman, dan digunakan sesuai kepentingan umum | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat atas tanah. | Persentase hak ulayat masyarakat adat yang diakui secara hukum dan terlindungi. | Program Penetapan Tanah Ulayat |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan transparansi dalam penggunaan lahan sesuai perizinan yang berlaku. | Persentase penggunaan lahan yang sesuai izin dan dikelola secara transparan | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. | Persentase masyarakat yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi hak atas tanahnya | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan secara adil, cepat, dan tertib hukum | Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran dan kerusakan ekosistem. | Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan bahan dan limbah berbahaya secara aman dan terkendali. | Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B) |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perizinan yang berlaku. | Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
| | | | | | Meningkatnya pengakuan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. | Persentase masyarakat hukum adat yang diakui, terlindungi, dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. | Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya respons dan penyelesaian masalah lingkungan hidup secara cepat, transparan, dan akuntabel. | Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan. | Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan peran pemuda dalam pembangunan. | Persentase pemuda yang kompeten, terampil, dan berperan aktif dalam pembangunan. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan, prestasi, dan partisipasi atlet serta masyarakat dalam bidang olahraga. | Persentase atlet dan masyarakat yang memiliki kemampuan, prestasi, dan partisipasi aktif dalam bidang olahraga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| | | | | | Meningkatnya keterampilan, kepemimpinan, dan partisipasi generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. | Persentase generasi muda yang terampil, berkemampuan kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif melalui kegiatan kepramukaan. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. | Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya. | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dan pendapatan pembudidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Persentase peningkatan nilai tambah, mutu, dan akses pasar produk perikanan bagi nelayan dan pelaku usaha. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengawasan keamanan pangan. | Persentase pelaku usaha pangan yang patuh terhadap standar keamanan pangan dan tersedianya pengawasan efektif | Program Pengawasan Keamanan Pangan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya harmonisasi dan kepastian hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. | Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan | Program Hubungan Industrial |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata. | Persentase cagar budaya yang terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, pengelolaan, dan akses masyarakat terhadap koleksi museum untuk edukasi dan budaya. | Persentase koleksi museum yang terpelihara, dikelola baik, dan mudah diakses untuk edukasi dan budaya | Program Pengelolaan Permuseuman |
| | | | | | Meningkatnya akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk literasi dan pendidikan masyarakat. | ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan akses terhadap koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya. | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel | Program Administrasi Pemerintahan Desa |
| | | | | | Meningkatnya kolaborasi antar-desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. | Persentase program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana melalui kolaborasi antar-desa secara efektif dan berkelanjutan | Program Peningkatan Kerja Sama Desa |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup keluarga. | Persentase keluarga yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup baik | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam program KB untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk terkendali. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat, etika, dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi. | Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| | | | | | Meningkatnya peran aktif dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam pembangunan. | Persentase organisasi kemasyarakatan yang patuh terhadap peraturan dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan, pengamanan, dan akuntabilitas barang milik daerah. | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | | | | **IS.3.5. Indeks capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan, pengamanan, dan akuntabilitas barang milik daerah. | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset daerah. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses arsip untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan. | Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan | Program Pengelolaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya keamanan, kelestarian, dan ketersediaan arsip penting sebagai sumber informasi dan bukti hukum. | Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| **4** | | **Meningkatnya kondisi keamanan** | | | | **IT.4. Indeks Stabilitas Keamanan Daerah** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **dan ketertiban masyarakat yang kondusif** | | Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan | | **IS.4.1. Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk** | |
| | **Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah** | | **Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan** | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah | Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah | Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. | Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana | Program Penanganan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan secara adil, cepat, dan tertib hukum | Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. | Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. | Persentase anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi serta mendapatkan layanan pemulihan yang memadai | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | | | | **IS.4.2. Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun** | |
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. | Persentase penurunan rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil dan tertib. | Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan secara adil, tertib, dan sesuai prosedur | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan |
| | | | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan secara adil, cepat, dan tertib hukum | Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan |
| | | | | | Meningkatnya harmonisasi dan kepastian hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. | Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi yang berhasil mencapai kesepakatan | Program Hubungan Industrial |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengurangan kerawanan pangan di masyarakat. | Persentase rumah tangga yang mengalami penurunan tingkat kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | Meningkatnya keterjangkauan dan kestabilan harga bagi masyarakat serta keseimbangan pasokan dan permintaan. | Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat karakter dan persatuan kebangsaan. | Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat, etika, dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi. | Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| | | | | | Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah | Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| **5** | **Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara** | **Meningkatnya ketahanan** | **Peningkatan kesejahteraan aparatur** | | | **IT.5. Indeks Ketahanan Masyarakat** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan** | **masyarakat yang inklusif dengan berlandaskan nilai keagamaan** | **dan penguatan peran keagamaan serta kepemudaan religius** | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang inklusif dan harmonis berbasis nilai keagamaan | | **IS.5.1. Indeks Kpeuasan Masyarakat Layanan Keagamaan** | |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya penataan dan kualitas kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | | Meningkatnya tertib penyelenggaraan dan keselamatan bangunan gedung. | Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi | Program Penataan Bangunan Gedung |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat karakter dan persatuan kebangsaan. | Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
| | | | | | Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah | Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan peran keluarga dalam pembangunan. | Persentase keluarga yang sejahtera, berdaya, dan aktif berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | | | **IS.5.2. Indeks kerukunan umat beragama** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat karakter dan persatuan kebangsaan. | Persentase masyarakat atau peserta didik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui asesmen atau survei | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan kecepatan penyelesaian konflik sosial demi menjaga stabilitas daerah | Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dideteksi dan ditangani secara cepat sebelum meluas. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | | | | | #N/A | #N/A | Program Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat, etika, dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi. | Persentase masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum atau musyawarah desa/kelurahan | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah | Persentase lembaga/instansi yang melaksanakan koordinasi rutin dan terintegrasi dalam menjaga ketertiban umum | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. | Persentase penurunan jumlah laporan atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam periode tertentu | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif | Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap jenjang pendidikan (Kewenangan Kabupaten) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IS.5.3. Indeks Pembangunan Kebudayaan** | |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal dan nasional. | Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesenian tradisional. | Persentase masyarakat yang melestarikan, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kesenian tradisional. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan penghargaan masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya. | Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan menghargai sejarah serta warisan budaya | Program Pembinaan Sejarah |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata. | Persentase cagar budaya yang terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, pengelolaan, dan akses masyarakat terhadap koleksi museum untuk edukasi dan budaya. | Persentase koleksi museum yang terpelihara, dikelola baik, dan mudah diakses untuk edukasi dan budaya | Program Pengelolaan Permuseuman |
| | | | | | Meningkatnya produksi, kualitas, dan apresiasi film nasional serta kontribusinya terhadap budaya dan ekonomi kreatif. | Persentase produksi film yang berkualitas, diapresiasi, dan berkontribusi pada budaya serta ekonomi kreatif. | Program Perfilman Nasional |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk literasi dan pendidikan masyarakat. | ersentase perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan dimanfaatkan untuk literasi dan pendidikan masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan akses terhadap koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya. | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang terlindungi, terpelihara, dan mudah diakses sebagai warisan budaya. | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno |
| | | | | | Meningkatnya keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses arsip untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan. | Persentase arsip yang tertata, aman, dan mudah diakses untuk mendukung administrasi dan pengambilan keputusan | Program Pengelolaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya keamanan, kelestarian, dan ketersediaan arsip penting sebagai sumber informasi dan bukti hukum. | Persentase arsip penting yang aman, terpelihara, dan tersedia sebagai sumber informasi dan bukti hukum. | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya akses legal dan terkontrol terhadap arsip untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan administrasi. | Persentase arsip yang dapat diakses secara legal, terkontrol, dan mendukung penelitian, pendidikan, serta administrasi | Program Perizinan Penggunaan Arsip |
| | | | | | Meningkatnya kemampuan dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra. | Persentase peningkatan jumlah peserta program literasi bahasa dan sastra dalam kurun waktu satu tahun. | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra |
| | | | | | Meningkatnya relevansi dan kualitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. | Persentase Lulusan yang Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. | Program Pengembangan Kurikulum |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa/kelurahan. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya pengakuan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. | Persentase masyarakat hukum adat yang diakui, terlindungi, dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | | |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. | Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan berkelanjutan berbasis penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif** | **Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur** | **Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat** | | | **IT.6.1 Indeks Layanan Infrastruktur** | |
| | | | | Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan akses layanan infrastruktur publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan | | **IS.6.1.1. Proporsi jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten.** | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | | Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. | Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi. | Persentase peningkatan jumlah pelaku jasa konstruksi yang tersertifikasi dan teregistrasi | Program Pengembangan Jasa Konstruksi |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan tanah yang aman dan tepat guna untuk kepentingan umum. | Persentase tanah yang tersedia, aman, dan digunakan sesuai kepentingan umum | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya akurasi data dan informasi bidang tanah untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah. | Persentase data dan informasi bidang tanah yang akurat, lengkap, dan dimanfaatkan untuk perencanaan serta pengelolaan wilayah | Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. | Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | **IS.6.1.2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak** | |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. | Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar yang memadai dan berfungsi | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. | Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran dan kerusakan ekosistem. | Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perizinan yang berlaku. | Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
| | | | | | Meningkatnya respons dan penyelesaian masalah lingkungan hidup secara cepat, transparan, dan akuntabel. | Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | **IS.6.1.3. Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih** | |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. | Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan tanah yang aman dan tepat guna untuk kepentingan umum. | Persentase tanah yang tersedia, aman, dan digunakan sesuai kepentingan umum | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. | Persentase aparatur pemerintah daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatan. | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| **7** | | **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** | **Penguatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi** | | | **IT.6.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | |
| | | | | Meningkatnya ketahanan lingkungan | | **IS. 6.2.1.Indeks Resiko Bencana** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **perubahan iklim dan bencana secara berkelanjutan** | terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. | Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah dalam penanggulangan bencana. | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu. | Persentase penurunan waktu tanggap darurat bencana | Program Penanganan Bencana |
| | | | | | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. | Persentase peningkatan jumlah program pembangunan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. | Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. | Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. | Persentase perencanaan lingkungan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. | Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | | Meningkatnya peran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan lokal. | Persentase lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang berkapasitas dan aktif berperan dalam pembangunan lokal | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang didukung oleh partisipasi aktif dan harmonisasi seluruh elemen daerah | Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. | Persentase pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD yang tercapai sesuai rencana kerja tahunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. | Persentase capaian indikator kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar). | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | **Penurunan Intensitas Emisi GRK** | |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. | Persentase perencanaan lingkungan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran dan kerusakan ekosistem. | Persentase penurunan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah tertentu | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. | Persentase keanekaragaman hayati yang dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan bahan dan limbah berbahaya secara aman dan terkendali. | Persentase bahan dan limbah berbahaya yang dikelola aman, terkendali, dan meminimalkan risiko bagi manusia dan lingkungan | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B) |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perizinan yang berlaku. | Persentase pengelolaan lingkungan hidup yang patuh terhadap peraturan dan efektif sesuai perizinan. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
| | | | | | Meningkatnya respons dan penyelesaian masalah lingkungan hidup secara cepat, transparan, dan akuntabel. | Persentase masalah lingkungan hidup yang ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. | Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
| | | | | | Meningkatnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif serta berkelanjutan. | Persentase lingkungan yang bersih dan sampah yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan. | Persentase pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan. | Persentase keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan yang optimal. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah** | **Meningkatnya daya saing daerah di berbagai sektor pembangunan** | **Pengembangan wirausaha baru melalui pusat kreatif dan startup desa sebagai penggerak ekonomi lokal** | | | **IT.7. Indeks Daya Saing Daerah** | |
| | | | | Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk serta jasa unggulan daerah. | | **IS.7.1. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah** | |
| | | | | | Meningkatnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Persentase kemudahan berusaha dan investasi yang tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya jumlah dan kualitas investasi melalui peningkatan minat investor di daerah. | Persentase peningkatan jumlah dan kualitas investasi yang masuk ke daerah melalui minat investor yang tinggi | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan percepatan proses investasi bagi investor di daerah. | Persentase proses investasi di daerah yang mudah, pasti, dan cepat bagi investor. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan investasi sesuai peraturan dan rencana pembangunan daerah. | Persentase investasi yang patuh dan efektif sesuai peraturan serta rencana pembangunan daerah | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya akurasi, keterpaduan, dan kemudahan akses informasi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Persentase informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | | | Meningkatnya keterpaduan dan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah. | Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang (RDTR) dan telah diterapkan sesuai dengan ketetapan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, konektivitas, dan kemantapan jaringan jalan. | Persentase peningkatan panjang jalan yang memenuhi standar kemantapan jaringan | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | | Meningkatnya pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air secara efisien dan berkeadilan. | Persentase peningkatan debit air yang dimanfaatkan secara efektif dan merata | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas sistem drainase dalam mengendalikan genangan dan banjir. | Persentase penurunan luas area dan durasi genangan/banjir setelah perbaikan/pengembangan sistem drainase. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. | Persentase rumah tangga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | | Meningkatnya kualitas permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan memiliki akses air minum, sanitasi, serta persampahan yang terkelola | Program Pengembangan Permukiman |
| | | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan tanah yang aman dan tepat guna untuk kepentingan umum. | Persentase tanah yang tersedia, aman, dan digunakan sesuai kepentingan umum | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi dan terserap sesuai kebutuhan pasar kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. | Persentase Tingkat kesesuaian penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IS.7.2. Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital** | |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. | Persentase peningkatan produktivitas ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pemerataan pembangunan daerah. | | |
| | | | | | Meningkatnya ketersediaan data sektoral yang akurat dan relevan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. | Persentase data sektoral yang akurat, relevan, dan tersedia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, perlindungan, dan nilai ekonomi produk kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. | Persentase peningkatan jumlah produk kreatif yang terlindungi HAKI dan bernilai ekonomi tinggi. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | | | Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | Persentase tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan daya saing destinasi pariwisata daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD daerah | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal dan nasional. | Persentase masyarakat yang melestarikan, memahami, dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan nasional. | Program Pengembangan Kebudayaan |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya pelestarian, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesenian tradisional. | Persentase masyarakat yang melestarikan, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kesenian tradisional. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| | | | | | Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan penghargaan masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya. | Persentase masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan menghargai sejarah serta warisan budaya | Program Pembinaan Sejarah |
| | | | | | Meningkatnya produksi, kualitas, dan apresiasi film nasional serta kontribusinya terhadap budaya dan ekonomi kreatif. | Persentase produksi film yang berkualitas, diapresiasi, dan berkontribusi pada budaya serta ekonomi kreatif. | Program Perfilman Nasional |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. | Persentase UMKM yang berkapasitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | | Meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. | Persentase UMKM yang berinovasi, produktif, dan menambah nilai produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | | Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan perusahaan secara resmi. | Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha resmi | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan |
| | | | | | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. | Persentase tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai standar industri atau pekerjaan. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya kualitas, relevansi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. | Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas inovasi dan penerapan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan penerapan inovasi daerah. | Program Riset Dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Meningkatnya transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan | Persentase dokumen dan informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat. | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, integrasi, dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan aplikasi informatika. | Persentase layanan yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | | Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang menunjukkan efisiensi dan kesesuaian penggunaan keuangan daerah. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pemerataan pembangunan daerah. | Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB daerah. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | | | Meningkatnya efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. | Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan dan capaian program daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meningkatnya keselarasan dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. | Persentase program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |

## 5.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan kesatuan bangsa dan urusan kewilayahan. Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumberdana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, top down, dan buttom up, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD.

Beberapa tantangan dan dinamika pembangunan tersebut teridentifikasi dalam proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan. Identifikasi terhadap hal tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan langsung masyarakat dan stakeholder yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun media informasi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pencermatan terhadap usulan secara bottom-up dari kabupaten/kota yang mana proses pengusulannya oleh masyarakat telah dimulai pada saat dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Matriks rencana program dan kegiatan disajikan berikut ini secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah ditampilkan dalam tabel 5.3 berikut ini.

# PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

# TAHUN 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **477.227.439.769,00** | | | | | | | **475.458.353.858,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **474.527.965.769,00** | | | | | | | **471.458.353.858,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **474.527.965.769,00** | | | | | | | **471.458.353.858,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **341.946.283.689,00** | | | | | | | **341.038.353.858,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **341.946.283.689,00** | - | - | - | - | - | - | **341.038.353.858,00** | - |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan* | - | | | 19 Dokumen | 63.250.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 76.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 6.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 6.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 6.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 6.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 3.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 17.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 5 Data | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 340.135.367.689,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 337.789.453.858,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2868 Orang/bulan | 339.351.657.689,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 336.997.453.858,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 767.260.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 770.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 6.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang dihasilkan* | - | | | 1 Dokumen | 40.825.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.775.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 17.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 45.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 20.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersedia* | - | | | 1 Dokumen | 71.575.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 86.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 35 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 8.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 17.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 25.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 26.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi umum yang dilaksanakan* | - | | | 1 Layanan | 708.366.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 629.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 16.061.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 16.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 15.840.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 114.918.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 61.549.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 65.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 350.847.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 23.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 18.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan* | - | | | 4 Paket | 435.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 1.250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 46.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 289.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **341.946.283.689,00** | - | - | - | - | - | - | **341.038.353.858,00** | - |
| | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **341.946.283.689,00** | - | - | - | - | - | - | **341.038.353.858,00** | - |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan* | - | | | 4 Layanan | 294.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 332.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 22.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 266.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Layanan Pemeliharaan barang Milik daerah* | - | | | 5 Layanan | 197.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 56.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | **100 Persen** | **131.884.842.080,00** | | | | | | | **129.470.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidkan* | - | | | 46000 Orang | 70.924.282.080,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | - | 67.850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 280.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Patanyamang | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 1.510.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 450.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 4 Ruang | 600.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 25 Paket | 3.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 14 Paket | 4.600.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 150 Peserta Didik | 344.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 100 Orang | 962.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 200 Orang | 368.595.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 241 Satuan Pendidikan | 30.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 241 Satuan Pendidikan | 41.747.752.080,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 42.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 480 Orang | 118.630.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 600.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 100 Orang | 26.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 100 Konten Digital | 55.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 17.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 6.675.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pendidikan yang memasukkan nilai-nilai kerukunan umat beragama dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran ]** | **Persentase sekolah/madrasah yang mengimplementasikan modul pendidikan kerukunan umat beragama. Minimal 85 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 90.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 14 Komunitas | 112.460.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 50 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 3 Kegiatan | 17.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 200 Buku | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 8000 Paket | 4.180.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 2 Ruang | 2.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 8 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 52.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 241 Satuan Pendidikan | 142.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 12 Ruang | 2.410.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 4.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0053 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 1000 Peserta Didik | 1.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 4 Paket | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 7-12 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan* | - | | | 26000 Orang | 39.912.775.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | - | 35.390.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 525.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 7 Ruang | 1.600.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 350.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 4 Paket | 725.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 2.100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 800 Peserta Didik | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 150 Peserta Didik | 325.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 50 Orang | 540.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 100 Orang | 122.705.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 74 Satuan Pendidikan | 380.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 74 Satuan Pendidikan | 19.121.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 18.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 148 Orang | 106.430.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 100 Orang | 26.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 2 Konten Digital | 47.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pendidikan yang memasukkan nilai-nilai kerukunan umat beragama dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran ]** | **Persentase sekolah/madrasah yang mengimplementasikan modul pendidikan kerukunan umat beragama. Minimal 85 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 90.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 14 Komunitas | 90.020.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 3 Kegiatan | 17.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 26000 Satuan Pendidikan | 105.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 3 Ruang | 1.750.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 47.070.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 200 Buku | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 8000 Paket | 4.400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0065 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 350.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0066 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi* | | | | 2 Ruang | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 4 Paket | 800.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 10 Paket | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk Usia 13-15 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Jumlah Penduduk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan* | - | | | 15868 Orang | 17.358.010.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | - | 20.930.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 10 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 580.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 100 Peserta Didik | 1.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | | | | 750 Orang | 4.478.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 6.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 100 Orang | 137.680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 150 Satuan Pendidikan | 285.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 267 Satuan Pendidikan | 5.380.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 5.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 267 Orang | 78.170.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 50 Orang | 26.170.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 30 Konten Digital | 26.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 50 Orang | 24.590.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 33.190.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pendidikan yang memasukkan nilai-nilai kerukunan umat beragama dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran ]** | **Persentase sekolah/madrasah yang mengimplementasikan modul pendidikan kerukunan umat beragama. Minimal 85 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 125.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 14 Komunitas | 191.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 5 Ruang | 400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0031 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 5 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.03.0033 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 125.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 100 Peserta didik | 71.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0035 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 100 Buku | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0036 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 32.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 121.010.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 6000 Paket | 550.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0043 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi* | | | | 1 Ruang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0044 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 20 Paket | 570.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 267 Satuan Pendidikan | 110.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.03.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 2 Ruang | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Penduduk usia 5-6 Tahun | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Anak Tidak Sekolah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal* | - | | | 500 Orang | 3.689.775.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | - | 5.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 50 Peserta Didik | 110.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 100 Orang | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 50 Orang | 18.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan pendidikan non formal (keagamaan )yang terstruktur dan terstandarisasi ]** | **Persentase lembaga pendidikan non formal (keagamaan) yang memenuhi standar kurikulum dan administrasi. Minimal 100 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 12 Satuan Pendidikan | 14.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 7 Satuan Pendidikan | 545.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 20 Orang | 23.055.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 30 Orang | 13.450.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang terserap di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan ]** | **Persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang bekerja di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi pada tahun yang sama. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **90** | **50** | **50** | **60** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 1 Konten Digital | 14.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang terserap di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan ]** | **Persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang bekerja di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi pada tahun yang sama. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **90** | **50** | **50** | **60** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 13.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 103.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan pendidikan non formal (keagamaan )yang terstruktur dan terstandarisasi ]** | **Persentase lembaga pendidikan non formal (keagamaan) yang memenuhi standar kurikulum dan administrasi. Minimal 100 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pendidikan yang memasukkan nilai-nilai kerukunan umat beragama dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran ]** | **Persentase sekolah/madrasah yang mengimplementasikan modul pendidikan kerukunan umat beragama. Minimal 85 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh satuan pendidikan dan/atau komunitas literasi ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) yang difasilitasi oleh satuan pendidikan atau komunitas literasi terhadap total populasi usia 10 tahun ke atas minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **85** | **85** | **90** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 11.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 26.960.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0033 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 5 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terpenuhi haknya atas pendidikan dasar yang layak melalui pengelolaan sistem pendidikan yang efektif ]** | **Persentase anak usia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib belajar. Minimal 100 % diakhir tahun.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 50 Peserta Didik | 41.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak usia sekolah dari keluarga miskin yang mengakses layanan pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan dalam satu tahun ]** | **Persentase anak usia 7–18 tahun dari keluarga miskin yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **75** | **75** | **80** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 20 Paket | 65.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0037 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 100 Buku | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 1 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 160.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 41.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang terserap di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan ]** | **Persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang bekerja di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi pada tahun yang sama. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **90** | **50** | **50** | **60** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0043 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta didik yang lulus ujian nasional dengan nilai minimal standar kelulusan setiap tahun ]** | **Persentase peserta didik tingkat akhir sekolah menengah yang lulus ujian nasional dengan nilai >= standar kelulusan, minimal 100 % pada akhir tahun ajaran.** | **100** | **95** | **95** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 12 Peserta Didik | 22.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang terserap di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan ]** | **Persentase lulusan pendidikan vokasi (melalui pendidikan nonformal) yang bekerja di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi pada tahun yang sama. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **90** | **50** | **50** | **60** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai standar mutu dan layanan publik ]** | **Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan dengan target minimal 100 % dalam 1 tahun.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **131.884.842.080,00** | - | - | - | - | - | - | **129.470.000.000,00** | - |
| | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun* | | | | 1 unit | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0056 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0060 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Anak Tidak Sekolah | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | **-** | **231.910.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase satuan pendidikan dasar (SD sederajat/SMP sederajat) yang mengintegrasikan materi gizi seimbang dan kesehatan anak ke dalam kurikulum pembelajaran ]** | **Persentase sekolah dasar yang menerapkan kurikulum dengan modul gizi seimbang dan pencegahan stunting minimal 50 % pada setiap akhir tahun ajaran.** | **90** | **20** | **20** | **50** | **231.910.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | - | | | - | 115.955.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 115.955.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase sekolah yang mengimplementasikan kurikulum baru yang sesuai standar nasional dalam waktu 12 bulan setelah peluncuran ]** | **Persentase sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum baru sesuai standar nasional dalam 1 tahun setelah peluncuran mencapai minimal 90 %.** | **100** | **85** | **85** | **90** | **231.910.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kurikulum vokasi (Pendidikan nonformal) yang relevan dengan kebutuhan sektor produktif ]** | **Persentase kurikulum vokasi ((Pendidikan nonformal) yang direvisi dan disesuaikan dengan standar kebutuhan industri terhadap total kurikulum vokasi yang ada. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **95** | **50** | **50** | **60** | **231.910.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | - | | | - | 115.955.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 115.955.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase satuan pendidikan dasar (SD sederajat/SMP sederajat) yang mengintegrasikan materi gizi seimbang dan kesehatan anak ke dalam kurikulum pembelajaran ]** | **Persentase sekolah dasar yang menerapkan kurikulum dengan modul gizi seimbang dan pencegahan stunting minimal 50 % pada setiap akhir tahun ajaran.** | **90** | **20** | **20** | **50** | **231.910.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase sekolah yang mengimplementasikan kurikulum baru yang sesuai standar nasional dalam waktu 12 bulan setelah peluncuran ]** | **Persentase sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum baru sesuai standar nasional dalam 1 tahun setelah peluncuran mencapai minimal 90 %.** | **100** | **85** | **85** | **90** | **231.910.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | **100 Persen** | **326.580.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) dalam proses pembelajaran ]** | **Persentase pendidik yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi literasi (membaca, menulis, dan digital) terhadap total pendidik. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdistribusi dengan baik* | - | | | 2000 Orang | 326.580.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 1 Dokumen | 136.660.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam edukasi gizi dan pencegahan stunting di satuan pendidikan dasar ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD sederajat dan SMP sederajat yang mengikuti pelatihan edukasi gizi dan pencegahan stunting minimal 60 % dalam satu tahun anggaran.** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai standar pelayanan publik ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan tersertifikasi sesuai standar dalam 1 tahun, dengan target minimal 60 %.** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | | **[ Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan muatan budaya lokal dalam RPP dan kegiatan ekstrakurikuler. Minimal 75 % diakhir tahun ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi meningkat menjadi minimal 93 % dalam satu tahun.** | **98** | **90** | **90** | **93** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memahami hak anak dalam pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dasar yang telah mengikuti pelatihan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam satu tahun terakhir. Minimal 60 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai standar pelayanan publik ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan tersertifikasi sesuai standar dalam 1 tahun, dengan target minimal 60 %.** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 1 Laporan | 189.920.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memahami hak anak dalam pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dasar yang telah mengikuti pelatihan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam satu tahun terakhir. Minimal 60 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | | **[ Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan muatan budaya lokal dalam RPP dan kegiatan ekstrakurikuler. Minimal 75 % diakhir tahun ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi meningkat menjadi minimal 93 % dalam satu tahun.** | **98** | **90** | **90** | **93** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, dan literasi digital) dalam proses pembelajaran ]** | **Persentase pendidik yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi literasi (membaca, menulis, dan digital) terhadap total pendidik. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam edukasi gizi dan pencegahan stunting di satuan pendidikan dasar ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD sederajat dan SMP sederajat yang mengikuti pelatihan edukasi gizi dan pencegahan stunting minimal 60 % dalam satu tahun anggaran.** | **95** | **50** | **50** | **60** | **326.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| 5. | **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | **100 Persen** | **138.350.000,00** | | | | | | | **250.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bahasa dan sastra berbasis literasi ]** | **Persentase masyarakat peserta kegiatan pengembangan bahasa dan sastra (seperti lomba menulis, baca puisi, literasi digital berbasis karya sastra) terhadap total populasi sasaran. Minimal 65 % setiap tahunnya** | **90** | **60** | **60** | **65** | **138.350.000,00** | - | - | - | - | - | - | **250.000.000,00** | - |
| | 1.01.06.2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Bahasa dan Sastra yang dikembangkan* | - | | | 2 Bahasa | 138.350.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.06.2.01.0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi* | | | | 2 Bahasa | 138.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki kemampuan bahasa dan apresiasi sastra dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase siswa yang mencapai nilai minimal 75 pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra meningkat menjadi 85 % dalam satu tahun.** | **98** | **80** | **80** | **85** | **138.350.000,00** | - | - | - | - | - | - | **250.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.699.474.000,00** | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **2.699.474.000,00** | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | **45 Persen** | **619.815.000,00** | | | | | | | **1.250.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | - | | | 10 Objek | 139.755.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Budaya, Pranata Adat dan Pranata Tradisional | - | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 10 Objek | 109.755.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Budaya, Pranata Adat dan Pranata Tradisional | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase karya budaya lokal yang dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai ekonomi ]** | **Persentase karya budaya lokal yang diinkubasi atau dikomersialisasikan sebagai produk ekonomi kreatif terhadap total karya budaya yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 30 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Budaya, Pranata Adat dan Pranata Tradisional | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal ]** | **Persentase kegiatan budaya lokal yang melibatkan pemuda secara aktif dalam perencanaan atau pelaksanaannya dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.01.0003 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Budaya, Pranata Adat dan Pranata Tradisional | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.01.0004 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina* | | | | 30 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Budaya, Pranata Adat dan Pranata Tradisional | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase karya budaya lokal yang dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai ekonomi ]** | **Persentase karya budaya lokal yang diinkubasi atau dikomersialisasikan sebagai produk ekonomi kreatif terhadap total karya budaya yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.01.0005 | Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina* | | | | 2 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Budaya, Pranata Adat dan Pranata Tradisional | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal ]** | **Persentase kegiatan budaya lokal yang melibatkan pemuda secara aktif dalam perencanaan atau pelaksanaannya dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan* | - | | | 5 Objek | 223.250.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Lembaga Kesenian Tradisional | - | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 3 Objek | 223.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Lembaga Kesenian Tradisional | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase karya budaya lokal yang dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai ekonomi ]** | **Persentase karya budaya lokal yang diinkubasi atau dikomersialisasikan sebagai produk ekonomi kreatif terhadap total karya budaya yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Lembaga Kesenian Tradisional | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal ]** | **Persentase kegiatan budaya lokal yang melibatkan pemuda secara aktif dalam perencanaan atau pelaksanaannya dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase karya budaya lokal yang dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai ekonomi ]** | **Persentase karya budaya lokal yang diinkubasi atau dikomersialisasikan sebagai produk ekonomi kreatif terhadap total karya budaya yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 256.810.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 1 Objek | 132.410.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase karya budaya lokal yang dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai ekonomi ]** | **Persentase karya budaya lokal yang diinkubasi atau dikomersialisasikan sebagai produk ekonomi kreatif terhadap total karya budaya yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina* | | | | 50 Orang | 24.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **85** | **40** | **40** | **60** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi* | | | | 3 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi berbasis nilai budaya lokal ]** | **Persentase peserta kegiatan literasi (membaca, menulis, atau digital) yang mengangkat tema atau ekspresi budaya lokal terhadap total peserta kegiatan kebudayaan. Minimal 95 % setiap tahunnya** | **99** | **90** | **90** | **95** | **619.815.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.250.000.000,00** | - |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | **100 Persen** | **216.625.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelompok seni tradisional yang mengembangkan produk atau layanan ekonomi kreatif berbasis kesenian ]** | **Persentase kelompok kesenian tradisional yang menghasilkan produk atau layanan bernilai ekonomi (seperti pertunjukan berbayar, merchandise, pelatihan seni) terhadap total kelompok kesenian yang dibina. minimal 30 % pada akhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **216.625.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten* | - | | | 14 Lembaga | 216.625.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Kesenian | - | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | | | | 100 Orang | 166.625.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Kesenian | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat aktif dalam program pengembangan kesenian tradisional daerah ]** | **Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat aktif. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **216.625.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelompok seni tradisional yang mengembangkan produk atau layanan ekonomi kreatif berbasis kesenian ]** | **Persentase kelompok kesenian tradisional yang menghasilkan produk atau layanan bernilai ekonomi (seperti pertunjukan berbayar, merchandise, pelatihan seni) terhadap total kelompok kesenian yang dibina. minimal 30 % pada akhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **216.625.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Lembaga | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pranata Kesenian | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat aktif dalam program pengembangan kesenian tradisional daerah ]** | **Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat aktif. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **216.625.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| 3. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | **100 Persen** | **98.920.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase narasi sejarah lokal yang dimanfaatkan dalam produk ekonomi kreatif ]** | **Persentase narasi atau tokoh sejarah lokal yang dijadikan konten produk ekonomi kreatif (seperti film, buku, permainan, desain, atau pertunjukan) terhadap total narasi sejarah yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **98.920.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sejarah Lokal yang dibina* | - | | | 1 Dokumen | 98.920.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan* | | | | 30 Orang | 50.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan sejarah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **98.920.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah* | | | | 2 Unit | 48.320.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase narasi sejarah lokal yang dimanfaatkan dalam produk ekonomi kreatif ]** | **Persentase narasi atau tokoh sejarah lokal yang dijadikan konten produk ekonomi kreatif (seperti film, buku, permainan, desain, atau pertunjukan) terhadap total narasi sejarah yang didokumentasikan. minimal 30 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **98.920.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan sejarah daerah ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **98.920.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| 4. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | **75 Persen** | **919.951.000,00** | | | | | | | **1.150.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelestarian cagar budaya yang terkelola dengan baik sesuai standar nasional ]** | **Persentase cagar budaya yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan sesuai standar nasional. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **40** | **50** | **60** | **919.951.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.150.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan* | - | | | 5 Objek | 184.951.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* | | | | 10 Objek | 15.026.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kualitas layanan informasi dan edukasi cagar budaya kepada masyarakat ]** | **Persentase pengunjung cagar budaya yang menyatakan puas terhadap layanan informasi dan edukasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **919.951.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.150.000.000,00** | - |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 5 Objek | 169.925.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelestarian cagar budaya yang terkelola dengan baik sesuai standar nasional ]** | **Persentase cagar budaya yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan sesuai standar nasional. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **40** | **50** | **60** | **919.951.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.150.000.000,00** | - |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 735.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi* | | | | 10 Objek | 210.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kualitas layanan informasi dan edukasi cagar budaya kepada masyarakat ]** | **Persentase pengunjung cagar budaya yang menyatakan puas terhadap layanan informasi dan edukasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **919.951.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.150.000.000,00** | - |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | | | | 2 Objek | 525.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelestarian cagar budaya yang terkelola dengan baik sesuai standar nasional ]** | **Persentase cagar budaya yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan sesuai standar nasional. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **40** | **50** | **60** | **919.951.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.150.000.000,00** | - |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan* | | | | 2 Objek | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kualitas layanan informasi dan edukasi cagar budaya kepada masyarakat ]** | **Persentase pengunjung cagar budaya yang menyatakan puas terhadap layanan informasi dan edukasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **919.951.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.150.000.000,00** | - |
| 5. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | **100 Persen** | **844.163.000,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional ]** | **Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | *Jumlah Museum Daerah yang dikelola dengan baik* | - | | | 1 Unit | 844.163.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu* | | | | 233 Unit | 290.073.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) museum ]** | **Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) mencapai minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya* | | | | 20 Orang | 18.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional ]** | **Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum* | | | | 1 Unit | 495.330.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) museum ]** | **Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) mencapai minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional ]** | **Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 4 Unit | 10.360.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) museum ]** | **Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) mencapai minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional ]** | **Persentase koleksi museum yang terinventarisasi dan terawat sesuai standar nasional. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | 2.22.06.2.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi* | | | | 2 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) museum ]** | **Persentase pengunjung museum yang mengaku puas terhadap layanan operasional (termasuk informasi, fasilitas, dan dukungan staf) mencapai minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **844.163.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | **185.094.416.290,00** | | | | | | | **232.391.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **185.094.416.290,00** | | | | | | | **232.391.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **185.094.416.290,00** | | | | | | | **232.391.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **105.042.265.265,00** | | | | | | | **78.241.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **105.042.265.265,00** | - | - | - | - | - | - | **78.241.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 74.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 14 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 12 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **105.042.265.265,00** | - | - | - | - | - | - | **78.241.000.000,00** | - |
| | 1.02.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 12 Berita Acara | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **105.042.265.265,00** | - | - | - | - | - | - | **78.241.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 102.728.065.265,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 75.862.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1414 Orang/bulan | 102.039.995.265,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 660.570.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 15 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 55.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 842.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.465.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 160.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 460.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 147.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.150.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 57.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 130.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 116.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **105.042.265.265,00** | - | - | - | - | - | - | **78.241.000.000,00** | - |
| | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 100 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **105.042.265.265,00** | - | - | - | - | - | - | **78.241.000.000,00** | - |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 26.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **78.032.423.025,00** | | | | | | | **151.970.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai protokol pelayanan publik ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **99** | **90** | **90** | **95** | **78.032.423.025,00** | - | - | - | - | - | - | **151.970.000.000,00** | - |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 31.300.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 97.650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 17.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar perorangan dan masyarakat ]** | **Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar (cakupan imunisasi dasar lengkap, kunjungan antenatal care >=4 kali, dan pelayanan kesehatan di puskesmas).** | **100** | **95** | **95** | **100** | **78.032.423.025,00** | - | - | - | - | - | - | **151.970.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **78.032.423.025,00** | - | - | - | - | - | - | **151.970.000.000,00** | - |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 27.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 6.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun* | | | | 5 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 2 Unit | 800.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 2 Unit | 4.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 5 Unit | 2.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 2 Unit | 4.400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 4 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 100 Unit | 2.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 22 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 25 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 6.500.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 250 Paket | 5.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 17.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas* | | | | 17000 Keluarga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 500 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 46.532.383.025,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 53.820.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6600 Orang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6600 Orang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6600 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 25000 Orang | 247.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 17000 Orang | 99.979.300,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4000 Orang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6000 Orang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4000 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4000 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 59.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1000 Orang | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1000 Orang | 240.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 630.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 550.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 480.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 9.520.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 250 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 250 Orang | 53.330.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 28.004.128.725,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 30.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 2000 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1000 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 223.076.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 12 Dokumen | 11.078.802.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 17.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 12 Dokumen | 749.780.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 990.770.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 10 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 1 Unit | 245.196.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1000 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1000 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 100 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 200.040.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 100 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar* | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 17 Unit | 100.040.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | **-** | **1.020.000.000,00** | | | | | | | **1.030.000.000,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 500 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 250 Orang | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | **-** | **399.728.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | - | | | - | 99.998.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 12 Dokumen | 99.998.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | - | | | - | 99.730.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 1 Dokumen | 99.730.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **600.000.000,00** | | | | | | | **650.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0002 | Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman* | | | | 14 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat* | | | | 1000 Keluarga | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 400.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI** | | | | | | **114.500.000.000,00** | | | | | | | **129.109.602.017,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **104.970.000.000,00** | | | | | | | **104.709.602.017,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **104.970.000.000,00** | | | | | | | **104.709.602.017,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **52.000.000.000,00** | | | | | | | **86.509.602.017,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 31.009.602.017,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 450 Orang/bulan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 31.009.602.017,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 52.000.000.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 55.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 52.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 55.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **52.970.000.000,00** | | | | | | | **18.200.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 52.970.000.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 18.200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 42.100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 12.700.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10.870.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.500.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **9.530.000.000,00** | | | | | | | **24.400.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **9.530.000.000,00** | | | | | | | **24.400.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **9.530.000.000,00** | | | | | | | **24.400.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.530.000.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 23.700.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | X.XX.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 9.530.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 23.700.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 700.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0,00 | - | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 700.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI |
| | | **PUSKESMAS LAU** | | | | | | **4.479.248.000,00** | | | | | | | **4.550.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.479.248.000,00** | | | | | | | **4.550.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.479.248.000,00** | | | | | | | **4.550.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.429.248.000,00** | | | | | | | **2.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.429.248.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 2.500.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.429.248.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 2.500.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **2.000.000.000,00** | | | | | | | **2.000.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.000.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 2.000.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 491 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 491 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 491 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1823 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6112 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 18650 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2474 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 371 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 219 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 84 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 171 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 518 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS LAU |
| | | **PUSKESMAS MAROS BARU** | | | | | | **3.951.035.000,00** | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.951.035.000,00** | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.951.035.000,00** | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.951.035.000,00** | | | | | | | **2.000.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.951.035.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.000.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.951.035.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.950.000.000,00** | | | | | | | **1.950.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.950.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.950.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 434 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 434 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1877 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4093 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10178 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2345 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1069 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 233 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 58 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 264 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 564 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 58 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 4093 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 264 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 564 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MAROS BARU |
| | | **PUSKESMAS BANTIMURUNG** | | | | | | **5.503.097.000,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.503.097.000,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **5.503.097.000,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **3.403.097.000,00** | | | | | | | **3.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 3.403.097.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.500.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 3.403.097.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **2.050.000.000,00** | | | | | | | **2.050.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.050.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 2.050.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 433 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 433 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 433 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2193 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 5241 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 19701 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2898 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1354 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 239 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 112 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 437 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 501 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 12 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BANTIMURUNG |
| | | **PUSKESMAS SIMBANG** | | | | | | **3.471.613.000,00** | | | | | | | **3.505.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.471.613.000,00** | | | | | | | **3.505.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.471.613.000,00** | | | | | | | **3.505.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.421.613.000,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.421.613.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.421.613.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **2.000.000.000,00** | | | | | | | **1.955.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.000.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.955.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 460 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 460 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 460 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1878 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3824 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 14798 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2502 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1323 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 149 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 66 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 221 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 495 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIMBANG |
| | | **PUSKESMAS MANDAI** | | | | | | **4.438.951.000,00** | | | | | | | **5.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.438.951.000,00** | | | | | | | **5.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.438.951.000,00** | | | | | | | **5.000.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.438.951.000,00** | | | | | | | **3.000.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.438.951.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.000.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.438.951.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.950.000.000,00** | | | | | | | **1.950.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.950.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.950.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 800 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 800 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 800 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3960 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 8351 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 23706 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1728 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 467 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 252 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 76 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 567 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 905 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 76 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 8351 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 567 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 905 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MANDAI |
| | | **PUSKESMAS MALLAWA** | | | | | | **2.950.817.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.950.817.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.950.817.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.000.817.000,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.000.817.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.000.817.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.900.000.000,00** | | | | | | | **1.855.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.900.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.855.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 689 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1650 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 5742 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1464 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 210 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 85 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 54 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 52 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 108 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 1650 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 52 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 108 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MALLAWA |
| | | **PUSKESMAS TANRALILI** | | | | | | **4.400.000.000,00** | | | | | | | **4.355.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.400.000.000,00** | | | | | | | **4.355.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.400.000.000,00** | | | | | | | **4.355.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.500.000.000,00** | | | | | | | **2.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.500.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.500.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.500.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.850.000.000,00** | | | | | | | **1.805.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.850.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.805.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 460 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 460 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 460 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3.360 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4.435 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 12.501 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2.163 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1.466 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 231 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 52 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 281 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 547 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 281 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TANRALILI |
| | | **PUSKESMAS MARUSU** | | | | | | **3.792.065.000,00** | | | | | | | **3.960.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.792.065.000,00** | | | | | | | **3.960.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.792.065.000,00** | | | | | | | **3.960.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.692.065.000,00** | | | | | | | **2.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.692.065.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.000.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.692.065.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **2.050.000.000,00** | | | | | | | **1.910.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.050.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.910.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 582 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 582 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 582 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2944 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4069 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 16260 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2021 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 398 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 212 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 67 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 463 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 665 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 12 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MARUSU |
| | | **PUSKESMAS MONCONGLOE** | | | | | | **3.203.485.000,00** | | | | | | | **3.455.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.203.485.000,00** | | | | | | | **3.455.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.203.485.000,00** | | | | | | | **3.455.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.303.485.000,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.303.485.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.303.485.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.900.000.000,00** | | | | | | | **1.905.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.900.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.905.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 266 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 266 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 266 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1.391 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2.898 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6.417 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1.293 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 600 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 165 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 46 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 175 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 306 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 46 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 46 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 175 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 306 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **0,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS MONCONGLOE |
| | | **PUSKESMAS TOMPOBULU** | | | | | | **3.429.660.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.429.660.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.429.660.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.479.660.000,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.479.660.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.479.660.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.900.000.000,00** | | | | | | | **1.855.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.900.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.855.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 246 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 246 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 246 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1539 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2693 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 9863 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1406 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 665 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 28 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 146 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 275 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 1500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 146 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 275 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TOMPOBULU |
| | | **PUSKESMAS BONTOA** | | | | | | **4.295.326.000,00** | | | | | | | **4.605.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.295.326.000,00** | | | | | | | **4.605.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.295.326.000,00** | | | | | | | **4.605.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.145.326.000,00** | | | | | | | **2.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.145.326.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.500.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.145.326.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **2.100.000.000,00** | | | | | | | **2.055.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.100.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 2.055.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 587 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 587 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 587 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2228 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4386 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 16317 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2482 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 969 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 188 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 68 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 350 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 657 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS BONTOA |
| | | **PUSKESMAS TURIKALE** | | | | | | **4.952.328.000,00** | | | | | | | **5.005.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.952.328.000,00** | | | | | | | **5.005.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.952.328.000,00** | | | | | | | **5.005.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.852.328.000,00** | | | | | | | **3.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.852.328.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.000.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.852.328.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **2.050.000.000,00** | | | | | | | **1.955.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.050.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.955.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 248 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 248 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 248 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2320 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 5929 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10539 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3656 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1080 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 411 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 93 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 545 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 310 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 500 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TURIKALE |
| | | **PUSKESMAS CENRANA** | | | | | | **3.053.805.000,00** | | | | | | | **3.275.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.053.805.000,00** | | | | | | | **3.275.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.053.805.000,00** | | | | | | | **3.275.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.053.805.000,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.053.805.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.053.805.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.950.000.000,00** | | | | | | | **1.725.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.950.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.725.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2000 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CENRANA |
| | | **PUSKESMAS CAMBA** | | | | | | **3.439.035.000,00** | | | | | | | **2.880.423.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.439.035.000,00** | | | | | | | **2.880.423.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.439.035.000,00** | | | | | | | **2.880.423.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **1.439.035.000,00** | | | | | | | **1.500.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.439.035.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.439.035.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **1.950.000.000,00** | | | | | | | **1.330.423.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.950.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.330.423.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 240 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 400 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 2.923.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1000 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 100 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 250 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0049 | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 2.500.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **-** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | PUSKESMAS CAMBA |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** | | | | | | **220.501.624.521,00** | | | | | | | **242.477.681.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **220.451.344.521,00** | | | | | | | **242.345.581.000,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **209.801.979.521,00** | | | | | | | **209.071.950.000,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **19.966.959.521,00** | | | | | | | **17.393.800.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 13 Dokumen | 22.900.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 47.950.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3.175.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.175.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.675.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.675.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.850.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.250.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 11.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 16 Data | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Berita Acara | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 12 Laporan | 13.297.739.521,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 13.853.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1750 Orang/bulan | 12.381.624.521,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 13.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 913.440.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 1.175.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 4 Dokumen | 36.432.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 43.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 677.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 35.225.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 38.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 530.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 125 Orang | 33.635.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 23.650.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 31 Paket | 31.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 20.150.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 1.105.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 9 Jenis | 984.052.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 937.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 12.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.373.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 27.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 186.969.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 180.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 71.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 68.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 8.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 8.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 693.680.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 630.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Pelaksanaan UrusanPemerintahan Daerah* | - | | | 7 Jenis | 4.962.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 1.870.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 4.700.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 22.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 14 Unit | 240.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 370.100.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 310.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 6.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 363.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan PelaksanaanUrusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik* | - | | | 4 Jenis | 259.600.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 307.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 87.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 149.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 250 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.966.959.521,00** | - | - | - | - | - | - | **17.393.800.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | **90 Persen** | **10.083.860.000,00** | | | | | | | **36.519.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah ketersediaan air baku* | - | | | 15385 M3 | 3.912.350.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 11.232.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 1 KM | 13.600.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan* | | | | 10 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 2 KM | 650.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan* | | | | 2,27 KM | 1.862.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 6.792.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun* | | | | 5 Titik | 437.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.571.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun* | | | | 3 Unit | 947.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.547.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik* | - | | | 4200 Ha | 6.171.510.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 25.287.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun* | | | | 0 KM | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | | | | 3,2 KM | 1.416.610.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 4.645.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 12,39 KM | 3.521.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 13.590.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi* | | | | 7,5 KM | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.713.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 6,46 KM | 612.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya* | | | | 10 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0048 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan* | | | | 2 UNIT | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.059.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi* | | | | 7 UNIT | 621.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.030.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | **100 Persen** | **70.194.100.000,00** | | | | | | | **8.035.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak* | - | | | 88960 Rumah Tangga | 70.194.100.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 8.035.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun* | | | | 60 Unit | 1.238.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | | | | 30 Orang | 30.880.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 155.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | | | | 3 Liter/Detik | 6.898.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 3 Liter/Detik | 57.480.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 50 SR | 4.390.570.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 4. | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | **-** | **1.000.000.000,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun* | | | | 1 Ton/hari | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | **-** | **3.200.000.000,00** | | | | | | | **3.200.000.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 3.200.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 3.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.05.2.01.0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja* | | | | 100 Rumah Tangga | 130.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | | | | 89 Orang | 81.918.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.05.2.01.0044 | Penyediaan Unit pengolahan setempat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.* | | | | 174 Rumah Tangga | 2.687.382.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.05.2.01.0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 6. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | **-** | **3.000.000.000,00** | | | | | | | **15.100.000.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 3.000.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 15.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 15000 M | 3.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 15.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 15000 Meter | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 7. | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | **-** | **0,00** | | | | | | | **5.000.000.000,00** | |
| | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.07.2.01.0033 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar* | | | | 250 Rumah Tangga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 8. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | **8,04 Rasio** | **16.550.000.000,00** | | | | | | | **23.850.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Jumlah dokumen IMB dan setifikat laink fungsi bangunan gedung yang diterbitkan* | - | | | 5000 Dokumen | 16.550.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 23.850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan* | | | | 2 Bangunan Gedung | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala* | | | | 4 Bangunan Gedung | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 20 Dokumen | 15.350.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 20.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 1200 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 9. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | **2,01 Rasio** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun* | - | | | 1 Dokumen | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 10. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | **78.56 Persen** | **81.700.060.000,00** | | | | | | | **93.250.000.000,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang* | - | | | 973.02 Km | 81.700.060.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 93.250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola* | | | | 30 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 12 Dokumen | 1.100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 1238.567 KM | 1.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0049 | Pelebaran Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang jembatan yang dilebarkan* | | | | 0 Meter | 3.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 3 KM | 1.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0052 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya* | | | | 1238.567 KM | 200.060.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan* | | | | 4 KM | 4.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 1 KM | 2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala* | | | | 5 KM | 10.900.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0057 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian* | | | | 0 Meter | 7.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0058 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 0 Meter | 4.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 9 KM | 30.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 50.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0060 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi* | | | | 1238.567 KM | 1.200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0061 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala* | | | | 0 Meter | 2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 2 Jembatan | 1.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0068 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar* | | | | 1 KM | 2.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang jembatan yang dibangun* | | | | 0 Meter | 10.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 7.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 11. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | **undefined Persen** | **1.592.000.000,00** | | | | | | | **2.439.000.000,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | - | | | 300 Orang | 1.065.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | - | 1.740.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0009 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 300 Orang | 120.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 Lembaga | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0012 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan* | | | | 8 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0013 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya* | | | | 1 Lembaga | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 300 Orang | 750.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Tenaga Kerja Konstruksi | | 1.250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersedia* | - | | | 2 Sistem | 294.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 404.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan* | | | | 2 Perangkat Pendukung | 70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 120.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 168.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 12 Orang | 84.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 96.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan* | | | | 2 Layanan Informasi | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Jumlah Penyelenggara Jasa Konstruksi Yang Diawasi dan Dievaluasi* | - | | | 30 Badan Usaha | 233.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Badan Usaha | - | 295.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 100 Paket Pekerjaan | 80.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Badan Usaha | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 100 Bangunan Konstruksi | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Badan Usaha | | 60.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 5 Lembaga | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Badan Usaha | | 45.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha* | | | | 30 Badan Usaha | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Badan Usaha | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0010 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Badan Usaha | | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 12. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | **11,62 Persen** | **2.515.000.000,00** | | | | | | | **3.285.150.000,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR* | - | | | 7500 Ha | 468.750.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 680.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 417.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah publikasi informasi penataan ruang* | | | | 2 Publikasi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0008 | Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi* | | | | 1 Dokumen | 31.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Luas Areal Ruang Daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan* | - | | | 7500 Ha | 1.173.400.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0004 | Penyusunan Peta Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data SHP Peta Dasar* | | | | 1 Peta | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 958.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan* | | | | 2 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat* | | | | 0 Kegiatan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Luas Areal Ruang Daerah yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana peruntukan* | - | | | 7500 Ha | 486.660.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang* | | | | 1 Dokumen | 465.160.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 100 Layanan | 21.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 0 Sistem Informasi | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya* | - | | | 7500 Ha | 386.190.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 1.255.150.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang* | | | | 20 Kasus | 33.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0007 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif* | | | | 20 Kasus | 26.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* | | | | 30 Dokumen | 27.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang* | | | | 1 Laporan | 279.040.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0010 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0012 | Penilaian Perwujudan RTR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0013 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang* | | | | 1 Berita Acara | 20.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 20.150.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.04.0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | - | | | | - | 0,00 | - | - | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **10.649.365.000,00** | | | | | | | **33.273.631.000,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | **100 Persen** | **928.765.000,00** | | | | | | | **18.221.960.000,00** | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah masyarakat korban bencana yang terdata untuk mendapatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah* | - | | | 100 Orang | 12.400.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 34.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus* | | | | 3 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 12.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah masyarakat korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi* | - | | | 100 Orang | 25.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 84.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih* | | | | 5 Orang | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02.0007 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02.0008 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan* | | | | 24 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 4.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.02.0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan* | | | | 24 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 4.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi* | - | | | 100 Orang | 470.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 9.432.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | | | | 75 Unit Rumah | 270.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 375.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun* | | | | 25 Unit Rumah | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 375.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.03.0007 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah* | | | | 100 Rumah Tangga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.03.0010 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan* | | | | 100 Unit Rumah | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 17.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 50 Unit Rumah | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 8.650.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.02.2.04 | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang menerima bantuan rumah* | - | | | 100 Rumah Tangga | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 18.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.04.0004 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.04.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah* | | | | 100 Rumah Tangga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 17.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | *Jumlah rumah susun/ rumah khusus yang mendapatkan pembinaan dalam pengelolaannya* | - | | | 1 Rumah Susun | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 8.651.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.05.0003 | Pembangunan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun* | | | | 50 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 8.650.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.05.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | *Jumlah rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan* | - | | | 10 Rekomendasi | 421.365.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 1.360.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan* | | | | 4 Laporan | 410.420.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 680.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.06.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum* | | | | 4 Laporan | 10.945.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 680.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **99,75 Persen** | **3.478.439.000,00** | | | | | | | **3.973.980.500,00** | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | *Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbikan* | - | | | 1 Izin | 47.260.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 57.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman* | | | | 1 Laporan | 47.260.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 57.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah kawasan dan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha* | - | | | 7 Kawasan | 12.900.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 8.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Dokumen | 12.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 8.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* | - | | | 7 Kawasan | 3.418.279.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 3.908.480.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki* | | | | 30 Unit Rumah | 431.600.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 654.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Laporan | 11.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 14.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi* | | | | 1 Dokumen | 15.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 8.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan* | | | | 1 Ha | 627.309.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* | | | | 20 Unit | 1.031.480.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.231.480.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar* | | | | 1 Ha | 1.300.089.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 3. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | **98,62 Persen** | **2.188.561.000,00** | | | | | | | **2.501.480.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki* | - | | | 30 Unit Rumah | 2.188.561.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 2.501.480.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 30 Unit Rumah | 644.280.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 770.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh* | | | | 30 Unit | 1.544.280.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 1.731.480.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 4. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | **85 Persen** | **4.053.600.000,00** | | | | | | | **8.574.210.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai standar* | - | | | 20 Perumahan | 4.053.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 8.574.210.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* | | | | 12 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 5.190.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan* | | | | 4 Laporan | 17.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU* | | | | 12 Kelompok | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum* | | | | 12 Lokasi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 95.520.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0009 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* | | | | 12 Laporan | 21.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 10.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan* | | | | 12 Lokasi | 3.665.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.388.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum* | | | | 20 Lokasi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 6.070.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 5. | **1.04.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **60,64 Persen** | **0,00** | | | | | | | **2.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.06.2.01 | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | *Jumlah sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang diterbitkan* | - | | | 10 Pengembang | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 2.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 1.04.06.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil* | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 2.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **50.280.000,00** | | | | | | | **132.100.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **50.280.000,00** | | | | | | | **132.100.000,00** | |
| 1. | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | **100 Persen** | **12.570.000,00** | | | | | | | **22.210.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kasus Sengketa Tanah Yang Diselesaikan* | - | | | 1 Kasus | 12.570.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 22.210.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Berita Acara | 2.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 10.140.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 9.920.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 12.070.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2. | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | **100 Persen** | **31.425.000,00** | | | | | | | **41.645.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang di tetapkan* | - | | | 1 Obyek | 31.425.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 41.645.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah* | | | | 1 Dokumen | 6.285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 12.075.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 6.285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 10.375.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0006 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.* | | | | 1 Berita Acara | 6.285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 6.455.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0007 | Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 6.285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 6.455.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0008 | Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 6.285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 6.285.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 3. | **2.10.09** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | | | | | **100 Persen** | **0,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah* | - | | | 1 Dokumen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 4. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | **100 Persen** | **6.285.000,00** | | | | | | | **18.245.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 6.285.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | - | 18.245.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Masyarakat di kabupaten Maros | | 11.620.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.10.2.01.0006 | Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK* | | | | 5 Dokumen | 6.285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat di kabupaten Maros | | 6.625.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **11.143.534.526,00** | | | | | | | **13.759.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **11.143.534.526,00** | | | | | | | **13.759.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **11.143.534.526,00** | | | | | | | **13.759.000.000,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **10.799.692.526,00** | | | | | | | **12.639.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 21.879.800,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 82.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 2.776.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.372.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.372.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.372.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.372.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.537.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.106.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 1.371.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.510.148.726,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 7.204.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 80 Orang/bulan | 6.364.655.726,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 7.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1.278.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 135.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 160.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 4.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 18 Laporan | 1.823.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 4.476.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.088.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 18.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.544.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.088.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 238.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 2 Unit | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 160.538.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 441.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.959.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 8.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3.780.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 4.636.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 18.653.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 12.023.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 97.690.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 947.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 391.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 550.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 191.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 210.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.672.950.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 4.037.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 3.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 11.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 3.669.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 4.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 37.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | 69.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **10.799.692.526,00** | - | - | - | - | - | - | **12.639.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 21.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **-** | **343.842.000,00** | | | | | | | **1.120.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 259.623.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | 739.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan*<br><br>*dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 1 Dokumen | 18.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan* | | | | 1 Dokumen | 1.022.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja* | | | | 200 Orang | 6.861.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | - | - | - | - | - | - | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0011 | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 3.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0012 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.* | | | | 4 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0013 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya* | | | | 200 Orang | 9.719.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas* | | | | 200 Orang | 9.919.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ] | Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun | 90 | 40 | 40 | 50 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ] | Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ] | Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ] | Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun | 55 | 30 | 30 | 35 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ] | Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ] | Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah. | 9 | 5 | 5 | 5 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ] | Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun. | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 12 laporan | 45.230.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 12 Laporan | 31.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia* | | | | 2 Unit | 93.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.01.0019 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas* | | | | 15 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ] | Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun | 90 | 40 | 40 | 50 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ] | Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ] | Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ] | Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun | 55 | 30 | 30 | 35 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ] | Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ] | Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah. | 9 | 5 | 5 | 5 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ] | Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun. | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | - | | | - | 72.909.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | 292.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0004 | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 laporan | 10.985.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ] | Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ] | Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ] | Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun | 90 | 40 | 40 | 50 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ] | Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun. | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ] | Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ] | Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ] | Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 75 | 75 | 80 | 343.842.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.120.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.02.2.02.0005 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 dokumen | 1.022.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah* | | | | 2 unit | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 1.278.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan* | | | | 1 laporan | 1.278.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda* | | | | 1 Dokumen | 3.947.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 9.969.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 1 Laporan | 12.830.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 80.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 13.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 11.310.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | 89.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0002 | Pembentukan Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS* | | | | 1 Dokumen | 772.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 3.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.03.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | - | - | - | - | - | - | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.03.0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS* | | | | 1 Laporan | 1.466.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan pencegahan tindak kriminalitas serta kekerasan di wilayah masyarakat melalui kerja sama dengan satuan keamanan lainnya. ]** | **Persentase kegiatan patroli dan pencegahan tindak kriminalitas yang tercatat dan dilaksanakan sesuai jadwal. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 1 Laporan | 3.972.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lingkungan permukiman masyarakat miskin yang berada dalam kondisi tertib dan aman dalam satu tahun. ]** | **Persentase wilayah padat penduduk miskin yang mengalami penurunan gangguan ketertiban (seperti konflik sosial, pelanggaran perda, atau kriminalitas ringan) minimal 60 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase wilayah yang mendapat pelayanan patroli dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung stabilitas harga barang dan jasa. ]** | **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berpotensi mengganggu distribusi barang minimal 5 % setiap tahun, sehingga membantu pengendalian inflasi daerah.** | **9** | **5** | **5** | **5** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase patroli dan kegiatan preventif ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal dan melibatkan masyarakat. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **75** | **75** | **80** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya Minimal 35 % diakhir tahun** | **55** | **30** | **30** | **35** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari potensi kekerasan dan pelanggaran hak di ruang publik. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan tingkat gangguan ketertiban umum terhadap anak menurun (berdasarkan laporan kejadian kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak di ruang publik). Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang berfokus pada penguatan kerukunan umat beragama di masyarakat. ]** | **Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengandung unsur edukasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **343.842.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000.000,00** | - |
| | | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | **9.803.186.100,00** | | | | | | | **4.531.353.136.776,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.803.186.100,00** | | | | | | | **4.531.353.136.776,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **9.803.186.100,00** | | | | | | | **4.531.353.136.776,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **6.789.811.350,00** | | | | | | | **4.519.729.098.276,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 24.992.750,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 40.402.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.585.750,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.871.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 3.146.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.072.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 18 Laporan | 4.841.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 12 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.600.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 2.820.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.054.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.166.477.600,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.872.205.276,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 840 Orang/bulan | 4.035.983.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.592.439.276,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 120.840.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 245.080.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 2.981.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.671.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.991.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1.991.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 2.691.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.405.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.991.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 76.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.991.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.740.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 530.610.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 30 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | - | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 3 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 205.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1.370.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 3 Dokumen | 1.370.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.805.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 18 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 180.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 80 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 50 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 226.012.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 492.826.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 8.086.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.926.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 9.545.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.497.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.650.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 14.022.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 18.112.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.507.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.012.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 1.136.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.156.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.348.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 152.470.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 170.870.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 100 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 275.797.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.508.080.250.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.660.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 111.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 589.250.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 74.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 349.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 950.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 90.297.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 332.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.030.800.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 5.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.800.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 2.025.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.011.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 59.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.336.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 19.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 64.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 60.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 30 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.789.811.350,00** | - | - | - | - | - | - | **4.519.729.098.276,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 19.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 32.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 2. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | **-** | **3.013.374.750,00** | | | | | | | **11.624.038.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.799.237.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 7.909.426.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 68.879.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 365 Laporan | 465.660.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 788.260.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 39.253.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 103.510.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal* | | | | 1 Dokumen | 140.690.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.150.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | | | | 1 Orang | 75.924.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 567.402.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya* | | | | 103 Desa/Kelurahan | 1.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 217.800.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0012 | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran* | | | | 1 laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 336.425.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 462.159.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0014 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 21.588.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0015 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0016 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 47.593.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 60 Unit | 2.035.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.629.360.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 28.210.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 56.300.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0020 | Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 400.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0024 | Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi* | | | | 8 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0025 | Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *0* | | | | 1 0 | 12.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.01.0027 | Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | - | - | | | - | 6.600.550,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 485.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 6.600.550,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 49.700.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.02.0004 | Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran* | | | | 4 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ] | Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 20 | 20 | 50 | 3.013.374.750,00 | - | - | - | - | - | - | 11.624.038.500,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ] | persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 3.013.374.750,00 | - | - | - | - | - | - | 11.624.038.500,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ] | Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun | 95 | 70 | 70 | 75 | 3.013.374.750,00 | - | - | - | - | - | - | 11.624.038.500,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ] | Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun. | 95 | 50 | 50 | 75 | 3.013.374.750,00 | - | - | - | - | - | - | 11.624.038.500,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ] | Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun. | 95 | 50 | 50 | 75 | 3.013.374.750,00 | - | - | - | - | - | - | 11.624.038.500,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ] | Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun | 95 | 70 | 70 | 75 | 3.013.374.750,00 | - | - | - | - | - | - | 11.624.038.500,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.02.0005 | Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 900.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.03.0002 | Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.03.0003 | Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran* | | | | 4 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.03.0004 | Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | - | | | - | 34.526.700,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 417.334.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 200 Orang | 19.144.700,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 38.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | | | | 103 Desa/Kelurahan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 53.812.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | | | | 103 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.140.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.04.0004 | Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran* | | | | 150 Orang | 15.382.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.382.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.2.04.0006 | Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya* | | | | 500 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | - | - | | | - | 173.010.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.912.078.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 57.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 239.446.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis* | | | | 163 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Camba, Cempaniga<br>Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang<br>Kab. Maros, Bontoa, Bontoa<br>Kab. Maros, Tanralili, Borong<br>Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae<br>Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu<br>Kab. Maros, Turikale, Adatongeng<br>Kab. Maros, Turikale, Adatongeng<br>Kab. Maros, Turikale, Adatongeng<br>Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 757.472.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05.0006 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 12 Laporan | 23.010.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 78.160.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05.0008 | Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terlindungi dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya melalui sistem penyelamatan yang responsif dan ramah anak. ]** | **Persentase anak usia 0–17 tahun yang tinggal di wilayah dengan akses layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif dan memiliki sistem evakuasi ramah anak. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | 1.05.04.2.05.0009 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 12 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempaniga Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang Kab. Maros, Bontoa, Bontoa Kab. Maros, Tanralili, Borong Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | | 380.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan permukiman masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam satu tahun. ]** | **persentase RT atau dusun di wilayah padat penduduk miskin yang dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran dan telah mendapatkan sosialisasi atau simulasi penanggulangan kebakaran minimal 70 % dalam satu tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang efektif dalam mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase laporan kejadian kebakaran dan insiden non kebakaran yang ditangani tepat waktu dan melibatkan koordinasi lintas sektor. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase respon cepat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu standar respons dengan target minimal 75 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 4 jam untuk mencegah lonjakan harga dan inflasi minimal 75 % setiap tahun.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya perlindungan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari risiko kebakaran dan kejadian darurat lainnya. ]** | **Persentase kejadian kebakaran dan non-kebakaran yang tertangani dengan cepat dan tepat oleh tim penyelamat.** | **95** | **50** | **50** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. ]** | **Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran yang terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat. Minimal 75 % diakhir tahun** | **95** | **70** | **70** | **75** | **3.013.374.750,00** | - | - | - | - | - | - | **11.624.038.500,00** | - |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **7.226.639.679,00** | | | | | | | **7.799.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.226.639.679,00** | | | | | | | **7.799.000.000,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **7.226.639.679,00** | | | | | | | **7.799.000.000,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **6.254.251.679,00** | | | | | | | **6.450.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 29.273.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 58.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.941.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.991.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.941.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 0 Data | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.923.217.679,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.268.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 58 Orang/bulan | 3.772.495.679,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 131.880.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 132.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 12 Laporan | 9.417.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 4.485.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.940.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.138.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 18.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.599.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.539.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 191.201.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 206.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 4 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 90 Paket | 181.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 182.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 9.701.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 685.459.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 387.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.377.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 149.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 101.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 27.995.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 28.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 51.861.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 53.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 26.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 36.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 346.225.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 276.200.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 307.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 66.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 95.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 81.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 115.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 116.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 687.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 719.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 7.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 679.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 681.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 452.162.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 487.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 196.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 198.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 115.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 116.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.254.251.679,00** | - | - | - | - | - | - | **6.450.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 141.162.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 146.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | **-** | **972.388.000,00** | | | | | | | **1.349.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 200 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | - | | | - | 604.070.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 800.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 12 Unit | 159.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 235.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana* | | | | 14 Kawasan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 100 Orang | 47.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 148.440.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 151.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 1 laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 199.030.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 210.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 14 Kawasan | 48.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | - | | | - | 265.280.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 363.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 1 Dokumen | 39.855.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 300 Orang | 49.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae<br>Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 500 Orang | 176.425.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 210.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae<br>Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | - | | | - | 53.038.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | - | 135.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana* | | | | 1 Dokumen | 23.738.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 31.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)* | | | | 0 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal* | | | | 20 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 29.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 32.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | **9.667.842.143,00** | | | | | | | **10.123.700.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.667.842.143,00** | | | | | | | **10.123.700.000,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **9.667.842.143,00** | | | | | | | **10.123.700.000,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **5.649.480.643,00** | | | | | | | **6.715.700.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.649.480.643,00** | - | - | - | - | - | - | **6.715.700.000,00** | - |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 31.520.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 34.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.955.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.225.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 11.340.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 12 Data | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.647.022.143,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.667.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 700 Orang/bulan | 4.492.842.143,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 147.480.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 10 Laporan | 2.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.150.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.575.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.700.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 10 Dokumen | 1.575.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 55 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 330.663.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 250.700.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.555.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 61.430.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 51.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.701.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.200.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 230.477.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 152.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 354.300.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 385.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 136.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 185.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 156.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.649.480.643,00** | - | - | - | - | - | - | **6.715.700.000,00** | - |
| | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | 61.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.649.480.643,00** | - | - | - | - | - | - | **6.715.700.000,00** | - |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 192.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 263.300.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 189.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 260.800.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 61.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 83.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 31.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 33 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 11.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | **-** | **400.599.000,00** | | | | | | | **885.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat Rentan yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Mitigasi Bencana ]** | **Persentase kelompok masyarakat rentan (misalnya lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin) yang mengikuti pelatihan dan kegiatan mitigasi serta pemberdayaan sosial terkait bencana. Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.01 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | - | - | | | - | 35.501.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.01.0004 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 25 Keluarga | 35.501.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan yang disalurkan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang mendapatkan layanan (bantuan dan pelatihan) sesuai SOP waktu, prosedur, dan kualitas, dengan target minimal 60 % dalam 1 tahun.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan sosial yang melibatkan pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang berpartisipasi dalam minimal satu kegiatan pemberdayaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda rentan sosial yang diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif. ]** | **Persentase pemuda dari kelompok rentan sosial yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya dalam 6 bulan terhadap total pemuda penerima bantuan dalam tahun berjalan. Minimal 70 % diakhir tahun.** | **90** | **50** | **50** | **70** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase keluarga miskin peserta program pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan penghasilan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pengelolaan gizi keluarga untuk mencegah stunting pada anak. ]** | **Persentase keluarga miskin penerima pelatihan pengelolaan gizi keluarga dengan target minimal 55 % pada akhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berdaya secara sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan. ]** | **Persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami peningkatan penghasilan atau kemandirian sosial dalam 12 bulan setelah mengikuti program pemberdayaan sosial. Minimal 5 % diakhir tahun** | **9** | **2** | **2** | **5** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketahanan sosial kelompok rentan melalui pemberdayaan sosial yang mendukung stabilitas daya beli masyarakat. ]** | **Persentase kelompok rentan yang memperoleh akses bantuan pemberdayaan sosial untuk mendukung daya beli terhadap kebutuhan pokok. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kemandirian dan peran serta kelompok rentan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. ]** | **Persentase kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin) yang terakses program pemberdayaan sosial berbasis kesehatan.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya ketahanan sosial kelompok rentan melalui pemberdayaan sosial yang mendukung stabilitas daya beli masyarakat. ]** | **Persentase kelompok rentan yang memperoleh akses bantuan pemberdayaan sosial untuk mendukung daya beli terhadap kebutuhan pokok. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 365.098.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 860.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Keluarga | 13.140.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 270.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase anak pada keluarga rentan yang terpenuhi hak pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraannya melalui penguatan kapasitas keluarga ] | Persentase anak dari keluarga rentan sosial yang mendapatkan layanan pemberdayaan keluarga (seperti pelatihan pengasuhan, bantuan sosial produktif, dan pendampingan keluarga ramah anak). Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 40 | 40 | 50 | 400.599.000,00 | - | - | - | - | - | - | 885.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase layanan pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan yang disalurkan sesuai standar pelayanan publik. ] | Persentase penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang mendapatkan layanan (bantuan dan pelatihan) sesuai SOP waktu, prosedur, dan kualitas, dengan target minimal 60 % dalam 1 tahun. | 80 | 55 | 55 | 60 | 400.599.000,00 | - | - | - | - | - | - | 885.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan sosial yang melibatkan pemuda secara aktif ] | Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang berpartisipasi dalam minimal satu kegiatan pemberdayaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun | 75 | 55 | 55 | 60 | 400.599.000,00 | - | - | - | - | - | - | 885.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pemuda rentan sosial yang diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif. ] | Persentase pemuda dari kelompok rentan sosial yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya dalam 6 bulan terhadap total pemuda penerima bantuan dalam tahun berjalan. Minimal 70 % diakhir tahun. | 90 | 50 | 50 | 70 | 400.599.000,00 | - | - | - | - | - | - | 885.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam 12 bulan. ] | Persentase keluarga miskin peserta program pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan penghasilan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 400.599.000,00 | - | - | - | - | - | - | 885.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pengelolaan gizi keluarga untuk mencegah stunting pada anak. ] | Persentase keluarga miskin penerima pelatihan pengelolaan gizi keluarga dengan target minimal 55 % pada akhir tahun | 75 | 50 | 50 | 55 | 400.599.000,00 | - | - | - | - | - | - | 885.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berdaya secara sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan. ]** | **Persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami peningkatan penghasilan atau kemandirian sosial dalam 12 bulan setelah mengikuti program pemberdayaan sosial. Minimal 5 % diakhir tahun** | **9** | **2** | **2** | **5** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda rentan sosial yang diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif. ]** | **Persentase pemuda dari kelompok rentan sosial yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya dalam 6 bulan terhadap total pemuda penerima bantuan dalam tahun berjalan. Minimal 70 % diakhir tahun.** | **90** | **50** | **50** | **70** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Lembaga | 105.797.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 270.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketahanan sosial kelompok rentan melalui pemberdayaan sosial yang mendukung stabilitas daya beli masyarakat. ]** | **Persentase kelompok rentan yang memperoleh akses bantuan pemberdayaan sosial untuk mendukung daya beli terhadap kebutuhan pokok. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kemandirian dan peran serta kelompok rentan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. ]** | **Persentase kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin) yang terakses program pemberdayaan sosial berbasis kesehatan.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase keluarga miskin peserta program pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan penghasilan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan yang disalurkan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang mendapatkan layanan (bantuan dan pelatihan) sesuai SOP waktu, prosedur, dan kualitas, dengan target minimal 60 % dalam 1 tahun.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan sosial yang melibatkan pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang berpartisipasi dalam minimal satu kegiatan pemberdayaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat Rentan yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Mitigasi Bencana ]** | **Persentase kelompok masyarakat rentan (misalnya lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin) yang mengikuti pelatihan dan kegiatan mitigasi serta pemberdayaan sosial terkait bencana. Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kemandirian dan peran serta kelompok rentan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. ]** | **Persentase kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin) yang terakses program pemberdayaan sosial berbasis kesehatan.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.03.0010 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial* | | | | 50 Orang | 20.925.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat Rentan yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Mitigasi Bencana ]** | **Persentase kelompok masyarakat rentan (misalnya lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin) yang mengikuti pelatihan dan kegiatan mitigasi serta pemberdayaan sosial terkait bencana. Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak pada keluarga rentan yang terpenuhi hak pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraannya melalui penguatan kapasitas keluarga ]** | **Persentase anak dari keluarga rentan sosial yang mendapatkan layanan pemberdayaan keluarga (seperti pelatihan pengasuhan, bantuan sosial produktif, dan pendampingan keluarga ramah anak). Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 35 Orang | 13.984.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan sosial yang melibatkan pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang berpartisipasi dalam minimal satu kegiatan pemberdayaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketahanan sosial kelompok rentan melalui pemberdayaan sosial yang mendukung stabilitas daya beli masyarakat. ]** | **Persentase kelompok rentan yang memperoleh akses bantuan pemberdayaan sosial untuk mendukung daya beli terhadap kebutuhan pokok. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan sosial yang melibatkan pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang berpartisipasi dalam minimal satu kegiatan pemberdayaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 14 Orang | 118.052.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda rentan sosial yang diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif. ]** | **Persentase pemuda dari kelompok rentan sosial yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya dalam 6 bulan terhadap total pemuda penerima bantuan dalam tahun berjalan. Minimal 70 % diakhir tahun.** | **90** | **50** | **50** | **70** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase keluarga miskin peserta program pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan penghasilan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pengelolaan gizi keluarga untuk mencegah stunting pada anak. ]** | **Persentase keluarga miskin penerima pelatihan pengelolaan gizi keluarga dengan target minimal 55 % pada akhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berdaya secara sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan. ]** | **Persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami peningkatan penghasilan atau kemandirian sosial dalam 12 bulan setelah mengikuti program pemberdayaan sosial. Minimal 5 % diakhir tahun** | **9** | **2** | **2** | **5** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat Rentan yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Mitigasi Bencana ]** | **Persentase kelompok masyarakat rentan (misalnya lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin) yang mengikuti pelatihan dan kegiatan mitigasi serta pemberdayaan sosial terkait bencana. Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketahanan sosial kelompok rentan melalui pemberdayaan sosial yang mendukung stabilitas daya beli masyarakat. ]** | **Persentase kelompok rentan yang memperoleh akses bantuan pemberdayaan sosial untuk mendukung daya beli terhadap kebutuhan pokok. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan yang disalurkan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang mendapatkan layanan (bantuan dan pelatihan) sesuai SOP waktu, prosedur, dan kualitas, dengan target minimal 60 % dalam 1 tahun.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketahanan sosial kelompok rentan melalui pemberdayaan sosial yang mendukung stabilitas daya beli masyarakat. ]** | **Persentase kelompok rentan yang memperoleh akses bantuan pemberdayaan sosial untuk mendukung daya beli terhadap kebutuhan pokok. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | 1.06.02.2.03.0015 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi* | | | | 30 Orang | 93.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 120.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase keluarga miskin peserta program pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan penghasilan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berdaya secara sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan. ]** | **Persentase keluarga dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami peningkatan penghasilan atau kemandirian sosial dalam 12 bulan setelah mengikuti program pemberdayaan sosial. Minimal 5 % diakhir tahun** | **9** | **2** | **2** | **5** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan yang disalurkan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang mendapatkan layanan (bantuan dan pelatihan) sesuai SOP waktu, prosedur, dan kualitas, dengan target minimal 60 % dalam 1 tahun.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan sosial yang melibatkan pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang berpartisipasi dalam minimal satu kegiatan pemberdayaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda rentan sosial yang diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif. ]** | **Persentase pemuda dari kelompok rentan sosial yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya dalam 6 bulan terhadap total pemuda penerima bantuan dalam tahun berjalan. Minimal 70 % diakhir tahun.** | **90** | **50** | **50** | **70** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pengelolaan gizi keluarga untuk mencegah stunting pada anak. ]** | **Persentase keluarga miskin penerima pelatihan pengelolaan gizi keluarga dengan target minimal 55 % pada akhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat Rentan yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Mitigasi Bencana ]** | **Persentase kelompok masyarakat rentan (misalnya lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin) yang mengikuti pelatihan dan kegiatan mitigasi serta pemberdayaan sosial terkait bencana. Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kemandirian dan peran serta kelompok rentan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. ]** | **Persentase kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin) yang terakses program pemberdayaan sosial berbasis kesehatan.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **400.599.000,00** | - | - | - | - | - | - | **885.000.000,00** | - |
| 3. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | **-** | **174.700.000,00** | | | | | | | **408.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | | | - | 147.290.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 333.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 140 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 15.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak balita dengan status sosial rentan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial terpadu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang optimal. ]** | **Persentase anak balita sosial rentan yang menerima layanan rehabilitasi sosial terpadu dengan fokus pada pemenuhan gizi minimal 75 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **75** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 140 Orang | 23.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 22 Orang | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 30.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 42.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 35 Orang | 22.640.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 24.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak balita dengan status sosial rentan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial terpadu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang optimal. ]** | **Persentase anak balita sosial rentan yang menerima layanan rehabilitasi sosial terpadu dengan fokus pada pemenuhan gizi minimal 75 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **75** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima layanan rehabilitasi sosial yang berhasil mandiri secara ekonomi dalam 12 bulan. ]** | **Persentase penerima layanan rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 75 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 7.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima layanan rehabilitasi sosial yang berhasil mandiri secara ekonomi dalam 12 bulan. ]** | **Persentase penerima layanan rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 75 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Orang | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.01.0017 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak balita dengan status sosial rentan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial terpadu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang optimal. ]** | **Persentase anak balita sosial rentan yang menerima layanan rehabilitasi sosial terpadu dengan fokus pada pemenuhan gizi minimal 75 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **75** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya untuk pemenuhan hak hidup layak dan perlindungan. ]** | **Persentase anak yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial (anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dsb.) yang mendapatkan intervensi rehabilitasi sosial sesuai SPM. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | - | | | - | 27.410.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 74.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 3.276.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.02.0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Orang | 3.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 7.500.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima layanan rehabilitasi sosial yang berhasil mencapai kemandirian sosial sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima layanan rehabilitasi sosial yang mencapai kemandirian sosial minimal 50 % dalam waktu 6 bulan setelah program dalam 1 tahun.** | **70** | **20** | **20** | **50** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berhasil direhabilitasi dan diberdayakan secara sosial dan ekonomi. ]** | **Persentase PMKS dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menyelesaikan program rehabilitasi sosial dan menjalani kegiatan ekonomi produktif dalam 12 bulan. Minimal 55 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan sosial bagi penerima rehabilitasi sosial. ]** | **Persentase penerima rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan fungsi sosial dan kesehatan setelah program rehabilitasi.** | **80** | **55** | **55** | **60** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **174.700.000,00** | - | - | - | - | - | - | **408.000.000,00** | - |
| | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 13.484.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | **-** | **3.064.212.500,00** | | | | | | | **1.325.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat rentan yang terlindungi melalui program jaminan sosial dan kesehatan aktif. ]** | **Persentase masyarakat rentan yang terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan sosial dan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 70% diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 3.064.212.500,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 1.325.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 52961 Orang | 550.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 600.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan. ]** | **Persentase penduduk miskin dan rentan yang terdaftar dan mendapatkan manfaat program jaminan sosial kesehatan.** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan program jaminan sosial dasar dalam 12 bulan. ]** | **persentase keluarga miskin yang mengalami peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial secara berkelanjutan. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang terdaftar aktif dan menerima manfaat dari minimal satu skema jaminan sosial dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50% diakhir tahun** | **80** | **45** | **45** | **50** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang mendapatkan layanan tepat waktu dan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang menerima layanan sesuai waktu dan kualitas minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **60** | **60** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan program jaminan sosial dasar dalam 12 bulan. ]** | **persentase keluarga miskin yang mengalami peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 52961 Orang | 2.060.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 325.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima perlindungan dan jaminan sosial yang memperoleh dukungan ekonomi stabil untuk mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat rentan. ]** | **Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa mengalami tekanan inflasi minimal 70 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan. ]** | **Persentase penduduk miskin dan rentan yang terdaftar dan mendapatkan manfaat program jaminan sosial kesehatan.** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga penerima manfaat jaminan sosial yang mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase keluarga penerima manfaat jaminan sosial yang melaporkan peningkatan pengeluaran per kapita minimal 5 % dalam satu tahun mencapai minimal 35 %.** | **55** | **20** | **20** | **35** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima perlindungan dan jaminan sosial yang memperoleh dukungan ekonomi stabil untuk mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat rentan. ]** | **Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa mengalami tekanan inflasi minimal 70 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 52961 Orang | 385.968.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial secara berkelanjutan. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang terdaftar aktif dan menerima manfaat dari minimal satu skema jaminan sosial dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50% diakhir tahun** | **80** | **45** | **45** | **50** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat rentan yang terlindungi melalui program jaminan sosial dan kesehatan aktif. ]** | **Persentase masyarakat rentan yang terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan sosial dan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 70% diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga penerima manfaat jaminan sosial yang mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase keluarga penerima manfaat jaminan sosial yang melaporkan peningkatan pengeluaran per kapita minimal 5 % dalam satu tahun mencapai minimal 35 %.** | **55** | **20** | **20** | **35** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan program jaminan sosial dasar dalam 12 bulan. ]** | **persentase keluarga miskin yang mengalami peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang mendapatkan layanan tepat waktu dan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang menerima layanan sesuai waktu dan kualitas minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **60** | **60** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan. ]** | **Persentase penduduk miskin dan rentan yang terdaftar dan mendapatkan manfaat program jaminan sosial kesehatan.** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan* | | | | 20322 Usulan | 26.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang mendapatkan layanan tepat waktu dan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang menerima layanan sesuai waktu dan kualitas minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **60** | **60** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat rentan yang terlindungi melalui program jaminan sosial dan kesehatan aktif. ]** | **Persentase masyarakat rentan yang terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan sosial dan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 70% diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial secara berkelanjutan. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang terdaftar aktif dan menerima manfaat dari minimal satu skema jaminan sosial dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50% diakhir tahun** | **80** | **45** | **45** | **50** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapatkan program jaminan sosial dasar dalam 12 bulan. ]** | **persentase keluarga miskin yang mengalami peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan minimal 20% dalam satu tahun, Minimal 60 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang mendapatkan layanan tepat waktu dan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial yang menerima layanan sesuai waktu dan kualitas minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **60** | **60** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | 1.06.05.2.02.0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 52961 Orang | 41.994.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerima perlindungan dan jaminan sosial yang memperoleh dukungan ekonomi stabil untuk mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat rentan. ]** | **Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa mengalami tekanan inflasi minimal 70 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga penerima manfaat jaminan sosial yang mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase keluarga penerima manfaat jaminan sosial yang melaporkan peningkatan pengeluaran per kapita minimal 5 % dalam satu tahun mencapai minimal 35 %.** | **55** | **20** | **20** | **35** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial secara berkelanjutan. ]** | **Persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang terdaftar aktif dan menerima manfaat dari minimal satu skema jaminan sosial dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50% diakhir tahun** | **80** | **45** | **45** | **50** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat rentan yang terlindungi melalui program jaminan sosial dan kesehatan aktif. ]** | **Persentase masyarakat rentan yang terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan sosial dan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 70% diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **70** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan. ]** | **Persentase penduduk miskin dan rentan yang terdaftar dan mendapatkan manfaat program jaminan sosial kesehatan.** | **75** | **50** | **50** | **55** | **3.064.212.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.325.000.000,00** | - |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | **-** | **356.850.000,00** | | | | | | | **770.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase balita terdampak bencana yang mendapatkan bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat tepat waktu guna mencegah stunting. ]** | **Persentase balita terdampak bencana yang menerima bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat minimal 85 % dalam waktu 2 minggu setelah bencana terjadi pada tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 102.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 470.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2100 Orang | 41.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 201.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pemulihan pasca bencana dan mampu kembali beraktivitas ekonomi dalam 6 bulan setelah bencana. ]** | **Persentase masyarakat miskin korban bencana yang mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga minimal 30% dalam 6 bulan setelah menerima bantuan pemulihan, Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara tepat waktu. ]** | **Persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima bantuan pemulihan sosial ekonomi dalam waktu maksimal 30 hari setelah bencana terjadi. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat penanganan bencana untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga kebutuhan pokok. ]** | **Persentase wilayah terdampak bencana yang tertangani dalam waktu <= 7 hari untuk mencegah gangguan distribusi barang kebutuhan pokok. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **50** | **50** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara tepat waktu. ]** | **Persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima bantuan pemulihan sosial ekonomi dalam waktu maksimal 30 hari setelah bencana terjadi. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1000 Orang | 51.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 152.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase balita terdampak bencana yang mendapatkan bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat tepat waktu guna mencegah stunting. ]** | **Persentase balita terdampak bencana yang menerima bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat minimal 85 % dalam waktu 2 minggu setelah bencana terjadi pada tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pemulihan pasca bencana dan mampu kembali beraktivitas ekonomi dalam 6 bulan setelah bencana. ]** | **Persentase masyarakat miskin korban bencana yang mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga minimal 30% dalam 6 bulan setelah menerima bantuan pemulihan, Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat penanganan bencana untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga kebutuhan pokok. ]** | **Persentase wilayah terdampak bencana yang tertangani dalam waktu <= 7 hari untuk mencegah gangguan distribusi barang kebutuhan pokok. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **50** | **50** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara tepat waktu. ]** | **Persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima bantuan pemulihan sosial ekonomi dalam waktu maksimal 30 hari setelah bencana terjadi. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 150 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 7.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat penanganan bencana untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga kebutuhan pokok. ]** | **Persentase wilayah terdampak bencana yang tertangani dalam waktu <= 7 hari untuk mencegah gangguan distribusi barang kebutuhan pokok. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **50** | **50** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 9.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase balita terdampak bencana yang mendapatkan bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat tepat waktu guna mencegah stunting. ]** | **Persentase balita terdampak bencana yang menerima bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat minimal 85 % dalam waktu 2 minggu setelah bencana terjadi pada tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pemulihan pasca bencana dan mampu kembali beraktivitas ekonomi dalam 6 bulan setelah bencana. ]** | **Persentase masyarakat miskin korban bencana yang mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga minimal 30% dalam 6 bulan setelah menerima bantuan pemulihan, Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara tepat waktu. ]** | **Persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima bantuan pemulihan sosial ekonomi dalam waktu maksimal 30 hari setelah bencana terjadi. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pemulihan pasca bencana dan mampu kembali beraktivitas ekonomi dalam 6 bulan setelah bencana. ]** | **Persentase masyarakat miskin korban bencana yang mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga minimal 30% dalam 6 bulan setelah menerima bantuan pemulihan, Minimal 65 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 1.06.06.2.01.0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1000 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase balita terdampak bencana yang mendapatkan bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat tepat waktu guna mencegah stunting. ]** | **Persentase balita terdampak bencana yang menerima bantuan gizi dan layanan kesehatan darurat minimal 85 % dalam waktu 2 minggu setelah bencana terjadi pada tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara tepat waktu. ]** | **Persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima bantuan pemulihan sosial ekonomi dalam waktu maksimal 30 hari setelah bencana terjadi. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat penanganan bencana untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga kebutuhan pokok. ]** | **Persentase wilayah terdampak bencana yang tertangani dalam waktu <= 7 hari untuk mencegah gangguan distribusi barang kebutuhan pokok. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **50** | **50** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penerapan Rencana Tanggap Darurat Bencana oleh OPD dan Masyarakat ]** | **Persentase OPD dan kelompok masyarakat di wilayah rawan bencana yang memiliki dan mengimplementasikan rencana tanggap darurat bencana. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 254.850.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Kampung | 28.770.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi secara tepat waktu. ]** | **Persentase masyarakat terdampak bencana dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang menerima bantuan pemulihan sosial ekonomi dalam waktu maksimal 30 hari setelah bencana terjadi. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesiapsiagaan dan respons cepat penanganan bencana untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga kebutuhan pokok. ]** | **Persentase wilayah terdampak bencana yang tertangani dalam waktu <= 7 hari untuk mencegah gangguan distribusi barang kebutuhan pokok. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **50** | **50** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 226.079.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penerapan Rencana Tanggap Darurat Bencana oleh OPD dan Masyarakat ]** | **Persentase OPD dan kelompok masyarakat di wilayah rawan bencana yang memiliki dan mengimplementasikan rencana tanggap darurat bencana. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **356.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| 6. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | **-** | **22.000.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **20.000.000,00** | - |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 22.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 5 Orang | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0005 | Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 150 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | **4.196.793.783,00** | | | | | | | **5.005.530.557,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.089.203.783,00** | | | | | | | **4.881.059.807,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **4.089.203.783,00** | | | | | | | **4.881.059.807,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **3.107.090.783,00** | | | | | | | **3.851.692.907,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna. ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.107.090.783,00** | - | - | - | - | - | - | **3.851.692.907,00** | - |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 89.142.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 167.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 7.160.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 6.555.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 6.330.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 7.747.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 7.883.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 9.545.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 29.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 6.281.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 2 Dokumen | 26.128.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 26.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 2 Data | 5.906.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 2 Dokumen | 5.606.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.207.995.283,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.070.123.557,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 78 Orang/bulan | 2.046.807.283,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.907.623.557,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 42 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 139.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 4.251.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 2.551.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4.386.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 24.951.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 24.951.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 34.046.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 89.400.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1.146.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 55.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 78 Paket | 15.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 13.900.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 6.112.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 5.006.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 6.282.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 362.286.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 242.679.500,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.530.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 9.597.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.624.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 70.677.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 23.214.500,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 14.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 0 Laporan | 34.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 27.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 5 Laporan | 222.282.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 128.841.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 126.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 151.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.107.090.783,00** | - | - | - | - | - | - | **3.851.692.907,00** | - |
| | 2.07.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 114.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 120.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna. ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.107.090.783,00** | - | - | - | - | - | - | **3.851.692.907,00** | - |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 75.400.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 65.400.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 2.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 29.100.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 61.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.300.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 186.770.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 60.089.850,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 36.770.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.089.850,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.107.090.783,00** | - | - | - | - | - | - | **3.851.692.907,00** | - |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna. ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.107.090.783,00** | - | - | - | - | - | - | **3.851.692.907,00** | - |
| | 2.07.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | **-** | **12.334.000,00** | | | | | | | **16.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana tenaga kerja daerah yang memuat strategi pengembangan wirausaha pemuda. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja daerah (RTK/RTTK) yang mengintegrasikan data, analisis, dan strategi pengembangan wirausaha pemuda terhadap total dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun dalam tahun berjalan.** | **50** | **20** | **20** | **30** | **12.334.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | - | | | - | 12.334.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 16.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 12.334.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 16.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Industri Investasi. ]** | **Persentase tenaga kerja terampil yang telah mengikuti pelatihan dan terserap dalam sektor investasi dari total kebutuhan tenaga kerja terampil di daerah, dengan target minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **12.334.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja baru yang ditempatkan di sektor jasa sesuai hasil perencanaan tenaga kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja baru yang terserap di sektor jasa dalam waktu 6 bulan setelah selesai pencatatan kebutuhan, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **12.334.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan melalui perencanaan tenaga kerja yang efektif. ]** | **Persentase tenaga kerja baru yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dalam 3 bulan pertama setelah memasuki pasar kerja berdasarkan data perencanaan tenaga kerja tahunan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **60** | **12.334.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana kebutuhan tenaga kerja yang akurat dan terpenuhi sesuai dengan kondisi pasar kerja. ]** | **Persentase rencana kebutuhan tenaga kerja yang disusun dan diadopsi oleh pemangku kepentingan sesuai data pasar kerja tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **12.334.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan vokasi yang terserap di sektor produktif sesuai perencanaan tenaga kerja daerah. ]** | **Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif sesuai kebutuhan daerah dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi.** | **50** | **20** | **20** | **30** | **12.334.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.500.000,00** | - |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | **-** | **242.324.000,00** | | | | | | | **319.116.900,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja UMKM yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Digital untuk Operasional Bisnis. ]** | **Persentase tenaga kerja UMKM yang mengikuti pelatihan digitalisasi (e-commerce, pemasaran digital, manajemen aplikasi usaha) terhadap total peserta pelatihan kerja. minimal 60 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **60** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | - | | | - | 169.810.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 225.976.900,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 50 Orang | 99.025.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 64.476.900,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja terlatih di sektor pangan strategis untuk menjaga stabilitas produksi dan pasokan. ]** | **Persentase tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja berbasis sektor pangan strategis (pertanian, pengolahan, logistik), Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi dan peningkatan produktivitas kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja ekonomi kreatif yang lulus pelatihan bersertifikat dan mengalami peningkatan produktivitas (misalnya output kerja/produksi per tenaga kerja) terhadap total tenaga kerja yang dilatih. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang Mendukung Realisasi Investasi Daerah. ]** | **Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja dan terserap di sektor investasi dari total peserta pelatihan, dengan target minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja terlatih yang diserap pada industri pengolahan. ]** | **Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan dalam waktu <=6 bulan setelah pelatihan, Minimal 40 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja terlatih di sektor pariwisata yang terserap pada unit usaha pariwisata lokal. ]** | **Persentase lulusan pelatihan kerja bidang pariwisata yang bekerja di sektor usaha pariwisata lokal dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase peserta pelatihan kerja yang terserap ke pasar kerja dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan. ]** | **Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja atau berwirausaha dalam kurun waktu maksimal 6 bulan pasca pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja miskin yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja dari keluarga miskin yang terserap ke dunia kerja atau wirausaha meningkatMinimal 70 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang mengikuti pelatihan berbasis kewirausahaan. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja usia 16–30 tahun yang mengikuti pelatihan kewirausahaan terhadap total peserta pelatihan kerja dalam tahun berjalan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja dan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas sektor jasa. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja yang berhasil meningkatkan produktivitas kerja di sektor jasa minimal 10 % dalam 6 bulan setelah pelatihan.** | **30** | **5** | **5** | **10** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja yang lulus dan memperoleh sertifikasi kompetensi serta merasa puas, minimal 60 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **60** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja terlatih yang mengalami peningkatan penghasilan dalam 12 bulan setelah mengikuti pelatihan kerja. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja yang melaporkan peningkatan penghasilan minimal 5 % dalam satu tahun mencapai minimal 50 %.** | **70** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan pendapatan setelah mengikuti pelatihan kerja dan produktivitas. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja yang mengalami kenaikan pendapatan minimal 10% dalam 6 bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja terlatih yang mengalami peningkatan penghasilan dalam 12 bulan setelah mengikuti pelatihan kerja. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja yang melaporkan peningkatan penghasilan minimal 5 % dalam satu tahun mencapai minimal 50 %.** | **70** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 1 Lembaga | 9.410.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang Mendukung Realisasi Investasi Daerah. ]** | **Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja dan terserap di sektor investasi dari total peserta pelatihan, dengan target minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja UMKM yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Digital untuk Operasional Bisnis. ]** | **Persentase tenaga kerja UMKM yang mengikuti pelatihan digitalisasi (e-commerce, pemasaran digital, manajemen aplikasi usaha) terhadap total peserta pelatihan kerja. minimal 60 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **60** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | 2.07.03.2.01.0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n* | | | | 50 Orang | 61.375.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 150.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan vokasi yang mengikuti pelatihan kerja dan berhasil memperoleh pekerjaan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus. ]** | **Persentase lulusan vokasi yang menyelesaikan pelatihan kerja dan terserap di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **55** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja terlatih di sektor pariwisata yang terserap pada unit usaha pariwisata lokal. ]** | **Persentase lulusan pelatihan kerja bidang pariwisata yang bekerja di sektor usaha pariwisata lokal dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja miskin yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja dari keluarga miskin yang terserap ke dunia kerja atau wirausaha meningkatMinimal 70 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | - | | | - | 11.055.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 50.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 5 Lembaga | 11.055.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | - | - | | | - | 24.229.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 21.640.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi* | | | | 10 Perizinan | 24.229.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 21.640.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja usia produktif dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh pekerjaan atau mengalami peningkatan pendapatan dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | - | - | | | - | 14.331.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 10.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | 2 Perusahaan | 14.331.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi dan peningkatan produktivitas kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja ekonomi kreatif yang lulus pelatihan bersertifikat dan mengalami peningkatan produktivitas (misalnya output kerja/produksi per tenaga kerja) terhadap total tenaga kerja yang dilatih. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **50** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 22.899.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 10.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 22.899.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan pendapatan setelah mengikuti pelatihan kerja dan produktivitas. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja yang mengalami kenaikan pendapatan minimal 10% dalam 6 bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja usia produktif dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar. ]** | **Persentase peserta pelatihan kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh pekerjaan atau mengalami peningkatan pendapatan dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **242.324.000,00** | - | - | - | - | - | - | **319.116.900,00** | - |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | **-** | **284.528.000,00** | | | | | | | **166.420.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sektor jasa melalui program penempatan kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di sektor jasa minimal 40 % dari total peserta program penempatan kerja dalam satu tahun.** | **60** | **20** | **20** | **40** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 102.118.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 79.392.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 100 Orang | 12.968.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 17.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Sektor Investasi Daerah. ]** | **Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di perusahaan/industri investasi dari total tenaga kerja yang difasilitasi penempatannya, dengan target minimal 40 % pada akhir tahun** | **60** | **20** | **20** | **40** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang ditempatkan pada unit usaha pariwisata formal dan informal. ]** | **Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang berhasil ditempatkan melalui fasilitasi penempatan kerja oleh pemerintah daerah per tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berhasil ditempatkan pada pekerjaan formal sesuai keterampilan. ] | Persentase tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang berhasil mendapatkan pekerjaan formal dalam waktu 3 bulan setelah mengikuti program penempatan. Minimal 40 % diakhir tahun | 60 | 20 | 20 | 40 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan penempatan sesuai kompetensi dan standar pelayanan publik. ] | Persentase pengguna layanan penempatan tenaga kerja yang memberikan nilai kepuasan minimal “baik” pada survei indeks pelayanan publik, dengan target mencapai 50 % pada akhir tahun | 90 | 40 | 40 | 50 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan pada lowongan kerja sesuai kompetensi. ] | Persentase pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan di dunia kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pelatihan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun | 90 | 40 | 40 | 50 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pemuda yang ditempatkan pada sektor kerja mandiri/usaha sendiri. ] | Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang terdata melalui layanan penempatan kerja sebagai pelaku usaha baru terhadap total pemuda yang ditempatkan dalam tahun berjalan. Minimal 60 % diakhir tahun | 80 | 55 | 55 | 60 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase lulusan vokasi yang ditempatkan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus. ] | Persentase lulusan vokasi yang memperoleh pekerjaan melalui layanan penempatan tenaga kerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi. Minimal 70 % setiap tahunnya | 90 | 60 | 60 | 70 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan mengalami peningkatan pendapatan dalam 12 bulan ke depan. ] | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan melaporkan peningkatan pendapatan minimal 10 % dalam satu tahun mencapai minimal 60 %. | 95 | 50 | 50 | 60 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada pekerjaan dengan penghasilan di atas upah minimum regional. ] | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan menerima penghasilan minimal 5 % di atas upah minimum regional. Minimal 5 % diakhir tahun | 90 | 40 | 40 | 50 | 284.528.000,00 | - | - | - | - | - | - | 166.420.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada sektor industri pengolahan. ]** | **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di industri pengolahan terhadap total tenaga kerja yang ditempatkan, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sektor jasa melalui program penempatan kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di sektor jasa minimal 40 % dari total peserta program penempatan kerja dalam satu tahun.** | **60** | **20** | **20** | **40** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | 0 Orang | 76.816.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 46.892.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan vokasi yang ditempatkan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus. ]** | **Persentase lulusan vokasi yang memperoleh pekerjaan melalui layanan penempatan tenaga kerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi. Minimal 70 % setiap tahunnya** | **90** | **60** | **60** | **70** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan mengalami peningkatan pendapatan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan melaporkan peningkatan pendapatan minimal 10 % dalam satu tahun mencapai minimal 60 %.** | **95** | **50** | **50** | **60** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 20 Orang | 12.334.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan vokasi yang ditempatkan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus. ]** | **Persentase lulusan vokasi yang memperoleh pekerjaan melalui layanan penempatan tenaga kerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi. Minimal 70 % setiap tahunnya** | **90** | **60** | **60** | **70** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang ditempatkan pada sektor kerja mandiri/usaha sendiri. ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang terdata melalui layanan penempatan kerja sebagai pelaku usaha baru terhadap total pemuda yang ditempatkan dalam tahun berjalan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sektor jasa melalui program penempatan kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di sektor jasa minimal 40 % dari total peserta program penempatan kerja dalam satu tahun.** | **60** | **20** | **20** | **40** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan mengalami peningkatan pendapatan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan melaporkan peningkatan pendapatan minimal 10 % dalam satu tahun mencapai minimal 60 %.** | **95** | **50** | **50** | **60** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | - | | | - | 71.045.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 52.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 0 Orang | 71.045.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 52.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lulusan vokasi yang ditempatkan di sektor produktif dalam waktu 6 bulan setelah lulus. ]** | **Persentase lulusan vokasi yang memperoleh pekerjaan melalui layanan penempatan tenaga kerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total lulusan vokasi. Minimal 70 % setiap tahunnya** | **90** | **60** | **60** | **70** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Sektor Investasi Daerah. ]** | **Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di perusahaan/industri investasi dari total tenaga kerja yang difasilitasi penempatannya, dengan target minimal 40 % pada akhir tahun** | **60** | **20** | **20** | **40** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sektor jasa melalui program penempatan kerja. ]** | **Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di sektor jasa minimal 40 % dari total peserta program penempatan kerja dalam satu tahun.** | **60** | **20** | **20** | **40** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **284.528.000,00** | - | - | - | - | - | - | **166.420.000,00** | - |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 111.365.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 34.528.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 10 Orang | 53.115.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 19.967.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan* | | | | 10 Orang | 58.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 14.561.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | **-** | **442.927.000,00** | | | | | | | **527.330.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase kerja sama industri yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase perusahaan yang menjalin kerja sama penyerapan tenaga kerja vokasi terhadap total perusahaan mitra yang terdata. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 155.239.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | - | 126.642.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 75 Perusahaan | 58.410.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | | 51.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan melalui penguatan hubungan industrial yang kondusif. ]** | **Persentase pekerja di perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan setiap tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **60** | **60** | **70** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan industri pengolahan yang menerapkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. ]** | **Persentase perusahaan industri pengolahan yang tidak mengalami perselisihan hubungan industrial dalam 1 tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit aktif dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 100 Perusahaan | 57.595.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 51.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase kerja sama industri yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase perusahaan yang menjalin kerja sama penyerapan tenaga kerja vokasi terhadap total perusahaan mitra yang terdata. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan melalui penguatan hubungan industrial yang kondusif. ]** | **Persentase pekerja di perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan setiap tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **60** | **60** | **70** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan industri pengolahan yang menerapkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. ]** | **Persentase perusahaan industri pengolahan yang tidak mengalami perselisihan hubungan industrial dalam 1 tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 4 Laporan | 39.234.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 24.642.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase kerja sama industri yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase perusahaan yang menjalin kerja sama penyerapan tenaga kerja vokasi terhadap total perusahaan mitra yang terdata. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit aktif dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan melalui penguatan hubungan industrial yang kondusif. ]** | **Persentase pekerja di perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan setiap tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **60** | **60** | **70** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi dan penyelesaian damai. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 287.688.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | - | 400.688.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 9 Perkara | 83.640.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 70.001.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit aktif dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase sengketa hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi dalam waktu maksimal 30 hari kerja mencapai minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 9 Perkara | 46.914.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 91.687.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi dan penyelesaian damai. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit aktif dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi dan penyelesaian damai. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi* | | | | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 34.715.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 51.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit aktif dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 0 Lembaga | 62.954.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 52.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase sengketa hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi dalam waktu maksimal 30 hari kerja mencapai minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi dan penyelesaian damai. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase perusahaan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit aktif dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **442.927.000,00** | - | - | - | - | - | - | **527.330.000,00** | - |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | | | | 50 Orang | 59.465.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 135.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **107.590.000,00** | | | | | | | **124.470.750,00** | |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **107.590.000,00** | | | | | | | **124.470.750,00** | |
| 1. | **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | **-** | **60.993.000,00** | | | | | | | **86.470.750,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase kawasan transmigrasi yang memiliki dokumen perencanaan teknis dan spasial yang terpadu dan berkualitas. ]** | **Meningkatnya persentase kawasan transmigrasi yang dokumen perencanaannya selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan RPJMD, Minimal 50 % di akhir tahun** | **90** | **0** | **0** | **50** | **60.993.000,00** | - | - | - | - | - | - | **86.470.750,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.32.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | - | - | | | - | 60.993.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | - | 86.470.750,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain* | | | | 1 Dokumen | 51.623.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | | 15.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi* | | | | 1 Kawasan Transmigrasi | 9.370.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | | 70.970.750,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | **-** | **46.597.000,00** | | | | | | | **38.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46.597.000,00** | - | - | - | - | - | - | **38.000.000,00** | - |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 46.597.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | - | 38.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | | 16.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga transmigran dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memiliki akses terhadap sarana produktif dan peningkatan pendapatan. ]** | **Persentase keluarga transmigran dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 15% dalam 12 bulan setelah penataan kawasan transmigrasi. Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **0** | **0** | **10** | **46.597.000,00** | - | - | - | - | - | - | **38.000.000,00** | - |
| | 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan* | | | | 20 Kepala Keluarga | 22.828.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga transmigran miskin yang memiliki akses terhadap sarana dasar (perumahan layak, air bersih, dan listrik) dalam 12 bulan. ]** | **persentase keluarga transmigran miskin yang menikmati sarana dasar lengkap (perumahan layak, air bersih, dan listrik) minimal 60% dalam satu tahun, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **5** | **5** | **30** | **46.597.000,00** | - | - | - | - | - | - | **38.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penduduk transmigran yang memiliki pekerjaan produktif di kawasan transmigrasi. ]** | **Persentase penduduk transmigran yang terserap dalam kegiatan produktif atau berwirausaha dalam 12 bulan setelah penempatan di kawasan transmigrasi. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **0** | **0** | **50** | **46.597.000,00** | - | - | - | - | - | - | **38.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46.597.000,00** | - | - | - | - | - | - | **38.000.000,00** | - |
| | 3.32.03.2.01.0020 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi* | | | | 1 Lokasi | 23.769.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | - | | 11.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **17.558.077.578,00** | | | | | | | **19.276.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **17.558.077.578,00** | | | | | | | **19.276.000.000,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **10.287.000.578,00** | | | | | | | **11.236.000.000,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 persen** | **7.954.784.578,00** | | | | | | | **9.130.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 19 dokumen | 28.300.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen Dokumen | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan Laporan | 1.225.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1.225.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen Laporan administrasi keuangan* | - | | | 44 Dokumen | 6.686.995.978,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 8.075.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 70 Orang/bulan | 6.491.845.978,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 7.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 186.120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan Laporan | 5.830.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Yang terpelihara dengan baik* | - | | | 7 jenis | 14.380.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan Laporan | 14.380.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 70 Orang | 36.650.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 31 Paket | 31.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 5.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 7 jenis | 440.180.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 515.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.563.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 84.519.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 288.098.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah* | - | | | 7 jenis | 531.093.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 145.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 125.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 200.793.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 205.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan* | - | | | 12 Layanan | 114.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 165.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.954.784.578,00** | - | - | - | - | - | - | **9.130.000.000,00** | - |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 114.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barar=ng milik Daerah yang terpelihara dengan baik* | - | | | 7 jenis | 103.185.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | - | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 36.770.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 32.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 16.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 17.515.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | aparatur perempuan dan laki-laki | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | **77,21 persen** | **1.240.972.000,00** | | | | | | | **915.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan edukasi gizi berbasis kesetaraan gender untuk mencegah stunting. ]** | **Persentase ibu hamil dan menyusui yang mengikuti program edukasi gizi berbasis pengarusutamaan gender mencapai minimal 60 % pada tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **1.240.972.000,00** | - | - | - | - | - | - | **915.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 15 Lembaga | 119.992.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | - | 210.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG* | | | | 1 Laporan Laporan | 15.580.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.240.972.000,00** | - | - | - | - | - | - | **915.000.000,00** | - |
| | 2.08.02.2.01.0010 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi* | | | | 1 Dokumen Kebijakan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan edukasi gizi berbasis kesetaraan gender untuk mencegah stunting. ]** | **Persentase ibu hamil dan menyusui yang mengikuti program edukasi gizi berbasis pengarusutamaan gender mencapai minimal 60 % pada tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **1.240.972.000,00** | - | - | - | - | - | - | **915.000.000,00** | - |
| | 2.08.02.2.01.0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan* | | | | 15 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0012 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan Laporan | 88.612.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)* | | | | 15 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0014 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek* | | | | 100 Orang | 15.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.240.972.000,00** | - | - | - | - | - | - | **915.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 15 Lembaga | 1.120.980.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | - | 410.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi* | | | | 15 Lembaga | 57.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0005 | Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi* | | | | 1 Lembaga | 849.380.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi* | | | | 100 orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan  di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan* | | | | 100 Orang | 214.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah target Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 15 Lembaga | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | - | 295.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan* | | | | 15 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0008 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan* | | | | 1 Dokumen dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek* | | | | 80 orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0011 | mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi* | | | | 20 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | **undefined undefined** | **306.200.000,00** | | | | | | | **585.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah cakupan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 Orang | 41.200.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan | - | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0004 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 41.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota* | | | | 20 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Layanan | 207.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | - | 480.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0003 | &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 30 Orang | 8.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0004 | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota* | | | | 50 Orang | 28.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0005 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 orang | 99.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0006 | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 10.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 orang | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0009 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 orang | 38.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Perempuan korban kekerasan | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 Orang | 57.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | - | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan* | | | | 80 Orang | 57.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | **-** | **96.350.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 orang | 25.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan | - | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0008 | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Lembaga | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Ketersediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak* | - | | | 1 Layanan | 71.350.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | - | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03.0002 | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 12.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03.0004 | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 44.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03.0005 | Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | **100 persen** | **22.680.000,00** | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data* | - | | | 1 dokumen | 22.680.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | - | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 22.680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | **100 persen** | **514.064.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah ketersediaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 20 Lembaga | 99.074.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | - | 245.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0005 | Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 45 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0006 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 99.074.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah cakupan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak* | - | | | 100 Orang | 414.990.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | - | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek* | | | | 100 Orang | 12.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan Laporan | 28.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0009 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan* | | | | 20 Lembaga | 374.340.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | **100 persen** | **151.950.000,00** | | | | | | | **191.000.000,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah cakupan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 100 Orang | 17.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | - | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 9.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0011 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota* | | | | 1 Dokumen Kebijakan | 7.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus* | - | | | 1 Layanan | 96.150.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | - | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 39.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0009 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 48.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0015 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 9.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | masyarakat ( anak korban kekerasan) | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 20 Lembaga | 38.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan anak | - | 46.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah KIE Perlindungan khusus anak* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan anak | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0012 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan anak | | 1.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0013 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan anak | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0014 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan* | | | | 20 Lembaga | 38.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Lembaga Penyedia Layanan anak | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **7.271.077.000,00** | | | | | | | **8.040.000.000,00** | |
| 1. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | **-** | **72.912.000,00** | | | | | | | **190.000.000,00** | |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kebijakan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 72.912.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | - | 190.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana* | | | | 1 Laporan | 40.112.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0026 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk* | | | | 103 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0027 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 32.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | **-** | **4.885.187.000,00** | | | | | | | **6.390.000.000,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Jumlah Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal* | - | | | 1 Paket | 905.270.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | - | 1.675.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK* | | | | 12 Laporan | 194.220.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 900.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 31 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 14 Kecamatan Laporan | 230.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | 14 Kecamatan Laporan | 150.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 1 Dokumen | 330.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 20 Organisasi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Jumlah Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)* | - | | | 103 desa | 515.220.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | - | 1.040.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia* | | | | 14 Kecamatan Unit | 298.720.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 900.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 2060 Orang | 61.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 90.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | 1 Laporan | 154.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 32 Fasyankes | 2.456.910.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | - | 2.225.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 1 Laporan | 31.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | 61429 Orang | 734.240.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 900.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 14 Kecamatan Unit | 1.663.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING, DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 1 Laporan | 28.170.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Jumlah Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | - | | | 100 orang | 1.007.787.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | - | 1.450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DASHAT di Kampung KB* | | | | 48 Unit | 347.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 103 Kampung | 660.387.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 850.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | **-** | **2.312.978.000,00** | | | | | | | **1.460.000.000,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* | - | | | 1611 KK | 2.208.478.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | - | 1.410.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia* | | | | 1 Kegiatan | 55.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Laporan | 91.518.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 14 Kecamatan Unit | 138.160.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 906 Orang | 1.923.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* | - | | | 103 desa | 104.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | - | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | 1 laporan | 104.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | 1 laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat ( Perempuan dan Laki-laki) | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **46.662.462.397,00** | | | | | | | **18.689.012.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **46.662.462.397,00** | | | | | | | **18.689.012.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **46.662.462.397,00** | | | | | | | **18.689.012.000,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **7.648.250.547,00** | | | | | | | **7.404.712.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.648.250.547,00** | - | - | - | - | - | - | **7.404.712.000,00** | - |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 47.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 39.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 12 Data | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.870.455.047,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.612.962.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 73 Orang/bulan | 6.662.690.047,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.444.142.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 204.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 163.820.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.385.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 16 Laporan | 1.780.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 26.250.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 26.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 274.125.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 248.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.104.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 22.046.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.955.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 198.020.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 175.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 169.070.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 228.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 169.070.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 228.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 175.750.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 166.150.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 4.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.400.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 171.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 161.750.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.648.250.547,00** | - | - | - | - | - | - | **7.404.712.000,00** | - |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 85.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 80.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.648.250.547,00** | - | - | - | - | - | - | **7.404.712.000,00** | - |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **-** | **35.853.200,00** | | | | | | | **46.300.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35.853.200,00** | - | - | - | - | - | - | **46.300.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 35.853.200,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 46.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan* | | | | 1 Dokumen | 35.853.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 46.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **-** | **146.966.000,00** | | | | | | | **227.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran yang Mendukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase kegiatan pengendalian pencemaran (pengelolaan limbah B3, pengendalian emisi industri, rehabilitasi lahan kritis, dll.) yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 146.966.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 227.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 1 Dokumen | 6.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 42.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **[ Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. ]** | **Persentase lokasi pemantauan kualitas udara, air, dan tanah yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penanganan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diproses sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja sesuai SOP, dengan target >= 80 % per tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 30.106.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **[ Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. ]** | **Persentase lokasi pemantauan kualitas udara, air, dan tanah yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran yang Mendukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase kegiatan pengendalian pencemaran (pengelolaan limbah B3, pengendalian emisi industri, rehabilitasi lahan kritis, dll.) yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penanganan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diproses sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja sesuai SOP, dengan target >= 80 % per tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **[ Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. ]** | **Persentase lokasi pemantauan kualitas udara, air, dan tanah yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran yang Mendukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase kegiatan pengendalian pencemaran (pengelolaan limbah B3, pengendalian emisi industri, rehabilitasi lahan kritis, dll.) yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penanganan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diproses sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja sesuai SOP, dengan target >= 80 % per tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **[ Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. ]** | **Persentase lokasi pemantauan kualitas udara, air, dan tanah yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai standar.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **146.966.000,00** | - | - | - | - | - | - | **227.000.000,00** | - |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | **-** | **214.444.700,00** | | | | | | | **235.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kawasan Lindung dan Ekosistem Alami yang Dikelola Secara Berkelanjutan untuk Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase luas kawasan lindung dan ekosistem alami (hutan, mangrove, lahan gambut, dll.) yang dikelola secara berkelanjutan dan tercatat dalam program mitigasi emisi GRK terhadap total luas kawasan berpotensi mitigasi. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **214.444.700,00** | - | - | - | - | - | - | **235.000.000,00** | - |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 214.444.700,00 | | | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 235.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Ha | 106.460.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 175.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 1 Unit | 7.984.700,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | **-** | **15.280.000,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15.280.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.000.000,00** | - |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 15.280.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | | | | 1 Dokumen | 15.280.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | **-** | **51.569.500,00** | | | | | | | **115.000.000,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 51.569.500,00 | | | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup | - | - | 115.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0006 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD* | | | | 1 Orang | 8.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 5 Orang | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0010 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 100 Usaha/Kegiatan | 36.869.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | | **-** | **11.821.800,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui keberadaannya dan hak-haknya untuk berpartisipasi dalam izin lingkungan sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase permohonan pengakuan MHA yang diselesaikan tepat waktu (<= 60 hari kerja) sesuai SOP pelayanan publik, dengan target >= 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **95** | **11.821.800,00** | - | - | - | - | - | - | **15.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | - | - | | | - | 11.821.800,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | | | | 1 Dokumen | 11.821.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | **-** | **38.630.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Masyarakat yang Memiliki Pemahaman dan Perilaku Adaptif Terhadap Risiko Bencana Lingkungan setelah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. ]** | **Persentase peserta masyarakat yang mampu mengidentifikasi risiko bencana lingkungan dan melakukan tindakan mitigasi yang tepat berdasarkan hasil evaluasi pasca-pelatihan, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **38.630.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 38.630.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 13.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat* | | | | 100 Orang | 24.830.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | **-** | **136.361.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan melalui skema penghargaan lingkungan hidup. ]** | **Persentase komunitas/kelompok masyarakat yang mengikuti program penghargaan lingkungan hidup, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **136.361.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 136.361.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 10 Entitas | 136.361.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **-** | **12.241.000,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.241.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 12.241.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola* | | | | 12 Pengaduan | 6.041.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0011 | Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* | | | | 5 Orang | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 11. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | **-** | **38.351.044.650,00** | | | | | | | **10.451.000.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | - | - | | | - | 38.351.044.650,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 10.451.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 20 Kelompok | 136.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 126.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | | | | 50 Unit | 3.530.595.350,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 2.950.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 14.166.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **[ Meningkatnya pengelolaan sampah yang bersih, tertib, dan ramah lingkungan guna mendukung kesehatan masyarakat. ]** | **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.** | **80** | **30** | **30** | **40** | **38.351.044.650,00** | - | - | - | - | - | - | **10.451.000.000,00** | - |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | 40 Unit | 614.998.300,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38.351.044.650,00** | - | - | - | - | - | - | **10.451.000.000,00** | - |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | | | | 1 Laporan | 3.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 25550 Ton | 7.022.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 6.600.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0024 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | | | | 450 Ton | 13.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0028 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan* | | | | 1 Unit | 27.000.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0030 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | | | | 9500 Ton | 15.485.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN** | | | | | | **124.940.400,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **124.940.400,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **124.940.400,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **-** | **124.940.400,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 124.940.400,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 125.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | | | | 3 Paket | 74.940.400,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **8.101.928.586,00** | | | | | | | **8.505.200.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.101.928.586,00** | | | | | | | **8.505.200.000,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **8.101.928.586,00** | | | | | | | **8.505.200.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **6.475.223.086,00** | | | | | | | **6.732.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 45.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 3.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 4.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 42 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 6 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.530.131.786,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.673.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 62 Orang/bulan | 5.361.469.286,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 153.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 155.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 3 Laporan | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 10.812.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 13.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.372.500,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 1.372.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 88.125.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 100.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 24.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 62 Dokumen | 4.125.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 70 Orang | 59.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 65.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 406.993.800,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 442.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 25.104.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 28.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 76.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 15.854.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 34.997.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 38.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 36.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 31.440.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 36.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 35 Laporan | 187.248.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 185.250.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 180.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 116.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 69.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 128.400.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 136.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 17.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 107.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 110.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 109.750.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.475.223.086,00** | - | - | - | - | - | - | **6.732.200.000,00** | - |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 9 Unit | 49.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | **-** | **656.935.000,00** | | | | | | | **668.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **656.935.000,00** | - | - | - | - | - | - | **668.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | - | | | - | 111.135.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 123.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | | | | 1500 Dokumen | 19.614.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk* | | | | 500 Orang | 5.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 500 Laporan | 35.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 36.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | | | | 40000 Dokumen | 50.921.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 37.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 200000 Dokumen | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 37.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | - | | | - | 510.800.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 508.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 4 Laporan | 30.712.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk* | | | | 1800 Dokumen | 62.870.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 79.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk* | | | | 12 Laporan | 395.165.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 370.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk* | | | | 9 Laporan | 15.103.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 17.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0006 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk* | | | | 5 Dokumen | 6.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | **-** | **240.140.500,00** | | | | | | | **259.000.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | - | | | - | 146.112.500,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 158.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 40000 Dokumen | 72.812.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 79.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 5 Layanan | 38.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 39.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | - | | | - | 94.028.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 101.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam* | | | | 4 Laporan | 29.388.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 31.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 20 Laporan | 42.690.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil* | | | | 4 Laporan | 21.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | **-** | **659.560.000,00** | | | | | | | **772.000.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | - | | | - | 43.917.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 51.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 12 Dokumen | 11.262.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 14.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 7 Dokumen | 32.655.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 37.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | | | - | 595.243.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 696.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 3 Laporan | 555.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 650.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 150 Dokumen | 19.998.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 23.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan* | | | | 12 Dokumen | 20.045.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 23.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | | | - | 20.400.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 12 Laporan | 20.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | **-** | **70.070.000,00** | | | | | | | **74.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | - | | | - | 70.070.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 74.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 26.475.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 27.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 2 Dokumen | 43.595.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 47.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **9.033.620.081,00** | | | | | | | **13.447.475.783,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.033.620.081,00** | | | | | | | **13.447.475.783,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **9.033.620.081,00** | | | | | | | **13.447.475.783,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **6.296.603.481,00** | | | | | | | **6.400.875.783,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.296.603.481,00** | - | - | - | - | - | - | **6.400.875.783,00** | - |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan DPMD* | - | | | 33 Dokumen | 44.800.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 73.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 4.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 3.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 3.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 3.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 3.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 10.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 18.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 12 Data | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Berita Acara | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 3.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 4.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu* | | | | 5 Substansi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan* | | | | 2 Berita Acara | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 4.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 48 Dokumen | 5.315.926.481,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 4.961.775.783,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 50 Orang/bulan | 5.161.041.481,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 4.775.275.783,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 132.960.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 155.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 3.975.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 5 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 6.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 7.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 1.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 3.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 4 Dokumen | 25.400.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 6.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 1.525.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 1.525.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 1.525.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 1.525.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 28 Orang | 54.400.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 68.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 50 Unit | 3.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 25.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 50 Paket | 35.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 32.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 5.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang dilaksanakan* | - | | | 7 Jenis | 431.027.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 485.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 15.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 22.758.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 52.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 33.279.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 32.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 34.975.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 35.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 74.937.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 75.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 232.077.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 275.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 247.500.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 110.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 137.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 66.050.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | - | 357.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 2.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 15.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 32.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 63.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Dinas PMD | | 310.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 111.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 227.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 11.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.296.603.481,00** | - | - | - | - | - | - | **6.400.875.783,00** | - |
| | 2.13.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 82.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | **75 %** | **230.440.000,00** | | | | | | | **325.400.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang tinggal di desa dengan tata kelola wilayah yang mendukung pemenuhan hak dasar anak. ]** | **Persentase desa yang memiliki data kependudukan anak dan peta wilayah berbasis kebutuhan layanan dasar anak. Minimal 80 diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **230.440.000,00** | - | - | - | - | - | - | **325.400.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | *Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa* | - | | | 60 Desa | 230.440.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | - | 325.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa* | | | | 1 Desa | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | | 20.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya* | | | | 80 Desa | 36.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | | 46.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya* | | | | 80 Desa | 38.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa* | | | | 2 Desa | 48.804.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | | 56.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0005 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 49.236.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi* | | | | 1 Unit | 57.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Pengelola Lembaga Adat | | 71.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | **100 %** | **122.530.000,00** | | | | | | | **2.145.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa lokus stunting yang menjalin kerja sama antar desa dalam program percepatan penurunan stunting. ]** | **Persentase desa lokus stunting yang memiliki perjanjian kerja sama antardesa dalam penyediaan layanan kesehatan, pangan lokal, atau sanitasi meningkat dari 10 % menjadi 50 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **122.530.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.145.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Jumlah kerja sama antar desa yang difasilitasi dalam rangka pembangunan Desa* | - | | | 2 Kerjasama | 122.530.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Kelompok BKAD, Pihak Ketiga, Kelompok TMMD dan Masyarakat Kec. Mallawa | - | 2.145.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 53.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Kelompok BKAD, Pihak Ketiga, Kelompok TMMD dan Masyarakat Kec. Mallawa | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang mendapatkan akses layanan dasar melalui kerja sama antar desa. ]** | **Persentase desa yang bekerja sama dalam penyediaan layanan dasar ramah anak (pendidikan, kesehatan, atau perlindungan anak). Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **122.530.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.145.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa yang menjalin kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam satu tahun. ]** | **Persentase desa yang melaksanakan minimal satu bentuk kerja sama produktif (usaha bersama, BUMDes Bersama, atau kemitraan usaha) yang melibatkan warga miskin dan menghasilkan peningkatan pendapatan, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **122.530.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.145.000.000,00** | - |
| | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 33.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Kelompok BKAD, Pihak Ketiga, Kelompok TMMD dan Masyarakat Kec. Mallawa | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa yang menjalin kerja sama antardesa atau dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan layanan publik. ]** | **Persentase desa yang memiliki perjanjian kerja sama aktif dengan desa lain atau pihak ketiga dalam bidang layanan publik Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **40** | **40** | **50** | **122.530.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.145.000.000,00** | - |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 1 Dokumen | 36.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Kelompok BKAD, Pihak Ketiga, Kelompok TMMD dan Masyarakat Kec. Mallawa | | 2.030.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **50 %** | **604.218.600,00** | | | | | | | **2.600.300.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terdata dalam administrasi kependudukan desa secara lengkap dan mutakhir. ]** | **Persentase anak usia 0–18 tahun yang tercatat dalam data kependudukan desa dengan data identitas lengkap (nama, NIK, tanggal lahir, dan nama orang tua). Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **90** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku* | - | | | 40 Desa | 604.218.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | - | 2.600.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 66.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 85.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase warga desa yang puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. ]** | **Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**<br><br>**Persentase warga desa yang menyatakan puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100**<br><br>**95** | **10**<br><br>**50** | **20**<br><br>**50** | **40**<br><br>**80** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa* | | | | 1 Dokumen | 63.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terdata dalam administrasi kependudukan desa secara lengkap dan mutakhir. ]** | **Persentase anak usia 0–18 tahun yang tercatat dalam data kependudukan desa dengan data identitas lengkap (nama, NIK, tanggal lahir, dan nama orang tua). Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **90** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 34.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 35.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase warga desa yang puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. ]** | **Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**<br><br>**Persentase warga desa yang menyatakan puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100**<br><br>**95** | **10**<br><br>**50** | **20**<br><br>**50** | **40**<br><br>**80** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 1 Dokumen | 29.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 35.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 80 Orang | 59.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa* | | | | 1 Laporan | 21.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa* | | | | 1 Dokumen | 16.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 25.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | | | | 1 Dokumen | 68.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa* | | | | 64 Laporan | 79.367.600,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 1.900.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 1 Laporan | 13.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 20.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terdata dalam administrasi kependudukan desa secara lengkap dan mutakhir. ]** | **Persentase anak usia 0–18 tahun yang tercatat dalam data kependudukan desa dengan data identitas lengkap (nama, NIK, tanggal lahir, dan nama orang tua). Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **90** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase warga desa yang puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. ]** | **Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**<br><br>**Persentase warga desa yang menyatakan puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100**<br><br>**95** | **10**<br><br>**50** | **20**<br><br>**50** | **40**<br><br>**80** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 35.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 80 Orang | 14.150.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 35.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Desa | 39.911.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa* | | | | 1 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang terdata dalam administrasi kependudukan desa secara lengkap dan mutakhir. ]** | **Persentase anak usia 0–18 tahun yang tercatat dalam data kependudukan desa dengan data identitas lengkap (nama, NIK, tanggal lahir, dan nama orang tua). Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **90** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0017 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa* | | | | 1 Dokumen | 17.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase warga desa yang puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. ]** | **Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**<br><br>**Persentase warga desa yang menyatakan puas terhadap layanan administrasi pemerintahan desa. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100**<br><br>**95** | **10**<br><br>**50** | **20**<br><br>**50** | **40**<br><br>**80** | **604.218.600,00** | - | - | - | - | - | - | **2.600.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 1 Dokumen | 32.490.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Bumdes, Tokoh Masyarakat | | 75.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | **-** | **1.779.828.000,00** | | | | | | | **1.975.900.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif melaksanakan program kesehatan berbasis kearifan lokal.** | **95** | **50** | **50** | **80** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.779.828.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.975.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 20.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di desa. ]** | **Persentase desa lokus stunting yang memiliki lembaga kemasyarakatan dan/atau adat terlibat dalam edukasi dan pemantauan gizi balita meningkat dari 10 % menjadi 50 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 1 Dokumen | 40.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 71.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif menyelenggarakan kegiatan literasi berbasis budaya dan kearifan lokal. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total lembaga yang ada di wilayah sasaran. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 103 Lembaga | 37.720.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 86.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif dalam pemenuhan hak anak di tingkat desa/kelurahan. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang melaksanakan kegiatan perlindungan atau pemenuhan hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan dalam 1 tahun terakhir.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 100 Unit | 18.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 51.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang terlibat dalam program pemberdayaan pertanian dari total lembaga yang terdaftar, dengan target minimal 50 % dalam satu tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 1 Dokumen | 24.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata budaya dan ekowisata di daerah. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata budaya dan ekowisata dari total lembaga sasaran per tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase peran lembaga kemasyarakatan, adat, dan masyarakat hukum adat dalam pengembangan potensi jasa berbasis kearifan lokal. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang terlibat dalam program pengembangan sektor jasa (seperti pariwisata, kerajinan, atau jasa budaya), Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dan adat dalam mendukung pengembangan industri pengolahan berbasis kearifan lokal. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat yang terlibat aktif dalam program pengembangan industri pengolahan di tingkat desa/kecamatan, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 1 Laporan | 38.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam satu tahun. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan program atau kegiatan peningkatan pendapatan bagi warga miskin minimal satu kali dalam setahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 5.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif berperan dalam menjaga ketertiban dan penyelesaian konflik sosial. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang melaksanakan program ketertiban dan resolusi konflik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa* | | | | 1 Dokumen | 23.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang berperan aktif dalam fasilitasi layanan keagamaan. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan atau memfasilitasi kegiatan keagamaan secara rutin. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 8 Dokumen Dokumen | 1.518.058.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 1.570.800.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif melaksanakan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. ]** | **Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan minimal 2 kegiatan pelestarian budaya setiap tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat* | | | | 80 Keluarga | 28.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang Terlibat Aktif dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Risiko Bencana. ]** | **Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang mengikuti pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan mitigasi risiko bencana. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **1.779.828.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.975.900.000,00** | - |
| | 2.13.05.2.01.0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | | | | 80 Keluarga | 39.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **17.016.908.040,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **17.016.908.040,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **17.016.908.040,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **6.709.174.840,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.709.174.840,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.351.900,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 7.300.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.400.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.290.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.400.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.290.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.290.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 3.280.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 11.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.937.628.240,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 74 Orang/bulan | 3.666.908.040,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 266.160.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 860.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 6 Laporan | 2.000.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 6 Laporan | 1.700.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 38.100.200,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.500.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 34.600.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 323.209.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 32.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1.704.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 75 Paket | 92.815.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 28.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 157.890.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 1.085.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 318.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Jenis Unit | 267.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.107.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.102.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 141.485.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 11 Unit | 48.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.709.174.840,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 17.985.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **-** | **10.307.733.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Ruas Jalan Mantap yang Dilengkapi Sarana Lalu Lintas ]** | **Persentase ruas jalan dalam kondisi mantap yang telah dilengkapi sarana lalu lintas (rambu, marka, APILL, dan fasilitas keselamatan lainnya) terhadap total ruas jalan mantap yang menjadi target layanan LLAJ, Minimal 50 % diakhir tahun** | **1** | **1** | **1** | **1** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelancaran dan keselamatan lalu lintas sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase ruas jalan dengan tingkat kelancaran lalu lintas minimal 40 % dan tingkat kecelakaan lalu lintas menurun paling sedikit 5 % dalam 1 tahun.** | **25** | **10** | **10** | **5** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 7.464.124.200,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 140 Unit | 4.956.074.200,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 300 Unit | 2.508.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan dan penertiban lalu lintas yang efektif dalam mencegah tindak kriminalitas dan kekerasan di jalan raya. ]** | **Persentase operasi pengawasan dan penertiban lalu lintas yang dilaksanakan sesuai jadwal dengan pelibatan masyarakat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | - | - | | | - | 14.340.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 1 Unit | 13.440.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan yang berkontribusi pada penurunan biaya distribusi sehingga membantu pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase penurunan waktu tempuh angkutan barang kebutuhan pokok minimal 5 % per tahun untuk mendukung stabilitas harga dan menekan inflasi.** | **25** | **0** | **0** | **5** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | - | - | | | - | 66.470.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 66.470.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Jalan ]** | **Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (CO2 ekuivalen) dari kendaraan bermotor di wilayah operasi program dibanding tahun sebelumnya. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **20** | **20** | **30** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | - | | | - | 788.690.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 3 Unit | 483.060.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar* | | | | 5000 Unit | 14.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 5000 Dokumen | 125.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PAJAK DAERAH | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0006 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji* | | | | 14 Laporan | 12.620.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 10 Unit | 104.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 7 Laporan | 26.990.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 3 Laporan | 7.120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan akses transportasi jalan yang aman, lancar, dan terjangkau dalam satu tahun. ]** | **Persentase masyarakat miskin yang menggunakan layanan transportasi jalan dengan tingkat keselamatan dan kenyamanan memadai minimal 50 % dalam satu tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.460.589.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 291.379.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0008 | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun* | | | | 3 Unit | 132.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.02.2.06.0010 | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi* | | | | 4 Laporan | 6.905.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan akses transportasi jalan yang aman, lancar, dan terjangkau dalam satu tahun. ]** | **Persentase masyarakat miskin yang menggunakan layanan transportasi jalan dengan tingkat keselamatan dan kenyamanan memadai minimal 50 % dalam satu tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)* | | | | 3 Unit | 164.105.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1.210.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 9.330.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | | | | 50 Dokumen | 837.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | | | | 4 Laporan | 18.660.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kawasan Produktif yang Terkoneksi dengan Sistem Transportasi Lokal melalui peningkatan efektivitas pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. ]** | **Persentase ruas jalan di kawasan produktif yang memiliki pengelolaan lalu lintas optimal dan akses angkutan umum yang memadai. minimal 80 % pada akhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **10.307.733.200,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 13.520.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin* | | | | 4 Laporan | 7.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi* | | | | 4 Laporan | 6.120.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | | | | | | **15.181.470.018,00** | | | | | | | **14.238.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **15.181.470.018,00** | | | | | | | **14.238.500.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **15.001.222.718,00** | | | | | | | **13.823.100.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **6.471.487.718,00** | | | | | | | **6.113.100.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.471.487.718,00** | - | - | - | - | - | - | **6.113.100.000,00** | - |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia* | - | | | 19 Dokumen | 23.787.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | - | 23.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 1.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.083.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.623.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.933.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.073.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 1.175.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 1.220.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12.180.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | PD | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia* | - | | | 37 Dokumen | 5.445.490.418,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 5.418.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 54 Orang/bulan | 5.257.035.618,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 21.154.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 163.440.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 190.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 3 Laporan | 1.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 19 Laporan | 2.130.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 7.580.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 9.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 1.630.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 5.950.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 27.026.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 23.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 31 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 7.026.300,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 6 Dokumen | 196.118.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 308.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 3.445.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 3.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 22.602.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 7.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 16.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 138.171.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 240.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 650.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan* | - | | | 3 Jenis | 64.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 91.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 58.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 86.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan penunjang PD* | - | | | 3 Jenis | 57.085.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 140.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 49 Unit | 27.075.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.471.487.718,00** | - | - | - | - | - | - | **6.113.100.000,00** | - |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **555.424.000,00** | | | | | | | **765.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang aktif menggunakan platform komunikasi publik untuk berpartisipasi dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan. ]** | **Persentase pemuda usia 16-30 tahun yang aktif mengakses dan memberikan masukan melalui platform komunikasi publik (website, media sosial, aplikasi) minimal 4 kali dalam setahun. Minimal 50 % dalam setahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik* | - | | | 6 Dokumen | 555.424.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | - | 765.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 14 Komunitas | 18.480.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anak yang orang tuanya memperoleh informasi publik terkait pemenuhan hak anak secara tepat dan berkelanjutan. ]** | **Persentase orang tua/wali anak yang mengakses informasi publik terkait hak-hak anak melalui media resmi pemerintah dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika* | | | | 1 Laporan | 10.640.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyebaran Informasi Publik Terkait Investasi yang Akurat dan Tepat Waktu kepada Masyarakat dan Investor ]** | **Persentase informasi investasi yang disampaikan melalui kanal resmi (website, media sosial, publikasi) tepat waktu dan akurat dibandingkan total informasi yang direncanakan disebarkan setiap tahun. minimal 60 % pada akhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 39 Permohonan | 82.839.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 3 Rekomendasi | 6.660.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyebaran informasi layanan keagamaan yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. ] [ Meningkatnya persentase masyarakat yang mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kanal resmi komunikasi publik. ]** | **Persentase masyarakat yang mengakses informasi pemerintahan daerah melalui media resmi (website, media sosial, kanal informasi publik). Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase khalayak yang terpapar informasi publik* | | | | 100 Persentase | 177.847.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase publikasi informasi pembangunan sektor real estate kepada masyarakat dan investor. ]** | **Persentase media informasi resmi pemerintah (website, media sosial, buletin, dsb.) yang memuat konten terkait pengembangan dan peluang investasi sektor real estate, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pekerja yang mengetahui manfaat dan kewajiban kepesertaan jaminan ketenagakerjaan melalui media informasi publik. ]** | **Persentase pekerja yang menyatakan mengetahui manfaat jaminan ketenagakerjaan melalui survei komunikasi publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait pengembangan sektor industri pengolahan. ]** | **Persentase peningkatan jumlah publikasi dan sosialisasi informasi sektor industri pengolahan yang tersampaikan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase informasi publik terkait sektor pertanian yang tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. ]** | **Persentase peningkatan jumlah publikasi, penyuluhan, dan kampanye informasi pertanian yang disebarkan melalui media publik dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perempuan usia subur yang mengakses informasi publik tentang layanan kesehatan reproduksi. ]** | **Persentase perempuan usia subur yang menyatakan memperoleh informasi layanan kesehatan reproduksi melalui media komunikasi publik dalam 12 bulan terakhir. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **55** | **55** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase publikasi dan kampanye komunikasi yang memuat pesan kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase publikasi dan kampanye yang mengangkat nilai kerukunan umat beragama. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase informasi dan komunikasi publik yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase publikasi informasi terkait inflasi dan harga kebutuhan pokok yang disebarluaskan tepat waktu minimal 90% setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran dan pengendalian inflasi.** | **100** | **50** | **50** | **90** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase informasi pelayanan publik yang disampaikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. ]** | **Persentase unit layanan publik yang menyediakan informasi layanan secara terbuka melalui media digital/resmi, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **90** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase diseminasi informasi publik tentang layanan dan program pendidikan secara tepat sasaran dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengakses dan memahami informasi program pendidikan melalui kanal resmi pemerintah daerah mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan akses informasi publik yang akurat, relevan, dan mudah dipahami dalam satu tahun. ]** | **Persentase masyarakat miskin yang aktif menerima dan memahami informasi layanan publik melalui media komunikasi yang tersedia minimal 50 % dalam satu tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah yang mendapatkan informasi dan komunikasi publik yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengakses informasi program pengentasan kemiskinan melalui media komunikasi publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyebaran informasi dan komunikasi publik yang mendukung promosi dan pengembangan ekonomi kreatif daerah. ]** | **Persentase konten informasi dan komunikasi publik yang mengangkat tema ekonomi kreatif terhadap total konten yang disebarluaskan oleh pemerintah daerah. minimal 60 % pada akhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase komunikasi dan publikasi inovasi instansi pemerintah yang efektif menjangkau masyarakat dan pemangku kepentingan. ]** | **Persentase inovasi pemerintah daerah yang dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan melalui kanal informasi resmi, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penggunaan Teknologi Digital Ramah Lingkungan dalam Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik ]** | **Persentase penggunaan teknologi digital ramah lingkungan (misal: server hemat energi, paperless, penggunaan cloud computing hijau) dalam unit pelayanan informasi dan komunikasi publik, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 2 Media | 185.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Publikasi Informasi Pembangunan Konektivitas Kawasan Produktif Melalui Media Resmi Pemerintah. ]** | **Persentase konten informasi terkait pembangunan konektivitas kawasan produktif yang dipublikasikan melalui media resmi pemerintah daerah. minimal 60 % pada akhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang mengakses dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi melalui media informasi dan komunikasi publik. ]** | **Persentase masyarakat pengguna media informasi dan komunikasi publik yang terlibat dalam kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total pengguna media tersebut. Minimal 80 % setiap tahunnya** | **95** | **50** | **50** | **80** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase keterpaduan dan pemanfaatan kanal informasi publik digital secara aktif oleh masyarakat. ]** | **Persentase peningkatan kunjungan dan interaksi masyarakat pada portal resmi dan media sosial pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase UMKM yang Mengakses Informasi Publik Terkait Dukungan Digitalisasi Melalui Media Komunikasi Pemerintah Daerah. ]** | **Persentase UMKM yang mengakses konten informasi digitalisasi UMKM melalui kanal resmi pemerintah daerah (website, media sosial, TV/Radio daerah) terhadap total UMKM yang terdaftar. minimal 60 % pada akhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase konten komunikasi publik yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal. ]** | **Persentase konten informasi publik yang memuat tema budaya lokal dan disiarkan melalui media pemerintah daerah. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 12 Konten | 54.390.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup sehat melalui informasi dan komunikasi publik yang efektif. ]** | **Persentase masyarakat yang menerima dan memahami informasi kesehatan dari media komunikasi publik.** | **70** | **20** | **20** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyampaikan informasi publik terkait isu gender dan PPRG secara terbuka dan partisipatif. ]** | **Persentase perangkat daerah yang mengelola kanal informasi publik dengan konten rutin terkait isu gender dan PPRG terhadap total perangkat daerah. Minimal 70 % setiap tahunnya** | **90** | **50** | **50** | **70** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan menerapkan informasi kesehatan gizi anak melalui media komunikasi publik. ]** | **Persentase keluarga dengan balita yang mengakses dan memahami informasi gizi dan pencegahan stunting melalui media komunikasi publik meningkat dari 10 % menjadi 50 % di wilayah prioritas pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **555.424.000,00** | - | - | - | - | - | - | **765.000.000,00** | - |
| | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan* | | | | 6 Orang | 18.708.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | masyarakat usia 15-60 Tahun | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | **80 Persen** | **7.974.311.000,00** | | | | | | | **6.945.000.000,00** | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Di tetapkan oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 5.050.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Seluruh PD , Kelurahan dan Desa | - | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa* | | | | 12 Dokumen | 5.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Seluruh PD , Kelurahan dan Desa | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 4 Dokumen | 7.969.261.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | - | 6.935.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional* | | | | 2 Aplikasi | 21.686.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE* | | | | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika yang Mendukung Pelayanan dan Pemantauan Cakupan Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase perangkat dan sistem yang menggunakan aplikasi informatika untuk pemantauan dan pengelolaan cakupan jaringan 4G atau lebih. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **0** | **0** | **30** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 43 Perangkat Daerah | 699.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Seluruh PD | | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemanfaatan aplikasi layanan pemerintahan daerah yang terintegrasi oleh perangkat daerah dan masyarakat. ]** | **Persentase perangkat daerah yang secara aktif menggunakan minimal 3 aplikasi pemerintahan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan publik dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional* | | | | 0 Layanan | 5.185.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase penggunaan aplikasi informatika yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan publik yang terdigitalisasi melalui aplikasi informatika. ]** | **Persentase jenis layanan publik yang telah diintegrasikan ke dalam sistem/aplikasi digital berbasis informatika, dengan target minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **50** | **50** | **70** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo* | | | | 1 Dokumen | 28.064.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memanfaatkan aplikasi informatika untuk kegiatan literasi digital. ]** | **Persentase pengguna aktif aplikasi informatika berbasis literasi digital terhadap total populasi pengguna sasaran. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **30** | **50** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE* | | | | 5 Aplikasi | 332.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase aplikasi informatika yang mendukung pengembangan dan implementasi inovasi di instansi pemerintah daerah. ]** | **Persentase aplikasi informatika yang diadopsi dan digunakan secara efektif untuk mendukung proses inovasi di instansi pemerintah, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **5** | **5** | **50** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase aplikasi informatika yang dikembangkan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam pemasaran dan pengelolaan usaha. ]** | **Persentase aplikasi informatika yang aktif digunakan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk pemasaran dan manajemen usaha terhadap total aplikasi yang dikembangkan. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase aplikasi informatika yang mendukung pelestarian dan promosi budaya lokal. ]** | **Persentase aplikasi dan platform digital milik pemerintah daerah yang menampilkan konten budaya lokal (bahasa daerah, tradisi, karya seni, cagar budaya) minimal 40 % dari total aplikasi yang aktif dikelola.** | **80** | **10** | **10** | **40** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengguna aplikasi informatika yang mengakses dan memanfaatkan data serta layanan informasi gizi untuk pencegahan stunting. ]** | **Persentase tenaga kesehatan dan keluarga balita yang menggunakan aplikasi informatika untuk memantau dan mendapatkan informasi gizi meningkat dari 5 % menjadi 50% di wilayah target pada akhir tahun** | **70** | **5** | **5** | **50** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase UMKM yang Menggunakan Aplikasi Informatika Daerah untuk Mendukung Operasional Bisnis Secara Digital. ]** | **Persentase UMKM yang aktif menggunakan aplikasi informatika daerah (e-commerce lokal, sistem pemesanan online, aplikasi layanan digital UMKM) terhadap total UMKM pengguna yang terdaftar. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali* | | | | 12 Laporan | 3.900.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 3.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0034 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 2 Aplikasi | 11.170.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0035 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE* | | | | 12 Laporan | 6.660.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika yang Mendukung Pelayanan dan Pemantauan Cakupan Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase perangkat dan sistem yang menggunakan aplikasi informatika untuk pemantauan dan pengelolaan cakupan jaringan 4G atau lebih. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **0** | **0** | **30** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0036 | Penyediaan Akses Internet | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas* | | | | 43 Perangkat Daerah | 2.500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Seluruh PD | | 2.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.974.311.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.945.000.000,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah* | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas* | | | | 2 Dokumen | 14.246.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0039 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah* | | | | 28 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Seluruh PD | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **116.012.500,00** | | | | | | | **180.400.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | **100 Persen** | **116.012.500,00** | | | | | | | **180.400.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan statistik sektoral* | - | | | 4 Dokumen | 116.012.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | - | 180.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.2.01.0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik* | | | | 70 % | 25.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketersediaan data pendidikan yang valid, akurat, dan tepat waktu untuk perencanaan dan evaluasi dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase data pendidikan sektoral yang lengkap, valid, dan tersedia tepat waktu meningkat menjadi minimal 60 % dalam satu tahun.** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk* | | | | 40 % | 20.012.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 20.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Data Statistik Sektoral yang Mendukung Analisis Digitalisasi UMKM ]** | **Persentase data statistik sektoral terkait digitalisasi UMKM yang tersedia dan terpublikasi tepat waktu setiap tahun. minimal 60 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketersediaan data statistik sektoral yang mendukung analisis dan pengambilan kebijakan sektor real estate. ]** | **Persentase data statistik sektoral terkait real estate (seperti jumlah proyek, nilai investasi, luas lahan, kontribusi PDRB) yang tersedia dan diperbarui secara berkala, Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penggunaan data statistik sektoral yang valid dan akurat dalam perumusan kebijakan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase data statistik sektoral valid yang mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah (mencapai minimal 50 %,) yang berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 5 % dalam satu tahun.** | **9** | **3** | **3** | **5** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya ketersediaan data kesehatan yang akurat dan tepat waktu untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan. ]** | **Persentase laporan statistik kesehatan yang dipublikasikan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas data.** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektor industri pengolahan yang lengkap dan tepat waktu tersedia untuk perencanaan pembangunan. ]** | **Persentase data statistik sektor industri pengolahan yang terpublikasi tepat waktu setiap tahun, Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral yang akurat dan lengkap terkait kelompok pendapatan 40% terbawah sebagai dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. ]** | **Persentase data statistik sektoral yang terverifikasi dan tersaji tepat waktu dalam laporan statistik tahunan untuk mendukung program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase data statistik sektoral yang tersedia tepat waktu dan digunakan dalam perencanaan program peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data sektoral yang terdokumentasi dan tersedia dalam sistem statistik sektoral daerah. ]** | **Persentase data sektoral dari seluruh perangkat daerah yang terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem statistik sektoral. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | 2.20.02.2.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.* | | | | 80 % | 40.205.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral jasa yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase data statistik sektoral jasa yang dipublikasikan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas, Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan tepat waktu dan valid minimal 60 % setiap tahun, sehingga mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif.** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan secara digital dan tepat waktu. ]** | **Persentase laporan statistik sektoral yang dipublikasikan secara digital sesuai jadwal dalam 1 tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketersediaan data sektoral pertanian yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan pembangunan. ]** | **Persentase publikasi data sektoral pertanian yang tersedia tepat waktu dari total rencana publikasi dalam satu tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektor pariwisata yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase data statistik pariwisata yang diterbitkan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas dari total data statistik pariwisata yang dijadwalkan per tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | 2.20.02.2.01.0020 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik* | | | | 5 Orang | 10.360.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral yang digunakan untuk mendorong program literasi masyarakat. ]** | **Persentase laporan statistik sektoral yang secara langsung mendukung perencanaan dan evaluasi program literasi terhadap total laporan statistik sektoral yang diterbitkan. Minimal 60 % setiap tahunnya** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | 2.20.02.2.01.0021 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 10.050.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase data statistik sektoral yang digunakan untuk mendukung pengembangan dan evaluasi inovasi di instansi pemerintah daerah. ]** | **Persentase laporan statistik sektoral yang dijadikan dasar pengambilan keputusan inovasi oleh instansi pemerintah daerah, dengan target minimal 60 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang mendapatkan manfaat dari kebijakan berbasis data statistik sektoral yang akurat dan terkini dalam satu tahun. ]** | **Persentase program dan kebijakan sektor terkait yang didukung oleh data statistik sektoral valid dan tepat waktu minimal 60 % dalam satu tahun** | **100** | **50** | **50** | **60** | **116.012.500,00** | - | - | - | - | - | - | **180.400.000,00** | - |
| | 2.20.02.2.01.0022 | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah* | | | | 4 Laporan | 10.360.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **64.234.800,00** | | | | | | | **235.000.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | **100 Persen** | **64.234.800,00** | | | | | | | **235.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase sistem informasi pemerintahan daerah yang terlindungi dengan mekanisme persandian digital sesuai standar keamanan. ]** | **Persentase aplikasi dan sistem informasi pemerintahan daerah yang telah menerapkan protokol persandian digital yang terstandarisasi dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **64.234.800,00** | - | - | - | - | - | - | **235.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 2 Dokumen | 58.320.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | - | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0006 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan* | | | | 12 Laporan | 6.640.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian* | | | | 43 Perangkat Daerah | 16.680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penetapanan Pola Hubungan Komunikasi sandi yang tersedia* | - | | | 1 Dokumen | 5.914.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | - | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.02.0002 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.* | | | | 3 Kegiatan | 5.914.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan PD | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | **11.709.279.537,00** | | | | | | | **11.719.380.100,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.743.363.037,00** | | | | | | | **9.591.009.100,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **8.743.363.037,00** | | | | | | | **9.591.009.100,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **8.158.720.037,00** | | | | | | | **8.545.049.600,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.158.720.037,00** | - | - | - | - | - | - | **8.545.049.600,00** | - |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 26.623.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 37.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 5.623.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Berita Acara | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu* | | | | 1 Substansi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan* | | | | 1 Berita Acara | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.035.744.037,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.709.749.100,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 882 Orang/bulan | 5.859.284.037,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.471.829.100,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 174.960.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 185.520.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 62.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 62.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 22.995.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 44.795.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 12 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 19.995.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 19.995.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 357.108.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 386.005.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.170.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.014.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 71.237.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 74.018.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 41.880.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 44.816.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 51.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 71.040.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 162.121.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 136.117.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 64.950.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 455.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 14.950.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 155.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.158.720.037,00** | - | - | - | - | - | - | **8.545.049.600,00** | - |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.158.720.037,00** | - | - | - | - | - | - | **8.545.049.600,00** | - |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.555.800.000,00 | | | - | - | - | - | 1.596.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 15.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 15.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.540.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.560.700.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 92.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 191.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.158.720.037,00** | - | - | - | - | - | - | **8.545.049.600,00** | - |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.158.720.037,00** | - | - | - | - | - | - | **8.545.049.600,00** | - |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.158.720.037,00** | - | - | - | - | - | - | **8.545.049.600,00** | - |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 51.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | **80 Persen** | **0,00** | | | | | | | **31.780.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam yang selesai tepat waktu sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses dan diterbitkan dalam waktu maksimal sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 21.780.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 77 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 21.780.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha resmi dan aktif menjalankan kegiatan jasa keuangan. ]** | **Meningkatnya persentase koperasi simpan pinjam yang mengantongi izin usaha resmi dan tercatat aktif, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase lembaga simpan pinjam mikro yang melayani kelompok pendapatan 40% terbawah dan memiliki izin usaha resmi. ]** | **Persentase lembaga simpan pinjam mikro yang melayani anggota dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang telah memperoleh izin usaha resmi. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase usaha simpan pinjam yang beroperasi legal dan mendukung pembiayaan sektor real estate. ]** | **Persentase usaha simpan pinjam yang memiliki izin usaha resmi dan memberikan pembiayaan kepada sektor real estate, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase usaha simpan pinjam yang berizin dan beroperasi sesuai ketentuan guna mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase usaha simpan pinjam berizin yang memberikan pinjaman produktif kepada masyarakat minimal 80 % setiap tahun untuk membantu menjaga stabilitas inflasi.** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rumah tangga miskin terhadap layanan usaha berbasis simpan pinjam yang legal dan terpantau. ]** | **Persentase pelaku usaha dari rumah tangga miskin yang memiliki izin usaha simpan pinjam meningkat minimal 80 % dalam satu tahun.** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses dan diterbitkan secara digital sesuai standar waktu pelayanan. ]** | **Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diselesaikan melalui sistem layanan elektronik dalam waktu standar pelayanan dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha resmi dan aktif menjalankan kegiatan jasa keuangan. ]** | **Meningkatnya persentase koperasi simpan pinjam yang mengantongi izin usaha resmi dan tercatat aktif, Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **31.780.000,00** | - |
| | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 4 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | **-** | **19.100.000,00** | | | | | | | **39.670.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang patuh terhadap regulasi dan beroperasi dengan tata kelola yang baik. ]** | **Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang lolos pengawasan dan pemeriksaan dengan standar kepatuhan minimal 90% dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **19.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.670.000,00** | - |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | | | - | 19.100.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 39.670.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 200 Unit Usaha | 19.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 18.450.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa menggunakan sistem digital untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. ]** | **Persentase koperasi yang menjalani pengawasan dan pemeriksaan berbasis digital sesuai jadwal dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **19.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.670.000,00** | - |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 254 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 21.220.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | **-** | **17.510.000,00** | | | | | | | **65.280.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase KSP/USP koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan keuangan secara digital dan tepat waktu. ]** | **Persentase KSP/USP koperasi yang menjalani penilaian kesehatan keuangan berbasis digital sesuai jadwal dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **95** | **50** | **50** | **80** | **17.510.000,00** | - | - | - | - | - | - | **65.280.000,00** | - |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 17.510.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 65.280.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 353 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 37.930.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | | | | 353 Unit Usaha | 17.510.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 27.350.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | **-** | **38.200.000,00** | | | | | | | **25.650.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase anggota koperasi sektor jasa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan manajemen usaha yang lebih baik. ]** | **Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang anggotanya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dengan peningkatan omzet usaha Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **38.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.650.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 38.200.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 25.650.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 100 Orang | 38.200.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.650.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | **-** | **18.881.000,00** | | | | | | | **154.123.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi yang berperan aktif dalam penguatan ekonomi masyarakat miskin. ]** | **Persentase koperasi aktif yang anggotanya berasal dari rumah tangga miskin dan menerima fasilitasi usaha produktif meningkat minimal 10 % per tahun.** | **30** | **0** | **0** | **10** | **18.881.000,00** | - | - | - | - | - | - | **154.123.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 18.881.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 154.123.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya* | | | | 60 Keluarga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan* | | | | 50 Kelompok Masyarakat | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi sektor real estate yang mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum. ]** | **Persentase koperasi real estate yang menerima layanan pendampingan dan perlindungan hukum dari pemerintah daerah, Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **70** | **18.881.000,00** | - | - | - | - | - | - | **154.123.000,00** | - |
| | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan mendapatkan perlindungan hukum serta akses pembiayaan. ]** | **Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang melaporkan peningkatan omzet dan akses pembiayaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **18.881.000,00** | - | - | - | - | - | - | **154.123.000,00** | - |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi sektor real estate yang mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum. ]** | **Persentase koperasi real estate yang menerima layanan pendampingan dan perlindungan hukum dari pemerintah daerah, Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **40** | **40** | **70** | **18.881.000,00** | - | - | - | - | - | - | **154.123.000,00** | - |
| | 2.17.06.2.01.0006 | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya* | | | | 10 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase anggota koperasi dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memperoleh manfaat ekonomi nyata dari koperasi. ]** | **Persentase anggota koperasi dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang melaporkan peningkatan pendapatan atau akses layanan keuangan dalam 12 bulan setelah mengikuti program pemberdayaan koperasi. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **18.881.000,00** | - | - | - | - | - | - | **154.123.000,00** | - |
| | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan mendapatkan perlindungan hukum serta akses pembiayaan. ]** | **Meningkatnya persentase koperasi sektor jasa yang melaporkan peningkatan omzet dan akses pembiayaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **18.881.000,00** | - | - | - | - | - | - | **154.123.000,00** | - |
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan  Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Unit Usaha | 18.881.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 84.123.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 7. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | **-** | **416.802.000,00** | | | | | | | **663.006.500,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **416.802.000,00** | - | - | - | - | - | - | **663.006.500,00** | - |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | - | | | - | 416.802.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 663.006.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | | | | 2 Unit Usaha | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 117.995.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 12 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 148.295.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 1 Unit Usaha | 14.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.420.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | | | | 12 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 21.980.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0008 | Pemulihan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 100 Unit Usaha | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0010 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 86.526.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 253.202.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase UMKM aktif yang dijalankan oleh pemuda ]** | **Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang terdaftar sebagai pelaku usaha aktif dalam basis data UMKM terhadap total pemuda yang mengikuti program pemberdayaan UMKM pada tahun berjalan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **416.802.000,00** | - | - | - | - | - | - | **663.006.500,00** | - |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 42.715.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **416.802.000,00** | - | - | - | - | - | - | **663.006.500,00** | - |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 60 Orang | 14.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 45.075.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 8. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | **-** | **74.150.000,00** | | | | | | | **66.450.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | - | | | - | 74.150.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 66.450.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah yang Difasilitasi* | | | | 60 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi* | | | | 60 Lembaga | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 12 Unit Usaha | 52.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 26.450.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 60 Unit Usaha | 21.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2.965.916.500,00** | | | | | | | **2.128.371.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **2.020.670.000,00** | | | | | | | **1.472.900.000,00** | |
| 1. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | **-** | **0,00** | | | | | | | **182.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase permohonan perizinan dan pendaftaran perusahaan yang diproses dan diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase permohonan perizinan dan pendaftaran perusahaan yang diproses dan diterbitkan izin dalam waktu maksimal sesuai standar dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **60** | **90** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **182.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki izin usaha resmi dan terdaftar secara legal. ]** | **Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah memperoleh izin usaha dan terdaftar secara resmi terhadap total pelaku usaha ekonomi kreatif. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **182.200.000,00** | - |
| | 3.30.02.2.01.0002 | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik* | | | | 1 laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **182.200.000,00** | - |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 32.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 32.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0003 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran  Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang  terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik* | | | | 1 dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.02.2.04 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0004 | Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran  Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik* | | | | 1 dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05.0002 | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0001 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | **-** | **2.000.860.000,00** | | | | | | | **1.022.250.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha mikro dan kecil miskin yang memperoleh akses distribusi perdagangan yang lebih efisien dalam 12 bulan. ]** | **Persentase pelaku usaha mikro dan kecil miskin yang mengalami penurunan biaya distribusi minimal 15% dalam satu tahun, Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | - | | | - | 2.000.860.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 822.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 25 Unit | 2.000.860.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 702.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase sarana distribusi pangan strategis yang berfungsi optimal dalam menjaga kelancaran pasokan. ]** | **Persentase pasar, gudang, dan pusat distribusi pangan strategis yang berfungsi dan dimanfaatkan secara aktif, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase efisiensi distribusi dan akses pasar produk lokal sehingga mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha dan petani. ]** | **Persentase pelaku usaha dan petani yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 10% dalam 12 bulan setelah pemanfaatan sarana distribusi perdagangan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memanfaatkan sarana distribusi perdagangan sehingga memperluas pasar dan menambah tenaga kerja. ]** | **Persentase pelaku usaha yang meningkatkan kapasitas distribusi dan menambah jumlah tenaga kerja dalam 12 bulan setelah pemanfaatan sarana distribusi. Minimal 10 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **6** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang memanfaatkan sarana distribusi perdagangan untuk menjalankan usaha baru. ]** | **Persentase pemuda yang menggunakan sarana distribusi perdagangan dalam menjalankan usaha baru dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk industri pengolahan yang terdistribusi melalui sarana distribusi yang memadai dan efisien. ]** | **Persentase peningkatan volume produk industri pengolahan yang menggunakan sarana distribusi resmi dan terstandarisasi, Minimal 10 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase sarana distribusi hasil pertanian yang berfungsi secara optimal. ]** | **Persentase sarana distribusi hasil pertanian (seperti pasar, gudang, atau cold storage) yang aktif digunakan minimal 50 % dari total sarana yang tersedia dalam setahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase sarana distribusi perdagangan yang berfungsi optimal sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase sarana distribusi perdagangan (seperti pasar, gudang, dan fasilitas logistik) yang terkelola dan beroperasi sesuai standar dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 25 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang memanfaatkan sarana distribusi perdagangan untuk menjalankan usaha baru. ]** | **Persentase pemuda yang menggunakan sarana distribusi perdagangan dalam menjalankan usaha baru dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memanfaatkan sarana distribusi perdagangan sehingga memperluas pasar dan menambah tenaga kerja. ]** | **Persentase pelaku usaha yang meningkatkan kapasitas distribusi dan menambah jumlah tenaga kerja dalam 12 bulan setelah pemanfaatan sarana distribusi. Minimal 10 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **6** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha mikro dan kecil miskin yang memperoleh akses distribusi perdagangan yang lebih efisien dalam 12 bulan. ]** | **Persentase pelaku usaha mikro dan kecil miskin yang mengalami penurunan biaya distribusi minimal 15% dalam satu tahun, Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk industri pengolahan yang terdistribusi melalui sarana distribusi yang memadai dan efisien. ]** | **Persentase peningkatan volume produk industri pengolahan yang menggunakan sarana distribusi resmi dan terstandarisasi, Minimal 10 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase efisiensi distribusi dan akses pasar produk lokal sehingga mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha dan petani. ]** | **Persentase pelaku usaha dan petani yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 10% dalam 12 bulan setelah pemanfaatan sarana distribusi perdagangan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **30** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase sarana distribusi pangan strategis yang berfungsi optimal dalam menjaga kelancaran pasokan. ]** | **Persentase pasar, gudang, dan pusat distribusi pangan strategis yang berfungsi dan dimanfaatkan secara aktif, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase sarana distribusi hasil pertanian yang berfungsi secara optimal. ]** | **Persentase sarana distribusi hasil pertanian (seperti pasar, gudang, atau cold storage) yang aktif digunakan minimal 50 % dari total sarana yang tersedia dalam setahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000.860.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.022.250.000,00** | - |
| | 3.30.03.2.01.0003 | Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang* | | | | 1 Kegiatan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0004 | Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang* | | | | 1 laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | **-** | **4.930.000,00** | | | | | | | **80.620.000,00** | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 25.100.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.100.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.890.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 28.720.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* | | | | 12 Laporan | 2.040.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.220.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 8.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.040.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 26.800.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | | | | 12 Laporan | 2.040.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 6.800.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | **-** | **2.040.000,00** | | | | | | | **35.970.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase volume ekspor produk pertanian unggulan daerah. ]** | **Persentase peningkatan volume ekspor produk pertanian unggulan daerah (dalam ton atau satuan relevan) dibandingkan tahun sebelumnya. Minimal 5 % diakhir tahun** | **9** | **0** | **0** | **5** | **2.040.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.970.000,00** | - |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 2.040.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 35.970.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 1 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | | | | 1 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan* | | | | 1 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi* | | | | 12 Produk | 2.040.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.970.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | **-** | **12.840.000,00** | | | | | | | **121.860.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.840.000,00** | - | - | - | - | - | - | **121.860.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | - | | | - | 12.840.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 121.860.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 12 Unit | 11.650.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 72.625.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk pangan lokal yang memenuhi standar keamanan dan gizi untuk mendukung penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting. ]** | **Persentase produk pangan lokal yang tersertifikasi memenuhi standar keamanan dan gizi meningkat sebesar 50 % dalam 3 tahun ke depan (2026–2028).** | **90** | **30** | **30** | **50** | **12.840.000,00** | - | - | - | - | - | - | **121.860.000,00** | - |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 100 Orang | 1.190.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 39.235.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal* | | | | 60 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | **-** | **0,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri* | | | | 60 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 60 UMKM | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk dalam negeri yang digunakan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menekan inflasi. ]** | **Persentase produk dalam negeri pada komoditas strategis yang mampu menstabilkan harga di pasar lokal, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 60 UMKM | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk industri pengolahan yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri. ]** | **Persentase peningkatan volume penjualan produk industri pengolahan di pasar domestik minimal 10 % per tahun.** | **50** | **5** | **5** | **10** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase pendapatan pelaku usaha lokal produsen barang dan jasa melalui peningkatan pembelian dan distribusi produk dalam negeri. ] | Persentase pelaku usaha produsen produk dalam negeri yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 10% dalam 12 bulan setelah program berjalan. Minimal 30 \% diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan dan memasarkan produk dalam negeri sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ] | Persentase pelaku usaha dan konsumen yang melaporkan peningkatan pendapatan dan pengeluaran minimal .....% akibat penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri mencapai minimal 30 % dalam satu tahun. | 50 | 10 | 10 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaku usaha sektor jasa yang memasarkan dan menggunakan produk dalam negeri secara aktif. ] | Meningkatnya persentase pelaku usaha sektor jasa yang menggunakan dan memasarkan produk dalam negeri, Minimal 30 % diakhir tahun | 70 | 10 | 10 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pemuda wirausahawan baru yang menggunakan dan memasarkan produk dalam negeri. ] | Persentase pemuda wirausahawan baru yang menggunakan produk dalam negeri dalam usahanya dalam 12 bulan terakhir. Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase penggunaan produk pertanian lokal dalam rantai pasok industri dan perdagangan daerah. ] | Persentase peningkatan volume penyerapan produk pertanian lokal oleh pelaku usaha dan pasar dalam negeri dibandingkan tahun sebelumnya. Minimal....% diakhir tahun | 9 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaku usaha mikro dan kecil miskin yang menggunakan produk dalam negeri sebagai bahan baku utama dalam 12 bulan. ] | Persentase pelaku usaha mikro dan kecil miskin yang mengalami peningkatan omzet minimal 15% setelah menggunakan produk dalam negeri sebagai bahan baku utama selama satu tahun, Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaku usaha mikro dan kecil dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang meningkatkan penjualan produk dalam negeri. ] | Persentase pelaku usaha mikro dan kecil dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang mengalami peningkatan volume penjualan produk dalam negeri minimal 20% dalam 12 bulan setelah mengikuti program. Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **945.246.500,00** | | | | | | | **655.471.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | **-** | **945.246.500,00** | | | | | | | **594.731.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **945.246.500,00** | - | - | - | - | - | - | **594.731.000,00** | - |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 945.246.500,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 594.731.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase industri pengolahan yang berkembang sesuai rencana pembangunan industri daerah. ]** | **Persentase industri pengolahan yang memenuhi target kapasitas produksi dan investasi tahunan, Minimal 30 % diakhir tahun** | **0** | **10** | **10** | **30** | **945.246.500,00** | - | - | - | - | - | - | **594.731.000,00** | - |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 1 Dokumen | 798.266.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 323.975.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase industri yang menyerap lulusan vokasi sesuai perencanaan pembangunan industri. ]** | **Persentase industri yang merekrut lulusan vokasi dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total industri yang menjadi sasaran pembangunan. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **0** | **10** | **10** | **30** | **945.246.500,00** | - | - | - | - | - | - | **594.731.000,00** | - |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 146.980.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 190.756.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **945.246.500,00** | - | - | - | - | - | - | **594.731.000,00** | - |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0007 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri* | | | | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan* | | | | 60 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0009 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0010 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri* | | | | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | **-** | **0,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase izin usaha industri yang diproses dan dikendalikan sesuai standar pelayanan publik tepat waktu. ]** | **Persentase izin usaha industri yang diterbitkan dan dikendalikan dalam waktu maksimal sesuai standar dengan target minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **20.000.000,00** | - |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | **-** | **0,00** | | | | | | | **40.740.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase data industri pengolahan daerah yang terintegrasi dan akurat dalam sistem informasi nasional. ]** | **Persentase data industri pengolahan daerah yang terinput lengkap dan diperbarui dalam sistem informasi industri nasional,Minimal 70 % diakhir tahun** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 40.740.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 20.740.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase data industri yang terintegrasi dengan informasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase data industri dalam sistem informasi nasional yang memuat data penyerapan lulusan vokasi terhadap total data industri yang dikelola. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **0** | **10** | **10** | **30** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan industri yang melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional secara digital. ]** | **Persentase perusahaan industri di wilayah kabupaten yang menyampaikan laporan secara lengkap melalui SIINas dalam 1 tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase data industri pengolahan daerah yang terintegrasi dan akurat dalam sistem informasi nasional. ]** | **Persentase data industri pengolahan daerah yang terinput lengkap dan diperbarui dalam sistem informasi industri nasional,Minimal 70 % diakhir tahun** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase data industri yang terintegrasi dengan informasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase data industri dalam sistem informasi nasional yang memuat data penyerapan lulusan vokasi terhadap total data industri yang dikelola. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **0** | **10** | **10** | **30** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan industri yang melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional secara digital. ]** | **Persentase perusahaan industri di wilayah kabupaten yang menyampaikan laporan secara lengkap melalui SIINas dalam 1 tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data industri yang terintegrasi dengan informasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase data industri dalam sistem informasi nasional yang memuat data penyerapan lulusan vokasi terhadap total data industri yang dikelola. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **0** | **10** | **10** | **30** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan industri yang melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional secara digital. ]** | **Persentase perusahaan industri di wilayah kabupaten yang menyampaikan laporan secara lengkap melalui SIINas dalam 1 tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data industri pengolahan daerah yang terintegrasi dan akurat dalam sistem informasi nasional. ]** | **Persentase data industri pengolahan daerah yang terinput lengkap dan diperbarui dalam sistem informasi industri nasional,Minimal 70 % diakhir tahun** | **0** | **50** | **50** | **70** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | **40.740.000,00** | - |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **7.322.226.016,00** | | | | | | | **7.845.736.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.322.226.016,00** | | | | | | | **7.845.736.000,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **7.322.226.016,00** | | | | | | | **7.845.736.000,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **6.638.621.016,00** | | | | | | | **7.350.736.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.638.621.016,00** | - | - | - | - | - | - | **7.350.736.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD* | - | | | 19 Dokumen | 51.445.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 45.100.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 5.605.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 9.990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 4.730.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 12 Dokumen | 9.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 9.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 12 Data | 2.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 42 Dokumen | 5.231.146.016,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 6.165.536.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 60 Orang/bulan | 5.072.226.016,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 6.025.536.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 148.920.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 130.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 2.550.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 1.550.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 2.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.550.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 60 Orang | 141.450.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 50.950.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 115.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 15.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 13.950.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 10.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 22.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD yang Dilaksanakan* | - | | | 7 Layanan | 483.860.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 515.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 65.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 65.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 168.135.950,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 180.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.399.050,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 56.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 154.025.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.638.621.016,00** | - | - | - | - | - | - | **7.350.736.000,00** | - |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 51.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 115.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 51.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.638.621.016,00** | - | - | - | - | - | - | **7.350.736.000,00** | - |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 474.900.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 476.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 21.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 264.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 255.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 195.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.638.621.016,00** | - | - | - | - | - | - | **7.350.736.000,00** | - |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan PD dalam kondisi baik* | - | | | 3 Jenis | 138.270.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 36.770.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.638.621.016,00** | - | - | - | - | - | - | **7.350.736.000,00** | - |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.638.621.016,00** | - | - | - | - | - | - | **7.350.736.000,00** | - |
| | 2.18.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 31.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | **12,06 Persen** | **204.000.000,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Investasi Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase nilai investasi yang terealisasi untuk pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih di wilayah blankspot terhadap total target investasi. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi* | - | | | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | - | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi baru yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dengan upah di atas standar minimum. ]** | **Persentase investasi baru yang terealisasi dalam setahun yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dengan upah minimal 5 % di atas upah minimum regional. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi sektor jasa yang terealisasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. ]** | **Meningkatnya persentase realisasi investasi pada sektor jasa terhadap total investasi daerah, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi yang menyerap tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase proyek investasi baru yang mempekerjakan tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah dalam 12 bulan setelah perizinan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Realisasi Investasi Daerah dari Total Target Investasi Tahunan ]** | **Persentase nilai realisasi investasi daerah dibandingkan dengan target investasi tahunan, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase iklim investasi daerah yang mendukung pembukaan lapangan kerja baru. ]** | **Persentase rekomendasi kebijakan perbaikan iklim investasi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 40 % diakhir tahun** | **80** | **10** | **10** | **40** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi sektor industri pengolahan di daerah. ]** | **Persentase peningkatan nilai realisasi investasi pada sektor industri pengolahan dibanding tahun sebelumnya, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi pada sektor produksi barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga. ]** | **Persentase realisasi investasi pada sektor pangan dan kebutuhan pokok dari total investasi daerah, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi real estate yang terproses dan beroperasi sesuai perizinan dalam wilayah daerah. ]** | **Persentase proyek investasi real estate yang memperoleh izin lengkap dan telah beroperasi selama minimal 6 bulan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja bagi lulusan vokasi. ]** | **Persentase perusahaan penanaman modal baru yang menyerap lulusan vokasi dalam waktu 6 bulan setelah lulus terhadap total perusahaan penanaman modal baru. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi yang masuk ke sektor pertanian sebagai bagian dari total investasi di daerah. ]** | **Persentase peningkatan nilai investasi di sektor pertanian minimal 5 % per tahun dari total investasi daerah.** | **25** | **3** | **3** | **5** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kemudahan berusaha bagi pemuda pelaku usaha baru. ]** | **Persentase pemuda wirausahawan baru yang memperoleh izin usaha dengan mudah.** | **90** | **50** | **50** | **70** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi investasi pada sektor pariwisata. ]** | **Persentase nilai investasi yang terealisasi di sektor pariwisata terhadap total target investasi tahunan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin. ]** | **Persentase investasi baru sektor padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja dari rumah tangga miskin mencapai minimal 50 % dari total tenaga kerja terserap dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **204.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | **100 Persen** | **69.855.000,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase investor real estate baru yang tertarik dan berinvestasi di daerah melalui kegiatan promosi yang efektif. ]** | **Persentase peningkatan jumlah investor real estate baru yang melakukan investasi dalam satu tahun anggaran, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Investor yang melakukan investasi pada tahun berkenan* | - | | | 200 Orang | 69.855.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | - | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 23.255.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan promosi investasi sektor pertanian yang menghasilkan minat investasi. ]** | **Persentase kegiatan promosi penanaman modal sektor pertanian yang menghasilkan minat investasi minimal 10 % dari total kegiatan promosi yang dilaksanakan per tahun.** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investor yang melakukan investasi dengan penyerapan tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase investor baru yang melakukan investasi dan menyerap tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah dalam 12 bulan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi baru yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase investasi baru yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat minimal 5 % mencapai minimal 30 % dalam satu tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi baru di sektor jasa sebagai hasil dari kegiatan promosi penanaman modal. ]** | **Meningkatnya persentase komitmen investasi baru di sektor jasa yang tercatat melalui kegiatan promosi, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investor baru yang menanamkan modal pada sektor produksi barang kebutuhan pokok untuk stabilisasi harga. ]** | **Persentase investor baru yang berinvestasi di sektor pangan dan kebutuhan pokok minimal 10 % dari total investor baru setiap tahun.** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota* | | | | 1 Dokumen | 46.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase wirausaha muda yang mengetahui peluang investasi daerah. ]** | **Persentase wirausaha muda yang mengikuti kegiatan promosi penanaman modal daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase minat investor pada sektor industri pengolahan. ]** | **Persentase proposal investasi yang masuk pada sektor industri pengolahan terhadap total proposal investasi, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja vokasi. ]** | **Persentase peluang investasi yang dipromosikan dengan komponen penyerapan tenaga kerja vokasi terhadap total peluang investasi yang dipromosikan. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **50** | **10** | **10** | **30** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investor yang menanamkan modal pada sektor pariwisata. ]** | **Persentase investor baru di sektor pariwisata dibanding total investor yang difasilitasi dalam tahun berjalan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Investor Baru yang Terdaftar dan Berinvestasi di Daerah ]** | **Persentase kenaikan investor baru yang mendaftar dan melakukan investasi di daerah setiap tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **69.855.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | **100 Persen** | **144.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase investor yang difasilitasi dan menyerap lulusan vokasi. ]** | **Persentase investor yang menerima fasilitasi perizinan dan melaporkan penyerapan lulusan vokasi dalam waktu 6 bulan terhadap total investor yang difasilitasi. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang di Terbitkan* | - | | | 26 Dokumen | 144.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | - | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi investasi di sektor pariwisata melalui pelayanan penanaman modal yang efisien dan tepat waktu. ]** | **Persentase nilai realisasi investasi sektor pariwisata dari total nilai investasi yang diproses oleh pelayanan penanaman modal per tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **5** | **10** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 50 Pelaku Usaha | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Pelaku Usaha | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase investor sektor jasa yang memperoleh kemudahan layanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal. ]** | **Meningkatnya persentase investasi sektor jasa yang terealisasi melalui pelayanan perizinan yang cepat dan tepat, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi yang berhasil tersalurkan ke sektor yang menyerap tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase nilai investasi yang tersalurkan ke sektor padat karya dengan penyerapan tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah dalam 12 bulan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase proses perizinan investasi sektor pangan dan kebutuhan pokok yang selesai tepat waktu untuk mendukung stabilitas harga. ]** | **Persentase proses perizinan investasi sektor pangan dan kebutuhan pokok yang selesai sesuai target waktu, minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha industri pengolahan yang memperoleh kemudahan layanan perizinan berusaha. ]** | **Persentase permohonan perizinan sektor industri pengolahan yang diselesaikan dalam waktu <=3 hari kerja, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase proses perizinan investasi real estate yang selesai tepat waktu sesuai standar pelayanan. ]** | **Persentase permohonan perizinan investasi real estate yang diselesaikan sesuai waktu layanan maksimal, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang memperoleh kemudahan akses layanan perizinan usaha penanaman modal. ]** | **Persentase pemuda yang mengajukan dan memperoleh perizinan usaha melalui layanan penanaman modal dalam setahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepuasan Investor Terhadap Layanan Penanaman Modal ]** | **Persentase tingkat kepuasan investor terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi, dengan target minimal 50 % kepuasan setiap tahun berdasarkan hasil survei tahunan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 50 Pelaku Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Proses Perizinan Investasi Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Blankspot yang Selesai Tepat Waktu ]** | **Persentase proses perizinan proyek pembangunan jaringan internet 4G atau lebih di wilayah blankspot yang selesai sesuai target waktu terhadap total proses perizinan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 50 Kegiatan Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase permohonan penanaman modal yang diproses dan diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase permohonan penanaman modal yang diproses dan diterbitkan izin dalam waktu maksimal sesuai standar dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **144.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | **100 Persen** | **215.750.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi yang sesuai dengan komitmen penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase investor yang memenuhi target penyerapan lulusan vokasi sesuai perjanjian investasi terhadap total investor yang diawasi.Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Perusahaan yang Dievaluasi dan Mendapatkan Pendampingan* | - | | | 200 Perusahaan | 215.750.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | - | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 50 Kegiatan Usaha. | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaku Investasi Terhadap Ketentuan Perizinan dan Pelaporan ]** | **Persentase pelaku investasi yang melaporkan pelaksanaan investasinya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 60 Pelaku Usaha | 115.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap rencana penanaman modal yang disetujui guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. ]** | **Persentase pelaku usaha pariwisata yang melaporkan realisasi investasi sesuai dengan rencana penanaman modal per tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 50 Kegiatan Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase proyek investasi yang sesuai dengan ketentuan dan menyerap tenaga kerja dari kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase proyek investasi yang diawasi dan memenuhi standar ketenagakerjaan dengan minimal 50 % tenaga kerja berasal dari kelompok pendapatan 40% terbawah dalam waktu 12 bulan** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase investasi di sektor pangan dan kebutuhan pokok yang berjalan sesuai rencana untuk menjaga stabilitas harga. ]** | **Persentase proyek investasi sektor pangan dan kebutuhan pokok yang mencapai target fisik dan keuangan tepat waktu Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase proyek investasi real estate yang berjalan sesuai rencana dan ketentuan perizinan. ]** | **Persentase proyek investasi real estate yang sesuai dengan jadwal dan standar perizinan, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi investasi sektor industri pengolahan sesuai rencana. ]** | **Persentase proyek investasi industri pengolahan yang terealisasi sesuai target waktu dan nilai rencana investasi, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perusahaan yang menanamkan modal yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase perusahaan yang menanamkan modalnya dan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **215.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | **100 Persen** | **50.000.000,00** | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketersediaan data investasi sektor industri pengolahan yang akurat dan terkini. ]** | **Persentase data proyek investasi sektor industri pengolahan yang terbarui dalam sistem informasi penanaman modal, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Jenis Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* | - | | | 1 Jenis | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | - | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pelaku Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan Akurasi Data Investasi Terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal ]** | **Persentase data investasi yang terinput secara lengkap dan akurat dalam sistem informasi penanaman modal, dengan target minimal 60 % data terkini dan valid setiap semester.** | **80** | **40** | **40** | **60** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase data investasi yang terintegrasi dengan informasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase data investasi yang mencakup informasi penyerapan lulusan vokasi terhadap total data investasi yang dikelola dalam sistem informasi.Minimal 70 % setiap tahunnya** | **90** | **50** | **50** | **70** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase data investasi sektor pariwisata yang terkelola secara akurat dan terkini dalam sistem informasi penanaman modal daerah. ]** | **Persentase data investasi sektor pariwisata yang terinput dan terupdate tepat waktu dalam sistem informasi penanaman modal setiap triwulan. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **50** | **50** | **70** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang mengakses informasi penanaman modal melalui sistem informasi digital. ]** | **Persentase pemuda yang menggunakan sistem informasi penanaman modal untuk mendapatkan data usaha dalam 12 bulan terakhir. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyampaian data penanaman modal yang dilakukan secara digital melalui sistem informasi yang terintegrasi. ]** | **Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) melalui sistem informasi daring dalam 1 tahun. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **40** | **40** | **60** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | - |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | **8.243.908.999,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.243.908.999,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **7.874.542.999,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **6.591.740.499,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.591.740.499,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Pelaksanaan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah*<br>*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 67 Data<br>9 Dokumen | 32.675.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.885.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.525.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2.525.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2.525.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 2.525.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2.525.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 11.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 67 Data | 2.015.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | persentase capaian target dokumen perencanaan dan pelaporan daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan* | - | | | 12 Dokumen | 5.226.180.499,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 910 Orang/bulan | 5.078.600.499,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 139.580.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 40 Orang | 25.800.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 40 Paket | 25.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 5 Jenis | 235.045.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 13.531.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 63.133.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 9.750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 35.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 103.231.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 798.800.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 245.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 350.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.591.740.499,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.23.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 203.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.591.740.499,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 188.240.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 100 Laporan | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Laporan | 39.940.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 204 Laporan | 147.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 85.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis barang milik daerah perangkat daerah penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang berada dalam kondisi baik | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis barang milik daerah perangkat daerah penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang berada dalam kondisi baik | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan jenis barang milik daerah perangkat daerah penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang berada dalam kondisi baik | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | **-** | **1.229.802.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan untuk kegiatan literasi. ]** | **Persentase pengunjung aktif perpustakaan yang mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, atau literasi digital) terhadap total anggota terdaftar.Minimal 85 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **85** | **85** | **1.229.802.500,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 556.838.500,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 30 Perpustakaan | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 1 Perpustakaan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi* | | | | 5 Layanan | 112.638.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 30 Perpustakaan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat* | | | | 120 Eksemplar | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0015 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi* | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 250 Orang | 68.460.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 45.740.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 2200 Eksemplar | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 260 Eksemplar | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 2 Perpustakaan | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.229.802.500,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 672.964.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya* | | | | 6 Orang | 33.930.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 8 Perpustakaan | 428.070.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Perpustakaan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 23 Orang | 178.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 300 Lokus | 32.964.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | **-** | **53.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 5 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 5 Eksemplar | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 53.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 Eksemplar | 53.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02.0004 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 Eksemplar | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **369.366.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | **-** | **356.451.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memanfaatkan arsip sebagai sumber literasi dan informasi. ]** | **Persentase pengguna layanan arsip yang terlibat dalam kegiatan literasi (pencarian, pembacaan, atau pemanfaatan arsip digital) terhadap total pengguna arsip. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **40** | **50** | **356.451.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 178.999.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan* | | | | 100 Berkas | 57.420.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 100 Berkas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 29 Laporan | 27.110.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.2.01.0008 | Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip* | | | | 20 Lembaga | 26.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0009 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 10.080.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis* | | | | 29 Instansi | 32.789.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip dinamis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 73.802.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip statis yang dikelola perangkat daerah | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI* | | | | 60 Arsip | 51.282.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip statis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 100 Arsip | 22.520.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan arsip statis yang dikelola perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 103.650.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan terakit pengelolaan kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 1850 Pengguna | 70.210.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan terakit pengelolaan kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 33.440.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Persentase capaian target urusan layanan terakit pengelolaan kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | **-** | **12.915.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase arsip penting yang terlindungi dan terselamatkan melalui penerapan sistem digital monitoring dan backup. ]** | **Persentase arsip penting yang memiliki sistem backup digital dan proteksi keamanan data dalam 1 tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **40** | **50** | **12.915.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | - | | | - | 12.915.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | 120 Berkas | 12.915.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN DAERAH** | | | | | | **11.604.091.581,00** | | | | | | | **13.211.420.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **11.604.091.581,00** | | | | | | | **13.211.420.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **11.604.091.581,00** | | | | | | | **13.211.420.000,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **7.390.806.581,00** | | | | | | | **8.351.420.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **7.390.806.581,00** | - | - | - | - | - | - | **8.351.420.000,00** | - |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 15 Dokumen | 12.160.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 13.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.030.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1.095.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 134 Data | 1.035.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 44 Dokumen | 6.495.228.081,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 7.192.420.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 67 Orang/bulan | 6.321.483.081,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 172.680.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 190.920.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 1.065.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* | - | | | 1 Dokumen | 1.100.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 1.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 67 Orang | 14.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 16.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 356.018.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 475.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.190.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 79.943.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 80.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 6.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 242.895.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 355.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 4 Jenis | 218.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 320.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 43.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 45.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 130.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 175.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 227.300.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 267.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 12.500.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 214.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 245.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik* | - | | | 3 Jenis | 67.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 65.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | **2,2 Persen** | **2.152.945.000,00** | | | | | | | **2.150.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase produksi perikanan tangkap yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB daerah. ]** | **Persentase peningkatan volume produksi perikanan tangkap yang dipasarkan dan tercatat dalam data resmi dalam 1 tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **14** | **5** | **8** | **10** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya* | - | | | 4.124,5 Ton | 250.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan | - | 550.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase nelayan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan perikanan tangkap sesuai standar yang ditetapkan. ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya* | - | | | 50 Kelompok | 1.902.945.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | - | 1.600.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 620 Orang | 124.195.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase rumah tangga miskin pesisir yang memperoleh peningkatan pendapatan dari usaha perikanan tangkap berkelanjutan. ]** | **Persentase rumah tangga miskin pesisir yang pendapatan bulanan dari perikanan tangkap meningkat minimal 5 % dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **40** | **50** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 30 Kelompok | 41.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase nelayan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan perikanan tangkap sesuai standar yang ditetapkan. ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rumah tangga miskin pesisir yang memperoleh peningkatan pendapatan dari usaha perikanan tangkap berkelanjutan. ]** | **Persentase rumah tangga miskin pesisir yang pendapatan bulanan dari perikanan tangkap meningkat minimal 5 % dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **40** | **50** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha* | | | | 20 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase nelayan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan perikanan tangkap sesuai standar yang ditetapkan. ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase produksi perikanan tangkap yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB daerah. ]** | **Persentase peningkatan volume produksi perikanan tangkap yang dipasarkan dan tercatat dalam data resmi dalam 1 tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **14** | **5** | **8** | **10** | **2.152.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000.000,00** | - |
| | 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil* | | | | 170 Unit | 1.737.150.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | **2,3 Persen** | **1.260.292.500,00** | | | | | | | **1.720.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase petani budidaya ikan miskin yang mendapatkan tambahan pendapatan dari usaha perikanan budidaya yang produktif dan berkelanjutan. ]** | **Persentase petani budidaya ikan miskin yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 15% dalam 12 bulan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **40** | **50** | **1.260.292.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.720.000.000,00** | - |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan* | - | | | 40 Kelompok | 49.910.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | - | 85.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 20 Kelompok | 22.110.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 45.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | | | | 20 Kelompok | 27.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Kelompok | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase produksi perikanan budidaya yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB daerah. ]** | **Persentase peningkatan volume produksi perikanan budidaya yang dipasarkan dan tercatat dalam data resmi dalam 1 tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **14** | **5** | **8** | **10** | **1.260.292.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.720.000.000,00** | - |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar* | - | | | 40 Kelompok | 1.210.382.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | - | 1.635.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 6 Unit | 684.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga yang mengakses ikan hasil budidaya sebagai sumber protein dalam rangka pencegahan stunting. ]** | **Persentase keluarga dengan balita yang mengonsumsi ikan hasil budidaya minimal 3 kali per minggu meningkat dari 30 % menjadi 50 % di wilayah target pada akhir tahun** | **90** | **30** | **40** | **50** | **1.260.292.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.720.000.000,00** | - |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | | | | 1 Dokumen | 22.732.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0008 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase produksi perikanan budidaya yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB daerah. ]** | **Persentase peningkatan volume produksi perikanan budidaya yang dipasarkan dan tercatat dalam data resmi dalam 1 tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **14** | **5** | **8** | **10** | **1.260.292.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.720.000.000,00** | - |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 10 Unit | 428.250.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga yang mengakses ikan hasil budidaya sebagai sumber protein dalam rangka pencegahan stunting. ]** | **Persentase keluarga dengan balita yang mengonsumsi ikan hasil budidaya minimal 3 kali per minggu meningkat dari 30 % menjadi 50 % di wilayah target pada akhir tahun** | **90** | **30** | **40** | **50** | **1.260.292.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.720.000.000,00** | - |
| | 3.25.04.2.04.0013 | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia* | | | | 1 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 75.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | **10 Persen** | **11.050.000,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mendukung kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase kawasan perikanan tangkap dan budidaya yang diawasi dan dikelola sesuai standar kelestarian dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **40** | **50** | **11.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **40.000.000,00** | - |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Jenis Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | - | | | 4 Jenis | 11.050.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Menengah Kecil Sektor Kelautan dan Perikanan (UMK) | - | 40.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 5 Pelaku Usaha | 2.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Menengah Kecil Sektor Kelautan dan Perikanan (UMK) | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.05.2.01.0006 | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 9 Pelaku Usaha | 3.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Menengah Kecil Sektor Kelautan dan Perikanan (UMK) | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 5 Pelaku Usaha | 3.400.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Menengah Kecil Sektor Kelautan dan Perikanan (UMK) | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.05.2.01.0012 | Pengawasan Ekstraksi Garam | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya* | | | | 1 Pelaku Usaha | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Menengah Kecil Sektor Kelautan dan Perikanan (UMK) | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | **1,18 Persen** | **788.997.500,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase rumah tangga miskin nelayan yang mendapatkan tambahan pendapatan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. ]** | **Meningkatnya persentase rumah tangga miskin nelayan yang pendapatan bulanannya dari hasil perikanan olahan naik minimal 20% dalam 12 bulan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan* | - | | | 40 Unit Usaha | 44.397.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Keluarga Beresiko Stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | - | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 40 Unit Usaha | 44.397.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Keluarga Beresiko Stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk olahan perikanan bergizi yang tersedia dan terjangkau di pasar lokal untuk mendukung pencegahan stunting. ]** | **Persentase produk olahan perikanan bernilai gizi tinggi yang dipasarkan di pasar lokal (wilayah target) meningkat dari 10 % menjadi 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil perikanan yang terolah dan terdistribusi secara efisien untuk menjaga stabilitas harga produk perikanan. ]** | **Persentase hasil perikanan yang berhasil diolah dan dipasarkan tepat waktu mencapai minimal 50 % setiap tahun, sehingga mengurangi fluktuasi harga di pasar lokal.** | **90** | **30** | **40** | **50** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan* | - | | | 7 Jenis | 744.600.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Keluarga Beresiko Stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | - | 850.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1100 Ton | 82.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Keluarga Beresiko Stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengolahan perikanan yang terserap dan dipasarkan secara optimal ke pasar lokal dan regional. ]** | **Persentase volume hasil pengolahan perikanan yang berhasil dipasarkan ke pasar lokal dan regional, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan secara efisien untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase hasil perikanan yang berhasil diolah dan dipasarkan dengan nilai tambah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **40** | **50** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk olahan perikanan bergizi yang tersedia dan terjangkau di pasar lokal untuk mendukung pencegahan stunting. ]** | **Persentase produk olahan perikanan bernilai gizi tinggi yang dipasarkan di pasar lokal (wilayah target) meningkat dari 10 % menjadi 30 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaku usaha hasil perikanan yang menerima layanan pengolahan dan pemasaran sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase pelaku usaha hasil perikanan yang terlayani dengan layanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai standar, dengan tingkat kepuasan minimal 50 % dalam 12 bulan.** | **90** | **30** | **40** | **50** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 10 Pelaku Usaha | 662.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Keluarga Beresiko Stunting, Penyuluh Perikanan, dan Aparatur | | 700.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan secara efisien untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase hasil perikanan yang berhasil diolah dan dipasarkan dengan nilai tambah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **40** | **50** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat rumah tangga dan UMKM. ]** | **Persentase pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 10% dalam waktu 12 bulan setelah mendapat fasilitasi program. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **788.997.500,00** | - | - | - | - | - | - | **950.000.000,00** | - |
| | | **UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN** | | | | | | **34.027.500,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **34.027.500,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **34.027.500,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | **2,2 Persen** | **34.027.500,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **34.027.500,00** | - | - | - | - | - | - | **35.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | *Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya* | - | | | 1 Unit | 34.027.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat dan Aparatur | - | 35.000.000,00 | UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 2 Layanan | 34.027.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat dan Aparatur | | 35.000.000,00 | UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN |
| | | **UPTD BALAI BENIH IKAN** | | | | | | **144.690.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **144.690.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **144.690.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | **2,3 Persen** | **144.690.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar* | - | | | 40 Kelompok | 144.690.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Aparatur | - | 150.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH IKAN |
| | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 40 Unit | 144.690.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Minasa Baji Kab. Maros, Tanralili, Kurusumange | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Aparatur | | 150.000.000,00 | UPTD BALAI BENIH IKAN |
| | | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | | | | **16.677.508.939,00** | | | | | | | **19.341.364.919,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.017.658.939,00** | | | | | | | **14.674.364.919,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **14.017.658.939,00** | | | | | | | **14.674.364.919,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **8.547.285.939,00** | | | | | | | **9.616.364.919,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 16.075.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 23.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.810.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.630.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 930.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.675.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.125.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 3.080.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.568.956.239,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 8.183.558.919,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 86 Orang/bulan | 7.387.696.239,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.915.683.919,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 175.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.260.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 6 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.875.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 393.754.700,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 708.306.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 18.706.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 23.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 67.138.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 137.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 11.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 62.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 204.160.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 388.306.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 84.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 86.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 195.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 195.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 318.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 516.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 14.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 304.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 55.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 110.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 67.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.547.285.939,00** | - | - | - | - | - | - | **9.616.364.919,00** | - |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 43.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | **-** | **999.245.000,00** | | | | | | | **1.378.000.000,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 631.655.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 803.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 75 Orang | 73.715.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 31.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda dari keluarga miskin yang memiliki keterampilan kewirausahaan dan daya saing kerja dalam satu tahun. ]** | **Persentase pemuda dari keluarga miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau keterampilan kerja dan berhasil memulai usaha atau mendapatkan pekerjaan, Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 10 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 21.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda penerima layanan pelatihan dan pendampingan peningkatan daya saing yang sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase pemuda peserta program yang menyelesaikan pelatihan dan memberikan penilaian “puas” atau “sangat puas” terhadap kualitas materi, metode, dan kelancaran penyelenggaraan, dengan target >= 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **40** | **50** | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda* | | | | 3 Kegiatan | 104.850.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 125.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang secara aktif berpartisipasi dalam organisasi, kegiatan pembangunan, dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan. ]** | **Persentase pemuda usia 15-30 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti minimal satu organisasi kepemudaan, kegiatan pembangunan, atau forum pengambilan keputusan dalam 12 bulan terakhir. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi* | | | | 250 Orang | 286.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan memulai usaha mandiri. ]** | **Persentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang memulai usaha dalam waktu maksimal 6 bulan setelah pelatihan terhadap total peserta pelatihan dalam tahun berjalan.Minimal 30% diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 150 Orang | 146.890.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | - | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase pemuda usia 16-25 tahun yang mengikuti pelatihan keterampilan dan lulus sertifikasi kompetensi meningkat menjadi minimal 10 % dalam satu tahun.** | **30** | **0** | **5** | **10** | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya persentase produktivitas pemuda dalam berwirausaha dan berpartisipasi aktif di sektor ekonomi lokal. ]** | **Persentase pemuda peserta program yang mengalami peningkatan pendapatan minimal 10% dalam 12 bulan setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 367.590.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 575.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 14 Organisasi | 350.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 550.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | - | - | - | - | - | - | **999.245.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.378.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota* | | | | 50 Orang | 16.990.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | **-** | **4.128.128.000,00** | | | | | | | **3.091.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 618.333.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 3 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar* | | | | 3 Dokumen | 118.333.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 227.800.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 136.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 5 Kegiatan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 85.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota* | | | | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 100 Orang | 77.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 31.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 12.000.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 180.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 50 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota* | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | - | - | | | - | 3.056.195.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 2.200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3.056.195.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 2.200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | - | | | - | 213.800.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 275.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi* | | | | 12 Laporan | 83.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat* | | | | 3 Dokumen | 66.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 110.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | | | | 2 Lembaga | 34.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | **-** | **343.000.000,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | - | | | - | 343.000.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 589.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 24.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 440 Organisasi | 331.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 565.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2.659.850.000,00** | | | | | | | **4.667.000.000,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **2.659.850.000,00** | | | | | | | **4.667.000.000,00** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | **-** | **1.101.200.000,00** | | | | | | | **2.238.000.000,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 115.000.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 470.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan* | | | | 100 Orang | 65.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 170.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 120.000.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.02.0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 1 Lokasi | 70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 854.200.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.612.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)* | | | | 3 Lokasi | 50.675.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 125.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 5 Unit | 632.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 1.400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 57.275.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 52.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota* | | | | 1 Dokumen | 113.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 35.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 12.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.04.0016 | Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya* | | | | 10 Badan Usaha | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | **-** | **737.620.000,00** | | | | | | | **1.130.000.000,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 737.620.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.130.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 5 Kegiatan | 719.620.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 7 Promosi | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | **-** | **683.850.000,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | - | | | - | 663.850.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 960.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.02.0003 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif* | | | | 10 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.02.0004 | Penyediaan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif* | | | | 3 Dokumen | 617.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.02.0016 | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah* | | | | 1 Dokumen | 26.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | **-** | **137.180.000,00** | | | | | | | **299.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | - | | | - | 41.390.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 231.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif* | | | | 0 Laporan | 16.190.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 31.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 200 Orang | 25.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | - | - | | | - | 95.790.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 68.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif* | | | | 50 Orang | 24.600.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0002 | Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha* | | | | 3 Laporan | 55.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 31.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0007 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi  Subsektor Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif* | | | | 10 Orang | 15.390.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH** | | | | | | **24.211.777.125,00** | | | | | | | **24.186.590.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **528.192.900,00** | | | | | | | **626.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **528.192.900,00** | | | | | | | **626.000.000,00** | |
| 1. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | **-** | **15.000.000,00** | | | | | | | **65.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase rumah tangga miskin yang terlibat dalam usaha pangan lokal berbasis kemandirian. ]** | **Meningkatnya persentase rumah tangga miskin yang memiliki usaha pangan lokal mandiri dan mengalami kenaikan pendapatan minimal 5 % dalam 1 tahun.** | **10** | **5** | **5** | **6** | **15.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **65.000.000,00** | - |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 65.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik* | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 2. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | **-** | **429.330.000,00** | | | | | | | **472.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **429.330.000,00** | - | - | - | - | - | - | **472.000.000,00** | - |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | - | | | - | 179.330.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 222.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | | | | 250 Keluarga | 29.554.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota* | | | | 2 laporan | 18.076.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0011 | Pemantauan Stok Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Stok Pangan* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 49.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 80.000.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 5,5 Ton | 80.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | - | - | | | - | 170.000.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 170.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 2 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.04.0005 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | **-** | **53.863.000,00** | | | | | | | **59.000.000,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | - | - | | | - | 14.000.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 14.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 14.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 14.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 39.863.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 45.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 2 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi* | | | | 1 Dokumen | 19.863.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 4. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | **-** | **29.999.900,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pangan segar yang beredar dan memenuhi standar keamanan pangan. ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **29.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 29.999.900,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **29.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | - |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 14.999.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 0 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **23.683.584.225,00** | | | | | | | **23.560.590.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **23.683.584.225,00** | | | | | | | **23.560.590.000,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **20.826.396.425,00** | | | | | | | **20.770.090.000,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 28.550.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 29.100.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 7.350.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 19.536.385.425,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 19.375.450.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 225 Orang/bulan | 19.328.775.425,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 19.163.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 203.160.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 208.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 700.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 6 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 750.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 750.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 0 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 20.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 51 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 507.961.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 509.540.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.540.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 14.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 399.961.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 299.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 350.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 100 Unit | 149.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 301.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 329.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 292.600.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 320.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 140.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 155.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 230 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 95.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | **-** | **707.122.800,00** | | | | | | | **710.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | - | | | - | 257.495.500,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 260.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 2 Laporan | 24.974.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 2 Laporan | 24.661.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak* | | | | 0 Ton | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0005 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0006 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan* | | | | 1 Laporan | 45.920.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura* | | | | 2 Laporan | 5.970.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0012 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan* | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan* | | | | 2 Laporan | 5.970.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0016 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura* | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 129.628.500,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 130.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 129.628.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 130.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 149.999.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih/bibit ternak yang beredar* | | | | 12 Laporan | 149.999.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | - | - | | | - | 169.999.800,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 170.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 1500 Ekor | 169.999.800,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 170.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | **-** | **1.034.510.500,00** | | | | | | | **1.129.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | - | - | | | - | 44.960.500,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 119.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 44.960.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 45.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0010 | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 74.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | - | | | - | 989.550.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 1.010.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 5 Unit | 989.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | **-** | **95.098.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.003.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali* | | | | 1 Laporan | 50.003.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 15.090.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.02.0005 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan* | | | | 1 Laporan | 15.090.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | - | | | - | 30.005.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik* | | | | 1 Laporan Unit Usaha | 30.005.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 5. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | **-** | **570.870.000,00** | | | | | | | **530.000.000,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 570.870.000,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 530.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 100 Ha | 340.861.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani* | | | | 100 Ha | 99.988.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan* | | | | 100 Ha | 130.021.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 130.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan* | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 6. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | **-** | **8.062.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | - | | | - | 8.062.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.06.2.02.0001 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan* | | | | 1 Dokumen | 8.062.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 11.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.06.2.02.0005 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| 7. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | **-** | **441.524.500,00** | | | | | | | **261.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | - | | | - | 441.524.500,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 261.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 14 Unit | 10.899.900,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1229 Unit | 300.000.500,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 14 Unit | 10.466.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 11.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi* | | | | 5 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 125 Orang | 10.158.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 14 Unit | 10.000.100,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH |
| | | **UPTD PUSKESWAN** | | | | | | **200.953.750,00** | | | | | | | **201.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **200.953.750,00** | | | | | | | **201.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **200.953.750,00** | | | | | | | **201.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | **-** | **200.953.750,00** | | | | | | | **201.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 24.999.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 25.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 12 Laporan | 24.999.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 25.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 156.993.750,00 | | | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 157.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 12.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 4 Laporan | 144.993.750,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 145.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - | - | | | - | 12.961.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 13.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.04.0007 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi* | | | | 15 Orang | 12.961.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 13.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 6.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan* | | | | 5 Unit | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 6.000.000,00 | UPTD PUSKESWAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **53.074.155.274,00** | | | | | | | **50.600.000.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **53.074.155.274,00** | | | | | | | **50.600.000.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **53.074.155.274,00** | | | | | | | **50.600.000.000,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **40.579.285.274,00** | | | | | | | **44.045.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **40.579.285.274,00** | - | - | - | - | - | - | **44.045.000.000,00** | - |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 6 Dokumen | 46.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 65.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 24.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 45 Dokumen | 20.359.315.274,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 22.146.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2492 Orang/bulan | 19.729.155.274,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 21.556.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 608.160.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 560.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 7.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 2.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 22.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 38.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 24.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian PD yang dilaksanakan* | - | | | 340 Orang | 414.650.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 422.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 11 Paket | 394.650.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang dilaksanakan* | - | | | 3 Layanan | 4.756.598.400,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 5.050.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 280.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 523.238.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 530.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 1.850.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 1.900.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 1.993.360.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 2.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 1.950.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 2.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 950.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 22 Unit | 650.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 350.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 1.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 2.613.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 2.450.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 2.483.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 2.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 Jenis | 1.375.470.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | - | 2.699.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 395.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 533.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 800.470.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Sekretariat Daerah | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | - | | | 2 Orang | 1.347.501.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Bupati dan Wakil Bupati | - | 1.470.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 165.051.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Bupati dan Wakil Bupati | | 170.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 442.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Bupati dan Wakil Bupati | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang | 140.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Bupati dan Wakil Bupati | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Bupati dan Wakil Bupati | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Jumlah Pelaksanaan Layanan Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi* | - | | | 2 Paket | 1.860.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 1.740.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 900.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 720.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 720.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 240.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Kebijakan Penataan Organisasi yang dikeluarkan* | - | | | 5 Kebijakan | 489.050.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | - | 635.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 5 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 85.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 4 Laporan | 35.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 89.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 4 Dokumen | 150.350.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 134.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Jumlah Layanan Keprotokoleran dan komunikasi pimpinan* | - | | | 3 Layanan | 5.345.700.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Media Elektornik dan Media Masa | - | 5.230.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 2 Laporan | 1.192.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Media Elektornik dan Media Masa | | 1.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Media Elektornik dan Media Masa | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 4.143.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Media Elektornik dan Media Masa | | 3.920.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | **100 Persen** | **10.822.970.000,00** | | | | | | | **4.525.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan yang dilaksanakan* | - | | | 3 Kebijakan | 722.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | - | 860.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 3 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 1 Dokumen | 269.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 290.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 4 Dokumen | 423.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 470.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yg dilaksanakan* | - | | | 3 Kebijakan | 9.449.850.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Peserta MTQ/STQ dan Jemaah Haji | - | 2.930.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 4 Dokumen | 1.524.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Peserta MTQ/STQ dan Jemaah Haji | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan ]** | **Persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang terealisasi sesuai target tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 3 Dokumen | 7.825.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Peserta MTQ/STQ dan Jemaah Haji | | 1.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan ]** | **Persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang terealisasi sesuai target tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah, Peserta MTQ/STQ dan Jemaah Haji | | 130.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Jumlah Kebijakan terkait Hukum dan Penetapan Produk Hukum Daerah* | - | | | 3 Kebijakan | 578.920.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin | - | 605.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 1600 Dokumen | 101.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin | | 75.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan ]** | **Persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang terealisasi sesuai target tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 6 Kasus | 452.220.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin | | 480.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 1600 Dokumen | 25.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan ]** | **Persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang terealisasi sesuai target tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Jumlah Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 10 Kegiatan | 71.800.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | - | 130.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 55 Dokumen | 38.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan ]** | **Persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang terealisasi sesuai target tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 23.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan literasi yang berjalan efektif dan mendorong partisipasi masyarakat ]** | **Persentase kebijakan literasi yang terimplementasi dan diikuti peningkatan partisipasi masyarakat terhadap total kebijakan literasi yang dibuat. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaporkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan usia 15-49 tahun dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang telah terkoordinasi dan diimplementasikan sesuai rencana di tingkat pemerintahan daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi antar OPD dan lintas sektor yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas unit yang dievaluasi, efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi sosial yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi lintas OPD yang menghasilkan penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama ]** | **Persentase kebijakan yang mengakomodasi nilai kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintahan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan ]** | **Persentase kebijakan/program yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak dari total kebijakan/program yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka koordinasi program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase kebijakan yang dirumuskan dan disahkan sebagai hasil koordinasi penanganan gizi buruk atau stunting minimal 50 % dari total usulan kebijakan setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan dan program yang secara eksplisit mengakomodasi peningkatan akses dan mutu pendidikan anak mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung penerapan inovasi dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas sektor yang mengakomodasi inovasi dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pemerintah daerah yang mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ]** | **Persentase kebijakan dan forum koordinasi yang secara aktif mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pemerintahan daerah yang mengintegrasikan responsif gender dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase kebijakan atau program kesejahteraan masyarakat yang memuat analisis dan aksi responsif gender terhadap total kebijakan/program yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat ]** | **Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan atau fasilitasi koordinasi pemerintah daerah yang memuat dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam organisasi, pembangunan, dan pengambilan keputusan terhadap total kebijakan dan fasilitasi yang dikeluarkan dalam tahun berjalan.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan ]** | **Persentase pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual yang terealisasi sesuai target tahunan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan Terintegrasi Penanggulangan Risiko Bencana yang Disusun dan Dikoordinasikan Antar OPD ]** | **Persentase kebijakan penanggulangan risiko bencana yang telah disusun dan terkoordinasi antar OPD. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **10.822.970.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.525.000.000,00** | - |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | **100 Persen** | **1.671.900.000,00** | | | | | | | **2.030.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD dan Pemangku Kepentingan ]** | **Persentase kebijakan dan program akses air bersih yang telah disinkronkan dan dikordinasikan secara efektif antar OPD terkait dan pemangku kepentingan terhadap total kebijakan/program yang direncanakan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dikeluarkan* | - | | | 3 Kebijakan | 345.900.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | - | 370.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase kebijakan dan program lintas sektor yang terkoordinasi dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kebijakan lintas sektor yang berhasil diimplementasikan dan menghasilkan program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terkoordinasi dan terealisasi dengan baik (minimal 50 % dari total kebijakan) yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 6 Laporan | 239.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan ekonomi daerah yang terintegrasi dan sinergis dalam mengendalikan inflasi ]** | **Persentase kebijakan ekonomi yang dihasilkan dan diimplementasikan dengan koordinasi lintas sektor untuk pengendalian inflasi, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan yang mengutamakan inklusivitas dan pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase kebijakan dan program pembangunan yang diselaraskan dan diimplementasikan secara koordinatif dengan fokus pada pengentasan kelompok pendapatan 40% terbawah, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase kebijakan dan program lintas sektor yang terkoordinasi dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi program perekonomian yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan selama 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD bidang perekonomian yang berdampak pada penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan sektoral yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor real estate secara berkelanjutan ]** | **Persentase dokumen kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang memuat dukungan eksplisit terhadap pengembangan real estate, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar OPD yang mendukung pengembangan sektor jasa di daerah ]** | **Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah setelah penerapan kebijakan dan koordinasi terpadu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan pariwisata oleh Sekretariat Daerah untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase realisasi koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan pariwisata oleh Sekretariat Daerah terhadap target tahunan yang mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan yang dihasilkan dan diimplementasikan ]** | **Persentase rancangan kebijakan dan program pengembangan industri pengolahan yang disusun dan diimplementasikan tepat waktu, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase sinergi program lintas sektor dalam mendukung penguatan sektor pertanian ]** | **Persentase program/kegiatan lintas perangkat daerah yang bersinergi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sektor pertanian dari total program terkait pembangunan ekonomi daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kebijakan lintas sektor yang berhasil diimplementasikan dan menghasilkan program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara terintegrasi ]** | **Persentase kebijakan dan program koordinasi lintas sektor yang dihasilkan dan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif terhadap total kebijakan perekonomian daerah. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 1 Dokumen | 86.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Pemerintah Daerah | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan yang dihasilkan dan diimplementasikan ]** | **Persentase rancangan kebijakan dan program pengembangan industri pengolahan yang disusun dan diimplementasikan tepat waktu, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung pemuda menjadi wirausahawan baru ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan tpemberdayaan wirausahawan pemuda secara terkoordinir terhadap total perangkat daerah terkait dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung penyerapan lulusan vokasi ]** | **Persentase kebijakan/program pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total kebijakan/program yang dirumuskan dan dikoordinasikan. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terkoordinasi dan terealisasi dengan baik (minimal 50 % dari total kebijakan) yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kebijakan lintas sektor yang berhasil diimplementasikan dan menghasilkan program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan yang mengutamakan inklusivitas dan pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase kebijakan dan program pembangunan yang diselaraskan dan diimplementasikan secara koordinatif dengan fokus pada pengentasan kelompok pendapatan 40% terbawah, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase kebijakan dan program lintas sektor yang terkoordinasi dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perekonomian yang mendukung peningkatan cakupan pekerja sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi perekonomian yang mengintegrasikan program peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, dengan target minimal 50 % kebijakan terkait diimplementasikan dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi program perekonomian yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan selama 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD bidang perekonomian yang berdampak pada penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi yang Mendukung Digitalisasi UMKM ]** | **Persentase kebijakan atau program koordinasi yang mengintegrasikan dukungan digitalisasi UMKM, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Kebijakan dan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Antar OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang secara rutin melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan* | - | | | 3 Kebijakan | 410.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | - | 470.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD Terkait Investasi Daerah yang Efektif ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD yang terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan percepatan proses investasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan yang diimplementasikan untuk pengembangan jaringan internet 4G di wilayah blankspot terhadap total kebijakan yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang mendukung penguatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase kebijakan pembangunan hasil koordinasi dan evaluasi yang mendukung peningkatan nilai indeks SPBE dalam domain kebijakan internal. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 12 Laporan | 290.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 330.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung penyerapan lulusan vokasi ]** | **Persentase kebijakan/program pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total kebijakan/program yang dirumuskan dan dikoordinasikan. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder Dalam Mendukung Pengembangan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi implementasi pengembangan transportasi yang diadopsi oleh OPD terkait dalam satu tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD yang Mendukung Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Mantap ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi yang disusun dan diimplementasikan antar OPD terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan mantap. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD dan Pemangku Kepentingan ]** | **Persentase kebijakan dan program akses air bersih yang telah disinkronkan dan dikordinasikan secara efektif antar OPD terkait dan pemangku kepentingan terhadap total kebijakan/program yang direncanakan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan yang diimplementasikan untuk pengembangan jaringan internet 4G di wilayah blankspot terhadap total kebijakan yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 17 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Kebijakan dan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Antar OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang secara rutin melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD Terkait Investasi Daerah yang Efektif ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD yang terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan percepatan proses investasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi yang Mendukung Digitalisasi UMKM ]** | **Persentase kebijakan atau program koordinasi yang mengintegrasikan dukungan digitalisasi UMKM, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan* | - | | | 3 Kebijakan | 678.700.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga | - | 840.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1015 Dokumen | 385.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga | | 470.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terkoordinasi dan terealisasi dengan baik (minimal 50 % dari total kebijakan) yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar OPD yang mendukung pengembangan sektor jasa di daerah ]** | **Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah setelah penerapan kebijakan dan koordinasi terpadu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang mendukung penguatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase kebijakan pembangunan hasil koordinasi dan evaluasi yang mendukung peningkatan nilai indeks SPBE dalam domain kebijakan internal. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD dan Pemangku Kepentingan ]** | **Persentase kebijakan dan program akses air bersih yang telah disinkronkan dan dikordinasikan secara efektif antar OPD terkait dan pemangku kepentingan terhadap total kebijakan/program yang direncanakan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD yang Mendukung Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Mantap ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi yang disusun dan diimplementasikan antar OPD terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan mantap. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan yang diimplementasikan untuk pengembangan jaringan internet 4G di wilayah blankspot terhadap total kebijakan yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder Dalam Mendukung Pengembangan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi implementasi pengembangan transportasi yang diadopsi oleh OPD terkait dalam satu tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara terintegrasi ]** | **Persentase kebijakan dan program koordinasi lintas sektor yang dihasilkan dan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif terhadap total kebijakan perekonomian daerah. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 3 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang mendukung penguatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase kebijakan pembangunan hasil koordinasi dan evaluasi yang mendukung peningkatan nilai indeks SPBE dalam domain kebijakan internal. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi yang Mendukung Digitalisasi UMKM ]** | **Persentase kebijakan atau program koordinasi yang mengintegrasikan dukungan digitalisasi UMKM, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar OPD yang mendukung pengembangan sektor jasa di daerah ]** | **Meningkatnya persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah setelah penerapan kebijakan dan koordinasi terpadu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 89 Orang | 93.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Organisasi Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase sinergi program lintas sektor dalam mendukung penguatan sektor pertanian ]** | **Persentase program/kegiatan lintas perangkat daerah yang bersinergi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sektor pertanian dari total program terkait pembangunan ekonomi daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung penyerapan lulusan vokasi ]** | **Persentase kebijakan/program pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total kebijakan/program yang dirumuskan dan dikoordinasikan. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan yang mengutamakan inklusivitas dan pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase kebijakan dan program pembangunan yang diselaraskan dan diimplementasikan secara koordinatif dengan fokus pada pengentasan kelompok pendapatan 40% terbawah, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder Dalam Mendukung Pengembangan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi implementasi pengembangan transportasi yang diadopsi oleh OPD terkait dalam satu tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kebijakan lintas sektor yang berhasil diimplementasikan dan menghasilkan program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara terintegrasi ]** | **Persentase kebijakan dan program koordinasi lintas sektor yang dihasilkan dan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif terhadap total kebijakan perekonomian daerah. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD yang Mendukung Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Mantap ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi yang disusun dan diimplementasikan antar OPD terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan mantap. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perekonomian yang mendukung peningkatan cakupan pekerja sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi perekonomian yang mengintegrasikan program peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, dengan target minimal 50 % kebijakan terkait diimplementasikan dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD dan Pemangku Kepentingan ]** | **Persentase kebijakan dan program akses air bersih yang telah disinkronkan dan dikordinasikan secara efektif antar OPD terkait dan pemangku kepentingan terhadap total kebijakan/program yang direncanakan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD Terkait Investasi Daerah yang Efektif ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD yang terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan percepatan proses investasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan yang diimplementasikan untuk pengembangan jaringan internet 4G di wilayah blankspot terhadap total kebijakan yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan sektoral yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor real estate secara berkelanjutan ]** | **Persentase dokumen kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang memuat dukungan eksplisit terhadap pengembangan real estate, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan yang dihasilkan dan diimplementasikan ]** | **Persentase rancangan kebijakan dan program pengembangan industri pengolahan yang disusun dan diimplementasikan tepat waktu, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - | - | | | - | 237.300.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 4 Dokumen | 79.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 130.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perangkat daerah yang mendukung pemuda menjadi wirausahawan baru ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan tpemberdayaan wirausahawan pemuda secara terkoordinir terhadap total perangkat daerah terkait dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi yang Mendukung Digitalisasi UMKM ]** | **Persentase kebijakan atau program koordinasi yang mengintegrasikan dukungan digitalisasi UMKM, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD Terkait Investasi Daerah yang Efektif ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD yang terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan percepatan proses investasi, minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi perekonomian yang mendukung peningkatan cakupan pekerja sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi perekonomian yang mengintegrasikan program peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, dengan target minimal 50 % kebijakan terkait diimplementasikan dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase kebijakan dan program lintas sektor yang terkoordinasi dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan ekonomi daerah yang terintegrasi dan sinergis dalam mengendalikan inflasi ]** | **Persentase kebijakan ekonomi yang dihasilkan dan diimplementasikan dengan koordinasi lintas sektor untuk pengendalian inflasi, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kebijakan lintas sektor yang berhasil diimplementasikan dan menghasilkan program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan ekonomi yang mendukung penyerapan lulusan vokasi ]** | **Persentase kebijakan/program pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total kebijakan/program yang dirumuskan dan dikoordinasikan. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase sinergi program lintas sektor dalam mendukung penguatan sektor pertanian ]** | **Persentase program/kegiatan lintas perangkat daerah yang bersinergi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sektor pertanian dari total program terkait pembangunan ekonomi daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Kebijakan dan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Antar OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang secara rutin melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 4 Dokumen | 79.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan pariwisata oleh Sekretariat Daerah untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase realisasi koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan pariwisata oleh Sekretariat Daerah terhadap target tahunan yang mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **30** | **30** | **80** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder Dalam Mendukung Pengembangan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi implementasi pengembangan transportasi yang diadopsi oleh OPD terkait dalam satu tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang mendukung penguatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase kebijakan pembangunan hasil koordinasi dan evaluasi yang mendukung peningkatan nilai indeks SPBE dalam domain kebijakan internal. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kebijakan lintas sektor yang berhasil diimplementasikan dan menghasilkan program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara terintegrasi ]** | **Persentase kebijakan dan program koordinasi lintas sektor yang dihasilkan dan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif terhadap total kebijakan perekonomian daerah. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD yang Mendukung Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Mantap ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi yang disusun dan diimplementasikan antar OPD terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan mantap. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Kebijakan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase kebijakan dan hasil koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan yang diimplementasikan untuk pengembangan jaringan internet 4G di wilayah blankspot terhadap total kebijakan yang disusun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terkoordinasi dan terealisasi dengan baik (minimal 50 % dari total kebijakan) yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 50 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* | | | | 4 Dokumen | 79.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder Dalam Mendukung Pengembangan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi implementasi pengembangan transportasi yang diadopsi oleh OPD terkait dalam satu tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pembangunan yang mengutamakan inklusivitas dan pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase kebijakan dan program pembangunan yang diselaraskan dan diimplementasikan secara koordinatif dengan fokus pada pengentasan kelompok pendapatan 40% terbawah, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan sektoral yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor real estate secara berkelanjutan ]** | **Persentase dokumen kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang memuat dukungan eksplisit terhadap pengembangan real estate, Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi program perekonomian yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan selama 12 bulan ]** | **Persentase kebijakan dan koordinasi antar OPD bidang perekonomian yang berdampak pada penurunan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kebijakan dan Koordinasi Antar OPD yang Mendukung Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Mantap ]** | **Persentase kebijakan dan mekanisme koordinasi yang disusun dan diimplementasikan antar OPD terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan mantap. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD dan Pemangku Kepentingan ]** | **Persentase kebijakan dan program akses air bersih yang telah disinkronkan dan dikordinasikan secara efektif antar OPD terkait dan pemangku kepentingan terhadap total kebijakan/program yang direncanakan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **50** | **1.671.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.030.000.000,00** | - |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **44.936.827.590,00** | | | | | | | **45.564.594.001,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **44.936.827.590,00** | | | | | | | **45.564.594.001,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **44.936.827.590,00** | | | | | | | **45.564.594.001,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **31.754.013.790,00** | | | | | | | **32.967.374.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **31.754.013.790,00** | - | - | - | - | - | - | **32.967.374.000,00** | - |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 45.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 45.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.622.692.790,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.711.566.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 5.418.452.790,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.507.326.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 180.240.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 180.240.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 41.400.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 41.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 41.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 41.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.916.931.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.976.103.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 262.045.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 262.045.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 391.719.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 470.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 137.645.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 137.645.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 50 Dokumen | 12.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 110.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 92.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 378.540.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 381.700.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 604.482.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 599.713.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 349.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 75.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 274.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 825.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 733.750.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 821.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 43.300.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 43.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 42.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 42.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 648.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 736.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 727.205.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.153.670.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 225.460.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 229.270.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 65.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 65.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 87.975.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 139.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 328.770.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | - | | | - | 20.446.185.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 20.446.185.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 35 Orang/Bulan | 19.966.685.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 19.966.685.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 339.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 339.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 35 Orang | 140.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 140.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | - | | | - | 1.865.250.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.865.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD* | | | | 12 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 12 Laporan | 61.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 61.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 1.800.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | **-** | **13.182.813.800,00** | | | | | | | **12.597.220.001,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan legislatif DPRD terhadap kebijakan dan program pengembangan kebudayaan daerah ]** | **Persentase rekomendasi kebijakan DPRD terkait kebudayaan yang diimplementasikan mencapai minimal 70% setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | - | | | - | 196.150.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 194.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 7.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk kebijakan DPRD yang mendukung program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting ]** | **Persentase rancangan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan DPRD yang membahas dan mendukung program penurunan gizi buruk atau stunting mencapai minimal 70 % dalam setiap masa sidang.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan legislatif DPRD terhadap kebijakan dan program pengembangan kebudayaan daerah ]** | **Persentase rekomendasi kebijakan DPRD terkait kebudayaan yang diimplementasikan mencapai minimal 70% setiap tahun.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 65.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 65.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD terkait kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri pengolahan yang diadopsi oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD mengenai pengembangan industri pengolahan yang diakomodasi dalam peraturan daerah atau kebijakan pemerintah, Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 18.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan DPRD yang terkoordinasi dan responsif dalam mendukung penurunan kemiskinan selama 12 bulan ]** | **Persentase rancangan kebijakan dan rekomendasi DPRD yang diadopsi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan minimal 70 % dalam satu tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi dan kebijakan DPRD yang mendukung peningkatan cakupan pekerja sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase usulan atau rekomendasi DPRD terkait jaminan ketenagakerjaan yang ditetapkan menjadi kebijakan daerah dalam 1 tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD terkait kebijakan pertanian yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD tentang sektor pertanian yang diadopsi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap tahun, dengan target minimal 70 % pada akhir tahun anggaran.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | - | | | - | 188.050.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 188.050.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 2 Dokumen | 33.450.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 33.450.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 2 Dokumen | 34.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 34.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan DPRD yang responsif terhadap kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase kebijakan DPRD yang disusun dan diimplementasikan dengan fokus pada pengentasan ketimpangan pendapatan, berdasarkan hasil evaluasi tahunan. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 2 Dokumen | 38.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 38.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan DPRD dalam pengawasan dan kebijakan pengendalian inflasi daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD terkait pengendalian inflasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah minimal 70 % setiap tahun untuk mendukung stabilitas harga.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 2 Dokumen | 28.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 28.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan administrasi dan teknis DPRD dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang berkualitas dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase rancangan peraturan daerah atau rekomendasi terkait pendidikan yang didukung dengan analisis dan data lengkap mencapai minimal 70 % dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester* | | | | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD terkait kebijakan ketenagakerjaan yang diadopsi oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja ]** | **Persentase rekomendasi DPRD tentang kebijakan ketenagakerjaan yang diimplementasikan dalam program pembangunan daerah setiap tahun anggaran. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 2 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 24.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD yang mendukung kerukunan umat beragama yang diadopsi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD terkait kerukunan umat beragama yang diadopsi dan dilaksanakan oleh OPD terkait. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | - | | | - | 76.800.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 76.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rekomendasi DPRD yang Terkait Pengawasan dan Kebijakan Peningkatan Kondisi Jalan Mantap yang Ditindaklanjuti oleh OPD Terkait ]** | **Persentase rekomendasi DPRD dalam laporan pengawasan dan kebijakan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan mantap yang ditindaklanjuti oleh OPD teknis terhadap total rekomendasi yang dikeluarkan per tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk legislasi DPRD yang memasukkan aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase produk legislasi DPRD yang mengakomodasi isu gender terhadap total produk legislasi yang disahkan dalam satu tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat hasil dari fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD ]** | **Persentase rekomendasi dan keputusan DPRD yang mendukung peningkatan daya beli masyarakat melalui alokasi program ekonomi produktif, dengan target minimal 70 % dari total keputusan strategis tahunan.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi dan Dukungan DPRD dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengawasan Program Akses Air Bersih Layak ]** | **Persentase rapat, hearing, atau forum DPRD yang membahas dan mendukung kebijakan serta pengawasan program akses air bersih layak terhadap total rapat terkait pembangunan daerah. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam* | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara akuntabel ]** | **Persentase rekomendasi kebijakan DPRD (melalui fungsi pengawasan dan hasil rapat kerja) yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan legislatif terhadap kebijakan dan program yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat ]** | **Persentase kebijakan dan rekomendasi DPRD yang mendukung program peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara akuntabel ]** | **Persentase rekomendasi kebijakan DPRD (melalui fungsi pengawasan dan hasil rapat kerja) yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 18.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 18.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan administrasi dan kebijakan DPRD yang menguatkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN daerah ]** | **Persentase dokumen kebijakan, rekomendasi, dan dukungan administrasi yang disusun DPRD terkait manajemen ASN berbasis sistem merit, dengan target minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | - | - | | | - | 2.802.295.800,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.565.600.001,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD* | | | | 35 Dokumen | 644.896.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 245.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 12 Dokumen | 1.908.799.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 36 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 84 Orang | 93.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 93.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan DPRD yang mendukung pengembangan wirausaha pemuda ]** | **Persentase rancangan dan produk kebijakan DPRD yang mengakomodasi program pemberdayaan wirausaha pemuda, dengan target minimal 40% kebijakan terkait diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.001,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rekomendasi DPRD yang Diadopsi dalam Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana ]** | **Persentase rekomendasi DPRD terkait pengurangan risiko bencana yang diadopsi dan diimplementasikan dalam kebijakan daerah. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD yang mendukung peningkatan akses perempuan usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi ]** | **Persentase rekomendasi DPRD yang mengakomodasi kebijakan dan program peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia 15–49 tahun dari total rekomendasi DPRD dalam 1 tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyusunan Rekomendasi DPRD Terkait Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Blankspot ]** | **Persentase rekomendasi DPRD yang disusun dan disampaikan terkait pengembangan jaringan 4G di wilayah blankspot. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk legislasi DPRD yang mendukung pengembangan dan investasi sektor real estate ]** | **Persentase produk legislasi (peraturan daerah, perda) yang disahkan DPRD terkait kebijakan pengembangan real estate, Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | - | | | - | 2.440.150.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.086.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 12 Laporan | 42.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 42.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD yang mendukung peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan anggaran yang memuat dukungan terhadap program peningkatan partisipasi pemuda, terhadap total rekomendasi DPRD dalam satu tahun.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 35 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan DPRD yang dihasilkan dan diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ]** | **Persentase rekomendasi kebijakan DPRD yang diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 35 Dokumen | 2.393.650.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.039.750.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | - | - | | | - | 12.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD terkait pemenuhan hak anak yang diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | - | - | | | - | 717.120.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 717.120.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah* | | | | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD terkait kebijakan ketenagakerjaan yang diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi DPRD tentang kebijakan sistem pemerintahan berbasis digital yang diimplementasikan dalam program pembangunan daerah setiap tahun anggaran. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun* | | | | 12 Dokumen | 711.620.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 711.620.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi inovasi kebijakan publik yang dihasilkan DPRD melalui dukungan administrasi dan teknis ]** | **Persentase rekomendasi inovasi kebijakan publik yang dihasilkan DPRD dari total rekomendasi yang dikeluarkan, dengan target minimal 70 % dalam 1 tahun.** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | - | - | | | - | 6.750.248.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.757.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 12 Dokumen | 5.996.868.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi DPRD yang mendukung literasi masyarakat secara efektif ]** | **Persentase Rekomendasi DPRD yang terlaksana dan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam literasi terhadap total rekomendasi yang direncanakan. Minimal 70 % setiap tahunnya** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi dan kebijakan DPRD yang mendukung penguatan sektor jasa daerah ]** | **Persentase jumlah rekomendasi/kebijakan DPRD terkait pengembangan sektor jasa terhadap total rekomendasi/kebijakan tahunan, Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan DPRD yang mendukung peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rancangan peraturan daerah (perda) dan keputusan DPRD terkait jaminan kesehatan yang disahkan dalam satu tahun. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **30** | **70** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 12 Dokumen | 576.380.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 580.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Meningkatnya kualitas dan efektivitas pengawasan serta legislasi DPRD dalam mendukung kebijakan kesehatan daerah ]** | **Persentase rekomendasi DPRD terkait kebijakan kesehatan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.** | **90** | **30** | **30** | **50** | **13.182.813.800,00** | - | - | - | - | - | - | **12.597.220.001,00** | - |
| | 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus* | | | | 7 Dokumen | 160.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 160.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | **8.299.813.891,00** | | | | | | | **11.465.000.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **8.299.813.891,00** | | | | | | | **11.465.000.000,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **7.685.213.891,00** | | | | | | | **10.780.000.000,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **6.147.117.241,00** | | | | | | | **8.750.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.147.117.241,00** | - | - | - | - | - | - | **8.750.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 38.551.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 75.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 11 Dokumen | 4.174.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.571.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 4.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.582.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 4.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.499.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 5.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.580.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 5.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.553.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 4.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 2.518.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 5.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 12 Dokumen | 14.507.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 25.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 2.566.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.324.061.141,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 6.668.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 75 Orang/bulan | 5.162.541.141,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 6.500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 158.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 165.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.999.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.999.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 22.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 45 Paket | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 338.605.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 589.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 13.023.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 30.182.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 97.860.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 145.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 7.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 16.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 9.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 180.520.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 58.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 103.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 380.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 42.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 61.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 264.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 875.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 5.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 259.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 850.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 54.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | - | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 34.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Bapperida Kab. Maros | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **1.121.263.900,00** | | | | | | | **1.615.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | - | | | - | 488.096.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat, OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 875.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 40.657.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat, OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB. ]** | **Persentase capaian target kontribusi sektor jasa terhadap PDRB yang terealisasi dan terlaporkan dalam laporan evaluasi pembangunan daerah tiap tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terealisasi sesuai target. ]** | **Persentase realisasi program pembangunan sektor industri pengolahan sesuai rencana tahunan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Investasi Daerah yang Sesuai dengan Target Perencanaan. ]** | **Persentase realisasi investasi daerah yang sesuai dengan rencana investasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]** | **Persentase program kesehatan daerah yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil evaluasi tahunan.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 1 Berita Acara | 34.752.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat, OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terealisasi sesuai target. ]** | **Persentase realisasi program pembangunan sektor industri pengolahan sesuai rencana tahunan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Investasi Daerah yang Sesuai dengan Target Perencanaan. ]** | **Persentase realisasi investasi daerah yang sesuai dengan rencana investasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]** | **Persentase program kesehatan daerah yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil evaluasi tahunan.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB. ]** | **Persentase capaian target kontribusi sektor jasa terhadap PDRB yang terealisasi dan terlaporkan dalam laporan evaluasi pembangunan daerah tiap tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 1 Berita Acara | 109.396.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat, OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]** | **Persentase program kesehatan daerah yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil evaluasi tahunan.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Investasi Daerah yang Sesuai dengan Target Perencanaan. ]** | **Persentase realisasi investasi daerah yang sesuai dengan rencana investasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terealisasi sesuai target. ]** | **Persentase realisasi program pembangunan sektor industri pengolahan sesuai rencana tahunan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB. ]** | **Persentase capaian target kontribusi sektor jasa terhadap PDRB yang terealisasi dan terlaporkan dalam laporan evaluasi pembangunan daerah tiap tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan* | | | | 1550 Usulan | 40.931.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat, OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ] | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ] | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ] | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 70 | 70 | 80 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ] | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase realisasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB. ] | Persentase capaian target kontribusi sektor jasa terhadap PDRB yang terealisasi dan terlaporkan dalam laporan evaluasi pembangunan daerah tiap tahun. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ] | Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ] | Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya | 100 | 0 | 0 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terealisasi sesuai target. ]** | **Persentase realisasi program pembangunan sektor industri pengolahan sesuai rencana tahunan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Investasi Daerah yang Sesuai dengan Target Perencanaan. ]** | **Persentase realisasi investasi daerah yang sesuai dengan rencana investasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]** | **Persentase program kesehatan daerah yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil evaluasi tahunan.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br><br>*(RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 262.360.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat, OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 550.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 234.536.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 4 Dokumen | 149.558.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 100 Orang | 84.977.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terealisasi sesuai target. ]** | **Persentase realisasi program pembangunan sektor industri pengolahan sesuai rencana tahunan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 273.970.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 5 Laporan | 118.573.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB. ]** | **Persentase capaian target kontribusi sektor jasa terhadap PDRB yang terealisasi dan terlaporkan dalam laporan evaluasi pembangunan daerah tiap tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]** | **Persentase program kesehatan daerah yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil evaluasi tahunan.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Investasi Daerah yang Sesuai dengan Target Perencanaan. ]** | **Persentase realisasi investasi daerah yang sesuai dengan rencana investasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 5 Laporan | 155.397.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Pettuadae<br>Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB. ]** | **Persentase capaian target kontribusi sektor jasa terhadap PDRB yang terealisasi dan terlaporkan dalam laporan evaluasi pembangunan daerah tiap tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan pro rakyat dari kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan hasil evaluasi tahunan. ]** | **Persentase kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah dan tervalidasi melalui evaluasi perencanaan dan pengendalian tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Capaian Kegiatan Prioritas Akses Air Bersih Layak yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan ]** | **Persentase kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan akses air bersih layak (misalnya: SPAM, pengelolaan SDA, PSU permukiman) yang tercantum dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap total usulan kegiatan prioritas akses air bersih. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]** | **Persentase program kesehatan daerah yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil evaluasi tahunan.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Investasi Daerah yang Sesuai dengan Target Perencanaan. ]** | **Persentase realisasi investasi daerah yang sesuai dengan rencana investasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terealisasi sesuai target. ]** | **Persentase realisasi program pembangunan sektor industri pengolahan sesuai rencana tahunan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 124.660.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 140.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola* | | | | 1 Dokumen | 71.771.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ] | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ] | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi. | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ] | Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ] | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ] | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun. | 100 | 80 | 80 | 90 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ] | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun. | 100 | 70 | 70 | 80 | 1.121.263.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.615.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi program literasi masyarakat. ]** | **Persentase RPD tahunan yang mencantumkan program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total RPD tahunan. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **0** | **0** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 52.889.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal. 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kegiatan Pembangunan Jalan yang Direncanakan dan Dievaluasi Secara Berbasis Data Kondisi Jalan ]** | **Persentase kegiatan pembangunan jalan yang telah melalui proses perencanaan dan evaluasi berbasis data kondisi jalan (data IKKJ, data mantap/tidak mantap, dan kebutuhan teknis), terhadap total kegiatan pembangunan jalan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase implementasi rencana pembangunan daerah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase kegiatan pembangunan daerah yang berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah evaluasi dilakukan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan isu kepemudaan. ]** | **Persentase dokumen RKPD, Renja, dan Perubahan RKPD/Renja yang memuat program/kegiatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda terhadap total dokumen yang disusun pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Perencanaan Program UMKM yang Terintegrasi dengan Strategi Digitalisasi Daerah. ]** | **Persentase program UMKM dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat komponen digitalisasi terhadap total program UMKM yang direncanakan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi kreatif di daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memasukkan target dan strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap total dokumen perencanaan dan evaluasi. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi aspek kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang memuat aspek kebudayaan meningkat minimal 90 % dalam waktu 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Mengakomodasi Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat strategi dan kebijakan konektivitas kawasan produktif dengan sistem transportasi lokal yang disusun dan disahkan tepat waktu. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting dan terkoordinasi secara efektif. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang memuat program penurunan gizi buruk atau stunting dan dilaksanakan evaluasi efektivitasnya minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) yang memuat kebijakan dan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang disahkan setiap tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) yang mengakomodasi program prioritas sektor pertanian. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program prioritas pengembangan sektor pertanian dari total dokumen yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat program dan target sektor pendidikan mencapai minimal 90% dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi prinsip sistem merit dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat strategi dan target penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Analisis Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah setiap tahun. ]** | **Persentase dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah yang mencakup analisis risiko bencana serta rekomendasi mitigasi dari total dokumen yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan strategi pengembangan real estate secara terarah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang memuat program/kegiatan pendukung sektor real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi target peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan sesuai tenggat waktu tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat integrasi inovasi berbasis riset, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase integrasi data dan analisis sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat analisis dan strategi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari total dokumen yang disusun per tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat indikator capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mencantumkan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terkontrol, dan terkoordinasi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memasukkan analisis dampak inflasi minimal 90 % setiap tahun untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE sesuai standar kebijakan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan dan laporan pengendalian pembangunan daerah yang memuat analisis dan rekomendasi peningkatan nilai SPBE sesuai pedoman yang disusun dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase program pembangunan daerah yang terealisasi sesuai perencanaan dan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 % mencapai minimall 80 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase program pembangunan daerah yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase program/kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak dalam dokumen perencanaan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase program kegiatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase program kegiatan pada dokumen perencanaan yang memuat komponen dukungan terhadap peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang memuat analisis gender terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang mendukung peningkatan pemuda menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan dan melaporkan rencana pembangunan daerah tahunan yang mengakomodasi program pemberdayaan pemuda sebagai wirausahawan baru, dengan pelaksanaan minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase Isu kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ]** | **Persentase target dan strategi peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia 15–49 tahun yang termuat dalam dokumen RKPD yang disusun dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Integrasi Data dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/Renja PD) yang memuat data akurat dan rencana strategis pengembangan jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **1.121.263.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.615.000.000,00** | - |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **416.832.750,00** | | | | | | | **415.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersinkronisasi secara efektif antar OPD dan tingkat pemerintahan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dan tingkat pemerintahan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | - | | | - | 178.363.450,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 9.537.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD yang berhasil menyelaraskan rencana inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan kesepakatan integrasi inovasi dalam rencana pembangunan daerah, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas OPD yang terlaksana tepat waktu dan menghasilkan keputusan atau tindak lanjut konkret untuk peningkatan nilai SPBE dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam perencanaan pengelolaan ASN. ]** | **Persentase forum koordinasi antar OPD yang menghasilkan rencana pengelolaan ASN berbasis sistem merit secara terpadu, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersinkronisasi secara efektif antar OPD dan tingkat pemerintahan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dan tingkat pemerintahan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 2 Laporan | 23.515.250,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD yang berhasil menyelaraskan rencana inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase rapat koordinasi yang menghasilkan kesepakatan integrasi inovasi dalam rencana pembangunan daerah, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas OPD yang terlaksana tepat waktu dan menghasilkan keputusan atau tindak lanjut konkret untuk peningkatan nilai SPBE dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang mengintegrasikan prinsip sistem merit dalam perencanaan pengelolaan ASN. ]** | **Persentase forum koordinasi antar OPD yang menghasilkan rencana pengelolaan ASN berbasis sistem merit secara terpadu, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD terkait dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi intervensi penurunan gizi buruk atau stunting minimal 90 % pada akhir tahun anggaran.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 8.988.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase keselarasan rencana pembangunan antar perangkat daerah yang mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan yang telah dikordinasikan dan disinkronkan antar perangkat daerah terkait peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas perangkat daerah yang mengakomodasi isu kepemudaan dalam perencanaan pembangunan. ]** | **Persentase forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah (forum OPD, musrenbang, rakor) yang menghasilkan kesepakatan pengintegrasian program/kegiatan kepemudaan terhadap total forum koordinasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD dalam perencanaan program literasi yang efektif. ]** | **Persentase OPD yang berpartisipasi aktif dalam koordinasi perencanaan program literasi terhadap total OPD terkait. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan pemuda untuk mendukung peningkatan wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi program pemberdayaan pemuda minimal 90% diakhir tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang terkoordinasi dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase perangkat daerah yang mengikuti forum koordinasi dan asistensi PPRG terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan OPD terkait pendidikan meningkat menjadi minimal 90 % dari total perencanaan tahunan dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi perangkat daerah yang menghasilkan rencana terpadu untuk meningkatkan akses perempuan usia subur ke layanan kesehatan reproduksi. ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas OPD yang menghasilkan dokumen rencana aksi bersama terkait peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan aspek kebudayaan. ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas sektor yang menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah dengan integrasi aspek kebudayaan meningkat sebesar 90 % dalam 12 bulan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan sinkron dalam mengakomodasi pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja OPD) yang telah memuat isu dan kebutuhan pemenuhan hak anak. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya keterpaduan dan sinergi antar sektor dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan program-program kesehatan lintas sektor.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD dalam perencanaan yang mendukung penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan antar OPD dan mencakup strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang tersinkronisasi antar perangkat daerah untuk mendukung perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja OPD) yang telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi lintas OPD terkait peningkatan cakupan peserta aktif jaminan ketenagakerjaan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas perangkat daerah yang mengakomodasi isu kepemudaan dalam perencanaan pembangunan. ]** | **Persentase forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah (forum OPD, musrenbang, rakor) yang menghasilkan kesepakatan pengintegrasian program/kegiatan kepemudaan terhadap total forum koordinasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 7 Laporan | 136.323.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan aspek kebudayaan. ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas sektor yang menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah dengan integrasi aspek kebudayaan meningkat sebesar 90 % dalam 12 bulan.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi perangkat daerah yang menghasilkan rencana terpadu untuk meningkatkan akses perempuan usia subur ke layanan kesehatan reproduksi. ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas OPD yang menghasilkan dokumen rencana aksi bersama terkait peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan OPD terkait pendidikan meningkat menjadi minimal 90 % dari total perencanaan tahunan dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang terkoordinasi dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase perangkat daerah yang mengikuti forum koordinasi dan asistensi PPRG terhadap total perangkat daerah. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan pemuda untuk mendukung peningkatan wirausahawan baru. ]** | **Persentase perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi program pemberdayaan pemuda minimal 90% diakhir tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan sinkron dalam mengakomodasi pemenuhan hak anak. ]** | **Persentase dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja OPD) yang telah memuat isu dan kebutuhan pemenuhan hak anak. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya keterpaduan dan sinergi antar sektor dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan program-program kesehatan lintas sektor.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD dalam perencanaan yang mendukung penyerapan lulusan vokasi. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan antar OPD dan mencakup strategi penyerapan lulusan vokasi terhadap total dokumen perencanaan yang disusun. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang tersinkronisasi antar perangkat daerah untuk mendukung perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja OPD) yang telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi lintas OPD terkait peningkatan cakupan peserta aktif jaminan ketenagakerjaan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD terkait dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang mengakomodasi intervensi penurunan gizi buruk atau stunting minimal 90 % pada akhir tahun anggaran.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keselarasan rencana pembangunan antar perangkat daerah yang mendukung peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan yang telah dikordinasikan dan disinkronkan antar perangkat daerah terkait peningkatan peserta aktif jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD dalam perencanaan program literasi yang efektif. ]** | **Persentase OPD yang berpartisipasi aktif dalam koordinasi perencanaan program literasi terhadap total OPD terkait. Minimal 90 % setiap tahunnya** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Investasi Daerah yang Efektif. ]** | **Persentase pertemuan koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan terkait perencanaan investasi daerah yang terlaksana sesuai jadwal. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | | | - | 125.595.900,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 8.931.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase keterpaduan program lintas perangkat daerah dalam mendukung pengembangan sektor real estate. ]** | **Persentase dokumen hasil koordinasi yang menunjukkan keselarasan program/kegiatan antar perangkat daerah terkait real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah yang efektif sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah terkoordinasi dan tersinkronisasi antar OPD mencapai minimal 90 %, yang berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang mendukung pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan sinkron antar OPD minimal 90 % setiap tahun untuk memperkuat pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keselarasan perencanaan pembangunan antar perangkat daerah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah terkait ekonomi kreatif. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan fokus pada pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang mencantumkan program pengembangan sektor jasa hasil koordinasi antar OPD, Minimal 90 %% diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik untuk menurunkan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang menghasilkan kebijakan pembangunan terintegrasi dengan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase forum koordinasi perencanaan pembangunan yang membahas sektor pertanian. ]** | **Persentase kegiatan forum koordinasi perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan prioritas pembangunan sektor pertanian terhadap total forum yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesepakatan rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terkoordinasi antar OPD terkait. ]** | **Persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang telah disinkronkan dan disepakati antar OPD, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kesesuaian Rencana Investasi Daerah yang Terkoordinasi Antar OPD Terkait ]** | **Persentase rencana investasi daerah yang telah terkoordinasi dan disinkronkan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap total rencana investasi daerah. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD terkait yang menghasilkan kesepakatan program pengembangan sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase rapat koordinasi antar OPD yang menghasilkan kesepakatan program pengembangan sektor pariwisata dari total rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah per tahun. Minimal 90 %diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terkoordinasi dan tersinkronisasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase program pembangunan yang terkoordinasi dan tersinkronisasi antar PD yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah program dilaksanakan. Minimal 90 % iakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase keselarasan program pembangunan lintas perangkat daerah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase program lintas perangkat daerah yang terkoordinasi dan selaras dengan sasaran peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan selaras dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase program dan kegiatan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan sinkron sesuai prioritas pengentasan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan evaluasi triwulan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase forum koordinasi perencanaan pembangunan yang membahas sektor pertanian. ]** | **Persentase kegiatan forum koordinasi perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan prioritas pembangunan sektor pertanian terhadap total forum yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 80.650.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Investasi Daerah yang Efektif. ]** | **Persentase pertemuan koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan terkait perencanaan investasi daerah yang terlaksana sesuai jadwal. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan selaras dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase program dan kegiatan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan sinkron sesuai prioritas pengentasan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan evaluasi triwulan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase keselarasan program pembangunan lintas perangkat daerah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase program lintas perangkat daerah yang terkoordinasi dan selaras dengan sasaran peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kesepakatan rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang terkoordinasi antar OPD terkait. ]** | **Persentase rencana pembangunan sektor industri pengolahan yang telah disinkronkan dan disepakati antar OPD, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kesesuaian Rencana Investasi Daerah yang Terkoordinasi Antar OPD Terkait ]** | **Persentase rencana investasi daerah yang telah terkoordinasi dan disinkronkan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap total rencana investasi daerah. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar OPD terkait yang menghasilkan kesepakatan program pengembangan sektor pariwisata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. ]** | **Persentase rapat koordinasi antar OPD yang menghasilkan kesepakatan program pengembangan sektor pariwisata dari total rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah per tahun. Minimal 90 %diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keterpaduan program lintas perangkat daerah dalam mendukung pengembangan sektor real estate. ]** | **Persentase dokumen hasil koordinasi yang menunjukkan keselarasan program/kegiatan antar perangkat daerah terkait real estate, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah yang efektif sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah terkoordinasi dan tersinkronisasi antar OPD mencapai minimal 90 %, yang berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang mendukung pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan sinkron antar OPD minimal 90 % setiap tahun untuk memperkuat pengendalian inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terkoordinasi dan tersinkronisasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase program pembangunan yang terkoordinasi dan tersinkronisasi antar PD yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan setelah program dilaksanakan. Minimal 90 % iakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keselarasan perencanaan pembangunan antar perangkat daerah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah terkait ekonomi kreatif. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rencana pembangunan daerah yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan fokus pada pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang mencantumkan program pengembangan sektor jasa hasil koordinasi antar OPD, Minimal 90 %% diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik untuk menurunkan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang menghasilkan kebijakan pembangunan terintegrasi dengan target penurunan kemiskinan minimal 90 % dalam satu tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Keterlibatan OPD dan Pemangku Kepentingan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Mitigasi Risiko Bencana. ]** | **Persentase OPD dan pemangku kepentingan yang secara aktif berpartisipasi dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan mitigasi risiko bencana. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 0 Laporan | 9.571.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Koordinasi Antar OPD dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase rapat koordinasi lintas OPD yang membahas dan menyepakati langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca terhadap total rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah per tahun, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 26.443.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Keterlibatan OPD dan Pemangku Kepentingan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Mitigasi Risiko Bencana. ]** | **Persentase OPD dan pemangku kepentingan yang secara aktif berpartisipasi dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan mitigasi risiko bencana. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kesesuaian dan Sinkronisasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD Terkait ]** | **Persentase program/kegiatan yang mendukung akses air bersih layak yang telah terkoordinasi dan sinkron antar OPD. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | | | - | 112.873.400,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 165.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 8.917.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Jalan yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi Antar OPD Terkait ]** | **Persentase rencana pembangunan jalan (termasuk pemeliharaan dan peningkatan) yang telah melalui mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar OPD terkait sebelum pelaksanaan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih Antar OPD Terkait ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang telah disinkronkan dan disepakati oleh seluruh OPD terkait infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen rencana yang ada. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kesesuaian dan Sinkronisasi Program Akses Air Bersih Layak Antar OPD Terkait ]** | **Persentase program/kegiatan yang mendukung akses air bersih layak yang telah terkoordinasi dan sinkron antar OPD. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 50.706.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih Antar OPD Terkait ]** | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang telah disinkronkan dan disepakati oleh seluruh OPD terkait infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih terhadap total dokumen rencana yang ada. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Rencana Pembangunan Jalan yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi Antar OPD Terkait ]** | **Persentase rencana pembangunan jalan (termasuk pemeliharaan dan peningkatan) yang telah melalui mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar OPD terkait sebelum pelaksanaan, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Antara OPD dan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Konektivitas Kawasan Produktif dengan Sistem Transportasi Lokal. ]** | **Persentase dokumen rencana pembangunan yang telah diselaraskan dan disetujui oleh seluruh OPD terkait dalam kurun waktu perencanaan tahunan. minimal 90 % pada akhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **416.832.750,00** | - | - | - | - | - | - | **415.000.000,00** | - |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 8.984.400,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 44.265.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 65.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **614.600.000,00** | | | | | | | **685.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | **70 Persen** | **425.337.500,00** | | | | | | | **430.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase hasil litbang yang dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit (misalnya rekrutmen, pengembangan karier, atau manajemen kinerja), dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **0** | **0** | **90** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | - | | | - | 85.083.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Laporan | 85.083.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan, minimal 90 % per tahun** | **100** | **0** | **0** | **90** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | - | - | | | - | 170.113.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 170.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | | | | 1 Dokumen | 85.029.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Menghasilkan Inovasi Berbasis Nilai Budaya Lokal ]** | **Persentase penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada inovasi yang mengintegrasikan nilai budaya lokal dari total penelitian yang didanai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| | 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan* | | | | 1 Dokumen | 85.083.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi Daerah untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase jumlah rekomendasi penelitian dan inovasi terkait pengurangan emisi gas rumah kaca yang diadopsi dan diterapkan oleh OPD atau pemangku kepentingan terkait. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | - | | | - | 85.068.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | - | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup* | | | | 1 Dokumen | 85.068.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | OPD dan Kecamatan Kab. Maros | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi daerah yang melibatkan pemuda sebagai subjek atau pelaku. ]** | **Persentase kegiatan penelitian dan pengembangan daerah yang melibatkan partisipasi aktif pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau diseminasi hasil riset dalam satu tahun. Minmal 20 % diakhir tahun** | **40** | **0** | **0** | **20** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | - | | | - | 85.072.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 1 Dokumen | 85.072.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penelitian dan Inovasi yang Berorientasi pada Pengembangan Investasi Daerah ]** | **Persentase jumlah penelitian dan inovasi yang diarahkan untuk mendukung pengembangan investasi daerah terhadap total penelitian dan inovasi yang dilakukan, minimal .50 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan di instansi pemerintah daerah. ]** | **Persentase jumlah inovasi baru yang diadopsi dan diimplementasikan oleh instansi pemerintah daerah dari total proposal penelitian dan pengembangan yang diselesaikan, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **425.337.500,00** | - | - | - | - | - | - | **430.000.000,00** | - |
| 2. | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | **-** | **189.262.500,00** | | | | | | | **255.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit yang dikembangkan melalui hasil riset daerah. ]** | **Persentase kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit yang disusun atau direvisi berdasarkan hasil riset dan inovasi daerah, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | | | - | 165.881.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 170.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset* | | | | 1 Naskah | 85.083.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pengembangan solusi kesehatan daerah. ]** | **Persentase inovasi kesehatan yang diadopsi dan diterapkan dalam program pelayanan kesehatan daerah.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | 5.05.03.2.01.0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | | | | 1 Laporan | 22.999.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pendidikan mencapai minimal 50 % dalam satu tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | 5.05.03.2.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | | | | 1 Laporan | 57.798.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi daerah yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase riset dan inovasi yang menghasilkan solusi atau produk yang melibatkan atau mendukung penyerapan lulusan vokasi terhadap total riset dan inovasi daerah yang dilakukan dalam satu tahun. Minimal 50 % setiap Tahunnya** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | - | - | | | - | 23.381.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.03.2.02.0004 | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah* | | | | 1 Laporan | 23.381.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil riset dan inovasi yang mendukung kebijakan responsif gender di daerah. ]** | **Persentase hasil riset atau kajian kebijakan yang mengintegrasikan analisis gender terhadap total riset atau kajian yang dihasilkan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi daerah yang diadopsi oleh pelaku ekonomi lokal untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah. ]** | **Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh UMKM, koperasi, atau sektor pertanian, perikanan, dan industri lokal mencapai minimal 50 % dari total riset terapan yang dilakukan dalam 1 tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan untuk pengembangan sektor real estate daerah. ]** | **Persentase hasil riset dan kajian inovatif yang dimanfaatkan dalam kebijakan atau program pengembangan kawasan real estate, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi ekonomi kreatif yang berhasil dipatenkan atau dilindungi hak kekayaan intelektual di tingkat daerah. ]** | **Persentase inovasi ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap total inovasi yang dikembangkan di daerah. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi riset pertanian yang diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian di daerah. ]** | **Persentase inovasi hasil riset pertanian yang diadopsi oleh pelaku usaha pertanian dalam satu tahun terhadap total inovasi riset pertanian yang dikembangkan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi berbasis riset yang diterapkan dalam peningkatan sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase inovasi hasil riset yang diimplementasikan dalam program SPBE dalam 1 tahun anggaran. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Inovasi Daerah yang Berkontribusi pada Peningkatan Realisasi Investasi ]** | **Persentase inovasi yang diimplementasikan dan berkontribusi langsung pada peningkatan nilai realisasi investasi daerah terhadap total inovasi yang dikembangkan, minimal .....% pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi berbasis riset yang diterapkan dalam sektor jasa untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. ]** | **Persentase jumlah inovasi riset yang diadopsi dan diimplementasikan oleh pelaku sektor jasa terhadap total inovasi riset daerah Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Riset dan Inovasi Daerah yang Mendukung Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase jumlah riset dan inovasi yang difokuskan pada solusi pengurangan emisi gas rumah kaca dari total riset dan inovasi yang diselesaikan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi daerah yang melibatkan pemuda sebagai subjek atau pelaku. ]** | **Persentase kegiatan penelitian dan pengembangan daerah yang melibatkan partisipasi aktif pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau diseminasi hasil riset dalam satu tahun. Minmal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil riset dan inovasi yang diadopsi untuk pengembangan produk dan layanan pariwisata daerah. ]** | **Persentase produk atau layanan pariwisata baru berbasis riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase produk industri pengolahan yang dihasilkan melalui hasil riset dan inovasi daerah. ]** | **Persentase produk industri pengolahan yang menggunakan teknologi atau inovasi hasil riset daerah, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Produk Riset dan Inovasi Daerah yang Mengintegrasikan Nilai Budaya Lokal ]** | **Persentase produk riset dan inovasi yang mengandung unsur nilai budaya lokal dari total produk riset dan inovasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi yang diterapkan untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase riset dan inovasi daerah yang diimplementasikan dalam program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan. minimal 50 % per tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase riset dan inovasi daerah yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan atau program jaminan ketenagakerjaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi daerah yang menghasilkan produk atau metode literasi efektif bagi masyarakat. ]** | **Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap total riset dan inovasi yang dilakukan. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi yang berhasil diimplementasikan dalam instansi pemerintah daerah. ]** | **Persentase riset dan inovasi yang diadopsi dan diterapkan oleh instansi pemerintah daerah dari total riset yang selesai, dengan target minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan wirausaha pemuda. ]** | **Persentase riset dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga daerah dan berkontribusi langsung pada pembentukan atau pengembangan wirausahawan baru di kalangan pemuda, dengan target minimal 50 % riset/inovasi diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi daerah yang menghasilkan solusi efektif untuk peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan. ]** | **Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam kebijakan atau program peningkatan peserta jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase riset dan inovasi yang berkontribusi pada strategi pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam kebijakan pengendalian inflasi minimal 50 % setiap tahun untuk mendukung stabilitas harga.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase inovasi dan riset daerah yang menghasilkan solusi berbasis bukti untuk pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase riset dan inovasi yang fokus pada pemenuhan hak anak dari total riset dan inovasi yang didanai dan didukung pemerintah daerah dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase UMKM yang Mengakses Inovasi Teknologi Hasil Riset Daerah untuk Digitalisasi Operasional Bisnis. ]** | **Persentase UMKM yang memanfaatkan hasil riset dan inovasi teknologi lokal berbasis digital terhadap total UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **10** | **10** | **50** | **189.262.500,00** | - | - | - | - | - | - | **255.000.000,00** | - |
| | | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | **275.198.727.428,00** | | | | | | | **263.711.495.593,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **275.198.727.428,00** | | | | | | | **263.711.495.593,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **275.198.727.428,00** | | | | | | | **263.711.495.593,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **undefined undefined** | **64.610.217.628,00** | | | | | | | **65.177.600.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **64.610.217.628,00** | - | - | - | - | - | - | **65.177.600.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 40.610.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 56.600.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 8.135.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 6.600.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.630.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.725.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.495.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 4 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 32 Dokumen | 31.965.705.928,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 33.092.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/bulan | 30.798.727.428,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 32.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 133.870.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 120.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 959.880.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 852.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 19.267.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 35.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 16.345.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 27.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 15.111.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 18.559.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 26.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 3.945.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 5 Dokumen | 21.434.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 40.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.357.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.800.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.425.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.935.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.917.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 80 Orang | 80.759.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 35.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 70.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 10.259.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 7 Layanan | 421.053.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 504.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 9.577.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 12.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 31.452.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 35.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 29 Paket | 71.664.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 72.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 18.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 65.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 400 Laporan | 229.509.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 300.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 321.700.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 650.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 47.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 250.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 274.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 400.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Jenis | 28.223.235.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 27.395.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 43.220.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 45.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 24.800.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 24.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 3.380.015.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 3.350.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 Jenis | 3.535.720.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 3.405.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 2.825.181.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 2.800.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 529.289.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 550.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 31 Unit | 81.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 55.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | **100 %** | **196.359.319.150,00** | | | | | | | **172.041.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan program kesehatan. ]** | **Persentase realisasi anggaran kesehatan daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan rencana program.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Jumlah Dokumen koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* | - | | | 237 Dokumen | 724.980.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 741.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 10.760.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 17.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi dan realisasi anggaran daerah yang efektif untuk sektor pendidikan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase realisasi anggaran pendidikan yang sesuai dengan perencanaan dan memenuhi target pencapaian minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 9.758.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung program pembangunan yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase realisasi anggaran daerah yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat minimal 10 %, mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 39 Dokumen | 1.080.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi dan realisasi anggaran daerah yang mendukung program penurunan angka prevalensi gizi buruk atau stunting secara tepat waktu dan efektif. ]** | **Persentase realisasi anggaran yang dialokasikan untuk program penurunan gizi buruk atau stunting mencapai minimal 80 % dari total anggaran yang direncanakan setiap tahunnya.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 39 Dokumen | 2.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi dan realisasi anggaran daerah yang mendukung program literasi masyarakat. ]** | **Persentase realisasi anggaran daerah yang digunakan untuk program literasi (membaca, menulis, literasi digital) terhadap total anggaran pendidikan dan kebudayaan daerah. Minimal 80 % setiap tahunnya** | **100** | **70** | **70** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 39 Dokumen | 810.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 5.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi dan realisasi anggaran daerah yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase realisasi anggaran daerah yang dialokasikan untuk program dan kegiatan pemenuhan hak anak dari total anggaran belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 39 Dokumen | 1.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang mendukung perluasan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal. ]** | **Persentase anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk program/kegiatan fasilitasi perlindungan jaminan ketenagakerjaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **10** | **10** | **10** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 1 Dokumen | 310.745.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 280.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi belanja daerah yang mendukung sektor pertanian. ]** | **Persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk program/kegiatan sektor pertanian terhadap total belanja daerah dalam 1 tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **10** | **10** | **10** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 1 Dokumen | 281.448.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 290.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi dan penyerapan anggaran daerah yang mendukung pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase realisasi anggaran yang dialokasikan untuk program pengembangan sektor jasa terhadap total anggaran daerah, Minimal 10 % diakhir tahun** | **14** | **10** | **10** | **10** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan* | | | | 12 Dokumen | 24.105.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran yang mendukung pengembangan infrastruktur dan stimulus sektor real estate. ]** | **Persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung sektor real estate (infrastruktur, perizinan, promosi kawasan, dsb), Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **0** | **0** | **5** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | | | | 12 Dokumen | 42.044.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 45.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk pengembangan sektor industri pengolahan. ]** | **Persentase anggaran daerah yang terserap untuk program pengembangan sektor industri pengolahan sesuai rencana, Minimal 20 % diakhir tahun** | **25** | **5** | **5** | **20** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan* | | | | 12 Dokumen | 19.903.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 20.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi anggaran daerah yang digunakan tepat waktu dan sesuai prioritas minimal 90 % setiap tahun guna menjaga stabilitas ekonomi dan menekan inflasi.** | **100** | **80** | **80** | **90** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 39 Orang | 20.276.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran untuk program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase realisasi anggaran daerah yang digunakan untuk program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dengan laporan pertanggungjawaban triwulan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **30** | **30** | **30** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah* | - | | | 68 Dokumen | 425.386.150,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 372.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 12 Dokumen | 39.910.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 37.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan pada kegiatan penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 2 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **2** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 6.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengelolaan keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan mendukung peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase belanja daerah yang dialokasikan secara efektif untuk program peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 12 Dokumen | 16.802.150,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 18.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang mendukung implementasi dan peningkatan nilai indeks SPBE. ]** | **Persentase total anggaran daerah yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang berkontribusi langsung pada peningkatan nilai indeks SPBE dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 31.211.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 45.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang digunakan untuk pengembangan dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase anggaran yang dialokasikan dan terserap untuk kegiatan pengembangan sistem merit (seperti pelatihan, rekrutmen berbasis kompetensi, dan pengembangan karier), dengan target minimal 5 % dalam 1 tahun.** | **10** | **2** | **2** | **5** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 4 Dokumen | 230.395.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 85.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang mendukung pelaksanaan inovasi di instansi pemerintah. ]** | **Persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk kegiatan inovasi dan pengembangan di instansi pemerintah, dengan target minimal 2 % dari total anggaran dalam 1 tahun.** | **6** | **0** | **0** | **2** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* | | | | 4 Dokumen | 27.819.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 18.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase realisasi anggaran daerah untuk pelayanan publik yang tepat waktu dan sesuai rencana. ]** | **ersentase realisasi anggaran bidang pelayanan publik yang terealisasi tepat waktu dan sesuai rencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | | | | 12 Laporan | 47.799.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 65.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi dan penyerapan anggaran keuangan yang tepat dan transparan untuk kegiatan pembangunan kebudayaan daerah. ]** | **Persentase realisasi anggaran program pembangunan kebudayaan yang tepat waktu dan sesuai rencana meningkat minimal 80 % dalam satu tahun anggaran.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 12 Dokumen | 26.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 30.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyerapan Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan ]** | **Persentase realisasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap total anggaran yang direncanakan dalam APBD, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | | | | 12 Dokumen | 4.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 18.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyerapan Anggaran Pengelolaan Air Bersih Layak Tepat Waktu ]** | **Persentase realisasi anggaran program penyediaan air bersih yang terserap sesuai jadwal semester terhadap total anggaran yang dialokasikan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **90** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 50.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Alokasi Dana Daerah yang Efektif untuk Mitigasi dan Penanggulangan Risiko Bencana. ]** | **Persentase penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran dan terealisasi untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan risiko bencana dari total anggaran yang dialokasikan setiap tahun. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **8** | **8** | **10** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | - | | | 83 Dokumen | 1.065.751.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 913.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 12 Laporan | 27.956.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Alokasi Anggaran Daerah untuk Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase anggaran daerah yang dialokasikan dan terealisasi untuk kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 12 Dokumen | 18.357.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran Daerah yang Dialokasikan untuk Mendukung Proyek Investasi ]** | **Persentase nilai realisasi anggaran daerah yang digunakan untuk pendanaan infrastruktur dan insentif investasi (jalan akses, sarana air bersih, insentif fiskal, dsb.). minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 12 Laporan | 67.013.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 48.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyaluran Dana APBD yang Tepat Sasaran untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Produktif. ]** | **Persentase realisasi anggaran APBD yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi di kawasan produktif setiap tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **80** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 12 Laporan | 503.744.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 430.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Dana APBD yang Dialokasikan untuk Program Pendukung Digitalisasi UMKM ]** | **Persentase anggaran daerah yang terserap untuk program pemberdayaan UMKM berbasis digital dari total anggaran pemberdayaan UMKM. minimal 15 % pada akhir tahun** | **35** | **10** | **10** | **15** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 48.731.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 45.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase alokasi anggaran daerah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. ]** | **Persentase alokasi anggaran daerah untuk program dan kegiatan ekonomi kreatif terhadap total anggaran belanja daerah. minimal 10 % pada akhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* | | | | 1 Dokumen | 5.211.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 3.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | | | | 12 Dokumen | 173.261.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 170.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan<br><br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* | | | | 1 Dokumen | 2.670.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 3.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 48.997.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 35.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 52.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 38.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 80 Orang | 72.057.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 80.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* | | | | 15 Lembaga | 39.607.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 19.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 5.646.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 2.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan terkoordinasi dalam mendukung penurunan kemiskinan selama 12 bulan. ]** | **Persentase alokasi dan realisasi anggaran daerah yang terkoordinasi untuk program penanggulangan kemiskinan minimal 50 % dalam satu tahun** | **70** | **50** | **50** | **50** | **196.359.319.150,00** | - | - | - | - | - | - | **172.041.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | - | | | 1920 Dokumen | 194.143.202.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 170.015.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 600 Laporan | 185.123.028.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA, DANA DESA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 170.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 600 Laporan | 9.020.174.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 15.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | **100 %** | **14.229.190.650,00** | | | | | | | **26.492.895.593,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase efektivitas pengelolaan aset daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip SPBE. ]** | **Persentase aset daerah yang terkelola dengan baik (tercatat, terinventarisasi, dan termanfaatkan secara optimal) berdasarkan laporan audit dan evaluasi pengelolaan aset dalam 1 tahun. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **14.229.190.650,00** | - | - | - | - | - | - | **26.492.895.593,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah* | - | | | 142 Dokumen | 14.229.190.650,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | - | 26.492.895.593,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 42.680.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 59.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemanfaatan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase barang milik daerah (seperti sarana pelatihan, ruang kerja, dan teknologi informasi) yang digunakan secara optimal untuk mendukung pengelolaan ASN berbasis sistem merit, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **14.229.190.650,00** | - | - | - | - | - | - | **26.492.895.593,00** | - |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 23.255.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 32.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal. ]** | **Persentase BMD yang digunakan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **14.229.190.650,00** | - | - | - | - | - | - | **26.492.895.593,00** | - |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 12.285.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dan terdokumentasi sesuai standar akuntabilitas. ]** | **Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah sesuai standar akuntabilitas. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **14.229.190.650,00** | - | - | - | - | - | - | **26.492.895.593,00** | - |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 40 Dokumen | 12.057.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 8.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 3 Laporan | 59.698.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 25.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 3 Laporan | 117.435.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 18.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 25 Laporan | 64.460.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 75.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 3 Laporan | 13.662.886.650,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 21.037.895.593,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 5 Laporan | 8.620.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 11.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 15 Dokumen | 14.360.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 5.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | | | | 3 Laporan | 27.270.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 27.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 1 Laporan | 152.385.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 85.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 31.799.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur dan Masyarakat | | 90.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **18.157.046.873,00** | | | | | | | **20.868.794.500,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **18.157.046.873,00** | | | | | | | **20.868.794.500,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **18.157.046.873,00** | | | | | | | **20.868.794.500,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **16.390.396.773,00** | | | | | | | **19.471.641.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **16.390.396.773,00** | - | - | - | - | - | - | **19.471.641.000,00** | - |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 13.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 14.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.850.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 2.650.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.733.952.273,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 18.236.441.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 840 Orang/bulan | 14.433.478.773,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 17.900.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 69.821.200,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 82.071.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 227.760.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 250.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.762.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.120.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 1.130.300,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.250.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 185.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 140.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 340.444.500,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 331.800.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.471.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.300.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 5.206.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 132.223.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 45.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 50.905.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 25.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 136.139.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 240.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 553.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 90.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 108.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 445.900.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 70.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 526.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 523.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 2.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.200.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 524.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 520.800.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 222.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 75.900.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 48 Unit | 72.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 55.900.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **-** | **1.766.650.100,00** | | | | | | | **1.397.153.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | | | - | 1.766.650.100,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.397.153.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 125.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkontribusi pada penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **Persentase penerimaan pendapatan daerah yang dialokasikan secara terkoordinasi untuk program pengentasan kemiskinan minimal 10 % dalam satu tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 155.150.100,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 17.250.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 7 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 18.400.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 12 Laporan | 140.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang tercatat dan dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang tercatat dalam sistem informasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar akuntabilitas. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 1 Laporan | 847.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 230.600.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 100 Obyek Pajak | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 275.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 402.403.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang tercatat dan dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang tercatat dalam sistem informasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar akuntabilitas. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 12 Layanan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 8.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 47.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang tercatat dan dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang tercatat dalam sistem informasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar akuntabilitas. Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 215.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 180.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung program peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dialokasikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 10 % diakhir tahun** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang dianggarkan dan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah berdasarkan laporan realisasi keuangan tahunan.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. ]** | **Persentase pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan ASN berbasis sistem merit (seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja), dengan target minimal 10 % dalam 1 tahun.** | **15** | **5** | **5** | **10** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase peningkatan alokasi pendapatan daerah yang digunakan untuk program penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **5** | **5** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. ]** | **Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahunan minimal 95% setiap tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung inisiatif peningkatan nilai SPBE. ]** | **Persentase total pembiayaan daerah yang dialokasikan pada program atau kegiatan peningkatan nilai indeks SPBE dibandingkan dengan total pembiayaan daerah dalam 1 tahun anggaran. Minimal 5 % diakhir tahun** | **10** | **2** | **2** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. ]** | **Persentase alokasi pendapatan asli daerah untuk program kebudayaan minimal 5 % setiap tahun anggaran.** | **10** | **1** | **1** | **5** | **1.766.650.100,00** | - | - | - | - | - | - | **1.397.153.500,00** | - |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **9.183.367.306,00** | | | | | | | **8.990.000.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **9.183.367.306,00** | | | | | | | **8.990.000.000,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **8.263.367.306,00** | | | | | | | **8.192.500.000,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **6.401.547.306,00** | | | | | | | **6.477.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.401.547.306,00** | - | - | - | - | - | - | **6.477.500.000,00** | - |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan* | - | | | 21 Dokumen | 58.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 57.400.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 8.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 6.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 7.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Hasil Administrasi Keuangan* | - | | | 45 Dokumen | 5.517.767.306,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 5.597.767.816,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 756 Orang/bulan | 5.333.367.306,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.413.367.816,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 164.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 164.400.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 6.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 14.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 14.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 3.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 3.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur PD yang Medapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 55 Orang | 16.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 16.200.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 16.200.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Dilaksanakan* | - | | | 7 Layanan | 382.192.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 380.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 18.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 85.003.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 80.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 45.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 212.189.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 215.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 250.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 65.500.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 130.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | 54.700.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 95.388.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 90.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 5.488.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 84.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 80.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik* | - | | | 3 Jenis | 79.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | - | 82.132.184,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 39.132.184,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 61 Unit | 16.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 16.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 43.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Perangkat Daerah, P : 28 Orang, L: 26 Orang | | 27.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **1.861.820.000,00** | | | | | | | **1.715.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan ASN daerah yang memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase kebijakan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. minimal 0,5 % dalam satu tahun** | **1** | **0,1** | **0,1** | **0,5** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 100 Persen | 655.550.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | - | 603.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0001 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 1 Dokumen | 27.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 27.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penempatan ASN Kompeten dan Berpaham Nilai Budaya Daerah pada OPD Pengampu Kebudayaan ]** | **Persentase ASN yang ditempatkan di OPD Pengampu Kebudayaan dengan kualifikasi kompetensi dan pemahaman nilai budaya daerah yang sesuai, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Mendapatkan Penempatan Sesuai Kompetensi di OPD Pengelola Jalan ]** | **Persentase ASN teknis yang ditempatkan sesuai hasil evaluasi kompetensi dan kebutuhan OPD pengelola jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penempatan ASN Kompeten di OPD Pengelola Air Bersih sesuai Kebutuhan Teknis ]** | **Persentase ASN yang ditempatkan di OPD pengelola air bersih dengan kompetensi sesuai kebutuhan teknis terhadap total kebutuhan ASN di OPD tersebut. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada OPD Pengampu Infrastruktur Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN TIK yang ditempatkan sesuai kebutuhan formasi jabatan di OPD pengampu pengurangan blankspot. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang penempatannya sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian administrasi kepegawaian ASN sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen administrasi kepegawaian ASN yang diproses tepat waktu sesuai standar dengan target minimal 90% dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 4 Dokumen | 28.550.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan ASN daerah yang memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase kebijakan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. minimal 0,5 % dalam satu tahun** | **1** | **0,1** | **0,1** | **0,5** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 2 Lembaga | 280.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 280.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 75.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian administrasi kepegawaian ASN sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen administrasi kepegawaian ASN yang diproses tepat waktu sesuai standar dengan target minimal 90% dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian administrasi kepegawaian ASN sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen administrasi kepegawaian ASN yang diproses tepat waktu sesuai standar dengan target minimal 90% dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Laporan | 85.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 56.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian administrasi kepegawaian ASN sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen administrasi kepegawaian ASN yang diproses tepat waktu sesuai standar dengan target minimal 90% dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Mendapatkan Penempatan Sesuai Kompetensi di OPD Pengelola Jalan ]** | **Persentase ASN teknis yang ditempatkan sesuai hasil evaluasi kompetensi dan kebutuhan OPD pengelola jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi* | - | | | 6915 undefined | 344.800.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | - | 285.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 3 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian administrasi kepegawaian ASN sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen administrasi kepegawaian ASN yang diproses tepat waktu sesuai standar dengan target minimal 90% dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan ASN daerah yang memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase kebijakan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. minimal 0,5 % dalam satu tahun** | **1** | **0,1** | **0,1** | **0,5** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penempatan ASN Kompeten di OPD Pengelola Air Bersih sesuai Kebutuhan Teknis ]** | **Persentase ASN yang ditempatkan di OPD pengelola air bersih dengan kompetensi sesuai kebutuhan teknis terhadap total kebutuhan ASN di OPD tersebut. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penempatan ASN Kompeten dan Berpaham Nilai Budaya Daerah pada OPD Pengampu Kebudayaan ]** | **Persentase ASN yang ditempatkan di OPD Pengampu Kebudayaan dengan kualifikasi kompetensi dan pemahaman nilai budaya daerah yang sesuai, Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada OPD Pengampu Infrastruktur Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN TIK yang ditempatkan sesuai kebutuhan formasi jabatan di OPD pengampu pengurangan blankspot. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang penempatannya sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase penyelesaian administrasi kepegawaian ASN sesuai standar pelayanan publik. ]** | **Persentase dokumen administrasi kepegawaian ASN yang diproses tepat waktu sesuai standar dengan target minimal 90% dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 6 0 | 150.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Kabupaten Maros | | 130.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan ASN daerah yang memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase kebijakan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. minimal 0,5 % dalam satu tahun** | **1** | **0,1** | **0,1** | **0,5** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 3 Dokumen | 134.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi* | - | | | 1000 Orang | 446.470.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | - | 442.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | | | | 3 Dokumen | 371.470.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 372.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan ASN daerah yang memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase kebijakan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. minimal 0,5 % dalam satu tahun** | **1** | **0,1** | **0,1** | **0,5** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN* | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada OPD Pengampu Infrastruktur Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN TIK yang ditempatkan sesuai kebutuhan formasi jabatan di OPD pengampu pengurangan blankspot. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | | | | 737 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penempatan ASN Kompeten di OPD Pengelola Air Bersih sesuai Kebutuhan Teknis ]** | **Persentase ASN yang ditempatkan di OPD pengelola air bersih dengan kompetensi sesuai kebutuhan teknis terhadap total kebutuhan ASN di OPD tersebut. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital. ]** | **Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi kualifikasi jabatan dan kompetensi sesuai standar jabatan. Minimal 60 % diakhir tahun** | **80** | **30** | **30** | **60** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengelolaan ASN daerah yang memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase kebijakan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. minimal 0,5 % dalam satu tahun** | **1** | **0,1** | **0,1** | **0,5** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Evaluasi dan Penilaian Kinerja* | - | | | 6915 Orang | 415.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | - | 385.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang penempatannya sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang penempatannya sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 200 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 130.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* | | | | 200 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 10 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. ]** | **Persentase jabatan administrasi dan fungsional yang diisi oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai data hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **1.861.820.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.715.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **920.000.000,00** | | | | | | | **797.500.000,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | **100 Persen** | **920.000.000,00** | | | | | | | **797.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pendampingan UMKM dalam Pemanfaatan Platform Digital. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait digitalisasi UMKM terhadap total ASN yang ditugaskan melakukan pembinaan UMKM. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis* | - | | | 20 Orang | 270.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | - | 310.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 36 Orang | 270.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 310.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. ]** | **Persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebudayaan mencapai minimal 50 % per tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN dan Tenaga Kerja Terlatih dalam Manajemen Risiko Bencana dan Tanggap Darurat. ]** | **Persentase ASN dan tenaga kerja yang mengikuti dan lulus pelatihan manajemen risiko bencana dan tanggap darurat dari total ASN dan tenaga kerja di OPD terkait setiap tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja ASN di bidang pertanian yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai standar untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase ASN di sektor pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan dinyatakan kompeten dalam satu tahun terhadap total ASN di bidang pertanian. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan sektor real estate. ]** | **Persentase ASN pada perangkat daerah terkait yang mengikuti pelatihan teknis di bidang tata ruang, properti, atau investasi real estate, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Pengelola Program Air Bersih yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ]** | **Persentase ASN pengelola program air bersih yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar teknis dan manajerial terhadap total ASN pengelola. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Meningkatkan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi ]** | **Persentase ASN teknis bidang infrastruktur yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi terkait kebijakan jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan atau diklat tentang kebijakan dan implementasi jaminan ketenagakerjaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis dalam pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan dan ekonomi. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training) dan menunjukkan peningkatan kinerja layanan publik pada unit kerja strategis ekonomi mencapai minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan transportasi lokal setiap tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mendukung pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait pengembangan sektor jasa terhadap total ASN terkait, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait pengembangan pariwisata dalam satu tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang kompeten di bidang pengembangan sektor industri pengolahan ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait sektor industri pengolahan, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/kegiatan pengembangan kompetensi terkait fasilitasi kepemudaan dan partisipasi publik dalam 1 tahun terhadap total ASN yang membidangi urusan kepemudaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kapasitas dalam membina dan mendukung wirausahawan pemuda. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan wirausaha pemuda, serta aktif melakukan pendampingan minimal 3 wirausahawan baru dalam 1 tahun, dengan target minimal 50 % diakhir tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, literasi digital) untuk mendukung pelayanan publik dan sosialisasi literasi kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan literasi dan menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi literasi terhadap total ASN. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/pembinaan terkait hak anak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tugasnya dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekonomi daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengelolaan ekonomi daerah dan inflasi minimal 30 % setiap tahun untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan berkontribusi dalam program penciptaan lapangan kerja dalam 12 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi untuk mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas terkait penyerapan lulusan vokasi terhadap total ASN yang bertugas di bidang terkait.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi yang berdampak pada peningkatan indeks inovasi instansi pemerintah. ]** | **Persentase ASN yang menyelesaikan pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi terkait dengan penerapan inovasi di instansi pemerintah, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pelayanan dan Perizinan Investasi. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus pelayanan dan perizinan investasi dari total ASN di dinas terkait, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis PPRG terhadap total ASN sasaran pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. ] | Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi pengelolaan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai kebutuhan jabatan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. ] | Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi (manajerial dan teknis). Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase ASN yang Kompeten dalam Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi ] | Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pengelolaan infrastruktur digital dan telekomunikasi terhadap total ASN yang terlibat. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan standar pelayanan publik. ] | Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan kompetensi dengan hasil evaluasi minimal “baik” mencapai minimal 80 % dalam 1 tahun. | 100 | 70 | 70 | 80 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ] | Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari total ASN dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun | 75 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pegawai yang memiliki kompetensi digital dan manajerial sesuai kebutuhan implementasi SPBE. ] | Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi digital dan manajerial terkait SPBE dan dinyatakan kompeten dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase SDM sektor pendidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan dalam 12 bulan ke depan. ] | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi minimal 50 % dari total sasaran dalam satu tahun. | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengembangan ASN yang mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **persentase program pelatihan dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik bagi kelompok masyarakat miskin. Minimal 30 % dalam satu tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting di wilayah kerja. ]** | **Persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang tersertifikasi kompeten dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting meningkat menjadi minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan. ]** | **Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai standar profesi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ]** | **Persentase ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi berbasis hasil analisis kebutuhan kompetensi, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi yang berdampak pada peningkatan indeks inovasi instansi pemerintah. ]** | **Persentase ASN yang menyelesaikan pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi terkait dengan penerapan inovasi di instansi pemerintah, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas* | - | | | 300 Orang | 650.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | - | 487.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi untuk mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas terkait penyerapan lulusan vokasi terhadap total ASN yang bertugas di bidang terkait.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pelayanan dan Perizinan Investasi. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus pelayanan dan perizinan investasi dari total ASN di dinas terkait, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, literasi digital) untuk mendukung pelayanan publik dan sosialisasi literasi kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan literasi dan menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi literasi terhadap total ASN. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan standar pelayanan publik. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan kompetensi dengan hasil evaluasi minimal “baik” mencapai minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekonomi daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengelolaan ekonomi daerah dan inflasi minimal 30 % setiap tahun untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja ASN di bidang pertanian yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai standar untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase ASN di sektor pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan dinyatakan kompeten dalam satu tahun terhadap total ASN di bidang pertanian. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari total ASN dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan sektor real estate. ]** | **Persentase ASN pada perangkat daerah terkait yang mengikuti pelatihan teknis di bidang tata ruang, properti, atau investasi real estate, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis PPRG terhadap total ASN sasaran pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Pengelola Program Air Bersih yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ]** | **Persentase ASN pengelola program air bersih yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar teknis dan manajerial terhadap total ASN pengelola. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/kegiatan pengembangan kompetensi terkait fasilitasi kepemudaan dan partisipasi publik dalam 1 tahun terhadap total ASN yang membidangi urusan kepemudaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Meningkatkan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi ]** | **Persentase ASN teknis bidang infrastruktur yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pendampingan UMKM dalam Pemanfaatan Platform Digital. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait digitalisasi UMKM terhadap total ASN yang ditugaskan melakukan pembinaan UMKM. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi terkait kebijakan jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan atau diklat tentang kebijakan dan implementasi jaminan ketenagakerjaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis dalam pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan dan ekonomi. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training) dan menunjukkan peningkatan kinerja layanan publik pada unit kerja strategis ekonomi mencapai minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi pengelolaan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai yang memiliki kompetensi digital dan manajerial sesuai kebutuhan implementasi SPBE. ]** | **Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi digital dan manajerial terkait SPBE dan dinyatakan kompeten dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan transportasi lokal setiap tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mendukung pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait pengembangan sektor jasa terhadap total ASN terkait, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase SDM sektor pendidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi minimal 50 % dari total sasaran dalam satu tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait pengembangan pariwisata dalam satu tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kapasitas dalam membina dan mendukung wirausahawan pemuda. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan wirausaha pemuda, serta aktif melakukan pendampingan minimal 3 wirausahawan baru dalam 1 tahun, dengan target minimal 50 % diakhir tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengembangan ASN yang mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **persentase program pelatihan dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik bagi kelompok masyarakat miskin. Minimal 30 % dalam satu tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan berkontribusi dalam program penciptaan lapangan kerja dalam 12 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai kebutuhan jabatan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi (manajerial dan teknis). Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang kompeten di bidang pengembangan sektor industri pengolahan ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait sektor industri pengolahan, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Kompeten dalam Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pengelolaan infrastruktur digital dan telekomunikasi terhadap total ASN yang terlibat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ]** | **Persentase ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi berbasis hasil analisis kebutuhan kompetensi, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. ]** | **Persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebudayaan mencapai minimal 50 % per tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting di wilayah kerja. ]** | **Persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang tersertifikasi kompeten dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting meningkat menjadi minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/pembinaan terkait hak anak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tugasnya dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait pengembangan pariwisata dalam satu tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | 5.04.02.2.02.0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan. ]** | **Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai standar profesi.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting di wilayah kerja. ]** | **Persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang tersertifikasi kompeten dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting meningkat menjadi minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengembangan ASN yang mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **persentase program pelatihan dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik bagi kelompok masyarakat miskin. Minimal 30 % dalam satu tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase SDM sektor pendidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi minimal 50 % dari total sasaran dalam satu tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai yang memiliki kompetensi digital dan manajerial sesuai kebutuhan implementasi SPBE. ]** | **Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi digital dan manajerial terkait SPBE dan dinyatakan kompeten dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari total ASN dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan standar pelayanan publik. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan kompetensi dengan hasil evaluasi minimal “baik” mencapai minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Kompeten dalam Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pengelolaan infrastruktur digital dan telekomunikasi terhadap total ASN yang terlibat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai kebutuhan jabatan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi (manajerial dan teknis). Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi pengelolaan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pendampingan UMKM dalam Pemanfaatan Platform Digital. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait digitalisasi UMKM terhadap total ASN yang ditugaskan melakukan pembinaan UMKM. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis PPRG terhadap total ASN sasaran pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pelayanan dan Perizinan Investasi. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus pelayanan dan perizinan investasi dari total ASN di dinas terkait, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi yang berdampak pada peningkatan indeks inovasi instansi pemerintah. ]** | **Persentase ASN yang menyelesaikan pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi terkait dengan penerapan inovasi di instansi pemerintah, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi untuk mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas terkait penyerapan lulusan vokasi terhadap total ASN yang bertugas di bidang terkait.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan berkontribusi dalam program penciptaan lapangan kerja dalam 12 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekonomi daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengelolaan ekonomi daerah dan inflasi minimal 30 % setiap tahun untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/pembinaan terkait hak anak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tugasnya dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, literasi digital) untuk mendukung pelayanan publik dan sosialisasi literasi kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan literasi dan menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi literasi terhadap total ASN. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kapasitas dalam membina dan mendukung wirausahawan pemuda. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan wirausaha pemuda, serta aktif melakukan pendampingan minimal 3 wirausahawan baru dalam 1 tahun, dengan target minimal 50 % diakhir tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/kegiatan pengembangan kompetensi terkait fasilitasi kepemudaan dan partisipasi publik dalam 1 tahun terhadap total ASN yang membidangi urusan kepemudaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ]** | **Persentase ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi berbasis hasil analisis kebutuhan kompetensi, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. ] | Persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebudayaan mencapai minimal 50 % per tahun. | 70 | 10 | 10 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase tenaga kerja ASN di bidang pertanian yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai standar untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ] | Persentase ASN di sektor pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan dinyatakan kompeten dalam satu tahun terhadap total ASN di bidang pertanian. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan sektor real estate. ] | Persentase ASN pada perangkat daerah terkait yang mengikuti pelatihan teknis di bidang tata ruang, properti, atau investasi real estate, Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase ASN Pengelola Program Air Bersih yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ] | Persentase ASN pengelola program air bersih yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar teknis dan manajerial terhadap total ASN pengelola. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Meningkatkan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi ] | Persentase ASN teknis bidang infrastruktur yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi terkait kebijakan jaminan ketenagakerjaan. ] | Persentase ASN yang lulus pelatihan atau diklat tentang kebijakan dan implementasi jaminan ketenagakerjaan. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis dalam pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan dan ekonomi. ] | Persentase ASN yang lulus pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training) dan menunjukkan peningkatan kinerja layanan publik pada unit kerja strategis ekonomi mencapai minimal 50 % dalam 1 tahun. | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan transportasi lokal setiap tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mendukung pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait pengembangan sektor jasa terhadap total ASN terkait, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang kompeten di bidang pengembangan sektor industri pengolahan ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait sektor industri pengolahan, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan sektor real estate. ]** | **Persentase ASN pada perangkat daerah terkait yang mengikuti pelatihan teknis di bidang tata ruang, properti, atau investasi real estate, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 237.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai kebutuhan jabatan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi (manajerial dan teknis). Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Meningkatkan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi ]** | **Persentase ASN teknis bidang infrastruktur yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi terkait kebijakan jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan atau diklat tentang kebijakan dan implementasi jaminan ketenagakerjaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis dalam pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan dan ekonomi. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training) dan menunjukkan peningkatan kinerja layanan publik pada unit kerja strategis ekonomi mencapai minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan transportasi lokal setiap tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mendukung pengembangan sektor jasa. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait pengembangan sektor jasa terhadap total ASN terkait, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait pengembangan pariwisata dalam satu tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang kompeten di bidang pengembangan sektor industri pengolahan ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait sektor industri pengolahan, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/kegiatan pengembangan kompetensi terkait fasilitasi kepemudaan dan partisipasi publik dalam 1 tahun terhadap total ASN yang membidangi urusan kepemudaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kapasitas dalam membina dan mendukung wirausahawan pemuda. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan wirausaha pemuda, serta aktif melakukan pendampingan minimal 3 wirausahawan baru dalam 1 tahun, dengan target minimal 50 % diakhir tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, literasi digital) untuk mendukung pelayanan publik dan sosialisasi literasi kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan literasi dan menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi literasi terhadap total ASN. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/pembinaan terkait hak anak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tugasnya dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekonomi daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengelolaan ekonomi daerah dan inflasi minimal 30 % setiap tahun untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan berkontribusi dalam program penciptaan lapangan kerja dalam 12 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi untuk mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas terkait penyerapan lulusan vokasi terhadap total ASN yang bertugas di bidang terkait.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi yang berdampak pada peningkatan indeks inovasi instansi pemerintah. ]** | **Persentase ASN yang menyelesaikan pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi terkait dengan penerapan inovasi di instansi pemerintah, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pelayanan dan Perizinan Investasi. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus pelayanan dan perizinan investasi dari total ASN di dinas terkait, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis PPRG terhadap total ASN sasaran pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pendampingan UMKM dalam Pemanfaatan Platform Digital. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait digitalisasi UMKM terhadap total ASN yang ditugaskan melakukan pembinaan UMKM. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi pengelolaan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. ]** | **Persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebudayaan mencapai minimal 50 % per tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja ASN di bidang pertanian yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai standar untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase ASN di sektor pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan dinyatakan kompeten dalam satu tahun terhadap total ASN di bidang pertanian. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Pengelola Program Air Bersih yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ]** | **Persentase ASN pengelola program air bersih yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar teknis dan manajerial terhadap total ASN pengelola. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting di wilayah kerja. ]** | **Persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang tersertifikasi kompeten dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting meningkat menjadi minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengembangan ASN yang mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **persentase program pelatihan dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik bagi kelompok masyarakat miskin. Minimal 30 % dalam satu tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase SDM sektor pendidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi minimal 50 % dari total sasaran dalam satu tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai yang memiliki kompetensi digital dan manajerial sesuai kebutuhan implementasi SPBE. ]** | **Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi digital dan manajerial terkait SPBE dan dinyatakan kompeten dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari total ASN dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan standar pelayanan publik. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan kompetensi dengan hasil evaluasi minimal “baik” mencapai minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Kompeten dalam Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pengelolaan infrastruktur digital dan telekomunikasi terhadap total ASN yang terlibat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ]** | **Persentase ASN dalam jabatan administrasi dan fungsional yang mengikuti pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi berbasis hasil analisis kebutuhan kompetensi, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kabupaten Maros | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Pengelola Program Air Bersih yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ]** | **Persentase ASN pengelola program air bersih yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar teknis dan manajerial terhadap total ASN pengelola. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan berkontribusi dalam program penciptaan lapangan kerja dalam 12 bulan setelah pelatihan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kerja ASN di bidang pertanian yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai standar untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase ASN di sektor pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan dinyatakan kompeten dalam satu tahun terhadap total ASN di bidang pertanian. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. ]** | **Persentase ASN dan tenaga kebudayaan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebudayaan mencapai minimal 50 % per tahun.** | **70** | **10** | **10** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan sektor real estate. ]** | **Persentase ASN pada perangkat daerah terkait yang mengikuti pelatihan teknis di bidang tata ruang, properti, atau investasi real estate, Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN Teknis Infrastruktur yang Meningkatkan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi ]** | **Persentase ASN teknis bidang infrastruktur yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap total ASN teknis infrastruktur, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi terkait kebijakan jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan atau diklat tentang kebijakan dan implementasi jaminan ketenagakerjaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis dalam pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan dan ekonomi. ]** | **Persentase ASN yang lulus pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training) dan menunjukkan peningkatan kinerja layanan publik pada unit kerja strategis ekonomi mencapai minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan transportasi lokal setiap tahun. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mendukung pengembangan sektor jasa. ] | Persentase ASN yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait pengembangan sektor jasa terhadap total ASN terkait, Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah. ] | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait pengembangan pariwisata dalam satu tahun. Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang kompeten di bidang pengembangan sektor industri pengolahan ] | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait sektor industri pengolahan, Minimal 30 % diakhir tahun | 50 | 10 | 10 | 30 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan. ] | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/kegiatan pengembangan kompetensi terkait fasilitasi kepemudaan dan partisipasi publik dalam 1 tahun terhadap total ASN yang membidangi urusan kepemudaan. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kapasitas dalam membina dan mendukung wirausahawan pemuda. ] | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan wirausaha pemuda, serta aktif melakukan pendampingan minimal 3 wirausahawan baru dalam 1 tahun, dengan target minimal 50 % diakhir tahun. | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi literasi (membaca, menulis, literasi digital) untuk mendukung pelayanan publik dan sosialisasi literasi kepada masyarakat. ] | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan literasi dan menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi literasi terhadap total ASN. Minimal 50 % setiap tahunnya | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ] | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan/pembinaan terkait hak anak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tugasnya dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun | 70 | 30 | 30 | 50 | 920.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 797.500.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekonomi daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan pengelolaan ekonomi daerah dan inflasi minimal 30 % setiap tahun untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting di wilayah kerja. ]** | **Persentase tenaga kesehatan dan kader gizi yang tersertifikasi kompeten dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk atau stunting meningkat menjadi minimal 50 % dalam 1 tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kebijakan dan koordinasi pengembangan ASN yang mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan. ]** | **persentase program pelatihan dan pengembangan ASN yang terkoordinasi dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik bagi kelompok masyarakat miskin. Minimal 30 % dalam satu tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase SDM sektor pendidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan dalam 12 bulan ke depan. ]** | **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi minimal 50 % dari total sasaran dalam satu tahun.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pegawai yang memiliki kompetensi digital dan manajerial sesuai kebutuhan implementasi SPBE. ]** | **Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi digital dan manajerial terkait SPBE dan dinyatakan kompeten dalam 1 tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari total ASN dalam satu tahun, Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan standar pelayanan publik. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan kompetensi dengan hasil evaluasi minimal “baik” mencapai minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **80** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Kompeten dalam Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi terkait pengelolaan infrastruktur digital dan telekomunikasi terhadap total ASN yang terlibat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis sesuai kebutuhan jabatan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi (manajerial dan teknis). Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi pengelolaan jaminan kesehatan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pendampingan UMKM dalam Pemanfaatan Platform Digital. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait digitalisasi UMKM terhadap total ASN yang ditugaskan melakukan pembinaan UMKM. minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis PPRG terhadap total ASN sasaran pelatihan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Pelayanan dan Perizinan Investasi. ]** | **Persentase ASN yang telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus pelayanan dan perizinan investasi dari total ASN di dinas terkait, minimal 50 % pada akhir tahun** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi yang berdampak pada peningkatan indeks inovasi instansi pemerintah. ]** | **Persentase ASN yang menyelesaikan pelatihan inovasi dan pengembangan kompetensi terkait dengan penerapan inovasi di instansi pemerintah, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **10** | **30** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase ASN yang memiliki kompetensi untuk mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas terkait penyerapan lulusan vokasi terhadap total ASN yang bertugas di bidang terkait.** | **70** | **30** | **30** | **50** | **920.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **797.500.000,00** | - |
| | | **INSPEKTORAT KABUPATEN** | | | | | | **25.375.311.319,00** | | | | | | | **36.701.449.314,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **25.375.311.319,00** | | | | | | | **36.701.449.314,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **25.375.311.319,00** | | | | | | | **36.701.449.314,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **19.086.736.319,00** | | | | | | | **30.415.714.314,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **19.086.736.319,00** | - | - | - | - | - | - | **30.415.714.314,00** | - |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 41.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 50.253.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.565.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.244.500,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.444.500,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.800.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.199.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.600.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 2.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.600.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 21.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 28.800.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.388.553.071,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 12.068.751.500,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1022 Orang/bulan | 12.225.353.071,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.916.471.500,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 11 Dokumen | 163.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 152.280.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.553.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.549.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 41.100.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 36.750.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 73 Orang | 1.512.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.512.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 819.598.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 779.809.814,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.275.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.275.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.662.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.662.500,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 121.374.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 102.288.314,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 38.250.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 38.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 54.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 579.036.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 564.334.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 740.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 713.800.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 122.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 47.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 617.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 666.300.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 286.750.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 253.850.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 450 Laporan | 14.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 14.200.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 134.750.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 101.850.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 137.800.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 137.800.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.257.235.248,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 15.000.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 3.257.235.248,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | **-** | **4.746.950.000,00** | | | | | | | **4.779.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | - | | | - | 4.167.970.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.218.220.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 118 Laporan | 447.780.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 699.890.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program pengembangan sektor jasa terhadap hasil pengawasan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait sektor jasa yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam kurun waktu satu tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ]** | **Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat terhadap pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan ]** | **Persentase tindak lanjut pelaku usaha pariwisata atas rekomendasi pengawasan Inspektorat dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diserahkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 150 Laporan | 1.109.080.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.898.730.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ]** | **Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ] | Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ] | Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ] | Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ] | Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ] | Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun. | 100 | 70 | 70 | 90 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ] | Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ] | Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun | 100 | 70 | 70 | 90 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 69 Laporan | 901.680.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 221.680.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ] | Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ] | Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan. | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ] | Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ] | Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun. | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ] | Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ] | Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %. | 100 | 70 | 70 | 90 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ] | Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program pengembangan sektor jasa terhadap hasil pengawasan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait sektor jasa yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam kurun waktu satu tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat terhadap pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan ]** | **Persentase tindak lanjut pelaku usaha pariwisata atas rekomendasi pengawasan Inspektorat dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diserahkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 2 Laporan | 142.800.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 228.310.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ]** | **Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 14 Laporan | 428.400.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 325.040.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ]** | **Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ]** | **Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 12 Kesepakatan | 214.030.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 214.030.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 36 Dokumen | 924.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 630.540.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program pengembangan sektor jasa terhadap hasil pengawasan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait sektor jasa yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam kurun waktu satu tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ] | Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun. | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ] | Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ] | Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun. | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ] | Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun. | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ] | Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ] | Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %. | 100 | 70 | 70 | 90 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |
| | | [ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ] | Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun | 100 | 50 | 50 | 80 | 4.746.950.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.779.200.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | - | | | - | 578.980.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 560.980.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 8 Laporan | 36.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 18.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program pengembangan sektor jasa terhadap hasil pengawasan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait sektor jasa yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam kurun waktu satu tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat terhadap pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan ]** | **Persentase tindak lanjut pelaku usaha pariwisata atas rekomendasi pengawasan Inspektorat dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diserahkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya kepatuhan terhadap standar kesehatan melalui pengawasan yang efektif ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 12 Laporan | 542.980.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 542.980.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Pelaksana Internal terhadap Standar Pelaksanaan Pembinaan UMKM Pemanfaatan Platform Digital ]** | **Persentase unit pelaksana internal (OPD/Dinas) yang melaksanakan pengawasan dan pelaporan pembinaan UMKM digital sesuai standar dan jadwal. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ]** | **Persentase unit kerja yang memenuhi standar regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan hasil pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah ]** | **Persentase unit kerja yang diawasi terkait kepatuhan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, dengan target minimal 90 % dalam 1 tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat terhadap pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan ]** | **Persentase tindak lanjut pelaku usaha pariwisata atas rekomendasi pengawasan Inspektorat dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diserahkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang memastikan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan di berbagai sektor ]** | **Persentase temuan pengawasan terkait pemenuhan hak anak yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap program-program yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kelompok pendapatan 40% terbawah ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan berkontribusi pada perbaikan program pemberdayaan kelompok pendapatan 40% terbawah dalam laporan pengawasan tahunan. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program ekonomi kreatif terhadap standar dan prosedur internal pemerintah daerah melalui pengawasan internal ]** | **Persentase temuan hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi terhadap total temuan pengawasan internal pada program ekonomi kreatif. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh OPD terkait pengelolaan anggaran untuk pengendalian inflasi minimal 90 % setiap tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang berkontribusi pada peningkatan cakupan peserta aktif jaminan kesehatan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan yang diimplementasikan oleh instansi terkait dalam waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan diterbitkan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pemerintahan berbasis digital ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait SPBE yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan program pengembangan sektor jasa terhadap hasil pengawasan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait sektor jasa yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam kurun waktu satu tahun, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan cakupan jaminan ketenagakerjaan ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan terkait ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh dinas pertanian dan stakeholder terkait guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan dalam program peningkatan produktivitas pertanian selama 1 tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program/kegiatan pendukung industri pengolahan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ]** | **Persentase rekomendasi pengawasan atas program/kegiatan yang berkontribusi terhadap industri pengolahan (misalnya: sarana produksi, pelatihan, promosi, dll.) yang ditindaklanjuti oleh OPD, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kebudayaan sesuai kebijakan daerah ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait kebudayaan mencapai minimal 80 % setiap tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mendukung penurunan kemiskinan dalam 12 bulan ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti minimal 90 % per tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Temuan Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Konektivitas Sistem Transportasi di Kawasan Produktif ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dalam periode satu tahun. minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang diselesaikan tepat waktu ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti tepat waktu. Minimal 90 % diakhir tahun** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program industri pengolahan di OPD terkait meningkat melalui pengawasan internal ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang diimplementasikan oleh OPD terkait dalam kurun waktu 6 bulan setelah laporan pengawasan, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet 4G atau Lebih ]** | **Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan internet 4G atau lebih yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Proyek Investasi Daerah yang Telah Diaudit ]** | **Persentase proyek investasi daerah yang telah menjalani audit dan memenuhi standar kepatuhan terhadap total proyek investasi yang sedang berjalan, minimal 80 % pada akhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ]** | **Persentase program pemberdayaan ekonomi (UMKM, ketahanan pangan, pelatihan kerja) yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil pengawasannya dalam upaya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat, dengan target minimal 90 %.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan untuk mendukung peningkatan pendapatan per kapita ]** | **Persentase program pembangunan yang diawasi dan terbukti tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ]** | **Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan terkait PPRG terhadap total perangkat daerah yang menjadi sasaran pengawasan. Minimal 80 % diakhir tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pengawasan pelaksanaan program gizi dan penanganan stunting yang efektif dan tepat waktu di seluruh wilayah kerja ]** | **Persentase pelaksanaan pengawasan program gizi dan stunting yang memenuhi standar kualitas minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Prosedur Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan OPD Terkait ]** | **Persentase OPD terkait yang telah melakukan pengawasan internal dan pelaporan kepatuhan terhadap standar mitigasi risiko bencana. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase hasil pengawasan yang merekomendasikan penerapan inovasi untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah ]** | **Persentase laporan pengawasan yang memuat rekomendasi inovasi dan tindak lanjut pelaksanaannya, dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan pengawasan program pendidikan yang sesuai standar dalam 12 bulan ke depan ]** | **Persentase kegiatan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan mencapai minimal 90 % dalam satu tahun.** | **100** | **70** | **70** | **90** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pembangunan daerah yang diawasi dan dipastikan mendukung penciptaan lapangan kerja ]** | **Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **4.746.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.779.200.000,00** | - |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | **-** | **1.541.625.000,00** | | | | | | | **1.506.535.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang mendapatkan manfaat dari perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi secara tepat, berkualitas, dan aplikatif ]** | **Meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan hasil asistensi yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah,** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.541.625.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.506.535.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 75.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 4 Rekomendasi | 56.900.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 56.900.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 4 Rekomendasi | 18.100.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 18.100.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | - | | | - | 1.466.625.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.431.535.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 42 perangkat daerah | 664.125.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 656.105.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 42 perangkat daerah | 61.075.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 59.340.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 3 Kegiatan | 178.825.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 270.524.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 7 perangkat daerah | 562.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 445.566.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **KECAMATAN MAROS BARU** | | | | | | **6.043.088.752,00** | | | | | | | **6.131.311.752,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.043.088.752,00** | | | | | | | **6.131.311.752,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.043.088.752,00** | | | | | | | **6.131.311.752,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **5.130.000.752,00** | | | | | | | **5.164.220.752,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 13.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 18 Laporan | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 900.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 12 Data | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.600.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.845.088.752,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.845.088.752,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 52 Orang/bulan | 4.773.088.752,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.773.088.752,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 72.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 72.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 9.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 163.037.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 199.957.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 1.861.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.889.500,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15.920.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 16.013.500,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 10000 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 41.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 58.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 49.756.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 70.054.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 77.200.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 77.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 67.200.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 67.200.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.130.000.752,00** | - | - | - | - | - | - | **5.164.220.752,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 19.775.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 19.775.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 14.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 14.500.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 5.275.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.275.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **765.000.000,00** | | | | | | | **770.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 5.300.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 5.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 5.300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 5.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 754.100.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 754.100.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 5.300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 748.800.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 748.800.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 5.600.000,00 | | | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | - | 10.600.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 2.800.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **765.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **770.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 2.800.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **48.318.000,00** | | | | | | | **75.321.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **48.318.000,00** | - | - | - | - | - | - | **75.321.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 48.318.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 75.321.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 20.300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 33.830.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **48.318.000,00** | - | - | - | - | - | - | **75.321.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 28.018.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 41.491.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **-** | **2.800.000,00** | | | | | | | **3.300.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.300.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 2.800.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | - | 3.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 2.800.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 3.300.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.300.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **-** | **95.850.000,00** | | | | | | | **117.350.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **95.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **117.350.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 95.850.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 117.350.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 2 Orang | 43.550.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 59.550.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 2 Orang | 52.300.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 57.800.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **-** | **1.120.000,00** | | | | | | | **1.120.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.120.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.120.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 1.120.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.120.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 1.120.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.120.000,00 | KECAMATAN MAROS BARU |
| | | **KELURAHAN BAJU BODOA** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **85.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 85.500.000,00 | KELURAHAN BAJU BODOA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.500.000,00 | KELURAHAN BAJU BODOA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **204.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 204.500.000,00 | KELURAHAN BAJU BODOA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baju Bodoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 204.500.000,00 | KELURAHAN BAJU BODOA |
| | | **KELURAHAN BAJI PAMAI** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **85.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 85.500.000,00 | KELURAHAN BAJI PAMAI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.500.000,00 | KELURAHAN BAJI PAMAI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **204.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 204.500.000,00 | KELURAHAN BAJI PAMAI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Baji Pamai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 204.500.000,00 | KELURAHAN BAJI PAMAI |
| | | **KELURAHAN PALLANTIKANG** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **85.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 85.500.000,00 | KELURAHAN PALLANTIKANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Pallantikang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 85.500.000,00 | KELURAHAN PALLANTIKANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **204.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 204.500.000,00 | KELURAHAN PALLANTIKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Maros Baru, Pallantikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 204.500.000,00 | KELURAHAN PALLANTIKANG |
| | | **KECAMATAN BANTIMURUNG** | | | | | | **4.847.927.091,00** | | | | | | | **4.866.279.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.847.927.091,00** | | | | | | | **4.866.279.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.847.927.091,00** | | | | | | | **4.866.279.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **4.198.632.091,00** | | | | | | | **4.193.784.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.198.632.091,00** | - | - | - | - | - | - | **4.193.784.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 19.050.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 20.775.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.650.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 3.375.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.198.632.091,00** | - | - | - | - | - | - | **4.193.784.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 96 Data | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 9.600.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.198.632.091,00** | - | - | - | - | - | - | **4.193.784.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 26 Dokumen | 3.898.567.091,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 3.866.364.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/bulan | 3.847.927.091,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 3.815.724.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 50.640.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.640.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 12.600.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 18 Paket | 12.600.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 12.600.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 130.614.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 132.203.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.070.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 3.070.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.558.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.615.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.946.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 22.478.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 40.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 59.040.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 59.040.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 57.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 57.500.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 17.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 17.500.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 40.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 56.640.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 64.320.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 8.640.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 48.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 55.320.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 Jenis | 19.461.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 35.822.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 13.650.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 30.011.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.198.632.091,00** | - | - | - | - | - | - | **4.193.784.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 5.811.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.811.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **464.800.000,00** | | | | | | | **467.800.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 3.100.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 4.100.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.100.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 4.100.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan*<br>*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | - | | | 1 Layanan<br>24 Laporan | 451.300.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 451.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.100.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 3.100.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 448.200.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 448.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **50** | **80** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimphkan Kepada Camat* | - | | | 3 Urusan | 10.400.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 12.400.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 4.100.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 4.100.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 2.200.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 3.200.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **464.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **467.800.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 4.100.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 5.100.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **60.545.000,00** | | | | | | | **71.295.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Masyarakat yang terlibat pada Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan* | - | | | 100 Orang | 55.795.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | - | 66.545.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 31.475.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | | 37.725.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 24.320.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 28.820.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) yang diselenggarakan di tingkat lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi lokal terhadap total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di desa/kelurahan tersebut. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **40** | **50** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Masyarakat yang terlibat pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 100 Orang | 4.750.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 4.750.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 3.100.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 3.100.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam program jaminan ketenagakerjaan sebagai peserta aktif. ]** | **Persentase pekerja di desa dan kelurahan yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan, dengan target peningkatan minimal 80 % dalam 12 bulan.** | **100** | **50** | **70** | **80** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di tingkat kecamatan. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan dan kegiatan pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat dari total masyarakat sasaran di kecamatan per tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang memiliki akses dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **60.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **71.295.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 2 Laporan | 1.650.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 1.650.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **3.075.000,00** | | | | | | | **4.075.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.075.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.075.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Masyarakat yang terlibat Dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 100 Orang | 3.075.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 4.075.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.075.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.075.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.075.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.075.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **undefined undefined** | **118.575.000,00** | | | | | | | **127.025.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **118.575.000,00** | - | - | - | - | - | - | **127.025.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan* | - | | | 2 Urusan | 118.575.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 127.025.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 54.250.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 55.950.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 100 Orang | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.050.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 500 Orang | 58.225.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 62.975.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.050.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **2.300.000,00** | | | | | | | **2.300.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.300.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.300.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku* | - | | | 6 Desa | 2.300.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 2.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 6 Dokumen | 2.300.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 2.300.000,00 | KECAMATAN BANTIMURUNG |
| | | **KELURAHAN LEANG - LEANG** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | **283.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | **283.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | **283.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **70.500.000,00** | | | | | | | **75.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 70.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 75.000.000,00 | KELURAHAN LEANG - LEANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 70.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 75.000.000,00 | KELURAHAN LEANG - LEANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **209.500.000,00** | | | | | | | **208.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan* | - | | | 2 Jenis | 209.500.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | - | 208.000.000,00 | KELURAHAN LEANG - LEANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN LEANG - LEANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 10 Pokmas / Ormas | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 8.000.000,00 | KELURAHAN LEANG - LEANG |
| | | **KELURAHAN KALABBIRANG** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | **283.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | **283.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | **283.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **70.500.000,00** | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 70.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 75.000.000,00 | KELURAHAN KALABBIRANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 70.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 75.000.000,00 | KELURAHAN KALABBIRANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **209.500.000,00** | | | | | | | **208.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan* | - | | | 2 Jenis | 209.500.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | - | 208.000.000,00 | KELURAHAN KALABBIRANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN KALABBIRANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 10 Pokmas / Ormas | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 8.000.000,00 | KELURAHAN KALABBIRANG |
| | | **KECAMATAN CAMBA** | | | | | | **4.265.340.637,00** | | | | | | | **4.680.943.901,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.265.340.637,00** | | | | | | | **4.680.943.901,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.265.340.637,00** | | | | | | | **4.680.943.901,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **3.625.536.637,00** | | | | | | | **3.975.943.901,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.625.536.637,00** | - | - | - | - | - | - | **3.975.943.901,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 4.950.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 7.950.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 1.350.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.100.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 11 Dokumen | 600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.050.000,00 | KECAMATAN CAMBA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.050.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.050.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 11 Dokumen | 600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.050.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 11 Laporan | 600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.050.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 11 Laporan | 600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 600.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 25 Dokumen | 3.349.620.637,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 3.604.093.901,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 58 Orang/bulan | 3.290.340.637,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.544.093.901,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 59.280.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 60.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 31 Orang | 15.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 15.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 31 Paket | 15.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 15.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 108.896.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 159.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 3.155.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.625.536.637,00** | - | - | - | - | - | - | **3.975.943.901,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 7.771.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.625.536.637,00** | - | - | - | - | - | - | **3.975.943.901,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 22.476.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 25.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.625.536.637,00** | - | - | - | - | - | - | **3.975.943.901,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.625.536.637,00** | - | - | - | - | - | - | **3.975.943.901,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 26.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 60.494.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 90.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 27.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 50.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 27.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 50.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 70.920.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 78.400.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 7.320.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 8.200.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 63.600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 70.200.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 Jenis | 48.650.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 60.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 44.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 50.500.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 4.650.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **463.850.000,00** | | | | | | | **503.400.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 5.550.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 5.550.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pada Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Layanan | 442.300.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 477.400.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 5.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 436.800.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 470.400.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat* | - | | | 2 Urusan | 16.000.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 19.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **463.850.000,00** | - | - | - | - | - | - | **503.400.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 5.500.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **67.904.000,00** | | | | | | | **70.600.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **67.904.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.600.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Pada Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan* | - | | | 525 Orang | 65.304.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 67.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 34.990.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 35.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.904.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.600.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 30.314.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 32.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang memiliki akses dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.904.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.600.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan* | - | | | 60 Orang | 2.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 3.600.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 2 Laporan | 2.600.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 3.600.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **5.100.000,00** | | | | | | | **8.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **5.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.000.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 70 Orang | 5.100.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 5.100.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 8.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **5.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **96.950.000,00** | | | | | | | **116.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **96.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **116.000.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan* | - | | | 2 Urusan | 96.950.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 116.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 46.200.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 52.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 80 Orang | 4.700.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 200 Orang | 41.350.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 50.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 4.700.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **6.000.000,00** | | | | | | | **7.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **7.000.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku* | - | | | 6 Desa | 6.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CAMBA |
| | | **KELURAHAN CEMPANIGA** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pada Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN | - | 90.000.000,00 | KELURAHAN CEMPANIGA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempaniga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN | | 90.000.000,00 | KELURAHAN CEMPANIGA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan* | - | | | 60 Orang | 200.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN CEMPANIGA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Cempaniga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN CEMPANIGA |
| | | **KELURAHAN MARIO PULANA** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pada Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN | - | 90.000.000,00 | KELURAHAN MARIO PULANA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN | | 90.000.000,00 | KELURAHAN MARIO PULANA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan* | - | | | 60 Orang | 200.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN MARIO PULANA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Camba, Mario Pulana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN MARIO PULANA |
| | | **KECAMATAN MALLAWA** | | | | | | **3.454.920.109,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.454.920.109,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.454.920.109,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **3.091.470.109,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.091.470.109,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 19 Dokumen | 7.690.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.150.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.250.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 1.290.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 26 Dokumen | 2.744.960.109,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 37 Orang/bulan | 2.693.120.109,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 51.840.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 40 Orang | 15.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 40 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 125.370.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.120.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.183.500,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 18.745.500,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.091.470.109,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.297.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.091.470.109,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 23.500.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 68.524.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 Jenis | 50.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 104.950.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 9.550.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 95.400.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 43.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 11 Unit | 38.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 5.500.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **221.950.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 2 Urusan | 3.350.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.350.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 2 Urusan | 209.450.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 206.400.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 3 Urusan | 9.150.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **221.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **50.200.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **50.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan* | - | | | 4 ORANG | 50.200.000,00 | | | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 28.200.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **50.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **50.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **3.150.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.150.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum* | - | | | 40 Orang | 3.150.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.150.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan strategi ketentraman dan ketertiban umum untuk mengurangi gangguan sosial. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bersama lintas sektor dalam ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana tepat waktu. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.150.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.150.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **86.350.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **86.350.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan* | - | | | 2 Urusan | 86.350.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 400 Orang | 37.500.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 37 Orang | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 400 Orang | 45.800.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **1.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang Berlaku* | - | | | 11 Desa | 1.800.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN MALLAWA |
| | | **KELURAHAN SABILA** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 2 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN SABILA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN SABILA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 420 Orang | 200.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN SABILA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Malllawa, Sabila | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN SABILA |
| | | **KECAMATAN TANRALILI** | | | | | | **4.178.738.899,00** | | | | | | | **4.204.898.899,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.178.738.899,00** | | | | | | | **4.204.898.899,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.178.738.899,00** | | | | | | | **4.204.898.899,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **3.843.783.899,00** | | | | | | | **3.868.993.899,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.843.783.899,00** | - | - | - | - | - | - | **3.868.993.899,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 7.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 13.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 30 Dokumen | 3.621.148.899,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 3.622.858.899,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 658 Orang/bulan | 3.568.738.899,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 3.568.738.899,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 51.840.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 53.550.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 285.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 285.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.843.783.899,00** | - | - | - | - | - | - | **3.868.993.899,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.770.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.770.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.843.783.899,00** | - | - | - | - | - | - | **3.868.993.899,00** | - |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.200.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 48 orang | 7.285.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 10.285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 7.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 102.510.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 112.010.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.222.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 9.222.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 21.788.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 21.788.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 500.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 49.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 49.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 5 Jenis | 18.250.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 18.250.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 8.250.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 8.250.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 0 0 | 10.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 61.320.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | - | 66.320.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 10.320.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 10.320.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.843.783.899,00** | - | - | - | - | - | - | **3.868.993.899,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 0,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.843.783.899,00** | - | - | - | - | - | - | **3.868.993.899,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur Sipil Negara (ASN) | | 51.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 3 jenis | 21.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 21.500.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 14.500.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 14.500.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **146.950.000,00** | | | | | | | **147.900.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 urusan | 4.050.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 5.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 4.050.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan* | - | | | 2 Layanan | 132.650.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 132.650.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 3.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 129.600.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 129.600.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat* | - | | | 3 Urusan | 10.250.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | - | 10.250.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 4.050.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | - | | 4.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 2.150.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 2.150.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **146.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **147.900.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 4.050.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 4.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **67.395.000,00** | | | | | | | **67.395.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **67.395.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.395.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan* | - | | | 750 orang | 67.395.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 67.395.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 39.150.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 39.150.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **67.395.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.395.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.395.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.395.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 28.245.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 28.245.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **4.050.000,00** | | | | | | | **4.050.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **4.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.050.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum* | - | | | 100 orang | 4.050.000,00 | | | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 4.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 4.050.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.050.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **4.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.050.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **114.410.000,00** | | | | | | | **114.410.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **114.410.000,00** | - | - | - | - | - | - | **114.410.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan* | - | | | 4 Urusan | 114.410.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 114.410.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 56.525.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 56.525.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 75 Orang | 285.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 285.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 800 Orang | 56.250.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 56.250.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1.350.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | | 1.350.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **2.150.000,00** | | | | | | | **2.150.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.150.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.150.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku* | - | | | 7 Desa | 2.150.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 2.150.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 7 Dokumen | 2.150.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 2.150.000,00 | KECAMATAN TANRALILI |
| | | **KELURAHAN BORONG** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 urusan | 90.000.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | - | 90.000.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | | 90.000.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **210.000.000,00** | | | | | | | **210.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan* | - | | | 4 Kegiatan | 210.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 210.000.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 1.400.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 1.400.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 200.000.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 6 Pokmas / Ormas | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 8.000.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 1 Laporan | 600.000,00 | Kab. Maros, Tanralili, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 600.000,00 | KELURAHAN BORONG |
| | | **KECAMATAN BONTOA** | | | | | | **4.043.788.139,00** | | | | | | | **4.537.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.043.788.139,00** | | | | | | | **4.537.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.043.788.139,00** | | | | | | | **4.537.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **3.449.773.139,00** | | | | | | | **3.810.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.449.773.139,00** | - | - | - | - | - | - | **3.810.000.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 9.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 10.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 1.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan Laporan | 1.600.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 26 Dokumen | 3.158.028.139,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 3.268.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 3.103.788.139,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 3.200.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen Dokumen | 54.240.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.449.773.139,00** | - | - | - | - | - | - | **3.810.000.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 laporan Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 3.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 laporan Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.449.773.139,00** | - | - | - | - | - | - | **3.810.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 35 Orang | 0,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 20.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket Paket | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 123.895.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 167.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket Paket | 3.996.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket Paket | 5.999.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket Paket | 28.912.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.449.773.139,00** | - | - | - | - | - | - | **3.810.000.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket Paket | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.449.773.139,00** | - | - | - | - | - | - | **3.810.000.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 laporan Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 40.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 laporan Laporan | 49.988.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 44.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 200.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 unit Unit | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 unit Unit | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 100.350.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Non PNS | - | 110.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 laporan Laporan | 10.950.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Non PNS | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 laporan Laporan | 89.400.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Non PNS | | 95.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 1 Jenis | 13.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 35.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 unit Unit | 10.900.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **321.420.000,00** | | | | | | | **385.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 5.100.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat, Disabilitas | - | 10.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 dokumen Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat, Disabilitas | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan* | - | | | 2 Urusan | 302.400.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 360.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 laporan Laporan | 298.200.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 350.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat* | - | | | 3 Urusan | 13.920.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | - | 15.500.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 laporan Laporan | 4.500.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **321.420.000,00** | - | - | - | - | - | - | **385.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 4.920.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **82.095.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda di desa dan kelurahan yang memiliki keterampilan dan dukungan untuk menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase pemuda di desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan memulai usaha baru, dengan target minimal 50 % peningkatan setiap tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **82.095.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan* | - | | | 100 Orang | 77.895.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 145.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **82.095.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 45.400.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 80.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **82.095.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **82.095.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 32.495.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam program jaminan ketenagakerjaan sebagai peserta aktif. ]** | **Persentase pekerja di desa dan kelurahan yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan, dengan target peningkatan minimal 80 % dalam 12 bulan.** | **100** | **50** | **70** | **80** | **82.095.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 15 Orang | 4.200.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | - | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) yang diselenggarakan di tingkat lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi lokal terhadap total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di desa/kelurahan tersebut. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **40** | **50** | **82.095.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **6.000.000,00** | | | | | | | **8.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **6.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.500.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum* | - | | | 75 Orang | 6.000.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 8.500.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 laporan Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 8.500.000,00 | KECAMATAN BONTOA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **6.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.500.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **178.550.000,00** | | | | | | | **177.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **178.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **177.000.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan* | - | | | 2 Urusan | 178.550.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 177.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 79.150.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 80.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 100 Orang | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 700 Orang | 93.400.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 90.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **5.950.000,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.950.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.000.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 8 desa* | - | | | 8 Desa | 5.950.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Perangkat Desa | - | 6.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 8 Dokumen Dokumen | 5.950.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Perangkat Desa | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BONTOA |
| | | **KELURAHAN BONTOA** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **415.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **415.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **415.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **85.500.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 85.500.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Aparatur | - | 90.000.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Aparatur | | 90.000.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **204.500.000,00** | | | | | | | **325.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 35 Orang | 204.500.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 325.000.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 unit Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 15 Pokmas / Ormas | 0,00 | Kab. Maros, Bontoa, Bontoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 25.000.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | | **KECAMATAN TURIKALE** | | | | | | **11.460.634.159,00** | | | | | | | **20.226.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **11.460.634.159,00** | | | | | | | **20.226.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **11.460.634.159,00** | | | | | | | **20.226.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 persen** | **9.048.934.159,00** | | | | | | | **16.071.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **9.048.934.159,00** | - | - | - | - | - | - | **16.071.000.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 26.400.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 35.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 26 Dokumen | 8.739.053.159,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 15.160.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 120 Orang/bulan | 8.675.773.159,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 15.000.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 59.280.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 150.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.200.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 14.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 120 Orang | 20.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 52.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 layanan | 111.881.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 300.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 39.881.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 150.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 43.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 330.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 23.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 200.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 76.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 140.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 14.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 62.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 1 Jenis | 26.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | - | 40.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 16.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Aparatur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **2.226.200.000,00** | | | | | | | **3.660.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 10.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa<br>Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan*<br>*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | - | | | 1 layanan<br>84 Laporan | 2.201.200.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 3.600.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 2.191.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 3.500.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat* | - | | | 3 Urusan | 15.000.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **2.226.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.660.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **107.500.000,00** | | | | | | | **340.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan* | - | | | 900 Orang | 100.000.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ketahanan masyarakat melalui pen ingkatan ke sejahteraan , harmoni sosial, dan keberlanjut an secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di tingkat kecamatan. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan dan kegiatan pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat dari total masyarakat sasaran di kecamatan per tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 100 Orang | 7.500.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 140.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) yang diselenggarakan di tingkat lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi lokal terhadap total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di desa/kelurahan tersebut. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **40** | **50** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam program jaminan ketenagakerjaan sebagai peserta aktif. ]** | **Persentase pekerja di desa dan kelurahan yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan, dengan target peningkatan minimal 80 % dalam 12 bulan.** | **100** | **50** | **70** | **80** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda di desa dan kelurahan yang memiliki keterampilan dan dukungan untuk menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase pemuda di desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan memulai usaha baru, dengan target minimal 50 % peningkatan setiap tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan usaha jasa lokal. ]** | **Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang jasa (seperti pelatihan, pendampingan, atau bantuan usaha), Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan kebudayaan lokal (seperti festival budaya, pelatihan seni tradisional, atau pelestarian adat). Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan untuk memperkuat ketertiban dan mengurangi gangguan sosial. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **40** | **50** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang memperoleh keterampilan dan peluang usaha produktif. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang mendukung kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan dengan nilai positif terhadap kerukunan umat beragama. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan komunitas. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan masyarakat (seperti majelis taklim, sekolah minggu, pembinaan remaja masjid, dll.). Minimal 80 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **40** | **50** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang memiliki akses dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **107.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 persen** | **2.500.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum* | - | | | 400 Orang | 2.500.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 persen** | **75.500.000,00** | | | | | | | **145.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **75.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **145.000.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan* | - | | | 2 Urusan | 75.500.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 145.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 600 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 60 Orang | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 500 Orang | 43.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TURIKALE |
| | | **KELURAHAN PETTUADAE** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **200.000.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN PETTUADAE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN PETTUADAE |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN PETTUADAE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN PETTUADAE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Pettuadae Kab. Maros, Turikale, Pettuadae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN PETTUADAE |
| | | **KELURAHAN RAYA** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN RAYA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya Kab. Maros, Turikale, Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN RAYA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN RAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya Kab. Maros, Turikale, Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN RAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Raya Kab. Maros, Turikale, Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN RAYA |
| | | **KELURAHAN TAROADA** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN TAROADA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada Kab. Maros, Turikale, Taroada | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN TAROADA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN TAROADA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada Kab. Maros, Turikale, Taroada | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN TAROADA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Taroada Kab. Maros, Turikale, Taroada | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN TAROADA |
| | | **KELURAHAN ADATONGENG** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN ADATONGENG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN ADATONGENG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN ADATONGENG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN ADATONGENG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng Kab. Maros, Turikale, Adatongeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN ADATONGENG |
| | | **KELURAHAN TURIKALE** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN TURIKALE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN TURIKALE |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN TURIKALE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN TURIKALE |
| | | **KELURAHAN ALLIRITENGNGAE** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN ALLIRITENGNGAE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN ALLIRITENGNGAE |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN ALLIRITENGNGAE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN ALLIRITENGNGAE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae Kab. Maros, Turikale, Alliri Tengae | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN ALLIRITENGNGAE |
| | | **KELURAHAN BORIBELLAYYA** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **315.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusan | 90.000.000,00 | | | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 200.000.000,00 | KELURAHAN BORIBELLAYYA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya<br>Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 200.000.000,00 | KELURAHAN BORIBELLAYYA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **225.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan* | - | | | 300 Orang | 225.000.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | KELURAHAN BORIBELLAYYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya<br>Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 300.000.000,00 | KELURAHAN BORIBELLAYYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya<br>Kab. Maros, Turikale, Bori Bellaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KELURAHAN BORIBELLAYYA |
| | | **KECAMATAN MARUSU** | | | | | | **3.143.277.580,00** | | | | | | | **3.324.700.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.143.277.580,00** | | | | | | | **3.324.700.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.143.277.580,00** | | | | | | | **3.324.700.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.958.082.580,00** | | | | | | | **3.052.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.958.082.580,00** | - | - | - | - | - | - | **3.052.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 15.690.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 19.700.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 1.050.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 840.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 840.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 840.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 840.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 840.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 840.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 0 Data | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.709.957.580,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.565.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 2.648.277.580,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.500.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 61.680.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 12.600.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 106.935.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 164.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.070.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.558.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 20.627.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 31.300.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 32.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 44.380.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 27.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 180.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 22.500.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 60.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 70.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 7.100.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 53.400.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 58.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 20.700.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 27.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 15.700.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **24.200.000,00** | | | | | | | **39.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 2.700.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 2.700.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 14.700.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 18.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 2.700.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | | | 12 0 | 12.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 6.800.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 2.700.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1.400.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **24.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **39.500.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 2.700.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **47.345.000,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga di desa dan kelurahan yang mengadopsi praktik gizi seimbang dan pola hidup sehat ]** | **Persentase keluarga di desa dan kelurahan yang mengikuti program pemberdayaan gizi dan kesehatan minimal 50 % pada akhir tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **47.345.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 47.345.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 70.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 24.025.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **47.345.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.000.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 23.320.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di tingkat kecamatan. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan dan kegiatan pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat dari total masyarakat sasaran di kecamatan per tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **47.345.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.000.000,00** | - |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **-** | **2.675.000,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.675.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 2.675.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 2.675.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.675.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.000.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **-** | **108.825.000,00** | | | | | | | **152.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **108.825.000,00** | - | - | - | - | - | - | **152.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 108.825.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 152.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 400 Orang | 51.150.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 40 Orang | 2.650.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 400 Orang | 52.375.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 2.650.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **-** | **2.150.000,00** | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.150.000,00** | - | - | - | - | - | - | **5.000.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 2.150.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 7 Dokumen | 2.150.000,00 | Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MARUSU |
| | | **KECAMATAN LAU** | | | | | | **7.941.347.411,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **7.941.347.411,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **7.941.347.411,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **6.384.347.411,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.089.187.411,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1148 Orang/bulan | 6.036.347.411,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 11 Dokumen | 51.840.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 109.760.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.760.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 47.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 43.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 38.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 87.400.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6.384.347.411,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 74.400.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 44.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **1.414.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 38.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 38.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 1.370.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 1.368.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 6.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.414.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **54.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 53.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam program jaminan ketenagakerjaan sebagai peserta aktif. ]** | **Persentase pekerja di desa dan kelurahan yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan, dengan target peningkatan minimal 80 % dalam 12 bulan.** | **100** | **50** | **70** | **80** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 1.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) yang diselenggarakan di tingkat lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi lokal terhadap total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di desa/kelurahan tersebut. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **40** | **50** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan komunitas. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan masyarakat (seperti majelis taklim, sekolah minggu, pembinaan remaja masjid, dll.). Minimal 80 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **40** | **50** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 20 Pokmas / Ormas | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam mengelola sumber daya lokal untuk mendukung stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang berhasil mengembangkan produk lokal untuk kebutuhan pasar daerah guna menekan inflasi minimal 30 % setiap tahun.** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan kebudayaan lokal (seperti festival budaya, pelatihan seni tradisional, atau pelestarian adat). Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang memperoleh keterampilan dan peluang usaha produktif. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan untuk memperkuat ketertiban dan mengurangi gangguan sosial. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **40** | **50** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang mendukung kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan dengan nilai positif terhadap kerukunan umat beragama. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan usaha jasa lokal. ]** | **Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang jasa (seperti pelatihan, pendampingan, atau bantuan usaha), Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang memiliki akses dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **54.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **-** | **2.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 2.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **2.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **-** | **84.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **84.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 84.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 100 Orang | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 500 Orang | 22.000.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **-** | **2.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.500.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 2.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 2 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KECAMATAN LAU |
| | | **KELURAHAN ALLEPOLEA** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN ALLEPOLEA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Allepolea | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN ALLEPOLEA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN ALLEPOLEA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Allepolea | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN ALLEPOLEA |
| | | **KELURAHAN SOREANG** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN SOREANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Soreang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN SOREANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN SOREANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Soreang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN SOREANG |
| | | **KELURAHAN MATTIRODECENG** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN MATTIRODECENG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Mattirodeceng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN MATTIRODECENG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN MATTIRODECENG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Mattirodeceng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN MATTIRODECENG |
| | | **KELURAHAN MACCINI BAJI** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **290.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **85.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN MACCINI BAJI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN MACCINI BAJI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **204.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 204.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 0,00 | KELURAHAN MACCINI BAJI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Lau, Maccini Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 0,00 | KELURAHAN MACCINI BAJI |
| | | **KECAMATAN CENRANA** | | | | | | **2.888.802.089,00** | | | | | | | **2.888.802.089,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.888.802.089,00** | | | | | | | **2.888.802.089,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.888.802.089,00** | | | | | | | **2.888.802.089,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **2.649.307.089,00** | | | | | | | **2.649.307.089,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 11.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 11.500.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.300.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.300.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.300.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.300.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 2.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 25 Dokumen | 2.300.012.089,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 2.300.012.089,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 2.248.802.089,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.248.802.089,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 50.640.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 50.640.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 285.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 285.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 285.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 285.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.770.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.770.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 285.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 285.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.200.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 30 Orang | 12.885.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 12.885.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 12.600.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 12.600.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 285.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 layanan | 151.474.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 151.474.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.050.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.050.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 10.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 34.224.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 34.224.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 300.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 300.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 35.200.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 35.200.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 67.600.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 67.600.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 jenis | 47.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 47.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 9.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 38.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 38.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 0,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 jenis | 71.040.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 71.040.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 11.640.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 11.640.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 0,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 0,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.649.307.089,00** | - | - | - | - | - | - | **2.649.307.089,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 59.400.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 59.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 jenis | 50.626.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 50.626.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 46.400.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 46.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 4.226.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.226.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **32.600.000,00** | | | | | | | **32.600.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan* | - | | | 1 urusan | 4.100.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 4.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 4.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 4.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan* | - | | | 1 Layanan | 15.100.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 15.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 3.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 12.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat* | - | | | 3 Urusan | 13.400.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 13.400.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 3.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 3.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 3.200.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **32.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **32.600.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 7.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 7.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **67.545.000,00** | | | | | | | **67.545.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan* | - | | | 800 Orang | 67.545.000,00 | | | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 67.545.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 36.650.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 36.650.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang mendukung kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan dengan nilai positif terhadap kerukunan umat beragama. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan usaha jasa lokal. ]** | **Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang jasa (seperti pelatihan, pendampingan, atau bantuan usaha), Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 30.895.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 30.895.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga di desa dan kelurahan yang mengadopsi praktik gizi seimbang dan pola hidup sehat ]** | **Persentase keluarga di desa dan kelurahan yang mengikuti program pemberdayaan gizi dan kesehatan minimal 50 % pada akhir tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang memperoleh keterampilan dan peluang usaha produktif. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) yang diselenggarakan di tingkat lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi lokal terhadap total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di desa/kelurahan tersebut. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **40** | **50** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan komunitas. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan masyarakat (seperti majelis taklim, sekolah minggu, pembinaan remaja masjid, dll.). Minimal 80 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **40** | **50** | **67.545.000,00** | - | - | - | - | - | - | **67.545.000,00** | - |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **4.050.000,00** | | | | | | | **4.050.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **4.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.050.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum* | - | | | 100 Orang | 4.050.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 4.050.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 4.050.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.050.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **4.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.050.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **127.050.000,00** | | | | | | | **127.050.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **127.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **127.050.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan* | - | | | 4 urusan | 127.050.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 127.050.000,00 | KECAMATAN CENRANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 62.850.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 62.850.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 200 Orang | 4.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 800 Orang | 56.000.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 56.000.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 4.100.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.100.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **8.250.000,00** | | | | | | | **8.250.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.250.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.250.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku* | - | | | 7 Desa | 8.250.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | - | 8.250.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 7 Dokumen | 8.250.000,00 | Kab. Maros, Cenrana, Limpoccoe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | Masyarakat | | 8.250.000,00 | KECAMATAN CENRANA |
| | | **KECAMATAN MONCONGLOE** | | | | | | **2.671.940.212,00** | | | | | | | **2.937.666.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.671.940.212,00** | | | | | | | **2.937.666.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.671.940.212,00** | | | | | | | **2.937.666.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.451.725.212,00** | | | | | | | **2.690.966.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.451.725.212,00** | - | - | - | - | - | - | **2.690.966.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 18.900.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.104.343.212,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.176.092.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 2.050.103.212,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.120.372.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 54.240.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 55.720.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 28.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 17.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.451.725.212,00** | - | - | - | - | - | - | **2.690.966.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.451.725.212,00** | - | - | - | - | - | - | **2.690.966.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 129.982.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | - | 152.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 49.982.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 55.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 55.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 98.400.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 101.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 83.400.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 86.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.451.725.212,00** | - | - | - | - | - | - | **2.690.966.000,00** | - |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 45.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | - | | | - | 0,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 114.774.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 114.774.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **53.000.000,00** | | | | | | | **62.050.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 16.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 19.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 2 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Moncong Loe Bulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 19.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 21.850.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.350.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 18.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 21.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 8.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **52.615.000,00** | | | | | | | **53.200.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 52.615.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 53.200.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 2.615.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 35.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **-** | **10.000.000,00** | | | | | | | **8.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 10.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | - | 8.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | - | | 8.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **-** | **98.000.000,00** | | | | | | | **114.250.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 98.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 114.250.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 800 Orang | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 59.750.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 200 Orang | 4.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 800 Orang | 49.000.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 49.500.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **-** | **6.600.000,00** | | | | | | | **8.700.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 6.600.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | - | 8.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 6.600.000,00 | Kab. Maros, Moncong Loe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | - | | 8.700.000,00 | KECAMATAN MONCONGLOE |
| | | **KECAMATAN TOMPOBULU** | | | | | | **3.216.802.145,00** | | | | | | | **3.222.002.145,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.216.802.145,00** | | | | | | | **3.222.002.145,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.216.802.145,00** | | | | | | | **3.222.002.145,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 PERSEN** | **3.010.707.145,00** | | | | | | | **3.015.907.145,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 7.000.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 7.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 25 Dokumen | 2.764.212.145,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 2.764.212.145,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 434 Orang/bulan | 2.711.802.145,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.711.802.145,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 51.840.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 51.840.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 285.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 285.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 285.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 285.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.770.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.770.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 285.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 285.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.200.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian* | - | | | 31 Orang | 10.085.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 10.085.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 14 Paket | 9.800.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 9.800.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 285.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 285.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 6 Layanan | 96.244.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 96.244.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.635.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 2.635.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.804.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 6.804.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.805.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 15.805.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.150.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 1.150.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 49.850.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 49.850.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 29.500.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 29.500.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 0,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 4.500.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 4.500.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Jenis | 67.800.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 72.800.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 9.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.010.707.145,00** | - | - | - | - | - | - | **3.015.907.145,00** | - |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 58.800.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 58.800.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *umlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 2 Jenis | 31.096.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | - | 31.096.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 27.100.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 27.100.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 3.996.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN | | 3.996.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 Persen** | **29.550.000,00** | | | | | | | **29.550.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *umlah Urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada ditingkat Kecamatan* | - | | | 1 Urusann | 3.850.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 3.850.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.850.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan* | - | | | 1 Layanan | 15.050.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | - | 15.050.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 5 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 3.050.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 12.000.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat* | - | | | 3 Urusan | 10.650.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | - | 10.650.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 3.850.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 2.950.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ekonomi lokal berbasis inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | | 2.950.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **29.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **29.550.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 3.850.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 Persen** | **56.945.000,00** | | | | | | | **56.945.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *umlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan* | - | | | 950 Orang | 56.945.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 56.945.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 34.150.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 34.150.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di tingkat kecamatan. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan dan kegiatan pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat dari total masyarakat sasaran di kecamatan per tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang mendukung kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan dengan nilai positif terhadap kerukunan umat beragama. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan usaha jasa lokal. ]** | **Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang jasa (seperti pelatihan, pendampingan, atau bantuan usaha), Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 22.795.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 22.795.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga di desa dan kelurahan yang mengadopsi praktik gizi seimbang dan pola hidup sehat ]** | **Persentase keluarga di desa dan kelurahan yang mengikuti program pemberdayaan gizi dan kesehatan minimal 50 % pada akhir tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang memperoleh keterampilan dan peluang usaha produktif. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan komunitas. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan keagamaan berbasis pemberdayaan masyarakat (seperti majelis taklim, sekolah minggu, pembinaan remaja masjid, dll.). Minimal 80 % diakhir tahun** | **70** | **20** | **40** | **50** | **56.945.000,00** | - | - | - | - | - | - | **56.945.000,00** | - |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **4.750.000,00** | | | | | | | **4.750.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **4.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.750.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *umlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum* | - | | | 100 Orang | 4.750.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | - | 4.750.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 4.750.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | Masyarakat | | 4.750.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **4.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.750.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **112.100.000,00** | | | | | | | **112.100.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **112.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **112.100.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan* | - | | | 4 Urusan | 112.100.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | - | 112.100.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 400 Orang | 54.500.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 54.500.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 200 Orang | 3.850.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan secara inklusif | Masyarakat | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 450 Orang | 50.800.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif | Masyarakat | | 50.800.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 2.950.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Masyarakat | | 2.950.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **2.750.000,00** | | | | | | | **2.750.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.750.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku* | - | | | 8 Desa | 2.750.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | - | 2.750.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 2.750.000,00 | Kab. Maros, Tompobulu, Tompobulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | | 2.750.000,00 | KECAMATAN TOMPOBULU |
| | | **KECAMATAN SIMBANG** | | | | | | **2.900.133.608,00** | | | | | | | **2.900.133.608,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.893.933.608,00** | | | | | | | **2.893.933.608,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.893.933.608,00** | | | | | | | **2.893.933.608,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **2.730.483.608,00** | | | | | | | **2.730.483.608,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.730.483.608,00** | - | - | - | - | - | - | **2.730.483.608,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.510.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.510.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.110.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.110.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Laporan | 900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.487.660.608,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.487.660.608,00 | KECAMATAN SIMBANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 378 Orang/bulan | 2.433.420.608,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.433.420.608,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 54.240.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 54.240.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 4.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 4.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 4.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 96.733.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 96.733.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 2.508.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.508.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 1.722.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.722.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 21.293.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 21.293.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 28.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 28.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 352 Laporan | 43.210.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 43.210.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 27.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 27.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 27.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 27.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 46.480.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 46.480.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 6.880.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.880.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 39.600.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 39.600.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 61.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 61.900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 11.900.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 11.900.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **-** | **28.450.000,00** | | | | | | | **28.450.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 3.050.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan kecamatan yang mendukung kemudahan usaha dan layanan perizinan sektor jasa. ]** | **Persentase kecamatan yang menyediakan layanan administrasi dan informasi usaha sektor jasa secara digital dan tepat waktu, Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **80** | **80** | **85** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 15.050.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 15.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 10.350.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 10.350.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **28.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | **28.450.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 4.250.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 4.250.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **-** | **35.100.000,00** | | | | | | | **35.100.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.100.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 35.100.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 35.100.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **35.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.100.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 26.600.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 26.600.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **35.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.100.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif mengikuti kegiatan literasi (membaca, menulis, literasi digital) yang diselenggarakan di tingkat lokal. ]** | **Persentase warga desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi lokal terhadap total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di desa/kelurahan tersebut. Minimal 50 % setiap tahunnya** | **70** | **30** | **40** | **50** | **35.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.100.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda di desa dan kelurahan yang memiliki keterampilan dan dukungan untuk menjadi wirausahawan baru. ]** | **Persentase pemuda di desa dan kelurahan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan memulai usaha baru, dengan target minimal 50 % peningkatan setiap tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **35.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.100.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 5.450.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.450.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **-** | **3.050.000,00** | | | | | | | **3.050.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.050.000,00** | - |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 3.050.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.050.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.050.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **-** | **91.750.000,00** | | | | | | | **91.750.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **91.750.000,00** | - | - | - | - | - | - | **91.750.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 91.750.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 91.750.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 2150 Orang | 45.450.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 45.450.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 50 Orang | 3.050.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 350 Orang | 40.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 40.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.050.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 3.050.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **-** | **5.100.000,00** | | | | | | | **5.100.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.100.000,00** | - | - | - | - | - | - | **5.100.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 5.100.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 5.100.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 60 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 5.100.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **6.200.000,00** | | | | | | | **6.200.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **6.200.000,00** | | | | | | | **6.200.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **-** | **6.200.000,00** | | | | | | | **6.200.000,00** | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 6.200.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 6.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6.200.000,00 | Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 6.200.000,00 | KECAMATAN SIMBANG |
| | | **KECAMATAN MANDAI** | | | | | | **6.668.662.744,00** | | | | | | | **6.668.662.744,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.668.662.744,00** | | | | | | | **6.668.662.744,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.668.662.744,00** | | | | | | | **6.668.662.744,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 persen** | **5.187.699.744,00** | | | | | | | **5.186.949.744,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **5.187.699.744,00** | - | - | - | - | - | - | **5.186.949.744,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | - | | | 7 Dokumen | 11.900.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | - | 11.900.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 1.700.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MANDAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 persen | 4.864.802.744,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | - | 4.864.802.744,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 60 Orang/bulan | 4.812.962.744,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 4.812.962.744,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 51.840.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 51.840.000,00 | KECAMATAN MANDAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 35.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 persen | 124.062.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | - | 123.312.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.896.500,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 5.896.500,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.273.500,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 17.273.500,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 75.892.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 75.142.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 persen | 55.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | - | 55.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 10.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 10.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 persen | 76.920.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | - | 76.920.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 7.320.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 7.320.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 69.600.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 69.600.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 persen | 19.515.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | - | 19.515.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 11.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 11.500.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 8.015.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN Kecamatan Mandai | | 8.015.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **1.296.200.000,00** | | | | | | | **1.296.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase layanan pemerintahan dan publik di tingkat kecamatan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase layanan pemerintahan dan publik di kecamatan yang mengakomodasi standar pemenuhan hak anak dari total layanan yang diberikan dalam satu tahun. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **1.296.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.296.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan* | - | | | 100 persen | 3.200.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dalam 12 bulan. ]** | **Persentase unit layanan publik kecamatan yang melaksanakan pelayanan yang memihak pada masyarakat miskin minimal 95 % per tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.296.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.296.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. ]** | **Persentase layanan publik yang terverifikasi memenuhi standar pelayanan minimal, dengan target minimal 95 % dalam 1 tahun.** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.296.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.296.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan* | - | | | 100 persen | 1.283.400.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 1.283.400.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 1.283.400.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 1.283.400.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | **[ Meningkatnya persentase unit layanan publik yang menerapkan prinsip responsif gender dalam penyelenggaraan pelayanan. ]** | **Persentase unit layanan publik yang memiliki standar pelayanan publik yang responsif gender terhadap total unit layanan. Minimal 80 % diakhir tahun** | **100** | **50** | **60** | **80** | **1.296.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.296.200.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pendampingan usaha industri pengolahan di kecamatan secara tepat waktu dan berkualitas. ]** | **Persentase izin usaha industri pengolahan yang diterbitkan oleh kecamatan tepat waktu sesuai standar waktu pelayanan, Minimal 95 % diakhir tahun** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.296.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.296.200.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan* | - | | | 100 persen | 9.600.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 9.600.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelayanan publik yang mendukung penyerapan lulusan vokasi di sektor produktif. ]** | **Persentase unit pelayanan publik yang menyediakan layanan informasi dan fasilitasi penempatan lulusan vokasi terhadap total unit pelayanan publik. Minimal. 95 % setiap tahunnya** | **100** | **90** | **90** | **95** | **1.296.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.296.200.000,00** | - |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **46.338.000,00** | | | | | | | **47.088.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang memiliki dan menerapkan mekanisme layanan publik berbasis partisipasi (misalnya forum warga, survei kepuasan, layanan berbasis digital), dengan target minimal 80 % dalam 1 tahun.** | **100** | **60** | **70** | **80** | **46.338.000,00** | - | - | - | - | - | - | **47.088.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat diKecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan* | - | | | 100 persen | 44.188.000,00 | | | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 44.938.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 21.950.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 21.950.000,00 | KECAMATAN MANDAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. ]** | **Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **46.338.000,00** | - | - | - | - | - | - | **47.088.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya secara ekonomi untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. ]** | **Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif dalam 12 bulan pelaksanaan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **46.338.000,00** | - | - | - | - | - | - | **47.088.000,00** | - |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 22.238.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 22.988.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang memiliki akses dan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah di desa dan kelurahan yang mengikuti dan mendapatkan manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat. Minimal 30 % diakhir tahun** | **70** | **10** | **20** | **30** | **46.338.000,00** | - | - | - | - | - | - | **47.088.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 2.150.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 2.150.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 2 Laporan | 2.150.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 2.150.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 persen** | **3.200.000,00** | | | | | | | **3.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindak kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan komunitas dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.200.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda diWilayah Kecamatan* | - | | | 100 persen | 3.200.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | **[ Meningkatnya persentase koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menekan tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase rapat koordinasi dan kegiatan bersama antar instansi dan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai jadwal. Minimal 70 % diakhir tahun** | **90** | **30** | **60** | **70** | **3.200.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.200.000,00** | - |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **100 persen** | **129.675.000,00** | | | | | | | **129.675.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara tertib, terpadu, dan responsif di tingkat Kecamatan ]** | **Meningkatnya persentase forum koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana secara rutin dan terdokumentasi, Minimal 80 % di akhir tahun** | **100** | **70** | **75** | **80** | **129.675.000,00** | - | - | - | - | - | - | **129.675.000,00** | - |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Masyarakat diWilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | - | | | 100 persen | 129.675.000,00 | | | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 129.675.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 250 Orang | 54.150.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 54.150.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 50 Orang | 3.200.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 500 Orang | 68.225.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 68.225.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 4.100.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Penguatan keamanan, toleransi sosial, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehidupan demokrasi yang inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 4.100.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 persen** | **5.550.000,00** | | | | | | | **5.550.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.550.000,00** | - | - | - | - | - | - | **5.550.000,00** | - |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintah Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan* | - | | | 100 persen | 5.550.000,00 | | | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 5.550.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 6 Dokumen | 5.550.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 5.550.000,00 | KECAMATAN MANDAI |
| | | **KELURAHAN HASANUDDIN** | | | | | | **292.150.000,00** | | | | | | | **292.150.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **292.150.000,00** | | | | | | | **292.150.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **292.150.000,00** | | | | | | | **292.150.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **85.500.000,00** | | | | | | | **85.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan* | - | | | 100 persen | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 85.500.000,00 | KELURAHAN HASANUDDIN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 85.500.000,00 | KELURAHAN HASANUDDIN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **206.650.000,00** | | | | | | | **206.650.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Partisipasi Masyarakat diKecamatan dalam Kegiatan Pembangunan* | - | | | 100 persen | 206.650.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 206.650.000,00 | KELURAHAN HASANUDDIN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 204.500.000,00 | KELURAHAN HASANUDDIN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 2.150.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Hasanuddin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 2.150.000,00 | KELURAHAN HASANUDDIN |
| | | **KELURAHAN BONTOA** | | | | | | **292.150.000,00** | | | | | | | **292.150.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **292.150.000,00** | | | | | | | **292.150.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **292.150.000,00** | | | | | | | **292.150.000,00** | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **100 persen** | **85.500.000,00** | | | | | | | **85.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan* | - | | | 100 persen | 85.500.000,00 | | | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 85.500.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 85.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 85.500.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **100 persen** | **206.650.000,00** | | | | | | | **206.650.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat diKecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan* | - | | | 100 persen | 206.650.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | - | 206.650.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 204.500.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 204.500.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 2.150.000,00 | Kab. Maros, Mandai, Bontoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | ASN dan Masyarakat Kecamatan Mandai | | 2.150.000,00 | KELURAHAN BONTOA |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **6.964.752.386,00** | | | | | | | **7.597.303.000,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **6.964.752.386,00** | | | | | | | **7.597.303.000,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **6.964.752.386,00** | | | | | | | **7.597.303.000,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **100 Persen** | **3.736.553.200,00** | | | | | | | **3.844.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**<br><br>**Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah* | - | | | 19 Dokumen | 49.435.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | - | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.845.000,00 | Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | | | | 1 Dokumen | 4.990.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 9.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan* | - | | | 45 Jenis | 3.163.716.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | - | 3.216.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 3.000.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 3.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 4.957.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 137.760.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 180.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 4.999.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 4 Dokumen | 14.060.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 37.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.060.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 9.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 3.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**<br><br>**Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian PD* | - | | | 2 Dokumen | 19.600.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | - | 40.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**<br><br>**Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 45 Paket | 19.600.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**<br><br>**Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan* | - | | | 7 Jenis | 272.991.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | - | 261.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 34 Paket | 17.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 34 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 49.999.600,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 149.992.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 150.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Di laksanakan | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase dukungan penunjang yang efektif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan berdaya guna ]** | **Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**<br><br>**Meningkatnya persentase realisasi kegiatan penunjang yang mendukung langsung pencapaian kinerja urusan pemerintahan, Minimal. 100% diakhir tahun** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Jenis | 50.750.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | - | 85.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 3.550.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 37.200.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik* | - | | | 1 Jenis | 166.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | - | 155.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.736.553.200,00** | - | - | - | - | - | - | **3.844.000.000,00** | - |
| | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 136.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Turikale, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | 125.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | **8,26 Persen** | **1.214.999.800,00** | | | | | | | **1.280.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis/Jumlah kelompok sasaran masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan informasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan/Jumlah Lembaga atau Ormas Yang mendapatkan Hibah* | - | | | 2/1000/2 Dok /Orang/Lembaga | 1.214.999.800,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | 1.280.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 12 Dokumen | 9.999.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 559 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 35.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 250 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara* | | | | 150 Keluarga | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan terkait kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti minimal satu kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan terkait kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti minimal satu kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 559 Orang | 1.100.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 1.100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan terkait kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti minimal satu kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan terkait kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti minimal satu kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan terkait kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti minimal satu kegiatan penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan karakter kebangsaan berbasis keagamaan. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 150 Orang | 9.999.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat yang paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diikuti oleh pemuda secara aktif ]** | **Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam setahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta sosialisasi dan pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan sikap positif. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **1.214.999.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.280.000.000,00** | - |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | **-** | **950.760.486,00** | | | | | | | **1.265.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan budaya politik dengan menyertakan pemuda secara aktif. ]** | **Persentase pemuda yang terdaftar dan aktif mengikuti program pendidikan politik dan pengembangan budaya politik dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **950.760.486,00** | - | - | - | - | - | - | **1.265.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | - | | | - | 950.760.486,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | - | 1.265.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 9.999.800,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 9.999.500,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam pendidikan politik beretika guna mendorong budaya pelayanan publik yang partisipatif dan akuntabel. ]** | **Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan program pendidikan politik berbasis etika dan pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **950.760.486,00** | - | - | - | - | - | - | **1.265.000.000,00** | - |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 1500 Orang | 885.761.186,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 1.200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase anggota partai politik dan peserta pendidikan politik yang memahami dan menerapkan etika serta budaya politik yang santun untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase peserta pendidikan politik yang lulus evaluasi pemahaman etika dan budaya politik. minimal 90 % dalam satu tahun anggaran.** | **70** | **30** | **40** | **50** | **950.760.486,00** | - | - | - | - | - | - | **1.265.000.000,00** | - |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 2 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan politik dengan muatan etika dan budaya politik yang mendukung kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan program pendidikan politik beretika dan berbudaya inklusif. Minimal 80 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **950.760.486,00** | - | - | - | - | - | - | **1.265.000.000,00** | - |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **950.760.486,00** | - | - | - | - | - | - | **1.265.000.000,00** | - |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka* | | | | 1 Kegiatan | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | - | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | **31,47 Persen** | **40.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi untuk menjalankan program yang mendukung pemenuhan hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan program pemenuhan hak anak dan mendapat pengawasan serta pembinaan dalam satu tahun. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **20** | **30** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan Peningkatan kapasitas organisasi* | - | | | 2/35 Dokumen/Lembaga | 40.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | - | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan pemuda secara aktif . ]** | **Persentase pemuda yang terdaftar dan aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dalam satu tahun.** | **70** | **10** | **20** | **30** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam advokasi dan sosialisasi isu gender dalam pembangunan daerah. ]** | **Persentase organisasi kemasyarakatan binaan yang aktif melaksanakan kegiatan advokasi atau sosialisasi isu gender terhadap total organisasi binaan. Minimall 30 % setia tahunnya** | **70** | **10** | **20** | **30** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 100 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. ]** | **Persentase organisasi kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam program pelayanan publik. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase pemuda yang mengikuti program pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang memulai usaha baru. ]** | **Persentase pemuda peserta pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang membuka usaha baru dalam waktu 3 bulan setelah pelatihan, Minimal 10 % diakhir tahun** | **30** | **5** | **8** | **10** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif mendukung kegiatan literasi masyarakat. ]** | **Persentase organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan literasi terhadap total organisasi yang diberdayakan. Minimal 30 % setiap tahunnya** | **70** | **10** | **20** | **30** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 100 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi aktif dalam mendukung peningkatan cakupan pekerja sebagai peserta aktif jaminan ketenagakerjaan. ]** | **Persentase organisasi kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam sosialisasi dan pengawasan program jaminan ketenagakerjaan kepada pekerja dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **40.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | - |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 4 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | **-** | **124.999.900,00** | | | | | | | **230.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat dari kelompok pendapatan 40% terbawah yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui program pembinaan dan pengembangan. ]** | **Persentase masyarakat kelompok pendapatan 40% terbawah yang melaporkan peningkatan kemampuan ekonomi, sosial, atau budaya dalam survei tahunan pasca program pembinaan dan pengembangan. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **20** | **30** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya* | - | | | 2/350 Dokumen/Orang | 124.999.900,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | 230.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Masyarakat yang Memiliki Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Menghadapi Risiko Bencana. ]** | **Persentase rumah tangga atau komunitas yang memiliki rencana tanggap darurat bencana dan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya untuk mitigasi risiko bencana. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **20** | **30** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase kelompok masyarakat di wilayah rawan konflik yang terfasilitasi dalam kegiatan penguatan ekonomi produktif. ]** | **Persentase kelompok masyarakat di wilayah rawan konflik yang mengikuti program penguatan ekonomi** | **70** | **30** | **40** | **50** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung terpenuhinya hak anak sesuai ketentuan. ]** | **Persentase keluarga yang mengikuti program pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang berdampak positif pada pemenuhan hak anak dalam satu tahun. Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. ]** | **Persentase keluarga petani yang melaporkan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui survei tahunan, dengan target minimal 30 % dalam 1 tahun.** | **50** | **10** | **20** | **30** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase komunitas yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengurangi gangguan ketertiban umum. ]** | **Persentase komunitas yang mengikuti program pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta menunjukkan peningkatan kapasitas minimal 30 % dalam satu tahun anggaran.** | **50** | **10** | **20** | **30** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 150 Orang | 99.999.900,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 170.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi dan budaya pariwisata yang mendukung ketahanan sosial-ekonomi daerah. ]** | **Persentase masyarakat lokal yang aktif berpartisipasi dalam program pengembangan ekonomi dan budaya pariwisata di wilayah target dalam satu tahun. Minimal. 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkontribusi pada peningkatan kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan nilai positif terhadap kerukunan umat beragama. Minimal 30 % diakhir tahun** | **50** | **10** | **20** | **30** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | | **[ Meningkatnya persentase ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang mendukung stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. ]** | **Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan ekonomi dan sosial untuk menekan laju inflasi minimal 20% setiap tahun.** | **40** | **10** | **15** | **20** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kegiatan penguatan ekonomi masyarakat berbasis jasa dalam mendukung ketahanan ekonomi dan budaya lokal. ]** | **Persentase kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor jasa (seperti pelatihan, fasilitasi usaha, promosi budaya jasa) terhadap total kegiatan ketahanan ekonomi dan budaya, Minimal 50 % diakhir tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 150 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase intervensi pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang berdampak pada penurunan kemiskinan. ]** | **Persentase kegiatan pembinaan yang menyasar kelompok rentan dan masyarakat miskin minimal 50 % per tahun** | **70** | **30** | **40** | **50** | **124.999.900,00** | - | - | - | - | - | - | **230.000.000,00** | - |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 2 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | **1,06 Persen** | **897.439.000,00** | | | | | | | **928.303.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase kewaspadaan dan penanganan konflik sosial yang efektif guna menjaga stabilitas sosial dan mencegah dampak negatif terhadap inflasi daerah. ]** | **Persentase penanganan konflik sosial yang selesai dalam 30 hari kerja untuk mencegah gangguan pasar dan lonjakan inflasi minimal 50 % setiap tahun.** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis /Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dalam penanganan Konflik* | - | | | 2/350 Dokumen/Orang | 897.439.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | - | 928.303.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase masyarakat yang memiliki kewaspadaan sosial dan partisipasi aktif dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial yang melindungi hak anak. ]** | **Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan atau sosialisasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan materi perlindungan hak anak dalam satu tahun. Minimal 55 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |
| | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase wilayah kondusif bagi tumbuhnya usaha sektor jasa melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial. ]** | **Meningkatnya persentase wilayah kondusif bagi tumbuhnya usaha sektor jasa melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial. Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 150 Orang | 18.050.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase penanganan potensi konflik sosial yang berdampak pada perlindungan kelompok masyarakat miskin. ]** | **Persentase wilayah rawan konflik sosial yang dilakukan fasilitasi penanganan dan berdampak pada perlindungan masyarakat miskin minimal. 50 % per tahun** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang efektif dalam mencegah eskalasi tindak kriminalitas dan kekerasan. ]** | **Persentase kegiatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terlaksana sesuai rencana dan mendapatkan partisipasi aktif masyarakat. Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 100 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya persentase penanganan potensi konflik sosial yang berdampak pada perlindungan kelompok masyarakat miskin. ]** | **Persentase wilayah rawan konflik sosial yang dilakukan fasilitasi penanganan dan berdampak pada perlindungan masyarakat miskin minimal. 50 % per tahun** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 12 Laporan | 9.989.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | | 35.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya persentase pelibatan masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang mendukung kerukunan umat beragama. ]** | **Persentase masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam minimal satu kegiatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial terkait kerukunan umat beragama. Minimal 50 % diakhir tahun** | **75** | **50** | **55** | **55** | **897.439.000,00** | - | - | - | - | - | - | **928.303.000,00** | - |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 15 Dokumen | 834.400.000,00 | Kab. Maros, Turikale, Turikale Kab. Maros, Turikale, Turikale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada layanan publik inklusif | Persentase Capaian Target pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi Konflik | | 793.303.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **1.804.304.518.000,00** | | | | | | | **6.375.051.442.556,00** | |

# BAB VI

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah, Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kaupaten Maros Tahun 2026 merupakan tahun Kedua dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2029, yang meliputi indicator Visi RPJPD, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja terdiri dari Indikator Makro Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Indikator Kinerja Kunci, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

## 6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program stake holder pembangunan, pemerintah daerah sendiri beserta pihak-pihak terkait lainnya Dengan memantau indikator-indikator ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat mengukur kemajuan pembangunan secara menyeluruh dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan adapun . 9 indikator makro utama yang menjadi fokus pemantauan pembangunan daerah yaitu 1) Laju Pertumbuhan Penduduk; 2) PDRB Perkapita; 3) Kontribusi PDRB; 4) Tingkat Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka; 6) Rasio Gini; 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 8) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Manusia (IKLH). Berikut gambaran pencapaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Penetapan Target 2025 dan 2026.

**Tabel 6.1**
**Capaian dan Penetapan Target Indikator Makro**
**Kabupaten Maros Tahun 2024-2026**

| NO | INDIKATOR MAKRO | Satuan | Basaline 2024 | Target Tahun 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 0,74 | 0,62 | 0,61 |
| 2 | Tungkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,34 | 4,25 | 4,16 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 9,32 | 8.90 | 7,82 - 6,92 |

| NO | INDIKATOR MAKRO | Satuan | Basaline 2024 | Target Tahun 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rasio Gini | Persen | 0,35 | 0,343 | 0,336 |
| 5 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | Persen | 13,35 | 13.53 | 13.75 |
| 6 | PDRB Perkapita | Rp Juta | 69,21 | 75,05 | 75,43 |
| 7 | Kontribusi PDRB Kabupaten | Angka | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 8 | Indek Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 74,04 | 74,62 | 74,76 |
| 9 | Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 71,9 | 75,26 | 75,47 |

### 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selain itu memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indicator program. Berikut gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Penetapan Target Tahun 2025 dan 2026 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 6.2**
**Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama**
**Kabupaten Maros Tahun 2024-2026**

| No | TOLOK UKUR | SATUAN | BESALINE 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Angka** | **74,04** | **74,62** | **74,76** |
| 2 | Indeks Kesehatan | Angka | 82,72 | 82,97 | 83,22 |
| 3 | Prevalensi stunting | Angka | 21,34 | 18,32 | 17,29 |
| 4 | Indeks Pendidikan | Angka | 64,36 | 64,78 | 65,16 |
| 5 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 45,52 | 45,71 | 45,89 |
| 6 | Indeks Pengeluaran | Angka | 45,24 | 46,98 | 48,79 |
| 7 | Tingkat pengangguran terbuka | Angka | 4,34 | 4,25 | 4,16 |
| 8 | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,236 | 0,222 | 0,209 |

| No | TOLOK UKUR | SATUAN | BESALINE 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 64,46 | 64,68 | 64,91 |
| 10 | Indeks Kabupaten Layak Anak | Angka | 707,00 | 750,00 | 765,00 |
| 11 | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | Angka | 54,19 | 54,77 | 55,61 |
| 12 | **PERTUMBUHAN EKONOMI** | Persen | 3,79 | 4,05 | 4,75 |
| 13 | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah | Persen | 14,79 | 15,54 | 16,34 |
| 14 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Persen | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| 15 | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah | Persen | 3,74 | 3,95 | 4,18 |
| 16 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persen | 14,79 | 15,23 | 15,84 |
| 17 | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah | Persen | 1,37 | 1,42 | 1,47 |
| 18 | Tingkat inflasi | Persen | 1,23 | 1,50 | 1,50 |
| 19 | Tingkat kemiskinan | Persen | 9,32 | 8.90 | 7,82 - 6,92 |
| 20 | Rasio gini | Angka | 0,35 | 0,343 | 0,336 |
| 21 | PDRB Per Kapita | Juta Jiwa | 69,21 | 75,05 | 75,43 |
| 22 | **INDEKS REFORMASI BIROKRASI** | Angka | 69,62 | 70,12 | 70,62 |
| 23 | Indeks SPBE | Angka | 3,15 | 4,00 | 4,20 |
| 24 | Indeks pelayanan Publik | Angka | 2,54 | 2,62 | 2,69 |
| 25 | Indeks Sistem Merit | Angka | 298,50 | 301,92 | 305,33 |
| 26 | Nilai SAKIP | Angka | 64,83 | 65,40 | 68,00 |
| 27 | Indeks inovasi | Angka | 50,98 | 52,48 | 53,98 |
| 28 | **INDEKS STABILITAS KEAMANAN DAERAH** | Angka | 99,98 | 99,99 | 99,99 |
| 29 | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk | Persen | 20,26 | 19,26 | 18,26 |

| No | TOLOK UKUR | SATUAN | BESALINE 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Persentase Penyelesaian Kasus Kriminal | Persen | 77,91 | 76,91 | 75,91 |
| 31 | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun | Persen | 24,47 | 7,00 | 7,25 |
| 32 | **INDEKS KETAHANAN MASYARAKAT** | Angka | 0,00 | 0,66 | 0,70 |
| 33 | Indeks kerukunan umat beragama | Angka | 96,18 | 96,38 | 96,59 |
| 34 | Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kegamaan | Persen | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| 35 | Indeks Pembangunan Inklusi | Angka | 0,00 | 65,00 | 58,75 |
| 36 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) | Angka | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 37 | **INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR** | Angka | 3,89 | 3,93 | 3,96 |
| 38 | Rasio jalan mantap | Rasio | 74,56 | 76,58 | 78,86 |
| 39 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak | Persen | 76,68 | 88,86 | 89,06 |
| 40 | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih | Persen | 48,38 | 50,58 | 52,88 |
| 41 | Indeks Transportasi darat | Angka | 55,30 | 57,40 | 59,70 |
| 42 | **INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP** | Angka | 71,90 | 75,26 | 75,47 |
| 43 | Indeks Kualitas Air | Angka | 60,00 | 75,12 | 75,32 |
| 44 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 93,04 | 78,62 | 78,92 |
| 45 | Indeks Tutupan Lahan | Angka | 47,01 | 69,30 | 69,37 |
| 46 | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | Angka | 13,35 | 13.53 | 13.75 |
| 47 | Indeks Resiko Bencana | Persen | 111,99 | 110,87 | 109,76 |
| 48 | **INDEKS DAYA SAING DAERAH** | Angka | 3,66 | 3,70 | 3,74 |

| No | TOLOK UKUR | SATUAN | BESALINE 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Persentase kenaikan nilai realisasi investasi daerah | Persen | 84,51 | 84,45 | 84,40 |
| 50 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | Persen | 27,40 | 27,65 | 27,91 |
| 51 | proporsi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB | Persen | 0,45 | 0,48 | 0,50 |

*Sumber: Bapperida Kab. Maros (Diolah) 2025*

### 6.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Indikator utama Pembangunan mencakup Indikator Visi RPJPD, Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek daya saing daerah dan Aspek pelayanan umum sebagai mana tertuang dalam table di bawah ini

**Tabel 6.3**
**Capaian dan Target Indikator Utama Pembanguna**
**Kabupaten Maros Tahun 2024-2026**

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INDIKATOR VISI RPJPD** | | | | | |
| 1 | PDRB Per Kapita ( Rp Juta/Jiwa) | Juta/Jiwa | 69,21 | 75,05 | 75,43 |
| 2 | Indeks Ekonomi Biru | Angka | 33,47 | 37,12 | 41,32 |
| 3 | Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB | Persen | 1,37 | 1,42 | 1,47 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | Persen | 9,32 | 8.90 | 7,82 - 6,92 |
| 5 | RAsio Gini | Rasio | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 6 | Kontribusi PDRB Kabupaten | Persen | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 7 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Persen | 3,79 | 4,05 | 4,75 |
| 8 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,66 | 3,7 | 3,74 |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 74,04 | 74,62 | 74,76 |
| 10 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | Persen | 13,35 | 13.53 | 13.75 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 71,9 | 75,26 | 75,47 |
| **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan Maros | Angka | 83,73 | 83,89 | 84,06 |
| 2 | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Maros | Persen | 7,15 | 7,3 | 7,46 |
| 3 | Konsumsi Listrik Perkapita Maros | Kwh/Kapita | 183 | 177,55 | 172,26 |
| 4 | Akses Rumah tangga Terhadap Konsumsi Air Minum | Persen | 88,66 | 88,86 | 89,06 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Maros | Angka | 71,9 | 75,26 | 75,47 |
| 6 | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Maros | Persen | 2,16 | 2,27 | 2,43 |
| 7 | Timbulan Sampah Terolah DI Fasilitas Pengolahan Sampah | Kg/Orang | 56,83 | 57,97 | 59,13 |
| 8 | Proporsi Rumah tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Persen | 55,12 | 57,99 | 61 |
| 9 | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | Persen | 13,35 | 13.53 | 13.75 |
| 10 | Indeks Resiko Bencana | angka | 111,99 | 110,87 | 109,76 |
| 11 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 0,74 | 0,62 | 0,61 |
| 12 | Rasio Penduduk | Persen | 100,83 | 100,84 | 100,85 |
| 13 | Kepadatan Penduduk | Orang/Km2 | 293 | 288 | 292 |
| 14 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Angka | 85,1 | 85,27 | 85,43 |
| 15 | Kapasitas Air baku Maros | Liter/Detik | 370 | 370 | 370 |
| 16 | median kawin usia pertama | Persen | 22 | 22,3 | 22,6 |
| 17 | indeks pembangunan berwawasan kependudukan | angka | 57,9 | 58,4 | 58,9 |
| 18 | Kehamilan tidak diinginkan | Persen | 9,17 | 8,87 | 8,57 |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,79 | 4,05 | 4,75 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tingkat Inflasi | Persen | 1,23 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 9,32 | 8.90 | 7,82 - 6,92 |
| 4 | Rasio Gini | Angka | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 5 | PDRB Perkapita | Rp Juta | 69,21 | 75,05 | 75,43 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,34 | 4,25 | 4,16 |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 74,04 | 74,62 | 74,76 |
| 8 | Indeks Kesehatan | Angka | 82,72 | 82,97 | 83,22 |
| 9 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,77 | 73,93 | 74,09 |
| 10 | Indeks Keluarga Sehat | Angka | 0,52 | 0,52 | 0,61 |
| 11 | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat | Angka | 82,32 | 87,58 | 89,75 |
| 12 | Prevalensi Stunting (SKI) | Persen | 21,34 | 18,32 | 17,29 |
| 13 | Indeks Pendidikan | Angka | 64,36 | 64,78 | 65,16 |
| 14 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,05 | 8,07 | 8,09 |
| 15 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,51 | 13,63 | 13,75 |
| 16 | Angka Literasi | Persen | 59,3 | 61,1 | 62,85 |
| 17 | Angka Numerasi | Persen | 53,35 | 55,55 | 57,75 |
| 18 | Indeks Pengeluaran | Angka | 45,24 | 46,98 | 48,79 |
| 19 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 45,52 | 45,71 | 45,89 |
| 20 | Tingkat Gemar Membaca | Persen | 45,42 | 45,52 | 45,61 |
| 21 | Indeks Cakupan Jaminan Sosial Masyarakat | Persen | 54,19 | 54,77 | 55,61 |
| 22 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | Persen | 99,63 | 99,63 | 100 |
| 23 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Persen | 8,75 | 9,9 | 11,21 |
| 24 | Indeks Ketahanan Masyarakat | Angka | 0 | 0,66 | 0,7 |
| 25 | Indeks kerukunan umat beragama | Angka | 96,18 | 96,38 | 96,59 |
| 26 | Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam | Angka | 80 | 85 | 90 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Sosial Kegamaan | | | | |
| 27 | Indeks Pembangunan Inklusi | Angka | 0 | 65 | 58,75 |
| 28 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (AKM) | Angka | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 29 | Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | Angka | 707 | 750 | 765 |
| 30 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Persen | 58,67 | 59,26 | 59,85 |
| 31 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Angka | 62,39 | 64,26 | 66,19 |
| 32 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Angka | 63,98 | 64,88 | 65,98 |
| 33 | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
| 34 | Indek Pembangunan Gender | Persen | 90,14 | 91,04 | 91,95 |
| 35 | Rasio Akseptor KB (AKM) | Persen | 63,17 | 66,96 | 70,98 |
| 36 | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 64,46 | 64,68 | 64,91 |
| 37 | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau politik. | Persen | 23 | 23,82 | 24,67 |
| 38 | Rasio Wirausaha Pemdua | Persen | 8,67 | 8,81 | 8,96 |
| 39 | Persentase pekerja informal | Persen | 45,48 | 39,69 | 34,18 |
| 40 | Indeks Pertanaman Padi | Rasio | 1,97 | 1,98 | 1,98 |
| 41 | Persentase persalinan dan fasilitas kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Produktivitas perikanan budidaya | Ton/ha | 3,25 | 3,37 | 3,43 |
| 43 | Proporsi Industri Kecil menengah | Persen | 98,35 | 98,37 | 98,4 |
| 44 | Persentase penyandang disabilitas bekerja sektor formal | Persen | 0,27 | 0,3 | 0,5 |
| 45 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok | Persen | 4,03 | 3,5 | 3,48 |
| 46 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan | Persen | 34,89 | 38,65 | 42,41 |
| 47 | Proporsi realisasi penyaluran pupuk | Persen | 0,6 | 0,59 | 4,19 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | organik terhadap pupuk kimia | | | | |
| 48 | Proporsi Sawah irigasi | Persen | 56,85 | 58 | 61,66 |
| 49 | Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | Persen | 22,03 | 25,7 | 29,37 |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| 1 | Angka Ketergantungan | Persen | 45 | 45 | 44 |
| 2 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | Persen | 0,45 | 0,48 | 0,5 |
| 3 | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah (ADSD) | Persen | 14,79 | 15,54 | 16,34 |
| 4 | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah (ADSD) | Persen | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| 5 | Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB daerah (ADSD) | Persen | 3,74 | 3,95 | 4,18 |
| 6 | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah (ADSD) | Persen | 14,79 | 15,23 | 15,84 |
| 7 | Persentase kontribusi sektor real estate terhadap PDRB daerah (ADSD) | Persen | 1,37 | 1,42 | 1,47 |
| 8 | Rasio Kewirausahaan | Persen | 20,62 | 21,08 | 21,55 |
| 9 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sektor Produktif | Persen | 61,55 | 62,34 | 62,7 |
| 10 | Persentase lulusan vokasi yang bekerja di sektor produktif dalam 6 bulan setelah kelulusan. | Persen | 11,45 | 12,25 | 13,12 |
| 11 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 50,98 | 52,48 | 53,98 |
| 12 | Indeks Ekonomi Hijau | Angka | 33,47 | 37,12 | 41,32 |
| 13 | Indeks Ekonomi Biru | Angka | 65,56 | 83,44 | 92,38 |
| 14 | Persentase layanan publik yang | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | diselenggarakan secara online dan terintegrasi | | | | |
| 15 | Pembentukan Modal tetap Bruto | Persen | 24,2 | 24,92 | 25,59 |
| 16 | Ekspor Barang dan Jasa | Persen | 13,97 | 14,26 | 14,55 |
| 17 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Angka | 3,14 | 3,12 | 3,1 |
| 18 | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | Angka | 3,89 | 3,93 | 3,96 |
| 19 | Rasio Kemantapan Jalan | Persen | 74,56 | 76,58 | 78,86 |
| 20 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih layak (ADSD) | Persen | 76,68 | 88,86 | 89,06 |
| 21 | Persentase cakupan wilayah blankspot yang telah terjangkau jaringan internet 4G atau lebih (ADSD) | Persen | 48,38 | 50,58 | 52,88 |
| 22 | Indeks Transportasi Darat | Angka | 55,3 | 57,4 | 59,7 |
| 23 | Rumah Tangga Dengan Akses Hunia Layak | Persen | 22,03 | 29,84 | 40,43 |
| 24 | Persentase Desa mandiri | Persen | 68,75 | 75,63 | 83,19 |
| 25 | Rasio Pajak Terhadap PDRB | Parsen | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 26 | Tingkat Inflasi | Persen | 1,23 | 1,41 | 1,63 |
| 27 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita | Rp | 1.154.743,00 | 1.164.400,89 | 1.174.139,55 |
| 28 | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | Persen | 48,96 | 48,33 | 47,71 |
| 29 | Produktivitas Total Daerah | Rasio | 84,51 | 84,45 | 84,4 |
| 30 | Indeks Stabilitas Keamanan Daerah | Angka | 99,98 | 99,99 | 99,99 |
| 31 | Persentase Penurunan Jumlah Tindak Pidana per 10.000 Penduduk (ADSD) | Persen | 20,26 | 19,26 | 18,26 |
| 32 | Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum per Tahun (ADSD) | Persen | 77,91 | 76,91 | 75,91 |
| 33 | Persentase peningkatan investasi | Persen | 24,47 | 7 | 7,25 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Rasio Konektivitas | Persen | 65,45 | 65,45 | 72,73 |
| 35 | Persentase UMKM yang memanfaatkan platform digital | Persen | 27,4 | 27,65 | 27,91 |
| 36 | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi | Persen | 6,98 | 7,06 | 7,14 |
| 37 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatwan domestik dan mancanegara | Persen | 41,79 | 15,82 | 15,83 |
| 38 | Net Ekspor Barang dan jasa | Persen | 13,97 | 14,26 | 14,55 |
| 39 | Return On Aset (ROA) BUMD | Persen | 0,00 | 0,97 | 1,2 |
| 40 | Indeks Kapabilitas Inovasi | Angka | 1,84 | 3,7 | 3,75 |
| 41 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Angka | 84,6 | 85 | 85,5 |
| 42 | Pembentukan Modal tetap Bruto | Persen | 25,05 | 25,37 | 25,69 |
| 43 | Kontribusi PDRB Kab/Kota Mamminasat terhadap PDB Nasional | Persen | 1,58 | 1,61 | 1,63 |
| 44 | Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Proipinsi | Persen | 4,11 | 4,13 | 4,16 |
| 45 | Jumlah kerja sama provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (sister City) | Kerjasama | 0,00 | 0,00 | 2 |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 69 | 70 | 75 |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 69,62 | 70,12 | 70,62 |
| 3 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Angka | 3,15 | 4,00 | 4,2 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,54 | 2,62 | 2,69 |
| 5 | Indeks Sistem Merit | Angka | 298,5 | 301,92 | 305,33 |
| 6 | Indeks Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Angka | 64,83 | 65,4 | 68 |
| 7 | Indeks Survey Penilaian Integritas | Angka | 77,59 | 78,5 | 79,5 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Persentase Penegakan Perda | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD | Persen | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| 10 | Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai MCP KPK | Angka | 80 | 82 | 85 |
| 11 | Indeks maturitas | Angka | 3,07 | 3,15 | 3,35 |
| 12 | Perda yang merupakan inisiatif DPRD | Persen | 11,11 | 12,22 | 13,44 |
| 13 | Persentase perempuan pengurus partai politik | Persen | 25,71 | 30,85 | 33,33 |
| 14 | Persentase Tindak Kriminal Tertangani | Angka | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,66 | 3,7 | 3,74 |
| 16 | Persentase koperasi sehat | Persen | | 28,32 | 28,9 |
| 17 | Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah | Persen | 53,89 | 58,11 | 62,33 |
| 18 | Persentase layanan publik yang diselenggaran secara online dan terintegrasi | Persen | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bapperida Kab. Maros (Diolah) 2025*

### 6.4 Idikator Kinerja Kunci ( IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah. Terdiri dari Beberapa Layanan meliputi layanan urusan wajib dasar, layanana urusan wajib non dasar,layanan wajib pilihan dan Layanan penunjang urusan. Berikut gambaran pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 dan Penetapan Target Tahun 2025 dan Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 6.4**
**Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci**
**Kabupaten Maros Tahun 2024-2026**

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR** | | | | | |
| I | **Pendidikan** | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 96,93 | 100 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Persen | 102,91 | 103,01 | 103,51 |
| 3 | Angka Pendidikan di Tamatkan | Persen | 52,7 | 54,8 | 56,9 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 102,92 | 100 | 100 |
| 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 102,34 | 100 | 100 |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | Persen | 102,92 | 100 | 100 |
| 7 | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B | Persen | 102,34 | 100 | 100 |
| 8 | Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI | Persen | 0,03 | | 0,02 |
| 9 | Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs | Persen | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| 10 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/MTs | Persen | 103,71 | 100 | 100 |
| 13 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 101,84 | 100 | 100 |
| 14 | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik | Persen | 97,46 | 97,99 | 98,11 |
| 15 | Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik | Persen | 98,4 | 98,67 | 98,89 |
| 16 | Rasio Ketersediaan Seklah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar | Persen | 174,11 | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | Persen | 22,29 | 0,045 | 0,045 |
| 18 | Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata | Persen | 0,63 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar | Persen | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan laki-Laki | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Penduduk Yang Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | Persen | 99,97 | 100 | 100 |
| 22 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | Persen | 0,00 | 100 | 100 |
| II | **Kesehatan** | | | | |
| 1 | Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1.000 penduduk | 11,49 | 5,7 | 8,00 |
| 2 | Angka Kelangsungan Hidup bayi | Per 1.000 penduduk | 988,51 | 988,5 | 988,5 |
| 3 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1.000 penduduk | 11,86 | 5,45 | 8,00 |
| 4 | Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1.000 penduduk | 10,56 | 4,19 | 8,00 |
| 5 | Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup | Per 100.000 penduduk | 0,00 | 41,7 | 0,001 |
| 6 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | Rasio | 14,13 | 9,7 | 14,1 |
| 7 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk | Rasio | 0,17 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Rasio | 0,00 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | Rasio | 0,31 | 0,5 | 0,7 |
| 10 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk | Rasio | 0,44 | 0,5 | 0,7 |
| 11 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | Persen | 100 | 83,4 | 100 |
| 12 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan | Persen | 108,04 | 100 | 100 |
| 13 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 95,15 | 95,1 | 95,1 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak | Persen | 107,33 | 100 | 100 |
| 16 | Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk | Persen | 0,01 | 105 | 104 |
| 17 | Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani | Persen | 30,2 | 95 | 95 |
| 18 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | Persen | 100 | 30,2 | 30,2 |
| 19 | Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | Per 100.000 penduduk | 261,11 | 107,89 | 103,99 |
| 20 | Tingkat kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk) | Per 100.000 penduduk | 12,26 | 4,3 | 4,1 |
| 21 | Proporsi jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS | Persen | 20,75 | 12,3 | 12,3 |
| 22 | Proporsi Kasus Tuberklosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS | Persen | 20,75 | 22,5 | 22,5 |
| 23 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Penderita Diare Yang Ditangani | Persen | 56,33 | 85 | 85 |
| 25 | Angka Kejadian malaria | Persen | 20,28 | 18,55 | 17,22 |
| 26 | Tingkat Kejadian Akibat Malaria | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doibati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi | Persen | 0,01 | 0,005 | 0,005 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Akhir | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS | Persen | 0,00 | 7,11 | 7,65 |
| 32 | Cakupan Kunjungan Bayi | Persen | 115,36 | 100 | 100 |
| 33 | Cakupan Puskesmas | Persen | 100 | 115,4 | 115,4 |
| 34 | Cakupan Pembantu Puskesmas | Persen | 26,21 | 100 | 100 |
| 35 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | Persen | 103,87 | 100 | 100 |
| 36 | Cakupan Pelayanan Nifas | Persen | 107,36 | 100 | 100 |
| 37 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga | Persen | 90,29 | 100 | 100 |
| 38 | Cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat | Persen | 97,2 | 100 | 100 |
| 39 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam | Persen | 100 | 30 | 40 |
| 40 | Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang DI Tangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | Persen | 86,72 | 100 | 100 |
| **III** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | |
| **III.1** | **Pekerjaan Umum** | | | | |
| 1 | Proprosi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 0,68 | 0,77 | 0,79 |
| 2 | Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk | Persen | 0,00 | 0,002976 | 0,002936 |
| 3 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam | Persen | 74,56 | 76,56 | 78,56 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kondisi Baik (> 40 km/jam) | | | | |
| 4 | Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan darinase/saluran pembuang air (min 1,5 m) | Persen | 0,36 | 0,28 | 0,38 |
| 5 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 97,51 | 97,71 | 97,91 |
| 6 | Persentase bangunan turap di wilayah penghbung dan aliran sungai rawan longsor | Persen | 25,08 | 2,78 | 13,89 |
| 7 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 72,97 | 75,89 | 78,92 |
| 8 | Rasio jaringan irigasi | Rasio | 0,01 | 0,005 | 0,006 |
| 9 | Persentase Penduduk berakses air minum | Persen | 76,68 | 88,86 | 89,06 |
| 10 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan | Persen | 46,32 | 28,97 | 29,19 |
| 11 | Persentase areal kawasan kumuh | Persen | 4,32 | 0,043 | 0,043 |
| 12 | Persentase Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan | Persen | 0,26 | 0,28 | 0,31 |
| 13 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.2** | **Penataan Ruang** | | | | |
| 1 | Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | Rasio | 1,88 | 0,93 | 0,93 |
| 2 | Luasa RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persen | 1,3 | 2,57 | 2,57 |
| 3 | Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan | Rasio | 0,65 | 0,85 | 0,85 |
| 4 | Ruang Oublik yang Berubah Peruntukannya | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ketaatan Terhadap RTRW | Persen | 10,81 | 54,09 | 54,26 |
| **IV** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0,17 | 19,39 | 20,56 |
| 2 | Rasio Pemukiman layak huni | Rasio | 0,99 | 79,13 | 79,67 |
| 3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 78,3 | 89,68 | 95,08 |
| 4 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persen | 22,03 | 20,01 | 20,25 |
| 5 | Persentase pemukiman yang tertata | Persen | 98,86 | 79,13 | 79,67 |
| 6 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persen | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Persentase luasan pemukiman kumuh kawasan perkotaan | Persen | 15,43 | 19,53 | 25,94 |
| 8 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | Persen | 0 | 2,15 | 2,12 |
| 9 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman disukung dengan PSU | Persen | 2,75 | 8,65 | 8,68 |
| **V** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | |
| 1 | Cakupan petugas perlindungan msayarakat (LINMAS) | Persen | 0,00 | 100 | 100 |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 0,00 | 70 | 75 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK) | Persen | 0,00 | 15 | 15 |
| 5 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 0,00 | 100 | 100 |
| **VI** | **SOSIAL** | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 14,1 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 14,1 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 14,1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya | Persen | 0,00 | 100 | 100 |
| 5 | Persetase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | Persen | 100 | 75 | 83,33 |
| 6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 100 | 100 | 100 |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | |
| **I** | **Tenaga Kerja** | | | | |
| 1 | Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Persen | 23,26 | 19,23 | 15,24 |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaiakan dengan | Persen | 8,33 | 20 | 20 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | perjanjian bersama (PB) | | | | |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 34,31 | 35,4 | 36,72 |
| 4 | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 0,00 | | |
| 5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | Persen | 58,45 | 59,2 | 62,13 |
| 6 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis komptensi | Persen | 72 | 75 | 76,92 |
| 8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masayarakat | Persen | 25 | 74,07 | 75,76 |
| 9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | Persen | 0,00 | 74,07 | 75,76 |
| 10 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | Rasio | 0,1 | 0,17 | 0,2 |
| **II** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 0,00 | 14,7 | 14,8 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 0,00 | 45,46 | 45,48 |
| 4 | Rasio KDRT | Rasio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 26,47 | 27,35 | 27,36 |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu | | | | |
| 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | Rasio | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 15 | Rasio APM perempuan/lai-laki di SMP | Rasio | 0,95 | 0,89 | 0,88 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Rasio | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| **III** | **Pangan** | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | Persen | 44.543,64 | 419,93 | 415 |
| 2 | Ketersedian energi dan protein perkapita | KKL/Kapita/Hari | 0,00 | 4922,89 | 4738,46 |
| **IV** | **Pertanahan** | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | Persen | 24,62 | 36,94 | 24,75 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah negara | Persen | 100 | 100 | 100 |
| **V** | **Lingkungan Hidup** | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pemabngunan kabupaten/kota | Dokumen | 0,00 | 1 | 1 |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah | Dokumen | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Hasil pengukuran indeks kualitas air | Angka | 60 | 75,12 | 75,32 |
| 5 | Hasil pengukuran indeks Kualitas udara | Angka | 93,04 | 78,62 | 78,92 |
| 6 | Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan | Angka | 47,01 | 69,3 | 69,37 |
| 7 | Persentase Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas | Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | daerah (PPLHD) di kabupaten/kota | | | | |
| 9 | Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA | Lembaga | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 10 | Tervferifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan ttradisional | Lembaga | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | Lembaga | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12 | Penetapan Hak MHA | Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Terfasilitasi kegiata peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Kegiatan | 0,00 | 1 | 1 |
| 16 | Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup | Kegiatan | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Timbunan sampah yang ditangani | Persen | 71,49 | 56,59 | 56,56 |
| 19 | Persentase cakupan areal pelayanan | Persen | 0,73 | 60,00 | 65,00 |
| 20 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R | Persen | 17,61 | 17,53 | 17,69 |
| 21 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 53,89 | 55,5 | 57,1 |
| 22 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **VI** | **Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil** | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Rasio | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| 2 | Rasio bayi berakte lahir | Rasio | 1,00 | 0,97 | 0,98 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | Rasio | 0,49 | 0,49 | 0,5 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Penerapan KTP nasional berbasis NIK | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP) | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan penertiban akta kelahiran | Persen | 99,68 | 98 | 99 |
| **VII** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | 93,75 | 95 | 96,25 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan msyarakat | Persen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 17,15 | 18 | 18 |
| 4 | Persentase LSM Aktif | Persen | 56,22 | 59,36 | 60,79 |
| 5 | Persentase LPM berprestasi | Persen | 60,87 | 65,22 | 69,57 |
| 6 | Persentase PKK Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase posyandu aktif | Persen | 100 | 100 | 100 |
| **VIII** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk | Persen | 3,24 | 0,92 | 0,91 |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | Anak/wanita | 2,26 | 2,23 | 2,2 |
| 3 | Persentase perangkat daerah (dinas/badan) | Persen | 100 | 84,07 | 84,42 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | | | | |
| 4 | Persentase perangkatd aerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk | Persen | 0,00 | 84,07 | 84,42 |
| 5 | Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualiotas penduduk | Kebijakan | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Sektor | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Kerjasama | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Orang | 1,33 | 0,83 | 0,83 |
| 9 | Ratio akseptor KB | Rasio | 63,17 | 64,14 | 64,4 |
| 10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun | Persen | 63,17 | 64,14 | 64,4 |
| 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun | Per 1000 penduduk | 37,01 | 24,3 | 23,8 |
| 12 | Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang | Persen | 0,67 | 16,83 | 16,82 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | istrinya dibawah 20 tahun | | | | |
| 13 | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 9,93 | 15,5 | 14 |
| 14 | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | Persen | 23,23 | 23,25 | 23,34 |
| 15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 15,72 | 34,65 | 34,79 |
| 16 | Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber-KB | Persen | 5,98 | 41,81 | 41,98 |
| 17 | Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB | Persen | 3,15 | 28,7 | 28,82 |
| 18 | Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB | Persen | 0,73 | 9,62 | 9,66 |
| 19 | Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | Persen | 33,17 | 29,47 | 29,59 |
| 21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat derah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian pendudul | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri | Persen | 29,03 | 30,23 | 30,35 |
| 23 | Rasio petugas pemabntu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk | Persen | 98,67 | 100,07 | 100,48 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | memenuhi permintaan masyarakat | | | | |
| 25 | Persentase faskers dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 60,39 | 60,64 | 60,89 |
| 26 | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS) | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 100 | 53,1 | 53,32 |
| 29 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 6,89 | 27,24 | 27,23 |
| 30 | Rata-rata usia kawin pertama | Tahun | 27,24 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes | Persen | 0,4 | 100 | 100 |
| **IX** | **Perhubungan** | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Orang | 10.541.421,00 | 10.853.965 | 10.962.505 |
| 2 | Jumlah uji kir angkutan umum | Dokumen | 206 | 250 | 300 |
| 3 | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis | Unit | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 29,77 | 32 | 35 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 55,98 | 60 | 65 |
| 6 | Pemasangan rambu-rambu | Persen | 82,5 | 84 | 84 |
| 7 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,04 | 0,085 | 0,084 |
| 8 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | Orang | 0,00 | 10.779.129 | 10.886.920 |
| 9 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum | Ton | 0,00 | 95.597.705 | 96.553.682 |
| 10 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | Orang | 10.573.677,00 | 10.679.414 | 10.786.208 |
| 11 | Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | TOn | 94.551.193,00 | 95.496.705 | 96.451.672 |
| **X** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 1 | cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan layanan telekomunikasi | Persen | 48,38 | 42,4 | 43,25 |
| 3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | Persen | 64,04 | 67,19 | 67,45 |
| 4 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | Persen | 0,58 | 0,73 | 0,75 |
| 5 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | Persen | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| **XI** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | |
| 1 | Persentase koperasi aktif | Persen | 46,61 | 46,89 | 47,46 |
| 2 | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif | Persen | 100 | 65 | 70 |
| 3 | Persentase BPR/LKM Aktif | Persen | 100 | 63,16 | 68,42 |
| 4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 99,77 | 99,47 | 99,46 |
| **XII** | **Penanaman Modal** | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 470 | 500 | 530 | 550 |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 112.033.458.259.695 | 115.000.000.000.000 | 117.000.000.000.000 | 119.500.000.000.000 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 37,92 | 25,95 | 27,95 | 28,75 |
| 4 | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah) | | 25,5 | 25,75 | 26,25 |
| **XIII** | **Pemuda dan Olahraga** | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Persen | 0,00 | 7.78 | 7,8 |
| 2 | Persentase wirausaha muda | Persen | 8,67 | 8,67 | 9,37 |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan pembinaan atlit muda | Persen | 15,63 | 17,34 | 19,25 |
| 6 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 0,00 | 7 | 7 |
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 23,08 | 16,67 | 16,67 |
| **XIV** | **Statistik** | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Buku " kabupaten dalam angka " | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Buku " PDRB " | Dokumen | 2 | 2 | 2 |
| **XV** | **Persandian** | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **XVI** | **Kebudayaan** | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kegiatan | 9 | 16 | 23 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Unit | 69,72 | 15,56 | 18,06 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Unit | 251 | 52 | 57 |
| **XVII** | **Perpustakaan** | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Persen | 0,23 | 0,24 | 0,29 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Rasio | 0,46 | 0,46 | 0,47 |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Rasio | 1,24 | 1,27 | 1,25 |
| 4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Orang | 168 | 185 | 203 |
| 5 | Jumlah koleksi buku perpustakaan | Buku | 33.917,00 | 74.500 | 75.500 |
| 6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| **XVIII** | **Kearsipan** | | | | |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 5 | 5 | 5 |
| **LAYANAN URUSAN WAJIB PILIHAN** | | | | | |
| **I** | **Pariwisata** | | | | |
| 1 | Kunjungan wisata | Persen | 120,32 | 75,47 | 78,18 |
| 2 | Lama kunjungan wisata | Hari | 1 | 2 | 2 |
| 3 | PAD Sektor Pariwisata | Persen | 1,29 | 0,76 | 0,76 |
| **II** | **Pertanian** | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | Persen | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2 | Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Persen | 6,58 | 6,69 | 6,81 |
| 4 | Cakupan bina kelompok tani | Persen | 10,51 | 11,88 | 13,43 |
| **III** | **Pergdagangan** | | | | |
| 1 | Ekspor bersih perdagangan | Rp | 1.937.701.569.141,00 | 1.939.639.270.710 | 1.943.514.673.848 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi | Persen | 100 | 64,99 | 69,93 |
| **IV** | **Perindutsrian** | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 0,00 | 65,28 | 70,83 |
| **V** | **Transmigrasi** | | | | |
| 1 | Persentase Transmigran swakarsa | Persen | 60 | 63,33 | 63,33 |
| **VI** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| 1 | Produksi perikanan | Persen | 114,96 | 100 | 100 |
| 2 | Konsumsi ikan | Persen | 117,99 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 61,4 | 62,93 | 63,56 |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | Persen | 31,4 | 31,45 | 31,49 |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | |
| **I** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | Persen | 92,5 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Penjbaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | Persen | 91,28 | 100,00 | 89,38 |
| **II** | **Keuangan** | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Nilai | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persetase SILPA | Persen | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 3 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | Persen | 4,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Persentase belanja pendidikan (20 %) | Persen | 27,92 | 20 | 20 |
| 5 | Pernsentase belanja kesehatan (10 %) | Persen | 19,86 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Perbandingan antara beanjalangsung dengan belanja tidak langsung | Rasio | 9,54 | 8,55 | 8,75 |
| 7 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 4,55 | 4,55 | 4,8 |
| 8 | Penetapan APBD | Persen | 100 | 100 | 100 |
| **III** | **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 91,77 | 70 | 70 |
| 3 | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 90,18 | 91,43 | 92,86 |
| 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Jabatan | 33 | 37 | 37 |
| 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 167 | 176 | 176 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 4.636 | 4656 | 4656 |
| **IV** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelibatngan | Persen | 57,14 | 60,00 | 64,00 |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Perentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **V** | **Pengawasan** | | | | |
| 1 | Pernsentase tindak lanjut temuan | Persen | 65,68 | 66,76 | 66,95 |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | Persen | 0,06 | 0,15 | 0,14 |
| 3 | Jumlah temuan BPK | Temuan | 32 | 28 | 30 |
| **VI** | **Sekretariat Dewan** | | | | |
| 1 | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksankan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Terintegarisnya program-program DPRD untuk melaksankaan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Satuan | Basaline Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD | | | | |

*Sumber: Bapperida Kab. Maros (Diolah) 2025*

### 6.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas; 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial. Penetapan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Maros disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.5**
**Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal**
**Kabupaten Maros Tahun 2024-2026**

| NO | INDIKATOR SPM | Satuan | Basaline 2024 | Target Tahun 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Persen | 81.24 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Pendidikan Dasar | Persen | 99.02 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Persen | 98.94 | 100.00 | 100.00 |
| **BIDANG KESEHATAN** | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Persen | 97.78 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Persen | 98.95 | 100.00 | 100.00 |

| NO | INDIKATOR SPM | Satuan | Basaline 2024 | Target Tahun 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Persen | 93.33 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persen | 98.67 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Persen | 96.00 | 100.00 | 100.00 |
| **BIDANG PEKERJAAN UMUM** | | | | | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **BIDANG PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | |
| 1 | Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | |
| 1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | Persen | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | Persen | 92.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **BIDANG SOSIAL** | | | | | |

| NO | INDIKATOR SPM | Satuan | Basaline 2024 | Target Tahun 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Persen | 95.38 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | Persen | 98.33 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | Persen | 93.85 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

### 6.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagai amanat pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator TPB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.

TPB bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.6**
**Capaian dan Target Perubahan Indikator TPB/SDG's**
**Tahun 2024 –2025**

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun** | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Persen | 9,65 | 9,32 | 8,9 |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan | Persen | 99,63 | 99,63 | 100 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas | Persen | 90,00 | 100 | 100 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | RT | 10.456 | 10.000 | 9.500 |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang diproses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | Persen | 90,90 | 92,00 | 94,00 |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | Persen | 102,10 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | Persen | 73,35 | 74,00 | 74,80 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak berkelanjutan | Persen | 88,66 | 93,66 | 98,66 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | Persen | 45,97 | 48,22 | 50,57 |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat | Persen | 102,92 | 100 | 100 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat | Persen | 102,34 | 100 | 100 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | Persen | 94,21 | 96,72 | 99,30 |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | 103.575,92 | 98.397,12 | 83.637,56 |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Lokasi | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Orang | 817 | 750 | 700 |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Orang | 2325 | 2000 | 1700 |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Persen | 18,80 | 20,68 | 22,75 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan** | | | | |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Persen | 9,70 | 8,80 | 7,99 |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Persen | 9,60 | 8,86 | 8,18 |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Persen | 3,40 | 3,09 | 2,81 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | Persen | 81,10 | 83,77 | 86,52 |
| **3** | **Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia** | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Angka per 100.000 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Persen | 90,90 | 95,00 | 100,00 |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Persen | 90,90 | 95,00 | 100,00 |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1.000 kelahiran hidup) | 0,30 | 0,27 | 0,24 |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Angka (per 1.000 kelahiran hidup) | 10,56 | 9,63 | 8,70 |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Angka (per 1.000 kelahiran hidup) | 11,49 | 10,41 | 9,33 |
| 3.2.2.(b) | Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Persen | 9,43 | 8,69 | 7,95 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Kasus | 261,11 | 229,78 | 202,20 |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Per 1.000 penduduk | 47,08 | 42,37 | 38,13 |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria. | Kecamatan | 14 | 14 | 14 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Persen | 6,32 | 5,69 | 5,12 |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Persen | 15,72 | 14,00 | 12,50 |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Persen | 68,50 | 60.00 | 53,00 |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Persen | 10 | 100 | 100 |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Persen | 73,35 | 74,00 | 74,80 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Persen | 39,95 | 41,00 | 42,00 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Angka | 37,01 | 24,30 | 23,80 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | Persen | 2,26 | 2,23 | 2,2 |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Persen | 9,93 | 15,50 | 14,00 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Persen | 99,63 | 99,63 | 100 |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Persen | 0,45 | 0,60 | 0,75 |
| **4** | **Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua** | | | | |
| 4 | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Persen | 85,25 | 93,99 | 100 |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Persen | 83,94 | 97,61 | 100 |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Persen | 105,42 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Persen | 103,29 | 100 | 100 |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Persen | 96,71 | 100 | 100 |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) | Persen | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Persen | 99,81 | 100 | 100 |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Persen | 84,56 | 90,57 | 97,00 |
| **5** | **Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan** | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Kebijakan | 20,00 | 24,00 | 28,00 |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | Persen | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Persen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Persen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Orang | 24,10 | 23,5 | 22,5 |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Tahun | 22,00 | 22,3 | 22,6 |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Tahun | 37,01 | 24,30 | 23,80 |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Persen | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Orang | 0,10 | 0,15 | 0,16 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Persen | 75,00 | 75,20 | 75,50 |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Persen | 9,93 | 15,50 | 14,00 |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Persen | 86,13 | 87,00 | 88,00 |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Persen | 66,41 | 69,73 | 73,22 |
| **6** | **Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan** | | | | |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Persen | 55,49 | 57,94 | 60,50 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Persen | 49,97 | 48,22 | 50,57 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Desa | 100 | 100 | 100 |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Nilai Indeks | 60,00 | 75,12 | 75,32 |
| **8** | **Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua** | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Persen | 3,79 | 8,44 | 0,51 |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Juta | 69,21 | 75,05 | 75,43 |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Persen | 71,2 | 75,40 | 79,80 |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 4,34 | 4,25 | 4,16 |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Persen | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Orang | 9141 | 12962 | 15013 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Orang | 833092 | 841360 | 849711 |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi** | | | | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dermaga | 4 | 4 | 4 |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Persen | 14,79 | 15,23 | 15,84 |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Persen | 3,48 | 4 | 4,50 |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Persen | 78,74 | 80,50 | 82,10 |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Persen | 66,41 | 69,73 | 73,22 |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Persen | 72,8 | 72,80 | 72,80 |
| **10** | **Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara** | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Poin | 0,349 | 0,343 | 0,336 |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 9,65 | 9,32 | 8,9 |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Desa | 1 | 1 | 0,00 |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | Desa | 55 | 60 | 65 |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Kebijakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Pemukiman Infklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** | | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Rasio | 22,03 | 30,00 | 40,00 |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | 103.575,92 | 98.397,12 | 83.637,56 |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Indeks | 111,99 | 110,87 | 109,76 |
| 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Desa / Kelurahan | N/a | N/a | N/a |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | Rambu | N/a | N/a | N/a |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | Rp | 610.700.000 | 550.000.000 | 500.000.0000 |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Persen | 56,33 | 60,00 | 63,00 |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| **12** | **Tujuan 12 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** | | | | |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Ton | 10632 | 12000 | 14000 |
| **13** | **Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya** | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | Orang | 103.575,92 | 98.397,12 | 83.637,56 |
| **14** | **Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Ton | 75,00 | 80,00 | 82,00 |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Nelayan | 200 | 400 | 600 |
| **15** | **Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati** | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Persen | 42,30 | 45,00 | 47,00 |
| **16** | **Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan** | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Kasus | 3 | 2 | 2 |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | per 100.000 penduduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Persen | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Persen | 97,40 | 98 | 98,25 |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Rumah Tangga | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Persen | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Orang | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Persen | 38,00 | 40,66 | 43,50 |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ | WTP | WTP | WTP | WTP |

| No | Tujuan / Indikator | Satuan | REALISASI TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Persen | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Persen | 1,29 | 2,50 | 3,00 |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Persen | 99,70 | 100 | 100 |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | Persen | 94,29 | 97,62 | 100 |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Persen | 95,45 | 98,42 | 100 |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Persen | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. | Persen | 0,650 | 0,651 | 0,651 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Persen | 13,30 | 22,15 | 20,83 |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | Persen | 4,88 | 5,30 | 5,70 |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Persen | 78,74 | 80,50 | 82,10 |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Persen | 72,8 | 72,80 | 72,80 |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Persen | 82,00 | 84,00 | 86,00 |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Data | 100 | 100 | 100 |

# BAB VII

# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Maros yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dari penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 sebagai berikut:

## 7.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab dan diharapkan berperan serta dalam mewujudkan program prioritas Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam RKPD
2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
3. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efetivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026, Bappelitbangda Kabupaten Maros berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evlauasi pelaksanana RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026.

## 7. 2 KESIMPULAN

1. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 disusun berdasarkan tahapan dan proses penyusunan yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.
3. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026 diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
4. Diperlukan dukungan semua stakeholder dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2026.

**BUPATI MAROS**

**TTD**

**H. A. S. CHAIDIR SYAM**